



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
dan  
WALIKOTA BUKITTINGGI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

- a. Pendapatan sebesar Rp698.402.386.323,22 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga Rupiah koma dua puluh dua sen);
- b. Belanja sebesar Rp744.059.199.525,66 (tujuh ratus empat puluh empat miliar lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah koma enam puluh enam sen);
- c. Defisit sebesar Rp45.656.813.202,44 (empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus dua Rupiah koma empat puluh empat sen);
- d. Pembiayaan terdiri atas :

1. penerimaan sebesar Rp132.979.000.890,90 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh Rupiah koma sembilan puluh sen); dan
2. pengeluaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp15.755.335.326,78 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam Rupiah koma tujuh puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp714.157.721.650,00 (tujuh ratus empat belas miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh Rupiah);
  2. realisasi sebesar Rp698.402.386.323,22 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga Rupiah koma dua puluh dua sen); dan
  3. selisih lebih sebesar Rp15.755.335.326,78 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam Rupiah koma tujuh puluh delapan sen).
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp93.086.081.979,34 (sembilan puluh tiga miliar delapan puluh enam juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah koma tiga puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp837.145.281.505,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima Rupiah);
  2. realisasi sebesar Rp744.059.199.525,66 (tujuh ratus empat puluh empat miliar lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah koma enam puluh enam sen); dan
  3. selisih lebih sebesar Rp93.086.081.979,34 (sembilan puluh tiga miliar delapan puluh enam juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah koma tiga puluh empat sen).
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp77.330.746.652,56 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah koma lima puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp122.987.559.855,00 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima Rupiah);
  2. realisasi sebesar Rp45.656.813.202,44 (empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus dua Rupiah koma empat puluh empat sen); dan
  3. selisih kurang sebesar Rp77.330.746.652,56 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah koma lima puluh enam sen).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp8.558.964,10 (delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat Rupiah koma sepuluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp132.987.559.855,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima Rupiah);
  2. realisasi sebesar Rp132.979.000.890,90 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh Rupiah koma sembilan puluh sen); dan
  3. selisih lebih sebesar Rp8.558.964,10 (delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat Rupiah koma sepuluh sen).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol Rupiah koma) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
  2. realisasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan
  3. selisih sebesar Rp0,00 (nol Rupiah koma).
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan *netto* sejumlah Rp8.558.964,10 (delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat Rupiah koma sepuluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan *netto* setelah perubahan Rp122.987.559.855,00 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima Rupiah);
  2. realisasi sebesar Rp122.979.000.890,90 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh Rupiah koma sembilan puluh sen); dan
  3. selisih lebih sebesar Rp8.558.964,10 (delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat Rupiah koma sepuluh sen).

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp132.987.559.855,90 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima Rupiah koma sembilan puluh sen); dan
- b. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp77.322.187.688,46 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah koma empat puluh enam sen).

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp2.045.355.031.596,55 (dua triliun empat puluh lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam Rupiah koma lima puluh lima sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp12.332.999.300,92 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah koma sembilan puluh dua sen); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp2.033.022.032.295,63 (dua triliun tiga puluh tiga miliar dua puluh dua juta tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima Rupiah koma enam puluh tiga sen).

## Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

- a. kegiatan operasional sebesar (Rp13.950.489.410,82) (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh Rupiah koma delapan puluh dua sen);
- b. kegiatan non operasional sebesar (Rp1.124.522.900,71) (satu miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah koma tujuh puluh satu sen);
- c. pos luar biasa sebesar Rp0,00 (nol Rupiah); dan
- d. defisit laporan operasional sebesar (Rp15.075.012.311,53) (lima belas miliar tujuh puluh lima juta dua belas ribu tiga ratus sebelas Rupiah koma lima puluh tiga sen).

## Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 januari tahun 2022 sebesar Rp132.987.559.855,90 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima Rupiah koma sembilan puluh sen);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp78.312.917.042,12 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat puluh dua Rupiah koma dua belas sen);
- c. arus kas aktivitas investasi sebesar (Rp133.969.730.244,56) (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh empat Rupiah koma lima puluh enam sen);
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol Rupiah);
- e. arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran sebesar (Rp8.321.965,00) (delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima Rupiah); dan
- f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp77.322.424.688,46 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah koma empat puluh enam sen).

## Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp2.040.816.158.974,56 (dua triliun empat puluh miliar delapan ratus enam belas juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat Rupiah koma lima puluh enam sen);
- b. surplus/defisit LO sebesar (Rp15.075.012.311,53) (lima belas miliar tujuh puluh lima juta dua belas ribu tiga ratus sebelas Rupiah koma lima puluh tiga sen); dan
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar/koreksi ekuitas sebesar Rp7.280.885.632,60 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua Rupiah koma enam puluh sen); dan

- d. jumlah ekuitas akhir sebesar Rp2.033.022.032.295,63 (dua triliun tiga puluh tiga miliar dua puluh dua juta tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima Rupiah koma enam puluh tiga sen).

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
  1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  4. rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III memuat laporan operasional;
- d. lampiran IV memuat Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. lampiran V memuat neraca;
- f. lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
- j. lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX memuat daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang terdiri atas:
  1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
  2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 16 Agustus 2023  
WALIKOTA BUKITTINGGI,



Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 16 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA  
BARAT: ( 3 / 56 /2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah, dimana berdasarkan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan paling sedikit meliputi :

- a. Laporan realisasi anggaran
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Neraca;
- d. Laporan operasional;
- e. Laporan arus kas;
- f. Laporan perubahan ekuitas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas



Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3



DPRD KOTA BUKITTINGGI  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 170/01/Kpts-Pimp.DPRD/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA  
BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBD KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2022**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-585-2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 maka perlu dilakukan penyempurnaan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
9. Peraturan DPRD Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bukittinggi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bukittinggi;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Bukittinggi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tanggal 11 Agustus 2023;
  2. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi tanggal 11 Agustus 2023 terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-585-2023 tanggal 11 Agustus 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-585-2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Persetujuan penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan dasar untuk penetapan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 11 Agustus 2023

KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI,



**PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG  
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
1	2	3	4	5
I	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN APBD			
A.	<p><b>KONSISTENSI</b></p> <p>Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.</p>	<p>1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah telah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.</p> <p>2. Nomenklatur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan telah disisihkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.</p> <p>3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.</p>	<p>Ke depannya, Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap konsisten menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi akan tetap konsisten menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan</p>
B.	<p><b>LEGALITAS</b></p> <p>Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.</p>	<p>1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Wali Kota Bukittinggi dan DPRD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran</p>	<p>a. Ke depannya, Pemerintah Kota Bukittinggi dan DPRD <b>harus mematuhi</b> tahapan dan jadwal proses Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan serta berupaya untuk mengefektifkan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</p>	<p>a. Pemerintah Kota Bukittinggi akan mematuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan serta berupaya untuk mengefektifkan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
		<p>20232, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Perianggungjawaban Pelaksanaan AP</p> <p>a. Wali Kota Bukittinggi telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perianggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kota Bukittinggi untuk dibahas bersama melalui surat Wali Kota Nomor 905/652/BK.05/VI.2023 tanggal 7 Juni 2023. Hal ini <b>sudah sesuai</b> dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perianggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perianggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 disampaikan Wali Kota Bukittinggi ke DPRD pada tanggal 7 Juni 2023, dan telah mendapatkan persetujuan bersama dari DPRD Kota Bukittinggi pada tanggal 20 Juli 2023. Hal ini <b>telah sesuai</b> dengan Pasal 194 ayat (1) dan (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perianggungjawaban</p>	<p>mengefektifkan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perianggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lama 1 (satu) bulan semenjak Rancangan Perda tersebut disampaikan oleh Bupati ke DPRD.</p>	<p>tentang Perianggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lama 1 (satu) bulan semenjak Rancangan Perda tersebut disampaikan oleh Walikota ke DPRD.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
		<p>Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun <b>belum memenuhi</b> Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.</p> <p>c. Persetujuan Bersama antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 20 Juli 2022, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 24 Juli 2022, <b>sudah sesuai</b> dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk</p>		

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI																								
	<p>dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.</p> <p>2. Kelengkapan Dokumen</p> <p>Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 <b>telah sesuai</b> dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022</p>																											
C.	KEEJLAKAN																											
I	Laporan Realisasi Anggaran																											
a	Pendapatan Daerah																											
1)	Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah																											
a)	Pajak Daerah																											
	<p>Gambaran realisasi pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1105 655 1474 1123"> <thead> <tr> <th>TA</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>47.068.135.193,00</td> <td>45.131.235.075,00</td> <td>95,88</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>47.413.135.193,00</td> <td>45.204.119.636,00</td> <td>95,34</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>31.278.967.000,00</td> <td>35.857.033.610,00</td> <td>114,64</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>37.070.692.210,00</td> <td>40.765.025.893,00</td> <td>109,97</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>50.269.852.262,00</td> <td>49.570.750.398,00</td> <td>98,61</td> </tr> </tbody> </table>	TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2018	47.068.135.193,00	45.131.235.075,00	95,88	2019	47.413.135.193,00	45.204.119.636,00	95,34	2020	31.278.967.000,00	35.857.033.610,00	114,64	2021	37.070.692.210,00	40.765.025.893,00	109,97	2022	50.269.852.262,00	49.570.750.398,00	98,61	<p>Memperhatikan gambaran data di atas, realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018, 2019 dan 2022 belum memenuhi target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 telah memenuhi target.</p>	<p>Berkenaan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap cermat dan rasional dalam menetapkan target anggaran setiap objek pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target tersebut tetap rasional. Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi akan lebih cermat dalam menetapkan target pajak dengan mempertimbangkan potensi dan pencapaian realisasi pendapatan Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya dan tetap intensif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut tetap rasional.</p>
TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%																									
2018	47.068.135.193,00	45.131.235.075,00	95,88																									
2019	47.413.135.193,00	45.204.119.636,00	95,34																									
2020	31.278.967.000,00	35.857.033.610,00	114,64																									
2021	37.070.692.210,00	40.765.025.893,00	109,97																									
2022	50.269.852.262,00	49.570.750.398,00	98,61																									



No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI																								
b)	Retribusi Daerah Gambaran realisasi pendapatan retribusi daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d 2021), sebagaimana tabel berikut :	Dari data tersebut di atas, realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari Tahun 2018, 2019 dan 2020 dan 2022 belum optimal dalam pencapaian target. Untuk Tahun 2021, telah memenuhi target yang ditetapkan.	Untuk itu pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus lebih rasional dalam menetapkan target pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhatikan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.	Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi akan lebih rasional dalam menetapkan target pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhatikan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TA</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>38.216.489.567,00</td> <td>29.942.903.285,00</td> <td>78,35</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>49.311.930.925,00</td> <td>33.125.468.779,75</td> <td>97,18</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>24.474.011.211,00</td> <td>21.833.603.342,00</td> <td>89,21</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>25.609.269.920,00</td> <td>27.401.880.331,00</td> <td>107,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>48.684.034.000,00</td> <td>46.662.398.969,00</td> <td>95,85</td> </tr> </tbody> </table>	TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2018	38.216.489.567,00	29.942.903.285,00	78,35	2019	49.311.930.925,00	33.125.468.779,75	97,18	2020	24.474.011.211,00	21.833.603.342,00	89,21	2021	25.609.269.920,00	27.401.880.331,00	107,00	2022	48.684.034.000,00	46.662.398.969,00	95,85			
TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%																									
2018	38.216.489.567,00	29.942.903.285,00	78,35																									
2019	49.311.930.925,00	33.125.468.779,75	97,18																									
2020	24.474.011.211,00	21.833.603.342,00	89,21																									
2021	25.609.269.920,00	27.401.880.331,00	107,00																									
2022	48.684.034.000,00	46.662.398.969,00	95,85																									

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI																								
c)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan																											
1	<p>Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="414 1657 690 2255"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>3.448.620.797,00</td> <td>4.935.906.024,00</td> <td>143,13</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>6.100.469.303,00</td> <td>6.071.910.132,00</td> <td>99,53</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>6.331.956.191,00</td> <td>6.331.956.191,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>5.482.031.608,00</td> <td>5.482.031.608,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>7.505.000.000,00</td> <td>6.641.291.925,00</td> <td>88,49</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2018	3.448.620.797,00	4.935.906.024,00	143,13	2019	6.100.469.303,00	6.071.910.132,00	99,53	2020	6.331.956.191,00	6.331.956.191,00	100,00	2021	5.482.031.608,00	5.482.031.608,00	100,00	2022	7.505.000.000,00	6.641.291.925,00	88,49	<p>Memperhatikan gambaran realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari tahun 2018, 2020, 2021 dan 2022 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan kecuali pada tahun 2019.</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun mendatang agar dalam menciptakan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, dalam menetapkan target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan supaya memperhatikan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya dan kondisi perekonomian pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun mendatang akan menetapkan target pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu serta mempedomani tren realisasi di tahun-tahun sebelumnya dan kondisi perekonomian pertumbuhan ekonomi.</p>
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%																									
2018	3.448.620.797,00	4.935.906.024,00	143,13																									
2019	6.100.469.303,00	6.071.910.132,00	99,53																									
2020	6.331.956.191,00	6.331.956.191,00	100,00																									
2021	5.482.031.608,00	5.482.031.608,00	100,00																									
2022	7.505.000.000,00	6.641.291.925,00	88,49																									
d)	<p>Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1047 1657 1323 2255"> <thead> <tr> <th>TA</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>14.005.034.528,00</td> <td>21.926.729.842,61</td> <td>156,56</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>14.288.597.206,00</td> <td>27.495.098.062,80</td> <td>192,43</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>15.148.273.128,00</td> <td>20.065.069.357,62</td> <td>103,53</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>23.948.534.818,00</td> <td>18.137.350.353,61</td> <td>93,47</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>29.798.905.194,00</td> <td>27.922.483.891,85</td> <td>93,70</td> </tr> </tbody> </table>	TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2018	14.005.034.528,00	21.926.729.842,61	156,56	2019	14.288.597.206,00	27.495.098.062,80	192,43	2020	15.148.273.128,00	20.065.069.357,62	103,53	2021	23.948.534.818,00	18.137.350.353,61	93,47	2022	29.798.905.194,00	27.922.483.891,85	93,70	<p>Memperhatikan daftar di atas, dalam kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 realisasi Lain-lain PAD yang Sah sudah memenuhi target yang ditetapkan. Namun di tahun 2021 dan 2022 realisasi Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan.</p>	<p>Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tahun 2022 yang meningkat dibandingkan penerimaan tahun 2021 disebabkan banyaknya pengembalian ke Kas Daerah yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan yang bukan merupakan gambaran dari kinerja pendapatan itu sendiri. Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kota Bukittinggi karena Lain-lain PAD yang Sah merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Kota Bukittinggi.</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi akan lebih memperhatikan lagi dalam menetapkan target Lain-lain PAD yang Sah sebagai salah satu sumber PAD yang cukup potensial bagi Pemerintah Kota Bukittinggi serta berupaya dalam meminimalisir temuan pemeriksaan sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja pemerintah.</p>
TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%																									
2018	14.005.034.528,00	21.926.729.842,61	156,56																									
2019	14.288.597.206,00	27.495.098.062,80	192,43																									
2020	15.148.273.128,00	20.065.069.357,62	103,53																									
2021	23.948.534.818,00	18.137.350.353,61	93,47																									
2022	29.798.905.194,00	27.922.483.891,85	93,70																									
2)	Pendapatan Transfer		Pendapatan Transfer merupakan	Pemerintah Kota Bukittinggi telah																								
	Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun																											

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
	<p>Anggaran 2022 sebesar Rp567.387.873.682,00 atau 96,18% dari yang dianggarkan Rp.577.899.930.194,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp593.762.137.738,00.</p>		<p>penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus lebih cermat dalam menetapkan target pendapatan transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.</p>	<p>mempedomani alokasi Pendapatan Transfer sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan akan meningkatkan konsolidasi internal dan lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah ataupun ditingkat pemerintah pusat.</p>
3)	<p>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp217.587.457,37 atau 00,00% dari yang dianggarkan Rp00,00. Target Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.086.628.530,00 mengalami penurunan sebesar RpRp3.086.628.530,00 atau 100,00%.</p>	<p>Meningkatnya penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2022 dibandingkan penerimaan tahun 2021 disebabkan banyaknya pengembalian ke Kas Daerah yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan yang bukan merupakan gambaran dari kinerja pendapatan itu sendiri.</p>	<p>Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus cermat dalam menetapkan target setiap objek Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan potensi yang dimiliki.</p>	<p>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2022 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Adapun realisasi Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
4) a dan b	<p>Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, sebagai berikut:</p> <p>a) Realisasi Pendapatan yang telah melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD 5 SKPD.</p> <p>b) Realisasi pendapatan yang belum memenuhi</p>	<p>Secara umum, permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain:</p> <p>1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.</p>	<p>Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:</p> <p>1) Menetapkan target Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan</p>	<p>Perundang-undangan teralisasi sebesar Rp217.587.457,37 merupakan pengembalian temuan pemeriksaan dan pengembalian sisa Belanja Hibah tahun 2021 oleh para penerima hibah. Pendapatan tersebut sebelumnya tidak dianggarkan, idealnya jika ada pengembalian belanja adalah ke Pos Lain-lain PAD yang Sah, namun tidak ditemukan rekening yang dibutuhkan pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang akhirnya Pemerintah Kota Bukittinggi mencatat pada rekening Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi akan lebih cermat dalam menetapkan target setiap objek Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan potensi yang dimiliki</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
	<p>target yang dianggarkan dalam APBD 2 SKPD.</p> <p>c) Pendapatan yang belum terealisasi sama sekali antara lain pada Dinas Pertanian dan Pangan.</p>	<p>2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu.</p> <p>3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifikan realisasi target Pendapatan Daerah.</p>	<p>Lain-lain PAD yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	<p>lain PAD yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>
		<p>2) Menetapkan prognosis laporan realisasi retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan lain-lain PAD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sehingga anggaran pendapatan retribusi dan lain lain PAD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapattannya.</p>	<p>2) Menetapkan prognosis laporan realisasi retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan lain-lain PAD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran pendapatan retribusi dan lain lain PAD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapattannya.</p>	<p>2) Menetapkan prognosis laporan realisasi retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan lain-lain PAD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran pendapatan retribusi dan lain lain PAD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapattannya.</p>
		<p>3) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.</p>	<p>3) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.</p>	<p>3) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.</p>
		<p>4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kota</p>	<p>4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kota</p>	<p>4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kota</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
			<p>Bukittinggi.</p> <p>5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyectorannya, dengan berbasis teknologi.</p> <p>6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.</p> <p>7) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.</p> <p>8) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.</p>	<p>serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kota Bukittinggi.</p> <p>5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyectorannya, dengan berbasis teknologi.</p> <p>6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.</p> <p>7) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.</p> <p>8) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI																												
b.	Belanja Daerah dan Transfer		9) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	9) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi																												
1)	Belanja Daerah																															
	Belanja Operasi																															
(1)	<p>Belanja Pegawai</p> <p>1. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp301.384.096.541,66 atau 92,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp325.444.707.669,00.</p> <p>2. Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="808 1639 1094 2255"> <thead> <tr> <th>TA</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>380.815.634.884,42</td> <td>352.055.439.698,03</td> <td>92,45</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>381.297.144.993,61</td> <td>362.187.753.715,82</td> <td>94,99</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>379.536.027.596,00</td> <td>360.230.406.322,57</td> <td>94,91</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>322.664.639.155,00</td> <td>296.371.615.365,25</td> <td>91,85</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>325.444.707.669,00</td> <td>301.384.096.541,66</td> <td>92,16</td> </tr> </tbody> </table>	TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	J	2	3	4	2018	380.815.634.884,42	352.055.439.698,03	92,45	2019	381.297.144.993,61	362.187.753.715,82	94,99	2020	379.536.027.596,00	360.230.406.322,57	94,91	2021	322.664.639.155,00	296.371.615.365,25	91,85	2022	325.444.707.669,00	301.384.096.541,66	92,16	<p>Persentase capaian realisasi belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung berfluktuasi dan persentase capaiannya masih dibawah target yang dianggarkan.</p>	<p>Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhatikan perencanaan ASN yang akan penuhi. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhatikan akses maksimal sebesar 2,5% sesuai maksimal Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhatikan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun.</p> <p>Perhitungan gaji dan tunjangan ASN, tetap akan memperhatikan akses maksimal sebesar 2,5% sesuai maksimal Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.</p>
TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%																													
J	2	3	4																													
2018	380.815.634.884,42	352.055.439.698,03	92,45																													
2019	381.297.144.993,61	362.187.753.715,82	94,99																													
2020	379.536.027.596,00	360.230.406.322,57	94,91																													
2021	322.664.639.155,00	296.371.615.365,25	91,85																													
2022	325.444.707.669,00	301.384.096.541,66	92,16																													
(2)	<p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>1. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp264.544.058.412,28 atau 87,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp301.912.139.291,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan</p>	<p>a. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya :</p> <p>1. Belanja Barang realisasi sebesar Rp45.252.903.639,74 atau 85,97%</p>	<p>a. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja</p>	<p>a. Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang akan melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Barang dan</p>																												

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI																								
2.	<p>rendahnya realisasi beberapa belanja.</p> <p>Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="311 660 571 1126"> <thead> <tr> <th>TA</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>191.286.599.420,80</td> <td>155.879.355.960,03</td> <td>81,49</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>182.167.460.500,27</td> <td>150.771.650.352,64</td> <td>82,77</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>149.565.919.990,10</td> <td>116.356.834.583,56</td> <td>77,80</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>295.562.732.925,00</td> <td>236.689.663.577,43</td> <td>80,08</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>301.912.139.291,00</td> <td>264.544.058.412,28</td> <td>87,62</td> </tr> </tbody> </table>	TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2018	191.286.599.420,80	155.879.355.960,03	81,49	2019	182.167.460.500,27	150.771.650.352,64	82,77	2020	149.565.919.990,10	116.356.834.583,56	77,80	2021	295.562.732.925,00	236.689.663.577,43	80,08	2022	301.912.139.291,00	264.544.058.412,28	87,62	<p>dari yang dianggarkan sebesar Rp52.636.885.429,00.</p> <p>2. Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp141.940.212.404,68 atau 90,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp157.512.299.151,00.</p> <p>3. Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp22.663.628.650,86 atau 78,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.712.176.742,00.</p> <p>4. Belanja Perjalanan Dinas realisasi sebesar Rp38.444.404.647,00 atau 86,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.438.835.988,00</p> <p>5. Belanja Uang dan Jasa untuk diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak lain/Masyarakat realisasi sebesar Rp2.751.096.770,00 atau 89,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.080.650.000,00.</p> <p>6. Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi sebesar Rp2.393.517.628,00 atau 58,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.107.857.277,00.</p>	<p>Barang dan Jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasi nya di prediksi tidak optimal tidak dapat dilakukan perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>b. Kedepon agar dilakukan rekonsiliasi secara berkala antara Dinas Pendidikan dengan sekolah dan BKD jika pada tahun berjalan diprediksi realisasi akan melebihi anggaran agar dilakukan penyesuaian anggaran pada perubahan APBD.</p> <p>c. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja barang dan jasa.</p>	<p>Jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasi nya di prediksi tidak optimal dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.</p>
TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%																									
2018	191.286.599.420,80	155.879.355.960,03	81,49																									
2019	182.167.460.500,27	150.771.650.352,64	82,77																									
2020	149.565.919.990,10	116.356.834.583,56	77,80																									
2021	295.562.732.925,00	236.689.663.577,43	80,08																									
2022	301.912.139.291,00	264.544.058.412,28	87,62																									
(3)	Belanja Subsidi	<p>Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Padang Panjang menganggarkan belanja subsidi sebesar Rp3.385.520.000,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp2.910.989.266,00, atau 85,98%.</p>	<p>Barang dan Jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasi nya di prediksi tidak optimal tidak dapat dilakukan perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>Jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasi nya di prediksi tidak optimal dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.</p>																								
(4)	Belanja Hibah	<p>Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.192.987.711,16,00 atau 94,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.425.478.526,00.</p>	<p>Barang dan Jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasi nya di prediksi tidak optimal tidak dapat dilakukan perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>Jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasi nya di prediksi tidak optimal dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.</p>																								



No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI																												
(5)	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.230.000.000,00 atau 98,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.255.000.000,00.																														
b)	<p>Belanja Modal Realisasi Belanja Modal sebesar Rp124.005.630.244,56 atau 83,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp147.955.769.352,00.</p> <p>Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah :</p> <p>(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp48.131.479.720,00 atau 79,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.312.518.236,00.</p> <p>(2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp25.739.508.574,06 atau 77,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.140.307.759,00.</p> <p>(3) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp45.500.951.384,50 atau 91,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp49.760.228.857,00.</p> <p>(4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp4.633.690.566 atau 97,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.742.714.500,00.</p> <p>Gambaran capaian realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1065 662 1461 1123"> <thead> <tr> <th>TA</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi</th> <th>%</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>240.718.542.106,00</td> <td>178.070.817.194,00</td> <td>73,95</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>304.079.090.833,00</td> <td>187.986.455.096,79</td> <td>61,82</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>260.642.165.432,00</td> <td>249.317.613.815,34</td> <td>95,66</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>123.125.748.792,00</td> <td>93.038.635.113,35</td> <td>75,56</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>147.955.769.352,00</td> <td>124.005.630.244,56</td> <td>83,81</td> </tr> </tbody> </table>	TA	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	1	2	3	4	2018	240.718.542.106,00	178.070.817.194,00	73,95	2019	304.079.090.833,00	187.986.455.096,79	61,82	2020	260.642.165.432,00	249.317.613.815,34	95,66	2021	123.125.748.792,00	93.038.635.113,35	75,56	2022	147.955.769.352,00	124.005.630.244,56	83,81	<p>1. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp124.005.630.244,56 atau 83,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp147.955.769.352,00. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah.</p> <p>2. Dari tabel di atas terlihat bahwa 5 (lima) tahun terakhir, realisasi Belanja Modal belum mencapai target. Pada tahun 2022, secara persentase dan nominal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.</p>	<p>Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Bukittinggi akan tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Bukittinggi akan tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>
TA	Anggaran (Rp)	Realisasi	%																													
1	2	3	4																													
2018	240.718.542.106,00	178.070.817.194,00	73,95																													
2019	304.079.090.833,00	187.986.455.096,79	61,82																													
2020	260.642.165.432,00	249.317.613.815,34	95,66																													
2021	123.125.748.792,00	93.038.635.113,35	75,56																													
2022	147.955.769.352,00	124.005.630.244,56	83,81																													
c)	Belanja Tak Terduga	Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp271.437.350,00 atau 5,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00.																														
2)	Belanja Transfer	Realisasi Belanja Transfer sebesar																														

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
3)	<p>Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi, antara lain :</p> <p>(1) Dinas Kesehatan antara lain pada sub kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, realisasi sebesar Rp6.627.705.873,14 atau 42,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.438.301.768,00.</li> <li>- Operasional Pelayanan Puskesmas, realisasi sebesar Rp2.145.838.244,00 atau 65,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.277.093.001,00.</li> <li>- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp235.500.000,00.</li> </ul> <p>(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain pada sub kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, realisasi sebesar Rp1.304.189.052,96 atau 21,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.060.278.680,00.</li> <li>- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, realisasi sebesar Rp521.245.968,00 atau 57,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp908.261.168,00.</li> <li>- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase, realisasi sebesar Rp1.574.018.458,00 atau 63,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.486.072.615,00.</li> </ul> <p>Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),</p>	<p>Rp8.520.000.000,00 atau 97,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.766.666.667,00 terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan yang merupakan bantuan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat</p> <p>Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakannya.</li> <li>2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.</li> <li>3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan isintansi terkait khususnya dana transfer DAK.</li> <li>4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah disyaratkan sebelumnya.</li> <li>5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebelumnya yang telah diatur dalam juknisnya.</li> </ol>	<p>Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain:</p>	<p>Dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2022 telah dihitung secara rasional dengan memperimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh dari pemerintah daerah.</p> <p>Pemerintah Kota Bukittinggi akan melakukan langkah-langkah strategis sesuai dengan hasil evaluasi ini antara lain dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.</li> <li>2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyelesaiannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan</li> </ol>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
	<p>Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG, realisasi sebesar Rp120.992.000,00 atau 33,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp356.260.250,00.</p>		<p>prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.</p> <p>5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APJP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, revaluasi serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.</p>	<p>masyarakat.</p> <p>3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.</p> <p>5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APJP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, revaluasi serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
			<p>7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.</p> <p>8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.</p> <p>9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.</p> <p>10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.</p>	<p>7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.</p> <p>8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.</p> <p>9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.</p> <p>10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.</p> <p>11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI																												
c	<p><b>PEMBLAYAAN</b></p> <p>Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembayaan Anggaran Tahun Berknsaan (SILPA) sebesar Rp77.322.187.688,46 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp837.145.281.505,00 adalah 9,24%.</p> <p>Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="431 662 732 1123"> <thead> <tr> <th>TA</th> <th>Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah (Rp)</th> <th>SILPA (Rp)</th> <th>Rasio SILPA thd Anggaran Belanja Daerah dan Transfer</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>839.898.354.079,22</td> <td>95.913.280.373,88</td> <td>11,42%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>891.197.754.148,88</td> <td>114.068.610.748,60</td> <td>12,80%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>883.714.285.381,10</td> <td>99.386.026.235,08</td> <td>11,25%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>783.759.843.834,00</td> <td>132.987.559.855,90</td> <td>16,97%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>837.145.281.505,00</td> <td>77.322.187.688,46</td> <td>9,24%</td> </tr> </tbody> </table>	TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah (Rp)	SILPA (Rp)	Rasio SILPA thd Anggaran Belanja Daerah dan Transfer	1	2	3	4	2018	839.898.354.079,22	95.913.280.373,88	11,42%	2019	891.197.754.148,88	114.068.610.748,60	12,80%	2020	883.714.285.381,10	99.386.026.235,08	11,25%	2021	783.759.843.834,00	132.987.559.855,90	16,97%	2022	837.145.281.505,00	77.322.187.688,46	9,24%	<p>Memperhatikan data tersebut diatas rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 berfluktuasi. Pada tahun 2022 rasio SILPA mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.</p>	<p>Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan dengan nilai yang rasional.</p>	<p>tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.</p> <p>Pemerintah Kota Bukittinggi telah memperhitungkan dengan cermat dan rasional proyeksi SILPA Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.</p> <p>Kecelakaan Pemerintah Kota Bukittinggi akan lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan Belanja Daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan secara rasional.</p>
TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah (Rp)	SILPA (Rp)	Rasio SILPA thd Anggaran Belanja Daerah dan Transfer																													
1	2	3	4																													
2018	839.898.354.079,22	95.913.280.373,88	11,42%																													
2019	891.197.754.148,88	114.068.610.748,60	12,80%																													
2020	883.714.285.381,10	99.386.026.235,08	11,25%																													
2021	783.759.843.834,00	132.987.559.855,90	16,97%																													
2022	837.145.281.505,00	77.322.187.688,46	9,24%																													
2	Neraca																															
a	Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp105.597.334.644,95 dimana terjadi penurunan sebesar Rp(63.597.399.111.510) atau (37,59%)																															

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
1)	<p>dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp169.194.733.756,46. Aset tersebut antara lain terdiri atas:</p> <p>Saldo Kas Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 sebesar Rp77.322.424.486,46 yaitu :</p> <p>(a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp63.591.297.145,77.</p> <p>(b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7.020.824,00.</p> <p>(c) Kas BLUD sebesar Rp12.610.034.870,69.</p> <p>(d) Kas Dana BOS sebesar Rp1.014.071.646,00.</p> <p>(e) Kas BOP sebesar Rp202,00.</p>	<p>Memperhatikan data tersebut, terhadap huruf b) terlihat terjadi keterlambatan penyeteroran kas dari Bendahara Pengeluaran ke kas Daerah</p>	<p>Oleh karena itu Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyeteroran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah hal 232 huruf C</p>	<p>Terhadap saldo Kas sebagaimana huruf "b" dapat kami jelaskan bahwa kas tersebut bukan bagian Kas dalam pengertian Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang berasal dari dana UP/GU/TU namun saldo tersebut merupakan utang kepada BPJS tahun 2020 yang seharusnya sudah dibayar namun masih dipegang oleh Bendahara karena kesalahan dalam penulisan rekening tujuan pada SP2D pembayaran.</p> <p>Kedepan, Pemerintah Kota Bukittinggi akan tetap mengupayakan penyeteroran kas dilakukan tepat waktu paling lambat 31 Desember sesuai aturan yang berlaku antara lain sebagaimana amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>
2)	<p>Saldo Piutang Daerah</p> <p>i) Saldo Piutang Daerah (sebelum penyisihan) :</p> <p>Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp43.377.889.031,00 terdiri dari :</p> <p>a. Piutang Pajak Daerah sebesar Rp14.306.957.898,00.</p> <p>b. Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp12.046.237.364,00.</p> <p>c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp8.363.843.874,00.</p> <p>d. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp 4.632.545.459,00.</p> <p>e. Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp3.781.987.835,00.</p> <p>f. Piutang Lainnya sebesar Rp246.316.501,00.</p>		<p>1. Diharapkan dengan adanya aplikasi SISMIO-PBBP2 dapat diperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet</p> <p>2. Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang</p>	<p>1. Pemerintah Kota Bukittinggi akan memberdayakan semua aplikasi yang ada antara lain SIPADEH, SISMIO-PBBP2 dan data juga data manual untuk mempercepat dan dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet</p> <p>2. Kedepan, Pemerintah Kota Bukittinggi akan berupaya melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
	<p>ii) Penyisihan Piutang Daerah Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp(21.330.836.015,00), yang meliputi:</p> <p>a. Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp(9.088.313.560,00).</p> <p>b. Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp(10.151.975.230,00).</p> <p>c. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp(1.844.230.624,00).</p> <p>d. Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp(246.316.601,00).</p> <p>iii. Piutang Bersih Sehingga nilai bersih piutang sebesar 22.047.053.016,00, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Piutang Pajak Daerah sebesar Rp5.218.644.338,00.</li> <li>2. Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp1.894.262.134,00.</li> <li>3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp8.363.843.874,00,</li> <li>4. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp2.958.338.601,00.</li> <li>5. Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp3.781.987.835,00.</li> </ol> <p>Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) sebagaimana angka (i) tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut :</p> <p>a. Piutang Pajak yang bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pajak Hotel sebesar Rp644.682.067,00.</li> <li>(2) Pajak Restoran sebesar Rp353.448.154,00.</li> <li>(3) Pajak Hiburan sebesar Rp10.059.954,00.</li> <li>(4) Pajak Reklame sebesar Rp926.902.863,00.</li> <li>(5) Pajak Penerangan jalan sebesar Rp400.000,00.</li> <li>(6) Pajak Parkir sebesar Rp1.096.520,00.</li> <li>(7) Pajak Air Tanah sebesar Rp14.839.340,00.</li> <li>(8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp12.243.202.829,00.</li> <li>(9) Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp112.326.171,00</li> </ol>		<p>seingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kota Bukittinggi yang sesungguhnya. Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat diralisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya.</p> <p>Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya</p>	<p>piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kota Bukittinggi yang sesungguhnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga akan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat diralisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya.</li> <li>4. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, akan tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya</li> </ol>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
	<p>b. Piutang Retribusi bersumber antara lain dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.865.698.764,00.</li> <li>(2) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp8.695.458.000,00.</li> <li>(3) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp485.080.600,00.</li> </ol> <p>c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Bank Nagari sebesar Rp8.159.778.827,00.</li> <li>(2) Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) PT BPR Jam Gadang sebesar Rp476.657.587,00.</li> </ol> <p>d. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Piutang Hasil Sewa BMD sebesar Rp823.226.551,00.</li> <li>(2) Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.857.054.133,00.</li> <li>(3) Piutang Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp37.181.354,00.</li> <li>(4) Piutang Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp235.565.177,00.</li> <li>(5) Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp816.613.850,00.</li> <li>(6) Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp20346.188,00.</li> <li>(7) Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp828.648.900,00.</li> <li>(8) Piutang-piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp448.551,00.</li> </ol> <p>e. Piutang Transfer Antar Daerah bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) PKB sebesar Rp1.525.842.081,00.</li> <li>(2) BBNKB sebesar Rp590.493.394,00.</li> <li>(3) PBBKB sebesar Rp1.456.366.220,00.</li> <li>(4) PAP sebesar Rp9.266.160,00.</li> </ol> <p>f. Piutang Lainnya bersumber dari Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp246.316.601,00.</p>	<p>1) Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf c) merupakan</p>	<p>1) Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan</p>	<p>1) Pemerintah Kota Bukittinggi akan melakukan pengendalian terhadap</p>
3)	<p>Persediaan Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar</p>	<p>1) Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf c) merupakan</p>	<p>1) Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan</p>	<p>1) Pemerintah Kota Bukittinggi akan melakukan pengendalian terhadap</p>



No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAAPAN/ HASIL KOREKSI
	<p>Rp7.525.720,925,49 mengalami penurunan sebesar (Rp1.607,709,506,67) atau (17,60%) dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.133.430.432,16.</p> <p>Saldo persediaan tersebut antara lain :</p> <p>a) Persediaan Bahan sebesar Rp271.606.475,00,  b) Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp2.947.394.573,00.  c) Persediaan Obat-obatan sebesar Rp3.880.177.079,49.  d) Persediaan untuk dijual/diserahkan sebesar Rp411.822.798,00.</p>	<p>persediaan obat-obatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Pertanian dan Pangan.</p> <p>2) Selain itu Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp411.822.798,00 yang antara lain berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p>	<p>yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.</p> <p>2) Diharapkan kedepannya terhadap Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan ini agar segera diserahterimakan pada saat kegiatan selesai dilaksanakan dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta lebih optimal dalam pengawasan pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada SKPD supaya menjadi lebih terbun guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.</p>	<p>pengelolaan persediaan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak agar tidak berpotensi menurunnya kualitas persediaan.</p> <p>2) kedepannya terhadap Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan ini Pemerintah Kota Bukittinggi akan menyerahkan serahterima pada saat kegiatan selesai dilaksanakan dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Pemerintah Kota Bukittinggi akan berupaya untuk lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD supaya menjadi lebih terbun guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.</p>
b.	<p>Investasi Jangka Panjang  Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 sebesar Rp62.195.784.727,47 mengalami kenaikan sebesar Rp10.362.333.633,30 atau 19,90% dari tahun 2021 sebesar Rp51.833.451.094,17, dengan</p>		<p>Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka</p>	<p>Kedepan, Pemerintah Kota Bukittinggi akan tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
	<p>rincian sebagai berikut:</p>		<p>pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.</p> <p>Terhadap Penyertaan Modal di BUMD yang belum memberikan kontribusi laba bagi daerah, maka Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus melakukan evaluasi dan langkah-langkah strategi untuk penyertaan perusahaan sehingga dapat berkinerja lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang sehingga dapat menyumbang PAD untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi.</p>	<p>penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.</p> <p>Terhadap Penyertaan Modal di BUMD yang belum memberikan kontribusi laba bagi daerah, maka Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus melakukan evaluasi dan langkah-langkah strategi untuk penyertaan perusahaan sehingga dapat berkinerja lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang sehingga dapat menyumbang PAD untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi.</p>
1)	<p>Investasi Jangka Panjang non permanen berupa investasi dana bergulir Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 sebesar Rp635.295.884,95 mengalami kenaikan sebesar Rp26.548.326,53 atau 4,01% dari tahun 2021 sebesar Rp661.844.211,48.</p>			
2)	<p>Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp61.560.485.842,52 atau mengalami peningkatan sebesar Rp10.388.878.959,80 atau 20,03% dibandingkan dengan saldo Jangka Panjang per 31 Desember</p>			

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
	<p>2021 sebesar Rp51.171.606.882,69 antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari sebesar Rp44.524.000.000,83.</li> <li>2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT.BPRS Jam Gadang Perseroda sebesar Rp8.250.000.000,00.</li> <li>3) Penyertaan Modal Pemerintah daerah pada PDAM Jam Gadang sebesar Rp6.786.485.841,69.</li> </ol>			
c	<p>Aset Tetap</p> <p>Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp992.779.645.697,30 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.024.836.242.663,87 terjadi kenaikan sebesar Rp32.056.596.966,57 atau 3,13% antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp566.289.788.505,20 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp566.209.588.505,20 terjadi penambahan sebesar Rp80.200.000,00 atau 0,01%.</li> <li>b. Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp406.665.021.112,66 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp346.346.890.953,31 terjadi peningkatan sebesar Rp60.318.130.159,35 atau 17,42%.</li> <li>c. Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.004.338.760.735,96 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp960.588.776.351,51 terjadi peningkatan sebesar Rp43.749.984.384,45 atau 4,55%.</li> <li>d. Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp672.744.182.570,34 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp623.922.585.555,15 terjadi peningkatan sebesar Rp48.821.597.015,19 atau 7,82%</li> <li>e. Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.169.875.091,80</li> </ol>	<p>Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan</p> <p>Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam neraca terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp1.147.432.277.019,89 sehingga nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.524.304.035.559,77 atau 83,28% dari nilai total aset Pemerintah Kota Bukittinggi.</p>	<p>Terkait pengelolaan terhadap aset tetap, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi harus optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta mengurangi terjadinya resiko hilang dan menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan daerah.</p> <p>Selanjutnya, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penerbitan atas penertiban aset tetap antara lain, meningkatkan kompetensi SDM, melakukan koordinasi, pembinaan, supervisi, peningkatkan kompetensi SDM, melakukan koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, Bimtek dan menyempurnakan SOP pengelolaan aset tetap.</p>	<p>Pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi akan lebih optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta mengurangi terjadinya resiko hilang dan menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan daerah.</p> <p>Selanjutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi akan mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penerbitan atas penertiban aset tetap antara lain, meningkatkan kompetensi SDM, melakukan koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, Bimtek dan menyempurnakan SOP pengelolaan aset tetap.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
f.	<p>dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.677.779,197,80 terjadi penambahan sebesar Rp+92.095.894,00 atau 1,60%.</p> <p>f. Konstruksi dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.618.883.121,17 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp65.149.630.115,64 terjadi penurunan sebesar (Rp27.530.746.994,47) atau (42,26%).</p>			
d	<p>Aset Lainnya</p> <p>Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 setelah akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi sebesar Rp21.758.833.807,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.358.975.351,00 terjadi penurunan sebesar Rp600.141.544,00 atau 2,68% antara lain berasal dari:</p> <p>1) Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp56.959.498,00.</p> <p>2) Kermitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp16.246.002.000,00.</p> <p>3) Aset Tak Berwujud sebesar Rp8.352.406.781,00.</p> <p>4) Aset Lain-lain sebesar Rp2.672.835.677,00.</p>		<p>1) Terhadap aset lain-lain yang dalam kondisi rusak berat, dalam penelusuran dan yang akan diserahkan dan yang akan diambil langkah-langkah konkrit dan strategis dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait, melakukan penertiban atas penatausahaan aset, dengan melakukan pembinaan, supervisi, bintek dan penyempurnaan sistem operasi dan prosedur pengelolaan aset.</p> <p>2) Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib untuk menghindari resiko potensi hilangnya aset lain-lain akibat tidak ditukung data yang memadai dan akurat.</p>	<p>1) Pemerintah Kota Bukittinggi akan segera mengambil langkah-langkah konkrit dan strategis dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait, melakukan penertiban atas penatausahaan aset, dengan melakukan pembinaan, supervisi, bintek dan penyempurnaan sistem operasi dan prosedur pengelolaan aset.</p> <p>2) Pemko Bukittinggi akan terus melakukan Langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset lainnya agar pemanfaatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib, dan ke depan usaha-usaha konkrit lainnya akan terus dilakukan.</p>
e	<p>Kewajiban</p> <p>Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.332.999.300,92 mengalami kenaikan sebesar Rp896.251.402,61 atau 7,84% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar</p>		<p>Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kota Bukittinggi harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai</p>	<p>Dengan telah dicatatnya kewajiban jangka pendek pada Neraca Kota Bukittinggi Tahun 2022 pun telah dilakukan audit atas LAPD Tahun</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
	<p>Rp11.436.747.898,31. Kewajiban per 31 Desember 2022 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri atas:</p> <p>1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) sebesar Rp237.000,00.</p> <p>2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp430.564.800,67.</p> <p>3) Utang Belanja sebesar Rp11.237.720.549,25 antara lain terdiri dari:</p> <p>a) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp6.240.714.248,00.</p> <p>b) Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp65.334.191,00.</p> <p>c) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.871.672.110,25.</p> <p>4) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp664.476.951,00.</p>		<p>peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kota Bukittinggi TA 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan</p>	<p>2022, maka Pemko Bukittinggi berkewajiban menyediakan anggaran pada perubahan APBD Tahun 2023 dengan optimal, untuk membayar hutang/kewajiban tersebut kepada pihak yang berhak sebagaimana ditindaklanjutinya pengertian dari kewajiban jangka pendek sesuai PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban pada Lampiran 1 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.</p>
3	<p>LAPORAN OPERASIONAL (LO)</p> <p>Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp703.466.188.835,22 turun sebesar Rp(297.896.063.897,72) atau (29,75%) dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.001.362.252.732,94. Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari:</p> <p>a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp127.187.243.766,85 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp136.257.791.456,00 atau 93,34%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :</p> <p>1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.506.989.601,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.269.852.262,00 atau 100,47%.</p> <p>2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.985.091.121,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.684.034.000,00 atau 92,40%.</p> <p>3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun</p>	<p>Berdasarkan data tersebut di samping, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Pajak-LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO yang merupakan hak Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.</p>	<p>Laporan operasional adalah laporan kinerja riil tahun berjalan, maka Pemerintah Kota Bukittinggi akan menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
D.	<p>Anggaran 2022 sebesar Rp8.363.843.874,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.505.000.000,00 atau 111,44%.</p> <p>4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.331.319.170,85 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp29.798.905.194,00 atau 78,30%.</p> <p>b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp565.023.737.353,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp577.899.930.194,00 atau 97,77%.</p> <p>REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p> <p>Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:</p> <p>1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA</p>	<p>Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.</p> <p>Tabel tersebut memperlihatkan pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi TA. 2022 telah memperhatikan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp744.059.199.525,66 dari anggaran sebesar Rp837.145.281.505,00</p>	<p>Kedepannya Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi selanjutnya akan terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan bagian dari fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
		<p>atau 88,88% telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keseluruhan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.</p>		
2.	<p>REKAPTULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MANDATORY SPENDING)</p>	<p>a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan</p> <p>Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp197.776.468.337,00 atau 23,34% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp190.634.608.343,00 atau 25,62% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Bukittinggi.</p> <p>Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagaimana table Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi akan tetap berupaya secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Bukittinggi.</p>
	<p>b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan</p> <p>Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp112.773.539.283,00 atau 16,70%</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10%</p>	<p>Kedepan Pemerintah Kota Bukittinggi akan berupaya tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10%</p>	

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
		<p>dari total anggaran Belanja Daerah di luar Gaji ASN. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp91.637.037.303,14 atau 15,84% dari total realisasi Belanja Daerah di luar Gaji ASN Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p>	<p>kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>c.</p>	<p>Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik</p> <p>Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp131.750.384.681,00 atau 30,54% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp431.343.152.540,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp129.390.744.866,16 atau 30,00% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp129.390.744.866,16.</p> <p>Pemerintah Kota Bukittinggi <b>belum</b> merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27</p>	<p>Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus dalam mengupayakan mengalisasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana tabel Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik.</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus mengupayakan mengalisasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana tabel Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik.</p>



No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN / PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
		<p>Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.</p>		
3	<p>REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)</p>	<p>Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:</p> <p>a. SPM Bidang Pendidikan</p> <p>Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp52.044.258.820,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp50.680.800.361,68 atau 97,38% dari total anggaran. Pemerintah Kota</p>		

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOPEKSI
		<p>Bukittinggi agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.</li> <li>2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.</li> <li>3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.</li> <li>4) 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.</li> </ol> <p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.</p>		
		<p>b. SPM Bidang Kesehatan Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp1.122.181.882,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp932.165.660,00 atau 83,07% dari total anggaran. Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya</p>	<p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.</p>	<p>Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang kesehatan ini dimana hanya terealisasi sebesar 83,07% dari yang dianggarkan dapat kami jelaskan bahwa secara umum output kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM sudah tercapai 100 %, dan seluruh aktivitas sudah terlaksana. Begitu juga barang dan jasa yang merupakan output kegiatan dan sub kegiatan telah tercapai</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
		<p>guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.</li> <li>2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.</li> <li>3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.</li> <li>4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.</li> <li>5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.</li> <li>6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.</li> <li>7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.</li> <li>8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.</li> <li>9) 100% warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan.</li> <li>10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan.</li> <li>11) 100% warga negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan Kesehatan</li> <li>12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.</li> </ol>	<p>Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang kesehatan ini dimana hanya tercapai sebesar 83,07% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kota Bukittinggi <b>untuk memberikan penjelasan</b></p>	<p>semuanya. Adapun sisa anggaran dari kegiatan dan sub kegiatan ini terjadi karena efisiensi belanja pengadaan barang dan jasa yang didapatkan di bawah standar biaya yang dimuat dalam DPA, terutama pengadaan alat dan bahan yang dipilih melalui e_katalog dengan kualitas yang sama, namun dapat diadakan dengan harga di bawah pagu.</p>
	<p>c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Bukittinggi TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan</p>		<p>Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ini dimana hanya terelisir sebesar 84,58% dari yang</p>	<p>Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ini dimana hanya terelisir sebesar 84,58% dari yang dianggarkan, dapat</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
		<p>Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp418.253.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp353.769.336,40 atau 84,58% dari total anggaran. Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.</li> <li>2. 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.</li> </ol> <p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p>	<p>dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kota Bukittinggi untuk <b>memberikan penjelasan.</b></p>	<p>kami jelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub kegiatan perluasan spam jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dimana masih ada sisa dana tdk ter spj kan 1 juta lebih namun realisasi fisik 100%</li> <li>2. Sub kegiatan fasilitasi penyediaan kerjasama spam, masih ada sisa dan yg belum di spj kan spt makan minum rapat dan sisa dana spped karna kurang optimalny penyerapan anggaran, namun realisasi fisik 100%;</li> <li>3. Sub kegiatan penyusunan rencana, kebijakan strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dim daerah kab/kota, kegiatan ini melakukan penyusunan dokumen masterplan air limbah domestik dan terdapat sisa tender, dan utk makan minum rapat realisasi spj tidak terlalu besar krn hanya rapat d awal saja selebihnya didanai oleh penyedia jasa, dan realisasi spped dispj kan berdasarkan undangan rapat, pelatihan yg diikuti, namun kegiatan fisiknya terealisasi 100%</li> </ol>
	<p>d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>Pemerintah Kota Bukittinggi pada TA. 2022 belum menganggarkan alokasi belanja untuk SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah Kota Bukittinggi agar berkomitmen untuk memprioritaskan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah</li> </ol>	<p>Sehubungan dengan tidak tersedianya alokasi anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam APBD Kota Bukittinggi TA 2022, maka diminta kepada Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memberikan penjelasan dan menyampaikan pernyataan tertulis bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi di masa yang akan datang akan berkomitmen untuk menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk</p>	<p>Alokasi anggaran sesuai dengan Nomenklatur Program/Kegiatan Sub Urusan Perumahan KEMENDAGRI 050-5889/2021 belum tersedia pada T.A. 2022, namun Kota Bukittinggi telah melaksanakan pendataan rumah melalui pendataan Sistem Informasi Rumah Bukittinggi (SIRUBI) pada lokasi rawan bencana dan daerah negative list sebagai Data Dasar dalam pemenuhan SPM Bidang perumahan Rakyat melalui Sub Kegiatan 1.04.02.2.06.01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perumahan izin</p>	

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
		<p>layak huni.</p> <p>2. 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni.</p> <p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.</p>	<p>penemuan seluruh SPM.</p>	<p>Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik dengan total anggaran Rp. 503.686.380,00 dan realisasi sebesar Rp. 488.718.394,00 (97,03 %).</p> <p>Pada Tahun 2023 Dinas Perkim sudah menganggarkan kegiatan terkait dengan pemenuhan SPM yaitu Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota pada Sub Kegiatan identifikasi Laban-Jaban Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan dengan anggaran sebesar Rp3.493.900.</p> <p>Dalam kesempatan tindak lanjut ini kami juga menyertakan pernyataan tertulis bahwa di masa yang akan datang akan berkomitmen untuk menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk pemenuhan seluruh SPM.</p>
		<p>e. SPM Bidang Keteniraman dan Keterlibatan Umum</p> <p>Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Bukittinggi TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Keteniraman dan Keterlibatan Umum dianggarkan sebesar Rp15.749.564.460,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.535.407.810,67 atau 92,29% dari total anggaran. Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara.</li> <li>2. 100% warga negara yang</li> </ol>		

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
		<p>memperoleh layanan informasi rawan bencana.</p> <p>3. 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.</p> <p>4. 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.</p> <p>5. 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.</p> <p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kab/Kota dan Kab/Kota.</p>		
		<p>1. SPM Bidang Sosial</p> <p>Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Bukittinggi TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp761.070.242,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp558.336.364,00 atau 73,36% dari total anggaran. Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Sosial untuk Kab/Kota yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.</li> <li>2. 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial</li> </ol>	<p>Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dimana hanya terealisasi 64,98% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kota Bukittinggi untuk <b>memberikan penjelasan</b>.</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2022 telah merealisasikan kinerja (output) kegiatan maupun sub kegiatan terkait dengan SPM Bidang Sosial secara optimal (100%), artinya seluruh keterlambatan yang ada telah ditangani secara baik, namun terjadi efisiensi belanja dikarenakan anggaran disediakan berpedoman kepada besaran anggaran tahun lalu</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
		<p>dasar anak telantar di luar panti.</p> <p>3. 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.</p> <p>4. 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.</p> <p>5. 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.</p> <p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kab/Kota dan di Daerah Kab/Kota.</p>		
4	REKAPTULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	<p>Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp143.513.856,886,00 atau 29,15% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp68.441.396.876,00 atau 15,96% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah.</p> <p>Hal ini belum belum memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar meningkatkan dan terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat</p>	<p>Kedepan, Pemerintah Kota Bukittinggi akan meningkatkan dan terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
5	REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	<p>Koperasi Dalam Rangka Menyusutkan Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Wali Kota/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisasian dan penyelarasian program, kegiatan dan target kinerja dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisasian dan penyelarasian program, kegiatan dan target kinerja dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan</p>
		<p>Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp50.040.546.769,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.528.377.810,00 atau 23,04% dari yang ditargetkan.</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisasian dan penyelarasian program, kegiatan dan target kinerja dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisasian dan penyelarasian program, kegiatan dan target kinerja dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan</p>



No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
6	REKAPTULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	<p>Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar Rp1.116.235.600,00 atau 0,99% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp112.773.539.283,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp1001.176.812,00 atau 89,69% dari total alokasi dana yang dianggarkan.</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi akan mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas sebagaimana saran pada hasil evaluasi.</p>
7	REKAPTULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi belum mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain Belanja Subsidi bunga atas Tabungan Utsman dan program kegiatan lainnya, namun ke depan akan mengoptimalkan penganggaran dan penggunaannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
II	<p>KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP BPK) BPK</p> <p>Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.</p>	<p>Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota Bukittinggi, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Dimutakhirkan.</li> <li>2. Kelemahan Pengendalian Intern dalam Pemberian Ijin Pemasangan dan Pengelolaan Pajak Reklame.</li> <li>3. Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Memungut Retribusi dan Sewa atas Pemanfaatan Toko/Kios di Pasar Atas.</li> <li>4. Perekrutan Pegawai Non-ASN pada Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Sepenuhnya Berpedoman pada Ketentuan yang Berlaku Sehingga Membebani Keuangan Daerah.</li> <li>5. Data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang Dibayarkan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Tidak Akurat.</li> <li>6. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Pengeluaran Riil Sebesar Rp477.637.480,00.</li> <li>7. Penangggungjawaban Belanja Hibah pada KONI Tidak Lengkap Sebesar Rp27.948.734,00.</li> <li>8. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa pada 13 SKPD Minimal Sebesar</li> </ol>	<p>Terhadap temuan BPK tersebut di atas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kota Bukittinggi harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sejak diberikannya temuan-temuan tersebut telah dilakukan <i>action plan</i> oleh SKPD teknis yang dipandu dan dipantau secara berkala oleh APP Kota Bukittinggi, untuk kasus-kasus yang berindikasi administrasi telah hampir 100% dan untuk indikasi kerugian daerah telah banyak mengalami kemajuan.</p> <p>Terhadap temuan BPK tersebut kedepan, Pemerintah Kota Bukittinggi akan mengambil langkah konkrit untuk kemajuan tindak lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
III	LAIN-LAIN	<p>Rp7.175.089.967,41.</p> <p>9. Kekurangan Volume Lima Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Lima SKPD Sebesar Rp66.691.304,51 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp7.495.484,00.</p> <p>10. Kekurangan Volume Tujuh Paket Pekerjaan Jalan,Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sebesar Rp212.645.498,82.</p> <p>11. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Seperuhnya Tertib.</p> <p>12. Pengelolaan Aset Kemitraan Pihak Ketiga pada Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Optimal.</p>	<p>Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :</p>	<p>Dalam rangka terus berupaya dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi akan tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai saran yaitu :</p>
			<p>1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.</p> <p>2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi</p>	<p>1. Meningkatkan penerapan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.</p> <p>2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
			<p>pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.</p> <p>3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur.</p>	<p>melibat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.</p> <p>3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur.</p>

KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI,





## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Jl. Imam Bonjol No.17 Bukittinggi Telepon (0752) 34471 – 31223; Fax. (0752) 31223  
Website : dprd.bukittinggi.go.id

### RISALAH PARIPURNA

No: 3 / Paripurna-DPRD.BKT/VII/2023

- Tahun Sidang : 2022 – 2023  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke - : 7 (tujuh)  
Jenis Rapat : Rapat Paripurna  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Kamis/20 Juli 2023  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Utama DPRD Kota Bukittinggi, Jl. Iman Bonjol Nomor 17 Bukittinggi
- Ketua Rapat : Beny Yusrial, S.IP (Ketua DPRD)  
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi tentang:  
A. Penandatanganan Nota Persetujuan bersama Raperda tentang:  
1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2022,  
2. Pengelolaan Keuangan Daerah.  
B. Hantaran KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024
- Sekretaris Rapat : Ir. Melwizardi, M.Si. (Sekretaris DPRD)  
Hadir : A. Anggota DPRD  
19 dari 25 orang Anggota dengan rincian:  
1. Fraksi Partai Gerindra  
4 dari 5 orang Anggota  
a. Beny Yusrial, S.IP.  
b. Herman Sofyan, S.E.  
c. Asri Bakar, S.H.  
d. M.Angga Alfarici, S.Pd.  
2. Fraksi PKS  
4 dari 5 orang Anggota  
a. Nur Hasra, B.Sc.  
b. H. Syaiful Efendi, Lc., MA.  
c. Arnis Malin Palimo  
d. Ibrayasser, S.AP.  
3. Fraksi Partai Demokrat  
3 dari 4 orang Anggota  
a. Rusdy Nurman, S.H.  
b. Yontrimansyah, S.E,  
c. Alizarman, S.H.I.,S.H.  
4. Fraksi Amanat Nasional Persatuan  
3 dari 5 orang Anggota  
a. Ir. Hj. Rahmi Brisma  
b. H. I  
c. rman  
d. Dedi Patria, S.H., M.H.  
5. Fraksi Golkar  
3 dari 3 orang Anggota  
a. Edison Katik Basa, S.E.,M.B.A.  
b. Iman Edyana, S.T.

6. Fraksi Nasdem – PKB,  
2 dari 3 orang Anggota
  - a. Asril, S.E.
  - b. Zulhamdi Nova Candra, IB, A.Md.
7. Sekretariat DPRD
  - B. Pemerintah Daerah
  - C. Forkopimda
  - D. Undangan yang lain

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

1. Yang terhormat Sdr. Walikota Bukittinggi.
2. Yang kami hormati Sdr. Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Bukittinggi
3. Yang kami hormati Sdr. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bukittinggi
4. Yang kami hormati Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi
5. Yang kami hormati Sdr. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi
6. Yang kami hormati Sdr. Sekda, Staf Ahli Walikota, para Asisten dan Kepala SKPD, Kepala Bagian serta Camat yang hadir dalam rapat paripurna ini.
7. Yang kami hormati Sekretaris DPRD beserta Staf.
8. Yang kami hormati tenaga ahli Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bukittinggi.
9. Selanjutnya rekan-rekan Pers, baik media cetak maupun elektronik, dan Hadirin yang berbahagia, mohon maaf tidak tersapa satu persatu.

Alhamdulillahrabbi'alamiin, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia - Nya yang tak pernah henti, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi.

Shalawat beriring salam marilah kita mohonkan kepada Allah SWT agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumlil akhir nanti. Amin Yaa Rabbal Alamin.

**MENGAWALI RAPAT PARIPURNA KITA HARI INI,  
AKAN DILAKUKAN PEMBACAAN AYAT SUCI AL QUR'AN OLEH:  
Ananda. RACHMAT NAUFAL**

"Selamat Datang" kami ucapkan kepada seluruh undangan pada acara Rapat Paripurna kita pada hari ini yakni dengan agenda:

- A. Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama terhadap Raperda tentang:
  1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

## 2. Pengelolaan Keuangan Daerah.

### B. Hantaran KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2024.

Pada kesempatan ini juga kami atas nama lembaga DPRD Kota Bukittinggi mengucapkan "Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Semoga kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang dilimpahkan Allah SWT dan semakin lebih baik ke depannya.

Selanjutnya, dengan memperhatikan jumlah anggota DPRD yang telah hadir dan telah menandatangani daftar hadir berjumlah 19 (sembilan belas) orang, berarti quorum telah tercapai, maka sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bukittinggi, Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi dapat dan sah untuk dilaksanakan hari ini Kamis tanggal 20 Juli 2023. Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim", Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

----- (ketuk palu 3 x) -----

Undangan yang kami hormati,

Pembahasan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, adalah merupakan bentuk pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD, dalam hal ini, adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD.

Berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 170/12/ Kpts.DPRD/2023 tentang Penugasan Badan Anggaran untuk membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022, Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Pemerintah Kota Bukittinggi serta perangkat daerah, telah melaksanakan pembahasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini sejak tanggal 14 Juni 2023 yang lalu.

Hasil pembahasan Raperda ini sudah disampaikan dalam rapat gabungan komisi, dan sudah pula disetujui oleh Fraksi-Fraksi DPRD pada tanggal 17 Juli 2023 dalam rapat paripurna internal, dan hari ini akan dilakukan penandatanganan persetujuan bersama atas Raperda tersebut.

Untuk itu kami ucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD khususnya Badan Anggaran, TAPD, perangkat daerah dan seluruh pihak terkait yang telah membantu penyelesaian pembahasan Raperda ini. Semoga

kerja keras yang sudah dilakukan dapat bermakna bagi pembangunan Kota Bukittinggi dan menjadi amal ibadah bagi kita semua.

Berkenaan dengan telah keluarnya fasilitasi Gubernur terhadap Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Surat Nomor 180/1065/Huk-2023 tanggal 6 Juni 2023 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, Pansus pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah melakukan rapat pembahasan kembali bersama dengan Pemerintah Kota Bukittinggi beserta perangkat daerah terkait terhadap hasil fasilitasi Gubernur tersebut pada tanggal 10 Juli 2023.

Sesuai dengan mekanisme, maka hasil rapat pembahasan Raperda tersebut juga telah dilaporkan dalam rapat gabungan komisi dan disetujui dalam rapat paripurna internal DPRD pada tanggal 17 Juli 2023 dan hari ini juga akan dilakukan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Kebijakan Umum Anggaran adalah hal yang perlu disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Tujuannya adalah untuk penyamaan persepsi, persamaan tindak, keselarasan dan keserasian dalam menyalurkan aspirasi masyarakat antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Harapannya adalah akan ada sinergitas dan keterpaduan dalam menyusun program dan kegiatan, penyediaan anggaran dan pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan RKPD, KUA dan PPAS merupakan dokumen yang terkait dengan proses penyusunan APBD yang dibahas antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dan dalam KUA memuat beberapa kebijakan umum yang menjadi landasan dalam penyusunan APBD.

Mengawali acara, marilah kita dengarkan laporan hasil pembahasan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, kepada Sdr juru bicara dipersilahkan:

**Sdr. Dedi Fatria, S.H., M.H., menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.**

Terima kasih



**Berikutnya, kepada juru bicara Pansus pembahasan hasil fasilitasi Gubernur terhadap Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyampaikan laporannya, kepada juru bicara dipersilahkan.**

Terimakasih kami ucapkan kepada Sdr. H. Syafril, S.ST.Par., M.Par. juru bicara yang telah menyampaikan laporan.

Selanjutnya kita dengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepada juru bicara masing-masing fraksi dipersilahkan:

1. Fraksi Partai Gerindra (M. Angga Alfarici, S.Pd.)
2. Fraksi Partai PKS (H.Ibrayasser, S.A.P.)
3. Fraksi Partai Demokrat (Alizarman, S.H.I., S.H.)
4. Fraksi Amanat Nasional Persatuan (Ir. Hj. Rahmi Brisma)
5. Fraksi Partai Golkar (Edison Katik Basa, S.E.,M.B.A.)
6. Fraksi Nasdem-PKB (Zulhamdi Nova Candra, IB, A.Md.)

Terimakasih, sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak/Ibu anggota DPRD Kota Bukittinggi, apakah hasil pembahasan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat disetujui? (Setuju, **ketok palu 1x**)

Alhamdulillah sudah disetujui, maka sebelum penandatanganan persetujuan bersama atas kedua Raperda ini, marilah kita dengarkan bersama Draft Nota Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Bukittinggi dengan Pemerintah Kota Bukittinggi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepada Sdr. Sekretaris DPRD dipersilahkan,

**(Sekwan, membacakan 2 buah draft nota persetujuan bersama)**

Terimakasih.

Untuk penandatanganan Nota Persetujuan Bersama, dipersilahkan kepada Sdr Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD untuk mengambil tempat.

Terimakasih. Alhamdulillah, sudah selesai penandatanganan

Undangan rapat paripurna yang berbahagia,

Agenda berikutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan Sdr. Walikota terhadap Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sekaligus Hantaran KUA - PPAS APBD Tahun Anggaran 2024.

Kepada Sdr. Walikota dipersilahkan.

**(Walikota menyampaikan sambutan, dan menyerahkan KUA - PPAS  
APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Ketua DPRD)**

Terimakasih.

Sambutan Walikota tadi merupakan akhir dari agenda kegiatan rapat kita pada hari ini. Dengan demikian selesailah acara Rapat Paripurna Terbuka DPRD Kota Bukittinggi. Terimakasih kepada rekan-rekan anggota DPRD dan hadirin yang berbahagia yang telah mengikuti acara ini dengan seksama, semoga Allah menjadikan akhir dari kegiatan kita adalah suatu kebaikan dan menjadi amal ibadah bagi kita semua, Amin.

Kita tutup Rapat Paripurna hari ini dengan mengucapkan "Alhamdulillahirrabbi alamin".

===== (ketuk palu 3x) =====

Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalammualaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BUKITTINGGI



BENNYUSRIAL, S.I.P.



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DPRD KOTA BUKITTINGGI  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
TENTANG**

- 1. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022**
- 2. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi;

Yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua beserta anggota DPRD Kota Bukittinggi;

Yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Bukittinggi;

Yang terhormat saudara Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi beserta para Asisten;

Yang terhormat saudara Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Yang kami muliakan Niniak Mamak, Alum Ulama, Cadiak Pandai serta Bundo Kandung;

Selanjutnya rekan-rekan Pers, para undangan serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang tak pernah henti, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat, guna mengikuti Rapat Paripurna DPRD

Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Shalawat beriring salam kita kirimkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW rasul yang patut kita contoh keteladannya, allahuma shall'ala Muhammad wa'ala alihi Muhammad.

**Saudara Walikota, Wakil Walikota, Ketua dan Wakil Ketua beserta Anggota DPRD dan para Hadirin yang berbahagia,**

Kami dari Fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih kepada saudara ketua, yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan Pendapat akhir Fraksi kami terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Setelah melalui hantaran oleh Saudara Walikota dan telah dibahas oleh Pansus untuk kedua ranperda tersebut, pada kesempatan ini fraksi Gerindra perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

#### **1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022**

Secara keseluruhan realisasi belanja daerah yaitu sebesar 88,88%, namun masih terdapat beberapa SKPD yang capaian realisasinya dibawah realisasi rata-rata Pemerintah Daerah, untuk kedepannya Fraksi Gerindra mengharapkan agar masing-masing perangkat daerah dapat merencanakan dan merealisasikan anggaran sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi serta kapasitas dari sumberdaya yang tersedia.

#### **2. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Ranperda pengelolaan keuangan daerah merupakan landasan yuridis dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan untuk menciptakan system pengelolaan keuangan yang sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang taat pada peraturan perundang-undangan. Dengan adanya regulasi daerah tersebut, pengelolaan keuangan daerah bisa lebih detail dan akuntabel, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban

dan pengawasan dilakukan secara transparan, serta diharapkan pula akan meningkatkan performansi dan memperbaiki kualitas pengelolaan APBD.

Kami juga berharap Peraturan Daerah ini dapat menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang belum tercapai.

**Saudara Walikota, Wakil Walikota, Ketua dan Wakil Ketua beserta Anggota DPRD dan para hadirin rapat paripurna yang berbahagia,**

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Gerindra ini kami sampaikan, Selanjutnya dengan berserah diri kepada Allah SWT, kami menerima dan menyetujui kedua Ranperda tersebut untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah dan mengharapkan ranperda ini nanti setelah menjadi perda dapat dijalankan dengan baik dan tepat sasaran.

Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, serta terima kasih atas segala perhatiannya.

Bukittinggi, 20 Juli 2023  
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bukittinggi

Muhammad Angga Alfarici, S.Pd ( )

Shabirin Rachmat, S.Sos ( )

Beny Yusrial, S.IP ( )

Asri Bakar, S.H ( )

Herman Sofyan, S.E ( )

Wabillaahitaufiq Wal Hidayah,

Wassallamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
BUKITTINGGI TENTANG:**

- 1. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2022; DAN**
- 2. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Yth.* Saudara Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi;

*Yth.* Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi;

*Yth.* Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; / yg mewakili.

✓ *Yth.* Ketua Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi;

✗ *Yth.* Ketua Pengadilan Agama Kota Bukittinggi;

*Yth.* Sekretaris Daerah, Para Asisten, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Camat, dan Lurah se-Kota Bukittinggi;

*Yth.* Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, dan Pemuka Masyarakat;

Rekan-Rekan Pers, Media Cetak dan Elektronik; serta Hadirin para undangan yang berbahagia.

✗ Alhamdulillah puji dan sukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan nikmat dan kasih sayangNya kepada kita bersama sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Shalawat berangkaikan salam semoga tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, penghulu Nabi dan Rasul, pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa, dan tauladan bagi umat sedunia dalam kehidupan di dunia. Semoga salawat dan salam yang kita ucapkan sebagai bukti kecintaan kita kepadanya menghantarkan kita bersama dengan Beliau di surga Nya karena seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai di akhirat nanti. *Amin, amin, ya rabbal 'alamin.* ✗

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pendapat akhir fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang: 1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022; dan 2) Pengelolaan Keuangan Daerah. Semoga kesungguhan dan keikhlasan kita dalam menjalankan amanah rakyat dapat menjadi amal shaleh dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita kelak di hadapan Nya.

Setelah membaca, menelaah, dan menganalisa kedua Ranperda tersebut di atas, ada beberapa catatan mendasar yang ingin kami sampaikan pada pendapat akhir fraksi pada kesempatan kali ini.

#### **I. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022**

Ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022:

1. Fraksi PKS mendorong agar Pemerintah Daerah melakukan riset terkait potensi daerah agar pendapatan yang direncanakan terukur sehingga dapat direalisasikan dengan baik.
2. Fraksi PKS mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah sehingga Bukittinggi menjadi Kota yang Tangguh dan mandiri.
3. Fraksi PKS mendorong agar rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah segera dihantarkan ke DPRD agar Pemerintah Daerah tidak mengalami kerugian akibat retribusi pasar atas yang tidak dapat dipungut karena regulasi yang belum tersedia.
4. Fraksi PKS juga mendorong agar piutang pajak segera ditagih kepada wajib pajak agar tidak semakin menumpuk setiap tahunnya yang dapat merugikan keuangan daerah.
5. Fraksi PKS mendorong agar setiap OPD berusaha untuk membuat perencanaan yang matang dan terukur sehingga mampu merealisasikan

4. Pada kesempatan ini kami juga ingin mengingatkan kepada sdr. Walikota Bukittinggi terkait isu kasus Inces yg berkembang di akhir<sup>2021</sup> kami berharap Walikota agar berhati-hati dalam menulis & menyampaikan sebuah Data & Informasi yg di dapat di lapangan. Gunakan prinsip: yg di tuntun agama btl. yaitu konsep "tabayun" mencari Informasi betul? ke sumbernya

Apalagi di ~~lin politik ini~~, kami fraksi pts isu tentang moral, ahlak & Asusila yg dilakukakan oleh ank kemenakan bkr yg mana hal ini sangat tabu di lgah masyarakat kita, masyarakat minang kabau yg berpedoman pd Falsafah, ABS, SBK, sehingga hal ini tdk menimbulkan keresahan di lgah masyarakat bria lokal maupun nasional



6. Fraksi PKS mendorong agar Pemerintah Daerah menindaklanjuti LHP BPK untuk tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran sebelumnya.
7. Fraksi PKS mendorong agar Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi meningkatkan performancenya dengan meningkatkan layanan kepada masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif serta meningkatkan pendapatan usaha baik air maupun non air. Melakukan Kerjasama secara intens dengan daerah tetangga terkait pemanfaatan potensi sumber air baru dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Bukittinggi.

## **II. Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan terkait Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Fraksi PKS berharap kiranya ketika Ranperda ini sudah ditetapkan dan diundangkan, agar Pemerintah Daerah mempedomaninya dengan baik.
2. Fraksi PKS berharap agar semua pejabat pengelola keuangan daerah baik itu pemegang kekuasaan, koordinator, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pejabat penatausahaan keuangan (PPK), bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan seksama dan saling bersinergi agar pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan tertib, tertib administrasi dan tertib hukum. Hal ini guna menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Fraksi PKS mendorong agar kiranya Pemerintah Daerah taat dan patuh dengan schedule atau jadwal yang sudah ditetapkan dalam Ranperda ini terkait dengan hantaran KUA dan PPAS, perubahan KUA dan PPAS, Ranperda tentang APBD, Ranperda tentang Perubahan APBD, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, laporan realisasi APBD semester pertama dan prognosis semester berikutnya. Keterlambatan dalam menyusun dan menghantarkan satu dokumen keuangan tersebut ke DPRD berimbas kepada keterlambatan pada dokumen-dokumen yang lainnya. Maka diperlukan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah agar menyusun dan menghantarkan dokumen tersebut di atas sesuai dengan

~~SV Di tahun politik ini, Fraksi PKS~~

→ Mengajak semua pihak utk menjaga  
konduktivitas kota Bkt,

Jangan Sampai Berkata & Berbuat yg dpt  
menimbulkan gejala di tengah masyarakat.

Hindari statemen yg dpt memicu perpecahan  
di tengah masyarakat, karena tidak baik  
utk perkembangan Demokrasi kedepan.

Berik dlm berkata & berbuat,

Melakukan check and recheck dlm bertindak  
adalah langkah yg cepat dlm menyesuaikan  
perhelatan demokrasi yg semakin dekat.

Demikianlah pendapat akhir fraksi ini kami sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* kami Fraksi PKS menyatakan setuju atas kedua Ranperda tersebut di atas untuk dijadikan sebagai Perda dengan beberapa catatan yang sudah kami sampaikan dan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam lembaran daerah sesuai mekanisme yang berlaku. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.*

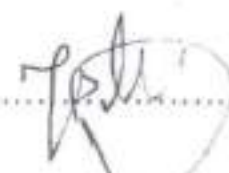
Bukittinggi, 20 Juli 2023

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS)

DPRD Kota Bukittinggi


H. Syaiful Efendi, Lc, MA

Ketua

(..........)

Amis Malin Palimo

Wakil Ketua

(..........)

Ibnu Asis, S.Tp

Sekretaris

(..........)

H. Ibra Yasser

Anggota

(..........)

Nurhasra, B.Sc

Penasihat

(.....)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

Jalan Imam Bonjol No. 17, Bukittinggi - 26116 Telp (0752) 34471, 31223 Faks. 31223



**PENDAPAT AKHIR**  
**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**  
**DPRD KOTA BUKITTINGGI**  
**TERHADAP:**

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA  
BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2022**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh....**

1. Yang terhormat Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi.
2. Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bukittinggi
3. Yang kami hormati Sdr. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bukittinggi
4. Yang kami hormati Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi
5. Yang kami hormati Sdr. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi
6. Yang kami hormati Sdr. Sekda, para Asisten dan Kepala SKPD, Kepala Bagian serta Camat yang hadir dalam rapat paripurna ini.
7. Yang kami hormati. Para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, dan Lurah se-Kota Bukittinggi.
8. Selanjutnya rekan-rekan Pers, baik media cetak maupun elektronik, dan Hadirin yang berbahagia, mohon maaf tidak tersapa satu persatu.

Segala Puji Bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa , atas limpahan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi waktu dan kesempatan menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

Shalawat beriringan salam kita peruntukan buat junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW, semoga segala sala'at beliau senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amiin...YRA.

Pertama sekali izinkan kami menyampaikan ucapan Terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah berkenan memberikan waktu dan kesempatan kepada Fraksi kami atas penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Ini, selanjutnya ucapan terima kasih dan apresiasi Serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Panitia Khusus DPRD Kota Bukittinggi, Badan Anggaran DPRD Kota Bukittinggi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) bersama dengan Perangkat SKPD Kota Bukittinggi yang telah bekerja keras dan maksimal dalam membahas dan menyelesaikan secara Hikmat terhadap Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 serta Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan Sidang dan Segenap Anggota DPRD, Hadirin Sidang Paripurna Yang Berbahagia,**

Pada kesempatan penyampain Pendapat Akhir Fraksi ini, Fraksi Partai Demokrat tidak akan mengulas secara terperinci lagi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 serta Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kami meyakini proses pembahasan Ranperda ini di bahas dan didalami secara bersama antara Badan Anggaran DPRD Kota Bukittinggi, Panitia Khusus DPRD Bukittinggi bersama Tim TAPD beserta SKPD terkait serta telah melalui tahapan dan mekanisme yang ada serta mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini Fraksi Demokrat Menekankan bahwa terhadap Produk Ranperda yang telah menjadi kesepakatan dan kebijakan antara eksekutif dan legislatif ini, agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-undang.

Kepada Pemerintah Daerah terutama SKPD terkait untuk dapat kembali memahami dan memaknai Ranperda ini dengan bentuk Progres Kegiatan baik dalam bentuk Sosialisasi maupun Realisasinya agar yang menjadi maksud, tujuan dan cita-cita Ranperda ini dapat terwujud sesuai dengan harapan kita semua.

Fraksi Partai Demokrat yang secara politis terlibat langsung dalam pengawasan pelaksanaan dan realisasi kegiatan APBD Kota Bukittinggi mempunyai catatan dan saran terhadap Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 serta Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kota Bukittinggi diminta untuk menindak lanjuti semua rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 serta pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Kepada setiap perangkat Daerah, Fraksi Demokrat menekankan untuk tetap memegang teguh maksud dan capaian program, akuntable, transparan, dan terukur serta birokrasi yang baik dalam melayani publik akan menjadi kunci kesuksesan setiap perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja.
3. Fraksi Demokrat juga menekankan kepada Pemerintah Daerah agar melakukan kajian dan estimasi perencanaan secara terukur dan matang terhadap target penerimaan pajak dan retribusi, sehingga selisih target dan realisasi tidak terlalu jauh

4. Agar menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah terhadap penerimaan yang sah dan pengelolaan keuangan yang baik dari bangunan Pasa Ateh yang telah diserahkan terimakan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada Bulan Juli 2021, sehingga diharapkan dapat meningkatkan persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah.
5. Masih adanya beberapa sektor pajak dan retribusi yang dapat ditingkatkan, karena realisasinya masih dibawah target.

**Hadirin Sidang Paripurna Yang Berbahagia..**

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bukittinggi, dengan mengucapkan **Bismillahirrahmanirrahim**, memohon keridhaan Allah SWT. Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bukittinggi dapat **menyetujui** sekaligus **Mengusulkan** ke dua Ranperda ini untuk dapat dijadikan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi yang nantinya akan di tuangkan dalam lembaran Peraturan Daerah Kota Bukittinggi.

Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam penyampaian Pendapat Akhir ini, terimakasih atas segala perhatiannya.

**Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,**

**Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

**Bukittinggi, 19 Juli 2023**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA BUKITTINGGI**

1. **YONTRIMANSYAIL, SE**

Ketua

2. **ALIZARMAN,SHLSH**

Wakil Ketua

3. **ERDISON NIMLI, AMd**

Sekretaris

4. **RUSDY NURMAN,SH**

Anggota

.....

.....

.....

.....



## PENDAPAT AKHIR

### DPRD KOTA BUKITTINGGI

- 1. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2022**
- 2. PENGELUARAN RUANGAN DAERAH**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Yang Terhormat Saudara Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi.
2. Yang Terhormat Saudara Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kota Bukittinggi.
3. Yang Kami Hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bukittinggi
4. Yang Terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Para Asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat dan Lurah Dilingkungan Pemko Bukittinggi.
5. Yang Kami Hormati Nik Mamak, Bunda Kanduang, Para Wartawan serta Para Undangan dan Hadirin Yang Berbahagia.

Sehagai wujud rasa syukur atas limpahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, patut kiranya jika pada kesempatan ini kita memuji dan memujanya. Karena telah mengizinkan dan memberikan kesempatan lahir dan bathin, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam suasana yang bahagia di awal Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H, dalam Rapat Paripurna dewan dengan agenda pokok pengambilan Keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perkenankan kami, segenap pimpinan dan anggota Fraksi Amanat Nasional Persatuan mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H. Semoga amalan yang indah berawal dari hati yang indah. Indahkan hati dengan tutur kata yang indah. Kini saatnya kita bermuhasabah, mengevaluasi diri agar ke depannya lebih mantap dalam beribadah serta mengabdikan bagi Kota Bukittinggi yang





Mendahului agenda pokok tersebut diatas, Rapat Dewan yang terhormat ini terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Fraksi-Fraksi di Dewan untuk menyampaikan pendapat akhirnya, setelah diawali dengan Laporan Panitia Khusus. Untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan atas 2 buah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Untuk itu kepada pimpinan rapat, atas nama Fraksi Amanat Nasional Persatuan kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

**Saudara Walikota, Pimpinan dan Serta Undangan Yang Terhormat,**

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 oleh Walikota, dan pembahasannya bersama DPRD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang yang pada dasarnya selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Oleh karenanya, kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD tersebut ini perlu dibina secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas dan peran kita masing masing dengan menyadari bahwa Pemerintah Daerah tanpa membina kemitraan dengan DPRD, maka dia sama dengan mayat berjalan, sebaliknya DPRD tanpa dukungan kemitraan dan Pemerintah Daerah, maka dia akan menjadi bangkai.

Dengan kerangka pemikiran tersebut ini, kita tiba pada suatu kesimpulan bahwa, keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat di daerah ini adalah juga merupakan bagian dari keberhasilan Dewan dan sebaliknya kegagalan DPRD dalam mengembantugas, fungsi dan kewenangannya juga merupakan kegagalan Pemerintah Daerah.



## **I. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.**

Kita semua memahami bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan Walikota kepada Dewan, memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan arus kas. Dan yang cukup substansial lagi, dewan telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan RPK secara lengkap, yang hal ini dapat menjadi materi sandingan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Terhadap seluruh materi tersebut diatas, dewan telah pula melakukan pembahasan baik itu bertanggung di internal Dewan maupun bersama dengan pihak Pemerintah Daerah melalui rapat gabungan komisi yang berlangsung tanggal 14 Juni 2023. Selanjutnya rapat pembahasan bersama Badan Anggaran dengan TAPD dan SKPD ditunjukkan Pemerintah Kota Bukittinggi yang dimulai tanggal 14 Juni 2023 s/d 17 Juli 2023.

Dan dalam pembahasan dengan pihak Pemerintah Daerah melalui rapat gabungan Komisi yang berlangsung tanggal 14 Juni sampai dengan 17 Juli 2023 yang lalu. Dimana dalam pembahasan dengan pihak Pemerintah Daerah tersebut diatas, beragam pertanyaan kritis yang disampaikan anggota Dewan kepada Pemerintah Daerah utamanya terhadap kinerja Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang telah kita sepakati dalam Perda Perubahan APBD 2022 yang tidak terduga di sisi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dalam pembahasannya tidak jarang muncul perbedaan dan perdebatan, namun kesemuanya ini masih dalam koridor demokrasi dan semangat kebersamaan.

Kita juga memahami bahwa, konteks pembahasan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 ini, tidak untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap muatan materinya, namun dalam rangka evaluasi antara rencana dan realisasi serta laporan dengan kenyataan sesuai



dengan norma-norma yang ada. Untuk itu, Fraksi Amanah Nasional Persatuan akan menyampaikan beberapa evaluasi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 sebagai berikut:

#### A. UMUM

Bahwa pelaksanaan APBD merupakan hakikat dari pelaksanaan proses demokrasi. Secara konseptual, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan bermuara kepada pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemberi mandat, baik kepada eksekutif maupun legislatif. Dengan konsep dan tata-tatanan seperti itu, maka akan dapat dianalisis untuk diketahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah, apakah ada kemajuan atau justru kemunduran selama satu tahun anggaran. Laporan pengelolaan keuangan daerah tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memonitor kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan keuangan/anggaran setiap tahunnya, agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (penganggarannya) semakin efektif, efisien dan dapat di kontrol oleh publik.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 ini, merupakan sebuah bentuk aplikasi sistem pertanggungjawaban anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selain sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap target serta pencapaian kinerja program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Sebagaimana diketahui dalam penyampaian hantaran Walikota terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 ini, Pemko Bukittinggi telah berurut-urut untuk yang Ke-10 kalinya diberikan Penghargaan Opini atas LKPD Kota Bukittinggi berupa Wejar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2022. Sebagaimana diawal kami



sebutkan tadi bahwa keberhasilan Pemko juga merupakan keberhasilan bersama antara Pemko dan lembaga DPRD. Kami perlu menyampaikan bahwa Penilaian opini WTP kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten hanya menilai tata Kelola keuangannya adalah baik bukan berarti benar. Karena kalau benar maka semuanya harus diaudit. Namun Fraksi Amanat Nasional Pembangunan tetap memberikan apresiasi atas pencapaian WTP yang Ke-10 bagi Kota Bukittinggi ini.

Setelah mencermati turhndap dekripsi materi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022. Kami uraikan Pendapat Akhir Fraksi PAN yang kami sertai dengan berbagai catatan penting sebagai masukan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembanguna serta perubahan etika pemerintahan dimasa-masa yang akan datang.

#### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Secara umum pada Laporan Realisasi Anggaran disebutkan Pendapatan-LRA Tahun 2022 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 714 Miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp.698 Miliar lebih atau mencapai 97,74% dari target yang ditetapkan. Sementara Belanja Daerah Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 837 miliar dengan realisasi sebesar Rp. 744 Miliar lebih dengan tingkat serapan anggaran sebesar 88,88%. Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah diperoleh surplus sebesar Rp. 93 Miliar lebih. Pertanyaannya kenapa bisa surplus sementara sewaktu pembahasan antara Berrgaji DIRKU dan LAPD kita sering bicara defisit sehingga tidak bisa berkreasi dalam anggaran program dari kagintan untuk SKPD dan bahkan kita memangkas kegiatan dan program SKPD dalam pembahasannya.

Dimana permasalahan ini sebenarnya, apakah kita salah dalam penganggaran bidang Pendapatan yang mengabaikan pedoman penyusunan APBD Tahun 2022 dan Permendagri yang memberikan rambu-rambu pada bidang Pendapatan apabila belum jelas besaran



penerimaannya seperti Dana Perimbangan DAU/DAK maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah, maka Pemerintah daerah bisa berpedoman pada penganggaran besaran pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Inilah yang sering anehnya kita dalam penyusunan APBD, ketika membahas kita defisit, tapi dalam setiap laporan pertanggungjawaban diperoleh temuan bahwa anggaran kita pada posisi Surplus.

Berdasarkan uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, setelah dilakukan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan APBD Tahun 2022 menghasilkan SILPA sebesar Rp. 77 Miliar lebih. Fraksi Amanat Nasional Pembangunan berharap agar SILPA kedepan tidak terlalu melonjak tinggi, maka kami meminta kepada Sekda sebagai Ketua TAPD untuk melakukan evaluasi terutama kepada SKPD yang banyak menghasilkan SILPA.

## 2. PENDAPATAN DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat realisasi sebesar Rp. 130 miliar lebih atau 95,99% dan target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 136 miliar lebih. Mencermati dari sisi Pendapatan sebagai salah satu ukuran kinerja keuangan Pemerintahan Daerah, Fraksi Amanat Nasional Pembangunan melihat bahwa belum terdapat kenaikan dari sisi PAD terutama pada sisi penyusunan target. Inilah sebenarnya yang perlu kita diskusikan dengan serius, apakah kita yang salah dalam membuat target pendapatan atau sebaliknya memang kinerja SKPD penghasil yang perlu kita evaluasi.

Kalau dicermati sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari uraian Nota Penjelasan Ranperda dapat dijelaskan bahwa realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022 secara umum sudah mencapai target yang diharapkan. Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 50 Miliar terealisasi sebesar Rp. 49 Miliar atau 98,61 %. Dibandingkan dengan tahun



sebelumnya maka PAD bidang Pajak Daerah belum melampaui target. Namun yang dipertanyakan kedepan apakah ditahun yang akan datang kita tetapkan besaran seperti tahun 2022 atau ada kenaikan.

Pada sisi Retribusi Daerah sama kinerjanya dengan realisasi Pajak Daerah. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 48 Miliar terealisasi sebesar Rp. 46 Miliar atau 95,85%. Pendapatan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah belum mencapai target yang ditetapkan atau baru terealisasi 88,49%. Pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 29 miliar lebih, namun terealisasi sebesar Rp. 27 miliar lebih atau 93,70%.

Walaupun secara umum kami melihat bahwa pada PAD telah mencapai target, namun kalau dirunut capaian objek pajak dan objek retribusi ada yang belum mencapai 100% seperti: Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menanam Telkomsel, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempel Khusus Parkir, dan Retribusi IMB. Oleh karena itu kedepan kami merekomendasikan agar terhadap objek pajak dan objek retribusi yang tidak mencapai target ini dilakukan evaluasi.

### **3. BELANJA DAERAH**

Belanja dikelompokkan dalam 3 bagian, Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Operasi ditargetkan Rp. 575 Miliar lebih dan realisasi Rp. 511 Miliar lebih atau 90,50%. Khusus belanja pegawai pada belanja operasi dianggarkan Rp. 325 Miliar lebih realisasi Rp. 301 Miliar lebih atau 92,61% atau bersisa 24 Miliar. Pada belanja pegawai ini Fraksi Amanat Nasional Pembangunan kami sarankan agar benar-benar disesuaikan dengan acuan gaji pegawai 2,5% agar tidak terjadinya sisa uang yang terlalu besar, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk belanja publik lainnya. Begitu juga pada Berang dan Jasa pada Belanja Operasi dianggarkan Rp. 301 miliar lebih terealisasi



Rp. 264 miliar lebih atau 87,62% bersisa sebanyak Belanja Hibah dianggarkan Rp. 42 miliar lebih terealisasi Rp. 40 miliar lebih atau 94,74%.

Khusus Belanja Bantuan Sosial hampir dapat direalisasikan 100% atau dianggarkan Rp. 2 miliar lebih terealisasi sebanyak yang dianggarkan Kalau kita perhatikan secara seksama kinerja Belanja Operasional dan 2 (dua) pos belanja diatas yakni belanja pegawai dan belanja barang dan jasa bersisa anggaran sebanyak Rp. 37 miliar lebih. Coba bayangkan kalau sebenarnya kita lebih cermat lagi menghitung penganggaran antara jumlah dianggarkan dengan realiasi, maka sesungguhnya sisa anggaran sebesar Rp. 37 miliar ini bisa kita manfaatkan untuk kegiatan lain terutama untuk pelayanan publik. Ke depan kami meminta kepada TAPD untuk mengkaji dengan cermat menyusun APBD ini.

Selanjutnya pada Belanja Modal ditargetkan sebesar Rp. 147 Miliar lebih Terealisasi 124 Miliar lebih atau 83,81%. Pada prinsipnya kami tetap mengingatkan bahwa belanja modal ini menyangkut kepada pelayanan publik. Ternyata dalam realiasi tidak dapat memenuhi target, dimana masih terdapat sisa Rp. 23 Miliar lebih. Kalau dibilang ini adalah penghematan maka ini alasan yang keliru. Ini harus menjadi catatan penting kenapa tidak dapat direalisasikan.

Berdasarkan perhitungan diatas terlihat bahwa sisa belanja daerah cukup besar, ini mengindikasikan bahwa manajemen kas daerah dan manajemen program/kegiatan SKPD masih banyak yang perlu diperbaiki. Pergeseran yang terlalu jauh ini menunjukkan tingkat akurasi antara perencanaan dan implementasi masih kurang baik. Sebagaimana yang disampaikan dalam setiap rapat anggaran, kenapa sisa belanja daerah ini cukup besar atau penyerapan belanja belum maksimal dimasing- masing SKPD, disamping upaya penghematan. Agar kedepan pengalaman ini bisa jadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2024



#### 4. PEMBIAYAAN DAERAH

Pada bagian akhir Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2022 tentang Pembiayaan Daerah Berdasarkan uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan APBD Tahun 2022 menghasilkan SILPA sebesar Rp. 77 Miliar lebih

#### B. REKOMENDASI DAN CATATAN FRAKSI TERHADAP RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2022 DAN PERSOALAN LAINNYA

Bahwa berdasarkan rapat-rapat Bangkar dengan TAPD dan SKPD selama pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 tanggal 14 Juni sampai dengan 17 Juli 2023, kami dari Fraksi Amanat Nasional Pembangunan memberikan Rekomendasi dan Catatan sebagai berikut:

##### 1. Pada Laporan Realisasi Anggaran

###### a. Bidang Pendapatan Daerah

- Meminta kepada Pemko Bukittinggi untuk lebih konsisten dan fokus dalam melaksanakan program kegiatan yang disusun atau direncanakan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah terutama pada bidang PAD.
- Perlu ketegasan untuk peningkatan SDM pengelolaan keuangan yang betul-betul ahli dan punya kemauan dan kemampuan manajerial pengelolaan keuangan yang dibutuhkan dengan memperhatikan standar kompetensi.
- Agar maksimal dalam kerjanya maka bidang pendapatan dan bidang pengelolaan keuangan dipisahkan. Buatlah OPD Dinas Pendapatan yang mengurus khusus pendapatan daerah.





**b. Bidang Belanja Daerah**

- Bahwa komposisi belanja daerah tahun 2022 secara umum sudah bagus, namun yang belum bagus tersebut, justru pada realisasi anggaran pada beberapa OPD yang masih rata-rata dibawah 85%, dengan berbagai alasan yang sama setiap tahun seperti petunjuk teknis yang terbit setelah APBD ditetapkan, tidak dapat terakomodir dalam APBD karena keuangan terbatas serta keterbatasan SDM pada OPD.
- Agar sisa belanja bisa terukur dengan baik, maka Pemko perlu secara cermat dan konsisten dengan besaran acuan gaji sebesar 2,5%.
- Terkait dengan sisa dana DAK dari sisa pekerjaan dan atau karena tidak dapat melakukan pekerjaan karena tidak cocok menu dan sebagainya DPRD memberikan Rekomendasi agar Pemko untuk segera meminta dukungan kepada Kementerian terkait agar tidak menjadi beban anggaran pada tahun berikutnya.
- Terkait lambatnya perencanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemko yang mengakibatkan pelaksanaan pengadaan terlambat dimulai dan berujung kepada gagalnya pekerjaan yang menjadi Silpa. DPRD memberikan rekomendasi agar perencanaan pengadaan dapat dilakukan setelah RKA OPD selesai jadi tidak menunggu akhir tahun.
- Terkait masih banyaknya terdapat Silpa di masing-masing OPD yang setiap tahun terus meningkat, DPRD meminta kepada Walikota untuk mengingatkan kembali kinerja serapan anggaran dan cara kerja pimpinan OPD.
- Pada sisi lain secara umum kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022, DPRD memberikan apresiasi atas diterimanya penghargaan Opini WTP dari BPK yang sudah berturut-turut selama 10 tahun.



### c. Bidang Pembiayaan

- Pada bagian akhir Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2022 tentang Pembiayaan Daerah Berdasarkan uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan APBD Tahun 2022 menghasilkan SILPA sebesar Rp. 77 Miliar lebih. Kedepan Silpa ini perlu penegasan agar tidak terlalu besar diakhir tahun anggaran.

#### 2. Pada Bidang Kemasyarakatan dan Pembangunan Lainnya

- Berpengalaman dengan masalah PPDB masuk SLTA dengan sistem zonasi beberapa minggu ini. Walaupun kewenangan PPDB masuk SLTA merupakan kewenangan Provinsi. Namun setidaknya masalah anak-anak tamatan SLTP dari Bukittinggi ada kebijakan Provinsi untuk kemudahan untuk bersekolah di SLTA yang ada di Bukittinggi. Permasalahan yang muncul berbanding terbalik dengan kebijakan Pemko Bukittinggi yang menghibahkan dana APBD Kota Bukittinggi membantu anggaran hibah uang komite dan guru honor di SLTA. Dana yang harusnya bisa digunakan untuk kebijakan perencanaan Kota Bukittinggi, kita bayarkan untuk SLTA, namun anak-anak mud yang tamatan di SLTP banyak yang tidak diterima di sekolah SLTA Negeri di Bukittinggi. Kami rekomendasikan kepada Walikota untuk dapat membicarakan masalah PPDB ini dengan Gubernur, sehingga tahun depan tidak muncul lagi masalah penerimaan PPDB seperti tahun ini.
- Menyangkut masalah kelanjutan dan perkembangan pembangunan Street Food Bukittinggi di atas tanah milik PT KAI. Bahwa didalam LHP BPK digadang-gadangkan berpotensi bisa merugikan keuangan daerah bila kegiatan ini batal ditengah jalan. Oleh karena itu kami minta kepada Saudara Walikota untuk mengambil Langkah-langkah kebijakan tindak lanjut sesuai dengan hasil LHP BPK.



## II. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Terhadap Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kami dari Fraksi Amanat Nasional Persatuan menyampaikan pada saat Ranperda ini sudah ditetapkan dan diundangkan, agar Pemerintah Daerah mempedomaninya dengan baik dan kepada semua pejabat pengelola keuangan daerah agar dapat memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan seksama dan saling bersinergi agar pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan tertib, tertib administrasi dan tertib hukum.

Bertolak dari hal-hal yang telah kami uraikan diatas, Fraksi Amanat Nasional Persatuan dengan ucapan BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 disertai Remendasi dan Catatan Dalam Pendapat Akhir kami ini dan juga Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Peraturan Daerah, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Amanat Nasional Persatuan kami sampaikan. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Bukittinggi, 20 Juli 2023

Hormat Kami  
FRAKSI AMANAT NASIONAL PERSATUAN  
DPRD KOTA BUKITTINGGI

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ir. Hj. RAHMI BRISMA	1. 
2.	Hj. NONI, S.Sos	2.
3.	Drs. NOVRIZAL USRA, M.Pd	3.
4.	DEDI FATRIA, S.H., M.H	4.
5.	H. IRMAN	5. 



Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu;alaikum Wr. Wb.

PENDAPAT AKHIR FRAKSI NasDem-PKB

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG  
JAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2022

Dan

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH

Yth, Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi;

Yth, Sdr. Waikota dan Wakil Walikota Bukittinggi;

Yth, Rekan-rekan anggota DPRD Kota Bukittinggi;

Yth, Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bukittinggi;

Yth, Kepala/Pimpinan BUMD/BUMN se-Kota Bukittinggi;

Yth, Sdr. Ketua KPUD Kota Bukittinggi;

Yth, Sdr. Sekretaris Daerah dan para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah  
Kota Bukittinggi, Para Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Camat dan Lurah se-  
Kota Bukittinggi;

Yth, Sdr. Sekwan dan jajaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi;

Yml, Inyik-inyik Ninik Mamak, Alim Ulama, Bundo Kandung dan Cadiak Pandai;

Yth, rekan-rekan insan pers, baik media cetak maupun elektronik, hadirin peserta  
sidang yang kami muliakan.

Segala pujian hanyalah patut dipersembahkan kepada Allah Sang Maha Kuasa,  
Salawat dan keselamatan semoga disampaikan kepada Nabi dan Rasul termulia  
Muhammad SAW, dan begitu pula pada keluarganya, kepada para sahabat  
pilihan, dan yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Semoga kita termasuk  
diantaranya. Aamiin.....Aamiin....ya Rabbal'alamin.

Hadirin peserta sidang yang kami muliakan.

Kami dari Fraksi NasDem-PKB menyampaikan ucapan terimakasih kepada Sdr. Ketua yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat akhir Fraksi kami atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022 dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Setelah mempelajari dan melalui pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022 kami Fraksi NasDem-PKB menyampaikan bahwa kami menjunjung tinggi hasil Pembahasan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 oleh Banggar DPRD beserta catatan yang telah dibacakan oleh juru bicara Banggar pada awal paripurna DPRD ini.

Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan kritikan terkait kepatuhan dalam melaksanakan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem penganggaran APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022.

Hadirin yang kami muliakan

Pada APBD Tahun 2022 Kota Bukittinggi belum melaksanakan amanah Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang "kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan" sepenuhnya dengan alasan SDM belum siap.

Pendapat kami Fraksi NasDem-PKB :

1. Bahwa ASN di lingkungan pemerintahan Kota Bukittinggi memiliki kemampuan di atas rata-rata Kota/Kabupaten lain yang justru telah melaksanakan amanah peraturan ini sepenuhnya.
2. Bahwa dalam pembahasan kami tidak mendapatkan penjelasan konkrit bahwa pemerintah Kota Bukittinggi sudah melakukan kajian ANIAR/ARK berkaitan dengan Permendagri No. 130 Tahun 2018.
3. Bahwa dalam pembahasan kami tidak mendapatkan penjelasan konkrit tentang Program/Kegiatan Peningkatan ASN berkaitan dalam upaya pelaksanaan amanah Permendagri No. 130 Tahun 2018.

Selanjutnya ada beberapa catatan yang perlu kami sampai antara lain :

1. Belanja daerah tahun 2022 dianggarkan Rp.837.145.281.505 hanya terealisasi Rp.744.059.199,66 atau anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.93.086.081.979,34 atau 88,88%.

Belanja Pegawai tahun 2022 dianggarkan Rp.325.444.707.669 hanya terealisasi Rp.301.384.096.541,66 atau 92,61% artinya tidak terserap 7,39% lebih tinggi dari acres yang ditetapkan aturan perundang-undangan acres belanja pegawai sebesar 2,5%.

Belanja Pegawai tahun 2022 sebesar 38,8% sementara sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 sudah diatur bahwa Tahun 2024 Belanja Pegawai Maksimal 30%.

Belanja Modal Tahun 2022 hanya dianggarkan 17,6% ternyata tidak terserap cukup besar yaitu 16,81% atau sebesar Rp.23.950.139.107,4.

Semua permasalahan Belanja Daerah tersebut menunjukkan sistem perencanaan yang belum optimal sehingga Pemerintah Kota Bukittinggi tidak efektif dalam pengelolaan anggaran.

2. Kepada Dinas Kominfo agar memaksimalkan aplikasi e-govermen dan segera mengintegrasikan dilingkungan Pemko Bukittinggi, masyarakat sebagai end user serta portal-portal nasional.
3. Agar pemerintah (TKPRD) mengkonsultasikan kepada instansi yang lebih tinggi untuk mendapatkan rekomendasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana didaerah terutama sarana dan prasarana olah raga dan pariwisata di ruang terbuka hijau.
4. Agar BKPSDM dalam penempatan pegawai benar-benar melaksanakan sesuai dengan amanah perundang-undangan serta profesional dan menghilangkan perilaku subjektif.
5. Kepada Dinas Lingkungan Hidup agar lebih kreatif dalam pengelolaan persampahan untuk menjawab kondisi TPA regional Payakumbuh bahwa sampah juga merupakan bahan baku yang bernilai ekonomis.
6. Kepada Dinas yang berhubungan dengan pendapatan daerah agar betul-betul mencermati UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi serta PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah serta UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah jangan sampai salah dalam menempatkan aturan berkaitan dengan pendapatan asli daerah.
7. Berkaitan dengan pembangunan di stasiun Kota Bukittinggi agar Pemko benar-benar teliti, dan cermat jangan sampai berbenturan dengan aturan perundang-undangan.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kami Fraksi NasDem-PKB menyambut baik atas selesainya pembahasan perda ini semoga dengan lahirnya peraturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bukittinggi.

Demikian Pendapat Akhir kami dari Fraksi NasDem-PKB terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini, dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" kami dapat menerima rancangan ini menjadi Perda dengan harapan kiranya pokok-pokok pikiran, kritikan, usul dan saran yang kami sampaikan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kita bersama.

Kami menyadari, bahwa sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf serta kekurangan dan keterbatasan, maka kalau dalam penyampaian kami ini ada yang kurang pada tempatnya dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

"Billahi taufiq wal hidayah"

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bukittinggi, 20 Juli 2022

Fraksi NasDem-PKB DPRD Kota Bukittinggi

1. Asril, SE
2. ~~Asril~~ Hamdi Nova Chandra IB
3. Abdul Rahman





## **FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD KOTA BUKITTINGGI**

---

### **PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA TERHADAP**

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dan
2. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Yang terhormat :

1. Walikota dan wakil walikota Bukittinggi
2. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bukittinggi
3. Unsur Forkopimda kota Bukittinggi
4. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama kota Bukittinggi
5. Sekretaris Daerah kota Bukittinggi
6. Para Asisten, Staf ahli dan segenap pimpinan SKPD se kota Bukittinggi
7. Sekretaris DPRD kota Bukittinggi
8. Rekan2 pers, hadirin para undangan yang berbahagia

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi ini, perkenankan kami mengajak kita semua untuk kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam rangka rapat paripurna DPRD kota Bukittinggi, dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terdapat dua ranperda sebagaimana kami sebutkan diatas.

Shalawat beriring salam, tak bosan-bosannya kita sampaikan buat junjungan dan suri tauladan kita, nabi besar Muhammad SAW, semoga dengan seringnya kita bershalat kepada beliau kita nantik akan mendapatkan syafaatnya kelak dikemudian hari. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum melanjutkan penyampaian pendapat akhir ini, izinkan kami Fraksi Partai Golkar mengucapkan Selamat Tahun Baru 1 Muharram 1445 Hijryah. Semoga dengan perjalanan waktu ini, Allah meredhai segala aktifitas dan kinerja yang telah kita lakukan selama ini, dilimpahkanNya rahmat dan karunia





## **FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

### **DPRD KOTA BUKITTINGGI**

kepada kita semua, serta dijauhkanNYa kita dari segala mara bahaya dan bencana. Aamiin ya Rabbal Alamiin.

Sdr. Walikota, Pimpinan DPRD serta segenap peserta paripurna yang berbahagia,

Sebagaimana diketahui bahwa Walikota telah mengantarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 pada tanggal 12 Juni 2023 yang lalu. Dan sesuai dengan aturan dan perundangan serta mekanisme yang berlaku, dimana telah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Bukittinggi bersama Tim TAPD serta SKPD teknis lainnya. Hasil pembahasan tersebut telah dilaporkan dalam rapat gabungan komisi DPRD pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 yang lalu untuk mendapatkan persetujuan. Hingga sampailah saatnya pada hari ini penyampaian Pendapat Akhir Fraksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lahirnya sebuah Peraturan Daerah.

Hadirin para peserta paripurna yang kami hormati,

Setelah melalui pembahasan antara Banggar DPRD bersama Tim TAPD dan SKPD teknis dilingkungan pemerintah kota Bukittinggi terhadap ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2022, didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut :

#### **A. Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp. 698.402.386.323,22 dari target Rp. 714.157.721.650,00 (97,79%), yang terdiri dari :

1. PAD direalisasikan sebesar Rp. 130.796.925.183,85 dari target Rp. 136.257.791.456,00 (95,99%)
2. Pendapatan transfer direalisasikan sebesar Rp. 567.387.873.682,00 dari target Rp. 577.899.930.194,00 (98,18%), dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direalisasikan sebesar Rp. 217.587.457,37.

Dari capaian pendapatan ini, Fraksi Partai Golkar memberikan catatan sebagai berikut :

1. Melihat dan mencermati capaian pendapatan sebagaimana tersebut diatas diharapkan ke depannya kiranya pemerintah lebih



## **FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

### **DPRD KOTA BUKITTINGGI**

mengoptimalkan kinerja dan pengawasan terhadap pendapatan ini, termasuk dalam hal ini kami fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah untuk senantiasa menggali dan memaksimal sumber-sumber PAD ini, baik dari segi pajak maupun retribusi daerah. Khusus dalam hal ini, kembali kami mengingatkan bahwa percepatan terhadap ranperda pajak dan retribusi daerah yang merupakan amanah dari UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah haruslah diupayakan. Karena sama kita ketahui bahwa regulasi ini juga mutlak menjadi landasan kita dalam menetapkan PAD yang bersumber dari Pajak dan Retribusi untuk APBD tahun anggaran 2024 mendatang.

Selanjutnya, terhadap realiasi belanja daerah baik belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Kami fraksi Partai Golkar memberikan catatan, dimana kita harus lebih optimal dalam membuat dan menyusun APBD yang dimulai semenjak rencana penganggaran. Karena kita masih menemukan adanya beberapa SKPD yang belum mampu merealisasikan secara maksimal sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen APBD. Padahal ketika pembahasan APBD sering kita dihadapkan pada kondisi defisit, namun realita yang terjadi pada akhirnya kita sesungguhnya tak mampu mewujudkan, dan jelas hal ini tentu menjadi kerugian kepada masyarakat yang semestinya bisa terlayani. Kami berharap, semoga hal-hal yang kami kemukakan diatas tidak terjadi lagi. Justru sebaliknya, kita harus lebih mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Saat ini, kehidupan dan perekonomian masyarakat kita masih berada pada kondisi sulit, sementara biaya kebutuhan hidup semakin meningkat.

Sdr. Walikota, pimpinan DPRD serta para hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan pendapat akhir terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah setelah melalui fasilitasi dari Gubernur Propinsi Sumatera Barat.

Ranperda ini telah dihantarkan secara resmi oleh Walikota, kemudian dilakukan pembahsaan antara Pansus bersama pemerintah kota Bukittinggi, dimana pada hari telah dijadwalkan dalam Bamus DPRD untuk penyampaian pendapat akhir fraksi sebagai bahagian yang tidak terpisahkan.

Pimpinan rapat dan hadirin yang berbahgia.



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**  
**DPRD KOTA BUKITTINGGI**

Demikianlah pendapat akhir ini kami sampaikan. Akhirnya dengan membacakan Bismillahirrahmaanirrahim, kami Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima dan menyetujui kedua ranperda diatas ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dan sesegeranya diundangkan dalam lembaran daerah.

Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan.

Wabillahi taufiq wai hidayah

Wassalamualaikum wr wb,

Bukittinggi, 20 Juli 2023

Fraksi Partai Golongan Karya

1. Edison Katik Basa, SE. MBA

2. H. Syafril, S.ST. Par

.....

3. Ir. Jon Edwar

.....



**NOTA PERSETUJUAN BERSAMA  
ANTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
DENGAN  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 170 / 02 / NPB-DPRD/2023

Nomor : 180 / 03 / Huk-E/2023

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh tiga** (20-07-2023), bertempat di Bukittinggi, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. BENY YUSRIAL, S.IP** : selaku Ketua DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-731-2021 tanggal 20 September 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi,
- NUR HASRA, B.Sc** : selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-685-2019 tanggal 23 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi,
- RUSDY NURMAN, SH** : selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-841-2019 tanggal 8 November 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi,
- secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama DPRD Kota Bukittinggi, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. H. ERMAN SAFAR, S.H.** : selaku Walikota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, beralamat di Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah, Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Persetujuan Bersama tentang

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan :

1. Pasal 241 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Pembahasan Rapat Paripurna Internal DPRD pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Persetujuan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Nota Persetujuan Bersama ini bertujuan untuk :
  - a. Memenuhi ketentuan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  - b. Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

### **Pasal 2 OBYEK DAN RUANG LINGKUP**

Obyek dan ruang lingkup dalam Nota Persetujuan Bersama ini adalah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah.

**Pasal 3**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Persetujuan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**PENUTUP**

Nota Persetujuan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masingnya untuk PARA PIHAK dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
WALIKOTA BUKITTINGGI,  
  
SAFAR, SH

PIHAK PERTAMA  
KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI,

  
BENY YUSRIAL, S.IP

WAKIL KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI,

  
NUR HASRA, B.Sc

WAKIL KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI,

  
RUSDY NURMAN, SH

Lampiran : Nota Persetujuan Bersama DPRD Kota dan Pemerintah Kota Bukittinggi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022

### 1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	130.796.925.183,85
b. Pendapatan Transfer	Rp.	567.387.873.682,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	217.587.457,37
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>698.402.386.323,22</b>

### 2. BELANJA DAERAH

a. Belanja Operasi		
1) Belanja Pegawai	Rp.	301.384.096.541,66
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	264.544.058.412,28
3) Belanja Subsidi	Rp.	2.910.989.266,00
4) Belanja Hibah	Rp.	40.192.987.711,16
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.230.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>Rp.</b>	<b>611.262.131.931,10</b>

b. Belanja Modal		
1) Belanja Modal Tanah	Rp.	0,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	48.131.479.720,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	25.739.508.574,06
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp.	45.500.951.384,50
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	4.633.690.566,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>Rp.</b>	<b>124.005.630.244,56</b>

c. Belanja Tidak Terduga		
1) Belanja Tidak Terduga	Rp.	271.437.350,00
<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Rp.</b>	<b>271.437.350,00</b>

d. Belanja Transfer		
1) Belanja Transfer	Rp.	8.520.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>Rp.</b>	<b>8.520.000.000,00</b>

**JUMLAH BELANJA** **Rp.** **744.059.199.525,66**

**SURPLUS / (DEFISIT)** **Rp.** **(45.656.813.202,44)**

**3. PEMBIAYAAN**

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	132.979.000.890,90
b. Pengeluaran	Rp.	10.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	122.979.000.890,90
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	<b>Rp.</b>	<b>77.322.187.688,46</b>

Bukittinggi, Juli 2023



PIHAK PERTAMA  
KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI

BENY YUSRIAL, S.IP

WAKIL KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI

NUR HASRA, B.Sc

WAKIL KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI

RUSDY NURMAN, SH





## WALIKOTA BUKITTINGGI

Jln. Kusuma Bhakti Bukik Gulai Bancah Bukittinggi 26122 – Sumatera Barat  
Telp. : (0752) 33369 – 21879 Fax.:(0752) 32767

Bukittinggi, 14 Agustus 2023 M  
Muharram 1445 H

Nomor : 905/ 902 /BK.05/VIII-2023  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Penyampaian Tindak Lanjut/Tanggapan  
Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat  
Nomor : 903- -2023

Kepada, Yth;  
Bapak Gubernur Sumatera Barat  
di Padang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-~~905~~-2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bersama ini disampaikan tindak lanjut/tanggapan beserta Keputusan Ketua DPRD Kota Bukittinggi Nomor : 170/ 01 / Kpts-DPRD/2023 tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Bukittinggi Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 dan kelengkapan lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dapat diproses lebih lanjut, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



LAMPIRAN SURAT WALI KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 905/982/BK.05/VIII/2023

TANGGAL : 14 Agustus 2023

TENTANG : Tindak Lanjut/Tanggap atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903 - 585 - 2023.

MATRIKS PENJELASAN DAN TINDAK LANJUT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 903-585-2023 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
1	2	3	4	5
A.	<p>Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.</p>	<p>1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah telah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.</p> <p>2. Nomenklatur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan telah disajikan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.</p> <p>3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.</p>	<p>Ke depannya, Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap konsisten menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi akan tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan</p>
B.	<p>LEGALITAS</p> <p>1. Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.</p>	<p>1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Wali Kota Bukittinggi dan DPRD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang</p>	<p>a. Ke depannya, Pemerintah Kota Bukittinggi dan DPRD harus mematuhi tahapan dan jadwal proses Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan</p>	<p>a. Pemerintah Kota Bukittinggi akan mematuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan serta berupaya untuk mengefektifkan proses pembahasan</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
		<p>Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 20232, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan AP</p> <p>a. Wali Kota Bukittinggi telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kota Bukittinggi untuk dibahas bersama melalui surat Wali Kota Nomor 905/652/BK.05/VI.2023 tanggal 7 Juni 2023. Hal ini <b>sudah sesuai</b> dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 disampaikan Wali Kota Bukittinggi ke DPRD pada tanggal 7 Juni 2023, dan telah mendapatkan persetujuan bersama dari DPRD Kota Bukittinggi pada tanggal 20 Juli 2023. Hal ini <b>telah sesuai</b> dengan Pasal 194 ayat (1) dan (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Kepala Daerah menyampaikan</p>	<p>serta berupaya untuk memfektifkan pembaharuan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lama 1 (satu) bulan semenjak Rancangan Perda tersebut disampaikan oleh Bupati ke DPRD.</p>	<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lama 1 (satu) bulan semenjak Rancangan Perda tersebut disampaikan oleh Walikota ke DPRD.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN / PERTANYAAN	TINDAK LANJUT / TANGGAPAN / HASIL KOREKSI
		<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun <b>belum memenuhi</b> Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.</p> <p>c. Persetujuan Bersama antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 20 Juli 2022, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 24 Juli 2022, <b>sudah sesuai</b> dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang</p>		

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI																								
		<p>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.</p> <p>2. Kelengkapan Dokumen</p> <p>Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 <b>telah sesuai</b> dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Kenda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022</p>																										
C.	KEBIJAKAN																											
1	Laporan Realisasi Anggaran																											
a	Pendapatan Daerah																											
1)	Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah																											
a)	Pajak Daerah	<p>Memperhatikan gambaran data di atas, realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018, 2019 dan 2022 belum memenuhi target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 telah memenuhi target.</p>	<p>Berkemauan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap cermat dan rasional dalam menetapkan target anggaran setiap objek pendapatan APBD, sehingga perencanaan target tersebut tetap rasional. Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi akan lebih cermat dalam menetapkan target pajak dengan mempertimbangkan potensi dan pencapaian realisasi pendapatan Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya dan tetap intensif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut tetap rasional.</p>																								
	<table border="1" data-bbox="381 640 414 1096"> <thead> <tr> <th>TA</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>47.068.136.193,00</td> <td>45.131.235.075,00</td> <td>95,88</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>47.413.135.193,00</td> <td>45.204.119.636,00</td> <td>95,34</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>31.278.967.000,00</td> <td>35.857.033.610,00</td> <td>114,64</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>37.070.692.210,00</td> <td>40.765.025.893,00</td> <td>109,97</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>50.269.852.262,00</td> <td>49.570.750.398,00</td> <td>98,61</td> </tr> </tbody> </table>	TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2018	47.068.136.193,00	45.131.235.075,00	95,88	2019	47.413.135.193,00	45.204.119.636,00	95,34	2020	31.278.967.000,00	35.857.033.610,00	114,64	2021	37.070.692.210,00	40.765.025.893,00	109,97	2022	50.269.852.262,00	49.570.750.398,00	98,61			
TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%																									
2018	47.068.136.193,00	45.131.235.075,00	95,88																									
2019	47.413.135.193,00	45.204.119.636,00	95,34																									
2020	31.278.967.000,00	35.857.033.610,00	114,64																									
2021	37.070.692.210,00	40.765.025.893,00	109,97																									
2022	50.269.852.262,00	49.570.750.398,00	98,61																									

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI																																										
b)	Retribusi Daerah Gambaran realisasi pendapatan retribusi daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d 2021), sebagaimana tabel berikut : <table border="1" data-bbox="402 1621 673 2195"> <thead> <tr> <th>TA</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>2</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>3</th> <th>%</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>38.216.489.567,00</td> <td></td> <td>29.942.903.285,00</td> <td></td> <td>78,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>49.311.930.925,00</td> <td></td> <td>33.125.468.779,75</td> <td></td> <td>97,18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>24.474.011.211,00</td> <td></td> <td>21.833.603.342,00</td> <td></td> <td>89,21</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>25.609.269.920,00</td> <td></td> <td>27.401.880.431,00</td> <td></td> <td>107,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>48.084.034.000,00</td> <td></td> <td>46.662.398.969,00</td> <td></td> <td>95,85</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TA	Anggaran (Rp)	2	Realisasi (Rp)	3	%	4	2018	38.216.489.567,00		29.942.903.285,00		78,35		2019	49.311.930.925,00		33.125.468.779,75		97,18		2020	24.474.011.211,00		21.833.603.342,00		89,21		2021	25.609.269.920,00		27.401.880.431,00		107,00		2022	48.084.034.000,00		46.662.398.969,00		95,85		Dari data tersebut di atas, realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari Tahun 2018, 2019 dan 2020 dan 2022 belum optimal dalam pencapaian target. Untuk Tahun 2021, telah memenuhi target yang ditetapkan.	Untuk itu pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus lebih rasional dalam menetapkan target pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhatikan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.	Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi akan lebih rasional dalam menetapkan target pendapatan Retribusi Daerah dengan dengan memperhitungkan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.
TA	Anggaran (Rp)	2	Realisasi (Rp)	3	%	4																																								
2018	38.216.489.567,00		29.942.903.285,00		78,35																																									
2019	49.311.930.925,00		33.125.468.779,75		97,18																																									
2020	24.474.011.211,00		21.833.603.342,00		89,21																																									
2021	25.609.269.920,00		27.401.880.431,00		107,00																																									
2022	48.084.034.000,00		46.662.398.969,00		95,85																																									

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI																												
c)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan																															
1	<p>Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="487 739 730 1108"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>%</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>3.448.620.797,00</td> <td>4.935.906.024,00</td> <td>143,13</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>6.100.469.303,00</td> <td>6.071.910.132,00</td> <td>99,53</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>6.331.956.191,00</td> <td>6.331.956.191,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>5.482.031.608,00</td> <td>5.482.031.608,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>7.505.000.000,00</td> <td>6.641.291.925,00</td> <td>88,49</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	1	2	3	4	2018	3.448.620.797,00	4.935.906.024,00	143,13	2019	6.100.469.303,00	6.071.910.132,00	99,53	2020	6.331.956.191,00	6.331.956.191,00	100,00	2021	5.482.031.608,00	5.482.031.608,00	100,00	2022	7.505.000.000,00	6.641.291.925,00	88,49	<p>Memperhatikan gambaran realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari tahun 2018, 2020, 2021 dan 2022 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan kecuali pada tahun 2019.</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun mendatang Bukittinggi pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, dalam menetapkan target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan supaya memperhatikan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya dan kondisi perkiraan pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun mendatang akan menetapkan target pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu serta mempedomani tren realisasi di tahun-tahun sebelumnya dan kondisi perkiraan pertumbuhan ekonomi.</p>
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%																													
1	2	3	4																													
2018	3.448.620.797,00	4.935.906.024,00	143,13																													
2019	6.100.469.303,00	6.071.910.132,00	99,53																													
2020	6.331.956.191,00	6.331.956.191,00	100,00																													
2021	5.482.031.608,00	5.482.031.608,00	100,00																													
2022	7.505.000.000,00	6.641.291.925,00	88,49																													
d)	<p>Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1104 739 1380 1108"> <thead> <tr> <th>TA</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>%</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>14.005.004.528,00</td> <td>21.926.729.842,61</td> <td>156,56</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>14.288.597.206,00</td> <td>27.495.098.062,80</td> <td>192,43</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>15.148.273.128,00</td> <td>20.065.069.357,62</td> <td>103,53</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>23.948.534.818,00</td> <td>18.137.350.353,61</td> <td>93,47</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>29.798.905.194,00</td> <td>27.922.483.891,85</td> <td>93,70</td> </tr> </tbody> </table>	TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	1	2	3	4	2018	14.005.004.528,00	21.926.729.842,61	156,56	2019	14.288.597.206,00	27.495.098.062,80	192,43	2020	15.148.273.128,00	20.065.069.357,62	103,53	2021	23.948.534.818,00	18.137.350.353,61	93,47	2022	29.798.905.194,00	27.922.483.891,85	93,70	<p>Memperhatikan daftar di atas, dalam kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 realisasi Lain-lain PAD yang Sah sudah memenuhi target yang ditetapkan. Namun di tahun 2021 dan 2022 realisasi Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan.</p>	<p>Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2022 yang meningkat dibandingkan penerimaan tahun 2021 disebabkan banyaknya pengembalian ke Kas Daerah yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan yang bukan merupakan gambaran dari kinerja pendapatan itu sendiri. Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kota Bukittinggi karena Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Kota Bukit Tinggi.</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi akan lebih memperhatikan lagi dalam menetapkan target Lain-lain PAD yang Sah sebagai salah satu sumber PAD yang cukup potensial bagi Pemerintah Kota Bukit Tinggi serta berupaya dalam meminimalisir temuan pemeriksaan sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja pemerintah.</p>
TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%																													
1	2	3	4																													
2018	14.005.004.528,00	21.926.729.842,61	156,56																													
2019	14.288.597.206,00	27.495.098.062,80	192,43																													
2020	15.148.273.128,00	20.065.069.357,62	103,53																													
2021	23.948.534.818,00	18.137.350.353,61	93,47																													
2022	29.798.905.194,00	27.922.483.891,85	93,70																													

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
2)	Pendapatan Transfer	-	Pendapatan Transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus lebih cermat dalam menetapkan target pendapatan transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.	Pemerintah Kota Bukittinggi telah mempedomani alokasi Pendapatan Transfer sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan akan meningkatkan konsolidasi internal dan lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah ataupun ditingkat pemerintah pusat.
3)	Lain-lain Pendapatan Daerah, yang Sah	Meningkatnya penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2022 dibandingkan penerimaan tahun 2021 disebabkan banyaknya pengembalian ke Kas Daerah yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan yang bukan merupakan gambaran dari kinerja pendapatan itu sendiri.	Fada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus cermat dalam menetapkan target setiap objek Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan potensi yang dimiliki.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2022 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.



No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
				<p>Adapun realisasi Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terrealisasi sebesar Rp217.587.457,37 merupakan pengembalian temuan pemeriksaan dan pengembalian sisa Belanja Hibah tahun 2021 oleh para penerima hibah. Pendapatan tersebut sebelumnya tidak dianggarkan, idealnya jika ada pengembalian belanja adalah ke Pos Lain-lain PAD yang Sah, namun tidak ditemukan rekening yang dibutuhkan pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang akhirnya Pemerintah Kota Bukittinggi mencatat pada rekening Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi akan lebih cermat dalam menetapkan target setiap objek Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan potensi yang dimiliki</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
4) a b	<p>Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, sebagai berikut:</p> <p>a) Realisasi Pendapatan yang telah melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD 5 SKPD.</p> <p>b) Realisasi pendapatan yang belum memenuhi target yang dianggarkan dalam APBD 2 SKPD.</p> <p>c) Pendapatan yang belum terealisasi sama sekali antara lain pada Dinas Pertanian dan Pangan.</p>	<p>Secara umum, permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain:</p> <p>1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu.</p> <p>3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.</p>	<p>Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:</p> <p>1) Menetapkan target Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>2) Menetapkan prognosis laporan realisasi retribusi, hasil pengelolaan keuangan daerah yang sah dan lain-lain PAD semester pertama, bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran pendapatan dan lain lain PAD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatannya.</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang akan lebih memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya, serta melakukan langkah-langkah sebagaimana saran evaluasi sebagai berikut:</p> <p>1) Menetapkan target Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>2) Menetapkan prognosis laporan realisasi retribusi, hasil pengelolaan keuangan daerah yang sah dan lain-lain PAD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran pendapatan retribusi dan lain lain PAD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatannya.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
			<p>3) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.</p> <p>4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kota Bukittinggi.</p> <p>5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.</p> <p>6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.</p> <p>7) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.</p> <p>8) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan</p>	<p>3) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.</p> <p>4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kota Bukittinggi.</p> <p>5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.</p> <p>6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.</p> <p>7) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.</p> <p>8) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI																								
b.	Belanja Daerah dan Transfer		Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.	scws, Bangun Guna Scrah (BGS)/Bangun Scrah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.																								
1)	Belanja Daerah		9) Mempercepat dan mempermudah elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	9) Mempercepat dan mempermudah elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi																								
(1)	Belanja Operasi	Persentase capaian realisasi belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung berfluktuasi dan persentase capaiannya masih dibawah target yang dianggarkan.	Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan access maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.	Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Perhitungan gaji dan tunjangan ASN, tetap akan memperhitungkan access maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.																								
	1. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp301.384.096.541,66 atau 92,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp325.444.707.669,00.																											
	2. Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :																											
	<table border="1" data-bbox="990 1601 1266 2192"> <thead> <tr> <th>TA</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>380.815.634.884,42</td> <td>352.055.439.698,03</td> <td>92,45</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>381.297.144.993,61</td> <td>362.187.753.715,82</td> <td>94,99</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>379.536.027.596,00</td> <td>360.230.406.322,57</td> <td>94,91</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>322.664.639.155,00</td> <td>296.371.615.565,25</td> <td>91,85</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>325.444.707.669,00</td> <td>301.384.096.541,66</td> <td>92,16</td> </tr> </tbody> </table>	TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2018	380.815.634.884,42	352.055.439.698,03	92,45	2019	381.297.144.993,61	362.187.753.715,82	94,99	2020	379.536.027.596,00	360.230.406.322,57	94,91	2021	322.664.639.155,00	296.371.615.565,25	91,85	2022	325.444.707.669,00	301.384.096.541,66	92,16			
TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%																									
2018	380.815.634.884,42	352.055.439.698,03	92,45																									
2019	381.297.144.993,61	362.187.753.715,82	94,99																									
2020	379.536.027.596,00	360.230.406.322,57	94,91																									
2021	322.664.639.155,00	296.371.615.565,25	91,85																									
2022	325.444.707.669,00	301.384.096.541,66	92,16																									

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI																								
(2)	<p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>1. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp264.544.058.412,28 atau 87,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp301.912.139.291,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja.</p> <p>2. Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="207 648 427 1103"> <thead> <tr> <th>TA</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>191.286.599.420,80</td> <td>155.879.355.960,03</td> <td>81,49</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>182.167.460.600,27</td> <td>150.771.650.352,64</td> <td>82,77</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>149.565.919.990,10</td> <td>116.356.834.683,56</td> <td>77,80</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>295.562.732.925,00</td> <td>236.689.663.677,43</td> <td>80,08</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>301.912.139.291,00</td> <td>264.544.058.412,28</td> <td>87,62</td> </tr> </tbody> </table>	TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2018	191.286.599.420,80	155.879.355.960,03	81,49	2019	182.167.460.600,27	150.771.650.352,64	82,77	2020	149.565.919.990,10	116.356.834.683,56	77,80	2021	295.562.732.925,00	236.689.663.677,43	80,08	2022	301.912.139.291,00	264.544.058.412,28	87,62	<p>Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Barang realisasi sebesar Rp45.252.903.639,74 atau 85,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp52.636.885.429,00.</li> <li>2. Belanja Jasa terrealisasi sebesar Rp141.940.212.404,68 atau 90,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp157.512.299.151,00.</li> <li>3. Belanja Pemeliharaan terrealisasi sebesar Rp22.663.628.650,86 atau 78,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.712.176.742,00.</li> <li>4. Belanja Perjalanan Dinas realisasi sebesar Rp38.444.404.647,00 atau 86,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.438.835.988,00</li> <li>5. Belanja Uang dan Jasa untuk diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak lain/Masyarakat realisasi sebesar Rp2.751.096.770,00 atau 89,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.080.650.000,00.</li> <li>6. Belanja Barang dan Jasa BLUD terrealisasi sebesar Rp2.393.517.628,00 atau 58,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.107.857.277,00.</li> </ol> <p>b. Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cukup fluktuatif, pada tahun 2021 dan 2022 capaian realisasinya secara nominal dan persentase mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.</p>	<p>a. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Barang dan Jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasi nya di prediksi tidak optimal tidak optimal dapat dilakukan perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>b. Kedepan agar dilakukan rekonsiliasi secara berkala antara Dinas Pendidikan dengan sekolah dan BKD jika pada tahun berjalan diprediksi realisasi akan melebihi anggaran agar dilakukan penyesuaian anggaran pada perubahan APBD.</p> <p>c. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap cermat dalam merencanakan dan melaksanakan belanja barang dan jasa.</p>	<p>a. Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan setiap objek Belanja Barang dan Jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasi nya di prediksi tidak optimal dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>b. Selain itu kedepan Pemerintah Kota Bukittinggi akan melakukan rekonsiliasi secara berkala antara Dinas Pendidikan dengan sekolah dan Badan Keuangan jika pada tahun berjalan diprediksi realisasi akan melebihi anggaran agar dilakukan penyesuaian anggaran pada perubahan APBD.</p> <p>c. Pemerintah Kota Bukittinggi juga akan lebih cermat dalam merencanakan dan melaksanakan belanja barang dan jasa.</p>
TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%																									
2018	191.286.599.420,80	155.879.355.960,03	81,49																									
2019	182.167.460.600,27	150.771.650.352,64	82,77																									
2020	149.565.919.990,10	116.356.834.683,56	77,80																									
2021	295.562.732.925,00	236.689.663.677,43	80,08																									
2022	301.912.139.291,00	264.544.058.412,28	87,62																									
(3)	Belanja Subsidi	<p>Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Padang Panjang mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp3.385.520.000,00 dari anggaran tersebut terrealisasi sebesar Rp2.910.989.266,00, atau 85,98%.</p>																										

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI																											
(4)	Belanja Hibah	Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.192.987.711,16,00 atau 94,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.425.478.526,00.																													
(5)	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.230.000.000,00 atau 98,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.255.000.000,00.																													
b)	<p>Belanja Modal Realisasi Belanja Modal sebesar Rp124.005.630.244,56 atau 83,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp147.955.769.352,00.</p> <p>Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah :</p> <p>(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp48.131.479.720,00 atau 79,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.312.518.236,00.</p> <p>(2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp25.739.508.574,06 atau 77,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.140.307.759,00.</p> <p>(3) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp45.500.951.384,50 atau 91,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp49.760.228.857,00.</p> <p>(4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp4.633.690.566 atau 97,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.742.714.500,00.</p> <p>Gambaran capaian realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut:</p>	<p>1. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp124.005.630.244,56 atau 83,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp147.955.769.352,00. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah.</p> <p>2. Dari tabel di atas terlihat bahwa 5 (lima) tahun terakhir, realisasi Belanja Modal belum mencapai target. Pada tahun 2022, secara persentase dan nominal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.</p>	<p>Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Bukittinggi akan tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Bukittinggi akan tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1214 643 1263 766">TA</th> <th data-bbox="1214 766 1263 889">Anggaran (Rp)</th> <th data-bbox="1214 889 1263 1012">Realisasi</th> <th data-bbox="1214 1012 1263 1103">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1263 643 1295 766">1</td> <td data-bbox="1263 766 1295 889">2</td> <td data-bbox="1263 889 1295 1012">3</td> <td data-bbox="1263 1012 1295 1103">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1295 643 1328 766">2018</td> <td data-bbox="1295 766 1328 889">240.718.542.106,00</td> <td data-bbox="1295 889 1328 1012">178.070.817.194,00</td> <td data-bbox="1295 1012 1328 1103">73,95</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1328 643 1360 766">2019</td> <td data-bbox="1328 766 1360 889">304.079.090.833,00</td> <td data-bbox="1328 889 1360 1012">187.986.455.096,79</td> <td data-bbox="1328 1012 1360 1103">61,82</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1360 643 1393 766">2020</td> <td data-bbox="1360 766 1393 889">260.642.105.432,00</td> <td data-bbox="1360 889 1393 1012">249.317.613.815,34</td> <td data-bbox="1360 1012 1393 1103">95,66</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1393 643 1425 766">2021</td> <td data-bbox="1393 766 1425 889">123.125.748.792,00</td> <td data-bbox="1393 889 1425 1012">93.038.635.113,33</td> <td data-bbox="1393 1012 1425 1103">75,56</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1425 643 1458 766">2022</td> <td data-bbox="1425 766 1458 889">147.955.769.352,00</td> <td data-bbox="1425 889 1458 1012">124.005.630.244,56</td> <td data-bbox="1425 1012 1458 1103">83,81</td> </tr> </tbody> </table>	TA	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	1	2	3	4	2018	240.718.542.106,00	178.070.817.194,00	73,95	2019	304.079.090.833,00	187.986.455.096,79	61,82	2020	260.642.105.432,00	249.317.613.815,34	95,66	2021	123.125.748.792,00	93.038.635.113,33	75,56	2022	147.955.769.352,00	124.005.630.244,56	83,81		
TA	Anggaran (Rp)	Realisasi	%																												
1	2	3	4																												
2018	240.718.542.106,00	178.070.817.194,00	73,95																												
2019	304.079.090.833,00	187.986.455.096,79	61,82																												
2020	260.642.105.432,00	249.317.613.815,34	95,66																												
2021	123.125.748.792,00	93.038.635.113,33	75,56																												
2022	147.955.769.352,00	124.005.630.244,56	83,81																												

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
c)	Belanja Tak Terduga	Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp271.437.350,00 atau 5,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00.		
2)	Belanja Transfer	Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp8.520.000.000,00 atau 97,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.766.666.667,00 terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan yang merupakan bantuan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat		
3)	<p>Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi, antara lain :</p> <p>(1) Dinas Kesehatan antara lain pada sub kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, realisasi sebesar Rp6.527.705.873,14 atau 42,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.438.301.768,00.</li> <li>- Operasional Pelayanan Puskesmas, realisasi sebesar Rp2.145.838.244,00 atau 65,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.277.093.001,00.</li> <li>- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp235.500.000,00.</li> </ul> <p>(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain pada sub kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, realisasi sebesar Rp1.304.189.052,96 atau 21,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.060.278.680,00.</li> <li>- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, realisasi sebesar Rp521.245.968,00 atau 57,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp908.261.168,00.</li> <li>- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase, realisasi sebesar Rp1.574.018.458,00 atau</li> </ul>	<p>Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakannya.</li> <li>2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.</li> <li>3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan isintansi terkait khususnya dana transfer DAK.</li> <li>4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diayarkannya sebelumnya.</li> <li>5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaannya bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebatmana yang</li> </ol>	<p>Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain:</p>	<p>Dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2022 telah dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh dari pemerintah daerah.</p> <p>Pemerintah Kota Bukittinggi akan melakukan langkah-langkah strategis sesuai dengan hasil evaluasi ini antara lain dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.</li> <li>2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan kegiatan melalui laporan peranggungjawaban Bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah</li> </ol>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
	<p>63,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.486.072.615,00.</p> <p>Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG, realisasi sebesar Rp120.992.000,00 atau 33,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp356.260.250,00.</p>	<p>telah diatur dalam jukninya.</p>	<p>diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat diakhiri sebagian untuk memandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.</p> <p>5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APFP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, revidi serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi</p>	<p>atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk memandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.</p> <p>5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APFP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, revidi serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai</p>



No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
			<p>kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.</p> <p>7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.</p> <p>8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.</p> <p>9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.</p> <p>10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.</p>	<p>dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.</p> <p>7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.</p> <p>8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.</p> <p>9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.</p> <p>10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI																												
c	<p><b>PEMBIAYAAN</b></p> <p>Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp77.322.187.688,46 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp837.145.281.505,00 adalah 9,24%.</p> <p>Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1003 1596 1390 2202"> <thead> <tr> <th>TA</th> <th>Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah (Rp)</th> <th>SILPA (Rp)</th> <th>Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja dan Transfer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>839.898.354.079,22</td> <td>95.915.280.573,88</td> <td>11,42%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>891.197.754.148,88</td> <td>114.068.610.748,60</td> <td>12,80%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>883.714.285.381,10</td> <td>99.386.026.235,08</td> <td>11,25%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>783.759.843.834,00</td> <td>132.987.559.855,90</td> <td>16,97%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>837.145.281.505,00</td> <td>77.322.187.688,46</td> <td>9,24%</td> </tr> </tbody> </table>	TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah (Rp)	SILPA (Rp)	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja dan Transfer	1	2	3	4	2018	839.898.354.079,22	95.915.280.573,88	11,42%	2019	891.197.754.148,88	114.068.610.748,60	12,80%	2020	883.714.285.381,10	99.386.026.235,08	11,25%	2021	783.759.843.834,00	132.987.559.855,90	16,97%	2022	837.145.281.505,00	77.322.187.688,46	9,24%	<p>Memperhatikan data tersebut diatas rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 berfluktuasi. Pada tahun 2022 rasio SILPA mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.</p>	<p>1)Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.</p>	<p>1)Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.</p>
TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah (Rp)	SILPA (Rp)	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja dan Transfer																													
1	2	3	4																													
2018	839.898.354.079,22	95.915.280.573,88	11,42%																													
2019	891.197.754.148,88	114.068.610.748,60	12,80%																													
2020	883.714.285.381,10	99.386.026.235,08	11,25%																													
2021	783.759.843.834,00	132.987.559.855,90	16,97%																													
2022	837.145.281.505,00	77.322.187.688,46	9,24%																													
			<p>Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan dengan nilai yang rasional.</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi telah memperhitungkan dengan cermat dan rasional proyekti SILPA Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.</p> <p>Kedepan Pemerintah Kota Bukittinggi akan lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan Belanja Daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan secara rasional.</p>																												

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
2	Neraca			
a	Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp105.597.334.644,95 dimana terjadi penurunan sebesar Rp(63.597.399.111.510) atau (37,59%) dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp169.194.733.756,46. Aset tersebut antara lain terdiri atas:			
1)	Saldo Kas Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 sebesar Rp77.322.424.486,46 yaitu : (a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp63.691.297.145,77. (b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7.020.824,00. (c) Kas BLUD sebesar Rp12.610.034.870,69. (d) Kas Dana BOS sebesar Rp1.014.071.646,00. (e) Kas BOP sebesar Rp202,00.	Memperhatikan data tersebut, terhadap huruf b) terlihat terjadi keterlambatan penyeteroran kas dari Bendahara Pengeluaran ke kas Daerah	Oleh karena itu Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyeteroran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah hal 232 huruf C	Terhadap saldo Kas sebagaimana huruf "b" dapat kami jelaskan bahwa kas tersebut bukan bagian Kas dalam pengertian Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UVHD) yang berasal dari dana UP/GU/TU namun saldo tersebut merupakan utang kepada BPJS tahun 2020 yang seharusnya sudah dibayar namun masih dipegang oleh Bendahara karena kesalahan dalam pemisalan rekening tujuan pada SP2D pembayaran.  Kedepan, Pemerintah Kota Bukittinggi akan tetap mengupayakan penyeteroran kas dilakukan tepat waktu paling lambat 31 Desember sesuai aturan yang berlaku antara lain sebagaimana amanat Permensdagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2)	Saldo Piutang Daerah i) Saldo Piutang Daerah (sebelum penyisihan) : Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp43.377.889.031,00 terdiri dari : a. Piutang Pajak Daerah sebesar Rp14.306.957.898,00. b. Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp12.046.237.364,00. c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp8.363.843.874,00. d. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp4.632.545.459,00.		1. Diharapkan dengan adanya aplikasi SISMIO-PBBP2 dapat diperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet  2. Berkemauan dengan piutang di atas Pemerintah Kota Bukittinggi	1. Pemerintah Kota Bukittinggi akan menyediakan semua aplikasi yang ada antara lain SIPADEH, SISMIO-PBBP2 dan data juga data manual untuk diperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet  2. Kedepan, Pemerintah Kota

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
	<p>e. Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp3.781.987.835,00.</p> <p>f. Piutang Lainnya sebesar Rp246.316.601,00.</p>		<p>harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kota Bukittinggi yang selengkap-lengkapnya. Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya.</p> <p>Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya</p>	<p>Bukittinggi akan berupaya melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai aset Pemerintah Kota Bukittinggi yang selengkap-lengkapnya. Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga akan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya.</p>
	<p>ii) Penyisihan Piutang Daerah Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp(21.330.836.015,00), yang meliputi:</p> <p>a. Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp(9.088.313.560,00).</p> <p>b. Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp(10.151.975.230,00).</p> <p>c. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp(1.844.230.624,00).</p> <p>d. Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp(246.316.601,00).</p>			<p>3. Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga akan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya.</p>
	<p>iii. Piutang Bersih Sehingga nilai bersih piutang sebesar 22.047.053.016,00, meliputi :</p> <p>1. Piutang Pajak Daerah sebesar Rp5.218.644.338,00.</p> <p>Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp1.894.262.134,00.</p> <p>2. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp8.363.843.874,00.</p> <p>3. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp2.958.338.601,00.</p> <p>4. Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp3.781.987.835,00.</p>			<p>4. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, akan tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya</p>
	<p>Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) sebagaimana angka (ii) tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut :</p> <p>a. Piutang Pajak yang bersumber dari:</p> <p>(1) Pajak Hotel sebesar Rp644.682.067,00.</p> <p>(2) Pajak Restoran sebesar Rp353.448.154,00.</p> <p>(3) Pajak Hiburan sebesar Rp10.059.954,00.</p> <p>(4) Pajak Reklame sebesar Rp926.902.863,00.</p> <p>(5) Pajak Penerangan jalan sebesar Rp400.000,00.</p> <p>(6) Pajak Parkir sebesar Rp1.096.520,00.</p> <p>(7) Pajak Air Tanah sebesar Rp14.839.340,00.</p> <p>(8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan</p>			

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
	<p>Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp12.243.202.829,00.</p> <p>(9) Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp112.326.171,00</p> <p>b. Piutang Retribusi bersumber antara lain dari:</p> <p>(1) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.865.698.764,00.</p> <p>(2) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp8.695.458.000,00.</p> <p>(3) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp485.080.600,00.</p> <p>c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari:</p> <p>(1) Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Bank Nagari sebesar Rp8.159.778.827,00.</p> <p>(2) Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) PT BPR Jam Gadang sebesar Rp476.657.587,00.</p> <p>d. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah terdiri dari:</p> <p>(1) Piutang Hasil Sewa BMD sebesar Rp823.226.551,00.</p> <p>(2) Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.857.054.133,00.</p> <p>(3) Piutang Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp37.181.354,00.</p> <p>(4) Piutang Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp235.565.177,00.</p> <p>(5) Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp816.613.850,00.</p> <p>(6) Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp20346.188,00.</p> <p>(7) Piutang Pendapatan HLUJ sebesar Rp828.648.900,00.</p> <p>(8) Piutang-piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp448.551,00.</p> <p>e. Piutang Transfer Antar Daerah bersumber dari:</p> <p>(1) PKB sebesar Rp1.625.842.081,00.</p> <p>(2) BBNKB sebesar Rp690.493.394,00.</p> <p>(3) PBBKB sebesar Rp1.456.366.220,00.</p> <p>(4) PAP sebesar Rp9.266.160,00.</p>			

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
3)	<p>f. Piutang Lainnya bersumber dari Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp246.316.601,00.</p> <p>Persediaan Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.525.720.925,49 mengalami penurunan sebesar (Rp1.607.709.506,67) atau (17,60%) dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.133.430.432,16.</p> <p>Saldo persediaan tersebut antara lain :</p> <p>a) Persediaan Bahan sebesar Rp271.606.475,00.  b) Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp2.947.394.573,00.  c) Persediaan Obat-obatan sebesar Rp3.880.177.079,49.  d) Persediaan untuk dijual/discrakan sebesar Rp411.822.798,00.</p>	<p>1) Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf c) merupakan persediaan obat-obatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Pertanian dan Pangan.</p> <p>2) Selain itu Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp411.822.798,00 yang antara lain berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p>	<p>1) Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.</p> <p>2) Diharapkan kedepannya terhadap Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan ini agar segera diserahterimakan pada saat kegiatan selesai dilaksanakan dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada SKPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.</p>	<p>1) Pemerintah Kota Bukittinggi akan melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak agar tidak berpotensi menurunnya kualitas persediaan.</p> <p>2) kedepannya terhadap Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan ini Pemerintah Kota Bukittinggi akan menyelesaikan serahterima pada saat kegiatan selesai dilaksanakan dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Pemerintah Kota Bukittinggi akan berupaya untuk lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
b.	<p>Investasi Jangka Panjang Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 sebesar Rp62.195.784.727,47 mengalami kenaikan sebesar Rp10.362.333.633,30 atau 19,90% dari tahun 2021 sebesar Rp51.833.451.094,17, dengan rincian sebagai berikut:</p>		<p>Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah serta Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.</p> <p>Terhadap Penyertaan Modal di BUMD yang belum memberikan kontribusi laba bagi daerah, maka Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus melakukan evaluasi dan langkah-langkah strategi untuk penyertaan perusahaan sehingga dapat berkinerja lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang sehingga dapat menyumbang PAD untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi.</p>	<p>Kedepan, Pemerintah Kota Bukittinggi akan tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.</p> <p>Terhadap Penyertaan Modal di BUMD yang belum memberikan kontribusi laba bagi daerah, maka Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus melakukan evaluasi dan langkah-langkah strategi untuk penyertaan perusahaan sehingga dapat berkinerja lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang sehingga dapat menyumbang PAD untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi.</p>
1)	<p>Investasi Jangka Panjang non permanen berupa investasi dana bergulir Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 sebesar Rp635.295.884,95 mengalami kenaikan sebesar Rp26.548.326,53 atau 4,01% dari tahun 2021 sebesar Rp661.844.211,48.</p>		<p>Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah serta Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.</p> <p>Terhadap Penyertaan Modal di BUMD yang belum memberikan kontribusi laba bagi daerah, maka Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus melakukan evaluasi dan langkah-langkah strategi untuk penyertaan perusahaan sehingga dapat berkinerja lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang sehingga dapat menyumbang PAD untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi.</p>	<p>Kedepan, Pemerintah Kota Bukittinggi akan tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.</p> <p>Terhadap Penyertaan Modal di BUMD yang belum memberikan kontribusi laba bagi daerah, maka Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus melakukan evaluasi dan langkah-langkah strategi untuk penyertaan perusahaan sehingga dapat berkinerja lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang sehingga dapat menyumbang PAD untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
2)	<p>Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp61.560.485.842,52 atau mengalami peningkatan sebesar Rp10.388.878.959,80 atau 20,03% dibandingkan dengan saldo Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp51.171.606.882,69 antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari sebesar Rp44.524.000.000,83.</li> <li>2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT.BPRS Jam Gadang Ferseroda sebesar Rp8.250.000.000,00.</li> <li>3) Penyertaan Modal Pemerintah daerah pada PDAM Jam Gadang sebesar Rp8.786.485.841,69.</li> </ol>	<p>Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan</p> <p>Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam neraca terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp1.147.432.277.019,89 sehingga nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.524.304.035.559,77 atau 83,28% dari nilai total aset Pemerintah Kota Bukittinggi.</p>	<p>Terkait pengelolaan terhadap aset tetap, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi harus optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta mengurangi terjadinya resiko hilang dan menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan daerah.</p> <p>Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penertiban atas penatausahaan aset tetap antara lain, meningkatkan kompetensi SDM, melakukan koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, Blmtek dan menyempurnakan SOP pengelolaan aset tetap.</p>	<p>Pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi akan lebih optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta mengurangi terjadinya resiko hilang dan menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan daerah.</p> <p>Selanjutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi akan mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penertiban atas penatausahaan aset tetap antara lain, meningkatkan kompetensi SDM, melakukan koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, Blmtek dan menyempurnakan SOP pengelolaan aset tetap.</p>
c	<p>Aset Tetap</p> <p>Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp992.779.645.697,30 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.024.836.242.663,87 terjadi kenaikan sebesar Rp32.056.596.966,57 atau 3,13% antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp566.289.788.505,20 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp566.209.588.505,20 terjadi penambahan sebesar Rp80.200.000,00 atau 0,01%.</li> <li>b. Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp406.665.021.112,66 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp346.346.890.953,31 terjadi peningkatan sebesar Rp60.318.130.159,35 atau 17,42%.</li> <li>c. Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.004.338.760.735,96 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp960.588.776.351,51 terjadi peningkatan sebesar Rp43.749.984.384,45 atau 4,55%.</li> <li>d. Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp672.744.182.570,34 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp623.922.585.555,15 terjadi</li> </ol>			



No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
	<p>peningkatan sebesar Rp48.821.597.015,19 atau 7,82%</p> <p>e. Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.169.875.091,80 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.677.779.197,80 terjadi penambahan sebesar Rp492.095.894,00 atau 1,60%.</p> <p>f. Konstruksi dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.618.883.121,17 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp65.149.630.115,64 terjadi penurunan sebesar (Rp27.530.746.994,47) atau (42,26%).</p>			
d	<p>Aset Lainnya</p> <p>Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 setelah akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi sebesar Rp21.758.833.807,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.358.975.351,00 terjadi penurunan sebesar Rp600.141.544,00 atau 2,68% antara lain berasal dari:</p> <p>1) Tegihan Jangka Panjang sebesar Rp56.959.498,00</p> <p>2) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp16.246.002.000,00.</p> <p>3) Aset Tak Berwujud sebesar Rp8.352.406.781,00.</p> <p>4) Aset Lain-lain sebesar Rp2.672.835.677,00.</p>		<p>1) Terhadap aset lain-lain yang dalam kondisi rusak berat, dalam penelusuran dan yang akan diserahteruskan, agar segera diambil langkah-langkah konkret dan strategis dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait, melakukan penertiban atas penatausahaan aset, dengan melakukan pemeliharaan, supervisi, bimtek dan penyempurnaan sistem prosedur pengelolaan aset.</p> <p>2) Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan langkah-langkah konkret dalam pengelolaan aset tersebut agar pemertan/aatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib untuk menghindari resiko potensi hilangnya aset lain-lain akibat tidak didukung data yang memadai dan akurat.</p>	<p>1) Pemerintah Kota Bukittinggi akan segera mengambil langkah-langkah konkret dan strategis dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait, melakukan penertiban atas penatausahaan aset, dengan melakukan pemeliharaan, supervisi, bimtek dan penyempurnaan sistem operasi dan prosedur pengelolaan aset.</p> <p>2) Pemko Bukittinggi akan terus melakukan Langkah-langkah konkret dalam pengelolaan aset lainnya agar pemanfaatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib, dan ke depan usaha-usaha konkret lainnya akan terus dilakukan.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
e	<p>Kewajiban Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.332.999.300,92 mengalami kenaikan sebesar Rp896.251.402,61 atau 7,84% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.436.747.898,31. Kewajiban per 31 Desember 2022 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) sebesar Rp237.000,00.</li> <li>2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp430.564.800,67.</li> <li>3) Utang Belanja sebesar Rp11.237.720.549,25 antara lain terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp6.240.714.248,00.</li> <li>b) Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp65.334.191,00.</li> <li>c) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.871.672.110,25.</li> </ol> </li> <li>4) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp664.476.951,00.</li> </ol>	-	<p>Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kota Bukittinggi harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kota Bukittinggi TA 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan</p>	<p>Dengan telah dicatatnya kewajiban jangka pendek pada Neraca Kota Bukittinggi Tahun 2022 pun telah dilakukan audit atas LKPD Tahun 2022, maka Pemko Bukittinggi berkewajiban menyediakan anggaran pada perubahan APBD Tahun 2023 dengan optimal, untuk membayar hutang/kewajiban tersebut kepada pihak yang berhak sebagaimana ditindaklanjutinya pengertian dari kewajiban jangka pendek sesuai PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban pada Lampiran 1 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.</p>
3	<p>LAPORAN OPERASIONAL (LO)</p> <p>Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp703.466.188.835,22 turun sebesar Rp(297.896.063.897,72) atau (29,75%) dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.001.362.252.732,94. Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp127.187.243.766,85 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp136.257.791.456,00 atau 93,34%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.506.989.601,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.269.852.262,00 atau 100,47%.</li> <li>2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp44.985.091.121,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran</li> </ol> </li> </ol>	<p>Berdasarkan data tersebut di samping, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Pajak-LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO yang merupakan hak Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan pencapaian besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023-</p>	<p>Laporan operasional adalah laporan kinerja ril tahun berjalan, maka Pemerintah Kota Bukittinggi akan menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan pencapaian target pendapatan daerah besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023-</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
	<p>Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp48.684.034.000,00 atau 92,40%.</p> <p>3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.363.843.874,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.505.000.000,00 atau 111,44%.</p> <p>4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.331.319.170,85 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp29.798.905.194,00 atau 78,30%.</p> <p>b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp565.023.737.353,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp577.899.930.194,00 atau 97,77%.</p>			
D.	<p><b>REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</b></p> <p>Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:</p> <p>1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA</p>	<p>Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselamatan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.</p>	<p>Kedepannya Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi selanjutnya akan terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan bagian dari fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
		<p>daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp744.059.199.525,66 dari anggaran sebesar Rp837.145.281.505,00 atau 88,88% telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keseluruhan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.</p>		
2.	<p>REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MANDATORY SPENDING)</p>	<p>a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan</p> <p>Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp197.776.468.337,00 atau 23,34% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp190.634.608.343,00 atau 25,62% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Bukittinggi.</p> <p>Perhitungan penentuan belanja fungsi pendidikan sebagaimana table Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi akan tetap berupaya secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Bukittinggi.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
		<p>b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan</p> <p>Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp112.773.539.283,00 atau 16,70% dari total anggaran Belanja Daerah di luar Gaji ASN. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp91.637.037.303,14 atau 15,84% dari total realisasi Belanja Daerah di luar Gaji ASN Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Kedepan Pemerintah Kota Bukittinggi akan berupaya tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
		<p>c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik</p> <p>Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp131.750.384.681,00 atau 30,54% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa Rp431.343.152.540,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp129.390.744.866,16 atau 30,00% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp129.390.744.866,16.</p> <p>Pemerintah Kota Bukittinggi belum merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh</p>	<p>Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi agar dalam merealisasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana tabel Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik.</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus mengupayakan mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana tabel Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN / PERTANYAAN	TINDAK LANJUT / TANGGAPAN / HASIL KOREKSI
		<p>persen) dari total belanja APBD dituar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamankan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeriharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.</p>		
3	<p>REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)</p>	<p>Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:</p> <p>a. SPM Bidang Pendidikan</p> <p>Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran</p>		

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
		<p>2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp52.044.258.820,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp50.680.800.361,68 atau 97,38% dari total anggaran. Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.</li> <li>2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.</li> <li>3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.</li> <li>4) 100% 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.</li> </ol> <p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.</p>	<p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.</p>	<p>Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang kesehatan ini dimana hanya terealisasi sebesar 83,07% dari yang dianggarkan dapat kami jelaskan bahwa secara</p>
b.	SPM Bidang Kesehatan	<p>Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp1.122.181.882,00 dan telah</p>	<p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.</p>	<p>Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang kesehatan ini dimana hanya terealisasi sebesar 83,07% dari yang dianggarkan dapat kami jelaskan bahwa secara</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
		<p>diralisasikan sebesar Rp932.165.660,00 atau 83,07% dari total anggaran. Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.</li> <li>2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.</li> <li>3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.</li> <li>4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.</li> <li>5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.</li> <li>6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.</li> <li>7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.</li> <li>8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.</li> <li>9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan</li> <li>10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan</li> <li>11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan Kesehatan</li> <li>12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.</li> </ol>	<p>Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang kesehatan ini dimana hanya tercalisir sebesar 83,07% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kota Bukittinggi untuk <b>memberikan penjelasan</b></p>	<p>umum output kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM sudah tercapai 100 %, dan seluruh aktivitas sudah terlaksana. Begitu juga barang dan jasa yang merupakan output kegiatan dan sub kegiatan telah terealisasi semuanya. Adapun sisa anggaran dari kegiatan dan sub kegiatan ini terjadi karena efisiensi belanja pengadaan barang dan jasa yang didapatkan di bawah standar biaya yang dimuat dalam DPA, terutama pengadaan alat dan bahan yang dipilih melalui e_katalog dengan kualitas yang sama, namun dapat diadakan dengan harga di bawah pagu.</p>



No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
	<p>c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Bukittinggi TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp418.253.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp353.769.336,40 atau 84,58% dari total anggaran. Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.</li> <li>2. 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.</li> </ol> <p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p>	<p>Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ini dimana hanya terelisir sebesar 84,58% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kota Bukittinggi untuk <b>memberikan penjelasan.</b></p>	<p>Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ini dimana hanya terelisir sebesar 84,58% dari yang dianggarkan, dapat kami jelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub kegiatan perluasan spam jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dimana masih ada sisa dana tdk ter spj kan 1 juta lebih namun realisasi fisik 100%</li> <li>2. Sub kegiatan fasilitasi penyediaan kerjasama spam, masih ada sisa dan yg belum di spj kan spt makan minum rapat dan sisa dana spped karena kurang optimalny penyerapan anggaran, namun realisasi fisik 100%;</li> <li>3. Sub kegiatan penyusunan rencana, kebijakan strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dlm daerah kab/kota, kegiatan ini melakukan penyusunan dokumen masterplan air limbah domestik dan terdapat sisa tender, dan utk makan minum rapat realisasi spj tidak terlalu besar krn hanya rapat d awal saja selebihnya didanai oleh penyedia jasa, dan realisasi spped dispj kan berdasarkan undangan rapat, pelatihan yg diikuti, namun kegiatan fisiknya terrealisasi 100%</li> </ol>	
	<p>d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>Pemerintah Kota Bukittinggi pada TA. 2022 belum menganggarkan alokasi belanja untuk SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah Kota Bukittinggi agar berkomitmen untuk memprioritaskan alokasi anggarannya</p>	<p>Sehubungan dengan tidak tersedianya alokasi anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam APBD Kota Bukittinggi TA 2022, maka diminta kepada Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memberikan penjelasan dan menyampaikan</p>	<p>Alokasi anggaran sesuai dengan Nomenklatur Program/Kegiatan Sub Urusan Perumahan KEMENDAGRI 050-5889/2021 belum tersedia pada T.A. 2022, namun Kota Bukittinggi telah melaksanakan pendataan rumah melalui pendataan Sistem Informasi Rumah Bukittinggi (SIRUB) pada lokasi rawan bencana dan daerah</p>	

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
		<p>guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.</li> <li>100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni.</li> </ol> <p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.</p>	<p>pernyataan tertulis bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi di masa yang akan datang akan berkomitmen untuk menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk pemenuhan seluruh SPM.</p>	<p>negative list sebagai Data Dasar dalam pemenuhan SPM Bidang perumahan Rakyat melalui Sub Kegiatan 1.04.02.2.06.01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik dengan total anggaran Rp. 503.686.380,00 dan realisasi sebesar Rp. 488.718.394,00 (97,03 %).</p> <p>Pada Tahun 2023 Dinas Perkim sudah menganggarkan kegiatan terkait dengan pemenuhan SPM yaitu Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota pada Sub Kegiatan identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan dengan anggaran sebesar Rp3.493.900.</p> <p>Dalam kesempatan tindak lanjut ini kami juga menyertakan pernyataan tertulis bahwa di masa yang akan datang akan berkomitmen untuk menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk pemenuhan seluruh SPM.</p>
		<p>e. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Bukittinggi TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dianggarkan sebesar Rp15.749.564.460,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.535.407.810,67 atau 92,29% dari total anggaran. Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:</p>		

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
		<p>1. 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara.</p> <p>2. 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.</p> <p>3. 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.</p> <p>4. 100%warga negara yang memperoleh layanan evakuasi korban bencana.</p> <p>5. 100%warga negara yang memperoleh layanan evakuasi korban kebakaran.</p> <p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kab/Kota dan Kab/Kota.</p>		
	<p>f. SPM Bidang Sosial</p> <p>Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Bukittinggi TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp761.070.242,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp558.336.364,00 atau 73,36% dari total anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Sosial untuk Kab/Kota yang terdiri dari:</p> <p>1. 100% warga negara penyandang</p>	<p>1. 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara.</p> <p>2. 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.</p> <p>3. 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.</p> <p>4. 100%warga negara yang memperoleh layanan evakuasi korban bencana.</p> <p>5. 100%warga negara yang memperoleh layanan evakuasi korban kebakaran.</p> <p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kab/Kota dan Kab/Kota.</p>	<p>Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dimana hanya terrealisasi 64,98% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kota Bukittinggi untuk <b>memberikan penjelasan</b>.</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2022 telah merealisasikan kinerja (output) kegiatan maupun sub kegiatan terkait dengan SPM Bidang Sosial secara optimal (100%), artinya seluruh keterlaksanaan yang ada telah ditangani secara baik, namun terjadi efisiensi belanja dikarenakan anggaran disediakan berpedoman kepada besaran anggaran tahun lalu</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAH/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
		<p>disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.</p> <p>2. 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.</p> <p>3. 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.</p> <p>4. 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.</p> <p>5. 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.</p> <p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kab/Kota dan di Daerah Kab/Kota.</p>		
4	REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	<p>Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp143.513.856,886,00 atau 29,15% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp68.441.396.876,00 atau 15,96% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar meningkatkan dan terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri</p>	<p>Kedepan, Pemerintah Kota Bukittinggi akan meningkatkan dan terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
5	REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	<p>realisasi Belanja Modal Tanah.</p> <p>Hal ini belum belum memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Wali Kota/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.</p>	<p>(TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).</p>	<p>(TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).</p>
		<p>Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp50.040.546.769,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.528.377.810,00 atau 23,04% dari yang ditargetkan.</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisasian dan penyetaraan program, kegiatan dan target kerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisasian dan penyetaraan program, kegiatan dan target kerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
6	REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	<p>Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (<i>under weight</i>) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar Rp1.116.235.600,00 atau 0,99% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp112.773.539.283,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp1001.176.812,00 atau 89,69% dari total alokasi dana yang dianggarkan.</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Happeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi akan mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas sebagaimana saran pada hasil evaluasi.</p>
7	REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi belum mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat</p>	<p>Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain Belanja Subsidi bunga atas Tabungas Utaman dan program kegiatan lainnya, namun kodepan akan mengoptimalkan penganggaran dan penggunaannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
II	<p>KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP BPK) BPK</p> <p>Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan</p>	<p>Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota Bukittinggi, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Dimutakhirkan.</li> <li>2. Kademahan Pengendalian Intern dalam Pemberian Ijin Pemasangan dan Pengelolaan Pajak Reklame.</li> <li>3. Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Memungut Retribusi dan Sewa atas Pemanfaatan Toko/Kios di Pasar Atas.</li> <li>4. Perekrutan Pegawai Non-ASN pada Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Sepenuhnya Berpedoman pada Ketentuan yang Berlaku Sehingga Membebani Keuangan Daerah.</li> <li>5. Data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang Dibayarkan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Tidak Akurat.</li> <li>6. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Pengeluaran Rill Sebesar Rp477.637.480,00.</li> <li>7. Penanggungjawaban Belanja Hibah pada KONI Tidak Lengkap Sebesar Rp27.948.734,00.</li> <li>8. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa pada 13 SKPD Minimal Sebesar</li> </ol>	<p>Terhadap temuan BPK tersebut di atas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kota Bukittinggi harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sejak diberikannya temuan-temuan tersebut telah dilakukan <i>action plan</i> oleh SKPD teknis yang dipanda dan dipantau secara berkala oleh APP Kota Bukittinggi, untuk kasus-kasus yang berindikasi administrasi telah hampir 100% dan untuk indikasi kerugian daerah telah banyak mengalami kemajuan.</p> <p>Terhadap temuan BPK tersebut kedepan, Pemerintah Kota Bukittinggi akan mengambil langkah konkrit untuk kemajuan tindak lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
III	LAIN-LAIN	<p>Rp7.175.089.967,41.</p> <p>9. Kekurangan Volume Lima Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Lima SKPD Sebesar Rp66.691.304,51 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp7.495.484,00.</p> <p>10. Kekurangan Volume Tujuh Paket Pekerjaan Jalan, Jigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUUR) Sebesar Rp212.645.498,82.</p> <p>11. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Seperuhnya Tertib.</p> <p>12. Pengelolaan Aset Kemitraan Pihak Ketiga pada Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Optimal.</p>	<p>Berkesamaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.</li> <li>2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi</li> </ol>	<p>Dalam rangka terus berupaya dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi akan tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai saran yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penerapan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.</li> <li>2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam</li> </ol>



No.	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI	SARAN/PERTANYAAN	TINDAK LANJUT/ TANGGAPAN/ HASIL KOREKSI
			<p>pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.</p> <p>3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur.</p>	<p>melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.</p> <p>3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur.</p>

Bukittinggi, 14 Agustus 2023

**WALIKOTA BUKITINGGI**



ERMAN SAFAR



**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 - 31402 - 34425 Padang  
<http://www.sumbarprov.go.id>, [biro\\_humas@sumbarprov.go.id](mailto:biro_humas@sumbarprov.go.id).

Padang, 11 Agustus 2023 M  
24 Muharram 1445 H

Nomor : 903/752/APKD/BPKAD-2023  
Lampiran : 2 (dua) rangkap  
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi  
Rancangan Peraturan Daerah  
tentang Pertanggungjawaban  
Pelaksanaan APBD Kota  
Bukittinggi Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.  
Wali Kota Bukittinggi  
di  
Bukittinggi

Sehubungan dengan Surat Wali Kota Bukittinggi Nomor 905/876/BK.05/VII-2023 tanggal 24 Juli 2022 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah selesai dievaluasi.

Berkenaan dengan itu, terlampir disampaikan Keputusan Gubernur dimaksud untuk dapat digunakan dalam penetapan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.



Sekretaris Daerah,

  
Drs. Hansastri, M.M.  
Pembina Utama  
NIP.196410131991031001

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Kota Bukittinggi;
3. Arsip.



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 585 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda tanggal 15 Maret 2023 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Bukittinggi segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Wali Kota Bukittinggi harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Wali Kota Bukittinggi segera menyampaikan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 11 Agustus 2023  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 903 - 585 - 2023

TANGGAL 11 AGUSTUS 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2022 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI  
KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

### HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KOTA BUKITTINGGI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN  
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

#### I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

##### A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp714.157.721.650,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp837.145.281.505,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp714.157.721.650,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp837.145.281.505,00 pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

Ke depannya, Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

## B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Wali Kota Bukittinggi dan DPRD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	905/652/BK.05/VI-2023	Diterima tanggal 7 Juni 2023	<b>Sesuai</b> , (paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
2	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	170/02/NPB-DPRD/2023 180/03/Huk-E/2023	20 Juli 2023	<b>Sesuai</b> , (paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir namun persetujuan bersama <i>belum memenuhi</i> 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD)
3	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi Gubernur	905/876/BK.05/VII-2023	Diterima tanggal 24 Juli 2023	<b>Sesuai</b> , (disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)

- a. Wali Kota Bukittinggi telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kota Bukittinggi untuk dibahas bersama melalui surat Wali Kota Nomor 905/652/BK.05/VI-2023 tanggal 7 Juni 2023. Hal ini **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, yaitu yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD Kota Bukittinggi pada tanggal 7 Juni 2023 dan persetujuan bersama antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani tanggal 20 Juli 2022, **sudah sesuai** dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat (3) dimana persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun **belum memenuhi** Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- c. Persetujuan Bersama antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 20 Juli 2022, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 24 Juli 2022, **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.

Ke depannya, Pemerintah Kota Bukittinggi dan DPRD **harus mematuhi** tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan serta berupaya untuk mengefektifkan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lama 1 (satu) bulan semenjak Rancangan Perda tersebut disampaikan oleh Bupati ke DPRD.

## 2. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas :



- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
    - a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
    - b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    - c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    - d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
  - 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - 3) Lampiran III : Laporan operasional;
  - 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
  - 5) Lampiran V : Neraca;
  - 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
  - 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
  - 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
  - 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
  - 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
  - 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
  - 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
  - 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
  - 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
  - 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
  - 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
  - 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
  - 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
  - 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
    - a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
    - b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
- 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
  - 2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

### C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

#### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

##### a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota sebesar Rp698.402.386.323,22 atau 97,79% dari target yang dianggarkan sebesar Rp714.157.721.650,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp25.522.667.196,39, atau naik 3,71% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp688.635.054.453,61.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

- 1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp130.796.925.183,85 atau 95,99% dari target yang dianggarkan sebesar Rp136.257.791.456,00. Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp44.471.503.270,39 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp91.786.288.185,61 atau naik sebesar 48,45%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :

##### a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp49.570.750.398,00 atau 98,61% sudah melebihi dari target yang dianggarkan sebesar Rp50.269.852.262,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi sebesar Rp9.504.826.369,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp40.765.025.893,00 atau naik 23,32%.

Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah :

- (1) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp16.203.259.513,00 atau 100,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.132.300.000,00.
- (2) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp967.282.188,00 atau 112,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp860.800.000,00.
- (3) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp6.268.267.602,00 atau 103,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.074.338.220,00.
- (4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), realisasi sebesar Rp13.896.515.896,00 atau 106,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.022.105.576,00.

Namun demikian, masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain :

- (1) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp6.907.203.972,00 atau 80,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.532.186.156,00.

- (2) Pajak Hiburan, realisasi sebesar Rp1.004.246.805,00 atau 92,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.088.022.310,00.
- (3) Pajak Parkir, realisasi sebesar Rp322.475.568,00 atau 80,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00.
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, realisasi sebesar Rp3.925.523.043,00 atau 95,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.090.100.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp47.068.135.193,00	Rp45.131.235.075,00	95,88
2019	Rp47.413.135.193,00	Rp45.204.119.636,00	95,34
2020	Rp31.278.967.000,00	Rp35.857.033.610,00	114,64
2021	Rp37.070.692.210,00	Rp40.765.025.893,00	109,97
2022	Rp50.269.852.262,00	Rp49.570.750.398,00	98,61

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berfluktuasi dan untuk tahun 2022 belum memenuhi target yang telah ditetapkan, namun secara nominal nilai realisasi nya lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Berkenaan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap cermat dan rasional dalam menetapkan target anggaran setiap objek pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target tersebut tetap rasional. Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp46.662.398.969,00 masih sangat jauh dari target yang dianggarkan sebesar Rp48.684.034.000,00 atau 95,85%. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp27.401.880.331,00 naik sebesar Rp21.282.153.669,00 atau 77,67%.

Belum optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah disebabkan oleh realiasi beberapa objek retribusi daerah belum mencapai target, antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum, terealisasi sebesar Rp1.305.794.000,00 atau 87,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00.
- (2) Retribusi Tempat Khusus Parkir realisasi sebesar Rp807.420.000,00 atau 67,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00.

- (3) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan, realisasi sebesar Rp8.941.077.094,00 atau 91,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.800.000.000,00.

Beberapa objek Pendapatan Retribusi Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, realisasi sebesar Rp709.272.000,00 atau 128,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp550.000.000,00.
- (2) Retribusi Pelayanan Pasar, realisasi sebesar Rp1.316.078.600,00 atau 103,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.272.500.000,00.
- (3) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus , realisasi sebesar Rp2.212.882.000,00 atau 110,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- (4) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, realisasi sebesar Rp459.680.000,00 atau 183,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp38.216.489.567,00	Rp29.942.903.285,00	78,35
2019	Rp49.311.930.925,00	Rp33.125.468.779,75	97,18
2020	Rp24.474.011.211,00	Rp21.833.603.342,00	89,21
2021	Rp25.609.269.920,00	Rp27.401.880.331,00	107,00
2022	Rp48.684.034.000,00	Rp46.662.398.969,00	95,85

Dari data tersebut di atas, selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi pendapatan Retribusi Daerah yang memenuhi target yang telah ditetapkan hanya pada tahun 2021. Pada tahun 2022 secara persentase belum memenuhi target yang telah ditetapkan namun secara persentase realisasinya jauh lebih tinggi dari pada realisasi tahun 2021.

Untuk itu kedepannya mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.641.291.925,00 atau 88,49% dari target yang dianggarkan sebesar Rp7.505.000.000,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi sebesar Rp2.022.968.392,00 atau naik 36,90% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.482.031.608,00.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp3.448.620.797,00	Rp4.935.906.024,00	143,13
2019	Rp6.100.469.303,00	Rp6.071.910.132,00	99,53
2020	Rp6.331.956.191,00	Rp6.331.956.191,00	100,00
2021	Rp5.482.031.608,00	Rp5.482.031.608,00	100,00
2022	Rp7.505.000.000,00	Rp6.641.291.925,00	88,49

Dari tabel di atas terlihat persentase realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2022 secara persentase realisasinya merupakan yang paling rendah selama 5 (lima) tahun terakhir.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, dalam menetapkan target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan supaya memperhatikan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya dan kondisi perkiraan pertumbuhan ekonomi.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.922.483.891,85 atau 93,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.798.905.194,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih tinggi sebesar Rp11.661.554.840,39 atau naik 64,30% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.137.350.353,61.

Realisasi penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 yang melebihi target yang dianggarkan yaitu:

- (1) Pendapatan Denda Pajak realisasi sebesar Rp334.802.457,00 atau 267,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian realisasi sebesar Rp2.663.715.363,70 atau 104,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.554.417.426,00.
- (3) Pendapatan BLUD realisasi sebesar Rp16.155.511.384,00 atau 104,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.438.301.768,00.

Sementara Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 belum mencapai target antara lain :

- (4) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan realisasi sebesar Rp632.792.049,00 atau 59,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.067.000.000,00.
- (5) Penerimaan Jasa Giro realisasi sebesar Rp2.639.172.489,00 atau 56,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.650.000.000,00.

- (6) Pendapatan Bunga realisasi sebesar Rp4.244.628.513,40 atau 73,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.750.000.000,00.

Selain itu, juga terdapat realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah yang tidak dianggarkan pada APBD TA.2022, antara lain :

- (1) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dengan realisasi sebesar Rp6.000.000,00.
- (2) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dengan realisasi sebesar Rp142.636.531,00.
- (3) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dengan realisasi sebesar Rp191.880.143,75.
- (4) Pendapatan Denda Retribusi dengan realisasi sebesar Rp180.043.745,00.
- (5) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan dengan realisasi sebesar Rp671.001.216,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp14.005.034.528,00	Rp21.926.729.842,61	156,56
2019	Rp14.288.597.206,00	Rp27.495.098.062,80	192,43
2020	Rp15.148.273.128,00	Rp20.065.069.357,62	103,53
2021	Rp23.948.534.818,00.	Rp18.137.350.353,61	93,47
2022	Rp29.798.905.194,00	Rp27.922.483.891,85	93,70

Memperhatikan daftar di atas, dalam kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 realisasi Lain-lain PAD yang Sah sudah memenuhi target yang ditetapkan. Namun di tahun 2021 dan 2022 realisasi Lain-lain PAD yang Sah belum memenuhi target yang ditetapkan. Namun secara nominal, pada tahun 2022 realisasinya merupakan yang paling tinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi harus rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki.

Meningkatnya penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2022 dibandingkan penerimaan tahun 2021 disebabkan banyaknya pengembalian ke Kas Daerah yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan yang bukan merupakan gambaran dari kinerja pendapatan itu sendiri.

Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kota Bukittinggi karena Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Kota Bukittinggi.

## 2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp567.387.873.682,00 atau 98,18% dari yang dianggarkan Rp.577.899.930.194,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp593.762.137.738,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.862.207.544,00 atau 2,67%.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus lebih cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

### 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp217.587.457,37 atau 00,00% dari yang dianggarkan Rp00,00. Target Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.086.628.530,00 mengalami penurunan sebesar RpRp3.086.628.530,00 atau 100,00%.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Sebagaimana yang diungkap dalam catatan atas laporan keuangan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari pengembalian atas belanja, hal ini tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Pendapatan Pengembalian ini sudah tercantum anggarannya di Lain-Lain PAD, sehingga lebih cocok realisasinya diletakkan disana.*

Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus cermat dalam menetapkan target setiap objek Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 4) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain :

#### a) Realisasi Pendapatan yang telah melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

(1) Dinas Kesehatan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan realisasi sebesar Rp535.212.000,00 atau 133,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00.

#### (2) Badan Keuangan Daerah antara lain pada :

(a) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp16.203.259.513,00 atau 100,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.132.300.000,00.

(b) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp967.282.188,00 atau 112,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp860.800.000,00.

(c) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp6.268.267.602,00 atau 103,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.074.338.220,00.

(d) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), realisasi sebesar Rp13.896.515.896,00 atau 106,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.022.105.576,00.

#### b) Realisasi pendapatan yang belum memenuhi target yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

(1) Dinas Perhubungan antara lain pada :

- (a) Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum, terealisasi sebesar Rp1.305.794.000,00 atau 87,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00.
- (b) Retribusi Tempat Khusus Parkir realisasi sebesar Rp807.420.000,00 atau 67,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00.

(2) Badan Keuangan Daerah antara lain pada :

- (a) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp6.907.203.972,00 atau 80,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.532.186.156,00.
- (b) Pajak Hiburan, realisasi sebesar Rp1.004.246.805,00 atau 92,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.088.022.310,00.
- (c) Pajak Parkir, realisasi sebesar Rp322.475.568,00 atau 80,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00.

c) Pendapatan yang belum terealisasi sama sekali antara lain pada Dinas Pertanian dan Pangan antara lain pada :

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00.
- (2) Retribusi Rumah Potong Hewan tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp240.000.000,00.

Khusus untuk PBB-P2, agar pencapaian realisasinya dapat meningkat dengan signifikan, Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan upaya optimal antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek PBB-P2 agar diperoleh data yang valid dan memudahkan upaya pemungutan yang seharusnya dapat dilakukan, serta melakukan sosialisasi kepada Masyarakat, Pemerintah Nagari dan kepada Jorong, karena PBB-P2 ini merupakan potensi pajak yang cukup besar untuk dapat membiayai pembangunan di Kota Bukittinggi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :

- 1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu.
- 3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :

- 1) Menetapkan target Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Menetapkan prognosis laporan realisasi retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan lain-lain PAD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran



pendapatan retribusi dan lain lain PAD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatannya.

- 3) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.
- 4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- 5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- 6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.
- 7) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.
- 8) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- 9) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp744.059.199.525,66 atau 88,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp837.145.281.505,00. Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp611.262.131.931,10 atau 90,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp675.422.845.486,00.

Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp301.384.096.541,66 atau 92,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp325.444.707.669,00.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp380.815.634.884,42	Rp352.055.439.698,03	92,45
2019	Rp381.297.144.993,61	Rp362.187.753.715,82	94,99
2020	Rp379.536.027.596,00	Rp360.230.406.322,57	94,91
2021	Rp322.664.639.155,00	Rp296.371.615.565,25	91,85
2022	Rp325.444.707.669,00	Rp301.384.096.541,66	92,61

Persentase capaian realisasi belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung berfluktuasi dan persentase capaiannya masih dibawah target yang dianggarkan.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan akses maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp264.544.058.412,28 atau 87,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp301.912.139.291,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya :

- (a) Belanja Barang realisasi sebesar Rp45.252.903.639,74 atau 85,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp52.636.885.429,00.
- (b) Belanja Jasa realisasi sebesar Rp141.940.212.404,68 atau 90,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp157.512.299.151,00
- (c) Belanja Pemeliharaan realisasi sebesar Rp22.663.628.650,86 atau 78,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.712.176.742,00.
- (d) Belanja Perjalanan Dinas realisasi sebesar Rp38.444.404.647,00 atau 86,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.438.835.988,00
- (e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat realisasi sebesar Rp2.751.096.770,00 atau 89,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.080.650.000,00.
- (f) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi sebesar Rp2.393.517.628,00 atau 58,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.107.857.277,00.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Barang dan Jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasinya di prediksi tidak optimal dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kedepan agar dilakukan rekonsiliasi secara berkala antara Dinas Pendidikan dengan sekolah dan BKD jika pada tahun berjalan diprediksi realisasi akan melebihi anggaran agar dilakukan penyesuaian anggaran pada perubahan APBD.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp191.286.599.420,80	Rp155.879.355.960,03	81,49
2019	Rp182.167.460.600,27	Rp150.771.650.352,64	82,77
2020	Rp149.565.919.990,10	Rp116.356.834.683,56	77,80
2021	Rp295.562.732.925,00	Rp236.689.663.677,43	80,08
2022	Rp301.912.139.291,00	Rp264.544.058.412,28	87,62

Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cukup fluktuatif, pada tahun 2021 dan 2022 capaian realisasinya secara nominal dan persentase mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap cermat dalam merencanakan dan merelisasikan belanja barang dan jasa.

(3) Belanja Subsidi

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Padang Panjang menganggarkan belanja subsidi sebesar Rp3.385.520.000,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp2.910.989.266,00, atau 85,98%.

(4) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.192.987.711,16,00 atau 94,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.425.478.526,00.

(5) Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.230.000.000,00 atau 98,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.255.000.000,00.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp124.005.630.244,56 atau 83,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp147.955.769.352,00.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah :

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp48.131.479.720,00 atau 79,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.312.518.236,00.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp25.739.508.574,06 atau 77,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.140.307.759,00.
- (3) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp45.500.951.384,50 atau 91,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp49.760.228.857,00.
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp4.633.690.566 atau 97,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.742.714.500,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp240.718.542.106,00	Rp178.070.817.194,00	73,95
2019	Rp304.079.090.833,00	Rp187.986.455.096,79	61,82
2020	Rp260.642.165.432,00	Rp249.317.613.815,34	95,66
2021	Rp123.125.748.792,00	Rp 93.038.635.113,35	75,56
2022	Rp147.955.769.352,00	Rp124.005.630.244,56	83,81

Dari tabel di atas terlihat bahwa 5 (lima) tahun terakhir, realisasi Belanja Modal belum mencapai target. Pada tahun 2022, secara persentase dan nominal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp271.437.350,00 atau 5,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00.

2) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp8.520.000.000,00 atau 97,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.766.666.667,00 terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan yang merupakan bantuan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi, antara lain :

(1) Dinas Kesehatan antara lain pada sub kegiatan :

- (a) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, realisasi sebesar Rp6.627.705.873,14 atau 42,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.438.301.768,00.
- (b) Operasional Pelayanan Puskesmas, realisasi sebesar Rp2.145.838.244,00 atau 65,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.277.093.001,00.
- (c) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp235.500.000,00.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain pada sub kegiatan :

- (a) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, realisasi sebesar Rp1.304.189.052,96 atau 21,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.060.278.680,00.

- (b) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, realisasi sebesar Rp521.245.968,00 atau 57,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp908.261.168,00.
- (c) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase, realisasi sebesar Rp1.574.018.458,00 atau 63,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.486.072.615,00.
- (d) Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG, realisasi sebesar Rp120.992.000,00 atau 33,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp356.260.250,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :

- 1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan.
- 2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan instansi terkait khususnya dana transfer DAK.
- 4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.
- 5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam juknisnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :

- 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, revidi serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementreerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.
- 7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.
- 8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.
- 9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.
- 10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.
- 11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp77.322.187.688,46 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp837.145.281.505,00 adalah 9,24%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah
1	2	3	4
2018	Rp839.898.354.079,22	Rp 95.915.280.573,88	11,42%
2019	Rp891.197.754.148,88	Rp114.068.610.748,60	12,80%
2020	Rp883.714.285.381,10	Rp 99.386.026.235,08	11,25%
2021	Rp783.759.843.834,00	Rp132.987.559.855,90	16,97%
2022	Rp837.145.281.505,00	Rp 77.322.187.688,46	9,24%

Memperhatikan data tersebut diatas rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 berfluktuasi. Pada tahun 2022 rasio SILPA mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan dengan nilai yang rasional.

## 2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp2.045.355.031.596,55 terjadi penurunan sebesar Rp6.897.875.276,32 atau 0,34% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp2.052.252.906.872,87.

Aset Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2021 tersebut, antara lain:

### a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp105.597.334.644,95 dimana terjadi penurunan sebesar Rp(63,597,399,111.510) atau (37,59%) dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp169.194.733.756,46. Aset tersebut antara lain terdiri atas :

- 1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 sebesar Rp77.322.424.486,46 yaitu :
  - (a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp63.691.297.145,77.
  - (b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7.020.824,00.
  - (c) Kas BLUD sebesar Rp12.610.034.870,69.
  - (d) Kas Dana BOS sebesar Rp1.014.071.646,00.
  - (e) Kas BOP sebesar Rp202,00.

Memperhatikan data tersebut, terhadap huruf b) terlihat terjadi keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran ke kas Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah hal 232 huruf C.

### 2) Saldo Piutang Daerah

#### (i) Saldo Piutang Daerah (sebelum penyisihan) :

Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp43.377.889.031,00 terdiri dari :

a) Piutang Pajak Daerah	Rp 14.306.957.898,00
b) Piutang Retribusi Daerah	Rp 12.046.237.364,00
c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 8.363.843.874,00
d) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Rp 4.632.545.459,00
e) Piutang Transfer Antar Daerah	Rp 3.781.987.835,00
f) Piutang Lainnya	Rp 246,316,6010,0

(ii) Penyisihan Piutang Daerah :

Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp(21.330.836.015,00), yang meliputi :

a) Penyisihan Piutang Pajak	Rp ( 9.088.313.560,00)
b) Penyisihan Piutang Retribusi	Rp ( 10.151.975.230,00)
c) Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Rp ( 1.844.230.624,00)
d) Penyisihan Piutang Lainnya	Rp ( 246.316.601,00)

(iii) Piutang Bersih :

Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp22.047.053.016,00 yang terdiri dari :

a) Piutang Pajak Daerah	Rp 5.218.644.338,00
b) Piutang Retribusi Daerah	Rp 1.894.262.134,00
c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 8.363.843.874,00
d) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Rp 2.958.338.601,00
e) Piutang Transfer Antar Daerah	Rp 3.781.987.835,00

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) sebagaimana angka (i) tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut :

a) Piutang Pajak yang bersumber dari :

- (1) Pajak Hotel sebesar Rp644.682.067,00.
- (2) Pajak Restoran sebesar Rp353.448.154,00.
- (3) Pajak Hiburan sebesar Rp10.059.954,00.
- (4) Pajak Reklame sebesar Rp926.902.863,00.
- (5) Pajak Penerangan jalan sebesar Rp400.000,00.
- (6) Pajak Parkir sebesar Rp1.096.520,00.
- (7) Pajak Air Tanah sebesar Rp14.839.340,00.
- (8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp12.243.202.829,00.
- (9) Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp112.326.171,00.

Diharapkan dengan adanya aplikasi SISMIOP-PBBP2 dapat memperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet.

b) Piutang Retribusi bersumber antara lain dari :

- (1) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.865.698.764,00.
- (2) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp8.695.458.000,00
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp485.080.600,00.

c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari :

- (1) Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD



(Lembaga Keuangan) Bank Nagari sebesar Rp8.159.778.827,00.

- (2) Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) PT BPR Jam Gadang sebesar Rp476.657.587,00.
- d) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah terdiri dari :
- (1) Piutang Hasil Sewa BMD sebesar Rp823.226.551,00.
  - (2) Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.857.054.133,00.
  - (3) Piutang Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp37.181.354,00.
  - (4) Piutang Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp235.565.177,00.
  - (5) Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp816.613.850,00.
  - (6) Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp20346.188,00.
  - (7) Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp828.648.900,00.
  - (8) Piutang-piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp448.551,00.
- e) Piutang Transfer Antar Daerah bersumber dari :
- (1) PKB sebesar Rp1.625.842.081,00.
  - (2) BBNKB sebesar Rp690.493.394,00.
  - (3) PBBKB sebesar Rp1.456.366.220,00.
  - (4) PAP sebesar Rp9.266.160,00
- f) Piutang Lainnya bersumber dari Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp246.316.601,00.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kota Bukittinggi yang sesungguhnya. Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

### 3) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.525.720.925,49 mengalami penurunan sebesar (Rp1,607,709,506.67) atau (17,60%) dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.133.430.432,16.

Saldo persediaan tersebut antara lain :

- (a) Persediaan Bahan sebesar Rp271.606.475,00.
- (b) Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp2.947.394.573,00.
- (c) Persediaan Obat-obatan sebesar Rp3.880.177.079,49.
- (d) Persediaan untuk dijual/diserahkan sebesar Rp411.822.798,00.

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf c) merupakan persediaan obat-obatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Pertanian dan Pangan. Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Selain itu Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp411.822.798,00 yang antara lain berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Diharapkan kedepannya terhadap Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan ini agar segera diserahterimakan pada saat kegiatan selesai dilaksanakan dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada SKPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 sebesar Rp62.195.784.727,47 mengalami kenaikan sebesar Rp10.362.333.633,30 atau 19,90% dari tahun 2021 sebesar Rp51.833.451.094,17, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Investasi Jangka Panjang non permanen berupa investasi dana bergulir Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 sebesar Rp635.295.884,95 mengalami kenaikan sebesar Rp26,548,326.53 atau 4,01% dari tahun 2021 sebesar Rp661.844.211,48.
- b) Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp61.560.485.842,52 atau mengalami peningkatan sebesar Rp10.388.878.959,80 atau 20,03% dibandingkan dengan saldo Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp51.171.606.882,69 antara lain sebagai berikut :
  - 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari sebesar Rp44.524.000.000,83.
  - 2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT.BPRS Jam Gadang Perseroda sebesar Rp8.250.000.000,00.
  - 3) Penyertaan Modal Pemerintah daerah pada PDAM Jam Gadang sebesar Rp8.786.485.841,69.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.

Terhadap Penyertaan Modal di BUMD yang belum memberikan kontribusi laba bagi daerah, maka Pemerintah Kota Bukittinggi agar melakukan evaluasi dan langkah-langkah strategi untuk penyertaan perusahaan sehingga dapat berkinerja lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp992.779.645.697,30 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.024.836.242.663,87 terjadi kenaikan sebesar Rp32.056.596.966,57 atau 3,13% antara lain :

- 1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp566.289.788.505,20 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp566.209.588.505,20 terjadi penambahan sebesar Rp80.200.000,00 atau 0,01%.
- 2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp406.665.021.112,66 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp346.346.890.953,31 terjadi peningkatan sebesar Rp60.318.130.159,35 atau 17,42%.
- 3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.004.338.760.735,96 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp960.588.776.351,51 terjadi peningkatan sebesar Rp43.749.984.384,45 atau 4,55%.
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp672.744.182.570,34 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp623.922.585.555,15 terjadi peningkatan sebesar Rp48.821.597.015,19 atau 7,82%.
- 5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.169.875.091,80 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.677.779.197,80 terjadi penambahan sebesar Rp492.095.894,00 atau 1,60%.
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.618.883.121,17 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp65.149.630.115,64 terjadi penurunan sebesar Rp(27.530.746.994,47) atau (42,26%).

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kota Bukittinggi memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam neraca terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp1.147.432.277.019,89 sehingga nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.524.304.035.559,77 atau 83,28% dari nilai total aset Pemerintah Kota Bukittinggi.

*Terkait pengelolaan terhadap aset tetap, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi harus optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta mengurangi terjadinya resiko hilang dan menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan daerah.*

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penertiban atas penatausahaan aset tetap antara lain, peningkatan kompetensi SDM, melakukan koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, Bimtek dan menyempurnakan SOP pengelolaan aset tetap.

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 setelah akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi sebesar Rp21.758.833.807,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.358.975.351,00 terjadi penurunan sebesar Rp600.141.544,00 atau 2,68% antara lain berasal dari :

- 1) Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp56.959.498,00.
- 2) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp16.246.002.000,00.
- 3) Aset Tak Berwujud sebesar Rp8.352.406.781,00.
- 4) Aset Lain-lain sebesar Rp2.672.835.677,00.

Terhadap aset lain-lain yang dalam kondisi rusak berat, dalam penelusuran dan yang akan diserahkan, agar segera diambil langkah-langkah konkrit dan strategis dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait, melakukan penertiban atas penatausahaan aset, dengan melakukan pembinaan, supervisi, bimtek dan penyempurnaan sistem operasi dan prosedur pengelolaan aset.

Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib untuk menghindari resiko potensi hilangnya aset lain-lain akibat tidak didukung data yang memadai dan akurat.

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.332.999.300,92 mengalami kenaikan sebesar Rp896.251.402,61 atau 7,84% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.436.747.898,31. Kewajiban per 31 Desember 2022 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri atas:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) sebesar Rp237.000,00.
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp430.564.800,67.
- 3) Utang Belanja sebesar Rp11.237.720.549,25 antara lain terdiri dari :
  - (a) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp6.240.714.248,00.
  - (b) Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp65.334.191,00.
  - (c) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.871.672.110,25.
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp664.476.951,00.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kota Bukittinggi harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kota Bukittinggi TA 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp703.466.188.835,22 turun sebesar Rp(297.896.063.897,72) atau (29,75%) dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.001.362.252.732,94. Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp127.187.243.766,85 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp136.257.791.456,00 atau 93,34%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :
  - 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.506.989.601,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.269.852.262,00 atau 100,47%.
  - 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp44.985.091.121,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp48.684.034.000,00 atau 92,40%.
  - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.363.843.874,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.505.000.000,00 atau 111,44%.
  - 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.331.319.170,85 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp29.798.905.194,00 atau 78,30%.
- b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp565.023.737.353,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp577.899.930.194,00 atau 97,77%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Pajak-LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO yang merupakan hak Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bukittinggi harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

### D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

#### 1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN TASE (%)
<b>Pelayanan Umum</b>	<b>227.441.587.882,00</b>	<b>199.153.074.584,16</b>	<b>87,56</b>
Komunikasi dan Informatika	10.091.964.537,00	9.332.871.184,66	92,48
Sekretariat Daerah	74.964.123.762,00	67.871.387.882,43	90,54
Sekretariat DPRD	40.491.537.552,00	32.585.823.296,00	80,48
Perencanaan	7.012.694.893,00	6.247.162.204,00	89,08
Keuangan	32.362.837.910,00	25.085.525.503,00	77,51
Kepegawaian	7.941.665.885,00	7.288.587.505,00	91,78
Inspektorat	8.473.210.882,00	7.328.446.153,00	86,49
Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	46.103.532.461,00	43.413.270.856,07	94,16
<b>Ketertiban dan Keamanan</b>	<b>39.518.193.039,00</b>	<b>36.042.106.878,43</b>	<b>91,20</b>
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	33.684.094.813,00	31.166.930.820,43	92,53
Kesatuan Bangsa dan Politik	5.834.098.226,00	4.875.176.058,00	83,56
<b>Ekonomi</b>	<b>70.292.147.944,00</b>	<b>62.928.004.860,12</b>	<b>89,52</b>
Perhubungan	15.154.462.444,00	13.466.614.877,26	88,86
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	26.423.908.302,00	23.614.121.854,96	89,37
Penanaman Modal	13.127.957.593,00	11.945.207.211,00	90,99
Pertanian	15.585.819.605,00	13.902.060.916,90	89,20
<b>Perlindungan Lingkungan Hidup</b>	<b>42.321.589.123,00</b>	<b>38.228.064.116,34</b>	<b>90,33</b>
Lingkungan Hidup	42.321.589.123,00	38.228.064.116,34	90,33
<b>Perumahan dan Fasilitas Umum</b>	<b>89.661.587.974,00</b>	<b>75.594.295.385,67</b>	<b>84,31</b>
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72.271.647.361,00	59.189.183.522,67	81,90
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	17.389.940.613,00	16.405.111.863,00	94,34
<b>Kesehatan</b>	<b>110.919.308.871,00</b>	<b>89.915.816.408,34</b>	<b>81,06</b>
Kesehatan	110.919.308.871,00	89.915.816.408,34	81,06
<b>Pariwisata</b>	<b>36.824.934.491,00</b>	<b>33.162.369.928,74</b>	<b>90,05</b>
Pariwisata	36.824.934.491,00	33.162.369.928,74	90,05
<b>Pendidikan</b>	<b>194.449.491.946,00</b>	<b>185.774.940.904,63</b>	<b>95,54</b>
Pendidikan	187.963.134.419,00	179.734.011.251,63	95,62
Perpustakaan	6.486.357.527,00	6.040.929.653,00	93,13
<b>Perlindungan Sosial</b>	<b>25.716.440.235,00</b>	<b>23.260.526.459,23</b>	<b>90,45</b>
Sosial	7.879.143.508,00	6.687.905.903,00	84,88
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.570.968.323,00	10.708.686.469,00	92,55
Administrasi Kependudukan dan Capil	6.266.328.404,00	5.863.934.087,23	93,58
<b>TOTAL</b>	<b>837.145.281.505,00</b>	<b>744.059.199.525,66</b>	<b>88,88</b>

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi TA. 2022 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp744.059.199.525,66 dari anggaran sebesar Rp837.145.281.505,00 atau 88,88% telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

## 2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*MANDATORY SPENDING*)

### a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp197.776.468.337,00 atau 23,34% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp190.634.608.343,00 atau 25,62% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Bukittinggi. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai berikut:

Tabel  
Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
<b>1.</b>	<b>a. Belanja pada Dinas Pendidikan</b>	<b>185.473.871.670,00</b>	<b>178.848.678.343,00</b>	
	1) Belanja Operasi:	160.786.452.407,00	154.301.303.784,00	95,97
	a. Belanja Pegawai	110.230.066.134,00	103.744.917.511,00	94,12
	b. Belanja Barang dan Jasa	37.380.961.273,00	37.380.961.273,00	100,00
	c. Belanja Hibah	13.175.425.000,00	13.175.425.000,00	100,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	2) Belanja Modal	24.687.419.263,00	24.547.374.559,00	99,43
	<b>b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang</b>	<b>12.302.596.667,00</b>	<b>11.785.930.000,00</b>	
	1) Belanja Transfer :			
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada	8.766.666.667,00	8.250.000.000,00	94,11
	2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah	3.535.930.000,00	3.535.930.000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)</b>	<b>197.776.468.337,00</b>	<b>190.634.608.343,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>847.424.062.076,00</b>	<b>744.059.199.525,66</b>	
	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	23,34	25,62	

## b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp12.773.539.283,00 atau 16,70% dari total anggaran Belanja Daerah di luar Gaji ASN. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp91.637.037.303,14 atau 15,84% dari total realisasi Belanja Daerah di luar Gaji ASN Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:

Tabel  
Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1,	<b>a. Belanja pada Dinas Kesehatan</b>	<b>110.922.929.837,00</b>	<b>89.915.816.408,14</b>	<b>81,06</b>
	1) Belanja Operasi:	80.837.155.651,00	69.169.066.868,00	85,57
	a. Belanja Pegawai	44.903.578.794,00	38.782.842.116,00	86,37
	b. Belanja Barang dan Jasa	35.383.576.857,00	29.836.224.752,00	84,32
	c. Belanja Hibah	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	2) Belanja Modal	30.085.774.186,00	20.746.749.540,14	68,96
	<b>b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:</b>	<b>1.850.609.446,00</b>	<b>1.721.220.895,00</b>	<b>93,01</b>
	1) Belanja Transfer :	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
	2) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	121.500.000,00	121.290.300,00	99,83
	3) Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55.474.000,00	54.911.400,00	98,99
	4) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.168.106.546,00	1.145.709.367,00	98,08
	5) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55.514.800,00	45.005.875,00	81,07
	6) Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	267.408.600,00	180.090.325,00	67,35



	7) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	103.500.000,00	96.839.800,00	93,57
	8) Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	79.105.500,00	77.373.628,00	97,81
<b>2,</b>	<b>Anggaran Kesehatan (a+b)</b>	<b>112.773.539.283,00</b>	<b>91.637.037.303,14</b>	<b>81,26</b>
<b>3,</b>	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>847.424.062.076,00</b>	<b>744.059.199.525,66</b>	<b>87,80</b>
<b>4,</b>	<b>Gaji ASN</b>	<b>171.961.833.253,00</b>	<b>165.379.234.960,00</b>	<b>96,17</b>
<b>5,</b>	<b>Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)</b>	<b>675.462.228.823,00</b>	<b>578.679.964.565,66</b>	<b>85,67</b>
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	16,70	15,84	

c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp131.750.384.681,00 atau 30,54% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp431.343.152.540,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp129.390.744.866,16 atau 30,00% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp129.390.744.866,16.

Pemerintah Kota Bukittinggi *belum* merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah **yang langsung terkait** dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi *agar terus mengupayakan* dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel  
Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persen tase (%)
1,	a) Belanja Modal			
	1) Tanah	-	-	
	2) Peralatan dan Mesin	22.417.171.549,00	22.417.171.549,00	100,00
	3) Bangunan dan Gedung	17.484.960.216,00	17.484.960.216,00	100,00
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.169.247.696,00	28.169.247.696,00	100,00
	5) Aset Tetap Lainnya	138.000.000,00	138.000.000,00	100,00
	6) Aset Lainnya	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00
2,	Belanja Pemeliharaan	10.113.377.694,00	10.113.377.694,00	100,00
3,	Belanja Hibah	42.527.627.526,00	40.192.987.711,16	94,51
4,	Belanja Bantuan Sosial	2.255.000.000,00	2.230.000.000,00	98,89
5,	Belanja Bantuan Keuangan.	8.520.000.000,00	8.520.000.000,00	100,00
	<b>Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah</b>	<b>131.750.384.681,00</b>	<b>129.390.744.866,16</b>	
	<b>Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya bersifat Umum</b>	<b>30,54</b>	<b>30,00</b>	<b>-</b>

### 3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

#### a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp52.044.258.820,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp50.680.800.361,68 atau 97,38% dari total anggaran. Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.
- 4) 100% 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

#### b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp1.122.181.882,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp932.165.660,00 atau 83,07% dari total anggaran. Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.

- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

*Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.*

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang kesehatan ini dimana hanya terelisir sebesar 83,07% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kota Bukittinggi **untuk memberikan penjelasan.***

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Bukittinggi TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp418.253.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp353.769.336,40 atau 84,58% dari total anggaran. Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

*Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.*

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ini dimana hanya terelisir sebesar 84,58% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kota Bukittinggi **untuk memberikan penjelasan.***

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pemerintah Kota Bukittinggi pada TA. 2022 belum menganggarkan alokasi belanja untuk SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah Kota Bukittinggi agar berkomitmen untuk memprioritaskan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

*Sehubungan dengan tidak tersedianya alokasi anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam APBD Kota Bukittinggi TA 2022, maka diminta kepada Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memberikan penjelasan dan menyampaikan pernyataan tertulis bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi di masa yang akan datang akan berkomitmen untuk menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk pemenuhan seluruh SPM.*

e. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Bukittinggi TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dianggarkan sebesar Rp15.749.564.460,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.535.407.810,67 atau 92,29% dari total anggaran. Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kab/Kota dan Kab/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Bukittinggi TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp761.070.242,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp558.336.364,00 atau 73,36% dari total anggaran. Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Sosial untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kab/Kota dan di Daerah Kab/Kota.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dimana hanya terealisasi 64,98% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kota Bukittinggi **untuk memberikan penjelasan.***

#### 4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp143.513.856.886,00 atau 29,15% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp68.441.396.876,00 atau 15,96% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah.

Hal ini belum *belum memenuhi* amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Wali Kota/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

*Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar meningkatkan dan terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).*

#### 5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp50.040.546.769,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.528.377.810,00 atau 23,04% dari yang ditargetkan.

*Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisan dan penyelarasan program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.*

6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar Rp1.116.235.600,00 atau 0,99% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp112.773.539.283,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp1001.176.812,00 atau 89,69% dari total alokasi dana yang dianggarkan.

Pemerintah Kota Bukittinggi agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

Pemerintah Kota Bukittinggi *belum* mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN Wali Kota TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota Bukittinggi, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Dimutakhirkan.
2. Kelemahan Pengendalian Intern dalam Pemberian Ijin Pemasangan dan Pengelolaan Pajak Reklame.
3. Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Memungut Retribusi dan Sewa atas Pemanfaatan Toko/Kios di Pasar Atas.

4. Perekrutan Pegawai Non-ASN pada Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Sepenuhnya Berpedoman pada Ketentuan yang Berlaku Sehingga Membebani Keuangan Daerah.
5. Data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang Dibayarkan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Tidak Akurat.
6. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Pengeluaran Riil Sebesar Rp477.637.480,00.
7. Penanggungjawaban Belanja Hibah pada KONI Tidak Lengkap Sebesar Rp27.948.734,00.
8. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa pada 13 SKPD Minimal Sebesar Rp7.175.089.967,41.
9. Kekurangan Volume Lima Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Lima SKPD Sebesar Rp66.691.304,51 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp7.495.484,00.
10. Kekurangan Volume Tujuh Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sebesar Rp212.645.498.82.
11. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Sepenuhnya Tertib.
12. Pengelolaan Aset Kemitraan Pihak Ketiga pada Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Optimal.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kota Bukittinggi harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

### III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
  
MAHYELDI



## WALIKOTA BUKITTINGGI

Jln. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi 26122 – Sumatera Barat

Telp. : (0752) 33369 – 21879

Fax.:(0752) 32767

Bukittinggi, 10 Maret 2023 M  
Sya'ban 1444 H

Nomor : 905/ 400 /BK.05/III-2023  
Lampiran :  
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Kepada, Yth;  
Bapak Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa  
Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera  
Barat

di Padang

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan representasi sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material, sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan yaitu:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.



4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Kota Bukittinggi telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2022 yang belum dicatat atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
  - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses dan diringkaskan secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dihitung dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
  - b. Ketaatan kepada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.

15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

  
WALIKOTA BUKITINGGI  
ERMAN SAFAR



## WALIKOTA BUKITTINGGI

Jln. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi 26122 – Sumatera Barat

Telp. : (0752) 33369 – 21879

Fax.:(0752) 32767

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022, terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (f) Laporan Arus Kas (LAK); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Arus Kas, posisi keuangan dan asset berupa Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bukittinggi, 16 Agustus 2023  
WALIKOTA BUKITTINGGI  
  
H. ERGAN SAFAR, SH

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022						
NOMOR URUT	URUSAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	(Rp)	(%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	774.157.721.650,00	698.402.386.323,22	(81.755.335.326,78)		97,79
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAR DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	15.963.301.768,00	16.824.326.384,00	861.024.616,00		105,39
1.02	Kesehatan	15.838.301.768,00	16.690.723.384,00	852.421.616,00		105,38
1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	15.838.301.768,00	16.690.723.384,00	852.421.616,00		105,38
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	120.000.000,00	131.328.000,00	11.328.000,00		109,44
1.03.1-03.2-10.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	120.000.000,00	131.328.000,00	11.328.000,00		109,44
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.000.000,00	2.275.000,00	(2.725.000,00)		45,50
1.04.1-04.2-10.0-00.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.000.000,00	2.275.000,00	(2.725.000,00)		45,50
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	18.867.034.000,00	17.967.506.174,00	(819.527.826,00)		95,33
2.11	Lingkungan Hidup	1.200.864.000,00	1.170.449.500,00	(30.414.500,00)		97,47
2.11.2-11.0-00.0-00.01	Dinas Lingkungan Hidup	1.200.864.000,00	1.170.449.500,00	(30.414.500,00)		97,47
2.15	Perhubungan	2.916.670.000,00	2.335.889.500,00	(580.780.500,00)		80,09
2.15.2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	2.916.670.000,00	2.335.889.500,00	(580.780.500,00)		80,09
2.16	Komunikasi dan Informatika	250.000.000,00	499.686.000,00	249.686.000,00		199,87
2.16.2-16.2-21.2-20.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	250.000.000,00	499.686.000,00	249.686.000,00		199,87
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.220.500.000,00	13.751.741.629,00	(468.758.371,00)		96,64
2.17.2-17.3-30.0-00.01	Dinas Koperasi, UKM dan Podgangan	14.220.500.000,00	13.751.741.629,00	(468.758.371,00)		96,64
2.18	Penanaman Modal	250.000.000,00	249.745.545,00	(254.455,00)		99,90
2.18.2-18.3-31.2-07.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	250.000.000,00	249.745.545,00	(254.455,00)		99,90
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PELITAH</b>	26.400.000.000,00	26.653.015.840,00	(816.984.160,00)		97,19

R.19

81A

NOMOR URUT	URUTAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
<b>3.26</b>	<b>Partisipasi</b>	29.000.000,00	28.154.035.255,00	(845.964.745,00)
3.26.3-26.2-19.0-00.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	20.000.000,00	20.154.035.255,00	(845.964.745,00)
<b>3.27</b>	<b>Pertanian</b>	480.000.000,00	498.980.585,00	18.980.585,00
3.27.3-27.2-09.3-25.01	Dinas Pertanian dan Pangan	480.000.000,00	498.980.585,00	18.980.585,00
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	649.867.385.882,00	634.957.537.925,22	(14.909.847.956,78)
<b>5.02</b>	<b>Kecelakaan</b>	649.867.385.882,00	634.957.537.925,22	(14.909.847.956,78)
5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Kewahlgan	649.867.385.882,00	634.957.537.925,22	(14.909.847.956,78)
<b>1</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	837.145.281.565,00	744.050.199.525,66	(93.095.081.939,34)
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	421.870.967.610,00	375.703.477.526,57	(46.167.490.083,43)
1.01.1-01.2-22.0-00.01	Pendidikan	184.531.786.333,00	176.640.871.175,63	(7.890.915.157,37)
1.01.1-01.2-22.0-00.01.5.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	184.531.786.333,00	176.640.871.175,63	(7.890.915.157,37)
<b>1.01.1-01.2-22.0-00.01.5.1.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	160.023.958.774,00	152.412.711.086,59	(7.611.247.767,41)
1.01.1-01.2-22.0-00.01.5.1.1.1	Belanja Pegawai	109.227.374.797,00	103.744.167.511,00	(5.483.207.286,00)
1.01.1-01.2-22.0-00.01.5.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.723.307.977,00	35.696.098.015,59	(2.027.209.961,41)
1.01.1-01.2-22.0-00.01.5.1.1.3	Belanja Hibah	13.073.276.000,00	12.972.445.480,00	(100.830.520,00)
1.01.1-01.2-22.0-00.01.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	24.507.807.559,00	24.228.160.169,04	(279.647.389,96)
1.01.1-01.2-22.0-00.01.5.1.2.1	Belanja Modal Pesialan dan Mesin	11.783.094.571,00	11.568.957.990,05	(214.046.530,95)
1.01.1-01.2-22.0-00.01.5.1.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.438.260.538,00	11.386.623.678,99	(51.636.859,01)
1.01.1-01.2-22.0-00.01.5.1.2.3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.286.562.500,00	1.272.570.500,00	(13.994.000,00)
<b>1.02</b>	<b>Kesehatan</b>	110.919.308.871,00	89.913.816.408,34	(21.005.492.462,66)
1.02.1-02.1-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	110.919.308.871,00	89.913.816.408,34	(21.005.492.462,66)
1.02.1-02.1-00.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	80.867.584.398,00	69.169.066.868,20	(11.698.517.529,80)
1.02.1-02.1-00.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	44.697.578.794,00	38.782.842.116,00	(5.914.736.678,00)
1.02.1-02.1-00.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.615.005.604,00	29.836.224.752,20	(5.778.780.851,80)
1.02.1-02.1-00.0-00.01.5.1.3	Belanja Hibah	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
1.02.1-02.1-00.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	30.056.724.473,00	20.746.749.540,14	(9.309.974.932,86)
1.02.1-02.1-00.0-00.01.5.2.1	Belanja Modal Pesialan dan Mesin	24.000.724.473,00	16.554.241.043,14	(7.526.483.429,86)
1.02.1-02.1-00.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.961.000.000,00	4.181.408.497,00	(1.779.591.503,00)
1.02.1-02.1-00.0-00.01.5.2.3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	11.100.000,00	(3.900.000,00)
<b>1.03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	67.466.653.480,00	54.896.841.356,17	(12.579.812.123,83)
1.03.1-03.2-10.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	67.466.653.480,00	54.896.841.356,17	(12.579.812.123,83)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERURANG) (%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	18.912.942.354,00	14.636.233.283,00	77,28
1.03.1-03.2-10.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	8.274.023.713,00	7.444.242.429,00	89,97
1.03.1-03.2-10.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.187.918.641,00	6.733.544.656,27	66,09
1.03.1-03.2-10.0-00.01.5.1.5	Belanja Hibah	451.000.000,00	438.436.197,73	97,21
1.03.1-03.2-10.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	48.553.751.126,00	40.270.618.073,17	82,94
1.03.1-03.2-10.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	1.005.399.200,00	990.574.767,00	94,55
1.03.1-03.2-10.0-00.01.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.826.116.000,00	462.653.076,96	9,59
1.03.1-03.2-10.0-00.01.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	42.722.235.926,00	38.857.390.229,21	90,95
<b>1.04</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	17.389.940.613,00	16.405.111.863,00	94,34
1.04.1-04.2-10.0-00.01	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman</b>	17.389.940.613,00	16.405.111.863,00	94,34
1.04.1-04.2-10.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	9.672.218.932,00	9.657.020.360,00	94,13
1.04.1-04.2-10.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3.582.089.210,00	3.412.874.394,00	95,28
1.04.1-04.2-10.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.785.129.722,00	3.414.145.976,00	90,20
1.04.1-04.2-10.0-00.01.5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.255.000.000,00	2.230.000.000,00	96,89
1.04.1-04.2-10.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	7.767.721.681,00	7.348.091.503,00	94,60
1.04.1-04.2-10.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	964.728.750,00	819.717.110,00	84,97
1.04.1-04.2-10.0-00.01.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	470.000.000,00	389.359.795,20	82,84
1.04.1-04.2-10.0-00.01.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	6.332.992.931,00	6.139.014.597,80	96,94
<b>1.05</b>	<b>Kerentanan dan Ketertarikan Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	33.684.094.813,00	31.146.930.020,43	92,53
1.05.1-05.3-00.0-00.01	<b>Dinas Kebakaran</b>	7.792.205.950,00	7.147.474.055,67	91,73
1.05.1-05.3-00.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	7.466.429.390,00	6.826.260.484,00	91,43
1.05.1-05.3-00.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3.542.735.132,00	3.355.404.988,00	94,71
1.05.1-05.3-00.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.923.694.258,00	3.470.855.496,00	86,46
1.05.1-05.3-00.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	325.776.560,00	321.213.571,67	96,60
1.05.1-05.3-00.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	325.776.560,00	321.213.571,67	96,60
1.05.1-05.3-00.0-00.02	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	21.379.894.911,00	19.727.921.874,00	92,27
1.05.1-05.3-00.0-00.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	20.596.130.911,00	19.080.052.074,00	92,64
1.05.1-05.3-00.0-00.02.5.1.1	Belanja Pegawai	7.130.265.555,00	6.648.736.103,00	93,25
1.05.1-05.3-00.0-00.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.465.865.356,00	12.431.215.971,00	92,32
1.05.1-05.3-00.0-00.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	783.674.000,00	647.869.800,00	82,67
1.05.1-05.3-00.0-00.02.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	783.674.000,00	647.869.800,00	82,67
1.05.1-05.3-00.0-00.03	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	4.512.083.952,00	4.291.534.890,76	95,11
1.05.1-05.3-00.0-00.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4.174.308.952,00	3.954.620.115,00	94,74
1.05.1-05.3-00.0-00.03.5.1.1	Belanja Pegawai	1.738.451.816,00	1.586.957.817,00	91,29
1.05.1-05.3-00.0-00.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.435.857.136,00	2.367.662.198,00	97,20

219

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERTURUN	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.05.1-05.0-00.0-00.03.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	337.775.000,00	336.914.775,76	(860.224,24)	99,75
1.05.1-05.0-00.0-00.03.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.775.000,00	167.326.846,00	(448.154,00)	99,73
1.05.1-05.0-00.0-00.03.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.000.000,00	169.587.935,76	(412.064,24)	99,76
<b>1.06</b>	<b>Sosial</b>	7.879.143.508,00	6.687.905.903,00	(1.191.237.605,00)	84,88
1.06.1-06.0-00.0-00.01.5.1	Dinas Sosial	7.879.143.508,00	6.687.905.903,00	(1.191.237.605,00)	84,88
1.06.1-06.0-00.0-00.01.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	7.818.968.508,00	6.627.965.903,00	(1.191.002.605,00)	84,77
1.06.1-06.0-00.0-00.01.5.1.1.1	Belanja Pegawai	3.285.015.596,00	2.719.640.391,00	(565.375.205,00)	82,79
1.06.1-06.0-00.0-00.01.5.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.533.952.912,00	3.888.325.512,00	(645.627.400,00)	86,14
1.06.1-06.0-00.0-00.01.5.1.5	Belanja Hibah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	60.175.000,00	59.940.000,00	(235.000,00)	99,61
1.06.1-06.0-00.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.175.000,00	59.940.000,00	(235.000,00)	99,61
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	141.967.756.875,00	129.266.666.181,69	(12.701.090.693,31)	91,05
<b>2.07</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	687.444.384,00	548.627.061,00	(138.817.323,00)	79,81
2.07.2-18.3-31.2-07.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	687.444.384,00	548.627.061,00	(138.817.323,00)	79,81
2.07.2-18.3-31.2-07.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	687.444.384,00	548.627.061,00	(138.817.323,00)	79,81
2.07.2-18.3-31.2-07.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2-18.3-31.2-07.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	687.444.384,00	548.627.061,00	(138.817.323,00)	79,81
<b>2.08</b>	<b>Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	7.949.779.587,00	7.621.818.986,00	(327.960.601,00)	95,87
2.08.2-08.2-14.0-00.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	7.949.779.587,00	7.621.818.986,00	(327.960.601,00)	95,87
2.08.2-08.2-14.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	7.793.283.587,00	7.370.524.236,00	(422.759.351,00)	95,78
2.08.2-08.2-14.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	4.414.487.737,00	4.207.674.122,00	(206.813.615,00)	95,32
2.08.2-08.2-14.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.288.795.850,00	3.170.850.114,00	(117.945.736,00)	96,41
2.08.2-08.2-14.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	246.496.000,00	243.294.750,00	(3.201.250,00)	98,70
2.08.2-08.2-14.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	246.496.000,00	243.294.750,00	(3.201.250,00)	98,70
<b>2.09</b>	<b>Pangan</b>	10.960.150.740,00	9.669.366.666,00	(1.290.784.074,00)	88,22
2.09.3-27.2-09.3-25.01	Dinas Pertanian dan Pangan	10.960.150.740,00	9.669.366.666,00	(1.290.784.074,00)	88,22
2.09.3-27.2-09.3-25.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	10.879.259.740,00	9.546.266.056,00	(1.333.093.684,00)	88,15
2.09.3-27.2-09.3-25.01.5.1.1	Belanja Pegawai	8.073.894.887,00	7.513.713.651,00	(560.091.236,00)	93,06
2.09.3-27.2-09.3-25.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.284.934.853,00	2.032.552.405,00	(252.382.448,00)	88,95
2.09.3-27.2-09.3-25.01.5.1.4	Belanja Subsidi	470.520.000,00	0,00	(470.520.000,00)	0,00
2.09.3-27.2-09.3-25.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	130.891.000,00	123.100.000,00	(7.791.000,00)	94,05
2.09.3-27.2-09.3-25.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.891.000,00	123.100.000,00	(7.791.000,00)	94,05

85  
1A

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
<b>2.10</b>	<b>Pertanian</b>			
2.10.1-03.2-10.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	559.638.165,00	433.368.774,04	(126.269.390,96)
2.10.1-03.2-10.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	559.638.165,00	433.368.774,04	(126.269.390,96)
2.10.1-03.2-10.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
2.10.1-03.2-10.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	559.638.165,00	433.368.774,04	(126.269.390,96)
2.10.1-03.2-10.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1.200.000,00	730.000,00	(470.000,00)
2.10.1-03.2-10.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	1.200.000,00	730.000,00	(470.000,00)
<b>2.11</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>			
2.11.2-11.0-00.0-00.01	Dinas Lingkungan Hidup	42.321.589.123,80	38.228.064.116,34	(4.093.525.006,66)
2.11.2-11.0-00.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	42.321.589.123,80	38.228.064.116,34	(4.093.525.006,66)
2.11.2-11.0-00.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	36.911.145.593,00	32.887.283.868,65	(4.023.861.724,35)
2.11.2-11.0-00.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.526.884.663,00	11.886.853.695,00	(640.031.568,00)
2.11.2-11.0-00.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	34.384.260.030,00	21.000.430.773,65	(13.383.830.156,35)
2.11.2-11.0-00.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	5.410.443.530,00	5.340.780.247,69	(69.663.282,31)
2.11.2-11.0-00.0-00.01.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.460.038.411,00	3.391.340.749,00	(68.698.662,00)
2.11.2-11.0-00.0-00.01.5.2.5	Belanja Modal Alat Transportasi Lainnya	1.950.405.119,00	1.940.430.408,69	(9.974.710,31)
2.11.2-11.0-00.0-00.01.5.2.5		0,00	0,00	0,00
<b>2.12</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Capil</b>			
2.12.2-12.0-00.0-00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.266.328.404,00	5.863.934.087,23	(402.394.316,77)
2.12.2-12.0-00.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6.266.328.404,00	5.863.934.087,23	(402.394.316,77)
2.12.2-12.0-00.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	5.763.639.404,00	5.383.081.217,00	(380.558.187,00)
2.12.2-12.0-00.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.865.733.834,00	3.687.147.897,00	(178.585.937,00)
2.12.2-12.0-00.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1.897.905.570,00	1.695.933.320,00	(201.972.250,00)
2.12.2-12.0-00.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	502.689.000,00	488.852.870,23	(13.836.129,77)
2.12.2-12.0-00.0-00.01.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	346.203.000,00	327.070.450,00	(19.132.550,00)
2.12.2-12.0-00.0-00.01.5.2.5	Belanja Modal Alat Transportasi Lainnya	56.396.000,00	55.997.420,23	(398.579,77)
2.12.2-12.0-00.0-00.01.5.2.5		100.000.000,00	97.285.000,00	(2.715.000,00)
<b>2.14</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			
2.14.2-08.2-14.0-00.01	Dinas Pembertayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	3.621.188.736,00	3.086.867.483,00	(534.321.253,00)
2.14.2-08.2-14.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3.621.188.736,00	3.086.867.483,00	(534.321.253,00)
2.14.2-08.2-14.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	34.670.000,00	1.400.000,00	(33.270.000,00)
2.14.2-08.2-14.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.586.518.736,00	3.085.467.483,00	(501.051.253,00)
2.14.2-08.2-14.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	0,00	0,00
2.14.2-08.2-14.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	0,00	6,00	6,00
<b>2.15</b>	<b>Perhubungan</b>			
2.15.1-03.2-10.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.299.778.160,00	17.335.508.269,72	(2.064.269.890,28)
2.15.1-03.2-10.0-00.01		4.245.315.716,00	3.868.977.892,46	(376.341.823,54)

8. 19



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.15.1-03.2-10.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3.729.815.716,00	3.540.320.437,00	(181.487.279,00)	95,13
	Belanja Pegawai	22.799.000,00	900.000,00	(21.899.000,00)	3,96
2.15.1-03.2-10.0-00.01.5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	3.707.065.716,00	3.547.420.437,00	(159.637.279,00)	95,69
2.15.1-03.2-10.0-00.01.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	513.500.000,00	320.645.455,46	(192.854.544,54)	62,26
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.500.000,00	19.425.000,00	(1.075.000,00)	94,76
2.15.1-03.2-10.0-00.01.5.2.4	Belanja Modal Tanah, Bangunan, dan Irigasi	495.000.000,00	301.220.455,46	(193.779.544,54)	60,85
2.15.2-15.0-00.0-00.01	<b>Dinas Perhubungan</b>	13.154.962.944,00	13.486.614.877,26	(1.687.947.566,74)	88,86
2.15.2-15.0-00.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	14.268.521.444,00	13.176.254.352,26	(1.092.267.091,74)	92,34
	Belanja Pegawai	6.554.807.797,00	6.014.547.557,00	(540.260.240,00)	91,76
2.15.2-15.0-00.01.5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	7.373.713.647,00	6.825.706.795,26	(548.006.851,74)	92,57
2.15.2-15.0-00.01.5.1.4	Belanja Subsidi	340.000.000,00	336.000.000,00	(4.000.000,00)	98,82
2.15.2-15.0-00.01.5.1.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	885.941.000,00	290.360.525,00	(595.580.475,00)	32,77
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	885.941.000,00	290.360.525,00	(595.580.475,00)	32,77
<b>2.16</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	9.958.690.937,00	9.215.894.634,66	(742.796.302,34)	92,54
2.16.2-16.2-21.2-20.01	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	9.958.690.937,00	9.215.894.634,66	(742.796.302,34)	92,54
2.16.2-16.2-21.2-20.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6.520.870.062,00	7.834.510.614,66	(1.313.640.552,66)	91,83
	Belanja Pegawai	2.911.017.191,00	2.835.690.241,64	(75.326.949,36)	97,87
2.16.2-16.2-21.2-20.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.609.852.871,00	4.998.820.373,02	(611.032.500,98)	89,11
2.16.2-16.2-21.2-20.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1.437.820.875,00	1.391.394.020,00	(46.426.855,00)	96,77
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.428.318.875,00	1.382.479.640,00	(45.839.235,00)	96,79
2.16.2-16.2-21.2-20.01.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.502.000,00	8.914.380,00	(587.620,00)	94,13
<b>2.17</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	11.340.944.060,00	10.735.473.946,00	(605.470.114,00)	94,66
2.17.2-17.3-30.0-00.01	<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan</b>	11.340.944.060,00	10.735.473.946,00	(605.470.114,00)	94,66
2.17.2-17.3-30.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	11.306.144.000,00	10.700.968.486,00	(605.175.514,00)	94,65
	Belanja Pegawai	5.750.232.312,00	5.323.390.345,00	(426.841.967,00)	92,58
2.17.2-17.3-30.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.980.911.748,00	2.802.588.875,00	(178.322.873,00)	94,02
2.17.2-17.3-30.0-00.01.5.1.4	Belanja Subsidi	2.575.000.000,00	2.574.999.266,00	(10.734,00)	100,00
2.17.2-17.3-30.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	34.800.000,00	34.505.460,00	(294.540,00)	99,15
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.800.000,00	34.505.460,00	(294.540,00)	99,15
2.17.2-17.3-30.0-00.01.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	8,00
<b>2.18</b>	<b>Pemananan Modal</b>	10.950.783.289,00	10.099.545.667,00	(851.237.622,00)	92,23
2.18.2-18.3-31.2-07.01	<b>Dinas Pemananan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>	10.950.783.289,00	10.099.545.667,00	(851.237.622,00)	92,23
2.18.2-18.3-31.2-07.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	10.693.194.289,00	9.847.430.107,00	(845.764.182,00)	92,09
2.18.2-18.3-31.2-07.01.5.1.1	Belanja Pegawai	6.768.081.902,00	6.362.134.962,00	(405.946.940,00)	94,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
2.18.2-18.3-31.2-07.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.925.112.367,00	3.485.295.145,00	(439.817.242,00)	88,79	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	257.589.000,00	252.115.500,00	(5.473.500,00)	97,88	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	232.589.000,00	227.605.500,00	(4.983.500,00)	97,90	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	24.470.000,00	(530.000,00)	97,68	
<b>2.19</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	7.900.462.077,00	7.177.070.881,70	(723.391.195,30)	90,84	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.5.1.1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.900.462.077,00	7.177.070.881,70	(723.391.195,30)	90,84	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	7.495.546.326,00	6.807.281.714,00	(688.264.612,00)	90,82	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	1.750.000,00	(500.000,00)	77,78	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.939.153.326,00	3.563.685.594,00	(375.467.732,00)	90,47	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.5.1.5	Belanja Hibah	3.354.143.000,00	3.241.846.120,00	(312.296.880,00)	91,21	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	494.915.751,00	366.789.167,70	(35.126.583,30)	91,32	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	75.100.000,00	68.534.800,00	(5.565.200,00)	91,29	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	329.815.751,00	300.254.367,70	(29.561.383,30)	91,04	
<b>2.20</b>	<b>Statistik</b>	53.080.600,00	51.589.850,00	(1.490.750,00)	97,17	
2.20.2-16.2-21.2-20.01.5.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	53.080.600,00	51.589.850,00	(1.490.750,00)	97,17	
2.20.2-16.2-21.2-20.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	28.000.600,00	26.771.950,00	(1.228.650,00)	95,34	
2.20.2-16.2-21.2-20.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.20.2-16.2-21.2-20.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.600,00	26.771.950,00	(1.228.650,00)	95,34	
2.20.2-16.2-21.2-20.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	25.000.000,00	24.808.900,00	(191.100,00)	99,24	
2.20.2-16.2-21.2-20.01.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	25.000.000,00	24.808.900,00	(191.100,00)	99,24	
<b>2.21</b>	<b>Pendidikan</b>	80.193.000,00	65.395.700,00	(14.797.300,00)	81,55	
2.21.2-16.2-21.2-20.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	80.193.000,00	65.395.700,00	(14.797.300,00)	81,55	
2.21.2-16.2-21.2-20.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	50.443.000,00	44.645.700,00	(5.797.300,00)	75,11	
2.21.2-16.2-21.2-20.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.21.2-16.2-21.2-20.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.443.000,00	44.645.700,00	(5.797.300,00)	75,11	
2.21.2-16.2-21.2-20.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	30.750.000,00	20.750.000,00	(10.000.000,00)	100,00	
2.21.2-16.2-21.2-20.01.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	100,00	
<b>2.22</b>	<b>Kebudayaan</b>	3.431.348.086,00	3.093.140.076,00	(338.208.010,00)	90,14	
2.22.1-01.2-22.0-00.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.431.348.086,00	3.093.140.076,00	(338.208.010,00)	90,14	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3.391.871.086,00	3.054.093.076,00	(337.708.010,00)	90,04	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	750.000,00	(8.850.000,00)	7,81	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.685.876.086,00	2.448.629.231,00	(2.237.196.855,00)	91,17	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.5.1.5	Belanja Hibah	696.375.000,00	604.713.845,00	(91.661.155,00)	86,84	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	39.547.000,00	39.047.000,00	(500.000,00)	98,74	

8.14

NOMOR SUBUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.22.1-01.2-21.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.947.000,00	34.947.000,00	(500.000,00)	98,55
2.22.1-01.2-21.0-00.01.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
<b>2.23</b>	<b>Perpustakaan</b>	5.866.559.387,00	5.568.555.966,00	(298.003.421,00)	94,92
2.23.1-23.2-24.0-00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	5.866.559.387,00	5.568.555.966,00	(298.003.421,00)	94,92
2.23.1-23.2-24.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.439.779.387,00	5.155.346.531,00	(284.432.856,00)	94,77
2.23.1-23.2-24.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3.682.114.819,00	3.662.064.176,00	(20.050.643,00)	99,46
2.23.1-23.2-24.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.757.664.568,00	1.493.282.355,00	(264.382.213,00)	84,96
2.23.1-23.2-24.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	406.780.000,00	413.209.435,00	(13.570.565,00)	96,82
2.23.1-23.2-24.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	242.700.000,00	230.203.140,00	(12.496.860,00)	94,85
2.23.1-23.2-24.0-00.01.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.000.000,00	88.511.555,00	(488.445,00)	99,45
2.23.1-23.2-24.0-00.01.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	95.000.000,00	94.415.140,00	(584.860,00)	99,38
<b>2.24</b>	<b>Kearsifan</b>	619.798.140,00	472.373.687,00	(147.424.453,00)	76,21
2.24.1-23.2-24.0-00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	619.798.140,00	472.373.687,00	(147.424.453,00)	76,21
2.24.1-23.2-24.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	532.798.140,00	393.853.637,00	(138.944.503,00)	73,92
2.24.1-23.2-24.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.1-23.2-24.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	532.798.140,00	393.853.637,00	(138.944.503,00)	73,92
2.24.1-23.2-24.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	87.000.000,00	78.520.050,00	(8.479.950,00)	90,25
2.24.1-23.2-24.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.000.000,00	78.520.050,00	(8.479.950,00)	90,25
2.24.1-23.2-24.0-00.01.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	90.122.835.441,00	44.393.676.359,96	(5.729.159.061,10)	86,57
<b>3.25</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	1.575.996.652,00	1.494.721.624,80	(81.275.027,20)	94,84
3.25.1-27.2-09.3-25.01	Dinas Pertanian dan Pangan	1.575.996.652,00	1.494.721.624,80	(81.275.027,20)	94,84
3.25.1-27.2-09.3-25.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.546.771.652,00	1.459.596.624,80	(87.175.027,20)	94,73
3.25.1-27.2-09.3-25.01.5.1.1	Belanja Pegawai	8.205.000,00	2.550.000,00	(5.655.000,00)	31,08
3.25.1-27.2-09.3-25.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.538.566.652,00	1.457.046.624,80	(81.520.027,20)	95,07
3.25.1-27.2-09.3-25.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	35.225.000,00	35.125.000,00	(100.000,00)	99,72
3.25.1-27.2-09.3-25.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.225.000,00	35.125.000,00	(100.000,00)	99,72
<b>3.26</b>	<b>Pariwisata</b>	38.924.472.414,00	25.985.299.047,04	(2.939.173.366,96)	89,84
3.26.1-26.2-19.0-00.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	38.924.472.414,00	25.985.299.047,04	(2.939.173.366,96)	89,84
3.26.1-26.2-19.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	24.120.678.934,00	21.855.295.525,06	(2.265.383.408,94)	90,53
3.26.1-26.2-19.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	8.064.101.238,00	7.379.935.678,00	(684.165.560,00)	91,52
3.26.1-26.2-19.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.056.577.696,00	14.475.359.847,06	(1.581.217.848,94)	90,83
3.26.1-26.2-19.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	4.803.793.480,00	4.130.003.521,98	(673.789.958,02)	86,39
3.26.1-26.2-19.0-00.01.5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00

219

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
3.26.3.26.2-99.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.501.650.000,00	1.479.402.014,00	(22.247.986,00)	98,52
3.26.3.26.2-99.0-00.01.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.827.993.480,00	2.411.305.405,95	(616.688.074,05)	79,63
3.26.3.26.2-99.0-00.01.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	710.000.000,00	203.326.102,03	(616.673.897,97)	96,82
3.26.3.26.2-99.0-00.01.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	64.150.000,00	55.970.000,00	(8.180.000,00)	87,25
<b>3.27</b>	<b>Pertanian</b>	<b>3.049.672.213,00</b>	<b>2.737.973.236,10</b>	<b>(311.698.976,90)</b>	<b>89,78</b>
3.27.3.27.2-49.3-25.01	Dinas Pertanian dan Pangan	3.049.672.213,00	2.737.973.236,10	(311.698.976,90)	89,78
3.27.3.27.2-49.3-25.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.893.322.213,00</b>	<b>2.625.486.310,36</b>	<b>(268.435.902,64)</b>	<b>90,72</b>
3.27.3.27.2-49.3-25.01.5.1.1	Belanja Pegawai	14.920.000,00	2.700.000,00	(12.220.000,00)	18,10
3.27.3.27.2-49.3-25.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.879.802.213,00	2.622.786.310,36	(256.215.902,64)	91,10
3.27.3.27.2-49.3-25.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>155.750.000,00</b>	<b>112.486.925,74</b>	<b>(43.263.074,26)</b>	<b>72,22</b>
3.27.3.27.2-49.3-25.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.250.000,00	64.331.250,00	(8.918.750,00)	67,82
3.27.3.27.2-49.3-25.01.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	35.655.675,74	(34.344.324,26)	50,94
3.27.3.27.2-49.3-25.01.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
<b>3.28</b>	<b>Perdagangan</b>	<b>15.082.964.242,00</b>	<b>12.878.647.908,96</b>	<b>(2.204.316.333,04)</b>	<b>85,39</b>
3.28.3.28.3-30.000.01	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	15.082.964.242,00	12.878.647.908,96	(2.204.316.333,04)	85,39
3.28.3.28.3-30.000.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>11.910.420.126,00</b>	<b>10.036.450.381,00</b>	<b>(1.873.969.745,00)</b>	<b>84,27</b>
3.28.3.28.3-30.000.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.3.28.3-30.000.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.910.420.126,00	10.036.450.381,00	(1.873.969.745,00)	84,27
3.28.3.28.3-30.000.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.172.544.116,00</b>	<b>2.842.189.527,96</b>	<b>(330.354.588,04)</b>	<b>89,59</b>
3.28.3.28.3-30.000.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.571.250,00	130.972.980,00	(76.598.270,00)	63,16
3.28.3.28.3-30.000.01.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.964.972.866,00	2.711.216.547,96	(253.756.318,04)	91,44
<b>3.31</b>	<b>Perindustrian</b>	<b>1.489.729.920,00</b>	<b>1.257.034.543,00</b>	<b>(232.695.377,00)</b>	<b>87,07</b>
3.31.2-18.3-31.2-07.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.489.729.920,00	1.257.034.543,00	(232.695.377,00)	87,07
3.31.2-18.3-31.2-07.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.485.229.920,00</b>	<b>1.252.534.543,00</b>	<b>(232.695.377,00)</b>	<b>87,03</b>
3.31.2-18.3-31.2-07.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2-18.3-31.2-07.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.485.229.920,00	1.252.534.543,00	(232.695.377,00)	87,03
3.31.2-18.3-31.2-07.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
3.31.2-18.3-31.2-07.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>115.455.661.314,00</b>	<b>100.457.211.176,43</b>	<b>(14.998.450.135,57)</b>	<b>87,01</b>
<b>4.01</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>74.064.123.762,00</b>	<b>67.871.387.882,43</b>	<b>(7.092.735.879,57)</b>	<b>90,54</b>
4.01.4-41.0-00.0-00.02	Sekretariat Daerah	74.064.123.762,00	67.871.387.882,43	(7.092.735.879,57)	90,54
4.01.4-41.0-00.0-00.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>65.291.922.881,00</b>	<b>58.235.368.015,05</b>	<b>(6.056.614.865,95)</b>	<b>90,71</b>
4.01.4-41.0-00.0-00.02.5.1.1	Belanja Pegawai	13.620.338.881,00	12.778.575.773,00	(841.763.108,00)	93,82

2/1/19

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANUGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.01.4-01.0-00.0-00.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32.255.054.000,00	38.585.152.657,05	(3.070.801.342,95)	89,62
4.01.4-01.0-00.0-00.02.5.1.5	Belanja Hibah	19.415.430.000,00	17.861.579.585,00	(1.553.850.415,00)	92,00
4.01.4-01.0-00.0-00.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	9.672.200.801,00	8.646.079.867,38	(1.026.121.013,62)	89,39
4.01.4-01.0-00.0-00.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.104.852.876,00	5.189.211.285,14	(915.641.590,86)	85,00
4.01.4-01.0-00.0-00.02.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	549.348.005,00	442.010.036,24	(107.338.968,76)	80,46
4.01.4-01.0-00.0-00.02.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.018.000.000,00	3.014.859.546,00	(3.150.454,00)	99,90
<b>4.02</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	40.491.517.552,00	32.585.823.296,00	(7.905.714.256,00)	80,48
4.02.4-02.0-00.0-00.02	<b>Sekretariat DPRD</b>	40.491.517.552,00	32.585.823.296,00	(7.905.714.256,00)	80,48
4.02.4-02.0-00.0-00.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	36.236.589.552,00	30.438.482.888,00	(5.808.106.664,00)	83,97
4.02.4-02.0-00.0-00.02.5.1.1	Belanja Pegawai	14.838.111.344,00	13.205.370.031,00	(1.632.741.313,00)	89,00
4.02.4-02.0-00.0-00.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.398.478.208,00	17.223.112.857,00	(4.175.365.351,00)	80,49
4.02.4-02.0-00.0-00.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	4.254.948.000,00	2.157.340.428,00	(2.097.607.572,00)	50,70
4.02.4-02.0-00.0-00.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.174.448.000,00	1.157.521.830,00	(2.021.926.190,00)	36,31
4.02.4-02.0-00.0-00.02.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.010.000.000,00	1.094.818.618,00	(5.181.382,00)	99,49
4.02.4-02.0-00.0-00.02.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70.500.000,00	0,00	(70.500.000,00)	0,00
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	47.317.196.608,00	38.621.275.212,00	(8.695.923.476,00)	81,62
<b>5.01</b>	<b>Perencanaan</b>	6.634.821.893,00	5.937.496.031,00	(697.327.862,00)	89,49
5.01.5-01.5-05.0-00.01	<b>Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan</b>	6.634.821.893,00	5.937.496.031,00	(697.327.862,00)	89,49
5.01.5-01.5-05.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6.501.410.893,00	5.848.986.031,00	(652.424.862,00)	89,96
5.01.5-01.5-05.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	4.466.321.425,00	4.270.116.234,00	(196.207.201,00)	95,61
5.01.5-01.5-05.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.035.087.468,00	1.578.869.807,00	(456.217.661,00)	77,58
5.01.5-01.5-05.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	131.411.000,00	88.510.000,00	(44.903.000,00)	66,34
5.01.5-01.5-05.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.411.000,00	88.510.000,00	(44.903.000,00)	66,34
<b>5.02</b>	<b>Keuangan</b>	32.362.837.918,00	25.085.525.503,00	(7.277.312.407,00)	77,51
5.02.5-02.0-00.0-00.01	<b>Badan Keuangan</b>	32.362.837.918,00	25.085.525.503,00	(7.277.312.407,00)	77,51
5.02.5-02.0-00.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	18.108.000.623,00	15.828.050.290,00	(2.279.950.333,00)	87,41
5.02.5-02.0-00.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	11.696.292.041,00	9.987.259.944,00	(1.708.032.097,00)	90,01
5.02.5-02.0-00.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.011.716.582,00	5.840.790.346,00	(1.170.926.236,00)	83,30
5.02.5-02.0-00.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	488.162.628,00	466.037.863,00	(21.124.765,00)	95,47
5.02.5-02.0-00.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	488.162.628,00	466.037.863,00	(21.124.765,00)	95,47
5.02.5-02.0-00.0-00.01.5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	5.000.000.000,00	271.437.350,00	(4.728.562.650,00)	5,43
5.02.5-02.0-00.0-00.01.5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	271.437.350,00	(4.728.562.650,00)	5,43
5.02.5-02.0-00.0-00.01.5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	3.766.666.667,00	8.520.000.000,00	(246.666.667,00)	97,19
5.02.5-02.0-00.0-00.01.5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	3.766.666.667,00	8.520.000.000,00	(246.666.667,00)	97,19

819

MOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
<b>5-03</b>	<b>Kepegawalan</b>	6.980.801.349,00	6.358.429.724,00	(622.371.625,00)	91,08
5.03.5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.980.801.349,00	6.358.429.724,00	(622.371.625,00)	91,08
5.03.5-03.5-04.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6.892.626.349,00	6.277.732.724,00	(614.893.625,00)	91,08
5.03.5-03.5-04.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3.655.681.037,00	3.467.086.532,00	(188.594.485,00)	94,84
5.03.5-03.5-04.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.086.945.312,00	2.676.641.316,00	(410.303.996,00)	86,71
5.03.5-03.5-04.0-00.01.5.1.5	Belanja Hibah	150.000.000,00	134.004.876,00	(15.995.144,00)	89,34
5.03.5-03.5-04.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	88.175.000,00	86.697.000,00	(1.478.000,00)	91,52
5.03.5-03.5-04.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.175.000,00	86.697.000,00	(1.478.000,00)	91,52
<b>5-04</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>	960.864.536,00	930.157.781,00	(30.706.755,00)	96,80
5.04.5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	960.864.536,00	930.157.781,00	(30.706.755,00)	96,80
5.04.5-03.5-04.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	897.464.536,00	874.927.906,00	(22.536.630,00)	97,49
5.04.5-03.5-04.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00
5.04.5-03.5-04.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	896.714.536,00	874.927.906,00	(21.786.630,00)	97,57
5.04.5-03.5-04.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	63.400.000,00	55.229.875,00	(8.170.125,00)	87,11
5.04.5-03.5-04.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.400.000,00	52.229.875,00	(8.170.125,00)	86,47
5.04.5-03.5-04.0-00.01.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
<b>5-05</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	377.871.000,00	309.666.173,00	(68.204.827,00)	81,95
5.05.5-01.5-05.0-00.01	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	377.871.000,00	309.666.173,00	(68.204.827,00)	81,95
5.05.5-01.5-05.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	377.871.000,00	309.666.173,00	(68.204.827,00)	81,95
5.05.5-01.5-05.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5-01.5-05.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	377.871.000,00	309.666.173,00	(68.204.827,00)	81,95
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	8.473.210.882,00	7.328.446.153,00	(1.144.764.729,00)	86,49
<b>6-01</b>	<b>Inspektorat</b>	8.473.210.882,00	7.328.446.153,00	(1.144.764.729,00)	86,49
6.01.6-01.0-00.0-00.01	Inspektorat	8.473.210.882,00	7.328.446.153,00	(1.144.764.729,00)	86,49
6.01.6-01.0-00.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	8.271.310.882,00	7.188.556.121,00	(1.082.754.761,00)	86,91
6.01.6-01.0-00.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	6.536.473.746,00	5.709.602.910,00	(827.870.836,00)	87,34
6.01.6-01.0-00.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.734.837.136,00	1.478.953.211,00	(255.883.925,00)	85,28
6.01.6-01.0-00.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	201.900.000,00	139.890.032,00	(62.009.968,00)	69,29
6.01.6-01.0-00.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201.900.000,00	139.890.032,00	(62.009.968,00)	69,29
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	46.103.552.461,00	43.413.270.856,07	(2.690.281.604,93)	94,16
<b>7-01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)</b>	46.103.552.461,00	43.413.270.856,07	(2.690.281.604,93)	94,16
7.01.7-01.0-00.0-00.01	Kecamatan Mendiangan Koto Selayan	17.091.427.558,00	16.038.641.632,07	(1.052.785.925,93)	93,84
7.01.7-01.0-00.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	16.085.478.558,00	15.130.903.710,43	(954.556.847,57)	94,07

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	
7.01.7-01.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	9.189.560.794,00	8.820.038.207,00	(368.622.587,00)	95,99
7.01.7-01.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.395.310.764,00	4.860.681.997,00	(534.628.767,00)	90,99
7.01.7-01.0-00.01.5.1.5	Belanja Hibah	1.500.607.000,00	1.449.301.506,43	(51.305.493,57)	96,58
7.01.7-01.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1.005.049.000,00	907.719.911,64	(98.229.088,36)	90,24
7.01.7-01.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	840.449.000,00	802.995.335,00	(37.453.665,00)	95,54
7.01.7-01.0-00.01.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.000.000,00	71.596.576,64	(55.403.423,36)	56,38
7.01.7-01.0-00.01.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	38.500.000,00	33.128.000,00	(5.372.000,00)	86,05
7.01.7-01.0-00.01.5.2	<b>Kecamatan Guguk Panjang</b>	14.817.737.145,00	13.696.503.046,00	(1.121.234.099,00)	91,83
7.01.7-01.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	14.436.045.845,00	13.384.560.355,00	(1.053.485.490,00)	92,70
7.01.7-01.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	7.908.510.802,00	7.199.609.204,00	(708.660.598,00)	91,04
7.01.7-01.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.594.526.043,00	5.220.606.070,00	(383.919.973,00)	94,84
7.01.7-01.0-00.01.5.1.5	Belanja Hibah	1.025.000.000,00	964.295.081,00	(60.704.919,00)	94,08
7.01.7-01.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	379.691.300,00	311.942.690,00	(67.748.610,00)	82,16
7.01.7-01.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	379.691.300,00	311.942.690,00	(67.748.610,00)	82,16
7.01.7-01.0-00.01.5.2	<b>Kecamatan Air Birugo Tiga Baleh</b>	14.194.387.758,00	13.678.126.189,00	(516.261.569,00)	96,36
7.01.7-01.0-00.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	13.764.900.358,00	13.274.791.401,00	(490.117.957,00)	96,44
7.01.7-01.0-00.01.5.1.1	Belanja Pegawai	8.388.611.000,00	8.013.649.171,00	(372.963.835,00)	95,35
7.01.7-01.0-00.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.299.296.352,00	4.184.729.230,00	(114.567.122,00)	97,34
7.01.7-01.0-00.01.5.1.5	Belanja Hibah	1.079.000.000,00	1.076.413.000,00	(2.587.000,00)	99,76
7.01.7-01.0-00.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	423.678.400,00	403.334.788,00	(20.343.612,00)	93,91
7.01.7-01.0-00.01.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	325.478.400,00	324.264.500,00	(212.900,00)	98,42
7.01.7-01.0-00.01.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.000.000,00	79.070.288,00	(28.929.712,00)	79,07
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	5.834.098.226,00	4.875.176.058,00	(958.922.168,00)	83,56
<b>8.01</b>	<b>Kecamatan Bangsa dan Politik</b>	5.834.098.226,00	4.875.176.058,00	(958.922.168,00)	83,56
8.01.8-01.1-05.0-00.04	Kantor Kecamatan Bangsa dan Politik	5.834.098.226,00	4.875.176.058,00	(958.922.168,00)	83,56
8.01.8-01.1-05.0-00.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.598.248.226,00	4.654.091.058,00	(944.157.168,00)	83,28
8.01.8-01.1-05.0-00.04.5.1.1	Belanja Pegawai	1.564.647.600,00	1.344.370.742,00	(220.276.858,00)	87,20
8.01.8-01.1-05.0-00.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.112.953.100,00	2.499.761.276,00	(613.191.824,00)	77,41
8.01.8-01.1-05.0-00.04.5.1.5	Belanja Hibah	919.647.526,00	879.952.040,00	(39.695.486,00)	95,63
8.01.8-01.1-05.0-00.04.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	245.850.000,00	221.092.000,00	(24.758.000,00)	89,93
8.01.8-01.1-05.0-00.04.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	245.850.000,00	221.092.000,00	(24.758.000,00)	89,93
<b>5</b>	<b>PEMBAYARAN DAERAH</b>				
<b>5.02</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
	Kecamatan				

8/A

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERUBAH / (BERUBAH)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.021-02.9-00.0-00.01	Musren Wanasari				
5.021-02.9-00.0-00.01.6.1	<b>PENERIMAAN PEMBAYARAN</b>	132.987.559.855,00	132.979.000.000,00	(8.538.964,10)	99,99
5.021-02.9-00.0-00.01.6.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	132.987.559.855,00	132.979.000.000,00	(8.538.964,10)	99,99
5.021-02.9-00.0-00.01.6.2	<b>PENGELUARAN PEMBAYARAN</b>	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
5.021-02.9-00.0-00.01.6.2.2	Pembiayaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00



Bukittinggi, 16 Agustus 2023

EMMIN SAFAR





PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI

Lampiran 1.2 : Peraturan Daerah Kota Bukittinggi

Nomor : 3 Tahun 2023

Tanggal : 16 Agustus 2023

**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	714.157.721.650,00	698.402.380.323,22	97,79	688.635.054.453,61
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	136.257.791.455,00	130.796.925.183,85	95,99	91.786.288.185,61
4.1.1	Pajak Daerah	50.369.851.261,00	49.570.750.396,80	98,61	40.765.025.993,00
4.1.2	Retribusi Daerah	48.684.034.000,00	46.562.398.969,80	95,85	27.401.880.331,00
4.1.3	Hasil Pengabdian Masyarakat Daerah yang Dipasihkan	7.505.000.000,00	6.641.291.925,80	88,49	5.482.031.608,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	28.798.905.194,00	27.922.883.891,85	93,70	18.137.350.333,61
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	577.899.930.194,00	567.387.873.682,80	98,18	593.762.137.738,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	543.423.791.657,00	533.574.902.562,80	98,00	561.086.880.504,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	543.423.791.657,00	533.574.902.562,80	98,00	515.555.324.504,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	45.531.556.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.476.138.537,00	34.812.971.120,80	100,98	32.675.257.234,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	34.076.138.537,00	34.812.971.120,80	100,99	32.675.257.234,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	400.000.000,00	400.000.000,80	100,00	0,00
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	0,00	217.587.457,17	0,00	3.086.628.538,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	217.587.457,17	0,00	3.086.628.538,00
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	837.145.381.505,00	744.059.199.525,66	88,88	650.051.328.563,46
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	675.422.845.486,00	611.262.131.931,10	90,50	555.168.586.206,11
5.1.1	Badan Pegawai	325.444.707.669,00	301.384.096.541,66	92,61	296.371.615.555,25
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	305.912.138.291,00	264.544.058.412,28	87,02	236.089.663.077,48
5.1.4	Badan Subsidi	3.305.520.000,00	2.910.989.766,00	88,08	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	41.423.478.526,00	40.192.987.711,16	94,74	21.027.307.017,43
5.1.6	Badanja Bantuan Sosial	2.255.000.000,00	2.230.000.000,00	98,89	1.080.000.000,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	147.955.769.353,00	124.065.630.244,56	83,81	93.038.615.113,36
5.2.1	Badanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Nests	68.312.518.236,00	48.131.479.720,00	70,80	42.231.774.799,89
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.140.307.759,00	25.739.508.574,06	77,67	23.949.425.057,53
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Infrast	49.760.228.857,00	45.505.351.384,50	91,44	24.162.072.116,02
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.742.714.500,00	4.633.690.566,00	97,70	3.695.363.180,00

8.1A

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	5.600.000.000,00	271.437.356,00	5,43	1.844.307.190,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.600.000.000,00	271.437.350,00	5,43	1.844.307.190,00
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	8.766.666.667,00	8.520.000.000,00	97,19	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	8.766.666.667,00	8.520.000.000,00	97,19	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(122.987.559.855,00)	(45.656.813.202,46)	37,12	38.583.725.890,15
6.	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	132.987.559.855,00	132.979.000.890,00	99,99	94.403.833.965,75
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	132.987.559.855,00	132.979.000.890,00	99,99	94.377.677.512,75
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	26.756.453,00
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	10.600.000.000,00	10.600.000.000,00	100,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.600.000.000,00	10.600.000.000,00	100,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	122.987.559.855,00	122.979.000.890,96	99,99	94.403.833.965,75
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	0,00	77.322.187.698,46	0,00	132.987.559.855,90

Bukittinggi, 16 Agustus 2023  
**WALIKOTA BUKITTINGGI**  




KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	(Rp)	(%)
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	663,861,392.00	623,649,680.00	(60,212,712.00)	91.20	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Kebutuhan Asisten/ Lain-lain/ Peningkatan Anggaran Kantor	5,603,000.00	5,603,000.00	0.00	100.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5,603,000.00	5,603,000.00	0.00	100.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5,603,000.00	5,603,000.00	0.00	100.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36,849,500.00	36,849,500.00	0.00	100.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	36,849,500.00	36,849,500.00	0.00	100.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	36,849,500.00	36,849,500.00	0.00	100.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Ruang Cetak dan Penggandaan	11,655,000.00	11,354,550.00	(300,450.00)	97.42	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	11,655,000.00	11,354,550.00	(300,450.00)	97.42	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11,655,000.00	11,354,550.00	(300,450.00)	97.42	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Kebutuhan Tantu	11,720,000.00	4,435,750.00	(7,284,250.00)	37.85	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	11,720,000.00	4,435,750.00	(7,284,250.00)	37.85	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11,720,000.00	4,435,750.00	(7,284,250.00)	37.85	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.09	Penyediaan Jasa Konsultasi dan Konsultan SPPD	224,600,000.00	217,852,312.00	(6,747,688.00)	97.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	224,600,000.00	217,852,312.00	(6,747,688.00)	97.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	224,600,000.00	217,852,312.00	(6,747,688.00)	97.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SPPD	362,434,402.00	347,554,568.00	(14,879,834.00)	96.20	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.11.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	362,434,402.00	347,554,568.00	(14,879,834.00)	96.20	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.11.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.11.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	362,434,402.00	347,554,568.00	(14,879,834.00)	96.20	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.11.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	191,161,000.00	152,810,300.00	(38,350,700.00)	79.94	

R.A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.06.11.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Hutan	191,161,000.00	152,810,300.00	(38,350,700.00)	79.94
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.09	<b>Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah</b>	148,450,000.00	68,973,238.00	(80,476,762.00)	46.42
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,450,000.00	7,450,000.00	0.00	100.00
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.08.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	7,450,000.00	7,450,000.00	0.00	100.00
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.08.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7,450,000.00	7,450,000.00	0.00	100.00
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.08.02	Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141,000,000.00	99,523,238.00	(41,476,762.00)	70.59
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.08.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	141,000,000.00	99,523,238.00	(41,476,762.00)	70.59
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.08.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.08.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	141,000,000.00	99,523,238.00	(41,476,762.00)	70.59
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Modal Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah</b>	365,000,000.00	688,682,022.16	323,682,022.16	188.68
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.09.01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,190,000.00	21,184,350.00	(18,005,650.00)	54.06
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.09.01.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	39,190,000.00	21,184,350.00	(18,005,650.00)	54.06
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.09.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39,190,000.00	21,184,350.00	(18,005,650.00)	54.06
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.09.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Asuransi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	429,350,000.00	179,736,725.00	(249,613,275.00)	41.87
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	219,350,000.00	170,736,725.00	(48,613,275.00)	77.84
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	219,350,000.00	170,736,725.00	(48,613,275.00)	77.84
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	15,000,000.00	14,461,000.00	(539,000.00)	96.41
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.09.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	15,000,000.00	14,461,000.00	(539,000.00)	96.41
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.09.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.09.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	14,461,000.00	(539,000.00)	96.41
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	462,049,300.00	462,218,957.16	169,657.16	100.26

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	5 (Rp)	6 (%)
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	485,049,300.00	475,235,957.18	(9,823,342.82)	97.97
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	10,250,000.00	4,500,000.00	(5,750,000.00)	43.90
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	474,799,300.00	470,735,957.18	(4,073,342.82)	99.14
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.09.09.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	100.00
1.01.1-01.2-22.0-00.01.01.2.09.09.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	100.00
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	73,533,310,244.00	71,205,317,762.45	(2,328,002,481.55)	96.96
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	47,026,635,272.00	40,145,112,806.09	(6,881,522,465.91)	97.14
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5,044,213,672.00	5,030,945,124.61	(1,268,547.39)	99.77
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	60,350,000.00	54,100,000.00	(6,250,000.00)	89.64
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.06.5.1.1	Belanja Pegawai	60,350,000.00	54,100,000.00	(6,250,000.00)	89.64
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.06.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	4,844,363,672.00	4,976,845,124.61	7,518,547.39	99.85
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.06.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,844,363,672.00	4,976,845,124.61	7,518,547.39	99.85
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.08	<b>Rehabilitasi Sekolah Besar Ruang Kelas</b>	650,163,500.00	646,465,911.21	(3,697,588.79)	99.45
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	12,800,000.00	9,250,000.00	(3,550,000.00)	72.27
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.08.5.1.1	Belanja Pegawai	12,800,000.00	9,250,000.00	(3,550,000.00)	72.27
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.08.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	637,363,500.00	637,215,911.21	(147,588.79)	100.00
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.08.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	637,363,500.00	637,215,911.21	(147,588.79)	100.00
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.09	<b>Rehabilitasi Sekolah Besar Ruang Guru/Kepala Sekolah/TK</b>	123,035,000.00	123,628,237.07	593,237.07	99.77
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,550,000.00	3,250,000.00	(300,000.00)	91.55
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.09.5.1.1	Belanja Pegawai	3,550,000.00	3,250,000.00	(300,000.00)	91.55
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.09.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	130,385,000.00	130,378,237.07	(6,762.93)	100.00
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.09.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	130,385,000.00	130,378,237.07	(6,762.93)	100.00
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.10	<b>Rehabilitasi Sekolah Besar Ruang Unit Kesehatan Sekolah</b>	122,412,800.00	122,105,917.78	(306,882.22)	99.75
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.10.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,350,000.00	3,250,000.00	(100,000.00)	91.55
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.10.5.1.1	Belanja Pegawai	3,350,000.00	3,250,000.00	(100,000.00)	91.55
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.10.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	119,062,800.00	118,855,917.78	(2,062,222.22)	100.00
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.10.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	119,062,800.00	118,855,917.78	(2,062,222.22)	100.00

8/14

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	(Rp)	(%)
					4	5
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.12	Renovasi Gedung/Berat Siswa, Prasarana dan Fasilitas Sekolah	1.227.495.000,00	1.315.655.571,02	(71.639.428,96)	95,12	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.12.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	36.850.000,00	29.250.000,00	(7.600.000,00)	79,36	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.12.5.1.1	Belanja Pegawai	36.850.000,00	29.250.000,00	(7.600.000,00)	79,36	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.12.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1.290.645.000,00	1.286.685.571,02	(4.039.428,98)	99,69	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.12.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.290.645.000,00	1.286.685.571,02	(4.039.428,98)	99,69	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	559.450.000,00	554.600.250,00	(4.849.750,00)	99,13	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.14.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	9.450.000,00	5.000.000,00	(4.450.000,00)	52,91	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.14.5.1.1	Belanja Pegawai	9.450.000,00	5.000.000,00	(4.450.000,00)	52,91	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.14.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	550.000.000,00	549.600.250,00	(399.750,00)	99,91	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.14.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	550.000.000,00	549.600.250,00	(399.750,00)	99,91	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.15	Pengadaan Alat Ransum Tenaga Sekolah	155.280.000,00	151.794.666,20	(3.485.333,80)	97,76	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.15.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2.900.000,00	1.700.000,00	(1.200.000,00)	58,62	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.15.5.1.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	1.700.000,00	(1.200.000,00)	58,62	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.15.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	152.380.000,00	150.094.666,20	(2.285.333,80)	98,59	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.15.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	152.380.000,00	150.094.666,20	(2.285.333,80)	98,59	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.16	Pengadaan Perengkapan Sekolah	247.504.250,00	237.300.000,00	(10.204.250,00)	95,26	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.16.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.16.5.1.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.16.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	246.304.250,00	237.300.000,00	(9.004.250,00)	96,75	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.16.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	246.304.250,00	237.300.000,00	(9.004.250,00)	96,75	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.17	Pengadaan Perengkapan Siswa	946.560.000,00	946.692.600,00	132.600,00	99,89	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.17.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	946.560.000,00	946.692.600,00	132.600,00	99,89	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.17.5.1.1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	1.500.000,00	(750.000,00)	66,67	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.17.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	944.310.000,00	944.192.600,00	(117.400,00)	99,99	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personal Asisten, Dosen, Sekolah Dasar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	

8.19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETILAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
					3	4
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.21.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.21.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.21.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.22	<b>BELANJA OPERASI</b>	5,391,000,000.00	5,305,774,791.00	(85,225,209.00)	96.42	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.22.5.1	Belanja Pegawai	560,000,000.00	547,877,141.00	(12,102,859.00)	97.79	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.22.5.1.1	Belanja Pegawai	17,150,000.00	15,000,000.00	(2,150,000.00)	87.46	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.22.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	543,130,000.00	532,877,141.00	(10,252,859.00)	98.11	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.22.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	4,830,720,000.00	4,757,897,600.00	(72,822,400.00)	98.49	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.22.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Murni	4,830,720,000.00	4,757,897,600.00	(72,822,400.00)	98.49	
1.06.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.23	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,118,815,000.00	960,203,091.00	(168,411,909.00)	85.87	
1.06.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.23.5.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.06.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.23.5.1.1	Belanja Pegawai dan Jasa	1,118,815,000.00	960,203,091.00	(158,711,909.00)	85.81	
1.06.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.23.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	24,390,000.00	22,600,000.00	(1,700,000.00)	93.00	
1.06.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.23.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Murni	24,390,000.00	22,600,000.00	(1,700,000.00)	93.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.24	<b>BELANJA OPERASI</b>	105,668,000.00	91,361,410.00	(12,307,590.00)	86.35	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.24.5.1	Belanja Pegawai	105,668,000.00	91,361,410.00	(12,307,590.00)	86.35	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.24.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.24.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	105,668,000.00	91,361,410.00	(12,307,590.00)	86.35	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.25	<b>BELANJA OPERASI</b>	309,094,750.00	287,489,121.00	(22,505,629.00)	92.74	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.25.5.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.25.5.1.1	Belanja Pegawai	309,094,750.00	287,489,121.00	(22,505,629.00)	92.74	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.25.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.26	<b>BELANJA OPERASI</b>	9,571,247,600.00	9,018,876,694.00	(552,470,906.00)	94.29	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.26.5.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	(552,470,906.00)	94.23	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.26.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	

8/A



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		AMGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)	(%)
		3	4	5	6	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.26.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.571.247.500,00	9.018.876.694,00	(552.370.806,00)	94,23	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.26.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	19.200.000,00	19.092.000,00	(108.000,00)	99,44	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.26.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	19.200.000,00	19.092.000,00	(108.000,00)	99,44	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.27.5.1.2	Pengembangan Kurikulum dan Tenaga Kejuruan pada Sekolah Pendidikan Sekolah Dasar	265.949.800,00	265.788.920,00	(160.880,00)	99,94	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.27.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	265.949.800,00	265.788.920,00	(160.880,00)	99,94	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.27.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.27.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	265.949.800,00	265.788.920,00	(160.880,00)	99,94	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.28.5.1.2	Amplifikasi Kebutuhan dan Manajemen Sekolah	774.445.000,00	735.122.950,00	(39.322.050,00)	95,29	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.28.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	774.445.000,00	735.122.950,00	(39.322.050,00)	95,07	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.28.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.28.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	196.445.000,00	195.162.950,00	(127.050,00)	80,54	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.28.5.1.5	Belanja Hibah	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.28.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	35.000.000,00	34.965.000,00	(35.000,00)	99,90	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.28.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	35.000.000,00	34.965.000,00	(35.000,00)	99,90	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.29	Penyediaan Dana BOS Sekolah Dasar	14.467.500.000,00	14.158.364.182,00	(309.135.818,00)	98,14	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.29.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	12.341.937.394,00	12.098.762.804,00	(243.174.590,00)	98,03	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.29.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.29.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.833.937.394,00	6.638.608.869,00	(195.328.525,00)	97,14	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.29.5.1.5	Belanja Hibah	5.508.000.000,00	5.460.153.937,00	(47.846.063,00)	99,13	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.29.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	2.125.562.696,00	2.099.601.316,00	(25.961.380,00)	98,78	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.29.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	1.597.938.496,00	1.575.659.316,00	(22.279.180,00)	98,61	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.29.5.2.5	Belanja Modal Kelembagaan dan Lainnya	527.624.200,00	523.942.000,00	(3.682.200,00)	99,30	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02	<b>Pembelian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	21.489.051.434,00	20.614.417.480,77	(874.634.013,23)	95,93	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.046.442.266,00	2.024.677.487,60	(21.764.778,40)	98,96	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.12.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2.046.442.266,00	2.008.282.244,41	(38.160.021,59)	98,13	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.12.5.1.1	Belanja Pegawai	38.950.000,00	33.200.000,00	(5.750.000,00)	85,24	

P.19



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.26.5.1.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.26.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	199.230.000,00	190.042.242,85	(1.187.757,15)	99,49	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.26.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	199.230.000,00	198.042.242,85	(1.187.757,15)	99,49	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.27	Pengadaan Peralengkapan Sekolah	62.000.000,00	60.871.450,00	(1.128.550,00)	98,18	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.27.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	62.000.000,00	60.871.450,00	(1.128.550,00)	98,18	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.27.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	62.000.000,00	60.871.450,00	(1.128.550,00)	98,18	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.28	Pengadaan Peralengkapan Siswa	546.460.000,00	545.667.600,00	(792.400,00)	99,85	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.28.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	546.460.000,00	545.667.600,00	(792.400,00)	99,85	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.28.5.1.1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	1.500.000,00	(750.000,00)	66,67	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.28.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	544.210.000,00	544.167.600,00	(42.400,00)	99,99	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.32.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.32.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.32.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Pabrik dan Alaspa Siswa	2.654.460.000,00	2.587.841.000,00	(66.619.000,00)	97,64	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.35.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	9.790.000,00	9.517.500,00	(272.500,00)	97,22	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.35.1.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	6.250.000,00	(550.000,00)	96,32	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.35.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.990.000,00	2.967.500,00	(22.500,00)	99,25	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.35.2	<b>BELANJA MODAL</b>	2.644.670.000,00	2.582.323.500,00	(62.346.500,00)	97,64	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.35.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	2.644.670.000,00	2.582.323.500,00	(62.346.500,00)	97,64	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.36	Penyediaan dan Pemeliharaan Biaya Bahan dan Gaji bagi Peserta Didik	854.861.200,00	526.732.445,00	(328.128.755,00)	62,78	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.36.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	818.711.200,00	501.758.945,00	(316.952.255,00)	61,29	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.36.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.36.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	818.711.200,00	501.758.945,00	(316.952.255,00)	61,29	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.36.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	36.150.000,00	34.973.500,00	(1.176.500,00)	96,48	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.36.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	36.150.000,00	34.973.500,00	(1.176.500,00)	96,48	

81A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.37	Penyediaan dan Tindak Lanjut Pukulan Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	76.576.750,00	54.693.300,00	(21.683.450,00)	71,69
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.37.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	57.376.750,00	35.701.400,00	(21.675.350,00)	62,22
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.37.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.37.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	57.376.750,00	35.701.400,00	(21.675.350,00)	62,22
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.37.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	19.200.000,00	19.191.900,00	(8.100,00)	99,96
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.37.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	19.200.000,00	19.191.900,00	(8.100,00)	99,96
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.38	Amplasan Meubel, Bahan dan Kebutuhan Siswa	438.337.600,00	382.099.250,00	(57.238.350,00)	86,97
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.38.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	438.337.600,00	381.099.250,00	(57.238.350,00)	86,94
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.38.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.38.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	438.337.600,00	381.099.250,00	(57.238.350,00)	86,94
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.38.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.38.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.39	Penyediaan Persekolahan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.982.466.508,00	3.824.032.555,00	(146.433.953,00)	96,32
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.39.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3.976.516.508,00	3.830.002.055,00	(146.524.453,00)	96,32
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.39.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.39.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.976.516.508,00	3.830.002.055,00	(146.524.453,00)	96,32
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.39.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	3.950.000,00	3.940.500,00	(9.500,00)	99,76
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.39.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	3.950.000,00	3.940.500,00	(9.500,00)	99,76
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.40	Pengembangan Kurikulum dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	198.552.000,00	197.097.950,00	(1.454.050,00)	99,27
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.40.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	198.552.000,00	197.097.950,00	(1.454.050,00)	99,27
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.40.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.40.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	198.552.000,00	197.097.950,00	(1.454.050,00)	99,27
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.41	Amplasan Kebutuhan dan Manajemen Sekolah	862.476.000,00	803.680.600,00	(68.795.400,00)	94,34
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.41.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	862.476.000,00	813.680.600,00	(68.795.400,00)	94,34
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.41.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00

8.19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		AMGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	4	
					(Rp)	(%)
				5	6	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.41.5.1.1	Belanja Borang dan Jasa	288,101,000.00	243,700,800.00	(44,400,200.00)	84.51	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.41.5.1.5	Belanja Hibah	574,375,000.00	569,879,800.00	(4,495,200.00)	99.23	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.42	Anggaran Daru BOS Sekolah Menengah Pertama	6,865,100,000.00	6,667,972,926.00	(197,127,074.00)	97.42	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.42.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5,784,997,400.00	5,623,810,526.00	(161,186,874.00)	97.23	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.42.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.42.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,589,497,400.00	4,455,685,003.00	(133,812,397.00)	97.17	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.42.5.1.3	Belanja Hibah	1,194,600,000.00	1,164,124,723.00	(30,475,277.00)	97.45	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.42.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1,081,002,600.00	1,064,161,400.00	(16,841,200.00)	98.44	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.42.5.2.1	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	325,264,300.00	318,724,900.00	(6,539,400.00)	97.99	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.42.5.2.2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	755,738,300.00	745,436,500.00	(10,301,800.00)	98.64	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.42.5.2.3	<b>Pengadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	9,254,174,128.00	8,216,668,293.56	(1,037,505,834.44)	88.52	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.03	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Gedung PAUD	222,810,000.00	210,470,118.56	(12,339,881.44)	95.18	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.03.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	7,600,000.00	4,325,000.00	(3,275,000.00)	57.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.03.02.5.1.1	Belanja Pegawai	7,600,000.00	4,325,000.00	(3,275,000.00)	57.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.03.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	315,810,000.00	306,145,118.56	(9,664,881.44)	96.94	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.03.02.5.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	315,810,000.00	306,145,118.56	(9,664,881.44)	96.94	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.07	<b>Anggaran Aker PAUD</b>	54,200,000.00	51,647,150.00	(2,552,850.00)	95.29	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,050,000.00	850,000.00	(200,000.00)	80.95	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.07.5.1.1	Belanja Pegawai	1,050,000.00	850,000.00	(200,000.00)	80.95	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.07.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	53,250,000.00	51,797,150.00	(1,452,850.00)	97.10	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.07.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	53,250,000.00	51,797,150.00	(1,452,850.00)	97.10	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.13	<b>Pengembangan Proses Belajar PAUD</b>	293,395,962.00	279,603,476.00	(13,792,486.00)	95.34	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.13.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	154,902,902.00	141,306,476.00	(13,596,426.00)	91.22	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.13.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.13.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	154,902,902.00	141,306,476.00	(13,596,426.00)	91.22	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.13.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	38,497,000.00	38,497,000.00	0.00	100.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.13.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	38,497,000.00	38,497,000.00	0.00	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.14	Persiapan dan Tidak Dapat Efektif Sektors PBLD	47,438,000.00	0.00	(47,438,000.00)	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.14.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	47,438,000.00	0.00	(47,438,000.00)	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.14.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47,438,000.00	0.00	(47,438,000.00)	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.15	Persiapan Pemasok dan Tenaga Kependidikan bagi Sektors PBLD	3,468,400,536.00	3,434,942,879.00	(33,457,666.00)	99.04	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.15.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,468,400,536.00	3,434,942,879.00	(33,457,666.00)	99.04	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.15.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.15.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,468,400,536.00	3,434,942,879.00	(33,457,666.00)	99.04	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.15.2	<b>BELANJA MODAL</b>	15,000,000.00	14,985,000.00	(15,000.00)	99.90	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.15.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	15,000,000.00	14,985,000.00	(15,000.00)	99.90	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.16	Pengembangan Kapasitas dan Tenaga Kependidikan pada Sektors PBLD	19,017,000.00	18,938,900.00	(78,100.00)	99.64	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.16.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	15,119,000.00	15,030,900.00	(88,100.00)	98.21	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.16.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.16.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15,119,000.00	15,030,900.00	(88,100.00)	98.21	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.16.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	3,198,000.00	3,108,000.00	(90,000.00)	97.19	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.16.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	3,198,000.00	3,108,000.00	(90,000.00)	97.19	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.17	Pembinaan Kemandirian dan Manajemen PBLD	3,058,717,000.00	3,026,645,779.00	(32,071,221.00)	98.95	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.17.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,058,717,000.00	3,026,645,779.00	(32,071,221.00)	98.95	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.17.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.17.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,058,717,000.00	3,026,645,779.00	(32,071,221.00)	98.95	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.17.5.1.5	Belanja Hibah	2,663,250,000.00	2,648,250,000.00	(15,000,000.00)	99.44	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PBLD	2,174,251,000.00	2,177,535,000.00	3,284,000.00	100.13	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.18.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,102,174,525.00	2,104,958,525.00	2,784,000.00	100.13	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.18.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	78,623,525.00	78,071,525.00	(600,000.00)	99.24	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.18.5.1.5	Belanja Hibah	2,023,551,000.00	2,026,935,000.00	3,384,000.00	100.17	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.18.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	72,576,475.00	71,575,475.00	(1,001,000.00)	98.00	

8/19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		AMGGAH SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5	6	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.16.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	69,376,475.00	69,376,475.00	0.00	100.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.18.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	100.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	4,363,489,420.00	4,318,719,181.23	(44,770,238.77)	96.72	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	129,100,000.00	107,777,461.23	(21,322,538.77)	83.48	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	13,600,000.00	1,550,000.00	(12,050,000.00)	11.40	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.02.5.1.1	Belanja Pegawai	13,600,000.00	1,550,000.00	(12,050,000.00)	11.40	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	115,500,000.00	106,227,461.23	(9,272,538.77)	91.97	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.02.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115,500,000.00	106,227,461.23	(9,272,538.77)	91.97	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.10	<b>Penyediaan Biaya Personal Penerima Didik Nonformal/Kesetaraan</b>	34,190,000.00	34,190,000.00	0.00	100.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.10.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	34,190,000.00	34,190,000.00	0.00	100.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.10.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.10.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34,190,000.00	34,190,000.00	0.00	100.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.12	<b>Penyenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan</b>	99,010,000.00	91,625,282.00	(7,384,718.00)	92.54	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.12.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	54,010,000.00	46,633,082.00	(7,376,918.00)	86.34	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.12.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.12.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54,010,000.00	46,633,082.00	(7,376,918.00)	86.34	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.12.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	45,000,000.00	44,992,200.00	(7,800.00)	99.96	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.12.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	45,000,000.00	44,992,200.00	(7,800.00)	99.96	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.14	<b>Penyediaan Aset Tetap dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	231,934,920.00	221,754,790.00	(10,180,130.00)	96.93	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.14.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	331,934,920.00	321,754,790.00	(10,180,130.00)	96.93	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.14.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.14.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	331,934,920.00	321,754,790.00	(10,180,130.00)	96.93	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.15	<b>Anggaran Lain Penerima dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	28,775,000.00	26,060,000.00	(2,715,000.00)	90.56	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.15.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	28,775,000.00	26,060,000.00	(2,715,000.00)	90.56	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.15.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	

819

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5	6	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.15.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.775.000,00	26.060.000,00	(715.000,00)	90,56	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.16	Ambalan Kolektibilitas dan Ambalan Sektoral Nonformal/Kooperasian	21.478.500,00	16.371.000,00	(5.107.500,00)	85,25	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.16.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	21.478.500,00	18.311.850,00	(3.167.650,00)	85,25	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.16.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.16.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.478.500,00	18.311.850,00	(3.167.650,00)	85,25	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.17	Pengabdian Desa RCP Sektoral Nonformal/Kooperasian	718.000,00	718.000,00	(0,00)	100,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.17.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	654.000,00	654.000,00	(0,00)	100,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.17.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	186.385,000,00	186.384,796,00	(200,00)	100,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.17.5.1.5	Belanja Hibah	468.500,000,00	468.500,000,00	0,00	100,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.17.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	64.115,000,00	64.115,000,00	0,00	100,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.02.2.04.17.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.115,000,00	64.115,000,00	0,00	100,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.03	<b>Program Pengembangan Kurikulum</b>	131.830,000,00	128.121,626,00	(3.708,374,00)	97,19	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.03.2.01	<b>Pendataan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	171.830,000,00	128.121,626,00	(43.708,374,00)	97,19	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	65.653,000,00	62.292,726,00	(3.360,274,00)	94,88	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.03.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	65.653,000,00	62.292,726,00	(3.360,274,00)	94,88	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.03.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.03.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.653,000,00	62.292,726,00	(3.360,274,00)	94,88	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.03.2.01.02	Penyusunan Sistem Muatan Lokal Pendidikan Dasar	66.177,000,00	65.828,900,00	(348,100,00)	99,47	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.03.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	66.177,000,00	65.828,900,00	(348,100,00)	99,47	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.03.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.03.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	66.177,000,00	65.828,900,00	(348,100,00)	99,47	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.04	<b>Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</b>	244.380,000,00	243.089,490,00	(1.290,510,00)	99,47	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.04.2.01	<b>Pemertanian Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Awal Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kooperasian</b>	244.380,000,00	243.089,490,00	(1.290,510,00)	99,47	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.04.2.01.01	Pembayaran dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kooperasian	244.380,000,00	243.089,490,00	(1.290,510,00)	99,47	



13/11

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	(Rp)	(%)
1.01.1-01.2-22.0-00.01.04.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai	244.380.000,00	243.889.450,00	(1.296.510,00)	99,47	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.04.2.01.01.5.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.04.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	153.380.000,00	152.989.490,00	(1.296.510,00)	99,16	
1.01.1-01.2-22.0-00.01.04.2.01.01.5.1.5	Belanja Hibah	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	100,00	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.02	Program Pengembangan Kebudayaan	796.136.000,00	593.814.015,00	(202.321.985,00)	74,59	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	252.492.000,00	192.471.420,00	(59.020.580,00)	76,62	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemantapan Objek Pemajuan Kebudayaan	252.492.000,00	192.471.420,00	(59.020.580,00)	76,62	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.01.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.02.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	252.492.000,00	192.471.420,00	(59.020.580,00)	76,62	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	101.504.000,00	59.503.750,00	(42.000.250,00)	58,62	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemantapan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	101.504.000,00	59.503.750,00	(42.000.250,00)	58,62	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.01.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.02.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	101.504.000,00	59.503.750,00	(42.000.250,00)	58,62	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03	Pembinaan Lambaga Adat yang Pengantunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	442.140.000,00	340.838.895,00	(101.301.105,00)	77,09	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Praritu Adat	442.140.000,00	340.838.895,00	(101.301.105,00)	77,09	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.02.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	442.140.000,00	340.838.895,00	(101.301.105,00)	77,09	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.02.2.03.02.5.1.5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	386.375.000,00	386.315.000,00	(60.000,00)	99,98	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.03.2.01	Pemeliharaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	386.375.000,00	386.315.000,00	(60.000,00)	99,98	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.03.2.01.03	Pemeliharaan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	386.375.000,00	386.315.000,00	(60.000,00)	99,98	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.03.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	386.375.000,00	386.315.000,00	(60.000,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.03.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22.1-01.2-22.0-00.01.03.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000.00	49,945,000.00	(60,000.00)	(60,000.00)	99.88
2.22.1-01.2-22.0-00.01.03.2.01.03.5.1.5	Belanja Hibah	336,375,000.00	336,375,000.00	0.00	0.00	100.00
2.22.1-01.2-22.0-00.01.05	<b>Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>	80,493,000.00	73,823,575.00	(7,667,425.00)	(7,667,425.00)	90.47
2.22.1-01.2-22.0-00.01.05.2.01	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	36,153,000.00	30,894,300.00	(5,259,700.00)	(5,259,700.00)	80.32
2.22.1-01.2-22.0-00.01.05.2.01.01	Pendanaan Cagar Budaya Cagar Budaya	44,680,000.00	42,373,880.00	(2,306,120.00)	(2,306,120.00)	90.45
2.22.1-01.2-22.0-00.01.05.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	13,680,000.00	12,373,880.00	(1,306,120.00)	(1,306,120.00)	90.45
2.22.1-01.2-22.0-00.01.05.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22.1-01.2-22.0-00.01.05.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13,680,000.00	12,373,880.00	(1,306,120.00)	(1,306,120.00)	90.45
2.22.1-01.2-22.0-00.01.05.2.01.02	<b>Penetapan Cagar Budaya</b>	20,513,000.00	18,510,500.00	(2,002,500.00)	(2,002,500.00)	90.24
2.22.1-01.2-22.0-00.01.05.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	7,566,000.00	5,563,500.00	(2,002,500.00)	(2,002,500.00)	73.53
2.22.1-01.2-22.0-00.01.05.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22.1-01.2-22.0-00.01.05.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7,566,000.00	5,563,500.00	(2,002,500.00)	(2,002,500.00)	73.53
2.22.1-01.2-22.0-00.01.05.2.01.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	12,947,000.00	12,947,000.00	0.00	0.00	100.00
2.22.1-01.2-22.0-00.01.05.2.01.02.5.2.2	Belanja Modal Perabotan dan Mesin	12,947,000.00	12,947,000.00	0.00	0.00	100.00
2.22.1-01.2-22.0-00.01.05.2.02	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	46,300,000.00	41,941,195.00	(4,358,805.00)	(4,358,805.00)	90.59
2.22.1-01.2-22.0-00.01.05.2.02.02	<b>Pengembangan Cagar Budaya</b>	46,300,000.00	41,941,195.00	(4,358,805.00)	(4,358,805.00)	90.59
2.22.1-01.2-22.0-00.01.05.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	46,300,000.00	41,941,195.00	(4,358,805.00)	(4,358,805.00)	90.59
2.22.1-01.2-22.0-00.01.05.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22.1-01.2-22.0-00.01.05.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46,300,000.00	41,941,195.00	(4,358,805.00)	(4,358,805.00)	90.59
2.22.1-01.2-22.0-00.01.06	<b>Program Pengelolaan Permusumean</b>	2,168,344,086.00	2,040,185,466.00	(128,158,620.00)	(128,158,620.00)	94.09
2.22.1-01.2-22.0-00.01.06.2.01	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>	2,168,344,086.00	2,040,185,466.00	(128,158,620.00)	(128,158,620.00)	94.09
2.22.1-01.2-22.0-00.01.06.2.01.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Kiblat secara Terpadu	558,330,894.00	511,481,967.00	(44,838,927.00)	(44,838,927.00)	91.57
2.22.1-01.2-22.0-00.01.06.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	558,330,894.00	511,481,967.00	(44,838,927.00)	(44,838,927.00)	91.97
2.22.1-01.2-22.0-00.01.06.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22.1-01.2-22.0-00.01.06.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	558,330,894.00	511,481,967.00	(44,838,927.00)	(44,838,927.00)	91.97

8.19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		AMGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.96.2.01.03	Aspek lain Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1,465,221,192.00	1,386,907,019.00	(78,314,173.00)	94.62	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.96.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,465,221,192.00	1,386,907,019.00	(78,314,173.00)	94.62	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.96.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	9,600,000.00	750,000.00	(8,850,000.00)	7.81	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.96.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,456,121,192.00	1,386,177,019.00	(69,944,173.00)	95.21	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.96.2.01.94	Penyelesaian dan Pemeliharaan Sruwa dan Ruasana Museum	144,300,000.00	139,776,500.00	(4,523,500.00)	96.87	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.96.2.01.94.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	117,700,000.00	113,676,500.00	(4,023,500.00)	96.58	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.96.2.01.94.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.96.2.01.94.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	117,700,000.00	113,676,500.00	(4,023,500.00)	96.58	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.96.2.01.94.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	26,600,000.00	26,100,000.00	(500,000.00)	98.12	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.96.2.01.94.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	21,600,000.00	21,100,000.00	(500,000.00)	97.69	
2.22.1-01.2-22.0-00.01.96.2.01.94.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100.00	
		0.00	(179,774,013,251.63)	(179,774,013,251.63)	0.00	

8.119



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan  
 Organisasi : 1.02.1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan

1 KODE REKENING	2 URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERSURUNG	
		3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	5 (Rp)	6 (%)
1.02.1-02.0-00.0-00.01.00.00.03.4	PENDAPATAN DAERAH	15.838.301,768.00	15.690.723,384.00	852.421,616.00	105,38
1.02.1-02.0-00.0-00.01.00.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.838.301,768.00	15.690.723,384.00	852.421,616.00	105,38
1.02.1-02.0-00.0-00.01.00.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	400.000.000.00	535.212.000.00	135.212.000.00	133,80
1.02.1-02.0-00.0-00.01.00.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	15.438.301,768.00	16.155.511,384.00	717.209,616.00	104,65
1.02.1-02.0-00.0-00.01.00.00.00.5	BELANJA DAERAH	110.919.308.871.00	89.913.810,498.34	(21.001.492.462.66)	81,06
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	56.188.370.508.00	45.611.892,444.14	(10.576.488.063,86)	81,10
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131.361.278.00	126.160,783.00	(5.200.495,00)	96,04
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	131.361.278.00	126.160,783.00	(5.200.495,00)	96,04
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	89.864.278.00	86.114,364.00	(3.749,914.00)	95,83
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	89.864.278.00	86.114,364.00	(3.749,914.00)	95,83
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1.2	BELANJA MODAL	41.497.000.00	40.046,419.00	(1.450,581.00)	96,50
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.497.000.00	40.046,419.00	(1.450,581.00)	96,50
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02	Administratif Keuangan Perangkat Daerah	37.734.496,332.00	36.360,637,215.00	(1.373,859,117.00)	96,36
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.734.496,332.00	36.360,637,215.00	(1.373,859,117.00)	96,36
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	37.734.496,332.00	36.360,637,215.00	(1.373,859,117.00)	96,36
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	37.734.496,332.00	36.360,637,215.00	(1.373,859,117.00)	96,36
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.936,000.00	257,226,764.00	(31,709,236.00)	89,07

8/1/23

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		AMGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	
		3	4	5	6
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Kebutuhan Instansi/ Labrak/ Pemasangan Bangunan Kantor	10,021,000.00	9,770,220.00	(250,780.00)	97.50
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	10,021,000.00	9,770,220.00	(250,780.00)	97.50
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10,021,000.00	9,770,220.00	(250,780.00)	97.50
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.01.5.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17,945,000.00	15,653,150.00	(2,291,850.00)	87.23
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	17,945,000.00	15,653,150.00	(2,291,850.00)	87.23
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	250,000.00	0.00	(250,000.00)	0.00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17,695,000.00	15,653,150.00	(2,041,850.00)	88.46
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,110,000.00	11,249,160.00	(15,860,840.00)	41.49
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.05.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	27,110,000.00	11,249,160.00	(15,860,840.00)	41.49
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.05.1.1	Belanja Pegawai	250,000.00	0.00	(250,000.00)	0.00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.05.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26,860,000.00	11,249,160.00	(15,610,840.00)	41.88
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Karyawan Tamu	39,545,000.00	30,700,150.00	(8,844,850.00)	77.63
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	39,545,000.00	30,700,150.00	(8,844,850.00)	77.63
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39,545,000.00	30,700,150.00	(8,844,850.00)	77.63
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD	304,305,000.00	290,252,084.00	(14,052,916.00)	95.41
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	304,305,000.00	290,252,084.00	(14,052,916.00)	95.41
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	304,305,000.00	290,252,084.00	(14,052,916.00)	95.41
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.10	Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	384,250,000.00	332,502,979.00	(51,747,021.00)	87.84
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,850,000.00	4,022,000.00	(828,000.00)	82.93
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.10.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4,850,000.00	4,022,000.00	(828,000.00)	82.93
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.10.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.06.10.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,850,000.00	4,022,000.00	(828,000.00)	82.93

8.1A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	(Rp)	
					4	5
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	379,400,000.00	333,485,979.00		(45,914,021.00)	87.90
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.08.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	379,400,000.00	333,485,979.00		(45,914,021.00)	87.90
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.08.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.08.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	379,400,000.00	333,485,979.00		(45,914,021.00)	87.90
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.09	<b>Pembelian Barang Milik Daerah Pemungutan Utusan Pemerintahan Daerah</b>	2,101,043,130.00	1,802,155,830.00		(298,887,300.00)	85.77
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22,111,800.00	21,696,175.00		(415,625.00)	98.12
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.09.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	22,111,800.00	21,696,175.00		(415,625.00)	98.12
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.09.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.09.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22,111,800.00	21,696,175.00		(415,625.00)	98.12
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pembiayaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	397,551,944.00	363,765,971.00		(33,785,973.00)	91.50
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	397,551,944.00	363,765,971.00		(33,785,973.00)	91.50
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	397,551,944.00	363,765,971.00		(33,785,973.00)	91.50
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pembelian Perbaikan dan Mesin Lainnya	44,630,000.00	14,754,750.00		(29,875,250.00)	33.06
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.09.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	44,630,000.00	14,754,750.00		(29,875,250.00)	33.06
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.09.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.09.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44,630,000.00	14,754,750.00		(29,875,250.00)	33.06
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pembelian/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,401,938,934.00	1,401,938,934.00		0.00	100.00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,401,938,934.00	1,401,938,934.00		0.00	100.00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	750,000.00	500,000.00		(250,000.00)	66.67
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,635,939,386.00	1,401,438,934.00		(234,500,452.00)	85.66
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.10	<b>Pembayaran Pelayanan BLUD</b>	15,438,307,768.00	6,627,705,673.14		(8,810,602,094.86)	42.91
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.10.01	Pelayment dan Penyempurnaan Pelayanan BLUD	15,438,307,768.00	6,627,705,673.14		(8,810,602,094.86)	42.91
1.02.1.02.0-00.0-00.01.01.2.10.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	10,862,440,095.00	4,736,471,928.00		(6,126,011,167.00)	43.60

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	5 (Rp)	6 (%)	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.10.01.5.1.1	Belanja Pegawai	6,754,582,818.00	2,342,904,380.00	(4,411,678,518.00)	34.69	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.10.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,107,857,277.00	2,393,517,628.00	(1,714,339,649.00)	58.27	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.10.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	4,575,861,673.00	1,891,283,945.14	(2,684,577,727.86)	41.33	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.10.01.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	3,875,861,673.00	1,891,283,945.14	(1,984,577,727.86)	48.80	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.10.01.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700,000,000.00	0.00	(700,000,000.00)	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	53,524,697,963.00	41,295,080,440.20	(10,229,617,522.80)	80.89	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Keseluruhan Daerah Kabupaten/Kota</b>	10,729,359,900.00	9,249,778,666.00	(1,479,581,234.00)	86.21	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	267,000,000.00	0.00	(267,000,000.00)	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.03.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	261,000,000.00	0.00	(261,000,000.00)	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.03.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	261,000,000.00	0.00	(261,000,000.00)	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Perbaikan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5,090,000,000.00	4,181,400,497.00	(908,599,503.00)	82.63	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.10.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	5,090,000,000.00	4,181,400,497.00	(908,599,503.00)	83.63	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.10.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,090,000,000.00	4,181,400,497.00	(908,599,503.00)	83.63	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.13	Anggaran Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	790,000,000.00	770,216,500.00	(19,783,500.00)	97.50	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.13.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.13.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.13.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	790,000,000.00	770,216,500.00	(19,783,500.00)	97.50	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.13.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	790,000,000.00	770,216,500.00	(19,783,500.00)	97.50	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.14	Perawatan Alat Kesehatan/Alat Perungjung Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3,566,800,000.00	3,256,575,198.00	(310,224,802.00)	91.30	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.14.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	3,566,800,000.00	3,256,575,198.00	(310,224,802.00)	91.30	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.14.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	3,566,800,000.00	3,256,575,198.00	(310,224,802.00)	91.30	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.16	Perawatan Obat, Vaksin	555,055,032.00	522,636,250.00	(32,418,782.00)	94.16	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.16.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	555,055,032.00	522,636,250.00	(32,418,782.00)	94.16	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.16.5.1.1	Belanja Pegawai	8,000,000.00	500,000.00	(7,500,000.00)	6.25	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.16.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	547,055,032.00	522,136,250.00	(24,918,782.00)	95.44	

61A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Baku PMAK	544,489,858.00	502,006,721.00	(37,483,147.00)	92.12	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.01.17.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	544,489,858.00	507,006,721.00	(37,483,147.00)	93.12	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.01.17.5.1.1	Belanja Pegawai	8,000,000.00	500,000.00	(7,500,000.00)	6.25	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.01.17.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	536,489,858.00	506,506,721.00	(29,983,147.00)	94.41	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.01.20	Pemeliharaan Awan dan Berkaly Air Kesehatan/layanan Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12,015,000.00	11,625,000.00	(390,000.00)	96.70	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.01.20.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	12,015,000.00	11,935,000.00	(80,000.00)	99.33	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.01.20.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12,015,000.00	11,935,000.00	(80,000.00)	99.33	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Dasar/Kabupaten/Kota	62,000,000.00	33,333,289,025.20	(6,727,746,974.80)	79.25	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.02.01	Pengadaan Pelayanan Kesehatan (Ibu Kemat)	107,130,000.00	171,751,890.00	(11,378,165.00)	91.28	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	107,130,000.00	171,751,890.00	(11,378,165.00)	91.78	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	107,130,000.00	171,751,890.00	(11,378,165.00)	91.78	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.02.02	Pengadaan Pelayanan Kesehatan (Ibu Bersalin)	173,101,164.00	102,799,711.00	(70,301,453.00)	59.39	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	151,901,164.00	81,654,766.00	(70,246,398.00)	53.76	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	151,901,164.00	81,654,766.00	(70,246,398.00)	53.76	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.02.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	21,200,000.00	21,144,945.00	(55,055.00)	99.74	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.02.02.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	21,200,000.00	21,144,945.00	(55,055.00)	99.74	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.02.03	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	119,288,000.00	118,736,320.00	(551,680.00)	92.87	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.02.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	119,288,000.00	118,736,320.00	(551,680.00)	92.87	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.02.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.02.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	119,288,000.00	118,736,320.00	(551,680.00)	92.83	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.02.04	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bayi	69,800,000.00	70,881,769.00	1,081,769.00	78.83	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.02.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	74,800,000.00	55,892,324.00	(18,907,676.00)	74.73	

Handwritten signature or initials in the top right corner.



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERTURUN	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)
1	2	3	4	5	6
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	74,800,000.00	55,897,324.09	(18,902,675.90)	74.73
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.04.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	15,000,000.00	14,984,415.00	(15,555.00)	99.99
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.04.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	15,000,000.00	14,984,415.00	(15,555.00)	99.99
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.05	Proyeksi Pelaksanaan Kebutuhan pada User Mendukung Dasar	19,956,000.00	18,075,350.00	(1,880,650.00)	90.28
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	19,956,000.00	18,075,350.00	(1,880,650.00)	90.28
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.05.5.1.1	Belanja Pegawai	6.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19,956,000.00	18,075,350.00	(1,880,650.00)	90.28
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.06	Proyeksi Pelaksanaan Kebutuhan pada User Produktif	3,329,000.00	3,246,800.00	(82,200.00)	97.80
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,329,000.00	3,246,800.00	(82,200.00)	97.80
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.06.5.1.1	Belanja Pegawai	6.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,323,000.00	3,246,800.00	(76,200.00)	97.80
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.07	Proyeksi Pelaksanaan Kebutuhan pada User Lanjut	140,045,000.00	131,214,713.00	(8,830,287.00)	93.69
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	140,045,000.00	131,214,713.00	(8,830,287.00)	93.69
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.07.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140,045,000.00	131,214,713.00	(8,830,287.00)	93.69
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.08	Proyeksi Pelaksanaan Kebutuhan Pendukung Aparatur	5,533,500.00	5,888,840.00	(355,340.00)	105.34
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5,533,500.00	5,888,840.00	(355,340.00)	105.34
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5,533,500.00	5,888,840.00	(355,340.00)	105.34
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.09	Proyeksi Pelaksanaan Kebutuhan Pendukung Dukungan Medika	37,352,000.00	36,847,100.00	(504,900.00)	98.65
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	37,352,000.00	36,847,100.00	(504,900.00)	98.65
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37,352,000.00	36,847,100.00	(504,900.00)	98.65
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.09.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.09.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00

819

KODE REKERING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERTURUN	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5	6	
1.02.1-42.0-00.0-00.01.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jera Berat	9.660.900.00	7.998.600.00	(1.662.300.00)	82.79	
1.02.1-42.0-00.0-00.01.02.2.02.10.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	9.660.900.00	7.998.600.00	(1.662.300.00)	82.79	
1.02.1-42.0-00.0-00.01.02.2.02.10.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.02.1-42.0-00.0-00.01.02.2.02.10.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.660.900.00	7.998.600.00	(1.662.300.00)	82.79	
1.02.1-42.0-00.0-00.01.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terdaya Tuberkulosis	16.551.000.00	12.094.750.00	(4.456.250.00)	72.89	
1.02.1-42.0-00.0-00.01.02.2.02.11.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	16.551.000.00	12.094.750.00	(4.456.250.00)	72.89	
1.02.1-42.0-00.0-00.01.02.2.02.11.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.02.1-42.0-00.0-00.01.02.2.02.11.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.551.000.00	12.094.750.00	(4.456.250.00)	72.89	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	319.444.318.00	260.689.867.00	(58.754.451.00)	81.61	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.12.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	319.444.318.00	260.689.867.00	(58.754.451.00)	81.61	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.12.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.12.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	319.444.318.00	260.689.867.00	(58.754.451.00)	81.61	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.12.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.12.5.2.2	Belanja Modal Perabotan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	861.185.600.00	766.795.047.00	(94.390.557.00)	88.94	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.15.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	430.120.800.00	406.231.043.00	(23.889.757.00)	94.21	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.15.5.1.1	Belanja Pegawai	500.000.00	0.00	(500.000.00)	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.15.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	429.620.800.00	406.231.043.00	(23.389.757.00)	94.32	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.15.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	431.064.800.00	361.564.000.00	(69.500.800.00)	83.88	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.15.5.2.2	Belanja Modal Perabotan dan Mesin	431.064.800.00	361.564.000.00	(69.500.800.00)	83.88	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	33.920.000.00	30.420.500.00	(3.499.500.00)	89.68	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.16.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	33.920.000.00	30.420.500.00	(3.499.500.00)	89.68	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.16.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.16.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	33.920.000.00	30.420.500.00	(3.499.500.00)	89.68	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	163.667.410.00	136.347.554.00	(27.319.856.00)	83.33	

819

KODE REKENING	URAIAN	JUNJAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	
		3	4	5	6
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.17.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	162,387,410.00	138,526,381.00	(23,861,029.00)	85.31
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.17.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.17.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	162,387,410.00	138,526,381.00	(23,861,029.00)	85.31
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.17.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1,300,000.00	815,173.00	(484,827.00)	62.71
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.17.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,300,000.00	815,173.00	(484,827.00)	62.71
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.19	Pengadaan Peralatan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Acupoint, Acupoint Mandiri dan Tradisional Lainnya	21,878,000.00	20,830,000.00	(1,048,000.00)	95.21
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.19.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	21,878,000.00	20,830,000.00	(1,048,000.00)	95.21
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.19.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.19.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21,878,000.00	20,830,000.00	(1,048,000.00)	95.21
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.20	Pengadaan Sarana dan Kesehatan	232,682,578.00	196,225,472.00	(36,457,106.00)	85.19
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.20.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	171,087,578.00	138,940,262.00	(32,147,316.00)	81.21
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.20.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.20.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	171,087,578.00	138,940,262.00	(32,147,316.00)	81.21
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.20.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	61,600,000.00	59,285,150.00	(2,314,850.00)	96.24
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.20.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61,600,000.00	59,285,150.00	(2,314,850.00)	96.24
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.22	Pengadaan Anggaran Kesehatan Jawa dan NPTK	28,213,000.00	18,585,050.00	(9,627,950.00)	65.87
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.22.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	28,213,000.00	18,585,050.00	(9,627,950.00)	65.87
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.22.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.22.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28,213,000.00	18,585,050.00	(9,627,950.00)	65.87
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.22.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.22.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.23	Anggaran Biaya Kesehatan Khusus	654,170,000.00	635,048,700.00	(19,121,300.00)	97.08
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.23.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	654,170,000.00	635,048,700.00	(19,121,300.00)	97.08
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.23.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.23.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	654,170,000.00	635,048,700.00	(19,121,300.00)	97.08
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.23.5.1.5	Belanja Hibah	550,000,000.00	550,000,000.00	0.00	100.00

8.1.19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	(Rp)	(%)
				5	6
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.24	Anggaran Ujaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pemas Krisis Kesehatan	11,292,500.00	1,732,000.00	(9,559,500.00)	11.80
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.24.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	11,292,500.00	1,333,000.00	(9,959,500.00)	11.88
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.24.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.24.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11,292,500.00	1,333,000.00	(9,959,500.00)	11.88
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.25	Aktivitas Kesehatan Penyakit Menular dan Tisak Menular	100,007,880.00	57,506,044.00	(42,501,836.00)	57.50
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.25.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	100,007,880.00	57,506,044.00	(42,501,836.00)	57.50
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.25.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.25.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100,007,880.00	57,506,044.00	(42,501,836.00)	57.50
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.25.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.25.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.26	Pengeluaran Jaminan Kesehatan Masyarakat	5,744,020,400.00	5,353,788,850.00	(390,231,550.00)	92.21
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.26.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5,744,020,400.00	5,353,788,850.00	(390,231,550.00)	92.21
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.26.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.26.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5,744,020,400.00	5,353,788,850.00	(390,231,550.00)	92.21
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.29	Pengeluaran Jaminan Kesehatan Rumah Sakit	270,465,994.00	239,558,390.00	(30,907,594.00)	88.57
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.29.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	270,465,994.00	239,558,390.00	(30,907,594.00)	88.57
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.29.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.29.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	270,465,994.00	239,558,390.00	(30,907,594.00)	88.57
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	28,469,725,287.00	22,087,128,998.20	(6,382,596,288.80)	77.58
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.32.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	13,466,599,287.00	12,213,308,430.20	(1,253,290,856.80)	90.69
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.32.5.1.1	Belanja Pegawai	15,080,080.00	12,250,000.00	(2,790,000.00)	81.67
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.32.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13,451,519,287.00	12,201,058,430.20	(1,250,460,856.80)	90.70
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.32.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	15,083,126,000.00	9,873,830,568.00	(5,129,295,432.00)	65.81
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.32.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	15,083,126,000.00	9,873,830,568.00	(5,129,295,432.00)	65.81
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Rawat Inas	3,272,093,091.00	2,145,838,244.00	(1,126,254,847.00)	65.88

819

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	(Rp)	(%)
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.02.33.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3.230.793,001.00	3.110.796.744.00	(1.120.086,257.00)	65.15	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.33.5.1.1	Belanja Pegawai	174.499,644.00	64.300,601.00	(110.199,043.00)	36.85	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.33.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.056.293,357.00	2.046.496.143.00	(1.018.897,214.00)	66.76	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.33.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	37.300,000.00	35.131,500.00	(2.168,500.00)	94.19	
1.02.1-02.0-00.0-01.02.2.02.33.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	37.300,000.00	35.131,500.00	(2.168,500.00)	94.19	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.34	Operasi/akur/ Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	735.417,500.00	652.014,600.00	(83.402,900.00)	88.28	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.34.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	533.417,526.00	460.442,680.00	(72.974,846.00)	86.32	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.34.5.1.1	Belanja Pegawai	1.250,000.00	1.250,000.00	0.00	100.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.34.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	532.167,526.00	459.192,680.00	(72.974,846.00)	86.29	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.34.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	202.500,000.00	196.573,920.00	(5.926,080.00)	97.07	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.34.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	202.500,000.00	196.573,920.00	(5.926,080.00)	97.07	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.35	Pelayanan/ Akurasi/ Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	235.900,000.00	0.00	(235.900,000.00)	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.35.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	235.900,000.00	0.00	(235.900,000.00)	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.35.1.2	Belanja Barang dan Jasa	235.900,000.00	0.00	(235.900,000.00)	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.36	Investigasi/ Anal/ Kegiatan Tidak Diharapkan (Kegiatan Rutin Pasca Insidental dan Pembenihan Obat Maksimal)	12.119,880.00	0.00	(12.119,880.00)	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.36.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	12.119,880.00	0.00	(12.119,880.00)	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.36.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.36.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.119,880.00	0.00	(12.119,880.00)	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.37	Pelayanan/ Konektivitas/ Dan dan Respon Hibah	86.570,000.00	45.695,990.00	(40.874,010.00)	57.41	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.37.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	86.570,000.00	45.695,990.00	(40.874,010.00)	57.41	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.37.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.37.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	86.570,000.00	45.695,990.00	(40.874,010.00)	57.41	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	32.025,000.00	31.402,500.00	(622,500.00)	98.17	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	11.265,000.00	11.005,000.00	(260,000.00)	95.92	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.03.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	11.265,000.00	10.805,000.00	(460,000.00)	95.92	

B.1A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.03.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.03.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11,265,000.00	10,805,000.00	(460,000.00)	95.92
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.03.02	Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan	20,760,000.00	20,632,500.00	(127,500.00)	99.39
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.03.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	20,760,000.00	20,632,500.00	(127,500.00)	99.39
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.03.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20,760,000.00	20,632,500.00	(127,500.00)	99.39
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.04	<b>Pemberitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota</b>	702,677,133.00	680,577,741.00	(22,099,392.00)	96.85
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.04.02	Pengadaan TDR Nelayan Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	10,810,000.00	9,712,280.00	(1,097,720.00)	89.85
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.04.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	10,810,000.00	9,712,280.00	(1,097,720.00)	89.85
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.04.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.04.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10,810,000.00	9,712,280.00	(1,097,720.00)	89.85
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.04.03	<b>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan</b>	691,867,133.00	670,865,461.00	(21,001,672.00)	96.96
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.04.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	676,867,133.00	655,953,681.00	(20,873,452.00)	96.92
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.04.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.04.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	676,867,133.00	655,953,681.00	(20,873,452.00)	96.92
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.04.03.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	15,000,000.00	14,871,780.00	(128,220.00)	99.15
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.04.03.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	15,000,000.00	14,871,780.00	(128,220.00)	99.15
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	66,810,000.00	59,715,050.00	(7,094,950.00)	89.37
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.01	<b>Pemberitan Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	19,680,000.00	15,503,000.00	(4,177,000.00)	78.79
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Pembinaan dan Penguasaan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Peningkatan Praktek Tenaga Kesehatan	19,680,000.00	15,503,000.00	(4,177,000.00)	78.79
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4,680,000.00	4,403,000.00	(277,000.00)	94.08
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,680,000.00	4,403,000.00	(277,000.00)	94.08
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.01.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	15,000,000.00	11,100,000.00	(3,900,000.00)	74.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.01.02.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15,000,000.00	11,100,000.00	(3,900,000.00)	74.00

14

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERURANG	
		3	4	5	6
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47,140,000.00	44,216,050.00	(2,923,950.00)	97.80
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47,140,000.00	44,216,050.00	(2,923,950.00)	97.80
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.03.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	47,140,000.00	44,216,050.00	(2,923,950.00)	93.80
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.03.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.03.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47,140,000.00	44,216,050.00	(2,923,950.00)	93.80
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	343,053,900.00	237,205,046.00	(105,848,854.00)	69.14
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.01	Pemberian Zin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	38,960,000.00	25,924,600.00	(13,035,400.00)	66.54
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengalihan Data Perizinan dan Tidak Lajut Pengawasan Zin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	38,960,000.00	25,924,600.00	(13,035,400.00)	66.54
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	38,960,000.00	25,924,600.00	(13,035,400.00)	66.54
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	38,960,000.00	25,924,600.00	(13,035,400.00)	66.54
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-ZRT sebagai Zin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	156,440,000.00	118,395,620.00	(37,844,380.00)	75.81
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.03.01	Pengembangan dan Pengawasan serta Tidak Lajut Pengawasan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-ZRT Sebagai Zin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	156,440,000.00	118,395,620.00	(37,844,380.00)	75.81
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.03.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	139,565,000.00	102,278,320.00	(37,286,680.00)	73.28
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.03.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.03.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	139,565,000.00	102,278,320.00	(37,286,680.00)	73.28
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.03.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	16,875,000.00	16,317,500.00	(557,500.00)	96.70
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.03.01.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	16,875,000.00	16,317,500.00	(557,500.00)	96.70
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Dapur Air Minum (DAM)	26,961,900.00	26,278,476.00	(683,424.00)	97.47
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.04.01	Pengembangan dan Pengawasan serta Tidak Lajut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	26,961,900.00	26,278,476.00	(683,424.00)	97.47
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.04.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	26,961,900.00	26,278,476.00	(683,424.00)	97.47

R.A.A





KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	
1.02.1-02.0-00.01.05.2.03.01.5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	472,077,900,00	439,093,140,00	(32,984,760,00)	-6.98	
		0.00	(73,225,093,024,34)	(73,225,093,024,34)	0.00	

Handwritten signature or initials.



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

URUSAN Pemerintahan Organisasi	URUSAN PERKANTORAN WALIB YANG BERSAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pekerjaan Umum dan Prasarana Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Ruang	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			KODE REKENING	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)
				1	3		4
1.03.1-03.2-10.0-00.01.00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH			131,328,000.00	131,328,000.00	109.44	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			131,328,000.00	131,328,000.00	109.44	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah			131,328,000.00	131,328,000.00	109.44	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH						
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.01.01	Program Peningjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		71,271,647,361.00	59,189,163,522.67	(11,082,483,838.33)	81.90	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.01.01.5.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10,057,126,828.00	9,702,057,494.19	(1,165,069,333.81)	89.28	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.01.01.5.1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		36,717,000.00	36,554,731.00	(162,269.00)	99.56	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.01.01.5.1.1	BELANJA OPERASI		36,717,000.00	36,554,731.00	(162,269.00)	99.56	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.01.01.5.1.1.1	Belanja Pegawai		0.00	0.00	0.00	0.00	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.01.01.5.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa		36,717,000.00	36,554,731.00	(162,269.00)	99.56	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7,742,773,713.00	7,208,042,429.00	(534,731,284.00)	93.09	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7,742,773,713.00	7,208,042,429.00	(534,731,284.00)	93.09	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI		7,742,773,713.00	7,208,042,429.00	(534,731,284.00)	93.09	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai		7,742,773,713.00	7,208,042,429.00	(534,731,284.00)	93.09	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		369,025,000.00	277,663,589.05	(91,361,410.95)	75.24	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.03.02	Pengadaan Barang Milik Daerah SKPD		369,025,000.00	277,663,589.05	(91,361,410.95)	75.24	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI		369,025,000.00	277,663,589.05	(91,361,410.95)	75.24	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.03.02.5.1.1	Belanja Pegawai		0.00	0.00	0.00	0.00	

8,7A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	5 (Rp)	6 (%)
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.05.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	369,025,000.00	277,663,588.05	(91,361,410.95)	75.24
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.05	<b>Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah</b>	3,900,000.00	3,852,810.00	(47,190.00)	98.79
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alat-alat Kebayakannya	3,900,000.00	3,852,810.00	(47,190.00)	98.79
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.05.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,900,000.00	3,852,810.00	(47,190.00)	98.79
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.05.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.05.02.5.1.1.1	Belanja Barang dan Jasa	3,900,000.00	3,852,810.00	(47,190.00)	98.79
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	456,696,475.00	404,966,860.00	(51,729,615.00)	88.67
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,996,725.00	4,902,610.00	(94,115.00)	98.12
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4,996,725.00	4,902,610.00	(94,115.00)	98.12
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.01.5.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,996,725.00	4,902,610.00	(94,115.00)	98.12
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Perawatan dan Pengalangan Kantor	103,297,800.00	96,969,782.00	(6,327,218.00)	93.87
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	103,297,800.00	96,969,782.00	(6,327,218.00)	93.87
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103,297,800.00	96,969,782.00	(6,327,218.00)	93.87
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21,708,500.00	20,036,570.00	(1,671,930.00)	92.30
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	21,708,500.00	20,036,570.00	(1,671,930.00)	92.30
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21,708,500.00	20,036,570.00	(1,671,930.00)	92.30
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengacuan	18,726,250.00	17,881,236.00	(845,014.00)	95.49
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	18,726,250.00	17,881,236.00	(845,014.00)	95.49
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18,726,250.00	17,881,236.00	(845,014.00)	95.49
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.08	Realisasi Kurungan Tantu	4,627,000.00	4,512,400.00	(114,600.00)	97.52
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4,627,000.00	4,512,400.00	(114,600.00)	97.52
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00

8/19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		3	4	(Rp)	(%)
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,627,000.00	4,512,400.00	(114,600.00)	97.57
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.09	Penyediaan Barang Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302,341,000.00	280,666,262.00	(21,674,738.00)	85.97
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	302,341,000.00	280,666,262.00	(21,674,738.00)	85.93
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	302,341,000.00	280,666,262.00	(21,674,738.00)	85.93
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	556,950,000.00	574,785,600.00	(22,164,400.00)	96.02
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	556,950,000.00	574,785,600.00	(22,164,400.00)	96.02
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.07.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,550,000.00	250,000.00	(2,300,000.00)	9.80
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.07.02.5.1.1	Belanja Pegawai	2,550,000.00	250,000.00	(2,300,000.00)	9.80
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.07.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	554,400,000.00	574,535,600.00	(19,864,400.00)	96.42
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.07.02.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	554,400,000.00	574,535,600.00	(19,864,400.00)	96.42
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	275,625,000.00	162,089,641.00	(113,535,359.00)	58.81
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Swak Melayat	3,495,000.00	3,190,000.00	(305,000.00)	91.27
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.08.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,495,000.00	3,190,000.00	(305,000.00)	91.27
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.08.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,495,000.00	3,190,000.00	(305,000.00)	91.27
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.08.02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	256,800,000.00	143,735,041.00	(113,064,959.00)	55.97
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.08.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	256,800,000.00	143,735,041.00	(113,064,959.00)	55.97
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.08.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.08.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	256,800,000.00	143,735,041.00	(113,064,959.00)	55.97
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.08.03	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perencanaan Kantor</b>	15,330,000.00	15,163,600.00	(166,400.00)	98.91
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.08.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	15,330,000.00	15,163,600.00	(166,400.00)	98.91
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.08.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.01.2.08.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15,330,000.00	15,163,600.00	(166,400.00)	98.91

819



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	6
1.03.1-03.2-10.0-00.01.02.2.01.14	Belanja Barang dan Jasa	4,050,000.00	1,544,000.00	(2,505,000.00)	38.17
1.03.1-03.2-10.0-00.01.02.2.01.14.5.1	<b>BELANJA MODAL</b>	431,505,000.00	463,434,655.02	(28,070,344.98)	93.45
1.03.1-03.2-10.0-00.01.02.2.01.14.5.1.1	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	431,505,000.00	463,434,655.02	(28,070,344.98)	93.49
1.03.1-03.2-10.0-00.01.02.2.01.14.5.2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman	2,553,204,000.00	2,464,870,182.24	(88,423,807.76)	96.54
1.03.1-03.2-10.0-00.01.02.2.01.14.5.2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	74,050,000.00	23,237,350.00	(50,812,650.00)	31.38
1.03.1-03.2-10.0-00.01.02.2.01.14.5.2.1.1	Belanja Pegawai	45,750,000.00	11,080,000.00	(34,770,000.00)	24.04
1.03.1-03.2-10.0-00.01.02.2.01.14.5.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28,300,000.00	12,237,350.00	(16,062,650.00)	43.24
1.03.1-03.2-10.0-00.01.02.2.01.14.5.2.1.2.1	<b>BELANJA MODAL</b>	2,479,254,000.00	2,441,632,842.24	(37,621,157.76)	98.48
1.03.1-03.2-10.0-00.01.02.2.01.14.5.2.1.2.1.1	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	2,479,254,000.00	2,441,632,842.24	(37,621,157.76)	98.48
1.03.1-03.2-10.0-00.01.02.2.01.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukiman	908,261,168.00	571,245,868.00	(337,015,299.00)	57.29
1.03.1-03.2-10.0-00.01.02.2.01.21.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	882,261,168.00	505,219,848.00	(376,991,320.00)	57.27
1.03.1-03.2-10.0-00.01.02.2.01.21.5.1.1	Belanja Pegawai	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	100.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.02.2.01.21.5.1.1.1	Belanja Barang dan Jasa	870,261,168.00	493,219,848.00	(376,991,320.00)	56.68
1.03.1-03.2-10.0-00.01.02.2.01.21.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	26,000,000.00	15,976,120.00	(10,023,880.00)	61.45
1.03.1-03.2-10.0-00.01.02.2.01.21.5.2.1	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	26,000,000.00	15,976,120.00	(10,023,880.00)	61.45
1.03.1-03.2-10.0-00.01.02.2.01.27	Operasional Unit Pengolah Airgas	87,455,000.00	0.00	(87,455,000.00)	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.02.2.01.27.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	87,455,000.00	0.00	(87,455,000.00)	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.02.2.01.27.5.1.1	Belanja Pegawai	7,200,000.00	0.00	(7,200,000.00)	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.02.2.01.27.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80,255,000.00	0.00	(80,255,000.00)	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	88,353,500.00	65,963,656.00	(22,389,844.00)	74.66
1.03.1-03.2-10.0-00.01.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	88,353,500.00	65,963,656.00	(22,389,844.00)	74.66
1.03.1-03.2-10.0-00.01.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	16,553,500.00	14,896,430.00	(1,657,070.00)	89.99
1.03.1-03.2-10.0-00.01.03.2.01.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	16,553,500.00	14,896,430.00	(1,657,070.00)	89.99
1.03.1-03.2-10.0-00.01.03.2.01.07.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.03.2.01.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16,553,500.00	14,896,430.00	(1,657,070.00)	89.99
1.03.1-03.2-10.0-00.01.03.2.01.07.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

879

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	4	5	
					3	(Rp)
1.03.1-03.2-10.0-00.01.03.2.01.07.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.03.2.01.12	Realisasi Penyisipan Kerja Sama SPAM	71.800.000,00	51.067.226,00	(20.732.774,00)	71,12	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.03.2.01.12.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	71.800.000,00	51.067.226,00	(20.732.774,00)	71,12	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.03.2.01.12.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.03.2.01.12.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	71.800.000,00	51.067.226,00	(20.732.774,00)	71,12	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.04	<b>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Pencampahan Regional</b>	680.643.085,00	678.793.040,00	(1.850.045,00)	99,73	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.04.2.01	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Pencampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	680.643.085,00	678.793.040,00	(1.850.045,00)	99,73	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.04.2.01.03	Pembangunan IPK/TPS/SPN/TPS-30/TPS	680.643.085,00	678.793.040,00	(1.850.045,00)	99,73	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.04.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	0,00	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.04.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.04.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.04.2.01.03.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	678.793.085,00	678.793.040,00	(45,00)	100,00	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.04.2.01.03.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	678.793.085,00	678.793.040,00	(45,00)	100,00	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.05	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	329.900.000,00	287.805.680,40	(42.094.319,60)	87,24	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.05.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	329.900.000,00	287.805.680,40	(42.094.319,60)	87,24	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Tindakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	329.900.000,00	287.805.680,40	(42.094.319,60)	87,24	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.05.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	329.900.000,00	287.805.680,40	(42.094.319,60)	87,24	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.05.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.05.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	328.100.000,00	286.005.680,40	(42.094.319,60)	87,17	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.06	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</b>	20.766.644.295,00	18.023.390.828,42	(1.343.253.466,58)	93,37	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.06.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	20.766.644.295,00	18.023.390.828,42	(1.343.253.466,58)	93,37	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	4.280.523.000,00	2.798.059.203,60	(1.482.463.796,40)	65,38	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.06.2.01.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	98.170.000,00	36.346.300,00	(61.823.700,00)	37,02	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.06.2.01.05.5.1.1	Belanja Pegawai	71.050.000,00	30.150.000,00	(40.900.000,00)	42,43	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.06.2.01.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27.120.000,00	6.196.300,00	(20.923.700,00)	22,85	

819

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	
		3	4	5	6
1.03.1-03.2-10.0-00.01.06.2.01.05.5.2	<b>BELANJA MODAL</b> Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.982.353.000,00	3.701.752.963,60	(220.600.036,40)	94,46
1.03.1-03.2-10.0-00.01.06.2.01.05.5.2.4		3.982.353.000,00	3.701.752.963,60	(220.600.036,40)	94,46
1.03.1-03.2-10.0-00.01.06.2.01.06	Amda/teknik Sistem Drainase Perkotaan	11.700.046.680,00	13.551.273.665,62	(148.775.513,18)	98,91
1.03.1-03.2-10.0-00.01.06.2.01.06.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai	162.635.000,00	61.945.050,00	(100.690.950,00)
1.03.1-03.2-10.0-00.01.06.2.01.06.5.1.1	Belanja Pegawai	137.350.000,00	53.750.000,00	(83.600.000,00)	39,13
1.03.1-03.2-10.0-00.01.06.2.01.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.285.000,00	8.195.050,00	(17.089.950,00)	32,41
1.03.1-03.2-10.0-00.01.06.2.01.06.5.2	<b>BELANJA MODAL</b> Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.537.413.680,00	13.489.308.116,82	(48.105.563,18)	99,64
1.03.1-03.2-10.0-00.01.06.2.01.06.5.2.4		13.537.413.680,00	13.489.308.116,82	(48.105.563,18)	99,64
1.03.1-03.2-10.0-00.01.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	2.486.072.615,00	1.874.018.408,00	(912.054.157,00)	63,31
1.03.1-03.2-10.0-00.01.06.2.01.09.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai	2.472.773.613,00	1.562.847.499,00	(909.926.116,00)
1.03.1-03.2-10.0-00.01.06.2.01.09.5.1.1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	15.000.000,00	(1.000.000,00)	83,33
1.03.1-03.2-10.0-00.01.06.2.01.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.454.773.613,00	1.547.847.499,00	(906.926.116,00)	63,05
1.03.1-03.2-10.0-00.01.06.2.01.09.5.2	<b>BELANJA MODAL</b> Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	13.299.000,00	11.170.959,00	(2.128.041,00)	84,00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.06.2.01.09.5.2.2		13.299.000,00	11.170.959,00	(2.128.041,00)	84,00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b> Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Mendirikan Bangunan (PMB) dan Serah-tukar Lahan Pungsi Bangunan Gedung	6.519.684.680,00	1.482.095.052,96	(5.037.589.627,04)	22,89
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01		6.519.684.680,00	1.482.095.052,96	(5.037.589.627,04)	22,89
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.01	Penyenggaraan Pemeliharaan dan Merenovasi Bangunan (PMR), Serah-tukar Lahan Pungsi (SLP), perantara Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pemeliharaan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBS	356.260.250,00	170.992.000,00	(235.268.250,00)	31,46
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.01.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai	336.260.250,00	181.555.900,00	(234.704.350,00)
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	336.260.250,00	181.555.900,00	(234.704.350,00)	30,28
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b> Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	20.000.000,00	19.436.100,00	(563.900,00)	97,18
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.01.5.2.2		20.000.000,00	19.436.100,00	(563.900,00)	97,18
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemantauan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	6.060.278.680,00	1.304.189.052,96	(4.756.089.627,04)	21,52
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.02.5.1		6.060.278.680,00	1.304.189.052,96	(4.756.089.627,04)	21,52

9,79



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	
		3	4	5	6
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	72,000,000.00	36,150,000.00	(45,850,000.00)	36.32
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	312,514,680.00	83,100,594.00	(229,414,086.00)	26.61
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.02.5.1.5	Belanja Hibah	451,000,000.00	438,436,197.73	(12,563,802.27)	97.21
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	5,224,764,000.00	756,442,321.23	(4,468,321,678.77)	14.48
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.02.5.2.1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,826,116,000.00	462,653,076.96	(4,363,462,923.04)	9.59
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.02.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	398,648,000.00	293,789,244.27	(104,858,755.73)	73.70
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.04	<b>Bantuan Teknik Pembangunan</b> <i>Bantuan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota</i>	96,932,750.00	66,914,000.00	(29,018,750.00)	67.64
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	96,932,750.00	66,914,000.00	(30,018,750.00)	67.64
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	96,932,750.00	66,914,000.00	(30,018,750.00)	67.64
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.09	<b>Penilaian Terhadap Penyelenggaraan</b> <i>Bantuan Gedung oleh Pihak Bangunan</i>	4,213,000.00	0.00	(4,213,000.00)	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4,213,000.00	0.00	(4,213,000.00)	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.08.2.01.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,213,000.00	0.00	(4,213,000.00)	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	21,388,004,693.00	19,464,088,806.26	(1,903,915,886.74)	83.31
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	22,388,004,693.00	19,464,088,806.26	(2,903,915,886.74)	83.31
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.04	<i>Sumbu Kencana Jalan/Jembatan</i>	5,000,000.00	3,490,000.00	(1,510,000.00)	29.80
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5,000,000.00	1,490,000.00	(3,510,000.00)	29.80
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	1,490,000.00	(3,510,000.00)	29.80
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.04.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.04.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.09	<b>Rahadistras Jalan</b>	6,954,722,000.00	5,982,632,967.63	(972,089,032.37)	86.04
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	46,150,000.00	35,360,000.00	(10,790,000.00)	54.95
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.09.5.1.1	Belanja Pegawai	44,500,000.00	24,150,000.00	(20,350,000.00)	54.27
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,650,000.00	1,210,000.00	(440,000.00)	73.33
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.09.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	6,908,062,000.00	5,958,272,967.63	(949,789,032.37)	86.25

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		ANGKARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	
		3	4	5	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.09.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	6.988.052.090.00	5.958.272.967.63	(949.789.032.37)	86.25
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.10	Pemeliharaan Merak Jalat	13.655.607.471.00	21.471.620.001.04	(2.242.987.409.96)	83.57
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.10.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	143.849.250.00	42.757.400.00	(101.091.850.00)	29.72
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.10.5.1.1	Belanja Pegawai	42.750.000.00	21.500.000.00	(21.250.000.00)	50.29
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.10.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	101.099.250.00	21.257.400.00	(79.841.850.00)	21.03
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.10.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	13.351.798.161.00	11.368.862.660.04	(2.142.895.559.96)	84.14
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.10.5.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	170.090.090.00	165.695.700.00	(4.394.390.00)	97.47
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.10.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	13.341.758.161.00	11.203.166.901.04	(2.138.591.259.96)	83.97
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.11	Pemeliharaan Ruah Jalat	1.294.310.314.00	1.013.403.572.00	(280.902.741.00)	78.30
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.11.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.279.158.314.00	1.000.373.053.00	(278.785.261.00)	78.21
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.11.5.1.1	Belanja Pegawai	18.000.000.00	18.000.000.00	0.00	100.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.11.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.261.158.314.00	982.373.053.00	(278.785.261.00)	77.89
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.11.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	15.152.000.00	13.094.520.00	(2.117.480.00)	86.03
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.11.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	15.152.000.00	13.094.520.00	(2.117.480.00)	86.03
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.12	Pembangunan Zembatan	967.248.000.00	638.178.558.59	(352.620.441.41)	64.30
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.12.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	23.300.000.00	7.900.000.00	(15.400.000.00)	33.91
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.12.5.1.1	Belanja Pegawai	23.300.000.00	7.900.000.00	(15.400.000.00)	33.91
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.12.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	964.449.000.00	627.219.558.59	(337.229.441.41)	65.03
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.12.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	964.449.000.00	627.219.558.59	(337.229.441.41)	65.03
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.19	Pemeliharaan Ruah Zembatan	491.125.968.00	436.676.726.00	(52.307.242.00)	89.35
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.19.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	486.125.968.00	433.933.726.00	(52.192.242.00)	89.26
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.19.5.1.1	Belanja Pegawai	9.000.000.00	9.000.000.00	0.00	100.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.19.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	477.125.968.00	424.933.726.00	(52.192.242.00)	89.06
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.19.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	5.000.000.00	4.885.000.00	(115.000.00)	97.70
1.03.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.19.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	5.000.000.00	4.885.000.00	(115.000.00)	97.70
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11	<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	134.467.000.00	33.906.360.00	(100.540.640.00)	25.23

8.15

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		AMGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)
1	2	3	4	5	6
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11.2.01	Penyelenggaraan Pemeliharaan Tenaga Terampil Konstruksi	74,623,000.00	480,000.00	(74,143,000.00)	0.64
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11.2.01.04	Perbaikan Pemeliharaan Tenaga Terampil Konstruksi	74,623,000.00	480,000.00	(74,143,000.00)	0.64
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11.2.01.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	74,623,000.00	480,000.00	(74,143,000.00)	0.64
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11.2.01.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	74,623,000.00	480,000.00	(74,143,000.00)	0.64
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	30,946,000.00	35,946,380.00	(26,397,590.00)	55.09
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	30,946,000.00	35,938,100.00	(5,539,900.00)	87.83
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11.2.02.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	30,946,000.00	35,602,000.00	(4,996,000.00)	52.80
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11.2.02.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11.2.02.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30,946,000.00	35,602,000.00	(4,996,000.00)	52.86
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11.2.02.06.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	0.00	0.00	(563,900.00)	97.18
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11.2.02.06.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	0.00	0.00	(563,900.00)	97.18
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Akejawat Konstruksi	11,200,000.00	7,317,260.00	(3,882,740.00)	65.33
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11.2.02.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	11,200,000.00	7,317,260.00	(3,882,740.00)	65.33
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11.2.02.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11.2.02.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11,200,000.00	7,317,260.00	(3,882,740.00)	65.33
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11.2.02.10	Penyusunan Data dan Informasi Kebutuhan Kerja Proyek Konstruksi	18,046,000.00	2,091,000.00	(16,955,000.00)	6.05
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11.2.02.10.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	18,046,000.00	2,091,000.00	(16,955,000.00)	6.05
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11.2.02.10.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.1-03.2-10.0-00.01.11.2.02.10.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18,046,000.00	2,091,000.00	(16,955,000.00)	6.05
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,148,004,231.00	823,058,602.68	(325,025,628.32)	71.69
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.01	Pemetaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	275,735,500.00	203,227,628.00	(72,507,872.00)	73.74
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.01.01	Abstrakan Anusudhan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penataan RTRW Kabupaten/Kota	360,469,500.00	114,644,739.00	(45,804,761.00)	71.45
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	111,749,500.00	69,664,282.00	(42,085,218.00)	62.34
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00

8.19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	5 (Rp)	6 (%)	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	111,246,500.00	59,164,282.00	(42,082,218.00)	62.17	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.01.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	48,700,000.00	44,086,467.00	(4,613,533.00)	92.36	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.01.5.1.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	48,700,000.00	44,086,467.00	(4,613,533.00)	92.36	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.01.5.1.2	Amortisasi Kijalaan dalam rangka Pelaksanaan Perawatan Ruang	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.01.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.01.5.1.2	Sosialisasi Kegiatan dan Perencanaan Perundang-undangan bidang Perawatan Ruang	115,286,000.00	88,682,889.00	(26,603,111.00)	76.92	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.01.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	115,286,000.00	88,682,889.00	(26,603,111.00)	76.92	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	115,286,000.00	88,682,889.00	(26,603,111.00)	76.92	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	448,448,366.00	355,773,273.60	(92,675,144.32)	80.78	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Inovasi dan Pengembangan Daerah	448,448,366.00	355,773,273.60	(92,675,144.32)	80.78	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.03.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	419,648,366.00	365,173,273.68	(54,475,144.32)	88.77	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.03.01.5.1.1	Belanja Pegawai	700,000.00	500,000.00	(200,000.00)	71.43	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.03.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	418,948,366.00	364,673,273.68	(54,275,144.32)	88.78	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.03.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	800,000.00	650,000.00	(150,000.00)	81.25	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.03.01.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	800,000.00	650,000.00	(150,000.00)	81.25	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.04	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	431,000,365.00	281,667,353.00	(149,333,012.00)	65.32	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perantara dan Persepsi Nukem Bidang Perawatan Ruang	254,091,115.00	228,134,634.00	(25,956,481.00)	89.78	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.04.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	225,339,915.00	204,330,205.00	(21,009,710.00)	90.68	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.04.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.04.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	225,339,915.00	204,330,205.00	(21,009,710.00)	90.68	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.04.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	38,751,200.00	33,894,439.00	(4,856,761.00)	87.79	
1.03.1-03.2-10.0-00.01.12.2.04.02.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	38,751,200.00	33,894,439.00	(4,856,761.00)	87.79	

219

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.03.1-03.2-18.0-00.01.12.2.04.04	Kontribusi Pelaksanaan Perbaikan Ruang	177,809,250.00	35,823,119.00	(141,986,131.00)	20.15
1.03.1-03.2-18.0-00.01.12.2.04.04.5.1	<b>BELANDA OPERASI</b>	177,809,250.00	35,823,119.00	(141,986,131.00)	20.15
1.03.1-03.2-18.0-00.01.12.2.04.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.1-03.2-18.0-00.01.12.2.04.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	177,809,250.00	35,823,119.00	(141,986,131.00)	20.15
2.10.1-03.2-18.0-00.01.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	15,998,500.00	11,707,735.00	(4,290,765.00)	73.18
2.10.1-03.2-18.0-00.01.04.2.01	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	15,998,500.00	11,707,735.00	(4,290,765.00)	73.18
2.10.1-03.2-18.0-00.01.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Pihak-Pihak dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15,998,500.00	11,707,735.00	(4,290,765.00)	73.18
2.10.1-03.2-18.0-00.01.04.2.01.01.5.1	<b>BELANDA OPERASI</b>	15,998,500.00	11,707,735.00	(4,290,765.00)	73.18
2.10.1-03.2-18.0-00.01.04.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.1-03.2-18.0-00.01.04.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15,998,500.00	11,707,735.00	(4,290,765.00)	73.18
2.10.1-03.2-18.0-00.01.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	16,605,000.00	11,049,800.00	(5,555,200.00)	66.55
2.10.1-03.2-18.0-00.01.05.2.01	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	16,605,000.00	11,049,800.00	(5,555,200.00)	66.55
2.10.1-03.2-18.0-00.01.05.2.01.02	Kontribusi dan Sumbangan Penyelidikan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16,605,000.00	11,049,800.00	(5,555,200.00)	66.55
2.10.1-03.2-18.0-00.01.05.2.01.02.5.1	<b>BELANDA OPERASI</b>	16,605,000.00	11,049,800.00	(5,555,200.00)	66.55
2.10.1-03.2-18.0-00.01.05.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.1-03.2-18.0-00.01.05.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16,605,000.00	11,049,800.00	(5,555,200.00)	66.55
2.10.1-03.2-18.0-00.01.07	Program Penetapan Tanah Ulayat	31,327,000.00	11,417,100.00	(19,909,900.00)	36.44
2.10.1-03.2-18.0-00.01.07.2.01	<b>Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	31,327,000.00	11,417,100.00	(19,909,900.00)	36.44
2.10.1-03.2-18.0-00.01.07.2.01.01	Kontribusi dan Sumbangan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31,327,000.00	11,417,100.00	(19,909,900.00)	36.44
2.10.1-03.2-18.0-00.01.07.2.01.01.5.1	<b>BELANDA OPERASI</b>	31,327,000.00	11,417,100.00	(19,909,900.00)	36.44
2.10.1-03.2-18.0-00.01.07.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.1-03.2-18.0-00.01.07.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31,327,000.00	11,417,100.00	(19,909,900.00)	36.44
2.10.1-03.2-18.0-00.01.09	Program Pengalokasian Izin Membuka Tanah	244,954,404.00	199,532,136.52	(45,422,267.48)	81.46

279

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	(Rp)	(%)
2.10.1-03.2-10.0-00.01.09.2.01	Pemerbitan Zain Membuka Tanah	244,954,604.00	199,532,136.57	(45,422,467.43)	81.46	
2.10.1-03.2-10.0-00.01.09.2.01.02	Pengendalian Administrasi Tanah Negara	244,954,604.00	199,532,136.57	(45,422,467.43)	81.46	
2.10.1-03.2-10.0-00.01.09.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	244,954,604.00	199,532,136.52	(45,422,467.48)	81.46	
2.10.1-03.2-10.0-00.01.09.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.1-03.2-10.0-00.01.09.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	244,954,604.00	199,532,136.52	(45,422,467.48)	81.46	
2.10.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.01	Program Penatagamaan Tanah	250,753,061.00	199,661,502.52	(51,091,558.48)	79.62	
2.10.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.01.01	Penggunaan Tanah yang Hampirnya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	250,753,061.00	199,661,502.52	(51,091,558.48)	79.62	
2.10.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.01.01.01	Kontribusi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pencatatan Penggunaan Tanah	40,723,000.00	31,066,519.52	(9,656,480.48)	76.34	
2.10.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.01.01.01.01.1	BELANJA OPERASI	40,723,000.00	31,066,519.52	(9,656,480.48)	76.34	
2.10.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.01.01.01.01.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.01.01.01.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40,723,000.00	31,066,519.52	(9,656,480.48)	76.34	
2.10.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.03	Kontribusi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	210,030,061.00	168,674,982.00	(41,355,079.00)	80.30	
2.10.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	210,030,061.00	167,924,983.00	(42,105,078.00)	80.41	
2.10.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	210,030,061.00	167,924,983.00	(42,105,078.00)	80.41	
2.10.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	1,200,000.00	730,000.00	(470,000.00)	60.83	
2.10.1-03.2-10.0-00.01.10.2.01.03.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	1,200,000.00	730,000.00	(470,000.00)	60.83	
2.15.1-03.2-10.0-00.01.02.2.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4,245,315,716.00	3,800,973,892.46	(444,341,823.54)	91.14	
2.15.1-03.2-10.0-00.01.02.2.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4,245,315,716.00	3,800,973,892.46	(444,341,823.54)	91.14	
2.15.1-03.2-10.0-00.01.02.2.02.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4,245,315,716.00	3,800,973,892.46	(444,341,823.54)	91.14	
2.15.1-03.2-10.0-00.01.02.2.02.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	554,640,000.00	521,845,160.00	(32,794,840.00)	94.09	
2.15.1-03.2-10.0-00.01.02.2.02.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	9,590,000.00	900,000.00	(8,690,000.00)	9.42	
2.15.1-03.2-10.0-00.01.02.2.02.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	545,050,000.00	520,945,160.00	(24,104,840.00)	95.57	
2.15.1-03.2-10.0-00.01.02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	495,000,000.00	301,220,455.46	(193,779,544.54)	60.85	
2.15.1-03.2-10.0-00.01.02.2.02.02.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	495,000,000.00	301,220,455.46	(193,779,544.54)	60.85	
2.15.1-03.2-10.0-00.01.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	3,195,675,716.00	3,045,908,277.00	(149,767,439.00)	95.31	

6.74

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(Rp)	(%)
2.15.1-03.2-10.0-00.01.02.2.02.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,175,175,716.00	3,036,483,277.00	(148,692,439.00)	95.32	
2.15.1-03.2-10.0-00.01.02.2.02.04.5.1.1	Belanja Pegawai	13,200,000.00	0.00	(13,200,000.00)	0.00	
2.15.1-03.2-10.0-00.01.02.2.02.04.5.1.2	Belanja Sarang dan Jasa	3,161,975,716.00	3,036,483,277.00	(135,492,439.00)	95.71	
2.15.1-03.2-10.0-00.01.02.2.02.04.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	20,500,000.00	19,435,000.00	(1,075,000.00)	94.76	
2.15.1-03.2-10.0-00.01.02.2.02.04.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	20,500,000.00	19,435,000.00	(1,075,000.00)	94.76	
		0.00	(99,057,855,522.67)	(99,057,855,522.67)	0.00	

2.19



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN SAHAYAT DAN KAWASAN PEMukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG		
		KODE REKENING	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)	(%)
			1	3		4	5
1.04.1-04.2-10.0-00.01.00.0.00.00.4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		5,000,000.00	2,275,000.00	(2,725,000.00)	45.50	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.00.0.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		5,000,000.00	2,275,000.00	(2,725,000.00)	45.50	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah		5,000,000.00	2,275,000.00	(2,725,000.00)	45.50	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.00.0.00.00.5	<b>BELANJA DAERAH</b>		17,389,940,813.00	16,405,111,863.00	(984,828,950.00)	94.34	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01	<b>Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		3,034,692,350.00	3,765,562,626.00	(1,59,129,734.00)	95.95	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.01	<b>Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		16,770,000.00	16,554,320.00	(215,680.00)	98.71	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		16,770,000.00	16,554,320.00	(215,680.00)	98.71	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>		16,770,000.00	16,554,320.00	(215,680.00)	98.71	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai		0.00	0.00	0.00	0.00	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa		16,770,000.00	16,554,320.00	(215,680.00)	98.71	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		3,480,109,210.00	3,335,424,384.00	(144,684,826.00)	95.84	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3,480,109,210.00	3,335,424,384.00	(144,684,826.00)	95.84	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>		3,480,109,210.00	3,335,424,384.00	(144,684,826.00)	95.84	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai		3,480,109,210.00	3,335,424,384.00	(144,684,826.00)	95.84	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		215,607,450.00	204,948,200.00	(10,659,250.00)	95.06	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Kebutuhan Material (Termasuk Bangunan Kantor)		2,087,550.00	2,083,000.00	(4,550.00)	99.76	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>		2,087,550.00	2,083,000.00	(4,550.00)	99.76	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai		0.00	0.00	0.00	0.00	

8.7A



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERTURUNGAN	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
		3	4	5	6
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,087,950.00	2,083,000.00	(4,950.00)	99.76
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.02	Penyelesaian Pembiayaan dan Pengalokasian Kas	65,900,000.00	56,470,574.00	(9,429,426.00)	84.41
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.02.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	500,000.00	0.00	(500,000.00)	0.00
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.02.5.1.1	Belanja Pegawai	500,000.00	0.00	(500,000.00)	0.00
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	65,400,000.00	56,470,574.00	(8,929,426.00)	86.35
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.02.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	65,400,000.00	56,470,574.00	(8,929,426.00)	86.35
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.04	Penyelesaian Saluran Logistik Kantor	11,661,500.00	11,611,500.00	(50,000.00)	99.57
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	11,661,500.00	11,611,500.00	(50,000.00)	99.57
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11,661,500.00	11,611,500.00	(50,000.00)	99.57
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.05	Penyelesaian Barang Cetak dan Penggandaan	6,318,000.00	6,318,000.00	0.00	100.00
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.05.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6,318,000.00	6,318,000.00	0.00	100.00
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.05.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.05.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6,318,000.00	6,318,000.00	0.00	100.00
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kegiatan Tamu	5,292,000.00	5,292,000.00	0.00	99.10
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5,292,000.00	5,292,000.00	0.00	99.10
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5,292,000.00	5,292,000.00	0.00	99.10
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SDFD	123,300,000.00	123,177,126.00	(122,874.00)	99.90
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	123,300,000.00	123,177,126.00	(122,874.00)	99.90
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	123,300,000.00	123,177,126.00	(122,874.00)	99.90
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungutan dan Pemeliharaan Daerah	3,415,000.00	3,330,000.00	(85,000.00)	97.51
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surtut Menjamal	3,415,000.00	3,330,000.00	(85,000.00)	97.51
1.04.1-04.2-10.0-00.01.01.2.08.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,415,000.00	3,330,000.00	(85,000.00)	97.51

8.19

MA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,415,000.00	3,330,000.00	(85,000.00)	97.51	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.01.5.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,000,000.00	12,035,976.00	(2,964,024.00)	80.24	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	15,000,000.00	12,035,976.00	(2,964,024.00)	80.24	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	12,035,976.00	(2,964,024.00)	80.24	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang MOBIL Dinyala Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah</b>	153,790,700.00	153,269,746.00	(520,954.00)	99.72	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,190,000.00	39,190,000.00	0.00	100.00	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	39,190,000.00	39,190,000.00	0.00	100.00	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39,190,000.00	39,190,000.00	0.00	100.00	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106,200,000.00	106,079,540.00	(120,460.00)	99.82	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	106,200,000.00	106,079,540.00	(120,460.00)	99.83	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	106,200,000.00	106,079,540.00	(120,460.00)	99.83	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	2,620,000.00	2,620,000.00	0.00	100.00	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.05.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,620,000.00	2,620,000.00	0.00	100.00	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.05.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.05.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,620,000.00	2,620,000.00	0.00	100.00	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45,780,700.00	45,440,206.00	(340,494.00)	99.26	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	45,780,700.00	45,440,206.00	(340,494.00)	99.25	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.04.1-94.2-10.0-00.01.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45,780,700.00	45,440,206.00	(340,494.00)	99.26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		AMGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	4	5	6
1.04.1-04.2-10.0-00.01.02	Program Pengembangan Perumahan	1,735,572,298.00	1,590,568,781.20		(145,003,516.80)	91.55	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1,208,490,878.00	1,101,850,387.20		(106,640,490.80)	89.69	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.02.2.05.01	Fasilitas Pengelolaan Akomodasi dan Pemeliharaan Rumah Susun	670,927,000.00	385,546,021.20		(285,380,978.80)	57.47	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.02.2.05.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	41,827,000.00	36,260,226.00		(5,566,774.00)	86.48	
	Belanja Pegawai	7,650,000.00	5,800,000.00		(1,850,000.00)	75.82	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.02.2.05.01.5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	34,177,000.00	30,460,226.00		(3,716,774.00)	88.86	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.02.2.05.01.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	429,090,000.00	349,285,795.20		(79,714,204.80)	81.42	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.02.2.05.01.5.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	429,090,000.00	349,285,795.20		(79,714,204.80)	81.42	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.02.2.05.01.5.2.3	Pertanggungjawaban Pemeliharaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	757,553,638.00	716,304,266.00		(41,249,372.00)	94.55	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.02.2.05.02	<b>BELANJA OPERASI</b>	585,128,838.00	555,058,866.00		(30,069,972.00)	94.86	
	Belanja Pegawai	18,600,000.00	14,050,000.00		(4,550,000.00)	75.54	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.02.2.05.02.5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	566,528,838.00	541,008,866.00		(25,519,972.00)	95.50	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.02.2.05.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	172,425,000.00	161,246,500.00		(11,178,500.00)	93.52	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.02.2.05.02.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	166,425,000.00	155,251,500.00		(11,173,500.00)	93.29	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.02.2.05.02.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,000,000.00	5,994,000.00		(6,000.00)	99.90	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.02.2.06	<b>Pemeriksaan dan Pengembangan Perumahan</b>	507,091,380.00	488,718,394.00		(18,372,986.00)	96.38	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.02.2.06.01	Fasilitas Pemeriksaan dan Pengembangan Perumahan dan Pengembangan Perumahan secara Elektronik	507,091,380.00	488,718,394.00		(18,372,986.00)	96.38	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.02.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	507,091,380.00	488,718,394.00		(18,372,986.00)	96.38	
	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.02.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	507,091,380.00	488,718,394.00		(18,372,986.00)	96.38	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.03	<b>Program Kawasan Perumahan</b>	468,957,000.00	440,329,370.00		(28,627,630.00)	93.90	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.03.2.02	<b>Pemertan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) M<sup>2</sup></b>	155,632,000.00	137,422,650.00		(17,666,350.00)	88.40	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.03.2.02.85	Kontribusi dan Sektorsitas Pengembangan Perumahan Perumahan/Perumahan Perumahan Kumuh	40,618,000.00	33,632,650.00		(6,985,350.00)	82.80	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.03.2.02.85.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	
	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.03.2.02.85.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40,618,000.00	33,632,650.00		(6,985,350.00)	82.80	

8-11A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		AMGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
					3	4
1.04.1-04.2-10.0-00.01.03.2.03.06	Penyusunan/Review/Update/Keputusan Kegiatan Bidang PIP	174,485,000.00	103,790,000.00	(70,695,000.00)	90.96	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.03.2.02.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	114,485,000.00	103,790,000.00	(10,695,000.00)	90.66	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.03.2.02.06.5.1.1	Belanja Pegawai	1,500,000.00	1,000,000.00	(500,000.00)	66.67	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.03.2.02.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	112,985,000.00	102,790,000.00	(10,195,000.00)	90.98	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.03.2.03.01	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Rawan ID (seputuh) Ho</b>	313,854,000.00	302,906,232.00	(10,947,768.00)	96.51	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.03.2.03.01.5.1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)	96,248,000.00	93,421,600.00	(2,826,400.00)	96.75	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.03.2.03.01.5.1.1	Belanja Pegawai	1,240,000.00	750,000.00	(500,000.00)	60.00	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.03.2.03.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	94,998,000.00	92,711,600.00	(2,286,400.00)	97.24	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.03.2.03.06	<b>Realisasi Pembangunan Pemukiman/Perencanaan Permukiman Kumuh</b>	217,606,000.00	209,785,120.00	(7,820,880.00)	96.42	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.03.2.03.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	29,506,000.00	24,449,120.00	(4,956,880.00)	84.29	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.03.2.03.06.5.1.1	Hutang Pegawai	4,150,000.00	2,350,000.00	(1,800,000.00)	56.63	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.03.2.03.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24,856,000.00	22,099,120.00	(2,756,880.00)	88.91	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.03.2.03.06.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	188,600,000.00	185,336,000.00	(3,264,000.00)	98.27	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.03.2.03.06.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	12,600,000.00	12,400,000.00	(200,000.00)	98.41	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.03.2.03.06.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Infaq	176,000,000.00	172,936,000.00	(3,064,000.00)	98.26	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.04	<b>Program Pemukiman Dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	3,404,411,374.00	3,314,406,775.00	(90,004,599.00)	97.36	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.04.2.01	<b>Peningkatan Permukiman dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	3,404,411,374.00	3,314,406,775.00	(90,004,599.00)	97.36	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.04.2.01.01.5.1	Perbaikan Rumah tidak Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) m <sup>2</sup>	3,334,166,374.00	3,253,131,375.00	(81,034,999.00)	97.57	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.04.2.01.01.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,226,593,624.00	3,150,140,543.00	(76,453,081.00)	97.63	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.04.2.01.01.5.1.1.1	Belanja Pegawai	10,500,000.00	1,500,000.00	(9,000,000.00)	14.29	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.04.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	961,093,624.00	918,640,543.00	(42,453,081.00)	95.58	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.04.2.01.01.5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2,255,000,000.00	2,230,000,000.00	(25,000,000.00)	98.89	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.04.2.01.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	107,572,750.00	102,999,832.00	(4,581,918.00)	95.74	

8.79

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(Rp)	(%)
1.04.1-04.2-10.0-00.01.04.2.01.01.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Modis	107,577,750.00	102,990,832.00	(4,581,318.00)	95.74	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.04.2.01.02	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bersewa PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sapsuluh) M <sup>2</sup>	20,245,000.00	61,275,400.00	(6,969,600.00)	82.27	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	70,245,000.00	61,275,400.00	(8,969,600.00)	87.23	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.04.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	2,350,000.00	500,000.00	(1,750,000.00)	21.22	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.04.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	67,895,000.00	60,775,400.00	(7,219,600.00)	89.38	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	9,856,307,671.00	7,294,244,310.80	(562,063,360.20)	92.85	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.05.2.01	Usaha Penyelenggaraan PSU Perumahan	7,856,307,671.00	7,294,244,310.80	(592,063,360.20)	92.85	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.05.2.01.01	Perencanaan Penyelenggaraan PSU Perumahan	776,157,000.00	708,969,408.00	(67,188,592.00)	91.34	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	62,578,000.00	24,705,600.00	(37,872,400.00)	39.48	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.05.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	15,580,000.00	11,500,000.00	(4,080,000.00)	73.81	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.05.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46,998,000.00	13,205,600.00	(33,792,400.00)	28.10	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.05.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	713,579,000.00	604,282,800.00	(29,316,192.00)	95.89	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.05.2.01.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67,100,000.00	51,347,800.00	(15,752,192.00)	76.52	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.05.2.01.01.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangsal	646,479,000.00	632,915,000.00	(13,564,000.00)	97.90	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.05.2.01.02	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Peningkatan	6,992,680,871.00	6,512,970,202.80	(479,710,668.20)	92.74	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	902,535,940.00	704,470,200.00	(198,065,731.00)	78.05	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.05.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	100.00	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.05.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	862,535,940.00	664,470,200.00	(198,065,731.00)	77.04	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	6,090,144,931.00	5,808,499,993.86	(281,644,937.14)	95.38	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.05.2.01.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	944,631,000.00	441,256,350.00	(103,374,604.00)	81.02	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.05.2.01.02.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35,000,000.00	34,080,000.00	(920,000.00)	97.37	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.05.2.01.02.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangsal	5,510,513,931.00	5,333,163,597.80	(177,350,333.20)	96.78	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.05.2.01.03	Kontribusi dan Sinergisasi dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	87,469,800.00	72,305,700.00	(15,164,100.00)	82.66	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	87,469,800.00	72,305,700.00	(15,164,100.00)	82.66	
1.04.1-04.2-10.0-00.01.05.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	

19.19

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.04.1-04.3-10.0-08.01.05.1.01.03.5.1.2	Bebanja Barang dan Jasa	87,489,800.00	72,395,700.00	(15,094,100.00)	82.66
		0.00	(16,402,836,863.00)	(16,402,836,863.00)	0.00

8/1A



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

URUSAN Pemerintahan Organisasi	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	6
		3	4	5		
1.05.1-05.0-00.0-00.01.00.00.01	<b>BELAJA DAERAH</b>	7.792.205.950.00	7.147.474.055.67	(644.731.894.33)	91.73	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.718.196.412.00	4.400.068.778.00	(238.127.634.00)	94.95	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.150.000.00	14.344.050.00	(805.950.00)	94.69	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.150.000.00	14.344.050.00	(805.950.00)	94.69	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	15.150.000.00	14.344.050.00	(805.950.00)	94.68	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000.00	14.344.050.00	(805.950.00)	94.68	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	3.539.385.132.00	3.535.254.988.00	(4.130.144.00)	94.79	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.539.385.132.00	3.355.154.988.00	(184.230.144.00)	94.79	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3.539.385.132.00	3.355.154.988.00	(184.230.144.00)	94.79	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3.539.385.132.00	3.355.154.988.00	(184.230.144.00)	94.79	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	47.900.000.00	47.250.000.00	(650.000.00)	96.64	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berbasis Akibat Kelangkaannya	47.900.000.00	47.250.000.00	(650.000.00)	96.64	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.05.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	47.900.000.00	47.250.000.00	(650.000.00)	96.64	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.05.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47.900.000.00	47.250.000.00	(650.000.00)	96.64	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	314.230.780.00	303.944.080.00	(10.286.700.00)	96.73	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi/Peningkatan Bangunan Kantor	4.525.000.00	4.789.000.00	264.000.00	97.24	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4.525.000.00	4.789.000.00	264.000.00	97.24	

27A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,789,000.00	4,789,000.00	(1,136,000.00)	97.24
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.02	Penyesuaian Peralatan dan Peralengkapan Kantor	65,750,000.00	65,278,205.00	(471,795.00)	99.28
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	65,750,000.00	65,278,205.00	(471,795.00)	99.28
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65,750,000.00	65,278,205.00	(471,795.00)	99.28
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.03	Penyesuaian Perbaikan Rumah Tangga	22,032,000.00	22,008,000.00	(24,000.00)	99.77
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,257,000.00	2,255,000.00	(2,000.00)	99.90
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,257,000.00	2,255,000.00	(2,000.00)	99.90
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.03.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	9,775,000.00	9,750,000.00	(25,000.00)	99.74
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.03.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,775,000.00	9,750,000.00	(25,000.00)	99.74
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.04	Penyesuaian Saluran Listrik Kantor	11,749,600.00	11,016,000.00	(733,600.00)	93.76
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11,749,600.00	11,016,000.00	(733,600.00)	93.76
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.05	Penyesuaian Ruang Cetak dan Penggandaan	12,457,610.00	12,457,610.00	0.00	100.00
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.05.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	12,457,610.00	12,457,610.00	0.00	100.00
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.05.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.05.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12,457,610.00	12,457,610.00	0.00	100.00
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.08	Penyesuaian Anggaran Tahun	6,475,000.00	3,586,000.00	(2,889,000.00)	55.29
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6,475,000.00	3,586,000.00	(2,889,000.00)	55.29
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-01.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6,475,000.00	3,586,000.00	(2,889,000.00)	55.29



KODE REKENTING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		3	4	(Rp)	(%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2			5	6
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SWPD	200,760,000.00	194,818,165.00	(5,941,835.00)	97.04
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	200,760,000.00	194,818,165.00	(5,941,835.00)	97.04
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200,760,000.00	194,818,165.00	(5,941,835.00)	97.04
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	55,400,000.00	48,240,924.00	(7,159,076.00)	85.46
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08.01	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	100.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	100.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	100.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08.02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	55,400,000.00	47,190,924.00	(8,209,076.00)	85.18
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	55,400,000.00	47,190,924.00	(8,209,076.00)	85.18
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55,400,000.00	47,190,924.00	(8,209,076.00)	85.18
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09	<b>Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	745,000,000.00	711,134,736.00	(33,865,264.00)	95.44
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.01	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan</b>	29,190,000.00	38,922,100.00	(9,732,100.00)	99.32
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	29,190,000.00	38,922,100.00	(9,732,100.00)	99.32
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29,190,000.00	38,922,100.00	(9,732,100.00)	99.32
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.02	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Asuransi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	628,015,900.00	607,299,955.00	(20,715,945.00)	96.70
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	628,015,900.00	607,299,955.00	(20,715,945.00)	96.70
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	628,015,900.00	607,299,955.00	(20,715,945.00)	96.70
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.06	<b>Pemeliharaan Perbaikan dan Poles Lainnya</b>	52,205,000.00	40,167,730.00	(12,037,270.00)	76.21

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	52,705,000.00	40,167,750.00	(12,537,250.00)	76.21
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	52,705,000.00	40,167,750.00	(12,537,250.00)	76.21
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Penyediaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25,169,600.00	24,744,931.00	(424,669.00)	98.31
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	25,169,600.00	24,744,931.00	(424,669.00)	98.31
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25,169,600.00	24,744,931.00	(424,669.00)	98.31
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3,074,000,530.00	2,667,405,277.67	(406,594,262.33)	86.77
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.01	Penyelamatan Non Kebakaran	2,679,399,038.00	2,540,816,372.67	(288,498,665.33)	89.80
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Penanggulangan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	295,572,500.00	253,900,921.67	(41,671,578.33)	85.90
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.01.01.5.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	115,572,500.00	77,900,000.00	(37,672,500.00)	67.40
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.01.01.5.1.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,350,000.00	250,000.00	(2,100,000.00)	10.64
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.01.01.5.1.1.2	Belanja Pegawai	113,222,500.00	77,650,000.00	(35,572,500.00)	68.58
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.01.01.5.2	Belanja Modal	180,000,000.00	176,000,971.67	(3,999,028.33)	97.78
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.01.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180,000,000.00	176,000,971.67	(3,999,028.33)	97.78
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.01.02	Amudaman dan Angkutan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,007,360,278.00	1,789,788,101.00	(217,591,177.00)	89.16
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,007,360,278.00	1,789,788,101.00	(217,591,177.00)	89.16
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,007,360,278.00	1,789,788,101.00	(217,591,177.00)	89.16
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.01.03	Amudaman dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	62,755,000.00	59,310,300.00	(3,444,700.00)	94.51
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	62,755,000.00	59,310,300.00	(3,444,700.00)	94.51
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	62,755,000.00	59,310,300.00	(3,444,700.00)	94.51
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.01.03.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.01.03.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature or mark.

KODE REKENTING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.05.1-05.0-00.0-04.2.01.06	Anggaran Sarana dan Prasarana Peningkatan, Peninggalan Kebutuhan dan Alat Peninggalan	234,457,500.00	223,005,000.00	(11,452,500.00)	95.36
1.05.1-05.0-00.0-04.2.01.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	177,000,000.00	175,605,000.00	(1,395,000.00)	99.21
1.05.1-05.0-00.0-04.2.01.06.5.1.1	Belanja Pegawai	1,000,000.00	0.00	(1,000,000.00)	0.00
1.05.1-05.0-00.0-04.2.01.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	176,000,000.00	175,605,000.00	(395,000.00)	98.78
1.05.1-05.0-00.0-04.2.01.05.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	47,457,500.00	47,400,000.00	(57,500.00)	99.89
1.05.1-05.0-00.0-04.2.01.05.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	47,457,500.00	47,400,000.00	(57,500.00)	99.89
1.05.1-05.0-00.0-04.2.01.07	Perencanaan Aprotur Perencanaan Kabupaten	85,617,700.00	84,777,700.00	(840,000.00)	99.02
1.05.1-05.0-00.0-04.2.01.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	85,617,700.00	84,777,700.00	(840,000.00)	99.02
1.05.1-05.0-00.0-04.2.01.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	85,617,700.00	84,777,700.00	(840,000.00)	99.02
1.05.1-05.0-00.0-04.2.01.09	Peninggalan Kebutuhan dan Koordinasi antar Daerah Berbasis, antar Lembaga, dan Koordinasi dalam Peningkatan, Peninggalan, Peninggalan Kabupaten dan Peninggalan Non Kabupaten	163,552,000.00	139,047,300.00	(24,504,700.00)	85.02
1.05.1-05.0-00.0-04.2.01.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	163,552,000.00	139,047,300.00	(24,504,700.00)	85.02
1.05.1-05.0-00.0-04.2.01.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-04.2.01.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	163,552,000.00	139,047,300.00	(24,504,700.00)	85.02
1.05.1-05.0-00.0-04.2.02	Inspeksi Perlatan Protokol Kabupaten	46,407,000.00	26,433,000.00	(19,974,000.00)	58.17
1.05.1-05.0-00.0-04.2.02.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	46,407,000.00	26,433,000.00	(19,974,000.00)	58.17
1.05.1-05.0-00.0-04.2.02.01.5.1	Belanja Pegawai	9,625,500.00	9,456,375.00	(169,125.00)	98.24
1.05.1-05.0-00.0-04.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	9,625,500.00	9,456,375.00	(169,125.00)	98.24
1.05.1-05.0-00.0-04.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-04.2.02.02	Pendanaan Sarana Prasarana Protokol Kabupaten	39,255,500.00	18,977,525.00	(20,277,975.00)	48.34
1.05.1-05.0-00.0-04.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	39,255,500.00	18,977,525.00	(20,277,975.00)	48.34
1.05.1-05.0-00.0-04.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-04.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39,255,500.00	18,977,525.00	(20,277,975.00)	48.34
1.05.1-05.0-00.0-04.2.03	Investigasi Kejujuran Kabupaten	39,880,000.00	28,127,645.00	(11,752,355.00)	70.57
1.05.1-05.0-00.0-04.2.03.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	39,880,000.00	28,127,645.00	(11,752,355.00)	70.57

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(Rp)	(%)
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.03.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	17,080,000.00	5,343,200.00	(11,736,800.00)	31.28	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.03.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.03.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17,080,000.00	5,343,200.00	(11,736,800.00)	31.28	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.03.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	22,890,000.00	22,784,445.00	(15,555.00)	99.93	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.03.01.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	22,890,000.00	22,784,445.00	(15,555.00)	99.93	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.04.01.5.1	<b>Pembudayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	145,939,500.00	61,033,260.00	(84,906,240.00)	41.82	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.04.01.5.1.1	Pembudayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	66,987,000.00	53,833,260.00	(13,153,740.00)	80.36	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.04.01.5.1.2	Belanja Pegawai	66,987,000.00	53,833,260.00	(13,153,740.00)	80.36	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.04.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.04.02	<b>Bantuan dan Pembiayaan Kembali Pemadam Kebakaran</b>	78,952,500.00	2,200,000.00	(71,752,500.00)	9.12	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.04.02.5.1	Belanja Pegawai	78,952,500.00	2,200,000.00	(71,752,500.00)	9.12	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.04.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.04.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	78,952,500.00	2,200,000.00	(71,752,500.00)	9.12	
		0.00	(7,147,474,055.67)	(7,147,474,055.67)	0.00	



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5	6	
1.05.1-05.0-00.0-00.00.06.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	21,379,894,911.00	19,727,921,874.00	(1,651,983,037.00)	92.27	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	8,271,831,895.00	7,622,828,260.00	(651,003,545.00)	92.13	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	26,245,000.00	24,101,855.00	(2,143,145.00)	91.87	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.01.01	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	26,245,000.00	24,101,855.00	(2,143,145.00)	91.87	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	26,245,000.00	24,101,855.00	(2,143,145.00)	91.83	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.01.01.5.1.1.1	Belanja Baring dan Jasa	26,245,000.00	24,101,855.00	(2,143,145.00)	91.83	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.02.01.5.1.1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	2,130,265,555.00	6,648,736,103.00	(4,518,470,548.00)	93.25	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.02.01.5.1.1.1	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	2,130,265,555.00	6,648,736,103.00	(4,518,470,548.00)	93.25	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.02.01.5.1.1.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	7,130,265,555.00	6,648,736,103.00	(481,529,452.00)	93.25	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.02.01.5.1.1.1.1.1	Belanja Pegawai	7,130,265,555.00	6,648,736,103.00	(481,529,452.00)	93.25	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	247,642,250.00	214,682,423.00	(32,959,827.00)	86.90	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.01	<b>Penyediaan Kebutuhan Dasabes/Asbab/Perencanaan/ Bangunan Kantor</b>	10,948,500.00	10,948,500.00	0.00	100.00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	10,948,500.00	10,948,500.00	0.00	100.00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.01.5.1.1.2	Belanja Baring dan Jasa	10,948,500.00	10,948,500.00	0.00	100.00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.04	<b>Penyediaan Belanja Kapital Kantor</b>	15,353,500.00	15,222,500.00	(131,000.00)	99.14	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	15,353,500.00	15,222,500.00	(131,000.00)	99.14	

Handwritten signature or initials

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	6
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15,355,500.00	15,223,500.00	(132,000.00)	99.14
1.05.1-05.0-01.0-00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,042,250.00	9,405,000.00	(2,637,250.00)	78.19
1.05.1-05.0-01.0-00.02.01.2.06.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	12,042,250.00	9,405,000.00	(2,637,250.00)	78.10
1.05.1-05.0-01.0-00.02.01.2.06.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-01.0-00.02.01.2.06.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12,042,250.00	9,405,000.00	(2,637,250.00)	78.10
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SMDP	206,701,000.00	179,105,421.00	(29,595,577.00)	85.82
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	206,701,000.00	179,105,421.00	(29,595,577.00)	85.80
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	206,701,000.00	179,105,421.00	(29,595,577.00)	85.80
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	120,085,000.00	88,045,169.00	(32,039,831.00)	73.32
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.01	Penyediaan Jasa Suci Menyurat	3,685,000.00	3,590,000.00	(95,000.00)	97.42
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,685,000.00	3,590,000.00	(95,000.00)	97.42
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,685,000.00	3,590,000.00	(95,000.00)	97.42
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116,400,000.00	84,456,169.00	(31,943,831.00)	72.56
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	116,400,000.00	84,456,169.00	(31,943,831.00)	72.56
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	116,400,000.00	84,456,169.00	(31,943,831.00)	72.56
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06	<b>Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	750,180,000.00	647,261,710.00	(102,918,290.00)	86.28
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Operasional atau Lapangan	425,780,000.00	397,305,650.00	(28,474,350.00)	92.33
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	380,780,000.00	354,075,650.00	(26,704,350.00)	92.99
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	380,780,000.00	354,075,650.00	(26,704,350.00)	92.99
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	45,000,000.00	43,250,000.00	(1,710,000.00)	96.28

8219

8.14

KODE REKENTING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
		3	4	5	6
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.09.05.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Modul	45,000,000.00	43,290,000.00	(1,710,000.00)	96.20
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.09.05	Pembelian Perakitan dan Modul Lainnya	70,880,000.00	6,695,000.00	(13,195,000.00)	33.65
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.09.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	19,890,000.00	6,695,000.00	(13,195,000.00)	33.66
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.09.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.09.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19,890,000.00	6,695,000.00	(13,195,000.00)	33.66
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.09.05	Pembelian/Kebudayaan Gedung Kantor dan Restorasi Lainnya	304,519,000.00	243,202,000.00	(61,317,000.00)	79.86
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.09.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	304,519,000.00	243,202,000.00	(61,317,000.00)	79.86
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.09.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.09.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	304,519,000.00	243,202,000.00	(61,317,000.00)	79.86
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02	<b>Program Percepatan Ketertarikan Dan Kebersihan Umum</b>	13,105,973,196.00	12,105,093,614.00	(1,000,879,492.00)	92.36
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.01	<b>Peningkatan Gangguan Ketertarikan dan Kebersihan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	12,628,006,456.00	11,506,488,974.00	(921,517,482.00)	92.59
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.01.01	Peningkatan Kemampuan Administrasi dan Kebersihan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	4,927,640,000.00	4,516,712,704.00	(410,927,296.00)	78.68
1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,927,640,000.00	1,516,712,704.00	(410,927,296.00)	78.68
1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,927,640,000.00	1,516,712,704.00	(410,927,296.00)	78.68
1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.01.02	<b>Peningkatan atas gangguan ketertarikan dan kebersihan umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Persebaran dan Penempatan Ujung Rata dan Ketertarikan Nelaya</b>	9,674,333,196.00	8,581,570,814.00	(922,649,292.00)	94.17
1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	8,552,146,106.00	8,211,170,814.00	(340,975,292.00)	96.01
1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8,552,146,106.00	8,211,170,814.00	(340,975,292.00)	96.01
1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.01.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	482,074,000.00	350,400,000.00	(131,674,000.00)	72.69
1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.01.02.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Modul	482,074,000.00	350,400,000.00	(131,674,000.00)	72.69
1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.01.04	<b>Pembudayaan Perilaku Masyarakat dalam rangka ketertarikan dan ketertarikan Umum</b>	754,561,000.00	741,506,750.00	(13,054,250.00)	98.27
1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.01.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	754,561,000.00	741,506,750.00	(13,054,250.00)	98.27
1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.01.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	754,561,300.00	741,506,750.00	(13,054,250.00)	98.27	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SWM Satuan Polisi Pamangpra dan Satuan Penyelenggaraan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bertujuan Melakukakan	711,585,350.00	688,688,706.00	(22,896,644.00)	96.90	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.01.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	556,185,350.00	532,586,706.00	(23,598,644.00)	95.76	
	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.01.05.5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	556,185,350.00	532,586,706.00	(23,598,644.00)	95.76	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.01.05.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	155,400,000.00	154,112,000.00	(1,288,000.00)	99.17	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.01.05.5.1.2.1	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	155,400,000.00	154,112,000.00	(1,288,000.00)	99.17	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.02	<b>Pemeliharaan Perawatan Daerah Kabupaten/Kota dan Perawatan Bupati/Walikota</b>	677,966,650.00	598,604,640.00	(79,362,010.00)	88.29	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.02.01	Sustentabilitas Pengelolaan Perawatan Daerah dan Perawatan Bupati/Walikota	138,028,400.00	110,629,450.00	(27,398,950.00)	80.15	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	86,808,400.00	60,179,450.00	(26,648,950.00)	69.31	
	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.02.01.5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	86,808,400.00	60,179,450.00	(26,648,950.00)	69.31	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.02.01.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	51,200,000.00	50,450,000.00	(750,000.00)	98.54	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.02.01.5.1.2.1	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	51,200,000.00	50,450,000.00	(750,000.00)	98.54	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.02.02	<b>Pemeliharaan atas Kebutuhan terhadap Pelaksanaan Perawatan Daerah dan Perawatan Bupati/Walikota</b>	385,079,500.00	341,301,400.00	(43,778,100.00)	88.62	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.02.02.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	335,079,500.00	251,683,600.00	(83,395,900.00)	75.05	
	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.02.02.1.1	Belanja Barang dan Jasa	335,079,500.00	251,683,600.00	(83,395,900.00)	75.05	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.02.02.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	50,000,000.00	49,617,800.00	(382,200.00)	99.24	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.02.02.1.2.1	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	50,000,000.00	49,617,800.00	(382,200.00)	99.24	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.02.02.2	<b>Pemeliharaan atas Pelaksanaan Perawatan Daerah dan Perawatan Bupati/Walikota</b>	254,606,750.00	246,673,790.00	(7,932,960.00)	97.27	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.02.02.2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	154,858,750.00	146,673,790.00	(8,184,960.00)	94.71	
	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.02.2.02.02.2.1.1	Belanja Barang dan Jasa	154,858,750.00	146,673,790.00	(8,184,960.00)	94.71	

Handwritten signature and initials.



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
		0.00	(19,727,921,874.00)	(19,727,921,874.00)	0.00

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	
KODE REKENING	3	4	5	6
Urusan Pemerintahan : 1.05 Organisasi : 1.05.1-05.0-00.0-00.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Keistimewaan dan Keterlibatan Umum serta Pendidikan Masyarakat Badan Penyelenggaraan Rencana Daerah			
1.05.1-05.0-00.0-00.03.00.00.00.5		4.291,534,890,76	(220,548,061,24)	95,11
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01		2.384,220,970,76	(175,407,665,24)	93,00
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.01		17,701,200,00	(6,686,550,00)	72,57
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.01.01		17,701,200,00	(6,686,550,00)	72,57
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.01.01.5.1		17,701,200,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.01.01.5.1.1		17,701,200,00	(6,686,550,00)	72,57
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.01.01.5.1.2		0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.02		1,586,957,917,00	(151,493,890,00)	91,29
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.02.01		1,586,957,917,00	(151,493,890,00)	91,29
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.02.01.5.1		1,586,957,917,00	(151,493,890,00)	91,29
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.02.01.5.1.1		1,586,957,917,00	(151,493,890,00)	91,29
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06		3,020,000,00	0,00	100,00
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.01		3,020,000,00	0,00	100,00
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.01.5.1		0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.01.5.1.1		3,020,000,00	0,00	100,00
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.01.5.1.2		0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.02		39,403,000,00	(214,000,00)	99,45
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.02.5.1		0,00	0,00	0,00

ETA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERTURUNGAN (%)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5	6	(Rp)	%
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	39,400,000.00	39,184,000.00	(216,000.00)	99.45		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39,400,000.00	39,184,000.00	(216,000.00)	99.45		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.04.5.1.1	Perencanaan Bahan Logistik Kantor	8,962,000.00	8,912,000.00	(50,000.00)	99.44		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.04.5.1.2	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.05.5.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8,962,000.00	8,912,000.00	(50,000.00)	99.44		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.05.5.1.2	Perencanaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,843,500.00	4,843,500.00	0.00	100.00		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.05.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4,843,500.00	4,843,500.00	0.00	100.00		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,843,500.00	4,843,500.00	0.00	100.00		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.08.5.1	Facilitas Kungkungan Ternu	3,148,000.00	3,148,000.00	0.00	98.99		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.08.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,148,000.00	3,148,000.00	0.00	98.99		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,148,000.00	3,148,000.00	0.00	98.99		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.09.5.1	Perencanaan Rapor Kelembah dan Konsultasi SOPP	280,000,000.00	279,308,157.00	(691,843.00)	99.62		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.09.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	180,000,000.00	179,308,157.00	(691,843.00)	99.62		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180,000,000.00	179,308,157.00	(691,843.00)	99.62		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.07.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	70,500,000.00	70,290,750.00	(209,250.00)	99.70		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.07.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.07.05.5.1.2	Belanja Modal	70,500,000.00	70,290,750.00	(209,250.00)	99.70		
1.05.1-05.0-00.0-00.03.01.2.07.05.5.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70,500,000.00	70,290,750.00	(209,250.00)	99.70		

219

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)
1	2	3	4	5	6
1.05.1-05.0-00.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	15.600.000,00	12.202.081,00	(2.397.919,00)	82,06
1.05.1-05.0-00.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.05.1-05.0-00.03.01.2.08.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.05.1-05.0-00.03.01.2.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.05.1-05.0-00.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	12.202.081,00	(2.797.919,00)	81,35
1.05.1-05.0-00.03.01.2.08.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	15.000.000,00	12.202.081,00	(2.797.919,00)	81,35
1.05.1-05.0-00.03.01.2.08.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.03.01.2.08.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.202.081,00	(2.797.919,00)	81,35
1.05.1-05.0-00.03.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah</b>	475.340.000,00	458.052.865,76	(17.287.204,24)	96,36
1.05.1-05.0-00.03.01.3.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Cetus Operasional atau Lapangan	230.220.000,00	226.170.075,00	(40.925,00)	98,58
1.05.1-05.0-00.03.01.3.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	226.220.000,00	226.170.075,00	(49.925,00)	99,98
1.05.1-05.0-00.03.01.3.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.03.01.3.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	226.220.000,00	226.170.075,00	(49.925,00)	99,98
1.05.1-05.0-00.03.01.3.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.695.000,00	23.575.000,00	(20.000,00)	99,49
1.05.1-05.0-00.03.01.3.09.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	23.695.000,00	23.575.000,00	(120.000,00)	99,06
1.05.1-05.0-00.03.01.3.09.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.695.000,00	23.575.000,00	(120.000,00)	99,06
1.05.1-05.0-00.03.01.3.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.425.000,00	216.307.790,76	(9.117.209,24)	95,84
1.05.1-05.0-00.03.01.3.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	55.425.000,00	48.719.855,00	(6.705.215,00)	87,90
1.05.1-05.0-00.03.01.3.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	55.425.000,00	48.719.855,00	(6.705.215,00)	87,90
1.05.1-05.0-00.03.01.3.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	169.587.935,76	(412.064,24)	99,76
1.05.1-05.0-00.03.01.3.09.09.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	170.000.000,00	169.587.935,76	(412.064,24)	99,76
1.05.1-05.0-00.03.01.3.09.09.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.048.395.316,00	1.007.313.920,00	(41.081.396,00)	97,89
1.05.1-05.0-00.03.03	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	47.414.200,00	47.397.200,00	(17.000,00)	99,96
1.05.1-05.0-00.03.03.2.01	<b>Asyutan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.03.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00

879

KODE REKENTING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Kota (Per Jenis Bencana)	47,414,700.00	47,397,200.00	(17,500.00)	98.96
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	47,414,700.00	47,397,200.00	(17,500.00)	99.96
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47,414,700.00	47,397,200.00	(17,500.00)	99.96
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.02	<b>Penyusunan Perencanaan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	1,992,105,616.00	1,651,056,470.00	(41,041,146.00)	92.83
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.02.02	Pelatihan Perencanaan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Kota	282,342,950.00	265,426,000.00	(16,916,950.00)	94.02
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	282,342,950.00	265,426,000.00	(16,916,950.00)	94.01
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	282,342,950.00	265,426,000.00	(16,916,950.00)	94.01
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.02.03	Anggaran Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten Kota	1,008,973,646.00	1,008,784,137.00	(189,509.00)	99.99
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.02.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,008,973,646.00	1,008,784,137.00	(189,509.00)	99.98
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.02.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.02.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,008,973,646.00	1,008,784,137.00	(189,509.00)	99.98
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.02.06	Anggaran Kapasitas Kewaspadaan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	119,777,600.00	117,095,990.00	(2,681,610.00)	98.59
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.02.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	69,777,600.00	68,096,150.00	(1,681,450.00)	97.59
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.02.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.02.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	69,777,600.00	68,096,150.00	(1,681,450.00)	97.59
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.02.06.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	49,000,000.00	48,999,840.00	(158.00)	100.00
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.02.06.5.2.2	Belanja Modal Perabotan dan Meubel	49,000,000.00	48,999,840.00	(158.00)	100.00
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.02.07.5.1.1	Pemangangan Peralabencana Kabupaten Kota	39,594,000.00	39,094,500.00	(499,500.00)	98.74
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.02.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	39,594,000.00	39,094,500.00	(499,500.00)	98.74
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.02.07.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00

R. 7 A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.05.1-05.0-00.0-03.2.02.07.5.1.2	Belanja barang dan jasa	39,594,000.00	39,094,500.00	(499,500.00)	98.74
1.05.1-05.0-00.0-03.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Relebar Cepak (TRC) Baskora Kabupaten/Kota	442,417,220.00	426,663,843.00	(21,753,377.00)	95.08
1.05.1-05.0-00.0-03.03.2.02.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	442,417,220.00	420,663,843.00	(21,753,377.00)	95.08
1.05.1-05.0-00.0-03.03.2.02.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-03.03.2.02.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	442,417,220.00	420,663,843.00	(21,753,377.00)	95.08
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.03	<b>Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	8,875,800.00	8,852,250.00	(22,750.00)	99.74
1.05.1-05.0-00.0-03.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	8,875,800.00	8,852,250.00	(22,750.00)	99.74
1.05.1-05.0-00.0-03.03.2.03.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-03.03.2.03.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-03.03.2.03.04.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	8,875,800.00	8,852,250.00	(22,750.00)	99.74
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.03.04.5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.1-05.0-00.0-00.03.03.2.03.04.5.2.2		0.00	(4,291,534,896.76)	(4,291,534,896.76)	0.00



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SOSIAL  
 Dinas Sosial

Urusan Pemerintahan : 1.06  
 Organisasi : 1.06.1-06.0-00.0-00.01

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.00.00.00.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	7.879.143.500,00	6.687.905.903,00	(1.191.237.605,00)	84,58	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.885.380.728,00	3.297.426.337,00	(587.954.391,00)	84,87	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.508.000,00	31.864.650,00	(2.643.350,00)	98,14	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.3.01.01	Penyusunan Dokumen Anggaran Perangkat Daerah	34.508.000,00	31.864.650,00	(2.643.350,00)	98,14	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	34.508.000,00	31.864.650,00	(2.643.350,00)	98,14	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.02.01.5.1.1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	3.281.265.596,00	2.718.399.391,00	(562.875.205,00)	82,85	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.02.01.5.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.281.265.596,00	2.718.399.391,00	(562.875.205,00)	82,85	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.02.01.5.1.1.2	<b>BELANJA OPERASI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.02.01.5.1.1.2.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.02.01.5.1.1.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	200.400.000,00	196.263.753,00	(4.136.247,00)	98,00	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.599.000,00	1.599.000,00	0,00	99,37	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.599.000,00	1.599.000,00	0,00	99,37	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.599.000,00	1.599.000,00	0,00	99,37	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.068.000,00	8.725.000,00	(343.000,00)	96,17	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	9.068.000,00	8.725.000,00	(343.000,00)	96,31	

279





KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	4	5	6
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Perencanaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	165,230,600.00	164,747,247.00		(483,353.00)	98.47	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	165,230,600.00	164,747,247.00		(483,353.00)	99.41	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	165,230,600.00	164,747,247.00		(483,353.00)	99.41	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02	Program Pemberdayaan Sosial	479,639,500.00	444,401,899.00		(35,237,601.00)	92.65	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	479,639,500.00	444,401,899.00		(35,237,601.00)	92.65	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.01	Amplifikasi Kemampuan Potensi Pelaku Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	237,657,500.00	230,067,500.00		(7,590,000.00)	96.81	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	237,657,500.00	230,067,500.00		(7,590,000.00)	96.81	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	237,657,500.00	230,067,500.00		(7,590,000.00)	96.81	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.02	Amplifikasi Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota	11,825,500.00	23,337,500.00		11,512,000.00	69.95	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	11,825,500.00	23,337,500.00		11,512,000.00	69.95	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11,825,500.00	23,337,500.00		11,512,000.00	69.95	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.04	Pengalokasian Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota	210,046,500.00	191,996,899.00		(18,049,601.00)	91.41	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	210,046,500.00	191,996,899.00		(18,049,601.00)	91.41	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	189,871,500.00	171,996,899.00		(17,874,601.00)	90.59	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.04.5.1.5	Belanja Hibah	20,000,000.00	20,000,000.00		0.00	100.00	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.04.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	175,000.00	0.00		(175,000.00)	0.00	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.04.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	175,000.00	0.00		(175,000.00)	0.00	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04	Program Rehabilitasi Sosial	919,315,342.00	716,022,804.00		(203,292,538.00)	77.89	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	657,455,747.00	535,132,024.00		(122,323,723.00)	81.39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Penyediaan Asumtanan	106,730,000.00	84,057,500.00	(22,672,500.00)	78.76
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	106,730,000.00	84,057,500.00	(22,672,500.00)	78.76
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	106,730,000.00	84,057,500.00	(22,672,500.00)	78.76
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.05	Pembelian Dibebaskan Pajak, Merusak, Sirkulasi, dan Sosial	117,067,750.00	96,795,400.00	(20,272,350.00)	82.68
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	87,867,750.00	66,825,400.00	(20,242,350.00)	76.75
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.05.5.1.1	Belanja Pegawai	87,867,750.00	66,825,400.00	(20,242,350.00)	76.75
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000.00	29,970,000.00	(30,000.00)	99.90
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.05.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	30,000,000.00	29,970,000.00	(30,000.00)	99.90
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.05.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	174,644,000.00	155,123,380.00	(19,520,620.00)	88.82
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.06	Pembelian Dibebaskan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terbatas, Anak Terbatas, Layak Usia Terbatas, serta Gebrakan Pengemis dan Masyarakat	174,644,000.00	155,123,380.00	(19,520,620.00)	88.82
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	174,644,000.00	155,123,380.00	(19,520,620.00)	88.82
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.10	Pembelian Layanan Kebersucian	112,284,000.00	87,268,847.00	(25,015,153.00)	77.37
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.10.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	122,284,000.00	87,268,847.00	(35,015,153.00)	71.37
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.10.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.10.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	122,284,000.00	87,268,847.00	(35,015,153.00)	71.37
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.12	Pembelian Layanan Akutansi	136,729,992.00	111,886,897.00	(24,843,095.00)	81.83
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.12.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	136,729,992.00	111,886,897.00	(24,843,095.00)	81.83
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.12.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.12.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	136,729,992.00	111,886,897.00	(24,843,095.00)	81.83
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	261,859,600.00	180,898,780.00	(80,960,820.00)	68.08
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.02.01	Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	35,741,000.00	33,408,500.00	(16,332,500.00)	54.30
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.02.01.5.1	Pembelian Layanan Dasar dan Pengakuan	35,741,000.00	18,408,500.00	(16,332,500.00)	54.30
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.02.01.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>				

2.1.1.1

R. 1/9

KODE REKERING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35,741,000.00	19,408,500.00	(16,332,500.00)	54.30
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.02.02	Pembelian Layanan Restorasi	54,000,000.00	14,225,750.00	(39,774,250.00)	26.34
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	54,000,000.00	14,225,750.00	(39,774,250.00)	26.34
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54,000,000.00	14,225,750.00	(39,774,250.00)	26.34
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.02.07	Pembelian Amalgam Pual, Metalik, Spilitik, dan Sosis	172,118,000.00	147,256,530.00	(24,862,070.00)	85.56
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.02.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	172,118,000.00	147,256,530.00	(24,862,070.00)	85.56
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.02.07.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.02.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	172,118,000.00	147,256,530.00	(24,862,070.00)	85.56
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05	<b>Program Perindungan Dan Jaminan Sosial</b>	1,900,890,364.00	1,660,280,940.00	(240,417,341.00)	87.35
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.01	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	479,298,750.00	61,157,820.00	(418,140,930.00)	12.75
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.01.02	Ryakan Anak-Anak Terlantar	59,350,250.00	21,747,150.00	(37,603,100.00)	36.64
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	59,350,250.00	21,747,150.00	(37,603,100.00)	36.64
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	59,350,250.00	21,747,150.00	(37,603,100.00)	36.64
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.01.03	Pembiayaan (termasuk Pembiayaan Pemeliharaan Anak Terlantar	609,948,500.00	41,410,720.00	(568,537,780.00)	6.79
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	609,948,500.00	41,410,720.00	(568,537,780.00)	6.79
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	609,948,500.00	41,410,720.00	(568,537,780.00)	6.79
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	1,771,299,524.00	1,597,123,023.00	(174,176,461.00)	90.18
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02.01	<b>Pembelian Paket Nelayan Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	637,426,250.00	574,370,545.00	(63,055,705.00)	90.11
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	637,426,250.00	574,370,545.00	(63,055,705.00)	90.11
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	637,426,250.00	574,370,545.00	(63,055,705.00)	90.11
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	30,000,000.00	29,970,000.00	(30,000.00)	99.90

KODE REKENDUNG	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERBURUK)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
		3	4	5	6
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02.01.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	30,000,000.00	29,970,000.00	(30,000,000)	99.90
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02.03	Aktivitas Bantuan Sosial Kecelakaan Keluarga	311,323,794.00	226,060,330.00	(85,263,464.00)	72.61
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	311,323,794.00	226,060,330.00	(85,263,464.00)	72.61
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	311,323,794.00	226,060,330.00	(85,263,464.00)	72.61
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02.04	Facilities Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	822,640,503.00	796,692,196.00	(25,957,307.00)	96.84
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	822,640,503.00	796,692,196.00	(25,957,307.00)	96.84
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02.04.5.1.1	Belanja Pegawai	3,750,000.00	1,250,000.00	(2,500,000.00)	33.33
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	818,890,503.00	795,442,196.00	(23,457,307.00)	97.14
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06	<b>Program Penanganan Bencana</b>	672,924,992.00	351,541,421.00	(120,383,569.00)	74.54
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06.1.01	<b>Perfundungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	210,344,500.00	107,261,940.00	(103,082,560.00)	50.99
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	100,000,000.00	60,171,200.00	(39,828,800.00)	60.17
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	100,000,000.00	60,171,200.00	(39,828,800.00)	60.17
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100,000,000.00	60,171,200.00	(39,828,800.00)	60.17
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06.7.01.06	Revisi Dukungan Psikososial	110,344,500.00	67,090,640.00	(43,253,860.00)	60.80
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06.7.01.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	110,344,500.00	67,090,640.00	(43,253,860.00)	60.80
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06.7.01.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06.7.01.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110,344,500.00	67,090,640.00	(43,253,860.00)	60.80
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06.2.02	<b>Penyenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Krisis/kegiatan Bencana Kabupaten/Kota</b>	262,580,492.00	246,279,583.00	(17,300,909.00)	93.41
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06.2.02.02	Kontribusi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	262,580,492.00	246,279,583.00	(17,300,909.00)	93.41
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	262,580,492.00	246,279,583.00	(17,300,909.00)	93.41
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	262,580,492.00	246,279,583.00	(17,300,909.00)	93.41
1.06.1-06.0-00.0-00.01.07	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	221,384,562.00	217,232,497.00	(4,152,065.00)	98.12

R.19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERBURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
1.05.1-06.0-00.0-00.01.07.2.01		221,384,662.00	217,232,497.00	(4,152,165.00)	98.12	
1.05.1-06.0-00.0-00.01.07.2.01.02		221,384,662.00	217,232,497.00	(4,152,165.00)	98.12	
1.05.1-06.0-00.0-00.01.07.2.01.02.5.1	Peneliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
	<b>BELANJA OPERASI</b>					
	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Belanja Bering dan Jasa	221,384,662.00	217,232,497.00	(4,152,165.00)	98.12	
1.06.1-06.0-00.0-00.01.07.2.01.02.5.1.2		0.00	(5,687,905,903.00)	(5,687,905,903.00)	0.00	

279



**PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

URUSAN PEMERINTAHAN Organisasi	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR, NEMBERSIYAKAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Direks Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	
			3	4	5	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.00.0.00.00.5		<b>BELANJA DAERAH</b>	11,570,460,323.00	10,708,686,469.00	(861,773,854.00)	92.55
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01		Program Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,121,739,607.00	4,904,424,983.00	(217,314,624.00)	95.76
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,149,500.00	19,684,530.00	(465,200.00)	97.69
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,149,500.00	19,684,530.00	(465,200.00)	97.69
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.01.01.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.01.01.5.1.1		Belanja Pegawai	20,149,500.00	19,684,530.00	(465,200.00)	97.69
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.01.01.5.1.2		Belanja Basing dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	4,414,487,737.00	4,207,674,122.00	(206,813,615.00)	95.32
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,414,487,737.00	4,207,674,122.00	(206,813,615.00)	95.32
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.02.01.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>	4,414,487,737.00	4,207,674,122.00	(206,813,615.00)	95.32
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1		Belanja Pegawai	157,783,000.00	156,035,387.00	(1,747,613.00)	98.89
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	1,404,500.00	1,386,000.00	(18,500.00)	98.68
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.06.01		Penyediaan Kebutuhan Instalasi/Lubuk/Perencanaan/Bangunan Kantor	1,404,500.00	1,386,000.00	(18,500.00)	98.68
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.06.01.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.06.01.5.1.1		Belanja Pegawai	1,404,500.00	1,386,000.00	(18,500.00)	98.68
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.06.01.5.1.2		Belanja Basing dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,615,500.00	4,189,500.00	(426,000.00)	90.69
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.06.04.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>	4,615,500.00	4,189,500.00	(426,000.00)	90.69

Handwritten signature/initials

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
					3	4
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,619,500.00	4,189,500.00	(430,000.00)	90.69	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,134,000.00	10,125,500.00	(8,500.00)	99.92	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.06.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	10,134,000.00	10,125,500.00	(8,500.00)	99.92	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.06.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.06.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10,134,000.00	10,125,500.00	(8,500.00)	99.92	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Karyawan Tamu	2,160,000.00	2,155,000.00	(5,000.00)	99.77	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.06.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,160,000.00	2,155,000.00	(5,000.00)	99.77	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.06.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,160,000.00	2,155,000.00	(5,000.00)	99.77	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.07.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SMDP	140,465,000.00	139,179,387.00	(1,285,613.00)	99.08	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.07.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	140,465,000.00	139,179,387.00	(1,285,613.00)	99.08	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.07.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.07.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140,465,000.00	139,179,387.00	(1,285,613.00)	99.08	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Barang Modal Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	30,000,000.00	29,700,000.00	(300,000.00)	99.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.07.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	30,000,000.00	29,700,000.00	(300,000.00)	99.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.07.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.07.05.5.1.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	30,000,000.00	29,700,000.00	(300,000.00)	99.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	100.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.08.01	Anggaran Jasa Sewa Menyurat	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	100.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.08.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	100.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.08.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	100.00	

219

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	
		3	4	5	6
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	31,200,000.00	28,025,515.00	(3,174,485.00)	89.83
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.08.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	31,200,000.00	28,025,515.00	(3,174,485.00)	89.83
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.08.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.08.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31,200,000.00	28,025,515.00	(3,174,485.00)	89.83
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	4,980,000.00	4,740,000.00	(240,000.00)	95.18
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.08.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4,980,000.00	4,740,000.00	(240,000.00)	95.18
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.08.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.08.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,980,000.00	4,740,000.00	(240,000.00)	95.18
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96,485,412.00	95,807,856.00	(677,556.00)	99.30
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.09.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	96,485,412.00	95,807,856.00	(677,556.00)	99.30
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.09.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.09.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	96,485,412.00	95,807,856.00	(677,556.00)	99.30
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	365,432,708.00	361,517,472.00	(3,915,236.00)	98.97
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71,190,000.00	69,441,649.00	(1,748,351.00)	97.54
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.09.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	71,190,000.00	69,441,649.00	(1,748,351.00)	97.54
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.09.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.09.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	71,190,000.00	69,441,649.00	(1,748,351.00)	97.54
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238,211,894.00	237,165,640.00	(1,046,254.00)	99.56
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	238,211,894.00	237,165,640.00	(1,046,254.00)	99.56
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	238,211,894.00	237,165,640.00	(1,046,254.00)	99.56
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.09.09	Pembayaran/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56,021,904.00	54,930,194.00	(1,091,710.00)	98.08
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	56,021,904.00	54,930,194.00	(1,091,710.00)	98.08
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00



KODE REKEMING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.02.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	56,031,904.00	54,936,194.00	(1,101,730.00)	98.03	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	429,504,600.00	476,360,215.00	(3,144,385.00)	99.27	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.02.2.01	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	91,445,000.00	90,657,721.00	(787,279.00)	99.14	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.02.2.01.03	Aktivitas Kebijakan dan Peningkatan Pelaksanaan PUG termasuk PUG	91,445,000.00	90,657,721.00	(787,279.00)	99.14	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.02.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.02.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	91,445,000.00	90,657,721.00	(787,279.00)	99.14	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.02.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	238,053,600.00	235,702,494.00	(2,357,106.00)	99.20	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.04	Sosialisasi Partisipasi Aktifitas Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	205,256,600.00	203,633,094.00	(1,423,506.00)	99.50	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	266,406,600.00	265,698,094.00	(708,506.00)	99.73	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	266,406,600.00	265,698,094.00	(708,506.00)	99.73	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	18,950,000.00	18,235,000.00	(715,000.00)	96.23	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.01.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Hasil	18,950,000.00	18,235,000.00	(715,000.00)	96.23	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.02	Aktivitas Kebijakan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	52,702,000.00	51,769,400.00	(932,600.00)	98.23	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	52,702,000.00	51,769,400.00	(932,600.00)	98.23	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	52,702,000.00	51,769,400.00	(932,600.00)	98.23	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.03	Program Peningkatan Perempuan	198,829,353.00	196,329,898.00	(2,499,455.00)	98.76	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.03.2.01	Peningkatan Keserasan Melalui Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50,600,000.00	44,659,825.00	(5,940,175.00)	88.26	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.03.2.01.01	Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Peningkatan Keserasan Melalui Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50,600,000.00	44,659,825.00	(5,940,175.00)	88.26	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.03.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	50,600,000.00	44,659,825.00	(5,940,175.00)	88.26	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.03.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	

87A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		3	4	5	6
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.02	Penyediaan Layanan rujukan lanjutan bagi Perencanaan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	148,221,353.00	121,878,073.00	(26,351,280.00)	82.22
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengabdian Masyarakat bagi Perencanaan Korban Kekerasan Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	43,426,353.00	42,072,323.00	(1,354,030.00)	96.88
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	43,426,353.00	42,072,323.00	(1,354,030.00)	96.88
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43,426,353.00	42,072,323.00	(1,354,030.00)	96.88
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.02.02	Koordinasi dan Stimulasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perencanaan Korban Kekerasan Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	104,795,000.00	79,797,750.00	(24,997,250.00)	76.15
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	104,795,000.00	79,797,750.00	(24,997,250.00)	76.15
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	104,795,000.00	79,797,750.00	(24,997,250.00)	76.15
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.03.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.08.2-08.2-14.0-00.01.01.2.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.08.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.01	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1,375,898,974.00	1,341,675,215.00	(34,223,759.00)	97.51
2.08.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Keberagaman Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,375,898,974.00	1,341,675,215.00	(34,223,759.00)	97.51
2.08.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.02	Akselerasi Komunitas, Jejaring dan Edukasi KG dan Peningkatan Anak bagi Keluarga Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	692,848,554.00	679,587,254.00	(13,261,300.00)	97.38
2.08.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	692,848,554.00	679,587,254.00	(13,261,300.00)	96.96
2.08.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.08.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	692,848,554.00	679,587,254.00	(13,261,300.00)	96.96
2.08.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	167,000,000.00	164,082,750.00	(2,917,250.00)	98.72
2.08.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.02.5.2.2	Belanja Modal Perabotan dan Mesin	167,000,000.00	164,082,750.00	(2,917,250.00)	98.72
2.08.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	678,048,420.00	662,087,967.00	(15,960,453.00)	97.65
2.08.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	678,048,420.00	662,087,967.00	(15,960,453.00)	97.54
2.08.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERTURUN	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5	6	
						3
2.08.2.08.2.14.0.00.01.04.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	647,503,420.00	631,590,961.00	(15,912,459.00)	97.54	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.04.2.01.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	30,546,000.00	30,497,000.00	(49,000.00)	99.54	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.04.2.01.01.5.2.2	Belanja Modal Perabotan dan Mesin	30,546,000.00	30,497,000.00	(49,000.00)	99.54	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.05	<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Das Anak</b>	17,340,000.00	16,729,560.00	(610,440.00)	96.48	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.05.2.01	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kolaborasi Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	17,340,000.00	16,729,560.00	(610,440.00)	96.48	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kecamatan Kabupaten/Kota	17,340,000.00	16,729,560.00	(610,440.00)	96.48	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.05.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	17,340,000.00	16,729,560.00	(610,440.00)	96.48	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.05.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.05.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17,340,000.00	16,729,560.00	(610,440.00)	96.48	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06	<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>	324,002,003.00	321,724,354.00	(2,277,649.00)	99.30	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.2.01	<b>Revisi/evaluasi PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha/Kewirausahaan Kabupaten/Kota</b>	271,038,604.00	269,354,603.00	(1,684,001.00)	99.36	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.2.01.01	Aktivitas Kegiatan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha/Kewirausahaan Kabupaten/Kota	229,615,804.00	228,177,025.00	(1,438,779.00)	99.66	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	129,615,804.00	129,177,025.00	(438,779.00)	99.66	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	129,615,804.00	129,177,025.00	(438,779.00)	99.66	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.2.01.02	Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten/Kota	141,463,000.00	140,177,704.00	(1,285,296.00)	99.09	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	141,463,000.00	140,177,704.00	(1,285,296.00)	99.09	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	141,463,000.00	140,177,704.00	(1,285,296.00)	99.09	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.2.02	<b>Pengujian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pendidikan Kualitas Hidup Anak Kewirausahaan Kabupaten/Kota</b>	52,923,249.00	52,369,545.00	(553,704.00)	98.95	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Pendidikan Kualitas Hidup Anak Kewirausahaan Kabupaten/Kota	52,923,249.00	52,369,545.00	(553,704.00)	98.95	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	52,923,249.00	52,369,545.00	(553,704.00)	98.95	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	52,923,249.00	52,369,545.00	(553,704.00)	98.95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
2.08.2-06.2-14.0-00.01.07.2.02.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b> Belanja Modal Perlatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.02.01.5.2.2		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	444,174,041.00	444,174,041.00	(18,088,159.00)	92.10	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.01	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	96,848,000.00	91,276,302.00	(5,571,700.00)	94.23	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.01.01	Aktivitas Kegiatan dan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kecamatan Kabupaten/Kota	34,498,000.00	34,219,550.00	(278,450.00)	99.19	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	34,498,000.00	34,219,550.00	(278,450.00)	99.19	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34,498,000.00	34,219,550.00	(278,450.00)	99.19	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.01.02	Koordinasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kecamatan Kabupaten/Kota	62,350,000.00	57,056,750.00	(5,293,250.00)	91.51	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	62,350,000.00	57,056,750.00	(5,293,250.00)	91.51	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	62,350,000.00	57,056,750.00	(5,293,250.00)	91.51	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.01.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.01.02.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.02	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan</b>	157,249,000.00	126,142,611.00	(31,106,389.00)	80.22	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.02.01	Aktivitas dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kecamatan Kabupaten/Kota	157,249,000.00	126,142,611.00	(31,106,389.00)	80.22	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	157,249,000.00	126,142,611.00	(31,106,389.00)	80.22	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	157,249,000.00	126,142,611.00	(31,106,389.00)	80.22	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.03	<b>Pangutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	228,376,000.00	226,865,830.00	(1,429,270.00)	99.38	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.03.01	Koordinasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77,200,000.00	76,571,520.00	(628,480.00)	99.19	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.03.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	77,200,000.00	76,571,520.00	(628,480.00)	99.19	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.03.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.03.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	77,200,000.00	76,571,520.00	(628,480.00)	99.19	

**19**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.03.02	Kontribusi dan Sinergisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyelenggara Aspek yang Memerlukan Perhatian Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76,806,000.00	76,287,035.00	(518,965.00)	99.37
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.03.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	76,806,000.00	76,287,035.00	(518,965.00)	99.32
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	76,806,000.00	76,287,035.00	(518,965.00)	99.32
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.03.03	Kontribusi dan Sinergisasi Program Jaringan antar Lembaga Penyelenggara Layanan Aspek yang Memerlukan Perhatian Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74,370,000.00	74,097,375.00	(272,625.00)	99.63
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.03.03.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	74,370,000.00	74,097,375.00	(272,625.00)	99.63
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.03.03.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.08.2-08.2-14.0-00.01.07.2.03.03.1.2	Belanja Barang dan Jasa	74,370,000.00	74,097,375.00	(272,625.00)	99.62
2.14.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.03	Program Pengendalian Penduduk	100,575,000.00	67,450,940.00	(33,124,060.00)	67.07
2.14.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.03.1	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	100,575,000.00	67,450,940.00	(33,124,060.00)	67.07
2.14.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.03.1.1	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	26,175,000.00	26,038,700.00	(136,300.00)	99.48
2.14.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.03.1.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	26,175,000.00	26,038,700.00	(136,300.00)	99.48
2.14.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.03.1.1.2	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.14.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.03.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26,175,000.00	26,038,700.00	(136,300.00)	99.48
2.14.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.13	Anggaran dan Pelaksanaan Costa Pengendalian Lapangan oleh Pelayanan KB	74,400,000.00	41,412,240.00	(32,987,760.00)	55.66
2.14.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.13.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	74,400,000.00	41,412,240.00	(32,987,760.00)	55.66
2.14.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.13.1.1	Belanja Pegawai	30,820,000.00	0.00	(30,820,000.00)	0.00
2.14.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.13.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43,580,000.00	41,412,240.00	(2,167,760.00)	99.60
2.14.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.13.1.2.1	Program Peminaan Keluarga Berencana (KB)	1,850,600.00	1,721,220.895.00	(129,379.105.00)	93.01
2.14.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.13.1.2.1	<b>Pelaksanaan Afirmasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</b>	1,215,000.000.00	1,111,240.300.00	(103,759.700.00)	99.63
2.14.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.13.1.2.1.1	<b>Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	1,215,000.000.00	1,111,240.300.00	(103,759.700.00)	99.63
2.14.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.13.1.2.1.1.1	Anggaran Operasional dan Sarana of Beker Penyelidikan KIE/PS	121,500,000.00	121,240,300.00	(259,700.00)	99.83
2.14.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.13.1.2.1.1.2	<b>BELANJA OPERASI</b>	121,500,000.00	121,240,300.00	(259,700.00)	99.83
2.14.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02.13.1.2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	121,500,000.00	121,240,300.00	(259,700.00)	99.83
2.14.2-08.2-14.0-00.01.02.2.02	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyelidik KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	6,223,585,546.00	6,200,630,767.00	(22,954,779.00)	98.22

219

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.02.03	Pengujian Abstrakan Perilaku, Pengajaran, Pelayanan dan Pengembangan Program KB/KYK untuk Peningkatan Kualitas Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLK)	55,474,000.00	54,911,400.00	(562,600.00)	98.99
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.02.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	55,474,000.00	54,911,400.00	(562,600.00)	98.99
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.02.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.02.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55,474,000.00	54,911,400.00	(562,600.00)	98.99
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.02.04	Pengajaran Keter Institusi Masyarakat Protesan (MPP)	1,168,106,546.00	1,145,709,367.00	(22,397,179.00)	98.08
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.02.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,168,106,546.00	1,145,709,367.00	(22,397,179.00)	98.08
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.02.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.02.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,168,106,546.00	1,145,709,367.00	(22,397,179.00)	98.08
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.03	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Keluarga Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	322,923,402.00	225,095,400.00	(97,827,000.00)	69.71
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.03.09	Proses dan Konseling Keluarga Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kompositik Keluarga	55,514,800.00	45,005,875.00	(10,508,925.00)	81.07
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.03.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	55,514,800.00	45,005,875.00	(10,508,925.00)	81.07
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.03.09.5.1.1	Belanja Pegawai	900,000.00	900,000.00	0.00	100.00
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.03.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54,614,800.00	44,105,875.00	(10,508,925.00)	80.76
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergarak	267,408,600.00	180,080,525.00	(87,328,075.00)	67.35
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.03.11.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	267,408,600.00	180,080,525.00	(87,328,075.00)	67.35
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.03.11.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	267,408,600.00	180,080,525.00	(87,328,075.00)	67.35
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.04	<b>Pembinaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Komunitarian Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB</b>	167,405,500.00	174,213,400.00	6,807,900.00	98.46
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengembangan Program KB/KYK di Komunitas KB	103,500,000.00	96,839,800.00	(6,660,200.00)	93.57
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.04.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	103,500,000.00	96,839,800.00	(6,660,200.00)	93.57
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.04.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	103,500,000.00	96,839,800.00	(6,660,200.00)	93.57
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Komunitas KB	59,105,500.00	77,373,600.00	18,268,100.00	97.81
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.04.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	59,105,500.00	77,373,600.00	18,268,100.00	97.81
2.14.2-08.2-14.0-00.01.03.2.04.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00

8.19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
3	2	4	5	6	
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	79,195,560.00	77,373,628.00	(1,771,872.00)	97.81
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (K5)	1,670,004,290.00	1,290,195,648.00	(371,808,642.00)	77.74
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga	1,193,244,290.00	826,674,680.00	(366,569,610.00)	69.29
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (BK3, BK4, BK5, PPK3, PPK4 dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKES)	165,250,000.00	163,500,000.00	(1,750,000.00)	98.94
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	165,250,000.00	163,500,000.00	(1,750,000.00)	98.94
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	165,000,000.00	163,250,000.00	(1,750,000.00)	98.94
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Penyelenggara dan Pelaksana (Kader) Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (BK3, BK4, BK5, PPK3, PPK4 dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKES)	615,920,000.00	267,263,875.00	(348,656,125.00)	43.39
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	615,920,000.00	267,263,875.00	(348,656,125.00)	43.39
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	239,425,000.00	234,602,550.00	(4,822,450.00)	97.99
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (BK3, BK4, BK5, PPK3, PPK4 dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKES)	239,425,000.00	234,602,550.00	(4,822,450.00)	97.99
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	239,425,000.00	234,602,550.00	(4,822,450.00)	97.99
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.07.5.1.1	Belanja Pegawai	350,000.00	350,000.00	0.00	100.00
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	239,075,000.00	234,252,550.00	(4,822,450.00)	97.96
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (Masyarakat Desa Tani Sehat, Gerakan Binasana, Kelengkapan serta Pengabdian Keluarga)	172,649,290.00	161,308,055.00	(11,341,235.00)	93.43
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	172,649,290.00	161,308,055.00	(11,341,235.00)	93.43
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.01.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	172,649,290.00	161,308,055.00	(11,341,235.00)	93.43
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Komunitas/Kelompok Masyarakat/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga	476,760,000.00	471,521,169.00	(5,238,832.00)	98.90
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Masyarakat	476,760,000.00	471,521,169.00	(5,238,832.00)	98.90

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(Rp)	(%)
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.02.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	475,760,000.00	471,521,168.00	(5,238,832.00)	98.99	
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.02.04.5.1.1	Belanja Pegawai	450,000.00	0.00	(450,000.00)	0.00	
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.02.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	475,310,000.00	471,521,168.00	(4,788,832.00)	98.99	
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.02.04.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.14.2-08.2-14.0-00.01.04.2.02.04.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	(10,708,685,469.00)	(10,708,685,469.00)	0.00	

8/9



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
		3	4		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.00.00.00.4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	1,200,864,000.00	1,170,445,500.00	(30,414,500.00)	97.47
2.11.2-11.0-00.0-00.01.00.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	1,200,864,000.00	1,170,445,500.00	(30,414,500.00)	97.47
2.11.2-11.0-00.0-00.01.00.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	1,200,864,000.00	1,170,445,500.00	(30,414,500.00)	97.47
2.11.2-11.0-00.0-00.01.00.00.00.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	42,321,589,123.00	38,228,054,116.34	(4,093,535,008.66)	90.33
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01	<b>Program Pengujiang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	22,422,799,303.00	19,774,654,404.65	(2,648,104,898.35)	87.97
2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.01	<i>Pencananaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	31,651,750.00	24,780,000.00	(6,871,750.00)	77.74
2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	31,651,750.00	24,780,000.00	(6,871,750.00)	77.74
2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	29,451,250.00	22,980,000.00	(6,471,250.00)	78.03
2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.01.01.5.1.1	Belanja Program	0.00	0.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29,451,250.00	22,980,000.00	(6,471,250.00)	78.03
2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.01.01.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	2,400,000.00	1,780,000.00	(620,000.00)	74.17
2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.01.01.5.1.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	2,400,000.00	1,780,000.00	(620,000.00)	74.17
2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	12,575,334,603.00	11,888,885,345.00	(686,449,258.00)	94.89
2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,529,884,603.00	11,888,570,845.00	(641,313,758.00)	94.89
2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	12,529,884,603.00	11,888,570,845.00	(641,313,758.00)	94.89
2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Program	12,526,884,603.00	11,886,853,095.00	(640,031,508.00)	94.89
2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,600,000.00	1,717,750.00	(882,250.00)	78.08

R-1A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.02.07	Kontribusi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SPPD	18.200.000,00	11.314.500,00	(4.885.500,00)	69,84	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.02.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	16.200.000,00	11.314.500,00	(4.885.500,00)	69,84	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.02.07.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.02.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	11.314.500,00	(4.885.500,00)	69,84	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.03.02.5.1	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	248.185.916,00	248.185.915,65	(0,35)	100,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.03.02.5.1.1	Perencanaan Barang Milik Daerah SPPD	248.185.916,00	248.185.915,65	(0,35)	100,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.03.02.5.1.2	<b>BELANJA OPERASI</b>	248.185.916,00	248.185.915,65	(0,35)	100,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.03.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	248.185.916,00	248.185.915,65	(0,35)	100,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.04	<b>Administrasi Pemayunan Daerah Keuangan Perangkat Daerah</b>	127.267.830,00	127.047.830,00	(210.219.992,00)	92,55	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.04.01	Perencanaan Penyediaan Atribusi Daerah	127.267.830,00	127.047.830,00	(210.219.992,00)	92,55	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.04.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	127.267.830,00	127.047.830,00	(210.219.992,00)	92,55	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.04.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.04.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	127.267.830,00	127.047.830,00	(210.219.992,00)	92,55	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	329.625.600,00	329.625.600,00	(3.174.400,00)	99,05	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.05.02	Perencanaan Pukulan Dinas Beserta Akibat Keterselenggaraannya	329.625.600,00	329.625.600,00	(3.174.400,00)	99,05	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.05.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	329.625.600,00	329.625.600,00	(3.174.400,00)	99,05	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.05.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.05.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	329.625.600,00	329.625.600,00	(3.174.400,00)	99,05	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	274.617.465,00	274.617.465,00	(96.691.035,00)	73,96	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.276.000,00	19.805.410,00	(470.590,00)	97,68	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	26.276.000,00	19.805.410,00	(470.590,00)	97,68	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.276.000,00	19.805.410,00	(470.590,00)	97,68	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.224.500,00	10.131.510,00	(160.990,00)	98,39	

*Handwritten signature/initials*

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5	6	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	10,134,500.00	10,131,510.00	(102,990.00)	98.99	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10,134,500.00	10,131,510.00	(102,990.00)	98.99	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Persediaan Barang Cetak dan Pengangkutan	26,153,000.00	17,141,875.00	(11,011,125.00)	65.55	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.05.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	26,153,000.00	17,141,875.00	(11,011,125.00)	65.55	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.05.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.05.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26,153,000.00	17,141,875.00	(11,011,125.00)	65.55	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Katering Termu	3,251,000.00	3,170,000.00	(81,000.00)	97.51	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,251,000.00	3,170,000.00	(81,000.00)	97.51	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,251,000.00	3,170,000.00	(81,000.00)	97.51	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309,394,000.00	224,368,675.00	(85,025,325.00)	72.52	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	309,394,000.00	224,368,675.00	(85,025,325.00)	72.52	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	309,394,000.00	224,368,675.00	(85,025,325.00)	72.52	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1,361,504,611.00	1,364,138,319.00	2,633,708.00	92.65	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07.02	Pengadaan Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan	1,018,404,611.00	1,001,659,819.00	(16,744,792.00)	98.36	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	35,000,000.00	38,295,208.00	3,295,208.00	110.00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35,000,000.00	38,295,208.00	3,295,208.00	110.00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	983,404,611.00	983,404,611.00	0.00	100.00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07.02.5.2.2	Belanja Modal Perabotan dan Mesin	983,404,611.00	983,404,611.00	0.00	100.00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	171,000,000.00	162,199,500.00	(8,800,500.00)	95.14	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07.05.2	<b>BELANJA MODAL</b>	173,000,000.00	162,199,500.00	(10,800,500.00)	93.76	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07.05.2.2	Belanja Modal Perabotan dan Mesin	173,000,000.00	162,199,500.00	(10,800,500.00)	93.76	

219

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		AMGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07.09	Persediaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	170,000,000.00	109,279,000.00	(69,621,000.00)	58.85
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	100,100,000.00	40,450,000.00	(59,650,000.00)	40.41
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100,100,000.00	40,450,000.00	(59,650,000.00)	40.41
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07.09.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	70,000,000.00	59,829,000.00	(10,171,000.00)	85.47
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07.09.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	70,000,000.00	59,829,000.00	(10,171,000.00)	85.47
2.11.2-11.0-00.0-90.01.01.2.08.01	<b>Persediaan Jasa Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah</b>	151,485,000.00	95,201,555.00	(56,283,445.00)	62.85
2.11.2-11.0-00.0-90.01.01.2.08.01.1	Persediaan Jasa Sinar Menyuar	1,335,000.00	1,425,200.00	(705,800.00)	92.85
2.11.2-11.0-00.0-90.01.01.2.08.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,335,000.00	1,425,200.00	(105,800.00)	92.85
2.11.2-11.0-00.0-90.01.01.2.08.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-90.01.01.2.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,335,000.00	1,425,200.00	(105,800.00)	92.85
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.08.02	<b>Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	149,950,000.00	93,776,355.00	(56,173,645.00)	62.54
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.08.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	149,950,000.00	93,776,355.00	(56,173,645.00)	62.54
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.08.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.08.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	149,950,000.00	93,776,355.00	(56,173,645.00)	62.54
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.01	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah</b>	7,243,111,333.00	5,461,232,387.00	(1,781,878,946.00)	75.49
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pagar dan Perbaikan Kandang, Dinas Operasional atau Lapangan	6,924,522,450.00	5,248,267,864.00	(1,676,254,586.00)	75.79
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6,924,522,450.00	5,248,267,864.00	(1,676,254,586.00)	75.79
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6,924,522,450.00	5,248,267,864.00	(1,676,254,586.00)	75.79
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.06	<b>Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya</b>	28,340,000.00	15,364,000.00	(12,976,000.00)	54.21
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	28,340,000.00	15,364,000.00	(12,976,000.00)	54.21
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28,340,000.00	15,364,000.00	(12,976,000.00)	54.21
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.09	<b>Persediaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	290,248,681.00	297,600,503.00	(7,648,880.00)	68.08

219

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		3	4	5	(Rp)	(%)
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	290,749,883.00	197,000,503.00	(92,748,380.00)	68.08	
0.00		0.00	0.00	0.00		
290,749,883.00		197,000,503.00	(92,748,380.00)	68.08		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.02.2.01.02	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b> <b>Rencana Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPPLH)</b> Kabupaten/Kota	111,749,000.00	110,632,180.00	(21,116,820.00)	83.97	
111,749,000.00		110,632,180.00	(21,116,820.00)	83.97		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPPLH Kabupaten/Kota	111,749,000.00	110,632,180.00	(21,116,820.00)	83.97	
111,749,000.00		110,632,180.00	(21,116,820.00)	83.97		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.02.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	
111,749,000.00		110,632,180.00	(21,116,820.00)	83.97		
111,749,000.00		110,632,180.00	(21,116,820.00)	83.97		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01.03	<b>Program Penyelidikan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b> <b>Penyidikan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b> Kabupaten/Kota	282,832,058.00	251,060,653.00	(31,771,405.00)	88.77	
282,832,058.00		251,060,653.00	(31,771,405.00)	88.77		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Kontrol, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencapaian Perencanaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Teknik Air, Udara, dan Laut	88,349,650.00	82,740,000.00	(5,608,650.00)	93.65	
88,349,650.00		82,740,000.00	(5,608,650.00)	93.65		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	
88,349,650.00		82,740,000.00	(5,608,650.00)	93.65		
88,349,650.00		82,740,000.00	(5,608,650.00)	93.65		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Akreditasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelidikan Emisi Gas Rumah Kaca, Air, dan Adaptasi Perubahan Iklim	65,615,000.00	53,865,950.00	(11,749,050.00)	82.09	
65,615,000.00		53,865,950.00	(11,749,050.00)	82.09		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	
65,615,000.00		53,865,950.00	(11,749,050.00)	82.09		
65,615,000.00		53,865,950.00	(11,749,050.00)	82.09		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	128,888,408.00	114,454,703.00	(14,433,705.00)	89.62	
128,888,408.00		114,454,703.00	(14,433,705.00)	89.62		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	84,888,408.00	84,237,728.00	(650,680.00)	99.26	
0.00		0.00	0.00	0.00		
84,888,408.00		84,237,728.00	(650,680.00)	99.26		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01.03.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	44,000,000.00	30,216,975.00	(13,783,025.00)	68.67	
44,000,000.00		30,216,975.00	(13,783,025.00)	68.67		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01.03.5.2.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44,000,000.00	36,216,975.00	(12,783,025.00)	82.57	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01	Program Pengelolaan Kelekaragaman Hayati (KEHATI)	3,150,402,330.00	2,746,598,227.00	(403,804,103.00)	87.18	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01	Pengelolaan Kelekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3,150,402,330.00	2,746,598,227.00	(403,804,103.00)	87.18	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Penyusunan dan Pemeliharaan Rencana Pengelolaan Kelekaragaman Hayati	97,000,000.00	97,075,600.00	(914,400.00)	99.07	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	97,990,000.00	97,075,600.00	(914,400.00)	99.07	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	97,990,000.00	97,075,600.00	(914,400.00)	99.07	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2,052,412,130.00	2,669,622,627.00	(602,889,703.00)	86.60	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,875,412,130.00	2,576,806,977.00	(398,611,353.00)	86.60	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,875,412,130.00	2,576,806,977.00	(398,611,353.00)	86.60	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01.04.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	77,000,000.00	72,721,650.00	(4,278,350.00)	94.44	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01.04.5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77,000,000.00	72,721,650.00	(4,278,350.00)	94.44	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01.04.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.05.2.01	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	12,360,000.00	8,236,760.00	(4,123,240.00)	66.64	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12,360,000.00	8,236,760.00	(4,123,240.00)	66.64	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.05.2.02.02	Koordinasi dan Sistemisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengabdian, Amanisasi, Pengelolaan, dan/atau Penembunan	12,360,000.00	8,236,760.00	(4,123,240.00)	66.64	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.05.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	12,360,000.00	8,236,760.00	(4,123,240.00)	66.64	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.05.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.05.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12,360,000.00	8,236,760.00	(4,123,240.00)	66.64	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.06	Program Pembiayaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	30,053,029.00	30,053,029.00	(9,559,371.00)	75.87	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30,053,029.00	30,053,029.00	(9,559,371.00)	75.87	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	27,717,500.00	27,093,466.00	(6,618,054.00)	76.12	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.06.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	27,717,500.00	27,093,466.00	(6,618,054.00)	76.12	

214

KODE REKENING	URAIAN	JUNJAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
		3	4	5	6
2.11.2-11.0-00.0-01.06.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	6.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.06.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27,717,500.00	21,099,446.50	(6,618,054.00)	76.12
2.11.2-11.0-00.0-00.01.06.2.01.03	Penghasilan Usaha dan/atau Kapital yang dan Lingkungan Hidup, dan PPLH yang Dibebaskan dari Pembebasan Daerah Kabupaten/Kota	11,894,900.00	8,953,583.00	(2,941,317.00)	75.27
2.11.2-11.0-00.0-01.06.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	11,894,900.00	8,953,583.00	(2,941,317.00)	75.27
2.11.2-11.0-00.0-01.06.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	6.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-01.06.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11,894,900.00	8,953,583.00	(2,941,317.00)	75.27
2.11.2-11.0-00.0-00.01.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	452,235,500.00	368,242,373.00	(83,993,127.00)	81.45
2.11.2-11.0-00.0-00.01.08.2.01	Penyenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	452,235,500.00	368,242,373.00	(83,993,127.00)	81.45
2.11.2-11.0-00.0-00.01.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Hidup Lingkungan Hidup	252,447,000.00	135,928,593.00	(116,518,407.00)	53.46
2.11.2-11.0-00.0-00.01.08.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	152,447,000.00	135,928,593.00	(16,518,407.00)	89.16
2.11.2-11.0-00.0-00.01.08.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	6.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.08.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	152,447,000.00	135,928,593.00	(16,518,407.00)	89.16
2.11.2-11.0-00.0-00.01.08.2.01.03	Penyenggaraan Pendidikan dan Lainnya Lingkungan Hidup	200,788,500.00	232,313,780.00	(31,525,280.00)	116.16
2.11.2-11.0-00.0-00.01.08.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	103,708,500.00	64,147,540.00	(39,560,960.00)	61.85
2.11.2-11.0-00.0-00.01.08.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.08.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	103,708,500.00	64,147,540.00	(39,560,960.00)	61.85
2.11.2-11.0-00.0-00.01.08.2.01.03.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	196,080,000.00	188,166,240.00	(7,913,760.00)	95.96
2.11.2-11.0-00.0-00.01.08.2.01.03.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	196,080,000.00	188,166,240.00	(7,913,760.00)	95.96
2.11.2-11.0-00.0-00.01.08.2.01.03.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	17,130,050.00	5,283,500.00	(11,846,550.00)	30.84
2.11.2-11.0-00.0-00.01.10.2.01	Penyediaan Pelayanan Masyarakat di Bidang Perindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	17,130,050.00	5,283,500.00	(11,846,550.00)	30.84
2.11.2-11.0-00.0-00.01.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	17,130,050.00	5,283,500.00	(11,846,550.00)	30.84
2.11.2-11.0-00.0-00.01.10.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	17,130,050.00	5,283,500.00	(11,846,550.00)	30.84
2.11.2-11.0-00.0-00.01.10.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.10.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17,130,050.00	5,283,500.00	(11,846,550.00)	30.84

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	4	5	6
2.11.2-11.0-06.0-00.01.1.2.01.01	Program Pengelolaan Pemasangan Perangkat Sempuh	15,812,468,602.00	14,963,262,989.69		(949,205,692.31)	94.03	
2.11.2-11.0-06.0-00.01.1.2.01.01	Pengadaan Karyawan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sempuh Kabupaten/Kota	15,812,468,602.00	14,963,262,989.69		(949,205,692.31)	94.63	
2.11.2-11.0-06.0-00.01.1.2.01.01	BELANJA OPERASI	65,030,000.00	50,989,025.00		(14,040,975.00)	77.22	
2.11.2-11.0-06.0-00.01.1.2.01.01.5.1	Belanja Pegawai	66,030,000.00	50,989,025.00		(15,040,975.00)	77.22	
2.11.2-11.0-06.0-00.01.1.2.01.01.5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00		0.00	0.00	
2.11.2-11.0-06.0-00.01.1.2.01.01.5.1.2	Pengangan Sempuh dengan melakukan Pembelian, Pemburuan Ulang dan Pemantauan Kembali	1,093,836,074.00	958,552,190.00		(135,283,884.00)	87.63	
2.11.2-11.0-06.0-00.01.1.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1,093,836,074.00	958,552,190.00		(135,283,884.00)	87.63	
2.11.2-11.0-06.0-00.01.1.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00	
2.11.2-11.0-06.0-00.01.1.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,093,836,074.00	958,552,190.00		(135,283,884.00)	87.63	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.2.01.03	Anggaran Sempuh dengan melakukan Pembelian, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengalihan dan Pemrosesan MHR Sempuh di 1704/775/2014 Kabupaten/Kota	10,147,952,689.00	9,762,632,903.00		(385,319,786.00)	96.26	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	9,819,076,689.00	9,460,194,849.00		(358,881,840.00)	96.35	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9,819,076,689.00	9,460,194,849.00		(358,881,840.00)	96.35	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	327,876,000.00	302,438,053.00		(25,437,947.00)	92.26	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.2.01.03.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	327,876,000.00	302,438,053.00		(25,437,947.00)	92.26	
2.11.2-11.0-06.0-00.01.1.2.01.04	Pengelolaan Peralatan serta Nopamalat dalam Pengelolaan Pemasangan	137,200,000.00	114,044,300.00		(23,155,700.00)	83.17	
2.11.2-11.0-06.0-00.01.1.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	137,200,000.00	114,044,300.00		(23,155,700.00)	83.12	
2.11.2-11.0-06.0-00.01.1.2.01.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00	
2.11.2-11.0-06.0-00.01.1.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	137,200,000.00	114,044,300.00		(23,155,700.00)	83.12	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.2.01.05	Kontribusi dan Subvensi Penyediaan Peralatan dan Sarana Pengelolaan Pemasangan	4,373,490,919.00	4,076,746,572.69		(296,705,346.31)	93.22	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	831,767,800.00	537,020,354.00		(294,746,646.00)	64.56	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.2.01.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.2.01.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	831,767,800.00	537,020,354.00		(294,746,646.00)	64.56	

8.1A



KODE REKENING	URAIAN	JUNJAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
		3	4	5	6
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11.2.01.05.5.2	<b>BELANJA MODAL</b> Belanja Modal Perbaikan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,541,682,915.00	3,539,724,238.66	(1,958,700.31)	99.94
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11.2.01.05.5.2.2		1,591,277,800.00	1,590,293,720.00	(984,080.00)	99.94
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11.2.01.05.5.2.3		1,950,405,115.00	1,949,430,498.66	(974,620.31)	99.95
		0.00	(37,667,614,616.34)	(37,667,614,616.34)	0.00

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

URUSAN PEMERINTAHAN Organisasi	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDULUAN DAN CAJIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
			KODE REKENING	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)	(%)
				1	3		4	5
2.12.2-12.0-00.0-00.00.00.5		<b>BELANJA DAERAH</b>		6.266.120.404.00	5.863.934.087.23	(402.194.316.77)	93.58	
2.12.2-12.0-00.0-00.00.01		Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		4.305.360.578.00	4.580.319.793.23	(325.040.784.77)	93.37	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.01		Penanaman, Pengangawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15.385.000.00	14.620.760.00	(764.240.00)	95.03	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.01.01		Penyediaan Dukungan Administrasi Perangkat Daerah		15.385.000.00	14.620.760.00	(764.240.00)	95.03	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.01.01.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>		15.385.000.00	14.620.760.00	(764.240.00)	95.03	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.01.01.5.1.1		Belanja Pegawai		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.01.01.5.1.2		Belanja Barang dan Jasa		15.385.000.00	14.620.760.00	(764.240.00)	95.03	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		2.855.233.834.00	3.686.397.897.00	(168.835.937.00)	95.62	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.855.233.834.00	3.686.397.897.00	(168.835.937.00)	95.62	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02.01.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>		3.855.233.834.00	3.686.397.897.00	(168.835.937.00)	95.62	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02.01.5.1.1		Belanja Pegawai		3.855.233.834.00	3.686.397.897.00	(168.835.937.00)	95.62	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		247.332.944.00	221.120.843.00	(16.182.101.00)	89.46	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Fasilitas Kerja/Pencetakan/Sangunan Kantor		2.507.700.00	1.834.000.00	(673.700.00)	73.12	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.06.01.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>		2.507.700.00	1.834.000.00	(673.700.00)	73.12	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.06.01.5.1.1		Belanja Pegawai		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.06.01.5.1.2		Belanja Barang dan Jasa		2.507.700.00	1.834.000.00	(673.700.00)	73.12	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		37.520.000.00	36.887.370.00	(632.630.00)	98.31	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.06.04.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>		37.520.000.00	36.887.370.00	(632.630.00)	98.31	

819

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	4	
					(Rp)	(%)
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37,530,000.00	36,887,370.00	(632,630.00)	98.31	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cacahan dan Penggantian	26,530,000.00	24,102,469.00	(2,427,531.00)	90.85	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	26,530,000.00	24,102,469.00	(2,427,531.00)	90.85	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26,530,000.00	24,102,469.00	(2,427,531.00)	90.85	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Perjalanan Tamu	8,221,000.00	4,484,700.00	(3,736,300.00)	54.55	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	8,221,000.00	4,484,700.00	(3,736,300.00)	54.55	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8,221,000.00	4,484,700.00	(3,736,300.00)	54.55	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	172,554,244.00	161,742,284.00	(10,811,960.00)	94.89	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	172,554,244.00	161,742,284.00	(10,811,960.00)	94.89	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	172,554,244.00	161,742,284.00	(10,811,960.00)	94.89	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.07	Anggaran Barang Milik Daerah Pemungjng Urusan Pemerintahan Daerah	220,650,000.00	214,285,500.00	(6,364,500.00)	97.07	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	220,650,000.00	214,285,500.00	(6,364,500.00)	97.07	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.07.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	650,000.00	0.00	(650,000.00)	0.00	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.07.06.5.1.1	Belanja Pegawai	650,000.00	0.00	(650,000.00)	0.00	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.07.06.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	220,000,000.00	214,285,500.00	(5,714,500.00)	97.40	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.07.06.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	220,000,000.00	214,285,500.00	(5,714,500.00)	97.40	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungjng Urusan Pemerintahan Daerah	97,010,000.00	77,634,799.00	(19,375,201.00)	80.03	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,210,000.00	2,210,000.00	0.00	100.00	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.08.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,210,000.00	2,210,000.00	0.00	100.00	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.08.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,210,000.00	2,210,000.00	0.00	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		AMGABAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94,800,000.00	75,424,799.00	(19,375,201.00)	79.56	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	94,800,000.00	75,424,799.00	(19,375,201.00)	79.56	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	94,800,000.00	75,424,799.00	(19,375,201.00)	79.56	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.01	<b>Pembelajaran Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah</b>	469,548,800.00	356,229,994.27	(113,318,805.73)	75.67	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,190,000.00	36,090,196.00	(3,099,804.00)	92.09	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	39,190,000.00	36,090,196.00	(3,099,804.00)	92.09	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39,190,000.00	36,090,196.00	(3,099,804.00)	92.09	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82,350,000.00	74,787,907.00	(7,562,093.00)	90.82	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	82,350,000.00	74,787,907.00	(7,562,093.00)	90.82	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	82,350,000.00	74,787,907.00	(7,562,093.00)	90.82	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.05	Pembelajaran Mezer	2,000,000.00	1,990,000.00	(10,000.00)	99.50	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,000,000.00	1,990,000.00	(10,000.00)	99.50	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	1,990,000.00	(10,000.00)	99.50	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.06	Pembelajaran Penelitian dan Absensi Lainnya	8,200,000.00	5,730,000.00	(2,470,000.00)	69.88	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	8,200,000.00	5,730,000.00	(2,470,000.00)	69.88	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8,200,000.00	5,730,000.00	(2,470,000.00)	69.88	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.09	Pembelajaran/Kelembagaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	337,888,800.00	237,631,691.23	(100,257,108.77)	70.35	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	281,412,800.00	181,634,471.00	(99,778,329.00)	64.54	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	5,300,000.00	500,000.00	(4,800,000.00)	9.43	

R.14

KODE REKENING	URAIAN	JUNJAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
		3	4	5	6
2.12.2-12.0-00.01.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	276,112,800.00	181,134,471.00	(94,978,329.00)	65.60
2.12.2-12.0-00.01.01.2.09.09.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	56,196,000.00	55,997,420.23	(198,579.77)	99.29
2.12.2-12.0-00.01.01.2.09.09.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56,196,000.00	55,997,420.23	(198,579.77)	99.29
2.12.2-12.0-00.01.02.2.01.02	<b>Program Pendifteran Penduduk</b>	632,108,753.00	606,805,111.00	(21,303,642.00)	95.05
2.12.2-12.0-00.01.02.2.01.02.2.01	<b>Poljman Pendifteran Penduduk</b>	611,021,253.00	589,427,811.00	(20,093,442.00)	95.07
2.12.2-12.0-00.01.02.2.01.02.2.01.02.5.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	215,212,200.00	191,620,029.00	(21,592,171.00)	89.04
2.12.2-12.0-00.01.02.2.01.02.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	215,212,200.00	191,620,029.00	(23,592,171.00)	89.04
2.12.2-12.0-00.01.02.2.01.02.5.1.1.1	Belanja Pegawai	2,050,000.00	250,000.00	(1,800,000.00)	12.20
2.12.2-12.0-00.01.02.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	213,162,200.00	191,379,029.00	(21,783,171.00)	89.78
2.12.2-12.0-00.01.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	395,809,053.00	389,307,782.00	(6,501,271.00)	98.36
2.12.2-12.0-00.01.02.2.01.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	379,809,053.00	371,323,782.00	(8,485,271.00)	98.29
2.12.2-12.0-00.01.02.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	379,809,053.00	371,323,782.00	(8,485,271.00)	98.29
2.12.2-12.0-00.01.02.2.01.04.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	16,000,000.00	15,984,000.00	(16,000.00)	99.98
2.12.2-12.0-00.01.02.2.01.04.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	16,000,000.00	15,984,000.00	(16,000.00)	99.98
2.12.2-12.0-00.01.02.2.02	<b>Peningkatan Pendaftaran Penduduk</b>	21,087,500.00	19,877,300.00	(1,210,200.00)	94.26
2.12.2-12.0-00.01.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Kartu KTP-E, Formulir, dan Buku Induk Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	21,087,500.00	19,877,300.00	(1,210,200.00)	94.26
2.12.2-12.0-00.01.02.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	21,087,500.00	19,877,300.00	(1,210,200.00)	94.26
2.12.2-12.0-00.01.02.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.12.2-12.0-00.01.02.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21,087,500.00	19,877,300.00	(1,210,200.00)	94.26
2.12.2-12.0-00.01.03	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	282,737,220.00	269,514,758.00	(13,222,462.00)	95.32
2.12.2-12.0-00.01.03.2.01	<b>Poljman Pencatatan Sipil</b>	282,737,220.00	269,514,758.00	(13,222,462.00)	95.32
2.12.2-12.0-00.01.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Peristiwa	52,407,000.00	47,309,570.00	(5,097,430.00)	90.27
2.12.2-12.0-00.01.03.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	52,407,000.00	47,309,570.00	(5,097,430.00)	90.27
2.12.2-12.0-00.01.03.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.12.2-12.0-00.01.03.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	52,407,000.00	47,309,570.00	(5,097,430.00)	90.27

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	
2.12.2-12.0-00.01.02.01.02	Anggaran dalam Anggaran Amortisasi Spd	230,330,220.00	222,205,188.00	(8,125,032.00)	96.47	
2.12.2-12.0-00.01.02.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	230,330,220.00	222,205,188.00	(8,125,032.00)	96.47	
2.12.2-12.0-00.01.02.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	1,800,000.00	0.00	(1,800,000.00)	0.00	
2.12.2-12.0-00.01.02.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	228,530,220.00	222,205,188.00	(6,325,032.00)	97.23	
2.12.2-12.0-60.0-00.01.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	404,712,853.00	374,279,125.00	(30,433,728.00)	92.48	
2.12.2-12.0-60.0-01.04.2.01	Penyusunan Data Kependudukan dan Pemeliharaan dan Penyajian Database Kependudukan	193,772,853.00	175,497,575.00	(18,275,278.00)	91.69	
2.12.2-12.0-00.01.04.2.01.01	Anggaran dan Penyediaan Data Kependudukan	26,742,303.00	21,556,900.00	(5,185,403.00)	75.62	
2.12.2-12.0-00.01.04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	28,242,500.00	21,356,900.00	(6,885,600.00)	75.62	
2.12.2-12.0-00.01.04.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.12.2-12.0-00.01.04.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28,242,500.00	21,356,900.00	(6,885,600.00)	75.62	
2.12.2-12.0-00.01.04.2.01.02	Kegiatan Pemeliharaan Data Kependudukan	167,571,353.00	159,140,675.00	(8,390,678.00)	94.39	
2.12.2-12.0-00.01.04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	67,531,353.00	60,355,675.00	(7,175,678.00)	89.37	
2.12.2-12.0-00.01.04.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	500,000.00	0.00	(500,000.00)	0.00	
2.12.2-12.0-00.01.04.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	67,031,353.00	60,355,675.00	(6,675,678.00)	90.04	
2.12.2-12.0-00.01.04.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	100,000,000.00	97,785,000.00	(2,215,000.00)	97.79	
2.12.2-12.0-00.01.04.2.01.02.5.2.1	Belanja Modal Acet Tetap Lainnya	100,000,000.00	97,785,000.00	(2,215,000.00)	97.79	
2.12.2-12.0-00.01.04.2.01.02.5.2.5	Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	208,579,800.00	194,791,550.00	(13,788,250.00)	93.22	
2.12.2-12.0-00.01.04.2.03.03	Facilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	208,579,800.00	194,791,550.00	(13,788,250.00)	93.22	
2.12.2-12.0-60.0-00.01.04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	90,646,000.00	91,980,600.00	(1,334,600.00)	99.33	
2.12.2-12.0-60.0-00.01.04.2.03.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.12.2-12.0-60.0-01.04.2.03.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90,646,000.00	91,980,600.00	(1,334,600.00)	99.33	
2.12.2-12.0-00.01.04.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	110,293,000.00	96,800,950.00	(13,492,050.00)	87.77	
2.12.2-12.0-00.01.04.2.03.03.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	110,293,000.00	96,800,950.00	(13,492,050.00)	87.77	
2.12.2-12.0-00.01.04.2.04	Pembinaan dan Penguasaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.12.2-12.0-00.01.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyediaan Data Kependudukan	0.00	0.00	0.00	0.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	4	
					5	
1	2	3	4	5	6	
2.12.2-12.0-00.0-01.04.2.04.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04.2.04.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04.2.04.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.05	<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	41,409,000.00	39,015,300.00	(2,393,700.00)	94.22	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.05.2.01	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	41,409,000.00	39,015,300.00	(2,393,700.00)	94.22	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.05.2.01.01	Menyusun Data Kependudukan Kabupaten/Raya	18,429,500.00	17,228,250.00	(1,191,250.00)	93.54	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.05.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	18,429,500.00	17,228,250.00	(1,191,250.00)	93.54	
2.12.2-12.0-00.0-01.05.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.12.2-12.0-00.0-01.05.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18,429,500.00	17,228,250.00	(1,191,250.00)	93.54	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.05.2.01.02	<b>Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyek Kependudukan serta Kebutuhan yang lain</b>	22,979,500.00	21,777,050.00	(1,202,450.00)	94.77	
2.12.2-12.0-00.0-00.01.05.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	22,979,500.00	21,777,050.00	(1,202,450.00)	94.77	
2.12.2-12.0-00.0-01.05.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.12.2-12.0-00.0-01.05.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22,979,500.00	21,777,050.00	(1,202,450.00)	94.77	
		0.00	(5,863,934,087.23)	(5,863,934,087.23)	0.00	

*P.A*



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

URUSAN Pemerintahan Organisasi : 2.15 : 2.15.2-15.0-00.0-00.01	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		KODE REKENING	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)
			1	3		4
2.15.2-15.0-00.0-00.01.00.0.00.00.4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		2.316.670.000,00	2.335.889.500,00	(586.780.500,00)	80,09
2.15.2-15.0-00.0-00.01.00.0.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		2.316.670.000,00	2.335.889.500,00	(586.780.500,00)	80,09
2.15.2-15.0-00.0-00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah		2.316.670.000,00	2.332.638.000,00	(584.032.000,00)	79,96
2.15.2-15.0-00.0-00.01.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sisa		0,00	3.251.500,00	3.251.500,00	0,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.00.0.00.00.5	<b>BELANJA DAERAH</b>		15.154.462.444,00	11.466.614.877,26	(1.687.847.566,74)	88,86
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01	<b>Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		11.399.445.813,00	9.946.109.534,00	(1.453.336.079,00)	87,25
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		16.557.000,00	16.217.300,00	(338.700,00)	97,95
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Perencanaan Dalam Perencanaan Perangkat Daerah		16.557.000,00	16.217.300,00	(338.700,00)	97,95
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>		16.557.000,00	16.217.300,00	(338.700,00)	97,95
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa		16.557.000,00	16.217.300,00	(338.700,00)	97,95
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		6.501.107.797,00	6.011.797.557,00	(489.310.240,00)	92,47
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Ayudanan Gaji dan Tunjangan ASN		6.501.107.797,00	6.011.797.557,00	(489.310.240,00)	92,47
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>		6.501.107.797,00	6.011.797.557,00	(489.310.240,00)	92,47
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai		6.501.107.797,00	6.011.797.557,00	(489.310.240,00)	92,47
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		297.000.000,00	290.884.400,00	(6.115.600,00)	97,94
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SMPD		297.000.000,00	290.884.400,00	(6.115.600,00)	97,94
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.03.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>		297.000.000,00	290.884.400,00	(6.115.600,00)	97,94



KODE REKENDUNG	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.03.02.5.1.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	1.250.000,00	(5.750.000,00)	17,86	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	290.000.000,00	289.634.400,00	(365.600,00)	99,87	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	316.579.600,00	304.932.514,00	(12.647.086,00)	96,20	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.445.000,00	8.345.000,00	(100.000,00)	98,57	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	8.445.000,00	8.345.000,00	(100.000,00)	98,53	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.445.000,00	8.345.000,00	(100.000,00)	98,53	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.02	Penyediaan Arahalan dan Perengklapan Kantor	97.244.000,00	95.523.200,00	(1.720.800,00)	98,23	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.02.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	97.244.000,00	95.523.200,00	(1.720.800,00)	98,23	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.02.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	97.244.000,00	95.523.200,00	(1.720.800,00)	98,23	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.229.100,00	37.105.491,00	(1.123.609,00)	97,06	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	38.229.100,00	37.105.491,00	(1.123.609,00)	97,06	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	38.229.100,00	37.105.491,00	(1.123.609,00)	97,06	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Pengabdian	30.906.500,00	28.471.250,00	(2.435.250,00)	92,12	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.05.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	30.906.500,00	28.471.250,00	(2.435.250,00)	92,12	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.05.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.05.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.906.500,00	28.471.250,00	(2.435.250,00)	92,12	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.08	Realisasi Kegiatan Tamu	2.800.000,00	2.796.000,00	(4.000,00)	99,86	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2.800.000,00	2.796.000,00	(4.000,00)	99,86	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.796.000,00	(4.000,00)	99,86	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rupa Kelembagaan dan Konsultasi SKPD	126.155.000,00	122.696.033,00	(3.458.967,00)	95,36	

8-19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERURANG	
		AMGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5	6	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	139,155,000.00	132,696,073.00	(6,458,927.00)	95.36	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	139,155,000.00	132,696,073.00	(6,458,927.00)	95.36	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah</b>	222,200,000.00	112,071,425.00	(610,228,575.00)	15.52	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	697,000,000.00	87,805,025.00	(610,114,975.00)	12.57	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.07.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	17,500,000.00	250,000.00	(17,250,000.00)	1.43	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.07.02.5.1.1	Belanja Pegawai	17,500,000.00	250,000.00	(17,250,000.00)	1.43	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.07.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	680,000,000.00	87,135,025.00	(592,864,975.00)	12.81	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.07.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	680,000,000.00	87,135,025.00	(592,864,975.00)	12.81	
2.15.2-15.0-10.0-01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	24,800,000.00	24,686,400.00	(113,600.00)	99.54	
2.15.2-15.0-10.0-01.01.2.07.05.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	24,800,000.00	24,686,400.00	(113,600.00)	99.54	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.07.05.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24,800,000.00	24,686,400.00	(113,600.00)	99.54	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.08	<b>Pengadaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah</b>	267,640,000.00	233,521,339.00	(34,318,661.00)	87.19	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,640,000.00	7,600,000.00	(40,000.00)	99.17	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.08.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,440,000.00	1,590,000.00	(80,000.00)	95.12	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,440,000.00	1,590,000.00	(80,000.00)	95.12	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260,000,000.00	231,961,339.00	(28,238,661.00)	87.14	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.08.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	266,200,000.00	231,961,339.00	(34,238,661.00)	87.14	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.08.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.08.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	266,200,000.00	231,961,339.00	(34,238,661.00)	87.14	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah</b>	3,277,861,216.00	2,876,670,999.00	(201,190,217.00)	90.81	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.09.01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	39,190,000.00	39,005,600.00	(184,400.00)	99.53	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.09.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	39,190,000.00	39,005,600.00	(184,400.00)	99.53	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.09.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.15.2-15.0-00.0-01.01.2.09.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39,190,000.00	39,005,600.00	(184,400.00)	99.53	

819

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(Rp)	(%)
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyetaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180,850,000.00	172,135,405.00	(8,714,595.00)	95.16	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	180,850,000.00	172,135,405.00	(8,714,595.00)	95.16	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180,850,000.00	172,135,405.00	(8,714,595.00)	95.16	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	7,500,000.00	6,815,000.00	(685,000.00)	90.87	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	7,500,000.00	6,815,000.00	(685,000.00)	90.87	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7,500,000.00	6,815,000.00	(685,000.00)	90.87	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Pembelian Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3,050,321,216.00	2,750,723,994.00	(299,597,222.00)	90.44	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,995,721,216.00	2,694,457,594.00	(299,263,622.00)	90.24	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	13,500,000.00	250,000.00	(13,250,000.00)	1.85	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,972,221,216.00	2,694,207,594.00	(278,013,622.00)	90.65	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.09.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	64,600,000.00	64,266,400.00	(333,600.00)	99.48	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.09.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	64,600,000.00	64,266,400.00	(333,600.00)	99.48	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3,754,816,811.09	3,520,505,343.26	(234,311,467.74)	93.76	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02	<b>Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	662,259,200.00	771,093,180.26	108,833,980.26	96.24	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pemeliharaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	638,200,000.00	611,794,170.26	(26,405,829.74)	97.39	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	638,200,000.00	611,794,170.26	(26,405,829.74)	97.39	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	15,700,000.00	1,000,000.00	(14,700,000.00)	6.37	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	612,500,000.00	610,794,170.26	(1,705,829.74)	99.72	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02.02.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02.04	Aktivitas dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	173,059,200.00	159,303,010.00	(13,756,190.00)	92.05	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	173,059,200.00	159,303,010.00	(13,756,190.00)	92.05	
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	

8.19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(Rp)	(%)
2.15.2-15.0-00.01.02.2.02.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	173,059,200.00	159,303,010.00	(13,756,190.00)	92.05	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.06	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	2,492,649,631.00	2,300,490,063.00	(192,159,568.00)	92.29	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	73,373,600.00	68,471,275.00	(4,902,325.00)	93.37	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.06.03.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	73,373,600.00	68,471,275.00	(4,902,325.00)	93.32	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.06.03.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.06.03.1.2	Belanja Barang dan Jasa	73,373,600.00	68,471,275.00	(4,902,325.00)	93.32	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.06.04	Pengawasan dan Pempersediaan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2,412,415,031.00	2,226,550,688.00	(185,864,343.00)	92.30	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,399,910,031.00	2,214,359,688.00	(185,550,343.00)	92.27	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,399,910,031.00	2,214,359,688.00	(185,550,343.00)	92.27	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.06.04.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	12,497,000.00	12,200,000.00	(297,000.00)	97.62	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.06.04.5.2.2	Belanja Modal Peraltan dan Mesin	12,497,000.00	12,200,000.00	(297,000.00)	97.62	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	6,860,000.00	5,458,100.00	(1,401,900.00)	79.58	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.06.05.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6,860,000.00	5,459,100.00	(1,400,900.00)	79.58	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.06.05.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.06.05.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6,860,000.00	5,459,100.00	(1,400,900.00)	79.58	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.07	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalawis) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	10,746,000.00	10,075,500.00	(670,500.00)	93.76	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekonstruksi Andalawis	10,746,000.00	10,075,500.00	(670,500.00)	93.76	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.07.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.07.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.07.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10,746,000.00	10,075,500.00	(670,500.00)	93.76	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.08.04	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.15.2-15.0-00.01.02.2.08.04.1	Realisasikan Aspek Audit dan Pemertanian Revisi/ubah Perizinan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Keselamatan Bermotor Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	

2.19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(Rp)	(%)
2.15.2-15.0-90.0-00.01.02.2.08.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-90.0-00.01.02.2.08.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-90.0-00.01.02.2.08.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-90.0-00.01.02.2.08.04.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-90.0-00.01.02.2.08.04.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-90.0-00.01.02.2.09	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	480,000,000.00	395,996,700.00	(4,083,300.00)	(4,083,300.00)	98.98
2.15.2-15.0-90.0-00.01.02.2.09.02	Pengembangan dan Peningkatan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	480,000,000.00	395,996,700.00	(4,083,300.00)	(4,083,300.00)	98.98
2.15.2-15.0-90.0-00.01.02.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	480,000,000.00	395,996,700.00	(4,083,300.00)	(4,083,300.00)	98.98
2.15.2-15.0-90.0-00.01.02.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	480,000,000.00	395,996,700.00	(4,083,300.00)	(4,083,300.00)	98.98
2.15.2-15.0-90.0-00.01.02.2.09.02.5.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-90.0-00.01.02.2.11	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	50,163,000.00	42,835,900.00	(7,227,100.00)	(7,227,100.00)	85.59
2.15.2-15.0-90.0-00.01.02.2.11.02	Perencanaan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,163,000.00	42,835,900.00	(7,227,100.00)	(7,227,100.00)	85.59
2.15.2-15.0-90.0-00.01.02.2.11.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	43,363,000.00	36,386,900.00	(6,976,100.00)	(6,976,100.00)	83.91
2.15.2-15.0-90.0-00.01.02.2.11.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.15.2-15.0-90.0-00.01.02.2.11.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43,363,000.00	36,386,900.00	(6,976,100.00)	(6,976,100.00)	83.91
2.15.2-15.0-90.0-00.01.02.2.11.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	6,800,000.00	6,549,000.00	(251,000.00)	(251,000.00)	96.31
2.15.2-15.0-90.0-00.01.02.2.11.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,800,000.00	6,549,000.00	(251,000.00)	(251,000.00)	96.31
		0.00	(11,130,725,377.26)	(11,130,725,377.26)	(11,130,725,377.26)	0.00

9/19



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

URUSAN Pemerintahan Organisasi	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	5 (Rp)	6 (%)	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.00.0.00.0.0.4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	250,000,000.00	459,680,000.00	209,680,000.00	183.87	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.00.0.00.0.0.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	250,000,000.00	459,680,000.00	209,680,000.00	183.87	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.00.0.00.0.0.1.2	Retribusi Daerah	250,000,000.00	459,680,000.00	209,680,000.00	183.87	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.00.0.00.0.0.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	10,091,964,537.00	9,332,871,194.66	(759,093,352.34)	92.48	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	3,348,968,141.00	3,248,166,794.66	(100,801,346.34)	96.99	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	18,429,950.00	18,131,400.00	(298,550.00)	98.39	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18,429,950.00	18,131,400.00	(298,550.00)	98.39	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	18,429,950.00	18,131,400.00	(298,550.00)	98.39	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18,429,950.00	18,131,400.00	(298,550.00)	98.39	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	2,907,267,191.00	2,823,690,261.66	(83,576,929.34)	97.13	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,907,267,191.00	2,823,690,261.66	(83,576,929.34)	97.13	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,907,267,191.00	2,823,690,261.66	(83,576,929.34)	97.13	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	2,907,267,191.00	2,823,690,261.66	(83,576,929.34)	97.13	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	186,471,000.00	184,778,083.00	(1,692,917.00)	99.09	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.06.01	Penyediaan Kebutuhan Jasa/Perencanaan Anggaran Kantor	702,000.00	676,000.00	(26,000.00)	96.43	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	702,000.00	676,000.00	(26,000.00)	96.43	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	702,000.00	676,000.00	(26,000.00)	96.43	

19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(Rp)	(%)
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.06.02	Penyediaan Pelebaran dan Peningkatan Kambor	21.550.000,00	20.397.000,00	(1.153.000,00)	94,63	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.06.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
	Belanja Pegawai	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.06.02.5.1.1	<b>BELANJA MODAL</b>	21.300.000,00	20.397.000,00	(903.000,00)	95,76	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.06.02.5.1.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	21.300.000,00	20.397.000,00	(903.000,00)	95,76	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kambor	6.351.000,00	6.095.000,00	(256.000,00)	95,97	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6.351.000,00	6.095.000,00	(256.000,00)	95,97	
	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	6.351.000,00	6.095.000,00	(256.000,00)	95,97	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cadangan dan Penggantian	5.705.000,00	5.705.000,00	(2.500,00)	99,94	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.06.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.705.000,00	5.705.000,00	(3.500,00)	99,94	
	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.06.05.5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	5.705.000,00	5.705.000,00	(3.500,00)	99,94	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Aparat Kendaraan dan Konsultasi SKPD	152.160.000,00	151.394.533,00	(765.467,00)	99,83	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	152.160.000,00	151.394.533,00	(765.467,00)	99,83	
	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	152.160.000,00	151.394.533,00	(765.467,00)	99,83	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.250.000,00	49.967.800,00	(282.200,00)	99,44	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.07.02	Pengadaan Kebutuhan Dasar Operasional atau Lapangan	50.250.000,00	49.967.800,00	(282.200,00)	99,44	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.07.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	296.000,00	296.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Pegawai	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.07.02.5.1.1	<b>BELANJA MODAL</b>	50.000.000,00	49.717.800,00	(282.200,00)	99,44	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.07.02.5.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	50.000.000,00	49.717.800,00	(282.200,00)	99,44	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.07.02.5.2.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.200.000,00	14.818.200,00	(4.381.800,00)	77,18	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Sifat Menyenak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	

187A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(Rp)	(%)
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.02	Penyetoran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	11.618.200,00	(6.381.800,00)	75,66	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	18.000.000,00	11.618.200,00	(6.381.800,00)	75,66	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	11.618.200,00	(6.381.800,00)	75,66	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09	<b>Pembelajaran Berbasis Misi Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	167.250.000,00	156.781.050,00	(10.468.950,00)	93,80	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.01	Penyetoran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendayaan Dinas Jabatan	39.190.000,00	30.620.750,00	(8.569.250,00)	98,55	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	39.190.000,00	30.620.750,00	(8.569.250,00)	98,55	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39.190.000,00	30.620.750,00	(8.569.250,00)	98,55	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.02	Penyetoran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pembiayaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.400.000,00	66.038.100,00	(9.361.900,00)	87,58	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	75.400.000,00	66.038.100,00	(9.361.900,00)	87,58	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.400.000,00	66.038.100,00	(9.361.900,00)	87,58	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.06	Pembelajaran Perabotan dan Meubel Lainnya	7.510.000,00	7.037.000,00	(473.000,00)	93,70	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	7.510.000,00	7.037.000,00	(473.000,00)	93,70	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.510.000,00	7.037.000,00	(473.000,00)	93,70	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.09	Pembelajaran/Kelembagaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.250.000,00	45.085.200,00	(164.800,00)	99,64	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	45.250.000,00	45.085.200,00	(164.800,00)	99,64	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.835.200,00	(164.800,00)	99,63	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02	<b>Program Pengetahuan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	7.750.851.130,00	2.228.834.505,00	(5.522.016.625,00)	81,02	

19



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(Rp)	(%)
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.750.051.100.00	2.228.634.505.00	(522.016.625.00)	81.02	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.02	Monitoring Operasional dan Aplikasi Publik	442.040.000.00	384.271.512.00	(57.768.508.00)	82.52	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	350.969.170.00	271.962.612.00	(77.006.658.00)	78.08	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	1.000.000.00	250.000.00	(750.000.00)	25.00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	349.969.170.00	271.712.612.00	(78.256.658.00)	78.21	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	91.078.750.00	90.808.500.00	(269.850.00)	99.78	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.078.750.00	90.808.500.00	(269.850.00)	99.78	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.04	Aktivitas Konten dan Berencana Media Komunikasi Publik	4.508.331.240.00	2.192.762.875.00	(2.310.626.465.00)	79.71	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.217.031.240.00	912.261.935.00	(304.769.405.00)	74.96	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.04.5.1.1	Belanja Pegawai	1.800.000.00	750.000.00	(1.050.000.00)	75.00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.216.031.240.00	911.511.935.00	(304.519.405.00)	74.96	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	291.300.000.00	285.440.940.00	(5.859.060.00)	97.99	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.04.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	291.300.000.00	285.440.940.00	(5.859.060.00)	97.99	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	260.655.770.00	237.509.168.00	(23.146.602.00)	88.08	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	267.155.770.00	235.759.168.00	(31.396.602.00)	88.25	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	267.155.770.00	235.759.168.00	(31.396.602.00)	88.25	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	2.500.000.00	1.750.000.00	(750.000.00)	70.00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.05.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000.00	1.750.000.00	(750.000.00)	70.00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	22.357.000.00	14.616.250.00	(7.740.750.00)	65.38	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	22.357.000.00	14.616.250.00	(7.740.750.00)	65.38	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.357.000.00	14.616.250.00	(7.740.750.00)	65.38	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.07	Layanan Akademy Media	474.900.000.00	344.327.050.00	(130.652.950.00)	79.16	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	434.986.000.00	344.327.050.00	(90.658.950.00)	79.16	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.07.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	

K-19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(Rp)	(%)
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	151,486,000.00	344,327,650.00	(190,658,950.00)	79.16	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.08	Kemudahan Akses Perangkat Keras/Perangkat Lunak	73,473,000.00	69,907,650.00	(3,565,350.00)	95.15	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	73,473,000.00	69,907,650.00	(3,565,350.00)	95.15	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	73,473,000.00	69,907,650.00	(3,565,350.00)	95.15	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	3,050,871,666.00	3,738,893,375.00	(119,978,331.00)	96.89	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.01	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	2,691,351,608.00	2,649,173,210.00	(42,178,398.00)	98.47	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem, Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	2,691,351,608.00	2,649,173,210.00	(42,178,398.00)	98.47	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,141,351,608.00	2,123,721,210.00	(17,630,398.00)	99.18	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,141,351,608.00	2,123,721,210.00	(17,630,398.00)	99.18	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.01.03.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	550,000,000.00	525,452,000.00	(24,548,000.00)	95.54	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.01.03.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	550,000,000.00	525,452,000.00	(24,548,000.00)	95.54	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	1,167,520,000.00	1,089,730,125.00	(77,799,875.00)	93.41	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.01	Penatakelolaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	183,827,000.00	161,861,250.00	(21,965,750.00)	88.05	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	183,827,000.00	161,861,250.00	(21,965,750.00)	88.05	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	183,827,000.00	161,861,250.00	(21,965,750.00)	88.05	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	291,205,304.00	271,971,302.00	(19,234,002.00)	93.40	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.01.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	291,205,304.00	271,971,302.00	(19,234,002.00)	93.40	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	91,205,304.00	71,995,302.00	(19,210,002.00)	78.94	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	91,205,304.00	71,995,302.00	(19,210,002.00)	78.94	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.03.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	200,000,000.00	199,976,000.00	(24,000.00)	99.99	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.03.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	200,000,000.00	199,976,000.00	(24,000.00)	99.99	

81A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		AMGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.07	Angembangan Akses dan Proses (Bani Pemerintahan Berbasis Elektronik)	668,647,754.00	638,993,173.00	(27,654,581.00)	95.65
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	435,005,629.00	421,151,793.00	(13,853,836.00)	96.82
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.07.5.1.1	Belanja Pegawai	1,000,000.00	500,000.00	(500,000.00)	50.00
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	434,005,629.00	420,651,793.00	(13,353,836.00)	96.92
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.07.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	234,642,125.00	217,841,380.00	(11,800,745.00)	94.04
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.07.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222,140,125.00	208,897,090.00	(13,243,125.00)	94.04
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.07.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,502,000.00	8,944,380.00	(557,620.00)	94.13
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.10	Angembangan dan Peningkatan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Administrasi Daerah	25,840,000.00	16,894,400.00	(8,945,600.00)	65.39
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.10.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	25,840,000.00	16,894,400.00	(8,945,600.00)	65.38
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.10.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.16.2-16.2-21.2-20.01.03.2.02.10.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25,840,000.00	16,894,400.00	(8,945,600.00)	65.38
2.20.2-16.2-21.2-20.01.02	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	51,080,600.00	51,080,600.00	0.00	100.00
2.20.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	51,080,600.00	51,080,600.00	0.00	100.00
2.20.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.01	Konfirmasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	51,080,600.00	51,080,600.00	0.00	100.00
2.20.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	24,080,600.00	24,080,600.00	0.00	100.00
2.20.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.20.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24,080,600.00	24,080,600.00	0.00	100.00
2.20.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	100.00
2.20.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	100.00
2.21.2-16.2-21.2-20.01.02	<b>Program Penyelenggaraan Persediaan Untuk Pengamanan Informasi</b>	80,153,000.00	65,395,000.00	(14,758,000.00)	81.55
2.21.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Persediaan Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	80,153,000.00	65,395,000.00	(14,758,000.00)	81.55
2.21.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Komunitas Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50,640,000.00	41,605,250.00	(8,934,750.00)	82.55
2.21.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	29,800,000.00	21,055,250.00	(8,834,750.00)	70.44
2.21.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29,800,000.00	21,055,250.00	(8,834,750.00)	70.44
2.21.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	20,750,000.00	20,750,000.00	0.00	100.00

619

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PEKUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.21.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.02.5.2.2	Belanja Modal Perabotan dan Mesin	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	100,00
2.21.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	29.553.000,00	23.590.450,00	(5.962.550,00)	79,82
2.21.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	29.553.000,00	23.590.450,00	(5.962.550,00)	79,82
2.21.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.2-16.2-21.2-20.01.02.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.553.000,00	23.590.450,00	(5.962.550,00)	79,82
		0,00	(8.873.191.184,56)	(8.873.191.184,56)	0,00

R. 19



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / BERSUKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			(Rp)	(%)
2.17.2-17.3-30.0-00.01.00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	14.229.500.000,00	13.751.741.639,06		(477.758.371,00)	96,64	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.229.500.000,00	13.751.741.639,06		(477.758.371,00)	96,64	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.00.0.00.00.4.1.2	Rtribusi Daerah	14.229.500.000,00	13.574.949.384,06		(654.550.616,00)	95,49	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	176.792.255,00		176.792.255,00	0,00	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	26.423.938.332,00	23.614.171.854,96		(2.809.766.477,04)	89,37	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.623.682.014,00	6.151.535.100,00		(472.146.914,00)	92,87	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.312.102,00	22.467.050,00		894.948,00	96,29	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.312.102,00	15.641.550,00		(670.552,00)	95,89	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.312.102,00	15.641.550,00		(670.552,00)	95,89	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.805.500,00		(194.500,00)	97,51	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.01.06	Koordinator dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000,00	6.825.500,00		(174.500,00)	97,51	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.01.06.5.1.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	6.825.500,00		(174.500,00)	97,51	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.01.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.02	Administrasi/ Keuangan Perangkat Daerah	5.796.814.714,00	5.323.392.345,00		(473.422.369,00)	92,60	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.796.814.714,00	5.323.392.345,00		(473.422.369,00)	92,58	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.796.814.714,00	5.323.392.345,00		(473.422.369,00)	92,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	
		3	4	5	6
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	5,750,232,312.00	5,323,390,345.00	(426,841,967.00)	90.91
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.02.07	Akreditasi dan Penyusunan Laporan Kelembagaan Bulanan/Triwulanan/Semesteran (SPY)	15,580,902.00	15,580,902.00	0.00	100.00
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	15,580,902.00	15,580,902.00	0.00	100.00
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.02.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15,580,902.00	15,580,902.00	0.00	100.00
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Peringkat Daerah	291,441,200.00	270,960,245.00	(14,881,045.00)	94.90
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Kebutuhan Indobias Listrik/Pemrosesan Anggaran Kantor	2,499,700.00	2,492,530.00	(6,170.00)	99.92
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	7,499,700.00	7,497,530.00	(2,170.00)	99.92
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7,499,700.00	7,497,530.00	(2,170.00)	99.92
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Perumahan Rumah Tangga	6,000,000.00	5,622,502.00	(377,498.00)	93.72
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	6,000,000.00	5,622,502.00	(377,498.00)	93.72
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	5,622,502.00	(377,498.00)	93.72
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,381,600.00	29,254,291.00	(127,309.00)	99.57
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	29,381,600.00	29,254,291.00	(127,309.00)	99.57
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29,381,600.00	29,254,291.00	(127,309.00)	99.57
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48,639,990.00	39,542,586.00	(9,097,404.00)	81.30
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	48,639,990.00	39,542,586.00	(9,097,404.00)	81.30
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	48,639,990.00	39,542,586.00	(9,097,404.00)	81.30
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Karyawan Tamu	5,770,000.00	5,234,900.00	(535,100.00)	90.73
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	5,770,000.00	5,234,900.00	(535,100.00)	90.73
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		AMGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	4	5	6
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5,770,000.00	5,234,900.00	(535,100.00)	90.73		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194,550,000.00	189,607,438.00	(4,942,562.00)	97.46		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	194,550,000.00	189,607,438.00	(4,942,562.00)	97.46		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	194,550,000.00	189,607,438.00	(4,942,562.00)	97.46		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	287,880,902.00	162,636,406.00	(125,244,496.00)	56.57		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19,080,902.00	19,080,902.00	0.00	100.00		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	19,080,902.00	19,080,902.00	0.00	100.00		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19,080,902.00	19,080,902.00	0.00	100.00		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08.02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	194,240,000.00	124,896,454.00	(69,343,546.00)	64.35		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	144,240,000.00	124,896,454.00	(19,343,546.00)	86.59		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	144,240,000.00	124,896,454.00	(19,343,546.00)	86.59		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08.03	<b>Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor</b>	18,660,000.00	16,659,050.00	(2,000,950.00)	89.29		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	18,660,000.00	16,659,050.00	(2,000,950.00)	89.29		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18,660,000.00	16,659,050.00	(2,000,950.00)	89.29		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	360,294,506.00	360,502,212.00	207,706.00	97.16		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Bekerja	177,551,804.00	172,333,115.00	(5,218,689.00)	97.06		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	177,551,804.00	172,333,115.00	(5,218,689.00)	97.06		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	177,551,804.00	172,333,115.00	(5,218,689.00)	97.06		

R. A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(Rp)	(%)
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.02	Perencanaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5,750,000.00	9,743,200.00	(6,800.00)	99.93	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6,750,000.00	9,743,200.00	(6,800.00)	99.93	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6,750,000.00	9,743,200.00	(6,800.00)	99.93	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.09	Amubakars/Bakubakar Gedung Kantor dan Bespaman Lainnya	173,432,702.00	168,423,897.00	(5,008,805.00)	97.11	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	173,432,702.00	168,423,897.00	(5,008,805.00)	97.11	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	173,432,702.00	168,423,897.00	(5,008,805.00)	97.11	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.03	<b>Program Pengawasan Dan Pemeliharaan Koperasi</b>	41,988,000.00	40,759,400.00	(1,228,600.00)	97.07	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjaman/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	41,988,000.00	40,759,400.00	(1,228,600.00)	97.07	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Komandan, Kelengkapan, serta Akuntabilitas Koperasi Kecamatan Kabupaten/Kota	41,988,000.00	40,759,400.00	(1,228,600.00)	97.07	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	21,001,400.00	21,001,400.00	0.00	94.65	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21,001,400.00	21,001,400.00	(1,186,600.00)	94.65	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	19,800,000.00	19,758,000.00	(42,000.00)	99.79	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.01.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	19,800,000.00	19,758,000.00	(42,000.00)	99.79	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.05	<b>Program Pendidikan Dan Latihan Perkerasias</b>	391,300,000.00	373,619,620.00	(17,680,380.00)	95.48	
2.17.3-17.3-30.0-00.01.05.2.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkerasiasan bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	195,146,000.00	186,794,110.00	(8,351,890.00)	95.72	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.05.2.01.01	Penggiatan Pemahaman dan Peningkatan Partisipasi serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	195,146,000.00	186,794,110.00	(8,351,890.00)	95.72	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.05.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	195,146,000.00	186,794,110.00	(8,351,890.00)	95.72	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.05.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.05.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	195,146,000.00	186,794,110.00	(8,351,890.00)	95.72	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.05.2.03	<b>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	196,154,000.00	186,825,510.00	(9,328,490.00)	95.24	

8-19



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.17.2-17.3-30.0-00.01.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Penguasaan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	196.154.000,00	186.825.510,00	(9.328.490,00)	95,24
2.17.2-17.3-30.0-00.01.05.2.03.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	196.154.000,00	186.825.510,00	(9.328.490,00)	95,24
2.17.2-17.3-30.0-00.01.05.2.03.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.01.05.2.03.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	196.154.000,00	186.825.510,00	(9.328.490,00)	95,24
2.17.2-17.3-30.0-00.01.06.2.01.01.05	<b>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keperasni</b>	128.656.000,00	121.142.185,00	(7.513.815,00)	94,16
2.17.2-17.3-30.0-00.01.06.2.01.01.01	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Keperasni yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	128.656.000,00	121.142.185,00	(7.513.815,00)	94,16
2.17.2-17.3-30.0-00.01.06.2.01.01.5.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akar Pasok, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewirausahaan Kabupaten/Kota	128.656.000,00	121.142.185,00	(7.513.815,00)	94,16
2.17.2-17.3-30.0-00.01.06.2.01.01.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	128.656.000,00	121.142.185,00	(7.513.815,00)	94,16
2.17.2-17.3-30.0-00.01.06.2.01.01.5.1.2	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.01.07.2.01.01	Belanja Barang dan Jasa	128.656.000,00	121.142.185,00	(7.513.815,00)	94,16
2.17.2-17.3-30.0-00.01.07.2.01.01.04	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	71.150.000,00	69.895.315,00	(1.254.685,00)	98,24
2.17.2-17.3-30.0-00.01.07.2.01.01.04.5.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemudahan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemungku Kepentingan	71.150.000,00	69.895.315,00	(1.254.685,00)	98,24
2.17.2-17.3-30.0-00.01.07.2.01.04.5.1.1	Pemberdayaan Kelembagaan, Pelopor dan Pengembangan Usaha Mikro	71.150.000,00	69.895.315,00	(1.254.685,00)	98,24
2.17.2-17.3-30.0-00.01.07.2.01.04.5.1.2	<b>BELANJA OPERASI</b>	71.150.000,00	69.895.315,00	(1.254.685,00)	98,24
2.17.2-17.3-30.0-00.01.07.2.01.04.5.1.2.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.01.07.2.01.04.5.1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	71.150.000,00	69.895.315,00	(1.254.685,00)	98,24
2.17.2-17.3-30.0-00.01.08.2.01	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	4.084.168.046,00	3.878.522.266,00	(205.645.780,00)	97,41
2.17.2-17.3-30.0-00.01.08.2.01.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</b>	4.084.168.046,00	3.878.522.266,00	(205.645.780,00)	97,41
2.17.2-17.3-30.0-00.01.08.2.01.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produser dan Pengalihan, Anekaan, SDM, serta Desain dan Teknologi	4.084.168.046,00	3.878.522.266,00	(205.645.780,00)	97,41
2.17.2-17.3-30.0-00.01.08.2.01.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4.084.168.046,00	3.878.522.266,00	(205.645.780,00)	97,41
2.17.2-17.3-30.0-00.01.08.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.01.08.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.084.168.046,00	3.878.522.266,00	(205.645.780,00)	97,41
2.17.2-17.3-30.0-00.01.08.2.01.01.5.1.2.01	Belanja Subsidi	2.575.000.000,00	2.574.999.266,00	(10.734,00)	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5	6	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	15,000,000.00	14,747,460.00	(252,540.00)	98.32	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.01.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Meubel	15,000,000.00	14,747,460.00	(252,540.00)	98.32	
2.17.2-17.3-30.0-00.01.01.2.01.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	234,330,978.00	216,583,021.00	(17,747,957.00)	92.43	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	98,287,693.00	95,401,266.00	(2,886,427.00)	98.09	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.01	Arwisahan Komponen, Insidasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	531,500.00	499,000.00	(32,500.00)	93.89	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	531,500.00	499,000.00	(32,500.00)	93.89	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	531,500.00	499,000.00	(32,500.00)	93.89	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Perlengkapan dan Pembongkaran Kantor	40,221,250.00	40,182,000.00	(39,250.00)	99.90	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	40,221,250.00	40,182,000.00	(39,250.00)	99.90	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.02.5.1.1	Belanja Pegawai	40,221,250.00	40,182,000.00	(39,250.00)	99.90	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.02.5.2	Belanja Modal Perakitan dan Meubel	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.04	Proyektiler Bahan Logistik Kantor	3,746,900.00	3,314,600.00	(434,300.00)	88.42	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,746,900.00	3,314,600.00	(434,300.00)	88.42	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,746,900.00	3,314,600.00	(434,300.00)	88.42	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,538,000.00	6,415,900.00	(122,100.00)	98.25	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6,538,000.00	6,415,900.00	(122,100.00)	98.25	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6,538,000.00	6,415,900.00	(122,100.00)	98.25	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Koneksi SKPD	45,250,000.00	44,989,766.00	(260,234.00)	99.42	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	45,250,000.00	44,989,766.00	(260,234.00)	99.42	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45,250,000.00	44,989,766.00	(260,234.00)	99.42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	(Rp)	(%)
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.790,000.00	14.882,018.00	(1,407,982.00)	91.08	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08.01	Akuisisi Jasa Saraf Menyurat	190,000.00	190,000.00	0.00	100.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	190,000.00	190,000.00	0.00	100.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	190,000.00	190,000.00	0.00	100.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08.02	Akuisisi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,600,000.00	14,182,018.00	(1,407,982.00)	90.97	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	15,600,000.00	14,182,018.00	(1,407,982.00)	90.97	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.08.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15,600,000.00	14,182,018.00	(1,407,982.00)	90.97	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09	Pembayaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222,250,328.00	206,799,757.00	(15,450,571.00)	93.06	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Asuransi Kendaraan dan/atau Operasional atau Lainnya	39,875,000.00	25,758,853.00	(14,116,147.00)	64.60	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	39,875,000.00	25,758,853.00	(14,116,147.00)	64.60	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39,875,000.00	25,758,853.00	(14,116,147.00)	64.60	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.09	Pembayaran/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82,384,328.00	81,040,884.00	(1,343,444.00)	98.37	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	82,384,328.00	81,040,884.00	(1,343,444.00)	98.37	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	82,384,328.00	81,040,884.00	(1,343,444.00)	98.37	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.09.5.1.2	Program Perlinaan Dan Pendaftaran Perusahaan	40,236,000.00	40,581,150.00	2,553,850.00	94.25	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.09.5.1.2.01	Pemeriksaan Tanda Daftar Gudang	13,700,000.00	13,664,700.00	(1,025,300.00)	92.44	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.09.5.1.2.01.01	Fasilitas Pembelian Tenda Daftar Gudang	13,700,000.00	13,664,700.00	(1,025,300.00)	92.44	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.09.5.1.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13,700,000.00	12,664,700.00	(1,025,300.00)	92.44	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.09.5.1.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.09.5.1.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13,700,000.00	12,664,700.00	(1,025,300.00)	92.44	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.01.2.09.09.5.1.2.01.01.5.1.2.01	Pemeriksaan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	12,515,000.00	12,515,450.00	435.00	99.63	

*R.A.*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5	6	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.02.2.01.02	Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Penelitian Suar Tanah Perkebunan (ditatau Lampsin Wawaha (STPW) Desa Negeri)	32,535,000.00	20,916,450.00	(1,618,536.00)	95.03	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	12,379,000.00	11,746,950.00	(988,050.00)	95.12	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.02.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.02.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12,379,000.00	11,746,950.00	(988,050.00)	95.12	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	20,000,000.00	11,369,500.00	(6,365,500.00)	56.85	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.02.2.01.02.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	20,000,000.00	11,369,500.00	(6,365,500.00)	56.85	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.01.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	14,105,380,996.00	12,166,884,634.96	(2,079,585,371.04)	85.34	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	11,545,604,128.00	9,540,440,282.96	(1,997,154,615.04)	82.70	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	5,962,874,366.00	5,271,063,105.96	(691,781,260.04)	88.40	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2,997,851,500.00	2,559,846,558.00	(438,004,942.00)	85.39	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,997,851,500.00	2,559,846,558.00	(438,004,942.00)	85.39	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	2,964,972,866.00	2,711,216,547.96	(253,756,318.04)	91.44	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.01.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,964,972,866.00	2,711,216,547.96	(253,756,318.04)	91.44	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.02	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5,582,779,762.00	4,277,386,167.00	(1,305,393,575.00)	76.62	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	5,436,779,762.00	4,207,104,707.00	(1,229,675,055.00)	77.38	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5,436,779,762.00	4,207,104,707.00	(1,229,675,055.00)	77.38	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	146,000,000.00	70,281,460.00	(75,718,538.00)	48.14	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.02.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	146,000,000.00	70,281,460.00	(75,718,538.00)	48.14	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.01.02.5.2.2	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	2,630,785,068.00	2,657,475,222.00	(82,098,836.00)	96.89	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengembangan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1,402,733,232.00	1,361,528,147.00	(41,205,085.00)	97.06	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1,402,733,232.00	1,361,528,147.00	(41,205,085.00)	97.06	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,402,733,232.00	1,361,528,147.00	(41,205,085.00)	97.06	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.02.01.5.2	Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1,237,052,636.00	1,145,907,165.00	(91,145,451.00)	96.67	

9.19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(Rp)	(%)
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,235,702,636.00	1,194,767,185.00	(40,935,451.00)	96.69	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,235,702,636.00	1,194,767,185.00	(40,935,451.00)	96.69	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.02.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1,350,000.00	1,140,000.00	(210,000.00)	84.44	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.03.2.02.02.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	1,350,000.00	1,140,000.00	(210,000.00)	84.44	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.04	<b>Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</b>	57,652,268.00	44,067,068.00	(13,585,200.00)	77.24	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.04.2.01	<b>Mengurangi Kelemahan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	6,953,000.00	4,796,300.00	(2,157,700.00)	68.99	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.04.2.01.07	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyalakan Alas-alas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Ayo dan Pasar Rakyat	6,953,000.00	4,796,300.00	(2,157,700.00)	68.99	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.04.2.01.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.04.2.01.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.04.2.01.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6,953,000.00	4,796,300.00	(2,157,700.00)	68.99	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.04.2.02	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	19,311,268.00	15,796,268.00	(3,515,000.00)	81.80	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.04.2.02.01	Promosi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	19,311,268.00	15,796,268.00	(3,515,000.00)	81.80	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.04.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.04.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.04.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19,311,268.00	15,796,268.00	(3,515,000.00)	81.80	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.04.2.03	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	30,788,000.00	23,512,500.00	(7,275,500.00)	76.37	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	30,788,000.00	23,512,500.00	(7,275,500.00)	76.37	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.04.2.03.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.04.2.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30,788,000.00	23,512,500.00	(7,275,500.00)	76.37	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.06	<b>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</b>	74,415,000.00	53,520,063.00	(20,894,937.00)	71.91	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.06.2.01	<b>Atas-tas Monevologi Legal Berupa, Test, Test Ulang, dan Pengawasan</b>	74,415,000.00	53,520,063.00	(20,894,937.00)	71.91	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.06.2.01.01	Atas-tas Monevologi Legal Berupa, Test, Test Ulang	67,480,000.00	48,928,613.00	(18,551,387.00)	72.51	
3.30.2-17.3-30.0-00.01.06.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	67,480,000.00	48,928,613.00	(18,551,387.00)	72.51	

Handwritten signature or initials.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
3.30.2-17.3-30.0-00.01.06.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
3.30.2-17.3-30.0-00.01.06.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	67,480,000.00	46,928,813.00	(18,551,187.00)	72.51
3.30.2-17.3-30.0-00.01.06.2.01.02	Anggaran/Penyusutan Meubelér Jagal	4,935,000.00	4,591,290.00	(343,750.00)	93.03
3.30.2-17.3-30.0-00.01.06.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4,935,000.00	4,591,250.00	(343,750.00)	93.03
3.30.2-17.3-30.0-00.01.06.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,935,000.00	4,591,250.00	(343,750.00)	93.03
3.30.2-17.3-30.0-00.01.07	<b>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	487,541,000.00	415,011,982.00	(72,529,018.00)	85.12
3.30.2-17.3-30.0-00.01.07.2.01	<b>Peleaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	487,541,000.00	415,011,982.00	(72,529,018.00)	85.12
3.30.2-17.3-30.0-00.01.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Peningkatan	487,541,000.00	415,011,982.00	(72,529,018.00)	85.12
3.30.2-17.3-30.0-00.01.07.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.30.2-17.3-30.0-00.01.07.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	487,541,000.00	415,011,982.00	(72,529,018.00)	85.12
3.30.2-17.3-30.0-00.01.07.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	(9,862,380,725.96)	(9,862,380,725.96)	0.00

B.1.A

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Ususan Pemerintahan : 2.18  
 Organisasi : 2.18.2-18.3-31.2-07.01  
 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Penanaman Modal  
 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.00.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	250,000,000.00	249,746,546.00	(254,455.00)	99.90	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.00.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250,000,000.00	249,746,546.00	(254,455.00)	99.90	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	250,000,000.00	249,746,546.00	(254,455.00)	99.90	
2.07.2-18.3-31.2-07.01.00.00.00.5	BELANJA DAERAH	13,127,967,593.00	11,946,207,211.00	(1,182,750,382.00)	90.99	
2.07.2-18.3-31.2-07.01.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	652,160,100.00	522,466,461.00	(1,29,693,639.00)	80.11	
2.07.2-18.3-31.2-07.01.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan Keterampilan bagi Pencari Kerja	652,160,100.00	522,466,461.00	(1,29,693,639.00)	80.11	
2.07.2-18.3-31.2-07.01.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kelester Kompetensi	652,160,100.00	522,466,461.00	(1,29,693,639.00)	80.11	
2.07.2-18.3-31.2-07.01.03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	652,160,100.00	522,466,461.00	(1,29,693,639.00)	80.11	
2.07.2-18.3-31.2-07.01.03.2.01.01.5.1.2	Belanja Bahan dan Jasa	652,160,100.00	522,466,461.00	(1,29,693,639.00)	80.11	
2.07.2-18.3-31.2-07.01.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	8,379,500.00	8,063,200.00	(316,300.00)	96.23	
2.07.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01	Pelayanan Antarkeaja di Daerah Kabupaten/Kota	8,379,500.00	8,063,200.00	(316,300.00)	96.23	
2.07.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	8,379,500.00	8,063,200.00	(316,300.00)	96.23	
2.07.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	8,379,500.00	8,063,200.00	(316,300.00)	96.23	
2.07.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.02.5.1.1	Belanja Program	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.07.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8,379,500.00	8,063,200.00	(316,300.00)	96.23	
2.07.2-18.3-31.2-07.01.05	Program Hubungan Industrial	26,904,784.00	18,097,400.00	(8,807,384.00)	67.28	
2.07.2-18.3-31.2-07.01.05.2.02	Pengembangan dan Penyelidikan Penyelidikan Hubungan Industrial, Monev Kerja dan Penunjang Persejahteraan di Daerah Kabupaten/Kota	26,904,784.00	18,097,400.00	(8,807,384.00)	67.28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.07.2-18.3-31.2-07.01.05.2.02.01	Penyediaan Persediaan Hartanuan Industri, Modal Kerja, dan Perwujudan Perumahan yang Berkualitas/Bertamapak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11,661,824.00	7,909,150.00	(3,752,674.00)	67.82
2.07.2-18.3-31.2-07.01.05.2.02.01.5.1	<b>BELANDA OPERASI</b>	11,661,824.00	7,909,150.00	(3,752,674.00)	67.82
2.07.2-18.3-31.2-07.01.05.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.07.2-18.3-31.2-07.01.05.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11,661,824.00	7,909,150.00	(3,752,674.00)	67.82
2.07.2-18.3-31.2-07.01.05.2.02.02	Penyediaan Persediaan Hartanuan Industri, Modal Kerja, dan Perwujudan Perumahan yang Berkualitas/Bertamapak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15,242,940.00	10,188,250.00	(5,054,710.00)	66.84
2.07.2-18.3-31.2-07.01.05.2.02.02.5.1	<b>BELANDA OPERASI</b>	15,242,940.00	10,188,250.00	(5,054,710.00)	66.84
2.07.2-18.3-31.2-07.01.05.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15,242,940.00	10,188,250.00	(5,054,710.00)	66.84
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,120,757,678.00	8,494,466,742.00	(626,290,936.00)	93.13
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.01	<b>Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	19,779,000.00	19,108,200.00	(670,800.00)	96.61
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19,779,000.00	19,108,200.00	(670,800.00)	96.61
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.01.01.5.1	<b>BELANDA OPERASI</b>	19,779,000.00	19,108,200.00	(670,800.00)	96.61
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19,779,000.00	19,108,200.00	(670,800.00)	96.61
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	6,361,531,902.00	6,361,384,962.00	(146,940.00)	94.01
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.02.01	Penyediaan Cad dan Tanggangan AKR	6,361,531,902.00	6,361,384,962.00	(146,940.00)	94.01
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.02.01.5.1	<b>BELANDA OPERASI</b>	6,361,531,902.00	6,361,384,962.00	(146,940.00)	94.01
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	6,361,531,902.00	6,361,384,962.00	(146,940.00)	94.01
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	286,306,236.00	284,517,720.00	(1,788,516.00)	99.38
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.03.02	Pengadaan Barang Milik Daerah SKPD	286,306,236.00	284,517,720.00	(1,788,516.00)	99.38
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.03.02.5.1	<b>BELANDA OPERASI</b>	286,306,236.00	284,517,720.00	(1,788,516.00)	99.38
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.03.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	286,306,236.00	284,517,720.00	(1,788,516.00)	99.38
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06	<b>Administrasi Urusan Perangkat Daerah</b>	431,502,600.00	404,426,538.00	(27,076,062.00)	93.79
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Perangkat Daerah Kantor	5,573,400.00	5,573,400.00	0.00	100.00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5,523,500.00	5,523,500.00	0.00	100.00
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5,523,500.00	5,523,500.00	0.00	100.00
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peselidat dan Peningkatan Kantor	122,676,000.00	122,652,000.00	(1,043,200.00)	99.16
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	123,676,000.00	122,632,000.00	(1,043,200.00)	99.16
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.02.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	123,676,000.00	122,632,000.00	(1,043,200.00)	99.16
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22,833,100.00	22,745,220.00	(87,880.00)	99.62
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	22,833,100.00	22,745,220.00	(87,880.00)	99.62
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22,833,100.00	22,745,220.00	(87,880.00)	99.62
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,132,000.00	20,934,740.00	(1,197,260.00)	94.59
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	22,132,000.00	20,934,740.00	(1,197,260.00)	94.59
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22,132,000.00	20,934,740.00	(1,197,260.00)	94.59
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.06	Fasilitas Kegiatan Tamu	10,138,000.00	6,832,100.00	(3,305,900.00)	67.39
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	10,138,000.00	6,832,100.00	(3,305,900.00)	67.39
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10,138,000.00	6,832,100.00	(3,305,900.00)	67.39
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249,200,000.00	225,758,198.00	(23,441,802.00)	90.59
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	249,200,000.00	225,758,198.00	(23,441,802.00)	90.59
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	249,200,000.00	225,758,198.00	(23,441,802.00)	90.59
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.07	Penggandaan Barang MRO Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	75,000,000.00	74,426,200.00	(573,300.00)	99.24
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.07.02	Penggandaan Kebutuhan Dinas Operasional atau Lainnya	75,000,000.00	74,426,200.00	(573,300.00)	99.24
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.07.02.5.1	<b>BELANJA MODAL</b>	75,000,000.00	74,426,200.00	(573,300.00)	99.24

81A

KODE REKENTING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		3	4	5	6
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.02.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	75,000,000.00	74,426,700.00	(573,300.00)	99.24
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.02.5.1	Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	900,800,000.00	807,300,564.00	(161,499,436.00)	89.57
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.02.5.1.1	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	3,000,000.00	2,990,000.00	(1,000,000.00)	65.25
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.02.5.1.2	BELANJA OPERASI	3,000,000.00	3,000,000.00	(1,960,000.00)	65.25
	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000.00	3,000,000.00	(1,960,000.00)	65.25
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.02.5.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	965,800,000.00	805,370,564.00	(160,429,436.00)	83.39
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.02.5.1.2	BELANJA OPERASI	965,800,000.00	805,370,564.00	(160,429,436.00)	83.39
	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Barang dan Jasa	965,800,000.00	805,370,564.00	(160,429,436.00)	83.39
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.02.5.1.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	570,767,940.00	541,242,038.00	(27,545,902.00)	95.17
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.02.5.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Otas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,190,000.00	27,775,225.00	(11,414,775.00)	70.87
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.02.5.1.2	BELANJA OPERASI	39,190,000.00	27,775,225.00	(11,414,775.00)	70.87
	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Barang dan Jasa	39,190,000.00	27,775,225.00	(11,414,775.00)	70.87
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.02.5.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perseorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173,900,000.00	160,068,888.00	(11,811,112.00)	92.06
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.02.5.1.2	BELANJA OPERASI	173,900,000.00	160,068,888.00	(11,811,112.00)	92.06
	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Barang dan Jasa	173,900,000.00	160,068,888.00	(11,811,112.00)	92.06
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.02.5.1.1	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	4,000,000.00	3,935,000.00	(65,000.00)	98.38
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.02.5.1.2	BELANJA OPERASI	4,000,000.00	3,935,000.00	(65,000.00)	98.38
	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00	3,935,000.00	(65,000.00)	98.38

81A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.09	Pembayaran/Rubrikasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	353,697,940.00	351,442,925.00	(2,255,015.00)	99.36	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	353,697,940.00	351,442,925.00	(2,255,015.00)	99.36	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	353,697,940.00	351,442,925.00	(2,255,015.00)	99.36	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01.2.18.01.02	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	238,176,000.00	217,016,605.00	(21,159,395.00)	91.12	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	238,176,000.00	217,016,605.00	(21,159,395.00)	91.12	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	238,176,000.00	217,016,605.00	(21,159,395.00)	91.12	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	224,263,000.00	203,141,605.00	(21,121,395.00)	90.58	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	224,263,000.00	203,141,605.00	(21,121,395.00)	90.58	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	13,913,000.00	13,875,000.00	(38,000.00)	99.73	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01.01.5.2.2	Belanja Modal Perabotan dan Mesin	13,913,000.00	13,875,000.00	(38,000.00)	99.73	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.01	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	183,494,000.00	178,892,290.00	(4,601,710.00)	97.49	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.03.2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	183,494,000.00	178,892,290.00	(4,601,710.00)	97.49	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	116,229,000.00	112,796,490.00	(3,432,510.00)	97.05	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.03.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.03.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.03.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	115,979,000.00	112,546,490.00	(3,432,510.00)	97.04	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.03.2.01.02	<b>Asas-asas Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</b>	67,265,000.00	66,095,800.00	(1,169,200.00)	98.36	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.03.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	42,265,000.00	41,675,800.00	(589,200.00)	98.61	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.03.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.03.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42,265,000.00	41,675,800.00	(589,200.00)	98.61	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.03.2.01.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	25,000,000.00	24,420,000.00	(580,000.00)	97.68	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.03.2.01.02.5.2.2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25,000,000.00	24,420,000.00	(580,000.00)	97.68	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.03.2.01.02.5.2.5	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	986,668,168.00	902,601,330.00	(84,066,838.00)	91.48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	4	5
2.18.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01	<b>2</b>	986,698,168.00	902,601,330.00		(84,096,838.00)	92.48
2.18.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.01	<b>Pelayanan Perumahan dan Non Perumahan secara Terpadu Sifat Pictu dibidang Pemananan Modal yang menjadi Kemungkinan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	986,698,668.00	658,002,827.00		(72,696,441.00)	92.97
2.18.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.01.5.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perumahan dan Non Perumahan Berbasis Sistem Adyanan Perumahan Berbasis Teknologi secara Elektronik	888,918,668.00	619,241,227.00		(69,717,441.00)	92.16
2.18.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.01.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00		0.00	0.00
2.18.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.01.5.1.1.1	Belanja Pegawai	888,918,668.00	619,241,227.00		(69,717,441.00)	92.16
2.18.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	16,761,000.00		(3,239,000.00)	83.81
2.18.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	20,000,000.00	16,761,000.00		(3,239,000.00)	83.81
2.18.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.01.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	38,309,500.00	32,499,339.00		(5,890,161.00)	84.66
2.18.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.02	Pemertanaan Amortisasi Korekmen Perumahan dan Non Perumahan Perumahan Modal	38,309,500.00	32,499,339.00		(5,890,161.00)	84.66
2.18.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	38,309,500.00	32,499,339.00		(5,890,161.00)	84.66
2.18.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	38,309,500.00	32,499,339.00		(5,890,161.00)	84.66
2.18.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengabdian Masyarakat terhadap Masyarakat dan Non Perumahan	39,320,000.00	34,099,764.00		(5,220,236.00)	86.72
2.18.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	39,320,000.00	34,099,764.00		(5,220,236.00)	86.72
2.18.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39,320,000.00	34,099,764.00		(5,220,236.00)	86.72
2.18.2-18.3-31.2-07.01.05	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Pemananan Modal</b>	403,803,443.00	289,574,840.00		(114,248,603.00)	71.71
2.18.2-18.3-31.2-07.01.05.2.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Pemananan Modal yang menjadi Kemungkinan Daerah Kabupaten/Kota</b>	403,803,443.00	309,574,840.00		(71,248,603.00)	77.71
2.18.2-18.3-31.2-07.01.05.2.01.02	Koordinator dan Koordinator Pembinaan Pelaksanaan Perumahan Modal	43,607,451.00	32,322,000.00		(11,285,451.00)	74.12
2.18.2-18.3-31.2-07.01.05.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	43,607,451.00	32,322,000.00		(11,285,451.00)	74.12
2.18.2-18.3-31.2-07.01.05.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00
2.18.2-18.3-31.2-07.01.05.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43,607,451.00	32,322,000.00		(11,285,451.00)	74.12
2.18.2-18.3-31.2-07.01.05.2.01.03	Koordinator dan Koordinator Pengawasan Pelaksanaan Perumahan Modal	360,215,992.00	257,252,840.00		(102,963,152.00)	71.42
2.18.2-18.3-31.2-07.01.05.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	360,215,992.00	257,252,840.00		(102,963,152.00)	71.42
2.18.2-18.3-31.2-07.01.05.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	1,300,000.00	500,000.00		(800,000.00)	38.46
2.18.2-18.3-31.2-07.01.05.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	358,915,992.00	256,752,840.00		(102,163,152.00)	71.54

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	(Rp)	(%)
2.18.2-18.3-31.2-07.01.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	17,864,000.00	16,993,800.00	(870,200.00)	95.13	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman dan Non Penanaman yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17,864,000.00	16,993,800.00	(870,200.00)	95.13	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.06.2.01.01	Angkutan, Penyulih dan Pemeliharaan Data dan Informasi Penanaman dan Non Penanaman berbasis Sistem Pelayanan Penanaman Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	17,864,000.00	16,993,800.00	(870,200.00)	95.13	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.06.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	17,864,000.00	16,993,800.00	(870,200.00)	95.13	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.06.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.18.2-18.3-31.2-07.01.06.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17,864,000.00	16,993,800.00	(870,200.00)	95.13	
3.31.2-18.3-31.2-07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,805,400.00	1,523,000.00	(282,400.00)	84.36	
3.31.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,805,400.00	1,523,000.00	(282,400.00)	84.36	
3.31.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,805,400.00	1,523,000.00	(282,400.00)	84.36	
3.31.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,805,400.00	1,523,000.00	(282,400.00)	84.36	
3.31.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.31.2-18.3-31.2-07.01.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,805,400.00	1,523,000.00	(282,400.00)	84.36	
3.31.2-18.3-31.2-07.01.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1,433,812,720.00	1,251,154,443.00	(182,658,277.00)	87.26	
3.31.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1,433,812,720.00	1,251,154,443.00	(182,658,277.00)	87.26	
3.31.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01.03	Koordinasi, Seleksi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	102,451,804.00	91,188,421.00	(11,263,383.00)	89.01	
3.31.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	102,451,804.00	91,188,421.00	(11,263,383.00)	89.01	
3.31.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.31.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	102,451,804.00	91,188,421.00	(11,263,383.00)	89.01	
3.31.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01.04	Akreditasi, Sertifikasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Servis dan Prasarana Industri	549,218,916.00	535,779,832.00	(13,439,084.00)	97.19	
3.31.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	549,218,916.00	535,779,832.00	(13,439,084.00)	97.16	
3.31.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.31.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	549,218,916.00	535,779,832.00	(13,439,084.00)	97.16	
3.31.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01.04.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	4,500,800.00	4,500,000.00	(800.00)	100.00	
3.31.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01.04.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	4,500,800.00	4,500,000.00	(800.00)	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	(Rp)	(%)
3.11.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01.05	Kontribusi, Sediaan, dan Pelaksanaan Penderdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	782,142,000.00	626,193,192.00	(155,951,808.00)	80.06	
3.11.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	782,142,000.00	626,193,192.00	(155,951,808.00)	80.06	
3.11.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.11.2-18.3-31.2-07.01.02.2.01.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	782,142,000.00	626,193,192.00	(155,951,808.00)	80.06	
3.11.2-18.3-31.2-07.01.04	<b>Program Penyelidikan Sistem Informasi Industri Nasional</b>	54,111,800.00	44,357,100.00	(9,754,700.00)	81.97	
3.11.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, EUKI dan EPIK Kementerian Kabupaten/Kota</b>	54,111,800.00	44,357,100.00	(9,754,700.00)	81.97	
3.11.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.02	Desain dan Publikasi Data Informasi dan Aneka Industri Kabupaten/Kota melalui S200a	54,111,800.00	44,357,100.00	(9,754,700.00)	81.97	
3.11.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	54,111,800.00	44,357,100.00	(9,754,700.00)	81.97	
3.11.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.11.2-18.3-31.2-07.01.04.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54,111,800.00	44,357,100.00	(9,754,700.00)	81.97	
		0.00	(11,695,461,666.00)	(11,695,461,666.00)	0.00	

K. 1 A



**PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
		3	4		
2.23.2.23.2-24.0-00.01.00.00.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	6,486,357,527.00	6,040,929,653.00	(445,427,874.00)	93.11
2.23.2.23.2-24.0-00.01.01	<b>Program Peninjauan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	4,586,075,737.00	4,444,971,572.00	(141,104,165.00)	96.92
2.23.2.23.2-24.0-00.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	405,000.00	385,000.00	(20,000.00)	95.06
2.23.2.23.2-24.0-00.01.01.2.01.01	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	405,000.00	385,000.00	(20,000.00)	95.06
2.23.2.23.2-24.0-00.01.01.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	405,000.00	385,000.00	(20,000.00)	95.06
2.23.2.23.2-24.0-00.01.01.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.23.2.23.2-24.0-00.01.01.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	405,000.00	385,000.00	(20,000.00)	95.06
2.23.2.23.2-24.0-00.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	3,676,864,819.00	3,658,089,376.00	(18,775,443.00)	99.49
2.23.2.23.2-24.0-00.01.01.2.02.01	<b>Penyediaan Casf dan Tolong-molong ASN</b>	3,676,864,819.00	3,658,089,376.00	(18,775,443.00)	99.49
2.23.2.23.2-24.0-00.01.01.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,676,864,819.00	3,658,089,376.00	(18,775,443.00)	99.49
2.23.2.23.2-24.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,676,864,819.00	3,658,089,376.00	(18,775,443.00)	99.49
2.23.2.23.2-24.0-00.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	227,060,650.00	207,986,298.00	(19,074,352.00)	91.60
2.23.2.23.2-24.0-00.01.01.2.06.01	<b>Penyediaan Komponen Inventaris Lainnya/Perangkat Angkutan Kantor</b>	3,918,750.00	3,918,750.00	0.00	100.00
2.23.2.23.2-24.0-00.01.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,918,750.00	3,918,750.00	0.00	100.00
2.23.2.23.2-24.0-00.01.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.23.2.23.2-24.0-00.01.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,918,750.00	3,918,750.00	0.00	100.00
2.23.2.23.2-24.0-00.01.01.2.06.04	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	20,162,000.00	20,162,000.00	0.00	100.00
2.23.2.23.2-24.0-00.01.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	20,162,000.00	20,162,000.00	0.00	100.00

119

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5	6	(Rp)	%
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20,542,000.00	20,152,000.00	(350,000.00)	98.30		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	17,577,200.00	17,522,200.00	(54,000.00)	99.69		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.06.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	17,577,200.00	17,522,200.00	(54,000.00)	99.69		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.06.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.06.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17,577,200.00	17,522,200.00	(54,000.00)	99.69		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.06.08	Penyediaan Kurungan Tani	7,966,000.00	6,200,000.00	(1,759,950.00)	77.89		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.06.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	7,966,000.00	6,200,000.00	(1,759,950.00)	77.89		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.06.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7,966,000.00	6,200,000.00	(1,759,950.00)	77.89		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177,072,000.00	180,153,278.00	16,918,722.00	90.45		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	177,072,000.00	180,153,278.00	16,918,722.00	90.45		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	177,072,000.00	180,153,278.00	16,918,722.00	90.45		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,230,000.00	92,646,555.00	(7,583,445.00)	92.36		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99,230,000.00	92,646,555.00	(7,583,445.00)	92.36		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.07.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	10,230,000.00	3,135,400.00	(7,094,600.00)	30.65		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.07.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.07.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10,230,000.00	3,135,400.00	(7,094,600.00)	30.65		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.07.09.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	89,000,000.00	88,511,155.00	(488,845.00)	99.45		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.07.09.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89,000,000.00	88,511,155.00	(488,845.00)	99.45		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140,777,478.00	132,947,364.00	(7,830,114.00)	94.37		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Sewa Menyewa	965,000.00	870,000.00	(95,000.00)	90.16		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.08.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	965,000.00	870,000.00	(95,000.00)	90.16		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.08.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	965,000.00	870,000.00	(95,000.00)	90.16		

8-19



KODE REKERING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(Rp)	(%)
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47,820,000.00	40,467,854.00	(7,352,146.00)	84.63	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	47,820,000.00	40,467,854.00	(7,352,146.00)	84.63	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47,820,000.00	40,467,854.00	(7,352,146.00)	84.63	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91,992,476.00	91,509,410.00	(483,066.00)	99.47	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	91,992,476.00	91,509,410.00	(483,066.00)	99.47	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.04.5.1.1	Belanja Pegawai	750,000.00	0.00	(750,000.00)	0.00	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	91,242,476.00	91,509,410.00	(233,066.00)	99.75	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	441,728,492.00	354,017,078.00	(87,711,413.00)	80.14	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pesawat dan Perawatan Diras atau Kendaraan Diras Lainnya	39,190,000.00	36,331,700.00	(2,858,300.00)	92.71	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	39,190,000.00	36,331,700.00	(2,858,300.00)	92.71	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39,190,000.00	36,331,700.00	(2,858,300.00)	92.71	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196,858,492.00	146,294,714.00	(48,563,778.00)	75.33	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	196,858,492.00	146,294,714.00	(48,563,778.00)	75.33	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	196,858,492.00	146,294,714.00	(48,563,778.00)	75.33	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.06	Penyediaan Akrab dan Mekan Lainnya	22,000,000.00	4,107,000.00	(17,893,000.00)	34.23	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	12,000,000.00	4,107,000.00	(7,893,000.00)	34.23	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12,000,000.00	4,107,000.00	(7,893,000.00)	34.23	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	193,680,000.00	165,283,665.00	(28,396,335.00)	85.34	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	193,680,000.00	165,283,665.00	(28,396,335.00)	85.34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5	6	%
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	250,000.00	0.00	(250,000.00)	0.00	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	193,430,000.00	165,203,665.00	(28,146,335.00)	85.45	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01.02	Program Pembinaan Perpustakaan	1,221,393,650.00	1,046,426,814.00	(174,966,836.00)	88.95	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01	Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	922,731,000.00	828,338,589.00	(94,392,411.00)	89.77	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01	Pengembangan dan Penyebaran Layanan Perpustakaan Elektronik	133,581,500.00	127,602,958.00	(5,978,542.00)	95.52	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	93,501,500.00	87,652,058.00	(5,849,442.00)	93.66	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01.5.1.2	Belanja Pegawai	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	100.00	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01.5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	91,301,500.00	85,372,058.00	(5,929,442.00)	93.51	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	40,000,000.00	39,948,900.00	(51,100.00)	99.87	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01.5.2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	40,000,000.00	39,948,900.00	(51,100.00)	99.87	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01.5.3						
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	59,077,000.00	48,563,300.00	(10,513,700.00)	82.20	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	59,077,000.00	48,563,300.00	(10,513,700.00)	82.20	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.04.5.1.1	Belanja Pegawai	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	100.00	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	57,947,000.00	47,433,300.00	(10,513,700.00)	81.86	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	8,523,500.00	5,117,000.00	(3,406,500.00)	60.03	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	8,523,500.00	5,117,000.00	(3,406,500.00)	60.03	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8,523,500.00	5,117,000.00	(3,406,500.00)	60.03	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.06	Peningkatan Kualitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56,490,000.00	54,801,610.00	(1,688,390.00)	97.01	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	56,490,000.00	54,801,610.00	(1,688,390.00)	97.01	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	56,490,000.00	54,801,610.00	(1,688,390.00)	97.01	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	145,287,500.00	134,530,160.00	(10,757,340.00)	92.60	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	145,287,500.00	134,530,160.00	(10,757,340.00)	92.60	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.07.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	145,287,500.00	134,530,160.00	(10,757,340.00)	92.60	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.07.5.1.3						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	5 (Rp)	6 (%)	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35,037,500.00	31,205,020.00	(3,832,480.00)	89.06	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.07.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	110,250,000.00	103,325,140.00	(6,924,860.00)	93.72	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.07.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	110,250,000.00	103,325,140.00	(6,924,860.00)	93.72	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.08	Aspek Anggaran dan Biaya	487,775,000.00	488,486,500.00	(710,284,440.00)	87.23	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	396,775,000.00	331,631,600.00	(65,143,400.00)	84.87	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.08.5.1.1	Belanja Pegawai	775,000.00	0.00	(775,000.00)	0.00	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	396,000,000.00	331,631,600.00	(64,368,400.00)	85.03	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.08.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	76,996,000.00	76,854,900.00	(141,100.00)	99.82	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.08.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	41,996,000.00	41,958,000.00	(38,000.00)	99.91	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.08.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35,000,000.00	34,896,900.00	(103,100.00)	99.71	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.09	Pengeluaran dan Aspek Anggaran Bahan Produksi	10,670,000.00	10,520,000.00	(150,000.00)	98.59	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,670,000.00	3,570,000.00	(1,900,000.00)	97.26	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,670,000.00	3,570,000.00	(1,900,000.00)	97.26	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.09.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	7,000,000.00	6,950,000.00	(50,000.00)	99.29	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.09.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	7,000,000.00	6,950,000.00	(50,000.00)	99.29	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.10	Pengurusan Data dan Informasi/ Pemasukan, Tenaga Pemasukan dan Ausbakan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41,330,500.00	38,719,000.00	(2,611,500.00)	93.69	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.10.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	16,330,500.00	13,710,000.00	(2,620,500.00)	84.01	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.10.5.1.1	Belanja Pegawai	565,000.00	565,000.00	0.00	100.00	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.10.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15,765,500.00	13,145,000.00	(2,620,500.00)	83.44	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.10.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	100.00	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.10.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	100.00	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01	Pembudayaan Demar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	286,662,630.00	286,086,226.00	(576,404.00)	85.47	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Seluruh Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	50,527,400.00	46,277,250.00	(4,250,150.00)	91.49	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	48,517,400.00	44,371,250.00	(4,146,150.00)	91.33	
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	

21A

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		AMGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
		3	4	5	6
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.01.5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	48,537,400.00	44,321,250.00	(4,206,150.00)	91.33
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	2,000,000.00	1,900,000.00	(100,000.00)	95.00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,000,000.00	1,900,000.00	(100,000.00)	95.00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.03	Pembelian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	204,985,000.00	172,425,400.00	(32,559,600.00)	84.08
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	149,631,000.00	122,375,400.00	(27,255,600.00)	81.79
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	149,631,000.00	122,375,400.00	(27,255,600.00)	81.79
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.03.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	55,334,000.00	49,950,000.00	(5,384,000.00)	90.27
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.03.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55,334,000.00	49,950,000.00	(5,384,000.00)	90.27
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Nilai-Nilai Sosial	43,170,250.00	39,537,575.00	(3,632,675.00)	91.59
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	43,170,250.00	39,537,575.00	(3,632,675.00)	91.59
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43,170,250.00	39,537,575.00	(3,632,675.00)	91.59
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.04.5.1.3	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	50,000,000.00	37,157,580.00	(12,842,420.00)	62.88
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.04.5.1.3.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	39,990,000.00	27,389,300.00	(12,600,700.00)	68.99
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.04.5.1.3.2	Program Pelestarian Naskah Kuno MIB Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000.00	27,588,300.00	(2,411,700.00)	92.63
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.04.5.1.3.2.1	Pengembangan, Pencetakan dan Pengalihan/pelepasan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Diarsipkan dan Diayaknakan	37,890,000.00	16,386,300.00	(21,503,700.00)	43.25
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.04.5.1.3.2.2	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.04.5.1.3.2.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.04.5.1.3.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37,890,000.00	16,386,300.00	(21,503,700.00)	43.25
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.04.5.1.3.2.2.2.1	<b>BELANJA MODAL</b>	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.04.5.1.3.2.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02	<b>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditranskripkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	20,000,000.00	19,569,280.00	(430,720.00)	97.85
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	20,000,000.00	19,569,280.00	(430,720.00)	97.85
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.01.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	20,000,000.00	19,569,280.00	(430,720.00)	97.85

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01.5.2.5	Belanja Modal Asst Titap Lainnya	20,000,000.00	19,569,280.00	(430,720.00)	97.83	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02	Program Pengelolaan Asrip	548,185,290.00	412,236,486.00	(135,948,804.00)	75.20	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01	Pengelolaan Asrip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	45,678,900.00	40,194,552.00	(5,484,350.00)	87.99	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01	Pengadaan dan Pengurusan Asip Dinamis	28,460,650.00	25,764,052.00	(2,696,600.00)	90.53	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	28,460,650.00	25,764,052.00	(2,696,600.00)	90.53	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28,460,650.00	25,764,052.00	(2,696,600.00)	90.53	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01.5.2.5	Belanja Modal Asst Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.03	Pengawasan Asip Dinamis Kawasan Kabupaten/Kota	17,218,250.00	14,430,500.00	(2,787,750.00)	83.81	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	17,218,250.00	14,430,500.00	(2,787,750.00)	83.81	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17,218,250.00	14,430,500.00	(2,787,750.00)	83.81	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02	Pengelolaan Asrip Statis Daerah Kabupaten/Kota	82,952,000.00	79,986,970.00	(2,965,030.00)	96.44	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Pemeliharaan, dan Akses Asrip Statis	82,952,000.00	79,986,970.00	(2,965,030.00)	96.44	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	42,952,000.00	42,289,970.00	(662,030.00)	98.46	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42,952,000.00	42,289,970.00	(662,030.00)	98.46	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	40,000,000.00	37,707,000.00	(2,293,000.00)	94.27	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40,000,000.00	37,707,000.00	(2,293,000.00)	94.27	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.03	Pengelolaan Sinyal Jaringan Informasi Komunikasi Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	479,554,390.00	282,044,966.00	(197,509,424.00)	59.01	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.03.01	Penyelesaian Informasi, Akses dan Layanan Komunikasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui J003	205,097,540.00	152,974,031.00	(52,123,509.00)	74.59	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.03.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	205,097,540.00	152,974,031.00	(52,123,509.00)	74.59	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.03.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.03.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	205,097,540.00	152,974,031.00	(52,123,509.00)	74.59	

Handwritten mark

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	(Rp)	(%)
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.03.02	Pembelayaan Kapasitas Unit Kebersihan dan Lembaga Kebersihan Daerah Kabupaten/Kota	214,456,850.00	139,070,035.00	(75,385,915.00)	64.86	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.03.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	189,456,850.00	119,177,885.00	(70,278,965.00)	62.91	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.03.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	189,456,850.00	119,177,885.00	(70,278,965.00)	62.91	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.03.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	24,000,000.00	19,893,050.00	(5,106,950.00)	79.57	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.03.02.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	25,000,000.00	19,893,050.00	(5,106,950.00)	79.57	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.01.01	<b>Program Perlindungan Dan Penyelamatan Asrip</b>	21,950,660.00	17,224,100.00	(5,326,560.00)	73.14	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.01.01.5.1	<b>Pemusnahan Asrip Dilengkapi Pemusnahan Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun</b>	23,550,690.00	17,224,100.00	(6,326,590.00)	73.14	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.01.01.5.1.1	Analisis, Pemetaan dan Pelaksanaan Pemusnahan Asrip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	16,752,690.00	13,578,900.00	(3,181,790.00)	81.01	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.01.01.5.1.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	16,752,690.00	13,578,900.00	(3,181,790.00)	81.01	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.01.01.5.1.1.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.01.01.5.1.1.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16,752,690.00	13,578,900.00	(3,181,790.00)	81.01	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.01.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.01.01.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.01.02	<b>Analisis dan Pelaksanaan Asrip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun</b>	6,798,000.00	3,653,200.00	(3,144,800.00)	53.74	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6,798,000.00	3,653,200.00	(3,144,800.00)	53.74	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.01.02.5.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6,798,000.00	3,653,200.00	(3,144,800.00)	53.74	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.04.2.01	<b>Program Perbaikan Penggunaan Asrip</b>	48,062,250.00	42,913,100.00	(5,149,149.00)	89.29	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.04.2.01.01	<b>Pelayanan Lain Penggunaan Asrip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</b>	48,062,250.00	42,913,100.00	(5,149,149.00)	89.29	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.04.2.01.01.5.1	Analisis dan Penetapan SOP Penggunaan Asrip yang Bersifat Tertutup	14,689,250.00	10,911,576.00	(3,777,674.00)	87.90	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.04.2.01.01.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	11,689,250.00	10,911,576.00	(777,674.00)	93.35	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.04.2.01.01.5.1.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.04.2.01.01.5.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11,689,250.00	10,911,576.00	(777,674.00)	93.35	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.04.2.01.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	3,000,000.00	2,000,000.00	(1,000,000.00)	66.67	

6

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.24.2-23.2-24.0-00.01.04.2.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,000,000.00	2,000,000.00	(1,000,000.00)	66.67
2.24.2-23.2-24.0-00.01.04.2.01.02	Persediaan Gantar dan Aneka-anak dari Penggunaan Aneka yang Besar dan Terbatas	33,272,000.00	36,001,525.00	(2,729,525.00)	99.99
2.24.2-23.2-24.0-00.01.04.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	14,272,000.00	11,081,525.00	(3,190,475.00)	77.10
2.24.2-23.2-24.0-00.01.04.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.2-23.2-24.0-00.01.04.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14,272,000.00	11,081,525.00	(3,190,475.00)	77.10
2.24.2-23.2-24.0-00.01.04.2.01.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	19,000,000.00	18,920,000.00	(80,000.00)	99.58
2.24.2-23.2-24.0-00.01.04.2.01.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,000,000.00	18,920,000.00	(80,000.00)	99.58
		0.00	(6,046,925,653.00)	(6,046,925,653.00)	0.00

Handwritten signature or initials.

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

URUSAN PEMERINTAHAN KODE REKENING	URUSAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	
		3	4	5	
URUSAN PEMERINTAHAN SELIAN PERKOTA (Esai Persepsi, Pemuda dan Olahraga)					
3.26.3-26.2-19.0-00.01.00.00.00.4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	29,000,000,000.00	28,154,035,255.00	(845,964,745.00)	97.08
3.26.3-26.2-19.0-00.01.00.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	29,000,000,000.00	28,154,035,255.00	(845,964,745.00)	97.08
3.26.3-26.2-19.0-00.01.00.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	28,850,000,000.00	27,782,542,855.00	(1,067,457,945.00)	96.30
3.26.3-26.2-19.0-00.01.00.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	150,000,000.00	371,493,200.00	221,493,200.00	247.66
2.19.3-26.2-19.0-00.01.00.00.00.5	<b>BELAJA DAERAH</b>	36,824,924,481.00	33,162,369,928.74	(3,662,554,552.26)	90.05
2.19.3-26.2-19.0-00.01.00.00.00.5.1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Kepemudaan	2,648,432,250.00	2,542,349,570.00	(106,082,680.00)	95.99
2.19.3-26.2-19.0-00.01.00.00.00.5.1.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelajar Kabupaten/Kota, Wirasatwa Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1,256,523,000.00	1,206,572,920.00	(49,949,080.00)	96.79
2.19.3-26.2-19.0-00.01.00.00.00.5.1.2	Kontribusi, Saran-saran dan Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat Daya Saling Kita dan/atau Pemuda	140,909,550.00	118,940,850.00	(21,968,700.00)	84.40
2.19.3-26.2-19.0-00.01.00.00.00.5.1.1	<b>BELAJA OPERASI</b>	140,909,550.00	118,940,850.00	(21,968,700.00)	84.40
2.19.3-26.2-19.0-00.01.00.00.00.5.1.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.19.3-26.2-19.0-00.01.00.00.00.5.1.1.2	Honorarium dan Jasa	140,909,550.00	118,940,850.00	(21,968,700.00)	84.40
2.19.3-26.2-19.0-00.01.00.00.00.5.1.2	Pembelian Pengadaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	39,457,950.00	33,566,900.00	(5,891,050.00)	85.07
2.19.3-26.2-19.0-00.01.00.00.00.5.1.1	<b>BELAJA OPERASI</b>	39,457,950.00	33,566,900.00	(5,891,050.00)	85.07
2.19.3-26.2-19.0-00.01.00.00.00.5.1.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.19.3-26.2-19.0-00.01.00.00.00.5.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39,457,950.00	33,566,900.00	(5,891,050.00)	85.07
2.19.3-26.2-19.0-00.01.00.00.00.5.1.2	Pengabdian Kapemudaan, Kepengajaran dan Kesukmadesaan Pemuda	1,376,135,900.00	1,354,066,170.00	(22,068,730.00)	98.40

819



KODE REKEMENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI		(Rp)	(%)
		3	4	5			
2.19.3-26.2-19.0-00.01.02.2.01.08.5.1 2.19.3-26.2-19.0-00.01.02.2.01.08.5.1.1 2.19.3-26.2-19.0-00.01.02.2.01.08.5.1.2	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	1,316,135,500.00 500,000.00 1,375,635,500.00	1,354,066,170.00 250,000.00 1,353,816,170.00	(22,069,330.00) (250,000.00) (21,819,330.00)	98.40 50.00 98.41		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02	<b>Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	4,091,909,250.00	4,035,775,650.00	(56,133,600.00)	94.06		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	4,091,909,250.00	4,035,775,650.00	(56,133,600.00)	94.06		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	601,909,250.00	636,666,050.00	(34,757,000.00)	93.81		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200,000,000.00	199,109,600.00	(890,400.00)	99.55		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.02.5.1.5	Belanja Hibah						
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Feasihargaan</b>	4,752,025,827.00	4,134,721,311.70	(617,304,515.30)	87.01		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.02	<b>Penyenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	209,559,000.00	185,451,500.00	(24,107,500.00)	88.53		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.02.01	Penyenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	209,559,000.00	185,451,500.00	(24,107,500.00)	88.53		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	209,559,000.00	185,451,500.00	(24,107,500.00)	88.53		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai				0.00		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	209,559,000.00	185,451,500.00	(24,107,500.00)	88.53		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.03	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	3,034,406,000.00	2,694,212,970.00	(340,193,030.00)	88.79		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Kecamatan Kabupaten/Kota	3,034,406,000.00	2,694,212,970.00	(340,193,030.00)	88.79		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.03.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,034,406,000.00	2,694,212,970.00	(340,193,030.00)	88.79		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.03.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.03.03.5.1.1.1	Belanja Barang dan Jasa	298,815,000.00	245,000,450.00	(53,784,550.00)	82.04		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.03.03.5.1.2	Belanja Hibah	2,735,593,000.00	2,449,186,520.00	(286,406,480.00)	89.53		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.03.03.5.1.5							
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.05	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Regional</b>	1,507,662,827.00	1,255,056,841.70	(252,605,985.30)	83.25		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.05.01	Penyenggaraan, Pengembangan dan Pemasangan Festival dan Olahraga Regional	396,400,000.00	275,789,200.00	(120,640,800.00)	69.57		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.05.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	396,400,000.00	275,789,200.00	(120,640,800.00)	69.57		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.05.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.05.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	396,400,000.00	275,789,200.00	(120,640,800.00)	69.57		

Handwritten mark or signature

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.05.01.5.1.5	Belanja Hibah	118,590,000.00	93,350,000.00	(25,000,000.00)	78.91	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.05.03	Penyusunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Pustaka Daerah Riwayat	1,111,332,827.00	979,267,641.70	(131,965,185.30)	88.12	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.05.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	706,317,076.00	609,478,474.00	(96,838,602.00)	86.29	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.05.03.5.1.1	Belanja Pegawai	1,750,000.00	1,500,000.00	(250,000.00)	85.71	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.05.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	704,567,076.00	607,978,474.00	(96,588,602.00)	86.29	
2.19.3-25.2-19.0-00.01.03.2.05.03.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	404,915,751.00	369,789,167.70	(35,126,583.30)	91.32	
2.19.3-25.2-19.0-00.01.03.2.05.03.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Meubel	75,100,000.00	69,534,800.00	(5,565,200.00)	92.59	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.05.03.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	329,815,751.00	300,254,367.70	(29,561,383.30)	91.04	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.05.03	Pemeliharaan Gedung Tradisional dalam Masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.05.05.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.05.05.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.03.2.05.05.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.04	<b>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	100.00	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.04.2.01	<b>Awak dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	100.00	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	100.00	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.04.2.01.05.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	100.00	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.04.2.01.05.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.19.3-26.2-19.0-00.01.04.2.01.05.1.5	Belanja Hibah	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	100.00	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01	<b>Program Peningkatkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	9,821,685,954.00	8,921,723,387.00	(909,962,517.00)	90.84	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.01	<b>Pencapaian, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	34,902,000.00	30,473,600.00	(4,428,400.00)	87.31	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	34,902,000.00	30,473,600.00	(4,428,400.00)	87.31	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	34,902,000.00	30,473,600.00	(4,428,400.00)	87.31	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34,902,000.00	30,473,600.00	(4,428,400.00)	87.31	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	8,887,671,738.00	7,368,685,678.00	(1,518,986,060.00)	82.89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.02.01	Aprovasian Gaji dan Tunjangan ASN	8,000,621,238.00	7,368,685,678.00	(631,935,560.00)	92.10
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	8,000,621,238.00	7,368,685,678.00	(631,935,560.00)	92.10
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	8,000,621,238.00	7,368,685,678.00	(631,935,560.00)	92.10
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.03.02.01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	120,550,000.00	120,549,861.00	(138.00)	100.00
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.03.02.01.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah SHPD	120,550,000.00	120,549,861.00	(138.00)	100.00
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.03.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	120,550,000.00	120,549,861.00	(138.00)	100.00
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.03.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.03.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	120,300,000.00	120,299,861.00	(139.00)	100.00
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	608,606,100.00	357,446,123.00	(251,160,000.00)	87.57
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,589,100.00	7,586,000.00	(23,100.00)	98.55
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1,589,100.00	1,586,000.00	(23,100.00)	98.55
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,589,100.00	1,586,000.00	(23,100.00)	98.55
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	96,850,000.00	95,038,200.00	(1,811,800.00)	98.17
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	96,850,000.00	95,038,200.00	(1,811,800.00)	98.17
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.02.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	96,850,000.00	95,038,200.00	(1,811,800.00)	98.17
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23,747,000.00	23,747,000.00	0.00	100.00
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	23,747,000.00	23,747,000.00	0.00	100.00
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23,747,000.00	23,747,000.00	0.00	100.00
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31,750,000.00	25,547,750.00	(6,202,250.00)	80.47
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	31,750,000.00	25,547,750.00	(6,202,250.00)	80.47
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.05.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.05.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31,750,000.00	25,547,750.00	(6,202,250.00)	80.47
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SHPD	254,470,000.00	211,545,173.00	(42,924,827.00)	83.17

81A

KODE REKENING	UNJUKAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(Rp)	(%)
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	254,470,000.00	211,545,173.00	(42,924,827.00)	85.13	
0.00		0.00	0.00	0.00		
254,470,000.00		211,545,173.00	(42,924,827.00)	85.13		
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.09.5.1.2	<b>Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah</b> Penyediaan Jasa Sewa Menyaraf	686,775,000.00	530,808,341.00	(105,966,659.00)	82.36	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.01		3,430,000.00	3,000,000.00	(430,000.00)	87.46	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.01.5.1		3,430,000.00	3,000,000.00	(430,000.00)	87.46	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.06.01.5.1.2	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	
3,430,000.00		3,000,000.00	(430,000.00)	87.46		
3,430,000.00		3,000,000.00	(430,000.00)	87.46		
3.26.3-16.2-19.0-00.01.01.2.08.02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	633,345,000.00	527,608,341.00	(105,736,659.00)	83.34	
3.26.3-16.2-19.0-00.01.01.2.08.02.5.1		633,345,000.00	527,608,341.00	(105,736,659.00)	83.34	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.08.02.5.1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.08.02.5.1.2	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	633,345,000.00	527,608,341.00	(105,736,659.00)	83.34	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.08.01.5.1.2		0.00	0.00	0.00	0.00	
633,345,000.00		527,608,341.00	(105,736,659.00)	83.34		
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Asuransi Perawatan Otas atau Kendaraan Dinas Jabatan	630,417,568.00	511,761,784.00	(108,655,784.00)	82.81	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.09.01		311,361,958.00	277,126,265.00	(94,235,693.00)	69.73	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.09.01.5.1		311,361,958.00	277,126,265.00	(94,235,693.00)	69.73	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.09.01.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	
311,361,958.00		277,126,265.00	(94,235,693.00)	69.73		
311,361,958.00		277,126,265.00	(94,235,693.00)	69.73		
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.09.01.5.1.2	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Asuransi</b> Perawatan Otas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00		0.00	0.00	0.00		
0.00		0.00	0.00	0.00		
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.09.06	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Asuransi</b> Perawatan Otas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22,200,000.00	14,490,000.00	(7,710,000.00)	65.27	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.09.06.5.1		22,200,000.00	14,490,000.00	(7,710,000.00)	65.27	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.09.06.5.1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.09.06.5.1.2	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	22,200,000.00	14,490,000.00	(7,710,000.00)	65.27	
0.00		0.00	0.00	0.00		
22,200,000.00		14,490,000.00	(7,710,000.00)	65.27		
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.09.09	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Asuransi</b> Perawatan Otas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90,610,000.00	90,608,659.00	(1,341.00)	100.00	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.09.09.5.1		90,610,000.00	90,608,659.00	(1,341.00)	100.00	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.09.09.5.1.1		230,000.00	250,000.00	20,000.00	100.00	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.09.09.5.1.2	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	90,380,000.00	90,359,659.00	(20,341.00)	100.00	
0.00		0.00	0.00	0.00		
90,380,000.00		90,359,659.00	(20,341.00)	100.00		

219

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	5 (Rp)	6 (%)
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.09.1.1	Arsitektur/Qualified Service dan Asuransi Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	196,259,608.00	191,535,860.00	(4,723,748.00)	97.59
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.09.1.1.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	196,259,608.00	191,535,860.00	(4,723,748.00)	97.59
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.09.1.1.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
3.26.3-26.2-19.0-00.01.01.2.09.1.1.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	196,259,608.00	191,535,860.00	(4,723,748.00)	97.59
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>	14,103,868.461.00	12,812,178,867.04	(1,291,688,593.96)	90.84
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	1,066,450,000.00	945,112,339.34	(121,337,660.66)	88.67
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1,066,450,000.00	945,112,339.34	(121,337,660.66)	88.62
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	9,150,000.00	2,250,000.00	(7,100,000.00)	24.26
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	657,100,000.00	634,746,669.16	(22,353,330.84)	96.60
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	900,000,000.00	308,115,670.18	(591,884,329.82)	77.03
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.01.03.5.1.2.01	<b>BELANJA MODAL</b>	300,000,000.00	208,987,128.15	(91,012,871.85)	69.66
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.01.03.5.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100,000,000.00	99,128,542.03	(871,457.97)	99.13
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.01.03.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi				
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02	<b>Peningkatan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	9,172,057,236.00	8,266,552,070.49	(805,505,165.51)	90.47
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3,241,042,706.00	3,073,780,940.69	(167,261,765.31)	94.84
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,241,042,706.00	3,073,780,940.69	(167,261,765.31)	94.84
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.03.5.1.1	Belanja Pegawai	18,000,000.00	0.00	(18,000,000.00)	0.00
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,223,042,706.00	3,073,780,940.69	(149,261,765.31)	95.37
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.04	<b>Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Selain dan Pasaranya dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	3,197,538,180.00	2,566,544,441.87	(630,993,738.13)	80.42
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,197,538,180.00	2,566,544,441.87	(630,993,738.13)	80.42
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.04.5.1.1	Belanja Pegawai	3,197,538,180.00	2,566,544,441.87	(630,993,738.13)	80.42
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.04.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.04.5.2.1	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.04.5.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.04.5.2.3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BIERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	4	5	6
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.02	Anekaan Destinasi Pariwisata Berkeadilan dalam Pengelolaan Ekowisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.794.476.350,00	2.626.226.688,00		(78.249.662,00)	97,11	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.654.476.350,00	2.583.001.688,00		(71.474.662,00)	97,31	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.07.5.1.1	Belanja Pegawai	900.000,00	0,00		(900.000,00)	0,00	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.653.576.350,00	2.583.001.688,00		(70.574.662,00)	97,34	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.07.5.2	BELANJA MODAL	90.000.000,00	43.225.000,00		(46.775.000,00)	86,45	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.02.07.5.2.5	Belanja Modal Asat, Tetap Lainnya	50.000.000,00	43.225.000,00		(6.775.000,00)	86,45	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.900.361.275,00	3.600.514.457,21		(299.846.767,79)	92,31	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Perawatan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.314.615.535,00	3.122.672.257,21		(182.943.267,79)	94,54	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.039.765.525,00	2.874.074.783,21		(165.690.741,79)	94,55	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.03.04.5.1.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	750.000,00		(250.000,00)	75,00	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.03.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.038.765.525,00	2.871.324.783,21		(167.440.741,79)	94,56	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	274.850.000,00	251.597.474,00		(23.252.526,00)	94,45	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.03.04.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	184.850.000,00	155.399.914,00		(29.450.086,00)	94,27	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.03.04.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Bangunan, dan Irigasi	110.000.000,00	104.197.560,00		(5.802.440,00)	94,71	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.03.06	Pembinaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	387.322.750,00	311.630.800,00		(75.691.950,00)	80,46	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	387.322.750,00	311.630.800,00		(75.691.950,00)	80,46	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.03.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.03.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	387.322.750,00	311.630.800,00		(75.691.950,00)	80,46	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.03.07	Anekaan Destinasi Pariwisata Berkeadilan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	198.422.600,00	255.711.400,00		(57.288.800,00)	28,22	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	86.322.950,00	43.219.400,00		(43.103.550,00)	50,07	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.03.07.5.1.1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00		0,00	100,00	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.03.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	85.822.950,00	42.719.400,00		(43.103.550,00)	49,78	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.03.07.5.2	BELANJA MODAL	112.100.000,00	111.992.000,00		(8.000,00)	99,96	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.03.07.5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.02.2.03.07.5.2.2	Belanja Modal Perabotan dan Mesin	112.100.000,00	111.992.000,00		(108.000,00)	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5	6	7
3.26.3-26.2-19.0-00.01.03.2.01.01	Program Pemecatan Perintis	1.032.164.969,00	777.142.425,00	(255.021.644,00)	75,29	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.03.2.01.01.5.1.1	Pemecatan Perintis Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Ductined dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.032.164.969,00	777.142.425,00	(255.021.644,00)	75,29	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.03.2.01.01	Pengujian Ponsel melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik dalam dan Luar Negeri	591.523.069,00	498.512.145,00	(93.010.924,00)	84,28	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	531.773.869,00	440.262.145,00	(91.488.924,00)	82,80	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.03.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.03.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	531.273.869,00	439.762.145,00	(91.488.924,00)	82,78	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	59.750.000,00	58.220.000,00	(1.530.000,00)	97,44	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.03.2.01.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.750.000,00	58.220.000,00	(1.530.000,00)	97,44	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.03.2.01.02	Fasilitas Kegiatan Pemasyarakatan Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	440.642.000,00	278.630.280,00	(162.010.720,00)	63,23	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	440.642.000,00	278.630.280,00	(162.010.720,00)	63,23	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.03.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	50,00	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.03.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	440.142.000,00	278.380.280,00	(161.760.720,00)	63,25	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	950.850.000,00	941.549.500,00	(9.300.500,00)	99,02	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berkegiatan, Berprestasi dan Berinteraksi bagi Inovasi Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	950.850.000,00	941.549.500,00	(9.300.500,00)	99,02	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	950.850.000,00	947.549.500,00	(3.300.500,00)	99,02	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	66,67	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.04.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	66,67	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.04.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	950.100.000,00	941.049.500,00	(9.050.500,00)	99,05	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.04.2.01.01.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	950.100.000,00	941.049.500,00	(9.050.500,00)	99,05	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.015.903.988,00	2.532.704.868,00	(483.199.120,00)	83,98	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.05.2.01	Peningkatan Aparat Sertifikasi dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	3.015.903.988,00	2.532.704.868,00	(483.199.120,00)	83,98	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.05.2.01.02	BELANJA OPERASI	598.765.000,00	490.632.680,00	(108.132.320,00)	81,94	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	598.765.000,00	490.632.680,00	(108.132.320,00)	81,94	

27A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	(Rp)	(% )
1	2					
3.26.3-26.2-19.0-00.01.05.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	430,000.00	0.00	(430,000.00)	0.00	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.05.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	598,335,050.00	490,632,680.00	(107,702,370.00)	82.08	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.05.2.01.05	Facilities Proses Kreatif, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2,079,849,430.00	1,822,440,038.00	(257,409,392.00)	87.62	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.05.2.01.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,079,849,430.00	1,822,440,038.00	(257,409,392.00)	87.62	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.05.2.01.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.26.3-26.2-19.0-00.01.05.2.01.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,079,849,430.00	1,822,440,038.00	(257,409,392.00)	87.62	
3.28.3-26.2-19.0-00.01.05.2.01.06	Facilities Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	337,298,500.00	219,632,150.00	(117,666,350.00)	65.12	
3.28.3-26.2-19.0-00.01.05.2.01.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	337,298,500.00	219,632,150.00	(117,666,350.00)	65.12	
3.28.3-26.2-19.0-00.01.05.2.01.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.28.3-26.2-19.0-00.01.05.2.01.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	337,298,500.00	219,632,150.00	(117,666,350.00)	65.12	
		0.00	(5,008,334,673.74)	(5,008,334,673.74)	0.00	



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

URUSAN PEMERINTAHAN Organisasi	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN PERUBAHAN Desas Pertanian dan Pangan	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
			KODE REKENING	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)	(%)
				1	3		4	5
3.27.3-27.2-09.3-25.01.00.0.00.00.4		<b>PERDAPATAN DAERAH</b>	480.000.000,00	490.980.585,00	10.980.585,00	103,95		
3.27.3-27.2-09.3-25.01.00.0.00.00.4.1		<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	480.000.000,00	490.980.585,00	10.980.585,00	103,95		
3.27.3-27.2-09.3-25.01.00.0.00.00.4.1.2		Retribusi Daerah	480.000.000,00	490.980.585,00	10.980.585,00	103,95		
2.09.3-27.2-09.3-25.01.00.0.00.00.5		<b>BELANJA DAERAH</b>	15.585.819.605,00	13.982.060.916,90	(1.603.758.688,10)	89,20		
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01		Program Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.142.287.240,00	8.539.967.798,00	(602.319.442,00)	93,41		
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.660.000,00	16.943.450,00	(10.716.550,00)	61,29		
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.660.000,00	16.943.450,00	(10.716.550,00)	61,29		
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.01.01.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>	17.660.000,00	16.943.450,00	(716.550,00)	95,94		
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.01.01.5.1.1		Belanja Pegawai	17.660.000,00	16.943.450,00	(716.550,00)	95,94		
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.01.01.5.1.2		Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	8.068.354.887,00	7.512.713.651,00	(555.641.236,00)	93,11		
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.068.354.887,00	7.512.713.651,00	(555.641.236,00)	93,11		
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.02.01.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>	8.068.354.887,00	7.512.713.651,00	(555.641.236,00)	93,11		
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.02.01.5.1.1		Belanja Pegawai	8.068.354.887,00	7.512.713.651,00	(555.641.236,00)	93,11		
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	347.438.800,00	334.345.200,00	(13.093.600,00)	96,27		
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi/Peralatan Bangunan Kantor	7.283.800,00	6.504.800,00	(789.000,00)	89,30		
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.01.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>	7.283.800,00	6.504.800,00	(789.000,00)	89,30		
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.01.5.1.1		Belanja Program	0,00	0,00	0,00	0,00		

819

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	(Rp)	(%)
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7,283,800.00	6,994,800.00	(289,000.00)	96.03	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170,891,000.00	123,100,000.00	(47,791,000.00)	94.05	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6.00	6.00	0.00	100.00	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.02.5.1.1	Belanja Pegawai	6.00	6.00	0.00	100.00	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	130,891,000.00	123,100,000.00	(7,791,000.00)	94.05	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.02.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	130,891,000.00	123,100,000.00	(7,791,000.00)	94.05	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,209,000.00	22,171,170.00	(2,037,830.00)	91.58	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	24,209,000.00	22,171,170.00	(2,037,830.00)	91.58	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24,209,000.00	22,171,170.00	(2,037,830.00)	91.58	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,530,000.00	15,480,550.00	(49,450.00)	99.68	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.05.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	15,530,000.00	15,480,550.00	(49,450.00)	99.68	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.05.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.05.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15,530,000.00	15,480,550.00	(49,450.00)	99.68	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.09	Perencanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SWPD	169,525,000.00	166,598,680.00	(2,926,320.00)	98.27	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	169,525,000.00	166,598,680.00	(2,926,320.00)	98.27	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	169,525,000.00	166,598,680.00	(2,926,320.00)	98.27	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemertajahan Usulan Pemerintahan Daerah	55,480,000.00	50,167,900.00	(5,312,100.00)	90.47	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surel Menyurat	5,380,000.00	5,380,000.00	0.00	100.00	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.08.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5,380,000.00	5,380,000.00	0.00	100.00	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5,380,000.00	5,380,000.00	0.00	100.00	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Konsultasi Sumber Daya Air dan Limbah	50,100,000.00	44,787,900.00	(5,312,100.00)	89.40	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.08.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	50,100,000.00	44,787,900.00	(5,312,100.00)	89.40	
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.08.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	

8.17

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50,100,000.00	44,787,900.00	(5,312,100.00)	89.40
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09	Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Pemungutan Uraian Pemertintahan Daerah	653,353,553.00	625,797,597.00	(27,555,956.00)	95.79
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	314,787,554.00	296,544,392.00	(18,243,162.00)	94.20
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	314,787,554.00	296,544,392.00	(18,243,162.00)	94.20
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	314,787,554.00	296,544,392.00	(18,243,162.00)	94.20
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Perabot dan Meubel lainnya	27,355,000.00	29,421,500.00	(2,066,500.00)	107.16
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	27,355,000.00	29,421,500.00	(2,066,500.00)	107.16
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27,355,000.00	29,421,500.00	(2,066,500.00)	107.16
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Restorasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	315,210,999.00	309,631,705.00	(5,579,294.00)	98.29
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	315,210,999.00	309,631,705.00	(5,579,294.00)	98.29
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	315,210,999.00	309,631,705.00	(5,579,294.00)	98.29
2.09.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.09.5.1.2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,646,032,500.00	1,062,116,858.00	(583,915,642.00)	64.53
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01	Penyediaan dan Penyediaan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1,023,095,000.00	498,614,400.00	(524,480,600.00)	48.70
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01.01	Penyediaan/Informasi Harga Pangan dan Biaya Bahan Pokok	13,895,000.00	13,312,500.00	(582,500.00)	95.81
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	13,895,000.00	13,312,500.00	(582,500.00)	95.81
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13,895,000.00	13,312,500.00	(582,500.00)	95.81
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	510,000,000.00	495,302,600.00	(14,697,400.00)	97.16
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	510,000,000.00	495,302,600.00	(14,697,400.00)	97.16
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	510,000,000.00	495,302,600.00	(14,697,400.00)	97.16

21A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01.03	Kebijakan, Sistemisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	500,000,000.00	0.00	(500,000,000.00)	0.00
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	500,000,000.00	0.00	(500,000,000.00)	0.00
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01.03.5.1.2	Belanja Bering dan Jasa	29,480,000.00	0.00	(29,480,000.00)	0.00
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01.03.5.1.4	Belanja Subsidi	670,520,000.00	0.00	(670,520,000.00)	0.00
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.04	<b>Publikasi dan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	622,127,500.00	563,502,458.00	(58,625,042.00)	90.58
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.04.02	Pendayagunaan Masyarakat dalam Pengamalgaman Konsumsi Pangan Berbasis Sember Daya Lokal	603,552,500.00	556,864,958.00	(46,687,542.00)	92.26
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.04.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	603,552,500.00	556,864,958.00	(46,687,542.00)	92.26
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.04.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.04.02.5.1.2	Belanja Bering dan Jasa	603,552,500.00	556,864,958.00	(46,687,542.00)	92.26
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.04.03	<b>Kemudahan dan Sistemisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun</b>	18,585,000.00	6,637,500.00	(11,947,500.00)	35.71
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.04.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	18,585,000.00	6,637,500.00	(11,947,500.00)	35.71
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.04.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.09.3-27.2-09.3-25.01.03.2.04.03.5.1.2	Belanja Bering dan Jasa	18,585,000.00	6,637,500.00	(11,947,500.00)	35.71
2.09.3-27.2-09.3-25.01.04.2.01	<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	129,181,000.00	26,286,400.00	(102,894,600.00)	20.35
2.09.3-27.2-09.3-25.01.04.2.01	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	21,421,000.00	21,184,150.00	(236,850.00)	98.89
2.09.3-27.2-09.3-25.01.04.2.01.01	Penyusunan, Pemantauan dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	21,421,000.00	21,184,150.00	(236,850.00)	98.89
2.09.3-27.2-09.3-25.01.04.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	21,421,000.00	21,184,150.00	(236,850.00)	98.89
2.09.3-27.2-09.3-25.01.04.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.09.3-27.2-09.3-25.01.04.2.01.01.5.1.2	Belanja Bering dan Jasa	21,421,000.00	21,184,150.00	(236,850.00)	98.89
2.09.3-27.2-09.3-25.01.04.2.02	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kawasan Kabupaten/Kota</b>	107,760,000.00	6,102,250.00	(101,657,750.00)	4.71
2.09.3-27.2-09.3-25.01.04.2.02.01	Absorbsi Penghasilan, Pengeluaran, dan Penyisihan Cadangan Pangan pokok Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	107,760,000.00	6,102,250.00	(101,657,750.00)	4.71
2.09.3-27.2-09.3-25.01.04.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	107,760,000.00	6,102,250.00	(101,657,750.00)	4.71
2.09.3-27.2-09.3-25.01.04.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.09.3-27.2-09.3-25.01.04.2.02.01.5.1.2	Belanja Bering dan Jasa	107,760,000.00	6,102,250.00	(101,657,750.00)	4.71

2.19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.06.3-27.2-09.3-25.01.05	Program Penguasaan Keamanan Pangan	42,650,000.00	40,995,000.00	(1,655,000.00)	96.12
2.06.3-27.2-09.3-25.01.05.2.01	Aktivitas Penguasaan Keamanan Pangan Sagar Daerah Kabupaten/Kota	42,650,000.00	40,995,000.00	(1,655,000.00)	96.12
2.06.3-27.2-09.3-25.01.05.2.01.04	Belanja Keamanan Pangan Sagar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	42,650,000.00	40,995,000.00	(1,655,000.00)	96.12
2.06.3-27.2-09.3-25.01.05.2.01.04.5.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.06.3-27.2-09.3-25.01.05.2.01.04.5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	42,650,000.00	40,995,000.00	(1,655,000.00)	96.12
2.06.3-27.2-09.3-25.01.05.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42,650,000.00	40,995,000.00	(1,655,000.00)	96.12
3.25.3-27.2-09.3-25.01.01	Program Pemangjeng Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	60,244,000.00	58,600,300.00	(1,643,700.00)	97.29
3.25.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06	Administratif Umum Perangkat Daerah	26,200,000.00	26,395,000.00	(305,000.00)	98.86
3.25.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.03	Persediaan Perawatan Rumah Tangga	26,200,000.00	26,395,000.00	(305,000.00)	98.86
3.25.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	6,150,000.00	5,945,000.00	(205,000.00)	96.67
3.25.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
3.25.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.03.5.1.1.1	Belanja Bausing dan Jasa	6,150,000.00	5,945,000.00	(205,000.00)	96.67
3.25.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.03.5.1.2	BELANJA MODAL	20,550,000.00	20,450,000.00	(100,000.00)	99.51
3.25.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.03.5.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	20,550,000.00	20,450,000.00	(100,000.00)	99.51
3.25.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.03.5.2.2	Pembelianan Barang Milik Daerah Penyusung Urusan Pemerintahan Daerah	23,544,000.00	22,214,300.00	(1,329,700.00)	96.07
3.25.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.08	Pembelianan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24,054,000.00	22,920,300.00	(1,133,700.00)	95.28
3.25.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	24,054,000.00	22,920,300.00	(1,133,700.00)	95.28
3.25.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	235,000.00	0.00	(235,000.00)	0.00
3.25.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23,819,000.00	22,920,300.00	(898,700.00)	96.10
3.25.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.11	Pembelianan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,490,000.00	9,294,000.00	(196,000.00)	97.57
3.25.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	9,490,000.00	9,294,000.00	(196,000.00)	97.97
3.25.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.11.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
3.25.3-27.2-09.3-25.01.01.2.09.11.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9,490,000.00	9,294,000.00	(196,000.00)	97.97
3.25.3-27.2-09.3-25.01.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,187,799,412.00	1,130,403,115.80	(57,396,296.20)	95.17
3.25.3-27.2-09.3-25.01.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1,187,799,412.00	1,130,403,115.80	(57,396,296.20)	95.17

KODE REKENING	URAIAN	JUNJAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	
		3	4	5	6
3.25.3-27.2-09.3-25.01.04.2.04.02	Penyusunan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	296,649,000.00	289,808,708.00	(7,840,292.00)	97.53
3.25.3-27.2-09.3-25.01.04.2.04.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	296,649,000.00	289,308,778.80	(7,340,221.20)	97.53
3.25.3-27.2-09.3-25.01.04.2.04.02.5.1.1	Belanja Pegawai	4,050,000.00	2,050,000.00	(2,000,000.00)	42.27
3.25.3-27.2-09.3-25.01.04.2.04.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	291,799,000.00	287,258,778.80	(4,540,221.20)	98.44
3.25.3-27.2-09.3-25.01.04.2.04.03	Penyediaan Kebutuhan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	891,170,412.00	891,094,337.00	(76,076,075.00)	94.38
3.25.3-27.2-09.3-25.01.04.2.04.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	895,475,412.00	826,419,337.00	(50,056,075.00)	94.29
3.25.3-27.2-09.3-25.01.04.2.04.03.5.1.1	Belanja Pegawai	3,150,000.00	500,000.00	(7,650,000.00)	15.87
3.25.3-27.2-09.3-25.01.04.2.04.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	873,325,412.00	825,919,337.00	(47,406,075.00)	94.57
3.25.3-27.2-09.3-25.01.04.2.04.03.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	14,675,000.00	14,675,000.00	0.00	100.00
3.25.3-27.2-09.3-25.01.04.2.04.03.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,675,000.00	14,675,000.00	0.00	100.00
3.25.3-27.2-09.3-25.01.06	Program Penyelahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	327,952,340.00	305,709,209.00	(22,243,131.00)	93.22
3.25.3-27.2-09.3-25.01.06.2.02	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	327,952,340.00	305,709,209.00	(22,243,131.00)	93.22
3.25.3-27.2-09.3-25.01.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Penyusutan atau Ransang hasil Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	327,952,340.00	305,709,209.00	(22,243,131.00)	93.22
3.25.3-27.2-09.3-25.01.06.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.25.3-27.2-09.3-25.01.06.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	327,952,340.00	305,709,209.00	(22,243,131.00)	93.22
3.25.3-27.2-09.3-25.01.06.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
3.27.3-27.2-09.3-25.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63,899,000.00	45,766,147.00	(18,132,853.00)	71.62
3.27.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	4,357,000.00	3,620,300.00	(536,700.00)	87.68
3.27.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,357,000.00	3,620,300.00	(536,700.00)	87.68
3.27.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4,357,000.00	3,620,300.00	(536,700.00)	87.68
3.27.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	85,000.00	0.00	(85,000.00)	0.00
3.27.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,272,000.00	3,620,300.00	(451,700.00)	89.43
3.27.3-27.2-09.3-25.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	43,290,000.00	25,861,847.00	(17,428,153.00)	59.87
3.27.3-27.2-09.3-25.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43,290,000.00	25,861,847.00	(17,428,153.00)	59.87
3.27.3-27.2-09.3-25.01.01.2.08.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	43,290,000.00	25,861,847.00	(17,428,153.00)	59.87

2/19

KODE BENEHUNG	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	4	
					(Rp)	(%)
3.27.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.27.3-27.2-09.3-25.01.01.2.06.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43,200,000.00	25,881,847.00	(17,318,153.00)	59.87	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.01.2.05	<b>Peningkatan Barang MIPA Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	16,342,000.00	16,084,000.00	(258,000.00)	98.42	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.01.2.05.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16,342,000.00	16,084,000.00	(258,000.00)	98.42	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.01.2.05.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	16,342,000.00	16,084,000.00	(258,000.00)	98.42	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.01.2.05.09.5.1.1	Belanja Pegawai	85,000.00	0.00	(85,000.00)	0.00	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.01.2.05.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16,257,000.00	16,084,000.00	(173,000.00)	98.94	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02	<b>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	1,945,846,104.00	1,766,474,033.36	(179,372,070.64)	91.81	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.01	<b>Pengadaan Penguasaan Sarana Pertanian</b>	349,967,200.00	345,684,150.00	(4,283,050.00)	98.06	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.01.01	Pengadaan Penguasaan Sarana Produksi Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Specific Lokal	295,296,050.00	278,214,450.00	(17,081,600.00)	94.22	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	295,296,050.00	278,214,450.00	(17,081,600.00)	94.22	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	294,796,050.00	277,714,450.00	(17,081,600.00)	94.21	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.01.02	<b>Pengembangan Penguasaan Sarana Produksi Pertanian</b>	349,671,150.00	36,969,700.00	(312,701,450.00)	67.62	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.01.02.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	349,671,150.00	36,969,700.00	(312,701,450.00)	67.62	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.01.02.01.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.01.02.01.2	Belanja Barang dan Jasa	349,671,150.00	36,969,700.00	(312,701,450.00)	67.62	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.01.02.01.2.02	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewani, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Komersial Kabupaten/Kota</b>	1,480,760,904.00	1,386,934,683.36	(93,826,220.64)	93.66	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.01.02.01.2.02.01	Pengelolaan Komoditas dan Kelembutan SDG Hewani/Tanaman	95,038,000.00	86,599,200.00	(8,438,800.00)	91.12	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.01.02.01.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	62,288,000.00	58,289,200.00	(3,998,800.00)	93.58	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.01.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.01.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	62,288,000.00	58,289,200.00	(3,998,800.00)	93.58	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	32,750,000.00	28,310,000.00	(4,440,000.00)	86.44	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.01.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	32,750,000.00	28,310,000.00	(4,440,000.00)	86.44	

6.19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(Rp)	(%)
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Neweay/Tanaman	4,015,423,400.00	991,571,825.36	(23,901,574.64)	97.85	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,015,423,400.00	991,571,825.36	(23,901,574.64)	97.85	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	12,500,000.00	1,950,000.00	(10,550,000.00)	15.60	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,002,923,400.00	989,571,825.36	(13,351,574.64)	98.67	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Neweay/Tanaman	370,308,504.00	308,813,658.00	(61,494,846.00)	83.39	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.2.02.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	360,508,504.00	299,513,658.00	(60,994,846.00)	83.08	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.2.02.03.5.1.1	Belanja Pegawai	1,750,000.00	250,000.00	(1,500,000.00)	14.29	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.2.02.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	358,758,504.00	299,263,658.00	(59,494,846.00)	83.42	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.2.02.03.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	9,800,000.00	9,300,000.00	(500,000.00)	94.90	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.2.02.03.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	9,800,000.00	9,300,000.00	(500,000.00)	94.90	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.2.03	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	115,109,000.00	84,305,800.00	(30,803,200.00)	73.24	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.2.03.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	115,109,000.00	84,305,800.00	(30,803,200.00)	73.24	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.2.03.01.5.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.2.03.01.5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	115,109,000.00	84,305,800.00	(30,803,200.00)	73.24	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.02.2.03.01.5.1.2						
3.27.3-27.2-09.3-25.01.03	<b>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	131,049,390.00	87,720,607.74	(43,328,692.26)	66.94	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	58,767,300.00	50,291,132.00	(8,476,168.00)	85.07	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01.01	Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (P2B) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KPP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)	35,998,500.00	30,278,430.00	(5,720,070.00)	84.11	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	35,998,500.00	30,278,430.00	(5,720,070.00)	84.11	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35,998,500.00	30,278,430.00	(5,720,070.00)	84.11	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01.03	Aktivitas dan Sertifikasi Prasarana Peningkatan Pertanian Lainnya	22,269,000.00	20,012,702.00	(2,256,298.00)	87.69	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	22,269,000.00	20,012,702.00	(2,256,298.00)	87.69	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.27.3-27.2-09.3-25.01.03.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22,269,000.00	20,012,702.00	(2,256,298.00)	87.69	

8-19



R19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	(Rp)	(%)
3.27.3.27.2.09.3.25.01.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	72,281,600.00	37,429,475.74	(34,852,324.26)	51.78	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Peternak Hewan	72,281,600.00	37,429,475.74	(34,852,324.26)	51.78	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	2,281,600.00	1,773,800.00	(508,000.00)	77.74	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.03.2.02.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,281,600.00	1,773,800.00	(508,000.00)	77.74	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.03.2.02.07.5.1.2	BELANJA MODAL	70,000,000.00	35,655,675.74	(34,344,324.26)	50.94	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.03.2.02.07.5.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70,000,000.00	35,655,675.74	(34,344,324.26)	50.94	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.03.2.02.07.5.2.3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	562,067,151.00	537,510,346.00	(24,556,811.00)	95.63	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.04	Penjaminan Kesehatan Hewan, Pemupukan dan Pembukaan Daerah Wahah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	70,429,804.00	68,745,604.00	(1,684,200.00)	97.62	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.04.2.01	Pengendalian dan Pengembangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	70,429,804.00	68,745,604.00	(1,684,200.00)	97.62	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.04.2.01.01	BELANJA OPERASI	70,429,804.00	68,745,604.00	(1,684,200.00)	97.61	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.04.2.01.01.5.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.04.2.01.01.5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	70,429,804.00	68,745,604.00	(1,684,200.00)	97.61	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.04.2.01.01.5.1.2	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	250,034,690.00	244,492,579.00	(5,542,111.00)	94.04	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	250,034,690.00	244,492,579.00	(5,542,111.00)	94.06	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	238,034,690.00	223,506,329.00	(15,408,361.00)	93.93	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.04.2.03.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.04.2.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	238,034,690.00	223,506,329.00	(15,408,361.00)	93.93	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.04.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	21,000,000.00	20,966,250.00	(33,750.00)	99.84	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.04.2.03.02.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Hewan	21,000,000.00	20,966,250.00	(33,750.00)	99.84	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.04.2.04	Pemupukan dan Pengawasan Penyakit Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	271,702,657.00	254,270,167.00	(17,432,500.00)	96.78	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.04.2.04.01	Pemupukan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	209,229,657.00	202,361,757.00	(6,867,900.00)	96.72	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	209,229,657.00	202,361,757.00	(6,867,900.00)	97.09	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.04.2.04.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.04.2.04.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	209,229,657.00	202,361,757.00	(6,867,900.00)	97.09	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.04.2.04.01.5.2	BELANJA MODAL	800,000.00	0.00	(800,000.00)	0.00	
3.27.3.27.2.09.3.25.01.04.2.04.01.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Hewan	800,000.00	0.00	(800,000.00)	0.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		1	2	3	4	5
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)	(%)
3.27.3.27.2.09.3-25.01.04.2.04.02	Anggaran Peredaran Hewan dan Produk Hewan	22,473,000.00	21,910,400.00	(562,600.00)	97.50	
3.27.3.27.2.09.3-25.01.04.2.04.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	22,473,000.00	21,910,400.00	(562,600.00)	97.50	
3.27.3.27.2.09.3-25.01.04.2.04.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.27.3.27.2.09.3-25.01.04.2.04.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22,473,000.00	21,910,400.00	(562,600.00)	97.50	
3.27.3.27.2.09.3-25.01.07	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	346,810,658.00	289,551,508.00	(56,259,150.00)	89.89	
3.27.3.27.2.09.3-25.01.07.2.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	346,810,658.00	289,551,508.00	(56,259,150.00)	89.89	
3.27.3.27.2.09.3-25.01.07.2.01.02	Angembangan Kapasitas Kolektabilitas Petani di Kecamatan dan Desa	108,174,004.00	102,009,804.00	(6,124,100.00)	94.29	
3.27.3.27.2.09.3-25.01.07.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	107,234,004.00	101,109,904.00	(6,124,100.00)	94.29	
3.27.3.27.2.09.3-25.01.07.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.27.3.27.2.09.3-25.01.07.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	107,234,004.00	101,109,904.00	(6,124,100.00)	94.29	
3.27.3.27.2.09.3-25.01.07.2.01.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1,906,000.00	1,900,000.00	(6,000.00)	100.00	
3.27.3.27.2.09.3-25.01.07.2.01.02.5.2.3	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	1,906,000.00	1,900,000.00	(6,000.00)	100.00	
3.27.3.27.2.09.3-25.01.07.2.01.03	<b>Penyuluhan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</b>	237,676,654.00	177,941,604.00	(59,735,050.00)	74.70	
3.27.3.27.2.09.3-25.01.07.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	218,176,654.00	161,186,604.00	(56,990,050.00)	73.88	
3.27.3.27.2.09.3-25.01.07.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.27.3.27.2.09.3-25.01.07.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	218,176,654.00	161,186,604.00	(56,990,050.00)	73.88	
3.27.3.27.2.09.3-25.01.07.2.01.03.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	19,500,000.00	16,355,000.00	(3,145,000.00)	83.87	
3.27.3.27.2.09.3-25.01.07.2.01.03.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	7,000,000.00	3,855,000.00	(3,145,000.00)	55.07	
3.27.3.27.2.09.3-25.01.07.2.01.03.5.2.5	Belanja Modal Asat Tetap Lainnya	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	100.00	
		0.00	(13,403,089,331.90)	(13,403,089,331.90)	0.00	

8.19

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

USULAN PEMERINTAHAN ORGANISASI	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERBURANG)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	
		3	4	5	
1	2	3	4	5	6
4.01.4-01.0-00.0-00.02.00.0.00.00.5	BELANDA DAERAH	74.964.123.762.00	67.871.387.882.43	(7.092.735.879.57)	90.54
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01	Program Penguji Usulan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43.006.020.404.00	38.009.810.072.38	(3.996.210.331.62)	90.71
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.01	Pencanaan, Penguji, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.407.750.00	17.457.025.00	(1.950.725.00)	89.95
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.01.01.5.1	Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	19.407.750.00	17.457.025.00	(1.950.725.00)	89.95
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.01.01.5.1.1	BELANDA OPERASI	19.407.750.00	17.457.025.00	(1.950.725.00)	89.95
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.01.01.5.1.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.01.01.5.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.407.750.00	17.457.025.00	(1.950.725.00)	89.95
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.609.477.112.00	12.136.965.665.00	(472.491.446.00)	96.25
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.592.478.913.00	12.122.192.665.00	(470.286.248.00)	96.27
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.02.01.5.1	BELANDA OPERASI	12.592.478.913.00	12.122.192.665.00	(470.286.248.00)	96.27
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	12.592.478.913.00	12.122.192.665.00	(470.286.248.00)	96.27
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.02.01	Pelaksanaan Analisis dan Pengujian/Verifikasi Keuangan APBD	11.491.000.00	10.416.500.00	(1.074.500.00)	90.65
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.02.01.5.1.1	BELANDA OPERASI	11.491.000.00	10.416.500.00	(1.074.500.00)	90.65
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.02.01.5.1.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.02.01.5.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.491.000.00	10.416.500.00	(1.074.500.00)	90.65
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.02.05	Kontribusi dan Penyusutan Laporan Keuangan Akhir Tahun APBD	5.457.200.00	4.356.500.00	(1.100.700.00)	79.83
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.02.05.5.1	BELANDA OPERASI	5.457.200.00	4.356.500.00	(1.100.700.00)	79.83
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.02.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	(Rp)	(%)
					4	5
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.05.10.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5,457,000.00	4,356,500.00	(1,100,500.00)	79.83	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.05	<b>Administratif Kependidikan Perangkat Daerah</b>	29,690,000.00	18,325,300.00	(11,364,700.00)	61.72	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.05.10	Sosialisasi, Pelatihan, dan Bimbingan Lapangan	29,690,000.00	18,325,300.00	(11,364,700.00)	61.72	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.05.10.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	29,690,000.00	18,325,300.00	(11,364,700.00)	61.72	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.05.10.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.05.10.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29,690,000.00	18,325,300.00	(11,364,700.00)	61.72	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06	<b>Administratif Umum Perangkat Daerah</b>	6,718,096,392.00	6,378,934,343.00	(339,162,049.00)	94.27	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.01	Penyediaan Kebutuhan Asasial/Perencanaan Anggaran Kantor	114,749,400.00	108,957,710.00	(5,791,690.00)	95.82	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	114,749,400.00	108,957,710.00	(5,791,690.00)	95.82	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai	1,500,000.00	0.00	(1,500,000.00)	0.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	113,249,400.00	108,957,710.00	(4,291,690.00)	97.09	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.02	<b>Penyediaan Aset dan Pengembangan Kantor</b>	2,276,520,000.00	2,013,677,254.00	(262,842,746.00)	88.45	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	171,300,000.00	143,996,500.00	(27,303,500.00)	84.06	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.02.5.1.1	Belanja Pegawai	9,300,000.00	500,000.00	(8,800,000.00)	5.38	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	162,000,000.00	143,496,500.00	(18,503,500.00)	88.58	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	2,105,220,000.00	1,869,680,754.00	(235,539,246.00)	88.81	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.02.5.2.1	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	1,105,220,000.00	869,730,150.00	(235,489,850.00)	78.69	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.02.5.2.2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,000,000,000.00	999,950,604.00	(49,396.00)	100.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.04	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	298,250,000.00	187,206,138.00	(110,943,862.00)	62.77	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	199,750,000.00	187,296,128.00	(12,453,872.00)	93.77	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	1,400,000.00	0.00	(1,400,000.00)	0.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	198,350,000.00	187,296,128.00	(11,053,872.00)	94.43	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.05	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	280,096,000.00	256,579,196.00	(23,516,804.00)	91.60	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	280,096,000.00	256,579,196.00	(23,516,804.00)	91.60	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.05.5.1.1	Belanja Pegawai	1,500,000.00	0.00	(1,500,000.00)	0.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	278,596,000.00	256,579,196.00	(22,016,804.00)	92.10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	4	5	6
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perunding-undangan	70.158.000,00	68.321.601,00		(806.399,00)	98,81	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.06.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	70.158.000,00	68.321.601,00		(806.399,00)	98,81	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.06.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.06.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.158.000,00	68.321.601,00		(806.399,00)	98,81	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.06.08	Analisis Kebijakan Tantu	2.118.072.992,00	2.076.786.072,00		(41.286.920,00)	98,05	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.06.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2.118.072.992,00	2.076.786.072,00		(41.286.920,00)	98,05	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.06.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.118.072.992,00	2.076.786.072,00		(41.286.920,00)	98,05	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.658.750.000,00	1.616.316.302,00		(42.433.698,00)	97,44	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.658.750.000,00	1.616.316.302,00		(42.433.698,00)	97,44	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	250.000,00	0,00		(250.000,00)	0,00	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.658.500.000,00	1.616.316.302,00		(42.183.698,00)	97,46	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.076.990.000,00	2.783.755.000,00		(159.235.000,00)	93,45	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.07.01	Pengadaan Kondisioner Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.076.990.000,00	2.714.910.000,00		(164.330.000,00)	94,29	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.07.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4.500.000,00	0,00		(4.500.000,00)	0,00	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.07.01.5.1.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	0,00		(4.500.000,00)	0,00	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.07.01.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	2.074.740.000,00	2.714.910.000,00		(159.830.000,00)	94,44	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.07.01.5.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	2.074.740.000,00	2.714.910.000,00		(159.830.000,00)	94,44	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.07.01.5.2.2	Pengadaan Mebel	99.750.000,00	68.845.000,00		(30.905.000,00)	69,02	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.07.05	<b>BELANJA OPERASI</b>	300.000,00	0,00		(300.000,00)	0,00	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.07.05.5.1	Belanja Pegawai	300.000,00	0,00		(300.000,00)	0,00	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.07.05.5.1.1	<b>BELANJA MODAL</b>	99.250.000,00	68.845.000,00		(30.405.000,00)	69,37	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.07.05.5.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	99.250.000,00	68.845.000,00		(30.405.000,00)	69,37	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.07.05.5.2.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.701.000,00	414.570.112,00		(71.131.888,00)	85,36	
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.311.000,00	35.943.000,00		(12.971.000,00)	55,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5	6	(Rp)	(%)
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	29,911,000.00	16,940,000.00	(12,971,000.00)	56.63		
0.00		0.00	0.00	0.00			
29,911,000.00		16,940,000.00	(12,971,000.00)	56.63			
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.02	Aproviasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	455,790,000.00	397,630,113.00	(58,159,887.00)	87.24		
455,790,000.00		397,630,113.00	(58,159,887.00)	87.24			
500,000.00		0.00	(500,000.00)	0.00			
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.06.02.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	455,290,000.00	397,630,113.00	(57,659,887.00)	87.34		
455,290,000.00		397,630,113.00	(57,659,887.00)	87.34			
500,000.00		0.00	(500,000.00)	0.00			
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang ABRI Daerah Persempangan Urusan Pemerintahan Daerah</b> Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan (Awa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Persempangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)	3,705,444,042.80	2,516,185,508.24	(1,189,258,534.56)	94.95		
2,160,206,452.80		2,076,953,005.00	(83,253,447.80)	96.15			
2,160,206,452.80		2,076,953,005.00	(83,253,447.80)	96.15			
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.09.01.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	500,000.00	0.00	(500,000.00)	0.00		
500,000.00		0.00	(500,000.00)	0.00			
2,159,706,452.80		2,076,953,005.00	(82,753,447.80)	96.17			
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.09.01.5.1.2	Pemeliharaan Mobil	8,600,000.00	8,600,000.00	0.00	100.00		
8,600,000.00		8,600,000.00	0.00	100.00			
9,500,000.00		9,500,000.00	0.00	100.00			
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.09.05.1	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00		0.00	0.00	0.00			
9,500,000.00		9,500,000.00	0.00	100.00			
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	29,700,000.00	56,166,000.00	(26,466,000.00)	20.47		
29,700,000.00		56,166,000.00	(26,466,000.00)	20.47			
500,000.00		0.00	(500,000.00)	0.00			
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.09.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	29,200,000.00	56,166,000.00	(26,966,000.00)	20.97		
29,200,000.00		56,166,000.00	(26,966,000.00)	20.97			
500,000.00		0.00	(500,000.00)	0.00			
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.09.06.5.1.1	Pemeliharaan/Bankubitas Gasing Kantor dan Bangunan Lainnya	79,200,000.00	1,115,949,692.00	(1,036,749,692.00)	94.51		
79,200,000.00		1,115,949,692.00	(1,036,749,692.00)	94.51			
227,160,000.00		225,261,611.24	(1,898,988.76)	99.18			
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.09.06.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00		0.00	0.00	0.00			
0.00		0.00	0.00	0.00			
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.09.09	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	1,185,535,590.00	1,115,949,692.00	(69,585,898.00)	93.81		
9,150,000.00		0.00	(9,150,000.00)	0.00			
1,185,535,590.00		1,115,949,692.00	(69,585,898.00)	93.81			
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.09.09.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	1,180,385,590.00	1,115,949,692.00	(64,435,898.00)	94.51		
1,180,385,590.00		1,115,949,692.00	(64,435,898.00)	94.51			
227,160,000.00		225,261,611.24	(1,898,988.76)	99.18			

R.H

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	
		3	4	5	6
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.09.09.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	227,160,000.00	225,261,011.24	(1,898,988.76)	99.16
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.09.11.5.1	Pembelian/Konstruksi/Service dan Peralatan Prestasi/Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39,242,000.00	34,255,800.00	(4,986,200.00)	87.29
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.09.11.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	39,242,000.00	34,255,800.00	(4,986,200.00)	87.29
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.09.11.5.1.1.1	Belanja Pegawai	250,000.00	0.00	(250,000.00)	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.09.11.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	38,992,000.00	34,255,800.00	(4,736,200.00)	87.85
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.11	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	1,058,629,968.00	843,646,608.00	(214,983,360.00)	79.69
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	778,629,968.00	596,283,108.00	(182,346,860.00)	76.58
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.11.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	778,629,968.00	596,283,108.00	(182,346,860.00)	76.58
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.11.01.5.1.1	Belanja Pegawai	778,629,968.00	596,283,108.00	(182,346,860.00)	76.58
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.11.02	Penyediaan Pakar/Dinas dan Alasul Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	280,000,000.00	247,363,500.00	(32,636,500.00)	88.34
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.11.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	280,000,000.00	247,363,500.00	(32,636,500.00)	88.34
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.11.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.11.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	280,000,000.00	247,363,500.00	(32,636,500.00)	88.34
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12	<b>Kualitas Kesejahteraan Substansial Daerah</b>	8,981,727,559.00	6,656,348,495.14	(2,325,379,063.86)	86.72
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	7,103,979,499.00	6,223,622,731.04	(880,356,767.96)	87.67
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,732,581,244.00	3,294,003,847.00	(438,577,397.00)	87.80
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.01.5.1.1	Belanja Pegawai	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	100.00
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,731,331,244.00	3,293,553,847.00	(437,777,397.00)	87.80
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	3,351,398,245.00	2,928,618,884.04	(422,779,360.96)	87.39
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.01.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	1,085,510,240.00	765,279,842.04	(319,230,397.96)	70.50
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.01.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	255,888,005.00	166,622,101.00	(89,265,904.00)	65.17
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.01.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,000,000,000.00	1,996,916,942.00	(3,083,058.00)	99.85
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2,627,998,070.00	2,405,948,554.10	(222,049,515.90)	91.54
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,302,617,044.00	2,021,399,931.00	(281,217,113.00)	88.66

819

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	(Rp)	(%)
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,332,617,044.00	2,021,399,531.00	(311,217,513.00)	86.66	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.03.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	495,381,026.00	384,548,633.10	(110,832,392.90)	77.63	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.03.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	439,081,026.00	334,412,708.10	(104,668,317.90)	76.16	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.03.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56,300,000.00	50,135,925.00	(6,164,075.00)	89.05	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.03	Amplifikasi Kebutuhan Rujukan Tanggap Sekelompok Daerah	497,700,000.00	26,777,200.00	(22,972,800.00)	5.36	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	8,350,000.00	0.00	(8,350,000.00)	0.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.03.5.1.1	Belanja Pegawai	1,000,000.00	0.00	(1,000,000.00)	0.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7,350,000.00	0.00	(7,350,000.00)	0.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.03.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	41,400,000.00	26,777,200.00	(14,622,800.00)	64.68	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.12.03.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	41,400,000.00	26,777,200.00	(14,622,800.00)	64.68	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.13	<b>Penataan Organisasi</b>	377,359,320.00	314,368,861.00	(62,990,459.00)	83.30	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.13.01	Anggaran Kembangkan dan Analisis Anggaran	97,861,000.00	86,360,070.00	(11,500,930.00)	88.23	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.13.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	97,881,000.00	86,360,070.00	(11,520,930.00)	88.23	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.13.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.13.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	97,881,000.00	86,360,070.00	(11,520,930.00)	88.23	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	192,327,630.00	177,762,652.00	(14,564,978.00)	92.47	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.13.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	174,733,220.00	160,032,042.00	(14,701,178.00)	93.30	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.13.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.13.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	174,733,220.00	160,032,042.00	(14,701,178.00)	93.30	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.13.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	17,594,610.00	14,730,810.00	(2,863,800.00)	83.72	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.13.02.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	17,594,610.00	14,730,810.00	(2,863,800.00)	83.72	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	87,190,500.00	50,245,939.00	(26,944,561.00)	57.63	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.13.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	87,190,500.00	50,245,939.00	(26,944,561.00)	57.63	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.13.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.2.13.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87,190,500.00	50,245,939.00	(26,944,561.00)	57.63	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.14	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	5,041,507,250.00	3,978,253,154.00	(1,063,254,096.00)	78.67
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.14.01	Fasilitas Keprotokolan	4,026,178,500.00	3,187,820,730.00	(838,357,770.00)	79.03
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.14.01.5.1	<b>BELANGA OPERASI</b>	4,026,178,500.00	3,181,820,730.00	(844,357,770.00)	79.03
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.14.01.5.1.1	Belanja Pegawai	500,000.00	0.00	(500,000.00)	0.00
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.14.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,525,678,500.00	3,181,820,730.00	(843,857,770.00)	79.04
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.14.02	<b>Fasilitas Komunikasi Pimpinan</b>	63,100,000.00	49,418,000.00	(13,682,000.00)	31.41
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.14.02.5.1	<b>BELANGA OPERASI</b>	63,100,000.00	19,818,000.00	(43,282,000.00)	31.41
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.14.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.14.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	63,100,000.00	19,818,000.00	(43,282,000.00)	31.41
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.14.03	<b>Pembekuan/Tugasan Pimpinan</b>	952,228,750.00	779,614,424.00	(172,614,326.00)	81.35
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.14.03.5.1	<b>BELANGA OPERASI</b>	905,628,750.00	748,696,674.00	(156,932,076.00)	82.67
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.14.03.5.1.1	Belanja Pegawai	4,280,000.00	0.00	(4,280,000.00)	0.00
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.14.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	901,348,750.00	748,696,674.00	(152,652,076.00)	83.06
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.14.03.5.2	<b>BELANGA MODAL</b>	46,600,000.00	25,917,750.00	(20,682,250.00)	55.62
4.01.4.01.0-00.0-00.02.01.2.14.03.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	46,600,000.00	25,917,750.00	(20,682,250.00)	55.62
4.03.4.01.0-01.0-00.02.01.2.01.02	<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>	30,540,479,600.00	27,793,204,098.05	(2,747,275,501.95)	91.00
4.01.4.01.0-01.0-00.02.02.01	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	709,471,000.00	541,030,023.00	(168,440,977.00)	76.26
4.01.4.01.0-01.0-00.02.02.01.01	<b>Pembinaan Administrasi Pemerintahan</b>	289,405,000.00	482,869,793.00	(106,535,207.00)	63.19
4.01.4.01.0-01.0-00.02.02.01.01.5.1	<b>BELANGA OPERASI</b>	289,405,000.00	180,869,793.00	(106,535,207.00)	63.19
4.01.4.01.0-01.0-00.02.02.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01.4.01.0-01.0-00.02.02.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	289,405,000.00	180,869,793.00	(106,535,207.00)	63.19
4.01.4.01.0-01.0-00.02.02.01.02	<b>Pengembangan Administrasi Wilayah/Kabupaten</b>	252,719,000.00	236,129,931.00	(16,089,069.00)	93.43
4.01.4.01.0-01.0-00.02.02.01.02.5.1	<b>BELANGA OPERASI</b>	252,739,000.00	236,129,931.00	(16,609,069.00)	93.43
4.01.4.01.0-01.0-00.02.02.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01.4.01.0-01.0-00.02.02.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	252,739,000.00	236,129,931.00	(16,609,069.00)	93.43
4.01.4.01.0-01.0-00.02.02.01.03	<b>Fasilitas Pelaksanaan Operasi Daerah</b>	167,227,000.00	122,030,998.00	(45,196,001.00)	72.93

KODE REFERENCING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	(Rp)		6
					4	5	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	167,327,000.00	122,000,200.00		(45,326,700.00)	72.93	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	167,327,000.00	122,000,200.00		(45,326,700.00)	72.93	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.02	<b>Pelebaran Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	28,852,864,600.00	26,463,052,827.05		(2,372,811,772.95)	91.79	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.02.01	Fasilitas Pengobatan Bina Mental Spiritual	2,401,180,600.00	2,827,894,088.00		(573,376,512.00)	76.12	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,349,980,600.00	1,777,994,888.00		(571,026,512.00)	75.66	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,349,980,600.00	1,777,994,888.00		(571,026,512.00)	75.66	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.02.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	51,200,000.00	49,850,000.00		(1,350,000.00)	97.36	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.02.01.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	51,200,000.00	49,850,000.00		(1,350,000.00)	97.36	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.02.02	<b>Pelebaran Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial</b>	25,902,260,000.00	14,236,925,846.00		(11,665,334,154.00)	90.15	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	15,889,060,000.00	14,218,398,846.00		(1,665,671,154.00)	90.11	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	122,919,000.00	96,099,261.00		(25,819,739.00)	80.62	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.02.02.5.1.5	Belanja Hibah	15,761,150,000.00	14,219,299,585.00		(1,541,850,415.00)	90.22	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.02.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	10,000,000.00	18,537,000.00		(661,000.00)	96.55	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.02.02.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	10,000,000.00	18,537,000.00		(661,000.00)	96.55	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.02.03	<b>Pelebaran Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat</b>	10,551,425,000.00	10,318,312,893.05		(233,102,106.95)	97.79	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.02.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	10,551,415,000.00	10,318,312,893.05		(233,102,106.95)	97.79	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.02.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.02.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6,897,135,000.00	6,678,032,893.05		(219,102,106.95)	96.79	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.02.03.5.1.5	Belanja Hibah	3,654,280,000.00	3,640,280,000.00		(12,000,000.00)	99.67	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.03	<b>Fasilitas dan Inovasi/ Mulum</b>	872,715,000.00	674,588,648.00		(198,146,352.00)	77.21	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.03.01	Fasilitas/Proyek/Proble Solving/ Dukungan Daerah	172,740,000.00	104,149,789.00		(67,590,211.00)	60.55	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.03.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	172,740,000.00	104,149,789.00		(67,590,211.00)	60.55	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.2.03.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
		3	4	5	6
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.2.03.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.21,740,000.00	104,149,789.00	(17,590,211.00)	85.55
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.2.03.02	Fasilitas Bantuan Kultur	668,205,000.00	408,002,774.00	(172,702,226.00)	71.25
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.2.03.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	418,948,000.00	269,201,499.00	(149,146,501.00)	64.35
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.2.03.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.2.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	418,948,000.00	269,201,499.00	(149,146,501.00)	64.35
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.2.03.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	182,357,000.00	158,801,275.00	(23,555,725.00)	87.08
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.2.03.02.5.2.1	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	164,357,000.00	149,819,275.00	(21,537,725.00)	85.68
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.2.03.02.5.2.2	Belanja Modal Asst Tetap Lainnya	18,000,000.00	17,982,000.00	(18,000.00)	99.99
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.2.03.03	Penkembangan Produk Kultur dan Pengelolaan Informasi Kultur	151,270,000.00	142,416,085.00	(8,853,915.00)	94.15
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.2.03.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	151,270,000.00	142,416,085.00	(8,853,915.00)	94.15
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.2.03.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.2.03.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	151,270,000.00	142,416,085.00	(8,853,915.00)	94.15
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.2.04	Fasilitas Kegiatan Daerah	101,425,000.00	94,552,592.00	(6,872,408.00)	93.22
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.2.04.01	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	101,425,000.00	94,552,592.00	(6,872,408.00)	93.22
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.2.04.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	101,425,000.00	94,552,592.00	(6,872,408.00)	93.22
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.2.04.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.2.04.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	101,425,000.00	94,552,592.00	(6,872,408.00)	93.22
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,417,623,758.00	1,066,373,720.00	(348,250,038.00)	75.36
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	371,498,100.00	262,149,777.00	(109,348,323.00)	70.57
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.01.01	Kontribusi, Sekuritas, Asuransi dan Fasilitas Kegiatan Pengelolaan BUMD dan (BUMD)	87,996,100.00	80,756,960.00	(7,239,140.00)	91.77
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	87,996,100.00	80,756,960.00	(7,239,140.00)	91.77
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87,996,100.00	80,756,960.00	(7,239,140.00)	91.77
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.01.02	Pengembangan dan Operasi Perekonomian	195,720,000.00	138,697,678.00	(57,022,322.00)	70.84
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	195,720,000.00	138,697,678.00	(57,022,322.00)	70.84

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		3	4	5	(Rp)	(%)
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	195,775,000.00	130,607,638.00	(57,081,322.00)	(57,081,322.00)	70.84
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.03	Pencapaian dan Peningkatan Ekonomi/Askm Merif	87,715,000.00	42,695,135.00	(45,019,865.00)	(45,019,865.00)	48.67
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	87,715,000.00	42,695,135.00	(45,019,865.00)	(45,019,865.00)	48.67
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.02.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87,715,000.00	42,695,135.00	(45,019,865.00)	(45,019,865.00)	48.67
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02	<b>Pencapaian Administrasi/ Pembangunan</b>	242,035,100.00	295,773,790.00	(78,261,422.00)	(78,261,422.00)	85.02
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.01	Fasilitasi/ Peningkatan Program Pembangunan	30,250,000.00	33,038,372.00	(6,267,628.00)	(6,267,628.00)	84.00
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	34,790,000.00	28,532,872.00	(6,257,128.00)	(6,257,128.00)	82.00
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34,790,000.00	28,532,872.00	(6,257,128.00)	(6,257,128.00)	82.00
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	4,500,000.00	4,495,500.00	(4,500.00)	(4,500.00)	99.96
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.01.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	4,500,000.00	4,495,500.00	(4,500.00)	(4,500.00)	99.96
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	58,589,000.00	45,293,696.00	(13,295,344.00)	(13,295,344.00)	77.31
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	58,589,000.00	45,293,696.00	(13,295,344.00)	(13,295,344.00)	77.31
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	58,589,000.00	45,293,696.00	(13,295,344.00)	(13,295,344.00)	77.31
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	144,156,200.00	127,451,750.00	(16,704,450.00)	(16,704,450.00)	88.41
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	144,156,200.00	127,451,750.00	(16,704,450.00)	(16,704,450.00)	88.41
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01.4-01.0-00.0-00.02.02.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	144,156,200.00	127,451,750.00	(16,704,450.00)	(16,704,450.00)	88.41
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	700,094,550.00	586,940,769.00	(113,153,781.00)	(113,153,781.00)	83.84
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	414,061,200.00	341,053,142.00	(73,008,058.00)	(73,008,058.00)	82.32
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	407,061,200.00	336,141,391.00	(70,919,809.00)	(70,919,809.00)	82.59
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.01.5.1.1	Belanja Pegawai	209,350,000.00	58,350,000.00	(151,000,000.00)	(151,000,000.00)	27.87
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	198,511,200.00	177,791,391.00	(20,719,809.00)	(20,719,809.00)	89.56

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5	(Rp)	(%)
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.03.03.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b> Belanja Modal Perawatan dan Mesin	6,200,000.00	4,911,750.00	(1,288,250.00)	79.22	
4.01.4-03.0-00.0-00.02.03.2.03.03.5.2.2		6,200,000.00	4,911,750.00	(1,288,250.00)	79.22	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.03.02	Pengadaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	225,356,358.00	210,486,128.00	(14,870,230.00)	95.47	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.03.02.5.1		175,356,358.00	160,491,828.00	(14,864,530.00)	91.52	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.03.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175,356,358.00	160,491,828.00	(14,864,530.00)	91.52	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.03.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	150,000,000.00	149,999,300.00	(5,700.00)	100.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.03.02.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	150,000,000.00	149,999,300.00	(5,700.00)	100.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.03.03	Perbaikan dan Aktivas Pengadaan Barang dan Jasa	41,477,000.00	33,410,500.00	(8,066,500.00)	80.55	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.03.03.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>	41,477,000.00	33,410,500.00	(8,066,500.00)	80.55
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.03.03.5.1.1	Belanja Pegawai	3,200,000.00	0.00	(3,200,000.00)	0.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.03.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	38,277,000.00	33,410,500.00	(4,866,500.00)	87.29	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.04	<b>Pemertanian Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	23,203,900.00	15,500,400.00	(7,703,500.00)	66.80	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.04.03		Kontribusi, Sumbangan dan Evakuasi Kebijakan Energi dan Air	23,203,900.00	15,500,400.00	(7,703,500.00)	66.80
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.04.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	23,203,900.00	15,500,400.00	(7,703,500.00)	66.80	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.04.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.02.03.2.04.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23,203,900.00	15,500,400.00	(7,703,500.00)	66.80	
		0.00	(67,871,387,882.43)	(67,871,387,882.43)	0.00	

2/19



**PEMERINTAH KOTA SUKITISINGGI  
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

URUSAN PEMERINTAHAN Organisasi :		INSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
: 6.01		Inspekturat	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
: 6.01.6-01.0-00.0-00.01		Inspekturat	3	4	5	6
KODE REKENING		URAIAN	3		4	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.6-01.0-00.0-00.01.00.00.00.5		<b>BELANJA DAERAH</b>	8.473.210.002.00	7.338.446.153.00	(1.144.764.729.00)	86,49
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.02		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.798.724.082.00	6.790.406.531.00	(908.318.151.00)	87,26
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.531.273.746.00	5.708.752.910.00	(822.520.836.00)	87,41
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1		Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.531.273.746.00	5.708.752.910.00	(822.520.836.00)	87,41
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1		<b>BELANJA OPERASI</b>	6.531.273.746.00	5.708.752.910.00	(822.520.836.00)	87,41
		Belanja Pegawai				
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.05		<b>Administrasi Koproganisasi Perangkat Daerah</b>	416.137.000.00	351.693.910.00	(64.443.091.00)	84,36
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.05.09		Perbaikan dan Pemeliharaan Akmal Benda-benda Tugas dan Fungsi	386.700.000.00	336.964.329.00	(50.735.671.00)	84,55
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.05.09.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>	386.700.000.00	336.964.329.00	(50.735.671.00)	84,55
		Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	386.700.000.00	336.964.329.00	(50.735.671.00)	84,55
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	29.437.000.00	24.929.590.00	(4.507.410.00)	84,69
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.05.11.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>	29.437.000.00	24.929.590.00	(4.507.410.00)	84,69
		Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	29.437.000.00	24.929.590.00	(4.507.410.00)	84,69
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	337.906.000.00	313.044.653.00	(24.861.347.00)	92,69
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi/Pemangan Bengunan Kantor	2.345.000.00	2.445.000.00	(100.000.00)	78,68
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.01.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>	2.345.000.00	2.445.000.00	(100.000.00)	78,68

8/19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	
		3	4	5	6
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.345,000.00	1,845,000.00	(500,000.00)	78.68
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Perabotan dan Peralengkapan Kantor	90,400,000.00	82,486,382.00	(8,412,518.00)	90.74
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	590,000.00	0.00	(590,000.00)	0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.02.5.1.1	Belanja Pegawai	590,000.00	0.00	(590,000.00)	0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.02.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	90,400,000.00	82,486,382.00	(7,913,518.00)	91.25
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.02.5.1.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90,400,000.00	82,486,382.00	(7,913,518.00)	91.25
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,012,000.00	14,593,000.00	(4,199,000.00)	97.91
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	20,012,000.00	19,593,000.00	(199,000.00)	97.91
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20,012,000.00	19,593,000.00	(199,000.00)	97.91
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,594,000.00	14,285,400.00	(308,600.00)	97.89
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	14,594,000.00	14,285,400.00	(308,600.00)	97.89
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14,594,000.00	14,285,400.00	(308,600.00)	97.89
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Asuransi	12,300,000.00	7,423,300.00	(4,876,700.00)	60.35
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	12,300,000.00	7,423,300.00	(4,876,700.00)	60.35
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12,300,000.00	7,423,300.00	(4,876,700.00)	60.35
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapor Koordinasi dan Konsultasi DPRD	197,775,000.00	187,411,571.00	(10,363,429.00)	94.76
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	197,775,000.00	187,411,571.00	(10,363,429.00)	94.76
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	197,775,000.00	187,411,571.00	(10,363,429.00)	94.76
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111,750,000.00	57,403,650.00	(54,346,350.00)	51.37
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07.03.05	Pengadaan Mesin	111,750,000.00	57,403,650.00	(54,346,350.00)	51.37

2.1A

KODE REKENING	LIBAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	750,000.00	0.00	(750,000.00)	0.00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07.05.5.1.1	Belanja Pegawai	750,000.00	0.00	(750,000.00)	0.00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07.05.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	111,500,000.00	57,403,650.00	(54,096,350.00)	51.48	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07.05.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	111,500,000.00	57,403,650.00	(54,096,350.00)	51.48	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	36,600,000.00	34,412,107.00	(2,187,893.00)	94.02	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,360,000.00	953,000.00	(407,000.00)	69.66	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,360,000.00	953,000.00	(407,000.00)	69.66	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,360,000.00	953,000.00	(407,000.00)	69.66	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35,220,000.00	33,459,107.00	(1,760,893.00)	95.00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	35,220,000.00	33,459,107.00	(1,760,893.00)	95.00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35,220,000.00	33,459,107.00	(1,760,893.00)	95.00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09	<b>Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	335,037,936.00	314,899,262.00	(20,138,674.00)	93.99	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pemungutan Pajak atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,190,000.00	36,862,462.00	(2,327,538.00)	94.11	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	39,190,000.00	36,862,462.00	(2,327,538.00)	94.11	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39,190,000.00	36,862,462.00	(2,327,538.00)	94.11	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75,400,000.00	72,047,000.00	(3,353,000.00)	95.55	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	75,400,000.00	72,047,000.00	(3,353,000.00)	95.55	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75,400,000.00	72,047,000.00	(3,353,000.00)	95.55	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3,200,000.00	1,126,000.00	(2,074,000.00)	35.19	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.05.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,200,000.00	1,126,000.00	(2,074,000.00)	35.19	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(Rp)	(%)
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,200,000.00	1,126,000.00	(2,074,000.00)		35.19
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pembelajaran Peralatan dan Mesin Lainnya	13,110,000.00	6,247,500.00	(6,862,500.00)		47.65
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	13,110,000.00	6,247,500.00	(6,862,500.00)		47.65
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00		0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13,110,000.00	6,247,500.00	(6,862,500.00)		47.65
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pembelajaran/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	204,137,936.00	198,596,300.00	(5,541,636.00)		97.29
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	204,137,936.00	198,596,300.00	(5,541,636.00)		97.29
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06.5.1.1	Belanja Pegawai	4,450,000.00	250,000.00	(4,200,000.00)		5.62
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	199,687,936.00	198,346,300.00	(1,341,636.00)		99.33
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Program Penyelenggaraan Pengawasan	515,775,600.00	411,173,693.00	(104,601,907.00)		79.72
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	472,017,600.00	377,615,047.00	(94,402,553.00)		80.04
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	123,354,000.00	105,039,001.00	(18,314,999.00)		85.15
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	123,354,000.00	105,039,001.00	(18,314,999.00)		85.15
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00		0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	123,354,000.00	105,039,001.00	(18,314,999.00)		85.15
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	84,901,600.00	55,357,850.00	(29,543,750.00)		65.20
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	84,901,600.00	55,357,850.00	(29,543,750.00)		65.20
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00		0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	84,901,600.00	55,357,850.00	(29,543,750.00)		65.20
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01.03	Revisi Laporan Kinerja	3,630,000.00	2,794,250.00	(835,750.00)		76.70
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,630,000.00	2,794,250.00	(835,750.00)		76.70
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00		0.00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,630,000.00	2,794,250.00	(835,750.00)		76.70
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01.04	Revisi Laporan Keuangan	56,630,000.00	48,439,108.00	(8,190,892.00)		85.72

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERBURANG)	
		3	4	5	(Rp)	(%)
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	56,838,000.00	48,439,108.00	(8,398,892.00)	85.22	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	56,838,000.00	48,439,108.00	(8,398,892.00)	85.22	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.06	Kefjasama Anggaran Internal	131,467,000.00	107,860,903.00	(23,606,097.00)	77.48	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	131,467,000.00	107,860,903.00	(23,606,097.00)	77.48	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	131,467,000.00	107,860,903.00	(23,606,097.00)	77.48	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.07	Monev dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pembekuan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	71,827,000.00	64,333,931.00	(7,493,069.00)	89.57	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	71,827,000.00	64,333,931.00	(7,493,069.00)	89.57	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.07.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	71,827,000.00	64,333,931.00	(7,493,069.00)	89.57	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.02	Penyenggaraan Anggaran dengan Tujuan Tertentu	43,758,000.00	33,358,650.00	(10,399,350.00)	76.27	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Kegiatan Daerah	31,428,000.00	25,904,150.00	(5,523,850.00)	82.42	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	31,428,000.00	25,904,150.00	(5,523,850.00)	82.42	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31,428,000.00	25,904,150.00	(5,523,850.00)	82.42	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12,330,000.00	7,454,500.00	(4,875,500.00)	60.46	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	12,330,000.00	7,454,500.00	(4,875,500.00)	60.46	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12,330,000.00	7,454,500.00	(4,875,500.00)	60.46	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.02.02.5.1.1	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	188,710,600.00	136,865,929.00	(51,844,671.00)	72.53	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.02.02	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	188,710,600.00	136,865,929.00	(51,844,671.00)	72.53	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pondokan, Asistensi, Hibah, dan Bantuan Reforasi Bantuan	16,321,000.00	13,113,780.00	(3,207,220.00)	80.35	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	16,321,000.00	13,113,780.00	(3,207,220.00)	80.35	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	

219

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.02.00.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.321.000.00	13.113.780.00	(3.207.220.00)	80.35	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.02.03	Kontribusi, Abstraksi dan Fasilitasi serta verifikasi Pengadaan dan Pemberantasan Korupsi	78.030.000.00	56.442.799.00	(21.587.201.00)	72.33	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.02.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	78.030.000.00	56.442.799.00	(21.587.201.00)	72.33	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.02.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.02.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	78.030.000.00	56.442.799.00	(21.587.201.00)	72.33	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengadaan Integritas	94.359.600.00	67.309.390.00	(27.050.250.00)	71.33	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.02.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	94.359.600.00	67.309.390.00	(27.050.250.00)	71.33	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.02.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.02.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	94.359.600.00	67.309.390.00	(27.050.250.00)	71.33	
		0.00	(7.328.446.153.00)	(7.328.446.153.00)	0.00	

819

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

URUSAN PEMERINTAHAN Organisasi	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3	REALISASI 4		
			(Rp)	(%)		
URUSAN PEMUNGJANG URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	5.01.5-01.5-05.0-00.01.00.0.00.00.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	7,012,694,893.00	6,247,142,294.00	(765,532,499.00)	89.08
	5.01.5-01.5-05.0-00.01.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	3,366,836,043.00	3,095,678,438.00	(281,177,605.00)	94.76
	5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	35,150,000.00	34,645,322.00	(504,678.00)	98.55
	5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.01.01	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	35,150,000.00	34,645,322.00	(504,678.00)	98.55
	5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	35,150,000.00	34,645,322.00	(504,678.00)	98.56
	5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35,150,000.00	34,645,322.00	(504,678.00)	98.56
	5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	4,466,323,425.00	4,270,116,224.00	(196,207,201.00)	95.61
	5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.02.01	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	4,466,323,425.00	4,270,116,224.00	(196,207,201.00)	95.61
	5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4,466,323,425.00	4,270,116,224.00	(196,207,201.00)	95.61
	5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	4,466,323,425.00	4,270,116,224.00	(196,207,201.00)	95.61
	5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	276,046,790.00	279,697,547.00	3,650,757.00	101.33
	5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.01	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Perangkat Lunak/Pemrosesan Anggaran Kantor</b>	2,242,790.00	2,985,000.00	742,210.00	133.06
	5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,242,790.00	2,985,000.00	742,210.00	133.06
	5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,242,790.00	2,985,000.00	742,210.00	133.06
	5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.02	<b>Penyediaan Perbaikan dan Penggantian Kantor</b>	84,000,000.00	47,650,000.00	(36,350,000.00)	56.96
	5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	84,000,000.00	47,650,000.00	(36,350,000.00)	56.96

2/1A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84,100,000.00	47,850,000.00	(36,150,000.00)	56.96	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Barang Logam Kantor	4,000,000.00	13,077,750.00	(942,250.00)	93.26	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	14,020,000.00	13,077,750.00	(942,250.00)	93.28	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14,020,000.00	13,077,750.00	(942,250.00)	93.28	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,140,000.00	9,412,250.00	(4,777,250.00)	66.56	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.05.3.1	BELANJA OPERASI	14,140,000.00	9,412,250.00	(4,777,250.00)	66.56	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.05.3.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.05.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14,140,000.00	9,412,250.00	(4,777,250.00)	66.56	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kelembagaan Ternu	3,716,000.00	3,708,540.00	(7,460.00)	99.67	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	3,716,000.00	3,708,540.00	(7,460.00)	99.68	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,716,000.00	3,708,540.00	(7,460.00)	99.68	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SWP	256,028,000.00	242,664,007.00	(14,263,993.00)	94.45	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	256,028,000.00	242,664,007.00	(14,263,993.00)	94.45	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	256,028,000.00	242,664,007.00	(14,263,993.00)	94.45	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36,570,000.00	30,044,000.00	(6,525,710.00)	81.91	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,250,000.00	1,013,750.00	(236,250.00)	81.07	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1,250,000.00	1,013,750.00	(236,250.00)	81.10	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.08.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,250,000.00	1,013,750.00	(236,250.00)	81.10	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27,000,000.00	25,044,000.00	(1,957,000.00)	96.46	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	27,000,000.00	25,044,000.00	(1,957,000.00)	96.46	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.08.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	

279

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	4	5	6
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27,500,000.00	26,042,940.00	(957,060.00)		96.46	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	6,120,000.00	4,988,000.00	(1,132,000.00)		47.28	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6,120,000.00	4,988,000.00	(1,132,000.00)		47.28	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00		0.00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6,120,000.00	2,988,000.00	(3,132,000.00)		47.28	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09	<b>Pembelian Barang ABWA Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	454,765,888.00	431,774,655.00	(23,991,233.00)		94.81	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan	77,351,804.00	67,931,054.00	(10,420,750.00)		95.21	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	77,351,804.00	67,931,054.00	(10,420,750.00)		95.21	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00		0.00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	77,351,804.00	67,931,054.00	(10,420,750.00)		95.21	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126,950,000.00	115,919,156.00	(11,030,850.00)		91.31	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	126,950,000.00	115,919,156.00	(11,030,850.00)		91.31	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00		0.00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	126,950,000.00	115,919,156.00	(11,030,850.00)		91.31	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09.09	Pembelian/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	256,464,064.00	247,324,451.00	(9,139,613.00)		96.44	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	256,464,064.00	247,324,451.00	(9,139,613.00)		96.44	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00		0.00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	256,464,064.00	247,324,451.00	(9,139,613.00)		96.44	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02	<b>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	707,491,800.00	422,636,176.00	(284,855,624.00)		59.74	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	557,214,650.00	305,765,056.00	(251,449,594.00)		55.47	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.03	Analisis Kebutuhan Publik	20,690,000.00	18,052,500.00	(2,637,500.00)		92.09	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	20,690,000.00	18,052,500.00	(2,637,500.00)		92.09	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00		0.00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20,690,000.00	18,052,500.00	(2,637,500.00)		92.09	

18

KODE REKENDUNG	URAIAN	JUMILAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		AMGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.04	Kontribusi Pelaksanaan Forum SWPO/Forum SWPD	4.270.400,00	3.946.300,00	(424.100,00)	90,30
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4.270.400,00	3.946.300,00	(424.100,00)	90,30
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.270.400,00	3.946.300,00	(424.100,00)	90,30
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.05	Alokasi Anggaran Kabupaten/Kota	101.039.850,00	80.504.465,00	(20.535.385,00)	79,68
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.05.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	101.039.850,00	80.504.465,00	(20.535.385,00)	79,68
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.05.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.05.1.2	Belanja Barang dan Jasa	101.039.850,00	80.504.465,00	(20.535.385,00)	79,68
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.07	Kontribusi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	423.114.400,00	202.261.791,00	(220.852.609,00)	47,57
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	396.614.400,00	179.284.791,00	(217.329.609,00)	45,20
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.07.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	396.614.400,00	179.284.791,00	(217.329.609,00)	45,20
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.07.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	26.500.000,00	22.977.000,00	(3.523.000,00)	80,62
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.07.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	26.500.000,00	22.977.000,00	(3.523.000,00)	80,62
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	92.977.600,00	71.369.168,00	(21.608.432,00)	76,76
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.02.02	<b>Pembinaan dan Pemantauan Data dan Informasi Pemerintahan Pembangunan SWPD</b>	92.977.600,00	71.369.168,00	(21.608.432,00)	76,76
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	92.977.600,00	71.369.168,00	(21.608.432,00)	76,76
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	92.977.600,00	71.369.168,00	(21.608.432,00)	76,76
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.03	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	63.299.600,00	45.501.952,00	(17.797.648,00)	71,89
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.03.01	<b>Kontribusi Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota</b>	63.299.600,00	45.501.952,00	(17.797.648,00)	71,89
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.03.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	63.299.600,00	45.501.952,00	(17.797.648,00)	71,89
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.03.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.03.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	63.299.600,00	45.501.952,00	(17.797.648,00)	71,89

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5	(Rp)	(%)
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	560.476.300,00	429.101.417,00	(131.294.983,00)	76,57	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	211.651.000,00	169.500.709,00	(42.150.290,00)	80,09	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPSRD, RPSMD dan RPPD)	66.886.000,00	57.083.560,00	(9.802.440,00)	85,39	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	51.886.000,00	45.283.560,00	(6.602.440,00)	87,28	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.01.5.1.1	Bebanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.01.5.1.2	Bebanja Barang dan Jasa	51.886.000,00	45.283.560,00	(6.602.440,00)	87,28	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.01.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	15.000.000,00	11.800.000,00	(3.200.000,00)	78,67	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.01.5.2	Bebanja Modal Perawatan dan Mesin	15.000.000,00	11.800.000,00	(3.200.000,00)	78,67	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPSRD, RPSMD dan RPPD)	42.406.000,00	35.694.361,00	(6.721.639,00)	84,15	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	42.406.000,00	35.694.361,00	(6.721.639,00)	84,15	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.05.5.1.1	Bebanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.05.5.1.2	Bebanja Barang dan Jasa	42.406.000,00	35.694.361,00	(6.721.639,00)	84,15	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.06	Astansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	27.505.000,00	15.564.335,00	(11.940.665,00)	56,59	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	27.505.000,00	15.564.335,00	(11.940.665,00)	56,59	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.06.5.1.1	Bebanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.06.5.1.2	Bebanja Barang dan Jasa	27.505.000,00	15.564.335,00	(11.940.665,00)	56,59	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonis Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	74.854.000,00	61.168.432,00	(13.685.568,00)	81,72	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	68.941.000,00	55.285.432,00	(13.655.568,00)	80,19	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.08.5.1.1	Bebanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.08.5.1.2	Bebanja Barang dan Jasa	68.941.000,00	55.285.432,00	(13.655.568,00)	80,19	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.08.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	5.913.000,00	5.883.000,00	(30.000,00)	99,49	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.08.5.2.2	Bebanja Modal Perawatan dan Mesin	5.913.000,00	5.883.000,00	(30.000,00)	99,49	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan SDA (Sumber Daya Alam)	164.408.000,00	113.494.361,00	(50.923.639,00)	69,07	

R1A



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5	(Rp)	6
5.01.5-01.5-95.0-00.01.01.2.02.02	Asisten Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	41,000,000.00	21,671,142.00	(19,328,858.00)	53.22	
5.01.5-01.5-95.0-00.01.01.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	41,000,000.00	21,621,142.00	(19,378,858.00)	53.22	
5.01.5-01.5-95.0-00.01.01.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.01.5-01.5-95.0-00.01.01.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	41,000,000.00	21,621,142.00	(19,378,858.00)	53.22	
5.01.5-01.5-95.0-00.01.01.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	54,455,000.00	47,003,697.00	(7,451,303.00)	86.32	
5.01.5-01.5-95.0-00.01.01.2.02.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	54,455,000.00	47,003,697.00	(7,451,303.00)	86.32	
5.01.5-01.5-95.0-00.01.01.2.02.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.01.5-01.5-95.0-00.01.01.2.02.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54,455,000.00	47,003,697.00	(7,451,303.00)	86.32	
5.01.5-01.5-95.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RSPD, RSPMD dan RPPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.01.5-01.5-95.0-00.01.01.2.02.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.01.5-01.5-95.0-00.01.01.2.02.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.01.5-01.5-95.0-00.01.01.2.02.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.01.5-01.5-95.0-00.01.01.2.02.06	Asisten Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	25,813,000.00	17,895,942.00	(7,917,058.00)	69.33	
5.01.5-01.5-95.0-00.01.01.2.02.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	25,813,000.00	17,895,942.00	(7,917,058.00)	69.33	
5.01.5-01.5-95.0-00.01.01.2.02.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.01.5-01.5-95.0-00.01.01.2.02.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25,813,000.00	17,895,942.00	(7,917,058.00)	69.33	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	43,140,000.00	26,763,580.00	(16,376,420.00)	62.04	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.02.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	43,140,000.00	26,763,580.00	(16,376,420.00)	62.04	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.02.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.02.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43,140,000.00	26,763,580.00	(16,376,420.00)	62.04	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.03.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	196,417,000.00	146,196,348.00	(50,220,652.00)	74.27	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.03.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	196,417,000.00	146,196,348.00	(50,220,652.00)	74.27	



81A

1 KODE REKENING	2 URAIAN	3 JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	5 (Rp)	6 (%)
5.85.5-01.5-05.0-00.01.02.2.04.01.5.1.1	Dibayar Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
5.85.5-01.5-05.0-00.01.02.2.04.01.5.1.2	Bekasja Barang dan Jasa	192.381.000.00	153.374.425.00	(39.006.575.00)	75.72
			(6,247,162,204.00)	(6,247,162,204.00)	0.00



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	5 (Rp)	6 (%)	
5.02.5-02.0-00.0-00.00.00.4	<b>UNDAH PEMUNGJANG (URUSAN PEMERINTAHAN) Keuangan</b> <b>Bekas Keuangan</b>	649.887.285.882.00	634.957.537.925.22	(14.999.847.956.78)	97.71	
5.02.5-02.0-00.0-00.00.00.4.1		<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	71.567.405.688.00	67.352.076.785.85	(4.615.378.902.15)	93.59
5.02.5-02.0-00.0-00.00.00.4.1.1		Pejak Daerah	50.289.852.262.00	49.570.750.398.00	(599.101.864.00)	98.61
5.02.5-02.0-00.0-00.00.00.4.1.2		Retribusi Daerah	132.000.000.00	53.926.900.00	(46.073.100.00)	54.83
5.02.5-02.0-00.0-00.00.00.4.1.3		Hasil Penyelenggaraan Kegiatan Daerah yang Dipisahkan	7.595.000.000.00	6.641.291.925.00	(863.708.075.00)	88.49
5.02.5-02.0-00.0-00.00.00.4.1.4		Lain-lain PAD yang Sah	14.090.603.426.00	11.084.107.562.85	(3.006.495.863.15)	78.66
5.02.5-02.0-00.0-00.00.00.4.2		<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	577.899.920.194.00	567.387.873.682.00	(10.512.046.512.00)	98.16
5.02.5-02.0-00.0-00.00.00.4.2.1		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	543.423.791.657.00	532.574.902.562.00	(10.848.889.095.00)	98.00
5.02.5-02.0-00.0-00.00.00.4.2.2		Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.476.138.537.00	34.812.971.120.00	336.832.583.00	100.98
5.02.5-02.0-00.0-00.00.00.4.3		<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	0.00	217.587.457.37	217.587.457.37	0.00
		Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	217.587.457.37	217.587.457.37	0.00
5.02.5-02.0-00.0-00.00.00.00.5		<b>BELANJA DAERAH</b>	32.382.837.910.00	26.085.525.503.00	(7.277.312.407.00)	77.51
5.02.5-02.0-00.0-00.00.00.5.1		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	11.777.728.831.00	10.505.567.205.00	(1.272.161.616.00)	89.20
5.02.5-02.0-00.0-00.00.00.5.1.2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	90.932.200.00	84.723.800.00	(6.278.400.00)	93.20
5.02.5-02.0-00.0-00.00.00.5.1.2.01.01		Penyusunan Dokumen Anggaran Perangkat Daerah	90.932.200.00	84.723.800.00	(6.278.400.00)	93.20
5.02.5-02.0-00.0-00.00.00.5.1.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	53.902.200.00	51.373.800.00	(2.528.400.00)	95.31	
5.02.5-02.0-00.0-00.00.00.5.1.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.00.00.5.1.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	33.902.200.00	51.373.800.00	(2.528.400.00)	95.31	
5.02.5-02.0-00.0-00.00.00.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	37.000.000.00	33.350.000.00	(3.650.000.00)	90.14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5	6	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.01.5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	37.000.000,00	33.350.000,00	(3.650.000,00)	90,14	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	10.089.892,041,00	9.015.059,944,00	(1.074.832,097,00)	89,35	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.089.892,041,00	9.015.059,944,00	(1.074.832,097,00)	89,35	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	10.089.892,041,00	9.015.059,944,00	(1.074.832,097,00)	89,35	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	10.089.892,041,00	9.015.059,944,00	(1.074.832,097,00)	89,35	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang A/R Daerah pada Perangkat Daerah</b>	207.200,000,00	200.238.153,00	(6.961,847,00)	96,64	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang A/R Daerah SKPD	207.200,000,00	200.238.153,00	(6.961,847,00)	96,64	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.03.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	207.200,000,00	200.238.153,00	(6.961,847,00)	96,64	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.03.02.5.1.1	Belanja Pegawai	7.200,000,00	250,000,00	(6.950,000,00)	3,42	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200,000,000,00	199,988,153,00	(11,847,00)	99,99	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	523.700,000,00	460.750,363,00	(62.949,637,00)	87,97	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.290,000,00	5.886,000,00	(404,000,00)	93,58	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6.290,000,00	5.886,000,00	(404,000,00)	93,58	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.290,000,00	5.886,000,00	(404,000,00)	93,58	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06.04	<b>Penyediaan Barang Logistik Kantor</b>	35.654,800,00	35.092,200,00	(562,600,00)	98,42	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	35.654,800,00	35.092,200,00	(562,600,00)	98,42	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.654,800,00	35.092,200,00	(562,600,00)	98,42	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06.05	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian</b>	244.886,500,00	233.202,350,00	(11.684,150,00)	95,23	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	244.886,500,00	233.202,350,00	(11.684,150,00)	95,23	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	244.886,500,00	233.202,350,00	(11.684,150,00)	95,23	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06.08	<b>Fasilitas Karyawan Tetap</b>	16.800,000,00	16,049,000,00	(751,000,00)	95,53	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	16.800,000,00	16,049,000,00	(751,000,00)	95,53	

82/19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5	6	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.06.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16,800,000.00	16,040,000.00	(760,000.00)	95.53	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220,150,000.00	220,520,813.00	(40,602,187.00)	77.46	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	220,150,000.00	220,520,813.00	(40,602,187.00)	77.46	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	220,150,000.00	220,520,813.00	(40,602,187.00)	77.46	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	239,790,000.00	235,159,375.00	(4,630,625.00)	96.67	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Mebel	30,050,000.00	27,210,000.00	(2,840,000.00)	90.55	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.07.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	30,050,000.00	27,210,000.00	(2,840,000.00)	90.55	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.07.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.07.06.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.07.06.5.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	30,050,000.00	27,210,000.00	(2,840,000.00)	90.55	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.07.06.5.2.2	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	107,940,000.00	107,940,375.00	(1,790,625.00)	98.37	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.07.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.07.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.07.06.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	100,740,000.00	107,940,375.00	(1,790,625.00)	98.37	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.07.06.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	100,740,000.00	107,940,375.00	(1,790,625.00)	98.37	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	222,550,000.00	222,660,687.00	(110,687.00)	98.45	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.08.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.08.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik	221,050,000.00	221,160,687.00	(110,687.00)	98.33	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.08.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	221,050,000.00	221,160,687.00	(110,687.00)	98.33	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.08.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5.02.0.00.0-00.01.01.2.08.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	221,050,000.00	221,160,687.00	(110,687.00)	98.33	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175,174,000.00	150,844,300.00	(24,329,700.00)	86.01	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KDM dan Perubahan PPAS	229,090,959.00	174,070,503.00	(55,020,456.00)	75.98	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	229,090,959.00	174,070,503.00	(55,020,456.00)	75.98	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	229,090,959.00	174,070,503.00	(55,020,456.00)	75.98	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	79,331,000.00	72,822,500.00	(6,508,500.00)	91.80	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	79,331,000.00	72,822,500.00	(6,508,500.00)	91.80	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	79,331,000.00	72,822,500.00	(6,508,500.00)	91.80	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran APBD	561,481,815.00	500,373,326.00	(61,108,489.00)	89.12	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	561,481,815.00	500,373,326.00	(61,108,489.00)	89.12	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.07.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	561,481,815.00	500,373,326.00	(61,108,489.00)	89.12	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.07.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	31,411,890.00	31,400,000.00	(11,890.00)	99.96	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.07.5.2.2	Belanja Modal Perabotan dan Mesin	31,411,890.00	31,400,000.00	(11,890.00)	99.96	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran APBD	268,347,700.00	250,782,700.00	(17,565,000.00)	93.40	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	237,894,300.00	218,667,700.00	(19,226,600.00)	92.23	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	237,894,300.00	218,667,700.00	(19,226,600.00)	92.23	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.08.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	32,253,700.00	32,095,000.00	(158,700.00)	99.51	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.08.5.2.2	Belanja Modal Perabotan dan Mesin	32,253,700.00	32,095,000.00	(158,700.00)	99.51	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Anggaran serta Ekshibisi Bidang Anggaran	127,880,000.00	98,589,134.00	(29,290,866.00)	77.03	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	102,380,000.00	71,030,234.00	(31,349,766.00)	71.60	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	

119



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERURANG		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	(Rp)		6
					4	5	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	102,960,000.00	71,030,234.00		(29,149,766.00)	71.09	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.09.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	25,000,000.00	24,758,900.00		(241,100.00)	98.04	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.09.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	25,000,000.00	24,758,900.00		(241,100.00)	98.04	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02	<b>Koordinator dan Pengelolaan Perencanaan Daerah</b>	490,276,262.00	433,153,786.00		(57,622,476.00)	88.26	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Koordinator dan Pengelolaan Kota Daerah	65,090,000.00	59,555,017.00		(5,534,983.00)	91.50	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	65,090,000.00	59,555,017.00		(5,534,983.00)	91.50	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65,090,000.00	59,555,017.00		(5,534,983.00)	91.50	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Peninjauan Anggaran Kas dan SPD	0.00	0.00		0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00		0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.04	<b>Pelaksanaan Penyusunan Daerah</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00		0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.05	<b>Koordinator, Fasilitas, Asistensi, Administrasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya</b>	101,609,954.00	95,224,832.00		(6,885,122.00)	94.21	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.05.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	101,609,954.00	95,724,832.00		(5,885,122.00)	94.21	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.05.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.05.1.2	Belanja Barang dan Jasa	101,609,954.00	95,724,832.00		(5,885,122.00)	94.21	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.07	<b>Koordinator dan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Anggaran Kas Daerah, Laporan Akras, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyisihan Pembiayaan Pihak Ketiga (PPK)</b>	37,831,400.00	37,589,550.00		(241,850.00)	96.14	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	37,831,400.00	37,589,550.00		(241,850.00)	96.14	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.07.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37,831,400.00	37,589,550.00		(241,850.00)	96.14	

R.1A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.02.88	Koordinator Pelaksanaan Pemasangan dan Ujung Ujung yang Tersebut untuk Angkutan Kas, Pelaksanaan Analisa Pembiayaan dan Anunsiator Ujung Daerah sebagai Optimalisasi Kas	37,641,000.00	34,255,220.00	(3,385,780.00)	91.01	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.02.88.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	37,641,000.00	34,255,220.00	(3,385,780.00)	91.01	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.02.88.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.02.88.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37,641,000.00	34,255,220.00	(3,385,780.00)	91.01	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.02.89	Akumulasi Data Persewaan dan Angkutan Kas serta Pemungutan dan Anunsiator Atas SP2D dengan Instruksi Tertentu	41,550,000.00	35,069,910.00	(6,480,090.00)	84.40	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.02.89.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	41,550,000.00	35,069,910.00	(6,480,090.00)	84.40	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.02.89.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.02.89.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	41,550,000.00	35,069,910.00	(6,480,090.00)	84.40	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.02.10	Pemungutan Aktiva Taklas Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Persewaan dan Angkutan Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Ekspansi	34,900,000.00	9,721,400.00	(25,178,600.00)	27.86	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.02.10.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	34,900,000.00	9,721,400.00	(25,178,600.00)	27.86	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.02.10.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.02.10.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34,900,000.00	9,721,400.00	(25,178,600.00)	27.86	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.02.11	Pembiayaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	172,153,908.00	166,237,857.00	(5,916,051.00)	96.56	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.02.11.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	146,653,908.00	142,455,357.00	(4,198,551.00)	97.14	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.02.11.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.02.11.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	146,653,908.00	142,455,357.00	(4,198,551.00)	97.14	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.02.11.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	25,500,000.00	23,782,500.00	(1,717,500.00)	93.26	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.02.11.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,500,000.00	23,782,500.00	(1,717,500.00)	93.26	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.03	Koordinator dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1,076,076,808.00	952,076,803.00	(124,000,005.00)	88.49	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Melanja, Pembiayaan, Pembiayaan-LD dan Biaya	65,385,994.00	47,319,900.00	(18,066,094.00)	72.37	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.03.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	65,385,994.00	47,319,900.00	(18,066,094.00)	72.37	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.03.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5.02.0-00.01.02.2.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65,385,994.00	47,319,900.00	(18,066,094.00)	72.37	

Handwritten signature or initials.

679

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Trawas dan Kecamatan	152,270,408.00	127,171,655.00	(5,098,753.00)	96.75
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.03.1	BELANJA OPERASI				
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.03.1.1	Belanja Pegawai	115,270,408.00	111,218,291.00	(4,052,117.00)	96.48
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.03.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.03.1.2	BELANJA MODAL	115,270,408.00	111,218,291.00	(4,052,117.00)	96.48
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.03.2	Belanja Modal Perleitan dan Mesin	17,000,000.00	15,953,364.00	(1,046,636.00)	93.84
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.03.2.2		17,000,000.00	15,953,364.00	(1,046,636.00)	93.84
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.04	Kontribusi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.04.1	BELANJA OPERASI	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.04.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.04.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Kecamatan Perforansi Kepala Daerah tentang Pengelolaan	480,666,600.00	480,636,080.00	(6,940,548.00)	98.70
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.05.1	BELANJA OPERASI	480,666,600.00	474,328,086.00	(6,338,514.00)	98.68
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.05.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.05.1.2	Belanja Barang dan Jasa	480,666,600.00	474,328,086.00	(6,338,514.00)	98.68
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.05.2	BELANJA MODAL	6,300,000.00	6,297,974.00	(2,026.00)	99.97
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.05.2.2	Belanja Modal Perleitan dan Mesin	6,300,000.00	6,297,974.00	(2,026.00)	99.97
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Trade Lift terhadap LHP BPP atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	26,158,000.00	11,634,850.00	(14,523,150.00)	44.48
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.06.1	BELANJA OPERASI				
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.06.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.06.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26,158,000.00	11,634,850.00	(14,523,150.00)	44.48
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Tuntutan/Perencanaan dan Tuntutan Anggaran Daerah	69,082,000.00	22,545,400.00	(17,437,400.00)	46.57
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.07.1	BELANJA OPERASI				
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.07.1.1	Belanja Pegawai	64,070,000.00	30,315,600.00	(33,744,400.00)	47.33
5.02.5-02.0-00.0-01.02.2.03.07.1.2		0.00	0.00	0.00	0.00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		AMGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5	6	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	64,070,000.00	30,325,600.00	(33,744,400.00)	47.33	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.07.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	5,913,000.00	2,220,000.00	(3,693,000.00)	37.54	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.07.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	5,913,000.00	2,220,000.00	(3,693,000.00)	37.54	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	14,977,000.00	3,802,450.00	(8,174,550.00)	31.75	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	11,977,000.00	3,802,450.00	(8,174,550.00)	31.75	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11,977,000.00	3,802,450.00	(8,174,550.00)	31.75	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah	28,189,000.00	14,891,450.00	(13,297,550.00)	52.83	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.10.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	28,189,000.00	14,891,450.00	(13,297,550.00)	52.83	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.10.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.10.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28,189,000.00	14,891,450.00	(13,297,550.00)	52.83	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Anggaran dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	177,543,806.00	168,053,807.00	(9,489,999.00)	95.22	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.11.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	137,243,806.00	128,763,807.00	(8,479,999.00)	93.82	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.11.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.11.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	137,243,806.00	128,763,807.00	(8,479,999.00)	93.82	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.11.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	40,300,000.00	40,290,000.00	(10,000.00)	99.98	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.11.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	40,300,000.00	40,290,000.00	(10,000.00)	99.98	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.12	Ambiliran Penyelidikan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	77,603,000.00	65,030,081.00	(12,572,919.00)	83.80	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.12.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	77,603,000.00	65,030,081.00	(12,572,919.00)	83.80	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.12.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.12.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	77,603,000.00	65,030,081.00	(12,572,919.00)	83.80	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.13	Akuntansi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.13.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.13.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.13.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	

279

279

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04	<b>Penunjang Urusan Keselamatan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		8,664,188,100.00	(4,961,656,587.00)	67.92	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	69,190,000.00	52,760,750.00	(16,429,250.00)	76.25	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	69,190,000.00	52,760,750.00	(16,429,250.00)	76.25	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	69,190,000.00	52,760,750.00	(16,429,250.00)	76.25	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04.02.5.1.2.04	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	8,766,666,667.00	8,520,000,000.00	(246,666,667.00)	97.19	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04.02.5.1.2.04.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04.08.5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	8,766,666,667.00	8,520,000,000.00	(246,666,667.00)	97.19	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04.08.5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan					
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5,000,000,000.00	271,437,350.00	(4,728,562,650.00)	5.43	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04.09.5.1	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	5,000,000,000.00	271,437,350.00	(4,728,562,650.00)	5.43	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04.09.5.1.1	Belanja Tidak Terduga					
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.05	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah</b>	87,228,000.00	79,291,780.00	(7,936,220.00)	90.90	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.05.02	<b>Langkah Keuangan Daerah</b>	87,228,000.00	79,291,780.00	(7,936,220.00)	90.90	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.05.02.5.1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	87,228,000.00	79,291,780.00	(7,936,220.00)	90.90	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.05.02.5.1.2	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.05.02.5.1.1	Belanja Pegawai	87,228,000.00	79,291,780.00	(7,936,220.00)	90.90	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.05.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	1,801,181,758.00	1,619,899,403.00	(181,282,355.00)	89.93	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	1,801,181,758.00	1,619,899,403.00	(181,282,355.00)	89.93	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	21,139,000.00	17,034,200.00	(4,104,800.00)	80.58	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	21,139,000.00	17,034,200.00	(4,104,800.00)	80.58	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21,139,000.00	17,034,200.00	(4,104,800.00)	80.58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5	(Rp)	6
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Penyusunan Anggaran Kibutaan Barang MKK Daerah	9,964,500.00	9,505,950.00	(458,550.00)	95.40	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	9,964,500.00	9,505,950.00	(458,550.00)	95.40	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9,964,500.00	9,505,950.00	(458,550.00)	95.40	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.05	Amalgamsanan Barang MKK Daerah	1,278,198,050.00	1,237,695,068.00	(40,502,982.00)	96.83	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.05.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,278,198,050.00	1,197,846,068.00	(80,351,982.00)	97.17	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.05.1.1	Belanja Pegawai	989,700,000.00	971,200,000.00	(18,500,000.00)	98.13	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.05.1.2	Belanja Barang dan Jasa	242,998,050.00	226,646,068.00	(16,351,982.00)	93.27	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.05.2	<b>BELANJA MODAL</b>	45,500,000.00	39,849,000.00	(5,651,000.00)	87.58	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.05.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	45,500,000.00	39,849,000.00	(5,651,000.00)	87.58	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.07	Pengawasan Barang MKK Daerah	40,262,500.00	22,781,871.00	(17,480,629.00)	56.59	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	40,262,500.00	22,781,871.00	(17,480,629.00)	56.58	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.07.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40,262,500.00	22,781,871.00	(17,480,629.00)	56.58	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.08	Penjualan Barang MKK Daerah	31,639,400.00	22,710,818.00	(8,928,582.00)	68.95	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	31,639,400.00	22,710,818.00	(8,928,582.00)	68.95	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31,639,400.00	22,710,818.00	(8,928,582.00)	68.95	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengambilan Penghasilan Barang MKK Daerah	202,949,308.00	144,397,399.00	(58,551,909.00)	71.15	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	177,349,308.00	119,901,869.00	(57,447,439.00)	67.62	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	177,349,308.00	119,901,869.00	(57,447,439.00)	67.62	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.09.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	25,600,000.00	24,475,530.00	(1,124,500.00)	95.61	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.09.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	25,600,000.00	24,475,530.00	(1,124,500.00)	95.61	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.10	Gedubitas Pengawasan, Amalgamsanan, Pemeliharaan, Amalgamsanan, dan Pengawasan Barang MKK Daerah	79,476,000.00	48,482,866.00	(31,228,134.00)	60.74	

Handwritten signature/initials.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERTURUN	
		3	4	5	6
5.01.5-02.0-00.0-01.01.2.01.10.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	79,826,000.00	48,487,866.00	(31,338,134.00)	66.74
5.01.5-02.0-00.0-01.01.2.01.10.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.5-02.0-00.0-01.01.2.01.10.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	79,826,000.00	48,487,866.00	(31,338,134.00)	66.74
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.13	Ambalan Angkutan Barang Antar Daerah dan Antar Kabupaten/Kota	235,983,000.00	117,276,261.00	(118,706,739.00)	86.29
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.13.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	135,983,000.00	117,276,261.00	(18,706,739.00)	86.29
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.13.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.13.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	135,983,000.00	117,276,261.00	(18,706,739.00)	86.29
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.04	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	1,830,373,000.00	1,573,886,913.00	(246,486,087.00)	86.46
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.04.2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	1,830,373,000.00	1,573,886,913.00	(246,486,087.00)	86.46
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.02	Akses dan Pembayaran Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	122,070,000.00	77,941,701.00	(44,128,299.00)	63.85
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	122,070,000.00	77,941,701.00	(44,128,299.00)	63.85
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	122,070,000.00	77,941,701.00	(44,128,299.00)	63.85
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	176,014,376.00	176,323,000.00	(5,091,376.00)	87.11
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	134,430,376.00	129,423,000.00	(4,997,376.00)	96.28
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	134,430,376.00	129,423,000.00	(4,997,376.00)	96.28
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.04.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	41,594,000.00	41,500,000.00	(94,000.00)	99.77
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.04.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	41,594,000.00	41,500,000.00	(94,000.00)	99.77
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.07	Perawatan dan Peralatan Ciptak Pajak Daerah	104,317,608.00	91,674,296.00	(12,643,312.00)	87.88
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	104,317,608.00	91,674,296.00	(12,643,312.00)	87.88
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	104,317,608.00	91,674,296.00	(12,643,312.00)	87.88
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.06	Pengeluaran, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	234,616,000.00	202,614,759.00	(32,001,241.00)	86.79
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	219,816,000.00	187,708,519.00	(32,107,481.00)	85.39
5.02.5-02.0-00.0-01.01.2.01.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00

R  
17





1 KODE REKENING	2 URAIAN	3 JUMLAH (Rp)		6 BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	5 (Rp)	(%)
5.02.5-02.0-00.01.00.0.00.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Penyertasan Modal Daerah	10.000.000,000,00	10.000.000,000,00	0,00	100,00
5.02.5-02.0-00.01.00.0.00.00.00.6.2.2		10.000.000,000,00	10.000.000,000,00	0,00	100,00



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

URUSAN Pemerintahan Organisasi	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)		
			3	4	5		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.05.1		<b>BELANJA DAERAH</b>	7,941,660,000.00	7,288,587,505.00	(653,078,380.00)	91.78	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,075,997,337.00	3,828,834,817.00	(247,172,520.00)	93.94	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,598,800.00	17,448,900.00	(2,149,900.00)	89.03	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.01.01.5.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19,598,800.00	17,448,900.00	(2,149,900.00)	89.03	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.01.01.5.1.1		<b>BELANJA OPERASI</b>	19,598,800.00	17,448,900.00	(2,149,900.00)	89.03	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.01.01.5.1.1.1		Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.01.01.5.1.1.2		Belanja Barang dan Jasa	19,598,800.00	17,448,900.00	(2,149,900.00)	89.03	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	3,654,371,037.00	3,466,836,552.00	(187,534,485.00)	94.87	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,654,371,037.00	3,466,836,552.00	(187,534,485.00)	94.87	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.02.01.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>	3,654,371,037.00	3,466,836,552.00	(187,534,485.00)	94.87	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1		Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.05		<b>Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah</b>	19,683,000.00	5,417,200.00	(14,267,800.00)	27.52	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.05.07		Pembelian Barang yang Menyangkut dalam Pelaksanaan Tugas	9,083,000.00	0.00	(9,083,000.00)	0.00	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.05.07.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>	9,083,000.00	0.00	(9,083,000.00)	0.00	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.05.07.5.1.1		Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.05.07.5.1.2		Belanja Barang dan Jasa	9,083,000.00	0.00	(9,083,000.00)	0.00	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.05.10		Sosialisasi/Promosi/Runding-Rundingan	9,705,000.00	5,417,200.00	(4,287,800.00)	55.82	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.05.10.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>	9,705,000.00	5,417,200.00	(4,287,800.00)	55.82	

*Handwritten mark/signature*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	4	
					(Rp)	(%)
				5	6	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.05.10.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.05.10.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9,705,000.00	5,417,200.00	(4,287,800.00)		55.82
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	272,809,000.00	270,250,550.00	(2,558,450.00)		98.28
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komputer Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	620,000.00	600,000.00	(20,000.00)		97.59
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	820,000.00	800,000.00	(20,000.00)		97.56
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	820,000.00	800,000.00	(20,000.00)		97.56
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Perawatan dan Perengajaan Kantor	50,000,000.00	49,897,000.00	(103,000.00)		98.87
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	500,000.00	0.00	(500,000.00)		0.00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.02.5.1.1	Belanja Pegawai	500,000.00	0.00	(500,000.00)		0.00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	50,000,000.00	49,897,000.00	(103,000.00)		97.69
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.02.5.2.2	Belanja Mode Perawatan dan Mesin	50,000,000.00	49,897,000.00	(103,000.00)		97.69
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,873,000.00	8,391,300.00	(481,700.00)		94.01
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	8,873,000.00	8,391,300.00	(481,700.00)		94.01
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00		0.00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8,873,000.00	8,391,300.00	(481,700.00)		94.01
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	2,397,500.00	2,855,500.00	458,000.00		85.45
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,341,500.00	2,855,500.00	(486,000.00)		85.46
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.05.5.1.1	Belanja Pegawai	310,000.00	0.00	(310,000.00)		0.00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,031,500.00	2,855,500.00	(176,000.00)		94.19
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.08	Facilitas Karyawan Tamu	2,830,000.00	2,895,250.00	65,250.00		65.29
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,830,000.00	2,895,250.00	65,250.00		65.29
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,830,000.00	2,895,250.00	65,250.00		65.29
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SMD	166,525,000.00	152,561,500.00	(13,963,500.00)		91.61
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	166,525,000.00	152,561,500.00	(13,963,500.00)		91.61
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00		0.00

81A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	166,525,000.00	153,561,500.00	(13,963,500.00)	91.61	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.06	<b>Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah</b>	6,000,000.00	3,142,366.00	(2,857,634.00)	52.21	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,950,000.00	7,060,000.00	(890,000.00)	88.36	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	7,950,000.00	7,060,000.00	(890,000.00)	88.36	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7,950,000.00	7,060,000.00	(890,000.00)	88.36	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,050,000.00	2,072,366.00	(1,977,634.00)	51.17	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.06.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4,050,000.00	2,072,366.00	(1,977,634.00)	51.17	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.06.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.06.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,050,000.00	2,072,366.00	(1,977,634.00)	51.17	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Alok Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah</b>	142,450,000.00	125,230,240.00	(17,219,760.00)	87.65	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kondominium Perumahan Dinas atau Mendirikan Dinkor Jabatan	30,190,000.00	28,212,712.00	(1,977,288.00)	71.99	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.09.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	30,190,000.00	28,212,712.00	(1,977,288.00)	71.99	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.09.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.09.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30,190,000.00	28,212,712.00	(1,977,288.00)	71.99	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Pemeliharaan Akras Operasional atau Lapangan	94,650,000.00	88,007,537.00	(6,642,463.00)	93.83	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	94,650,000.00	88,007,537.00	(6,642,463.00)	93.83	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	94,650,000.00	88,007,537.00	(6,642,463.00)	93.83	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	7,575,000.00	7,165,000.00	(410,000.00)	89.64	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.09.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	7,575,000.00	7,165,000.00	(410,000.00)	89.64	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.09.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7,575,000.00	7,165,000.00	(410,000.00)	89.64	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.09.06.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.03.5.03.5-04.0-00.01.01.2.09.06.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00	

8.15

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5	6	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.635.000,00	1.554.000,00	(81.000,00)	95,05	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.635.000,00	1.554.000,00	(81.000,00)	95,05	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.635.000,00	1.554.000,00	(81.000,00)	95,05	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.01.02.5.1	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	2.904.304.012,00	2.525.604.507,00	(378.699.505,00)	87,08	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.01.02.5.1.1	<b>Pendidikan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	617.698.954,00	425.388.639,00	(192.310.315,00)	68,85	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.01.02.5.1.2	Penyusunan Rencana Kelembagaan, Jenjang dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Anggaran ASN	45.152.800,00	42.707.190,00	(2.445.610,00)	94,57	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.01.02.5.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	45.152.800,00	42.707.190,00	(2.445.610,00)	94,57	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.01.02.5.1.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.01.02.5.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.152.800,00	42.707.190,00	(2.445.610,00)	94,57	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.01.02.5.1.2	<b>BELANJA OPERASI</b>	251.050.300,00	82.668.226,00	(168.382.074,00)	32,93	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	251.050.300,00	82.668.226,00	(168.382.074,00)	32,93	
5.03.5-01.5-04.0-00.01.02.2.01.06	<b>Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK</b>	14.375.800,00	14.150.400,00	(225.400,00)	98,43	
5.03.5-01.5-04.0-00.01.02.2.01.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	14.375.800,00	14.150.400,00	(225.400,00)	98,43	
5.03.5-01.5-04.0-00.01.02.2.01.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.5-01.5-04.0-00.01.02.2.01.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.375.800,00	14.150.400,00	(225.400,00)	98,43	
5.03.5-01.5-04.0-00.01.02.2.01.08	<b>Fasilitas Lembaga Profesi ASN</b>	150.861.250,00	134.373.106,00	(16.488.144,00)	89,07	
5.03.5-01.5-04.0-00.01.02.2.01.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	150.861.250,00	134.373.106,00	(16.488.144,00)	89,07	
5.03.5-01.5-04.0-00.01.02.2.01.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.5-01.5-04.0-00.01.02.2.01.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.861.250,00	134.373.106,00	(16.488.144,00)	89,07	
5.03.5-01.5-04.0-00.01.02.2.01.08.5.1.5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.5-01.5-04.0-00.01.02.2.01.10	<b>Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</b>	156.252.804,00	132.896.714,00	(23.356.090,00)	85,00	
5.03.5-01.5-04.0-00.01.02.2.01.10.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	156.252.804,00	132.896.714,00	(23.356.090,00)	85,00	
5.03.5-01.5-04.0-00.01.02.2.01.10.5.1.1	Belanja Pegawai	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	50,00	

8.1A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5	6	(Rp)	(%)
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.01.10.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	136,552,094.00	132,648,714.00	(3,904,380.00)	97.14		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.01.10.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	19,280,000.00	18,500,000.00	(780,000.00)	96.35		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.01.10.5.1.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	19,280,000.00	18,500,000.00	(780,000.00)	96.35		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	562,542,004.00	415,238,412.00	(146,804,592.00)	73.80		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.01	Pengembangan Mutasi ASN	37,316,200.00	28,711,400.00	(8,604,800.00)	76.94		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	37,316,200.00	28,711,400.00	(8,604,800.00)	76.94		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37,316,200.00	28,711,400.00	(8,604,800.00)	76.94		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02	<b>Pengembangan Keahlian Pegawai ASN</b>	75,169,104.00	74,729,652.00	(439,452.00)	99.42		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	60,109,104.00	59,739,652.00	(369,452.00)	99.29		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60,109,104.00	59,739,652.00	(369,452.00)	99.29		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	15,000,000.00	14,996,000.00	(4,000.00)	99.93		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	15,000,000.00	14,996,000.00	(4,000.00)	99.93		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.03	<b>Pengembangan Promosi ASN</b>	450,057,700.00	312,297,360.00	(137,760,340.00)	69.39		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	450,057,700.00	312,297,360.00	(137,760,340.00)	69.39		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	450,057,700.00	312,297,360.00	(137,760,340.00)	69.39		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.03	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	1,625,327,750.00	1,597,492,966.00	(27,834,784.00)	98.29		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.03.01	Pengembangan Keahlian Pegawai ASN	1,427,212,750.00	1,418,308,716.00	(8,904,034.00)	98.68		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.03.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,437,112,750.00	1,418,308,716.00	(18,804,034.00)	98.68		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.03.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.03.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,437,112,750.00	1,418,308,716.00	(18,804,034.00)	98.68		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.03.04	<b>Pengembangan Pendidikan Lanjutan ASN</b>	288,215,000.00	279,184,250.00	(9,030,750.00)	95.25		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.03.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	188,115,000.00	179,184,250.00	(9,030,750.00)	95.25		
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.03.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00		

Handwritten signature or initials in the top right corner.

KODE REKENDUNG	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)	(%)
		3	4	5	6	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	188,115,000.00	179,144,250.00	(8,930,750.00)	95.25	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04	<b>Pembelian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	98,234,304.00	81,082,894.00	(16,151,410.00)	81.79	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.03	Fasilitas Hasil Pembelian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	24,677,500.00	19,820,000.00	(4,857,500.00)	80.46	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	20,677,500.00	19,820,000.00	(857,500.00)	95.86	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20,677,500.00	19,820,000.00	(857,500.00)	95.86	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.05	<b>Pengeluaran Timada Jasa Bagi Pegawai</b>	16,191,000.00	15,468,440.00	(722,560.00)	94.91	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	16,191,000.00	15,468,440.00	(722,560.00)	94.91	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16,191,000.00	15,468,440.00	(722,560.00)	94.91	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.07	<b>Pembinaan Disiplin ASN</b>	54,700,554.00	53,175,254.00	(1,525,300.00)	97.11	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	54,700,554.00	53,175,254.00	(1,525,300.00)	97.11	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.07.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54,700,554.00	53,175,254.00	(1,525,300.00)	97.11	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.08	<b>Pengeluaran Penyelenggaraan Pelaksanaan ASN</b>	5,663,250.00	2,639,300.00	(3,023,950.00)	46.60	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5,663,250.00	2,639,300.00	(3,023,950.00)	46.60	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5,663,250.00	2,639,300.00	(3,023,950.00)	46.60	
5.04.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.07	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	968,864,536.00	930,157,781.00	(38,706,755.00)	96.00	
5.04.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02	<b>Sertifikasi, Akreditasi, Pengembangan Kompetensi Manjerial dan Fungsional</b>	948,864,536.00	930,157,781.00	(18,706,755.00)	96.87	
5.04.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.07	<b>Pengembangan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Anutan Fungsional, Asisten/Manajer, dan Pejabat Fungsional</b>	968,864,536.00	930,157,781.00	(38,706,755.00)	96.00	
5.04.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	897,464,536.00	874,877,946.00	(22,586,590.00)	97.49	
5.04.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.07.5.1.1	Belanja Pegawai	756,000.00	0.00	(756,000.00)	0.00	
5.04.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	896,714,536.00	874,877,946.00	(21,836,590.00)	97.57	
5.04.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.07.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	61,400,000.00	55,279,835.00	(6,120,165.00)	89.11	

219

KODE REKENING	URAJAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	(Rp)	(%)
		3	4	5	6	
5.04.5.03.5-04.0-00.01.02.2.02.07.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	60,490,000.00	53,229,075.00	(8,170,125.00)	88.47	
5.04.5.03.5-04.0-00.01.02.2.02.07.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00	
		0.00	(7,288,587,595.00)	(7,288,587,595.00)	0.00	

RA





**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

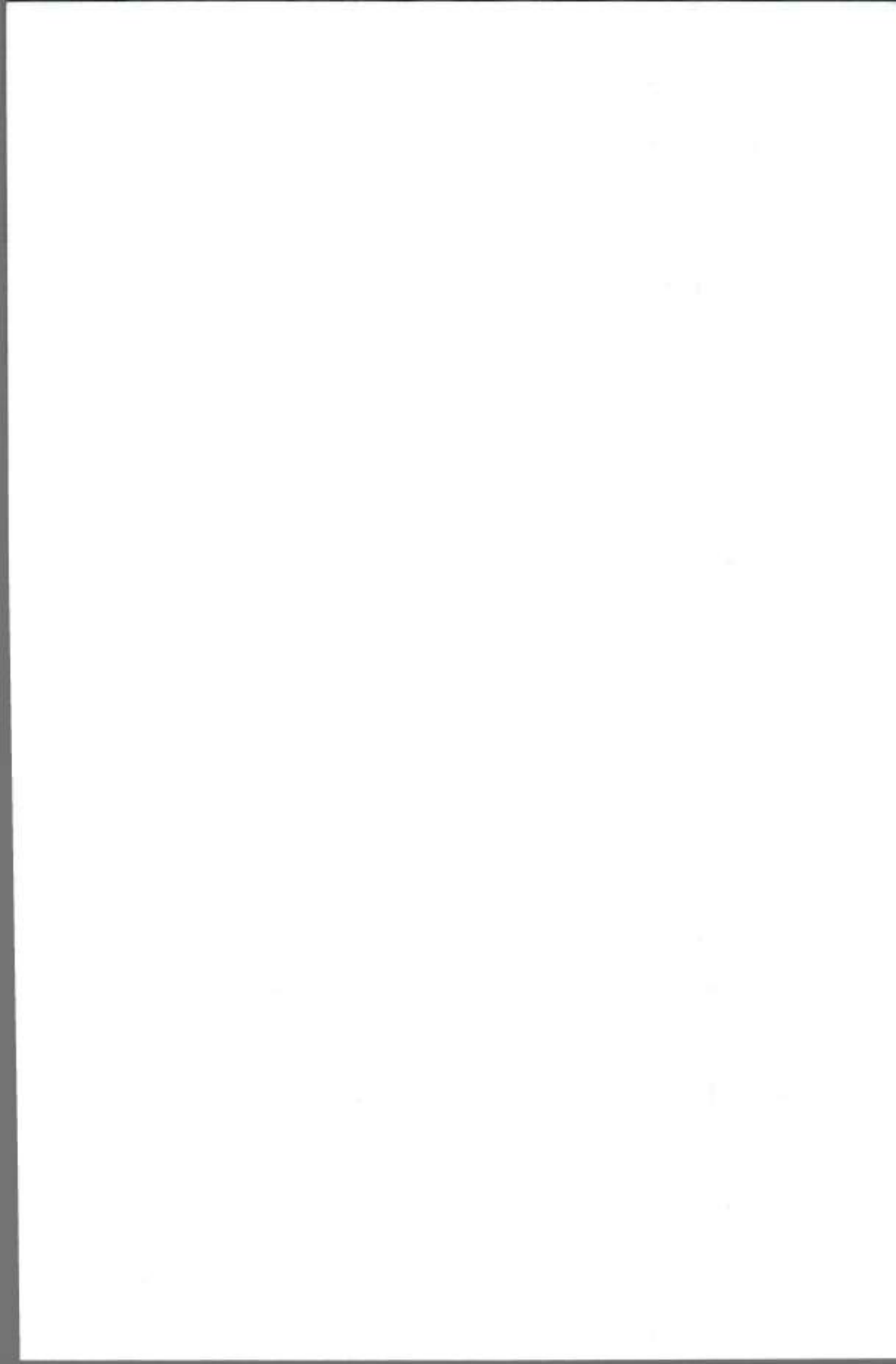
Urusan Pemerintahan Organisasi	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	5 (Rp)	6 (%)
4.02.4.02.0-00.0-00.00.00.5		<b>BELANJA DAERAH</b>	40,491,537,552.00	31,586,823,294.00	(7,905,714,258.00)	80.48
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24,802,337,158.00	19,093,664,999.00	(5,708,672,159.00)	76.98
4.02.4.02.0-00.0-00.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64,056,000.00	38,704,000.00	(25,351,000.00)	60.42
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64,056,000.00	38,704,000.00	(25,351,000.00)	60.42
4.02.4.02.0-00.0-00.03.01.2.01.01.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.01.01.5.1.1		Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.01.01.5.1.2		Belanja Barang dan Jasa	64,056,000.00	38,704,000.00	(25,351,000.00)	60.42
4.02.4.02.0-00.0-00.01.01.2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	4,223,061,250.00	3,254,386,034.00	(968,675,216.00)	77.06
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,223,061,250.00	3,254,386,034.00	(968,675,216.00)	77.06
4.02.4.02.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>	4,223,061,250.00	3,254,386,034.00	(968,675,216.00)	77.06
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.02.01.5.1.1		Belanja Pegawai	4,223,061,250.00	3,254,386,034.00	(968,675,216.00)	77.06
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.05		<b>Administrasi Koperasi Perangkat Daerah</b>	0.00	0.00	(40,000,000.00)	0.00
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.05.07		Penyusunan Pegawai yang Menunggu dalam Pelaksanaan Tugas	0.00	0.00	(40,000,000.00)	0.00
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.05.07.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	(40,000,000.00)	0.00
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.05.07.5.1.2		Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	(40,000,000.00)	0.00
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	2,307,419,016.00	1,721,973,649.00	(585,445,367.00)	74.61
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.01		Penyediaan Kebutuhan Aspal/Lainnya/Pencetakan Sampunan Kantor	25,000,000.00	14,738,358.00	(10,261,642.00)	47.05
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.01.5.1		<b>BELANJA OPERASI</b>	25,000,000.00	14,738,358.00	(10,261,642.00)	47.05

*Handwritten signature/initials*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)	(%)
					3	4
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35,050,000.00	14,738,358.00	(20,311,642.00)	(20,311,642.00)	62.05
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.02	Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kendor	136,308,000.00	99,966,600.00	(36,341,400.00)	(36,341,400.00)	73.34
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	136,308,000.00	99,966,600.00	(36,341,400.00)	(36,341,400.00)	73.34
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.03	Penyediaan Arakalan Rumah Tangga	5,444,000.00	3,345,280.00	(2,098,720.00)	(2,098,720.00)	61.45
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5,444,000.00	3,345,280.00	(2,098,720.00)	(2,098,720.00)	61.45
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5,444,000.00	3,345,280.00	(2,098,720.00)	(2,098,720.00)	61.45
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kendor	12,904,800.00	12,109,474.00	(795,326.00)	(795,326.00)	93.84
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	12,904,800.00	12,109,474.00	(795,326.00)	(795,326.00)	93.84
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12,904,800.00	12,109,474.00	(795,326.00)	(795,326.00)	93.84
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	89,333,000.00	63,415,300.00	(25,917,700.00)	(25,917,700.00)	70.99
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	89,333,000.00	63,415,300.00	(25,917,700.00)	(25,917,700.00)	70.99
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	89,333,000.00	63,415,300.00	(25,917,700.00)	(25,917,700.00)	70.99
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.05.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	20,000,000.00	19,425,000.00	(575,000.00)	(575,000.00)	97.13
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.05.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,000,000.00	19,425,000.00	(575,000.00)	(575,000.00)	97.13
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Pemungutan-usahagan	380,626,000.00	342,968,630.00	(37,657,370.00)	(37,657,370.00)	90.11
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	380,626,000.00	342,968,630.00	(37,657,370.00)	(37,657,370.00)	90.22
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	380,626,000.00	342,968,630.00	(37,657,370.00)	(37,657,370.00)	90.22
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.06.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	500,000.00	0.00	(500,000.00)	(500,000.00)	0.00
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.06.06.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	500,000.00	0.00	(500,000.00)	(500,000.00)	0.00

S. M.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
					3	4
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.06.08	Fasilitas Kuryangan Tantu	1.156.892.216,00	868.878.346,00	(288.013.870,00)		75,10
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.06.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.156.892.216,00	868.878.346,00	(288.013.870,00)		75,10
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.06.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00		0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.156.892.216,00	868.878.346,00	(288.013.870,00)		75,10
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.06.09	Pengembangan Riset Inovatif dan Kemitraan SKPD	471.261.000,00	297.126.661,00	(174.134.339,00)		63,05
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	471.261.000,00	297.126.661,00	(174.134.339,00)		63,05
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00		0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	471.261.000,00	297.126.661,00	(174.134.339,00)		63,05
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Alok Deraah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2.135.431.000,00	403.970.000,00	(1.731.461.000,00)		18,92
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.07.01	Pengadaan Kebutuhan Peralangan Dinas atau Kebutuhan Dinas Jabatan	1.650.000.000,00	0,00	(1.650.000.000,00)		0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.07.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1.650.000.000,00	0,00	(1.650.000.000,00)		0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.07.01.5.2.2	Belanja Modal Perakatan dan Mesin	1.650.000.000,00	0,00	(1.650.000.000,00)		0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.07.02	Pengadaan Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan	485.431.000,00	403.970.000,00	(81.461.000,00)		83,22
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.07.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	485.431.000,00	403.970.000,00	(81.461.000,00)		83,22
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.07.02.5.2.2	Belanja Modal Perakatan dan Mesin	485.431.000,00	403.970.000,00	(81.461.000,00)		83,22
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.08	<b>Pemeliharaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah</b>	266.280.000,00	169.500.553,00	(96.779.447,00)		62,95
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.08.01	Pemeliharaan Jasa Sifat Permanen	2.430.000,00	23.000,00	(2.397.000,00)		0,96
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.08.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3.430.000,00	33.000,00	(3.397.000,00)		0,96
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.08.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00		0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.430.000,00	33.000,00	(3.397.000,00)		0,96
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.08.02	Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	266.280.000,00	169.500.553,00	(96.779.447,00)		63,66
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.08.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	266.280.000,00	169.500.553,00	(96.779.447,00)		63,66
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.08.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00		0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.08.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	266.280.000,00	169.500.553,00	(96.779.447,00)		63,66



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.09.09	<b>Pembelian Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	3.157.273.428.00	2.171.612.633.00	(985.660.795.00)	68.78	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Sebatian	1.004.472.628.00	629.138.743.00	(385.333.885.00)	61.64	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.09.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.004.472.628.00	619.138.743.00	(385.333.885.00)	61.64	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.09.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.09.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.004.472.628.00	619.138.743.00	(385.333.885.00)	61.64	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.856.695.800.00	1.465.720.250.00	(400.975.550.00)	78.52	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	856.695.800.00	460.901.632.00	(395.794.168.00)	53.80	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	856.695.800.00	460.901.632.00	(395.794.168.00)	53.80	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.09.09.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1.010.000.000.00	1.004.818.618.00	(5.181.382.00)	99.49	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.09.09.5.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.010.000.000.00	1.004.818.618.00	(5.181.382.00)	99.49	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	245.785.000.00	59.189.240.00	(186.595.760.00)	24.08	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.09.10.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	245.785.000.00	59.189.240.00	(186.595.760.00)	24.08	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.09.10.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.09.10.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	245.785.000.00	59.189.240.00	(186.595.760.00)	24.08	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penolong Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.320.000.00	27.564.630.00	(12.755.400.00)	68.36	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.09.11.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	40.320.000.00	27.564.630.00	(12.755.400.00)	68.36	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.09.11.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.09.11.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.320.000.00	27.564.630.00	(12.755.400.00)	68.36	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.15	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	11.087.040.094.00	10.324.151.007.00	(762.889.087.00)	93.12	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.15.01	Penyenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.814.045.094.00	10.117.131.007.00	(696.914.087.00)	93.74	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.15.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	10.814.045.094.00	10.137.131.007.00	(676.914.087.00)	93.74	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.15.01.5.1.1	Belanja Pegawai	10.614.045.094.00	9.950.904.017.00	(663.061.087.00)	93.75	
4.02.4.02.0-00.0-00.02.01.2.15.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000.00	186.147.000.00	(13.853.000.00)	93.07	

8, M

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		AMGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
		3	4	5	6
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.15.02	Anggaran Akumul Dinas dan Akibat DPRD	210,965,000.00	257,620,000.00	(33,945,000.00)	74.71
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.15.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	210,965,000.00	157,620,000.00	(53,345,000.00)	74.71
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.15.02.5.1.1	Belanja Pegawai	1,005,000.00	0.00	(1,005,000.00)	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.15.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	209,960,000.00	157,620,000.00	(52,340,000.00)	75.07
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.15.03	Pelebaran Medical Check Up DPRD	62,030,000.00	28,400,000.00	(33,630,000.00)	47.40
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.15.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	62,030,000.00	28,400,000.00	(33,630,000.00)	47.40
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.15.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.15.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	62,030,000.00	28,400,000.00	(33,630,000.00)	47.40
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.16	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	1,512,916,370.00	1,009,333,674.00	(508,581,946.00)	66.49
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.16.01	Pembengkakan Administrasi Keanggotaan DPRD	124,272,112.00	118,650,692.00	(5,621,420.00)	95.48
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.16.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	124,272,112.00	118,650,692.00	(5,621,420.00)	95.48
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.16.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.16.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	124,272,112.00	118,650,692.00	(5,621,420.00)	95.48
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.16.04	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4,282,646,200.00	690,682,312.00	(3,591,963,888.00)	63.97
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.16.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4,282,646,200.00	690,682,312.00	(3,591,963,888.00)	63.97
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.16.04.5.1.1	Belanja Pegawai	489,029,258.00	309,005,622.00	(179,943,636.00)	63.20
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.16.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	489,029,258.00	309,005,622.00	(179,943,636.00)	63.20
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.16.04.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	904,615,000.00	581,586,710.00	(323,028,290.00)	64.29
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.16.04.5.2.1	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	834,615,000.00	581,586,710.00	(253,028,290.00)	69.68
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.16.04.5.2.2	Belanja Modal Asst Tetap Lainnya	70,000,000.00	0.00	(70,000,000.00)	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.02.01.2.16.04.5.2.5	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</b>	15,689,200,794.00	17,492,158,257.00	(2,197,942,097.00)	96.00
4.02.4-02.0-00.0-00.02.02.02	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	1,865,678,716.00	1,507,504,613.00	(273,177,903.00)	85.32
4.02.4-02.0-00.0-00.02.02.02.2.01	Penyusunan dan Pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah	18,687,856.00	135,704,539.00	(95,979,311.00)	74.69
4.02.4-02.0-00.0-00.02.02.02.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	18,687,856.00	135,704,539.00	(95,979,311.00)	74.69
4.02.4-02.0-00.0-00.02.02.02.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4-02.0-00.0-00.02.02.02.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18,687,856.00	135,704,539.00	(95,979,311.00)	74.69

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	5 (Rp)	6 (%)
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.01.02	Pembahasan Anggaran Perda	1,222,285,166.00	1,053,965,995.00	(168,323,171.00)	86.23
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,222,285,166.00	1,053,965,995.00	(168,323,171.00)	86.23
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,222,285,166.00	1,053,965,995.00	(168,323,171.00)	86.23
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan Undang-undang	359,342,100.00	324,445,647.00	(34,896,453.00)	90.29
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	359,342,100.00	324,445,647.00	(34,896,453.00)	90.29
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	359,342,100.00	324,445,647.00	(34,896,453.00)	90.29
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.01.04	Fasilitas Penyusunan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan Naskah Akademik	97,361,000.00	73,388,432.00	(23,972,568.00)	75.38
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.01.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	97,361,000.00	73,388,432.00	(23,972,568.00)	75.38
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.01.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	97,361,000.00	73,388,432.00	(23,972,568.00)	75.38
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.02	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	1,704,402,054.00	1,322,213,352.00	(382,187,702.00)	77.58
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.02.01	Pembahasan ALM dan PMS	276,486,000.00	249,571,460.00	(26,914,540.00)	90.27
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	276,486,000.00	249,571,460.00	(26,914,540.00)	90.27
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	276,486,000.00	249,571,460.00	(26,914,540.00)	90.27
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.02.02	<b>Pembahasan Perubahan ALM dan Perubahan PMS</b>	1,427,916,054.00	1,072,641,892.00	(355,274,162.00)	74.50
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,427,916,054.00	1,072,641,892.00	(355,274,162.00)	74.50
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,427,916,054.00	1,072,641,892.00	(355,274,162.00)	74.50
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.02.03	<b>Pembahasan APBD</b>	439,765,304.00	296,941,478.00	(142,823,826.00)	67.52
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.02.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	439,765,304.00	296,941,478.00	(142,823,826.00)	67.52
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.02.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0-00.0-00.02.02.2.02.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	439,765,304.00	296,941,478.00	(142,823,826.00)	67.52

8.1A

1	2	3		4		5		6
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.02.04	Pembelian APBD Perbaikan	238,229,500.00	257,183,661.00	(71,045,839.00)	78.35			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	328,229,500.00	257,183,661.00	(71,045,839.00)	78.35			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.02.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.02.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	328,229,500.00	257,183,661.00	(71,045,839.00)	78.35			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.02.05	Pembelian Laporan Semesta	26,459,250.00	1,846,500.00	(24,612,750.00)	6.98			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.02.05.1	BELANJA OPERASI	26,459,250.00	1,846,500.00	(24,612,750.00)	6.98			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.02.05.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.02.05.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26,459,250.00	1,846,500.00	(24,612,750.00)	6.98			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.02.06	Pembelian Pertanggungjawaban APBD	464,567,000.00	372,247,077.00	(92,319,923.00)	80.17			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.02.06.1	BELANJA OPERASI	464,567,000.00	372,247,077.00	(92,319,923.00)	80.13			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.02.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.02.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	464,567,000.00	372,247,077.00	(92,319,923.00)	80.13			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2,426,497,966.00	2,757,835,917.00	(331,337,951.00)	80.49			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1,063,854,466.00	873,493,274.00	(190,361,192.00)	82.11			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	1,063,854,466.00	873,493,274.00	(190,361,192.00)	82.11			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.03.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.03.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,063,854,466.00	873,493,274.00	(190,361,192.00)	82.11			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	845,803,000.00	714,950,936.00	(130,852,064.00)	84.53			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	845,803,000.00	714,950,936.00	(130,852,064.00)	84.53			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.03.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	845,803,000.00	714,950,936.00	(130,852,064.00)	84.53			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	633,875,000.00	595,867,015.00	(37,907,985.00)	71.72			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	633,875,000.00	595,867,015.00	(37,907,985.00)	71.72			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.03.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.02.4.02.6.00.0-00.02.02.2.03.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	633,875,000.00	595,867,015.00	(37,907,985.00)	71.72			

P.1A



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG		
		1	2	3	4		
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.03.04	Pengawasan Usaha Pemerintahan Bidang Perikanan			23,071,500.00	25,871,250.00	(2,799,750.00)	68.79
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.03.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>			23,071,500.00	15,871,250.00	(7,200,250.00)	68.79
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.03.04.5.1.1	Belanja Pegawai			0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.03.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			23,071,500.00	15,871,250.00	(7,200,250.00)	68.79
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.03.05	Pengawasan Usaha Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			23,332,750.00	0.00	(23,332,750.00)	0.00
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.03.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>			23,332,750.00	0.00	(23,332,750.00)	0.00
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.03.05.5.1.1	Belanja Pegawai			0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.03.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			23,332,750.00	0.00	(23,332,750.00)	0.00
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.03.06	Pengawasan Trade Lanyur Hasil Pemerintahan Layanan Keuangan oleh Badan Pemustaka Keuangan			9,472,750.00	4,105,250.00	(5,367,500.00)	43.34
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.03.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>			9,472,750.00	4,105,250.00	(5,367,500.00)	43.34
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.03.06.5.1.1	Belanja Pegawai			0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.03.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			9,472,750.00	4,105,250.00	(5,367,500.00)	43.34
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.03.07	Pengawasan Pengawasan Anggaran			630,088,500.00	533,548,192.00	(96,540,308.00)	87.85
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.03.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>			630,088,500.00	533,548,192.00	(96,540,308.00)	87.85
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.03.07.5.1.1	Belanja Pegawai			0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.03.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			630,088,500.00	533,548,192.00	(96,540,308.00)	87.85
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.03.08	Peningkatan Kapasitas DPRD			1,021,742,256.00	3,429,102,779.00	(2,407,360,523.00)	89.00
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.04.02	Pendidikan Tugas DPRD			1,717,965,008.00	1,507,018,467.00	(210,946,541.00)	87.72
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.04.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>			1,717,965,008.00	1,507,018,467.00	(210,946,541.00)	87.72
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.04.02.5.1.1	Belanja Pegawai			0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.04.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			1,717,965,008.00	1,507,018,467.00	(210,946,541.00)	87.72
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.04.03	Akses dan Dokumentasi Daerah			806,667,250.00	757,638,000.00	(49,029,250.00)	88.65
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.04.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>			806,667,250.00	710,074,500.00	(96,592,750.00)	88.04
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.04.03.5.1.1	Belanja Pegawai			0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.2.04.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			806,667,250.00	710,074,500.00	(96,592,750.00)	88.04

81A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	6
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.04.03.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	48,094,000.00	47,563,500.00	(530,500.00)	98.90
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.04.03.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	48,094,000.00	47,563,500.00	(530,500.00)	98.90
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.04.05	Persediaan Tenaga Ahli Fraksi	207,400,000.00	162,000,000.00	(45,400,000.00)	78.19
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.04.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	207,400,000.00	162,000,000.00	(45,400,000.00)	78.10
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.04.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.04.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	207,400,000.00	162,000,000.00	(45,400,000.00)	78.10
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	1,041,689,500.00	1,012,496,312.00	(29,193,188.00)	97.20
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.04.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,041,689,500.00	1,012,496,312.00	(29,193,188.00)	97.20
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.04.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,041,689,500.00	1,012,496,312.00	(29,193,188.00)	97.20
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.05	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	716,410,000.00	487,503,007.00	(228,906,993.00)	68.05
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.05.03	Pelaksanaan Riset	716,410,000.00	487,503,007.00	(228,906,993.00)	68.05
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.05.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	716,410,000.00	487,503,007.00	(228,906,993.00)	68.05
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.05.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.05.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	716,410,000.00	487,503,007.00	(228,906,993.00)	68.05
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.06	<b>Publisasi dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	202,766,000.00	88,914,229.00	(113,851,771.00)	43.85
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	202,766,000.00	88,914,229.00	(113,851,771.00)	43.85
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.06.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	202,766,000.00	88,914,229.00	(113,851,771.00)	43.85
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.06.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.06.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	202,766,000.00	88,914,229.00	(113,851,771.00)	43.85
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.08	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	3,585,000,000.00	3,555,944,025.00	(29,055,975.00)	99.19
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3,585,000,000.00	3,555,944,025.00	(29,055,975.00)	99.19
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.08.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,585,000,000.00	3,555,944,025.00	(29,055,975.00)	99.19
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.08.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,585,000,000.00	3,555,944,025.00	(29,055,975.00)	99.19
4.02.4.02.0.00.0.00.02.02.08.04	Fasilitasi Tugas Program DPRD	372,707,000.00	253,000,375.00	(118,616,625.00)	68.00

8.1A

81A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERURUNG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
		3	4	5	6
4.02.4.02.0.00.0-00.02.02.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	371,707,000.00	253,090,375.00	(118,616,625.00)	68.09
4.02.4.02.0.00.0-00.02.02.2.08.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02.4.02.0.00.0-00.02.02.2.08.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	371,707,000.00	253,090,375.00	(118,616,625.00)	68.09
		0.00	(32,585,823,206.00)	(32,585,823,206.00)	0.00



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

UNSUR KEMILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)  
 Kecamatan Mandiangin Kota Selatan

Urusan Pemerintahan : 7.01  
 Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.01

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3	REALISASI 4		(Rp) 5
7.01.7-01.0-00.0-00.01.00.0.00.00.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	17,051,427,558.00	16,038,641,622.07	(1,052,785,935.93)	93.84
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,887,210,998.00	10,283,012,060.64	(624,198,037.36)	94.27
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,882,298,000.00	4,144,957,400.00	(737,340,600.00)	85.17
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,282,200,000.00	1,144,957,400.00	(1,137,242,600.00)	50.17
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.3.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	36,930,000.00	27,959,400.00	(8,970,600.00)	75.71
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.3.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.3.01.01.5.1.1.1	Belanja Barang dan Jasa	36,930,000.00	27,959,400.00	(8,970,600.00)	75.71
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	161,798,500.00	166,998,000.00	(4,999,500.00)	85.88
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1.2.1	Belanja Modal Perbaikan dan Habis	77,798,500.00	68,855,000.00	(8,943,500.00)	88.50
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1.2.2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21,500,000.00	16,143,000.00	(5,357,000.00)	75.06
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1.2.5	<b>Administratif Keuangan Perangkat Daerah</b>	9,183,985,794.00	8,820,938,207.00	(363,047,587.00)	96.05
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.02	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,183,985,794.00	8,820,938,207.00	(363,047,587.00)	96.05
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	9,183,985,794.00	8,820,938,207.00	(363,047,587.00)	96.05
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	9,183,985,794.00	8,820,938,207.00	(363,047,587.00)	96.05
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.05	<b>Administratif Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	25,000,000.00	22,866,000.00	(2,134,000.00)	91.46
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Barang/Dinas Beserta Amilif Kekuasaannya	25,000,000.00	22,866,000.00	(2,134,000.00)	91.46
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.05.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	25,000,000.00	22,866,000.00	(2,134,000.00)	91.46
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.05.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000.00	22,866,000.00	(2,134,000.00)	91.46

8/11/23

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	6
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	474,868,400.00	493,392,547.00	(18,524,147.00)	93.97
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Persediaan Komponen Modal/Perawatan Bangunan Kantor	14,069,500.00	13,752,000.00	(317,500.00)	97.74
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	14,069,500.00	13,752,000.00	(317,500.00)	97.74
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14,069,500.00	13,752,000.00	(317,500.00)	97.74
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95,584,050.00	91,944,650.00	(3,639,400.00)	96.19
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	95,584,050.00	91,944,650.00	(3,639,400.00)	96.19
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	95,584,050.00	91,944,650.00	(3,639,400.00)	96.19
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cadangan dan Penggantian	52,711,850.00	44,646,666.00	(8,065,184.00)	84.70
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	52,711,850.00	44,646,666.00	(8,065,184.00)	84.70
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	52,711,850.00	44,646,666.00	(8,065,184.00)	84.70
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11,770,000.00	8,360,000.00	(3,410,000.00)	71.03
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	11,770,000.00	8,360,000.00	(3,410,000.00)	71.03
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11,770,000.00	8,360,000.00	(3,410,000.00)	71.03
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD	300,731,000.00	287,294,231.00	(13,436,769.00)	95.53
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	300,731,000.00	287,294,231.00	(13,436,769.00)	95.53
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300,731,000.00	287,294,231.00	(13,436,769.00)	95.53
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62,450,000.00	62,236,236.70	(213,763.30)	99.65
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	52,450,000.00	52,268,790.00	(181,210.00)	99.65
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.07.05.5.1	BELANJA OPERASI	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.07.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.07.05.5.1.2	BELANJA MODAL	52,450,000.00	52,268,790.00	(181,210.00)	99.65

27

8.1.5

KODE BUKUMING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.07.05.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	52,450,000.00	52,268,790.00	(181,210.00)	99.65
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Persediaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.07.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.07.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.07.07	Persediaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000.00	9,967,446.70	(5,032,553.30)	66.45
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.07.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.07.07.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.07.07.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	15,000,000.00	9,967,446.70	(5,032,553.30)	66.45
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.07.07.5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.07.07.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15,000,000.00	9,967,446.70	(5,032,553.30)	66.45
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08	<b>Persediaan Jasa Pemungjangan Urusan Pemerintahan Daerah</b>	117,220,000.00	103,278,285.00	(27,941,715.00)	78.71
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Persediaan Jasa Sifat Menyurat	6,980,000.00	6,620,000.00	(360,000.00)	97.71
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6,980,000.00	6,620,000.00	(360,000.00)	97.71
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6,980,000.00	6,620,000.00	(360,000.00)	97.71
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123,520,000.00	96,018,703.00	(27,511,297.00)	77.73
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	123,520,000.00	96,018,703.00	(27,511,297.00)	77.73
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	123,520,000.00	96,018,703.00	(27,511,297.00)	77.73
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Persediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	710,000.00	439,582.00	(270,418.00)	61.91
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	710,000.00	439,582.00	(270,418.00)	61.91
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	710,000.00	439,582.00	(270,418.00)	61.91
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjangan Urusan Pemerintahan Daerah</b>	868,457,914.00	692,708,304.94	(175,749,609.06)	79.66

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Arsip dan Peneliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pijak dan Perintah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	174,750,000.00	161,968,971.00	(12,781,029.00)	92.65	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	174,750,000.00	161,968,971.00	(12,781,029.00)	92.69	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	174,750,000.00	161,968,971.00	(12,781,029.00)	92.69	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2.06	Pemeliharaan Sarana dan Mesin Lainnya	71,455,000.00	24,233,200.00	(47,221,800.00)	33.78	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	31,455,000.00	24,233,200.00	(7,221,800.00)	77.04	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31,455,000.00	24,233,200.00	(7,221,800.00)	77.04	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2.06.5.1.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	660,252,904.00	508,536,212.94	(151,716,691.06)	76.72	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2.06.5.1.2.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	455,852,904.00	353,446,059.00	(102,406,845.00)	77.54	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2.06.5.1.2.09.5.1.1	Belanja Pegawai	1,700,000.00	0.00	(1,700,000.00)	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2.06.5.1.2.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	454,152,904.00	353,446,059.00	(100,706,845.00)	77.83	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2.06.5.1.2.09.5.1.2.09	<b>BELANJA MODAL</b>	204,400,000.00	153,090,204.94	(51,309,795.06)	74.90	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2.06.5.1.2.09.5.1.2.09.5.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	77,400,000.00	76,476,075.00	(923,925.00)	98.83	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2.06.5.1.2.09.5.1.2.09.5.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112,000,000.00	61,620,129.94	(50,379,870.06)	55.03	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2.06.5.1.2.09.5.1.2.09.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15,000,000.00	14,995,000.00	(5,000.00)	99.90	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	1,687,209,604.00	1,514,961,374.00	(172,248,230.00)	89.79	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	2,610,338,300.00	1,438,035,670.00	(1,172,302,630.00)	55.09	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Aktivitas/Service/Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Anggaran Daerah dan Instansi/Verbal Tertulis	47,139,900.00	48,451,000.00	1,311,100.00	102.78	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	33,989,900.00	28,251,000.00	(5,738,900.00)	83.12	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.01.01.5.1.1.1	Belanja Barang dan Jasa	33,989,900.00	28,251,000.00	(5,738,900.00)	83.12	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.01.01.5.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	13,150,000.00	12,200,000.00	(950,000.00)	92.78	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.01.01.5.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	13,150,000.00	12,200,000.00	(950,000.00)	92.78	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.01.01.5.2.2	Aktivitas Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,563,198,400.00	1,398,586,670.00	(164,611,730.00)	89.47	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.01.02	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,546,253,800.00	1,382,163,420.00	(164,090,380.00)	89.39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	6
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	1,250,000.00	0.00	(1,250,000.00)	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	530,396,800.00	418,277,100.00	(112,119,700.00)	28.85
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.01.02.5.1.5	Belanja Hibah	1,014,607,090.00	963,886,320.00	(50,720,690.00)	95.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.01.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	16,945,000.00	16,431,250.00	(513,750.00)	96.91
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.01.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16,945,000.00	16,431,250.00	(513,750.00)	96.91
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.04	<b>Perencanaan Usulan Pemerintahan yang Disampaikan kepada Camat</b>	76,670,604.00	75,925,204.00	(745,200.00)	98.77
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.04.02	Aspek-aspek (Rencana Pemerintahan yang terkait dengan Nopropotuh	76,670,604.00	75,925,204.00	(745,200.00)	98.77
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.04.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	44,270,904.00	43,769,204.00	(501,700.00)	98.87
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.04.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.04.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44,270,904.00	43,769,204.00	(501,700.00)	98.87
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.04.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	32,600,000.00	32,156,000.00	(443,500.00)	98.64
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.04.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32,600,000.00	32,156,000.00	(443,500.00)	98.64
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	4,432,458,602.00	4,193,488,763.43	(238,970,038.57)	94.61
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.01	<b>Kontribusi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	14,194,250.00	13,204,250.00	(990,000.00)	93.03
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	14,194,250.00	13,204,250.00	(990,000.00)	93.03
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	14,194,250.00	13,204,250.00	(990,000.00)	93.03
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14,194,250.00	13,204,250.00	(990,000.00)	93.03
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	286,861,802.00	222,724,066.00	(64,137,216.00)	81.85
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	55,195,250.00	51,090,070.00	(4,105,180.00)	92.56
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	55,195,250.00	51,090,070.00	(4,105,180.00)	92.56
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55,195,250.00	51,090,070.00	(4,105,180.00)	92.56
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.02	<b>Pembangunan Sarana dan Peralatan Kelurahan</b>	677,662,602.00	628,710,666.00	(48,952,528.00)	92.79
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	379,762,602.00	337,412,046.00	(42,350,556.00)	88.85
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	1,750,000.00	0.00	(1,750,000.00)	0.00

8.2A



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
					3	4
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	378,032,402.00	337,412,046.00	(40,600,356.00)		89.26
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	297,800,000.00	291,298,020.00	(6,601,980.00)		97.78
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	297,800,000.00	291,298,020.00	(6,601,980.00)		97.78
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.04	Evaluasi Kinerja	54,003,450.00	42,823,950.00	(11,079,500.00)		79.48
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	54,003,450.00	42,823,950.00	(11,079,500.00)		79.48
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00		0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54,003,450.00	42,823,950.00	(11,079,500.00)		79.48
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Komunitas Tingkat Kecamatan</b>	3,631,403,250.00	3,452,580,427.43	(178,642,822.57)		95.21
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Komunitas	3,631,403,250.00	3,452,580,427.43	(178,642,822.57)		95.21
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.03.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,361,987,250.00	3,206,834,727.43	(155,163,522.57)		95.38
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.03.02.5.1.1	Belanja Pegawai	875,000.00	0.00	(875,000.00)		0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,875,112,250.00	2,711,480,541.09	(163,702,709.00)		94.65
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.03.02.5.1.5	Belanja Hibah	486,000,000.00	486,415,186.43	(584,813.57)		99.88
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.03.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	269,416,000.00	259,735,700.00	(9,680,300.00)		93.07
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.03.02.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	269,416,000.00	259,735,700.00	(680,300.00)		93.07
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04.2.01.01.04	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	84,549,054.00	67,179,404.00	(17,369,650.00)		79.46
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04.2.01	<b>Kontribusi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	84,549,054.00	67,179,404.00	(17,369,650.00)		79.46
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kapasitas Adegan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Posko Vektor di Wilayah Kecamatan	84,549,054.00	67,179,404.00	(17,369,650.00)		79.46
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	81,295,054.00	64,595,404.00	(16,699,650.00)		79.01
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00		0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	81,295,054.00	64,595,404.00	(16,699,650.00)		79.01
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04.2.01.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	2,796,000.00	2,594,000.00	(202,000.00)		93.14
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04.2.01.01.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	2,796,000.00	2,594,000.00	(202,000.00)		93.14
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04.2.01.01.5.2.2		0.00	(16,038,641,622.07)	(16,038,641,622.07)		0.00

8/14

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

URUSAN Pemerintahan Organisasi	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	5 (Rp)	
7.01.7-01.0-00.0-00.00.00.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	14,817,237,145.00	13,696,503,045.00	(1,121,234,100.00)	92.43
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,361,692,179.00	8,596,988,240.00	(864,703,939.00)	90.87
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.01	Pencananaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,788,000.00	15,432,950.00	4,346,050.00	78.02
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.01.01	Penyusunan Anggaran Perencanaan Perangkat Daerah	19,780,000.00	15,432,950.00	(4,346,050.00)	78.02
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	19,780,000.00	15,432,950.00	(4,346,050.00)	78.03
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	7,871,764,802.00	7,199,659,204.00	(672,105,598.00)	91.46
7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,871,764,802.00	7,199,659,204.00	(672,105,598.00)	91.46
7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	7,871,764,802.00	7,199,659,204.00	(672,105,598.00)	91.46
7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	7,871,764,802.00	7,199,659,204.00	(672,105,598.00)	91.46
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	132,450,000.00	125,688,124.00	(6,761,876.00)	94.89
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah (SBPD)	132,450,000.00	125,688,124.00	(6,761,876.00)	94.89
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.03.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	132,450,000.00	125,688,124.00	(6,761,876.00)	94.89
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.03.02.5.1.1	Belanja Pegawai	4,450,000.00	0.00	(4,450,000.00)	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	128,000,000.00	125,688,124.00	(2,311,876.00)	98.19
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.05	<b>Administrasi Kipagawatan Perangkat Daerah</b>	20,000,000.00	18,792,800.00	(1,207,200.00)	93.96
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berenda Akibat Kolaborasi	20,000,000.00	18,792,800.00	(1,207,200.00)	93.96

8/19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5	(Rp)	(%)
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.05.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	20,000,000.00	18,292,800.00	(1,707,200.00)		91.46
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.05.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	18,292,800.00	(1,707,200.00)		91.46
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.05	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	514,595,256.00	444,640,196.00	(69,955,060.00)		86.41
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.05.01	Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,603,650.00	14,130,100.00	(473,550.00)		95.05
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	14,865,650.00	14,130,100.00	(735,550.00)		95.05
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.01.5.1.1	Belanja Pegawai	555,000.00	0.00	(555,000.00)		0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14,310,650.00	14,130,100.00	(180,550.00)		98.74
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.03	Penyediaan Perbaikan Rumah Tangga	85,083,106.00	78,202,500.00	(6,880,606.00)		25.23
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0.00	0.00	0.00		0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00		0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.03.5.1.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	80,063,106.00	78,202,500.00	(1,860,606.00)		35.23
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.03.5.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	80,063,106.00	78,202,500.00	(1,860,606.00)		35.23
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.03.5.2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94,653,808.00	90,012,850.00	(4,640,958.00)		95.10
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	94,650,808.00	90,012,850.00	(4,637,958.00)		95.10
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	1,105,000.00	0.00	(1,105,000.00)		0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	93,545,808.00	90,012,850.00	(3,532,958.00)		96.22
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54,245,000.00	48,206,075.00	(6,038,925.00)		89.79
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	54,245,000.00	48,206,075.00	(6,038,925.00)		89.79
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.05.5.1.1	Belanja Pegawai	555,000.00	0.00	(555,000.00)		0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	53,690,000.00	48,206,075.00	(5,483,925.00)		90.72
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Makanan dan Perawatan Akomodasi-Untangan	11,100,000.00	10,040,000.00	(1,060,000.00)		90.45
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	11,100,000.00	10,040,000.00	(1,060,000.00)		90.45
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.06.5.1.1	Belanja Pegawai	270,000.00	0.00	(270,000.00)		0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10,830,000.00	10,040,000.00	(790,000.00)		92.71
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.08	Penyediaan Kebutuhan Teras	4,880,000.00	652,400.00	(4,228,000.00)		34.75

219

KODE REKENING	URAIAN	JUNILAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	5	6
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,880,000.00	653,400.00	(1,226,600.00)	34.76	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,880,000.00	653,400.00	(1,226,600.00)	34.76	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.09	Penyediaan Apat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257,791,000.00	252,895,271.00	(4,895,729.00)	98.10	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	257,791,000.00	252,895,271.00	(4,895,729.00)	98.10	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	350,000.00	0.00	(350,000.00)	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	257,441,000.00	252,895,271.00	(4,545,729.00)	98.23	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	126,905,000.00	110,340,307.00	(26,555,693.00)	80.60	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Sarat Masyarakat	3,505,000.00	3,330,000.00	(175,000.00)	96.64	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.08.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,505,000.00	3,330,000.00	(175,000.00)	96.64	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.08.01.5.1.1	Belanja Pegawai	185,000.00	0.00	(185,000.00)	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,320,000.00	3,330,000.00	10,000.00	100.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131,400,000.00	105,020,307.00	(26,379,693.00)	79.57	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.08.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	131,400,000.00	105,020,307.00	(26,379,693.00)	79.93	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.08.02.5.1.1	Belanja Pegawai	880,000.00	0.00	(880,000.00)	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.08.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130,520,000.00	105,020,307.00	(25,499,693.00)	80.35	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09	<b>Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	666,196,627.00	592,924,459.00	(73,272,168.00)	89.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.02	Pembelian Jasa Amubuhan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Besar Operasional atau Lapangan	145,000,000.00	141,089,350.00	(3,910,650.00)	97.29	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	145,000,000.00	141,089,350.00	(3,910,650.00)	97.30	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	1,050,000.00	0.00	(1,050,000.00)	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	143,950,000.00	141,089,350.00	(2,860,650.00)	98.01	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.06	Pembelian Perawatan dan Mesin Lainnya	24,347,050.00	20,622,500.00	(3,724,550.00)	84.70	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	24,347,050.00	20,622,500.00	(3,724,550.00)	84.70	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.06.5.1.1	Belanja Pegawai	290,000.00	0.00	(290,000.00)	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24,057,050.00	20,622,500.00	(3,434,550.00)	85.71	

14

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.09	Pemerintah/Wilayah/Gesling Kantor dan Anggaran Lainnya	496,849,577.00	431,212,609.00	(65,636,968.00)	86.79
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	496,849,577.00	431,212,609.00	(65,636,968.00)	86.79
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	15,270,000.00	0.00	(15,270,000.00)	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	481,579,577.00	431,212,609.00	(50,366,968.00)	89.54
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.09.5.1.2.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1,608,631,694.00	1,531,119,500.00	(77,502,194.00)	95.18
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	1,551,402,965.00	1,474,509,787.00	(76,893,178.00)	95.04
7.01.7-01.0-00.0-00.02.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait Tingkat	24,944,500.00	22,668,500.00	(2,276,000.00)	90.89
7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	24,944,500.00	22,668,500.00	(2,276,000.00)	90.88
7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24,944,500.00	22,668,500.00	(2,276,000.00)	90.88
7.01.7-01.0-00.0-00.02.02.2.01.02	Penyediaan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,526,458,465.00	1,451,841,287.00	(74,617,178.00)	95.11
7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,431,703,255.00	1,358,134,847.00	(73,568,408.00)	94.85
7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	790,000.00	0.00	(790,000.00)	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	611,003,255.00	578,830,766.00	(32,163,499.00)	94.74
7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.01.02.5.1.5	Belanja Hibah	609,000,000.00	779,349,081.00	(170,349,081.00)	95.04
7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.01.02.5.1.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	94,753,200.00	93,706,440.00	(1,046,760.00)	96.90
7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.01.02.5.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	94,753,200.00	93,706,440.00	(1,046,760.00)	96.90
7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.01.02.5.2.2	Perencanaan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan kepada Camat	57,220,719.00	56,609,713.00	(611,006.00)	98.93
7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.04.02	Perencanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Masyarakat	57,220,719.00	56,609,713.00	(611,006.00)	98.93
7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.04.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	57,220,719.00	56,609,713.00	(611,006.00)	98.93
7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.04.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.04.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	57,220,719.00	56,609,713.00	(611,006.00)	98.93
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3,786,443,532.00	3,604,005,305.00	(182,438,227.00)	95.19
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	650,010,638.00	570,681,634.00	(79,329,004.00)	87.80
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.02.01	Analisis dan Sosialisasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Kecamatan dan Pembangunan di Kelurahan	54,833,000.00	45,427,190.00	(9,405,810.00)	82.70

R.19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	4	(Rp)	(%)
						5	6
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	54,933,200.00	45,427,150.00			(9,506,050.00)	82.70
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,410,000.00	0.00			(3,410,000.00)	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	51,523,200.00	45,427,150.00			(6,096,050.00)	88.17
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.02.02	Pembelian Sarana dan Peralatan Kelembagaan	510,876,008.00	448,278,408.00			(62,597,600.00)	87.84
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	334,751,028.00	277,479,658.00			(57,271,369.00)	85.44
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00			0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	334,751,028.00	277,479,658.00			(57,271,369.00)	85.44
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.02.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	186,125,000.00	171,298,750.00			(14,826,250.00)	92.03
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.02.02.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	186,125,000.00	171,298,750.00			(14,826,250.00)	92.03
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.02.04	Evaluasi Kelembagaan	84,201,700.00	76,476,275.00			(7,725,425.00)	90.83
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.02.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	84,201,700.00	76,476,275.00			(7,725,425.00)	90.83
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.02.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00			0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.02.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	84,201,700.00	76,476,275.00			(7,725,425.00)	90.83
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.03	<b>Pembudayaan Lembaga Komunitas Tingkat Kecamatan</b>	3,136,932,604.00	3,034,121,471.00			(102,809,133.00)	96.72
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.03.02	Anggaran Koperasi Lembaga Komunitas	3,125,887,604.00	3,025,321,471.00			(100,564,133.00)	96.78
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.03.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3,110,887,604.00	3,010,338,471.00			(100,549,133.00)	96.77
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.03.02.5.1.1	Belanja Pegawai	7,885,000.00	0.00			(7,885,000.00)	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,098,002,604.00	3,025,338,471.00			(72,664,133.00)	97.46
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.03.02.5.1.5	Belanja Hibah	205,000,000.00	185,000,000.00			(20,000,000.00)	90.24
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.03.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	15,000,000.00	14,985,000.00			(15,000.00)	99.90
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.03.02.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	15,000,000.00	14,985,000.00			(15,000.00)	99.90
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.03.05	Fasilitas Pemrosesan Teknologi Tepat Guna	11,045,000.00	8,800,000.00			(2,245,000.00)	79.67
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.03.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	11,045,000.00	8,800,000.00			(2,245,000.00)	79.67
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.03.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00			0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.03.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11,045,000.00	8,800,000.00			(2,245,000.00)	79.67
7.01.7-01.0-00.0-00.02.04	<b>Program Koordinasi Kerentanan dan Ketertarikan Umum</b>	60,499,750.00	51,590,000.00			(8,889,750.00)	85.61

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5	6	(Rp)	(%)
7.01.7-01.0-00.0-00.02.04.2.01.01	Koordinasi Utama Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kebertahanan Dasar	60.479.750,00	53.500.000,00	(6.889.750,00)	88,62		
7.01.7-01.0-00.0-00.02.04.2.01.01	Struktur dengan Kegiatan Negara Republik Indonesia, Tingkat Nasional Indonesia dan Instansi Kewilayahan Masyarakat	60.479.750,00	53.500.000,00	(6.889.750,00)	88,62		
7.01.7-01.0-00.0-00.02.04.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	56.729.750,00	49.840.000,00	(6.889.750,00)	87,86		
7.01.7-01.0-00.0-00.02.04.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.01.7-01.0-00.0-00.02.04.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	56.729.750,00	49.840.000,00	(6.889.750,00)	87,86		
7.01.7-01.0-00.0-00.02.04.2.01.01.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00		
7.01.7-01.0-00.0-00.02.04.2.01.01.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00		
		0,00	(13.696.503,045,00)	(13.696.503,045,00)	0,00		

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

URSAH PEMERINTAHAN Organisasi	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		KODE REKENING	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)
			1	3		4
7.01.7-01.0-00.0-00.03.00.00.00.00.5	<b>BELANJA DAERAH</b>		14,194,387,750.00	13,678,176,189.00	(516,261,569.00)	96.36
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01	<b>Program Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		8,932,313,088.00	9,479,842,802.00	(452,370,296.00)	95.45
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		33,434,304.00	33,434,304.00	0.00	100.00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.3.01.01	Ayasan Badan Penyelenggara Pemerintahan Perangkat Daerah		33,434,304.00	33,434,304.00	0.00	100.00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>		31,434,304.00	31,434,304.00	0.00	100.00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa		31,434,304.00	31,434,304.00	0.00	100.00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		8,388,318,006.00	8,013,149,171.00	(355,168,835.00)	95.76
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.02.01	Penyediaan Jasa dan Tunjangan ASN		8,388,318,006.00	8,013,149,171.00	(355,168,835.00)	95.76
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>		8,388,318,006.00	8,013,149,171.00	(355,168,835.00)	95.76
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai		157,450,000.00	146,990,651.00	(10,659,349.00)	93.40
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		157,450,000.00	146,990,651.00	(10,659,349.00)	93.40
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.03.02	Pengadaan Barang Milik Daerah SPPD		157,450,000.00	146,990,651.00	(10,659,349.00)	93.40
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.03.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>		157,450,000.00	146,990,651.00	(10,659,349.00)	93.40
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.03.02.5.1.1	Belanja Pegawai		7,450,000.00	250,000.00	(7,200,000.00)	3.36
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa		150,000,000.00	146,990,651.00	(3,009,349.00)	97.56
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.05	<b>Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah</b>		21,150,000.00	19,182,150.00	(1,967,850.00)	90.79
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alat-alat Kependidikan		21,150,000.00	19,182,150.00	(1,967,850.00)	90.79
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.05.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>		21,150,000.00	19,182,150.00	(1,967,850.00)	90.79



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5	6	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.05.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21,150,000.00	19,107,150.00	(1,967,850.00)	90.70	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	445,595,625.00	445,595,625.00	(746,425,963.00)	98.44	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,252,000.00	8,252,000.00	0.00	100.00	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	8,252,000.00	8,252,000.00	0.00	100.00	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8,252,000.00	8,252,000.00	0.00	100.00	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74,941,360.00	74,941,360.00	(784,540.00)	98.96	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	74,941,360.00	74,941,360.00	(784,540.00)	98.96	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	74,941,360.00	74,941,360.00	(784,540.00)	98.96	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,514,250.00	38,371,330.00	(2,142,920.00)	94.71	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	40,514,250.00	38,371,330.00	(2,142,920.00)	94.71	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.05.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40,514,250.00	38,371,330.00	(2,142,920.00)	94.71	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Pembelian Perundang-undangan	9,770,000.00	8,120,000.00	(1,650,000.00)	83.11	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	9,770,000.00	8,120,000.00	(1,650,000.00)	83.11	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9,770,000.00	8,120,000.00	(1,650,000.00)	83.11	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.08	Penyediaan Kebutuhan Tantu	804,000.00	671,200.00	(132,800.00)	83.46	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	804,000.00	671,200.00	(132,800.00)	83.46	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	804,000.00	671,200.00	(132,800.00)	83.46	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.09	Penyediaan Saran Kebutuhan dan Konsumsi SIPD	326,949,142.00	315,233,739.00	(11,715,403.00)	96.42	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	326,949,142.00	315,233,739.00	(11,715,403.00)	96.42	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	750,000.00	250,000.00	(500,000.00)	33.33	
7.01.7-01.8-00.0-00.03.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	326,199,142.00	314,983,739.00	(11,215,403.00)	96.56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERURANG)	
		AMGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5	6	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.07	Pengadaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101,050,000.00	78,070,288.00	(21,979,712.00)	78.25	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101,050,000.00	78,070,288.00	(21,979,712.00)	78.25	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.07.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,950,000.00	0.00	(1,950,000.00)	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.07.09.5.1.1	Belanja Pegawai	1,950,000.00	0.00	(1,950,000.00)	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.07.09.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	100,100,000.00	79,070,288.00	(20,929,712.00)	79.07	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.07.09.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100,100,000.00	79,070,288.00	(20,929,712.00)	79.07	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08	<b>Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	171,700,000.00	106,777,789.00	(64,922,211.00)	61.70	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08.01	Pemeliharaan Jasa Sewa Masyarakat	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	100.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	100.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	100.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08.02	<b>Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	129,600,000.00	105,177,789.00	(24,422,211.00)	81.15	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	129,600,000.00	105,177,789.00	(24,422,211.00)	81.15	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	129,600,000.00	105,177,789.00	(24,422,211.00)	81.15	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	657,695,386.00	636,149,820.00	(21,546,566.00)	96.72	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.02	<b>Perawatan, Reparasi, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	155,500,000.00	151,018,602.00	(4,481,398.00)	97.12	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	155,500,000.00	151,018,602.00	(4,481,398.00)	97.12	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	155,500,000.00	151,018,602.00	(4,481,398.00)	97.12	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.06	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	36,721,501.00	36,405,210.00	(316,291.00)	99.14	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	36,721,501.00	36,405,210.00	(316,291.00)	99.14	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	36,721,501.00	36,405,210.00	(316,291.00)	99.14	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.09	<b>Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	465,473,885.00	448,774,908.00	(16,748,977.00)	96.40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5	6	5	(%)
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	448,527,485.00	433,005,898.00	(15,521,677.00)	96.54		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	1,160,000.00	0.00	(1,160,000.00)	0.00		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	447,367,485.00	433,005,898.00	(14,361,677.00)	96.79		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.09.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	16,946,400.00	15,719,100.00	(1,227,300.00)	92.76		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.09.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	16,946,400.00	15,719,100.00	(1,227,300.00)	92.76		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	1,282,398,858.00	1,271,242,608.00	(11,156,250.00)	99.13		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	1,195,998,000.00	1,186,018,250.00	(9,980,750.00)	99.17		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tingkat	31,765,250.00	29,846,750.00	(1,918,500.00)	93.96		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	31,765,250.00	29,846,750.00	(1,918,500.00)	93.96		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31,765,250.00	29,846,750.00	(1,918,500.00)	93.96		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.01.02	<b>Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	1,164,233,250.00	1,156,171,500.00	(8,062,750.00)	99.31		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,152,233,250.00	1,144,405,500.00	(7,828,750.00)	99.32		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.01.02.5.1.1	Belanja Pegawai	900,000.00	0.00	(900,000.00)	0.00		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	192,333,250.00	192,962,500.00	(6,341,250.00)	97.80		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.01.02.5.1.5	Belanja Hibah	954,000,000.00	951,413,000.00	(2,587,000.00)	99.73		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.01.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	12,000,000.00	11,766,000.00	(234,000.00)	96.00		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.01.02.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	12,000,000.00	11,766,000.00	(234,000.00)	96.00		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.04	<b>Alokasi Dana Urusan Pemerintahan yang Dيمقipkan kepada Camat</b>	86,399,858.00	85,224,358.00	(1,175,500.00)	98.64		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.04.02	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Manajemen</b>	86,399,858.00	85,224,358.00	(1,175,500.00)	98.64		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.04.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	79,399,858.00	78,468,858.00	(931,000.00)	98.80		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.04.02.5.1.1	Belanja Pegawai	900,000.00	0.00	(900,000.00)	0.00		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.04.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	78,499,858.00	78,468,858.00	(31,000.00)	99.94		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.04.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	7,000,000.00	6,775,500.00	(224,500.00)	96.79		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.04.02.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	7,000,000.00	6,775,500.00	(224,500.00)	96.79		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03	<b>Program Pembiayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	2,888,657,812.00	2,846,460,821.00	(42,196,991.00)	98.20		
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.02	<b>Kegiatan Pembiayaan Kelurahan</b>	659,306,278.00	629,992,877.00	(29,313,401.00)	95.55		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERBURANG	
		3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	5 (Rp)	6 (%)
7.01.7-01.0-00.03.03.2.02.01	Amplifikasi Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	82,369,650.00	74,317,580.00	(8,052,070.00)	80.22
7.01.7-01.0-00.03.03.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	82,369,650.00	74,317,580.00	(8,052,070.00)	90.22
7.01.7-01.0-00.03.03.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,960,000.00	0.00	(3,960,000.00)	0.00
7.01.7-01.0-00.03.03.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	78,409,650.00	74,317,580.00	(4,092,070.00)	94.78
7.01.7-01.0-00.03.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	593,873,628.00	542,710,197.00	(51,163,431.00)	91.25
7.01.7-01.0-00.03.03.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	296,788,628.00	277,788,687.00	(18,999,941.00)	93.60
7.01.7-01.0-00.03.03.2.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.03.03.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	296,788,628.00	277,788,687.00	(18,999,941.00)	93.60
7.01.7-01.0-00.03.03.2.02.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	267,085,000.00	264,921,510.00	(2,163,500.00)	99.19
7.01.7-01.0-00.03.03.2.02.02.5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	267,085,000.00	264,921,510.00	(2,163,500.00)	99.19
7.01.7-01.0-00.03.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	13,063,000.00	12,965,100.00	(97,900.00)	99.25
7.01.7-01.0-00.03.03.2.02.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	13,063,000.00	12,965,100.00	(97,900.00)	99.25
7.01.7-01.0-00.03.03.2.02.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.03.03.2.02.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13,063,000.00	12,965,100.00	(97,900.00)	99.25
7.01.7-01.0-00.03.03.2.03	<b>Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	2,239,351,534.00	2,216,467,944.00	(22,883,590.00)	98.98
7.01.7-01.0-00.03.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2,239,351,534.00	2,216,467,944.00	(22,883,590.00)	98.98
7.01.7-01.0-00.03.03.2.03.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2,212,904,534.00	2,191,385,544.00	(21,518,990.00)	99.03
7.01.7-01.0-00.03.03.2.03.02.5.1.1	Belanja Pegawai	1,125,000.00	0.00	(1,125,000.00)	0.00
7.01.7-01.0-00.03.03.2.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,085,779,534.00	2,066,385,544.00	(19,393,990.00)	99.07
7.01.7-01.0-00.03.03.2.03.02.5.1.5	Belanja Hibah	125,000.00	125,000.00	0.00	100.00
7.01.7-01.0-00.03.03.2.03.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	20,447,000.00	25,082,400.00	4,635,400.00	94.84
7.01.7-01.0-00.03.03.2.03.02.5.2.2	Belanja Modal Penelitian dan Mesin	20,447,000.00	25,082,400.00	4,635,400.00	94.84
7.01.7-01.0-00.03.03.2.03.02.5.2.2	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Kestertiban Umum	81,018,000.00	80,479,558.00	(538,442.00)	99.34
7.01.7-01.0-00.03.03.2.03.04	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	81,018,000.00	80,479,558.00	(538,442.00)	99.34
7.01.7-01.0-00.03.03.2.03.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	81,018,000.00	80,479,558.00	(538,442.00)	99.34
7.01.7-01.0-00.03.03.2.03.04.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	81,018,000.00	80,479,558.00	(538,442.00)	99.34

819

1 KODE REKONSING	2 URAIAN	3 JUNJLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERURANG)	
		4 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	5 REALISASI	6 (Rp)	7 (%)
7.01.7-01.0-00.03.04.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.7-01.0-00.03.04.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	81,718,300.00	80,475,958.00	(3,38,042.00)	99.34
			(13,678,126,189.00)	(13,678,126,189.00)	0.00

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Usuhan Pemerintahan : 8.01  
 Organisasi : 8.01.8-01.1-05.0-00.04  
 URSUR PEMERINTAHAN UMUM Kesehatan Bangsa dan Politik  
 Kantor Kesehatan Bangsa dan Politik

1 KODE REKENING	2 URAIAN	3 JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(Rp)	(%)
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.00.00.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	5,874,090,226.00	4,875,170,050.00	(958,920,186.00)	83.56	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	1,940,948,290.00	1,714,932,687.00	(246,015,513.00)	87.45	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	6,490,000.00	3,660,300.00	(629,700.00)	87.22	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,490,000.00	5,660,300.00	(629,700.00)	87.22	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6,490,000.00	5,660,300.00	(829,700.00)	87.22	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6,490,000.00	5,660,300.00	(829,700.00)	87.22	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1,564,647,600.00	1,364,370,742.00	(200,276,858.00)	87.20	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.02.01	Penyediaan Gift dan Tunjangan ASN	1,564,647,600.00	1,364,370,742.00	(200,276,858.00)	87.20	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,564,647,600.00	1,364,370,742.00	(200,276,858.00)	87.20	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	278,472,000.00	238,600,172.00	(39,866,628.00)	86.27	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	764,000.00	534,000.00	(230,000.00)	69.90	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.01	Penyediaan Komputer, Instalasi Listrik/Perengkapan Bangunan Kantor	764,000.00	534,000.00	(230,000.00)	69.90	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	764,000.00	534,000.00	(230,000.00)	69.90	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	764,000.00	534,000.00	(230,000.00)	69.90	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perengkap Kantor	132,300,000.00	112,434,000.00	(19,866,000.00)	84.98	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.02.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	132,300,000.00	112,434,000.00	(19,866,000.00)	84.98	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.02.5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	132,300,000.00	112,434,000.00	(19,866,000.00)	84.98	

8/19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERUBAH)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	(Rp)	(%)
					4	5
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11,510,000.00	10,095,600.00		(1,414,400.00)	87.71
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	11,510,000.00	10,095,600.00		(1,414,400.00)	87.71
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11,510,000.00	10,095,600.00		(1,414,400.00)	87.71
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	8,593,000.00	7,995,000.00		(598,000.00)	93.04
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.05.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	8,593,000.00	7,995,000.00		(598,000.00)	93.04
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.05.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.05.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8,593,000.00	7,995,000.00		(598,000.00)	93.04
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.08	Facilitas Kampingan Tamu	7,701,000.00	4,856,500.00		(2,844,500.00)	63.06
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.08.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	7,701,000.00	4,856,500.00		(2,844,500.00)	63.06
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.08.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7,701,000.00	4,856,500.00		(2,844,500.00)	63.06
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115,604,000.00	102,590,072.00		(13,013,928.00)	88.74
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	115,604,000.00	102,590,072.00		(13,013,928.00)	88.74
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	115,604,000.00	102,590,072.00		(13,013,928.00)	88.74
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31,400,000.00	26,249,627.00		(5,150,373.00)	83.59
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00	100.00
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.08.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00	100.00
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.08.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00	100.00
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Akumulasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30,000,000.00	26,249,627.00		(3,750,373.00)	87.50
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.08.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	30,000,000.00	26,249,627.00		(3,750,373.00)	87.50
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.08.02.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00	0.00
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.08.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000.00	26,249,627.00		(3,750,373.00)	87.50

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah</b>	81,230,600.00	78,746,646.00	(3,291,254.00)	96.10
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Otas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27,700,000.00	25,989,175.00	(1,710,825.00)	93.82
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.09.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	27,700,000.00	25,989,175.00	(1,710,825.00)	93.82
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.09.01.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.09.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27,700,000.00	25,989,175.00	(1,710,825.00)	93.82
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	4,940,000.00	4,255,000.00	(685,000.00)	86.13
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.09.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4,940,000.00	4,255,000.00	(685,000.00)	86.13
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.09.06.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.09.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,940,000.00	4,255,000.00	(685,000.00)	86.13
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49,285,600.00	48,502,671.00	(795,929.00)	98.39
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.09.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	49,285,600.00	48,502,671.00	(795,929.00)	98.39
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.09.09.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01.8-01.1-05.0-00.04.01.2.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49,285,600.00	48,502,671.00	(795,929.00)	98.39
8.01.8-01.1-05.0-00.04.02.2.01.03	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	269,360,000.00	114,699,908.00	(154,670,092.00)	42.58
8.01.8-01.1-05.0-00.04.02.2.01.03.5.1	<b>Penguatan Kebijaksanaan Teknik dan Pemanfaatan Publikasi dan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	269,360,000.00	114,699,908.00	(154,670,092.00)	42.58
8.01.8-01.1-05.0-00.04.02.2.01.03.5.1.1	Adaptasi Kebijakan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Penguatan Kebangsaan, Binake Tanggah Mera dan Segarlah Kebangsaan	225,850,000.00	99,259,708.00	(126,520,292.00)	44.12
8.01.8-01.1-05.0-00.04.02.2.01.03.5.1.2	<b>BELANJA OPERASI</b>	225,850,000.00	99,259,708.00	(126,520,292.00)	44.12
8.01.8-01.1-05.0-00.04.02.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01.8-01.1-05.0-00.04.02.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	225,850,000.00	99,259,708.00	(126,520,292.00)	44.12
8.01.8-01.1-05.0-00.04.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	31,510,000.00	15,360,200.00	(18,149,800.00)	45.84
8.01.8-01.1-05.0-00.04.02.2.01.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	31,510,000.00	15,360,200.00	(18,149,800.00)	45.84
8.01.8-01.1-05.0-00.04.02.2.01.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01.8-01.1-05.0-00.04.02.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31,510,000.00	15,360,200.00	(18,149,800.00)	45.84



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
						3
8.01.8-01.1-05.0-00.04.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2,550,514,392.00	2,186,785,477.00	(363,724,915.00)	85.74	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.03.2.01	Perencanaan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas	2,550,514,392.00	2,186,785,477.00	(363,724,915.00)	85.74	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.03.2.01.04	Kelengkapan Peminatan, Perawatan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Perwakilan Umum Kepala Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik	84,308,000.00	84,308,000.00	(0.00)	92.92	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.03.2.01.04.5.1	Penyusunan Anggaran Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Peminatan, Perawatan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Perwakilan Umum Kepala Daerah, Serta Pemanfaatan Situasi Politik di Daerah	90,731,750.00	84,308,000.00	(6,423,750.00)	92.92	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.03.2.01.04.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.03.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90,731,750.00	84,308,000.00	(6,423,750.00)	92.92	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.03.2.01.05	ANALISIS Monev, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan	2,469,782,642.00	2,102,481,477.00	(367,301,165.00)	85.47	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.03.2.01.05.1	BELANJA OPERASI	2,469,782,642.00	1,993,821,477.00	(352,409,165.00)	84.96	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.03.2.01.05.1.1	Beban Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.03.2.01.05.1.1.1	Belanja Barang dan Jasa	1,610,580,116.00	1,287,766,487.00	(322,813,629.00)	79.96	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.03.2.01.05.1.1.2	Belanja Hibah	759,647,526.00	706,054,990.00	(79,590,536.00)	95.98	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.03.2.01.05.1.1.5	BELANJA MODAL	113,550,000.00	108,658,000.00	(4,892,000.00)	95.69	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.03.2.01.05.1.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	113,550,000.00	108,658,000.00	(4,892,000.00)	95.69	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.04	Program Pemberdayaan Dan Penguasaan Organisasi Masyarakat	202,105,500.00	117,098,860.00	(85,001,640.00)	57.94	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.04.2.01	Perencanaan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Penguasaan Organisasi Masyarakat	202,105,500.00	117,098,860.00	(85,001,640.00)	57.94	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.04.2.01.03	ANALISIS Kebijakan tentang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Model Jendela Ormas, Penguasaan Ormas dan Ormas Aktif di Daerah	32,246,800.00	23,552,500.00	(8,693,300.00)	73.04	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	32,246,800.00	23,552,500.00	(8,693,300.00)	73.04	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.04.2.01.03.5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.04.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32,246,800.00	23,552,500.00	(8,693,300.00)	73.04	
8.01.8-01.1-05.0-00.04.04.2.01.03.5.1.5	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
8.01.8-01.1-05.0-00.04.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Pengembangan Diri, Evaluasi dan Akreditasi Sekolah Dasar, Pengembangan Organisasi dan Ombudsman di Daerah	160,854,500.00	93,546,360.00	(76,308,140.00)	58.07
<b>BELANJA OPERASI</b>		160,854,500.00	93,546,360.00	(76,308,140.00)	58.07
	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Barang dan Jasa	160,854,500.00	93,546,360.00	(76,308,140.00)	58.07
	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01.8-01.1-05.0-00.04.04.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	345,790,630.00	272,746,969.00	(73,043,661.00)	78.88
8.01.8-01.1-05.0-00.04.05.2.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	345,790,630.00	272,746,969.00	(73,043,661.00)	78.88
8.01.8-01.1-05.0-00.04.05.2.01.03	Alokasi dan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perkotaan, Fasilitas Komunitas Untuk Berbagi dan Penghantar Apresiasi di Daerah	52,973,880.00	39,887,250.00	(12,986,630.00)	75.48
8.01.8-01.1-05.0-00.04.05.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	52,973,880.00	39,887,250.00	(12,986,630.00)	75.48
	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Barang dan Jasa	52,973,880.00	39,887,250.00	(12,986,630.00)	75.48
8.01.8-01.1-05.0-00.04.05.2.01.03.5.1.2	Realisasi Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perkotaan, Fasilitas Komunitas Untuk Berbagi dan Penghantar Apresiasi di Daerah	292,816,750.00	232,759,719.00	(60,057,031.00)	79.49
8.01.8-01.1-05.0-00.04.05.2.01.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	292,816,750.00	232,759,719.00	(60,057,031.00)	79.49
	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Barang dan Jasa	292,816,750.00	232,759,719.00	(60,057,031.00)	79.49
8.01.8-01.1-05.0-00.04.05.2.01.04.5.1.5	Program Peningkatan Keunggulan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	505,384,504.00	468,918,157.00	(36,466,347.00)	92.78
8.01.8-01.1-05.0-00.04.05.2.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Keunggulan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	505,384,504.00	468,918,157.00	(36,466,347.00)	92.78
8.01.8-01.1-05.0-00.04.05.2.01.04	Alokasi dan Koordinasi di Bidang Keunggulan Nasional, Kinerja Instansi, Peningkatan Chang Agent, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kemitraan Perbaikan Antar Negara, Fasilitas Akreditasi Bidang Keunggulan, serta Penanganan Konflik di Daerah	505,384,504.00	468,918,157.00	(36,466,347.00)	92.78
8.01.8-01.1-05.0-00.04.05.2.01.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	505,384,504.00	468,918,157.00	(36,466,347.00)	92.78
	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	6
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
8.01.8-01.1-05.0-00.04.04.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	430,304,504.00	393,918,157.00	(36,466,347.00)	91.53
8.01.8-01.1-05.0-00.04.05.2.01.04.5.1.5	Belanja Hibah	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	100.00
			(4,875,176,058.00)	(4,875,176,058.00)	0.00

Bukittinggi, 16 Agustus 2023  
**WALIKOTA BUKITTINGGI**



**ERMANSAFAR**



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2023

1	2	3	4	5	6						
						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
						KODE	URUSAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1											
1	1-01.2-22.0-00.01		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	421.870.967.618,00	375.703.477.526,57	(46.167.490.091,43)	89,06				
1	1-01.2-22.0-00.01		Pendidikan	194.531.786.313,00	176.640.871.175,63	(17.890.915.157,37)	90,72				
1	1-01.2-22.0-00.01	00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	194.531.786.313,00	176.640.871.175,63	(17.890.915.157,37)	90,72				
1	1-01.2-22.0-00.01	00	Non Program	0,00	(6.498.000,00)	(6.498.000,00)	0,00				
1	1-01.2-22.0-00.01	00	Non Kegiatan	0,00	(6.498.000,00)	(6.498.000,00)	0,00				
1	1-01.2-22.0-00.01	00	Non Sub Kegiatan	0,00	(6.498.000,00)	(6.498.000,00)	0,00				
1	1-01.2-22.0-00.01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	110.622.266.089,00	104.980.940.297,18	(5.641.325.791,82)	94,90				
1	1-01.2-22.0-00.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.890.090,00	56.122.836,00	(767.154,00)	98,65				
1	1-01.2-22.0-00.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.890.090,00	56.122.836,00	(767.154,00)	98,65				
1	1-01.2-22.0-00.01	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	108.967.474.797,00	103.545.592.511,00	(5.421.882.286,00)	95,02				
1	1-01.2-22.0-00.01	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.967.474.797,00	103.545.592.511,00	(5.421.882.286,00)	95,02				
1	1-01.2-22.0-00.01	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	603.861.972,00	623.649.680,00	(60.222.212,00)	91,31				
1	1-01.2-22.0-00.01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.663.000,00	5.603.000,00	(60.000,00)	100,00				
1	1-01.2-22.0-00.01	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.849.500,00	36.849.500,00	0,00	100,00				
1	1-01.2-22.0-00.01	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.615.000,00	11.364.500,00	(250.500,00)	97,82				
1	1-01.2-22.0-00.01	01	Fasilitas Kurungan Tamu	11.720.000,00	4.435.750,00	(7.284.250,00)	37,85				
1	1-01.2-22.0-00.01	01	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.660.000,00	217.862.312,00	(16.797.688,00)	93,00				
1	1-01.2-22.0-00.01	01	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	393.434.492,00	347.554.568,00	(45.879.924,00)	88,34				
1	1-01.2-22.0-00.01	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.450.000,00	66.973.238,00	(81.476.762,00)	45,12				
1	1-01.2-22.0-00.01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	100,00				
1	1-01.2-22.0-00.01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.000.000,00	59.523.238,00	(81.476.762,00)	42,22				
1	1-01.2-22.0-00.01	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	765.589.300,00	688.602.032,18	(76.987.267,82)	89,94				
1	1-01.2-22.0-00.01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	39.190.000,00	21.184.300,00	(18.005.699,00)	54,06				
1	1-01.2-22.0-00.01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan	219.350.000,00	170.736.725,00	(48.613.275,00)	77,84				
1	1-01.2-22.0-00.01	01	Dinas Operasional atau Lapangan								

919

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
KODE		3	4	5	6
1	1-01.2-22.0-00.01	15,000,000.00	14,461,000.00	(539,000.00)	96.41
	06				
	01				
	01	492,049,000.00	482,219,957.18	(9,829,042.82)	96.06
1	1-01.2-22.0-00.01	71,133,110,144.00	71,295,217,762.45	(2,238,092,481.55)	96.96
	02				
	01	41,126,635,172.00	40,145,112,866.89	(1,181,522,385.11)	97.14
1	1-01.2-22.0-00.01	5,844,713,672.00	5,830,345,124.61	(13,768,547.39)	99.73
	02				
	01	850,163,505.00	846,606,911.11	(3,556,593.89)	99.46
1	1-01.2-22.0-00.01	133,935,000.00	133,628,737.07	(306,262.93)	99.77
	02				
	01	122,412,000.00	122,109,937.78	(302,062.22)	99.75
1	1-01.2-22.0-00.01	1,127,495,000.00	1,315,855,571.02	(11,659,428.08)	95.12
	02				
	01	559,450,000.00	554,600,250.00	(4,849,750.00)	99.13
1	1-01.2-22.0-00.01	155,280,000.00	151,794,666.20	(3,485,333.80)	97.75
	02				
	01	241,304,250.00	237,300,000.00	(4,204,250.00)	98.25
1	1-01.2-22.0-00.01	946,560,000.00	945,693,600.00	(866,400.00)	99.91
	02				
	01	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100.00
1	1-01.2-22.0-00.01	5,391,900,000.00	5,395,774,741.00	(85,225,259.00)	98.42
	02				
	01	1,143,115,000.00	982,703,091.00	(160,411,909.00)	85.97
1	1-01.2-22.0-00.01	105,668,000.00	93,361,410.00	(12,307,590.00)	88.35
	02				
	01	109,994,750.00	287,489,121.00	(22,925,629.00)	92.74
1	1-01.2-22.0-00.01	9,590,447,600.00	9,037,968,694.00	(552,478,906.00)	94.24
	02				
	01	265,949,000.00	265,760,920.00	(188,080.00)	99.54
1	1-01.2-22.0-00.01	771,445,900.00	735,127,950.00	(36,317,950.00)	95.29
	02				
	01	14,467,500,000.00	14,198,364,182.00	(269,135,818.00)	98.14
1	1-01.2-22.0-00.01	21,489,051,624.00	20,514,417,400.77	(874,634,023.23)	95.93
	02				
	01	3,496,441,366.00	3,034,677,487.00	(461,763,879.00)	86.96
1	1-01.2-22.0-00.01	500,810,000.00	519,048,255.66	(1,761,744.34)	99.66
	02				
	01	477,210,000.00	473,998,156.77	(3,211,843.23)	99.33
1	1-01.2-22.0-00.01	41,720,000.00	42,513,181.89	(1,206,818.11)	97.24
	02				
	01	559,350,000.00	559,350,000.00	0.00	100.00
1	1-01.2-22.0-00.01	201,130,000.00	199,942,242.85	(1,187,757.15)	99.41
	02				
	01	62,000,000.00	60,871,450.00	(1,128,550.00)	98.18
1	1-01.2-22.0-00.01	946,460,000.00	945,667,600.00	(792,400.00)	99.85
	02				
	01	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERURANG)		
					3	4	5	6	
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.02	2,654,460,000.00	2,591,841,000.00	(62,619,000.00)	97.64
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.02	854,961,000.00	536,732,445.00	(318,228,555.00)	62.78
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.02	76,376,750.00	54,893,300.00	(21,483,450.00)	71.68
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.02	439,337,000.00	382,099,750.00	(57,238,250.00)	86.97
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.02	3,580,466,000.00	3,834,832,555.00	(146,433,953.00)	96.32
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.02	198,332,000.00	197,997,850.00	(1,454,050.00)	99.27
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.02	862,476,000.00	813,680,600.00	(48,795,400.00)	94.34
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.02	6,865,000,000.00	6,687,371,826.00	(177,128,074.00)	97.42
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.02	9,354,134,128.00	9,216,968,293.96	(137,165,834.44)	98.52
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.02	322,810,000.00	310,470,118.96	(12,339,881.44)	96.18
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.02	54,300,000.00	53,847,150.00	(452,850.00)	98.80
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.02	393,399,992.00	179,803,476.00	(13,596,516.00)	92.97
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.02	47,438,000.00	0.00	(47,438,000.00)	0.00
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.02	3,483,400,936.00	3,449,827,870.00	(33,573,066.00)	99.04
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.02	19,317,000.00	18,338,900.00	(378,100.00)	98.04
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.02	3,858,717,200.00	3,826,845,779.00	(32,071,421.00)	98.95
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.02	2,174,751,000.00	2,177,535,000.00	2,784,000.00	100.13
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.04	1,363,489,000.00	1,318,719,181.23	(44,770,238.77)	96.77
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.04	129,300,000.00	107,777,461.23	(21,522,538.77)	83.48
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.04	34,190,000.00	34,190,000.00	0.00	100.00
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.04	99,810,000.00	91,625,282.80	(7,384,718.00)	92.54
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.04	331,834,000.00	321,754,790.00	(10,080,130.00)	96.93
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.04	281,775,000.00	26,060,000.00	(2,715,000.00)	90.56
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.04	21,479,000.00	18,311,850.00	(3,167,050.00)	85.25
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	02	2.04	719,000,000.00	718,999,796.00	(202.00)	100.00
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	03	2.01	131,830,000.00	128,121,626.00	(3,708,374.00)	97.19
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	03	2.01	131,830,000.00	128,121,626.00	(3,708,374.00)	97.19
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	03	2.01	65,653,000.00	62,192,726.00	(3,360,274.00)	94.88
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	03	2.01	66,177,000.00	65,928,900.00	(348,100.00)	99.47
1	1	01	1-01.2-22.0-00.01	04	2.01	244,380,000.00	243,889,490.00	(1,290,510.00)	99.47

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	
			3	4	5	6
1 01	1-01.2-22.6-00.01	2.01	244.380.000,00	243.089.490,00	(1.290.510,00)	99,47
1 01	1-01.2-22.6-00.01	04	244.380.000,00	243.089.490,00	(1.290.510,00)	99,47
1 02	1-02.0-00.0-00.01		110.919.308,871,40	89.915.816.408,34	(21.003.492.862,66)	81,06
1 02	1-02.0-00.0-00.01		110.919.308,871,40	89.915.816.408,34	(21.003.492.862,66)	81,06
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	56.188,278,508,80	45.511.892.444,14	(10.576.486.063,86)	81,18
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	131.361,278,80	126.160.783,00	(5.200.495,00)	96,04
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	131.361,278,80	126.160.783,00	(5.200.495,00)	96,04
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	37.734,496,332,80	36.360.637.215,00	(1.373.859.117,00)	96,36
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	37.734,496,332,80	36.360.637.215,00	(1.373.859.117,00)	96,36
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	288.026,000,80	357.724.764,00	(41.201.236,00)	89,67
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	10.021,000,80	9.770.220,00	(250.780,00)	97,50
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	17.945,000,80	15.653.150,00	(2.291.850,00)	87,23
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	27.110,000,80	11.149.160,00	(15.960.840,00)	41,49
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	39.545,000,80	30.700.150,00	(8.844.850,00)	77,63
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	304.305,000,80	290.352.684,40	(13.952.916,00)	95,41
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	384.250,000,80	337.507.979,00	(46.742.021,00)	87,84
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	4.850,000,80	4.822.000,00	(28.000,00)	82,93
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	379.400,000,00	333.485.979,00	(45.914.021,00)	87,90
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	2.101,043,130,00	1.802.155.830,00	(298.887.300,00)	85,77
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	22.111,800,00	21.696.175,00	(415.625,00)	98,12
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	397.551,944,00	303.765.971,00	(93.785.973,00)	91,50
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	44.630,000,00	14.754.750,00	(29.875.250,00)	33,06
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	1.636.749.386,00	1.401.938.934,00	(234.810.452,00)	85,65
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	15.438.301.768,00	6.627.705.873,14	(8.810.595.894,86)	42,93
1 02	1-02.0-00.0-00.01	01	15.438.301.768,00	6.627.705.873,14	(8.810.595.894,86)	42,93
1 02	1-02.0-00.0-00.01	02	33.524,697,963,00	43.295.882.442,20	(10.229.615.520,80)	80,89
1 02	1-02.0-00.0-00.01	02	10.729.369.000,00	9.149.778.166,00	(1.479.581.734,00)	86,21
1 02	1-02.0-00.0-00.01	02	261.000,000,00	0,00	(261.000.000,00)	0,00
1 02	1-02.0-00.0-00.01	02	5.000,000,000,00	4.181.488.497,20	(818.591.503,00)	83,63

KODE			HIRAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERBURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI		(Rp)		(%)	
1			2				3	4	5	6
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.01	13	Pengadaan Peralatan dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	790.000.000,00	770.216.500,00	(19.783.500,00)	97,50
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemungkit Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.566.800.000,00	3.256.575.198,00	(310.224.802,00)	91,30
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	555.055.032,00	522.636.250,00	(32.418.782,00)	94,16
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Teknis Pakal	544.489.888,00	507.096.721,00	(37.493.167,00)	93,11
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Pemungkit Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12.015.000,00	11.935.000,00	(80.000,00)	99,33
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Diemah Kabupaten Kota	42.060.635.930,00	33.333.299.035,20	(8.727.346.894,80)	79,25
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	187.130.000,00	171.751.840,00	(15.378.160,00)	91,79
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	173.161.164,00	102.799.711,00	(70.361.453,00)	59,39
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	119.268.090,00	110.736.300,00	(8.531.800,00)	92,81
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	89.860.000,00	70.881.769,00	(18.978.231,00)	78,93
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.556.000,00	18.015.350,00	(1.540.650,00)	90,28
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3.120.000,00	3.246.800,00	(73.800,00)	97,80
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	140.045.000,00	131.214.713,00	(8.830.287,00)	93,69
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	6.533.500,00	5.880.840,00	(652.660,00)	90,13
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Diabetes Melitus	37.352.000,00	36.847.100,00	(504.900,00)	98,65
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.660.900,00	7.998.600,00	(1.662.300,00)	82,79
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	16.551.000,00	12.094.750,00	(4.456.250,00)	73,08
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	319.444.318,00	260.689.867,80	(58.754.451,00)	81,61
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gut Malaria	861.185.600,00	766.795.043,80	(94.390.557,00)	89,04
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	33.520.000,00	30.400.500,80	(3.119.500,00)	89,68
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	163.867.410,00	139.341.554,80	(24.525.856,00)	85,13
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Acupan Mandiri dan Tradisional Lainnya	21.870.000,00	20.820.000,80	(1.049.999,00)	95,21
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	20	Pengelolaan Surtidansi Kesehatan	232.687.578,00	198.225.412,80	(34.462.166,00)	85,19
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jwa dan NAPIA	28.213.000,00	18.585.050,80	(9.627.950,00)	65,87
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	654.170.000,00	635.048.700,80	(19.121.300,00)	97,08
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	24	Penyediaan Upaya Penanganan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	11.292.500,00	1.333.000,80	(9.959.500,00)	11,80
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100.007.882,00	57.506.044,80	(42.501.838,00)	57,50
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.744.020.400,00	5.353.789.650,80	(390.230.750,00)	93,21
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	29	Pengelolaan Kabupaten Kota Sehat	270.465.984,00	239.558.390,80	(30.907.594,00)	88,57
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	31	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	28.469.725.287,00	22.087.138.998,20	(6.382.586.288,00)	77,58
1	02	1-02.0-00.0-00.01	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.277.093.061,00	2.145.838.244,80	(1.131.254.757,00)	65,48



P. A

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERBURANG)	
	1	2	3	4	5	6
1 02 1-02.0-00.0-00.01	02	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	755,917,526.00	657,016,600.00	(78,900,926.00)	89.26
1 02 1-02.0-00.0-00.01	02	Pelaksanaan Aktivitas Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	235,500,000.00	0.00	(235,500,000.00)	0.00
1 02 1-02.0-00.0-00.01	02	Investigasi Awal Kegiatan Tidak Dihayati (Kejadian Buhan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mosaic)	12,110,880.00	0.00	(12,110,880.00)	0.00
1 02 1-02.0-00.0-00.01	02	Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	86,570,000.00	49,695,990.00	(36,874,010.00)	57.41
1 02 1-02.0-00.0-00.01	02	Pengumpulan Data dan Informasi Kesehatan	32,025,000.00	31,437,500.00	(587,500.00)	98.17
1 02 1-02.0-00.0-00.01	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	11,265,000.00	10,805,000.00	(460,000.00)	95.92
1 02 1-02.0-00.0-00.01	02	Penerbitan Izin Rumah-Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30,760,000.00	20,632,500.00	(10,127,500.00)	67.10
1 02 1-02.0-00.0-00.01	02	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	702,677,133.00	680,577,741.00	(22,099,392.00)	96.85
1 02 1-02.0-00.0-00.01	02	Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10,810,000.00	9,712,280.00	(1,097,720.00)	89.85
1 02 1-02.0-00.0-00.01	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	691,867,133.00	670,885,461.00	(20,981,672.00)	96.96
1 02 1-02.0-00.0-00.01	03	Pembinaan dan Penguasaan Tenaga Kesehatan serta Tindakan Lanjut Perorangan Praktik Tenaga Kesehatan	66,820,000.00	59,719,050.00	(7,100,950.00)	89.37
1 02 1-02.0-00.0-00.01	03	Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19,680,000.00	15,503,000.00	(4,177,000.00)	78.78
1 02 1-02.0-00.0-00.01	03	Pembinaan dan Penguasaan Tenaga Kesehatan serta Tindakan Lanjut Perorangan Praktik Tenaga Kesehatan	19,680,000.00	15,503,000.00	(4,177,000.00)	78.78
1 02 1-02.0-00.0-00.01	03	Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47,140,000.00	44,216,650.00	(2,923,350.00)	93.80
1 02 1-02.0-00.0-00.01	04	Program Solusio Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	47,140,000.00	44,216,650.00	(2,923,350.00)	93.80
1 02 1-02.0-00.0-00.01	04	Pembelian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	343,063,990.00	237,205,046.00	(105,858,944.00)	69.14
1 02 1-02.0-00.0-00.01	04	Pembelian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	38,960,000.00	25,504,600.00	(13,035,400.00)	65.54
1 02 1-02.0-00.0-00.01	04	Pembelian dan Penguasaan Data Perorangan dan Tindakan Lanjut Penguasaan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	38,960,000.00	25,504,600.00	(13,035,400.00)	65.54
1 02 1-02.0-00.0-00.01	04	Penerbitan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	156,440,000.00	118,595,620.00	(37,844,380.00)	75.81
1 02 1-02.0-00.0-00.01	04	Pengembangan dan Penguasaan serta Tindakan Lanjut Penguasaan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	156,440,000.00	118,595,620.00	(37,844,380.00)	75.81
1 02 1-02.0-00.0-00.01	04	Penerbitan Sertifikat Lais Higiens Jarakas Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	26,961,900.00	26,278,476.00	(683,424.00)	97.47
1 02 1-02.0-00.0-00.01	04	Pengembangan dan Penguasaan serta Tindakan Lanjut Penguasaan Penerbitan Sertifikat Lais	26,961,900.00	26,278,476.00	(683,424.00)	97.47
1 02 1-02.0-00.0-00.01	04	Pemeriksaan dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Prod. Manis pada Produksi dan Produk Makanan Industri Rumah Tangga	170,792,000.00	66,406,150.00	(104,385,850.00)	38.92
1 02 1-02.0-00.0-00.01	04	Pemeriksaan Prod. Manis pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Penguasaan serta Tindakan Lanjut Penguasaan	170,792,000.00	66,406,150.00	(104,385,850.00)	38.92

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	
		3	4	5	
1	2	3	4	5	6
1 02 1-02.0-00.0-00.01	05	796,348,500.00	711.917.426,00	(84.431.074,00)	89.46
1 02 1-02.0-00.0-00.01	05 2.01	178.334,000.00	141.664.380,00	(36.669.620,00)	79.44
1 02 1-02.0-00.0-00.01	05 2.01 01	178.334,000.00	141.664.380,00	(36.669.620,00)	79.44
1 02 1-02.0-00.0-00.01	05 2.02	145.937,500.00	131.159.906,00	(14.777.594,00)	89.87
1 02 1-02.0-00.0-00.01	05 2.02 01	145.937,500.00	131.159.906,00	(14.777.594,00)	89.87
1 02 1-02.0-00.0-00.01	05 2.03	472,077,000.00	439,093,140,00	(32.983.860,00)	93.01
1 02 1-02.0-00.0-00.01	05 2.03 01	472,077,000.00	439,093,140,00	(32.983.860,00)	93.01
1 03		67,466,693,480.00	54,886,941,356,17	(12.579.852,123,83)	81.35
1 03 1-03.2-10.0-00.01		67,466,693,480.00	54,886,941,356,17	(12.579.852,123,83)	81.35
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01	10,867,136,828.00	9,702,057,494,19	(1,165,069,333,81)	89.28
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01 2.01	36,717,000.00	36,554,731,00	(162,269,00)	99.56
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01 2.01 01	36,717,000.00	36,554,731,00	(162,269,00)	99.56
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01 2.02	7,242,773,713.00	7,208,042,429,00	(34,731,284,00)	93.09
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01 2.02 01	7,242,773,713.00	7,208,042,429,00	(34,731,284,00)	93.09
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01 2.03	369,025,000.00	277,463,589,05	(91,561,410,95)	75.24
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01 2.03 01	369,025,000.00	277,463,589,05	(91,561,410,95)	75.24
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01 2.05	3,900,000.00	3,852,810,00	(47,190,00)	98.79
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01 2.05 01	3,900,000.00	3,852,810,00	(47,190,00)	98.79
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01 2.06	456,696,475.00	404,968,860,00	(51,727,615,00)	88.67
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01 2.06 01	4,996,725.00	4,902,610,00	(94,115,00)	98.12
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01 2.06 02	103,297,000.00	96,969,782,00	(6,327,218,00)	93.87
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01 2.06 04	21,708,500.00	20,036,570,00	(1,671,930,00)	92.30
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01 2.06 05	18,726,250.00	17,881,236,00	(845,014,00)	95.49
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01 2.06 08	4,627,000.00	4,512,400,00	(114,600,00)	97.52
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01 2.06 09	303,341,000.00	260,666,262,00	(42,674,738,00)	85.93
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01 2.07	556,950,000.00	534,785,600,00	(22,164,400,00)	96.02
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01 2.07 02	556,950,000.00	534,785,600,00	(22,164,400,00)	96.02
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01 2.08	275,625,000.00	162,089,641,00	(113,536,359,00)	58.81
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01 2.08 01	3,495,000.00	3,190,000,00	(305,000,00)	91.27
1 03 1-03.2-10.0-00.01	01 2.08 02	256,800,000.00	140,730,041,00	(113,064,959,00)	55.97

8,19

8.1A

KODE	URATAN URUSAN, ORGANSIASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)			
							ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			REALISASI		(Rp)	(%)
							3	4	5	6			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	01	2.00	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor	15.330.000,00	15.103.600,00	(166.400,00)	98,91			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	01	2.09	03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah	1.425.439.640,00	1.074.300.834,14	(351.138.805,86)	75,35			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	39.190.000,00	39.038.000,00	(152.000,00)	99,56			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	01	2.09	02	Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.074.646.090,00	763.218.022,00	(311.428.068,00)	71,02			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	01	2.09	09	Dinas Operasional atau Lapangan	311.603.550,00	271.044.812,14	(39.558.737,86)	87,24			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	02	2.01	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.043.795.168,00	3.399.661.815,26	(644.133.352,74)	83,97			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	02	2.01	02	Program Pengkajian Sumber Daya Air (SDA)	45.170.000,00	0,00	(45.170.000,00)	0,00			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	02	2.01	61	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengantar Perair pada Wilayah Sungai (WVS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.170.000,00	0,00	(45.170.000,00)	0,00			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemberdayaan Kolembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	3.998.615.168,00	3.395.661.815,26	(602.953.352,74)	84,92			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	02	2.02	02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	449.599.000,00	-409.545.605,02	(46.099.344,98)	91,09			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	02	2.02	14	Pembaruan Jaringan Irigasi Pemukiman	2.553.304.000,00	2.464.870.192,24	(88.433.807,76)	96,54			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemukiman	908.261.168,00	521.245.968,00	(387.015.200,00)	57,39			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	02	2.02	27	Operasional Unit Pengaliran Irigasi	87.455.000,00	0,00	(87.455.000,00)	0,00			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	03	2.01	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	88.353.500,00	65.963.656,00	(22.389.844,00)	74,66			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	03	2.01	03	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	88.353.500,00	65.963.656,00	(22.389.844,00)	74,66			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perseorangan di Kawasan Perkotaan	16.553.500,00	14.896.430,00	(1.657.070,00)	89,99			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	03	2.01	12	Facilities Penyediaan Kerja Sama SPAM	71.800.000,00	51.067.246,00	(20.732.754,00)	71,12			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	04	2.01	04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Pemertanahan Regional	680.643.085,00	678.793.040,00	(1.850.045,00)	99,73			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	04	2.01	03	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	680.643.085,00	678.793.040,00	(1.850.045,00)	99,73			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPW/TPS-3R/TPS	680.643.085,00	678.793.040,00	(1.850.045,00)	99,73			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	05	2.01	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	329.900.000,00	287.805.680,40	(42.094.319,60)	87,24			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	05	2.01	05	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	329.900.000,00	287.805.680,40	(42.094.319,60)	87,24			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	05	2.01	01	Perencanaan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	329.900.000,00	287.805.680,40	(42.094.319,60)	87,24			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	06	2.01	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	20.266.644.295,00	18.923.390.828,42	(1.343.253.466,58)	93,37			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	06	2.01	06	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.266.644.295,00	18.923.390.828,42	(1.343.253.466,58)	93,37			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	4.080.523.000,00	3.798.099.203,60	(282.423.796,40)	93,09			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	06	2.01	06	Perbaikan Saluran Drainase Perkotaan	13.700.048.680,00	13.551.273.166,82	(148.775.513,18)	98,91			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	2.486.072.615,00	1.574.018.458,00	(912.054.157,00)	63,31			
1	03	1-03.2-10.0-00.01	08	2.01	08	Program Pemetaan Bangunan Gedung	6.519.684.680,00	1.492.095.052,96	(5.027.589.627,04)	22,89			

Lampiran 14 Perda Pengembangan - Kabupaten Bandung - Kabupaten Bandung - Kabupaten Bandung - Kabupaten Bandung - Kabupaten Bandung - Kabupaten Bandung - Kabupaten Bandung - Kabupaten Bandung - Kabupaten Bandung - Kabupaten Bandung

Halaman 8

KODE		URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
1		2		3		4		
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI		(Rp)		(%)		
1	03	1-03.2-10.0-00.01	08	2.01	5,519,684,680.00	1,492,055,052,96	(5,027,589,027,04)	22.89
1	03	1-03.2-10.0-00.01	00	2.01	395,265,250.00	120,592,060.00	(235,268,250.00)	33.96
1	03	1-03.2-10.0-00.01	08	2.01	6,065,275,660.00	1,364,189,052,96	(4,756,689,027,04)	21.52
1	03	1-03.2-10.0-00.01	08	2.01	98,932,750.00	66,914,000.00	(32,018,750.00)	67.64
1	03	1-03.2-10.0-00.01	08	2.01	4,213,000.00	0.00	(4,213,000.00)	0.00
1	03	1-03.2-10.0-00.01	10	2.01	23,388,004,653.00	19,464,088,806,26	(3,903,915,846,74)	83.31
1	03	1-03.2-10.0-00.01	10	2.01	23,388,004,653.00	19,464,088,806,26	(3,903,915,846,74)	83.31
1	03	1-03.2-10.0-00.01	10	2.01	5,000,000.00	1,490,000.00	(3,510,000.00)	29.80
1	03	1-03.2-10.0-00.01	10	2.01	6,954,212,000.00	5,983,632,967,63	(970,579,032,37)	86.04
1	03	1-03.2-10.0-00.01	10	2.01	13,655,607,411.00	11,411,620,001,04	(2,243,987,409,96)	83.57
1	03	1-03.2-10.0-00.01	10	2.01	1,294,310,314.00	1,013,407,573.00	(280,902,741.00)	78.30
1	03	1-03.2-10.0-00.01	10	2.01	987,740,000.00	635,119,538,59	(352,620,461,41)	64.30
1	03	1-03.2-10.0-00.01	10	2.01	451,125,968.00	438,818,726,09	(52,307,241,90)	99.35
1	03	1-03.2-10.0-00.01	11	2.02	124,467,000.00	33,926,360,08	(100,540,640,00)	25.23
1	03	1-03.2-10.0-00.01	11	2.02	74,623,000.00	480,000,08	(74,143,000,00)	0.64
1	03	1-03.2-10.0-00.01	11	2.02	74,623,000.00	480,000,08	(74,143,000,00)	0.64
1	03	1-03.2-10.0-00.01	11	2.02	59,844,000.00	33,446,360,09	(26,397,640,00)	55.89
1	03	1-03.2-10.0-00.01	11	2.02	30,598,000.00	25,038,100.00	(5,559,900,00)	81.83
1	03	1-03.2-10.0-00.01	11	2.02	11,200,000.00	7,317,250,00	(3,882,750,00)	65.33
1	03	1-03.2-10.0-00.01	11	2.02	18,046,000.00	1,091,000,00	(16,955,000,00)	6.05
1	03	1-03.2-10.0-00.01	12	2.03	1,148,084,231.00	873,958,662,68	(325,025,628,32)	71.69
1	03	1-03.2-10.0-00.01	12	2.03	275,735,500.00	283,377,628,00	(72,407,872,00)	73.74
1	03	1-03.2-10.0-00.01	12	2.03	160,449,500.00	114,644,790,00	(45,804,710,00)	71.45
1	03	1-03.2-10.0-00.01	12	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
1	03	1-03.2-10.0-00.01	12	2.03	115,286,000.00	88,662,889,00	(26,623,111,00)	76.92
1	03	1-03.2-10.0-00.01	12	2.03	440,448,365.00	355,773,221,68	(84,675,144,32)	80.78
1	03	1-03.2-10.0-00.01	12	2.03	440,448,365.00	355,773,221,68	(84,675,144,32)	80.78
1	03	1-03.2-10.0-00.01	12	2.04	431,900,365.00	263,957,753,00	(167,942,612,00)	61.12

27A

KODE		URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERBURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6			
1	1-03.2-10.0-00.01	12	2.04	254,091,115.00	228,134,634.00	(25,956,481.00)	89.76	
1	1-03.2-10.0-00.01	12	2.04	177,809,250.00	35,823,119.00	(141,986,131.00)	20.15	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.01	17,389,440,613.00	16,405,111,863.00	(984,828,750.00)	94.34	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.01	17,389,440,613.00	16,405,111,863.00	(984,828,750.00)	94.34	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.01	3,924,692,160.00	3,765,562,626.00	(159,129,734.00)	95.95	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.01	16,770,800.00	16,554,320.00	(215,680.00)	98.71	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.01	16,770,800.00	16,554,320.00	(215,680.00)	98.71	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.02	3,480,109,210.00	3,335,424,384.00	(144,684,826.00)	95.84	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.02	3,480,109,210.00	3,335,424,384.00	(144,684,826.00)	95.84	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.06	215,607,450.00	204,948,200.00	(10,659,250.00)	95.06	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.06	2,087,450.00	2,083,000.00	(4,450.00)	99.76	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.06	66,900,000.00	56,470,574.00	(10,429,426.00)	84.41	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.06	11,661,500.00	11,611,000.00	(50,000.00)	99.57	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.06	6,318,000.00	6,318,000.00	0.00	100.00	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.06	5,340,000.00	5,292,000.00	(48,000.00)	99.10	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.06	123,300,000.00	123,173,126.00	(126,874.00)	99.90	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.06	18,415,000.00	15,365,976.00	(3,049,024.00)	83.44	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.06	3,415,000.00	3,330,000.00	(85,000.00)	97.51	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.06	15,000,000.00	12,035,976.00	(2,964,024.00)	80.24	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.09	193,790,700.00	193,269,746.00	(520,954.00)	99.73	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.09	39,190,000.00	39,190,000.00	0.00	100.00	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.09	106,100,000.00	106,019,540.00	(80,460.00)	99.83	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.09	2,620,000.00	2,620,000.00	0.00	100.00	
1	1-04.2-10.0-00.01	01	2.09	45,780,700.00	45,440,206.00	(340,494.00)	99.26	
1	1-04.2-10.0-00.01	02	2.05	1,735,572,208.00	1,590,568,781.20	(145,003,426.80)	91.65	
1	1-04.2-10.0-00.01	02	2.05	1,228,480,828.00	1,101,850,387.20	(126,630,440.80)	89.69	
1	1-04.2-10.0-00.01	02	2.05	470,927,000.00	385,546,021.20	(85,380,978.80)	81.87	
1	1-04.2-10.0-00.01	02	2.05	757,151,320.00	716,304,366.00	(41,249,463.80)	94.55	
1	1-04.2-10.0-00.01	02	2.06	507,091,380.00	488,718,394.00	(18,372,986.00)	96.38	
1	1-04.2-10.0-00.01	02	2.06	507,091,380.00	488,718,394.00	(18,372,986.00)	96.38	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)				BESTAMBAH / (BERBURANG)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI		
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
1 04 1-04.2-10.0-00.01	03	468.957.000,00	440.329.370,00	(28.627.530,00)	93,90	
1 04 1-04.2-10.0-00.01	03 2.02	155.103.000,00	137.422.650,00	(17.680.350,00)	88,60	
1 04 1-04.2-10.0-00.01	03 2.02 05	40.618.000,00	33.632.650,00	(6.985.350,00)	82,80	
1 04 1-04.2-10.0-00.01	03 2.02 06	114.485.000,00	103.790.000,00	(10.695.000,00)	90,66	
1 04 1-04.2-10.0-00.01	03 2.02 03	313.854.000,00	302.906.720,00	(10.947.280,00)	96,51	
1 04 1-04.2-10.0-00.01	03 2.02 01	96.248.000,00	93.121.600,00	(3.126.400,00)	96,75	
1 04 1-04.2-10.0-00.01	03 2.02 06	217.606.000,00	209.705.120,00	(7.820.880,00)	96,41	
1 04 1-04.2-10.0-00.01	04	3.404.411.374,00	3.314.406.775,00	(90.004.599,00)	97,36	
1 04 1-04.2-10.0-00.01	04 2.01	3.404.411.374,00	3.314.406.775,00	(90.004.599,00)	97,36	
1 04 1-04.2-10.0-00.01	04 2.01 01	3.374.166.374,00	3.253.131.375,00	(81.034.999,00)	97,57	
1 04 1-04.2-10.0-00.01	04 2.01 02	70.245.000,00	61.275.400,00	(8.969.600,00)	87,23	
1 04 1-04.2-10.0-00.01	05	7.856.307.671,00	7.294.244.310,80	(562.063.360,20)	92,85	
1 04 1-04.2-10.0-00.01	05 2.01	7.856.307.671,00	7.294.244.310,80	(562.063.360,20)	92,85	
1 04 1-04.2-10.0-00.01	05 2.01 01	776.157.000,00	700.968.400,00	(67.188.592,00)	91,34	
1 04 1-04.2-10.0-00.01	05 2.01 02	6.992.680.671,00	6.512.970.202,80	(479.710.468,20)	93,14	
1 04 1-04.2-10.0-00.01	05 2.01 03	87.469.800,00	72.305.700,00	(15.164.100,00)	83,64	
1 05 1-05.0-00.0-00.01	01	33.684.994.813,00	31.166.930.820,43	(2.517.163.992,57)	92,52	
1 05 1-05.0-00.0-00.01	01 2.01	7.792.305.990,00	7.147.474.055,67	(644.731.894,33)	91,73	
1 05 1-05.0-00.0-00.01	01 2.01 01	4.718.196.412,00	4.480.068.778,00	(238.127.634,00)	94,95	
1 05 1-05.0-00.0-00.01	01 2.01 01	15.150.000,00	14.344.050,00	(805.950,00)	94,68	
1 05 1-05.0-00.0-00.01	01 2.01 01	15.150.000,00	14.344.050,00	(805.950,00)	94,68	
1 05 1-05.0-00.0-00.01	01 2.02	3.139.305.132,00	3.355.154.988,00	(184.230.144,00)	94,79	
1 05 1-05.0-00.0-00.01	01 2.02 01	3.530.305.132,00	3.355.154.988,00	(184.230.144,00)	94,79	
1 05 1-05.0-00.0-00.01	01 2.05	47.900.000,00	47.250.000,00	(650.000,00)	98,64	
1 05 1-05.0-00.0-00.01	01 2.05 02	47.900.000,00	47.250.000,00	(650.000,00)	98,64	
1 05 1-05.0-00.0-00.01	01 2.06	314.230.780,00	303.944.080,00	(10.286.700,00)	96,73	
1 05 1-05.0-00.0-00.01	01 2.06 01	4.925.000,00	4.709.000,00	(116.000,00)	97,24	

219

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERURANG)	
					3	4	5	6
1	1 05	1-05.0-00.0-00.01	01	2.06	65,750,000.00	65,278,205.00	(471,795.00)	99.28
1	05	1-05.0-00.0-00.01	01	2.06	12,032,180.00	12,005,000.00	(27,180.00)	99.77
1	05	1-05.0-00.0-00.01	01	2.06	11,749,500.00	11,016,000.00	(733,500.00)	93.76
1	05	1-05.0-00.0-00.01	01	2.06	12,539,000.00	12,457,610.00	(81,390.00)	99.35
1	05	1-05.0-00.0-00.01	01	2.06	6,475,000.00	3,581,100.00	(2,894,900.00)	55.29
1	05	1-05.0-00.0-00.01	01	2.06	200,760,000.00	194,818,165.00	(5,941,835.00)	97.04
1	05	1-05.0-00.0-00.01	01	2.06	56,450,000.00	48,740,324.00	(8,209,676.00)	85.46
1	05	1-05.0-00.0-00.01	01	2.09	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	100.00
1	05	1-05.0-00.0-00.01	01	2.09	55,400,000.00	47,590,914.00	(8,209,076.00)	85.18
1	05	1-05.0-00.0-00.01	01	2.09	745,000,000.00	711,134,736.00	(33,945,764.00)	95.44
1	05	1-05.0-00.0-00.01	01	2.09	30,190,000.00	38,922,100.00	(7,670,000.00)	99.32
1	05	1-05.0-00.0-00.01	01	2.09	628,015,000.00	507,299,955.00	(20,715,945.00)	96.76
1	05	1-05.0-00.0-00.01	01	2.09	52,705,000.00	40,167,750.00	(12,537,250.00)	76.21
1	05	1-05.0-00.0-00.01	01	2.09	25,169,600.00	24,744,931.00	(424,669.00)	98.31
1	05	1-05.0-00.0-00.01	04		3,074,000,000.00	2,467,405,277.67	(406,604,260.33)	86.37
1	05	1-05.0-00.0-00.01	04	2.01	2,839,309,038.00	2,549,810,372.67	(289,498,665.33)	89.80
1	05	1-05.0-00.0-00.01	04	2.01	295,572,900.00	253,900,921.67	(41,671,978.33)	85.96
1	05	1-05.0-00.0-00.01	04	2.01	2,007,360,278.00	1,789,769,101.00	(217,591,177.00)	89.15
1	05	1-05.0-00.0-00.01	04	2.01	62,755,000.00	59,310,300.00	(3,444,700.00)	94.51
1	05	1-05.0-00.0-00.01	04	2.01	224,451,560.00	223,005,000.00	(1,446,560.00)	99.36
1	05	1-05.0-00.0-00.01	04	2.01	85,617,700.00	84,777,700.00	(840,000.00)	99.02
1	05	1-05.0-00.0-00.01	04	2.01	163,552,600.00	(39,047,350.00)	(24,504,650.00)	85.02
1	05	1-05.0-00.0-00.01	04	2.02	48,481,600.00	28,433,900.00	(20,447,000.00)	58.17
1	05	1-05.0-00.0-00.01	04	2.02	9,635,500.00	9,456,375.00	(169,125.00)	98.24
1	05	1-05.0-00.0-00.01	04	2.02	30,255,500.00	18,977,525.00	(20,277,975.00)	48.34
1	05	1-05.0-00.0-00.01	04	2.03	30,080,000.00	28,127,645.00	(11,792,355.00)	76.53
1	05	1-05.0-00.0-00.01	04	2.03	39,080,000.00	28,127,645.00	(11,752,355.00)	76.53
1	05	1-05.0-00.0-00.01	04	2.04	145,039,500.00	61,033,360.00	(84,506,140.00)	41.82

8,19

KODE			URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERBURANG)					
1			2		3		4		5		6	
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			REALISASI									
1	05	1-05.0-00.0-00.01	04	2.04	01	66,987,000.00	53,833,366.90	(13,153,640,00)	80.36			
1	05	1-05.0-00.0-00.01	04	2.04	02	78,952,500.00	7,800,000.00	(71,152,500,00)	9.12			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	01			21,379,804,911.00	19,727,921,874.00	(1,651,883,037,00)	92.27			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	01			8,273,831,000.00	7,622,828,260.00	(651,003,545,00)	92.12			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	01	2.01		26,245,000.00	24,101,805.00	(2,143,145,00)	91.83			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	01	2.01	01	26,245,000.00	24,101,805.00	(2,143,145,00)	91.83			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	01	2.02		7,130,265,555.00	6,648,796,103.00	(481,529,452,00)	93.25			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	01	2.02	01	7,130,265,555.00	6,648,796,103.00	(481,529,452,00)	93.25			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	01	2.06		247,047,250.00	214,682,473.00	(32,364,827,00)	86.99			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	01	2.06	01	10,948,500.00	10,948,500.00	0.00	100.00			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	01	2.06	04	15,355,500.00	15,223,500.00	(132,000,00)	99.14			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	01	2.06	05	12,042,250.00	9,405,000.00	(2,637,250,00)	78.18			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	01	2.06	09	208,701,000.00	179,105,423.00	(29,595,577,00)	85.82			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	01	2.08		120,085,000.00	88,046,169.00	(32,038,831,00)	73.32			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	01	2.08	01	3,685,000.00	3,590,000.00	(95,000,00)	97.42			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	01	2.08	02	116,400,000.00	84,456,169.00	(31,943,831,00)	72.56			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	01	2.09		750,189,000.00	647,261,710.00	(102,927,290,00)	86.28			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	01	2.09	02	425,780,000.00	397,355,650.00	(28,414,350,00)	93.33			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	01	2.09	05	19,890,000.00	6,695,000.00	(13,195,000,00)	33.66			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	01	2.09	09	304,519,000.00	243,201,060.00	(61,317,940,00)	79.86			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	02			13,105,973,106.00	12,105,093,614.00	(1,000,879,492,00)	92.36			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	02	2.01		12,428,006,456.00	11,506,488,974.00	(921,517,482,00)	92.59			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	02	2.01	01	1,927,640,000.00	1,516,712,704.00	(410,927,296,00)	78.68			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	02	2.01	02	9,014,210,106.00	8,561,570,814.00	(472,649,292,00)	94.77			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	02	2.01	04	754,561,000.00	741,506,750.00	(13,054,250,00)	98.27			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	02	2.01	05	711,585,350.00	686,698,796.00	(24,886,644,00)	96.50			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	02	2.02		677,966,650.00	598,604,640.00	(79,362,010,00)	88.29			
1	05	1-05.0-00.0-00.02	02	2.02	01	138,078,400.00	110,629,450.00	(27,398,950,00)	80.15			

8 A



KODE			URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUNJAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05	1-05.0-00.0-00.00	01	2.03	305,075,500.00	341,301,400.00	(43,778,100.00)	88.63
1	05	1-05.0-00.0-00.00	02	2.02	154,608,750.00	146,671,790.00	(8,184,960.00)	94.71
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.01	4,512,081,952.00	4,291,534,890.76	(220,540,061,24)	95.11
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.01	2,563,688,636.00	2,384,220,970.76	(179,467,665,24)	93.00
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.01	24,391,250.00	17,701,700.00	(6,689,550,00)	72.57
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.02	24,391,250.00	17,701,700.00	(6,689,550,00)	72.57
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.02	1,738,451,816.00	1,386,957,917.00	(351,493,899,00)	91.29
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.02	1,738,451,816.00	1,586,957,917.00	(151,493,899,00)	91.29
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.06	239,405,900.00	238,415,657.00	(989,843,00)	99.59
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.06	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	100.00
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.06	19,400,000.00	19,184,000.00	(216,000,00)	99.45
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.06	8,962,000.00	8,912,000.00	(50,000,00)	99.44
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.06	4,043,200.00	4,843,200.00	0.00	100.00
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.06	3,180,000.00	3,140,000.00	(32,000,00)	98.99
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.06	980,000,000.00	179,308,157.00	(691,843,00)	99.62
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.07	70,500,000.00	70,290,750.00	(209,250,00)	99.70
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.07	70,500,000.00	70,290,750.00	(209,250,00)	99.70
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.08	15,600,000.00	12,802,081.00	(2,797,919,00)	82.06
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.08	600,000.00	600,000.00	0.00	100.00
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.08	15,000,000.00	12,802,081.00	(2,797,919,00)	81.35
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.08	475,340,070.00	458,452,865.76	(17,287,204,24)	96.36
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.08	226,220,000.00	226,170,075.00	(49,925,00)	99.98
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.09	23,695,000.00	13,175,000.00	(10,120,000,00)	57.29
1	05	1-05.0-00.0-00.03	01	2.09	225,405,070.00	218,307,790.76	(7,117,279,24)	96.84
1	05	1-05.0-00.0-00.03	03		1,948,395,316.00	1,907,313,920.00	(41,081,396,00)	97.89
1	05	1-05.0-00.0-00.03	03	2.01	47,414,700.00	47,397,200.00	(17,500,00)	99.96
1	05	1-05.0-00.0-00.03	03	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1	05	1-05.0-00.0-00.03	03	2.01	47,414,700.00	47,397,200.00	(17,500,00)	99.96
1	05	1-05.0-00.0-00.03	03	2.02	1,892,105,616.00	1,851,864,400.00	(41,041,146,00)	97.83
1	05	1-05.0-00.0-00.03	03	2.02	262,342,950.00	265,425,000.00	(16,916,950,00)	94.01

R. A

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)			
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			REALISASI	(Rp)	(%)	
		1	2	3				4
1 05	1-05.0-00.0-00.0.03	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.008.784.137,00	(189.509,00)	99,98
1 05	1-05.0-00.0-00.0.03	03	2.02	06	Pengastisan Kapasitas Kewaspadaan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	118.777.000,00	(1.081.810,00)	98,58
1 05	1-05.0-00.0-00.0.03	03	2.02	07	Perencanaan Pezabencana Kabupaten/Kota	39.594.000,00	(469.500,00)	98,74
1 05	1-05.0-00.0-00.0.03	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaktor Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	442.417.220,00	(21.753.177,00)	95,08
1 05	1-05.0-00.0-00.0.03	03	2.03		Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	8.875.000,00	(22.750,00)	99,74
1 05	1-05.0-00.0-00.0.03	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	8.852.250,00	(22.750,00)	99,74
1 06					<b>Sosial</b>			
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01				<b>Dinas Sosial</b>	7.879.143.508,00	(1.191.237.605,00)	84,88
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01				Program Perwujudan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.879.143.508,00	(1.191.237.605,00)	84,88
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	01	2.02		Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.885.180.728,00	(587.754.391,00)	84,82
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.508.000,00	(643.350,00)	98,14
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	01	2.01	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.508.000,00	(643.350,00)	98,14
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	01	2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.281.265.596,60	(562.875.205,00)	82,86
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	01	2.02	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.281.265.596,60	(562.875.205,00)	82,86
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	01	2.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.409.500,00	(4.015.747,00)	98,08
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	01	2.06	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.595.000,00	(10.000,00)	99,37
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	01	2.06	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.368.000,00	(333.000,00)	96,32
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	01	2.06	04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.197.500,00	(366.900,00)	91,66
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	01	2.06	05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.345.000,00	(3.305.847,00)	98,22
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.406.000,00	(8.117.028,00)	78,38
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.806.000,00	(6.000,00)	99,79
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	01	2.08	02	Pemeliharaan Bangun MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.400.000,00	(8.111.028,00)	77,09
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	01	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	331.591.632,00	(12.103.061,00)	96,35
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	01	2.09	01	Perencanaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.901.032,00	(4.407.700,00)	97,10
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	13.960.000,00	(6.712.000,00)	51,92
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Renovasi/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	165.736.600,00	(983.353,00)	99,41
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	02			Program Pemberdayaan Sosial	879.639.500,00	444.401.899,00	92,65
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	479.639.500,00	(35.237.601,00)	92,65
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewaspadaan Kabupaten/Kota	237.857.500,00	(7.590.000,00)	96,81
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewaspadaan Kabupaten/Kota	31.835.500,00	(9.598.000,00)	69,95
1 06	1-06.0-00.0-00.0.01	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewaspadaan Masyarakat Kewaspadaan Kabupaten/Kota	210.046.500,00	(18.049.601,00)	91,41

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI			
			3	4	5		6	
1	1-06.0-00.0-00.01	04	01	Program Rehabilitasi Sosial	919,315,342,00	716,022,894,00	(203,292,530,00)	77,89
1	1-06.0-00.0-00.01	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	657,455,743,00	535,132,024,00	(122,323,719,00)	81,39
1	1-06.0-00.0-00.01	04	2.01	Penyediaan Perlengkapan	106,730,000,00	84,057,590,00	(22,672,500,00)	78,76
1	1-06.0-00.0-00.01	04	2.01	Pemberian Bimbingan, Fik, Mentat, Spritual, dan Sosial	117,667,750,00	96,795,400,00	(20,872,350,00)	82,68
1	1-06.0-00.0-00.01	04	2.01	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	174,644,000,00	155,123,380,00	(19,520,620,00)	88,82
1	1-06.0-00.0-00.01	04	2.01	Pembinaan Layanan Kedaruratan	122,284,000,00	87,268,847,00	(35,015,153,00)	71,37
1	1-06.0-00.0-00.01	04	2.01	Pembinaan Layanan Rujukan	136,729,992,00	111,886,897,00	(24,843,095,00)	81,83
1	1-06.0-00.0-00.01	04	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	361,809,600,00	180,890,780,00	(80,968,820,00)	69,08
1	1-06.0-00.0-00.01	04	2.02	Pembinaan Layanan Duta dan Pengabdian	35,741,000,00	19,408,500,00	(16,332,500,00)	54,30
1	1-06.0-00.0-00.01	04	2.02	Pembinaan Layanan Kedaruratan	54,000,000,00	14,225,750,00	(39,774,250,00)	26,34
1	1-06.0-00.0-00.01	04	2.02	Pembinaan Bimbingan Fik, Mentat, Spritual, dan Sosial	172,118,400,00	147,256,530,00	(24,862,070,00)	85,56
1	1-06.0-00.0-00.01	05		Program Perhubungan Dan Jaminan Sosial	1,900,696,184,00	1,660,280,943,00	(240,417,341,00)	87,35
1	1-06.0-00.0-00.01	05	2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terantar	129,296,750,00	63,157,870,00	(66,140,880,00)	48,85
1	1-06.0-00.0-00.01	05	2.01	Rujukan Anak-Anak Terantar	59,350,250,00	21,747,150,00	(37,603,100,00)	36,64
1	1-06.0-00.0-00.01	05	2.02	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terantar	69,940,500,00	41,410,720,00	(28,537,780,00)	59,28
1	1-06.0-00.0-00.01	05	2.02	Penyediaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,771,399,534,00	1,597,123,073,00	(174,276,461,00)	90,15
1	1-06.0-00.0-00.01	05	2.02	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	837,026,250,00	574,370,545,00	(63,055,705,00)	90,11
1	1-06.0-00.0-00.01	05	2.02	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	311,323,784,00	226,060,330,00	(85,263,454,00)	72,61
1	1-06.0-00.0-00.01	05	2.02	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	822,649,500,00	796,692,198,00	(25,957,302,00)	96,84
1	1-06.0-00.0-00.01	06		Program Penanganan Bencana	472,924,992,00	352,541,423,00	(120,383,569,00)	74,54
1	1-06.0-00.0-00.01	06	2.01	Perencanaan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	210,344,500,00	107,261,840,00	(103,082,660,00)	50,99
1	1-06.0-00.0-00.01	06	2.01	Penyediaan Makanan	100,000,000,00	40,171,200,00	(59,828,800,00)	40,17
1	1-06.0-00.0-00.01	06	2.01	Pelayanan Dukungan Psikososial	110,344,500,00	67,090,640,00	(43,253,860,00)	60,89
1	1-06.0-00.0-00.01	06	2.02	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	262,580,492,00	245,279,583,00	(17,300,909,00)	93,41
1	1-06.0-00.0-00.01	06	2.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Timuna Slaga Bencana	262,580,492,00	245,279,583,00	(17,300,909,00)	93,41
1	1-06.0-00.0-00.01	07		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	221,384,662,00	217,232,497,00	(4,152,165,00)	98,12
1	1-06.0-00.0-00.01	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	221,384,662,00	217,232,497,00	(4,152,165,00)	98,12
1	1-06.0-00.0-00.01	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	221,384,662,00	217,232,497,00	(4,152,165,00)	98,12
2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	341.967.756.875,00	129.366.666.181,69	(12.701.990.693,31)	91,05
2	07			<b>Tenaga Kerja</b>	607.444.304,01	540.627.061,80	(130.817.323,00)	79,81

Handwritten signature and initials.

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah (Rp)		REALISASI	BERTAMBAH / (BERCURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	3			4	5
2 07	2-18.3-31.2-07.01	03	01	687,441,384.00	548,527,061.00	(138,817,323.00)	79.81
2 07	2-18.3-31.2-07.01	03	2.01	652,166,100.00	522,466,461.00	(129,693,639.00)	80.11
2 07	2-18.3-31.2-07.01	03	2.01	652,166,100.00	522,466,461.00	(129,693,639.00)	80.11
2 07	2-18.3-31.2-07.01	03	2.01	652,166,100.00	522,466,461.00	(129,693,639.00)	80.11
2 07	2-18.3-31.2-07.01	04	2.01	8,379,500.00	8,063,200.00	(316,300.00)	96.23
2 07	2-18.3-31.2-07.01	04	2.01	8,379,500.00	8,063,200.00	(316,300.00)	96.23
2 07	2-18.3-31.2-07.01	04	2.01	8,379,500.00	8,063,200.00	(316,300.00)	96.23
2 07	2-18.3-31.2-07.01	05	2.02	26,904,784.00	18,097,400.00	(8,807,384.00)	67.26
2 07	2-18.3-31.2-07.01	05	2.02	26,904,784.00	18,097,400.00	(8,807,384.00)	67.26
2 07	2-18.3-31.2-07.01	05	2.02	11,661,824.00	7,909,150.00	(3,752,674.00)	67.82
2 07	2-18.3-31.2-07.01	05	2.02	15,242,960.00	10,188,250.00	(5,054,710.00)	66.84
2 08	2-08.2-14.0-00.01	01	2.06	7,949,779,587.00	7,621,818,966.00	(327,960,621.00)	95.87
2 08	2-08.2-14.0-00.01	01	2.01	7,949,779,587.00	7,621,818,966.00	(327,960,621.00)	95.87
2 08	2-08.2-14.0-00.01	01	2.01	5,121,739,607.00	4,904,424,900.00	(217,314,707.00)	95.76
2 08	2-08.2-14.0-00.01	01	2.01	20,149,750.00	19,884,350.00	(265,400.00)	97.69
2 08	2-08.2-14.0-00.01	01	2.02	20,149,750.00	19,884,350.00	(265,400.00)	97.69
2 08	2-08.2-14.0-00.01	01	2.02	4,414,487,737.00	4,207,674,122.00	(206,813,615.00)	95.32
2 08	2-08.2-14.0-00.01	01	2.06	4,414,487,737.00	4,207,674,122.00	(206,813,615.00)	95.32
2 08	2-08.2-14.0-00.01	01	2.06	157,783,000.00	156,035,387.00	(1,747,613.00)	98.89
2 08	2-08.2-14.0-00.01	01	2.06	1,404,500.00	1,386,000.00	(18,500.00)	98.66
2 08	2-08.2-14.0-00.01	01	2.06	4,619,500.00	4,189,500.00	(430,000.00)	90.69
2 08	2-08.2-14.0-00.01	01	2.06	10,134,000.00	10,125,500.00	(8,500.00)	99.92
2 08	2-08.2-14.0-00.01	01	2.06	1,180,000.00	1,135,000.00	(45,000.00)	95.37
2 08	2-08.2-14.0-00.01	01	2.07	140,465,000.00	139,179,387.00	(1,285,613.00)	99.08
2 08	2-08.2-14.0-00.01	01	2.07	30,000,000.00	29,705,000.00	(295,000.00)	99.00
2 08	2-08.2-14.0-00.01	01	2.08	30,000,000.00	29,705,000.00	(295,000.00)	99.00
2 08	2-08.2-14.0-00.01	01	2.08	133,885,417.00	129,793,371.00	(4,092,046.00)	96.94
2 08	2-08.2-14.0-00.01	01	2.08	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	100.00
2 08	2-08.2-14.0-00.01	01	2.08	31,200,000.00	28,025,515.00	(3,174,485.00)	89.83

21

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)				
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)		(%)			
2	2-08-2-14-0-00-01	01	2.08	03					
2	2-08-2-14-0-00-01	01	2.08	04	4.900.000,00	4.740.000,00	(240.000,00)	95,18	
2	2-08-2-14-0-00-01	01	2.08	04	96.485.412,00	95.807.856,00	(677.556,00)	99,30	
2	2-08-2-14-0-00-01	01	2.09	04	365.433.708,00	361.537.473,06	(3.896.235,00)	96,93	
2	2-08-2-14-0-00-01	01	2.09	04	71.190.000,00	69.441.649,00	(1.748.351,00)	97,54	
2	2-08-2-14-0-00-01	01	2.09	02	238.211.804,00	237.165.640,00	(1.046.164,00)	99,56	
2	2-08-2-14-0-00-01	01	2.09	09	56.031.904,00	54.930.184,00	(1.101.720,00)	98,00	
2	2-08-2-14-0-00-01	02	2.01		429.504.600,00	426.360.215,00	(3.144.385,00)	99,27	
2	2-08-2-14-0-00-01	02	2.01		91.445.000,00	90.057.721,00	(1.387.279,00)	99,34	
2	2-08-2-14-0-00-01	02	2.01	03	91.445.000,00	90.057.721,00	(1.387.279,00)	99,34	
2	2-08-2-14-0-00-01	02	2.02		338.059.600,00	335.702.494,00	(2.357.106,00)	99,30	
2	2-08-2-14-0-00-01	02	2.02	01	285.356.600,00	283.933.094,00	(1.423.506,00)	99,50	
2	2-08-2-14-0-00-01	02	2.02	02	52.703.000,00	51.769.400,00	(933.600,00)	98,23	
2	2-08-2-14-0-00-01	03	2.01		198.821.353,00	166.529.898,00	(32.291.455,00)	83,76	
2	2-08-2-14-0-00-01	03	2.01		50.600.000,00	44.059.825,00	(6.540.175,00)	88,26	
2	2-08-2-14-0-00-01	03	2.01	01	50.600.000,00	44.059.825,00	(6.540.175,00)	88,26	
2	2-08-2-14-0-00-01	03	2.02		148.221.353,00	121.870.073,00	(26.351.280,00)	82,22	
2	2-08-2-14-0-00-01	03	2.02	01	43.426.353,00	42.072.323,00	(1.354.030,00)	96,88	
2	2-08-2-14-0-00-01	03	2.02	01	104.795.000,00	79.797.750,00	(24.997.250,00)	76,15	
2	2-08-2-14-0-00-01	03	2.03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2-08-2-14-0-00-01	03	2.03	02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2-08-2-14-0-00-01	04	2.01		1.375.698.974,00	1.341.675.215,00	(34.023.759,00)	97,51	
2	2-08-2-14-0-00-01	04	2.01		1.375.698.974,00	1.341.675.215,00	(34.023.759,00)	97,51	
2	2-08-2-14-0-00-01	04	2.01	02	697.849.554,00	679.587.254,00	(18.262.300,00)	97,38	
2	2-08-2-14-0-00-01	04	2.01	03	678.049.620,00	662.887.961,00	(15.161.659,00)	97,65	
2	2-08-2-14-0-00-01	05			17.740.000,00	16.729.560,00	(1.010.440,00)	96,48	

P. H

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERURANG)	
	1	2	3	4	5	6
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2 08 2-08.2-14.0-00.01	05	2.01	17,340,000.00	16,729,560.00	(610,440.00)	96.48
2 08 2-08.2-14.0-00.01	05	2.01	17,340,000.00	16,729,560.00	(610,440.00)	96.48
2 08 2-08.2-14.0-00.01	06	2.01	324,082,053.00	321,724,354.00	(2,357,699.00)	99.31
2 08 2-08.2-14.0-00.01	06	2.01	271,078,894.00	269,354,899.00	(1,723,995.00)	99.36
2 08 2-08.3-14.0-00.01	06	2.01	129,615,894.00	129,177,025.00	(438,779.00)	99.66
2 08 2-08.2-14.0-00.01	06	2.01	141,463,000.00	140,177,784.00	(1,285,216.00)	99.09
2 08 2-08.2-14.0-00.01	06	2.02	52,923,249.00	52,369,545.00	(553,704.00)	98.95
2 08 2-08.2-14.0-00.01	06	2.02	52,923,249.00	52,369,545.00	(553,704.00)	98.95
2 08 2-08.2-14.0-00.01	07	2.01	462,473,000.00	444,374,841.00	(180,958,159.00)	92.10
2 08 2-08.2-14.0-00.01	07	2.01	96,848,000.00	91,276,300.00	(5,571,700.00)	94.25
2 08 2-08.2-14.0-00.01	07	2.01	34,498,000.00	34,219,550.00	(278,450.00)	99.19
2 08 2-08.2-14.0-00.01	07	2.01	62,350,000.00	57,656,750.00	(5,293,250.00)	91.51
2 08 2-08.2-14.0-00.01	07	2.02	157,249,000.00	126,142,611.00	(31,106,389.00)	80.22
2 08 2-08.2-14.0-00.01	07	2.02	157,249,000.00	126,142,611.00	(31,106,389.00)	80.22
2 08 2-08.2-14.0-00.01	07	2.03	208,276,000.00	226,955,930.00	(1,420,070.00)	99.38
2 08 2-08.2-14.0-00.01	07	2.03	77,200,000.00	76,571,520.00	(628,480.00)	99.19
2 08 2-08.2-14.0-00.01	07	2.03	76,806,000.00	76,287,035.00	(518,965.00)	99.32
2 08 2-08.2-14.0-00.01	07	2.03	74,370,000.00	74,897,375.00	(272,625.00)	99.63
2 09 3-27.2-09.3-25.01	01		10,960,150,740.00	9,609,366,696.00	(1,290,784,044.00)	88.22
2 09 3-27.2-09.3-25.01	01		10,960,150,740.00	9,609,366,696.00	(1,290,784,044.00)	88.22
2 09 3-27.2-09.3-25.01	01	2.01	9,142,287,240.00	8,539,467,398.00	(602,819,842.00)	93.41
2 09 3-27.2-09.3-25.01	01	2.01	17,660,000.00	16,943,450.00	(716,550.00)	95.94
2 09 3-27.2-09.3-25.01	01	2.01	17,660,000.00	16,943,450.00	(716,550.00)	95.94
2 09 3-27.2-09.3-25.01	01	2.02	8,068,154,887.00	7,512,713,651.00	(555,441,236.00)	93.11

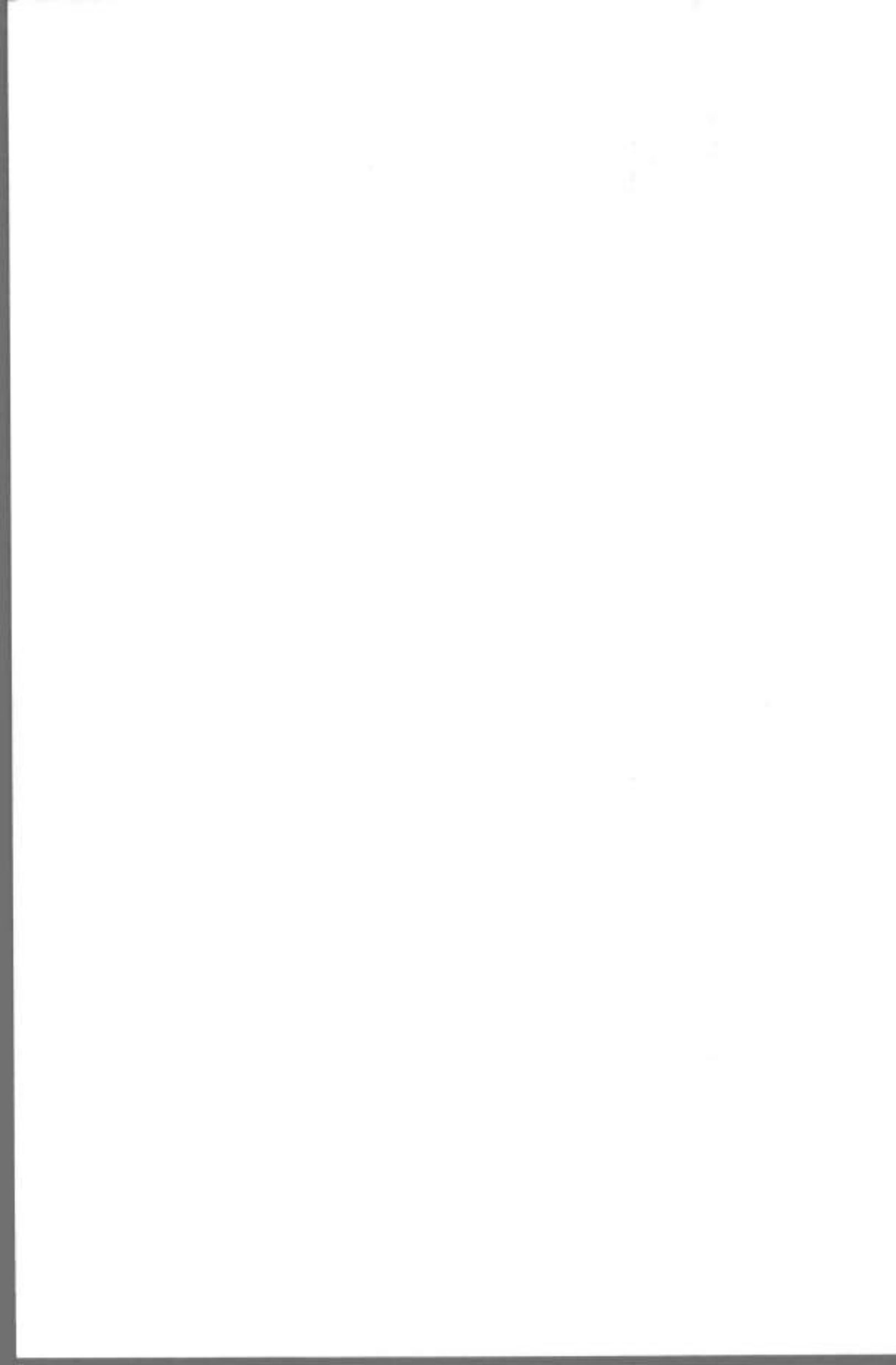
Handwritten signature and initials.

KODE			URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)					
1			2			3		4		5		6	
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			REALISASI			3		4		5		6	
2	09	3-27.2-09.3-25.01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.068.354.887,00	7.512.713.651,00	(555.641.236,00)		93,11		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	347.438.800,00	334.345.200,00	(13.093.600,00)		96,23		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	01	2.06	01	Penyediaan Komputer Instalasi Labrak/Perencanaan Anggaran Kantor	7.283.800,00	6.994.800,00	(289.000,00)		96,03		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	01	2.06	02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	130.891.000,00	123.100.000,00	(7.791.000,00)		94,05		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.209.000,00	22.171.170,00	(2.037.830,00)		91,58		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.530.000,00	15.460.550,00	(69.450,00)		99,68		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Sapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.525.000,00	166.398.080,00	(2.926.920,00)		98,27		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	01	2.06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.480.000,00	50.167.900,00	(5.312.100,00)		90,43		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	01	2.06	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00		100,00		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	01	2.06	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.100.000,00	44.787.900,00	(5.312.100,00)		89,40		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	01	2.09		Pembelian Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	653.353.553,00	623.797.597,00	(27.555.956,00)		95,78		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	314.787.554,00	296.544.392,00	(18.243.162,00)		94,20		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	23.355.000,00	19.421.500,00	(3.933.500,00)		83,16		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	315.210.999,00	309.831.705,00	(5.379.294,00)		98,29		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	03	2.01		Program Pengabdian Masyarakat dan Kebutuhan Lainnya	1.646.032.500,00	1.062.116.858,00	(583.915.642,00)		64,53		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	03	2.01	03	Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Fisik dan Harga Pangan	1.023.895.000,00	498.614.400,00	(525.280.600,00)		48,70		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	13.895.000,00	13.112.500,00	(782.500,00)		95,81		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	510.000.000,00	485.301.500,00	(24.698.500,00)		95,16		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)		0,00		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	612.137.500,00	563.502.458,00	(48.635.042,00)		92,05		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	03	2.04	02	Pembudayaan Masyarakat dalam Pengendalian Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	603.552.500,00	556.864.958,00	(46.687.542,00)		92,25		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Komsumsi per Kapita per Tahun	18.585.000,00	6.637.500,00	(11.947.500,00)		35,71		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	04	2.01		Program Peringatan Kawasan Pangan	129.181.000,00	26.286.400,00	(102.894.600,00)		20,35		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	04	2.01	01	Penyusunan Peta Kawasan dan Kawasan Pangan Kecamatan	21.421.000,00	21.184.150,00	(236.850,00)		98,89		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	04	2.01	04	Penyusunan, Pemeliharaan dan Analisis Peta Kawasan dan Kawasan Pangan	21.421.000,00	21.184.150,00	(236.850,00)		98,89		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	04	2.02		Pengawasan Kawasan Pangan Kawasan Kabupaten/Kota	107.760.000,00	5.102.250,00	(102.657.750,00)		4,73		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengawasan, Pengabdian, dan Penyelahan Cagar Pangan pada Kawasan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	107.760.000,00	5.102.250,00	(102.657.750,00)		4,73		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	05	2.01		Program Pengawasan Kawasan Pangan	47.650.000,00	40.995.000,00	(6.655.000,00)		86,12		
2	09	3-27.2-09.3-25.01	05	2.01	05	Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Pangan Seger Daerah Kabupaten/Kota	47.650.000,00	40.995.000,00	(6.655.000,00)		86,12		

KODE			URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6				
2	09	3-27-2-01-3-25-01	04	2.01	04	42.650.000,00	40.395.000,00	(1.655.000,00)	96,12
2	10	1-03-2-10-0-00-01				559.638.165,00	433.368.274,94	(126.269.890,06)	77,44
2	10	1-03-2-10-0-00-01	04	2.01	04	559.638.165,00	433.368.274,94	(126.269.890,06)	77,44
2	10	1-03-2-10-0-00-01	04	2.01	04	15.998.500,00	11.707.735,00	(4.290.765,00)	73,18
2	10	1-03-2-10-0-00-01	04	2.01	01	15.998.500,00	11.707.735,00	(4.290.765,00)	73,18
2	10	1-03-2-10-0-00-01	04	2.01	01	15.998.500,00	11.707.735,00	(4.290.765,00)	73,18
2	10	1-03-2-10-0-00-01	05	2.01	05	16.605.000,00	11.049.800,00	(5.555.200,00)	66,55
2	10	1-03-2-10-0-00-01	05	2.01	05	16.605.000,00	11.049.800,00	(5.555.200,00)	66,55
2	10	1-03-2-10-0-00-01	05	2.01	05	16.605.000,00	11.049.800,00	(5.555.200,00)	66,55
2	10	1-03-2-10-0-00-01	07	2.01	07	31.327.000,00	11.417.100,00	(19.909.900,00)	36,44
2	10	1-03-2-10-0-00-01	07	2.01	07	31.327.000,00	11.417.100,00	(19.909.900,00)	36,44
2	10	1-03-2-10-0-00-01	07	2.01	07	31.327.000,00	11.417.100,00	(19.909.900,00)	36,44
2	10	1-03-2-10-0-00-01	09	2.01	09	244.954.604,00	199.532.136,52	(45.422.467,48)	81,46
2	10	1-03-2-10-0-00-01	09	2.01	09	244.954.604,00	199.532.136,52	(45.422.467,48)	81,46
2	10	1-03-2-10-0-00-01	09	2.01	02	244.954.604,00	199.532.136,52	(45.422.467,48)	81,46
2	10	1-03-2-10-0-00-01	10	2.01	10	250.753.061,00	199.661.502,52	(51.091.558,48)	79,62
2	10	1-03-2-10-0-00-01	10	2.01	10	250.753.061,00	199.661.502,52	(51.091.558,48)	79,62
2	10	1-03-2-10-0-00-01	10	2.01	10	40.723.000,00	31.006.519,52	(9.716.480,48)	76,14
2	10	1-03-2-10-0-00-01	10	2.01	10	210.030.061,00	168.654.983,00	(41.375.078,00)	80,30
2	11	2-11-0-00-0-00-01				42.321.589.123,00	38.228.054.116,34	(4.093.525.006,66)	90,33
2	11	2-11-0-00-0-00-01	01	2.01	01	42.321.589.123,00	38.228.054.116,34	(4.093.525.006,66)	90,33
2	11	2-11-0-00-0-00-01	01	2.01	01	22.472.799.103,00	19.724.694.404,65	(2.698.104.698,35)	87,97
2	11	2-11-0-00-0-00-01	01	2.01	01	31.851.250,00	24.760.000,00	(7.091.250,00)	77,74
2	11	2-11-0-00-0-00-01	01	2.02	01	31.851.250,00	24.760.000,00	(7.091.250,00)	77,74
2	11	2-11-0-00-0-00-01	01	2.02	01	12.945.284.963,00	11.899.885.345,00	(645.399.618,00)	94,80
2	11	2-11-0-00-0-00-01	01	2.02	01	12.529.084.663,00	11.888.570.845,00	(640.513.818,00)	94,89
2	11	2-11-0-00-0-00-01	01	2.03	01	16.280.000,00	11.314.500,00	(4.885.500,00)	69,84
2	11	2-11-0-00-0-00-01	01	2.03	01	248.185.916,00	248.185.915,65	(0,35)	100,00
2	11	2-11-0-00-0-00-01	01	2.03	01	248.185.916,00	248.185.915,65	(0,35)	100,00

11A





KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	
					3	4	5	6
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.04	Administrasi Pendataan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	137.267.800,00	127.047.838,00	(10.219.962,00)	92,55
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.04	Perencanaan Pengabdian Retribusi Daerah	137.267.800,00	127.047.838,00	(10.219.962,00)	92,55
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	332.880.000,00	329.625.600,00	(3.254.400,00)	99,05
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	332.880.000,00	329.625.600,00	(3.254.400,00)	99,05
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	371.348.500,00	274.617.465,00	(96.691.035,00)	73,96
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.276.000,00	19.805.410,00	(470.590,00)	97,68
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.234.500,00	10.131.510,00	(102.990,00)	98,99
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.153.000,00	17.141.870,00	(11.011.130,00)	60,89
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.06	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.251.000,00	3.170.000,00	(81.000,00)	97,51
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.06	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309.394.000,00	224.308.675,00	(85.085.325,00)	72,52
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.07	Penyediaan Barang M&A Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.361.594.611,00	1.264.136.319,00	(97.458.292,00)	92,05
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.018.494.611,00	1.001.659.819,00	(16.794.792,00)	98,36
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.07	Pengadaan Mobil	173.090.000,00	162.199.500,00	(10.890.500,00)	93,76
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	170.100.000,00	100.279.000,00	(69.821.000,00)	58,95
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.485.000,00	95.201.555,00	(56.283.445,00)	62,85
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.535.000,00	1.425.200,00	(109.800,00)	92,85
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.950.000,00	93.776.355,00	(56.173.645,00)	62,54
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.09	Pemeliharaan Barang M&A, Daerlat Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.243.111.313,00	5.461.232.367,00	(1.781.878.946,00)	75,40
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.904.522.450,00	5.248.267.864,00	(1.656.254.586,00)	75,79
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.09	Pemeliharaan Perabot dan Mesin Lainnya	28.340.000,00	15.364.000,00	(12.976.000,00)	54,21
2 11	2-11.0-00.0-00.01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	290.248.883,00	197.600.503,00	(92.648.380,00)	68,08
2 11	2-11.0-00.0-00.01	02	2.01	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	131.749.000,00	110.632.180,00	(21.116.820,00)	83,97
2 11	2-11.0-00.0-00.01	02	2.01	Rencana Perindukan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPUH) Kabupaten/Kota	131.749.000,00	110.632.180,00	(21.116.820,00)	83,97
2 11	2-11.0-00.0-00.01	02	2.01	Pengendalian Pencemaran RPPUH Kabupaten/Kota	131.749.000,00	110.632.180,00	(21.116.820,00)	83,97
2 11	2-11.0-00.0-00.01	03	2.01	Program Penyediaan Pencemaran Dar/atau Kawasan Lingkungan Hidup	262.832.098,00	251.065.653,00	(11.766.445,00)	95,52
2 11	2-11.0-00.0-00.01	03	2.01	Pengelolaan Pencemaran dar/atau Kawasan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	262.832.098,00	251.065.653,00	(11.766.445,00)	95,52
2 11	2-11.0-00.0-00.01	03	2.01	Kuudansi, Seleksi/evaluasi dan Pelaksanaan Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	88.348.650,00	82.740.000,00	(5.608.650,00)	93,65
2 11	2-11.0-00.0-00.01	03	2.01	Koordinasi, Seleksi/evaluasi dan Pelaksanaan Penyelidikan Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	65.615.000,00	53.865.950,00	(11.749.050,00)	82,09
2 11	2-11.0-00.0-00.01	03	2.01	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	128.868.408,00	114.454.703,00	(14.413.705,00)	88,82
2 11	2-11.0-00.0-00.01	04	2.01	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	3.150.402.330,00	2.746.598.227,00	(403.804.103,00)	87,18
2 11	2-11.0-00.0-00.01	04	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.150.402.330,00	2.746.598.227,00	(403.804.103,00)	87,18

8.5

KODE		URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)					
1		2		3		4		5		6	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI		(Rp)		(%)	
2	11	2-11.0-00.0-00.01	04	2.01	97.990.000,00	97.075.660,00	(914.400,00)		99,07		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	04	2.01	3.952.412.330,00	2.649.522.627,00	(402.889.703,00)		66,81		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	05		12.360.000,00	8.236.760,00	(4.123.240,00)		66,64		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	05	2.02	12.360.000,00	8.236.760,00	(4.123.240,00)		66,64		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	05	2.02	12.360.000,00	8.236.760,00	(4.123.240,00)		66,64		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	06		39.612.400,00	30.053.029,00	(9.559.371,00)		75,87		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	06	2.01	39.612.400,00	30.053.029,00	(9.559.371,00)		75,87		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	06	2.01	27.717.500,00	21.099.446,00	(6.618.054,00)		76,11		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	06	2.01	11.894.900,00	8.953.583,00	(2.941.317,00)		75,27		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	08		452.235.500,00	388.242.373,00	(63.993.127,00)		85,85		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	08	2.01	452.235.500,00	388.242.373,00	(63.993.127,00)		85,85		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	08	2.01	152.447.000,00	135.826.593,00	(16.618.407,00)		89,15		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	08	2.01	290.788.500,00	252.313.780,00	(47.474.720,00)		84,15		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	10		17.130.050,00	5.283.500,00	(11.846.550,00)		30,84		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	10	2.01	17.130.050,00	5.283.500,00	(11.846.550,00)		30,84		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	10	2.01	17.130.050,00	5.283.500,00	(11.846.550,00)		30,84		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	11		15.812.468.682,00	14.963.262.989,69	(849.205.692,31)		94,63		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	11	2.01	15.812.468.682,00	14.963.262.989,69	(849.205.692,31)		94,63		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	11	2.01	66.030.000,00	50.989.025,00	(15.040.975,00)		77,22		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	11	2.01	1.093.836.074,00	998.552.190,00	(135.283.884,00)		87,63		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	11	2.01	10.141.952.689,00	9.742.932.962,00	(399.019.727,00)		96,26		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	11	2.01	137.200.000,00	114.944.800,00	(22.255.200,00)		83,12		
2	11	2-11.0-00.0-00.01	11	2.01	4.377.449.919,00	4.076.744.572,69	(299.705.346,31)		93,22		
2	12	2-12.0-00.0-00.01			6.266.328.404,00	5.863.934.087,23	(402.394.316,77)		93,50		
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01		6.266.328.404,00	5.863.934.087,23	(402.394.316,77)		93,50		
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.01	4.905.360.578,00	4.580.319.793,23	(325.040.784,77)		93,37		
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.01	15.385.000,00	14.620.760,00	(764.240,00)		95,03		

KODE		URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)					
1		2		3		4		5		6	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI		(Rp)		(%)	
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.01	15,385,000.00	14,620,750.00	(764,240.00)	95.03			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.02	3,855,233,834.00	3,686,397,897.00	(168,835,937.00)	95.62			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.06	3,855,233,834.00	3,686,397,897.00	(168,835,937.00)	95.62			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.06	247,132,944.00	231,150,843.00	(16,182,101.00)	93.46			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.06	2,507,700.00	1,934,000.00	(573,700.00)	77.12			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.06	37,520,000.00	36,887,170.00	(632,830.00)	98.31			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.06	26,530,000.00	24,102,469.00	(2,427,531.00)	90.85			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.06	8,221,000.00	4,484,700.00	(3,736,300.00)	54.55			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.06	172,554,244.00	163,742,204.00	(8,811,960.00)	94.89			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.07	220,850,000.00	214,285,500.00	(6,564,500.00)	97.03			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.07	220,850,000.00	214,285,500.00	(6,564,500.00)	97.03			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.08	97,010,000.00	77,534,799.00	(19,475,201.00)	80.03			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.08	2,210,000.00	2,210,000.00	0.00	100.00			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.08	94,800,000.00	75,424,799.00	(19,375,201.00)	79.56			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.09	469,540,000.00	356,229,994.23	(113,310,005.77)	75.87			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.09	39,190,000.00	36,090,196.00	(3,099,804.00)	92.19			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.09	82,360,000.00	74,787,907.00	(7,572,093.00)	90.82			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.09	2,000,000.00	1,990,000.00	(10,000.00)	99.50			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.09	8,200,000.00	5,730,000.00	(2,470,000.00)	69.88			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	01	2.09	337,868,800.00	237,631,891.23	(100,176,908.77)	70.35			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	02	2.01	532,168,753.00	600,805,111.00	68,636,358.00	95.05			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	02	2.01	611,021,253.00	580,927,811.00	(30,093,442.00)	95.07			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	02	2.01	215,212,200.00	191,620,029.00	(23,592,171.00)	89.04			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	02	2.01	395,809,053.00	389,307,782.00	(6,501,271.00)	98.36			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	02	2.02	21,087,500.00	19,877,300.00	(1,210,200.00)	94.26			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	02	2.02	21,087,500.00	19,877,300.00	(1,210,200.00)	94.26			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	03	2.01	282,737,220.00	269,514,758.00	(13,222,462.00)	95.32			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	03	2.01	282,737,220.00	269,514,758.00	(13,222,462.00)	95.32			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	03	2.01	52,407,000.00	47,309,570.00	(5,097,430.00)	90.27			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	03	2.01	230,330,220.00	222,205,188.00	(8,125,032.00)	96.47			
2	12	2-12.0-00.0-00.01	04		404,712,853.00	374,279,125.00	(30,433,728.00)	92.48			

8.1A

KODE		URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1		2		3		4	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	
				5		6	
				(Rp)		(%)	
2	2-12.0-00.0-00.01	04	2.01	155,773,853.00	179,497,575.00	(16,776,278,00)	91.69
2	2-12.0-00.0-00.01	04	2.01	28,242,500.00	21,356,905.00	(6,885,600,00)	75.62
2	2-12.0-00.0-00.01	04	2.01	167,531,353.00	158,140,670.00	(9,390,678,00)	94.39
2	2-12.0-00.0-00.01	04	2.03	208,939,000.00	194,781,550.00	(14,157,450,00)	93.22
2	2-12.0-00.0-00.01	04	2.03	208,939,000.00	194,781,550.00	(14,157,450,00)	93.22
2	2-12.0-00.0-00.01	04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2-12.0-00.0-00.01	04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2-12.0-00.0-00.01	05	2.01	41,405,000.00	39,015,300.00	(2,393,700,00)	94.22
2	2-12.0-00.0-00.01	05	2.01	41,405,000.00	39,015,300.00	(2,393,700,00)	94.22
2	2-12.0-00.0-00.01	05	2.01	18,425,000.00	17,238,250.00	(1,191,250,00)	93.54
2	2-12.0-00.0-00.01	05	2.01	22,979,500.00	21,777,050.00	(1,202,450,00)	94.77
2	2-08.2-14.0-00.01			3,621,188,736.00	3,686,867,483.00	(534,321,253,00)	85.24
2	2-08.2-14.0-00.01			3,621,188,736.00	3,686,867,483.00	(534,321,253,00)	85.24
2	2-08.2-14.0-00.01	02		100,575,000.00	67,450,940.00	(33,124,060,00)	67.07
2	2-08.2-14.0-00.01	02	2.02	100,575,000.00	67,450,940.00	(33,124,060,00)	67.07
2	2-08.2-14.0-00.01	02	2.02	26,175,000.00	26,038,700.00	(136,300,00)	99.46
2	2-08.2-14.0-00.01	02	2.02	74,400,000.00	41,412,240.00	(32,987,760,00)	55.66
2	2-08.2-14.0-00.01	03		1,850,699,446.00	1,721,220,895.00	(129,388,551,00)	93.01
2	2-08.2-14.0-00.01	03	2.01	121,500,000.00	121,290,300.00	(209,700,00)	99.83
2	2-08.2-14.0-00.01	03	2.01	1,71,900,000.00	121,290,300.00	(209,700,00)	99.83
2	2-08.2-14.0-00.01	03	2.02	1,223,580,546.00	1,200,000,797.00	(22,959,779,00)	98.12
2	2-08.2-14.0-00.01	03	2.02	55,474,000.00	54,911,400.00	(562,600,00)	98.99
2	2-08.2-14.0-00.01	03	2.02	1,168,166,546.00	1,145,709,367.00	(22,397,179,00)	98.08
2	2-08.2-14.0-00.01	03	2.03	322,023,460.00	225,096,470.00	(97,827,000,00)	69.71
2	2-08.2-14.0-00.01	03	2.03	55,514,900.00	45,005,875.00	(10,508,925,00)	81.07
2	2-08.2-14.0-00.01	03	2.03	267,468,660.00	180,090,525.00	(87,318,075,00)	67.31
2	2-08.2-14.0-00.01	03	2.04	182,865,500.00	174,713,478.00	(8,392,072,00)	95.46

87A

KODE		URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1		2		3	4	5	6
2	2-08.2-14.0-00.01	03	2.04	103.500.000,00	96.839.890,00	(6.660.100,00)	93,57
2	2-08.2-14.0-00.01	03	2.04	79.105.500,00	77.373.628,00	(1.731.872,00)	97,81
2	2-08.2-14.0-00.01	04	2.01	1.670.004.200,00	1.298.195.648,00	(371.808.552,00)	77,74
2	2-08.2-14.0-00.01	04	2.01	1.103.344.200,00	805.674.480,00	(297.669.720,00)	69,28
2	2-08.2-14.0-00.01	04	2.01	165.250.000,00	163.500.000,00	(1.750.000,00)	98,94
2	2-08.2-14.0-00.01	04	2.01	615.900.000,00	267.263.875,00	(348.636.125,00)	43,39
2	2-08.2-14.0-00.01	04	2.01	239.425.000,00	234.602.550,00	(4.822.450,00)	97,99
2	2-08.2-14.0-00.01	04	2.01	172.649.200,00	161.308.855,00	(11.340.345,00)	93,43
2	2-08.2-14.0-00.01	04	2.02	476.760.000,00	471.521.168,00	(5.238.832,00)	98,90
2	2-08.2-14.0-00.01	04	2.02	476.760.000,00	471.521.168,00	(5.238.832,00)	98,90
2	1-03.2-10.0-00.01	02	2.02	19.399.778.160,00	17.335.908.769,72	(2.064.189.290,28)	89,36
2	1-03.2-10.0-00.01	02	2.02	4.245.315.716,00	3.868.973.892,46	(376.341.823,54)	91,14
2	1-03.2-10.0-00.01	02	2.02	4.245.315.716,00	3.868.973.892,46	(376.341.823,54)	91,14
2	1-03.2-10.0-00.01	02	2.02	4.245.315.716,00	3.868.973.892,46	(376.341.823,54)	91,14
2	1-03.2-10.0-00.01	02	2.02	1.049.640.000,00	823.865.615,46	(225.774.384,54)	78,41
2	1-03.2-10.0-00.01	02	2.02	3.195.675.716,00	3.045.108.277,00	(140.567.439,00)	95,31
2	2-15.0-00.0-00.01	01	2.01	15.154.462.444,00	13.466.614.877,29	(1.687.847.566,71)	88,86
2	2-15.0-00.0-00.01	01	2.01	11.299.645.613,00	9.946.109.534,00	(1.353.536.079,00)	87,25
2	2-15.0-00.0-00.01	01	2.01	16.557.000,00	16.217.300,00	(339.700,00)	97,95
2	2-15.0-00.0-00.01	01	2.01	16.557.000,00	16.217.300,00	(339.700,00)	97,95
2	2-15.0-00.0-00.01	01	2.02	6.501.107.797,00	6.811.797.557,00	(310.689.740,00)	92,47
2	2-15.0-00.0-00.01	01	2.02	6.501.107.797,00	6.811.797.557,00	(310.689.740,00)	92,47
2	2-15.0-00.0-00.01	01	2.03	297.000.000,00	290.864.400,00	(6.135.600,00)	97,94
2	2-15.0-00.0-00.01	01	2.03	297.000.000,00	290.864.400,00	(6.135.600,00)	97,94
2	2-15.0-00.0-00.01	01	2.06	316.579.600,00	304.137.514,00	(12.442.086,00)	96,20
2	2-15.0-00.0-00.01	01	2.06	8.645.000,00	8.345.000,00	(300.000,00)	96,53

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	1	2	3	4		5
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2 15 2-15.0-00.0-00.01	01	2.06	97.244.000,00	95.523.700,00	(1.720.300,00)	96,23
	02					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	01	2.06	38.229.100,00	37.185.491,00	(1.043.609,00)	97,06
	04					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	01	2.06	30.906.900,00	38.471.250,00	(7.564.350,00)	92,12
	05					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	01	2.06	2.800.000,00	2.796.000,00	(4.000,00)	99,86
	08					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	01	2.06	139.135.000,00	132.696.073,00	(6.438.927,00)	95,36
	09					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	01	2.07	722.300.000,00	117.071.425,00	(610.228.575,00)	16,32
	02					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	01	2.07	697.500.000,00	87.385.025,00	(610.114.975,00)	12,53
	05					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	01	2.07	24.800.000,00	24.686.400,00	(113.600,00)	99,54
	05					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	01	2.08	267.840.000,00	233.521.339,00	(34.318.661,00)	87,19
	01					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	01	2.08	1.640.000,00	1.590.000,00	(50.000,00)	96,95
	01					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	01	2.08	266.200.000,00	231.961.339,00	(34.238.661,00)	87,14
	02					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	01	2.09	3.277.861.216,00	2.976.679.999,00	(301.181.217,00)	90,81
	01					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	01	2.09	39.190.000,00	39.095.600,00	(94.400,00)	99,53
	01					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	01	2.09	180.850.000,00	172.125.495,00	(8.724.505,00)	95,18
	02					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	01	2.09	7.500.000,00	6.815.000,00	(685.000,00)	90,87
	06					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	01	2.09	3.050.321.216,00	2.758.723.994,00	(291.597.222,00)	90,44
	09					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	02		3.794.816.831,00	3.520.505.343,26	(274.311.487,74)	93,76
	02					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	02	2.02	801.259.200,00	771.097.180,26	(30.162.019,74)	96,24
	02					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	02	2.02	628.200.000,00	611.794.170,26	(16.405.829,74)	97,29
	02					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	02	2.02	173.059.200,00	159.303.010,00	(13.756.190,00)	92,05
	02					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	02	2.06	2.492.648.631,00	2.300.490.063,00	(192.158.568,00)	92,29
	03					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	02	2.06	73.373.600,00	68.471.275,00	(4.902.325,00)	93,32
	04					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	02	2.06	2.412.415.031,00	2.226.559.088,00	(185.855.943,00)	92,30
	04					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	02	2.06	6.860.000,00	5.459.100,00	(1.400.900,00)	79,58
	05					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	02	2.07	10.746.000,00	10.075.500,00	(670.500,00)	93,76
	04					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	02	2.07	10.746.000,00	10.075.500,00	(670.500,00)	93,76
	04					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	02	2.08	0,00	0,00	0,00	0,00
	04					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	02	2.08	0,00	0,00	0,00	0,00
	04					
2 15 2-15.0-00.0-00.01	02	2.09	400.000.000,00	395.006.700,00	(4.993.300,00)	98,98
	02					

21A

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
	1	2	3	4	5	6	
2 15	2-15.0-00.0-00.01	02	2.09	400.000.000,00	395.966.700,00	(4.033.300,00)	98,98
2 15	2-15.0-00.0-00.01	02	2.11	90.163.000,00	42.935.980,00	(7.227.000,00)	85,59
2 15	2-15.0-00.0-00.01	02	2.11	50.163.000,00	42.935.980,00	(7.227.000,00)	85,59
2 16	2-16.2-21.2-20.01			9.950.690.917,00	9.215.894.634,66	(742.796.302,34)	92,54
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01		9.950.690.917,00	9.215.894.634,66	(742.796.302,34)	92,54
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.01	3.348.968.141,00	3.248.166.794,66	(100.801.346,34)	96,99
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.01	18.429.950,00	18.131.480,00	(298.550,00)	98,38
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.01	18.429.950,00	18.131.480,00	(298.550,00)	98,38
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.02	2.907.267.191,00	2.823.690.261,66	(83.576.929,34)	97,13
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.02	2.907.267.191,00	2.823.690.261,66	(83.576.929,34)	97,13
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.06	186.471.000,00	184.778.083,00	(1.692.917,00)	99,09
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.06	701.000,00	676.000,00	(25.000,00)	96,43
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.06	21.550.000,00	20.397.000,00	(1.153.000,00)	94,65
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.06	6.351.000,00	6.095.050,00	(255.950,00)	96,97
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.06	5.709.000,00	5.795.500,00	(3.500,00)	99,94
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.06	152.160.000,00	151.964.533,00	(255.467,00)	99,83
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.07	50.250.000,00	49.967.890,00	(282.100,00)	99,44
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.07	50.250.000,00	49.967.890,00	(282.100,00)	99,44
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.08	19.200.000,00	14.818.200,00	(4.381.800,00)	77,18
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.08	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.08	10.000.000,00	13.618.200,00	(4.381.800,00)	73,66
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.09	162.350.000,00	156.781.050,00	(10.568.950,00)	91,68
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.09	30.100.000,00	38.630.750,00	(969.250,00)	98,55
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.09	75.400.000,00	66.038.100,00	(9.361.900,00)	87,58
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.09	7.510.000,00	7.037.000,00	(473.000,00)	93,70
2 16	2-16.2-21.2-20.01	01	2.09	45.250.000,00	45.085.200,00	(164.800,00)	99,64
2 16	2-16.2-21.2-20.01	02		2.750.851.130,00	2.218.814.505,00	(532.036.625,00)	81,02
2 16	2-16.2-21.2-20.01	02	2.01	2.750.851.130,00	2.218.814.505,00	(532.036.625,00)	81,02
2 16	2-16.2-21.2-20.01	02	2.01	442.048.020,00	344.771.512,00	(97.276.508,00)	82,52
2 16	2-16.2-21.2-20.01	02	2.01	1.508.333.340,00	1.157.762.875,00	(310.628.465,00)	79,41

1  
 RA



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					3	4	5	6
2	2-16.2-21.2-20.01	02	2.01	05	269,655,770.00	237,509,168.00	(32,146,602.00)	88.08
2	2-16.2-21.2-20.01	02	2.01	06	22,357,000.00	14,616,250.00	(7,740,750.00)	65.38
2	2-16.2-21.2-20.01	02	2.01	07	434,966,000.00	344,327,050.00	(90,638,950.00)	79.15
2	2-16.2-21.2-20.01	02	2.01	08	73,473,000.00	69,907,650.00	(3,565,350.00)	95.15
2	2-16.2-21.2-20.01	03	2.01		3,850,871,666.00	3,738,893,335.00	(111,978,331.00)	96.89
2	2-16.2-21.2-20.01	03	2.01		2,641,351,608.00	2,649,173,210.00	(42,178,398.00)	98.43
2	2-16.2-21.2-20.01	03	2.01	03	2,691,351,608.00	2,649,173,210.00	(42,178,398.00)	98.43
2	2-16.2-21.2-20.01	03	2.02	07	1,167,520,053.00	1,069,770,125.00	(97,749,928.00)	91.54
2	2-16.2-21.2-20.01	03	2.02	01	183,827,000.00	161,861,250.00	(21,965,750.00)	88.05
2	2-16.2-21.2-20.01	03	2.02	03	291,205,304.00	271,971,362.00	(19,234,002.00)	93.40
2	2-16.2-21.2-20.01	03	2.02	07	666,647,754.00	608,993,173.00	(57,654,581.00)	91.34
2	2-16.2-21.2-20.01	03	2.02	10	25,840,000.00	16,884,480.00	(8,955,520.00)	65.38
2	2-17.3-30.0-00.01				11,340,944,060.00	10,735,473,946.00	(605,470,114.00)	94.66
2	2-17.3-30.0-00.01				11,340,944,060.00	10,735,473,946.00	(605,470,114.00)	94.66
2	2-17.3-30.0-00.01	01	2.01		6,623,602,014.00	6,151,535,160.00	(472,066,854.00)	92.87
2	2-17.3-30.0-00.01	01	2.01	01	23,312,102.00	22,467,000.00	(845,052.00)	96.38
2	2-17.3-30.0-00.01	01	2.01	01	16,312,102.00	15,641,550.00	(670,552.00)	95.89
2	2-17.3-30.0-00.01	01	2.01	06	7,000,000.00	6,825,500.00	(174,500.00)	97.51
2	2-17.3-30.0-00.01	01	2.02		5,705,813,214.00	5,308,071,247.00	(426,841,967.00)	62.60
2	2-17.3-30.0-00.01	01	2.02	01	5,750,232,312.00	5,323,390,345.00	(426,841,967.00)	92.58
2	2-17.3-30.0-00.01	01	2.02	07	15,580,902.00	15,580,902.00	0.00	100.00
2	2-17.3-30.0-00.01	01	2.06		291,841,200.00	276,960,245.00	(14,881,045.00)	94.98
2	2-17.3-30.0-00.01	01	2.06	01	7,499,700.00	7,493,510.00	(6,170.00)	99.92
2	2-17.3-30.0-00.01	01	2.06	03	6,000,000.00	5,827,500.00	(172,500.00)	97.13
2	2-17.3-30.0-00.01	01	2.06	04	29,381,600.00	29,254,291.00	(127,309.00)	99.57
2	2-17.3-30.0-00.01	01	2.06	05	48,639,990.00	39,542,386.00	(9,097,604.00)	81.36
2	2-17.3-30.0-00.01	01	2.06	08	5,770,000.00	5,234,900.00	(535,100.00)	90.71
2	2-17.3-30.0-00.01	01	2.06	09	194,550,000.00	189,607,438.00	(4,942,562.00)	97.46
2	2-17.3-30.0-00.01	01	2.08		181,980,962.00	162,636,406.00	(19,344,496.00)	89.37
2	2-17.3-30.0-00.01	01	2.08	01	19,080,962.00	19,080,962.00	0.00	100.00

8-4

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	
1	3	3	4	5	6
2 17 2-17.3-30.0-00.01	01 2.08	144.240.000,00	124.896.454,00	(19.343.546,00)	86,59
2 17 2-17.3-30.0-00.01	01 2.08	18.660.000,00	18.659.050,00	(950,00)	99,99
2 17 2-17.3-30.0-00.01	01 2.09	360.734.506,00	350.500.212,00	(10.234.294,00)	97,16
2 17 2-17.3-30.0-00.01	01 2.09	177.551.804,00	172.333.115,00	(5.218.689,00)	97,06
2 17 2-17.3-30.0-00.01	01 2.09	9.750.000,00	9.740.200,00	(9.800,00)	99,93
2 17 2-17.3-30.0-00.01	01 2.09	173.432.702,00	168.423.897,00	(5.008.805,00)	97,11
2 17 2-17.3-30.0-00.01	03 2.01	41.988.000,00	40.759.400,00	(1.228.600,00)	97,07
2 17 2-17.3-30.0-00.01	03 2.01	41.988.000,00	40.759.400,00	(1.228.600,00)	97,07
2 17 2-17.3-30.0-00.01	03 2.01	41.988.000,00	40.759.400,00	(1.228.600,00)	97,07
2 17 2-17.3-30.0-00.01	05 2.01	391.300.000,00	373.619.620,00	(17.680.380,00)	95,48
2 17 2-17.3-30.0-00.01	05 2.01	195.146.000,00	186.794.110,00	(8.351.890,00)	95,72
2 17 2-17.3-30.0-00.01	05 2.01	195.146.000,00	186.794.110,00	(8.351.890,00)	95,72
2 17 2-17.3-30.0-00.01	05 2.03	196.154.000,00	186.825.510,00	(9.328.490,00)	95,24
2 17 2-17.3-30.0-00.01	05 2.03	196.154.000,00	186.825.510,00	(9.328.490,00)	95,24
2 17 2-17.3-30.0-00.01	05 2.01	128.656.000,00	121.142.185,00	(7.513.815,00)	94,16
2 17 2-17.3-30.0-00.01	06 2.01	128.656.000,00	121.142.185,00	(7.513.815,00)	94,16
2 17 2-17.3-30.0-00.01	06 2.01	128.656.000,00	121.142.185,00	(7.513.815,00)	94,16
2 17 2-17.3-30.0-00.01	07 2.01	71.150.000,00	69.895.315,00	(1.254.685,00)	98,24
2 17 2-17.3-30.0-00.01	07 2.01	71.150.000,00	69.895.315,00	(1.254.685,00)	98,24
2 17 2-17.3-30.0-00.01	07 2.01	71.150.000,00	69.895.315,00	(1.254.685,00)	98,24
2 17 2-17.3-30.0-00.01	08 2.01	4.084.168.046,00	3.978.522.266,00	(105.645.780,00)	97,41
2 17 2-17.3-30.0-00.01	08 2.01	4.084.168.046,00	3.978.522.266,00	(105.645.780,00)	97,41
2 17 2-17.3-30.0-00.01	08 2.01	4.084.168.046,00	3.978.522.266,00	(105.645.780,00)	97,41
2 18 2-18.3-31.2-07.01		10.099.545.607,00	10.099.545.607,00	(0)	100,00
2 18 2-18.3-31.2-07.01		10.099.545.607,00	10.099.545.607,00	(0)	100,00

874

KODE		URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG			
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
1		2		3	4	5	6		
2	2-18.3-31.2-07.01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.120.757.678,00	8.494.466.742,00	(626.290.936,00)	93,13		
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.01	Penencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.779.000,00	19.108.200,00	(670.800,00)	96,61	
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.779.000,00	19.108.200,00	(670.800,00)	96,61
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.766.531.902,80	6.361.384.962,80	(405.146.940,00)	94,01	
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.02	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.766.531.902,80	6.361.384.962,80	(405.146.940,00)	94,01
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.03	Penyediaan Jasa dan Turjangan ASN	286.306.236,00	284.517.720,00	(1.788.516,00)	99,38	
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.03	01	Administrasi Besarang MMB Daerah pada Perangkat Daerah	286.306.236,00	284.517.720,00	(1.788.516,00)	99,38
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.06	Pengamanan Barang MBB Daerah SKPD	431.502.600,00	404.426.558,00	(29.076.042,00)	93,29	
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.06	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	5.523.500,00	5.523.500,00	0,00	100,00	
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	122.676.000,00	122.632.800,00	(43.200,00)	99,16	
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.06	01	Penyediaan Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor	22.833.100,00	22.745.220,00	(87.880,00)	99,62
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.132.000,00	20.934.740,00	(1.197.260,00)	94,59
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cadangan dan Penggantian	10.138.000,00	6.832.100,00	(3.305.900,00)	67,39
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	249.200.000,00	225.758.198,00	(23.441.802,00)	90,59
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	74.426.700,00	(573.300,00)	99,24
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	74.426.700,00	(573.300,00)	99,24	
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.08	Pengelolaan Jasa Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah	968.850.000,00	807.366.564,00	(161.483.436,00)	83,33	
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.050.000,00	1.990.000,00	(1.060.000,00)	65,25
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	965.800.000,00	805.370.564,00	(160.429.436,00)	83,39
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah	570.787.940,00	543.242.038,00	(27.545.902,00)	95,17	
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	38.190.000,00	27.775.225,00	(10.414.775,00)	70,87
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.09	02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan	172.900.000,00	160.068.888,00	(12.831.112,00)	92,06
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.09	06	Operasional alat Lapangan	4.000.000,00	3.935.000,00	(65.000,00)	98,38
2	2-18.3-31.2-07.01	01	2.09	09	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	351.697.940,00	351.442.925,00	(255.015,00)	99,36
2	2-18.3-31.2-07.01	02	Program Pengembangan Iklim Pemerintahan Modal	238.174.000,00	217.016.605,00	(21.157.395,00)	91,12		
2	2-18.3-31.2-07.01	02	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Pemerintahan Modal yang menjadi	238.174.000,00	217.016.605,00	(21.157.395,00)	91,12	
2	2-18.3-31.2-07.01	02	2.01	01	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	238.174.000,00	217.016.605,00	(21.157.395,00)	91,12
2	2-18.3-31.2-07.01	03	Program Promosi Pemerintahan Modal	183.494.000,00	178.892.290,00	(4.601.710,00)	97,49		
2	2-18.3-31.2-07.01	03	2.01	Penyenggaraan Promosi Pemerintahan Modal yang menjadi kewenangan Daerah	183.494.000,00	178.892.290,00	(4.601.710,00)	97,49	
2	2-18.3-31.2-07.01	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Pemerintahan Modal	116.226.000,00	112.796.490,00	(3.429.510,00)	97,05

KODE	URAIAN URSUAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	1	2	3	4	5	6	
2 18 2-18.3-31.2-07.01	02	03	67.265.000,00	66.075.800,00	(1.189.200,00)	98,26	
2 18 2-18.3-31.2-07.01	04	04	906.668.168,00	962.661.330,00	(84.066.838,00)	91,48	
2 18 2-18.3-31.2-07.01	04	2.01	906.668.168,00	962.661.330,00	(84.066.838,00)	91,48	
2 18 2-18.3-31.2-07.01	04	2.01	906.959.658,00	836.002.227,06	(72.956.441,00)	91,97	
2 18 2-18.3-31.2-07.01	04	2.01	36.389.500,00	32.499.339,06	(5.890.161,00)	84,66	
2 18 2-18.3-31.2-07.01	04	2.01	39.330.000,00	34.099.704,00	(5.230.296,00)	86,72	
2 18 2-18.3-31.2-07.01	05	05	403.823.443,00	289.574.840,00	(114.248.603,00)	71,71	
2 18 2-18.3-31.2-07.01	05	2.01	403.823.443,00	289.574.840,00	(114.248.603,00)	71,71	
2 18 2-18.3-31.2-07.01	05	2.01	43.607.451,00	32.322.090,00	(11.285.451,00)	74,12	
2 18 2-18.3-31.2-07.01	05	2.01	360.215.992,00	257.252.840,00	(102.963.152,00)	71,42	
2 18 2-18.3-31.2-07.01	06	06	17.864.000,00	16.963.800,00	(870.200,00)	95,13	
2 18 2-18.3-31.2-07.01	06	2.01	17.864.000,00	16.963.800,00	(870.200,00)	95,13	
2 18 2-18.3-31.2-07.01	06	2.01	17.864.000,00	16.963.800,00	(870.200,00)	95,13	
2 19 3-26.2-19.0-00.01	02	02	7.900.462.077,06	7.177.070.881,70	(723.391.195,30)	90,84	
2 19 3-26.2-19.0-00.01	02	02	7.900.462.077,06	7.177.070.881,70	(723.391.195,30)	90,84	
2 19 3-26.2-19.0-00.01	02	2.01	2.648.432.250,00	2.542.349.570,00	(106.082.680,00)	95,99	
2 19 3-26.2-19.0-00.01	02	2.01	1.556.523.000,00	1.506.573.920,00	(49.949.080,00)	96,79	
2 19 3-26.2-19.0-00.01	02	2.01	140.079.550,00	118.940.850,00	(21.988.700,00)	84,46	
2 19 3-26.2-19.0-00.01	02	2.01	39.457.950,00	31.566.900,00	(5.891.050,00)	85,07	
2 19 3-26.2-19.0-00.01	02	2.01	1.576.135.500,00	1.354.066.170,00	(22.069.330,00)	86,40	
2 19 3-26.2-19.0-00.01	02	2.02	1.091.909.250,00	1.035.775.050,00	(56.133.600,00)	94,06	
2 19 3-26.2-19.0-00.01	02	2.02	1.091.909.250,00	1.035.775.050,00	(56.133.600,00)	94,06	
2 19 3-26.2-19.0-00.01	03	03	4.752.009.827,00	4.134.721.311,70	(617.308.515,30)	87,01	
2 19 3-26.2-19.0-00.01	03	2.02	209.959.000,00	185.451.500,00	(24.507.500,00)	88,31	
2 19 3-26.2-19.0-00.01	03	2.02	209.959.000,00	185.451.500,00	(24.507.500,00)	88,31	
2 19 3-26.2-19.0-00.01	03	2.03	3.034.408.000,00	2.694.112.570,00	(340.195.080,00)	88,79	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI		(Rp)	(%)
		1	2				
2 19	3-26.2-19.0-00.01	03	2.03	3.034.498.000,00	2.694.212.970,00	(340.195.030,00)	88,79
2 19	3-26.2-19.0-00.01	03	2.05	1.507.663.827,00	1.755.056.841,70	(252.605.985,30)	83,25
2 19	3-26.2-19.0-00.01	03	2.05	396.430.000,00	275.789.200,00	(120.640.800,00)	69,57
2 19	3-26.2-19.0-00.01	03	2.05	1.111.233.827,00	979.267.641,70	(131.965.185,30)	88,12
2 19	3-26.2-19.0-00.01	03	2.05	0,00	0,00	0,00	0,00
2 19	3-26.2-19.0-00.01	04	2.01	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
2 19	3-26.2-19.0-00.01	04	2.01	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
2 19	3-26.2-19.0-00.01	04	2.01	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
2 20	2-16.2-21.2-20.01	02	2.01	51.080.600,00	51.580.850,00	(1.499.750,00)	97,17
2 20	2-16.2-21.2-20.01	02	2.01	51.080.600,00	51.580.850,00	(1.499.750,00)	97,17
2 20	2-16.2-21.2-20.01	02	2.01	53.080.600,00	51.580.850,00	(1.499.750,00)	97,17
2 20	2-16.2-21.2-20.01	02	2.01	53.080.600,00	51.580.850,00	(1.499.750,00)	97,17
2 20	2-16.2-21.2-20.01	02	2.01	53.080.600,00	51.580.850,00	(1.499.750,00)	97,17
2 21	2-16.2-21.2-20.01	02	2.01	80.193.000,00	65.395.700,00	(14.797.300,00)	81,55
2 21	2-16.2-21.2-20.01	02	2.01	80.193.000,00	65.395.700,00	(14.797.300,00)	81,55
2 21	2-16.2-21.2-20.01	02	2.01	80.193.000,00	65.395.700,00	(14.797.300,00)	81,55
2 21	2-16.2-21.2-20.01	02	2.01	80.193.000,00	65.395.700,00	(14.797.300,00)	81,55
2 22	1-01.2-22.0-00.01	02	2.01	50.640.000,00	41.805.250,00	(8.834.750,00)	82,55
2 22	1-01.2-22.0-00.01	02	2.01	29.553.000,00	23.580.450,00	(5.962.550,00)	79,82
2 22	1-01.2-22.0-00.01	02	2.01	3.431.348.086,00	3.093.140.076,00	(338.208.010,00)	90,14
2 22	1-01.2-22.0-00.01	02	2.01	3.431.348.086,00	3.093.140.076,00	(338.208.010,00)	90,14
2 22	1-01.2-22.0-00.01	02	2.01	796.135.000,00	593.814.015,00	(202.321.985,00)	74,59
2 22	1-01.2-22.0-00.01	02	2.01	252.402.000,00	193.471.400,00	(59.020.590,00)	76,62
2 22	1-01.2-22.0-00.01	02	2.01	252.402.000,00	193.471.400,00	(59.020.590,00)	76,62
2 22	1-01.2-22.0-00.01	02	2.01	101.504.000,00	59.903.750,00	(42.000.250,00)	58,62
2 22	1-01.2-22.0-00.01	02	2.01	101.504.000,00	59.903.750,00	(42.000.250,00)	58,62
2 22	1-01.2-22.0-00.01	02	2.01	442.140.000,00	340.838.845,00	(101.301.155,00)	77,09
2 22	1-01.2-22.0-00.01	02	2.01	442.140.000,00	340.838.845,00	(101.301.155,00)	77,09

*Handwritten initials/signature*

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			REALISASI	(Rp)	(%)
		1	2	3	4	5	6
2 22	1-01.2-22.0-00.01	03	Program Pengembangan Kesemian Tradisional	386.375.000,00	386.315.000,00	(60.000,00)	99,98
2 22	1-01.2-22.0-00.01	03	Pembinaan Kesemian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	386.375.000,00	386.315.000,00	(60.000,00)	99,98
2 22	1-01.2-22.0-00.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesemian Tradisional	386.375.000,00	386.315.000,00	(60.000,00)	99,98
2 22	1-01.2-22.0-00.01	05	Program Pelebaran Dan Pengabdian Cagar Budaya	80.493.000,00	72.825.575,00	(7.667.425,00)	90,47
2 22	1-01.2-22.0-00.01	05	Panitia Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	34.193.000,00	30.894.380,00	(3.300.620,00)	90,32
2 22	1-01.2-22.0-00.01	05	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	13.680.000,00	12.373.885,00	(1.306.115,00)	90,45
2 22	1-01.2-22.0-00.01	05	Pencapaian Cagar Budaya	20.513.000,00	18.510.500,00	(2.002.500,00)	90,24
2 22	1-01.2-22.0-00.01	05	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	46.360.000,00	41.941.195,00	(4.358.805,00)	90,59
2 22	1-01.2-22.0-00.01	05	Pengembangan Cagar Budaya	46.360.000,00	41.941.195,00	(4.358.805,00)	90,59
2 22	1-01.2-22.0-00.01	06	Program Penyelenggaraan Permusuman	2.168.344.086,00	2.090.185.486,00	(1.28.158.600,00)	94,09
2 22	1-01.2-22.0-00.01	06	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2.168.344.086,00	2.090.185.486,00	(1.28.158.600,00)	94,08
2 22	1-01.2-22.0-00.01	06	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	538.330.894,00	513.481.967,00	(44.838.927,00)	95,37
2 22	1-01.2-22.0-00.01	06	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.465.723.152,00	1.386.907.619,00	(78.796.173,00)	94,62
2 22	1-01.2-22.0-00.01	06	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	144.300.000,00	129.776.500,00	(4.523.500,00)	96,87
2 23			<b>Perputakaan</b>	5.866.559.367,00	5.568.555.966,00	(298.003.421,00)	94,92
2 23	2-23.2-24.0-00.01		<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	5.866.559.367,00	5.568.555.966,00	(298.003.421,00)	94,92
2 23	2-23.2-24.0-00.01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.586.075.717,00	4.444.971.572,00	(141.104.145,00)	96,92
2 23	2-23.2-24.0-00.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	405.000,00	385.000,00	(20.000,00)	95,06
2 23	2-23.2-24.0-00.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	405.000,00	385.000,00	(20.000,00)	95,06
2 23	2-23.2-24.0-00.01	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.676.864.819,00	3.658.089.376,00	(18.775.443,00)	99,49
2 23	2-23.2-24.0-00.01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.676.864.819,00	3.658.089.376,00	(18.775.443,00)	99,49
2 23	2-23.2-24.0-00.01	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.069.930,00	207.986.298,00	(19.083.632,00)	91,68
2 23	2-23.2-24.0-00.01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.918.750,00	3.918.750,00	0,00	100,00
2 23	2-23.2-24.0-00.01	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.542.000,00	20.192.000,00	(350.000,00)	98,36
2 23	2-23.2-24.0-00.01	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.577.200,00	17.522.220,00	(54.980,00)	99,68
2 23	2-23.2-24.0-00.01	01	Fasilitas Kunjungan Tani	7.960.000,00	6.300.050,00	(1.759.950,00)	77,89
2 23	2-23.2-24.0-00.01	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.072.000,00	160.153.278,00	(16.918.722,00)	90,45
2 23	2-23.2-24.0-00.01	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.210.000,00	91.446.555,00	(7.583.445,00)	92,36
2 23	2-23.2-24.0-00.01	01	Pengadaan Gedung Kantor atau Rencanan Lainnya	99.210.000,00	91.446.555,00	(7.583.445,00)	92,36
2 23	2-23.2-24.0-00.01	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.777.476,00	132.847.264,00	(7.930.212,00)	94,37
2 23	2-23.2-24.0-00.01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	965.000,00	870.000,00	(95.000,00)	90,36
2 23	2-23.2-24.0-00.01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.800.000,00	46.467.854,00	(7.352.146,00)	94,63

8.15

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	1	2	3	4	5	6
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2 23 2-23.2-24.0-00.01	01	2.06	91.992.476,00	91.509.410,00	(483.066,00)	99,47
2 23 2-23.2-24.0-00.01	01	2.09	441.728.492,00	354.017.579,00	(87.711.413,00)	80,14
2 23 2-23.2-24.0-00.01	01	2.09	39.190.000,00	36.331.700,00	(2.858.300,00)	92,71
2 23 2-23.2-24.0-00.01	01	2.09	196.858.402,00	148.294.714,00	(48.563.770,00)	75,33
2 23 2-23.2-24.0-00.01	01	2.09	12.000.000,00	4.107.000,00	(7.893.000,00)	34,23
2 23 2-23.2-24.0-00.01	01	2.09	193.680.000,00	165.283.665,00	(28.396.335,00)	85,34
2 23 2-23.2-24.0-00.01	02	2.01	1.221.393.650,00	1.086.428.814,00	(134.966.836,00)	88,95
2 23 2-23.2-24.0-00.01	02	2.01	923.731.000,00	828.338.988,00	(94.392.412,00)	89,77
2 23 2-23.2-24.0-00.01	02	2.01	133.581.500,00	137.600.958,00	(5.980.542,00)	95,52
2 23 2-23.2-24.0-00.01	02	2.01	59.077.000,00	48.563.200,00	(10.513.790,00)	82,20
2 23 2-23.2-24.0-00.01	02	2.01	8.523.500,00	5.117.000,00	(3.406.500,00)	60,03
2 23 2-23.2-24.0-00.01	02	2.01	56.490.000,00	54.801.610,00	(1.688.390,00)	97,01
2 23 2-23.2-24.0-00.01	02	2.01	145.287.500,00	134.520.160,00	(10.757.340,00)	92,66
2 23 2-23.2-24.0-00.01	02	2.01	467.771.000,00	408.486.560,00	(59.284.440,00)	87,33
2 23 2-23.2-24.0-00.01	02	2.01	10.670.000,00	10.520.000,00	(150.000,00)	98,59
2 23 2-23.2-24.0-00.01	02	2.01	41.330.500,00	38.719.000,00	(2.611.500,00)	93,68
2 23 2-23.2-24.0-00.01	02	2.02	298.862.650,00	258.098.276,00	(40.574.424,00)	86,41
2 23 2-23.2-24.0-00.01	02	2.02	50.527.400,00	46.221.250,00	(4.306.150,00)	91,46
2 23 2-23.2-24.0-00.01	02	2.02	204.903.000,00	172.329.400,00	(32.635.600,00)	84,06
2 23 2-23.2-24.0-00.01	02	2.02	43.170.250,00	39.537.570,00	(3.632.674,00)	91,59
2 23 2-23.2-24.0-00.01	03	2.02	59.090.000,00	37.157.980,00	(21.932.420,00)	62,88
2 23 2-23.2-24.0-00.01	03	2.01	39.090.000,00	17.588.000,00	(21.501.700,00)	44,99
2 23 2-23.2-24.0-00.01	03	2.01	39.990.000,00	17.588.000,00	(22.501.700,00)	44,99
2 23 2-23.2-24.0-00.01	03	2.02	20.900.000,00	19.569.280,00	(430.720,00)	93,65
2 23 2-23.2-24.0-00.01	03	2.02	20.900.000,00	19.569.280,00	(430.720,00)	93,65
2 24 2-23.2-24.0-00.01			619.798.140,00	472.373.607,00	(147.424.453,00)	76,21
2 24 2-23.2-24.0-00.01			619.798.140,00	472.373.607,00	(147.424.453,00)	76,21
2 24 2-23.2-24.0-00.01			548.185.290,00	412.236.486,00	(135.948.804,00)	75,23



KODE	URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG		
		AMGARAN SETELAH PERUBAHAN				(Rp)	(%)
		3	4	5			
2	2-23.2-24.0-00.01	02	2.01	45.678.900,00	40.104.550,00	(5.484.350,00)	87,99
2	2-23.2-24.0-00.01	02	2.01	20.440.650,00	25.764.050,00	(2.696.000,00)	90,53
2	2-23.2-24.0-00.01	02	2.01	17.218.250,00	14.430.500,00	(2.787.750,00)	83,81
2	2-23.2-24.0-00.01	02	2.02	82.952.000,00	79.996.970,00	(2.955.030,00)	96,44
2	2-23.2-24.0-00.01	02	2.02	82.952.000,00	79.996.970,00	(2.955.030,00)	96,44
2	2-23.2-24.0-00.01	02	2.03	419.594.300,00	292.044.966,00	(127.509.424,00)	69,61
2	2-23.2-24.0-00.01	02	2.03	205.097.540,00	152.074.031,00	(52.123.509,00)	74,59
2	2-23.2-24.0-00.01	02	2.03	214.456.850,00	139.070.935,00	(75.385.915,00)	64,85
2	2-23.2-24.0-00.01	03	2.01	23.550.600,00	17.224.100,00	(6.326.500,00)	73,14
2	2-23.2-24.0-00.01	03	2.01	23.550.600,00	17.224.100,00	(6.326.500,00)	73,14
2	2-23.2-24.0-00.01	03	2.01	16.753.600,00	13.570.900,00	(3.181.700,00)	81,01
2	2-23.2-24.0-00.01	03	2.01	6.796.000,00	3.653.200,00	(3.144.800,00)	53,74
2	2-23.2-24.0-00.01	04	2.01	48.862.250,00	42.913.101,00	(5.949.149,00)	89,29
2	2-23.2-24.0-00.01	04	2.01	48.862.250,00	42.913.101,00	(5.949.149,00)	89,29
2	2-23.2-24.0-00.01	04	2.01	14.689.250,00	12.511.576,00	(1.777.674,00)	87,98
2	2-23.2-24.0-00.01	04	2.01	31.171.600,00	30.301.525,00	(3.371.475,00)	99,99
3				50.122.835.441,00	44.393.676.359,00	(5.729.159.081,10)	88,57
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PELIHAN</b>						
3	<b>Kelautan dan Perikanan</b>			1.575.996.652,00	1.494.721.624,80	(81.275.027,20)	94,86
3	<b>Dinas Pertanian dan Pangan</b>			1.575.996.652,00	1.494.721.624,80	(81.275.027,20)	94,84
3	Program Penunjang Usaha Perikanan Daerah Kabupaten/Kota			60.144.900,00	58.609.300,00	(1.635.600,00)	97,29
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			26.700.800,00	26.395.000,00	(305.800,00)	98,86
3	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga		2.06	26.700.800,00	26.395.000,00	(305.800,00)	98,86
3	Pemeliharaan Sarung Mili Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah		01	33.544.900,00	32.214.300,00	(1.330.600,00)	96,03
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		01	24.054.900,00	22.920.300,00	(1.134.600,00)	95,28
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		01	9.490.000,00	9.294.000,00	(196.000,00)	97,93
3	Program Pengabdian Masyarakat		04	1.107.799.412,00	1.130.403.115,80	(57.396.296,20)	95,17
3	Pengabdian Masyarakat		04	1.107.799.412,00	1.130.403.115,80	(57.396.296,20)	95,17
3	Penyediaan Program/Proyek/Kelembagaan dan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		04	296.649.000,00	289.308.778,80	(7.340.221,20)	97,53
3	Penjaminan Keberhasilan Sarana/Kelembagaan dan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		04	891.150.412,00	841.094.337,00	(50.056.075,00)	94,38

Handwritten signature or initials.



KODE		URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1		2		3	4	5	6
3	25	3-27.2-09.3-25.01	96	327.952.340,00	305.709.209,00	(22.243.131,00)	93,22
3	25	3-27.2-09.3-25.01	96	327.952.340,00	305.709.209,00	(22.243.131,00)	93,22
3	25	3-27.2-09.3-25.01	06	327.952.340,00	305.709.209,00	(22.243.131,00)	93,22
3	26	3-26.2-19.0-00.01		28.024.472.414,00	25.985.299.947,64	(2.039.173.266,96)	89,84
3	26	3-26.2-19.0-00.01		28.024.472.414,00	25.985.299.947,64	(2.039.173.266,96)	89,84
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	9.821.685.904,00	8.921.723.387,00	(899.962.517,00)	90,84
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	34.902.000,00	30.473.600,00	(4.428.400,00)	87,31
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	34.902.000,00	30.473.600,00	(4.428.400,00)	87,31
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	8.000.621.238,00	7.368.685.678,00	(631.935.560,00)	92,10
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	8.000.621.238,00	7.368.685.678,00	(631.935.560,00)	92,10
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	120.550.000,00	120.549.861,00	(100,00)	100,00
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	120.550.000,00	120.549.861,00	(100,00)	100,00
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	488.406.100,00	357.444.123,00	(130.961.977,00)	87,52
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	1.589.100,00	1.566.000,00	(23.100,00)	98,55
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	96.850.800,00	95.038.200,00	(1.811.800,00)	98,13
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	23.747.000,00	23.747.000,00	0,00	100,00
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	31.750.000,00	25.547.750,00	(6.202.250,00)	80,47
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	254.470.000,00	211.545.173,00	(42.924.827,00)	83,13
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	636.775.000,00	530.808.341,00	(105.966.659,00)	83,36
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	3.430.000,00	3.000.000,00	(430.000,00)	87,46
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	633.345.000,00	527.808.341,00	(105.536.659,00)	83,34
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	620.431.566,00	513.761.704,00	(106.669.762,00)	82,81
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	311.361.958,00	217.126.265,00	(94.235.693,00)	69,73
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	22.200.000,00	14.490.000,00	(7.710.000,00)	65,27
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	90.610.000,00	90.609.659,00	(741,00)	100,00
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	196.259.608,00	191.535.860,00	(4.723.748,00)	97,59
3	26	3-26.2-19.0-00.01	01	14.103.868.461,00	12.812.178.867,04	(1.291.689.593,96)	90,84
3	26	3-26.2-19.0-00.01	02	1.064.410.000,00	945.112.339,34	(121.337.660,66)	88,62
3	26	3-26.2-19.0-00.01	02	1.066.450.000,00	945.112.339,34	(121.337.660,66)	88,62
3	26	3-26.2-19.0-00.01	02	9.137.057.236,00	8.266.552.070,49	(870.505.165,51)	90,47

9.14

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
3 26 3-26.2-19.0-00.01	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3,241,042,706.00	3,073,780,940.69	(167,261,765,31)	94.84	
3 26 3-26.2-19.0-00.01	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3,191,538,188.00	2,960,344,441.80	(230,193,746,20)	92.42	
3 26 3-26.2-19.0-00.01	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2,704,474,356.00	2,626,226,688.06	(78,248,662,00)	97.11	
3 26 3-26.2-19.0-00.01	Pengadaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3,900,361,225.00	3,600,514,457.21	(299,846,767,79)	92.31	
3 26 3-26.2-19.0-00.01	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3,314,615,525.00	3,133,672,257.21	(180,943,267,79)	94.54	
3 26 3-26.2-19.0-00.01	Pembudayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	387,322,750.00	311,032,889.00	(76,289,861,00)	80.46	
3 26 3-26.2-19.0-00.01	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	198,432,950.00	135,211,400.00	(63,221,550,00)	38.22	
3 26 3-26.2-19.0-00.01	Program Pemisahan Pariwisata	1,032,164,069.00	777,817,475.00	(254,346,594,00)	75.29	
3 26 3-26.2-19.0-00.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1,032,164,069.00	777,817,475.00	(254,346,594,00)	75.29	
3 26 3-26.2-19.0-00.01	Pengembangan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Diwilayah dan Luar Negeri	591,523,068.00	468,512,145.00	(123,010,924,00)	84.28	
3 26 3-26.2-19.0-00.01	Fasilitasi Kegiatan Pemisahan Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	440,641,000.00	278,630,280.00	(161,910,720,00)	63.23	
3 26 3-26.2-19.0-00.01	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Peningkatan Hak Kekayaan Intelektual	950,850,000.00	941,549,500.00	(9,300,500,00)	99.02	
3 26 3-26.2-19.0-00.01	Pemertanian Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berkreasi, Berpromosi dan Berinovasi bagi Inisan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	950,850,000.00	941,549,500.00	(9,300,500,00)	99.02	
3 26 3-26.2-19.0-00.01	Pengembangan dan kwalitas Prasarana Kota Kreatif	960,810,000.00	941,549,500.00	(19,260,500,00)	99.02	
3 26 3-26.2-19.0-00.01	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	3,015,903,980.00	3,532,704,668.00	(483,199,112,00)	83.98	
3 26 3-26.2-19.0-00.01	Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3,015,903,980.00	3,532,704,668.00	(483,199,112,00)	83.98	
3 26 3-26.2-19.0-00.01	Peningkatan Nomen Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	598,765,050.00	490,632,680.00	(108,132,370,00)	81.94	
3 26 3-26.2-19.0-00.01	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Didistribusikan dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2,079,840,430.00	1,822,440,038.00	(257,400,392,00)	87.62	
3 26 3-26.2-19.0-00.01	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	337,298,000.00	219,432,150.00	(117,866,350,00)	65.12	
3 27	<b>Pertanian</b>	3,049,872,213.00	2,737,873,236.30	(311,998,976,90)	89.78	
3 27 3-27.2-09.3-25.01	<b>Dinas Pertanian dan Pangan</b>	3,049,872,213.00	2,737,873,236.30	(311,998,976,90)	89.78	
3 27 3-27.2-09.3-25.01	Program Peningkatkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63,899,000.00	45,766,147.80	(18,132,853,00)	71.62	
3 27 3-27.2-09.3-25.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,357,000.00	3,820,309.00	(536,700,00)	87.88	
3 27 3-27.2-09.3-25.01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,357,000.00	3,820,309.00	(536,700,00)	87.88	
3 27 3-27.2-09.3-25.01	Nyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43,200,000.00	25,861,847.00	(17,338,153,00)	59.87	
3 27 3-27.2-09.3-25.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43,200,000.00	25,861,847.00	(17,338,153,00)	59.87	

8.1A

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI		
			3	4	5	6	
3 27	3-27.2-09.3-25.01	01	2.09	16,342,000.00	16,094,000.00	(258,000.00)	96.42
3 27	3-27.2-09.3-25.01	01	2.09	16,342,000.00	16,094,000.00	(258,000.00)	96.42
3 27	3-27.2-09.3-25.01	02	2.01	1,945,846,104.00	1,786,424,633.36	(159,421,470.64)	91.81
3 27	3-27.2-09.3-25.01	02	2.01	3,495,967,200.00	3,15,194,150.00	(34,783,050.00)	91.06
3 27	3-27.2-09.3-25.01	02	2.01	295,296,650.00	278,214,450.00	(17,081,600.00)	94.22
3 27	3-27.2-09.3-25.01	02	2.01	54,671,150.00	36,959,200.00	(17,701,450.00)	67.62
3 27	3-27.2-09.3-25.01	02	2.02	1,480,769,904.00	1,366,934,683.36	(93,835,220.64)	92.06
3 27	3-27.2-09.3-25.01	02	2.02	95,038,000.00	86,599,200.00	(8,438,800.00)	91.12
3 27	3-27.2-09.3-25.01	02	2.02	1,015,422,400.00	991,521,825.36	(23,900,574.64)	97.65
3 27	3-27.2-09.3-25.01	02	2.02	370,308,504.00	308,613,658.00	(61,694,846.00)	83.39
3 27	3-27.2-09.3-25.01	02	2.03	115,109,000.00	84,305,000.00	(30,803,200.00)	73.24
3 27	3-27.2-09.3-25.01	02	2.03	115,109,000.00	84,305,000.00	(30,803,200.00)	73.24
3 27	3-27.2-09.3-25.01	03	2.01	131,049,300.00	87,720,607.74	(43,328,692.26)	66.94
3 27	3-27.2-09.3-25.01	03	2.01	58,767,500.00	50,391,132.00	(8,476,368.00)	85.58
3 27	3-27.2-09.3-25.01	03	2.01	35,998,500.00	30,278,430.00	(5,720,070.00)	84.11
3 27	3-27.2-09.3-25.01	03	2.01	22,769,000.00	20,012,702.00	(2,756,298.00)	87.89
3 27	3-27.2-09.3-25.01	03	2.02	72,281,800.00	37,429,475.74	(34,852,324.26)	51.76
3 27	3-27.2-09.3-25.01	03	2.02	72,281,800.00	37,429,475.74	(34,852,324.26)	51.76
3 27	3-27.2-09.3-25.01	04	2.01	562,067,151.00	537,510,340.00	(24,556,811.00)	95.63
3 27	3-27.2-09.3-25.01	04	2.01	70,029,804.00	68,745,504.00	(1,284,200.00)	97.81
3 27	3-27.2-09.3-25.01	04	2.01	70,429,804.00	68,745,504.00	(1,684,200.00)	97.61
3 27	3-27.2-09.3-25.01	04	2.03	259,934,690.00	244,492,579.00	(15,442,111.00)	94.06
3 27	3-27.2-09.3-25.01	04	2.03	259,934,690.00	244,492,579.00	(15,442,111.00)	94.06
3 27	3-27.2-09.3-25.01	04	2.04	231,702,657.00	224,272,157.00	(7,430,500.00)	96.79
3 27	3-27.2-09.3-25.01	04	2.04	309,229,657.00	292,361,757.00	(16,867,900.00)	96.72
3 27	3-27.2-09.3-25.01	04	2.04	22,473,000.00	21,910,400.00	(562,600.00)	97.50
3 27	3-27.2-09.3-25.01	07	2.01	346,810,658.00	280,551,508.00	(66,259,150.00)	80.89
3 27	3-27.2-09.3-25.01	07	2.01	346,810,658.00	280,551,508.00	(66,259,150.00)	80.89
3 27	3-27.2-09.3-25.01	07	2.01	109,134,004.00	101,069,404.00	(8,064,600.00)	94.39

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5	6	
3 27	3-27-2-09.3-25.01	237,675,694,00	177,541,684,06	(60.135,650,00)	71,70	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyediaan Perikanan					
3 30	2-17.3-30.0-00.01	15,082,964,242,00	12,878,647,948,96	(2,204,316,333,04)	85,39	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	15,082,964,242,00	12,878,647,948,96	(2,204,316,333,04)	85,39	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	2,34,330,978,00	216,583,021,00	(17,747,957,00)	90,43	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	96,281,650,00	95,401,266,00	(880,384,00)	99,09	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	531,500,00	499,000,00	(32,500,00)	93,89	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	40,221,250,00	40,182,000,00	(39,250,00)	99,90	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	3,748,900,00	3,314,000,00	(434,300,00)	88,42	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	6,530,000,00	6,415,000,00	(114,300,00)	98,25	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	45,250,000,00	44,999,760,00	(260,234,00)	99,42	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	15,790,000,00	14,382,010,00	(1,407,990,00)	91,08	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	190,000,00	190,000,00	0,00	100,00	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	15,000,000,00	14,192,010,00	(1,407,990,00)	90,97	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	122,259,328,00	106,799,797,00	(15,459,531,00)	87,36	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	39,875,000,00	25,798,853,00	(14,116,147,00)	64,60	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	62,384,328,00	81,040,884,00	(1,941,444,00)	98,37	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	46,225,000,00	43,581,150,00	(2,653,850,00)	94,26	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	13,700,000,00	12,664,700,00	(1,035,300,00)	92,44	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	13,700,000,00	12,664,700,00	(1,035,300,00)	92,44	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	32,515,000,00	30,916,450,00	(1,618,550,00)	95,03	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	32,515,000,00	30,916,450,00	(1,618,550,00)	95,03	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	14,185,389,996,00	12,105,884,624,56	(2,079,505,371,44)	85,34	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	11,545,694,128,00	9,540,449,292,96	(1,997,154,835,04)	82,71	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	5,962,854,346,00	5,271,063,105,96	(691,791,240,04)	88,46	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	5,582,779,762,00	4,277,386,187,00	(1,305,393,575,00)	76,62	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	2,639,785,660,00	2,557,435,332,00	(82,350,328,00)	96,88	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	1,402,793,232,00	1,361,528,147,00	(41,205,885,00)	97,06	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	1,237,057,636,00	1,195,907,185,00	(41,145,451,00)	96,67	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	97,052,268,00	44,067,068,00	(12,985,200,00)	77,24	
3 30	2-17.3-30.0-00.01	6,063,000,00	4,758,300,00	(2,194,700,00)	68,44	
	Perdagangan					
	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan					
	Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
	Penyediaan Perlengkapan dan Perawatan Kantor					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Penyediaan Barang Cakupan dan Penggantian					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SORP					
	Penyediaan Jasa Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan					
	Dinas Operasional atau Lapangan					
	Pemeliharaan/Rutin/latihan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	Program Perawatan dan Pendaftaran Perusahaan					
	Pembelian Tenda Dapur Gudang					
	Fasilitas Pembelian Tenda Dapur Gudang					
	Pembelian Surat Tenda Pembelian Waralaba (STPW) untuk Pemeriksa Waralaba dan Wiralaba Dalam Negeri					
	Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Peredaran Surat Tenda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri					
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan					
	Fasilitas Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					
	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					
	Pembinaan dan Pengembangan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					
	Pembudayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					
	Program Substansi Harga Barang Kekurangan Pasok Dan Barang Penting					
	Mengoptimalkan Barang Kekurangan Pasok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	1	2	3	4	5	6	
3 30 2-17.3-30.0-00.01	04 2.01	02	6.593.000,00	4.758.300,00	(2.194.700,00)	68,44	
3 30 2-17.3-30.0-00.01	04 2.02		19.311.268,00	15.796.268,00	(3.515.000,00)	81,80	
3 30 2-17.3-30.0-00.01	04 2.02	01	19.311.268,00	15.796.268,00	(3.515.000,00)	81,80	
3 30 2-17.3-30.0-00.01	04 2.03	02	30.788.000,00	23.512.500,00	(7.275.500,00)	76,37	
3 30 2-17.3-30.0-00.01	04 2.03	02	30.788.000,00	23.512.500,00	(7.275.500,00)	76,37	
3 30 2-17.3-30.0-00.01	06		72.415.000,00	53.520.063,00	(18.894.937,00)	73,91	
3 30 2-17.3-30.0-00.01	06 2.01		72.415.000,00	53.520.063,00	(18.894.937,00)	73,91	
3 30 2-17.3-30.0-00.01	06 2.01	01	57.480.000,00	48.508.813,00	(8.971.187,00)	72,51	
3 30 2-17.3-30.0-00.01	06 2.01	02	4.935.000,00	4.991.250,00	(943.750,00)	93,03	
3 30 2-17.3-30.0-00.01	07		487.541.000,00	415.011.982,00	(72.529.018,00)	85,12	
3 30 2-17.3-30.0-00.01	07 2.01		487.541.000,00	415.011.982,00	(72.529.018,00)	85,12	
3 30 2-17.3-30.0-00.01	07 2.01	03	487.541.000,00	415.011.982,00	(72.529.018,00)	85,12	
3 31 2-18.3-31.2-07.01	01		1.489.729.920,00	1.287.034.543,00	(192.695.377,00)	87,07	
3 31 2-18.3-31.2-07.01	01 2.09		1.489.729.920,00	1.287.034.543,00	(192.695.377,00)	87,07	
3 31 2-18.3-31.2-07.01	01 2.09	01	1.805.400,00	1.523.000,00	(282.400,00)	84,36	
3 31 2-18.3-31.2-07.01	01 2.09	02	1.805.400,00	1.523.000,00	(282.400,00)	84,36	
3 31 2-18.3-31.2-07.01	02		1.433.812.720,00	1.251.154.443,00	(182.658.277,00)	87,26	
3 31 2-18.3-31.2-07.01	02 2.01		1.433.812.720,00	1.251.154.443,00	(182.658.277,00)	87,26	
3 31 2-18.3-31.2-07.01	02 2.01	03	102.451.804,00	91.080.421,00	(11.263.383,00)	89,01	
3 31 2-18.3-31.2-07.01	02 2.01	04	599.218.916,00	533.775.830,00	(65.443.086,00)	97,19	
3 31 2-18.3-31.2-07.01	02 2.01	05	782.142.000,00	676.190.192,00	(105.951.808,00)	80,06	
3 31 2-18.3-31.2-07.01	04		54.111.800,00	44.357.100,00	(9.754.700,00)	81,97	
3 31 2-18.3-31.2-07.01	04 2.01		54.111.800,00	44.357.100,00	(9.754.700,00)	81,97	
3 31 2-18.3-31.2-07.01	04 2.01	02	54.111.800,00	44.357.100,00	(9.754.700,00)	81,97	
4 01			115.455.661.314,00	100.457.211.178,43	(14.998.450.135,57)	87,01	
			74.964.123.762,00	67.871.387.882,43	(7.092.735.879,57)	90,54	

219

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			REALISASI	
		3	4	5	(Rp)	(%)
4	01	4-01.0-00.0-00.02	74,564,123,462,00	67,871,387,882,43	(7,092,735,879,57)	90,54
4	01	4-01.0-00.0-00.02	43,006,020,404,00	30,066,810,072,38	(3,096,210,331,62)	90,71
4	01	4-01.0-00.0-00.02	19,407,750,00	17,457,025,00	(1,950,725,00)	89,95
4	01	4-01.0-00.0-00.02	19,407,750,00	17,457,025,00	(1,950,725,00)	89,95
4	01	4-01.0-00.0-00.02	12,609,427,113,00	12,136,965,465,00	(472,461,448,00)	96,25
4	01	4-01.0-00.0-00.02	12,592,476,913,00	12,122,192,665,00	(470,286,248,00)	96,27
4	01	4-01.0-00.0-00.02	11,491,000,00	10,416,500,00	(1,074,500,00)	90,65
4	01	4-01.0-00.0-00.02	5,457,200,00	4,356,500,00	(1,100,700,00)	79,83
4	01	4-01.0-00.0-00.02	29,690,000,00	18,325,300,00	(11,364,700,00)	61,72
4	01	4-01.0-00.0-00.02	29,690,000,00	18,325,300,00	(11,364,700,00)	61,72
4	01	4-01.0-00.0-00.02	6,718,056,192,00	6,329,034,343,00	(388,921,849,00)	94,22
4	01	4-01.0-00.0-00.02	114,749,400,00	109,357,710,00	(4,391,690,00)	95,82
4	01	4-01.0-00.0-00.02	2,276,520,000,00	2,813,677,254,00	(262,842,746,00)	88,45
4	01	4-01.0-00.0-00.02	199,750,000,00	187,296,120,00	(12,453,872,00)	93,77
4	01	4-01.0-00.0-00.02	780,096,000,00	256,579,196,00	(33,516,894,00)	91,60
4	01	4-01.0-00.0-00.02	70,150,000,00	69,321,661,00	(828,339,00)	98,81
4	01	4-01.0-00.0-00.02	2,118,072,992,00	2,076,786,072,00	(41,286,920,00)	98,05
4	01	4-01.0-00.0-00.02	3,658,750,000,00	1,616,316,362,00	(42,433,618,00)	97,44
4	01	4-01.0-00.0-00.02	2,078,090,000,00	2,783,755,000,00	(195,235,000,00)	93,45
4	01	4-01.0-00.0-00.02	2,879,240,000,00	2,714,310,000,00	(164,330,000,00)	94,29
4	01	4-01.0-00.0-00.02	99,750,000,00	98,845,000,00	(30,965,000,00)	99,02
4	01	4-01.0-00.0-00.02	485,701,000,00	414,570,113,00	(71,130,887,00)	85,36
4	01	4-01.0-00.0-00.02	29,911,000,00	16,940,000,00	(12,971,000,00)	56,63
4	01	4-01.0-00.0-00.02	455,790,000,00	397,630,113,00	(58,159,887,00)	87,24
4	01	4-01.0-00.0-00.02	3,705,444,042,00	3,518,185,508,24	(187,258,533,76)	94,95
4	01	4-01.0-00.0-00.02	2,160,206,452,00	2,076,953,005,00	(83,253,447,00)	96,15
4	01	4-01.0-00.0-00.02	9,600,000,00	9,600,000,00	0,00	100,00
4	01	4-01.0-00.0-00.02	79,700,000,00	56,166,000,00	(21,534,000,00)	70,47
4	01	4-01.0-00.0-00.02	1,416,695,590,00	1,341,210,703,24	(75,484,886,76)	94,67
4	01	4-01.0-00.0-00.02	39,242,000,00	34,255,800,00	(4,986,200,00)	87,29
4	01	4-01.0-00.0-00.02	1,058,629,968,00	843,646,608,00	(214,983,360,00)	79,69

RA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	
				3	4	5	6
4 01	4-01.0-00.0-00.02	01	2.11	774.629.969,00	596.283.108,00	(182.346.860,00)	76,58
4 01	4-01.0-00.0-00.02	01	2.11	280.000.000,00	247.343.500,00	(32.656.500,00)	88,34
4 01	4-01.0-00.0-00.02	01	2.12	9.981.727.559,00	8.656.348.455,14	(1.325.379.053,86)	86,72
4 01	4-01.0-00.0-00.02	01	2.12	7.103.979.489,00	6.223.622.731,04	(880.356.757,96)	87,51
4 01	4-01.0-00.0-00.02	01	2.12	2.827.998.070,00	2.405.948.564,13	(422.049.505,87)	85,08
4 01	4-01.0-00.0-00.02	01	2.12	40.750.000,00	26.777.209,00	(13.972.791,00)	53,82
4 01	4-01.0-00.0-00.02	01	2.13	377.399.333,00	314.308.861,00	(63.030.469,00)	83,30
4 01	4-01.0-00.0-00.02	01	2.13	97.881.000,00	86.360.070,00	(11.520.930,00)	88,23
4 01	4-01.0-00.0-00.02	01	2.13	192.327.830,00	177.782.852,00	(14.544.978,00)	92,43
4 01	4-01.0-00.0-00.02	01	2.13	87.190.500,00	50.245.939,00	(36.944.561,00)	57,63
4 01	4-01.0-00.0-00.02	01	2.14	5.041.507.250,00	3.976.253.154,00	(1.065.254.096,00)	78,87
4 01	4-01.0-00.0-00.02	01	2.14	4.026.178.500,00	3.181.820.730,00	(844.357.770,00)	79,03
4 01	4-01.0-00.0-00.02	01	2.14	63.100.000,00	19.818.000,00	(43.282.000,00)	31,41
4 01	4-01.0-00.0-00.02	01	2.14	952.228.750,00	774.614.474,00	(177.614.276,00)	81,35
4 01	4-01.0-00.0-00.02	01	2.14	30.540.475.000,00	27.793.294.090,65	(2.747.179.509,35)	91,00
4 01	4-01.0-00.0-00.02	02	3.01	709.471.000,00	541.030.023,00	(168.440.977,00)	76,26
4 01	4-01.0-00.0-00.02	02	2.01	209.405.000,00	182.889.793,00	(26.515.207,00)	87,31
4 01	4-01.0-00.0-00.02	02	2.01	232.779.000,00	236.129.991,00	(3.349.969,00)	93,43
4 01	4-01.0-00.0-00.02	02	2.01	167.317.000,00	122.030.299,00	(45.286.701,00)	72,93
4 01	4-01.0-00.0-00.02	02	2.02	38.855.864.600,00	26.483.052.827,05	(12.372.811.772,95)	68,17
4 01	4-01.0-00.0-00.02	02	2.02	2.401.180.600,00	1.827.874.089,00	(573.306.511,00)	76,12
4 01	4-01.0-00.0-00.02	02	2.02	15.903.269.000,00	14.336.035.846,00	(1.567.233.154,00)	90,15
4 01	4-01.0-00.0-00.02	02	2.02	10.551.415.000,00	10.318.312.893,65	(233.102.106,35)	97,79
4 01	4-01.0-00.0-00.02	02	2.03	873.715.000,00	674.588.648,10	(199.126.351,90)	77,21
4 01	4-01.0-00.0-00.02	02	2.03	121.740.000,00	104.149.789,00	(17.590.211,00)	85,55
4 01	4-01.0-00.0-00.02	02	2.03	680.795.000,00	428.002.774,00	(252.792.226,00)	62,88
4 01	4-01.0-00.0-00.02	02	2.03	151.270.000,00	142.416.085,00	(8.853.915,00)	94,15
4 01	4-01.0-00.0-00.02	02	2.04	191.429.000,00	94.552.593,00	(96.876.406,00)	49,39
4 01	4-01.0-00.0-00.02	02	2.04	191.429.000,00	94.552.592,00	(96.876.408,00)	49,39
4 01	4-01.0-00.0-00.02	03	3.01	1.417.623.758,00	1.068.373.720,00	(349.250.038,00)	75,36
4 01	4-01.0-00.0-00.02	03	3.01	371.490.100,00	262.149.773,00	(109.340.327,00)	70,57

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG					
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI					
1	2	3	4	5	6				
4	01	4-01.0-00.0-00.02	01	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	80.756.940,00	(7.239.140,00)	91,77
						Pengendalian dan Dietribud Penlokalisasi	138.697.678,00	(57.881.322,00)	70,84
						Pencapaian dan Penguasaan Esensi Milau kead	87.715.090,00	(45.819.865,00)	48,67
						Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	242.035.280,00	(36.761.472,00)	85,02
						Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	39.290.000,00	(6.761.628,00)	84,08
						Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	58.589.000,00	(13.295.344,00)	77,31
						Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	144.156.200,00	(16.704.450,00)	88,41
						Pengelolaan Kegiatan Barung dan Jaza	790.894.558,00	(195.944.789,90)	74,91
						Pengelolaan Kegiatan Barung dan Jaza	414.061.200,00	(173.008.059,00)	58,22
						Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	325.356.358,00	(14.870.230,00)	95,43
						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	41.477.090,00	(8.066.500,00)	80,55
						Pembinaan Kebijakan Sumber Daya Alam	23.293.960,00	(7.703.500,00)	66,88
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	23.293.960,00	(7.703.500,00)	66,88
						<b>Subtotal DEPD</b>	40.491.537.552,00	(7.995.714.256,00)	80,48
						<b>Subtotal DEPD</b>	40.491.537.552,00	(7.995.714.256,00)	80,48
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.862.337.158,00	(5.708.672.159,00)	76,98
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.056.000,00	(25.351.091,00)	60,42
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	94.095.000,00	(35.351.091,00)	60,42
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.223.061.250,00	(968.675.226,00)	77,06
						Penyediaan Cadai dan Tunjangan ASN	4.223.061.250,00	(968.675.226,00)	77,06
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.030.000,00	(40.030.000,00)	0,00
						Pembinaan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	40.030.000,00	(40.030.000,00)	0,00
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.307.819.016,00	(585.845.367,00)	74,61
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencangan Bangunan Kantor	35.050.000,00	(20.311.642,00)	42,05
						Penyediaan Perabotan dan Peralengkapan Kantor	136.308.000,00	(36.341.400,00)	73,34
						Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	5.444.000,00	(2.098.720,00)	61,45
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.904.800,00	(795.326,00)	93,84
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	109.333.000,00	(26.492.700,00)	75,77
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Perawatan Perundang-undangan	380.626.000,00	(37.657.370,00)	90,11
						Fasilitas Kunjungan Tamu	1.156.892.216,00	(788.013.870,00)	75,10
						Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	471.261.000,00	(174.134.375,00)	63,05

1A



KODE		URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3		4		5		6		
4	02	4-02.0-00.0-00.02	01	2.07	2,135,431,000.00	400,970,000.00	(1,711,461,000.00)	18.92
4	02	4-02.0-00.0-00.02	01	2.07	1,650,000,000.00	0.00	(1,650,000,000.00)	0.00
4	02	4-02.0-00.0-00.02	01	2.07	485,431,000.00	400,970,000.00	(84,461,000.00)	82.22
4	02	4-02.0-00.0-00.02	01	2.08	266,710,000.00	168,533,553.00	(98,176,447.00)	62.86
4	02	4-02.0-00.0-00.02	01	2.08	3,430,000.00	33,000.00	(3,397,000.00)	0.96
4	02	4-02.0-00.0-00.02	01	2.08	266,280,000.00	168,500,553.00	(97,779,447.00)	63.66
4	02	4-02.0-00.0-00.02	01	2.09	3,157,273,428.00	2,171,612,833.00	(985,660,595.00)	68.78
4	02	4-02.0-00.0-00.02	01	2.09	1,004,473,628.00	619,138,743.00	(385,333,885.00)	61.64
4	02	4-02.0-00.0-00.02	01	2.09	1,866,695,800.00	1,460,720,250.00	(400,975,550.00)	78.52
4	02	4-02.0-00.0-00.02	01	2.09	245,785,000.00	59,189,240.00	(186,595,760.00)	24.08
4	02	4-02.0-00.0-00.02	01	2.09	40,320,000.00	27,564,600.00	(12,755,400.00)	68.36
4	02	4-02.0-00.0-00.02	01	2.15	11,067,040,004.00	10,324,151,007.00	(762,889,007.00)	93.12
4	02	4-02.0-00.0-00.02	01	2.15	10,814,045,094.00	29,137,131,067.00	(676,914,087.00)	93.74
4	02	4-02.0-00.0-00.02	01	2.15	210,965,000.00	157,600,000.00	(53,345,000.00)	74.71
4	02	4-02.0-00.0-00.02	01	2.15	62,000,000.00	29,400,000.00	(32,600,000.00)	47.40
4	02	4-02.0-00.0-00.02	01	2.16	1,517,916,370.00	1,089,333,034.00	(408,583,346.00)	66.49
4	02	4-02.0-00.0-00.02	01	2.16	124,272,112.00	138,650,662.00	(5,621,420.00)	95.48
4	02	4-02.0-00.0-00.02	01	2.16	1,393,644,258.00	890,682,332.00	(502,961,926.00)	63.91
4	02	4-02.0-00.0-00.02	02	2.01	15,689,200,394.00	13,462,138,297.00	(2,197,042,097.00)	86.00
4	02	4-02.0-00.0-00.02	02	2.01	1,860,676,116.00	1,507,594,613.00	(373,171,503.00)	85.32
4	02	4-02.0-00.0-00.02	02	2.01	101,463,860.00	135,794,539.08	(65,979,311.00)	74.69
4	02	4-02.0-00.0-00.02	02	2.01	1,222,209,166.00	1,053,965,995.00	(168,333,171.00)	86.23
4	02	4-02.0-00.0-00.02	02	2.01	359,342,100.00	314,445,647.00	(44,896,453.00)	90.29
4	02	4-02.0-00.0-00.02	02	2.01	97,361,080.00	73,388,432.00	(23,972,648.00)	75.36
4	02	4-02.0-00.0-00.02	02	2.02	1,794,461,054.00	1,322,213,352.00	(482,187,702.00)	77.58
4	02	4-02.0-00.0-00.02	02	2.02	276,486,000.00	249,571,460.00	(26,914,540.00)	90.27
4	02	4-02.0-00.0-00.02	02	2.02	168,894,000.00	144,423,226.00	(24,470,774.00)	85.51
4	02	4-02.0-00.0-00.02	02	2.02	439,765,304.00	396,941,478.00	(42,823,826.00)	67.52
4	02	4-02.0-00.0-00.02	02	2.02	338,229,500.00	257,183,661.00	(77,045,839.00)	78.35
4	02	4-02.0-00.0-00.02	02	2.02	26,459,250.00	1,846,570.00	(24,612,730.00)	6.98
4	02	4-02.0-00.0-00.02	02	2.02	464,567,000.00	372,247,027.00	(92,319,973.00)	80.13

814

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI		(Rp)	(%)
			1	2				
4 02	4-02.9-00.0-06.02	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3,426,497,966,00	2,757,835,917,00	(668,662,049,00)	80,40
4 02	4-02.9-00.0-06.02	02	2.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1,063,858,466,00	873,453,274,00	(190,361,192,00)	82,11
4 02	4-02.9-00.0-06.02	02	2.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	845,803,000,00	714,950,936,00	(130,852,064,00)	84,53
4 02	4-02.9-00.0-06.02	02	2.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	830,875,000,00	585,867,015,00	(235,007,985,00)	71,72
4 02	4-02.9-00.0-06.02	02	2.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	23,071,500,00	15,871,250,00	(7,200,250,00)	68,79
4 02	4-02.9-00.0-06.02	02	2.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	23,332,750,00	0,00	(23,332,750,00)	0,00
4 02	4-02.9-00.0-06.02	02	2.03	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	9,472,750,00	4,105,250,00	(5,367,500,00)	43,34
4 02	4-02.9-00.0-06.02	02	2.03	Pengawasan Penggunaan Anggaran	630,088,500,00	553,548,152,00	(76,540,308,00)	87,85
4 02	4-02.9-00.0-06.02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3,821,742,258,00	3,439,152,779,00	(382,589,479,00)	89,99
4 02	4-02.9-00.0-06.02	02	2.04	Pembelajaran Tugas DPRD	1,717,965,008,00	1,587,018,467,00	(130,946,541,00)	87,72
4 02	4-02.9-00.0-06.02	02	2.04	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	854,667,750,00	757,638,000,00	(97,029,750,00)	88,65
4 02	4-02.9-00.0-06.02	02	2.04	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	207,420,000,00	162,000,000,00	(45,420,000,00)	78,10
4 02	4-02.9-00.0-06.02	02	2.04	Penyusunan Program Kerja DPRD	1,041,689,508,00	1,012,466,312,00	(29,193,198,00)	97,20
4 02	4-02.9-00.0-06.02	02	2.05	Penyusunan dan Penghimpunan Aspirol Masyarakat	716,410,000,00	487,583,007,00	(228,806,993,00)	68,05
4 02	4-02.9-00.0-06.02	02	2.05	Pelaksanaan Reses	716,410,000,00	487,583,007,00	(228,806,993,00)	68,05
4 02	4-02.9-00.0-06.02	02	2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	202,766,000,00	88,914,229,00	(113,851,771,00)	43,85
4 02	4-02.9-00.0-06.02	02	2.06	Pengawasan Kode Etik DPRD	202,766,000,00	88,914,229,00	(113,851,771,00)	43,85
4 02	4-02.9-00.0-06.02	02	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	3,954,707,000,00	3,889,034,460,00	(65,672,540,00)	98,27
4 02	4-02.9-00.0-06.02	02	2.08	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3,585,000,000,00	3,555,944,025,00	(29,055,975,00)	99,19
4 02	4-02.9-00.0-06.02	02	2.08	Fasilitasi Tugas Peran DPRD	371,707,000,00	253,090,375,00	(118,616,625,00)	68,09
5				<b>UNSUR PENDUKANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	47,317,190,688,00	38,621,275,212,00	(8,695,923,476,00)	81,62
5 01				Perencanaan	6,634,823,893,00	5,937,466,011,00	(697,327,882,00)	89,49
5 01	5-01.5-05.0-00.01			Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	6,634,823,893,00	5,937,466,011,00	(697,327,882,00)	89,49
5 01	5-01.5-05.0-00.01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,366,856,043,00	5,085,638,438,00	(281,177,605,00)	94,76
5 01	5-01.5-05.0-00.01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,150,000,00	34,645,322,00	(504,678,00)	98,56
5 01	5-01.5-05.0-00.01	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35,150,000,00	34,645,322,00	(504,678,00)	98,56
5 01	5-01.5-05.0-00.01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,466,323,425,00	4,270,116,224,00	(196,207,201,00)	95,61
5 01	5-01.5-05.0-00.01	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,466,323,425,00	4,270,116,224,00	(196,207,201,00)	95,61
5 01	5-01.5-05.0-00.01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	376,046,750,00	319,697,547,00	(56,349,203,00)	85,02
5 01	5-01.5-05.0-00.01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,242,750,00	2,985,060,00	(257,750,00)	92,05
5 01	5-01.5-05.0-00.01	01	2.06	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	88,000,000,00	47,850,060,00	(40,149,940,00)	54,06

P.19

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5	(Rp)	(%)
		3	4	5		6
5 01	5-01.5-05.0-00.01	14.020.000,00	13.677.756,00	(402.250,00)		93,28
5 01	5-01.5-05.0-00.01	14.140.000,00	9.412.226,00	(4.727.750,00)		66,56
5 01	5-01.5-05.0-00.01	3.716.000,00	3.708.540,00	(7.460,00)		99,80
5 01	5-01.5-05.0-00.01	256.528.000,00	242.864.007,00	(14.263.993,00)		94,45
5 01	5-01.5-05.0-00.01	34.570.000,00	30.644.690,00	(4.525.310,00)		86,91
5 01	5-01.5-05.0-00.01	1.250.000,00	1.813.750,00	(236.250,00)		81,10
5 01	5-01.5-05.0-00.01	27.000.000,00	26.042.940,00	(957.060,00)		96,46
5 01	5-01.5-05.0-00.01	6.300.000,00	2.988.000,00	(3.332.000,00)		47,28
5 01	5-01.5-05.0-00.01	464.765.868,00	431.174.605,00	(23.591.213,00)		94,81
5 01	5-01.5-05.0-00.01	71.351.804,00	67.933.654,00	(3.420.750,00)		95,21
5 01	5-01.5-05.0-00.01	126.950.000,00	115.919.150,00	(11.030.850,00)		91,31
5 01	5-01.5-05.0-00.01	256.464.064,00	247.324.451,00	(9.139.613,00)		96,44
5 01	5-01.5-05.0-00.01	707.491.850,00	622.636.176,00	(284.855.674,00)		59,24
5 01	5-01.5-05.0-00.01	551.214.650,00	305.765.056,00	(245.449.594,00)		55,47
5 01	5-01.5-05.0-00.01	20.690.600,00	19.052.500,00	(1.637.500,00)		92,09
5 01	5-01.5-05.0-00.01	4.370.400,00	3.946.300,00	(424.100,00)		90,30
5 01	5-01.5-05.0-00.01	101.639.650,00	80.594.465,00	(20.535.385,00)		79,68
5 01	5-01.5-05.0-00.01	425.114.400,00	202.261.791,00	(222.852.609,00)		47,58
5 01	5-01.5-05.0-00.01	92.577.600,00	71.369.168,00	(21.608.432,00)		76,76
5 01	5-01.5-05.0-00.01	92.577.600,00	71.369.168,00	(21.608.432,00)		76,76
5 01	5-01.5-05.0-00.01	63.299.600,00	45.501.952,00	(17.797.648,00)		71,88
5 01	5-01.5-05.0-00.01	63.299.600,00	45.501.952,00	(17.797.648,00)		71,88
5 01	5-01.5-05.0-00.01	560.476.000,00	420.181.417,00	(131.294.583,00)		76,57
5 01	5-01.5-05.0-00.01	2.11.651.000,00	169.506.709,00	(42.150.292,00)		80,09
5 01	5-01.5-05.0-00.01	66.896.000,00	57.083.560,00	(9.802.440,00)		85,34
5 01	5-01.5-05.0-00.01	42.406.000,00	35.684.381,00	(6.721.619,00)		84,15
5 01	5-01.5-05.0-00.01	27.505.000,00	15.564.335,00	(11.940.665,00)		56,59
5 01	5-01.5-05.0-00.01	74.454.000,00	61.168.432,00	(13.685.568,00)		81,72

KODE			URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)					
1			2		3		4		5		6	
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			REALISASI									
5	01	5-01.5-05.0-00.01	03	2.02	164.408.000,00	113.484.361,00	(50.923.639,00)	69,03				
5	01	5-01.5-05.0-00.01	03	2.02	41.000.000,00	21.821.142,00	(19.178.858,00)	53,22				
5	01	5-01.5-05.0-00.01	03	2.02	54.455.000,00	47.083.697,00	(7.451.303,00)	86,32				
5	01	5-01.5-05.0-00.01	03	2.02	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	01	5-01.5-05.0-00.01	03	2.02	25.813.000,00	17.895.943,06	(7.917.056,94)	69,33				
5	01	5-01.5-05.0-00.01	03	2.02	63.140.000,00	26.763.940,00	(36.376.060,00)	62,04				
5	01	5-01.5-05.0-00.01	03	2.02	184.417.000,00	146.186.348,00	(38.230.652,00)	79,27				
5	01	5-01.5-05.0-00.01	03	2.03	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	01	5-01.5-05.0-00.01	03	2.03	47.465.000,00	38.713.112,00	(8.695.888,00)	81,66				
5	01	5-01.5-05.0-00.01	03	2.03	137.005.000,00	107.483.236,00	(29.524.764,00)	78,45				
5	02	5-02.0-00.0-00.01	01	2.01	32.362.837.910,00	25.085.525.503,00	(7.277.312.407,00)	77,51				
5	02	5-02.0-00.0-00.01	01	2.01	32.362.837.910,00	25.085.525.503,00	(7.277.312.407,00)	77,51				
5	02	5-02.0-00.0-00.01	01	2.01	11.777.728.821,00	10.595.567.255,00	(1.272.161.516,00)	89,30				
5	02	5-02.0-00.0-00.01	01	2.01	90.592.290,00	84.723.800,00	(5.878.490,00)	93,20				
5	02	5-02.0-00.0-00.01	01	2.01	90.962.200,00	84.723.800,00	(6.238.400,00)	93,20				
5	02	5-02.0-00.0-00.01	01	2.02	10.089.892.041,00	9.015.059.944,00	(1.074.832.097,00)	89,35				
5	02	5-02.0-00.0-00.01	01	2.02	10.089.892.041,00	9.015.059.944,00	(1.074.832.097,00)	89,35				
5	02	5-02.0-00.0-00.01	01	2.06	207.200.000,00	200.238.153,00	(6.961.847,00)	96,64				
5	02	5-02.0-00.0-00.01	01	2.06	207.200.000,00	200.238.153,00	(6.961.847,00)	96,64				
5	02	5-02.0-00.0-00.01	01	2.06	513.781.300,00	460.758.363,00	(53.022.937,00)	87,97				
5	02	5-02.0-00.0-00.01	01	2.06	6.290.000,00	5.886.000,00	(404.000,00)	93,58				
5	02	5-02.0-00.0-00.01	01	2.06	35.054.800,00	35.092.200,00	(37.400,00)	96,42				
5	02	5-02.0-00.0-00.01	01	2.06	244.886.500,00	233.282.350,00	(11.604.150,00)	95,23				
5	02	5-02.0-00.0-00.01	01	2.06	16.000.000,00	16.949.000,00	(751.000,00)	95,53				
5	02	5-02.0-00.0-00.01	01	2.06	220.150.000,00	170.528.813,00	(49.621.187,00)	77,46				
5	02	5-02.0-00.0-00.01	01	2.07	139.790.000,00	135.159.375,00	(4.630.625,00)	96,69				
5	02	5-02.0-00.0-00.01	01	2.07	30.050.000,00	27.216.900,00	(2.833.100,00)	90,55				
5	02	5-02.0-00.0-00.01	01	2.07	100.740.000,00	107.949.375,00	(7.209.375,00)	98,37				

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
KODE			3	4	5	6
5 02	5-02.0-00.0-00.01	01	137.550.000,00	121.666.687,00	(15.883.313,00)	88,45
5 02	5-02.0-00.0-00.01	01	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
5 02	5-02.0-00.0-00.01	01	136.050.000,00	120.166.687,00	(15.883.313,00)	88,33
5 02	5-02.0-00.0-00.01	01	588.613.280,00	487.960.883,00	(100.652.397,00)	82,90
5 02	5-02.0-00.0-00.01	01	39.190.000,00	19.089.049,00	(20.100.951,00)	48,71
5 02	5-02.0-00.0-00.01	01	268.200.000,00	207.384.016,00	(60.815.984,00)	77,32
5 02	5-02.0-00.0-00.01	01	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
5 02	5-02.0-00.0-00.01	01	14.600.000,00	13.660.000,00	(940.000,00)	93,56
5 02	5-02.0-00.0-00.01	01	263.123.280,00	244.327.818,00	(18.795.462,00)	92,88
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	16.963.554.333,00	11.386.181.982,00	(5.577.372.349,00)	67,12
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	1.473.616.594,00	1.077.462.403,00	(396.154.131,00)	73,12
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	175.374.000,00	150.844.300,00	(24.529.700,00)	86,01
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	229.090.959,00	174.070.503,00	(55.020.456,00)	75,98
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	79.331.000,00	72.822.500,00	(6.508.500,00)	91,80
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	352.492.995,00	330.373.326,00	(22.119.679,00)	93,76
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	209.347.740,00	250.762.700,00	(41.414.960,00)	120,31
5 02	5-02.0-01.0-00.01	02	137.980.000,00	98.509.134,00	(39.470.866,00)	71,43
5 02	5-02.0-01.0-00.01	02	490.776.262,00	433.153.786,00	(57.622.476,00)	88,26
5 02	5-02.0-01.0-00.01	02	65.090.000,00	59.555.817,00	(5.534.183,00)	91,59
5 02	5-02.0-01.0-00.01	02	0,00	0,00	0,00	0,00
5 02	5-02.0-01.0-00.01	02	0,00	0,00	0,00	0,00
5 02	5-02.0-01.0-00.01	02	161.609.954,00	95.724.832,00	(65.885.122,00)	59,29
5 02	5-02.0-01.0-00.01	02	37.011.400,00	21.980.550,00	(15.030.850,00)	59,40
5 02	5-02.0-01.0-00.01	02	37.641.000,00	34.255.220,00	(3.385.780,00)	91,01
5 02	5-02.0-01.0-00.01	02	41.550.000,00	35.069.910,00	(6.480.090,00)	84,40
5 02	5-02.0-01.0-00.01	02	34.900.000,00	9.721.400,00	(25.178.600,00)	27,86

8.19

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
			3	4	5	(Rp)	(%)	
								ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	2.03	11	172.153.008,00	166.237.857,00	(5.915.051,00)	96,56
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	2.03	02	1.076.076.808,00	962.035.853,00	(114.040.955,00)	89,48
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	2.03	02	65.385.994,00	47.319.900,00	(18.066.094,00)	72,37
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	2.03	03	132.270.408,00	127.171.655,00	(5.098.753,00)	96,15
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	2.03	04	0,00	0,00	0,00	0,00
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	2.03	05	486.966.600,00	480.626.040,00	(6.340.560,00)	98,70
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	2.03	06	26.158.000,00	11.614.890,00	(14.523.150,00)	44,48
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	2.03	07	60.983.000,00	32.545.600,00	(28.437.400,00)	46,51
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	2.03	08	11.977.000,00	3.802.456,00	(8.174.590,00)	31,75
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	2.03	10	28.189.000,00	14.891.450,00	(13.297.550,00)	52,83
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	2.03	11	177.543.806,00	169.033.807,00	(8.489.999,00)	95,22
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	2.03	12	77.603.000,00	65.000.000,00	(12.672.919,00)	83,80
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	2.03	13	0,00	0,00	0,00	0,00
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	2.04	02	13.835.856.667,00	8.844.198.100,00	(4.991.658.567,00)	63,92
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	2.04	02	66.196.000,00	52.780.790,00	(13.429.250,00)	76,25
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	2.04	08	8.786.656.667,00	8.530.000.000,00	(246.656.667,00)	97,19
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	2.04	09	5.000.000.000,00	271.437.336,00	(4.728.562.664,00)	5,43
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	2.05	02	87.228.000,00	79.291.780,00	(7.936.220,00)	90,96
5 02	5-02.0-00.0-00.01	02	2.05	02	87.228.000,00	79.291.780,00	(7.936.220,00)	90,96
5 02	5-02.0-00.0-00.01	03	2.01	03	1.401.181.798,00	1.619.889.403,00	(181.292.355,00)	89,93
5 02	5-02.0-00.0-00.01	03	2.01	03	1.401.181.798,00	1.619.889.403,00	(181.292.355,00)	89,93
5 02	5-02.0-00.0-00.01	03	2.01	01	21.139.000,00	17.034.200,00	(4.104.800,00)	80,58
5 02	5-02.0-00.0-00.01	03	2.01	03	9.964.500,00	9.935.950,00	(28.550,00)	99,40
5 02	5-02.0-00.0-00.01	03	2.01	03	1.278.198.059,00	1.237.895.068,00	(40.502.992,00)	96,83
5 02	5-02.0-00.0-00.01	03	2.01	07	48.262.500,00	22.781.871,00	(17.480.629,00)	56,58
5 02	5-02.0-00.0-00.01	03	2.01	08	32.939.400,00	22.710.818,00	(10.228.582,00)	68,95
5 02	5-02.0-00.0-00.01	03	2.01	09	202.949.308,00	144.397.369,00	(58.551.939,00)	71,15

11A

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
KODE		3	4	5	6
5 02	5-02.0-00.0-00.01	79.826.000,00	48.487.866,00	(31.338.134,00)	60,74
5 02	5-02.0-00.0-00.01	135.903.000,00	117.276.261,00	(18.626.739,00)	86,29
5 02	5-02.0-00.0-00.01	1.820.373.000,00	1.573.886.913,00	(246.486.087,00)	86,46
5 02	5-02.0-00.0-00.01	1.820.373.000,00	1.573.886.913,00	(246.486.087,00)	86,46
5 02	5-02.0-00.0-00.01	122.870.000,00	77.941.701,00	(44.928.299,00)	63,85
5 02	5-02.0-00.0-00.01	176.614.376,00	170.323.000,00	(6.291.376,00)	97,11
5 02	5-02.0-00.0-00.01	104.317.608,00	91.674.296,00	(12.643.312,00)	87,88
5 02	5-02.0-00.0-00.01	234.816.000,00	202.614.759,00	(32.201.241,00)	86,29
5 02	5-02.0-00.0-00.01	210.705.000,00	201.766.400,00	(8.938.600,00)	95,76
5 02	5-02.0-00.0-00.01	151.843.428,00	148.435.896,00	(3.407.532,00)	97,76
5 02	5-02.0-00.0-00.01	468.368.468,00	534.296.711,00	(66.931.757,00)	79,94
5 02	5-02.0-00.0-00.01	152.238.200,00	146.234.150,00	(6.004.050,00)	96,06
5 03	5-03.0-00.0-00.01	6.980.801.349,00	6.358.428.724,00	(622.372.625,00)	91,08
5 03	5-03.0-00.0-00.01	6.980.801.349,00	6.358.428.724,00	(622.372.625,00)	91,08
5 03	5-03.0-00.0-00.01	4.075.997.337,00	3.828.824.817,00	(247.172.520,00)	93,94
5 03	5-03.0-00.0-00.01	19.598.800,00	17.448.900,00	(2.149.900,00)	89,03
5 03	5-03.0-00.0-00.01	19.598.800,00	17.448.900,00	(2.149.900,00)	89,03
5 03	5-03.0-00.0-00.01	3.654.371.037,00	3.466.836.552,00	(187.534.485,00)	94,87
5 03	5-03.0-00.0-00.01	3.654.371.037,00	3.466.836.552,00	(187.534.485,00)	94,87
5 03	5-03.0-00.0-00.01	19.688.000,00	5.417.200,00	(14.270.800,00)	27,52
5 03	5-03.0-00.0-00.01	9.983.000,00	0,00	(9.983.000,00)	0,00
5 03	5-03.0-00.0-00.01	9.705.000,00	5.417.200,00	(4.287.800,00)	55,82
5 03	5-03.0-00.0-00.01	232.889.500,00	210.250.550,00	(22.638.950,00)	90,28
5 03	5-03.0-00.0-00.01	820.000,00	800.000,00	(20.000,00)	97,56
5 03	5-03.0-00.0-00.01	50.500.000,00	43.047.000,00	(6.653.000,00)	86,83
5 03	5-03.0-00.0-00.01	8.873.000,00	8.341.300,00	(531.700,00)	94,01
5 03	5-03.0-00.0-00.01	3.341.500,00	2.855.500,00	(486.000,00)	85,46
5 03	5-03.0-00.0-00.01	2.830.000,00	1.845.250,00	(984.750,00)	65,29
5 03	5-03.0-00.0-00.01	166.525.000,00	152.561.500,00	(13.963.500,00)	91,61
5 03	5-03.0-00.0-00.01	6.000.000,00	3.132.366,00	(2.867.634,00)	52,21
5 03	5-03.0-00.0-00.01	1.950.000,00	1.060.000,00	(890.000,00)	54,36

219

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	
					3	4	5	6
5 03	5-03.5-04.0-00.01	01	2.00	02	4.050.000,00	2.072.366,00	(1.977.634,00)	51,17
5 03	5-03.5-04.0-00.01	01	2.09		147.450.000,00	125.729.249,00	(17.710.751,00)	87,65
5 03	5-03.5-04.0-00.01	01	2.09	01	39.190.000,00	28.212.712,00	(10.977.288,00)	71,99
5 03	5-03.5-04.0-00.01	01	2.09	02	94.660.000,00	88.807.537,00	(5.842.463,00)	93,83
5 03	5-03.5-04.0-00.01	01	2.09	06	7.975.000,00	7.165.000,00	(810.000,00)	89,84
5 03	5-03.5-04.0-00.01	01	2.09	09	1.635.000,00	1.554.000,00	(81.000,00)	95,05
5 03	5-03.5-04.0-00.01	02	2.01		2.964.864.012,00	2.529.004.907,00	(375.199.105,00)	87,08
5 03	5-03.5-04.0-00.01	02	2.01		617.698.954,00	425.209.630,00	(192.409.324,00)	68,85
5 03	5-03.5-04.0-00.01	02	2.01	02	45.190.000,00	42.707.490,00	(2.451.610,00)	94,57
5 03	5-03.5-04.0-00.01	02	2.01	03	251.090.300,00	82.666.220,00	(168.390.080,00)	32,91
5 03	5-03.5-04.0-00.01	02	2.01	06	14.375.800,00	14.156.400,00	(225.400,00)	98,43
5 03	5-03.5-04.0-00.01	02	2.01	08	150.861.250,00	134.373.106,00	(16.488.144,00)	89,07
5 03	5-03.5-04.0-00.01	02	2.01	10	156.252.844,00	151.398.714,00	(4.854.090,00)	96,88
5 03	5-03.5-04.0-00.01	02	2.02		562.543.044,00	415.338.417,00	(146.804.587,00)	73,96
5 03	5-03.5-04.0-00.01	02	2.02	01	37.316.200,00	28.711.400,00	(8.604.800,00)	76,94
5 03	5-03.5-04.0-00.01	02	2.02	02	75.169.104,00	74.729.657,00	(439.447,00)	99,42
5 03	5-03.5-04.0-00.01	02	2.02	03	480.057.700,00	312.297.366,00	(137.760.340,00)	69,38
5 03	5-03.5-04.0-00.01	02	2.03		1.625.327.750,00	1.597.492.966,00	(27.834.784,00)	98,29
5 03	5-03.5-04.0-00.01	02	2.03	01	1.437.212.750,00	1.410.308.716,00	(18.904.034,00)	98,68
5 03	5-03.5-04.0-00.01	02	2.03	04	188.115.000,00	179.184.256,00	(8.930.750,00)	95,23
5 03	5-03.5-04.0-00.01	02	2.04		99.234.304,00	91.083.894,00	(8.150.410,00)	91,75
5 03	5-03.5-04.0-00.01	02	2.04	03	20.677.500,00	19.420.000,00	(856.500,00)	95,86
5 03	5-03.5-04.0-00.01	02	2.04	05	18.193.000,00	15.448.440,00	(2.744.560,00)	84,91
5 03	5-03.5-04.0-00.01	02	2.04	07	54.700.554,00	53.175.294,00	(1.525.260,00)	97,11
5 03	5-03.5-04.0-00.01	02	2.04	08	5.663.250,00	2.839.300,00	(3.023.950,00)	46,68
5 04					960.894.536,00	930.157.781,00	(30.706.755,00)	96,88
5 04	5-03.5-04.0-00.01	02			960.894.536,00	930.157.781,00	(30.706.755,00)	96,88
5 04	5-03.5-04.0-00.01	02	2.02		960.894.536,00	930.157.781,00	(30.706.755,00)	96,88
5 04	5-03.5-04.0-00.01	02	2.02	07	960.894.536,00	930.157.781,00	(30.706.755,00)	96,88

R.A



KODE	1	2	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN					REALISASI
			3	4	5			
5 05	5-01.5-05.0-00.01	02	377.871.000,00	309.866.173,00	(68.004.827,00)	81,95		
5 05	5-01.5-05.0-00.01		377.871.000,00	309.866.173,00	(68.004.827,00)	81,95		
5 05	5-01.5-05.0-00.01	02	377.871.000,00	309.866.173,00	(68.004.827,00)	81,95		
5 05	5-01.5-05.0-00.01	02	44.120.000,00	24.063.398,00	(20.056.602,00)	54,54		
5 05	5-01.5-05.0-00.01	02	44.120.000,00	24.063.398,00	(20.056.602,00)	54,54		
5 05	5-01.5-05.0-00.01	02	141.370.000,00	132.228.350,00	(9.141.650,00)	93,53		
5 05	5-01.5-05.0-00.01	02	141.370.000,00	132.228.350,00	(9.141.650,00)	93,53		
5 05	5-01.5-05.0-00.01	02	192.381.000,00	153.374.425,00	(39.006.575,00)	79,72		
5 05	5-01.5-05.0-00.01	02	192.381.000,00	153.374.425,00	(39.006.575,00)	79,72		
6			8.473.210.882,00	7.328.446.153,00	(1.144.764.729,00)	86,49		
6 01			8.473.210.882,00	7.328.446.153,00	(1.144.764.729,00)	86,49		
6 01	6-01.0-00.0-00.01		8.473.210.882,00	7.328.446.153,00	(1.144.764.729,00)	86,49		
6 01	6-01.0-00.0-00.01	01	7.268.724.882,00	6.790.406.531,00	(988.318.351,00)	87,28		
6 01	6-01.0-00.0-00.01	01	6.531.273.746,00	5.208.752.910,00	(622.520.836,00)	87,41		
6 01	6-01.0-00.0-00.01	01	6.531.273.746,00	5.208.752.910,00	(622.520.836,00)	87,41		
6 01	6-01.0-00.0-00.01	01	416.137.000,00	351.893.919,00	(64.243.081,00)	84,56		
6 01	6-01.0-00.0-00.01	01	386.700.000,00	326.964.329,00	(59.735.671,00)	84,55		
6 01	6-01.0-00.0-00.01	01	39.437.000,00	24.929.590,00	(14.507.410,00)	84,69		
6 01	6-01.0-00.0-00.01	01	337.926.000,00	313.044.653,00	(24.881.347,00)	92,64		
6 01	6-01.0-00.0-00.01	01	2.345.000,00	1.845.000,00	(500.000,00)	78,69		
6 01	6-01.0-00.0-00.01	01	90.900.000,00	82.486.382,00	(8.413.618,00)	90,74		
6 01	6-01.0-00.0-00.01	01	20.012.000,00	19.593.000,00	(419.000,00)	97,91		
6 01	6-01.0-00.0-00.01	01	14.594.000,00	14.285.400,00	(308.600,00)	97,89		
6 01	6-01.0-00.0-00.01	01	12.300.000,00	7.423.300,00	(4.876.700,00)	60,35		
6 01	6-01.0-00.0-00.01	01	197.775.000,00	187.411.571,00	(10.363.429,00)	94,76		
6 01	6-01.0-00.0-00.01	01	111.750.000,00	57.493.650,00	(54.256.350,00)	51,37		
6 01	6-01.0-00.0-00.01	01	111.750.000,00	57.493.650,00	(54.256.350,00)	51,37		
6 01	6-01.0-00.0-00.01	01	36.600.000,00	34.412.107,00	(2.187.893,00)	94,02		
6 01	6-01.0-00.0-00.01	01	1.396.000,00	953.000,00	(442.000,00)	68,26		
6 01	6-01.0-00.0-00.01	01	35.220.000,00	31.459.107,00	(3.760.893,00)	95,80		
6 01	6-01.0-00.0-00.01	01	335.037.936,00	314.600.292,00	(20.437.644,00)	93,99		

Handwritten initials/signature in the top right corner.

KODE		URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6		
6	01	6-01.0-00.0-00.01	2.09	01	36.880.400,00	(2.307.538,00)	94,11
6	01	6-01.0-00.0-00.01	2.09	01	75.400.000,00	(3.353.000,00)	95,55
6	01	6-01.0-00.0-00.01	2.09	01	1.200.000,00	(2.094.000,00)	35,19
6	01	6-01.0-00.0-00.01	2.09	01	11.110.000,00	(6.882.500,00)	47,65
6	01	6-01.0-00.0-00.01	2.09	01	204.137.936,09	(5.544.636,00)	97,29
6	01	6-01.0-00.0-00.01	2.01	02	515.775.600,00	(104.601.907,00)	79,72
6	01	6-01.0-00.0-00.01	2.01	02	472.017.600,00	(94.202.557,00)	80,04
6	01	6-01.0-00.0-00.01	2.01	02	121.354.000,00	(18.314.999,00)	85,15
6	01	6-01.0-00.0-00.01	2.01	02	84.901.600,00	(29.543.750,00)	65,20
6	01	6-01.0-00.0-00.01	2.01	02	1.630.000,00	(895.750,00)	76,70
6	01	6-01.0-00.0-00.01	2.01	02	56.838.000,00	(8.398.602,00)	85,22
6	01	6-01.0-00.0-00.01	2.01	02	131.467.000,00	(29.606.097,00)	77,48
6	01	6-01.0-00.0-00.01	2.01	02	71.827.000,00	(7.493.069,00)	89,57
6	01	6-01.0-00.0-00.01	2.02	02	93.768.000,00	(10.399.350,00)	76,23
6	01	6-01.0-00.0-00.01	2.02	02	31.428.000,00	(5.523.850,00)	82,42
6	01	6-01.0-00.0-00.01	2.02	02	12.330.000,00	(4.875.500,00)	60,46
6	01	6-01.0-00.0-00.01	03	03	188.710.600,00	(51.844.671,00)	72,53
6	01	6-01.0-00.0-00.01	03	03	108.710.600,00	(51.844.671,00)	72,53
6	01	6-01.0-00.0-00.01	2.02	03	16.321.000,00	(3.207.220,00)	80,35
6	01	6-01.0-00.0-00.01	2.02	03	78.030.000,00	(21.587.201,00)	72,33
6	01	6-01.0-00.0-00.01	03	03	94.359.600,00	(27.490.250,00)	71,33
7					46.163.552.461,00	(2.690.281.804,93)	94,16
7	01				46.163.552.461,00	(2.690.281.804,93)	94,16
7	01	7-01.0-00.0-00.01			17.091.427.559,00	(1.052.785.935,93)	93,84
7	01	7-01.0-00.0-00.01	01		10.887.230.098,00	(624.198.037,36)	94,27
7	01	7-01.0-00.0-00.01	01	2.01	130.228.000,00	(23.270.600,00)	83,17
7	01	7-01.0-00.0-00.01	01	2.01	130.228.000,00	(23.270.600,00)	83,17
7	01	7-01.0-00.0-00.01	01	2.02	9.163.965.794,00	(363.047.587,00)	96,05
7	01	7-01.0-00.0-00.01	01	2.02	9.163.965.794,00	(363.047.587,00)	96,05
7	01	7-01.0-00.0-00.01	01	2.05	23.000.000,00	(2.134.000,00)	91,46
<p><b>UNSUR KEWILAYAHAN</b></p> <p><b>Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)</b></p> <p><b>Kecamatan Mandiangin Kota Selayan</b></p> <p>Program Penyulung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota</p> <p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>							

11A

KODE			URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1			2		3	4	5	6
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.05	01	Pengadaan Pakuan Denis Bicara Akibat Kelangkaannya	25.000.000,00	22.865.000,00	(2.134.000,00)	91,46
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.06	01	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	474.858.400,00	445.997.547,00	(28.870.853,00)	91,92
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencarian Bangunan Kantor	14.069.500,00	13.752.000,00	(317.500,00)	97,74
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.06	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.594.050,00	91.944.650,00	(3.639.400,00)	96,19
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.06	01	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	52.713.850,00	44.646.800,00	(8.067.050,00)	84,70
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.06	01	Penyediaan Bahan Bahan dan Perabotan Perundang-undangan	11.770.000,00	8.360.000,00	(3.410.000,00)	71,03
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.06	01	Pemeliharaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.731.000,00	287.294.231,00	(13.436.769,00)	95,53
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.07	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.400.000,00	62.236.236,70	(5.163.763,30)	92,27
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.07	01	Pengadaan Mebel	52.490.000,00	52.268.790,00	(221.210,00)	99,60
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.07	01	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.07	01	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.090.000,00	9.967.446,70	(5.122.553,30)	66,45
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.08	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.220.000,00	103.278.285,00	(27.941.715,00)	78,71
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.980.000,00	6.820.000,00	(160.000,00)	97,71
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.530.000,00	96.018.703,00	(27.511.297,00)	77,73
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.08	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	710.000,00	409.582,00	(300.418,00)	57,83
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	896.457.904,00	692.738.394,94	(203.719.509,06)	77,27
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.790.000,00	161.968.971,00	(12.821.029,00)	92,69
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.09	01	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	31.455.000,00	24.233.200,00	(7.221.800,00)	77,04
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	660.232.994,00	506.536.313,94	(153.716.680,06)	76,72
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.01	02	Program Penyelenggaraan Pemertanian Dan Pelayaran Publik	1.687.299.694,00	1.514.961.374,60	(172.338.319,40)	89,79
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.01	02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertanian di Tingkat Kecamatan	1.610.338.790,00	1.439.035.670,60	(171.303.119,40)	89,36
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.01	02	Koordinasi/Sinergi Pemertanian dan Pelaksanaan Kegiatan Pemertanian dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	47.139.900,00	46.451.000,00	(688.900,00)	98,51
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.01	02	Penelitian Efektifitas Kegiatan Pemertanian di Tingkat Kecamatan	1.563.198.800,00	1.398.584.670,00	(164.614.130,00)	89,47
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemertanian yang Dilimpahkan kepada Camat	76.870.904,00	75.925.704,00	(945.200,00)	98,77
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemertanian yang terkait dengan Kementerian	76.870.904,00	75.925.704,00	(945.200,00)	98,77
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.432.458.802,00	4.193.488.763,43	(238.970.038,57)	94,61
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.01	03	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.194.250,00	13.704.750,00	(489.500,00)	93,01
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.01	03	Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pemertanian	14.194.250,00	13.704.750,00	(489.500,00)	93,01
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.02	03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	286.861.302,00	222.724.086,00	(64.137.216,00)	77,65
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.02	03	Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pemertanian	55.195.350,00	51.090.070,00	(4.105.280,00)	92,56
7 01	7-01.0-00.0-00.01	2.02	03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	677.667.602,00	628.710.266,00	(48.957.336,00)	92,78

KODE			URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)					
1			2			3			4		5		6	
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			REALISASI		(Rp)		(%)	
7	01	7-01.0-00.0-00.01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	54,000,400.00	42,923,950.00	(11,076,500.00)	79.48				
7	01	7-01.0-00.0-00.01	03	2.03		Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3,631,403,250.00	3,457,560,427.43	(173,842,822.57)	95.21				
7	01	7-01.0-00.0-00.01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	3,631,403,250.00	3,457,560,427.43	(173,842,822.57)	95.21				
7	01	7-01.0-00.0-00.01	04			Program Koordinasi Kelembagaan Dan Keterlibatan Umum	84,569,054.00	87,179,424.00	2,610,370.00	79.46				
7	01	7-01.0-00.0-00.01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kelembagaan dan Keterlibatan Umum	84,569,054.00	87,179,424.00	2,610,370.00	79.46				
7	01	7-01.0-00.0-00.01	04	2.01	01	Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	84,569,054.00	87,179,424.00	2,610,370.00	79.46				
7	01	7-01.0-00.0-00.02				<b>Kecamatan Guguk Panjang</b>	14,817,717,145.00	13,686,503,095.00	(1,131,214,100.00)	92.43				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,381,692,179.00	8,506,968,240.00	(874,723,939.00)	90.87				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,780,000.00	15,433,950.00	(84,346,050.00)	78.03				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,780,000.00	15,433,950.00	(84,346,050.00)	78.03				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,811,764,802.00	7,199,639,234.00	(612,125,568.00)	92.16				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,811,764,802.00	7,199,639,234.00	(612,125,568.00)	92.16				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	132,450,000.00	125,688,324.00	(6,761,676.00)	94.89				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	132,450,000.00	125,688,324.00	(6,761,676.00)	94.89				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,000,000.00	18,292,850.00	(11,707,150.00)	61.00				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Besor Attribut Kelembagaannya	30,000,000.00	18,292,850.00	(11,707,150.00)	61.00				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	514,595,750.00	444,640,196.00	(69,955,554.00)	86.41				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.06	01	Penyelesaian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,000,000.00	14,130,100.00	130,100.00	95.05				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.06	03	Penyelesaian Perawatan Rumah Tangga	80,000,000.00	28,202,500.00	(51,797,500.00)	35.25				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.06	04	Penyelesaian Bahan Logistik Kantor	94,600,000.00	90,012,850.00	(4,587,150.00)	95.10				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.06	05	Penyelesaian Barang Cetak dan Penggandaan	54,245,000.00	48,706,075.00	(5,538,925.00)	89.79				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.06	06	Penyelesaian Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	11,100,000.00	10,000,000.00	(1,100,000.00)	90.15				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	1,880,000.00	653,400.00	(1,226,600.00)	34.76				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257,791,000.00	252,895,271.00	(4,895,729.00)	98.10				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136,965,000.00	110,349,307.00	(26,615,693.00)	80.60				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,595,000.00	5,320,000.00	(275,000.00)	95.08				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131,490,000.00	105,029,307.00	(26,460,693.00)	79.93				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	846,190,617.00	592,924,459.00	(253,266,158.00)	69.90				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145,000,000.00	141,099,350.00	(3,900,650.00)	97.30				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,347,000.00	20,622,500.00	(13,724,500.00)	60.07				
7	01	7-01.0-00.0-00.02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	456,899,577.00	431,212,609.00	(25,686,968.00)	94.41				

219

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)			
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			REALISASI		(Rp)	
			1	2	3	4	5	6	
7 01	7-01.0-00.0-00.02	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.608.621.684,00	1.531.119.500,00	(77.502.184,00)	95,18		
7 01	7-01.0-00.0-00.02	02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.551.405.965,00	1.474.509.787,00	(76.896.178,00)	95,04		
7 01	7-01.0-00.0-00.02	02	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24.944.500,00	22.668.540,00	(2.276.000,00)	90,88		
7 01	7-01.0-00.0-00.02	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.526.456.465,00	1.451.841.287,00	(74.615.178,00)	95,11		
7 01	7-01.0-00.0-00.02	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	57.220.719,00	56.699.713,00	(521.006,00)	98,93		
7 01	7-01.0-00.0-00.02	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Noproporitas	57.220.719,00	56.699.713,00	(521.006,00)	98,93		
7 01	7-01.0-00.0-00.02	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.766.943.552,00	3.694.865.285,00	(72.078.267,00)	98,10		
7 01	7-01.0-00.0-00.02	03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	650.010.908,00	570.681.834,00	(79.329.074,00)	87,80		
7 01	7-01.0-00.0-00.02	03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	54.933.200,00	45.427.150,00	(9.506.050,00)	82,70		
7 01	7-01.0-00.0-00.02	03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	519.876.028,00	448.778.489,00	(71.097.539,00)	87,84		
7 01	7-01.0-00.0-00.02	03	Evaluasi Kelurahan	84.261.700,00	76.476.275,00	(7.785.425,00)	90,83		
7 01	7-01.0-00.0-00.02	03	Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.136.932.664,00	3.094.123.471,00	(42.809.193,00)	98,72		
7 01	7-01.0-00.0-00.02	03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	3.125.887.664,00	3.025.323.471,00	(100.564.193,00)	96,78		
7 01	7-01.0-00.0-00.02	03	Facilitas Pemertanian Teknologi Tepat Guna	11.045.000,00	8.800.000,00	(2.245.000,00)	79,67		
7 01	7-01.0-00.0-00.02	04	Program Koordinasi Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum	60.479.750,00	53.590.000,00	(6.889.750,00)	88,61		
7 01	7-01.0-00.0-00.02	04	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	60.479.750,00	53.590.000,00	(6.889.750,00)	88,61		
7 01	7-01.0-00.0-00.02	04	Serengas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tenaga Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60.479.750,00	53.590.000,00	(6.889.750,00)	88,61		
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	<b>Kecamatan Air Birupa Tiga Buleh</b>	14.154.387.750,00	13.678.126.189,00	(476.261.560,00)	96,36		
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.932.313.688,00	9.479.542.802,00	(452.770.886,00)	95,45		
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.434.304,00	33.434.304,00	0,00	100,00		
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	Pemertanian Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	33.434.304,00	33.434.304,00	0,00	100,00		
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.368.318.006,00	8.013.149.171,00	(355.168.835,00)	95,76		
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	Penyediaan Jasa dan Tenaga ASN	8.368.318.006,00	8.013.149.171,00	(355.168.835,00)	95,76		
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	Administrasi Binaing Milis Daerah pada Perangkat Daerah	157.450.000,00	146.590.651,00	(10.859.349,00)	93,10		
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	Pengawasan Binaing Milis Daerah SKPD	157.450.000,00	146.590.651,00	(10.859.349,00)	93,10		
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.150.000,00	19.382.150,00	(1.767.850,00)	91,70		
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alat-alat Kelengkapannya	21.150.000,00	19.382.150,00	(1.767.850,00)	91,70		
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.015.362,00	445.389.629,00	(16.625.733,00)	96,44		
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.252.000,00	8.252.000,00	0,00	100,00		
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.726.000,00	74.941.360,00	(784.640,00)	98,96		

K. H

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)				
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			REALISASI				
		3	4	5	(Rp)	(%)			
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian	40.514.250,00	38.371.330,00	(2.142.920,00)	94,71
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bagan dan Peralatan Penunjang-anggaran	9.770.000,00	8.120.000,00	(1.650.000,00)	83,11
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	2.06	08	Fasilitas Kurjungan Tams	804.000,00	671.200,00	(132.800,00)	83,46
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	2.06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326.949.142,00	315.233.730,00	(11.715.403,00)	96,42
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.050.000,00	79.370.288,00	(21.679.712,00)	78,25
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.050.000,00	79.070.288,00	(21.979.712,00)	78,25
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.200.000,00	106.777.789,00	(24.422.211,00)	81,39
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.600.000,00	105.177.789,00	(24.422.211,00)	81,16
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	637.695.356,00	636.148.820,00	(1.546.536,00)	96,72
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.500.000,00	151.018.402,00	(4.481.598,00)	97,12
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.721.501,00	36.405.310,00	(316.191,00)	99,14
7 01	7-01.0-00.0-00.03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	465.473.855,00	448.724.808,00	(16.748.977,00)	96,46
7 01	7-01.0-00.0-00.03	02	2.01		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.282.700.858,00	1.271.242.608,00	(11.458.250,00)	99,13
7 01	7-01.0-00.0-00.03	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.195.999.000,00	1.186.018.250,00	(9.980.750,00)	99,17
7 01	7-01.0-00.0-00.03	02	2.01	01	Koordinasi/Sejaji Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Lembaga Vertikal Tertentu	31.765.250,00	29.846.750,00	(1.918.500,00)	93,96
7 01	7-01.0-00.0-00.03	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.164.233.750,00	1.156.171.500,00	(8.062.250,00)	99,31
7 01	7-01.0-00.0-00.03	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	86.199.858,00	85.224.358,00	(975.500,00)	98,64
7 01	7-01.0-00.0-00.03	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Masyarakat	86.199.858,00	85.224.358,00	(975.500,00)	98,64
7 01	7-01.0-00.0-00.03	03	2.02		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.898.657.817,00	2.846.460.821,00	(52.196.991,00)	98,20
7 01	7-01.0-00.0-00.03	03	2.02	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	659.106.178,00	629.992.877,00	(29.113.461,00)	95,55
7 01	7-01.0-00.0-00.03	03	2.02	06	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	82.169.650,00	74.317.580,00	(8.852.070,00)	90,22
7 01	7-01.0-00.0-00.03	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	563.873.628,00	542.710.197,00	(21.163.431,00)	96,25
7 01	7-01.0-00.0-00.03	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	11.861.000,00	12.965.100,00	1.104.100,00	109,25
7 01	7-01.0-00.0-00.03	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.239.351.534,00	2.216.467.944,00	(22.883.590,00)	98,98
7 01	7-01.0-00.0-00.03	03	2.03	02	Peningkatan Kapabilitas Lembaga Kemasyarakatan	2.239.351.534,00	2.216.467.944,00	(22.883.590,00)	98,98
7 01	7-01.0-00.0-00.03	04			Program Koordinasi Keterlaksanaan Dan Keterlaksanaan Umum	81.018.000,00	80.479.958,00	(538.042,00)	99,34
7 01	7-01.0-00.0-00.03	04	2.01		Koordinasi Ubiaya Penyelenggaraan Keterlaksanaan dan Keterlaksanaan Umum	81.018.000,00	80.479.958,00	(538.042,00)	99,34
7 01	7-01.0-00.0-00.03	04	2.01	06	Sinergitas dengan Kopolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	81.018.000,00	80.479.958,00	(538.042,00)	99,34
8	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>					5.834.098.226,00	4.875.176.958,00	(958.922.168,00)	83,56

8. A

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			REALISASI	(Rp)	(%)
		3	4	5			
5 01		5,814,098,236,00	4,875,176,058,00	(938,922,168,00)	83,56		
5 01	Kecamatan Bangoe dan Politik	5,814,098,236,00	4,875,176,058,00	(938,922,168,00)	83,56		
5 01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1,960,948,200,00	1,714,932,687,00	(246,015,513,00)	87,45		
5 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,490,000,00	5,660,300,00	(829,700,00)	87,22		
5 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,490,000,00	5,660,300,00	(829,700,00)	87,22		
5 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,564,647,600,00	1,364,370,742,00	(200,276,858,00)	87,28		
5 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,564,647,600,00	1,364,370,742,00	(200,276,858,00)	87,28		
5 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	276,472,000,00	238,505,172,00	(37,966,828,00)	86,27		
5 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	764,000,00	534,000,00	(230,000,00)	69,50		
5 01	Penyediaan Komponen Instalasi/Perengkapan Bangunan Kantor	132,300,000,00	112,434,000,00	(19,866,000,00)	84,96		
5 01	Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	11,510,000,00	10,095,600,00	(1,414,400,00)	87,71		
5 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,593,000,00	7,995,000,00	(598,000,00)	93,04		
5 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,701,000,00	4,956,500,00	(2,744,500,00)	63,06		
5 01	Facilitas Kunjungan Tamu	115,694,000,00	102,590,072,00	(13,103,928,00)	88,74		
5 01	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31,400,000,00	27,649,627,00	(3,750,373,00)	88,06		
5 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,400,000,00	1,400,000,00	0,00	100,00		
5 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30,000,000,00	26,249,627,00	(3,750,373,00)	87,59		
5 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81,938,600,00	78,746,846,00	(3,191,754,00)	96,19		
5 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27,700,000,00	26,988,175,00	(711,825,00)	97,42		
5 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	4,940,000,00	4,255,000,00	(685,000,00)	86,13		
5 01	Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49,238,600,00	48,502,671,00	(735,929,00)	98,39		
5 01	Pemeliharaan Peralkatan dan Mesin Lainnya	269,360,000,00	114,695,908,00	(154,670,092,00)	42,58		
5 01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	269,360,000,00	114,695,908,00	(154,670,092,00)	42,58		
5 01	Program Pengurusan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	235,850,000,00	99,329,708,00	(136,520,292,00)	42,12		
5 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	31,510,000,00	15,360,200,00	(16,149,800,00)	48,84		
5 01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	2,550,514,392,00	2,186,789,477,00	(363,724,915,00)	85,74		
5 01	Program Peningkatan Papan Partisipasi Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2,550,514,392,00	2,186,789,477,00	(363,724,915,00)	85,74		
5 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebangkitan Pemerintahan, Peningkatan dan Partisipasi Politik, Pemeliharaan Umum/Pemeliharaan Kepala Daerah, serta Pemertanian Situasi Politik						

R.A







**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH AUDITED**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	132.987.559.855,90	96.386.020.235,06
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan	132.979.000.890,90	94.377.077.512,75
<b>Sub Total</b>	<b>8.558.965,00</b>	<b>5.008.948.722,33</b>
Sisa Lebih/Kurang Pembayaran Anggaran (SILPA/SUKPA)	77.322.187.688,46	132.987.559.855,90
<b>Sub Total</b>	<b>77.330.746.653,46</b>	<b>137.996.508.578,23</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(8.558.965,00)	(5.008.948.722,33)
Lain-lain	0,00	0,00
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>77.322.187.688,46</b>	<b>132.987.559.855,90</b>

Bukittinggi, 16 Agustus 2023

WALIKOTA BUKITTINGGI

ERMAN SAFAR



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**LAPORAN OPERASIONAL AUDITED**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
7	<b>PENDAPATAN - LO</b>	703.466.188.835,22	1.001.362.252.732,94	(297.896.063.897,72)	(29,75)
7.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	127.187.243.766,85	108.116.129.314,99	19.071.114.441,91	17,64
7.1.1	Pajak Daerah-LO	50.506.989.501,00	41.921.194.046,00	8.585.795.555,00	20,48
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	44.985.091.121,00	35.295.201.072,00	9.689.890.049,00	27,45
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Diizinkan-LO	8.363.943.874,00	6.983.284.173,00	1.380.559.701,00	19,77
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	23.331.319.170,85	23.916.450.633,94	(585.130.863,09)	(2,45)
7.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>	565.023.737.353,00	590.328.142.941,00	(25.304.405.588,00)	(4,29)
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	534.420.515.362,00	558.403.516.783,00	(24.063.001.421,00)	(4,31)
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	30.603.221.991,00	31.844.026.158,00	(1.241.404.167,00)	(3,80)
7.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO</b>	11.255.207.715,37	302.917.980.467,00	(291.662.772.751,63)	(96,26)
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	11.017.620.258,00	299.831.351.937,00	(288.793.731.679,00)	(96,32)
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sosial dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	217.587.457,37	3.086.628.530,00	(2.869.041.072,63)	(92,95)
8	<b>BEBAN</b>	717.416.678.246,04	558.490.138.784,82	158.926.539.461,22	8,95
8.1.1	Beban Pegawai	303.024.268.021,66	300.840.522.762,25	2.183.745.259,41	0,73
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	266.753.034.390,65	243.565.319.662,73	23.187.714.727,92	9,52
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	2.910.985.266,00	0,00	2.910.989.266,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	40.192.987.711,16	21.827.207.817,43	18.365.779.893,73	91,15
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	2.290.000.000,00	1.980.800.000,00	309.200.000,00	112,04
8.1.7	Beban Penyisihan Rutang	3.469.490.061,00	5.663.113.272,30	(2.193.623.211,30)	(38,74)
8.1.8	Beban Lain-lain	8.514.568.496,57	8.025.321.297,10	489.247.199,47	6,10
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	38.068.103.188,00	29.407.257.974,90	8.660.845.214,00	25,45
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.672.937.674,00	20.574.024.759,84	(1.901.087.085,84)	(9,24)
8.2.3	Beban Penyusutan Jaban, Jembatan dan Infaq	24.548.286.473,00	26.678.520.765,17	(2.130.234.292,17)	(7,98)
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	26.715.440,00	(26.715.440,00)	(100,00)
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	651.012.964,00	1.502.026.826,00	(851.013.862,00)	(77,98)

119  
8

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KEMAIKAN/ (PENURUMAN)	(%)
B.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.2	Beban Bantuan Keuangan	8.520.000,000,00	0,00	8.520.000.000,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	(13.950.499.431,82)	342.872.113.948,12	(256.822.603.350,94)	(104,07)
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
7.4.1	Surplus Perjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyiswaan Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Perjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	208.740.226,00	335.345.363,16	(126.605.137,16)	(37,75)
8.5.2	Defisit Penyiswaan Kewajiban Jangka Panjang-LO	916.082.674,71	503.905.132,00	412.177.542,71	81,80
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	(1.124.522.900,71)	(839.250.495,16)	(285.272.405,55)	33,99
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	(15.075.012.311,53)	342.832.863.452,26	(357.107.875.764,49)	(104,41)
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(15.075.012.311,53)	342.832.863.452,26	(357.107.875.764,49)	(104,41)

WALIKOTA Bukittinggi, 16 Agustus 2023  
**WALIKOTA BUKITTINGGI**  
  
**GERMAN SAFAR**



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS AUDITED**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	2.040.816.158.974,56	1.687.944.342.615,61
SURPLUS/DEFISIT-LO	(15.075.012.311,53)	342.032.863.452,96
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	7.280.885.632,60	10.838.952.901,99
EKUITAS AKHIR	2.033.022.032.295,63	2.040.816.158.974,56

Bukittinggi, 16 Agustus 2023

**WALIKOTA BUKITTINGGI**



**ERMAN SAFAR**



**NERACA AUDITED**  
**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Kas Daerah	63.691.297.145,77	126.122.416.542,07
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	17.754.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.020.824,00	1.625.443.351,00
Kas di BLUD	12.610.034.870,69	3.081.996.359,83
Kas Dana BOS	1.014.071.646,00	2.139.959.623,00
Kas Dana Kapitasi pada PKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas BOP	202,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	14.306.957.898,00	13.321.325.891,00
Piutang Retribusi Daerah	12.046.237.364,00	14.565.925.763,00
Piutang Hasil Penghasilan Kelayaan Daerah yang Dipisahkan	8.363.843.874,00	6.641.291.925,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.632.545.459,00	8.361.251.441,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	3.849.825,00
Piutang Transfer Antar Daerah	3.781.987.835,00	4.209.749.129,00
Piutang Lainnya	246.316.601,00	273.917.045,00
Penyisihan Piutang	(22.628.706.000,00)	(20.303.567.450,60)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Perediaan	7.525.720.925,49	9.133.430.432,16
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>105.597.334.644,95</b>	<b>169.194.733.756,46</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergilir	635.298.884,95	661.844.211,48
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>635.298.884,95</b>	<b>661.844.211,48</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	61.560.485.842,52	51.171.606.882,89
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>61.560.485.842,52</b>	<b>51.171.606.882,89</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>62.195.784.727,47</b>	<b>51.833.451.094,17</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	566.289.788.505,20	566.206.588.505,20
Peralatan dan Mesin	406.665.021.112,66	346.346.890.953,31
Gedung dan Bangunan	1.004.338.760.735,96	960.588.776.351,51
Jalan, Jembatan, dan Irigasi	672.744.182.570,34	623.922.585.555,15
Aset Tetap Lainnya	31.169.875.091,80	30.677.775.197,80
Konstruksi Dalam Persewaan	37.618.883.121,17	65.149.636.115,64
Akumulasi Penyusutan	(863.023.432.720,00)	(784.029.504.007,37)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.855.803.078.417,13</b>	<b>1.808.865.746.671,24</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Jangka Panjang	56.959.498,00	48.400.533,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	16.246.002.000,00	16.360.038.000,00
Aset Tidak Berwujud	8.352.406.731,00	8.170.357.401,00
Aset Lain-lain	2.672.835.677,00	4.746.796.227,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(7.418.832.774,00)	(6.986.819.810,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	1.849.463.625,00	0,00

URAIAN	2022	2021
JUMLAH ASET LAINNYA	21.758.833.807,00	22.358.975.351,00
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.045.355.031.596,55</b>	<b>2.052.152.906.872,87</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	237.000,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	999.500.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka	430.564.800,67	379.525.936,67
Utang Belanja	11.237.720.549,25	9.522.213.050,64
Utang Jangka Pendek Lainnya	664.476.951,00	535.508.911,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>12.332.999.300,92</b>	<b>11.436.747.898,31</b>
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>12.332.999.300,92</b>	<b>11.436.747.898,31</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	2.033.022.032.295,63	2.040.815.158.974,56
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>2.045.355.031.596,55</b>	<b>2.052.152.906.872,87</b>

Bukittinggi, 16 Agustus 2023  
**WALIKOTA BUKITTINGGI**  
  
**ERMAN SAFAR**



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**LAPORAN ARUS KAS AUDITED**

Per 31 Desember 2022 dan 2021

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Bukittinggi

Nomor : 3 Tahun 2023

Tanggal : 16 Agustus 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pajak Daerah	49.570.750.398,00	40.765.025.893,00
Retribusi Daerah	46.662.398.969,00	27.401.880.331,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.641.291.925,00	5.462.031.608,00
Lain-lain PAD yang Sah	27.886.583.891,85	17.994.114.585,61
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	532.574.902.562,00	561.086.880.504,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.812.971.120,00	32.675.257.234,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	217.587.457,37	3.086.628.530,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<i>694.366.486.323,22</i>	<i>688.491.818.685,61</i>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	301.384.096.541,66	191.036.056.141,25
Belanja Barang dan Jasa	264.544.058.412,28	202.176.372.062,43
Belanja Subsidi	2.910.989.266,00	0,00
Belanja Hibah	40.192.987.711,16	15.024.545.864,43
Belanja Bantuan Sosial	2.230.000.000,00	1.080.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	271.437.350,00	1.844.107.190,00
Belanja Bantuan Keuangan	8.520.000.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<i>620.053.569.281,10</i>	<i>411.161.081.258,11</i>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>79.312.917.042,12</b>	<b>277.330.737.427,50</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Aset Lainnya	35.900.000,00	143.235.798,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	26.758.453,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<i>35.900.000,00</i>	<i>169.994.251,00</i>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.131.479.720,00	30.066.387.660,80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.739.508.574,06	12.970.244.501,62
Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	45.500.951.384,50	24.149.072.116,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.633.690.366,00	389.627.390,00
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<i>134.005.630.244,56</i>	<i>67.555.331.668,44</i>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(133.969.730.244,56)</b>	<b>(67.385.339.447,44)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan PPK	47.860.974.563,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<i>47.860.974.563,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran PPK	47.860.737.563,00	0,00
Koreksi SLPA	8.558.965,00	5.008.948.722,33
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<i>47.869.296.528,00</i>	<i>5.008.948.722,33</i>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>(8.321.965,00)</b>	<b>(5.008.948.722,33)</b>
<b>Kenaikan / (Penurunan) Kas</b>	<b>(55.665.135.167,44)</b>	<b>204.936.449.257,73</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>132.987.559.855,90</b>	<b>(77.170.835.364,66)</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>77.322.424.688,46</b>	<b>127.765.613.893,07</b>
<b>Kas di BLUD</b>	<b>12.610.034.870,69</b>	<b>3.081.986.359,83</b>
<b>Kas Dana BOS</b>	<b>1.014.071.646,00</b>	<b>2.139.959.603,00</b>
<b>Kas Dana Kapitasi pada FKTP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kas Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Setara Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kas BOP</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran &amp; Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>62.698.217.049,77</b>	<b>222.067.839.898,90</b>

Bukittinggi, 16 Agustus 2023  
**WALIKOTA BUKITTINGGI**  
  
**ERMAN SAFAR**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.*

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, adalah suatu ungkapan puji dan syukur kepada sang pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pembolak balik hati, pemberi semua nikmat yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang. Sehingga dengan anugerah dan karuniaNya kepada semua tim yang terlibat beserta keluarga masing-masing, sehingga kami mampu menunaikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2022 dengan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku.

Tidak lupa juga kami persembahkan selalu shalawat serta salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan semua ummatnya yang selalu istiqomah sampai akhir zaman, semoga kelak kita diberikan syafaat oleh beliau sebagai ganjaran banyak bershalawat dan keterikatan hati dengan beliau..

Sesuai dengan amanat konstitusional kepala daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara prinsip penyusunan laporan keuangan ini wajib dilakukan yakni berbunyi LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK guna dilakukan pemeriksaan (audit) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan ini adalah laporan keuangan konsolidasian, yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal yakni Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

Konsolidasi sebagai proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dengan mengeliminasi akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu pelaporan entitas tunggal adalah jalan untuk mendapatkan laporan keuangan gabungan.

Dalam hal ini laporan keuangan ini merupakan konsolidasian dari 28 (dua puluh delapan) OPD/SKPD, yang merupakan entitas akuntansi dan juga pelaporan yang berada dalam lingkup entitas pelaporan yang lebih besar yaitu Pemerintah Kota Bukittinggi.

Laporan yang disajikan oleh OPD/SKPD sebagai entitas pelaporan terdiri dari 5 (lima) laporan yaitu (1) Laporan Realiasi Anggaran (LRA), (2) Neraca, (3) Laporan Operasional (LO), (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan menggunakan kaidah-kaidah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. 15



Kemudian Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai entitas pelaporan yang lebih besar melakukan penggabungan/ konsolidasian, sehingga 7 (tujuh) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (6) Laporan Arus Kas (LAK) dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022, LKPD ini disusun oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku setelah paling lama 2 (dua) bulan BPK RI melakukan serangkaian pemeriksaan, BPK RI memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi nantinya.

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan beserta laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk dapat memberikan informasi serta pengungkapan yang memadai (*full disclosure*) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi kedepannya.

*Wabillahi taufiq wal hidayah*

*Wassalamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.*

Bukittinggi, 16 Agustus 2023  
WALIKOTA BUKITTINGGI  
  
PRIMA SAFAR

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB WALIKOTA</b> .....	
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	
II. RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI .....	
III. RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.....	
IV. REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN.....	
V. REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA .....	
VI. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH .....	
VII. LAPORAN ARUS KAS .....	
VIII. LAPORAN OPERASIONAL .....	
IX. NERACA.....	
X. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	
XI. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB.....	
<b>BAB I INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI</b>	
1.1 Umum .....	1
1.2 Domisili dan Bentuk Geografis.....	2
1.3 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	4
1.4 Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan .....	7
1.5 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	8
1.6 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	10
<b>BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN</b>	
2.1 Kebijakan Keuangan Fiskal.....	13
2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro .....	30

2.3 Penetapan APBD, Pergeseran serta Perubahan APBD APBD Tahun 2022.....	41
--	----

### **BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	43
3.2 Hambatan/Kendala Dan Faktor Pendukung Dalam Pencapaian Target Kinerja.....	51

### **BAB IV DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI**

4.1 Struktur Laporan Keuangan.....	52
4.2 Kebijakan Konversi.....	55
4.3 Asumsi Dasar Akuntansi.....	56
4.4 Pengguna Laporan Keuangan.....	57
4.5 Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan.....	57
4.6 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyajian Laporan Keuangan.....	59
4.7 Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian.....	60
4.7.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	60
4.7.2 Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan Dan Andal.....	60
4.7.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	61
4.7.4 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan.....	61
4.7.5 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan.....	62
4.8 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	62
4.8.1 Akuntansi Anggaran.....	62
4.8.2 Akuntansi Pendapatan LRA.....	62
4.8.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	63
4.8.4 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan.....	63
4.8.5 Akuntansi Pendapatan LO.....	64
4.8.6 Akuntansi Beban.....	66
4.8.7 Aset.....	67
4.8.8 Kewajiban.....	87
4.8.9 Ekuitas.....	91
4.8.10 Badan Layanan Umum Daerah.....	91

### **BAB V.PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan.....	94
5.1.1 Pendapatan Daerah.....	98
5.1.2 Belanja Daerah.....	108
5.1.3 Surplus / Defisit.....	121

279

5.1.4	Pembiayaan Daerah.....	115
5.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....	123
5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih .....	125
5.3	Neraca.....	127
5.3.1	Aset.....	127
5.3.2	Kewajiban .....	222
5.3.4	Ekuitas.....	236
5.4	Laporan Operasional.....	236
5.4.1	Pendapatan - LO.....	238
5.4.2	Beban LO .....	252
5.5	Laporan Arus Kas .....	264
5.5.1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi.....	266
5.5.2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi.....	267
5.5.3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan / Pembiayaan .....	268
5.5.4	Kenaikan/Penurunan Kas.....	269
5.6	Laporan Perubahan Ekuitas.....	271
<b>BAB VI INFORMASI LAINNYA</b>		
6.1	Aset (Tanah) dalam Penelusuran .....	272
6.2	Kewajiban Kontingensi.....	273
6.3	Kebijakan Pengelolaan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022 Untuk Penanggulangan dan Penanganan Pandemi COVID.....	276
6.4	Informasi Dana Aset Yang Bersumber dari Dana Non APBD Kota Bukittinggi.....	291
6.5	Kebijakan / Pembatasan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Selama Tahun 2022 .....	293
6.6	Informasi Sengketa Tanah untuk Pembangunan Gedung DPRD Kota Bukittinggi .....	293

&

**BAB VII PENUTUP**

19

## DAFTAR TABLE

Tabel 1.2.1	Jarak Kota Bukittinggi dengan Kota-Kota di Sumatera .....	2
Tabel 1.2.2	Jumlah Kelurahan, Luas dan Persentase Daerah dan posisi Geografis per Menurut Kecamatan.....	3
Tabel 1.3.1	Daftar SKPD Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022.....	4
Tabel 2.1.1	Perubahan Target Makro Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.....	16
Tabel 2.1.2	Perubahan Target Pendapatan Tahun Anggaran 2022.....	17
Tabel 2.1.3	Perubahan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2022.....	20
Tabel 2.1.4	Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022.....	22
Tabel 2.1.2.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 s.d Tahun 2023.....	27
Tabel 2.1.3.1	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 s.d 2022 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023.....	29
Tabel 2.2.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi .....	32
Tabel 2.2.3.1	Indek Gini Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2022 .....	35
Tabel 2.2.5.1	Penduduk Miskin Kota Bukittinggi.....	38
Tabel 2.2.6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2018 s.d 2022.....	39
Tabel 2.2.7.1	Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2022 .....	40
Tabel 3.1.1	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 dan 2021.....	44
Tabel 3.1.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	48
Tabel 3.1.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	50
Tabel 4.8.7.1	Kapitalisasi Aset Tetap .....	73
Tabel 4.8.10.1	UPTD yang telah Menerapkan PPK BLUD .....	92
Tabel 5.1.1	Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun 2022.....	95
Tabel 5.1.2	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2021.....	97
Tabel 5.1.1.1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2021 .....	98
Tabel 5.1.1.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2021.....	99
Tabel 5.1.1.3	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021.....	100
Tabel 5.1.1.4	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021 .....	101
Tabel 5.1.1.5	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2002 dan 2021 .....	102
Tabel 5.1.1.6	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021 .....	103
Tabel 5.1.1.7	Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan 2021 .....	104
Tabel 5.1.1.8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan 2021.....	100
Tabel 5.1.1.9	Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2021 .....	105
Tabel 5.1.1.10	Dana Insentif Daerah Tahun 2022 dan 2021.....	106
Tabel 5.1.1.11	Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 dan 2021 .....	106
Tabel 5.1.1.14	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021 ....	107
Tabel 5.1.1.15	Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan dan Organisasi Tahun 2022 dan 2021.....	107

R 19

Tabel 5.1.1.16	Realisasi Belanja Berdasarkan Keselarasan dan Keterpaduan Urutan Pemerintah dan Fungsi Tahun 2022 dan 2021 .....	110
Tabel 5.1.1.17	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2021 .....	113
Tabel 5.1.2.1	Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021 .....	113
Tabel 5.1.2.2	Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021 .....	114
Tabel 5.1.2.3	Belanja Barang dan Jasa .....	115
Tabel 5.1.2.3.1	Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 dan 2021 .....	115
Tabel 5.1.2.4	Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 dan 2021 .....	116
Tabel 5.1.2.5	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 .....	117
Tabel 5.1.2.6	Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021 (Menurut Jenis Belanja) .....	118
Tabel 5.1.2.7	Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 (Menurut Jenis Belanja) .....	120
Tabel 5.1.2.8	Rincian SiLPA Tahun 2022 .....	123
Tabel 5.3.1.1	Daftar Saldo Kas di Rekening Kas Daerah .....	128
Tabel 5.3.1.2	Mutasi Kas Bendahara BLUD Tahun 2022 .....	132
Tabel 5.3.1.3	Saldo Kas Tunai dan Bank Pada bendahara BLUD .....	132
Tabel 5.3.1.4	Mutasi Kas Pada bendahara BOS Sekolah Negeri Tahun 2022 .....	133
Tabel 5.3.1.5	Saldo Kas Tunai dan Bank Pada Bendahara BOS Sekolah Negeri .....	136
Tabel 5.3.1.6	Sisa Kas Dana BOS Sekolah Swasta .....	138
Tabel 5.3.1.7	Sisa Kas Dana BOS PAUD Swasta .....	140
Tabel 5.3.1.8	Sisa Kas Dana BOS Kesetaraan .....	144
Tabel 5.3.4	Penyajian Piutang Pada Neraca Tahun 2022 dan 2021 .....	144
Tabel 5.3.5	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2022 .....	145
Tabel 5.3.6	Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2022 .....	146
Tabel 5.3.7	Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2022 .....	147
Tabel 5.3.8	Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2022 .....	150
Tabel 5.3.9	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2022 .....	150
Tabel 5.3.11	Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 .....	152
Tabel 5.3.12	Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 .....	157
Tabel 5.3.13	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 .....	159
Tabel 5.3.15	Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2021 .....	161
Tabel 5.3.17	Piutang Lainnya Tahun 2022 .....	162
Tabel 5.3.18	Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2022 .....	163
Tabel 5.3.19	Persediaan Per SKPD Tahun 2022 dan 2021 .....	164
Tabel 5.3.20	Persediaan Per Jenis Barang Tahun 2022 .....	165
Tabel 5.3.4.15	Daftar Posisi Pinjaman Dana Bergulir Per Kecamatan Tahun 2022 .....	167
Tabel 5.3.4.16	Pinjaman Berdasarkan Umur Pinjaman Tahun 2022 .....	168
Tabel 5.3.4.17	Penyisihan Pinjaman Tahun 2022 .....	170
Tabel 5.3.4.18	Kas Bendahara dan Bank Tahun 2022 .....	172
Tabel 5.3.4.19	Simpanan Anggota Kelompok Dana Bergulir Tahun 2022 .....	173
Tabel 5.3.4.20	Kondidi Kelompok UEM-SP di Bukittinggi Tahun 2022 .....	174
Tabel 5.3.4.21	Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 .....	177
Tabel 5.3.4.22	Perhitungan Equity Method untuk Investasi Pemko Bukittinggi Pasa PT.BPRS Jam Gadang Perseroda Tahun 2022 .....	180
Tabel 5.3.21	Kelompok Aset Tetap .....	187
Tabel 5.3.22	Rekap Data Aset Tetap Tanah Per SKPD .....	188
Tabel 5.3.24	Daftar Aset Tanah yang Masih Dalam Penelusuran .....	189
Tabel 5.3.25	Daftar Kendaraan Dinas yang dimanfaatkan pihak lain Tahun 2022 .....	198
Tabel 5.3.26	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan .....	199

8 19

Tabel 5.3.27	Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan.....	204
Tabel 5.3.28	Rincian Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya.....	207
Tabel 5.3.29	Rincian Aset Tetap – Konstruksi dalam Pengerjaan .....	209
Tabel 5.3.30	Akumulasi Penyusutan Aset tetap.....	210
Tabel 5.3.48	Mutasi Tagihan Jangka Panjang Tahun 2022 .....	212
Tabel 5.3.48	Aset Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah dilaksanakan Kerjasama Pemanfaatan Aset dalam Bentuk Bangun Guna Serah (BGS) ....	213
Tabel 5.3.49	Daftar Kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Pihak Ketiga di Pertokoan Pasar Simpang Aur.....	214
Tabel 5.3.50	Daftar Pemegang Sertifikat HGB di atas HPL di Pertokoan Pasar Simpang Aur.....	196
Tabel 5.3.2.1	Kewajiban Tahun 2022 .....	222
Tabel 5.3.2.2	Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2022.....	222
Tabel 5.3.2.4	Daftar Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka .....	224
Tabel 5.3.2.5	Daftar Mutasi Utang Belanja Pegawai Tahun 2022 .....	225
Tabel 5.3.2.6	Daftar Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022.....	228
Tabel 5.3.2.7	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022.....	230
Tabel 5.3.2.8	Daftar Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022 .....	232
Tabel 5.3.2.9	Daftar Utang Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022.....	233
Tabel 5.3.3.30	Daftar Mutasi Utang Kelebihan Transfer Tahun 2022 .....	234
Tabel 5.4.1	Realisasi Laporan Operasional Tahun 2022 .....	237
Tabel 5.4.1.1	Kegiatan Operasional Tahun 2022.....	238
Tabel 5.4.1.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022.....	239
Tabel 5.4.1.3	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022.....	240
Tabel 5.4.1.4	Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak-LO dengan LRA Tahun 2022 ....	240
Tabel 5.4.1.5	Rincian Selisih Pendapatan Pajak-LRA dengan LO Tahun 2022.....	241
Tabel 5.4.1.6	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 .....	242
Tabel 5.4.1.7	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Per SKPD Tahun 2022.....	242
Tabel 5.4.1.8	Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LRA dan LO Tahun 2022....	244
Tabel 5.4.1.9	Perbandingan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 .....	245
Tabel 5.4.1.10	Realisasi Lain – lain PAD yang Sah LO dan LRA Tahun 2022.....	246
Tabel 5.4.1.11	Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022.....	248
Tabel 5.4.1.12	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2022 .....	249
Tabel 5.4.1.13	Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah LO Tahun 2022.....	250
Tabel 5.4.1.14	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 .....	251
Tabel 5.4.1.15	Beban Tahun 2022 .....	252
Tabel 5.4.1.16	Beban Pegawai Tahun 2022 .....	253
Tabel 5.4.1.17	Beban Persediaan Tahun 2022.....	255
Tabel 5.4.1.18	Beban Jasa Tahun 2022.....	256
Tabel 5.4.1.19	Beban Pemeliharaan Tahun 2022.....	258
Tabel 5.4.1.20	Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 .....	259
Tabel 5.4.1.21	Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2022.....	260
Tabel 5.4.1.22	Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 .....	261
Tabel 5.4.1.23	Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 .....	261
Tabel 5.4.1.24	Beban Penyusutan Tahun 2022.....	262
Tabel 5.4.1.25	Beban Non Operasional Tahun 2022 .....	263
Tabel 5.5.1	Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2022 dan 2021 .....	264

Tabel 5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Operasi .....	266
Tabel 5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Investasi.....	268
Tabel 5.5.4	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris .....	269
Tabel 5.5.5	Saldo Kas dari Arus Kas .....	270
Tabel 5.6.1	Laporan Perubahan Ekuitas .....	271
Tabel 6.1.1	Daftar Aset Tanah yang masih dalam Penelusuran .....	272
Tabel 6.1.2	Daftar Rincian Utang Kredit Inpres Pasar (KIP) .....	275
Tabel 6.1.2.1.2	Daftar Anggaran dan Realisasi Kegiatan yang diperuntukkan untuk Program Perlindungan Sosial .....	277
Tabel 6.1.2.1.3	Anggaran dan Realisasi Kegiatan yang Diperuntukkan untuk Program Pemberdayaan Ekonomi.....	279
Tabel 6.1.2.3	Laporan Realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial.....	284
Tabel 6.1.2.4	Realisasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus .....	288
Tabel 6.2.1.1	Daftar Aset Non APBD.....	292
Tabel 6.4.0.1	Langkah dan Upaya Pengamanan Barang Milik Daerah yang Dilakukan ....	294

8

19



## BAB I INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

### 1.1. UMUM

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi secara berkala merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah, yang diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pertanggungjawaban tersebut merupakan salah satu bentuk penguatan pilar akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mendukung urusan pemerintah daerah secara keseluruhan. Dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan serta program kegiatan di masa yang akan datang untuk meningkatkan penyediaan pembangunan manusia serta infrastruktur Pemerintah Kota Bukittinggi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Peraturan perundang-undangan tersebut menetapkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi yang telah diterima secara umum yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut terlebih dahulu telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Kota Bukittinggi, selanjutnya disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran selanjutnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat serta kemudian disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang berkenaan.

R  
19

## 1.2. DOMISILI DAN BENTUK GEOGRAFIS

Kondisi daerah dan masyarakat yang semakin berkembang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bukittinggi menghendaki pembangunan manusia serta sarana dan prasarana (*mandatory spending*) yang cepat dan dinamis tentunya dengan menyesuaikan dan memanfaatkan kondisi alam, letak, berbagai sumber daya termasuk kondisi masyarakat yang ada.

Penyelenggaraan pembangunan tahun 2022 sebagai bentuk implementasi dan pencapaian visi Kota Bukittinggi telah dimuat dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022. APBD juga disusun dalam rangka konsistensi dan sinkronisasi program pembangunan serta kebijakan yang dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan visi dan misi Walikota Bukittinggi yang mengacu kepada visi dan misi umum daerah Kota Bukittinggi, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak sangatlah penting. Koordinasi dan kerja sama itu diantaranya adalah dengan forum pimpinan daerah, instansi vertikal dan horizontal, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, forum diskusi serta insan pers yang menggagas rencana pembangunan ke depan. Di samping itu juga kerjasama dengan pemerintah daerah lain, kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terus diupayakan untuk perkembangan serta mendorong kemajuan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara Geografis Kota Bukittinggi terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat dan di tengah-tengah Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi terletak pada Koordinat  $100^{\circ}, +6221'$  –  $100^{\circ}, 25'$  Bujur Timur dan  $00^{\circ}, 19'$  -  $00^{\circ}, 19'$  Lintang Selatan dengan Luas Wilayah  $25,239 \text{ Km}^2$  atau 0,06% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dikelilingi tiga gunung yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago, serta berada pada ketinggian 909 – 941 meter di atas permukaan laut, jarak Kota Bukittinggi dengan ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 90 km dengan melalui jalan yang menanjak, menurun, bergelombang dan berliku terutama di lokasi wisata alam Lembah Anai yang terkenal dengan air terjunnya. Berikut perkiraan jarak Kota Bukittinggi dengan kota-kota sekitarnya dan kota provinsi tetangga adalah:

**Tabel 1.2.1 Jarak Kota Bukittinggi Dengan Kota-Kota di Sumatera**

Kota-Kota	Jarak Km <sup>2</sup>
(1)	(2)
Bukittinggi – Medan	730,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Banda Aceh	1.337,00 Km <sup>2</sup>

Kota-Kota	Jarak Km <sup>2</sup>
(1)	(2)
Bukittinggi - Jambi	537,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Pekanbaru	221,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Palembang	795,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Bengkulu	779,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Tanjung Karang	1.222,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Padang Panjang	19,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Padang	91,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Pariaman	77,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Painsan	168,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Tapan	304,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Solok	73,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Sawahlunto	104,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Sijunjung	136,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Payakumbuh	33,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Batusangkar	49,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Lubuk Sikaping	77,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Simpang Empat	199,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Air Bangis	256,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Sitiung	242,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Muaro Labuah	143,00 Km <sup>2</sup>

Sumber: Laporan Dishubkominfo Kota Bukittinggi

Wilayah Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan dengan masing-masing luas wilayah sesuai dengan tabel berikut:

**Tabel 1.2.2 Jumlah Kelurahan, Luas dan Persentase Daerah dan Posisi Geografis per Menurut Kecamatan**

Kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah (Km <sup>2</sup> )	Persentase Luas Kecamatan	Posisi Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Guguk Panjang	7	6.831	27,07	100°, 22' 50" BT 0°, 18' 40" LS
Mandiangan Koto Selayan	9	12.156	48,16	100°, 22' 32" BT 0°, 17' 29" LS

Kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah (Km <sup>2</sup> )	Persentase Luas Kecamatan	Posisi Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aur Birugo Tigo Boleh	8	6.252	24,77	100°, 23' 21" BT 0°, 19' 16" LS

Sumber : BPS Kota Bukittinggi

Secara administratif Kota Bukittinggi berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Nagari Guguak dan Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam dan Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

### 1.3. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk kemudian digabungkan pada entitas pelaporan.

Dalam hal ini entitas akuntansi adalah 28 (dua puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi termasuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berada pada OPD Sekretariat Daerah, DPRD pada OPD Sekretariat DPRD dan juga fungsi PPKD yang berada pada OPD Badan Keuangan.

Tabel 1.3.1. Daftar SKPD  
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022

KODE	NAMA
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02.01	Dinas Kesehatan
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05.01	Dinas Kebakaran
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	NAMA
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06.01	Dinas Sosial
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.09.01	Dinas Perhubungan
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2.12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan
3.02.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan
4.01.01	Sekretariat Daerah
4.02.01	Inspektorat
4.03.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
4.04.01	Badan Keuangan
4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.08.01	Sekretariat DPRD
4.11.01	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
4.11.02	Kecamatan Guguk Panjang
4.11.03	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
4.12.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi terhadap Perangkat Daerah Kota Bukittinggi sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka sejak tahun 2021 telah dilakukan penyusunan draft rancangan peraturan daerah terkait penyesuaian terhadap Perangkat Daerah.

Penyesuaian tersebut ditetapkan tanggal 11 Oktober 2022 melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Bukittinggi;
2. Melakukan penataan kembali terhadap perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Pada tanggal 5 Desember 2022 ditetapkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah peraturan walikota sebagai turunan dari peraturan daerah yang ditetapkan, yang tidak mengalami perubahan adalah 3 (tiga) kecamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan kelurahan-kelurahan.

Terhadap perubahan susunan perangkat daerah tersebut, Walikota telah melantik pejabat-pejabat yang dibutuhkan untuk mengisi perangkat-perangkat daerah serta termasuk mutasi dan rotasi pada tanggal 30 Desember 2022. Perubahan perangkat daerah tersebut berlaku untuk 1 Januari 2023 dan tidak mengubah entitas dan jumlah entitas yang melakukan penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2022, serta yang menandatangani laporan keuangan tahun 2022 masih pejabat lama. Hal ini ditegaskan dalam Edaran Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi tanggal 6 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Entitas Akuntansi menyusun 5 (lima) laporan keuangan yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Badan Keuangan disamping sebagai entitas akuntansi juga berfungsi sebagai entitas pelaporan yang memegang peranan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi menyusun 7 (tujuh) jenis laporan keuangan yakni ditambah dengan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas (LAK).

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasian. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas (LAK), (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam hal ini penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBD dan pelaksanaannya pada seluruh SKPD maupun transaksi keuangan tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, LKPD ini tidak mencakup transaksi entitas pemerintah pusat dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), namun tetap mencantumkan Laporan Keuangan BUMD sebagai lampiran LKPD ini.

Khusus untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD

yang ada yakni RSUD Kota Bukittinggi dan 7 (tujuh) Puskesmas) menyusun 7 (tujuh) Laporan Keuangan lengkap yang macamnya sama dengan LKPD.

#### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

##### 1.4.1. Maksud

LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 disusun untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan serta memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* yang merupakan pengguna LKPD (jajaran pemerintah daerah, masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2022.

##### 1.4.2. Tujuan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit laporan operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Secara spesifik, tujuan penyusunan LKPD Kota Bukittinggi adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan,
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran,
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai,
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas,
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman,
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

### 1.5. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015, tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015.
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.
23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2020.
24. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana diubah
25. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020.
26. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi.
27. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah.
28. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.
29. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.
30. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomsor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

31. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

#### 1.6. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk memudahkan para pengguna (*stakeholders*) laporan keuangan dalam memahami LKPD Pemerintah Kota Bukittinggi, maka Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I :** Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 1.1. Umum
  - 1.2. Domisili dan Bentuk Geografis
  - 1.3. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
  - 1.4. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
    - 1.4.1. Maksud
    - 1.4.2. Tujuan
  - 1.5. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
  - 1.6. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- BAB II :** Kebijakan Fiskal/ Keuangan dan Ekonomi Makro
- 2.1. Kebijakan Keuangan/ Fiskal
    - 2.1.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
    - 2.1.2. Kebijakan Pendapatan Daerah
    - 2.1.3. Kebijakan Belanja Daerah
  - 2.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
    - 2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi
    - 2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita
    - 2.1.3. Gini Rasio
    - 2.1.4. Laju Inflasi
    - 2.1.5. Tingkat Kemiskinan
    - 2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka
    - 2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia
    - 2.1.8. Indeks Gini/Koefisien Gini
- BAB III :** Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target keuangan
  - 3.2. Kendala dan Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target

- BAB IV :** Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- 4.1. Struktur Laporan Keuangan
  - 4.2. Kebijakan Konversi
  - 4.3. Asumsi Dasar Akuntansi.
  - 4.4. Pengguna Laporan Keuangan.
  - 4.5. Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan.
  - 4.6. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
  - 4.7. Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian
  - 4.8. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- BAB V :** Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
- 5.1. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
    - 5.1.1. Pendapatan Daerah
    - 5.1.2. Belanja Daerah
    - 5.1.3. Pembiayaan Daerah
    - 5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan
  - 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - 5.3. Neraca
    - 5.3.1. Aset
    - 5.3.2. Kewajiban
    - 5.3.3. Ekuitas Dana
  - 5.4. Laporan Operasional
    - 5.4.1. Kegiatan Operasional
      - 5.4.1.1. Pendapatan
      - 5.4.1.2. Beban
    - 5.4.2. Kegiatan Non Operasional
    - 5.4.3. Surplus/ Defisit- LO
  - 5.5. Laporan Arus Kas
    - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
    - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan
    - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan
    - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran
    - 5.5.5. Kenaikan/ Penurunan Kas
    - 5.5.6. Kas Awal dan Kas Akhir.

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

5.7. Pengungkapan Informasi yang belum disajikan pada lembar muka Laporan Keuangan

**BAB VI:** Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan pemerintah daerah

6.1 Kebijakan Pengelolaan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022 Untuk Penanggulangan Dan Penanganan Pandemi Covid-19; dan

6.2 Informasi Dana Dan Aset Yang Bersumber Dari Dana Non APBD Kota Bukittinggi.

**BAB VII:** Penutup

82 79

## BAB II

### KEBIJAKAN KEUANGAN/FISKAL DAN EKONOMI MAKRO

#### 2.1. KEBIJAKAN KEUANGAN/ FISKAL

Pandemi Covid-19 yang berdampak pada dunia, telah menyebabkan banyak pelaku usaha mengalami kebangkrutan dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis.

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Upaya yang dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi adalah dengan pendanaan pada kegiatan dalam rangka mendukung penanganan pasca pandemi yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Bukittinggi mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi kepada Dana Transfer untuk pendanaan belanja gaji dan tunjangan pegawai, belanja operasional/rutin kantor, belanja pembangunan dan sebagainya.

Untuk memaksimalkan pengalokasian dana transfer, pengalokasian belanja wajib dan pendukung, pemulihan ekonomi, pengendalian inflasi serta penyampaian informasi dan laporan tahun 2022, pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa aturan yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KM.7/2021 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
13. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-2/PK/2021 tentang Pedoman Teknis Penyampaian Laporan Dana Insentif Daerah.

Beberapa catatan penting dari pelaksanaan dana transfer tahun 2022 maupun arahan untuk menggunakan APBD Tahun 2022 yang telah dilaksanakan Kota Bukittinggi yaitu:

1. Kewajiban Penganggaran Belanja Wajib Daerah yakni belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja wajib yang bersumber dari DTU.
2. Penganggaran dana kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19, perlindungan sosial dan pengendalian inflasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Aturan ini mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyalurkan 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial.
3. Mekanisme penyaluran DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Sekolah yang langsung ke masing-masing SD dan SMP. Pada APBD Kota Bukittinggi untuk negeri dianggarkan di kegiatan belanja operasional terkait dan swasta dianggarkan pada Belanja Hibah pos Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.

8 79

4. Mekanisme penyaluran DAK Non Fisik - Bantuan Operasional PAUD yang langsung ke masing-masing PAUD. Pada APBD Kota Bukittinggi untuk negeri dianggarkan di kegiatan belanja operasional terkait dan swasta dianggarkan pada Belanja Hibah pos Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari Pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi.

Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai *herd immunity* pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

Mengacu pada capaian sampai dengan tahun 2021 dan mengakomodir arahan yang tertuang pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 maka dilakukan penyesuaian terhadap target indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi sebagai mana tabel berikut :

k 7 A

**Tabel 2.1.1**  
**Perubahan Target Makro Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022**

No	URAIAN	CAPAIAN					TARGET	
		2018	2019	2020	2021	2022	RKPD Tahun 2022	Perubahan RKPD Tahun 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,08	6,02	5,88	(1,74)	3,61	3,00	4,23
2	Tingkat Inflasi (%)	1,37	2,99	1,31	2,02	1,69	2,90	2,90
3	Indeks Gini	0,313	0,337	0,267	0,265	0,286	0,264	0,264
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,75	6,32	6,00	6,01	6,98	4,59	4,69
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,94	7,24	6,20	7,51	6,09	7,16	6,25
6	Indeks Pembangunan Manusia	79,11	79,80	80,11	80,71	80,58	81,14	81,14

Tumbuhnya ekonomi Kota Bukittinggi ke angka 3,61 persen tahun 2021 menggambarkan bahwa pemulihan ekonomi telah berhasil lebih cepat dari pada yang ditargetkan sebelumnya, sehingga target awal pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 3,00 persen perlu dikoreksi dengan menyesuaikan perubahan target ekonomi nasional pada pemutakhiran RKP Tahun 2022 dan Perubahan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 menjadi 4,23 persen.

Begitu juga dengan penyesuaian target tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, target capaian tingkat pengangguran yang ditetapkan pada tahun 2022 perlu dikoreksi atas capaian tahun 2021 menjadi 6,25 dan target capaian tingkat kemiskinan yang terlalu optimis dikoreksi berdasarkan capaian dan perubahan target nasional dan provinsi menjadi 4,69 persen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 161 ayat (2) menyebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- Keadaan darurat; dan/atau
- Keadaan luar biasa.

Analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD



dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan daerah dilihat dari sisi pendapatan, belanja dan juga pembiayaan.

Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 telah digambarkan kerangka pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian telah dioperasionalkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022. Selanjutnya pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 ini, setelah melalui evaluasi terhadap APBD pada tahun berjalan terjadi beberapa perubahan terhadap target pendapatan, perubahan belanja dan juga pembiayaan.

Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- 1) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- 2) Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- 3) Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Perubahan target pendapatan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.2**  
**Perubahan Target Pendapatan Tahun Anggaran 2022**

NO	URAIAN	TARGET		SELISIH
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>717.647.532.987,00</b>	<b>706.442.102.795,00</b>	<b>(11.205.430.192,00)</b>
04.01	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>139.876.887.262,00</b>	<b>130.007.723.401,00</b>	<b>(9.869.133.861,00)</b>
04.01.01	Pajak Daerah	50.549.852.262,00	50.019.852.262,00	(530.000.000,00)
04.01.02	Retribusi Daerah	55.190.619.000,00	45.409.034.000,00	(9.781.585.000,00)
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.505.000.000,00	7.505.000.000,00	-
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	26.731.386.000,00	27.073.837.139,00	342.451.139,00
04.02	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>577.670.675.725,00</b>	<b>576.434.379.394,00</b>	<b>(1.236.296.331,00)</b>
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	547.804.286.317,00	541.958.240.857,00	(5.846.045.460,00)
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.866.389.408,00	34.476.138.537,00	4.609.749.129,00
04.03	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	-	-	-
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2022 yang dorainan didasari oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan, dimana terjadi pengurangan sebesar Rp11.205.430.192,00 atau 1,56% dari target awal sebesar Rp717.647.532.987,00 menjadi Rp706.442.102.795,00. Target pendapatan daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang sebesar Rp9.969.133.861,00 yang berasal dari penurunan target Pajak Daerah sebesar Rp530.000.000,00, penurunan target Retribusi Daerah sebesar Rp9.781.585.000,00, dan penambahan pada Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp342.451.139,00.

Penurunan target pajak daerah berasal dari penurunan beberapa uraian target pajak daerah sebagai berikut:

- a. Pajak rumah penginapan dan sejenisnya, mengalami penurunan sebesar Rp200.000.000,00 dari target awal Rp350.000.000,00 menjadi Rp150.000.000,00 yang disebabkan karena beberapa penginapan tidak beroperasi dan tidak ada penambahan objek pajak baru pada golongan ini.
- b. Pajak reklame papan/megatron, dan videotron mengalami penurunan sebesar Rp100.000.000,00 dari target awal RKPD sebesar Rp900.000.000,00 menjadi Rp800.000.000,00 yang disebabkan karena penyesuaian atas realisasi dan tidak adanya penambahan objek pajak baru.
- c. Pajak air tanah mengalami penurunan target sebesar Rp230.000.000,00 dari Rp300.000.000,00 menjadi Rp70.000.000,00 yang disebabkan karena target awal dihitung berdasarkan usulan yang ada pada Ranperwako tentang tarif pajak air tanah yang mengacu pada Peraturan Gubernur tentang tarif pajak air tanah, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka pembahasan Ranperwako Kota Bukittinggi tentang tarif pajak air tanah ditunda oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penurunan target retribusi daerah pada perubahan RKPD tahun 2022 berasal dari penyesuaian beberapa uraian target retribusi daerah sebagai berikut:

- a. Penurunan target retribusi pelayanan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp349.136.000,00 dari target awal sebesar Rp1.550.000.000,00 menjadi Rp1.200.864.000,00
- b. Pengurangan retribusi pada Dinas Perhubungan dari target awal sebesar Rp3.724.619.000,00 menjadi Rp2.491.670.000,00 atau sebesar Rp1.232.949.000,00 yang berasal dari penurunan retribusi penyediaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp619.257.000,00,

Retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp72.146.000,00, retribusi pelayanan tempat khusus parkir sebesar Rp533.716.000,00, dan retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum Rp7.830.000,00.

- c. Pengurangan target retribusi daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan sebesar Rp13.115.500.000,00 dari target awal sebesar Rp27.345.000.000,00 menjadi Rp14.229.500.000,00. Penurunan target retribusi daerah pada SKPD ini berasal dari pengurangan retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan/kebersihan sebesar Rp150.000.000,00, retribusi pelayanan pasar sebesar Rp212.500.000,00, retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp3.000.000,00, retribusi jasa usaha sebesar Rp13.250.000.000,00. Sedangkan untuk retribusi penyediaan penyedotan kakus mengalami kenaikan target sebesar Rp500.000.000,00
- d. Retribusi daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja mengalami penurunan target sebesar Rp570.000.000,00 dari Rp820.000.000,00 menjadi Rp250.000.000,00
- e. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan satu-satunya SKPD pengelola PAD yang mengalami kenaikan target capaian pada perubahan RKPD tahun 2022 dari target awal sebesar Rp20.220.000.000,00 menjadi Rp26.000.000.000,00 atau mengalami kenaikan target sebesar Rp5.780.000.000,00, yang bersumber dari retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
- f. Penurunan target retribusi pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp150.000.000,00 yang berasal dari pengurangan retribusi daerah pada pelayanan rumah potong hewan.
- g. Penurunan target retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp144.000.000,00 yang berasal dari pengurangan retribusi daerah pada retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Pada komponen dana transfer terjadi penurunan target pendapatan sebesar Rp1.236.296.331,00,00 atau 0,21% dari target semula sebesar Rp577.670.675.725,00 menjadi Rp576.434.379.394,00.

Penurunan terjadi karena adanya:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:
  - 1) Pemotongan DAU (P3K Guru) sebesar Rp3.539.197.900,00
  - 2) Pemotongan DAU Sisa DAK Non Fisik 2021 sebesar Rp1.123.847.560,00
  - 3) Pemotongan DAU (Covid) sebesar Rp1.183.000.000,00
- b. Kurang salur DBH Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp4.609.749.129,00

2. Belanja Daerah

Secara umum, belanja daerah Kota Bukittinggi pada Perubahan RKPD Tahun 2022 berkurang sebesar Rp2.307.830.894,00 dari APBD Tahun 2022 sebesar Rp842.475.552.719,00 sehingga menjadi Rp840.167.721.825,00.

Daftar berikut merupakan gambaran kebijakan perubahan Belanja Tahun Anggaran 2022 sesuai Perubahan KUA Tahun 2022, yaitu:

**Tabel 2.1.3**  
**Perubahan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2022**

No	URAIAN	JUNTAH PAGU		
		RKPD 2022 Rp	APBD 2022 Rp	Perubahan KUA dari Perubahan PPAS 2022
01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	257.292.097.351	185.266.674.371,00	185.777.374.981,00
01.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	112.707.172.196	106.108.638.856,00	114.604.044.215,00
01.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	183.495.017.897	66.608.499.943,00	66.351.697.769,00
01.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	27.424.001.400	17.830.766.377,00	17.347.122.047,00
01.05	Urusan Pemerintahan Bidang Keterterman dan Keteriban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	43.979.441.751	31.724.475.866,00	33.394.454.195,00
01.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	30.815.672.523	6.654.609.514,00	7.344.363.614,00
02.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	1.367.673.010	499.735.184,00	687.444.384,00
02.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.246.124.166	7.381.917.593,00	7.533.083.739,00
02.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	11.284.343.975	9.915.873.750,00	10.250.535.738,00
02.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	648.185.254	484.152.910,00	559.638.165,00
02.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	70.082.744.068	46.073.641.256,00	43.902.233.429,00
02.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.966.260.838	5.563.716.786,00	6.078.620.326,00
02.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.271.756.304	3.648.084.260,00	3.622.458.736,00
02.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	51.370.450.273	17.646.954.081,00	19.407.333.748,00
02.17	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi	17.359.837.295	9.755.195.295,00	10.064.190.618,00

	dan Informatika			
02.18	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	10.813.745.327	12.957.420.326,00	12.143.895.873,00
02.19	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	14.415.647.565	11.009.888.669,00	10.836.425.374,00
02.20	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	49.279.734.292	9.499.436.600,00	7.184.410.940,00
02.21	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	465.600.000	63.520.600,00	59.680.600,00
02.22	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	130.000.000	85.683.000,00	80.193.000,00
02.23	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	5.576.625.582	3.731.157.668,00	3.746.723.086,00
02.24	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	11.579.826.865	6.425.093.332,00	6.793.993.582,00
03.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	1.798.684.150	742.049.640,00	641.158.140,00
03.26	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	2.052.000.000	1.470.161.250,00	1.511.126.652,00
03.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	150.535.039.859	27.449.779.650,00	28.324.122.822,00
03.30	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	17.707.213.400	2.793.151.764,00	2.779.502.913,00
03.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	40.718.264.500	16.375.751.307,00	15.011.205.389,00
04.01	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3.454.432.466	987.232.520,00	1.242.591.520,00
04.02	Sekretariat Daerah	80.407.672.840	63.205.909.781,00	75.889.287.774,00
05.01	Sekretariat DPRD	42.362.764.025	35.826.590.617,00	40.222.313.571,00
05.03	Perencanaan	8.453.969.092	6.227.258.194,00	6.543.197.037,00
05.04	Keuangan	34.655.071.807	42.821.319.103,00	32.797.525.090
05.05	Kepegawaian	9.052.228.759	5.812.846.716,00	6.376.400.462,00
06.01	Pendidikan dan Pelatihan	2.236.412.840	1.368.957.000,00	992.864.536,00
07.01	Penelitian dan Pengembangan	2.270.000.000	344.081.000,00	377.871.000,00
01.01	Inspektorat Daerah	7.950.491.593	7.391.803.112,00	7.681.802.877,00
01.02	Kecamatan	81.318.779.569	44.028.497.729,00	46.006.237.738,00
01.03	Kesatuan Bangsa dan Politik	7.109.334.900	6.695.027.099,00	6.000.596.145
<b>TOTAL</b>		<b>1.410.654.317.732</b>	<b>842.475.552.719,00</b>	<b>840.167.721.825,00</b>

### 3. Pembiayaan Daerah

Pada sisi pembiayaan daerah juga terjadi perubahan, dari sisi penerimaan pembiayaan, yang merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Perubahan RKPD terhadap pembiayaan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.4  
Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	TARGET	
		APBD 2022	PERUBAHAN 2022
6	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>124.828.019.732,00</b>	<b>122.987.559.855,00</b>
6.1	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>134.828.019.732,00</b>	<b>132.987.559.855,00</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	134.828.019.732,00	132.987.559.855,00
6.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00

Pembiayaan daerah Kota Bukittinggi pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 mengalami pengurangan sebesar Rp1.840.459.877,00. Pengurangan terjadi pada penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.840.459.877,00 berupa perhitungan Silpa Tahun Anggaran sebelumnya yang awalnya ditargetkan sebesar Rp134.828.019.732,00, setelah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ditemui Silpa Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp132.987.559.855,00

Perubahan rencana kebijakan keuangan di atas sangat mempertimbangkan kondisi keuangan daerah Kota Bukittinggi yang banyak dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19, maka Kebijakan Keuangan Daerah pada Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022, adalah:

1. Penyesuaian Pendapatan Daerah sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021;
2. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kondisi penanganan Pandemi Covid-19 dengan tetap memperhitungkan target secara optimis.
3. Penyesuaian Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada Perubahan APBD dengan tetap memprioritaskan belanja pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, penanganan pandemi Covid-19 serta upaya penanganan dampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19;
4. Penyesuaian penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Agar pembangunan di daerah dapat berjalan secara optimal, maka dukungan pendanaan daerah dan penetapan anggaran belanja daerah harus disusun secara terukur dalam bentuk input, output dan outcome yang mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Arah dan kebijakan umum daerah dijabarkan dalam rincian:

1. Proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan,
2. Arah kebijakan pendapatan daerah,
3. Arah kebijakan belanja daerah, dan

4. Arah dan kebijakan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah. Dimana kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah. Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### 2.1.1.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pada Perubahan RKPD Kota Bukittinggi tahun 2022, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah disusun didasarkan pada hasil evaluasi capaian Rencana Kerja Triwulan I dan II tahun 2022. Selain itu perubahan program dan kegiatan juga terjadi akibat dilakukannya pergeseran anggaran dan penyesuaian pendapatan dan pembiayaan daerah, baik yang bersumber dari dana transfer maupun pendapatan asli daerah. Evaluasi yang dilakukan terhadap realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan terhadap program dan kegiatan yang meliputi perubahan pagu, perubahan target kinerja, kelompok sasaran, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan dan adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan RKPD tahun 2022.

Pada perubahan RKPD Kota Bukittinggi tahun 2022 terdapat penambahan 1 (satu) program yang berada di urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selanjutnya juga terdapat penambahan kegiatan baru pada Perubahan RKPD ini sebanyak 13 kegiatan yang tersebar pada 9 (sembilan) SKPD, dan terdapat penambahan 64 subkegiatan baru yang tersebar pada sebagian SKPD.

Selain penambahan subkegiatan baru, pada Perubahan RKPD ini juga terjadi pengurangan baik kegiatan maupun subkegiatan. Pengurangan subkegiatan pada Perubahan RKPD tahun 2022 terdapat pada pada Dinas Pendidikan sebanyak 2 (dua) kegiatan dan Dinas Perhubungan sebanyak 1 (satu) kegiatan. Sedangkan, pengurangan subkegiatan terdapat pada:

1. Dinas Pendidikan sebanyak 2 (dua) subkegiatan;
2. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) subkegiatan;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sebanyak 1 subkegiatan;
4. Dinas Perhubungan sebanyak 1 (satu) subkegiatan; dan

5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sebanyak 2 (dua) subkegiatan.

Secara lebih detail terkait rekapitulasi terhadap perubahan program, kegiatan, dan subkegiatan pada RKPD Kota Bukittinggi tahun 2022 disajikan pada tabel 5.1 pada Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan RKPD tahun 2022 yang disertai dengan pagu indikatif, tolok ukur kinerja dirinci menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan urusan pemerintahan daerah. Pada prinsipnya penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan perubahannya masih berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (*money follow program*).

Oleh sebab itu arah dan guna menyusun perhitungan keuangan daerah dan kerangka pendanaan selain memperhatikan proyeksi kerangka ekonomi makro juga perlu dilakukan evaluasi terhadap realisasi APBD beberapa tahun sebelumnya. Beberapa kebijakan penyusunan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022 antara lain:

1. Kebijakan penganggaran yang berkaitan dengan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD termasuk pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas yang tertuang dalam keputusan akhir dalam Nota Keuangan Presiden.
2. Kebijakan Belanja Pemerintah, yang lebih mengutamakan dana transfer ke daerah dan dana desa sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal dibandingkan belanja kementerian/lembaga. Hal ini diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas nasional.
3. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun 2022.
4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 14 (empat belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 4 (empat) Urusan Pemerintahan Pilihan, 5 (lima) unsur pendukung urusan pemerintahan, penunjang dan pengawas pemerintahan.



### 2.1.2. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan mengurus rumah tangganya ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya dapat diketahui dari kemampuan daerah dalam membiayai dan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran terhadap masyarakat. Untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam hal pembiayaan kegiatan dan pelayanan publik harus didukung dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat diperoleh melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, penggalan dan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada secara maksimal, dan usaha-usaha lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan fungsi dan peranan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik.

Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari potensi daerah itu sendiri.

Fokus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari berbagai sektor yang terkait dengan retribusi. Sesuai dengan ketentuan pasal 285 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang berlandaskan atas:
  - a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Bukittinggi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 serta memperhatikan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
  - c. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- d. Penganggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan memperhatikan potensi penerimaan tahun 2022 serta memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
  - e. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang bersumber dari penjualan terhadap aset pemerintah daerah yang tidak layak/ telah habis umur ekonomisnya. Dianggarkan pada kelompok lain-lain PAD yang sah, objek belanja Daerah Yang Tidak Dipisahkan.
  - f. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, Obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
  - g. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
  - h. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
  - i. Pendapatan dana BLUD untuk 7 Puskesmas (Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional) dan untuk dan 1 RSUD yang telah menerapkan PPK-BLUD adalah mempedomani Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
2. Dana Transfer yang merupakan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.  
Penerimaan dari dana perimbangan selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun antara lain dari Dana Alokasi Umum serta diikuti dengan penerimaan dari dana DAK serta Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Dalam dana transfer ini juga terdapat pendapatan yang bersumber dari Dana BOS.
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Pengembalian Hibah dari SKPD Pengelola Hibah.

Berikut ini Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 s.d. Tahun 2023 yaitu:

Tabel 2.1.2.1  
Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 s.d Tahun 2023

Kode	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Th 2019 (Rp)	Realisasi Th 2020 (Rp)	Realisasi Th 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi Tahun 2023 (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	734,106,696,896.05	689,222,919,606.62	688,635,054,455.61	566,608,718,556	601,121,014,936
1.1	Pendapatan Asli Daerah	111,890,596,611.00	84,087,662,500.62	91,786,288,185.61	102,963,217,150	137,387,813,528
1.1.1	Pajak Daerah	48,204,119,636.59	35,837,033,610.00	40,761,025,893.00	53,822,110,062	40,887,396,000
1.1.2	Retribusi Daerah	33,125,468,779.71	21,833,603,342.00	27,401,880,331.00	19,582,339,000	29,241,338,000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6,871,510,132.00	6,331,916,191.00	5,482,031,608.00	5,793,000,000	5,084,750,000
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	27,495,098,062.80	20,065,049,357.62	18,131,310,353.61	43,766,068,088	61,174,424,528
1.2	Pendapatan Transfer	607,228,300,285.00	585,094,336,618.00	598,762,137,736.00	463,733,201,408	463,733,201,408
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	26,313,224,000.00	56,127,080,000.00	561,068,880,504.00	433,866,812,000	433,866,812,000
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	29,151,151,773.00	25,459,087,709.00	32,675,257,234.00	29,866,389,408	29,866,389,408
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	14,981,890,000.00	20,040,920,487.00	3,086,628,530.00	0	0
1.3.1	Hibah	-	-	-	0	0
1.3.2	Dana Darum	-	-	-	0	0
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	14,981,890,000.00	20,040,920,487.00	3,086,628,530.00	0	0

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2022

### 2.1.3. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2022, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah:

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *out-comes* sesuai anggaran kinerja pembangunan.

3. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kota Bukittinggi secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut secara bertahap.
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui penganggaran yang lebih besar pada potensi utama kota, yaitu bidang pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan serta pelayanan kesehatan.
6. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (*pro poor*) di Kota Bukittinggi.
7. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum musyawarah rencana pembangunan.
8. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum serta sasaran dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, perkotaan, terminal dan lainnya dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.
9. Selain itu belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran berimbang dan berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2022 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Berikut Realisasi Belanja Tahun 2019 s.d. 2022 dan Proyeksi Belanja Tahun 2023.

Tabel 2.1.3.1  
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 s.d. 2022 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Th 2019 (Rp)	Realisasi Th 2020 (Rp)	Realisasi Th 2021 (Rp)	Realisasi Th 2022 (Rp)	Proyeksi Th 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	6
5.1.	Belanja Operasi	528.444.715.821,46	515.151.376.193,13	555.168.586.260,11	617.128.939.288,00	621.885.162.769,00
5.1.1	Belanja Pegawai	362.187.753.715,82	360.230.406.322,57	296.371.615.565,25	340.225.290.322,00	348.730.922.570,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.771.650.352,64	116.356.834.683,56	236.689.663.677,43	276.393.649.966,00	283.553.240.200,00
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	12.651.151.753,00	37.699.077.187,00	21.027.307.017,43	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.834.160.000,00	865.058.000,00	1.080.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.2.	Belanja Modal	187.986.455.096,79	249.317.613.815,34	93.038.635.113,35	55.780.729.795,00	57.012.748.040,00
5.2.1	Belanja Modal	187.986.455.096,79	249.317.613.815,34	93.038.635.113,35	55.780.729.795,00	57.012.748.040,00
5.3.	Belanja Tidak Terduga	97.094.060,08	31.485.489.291,50	1.844.107.190,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	97.094.060,08	31.485.489.291,50	1.844.107.190,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	559.301.924,50	706.056.990,00	-	-	-
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	559.301.924,50	706.056.990,00	-	-	-

## 2.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro yang terjadi di daerah menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi ekonomi masyarakat, perusahaan dan pasar. Secara umum indikator ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan tenaga kerja. Indikator ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi.

Dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2022 merupakan penjabaran arah dan strategi yang ditempuh pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian, dan menjawab tantangan serta isu strategis untuk mendukung pencapaian target sasaran pemerintah.

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan keuangan daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah. Sasaran kinerja tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah yang diikuti dengan kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2022.

Arah kebijakan ekonomi berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 yang merupakan upaya yang diprioritaskan untuk pencapaian Misi 1 yaitu Hebat dalam Sektor Peningkatan Ekonomi kerakyatan dirumuskan pada arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kunjungan wisata belanja
2. Mengembangkan variasi dan kualitas wisata kuliner
3. Memperluas akses kesempatan berusaha
4. Memperluas jangkauan pasar Usaha Mikro
5. Meningkatkan kinerja usaha koperasi
6. Mengembangkan sarana dan prasarana pasar
7. Mengembangkan SDM Pengelola Pasar
8. Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen
9. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan BUMD
10. Meningkatkan jumlah dan ragam usaha BUMD
11. Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro
12. Menciptakan kawasan *One Village One Product*
13. Meningkatkan kualitas layanan investasi

14. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung investasi hijau
15. Mengembangkan pasar dengan bangunan *vertical*
16. Meningkatkan penataan pasar dan pedagang
17. Meningkatkan penerapan standar kualitas jalan dan drainase lingkungan
18. Meningkatkan aksesibilitas dan mempertahankan kondisi jalan dan bangunan pelengkapanya
19. Meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas umum
20. Meningkatkan akses masyarakat pada hunian layak
21. Meningkatkan akses masyarakat pada air minum layak dan berkelanjutan
22. Meningkatkan kualitas dan luasan ruang publik
23. Meningkatkan cakupan sanitasi layak
24. Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial
25. Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kesempatan usaha dan kesempatan kerja
26. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan rumah tangga miskin
27. Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas.

Banyak program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka membuka peluang usaha dan menciptakan iklim berusaha yang hangat dalam rangka pencapaian Misi 1 yaitu Hebat dalam Sektor Peningkatan Ekonomi kerakyatan. Salah satu upaya telah diinisiasi langsung oleh Walikota Bukittinggi H. Erman Safar, SH, dengan sistem kerjasama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan BPRS Jam Gadang (Perseroda), telah diproses dan dipersiapkan sejak tahun 2021 berupa program "Tabungan Utsman" untuk tahun 2022.

Tabungan Utsman adalah program Pemerintah Kota Bukittinggi untuk membantu masyarakat di Kota Bukittinggi pasca pandemi covid-19 untuk mendapatkan modal dari perbankan dengan margin/ bunga yang ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah Kota Bukittinggi yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi para pelaku usaha mikro.

Pada APBD 2022 pos Belanja Subsidi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi anggaran yang disediakan untuk pembayaran subsidi margin ini adalah Rp1.575.000.000,00. Oleh karena antusiasnya masyarakat dan tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan program tersebut, maka Tabungan Utsman pada Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022 dana anggarannya ditambah Rp1.000.000.000,00 sehingga anggaran tahun 2022 menjadi Rp2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dan sudah terealisasi seluruhnya. Masyarakat yang dibantu adalah pelaku usaha yang tidak memiliki agunan

untuk mendapatkan modal dari perbankan serta untuk mengatasi agar pelaku usaha mikro khususnya di Kota Bukittinggi tidak terjerat oleh rentenir.

Sejak kasus Virus Covid-19 merebak di awal tahun 2020 maka secara drastis mempengaruhi kondisi perekonomian Kota seperti terlihat pada tabel di bawah ini bahwa kondisi makro Ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2019 - 2020 cenderung menurun. Untuk tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022 diperkirakan kembali meningkat seiring dengan berbagai program kegiatan terkait penanganan Virus Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah kota seperti program pemberian Vaksin ke berbagai lapisan masyarakat dan program terkait pemulihan ekonomi lainnya.

Kota Bukittinggi sebagai kota pariwisata yang sangat bergantung pada aktivitas kepariwisataan sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 ini. Kelumpuhan satu sektor berefek domino pada sektor lain sehingga terjadi ketimpangan pendapatan, munculnya penduduk miskin baru, kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Berikut indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2017-2020 dan proyeksi tahun 2020- 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2.1**  
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi**

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi Tahun					Proyeksi Tahun	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,05	6,08	6,02	5,88	-1,74	2,67	3,00
2	Gini Ratio	0,34	0,31	0,34	0,27	0,265	0,262	0,264
3	Tingkat Kemiskinan	5,48	5,35	4,92	4,60	4,54	4,59	4,48
4	Laju Inflasi	6,04	3,93	1,37	2,99	1,31	2,02	3,93
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (5)	79,11	6,94	6,59	6,14	5,51	7,35	7,18
6	Indek Pembangunan Manusia (%)	79,11	79,80	80,11	80,71	80,58	80,86	81,14

Sumber Data: 2016 s.d 2020 Data BPS Kota Bukittinggi

2021 s.d 2022: Angka Proyeksi

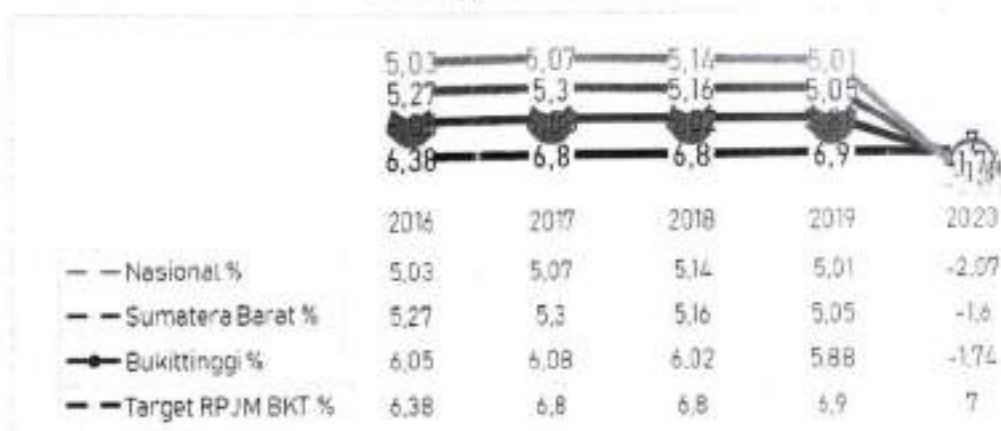
### 2.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 namun masih di atas pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Secara rata-rata, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB Kota Bukittinggi berada pada kategori perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Informasi dan Komunikasi. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut.



Grafik 2.2.1.1

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar dan Nasional serta Target Kota Bukittinggi Tahun 2016 S/D 2020



Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan 2019 yaitu di atas angka 5,88 % namun masih di atas pertumbuhan rata-rata kota-kota dan dibawah Kota Payakumbuh dan diatas pertumbuhan provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Namun pada tahun 2020 pada masa pandemic Covid-19 Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi sangat rendah sekali dibawah Kota Padang, hal ini karena secara rata-rata, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB Kota Bukittinggi berada pada kategori perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Informasi dan Komunikasi dan sektor penggerak ini merupakan sektor yang sangat terdampak oleh Pandemi Covid-19.

Tahun 2022, berdasarkan Bukittinggi Dalam Angka 2023 yang data dasarnya adalah tahun 2022 yang diterbitkan oleh BPS Wilayah Kota Bukittinggi, perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dengan Kota-Kota lain di Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi adalah 4,68% yang semula ditargetkan hanya 3% pada RKPD dan KUA Tahun 2022 yang berada pada urutan ketiga setelah Kabupaten Padang Pariaman 6,87%, Kabupaten Mentawai 4,94%.

### 2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

Dalam rangka pembangunan daerah, khususnya bidang ekonomi, salah satu yang menjadi indikator guna melihat perkembangan perekonomian adalah data PDRB (*Product Domestik Regional Bruto*). PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun. PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang

dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari sumbangan masing-masing sektor ekonomi atau subsektor ekonomi yang ikut berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan. Disamping itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah, juga sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam meningkatkan produksi sektoralnya.

Sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2022 ditargetkan untuk sektor Pariwisata dengan target capaian adalah 3%. Semua kabupaten kota di Sumatera Barat mengalami percepatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kota Bukittinggi tahun 2021 mengalami percepatan sebesar 3,61 persen.

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Ditinjau menurut kontribusi setiap lapangan usahanya, tiga lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 33,17 persen; transportasi dan pergudangan sebesar 10,22 persen; dan informasi dan komunikasi sebesar 7,36 persen. Total ketiganya mencapai 50,75 persen dari Total PDRB Kota Bukittinggi tahun 2021.

Perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi sendiri dihitung dari nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mencapai 3,61 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,32 persen, diikuti Kategori Jasa Lainnya sebesar 6,01 persen. Mulai dibukanya objek wisata berbayar, kondisi pandemi yang berangsur membaik dan faktor emosional masyarakat sehingga muncul revenge travel (balas dendam melakukan perjalanan) menyebabkan kegiatan ekonomi meningkat.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, Kota Bukittinggi berhasil mencapai 4,68%.

### 2.2.3. Gini Rasio

Gini rasio adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Untuk melihat distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain : Ketimpangan Rendah ( $0,3$ ), Ketimpangan Sedang ( $0,3$  g  $0,5$ ), Ketimpangan Tinggi ( $g0,5$ ).

Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi. "0" berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan "1" berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Gini Rasio Tahun 2021 ditarget  $0,262$  turun  $0,003$  dari tahun 2020 dan terealisasi sebesar  $0,286$ . Dengan harapan upaya pemulihan ekonomi meningkatkan pendapatan penduduk dari semua sektor yang membangun PDRB Kota maka diprediksi Tahun 2022 kembali naik  $0,002$  karena melihat kondisi akhir 2021 angka sebaran Covid-19 kembali meningkat. Menurut Data BPS, untuk realisasi ratio gini pada tahun 2022 adalah  $0,317$ .

Jika dilihat dari rasio pertumbuhan dari tahun 2021 dan tahun 2022 antara gini rasio dan pertumbuhan ekonomi, rasio gini Kota Bukittinggi turun sebesar  $0,031$  meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, sedangkan untuk nasional, rasio gini membaik dengan pertumbuhan cukup baik. Perbandingan Gini Rasio Kota Bukittinggi dengan provinsi dan nasional Tahun 2017 s/d 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.1  
Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2022

Indeks Gini	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target Daerah	0,330	0,320	0,310	0,300	0,300	0,284
Kota Bukittinggi	0,313	0,337	0,267	0,285	0,286	0,317
Sumatera Barat	0,318	0,321	0,306	0,305	0,306	0,306
Indonesia	0,391	0,384	0,380	0,385	0,381	0,381

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar, Pusat 2022

#### 2.2.4. Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) /Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Dalam pengukuran IHK oleh BPS, data harga yang disajikan meliputi, harga eceran beras di beberapa kota, harga eceran nasional beberapa jenis barang, Indeks Harga Konsumen (IHK) dan laju inflasi, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), Indeks harga yang diterima dan dibayar petani, Harga Produsen Gabah Kering Giling (GKG), Gabah Kering Panen (GKP), dan Gabah Kualitas Rendah di tingkat petani dan penggilingan, Indeks Harga Produsen (IHI).

Rata-rata harga eceran beras diolah dari survei mingguan Badan Pusat Statistik (BPS) di beberapa kota. Karena beragamnya kualitas beras di masing-masing kota, maka harga yang disajikan adalah rata-rata harga beras tertimbang.

IHK merupakan indikator inflasi di Indonesia. Sejak Januari 2014, IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) di 82 kota tahun 2012 yang mencakup sekitar 225–462 komoditas.

IHK mencakup 7 kelompok, yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mempunyai arti apa-apa, oleh karena adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima akan menurun dan sebaliknya untuk deflasi.

Menurut Data Statistik Daerah Tahun 2022 yang data dasarnya adalah tahun 2021, laju inflasi tercatat 1,69% lebih rendah dari tahun 2020 yang mengalami inflasi 2,02%.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember 2022 secara umum mengalami kenaikan yang mempengaruhi inflasi. Di Kota Bukittinggi pada bulan Desember 2022 terjadi inflasi yoy sebesar 7,76 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,59 pada bulan Desember 2021 menjadi 114,86 pada bulan Desember 2022. Tingkat inflasi

mtm Desember 2022 Kota Bukittinggi sebesar 0,66 persen dan tingkat inflasi ytd sebesar 7,76 persen.

Inflasi year on year (yoy) Kota Bukittinggi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 11 indeks kelompok pengeluaran yang mempengaruhi inflasi di Kota Bukittinggi yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 10,05 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,94 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,74 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 6,89 persen; kelompok kesehatan sebesar 6,00 persen; kelompok transportasi sebesar 18,95 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,58 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 3,15 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,44 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 6,45 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,17 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy pada Desember 2022 antara lain: bensin, beras, rokok kretek filter, angkutan dalam kota, telur ayam ras, sewa rumah, cabai merah, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, nasi dengan lauk, kue kering berminyak, tarif kendaraan roda 2 online, kontrak rumah, angkutan antar kota, rokok kretek, rokok putih, bahan bakar rumah tangga, tahu mentah, daging sapi dan beberapa komoditas lainnya.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi mtm pada Desember 2022 antara lain: daging ayam ras, cabai merah, petai, emas perhiasan, pisang, tomat, beras, ikan nila dan beberapa komoditas lainnya. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga pada bulan Desember 2022 terhadap November 2022 antara lain: bawang merah, jeruk, ikan asin sepat, minyak goreng, bawang putih dan beberapa komoditas lainnya.

Tingkat inflasi bulanan *month to month (mtm)* (Desember 2022 terhadap November 2022) Kota Bukittinggi sebesar 0,66 persen dan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 7,76 persen jauh melebihi target tertinggi Pemerintah Kota yang diperkirakan mencapai 4%.

#### 2.2.5. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah besaran rata-rata pengeluaran yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan

(GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. 18.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya

Garis kemiskinan, gambaran penduduk miskin, kedalaman serta keparahan kemiskinan Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi selama 7 tahun terakhir dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 2.2.5.1 Penduduk Miskin Kota Bukittinggi

Indikator Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (Rupiah)	420.478	475.755	459.371	475.755	519.470	540.457	570.032
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	5,48	5,35	4,92	4,60	4,54	5,14	4,46
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	6,81	6,75	6,32	6,00	6,01	6,98	6,160
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,05	0,57	0,39	0,56	0,56	0,80	0,83
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,30	0,10	0,06	0,12	0,20	0,19	0,24

Sumber: BPS Sumbar

Persentase penduduk miskin di Kota Bukittinggi mengalami penurunan secara terus menerus sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, namun naik pada tahun 2021 dan kembali turun pada tahun 2022, hal ini diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota Bukittinggi telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan sampai angka 4,46 pada tahun 2022, namun demikian penurunan ini masih jauh dibawah target pemerintah daerah. Walaupun secara jumlah dan persentase berhasil diturunkan, namun dari segi kedalaman dan keparahan kemiskinan mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan bahwa perlu melanjutkan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah yang lebih fokus untuk percepatan penurunan kedalaman dan keparahan penduduk miskin di Kota Bukittinggi pada masa mendatang.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) atau disebut juga *Poverty Gap Index* adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) atau *Poverty Severity Index* adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi sebesar 6,04 % dan tingkat kemiskinan Nasional sebesar 9,57 (per bulan September 2022).

#### 2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Walaupun angka TPT di Kota Bukittinggi tidaklah besar akan tetapi meningkatnya angka TPT dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa ini perlu menjadi perhatian agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan lebih memberikan stimulan agar tingkat pengangguran bisa menjadi semakin berkurang.

Tabel 2.2.6.1.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2018 s/d 2022

Urutan	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bukittinggi	7,24	6,20	7,51	6,09	4,90

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2023 Data Dasar 2022

Merujuk kepada data BPS Provinsi Sumatera Barat, angka pengangguran terbuka pada tahun 2022 sebanyak 4,90 persen mengalami penurunan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, tahun 2022 adalah angka yang paling rendah. Artinya pada tahun 2022 tersebut program-program pemerintah daerah berhasil menekan angka pengangguran dengan menciptakan iklim usaha yang mendukung serta memfasilitasi modal usaha antara lain dengan program Tabungan Utsman serta membuka ruang-ruang tempat usaha baik *offline* maupun *online*.

Capaian pembangunan ketenagakerjaan terkait Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi menunjukkan capaian yang optimal. Penyandingan terhadap target daerah memperlihatkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2022 di bawah angka perkiraan yaitu 7,18% yang ditetapkan di RKPD Tahun 2022.

#### 2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan

tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan atau variabel pokok yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita riil (*adjusted*), sesuai dengan indikator yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perkembangan IPM Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup di Kota Bukittinggi dinilai sangat memuaskan. Angka IPM Kota Bukittinggi yang selalu meningkat tersebut berada di atas Angka IPM Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang setiap tahunnya juga selalu meningkat.

Pembangunan Manusia sebagai indikasi adanya pembangunan melalui proses yang cukup panjang dan diukur melalui besaran angka indeks, yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertambahan penduduk secara kuantitas diikuti oleh pembangunan dari sisi kualitas agar tercipta SDM yang sejahtera, kompeten dan setara dengan SDM dari wilayah lain.

Untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya digunakan angka IPM. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat.
2. Pengetahuan.
3. Standar hidup layak.

Dimensi tersebut diturunkan dalam 4 (empat) indikator yang dapat diukur yaitu: Angka Harapan Hidup Sehat Saat Lahir (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Komoditas pengeluaran perkapita. Keempat dimensi serta angka IPM Kota Bukittinggi kurun waktu 2015-2022 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.7.1  
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2015- 2022

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	IPM
2015	Bkt: 73,52	Bkt: 10,79	Bkt: 14,95	Bkt: 12.330	Bkt: 78,72
	Sbr: 68,66	Sbr: 8,42	Sbr: 13,60	Sbr: 9.803	Sbr: 69,98
	Ind: 70,78	Ind: 7,84	Ind: 12,55	Ind: 10.150	Ind: 69,55
2016	Bkt: 73,60	Bkt: 10,98	Bkt: 14,93	Bkt: 12.475	Bkt: 79,11
	Sbr: 68,73	Sbr: 8,59	Sbr: 13,79	Sbr: 10.126	Sbr: 70,73
	Ind: 70,90	Ind: 7,95	Ind: 12,72	Ind: 10.420	Ind: 70,18

219



Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	IPM
2017	Bkt: 73,69	Bkt: 11,30	Bkt: 14,94	Bkt: 12.816	Bkt: 79,91
	Sbr: 68,78	Sbr: 8,72	Sbr: 13,94	Sbr: 10.306	Sbr: 71,24
	Ind: 71,06	Ind: 8,10	Ind: 12,85	Ind: 10.664	Ind: 70,81
2018	Bkt: 73,91	Bkt: 11,31	Bkt: 14,95	Bkt: 13.035	Bkt: 80,11
	Sbr: 69,01	Sbr: 8,76	Sbr: 13,95	Sbr: 10.634	Sbr: 71,73
	Ind: 71,20	Ind: 8,17	Ind: 12,91	Ind: 11.059	Ind: 71,39
2019	Bkt: 74,22	Bkt: 11,32	Bkt: 14,96	Bkt: 13.586	Bkt: 80,71
	Sbr: 69,31	Sbr: 8,92	Sbr: 14,01	Sbr: 10.925	Sbr: 72,39
	Ind: 71,34	Ind: 8,34	Ind: 12,95	Ind: 11.299	Ind: 71,92
2020	Bkt: 74,38	Bkt: 11,33	Bkt: 14,97	Bkt: 13.282	Bkt: 80,58
	Sbr: 69,47	Sbr: 8,49	Sbr: 14,02	Sbr: 10.733	Sbr: 72,28
	Ind: 71,47	Ind: 8,48	Ind: 12,98	Ind: 11.010	Ind: 71,94
2021	Bkt: 74,50	Bkt: 11,34	Bkt: 14,98	Bkt: 13.331	Bkt: 80,70
	Sbr: 69,59	Sbr: 7,07	Sbr: 14,09	Sbr: 10.790	Sbr: 72,65
	Ind: 71,47	Ind: 8,48	Ind: 12,98	Ind: 11.156	Ind: 72,29
2022	Bkt: 74,82	Bkt: 11,63	Bkt: 14,99	Bkt: 13.633	Bkt: 81,42
	Sbr: 69,90	Sbr: 9,18	Sbr: 14,10	Sbr: 11.130	Sbr: 73,26
	Ind: 71,47	Ind: 8,48	Ind: 12,98	Ind: 11.479	Ind: 72,91

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Hasilnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2022. Yaitu dari 80,58 tahun 2020, menjadi 80,70 pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 0,12 serta akhirnya meningkat cukup signifikan tahun 2022 menjadi 81,42 atau mengalami peningkatan sebesar 0,72.

### 2.3. Penetapan APBD, Pergeseran serta Perubahan APBD APBD Tahun 2022

Setelah ditetapkannya APBD Tahun 2022, maka terdapat 3 (tiga) kali pergeseran APBD, 1 (satu) kali perubahan APBD dan 1 (satu) kali pergeseran setelah perubahan APBD, sebagaimana kami cantumkan di bawah ini:

1. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022
2. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.
3. Perwako Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perwako Bukittinggi No 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022 tanggal 31 Januari 2022. Pergeseran dilakukan untuk mengakomodir antara lain pergeseran rekening untuk gaji tenaga kontrak.
4. Perwako Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Perwako Bukittinggi No 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022 tanggal 31 Maret 2022 untuk antara lain mengakomodir Bantuan Keuangan Pariwisata dari Provinsi untuk Kota Bukittinggi.

819

5. Perwako Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Perwako Bukittinggi No 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022 tanggal 4 Agustus 2022 untuk mengakomodir antara lain BKK pendidikan dari Bukittinggi ke pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 yang dominan adalah untuk mengakomodir perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran.
  7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 9 Desember 2022 untuk mengakomodir kekurangan gaji Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bukittinggi.

**BAB III****IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN****3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Pencapaian target kinerja keuangan dalam rangka merumuskan kebijakan fiskal daerah, APBD memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk memaksimalkan pelaksanaannya diharapkan setiap program dan kegiatan dapat dilakukan secara maksimal yang didasarkan kepada efisiensi dan efektifitas kegiatan sehingga setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan dampak yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pada bagian ini akan diuraikan secara umum beberapa hal terkait dengan realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan pelaksanaan anggaran Tahun 2022.

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 pada APBD Perubahan ditetapkan sebesar Rp714.157.721.650,00 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 pada APBD Perubahan ditetapkan sebesar Rp837.145.281.505,00. Komposisi pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp(122.987.559.855,00) yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah.

Dari target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 tersebut, dapat diuraikan realisasinya secara ringkas sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.1.1

**Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan  
Pemrintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 dan Tahun 2021**

URAIAN	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	Kemampuan Pembayaran	%
1	2	3	4	5	6	7-8/5
PENDAPATAN DAERAH - LRA	714.157.721.650,00	698.402.386.323,22	684.347.661.146,00	688.635.654.453,61	9.747.331.869,61	0,01
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	136.257.791.456,00	130.796.925.183,85	92.110.328.555,00	91.796.288.185,61	39.018.636.996,24	0,43
Pencapaian Pngk Daerah - LRA	50.269.652.262,00	49.570.750.368,00	37.070.592.710,00	40.765.025.893,00	8.905.734.525,00	0,22
Pencapaian Retribusi Daerah - LRA	48.684.034.000,00	46.862.398.969,00	25.609.269.520,00	27.401.880.331,00	10.260.518.638,00	0,70
Pencapaian Hasil Pengabdian Masyarakat Daerah yang Diperoleh	7.565.000.000,00	6.541.291.925,00	5.462.031.528,00	5.462.031.608,00	1.159.260.317,00	0,21
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	29.798.905.194,00	27.922.483.891,85	23.948.534.818,00	18.137.356.353,61	9.785.133.536,24	0,54
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	577.895.936.194,00	567.405.461.139,37	592.236.532.596,00	596.848.764.268,69	(29.243.305.128,63)	(0,05)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	543.423.791.457,00	532.374.902.562,00	562.370.143.182,00	561.086.880.504,00	(28.511.977.942,00)	(0,05)
Dana Perimbangan	543.423.791.657,00	532.574.902.562,00	516.838.587.182,00	515.555.324.504,00	17.079.578.058,00	0,03
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	45.531.556.000,00	45.531.556.000,00	(45.531.556.000,00)	(1,00)
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Transfer antar Daerah	34.476.138.537,00	34.312.371.126,00	29.866.389.408,00	32.675.257.234,00	2.137.713.896,00	0,07
Pendapatan Bagi Hasil	34.076.138.537,00	34.312.871.120,00	29.866.389.408,00	32.675.257.234,00	1.737.713.896,00	0,05
Bantuan Keuangan	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	217.587.457,37	-	3.086.628.530,00	(2.869.041.072,63)	(0,93)
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan	-	217.587.457,37	-	3.086.628.530,00	(2.869.041.072,63)	(0,93)
BELANJA DAERAH	837.145.281.505,00	744.059.199.525,66	783.759.843.034,00	650.051.328.563,46	94.007.870.962,20	0,14
BELANJA OPERASI	675.422.845.466,00	611.262.131.931,16	642.962.609.696,00	555.168.586.260,11	56.003.545.670,02	0,10

P.19

URAIAN	Anggaran 2022		Realisasi 2022		Anggaran 2021		Realisasi 2021		Kemungkinan Perubahan		%
	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Pegawai	325.444.707.669,00	301.394.096.541,66	327.664.639.135,00	296.371.615.565,25	5.012.460.976,41	0,02					
Belanja Barang dan Jasa	301.912.136.291,00	264.544.058.412,28	285.502.732.925,00	236.889.663.677,43	27.854.394.734,85	0,12					
Belanja Subsidi	3.385.020.000,00	2.910.989.266,00	-	-	2.910.989.266,00						
Belanja Hibah	42.425.478.526,00	40.192.987.711,16	23.655.237.528,00	21.827.307.017,43	10.165.680.683,73	0,01					
Belanja Bantuan Sosial	2.255.000.000,00	2.230.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.150.000.000,00	1,06					
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>147.955.768.352,00</b>	<b>124.005.630.244,56</b>	<b>123.125.748.792,00</b>	<b>93.838.638.113,35</b>	<b>30.966.995.131,21</b>	<b>0,33</b>					
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-						
Belanja Modal Perakitan dan Mesin	60.312.618.236,00	48.131.479.720,00	49.999.944.467,00	42.231.774.799,80	5.899.704.920,20	0,14					
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.140.307.759,00	25.739.508.574,06	29.277.125.124,00	23.949.425.057,53	1.790.083.516,53	0,07					
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.780.228.857,00	45.540.961.384,00	40.888.820.001,00	24.162.072.115,02	21.338.870.268,49	0,88					
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.742.714.500,00	4.633.690.566,00	2.961.859.200,00	2.695.363.140,00	1.938.327.426,00	0,72					
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-						
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.900.000.000,00</b>	<b>271.437.350,00</b>	<b>17.671.485.426,00</b>	<b>1.844.187.190,00</b>	<b>(1.572.668.840,00)</b>	<b>(0,85)</b>					
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	271.437.350,00	17.671.485.426,00	1.844.187.190,00	(1.572.668.840,00)	(0,85)					
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>8.766.666.667,00</b>	<b>8.520.000.000,00</b>	-	-	<b>8.520.000.000,00</b>						
<b>BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>8.766.666.667,00</b>	<b>8.520.000.000,00</b>	-	-	<b>8.520.000.000,00</b>						
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	-	-	-	-	-						
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>837.145.281.505,00</b>	<b>744.059.190.525,66</b>	<b>783.759.843.834,00</b>	<b>650.051.328.563,46</b>	<b>94.007.870.962,20</b>	<b>0,14</b>					
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(122.987.589.855,00)</b>	<b>45.656.813.202,44</b>	<b>(98.412.782.688,00)</b>	<b>38.583.726.800,15</b>	<b>(84.240.530.092,50)</b>	<b>(2,18)</b>					
<b>PEMBAYARAN DAERAH</b>	-	-	-	-	-						
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>132.987.589.855,00</b>	<b>132.979.600.890,90</b>	<b>99.412.782.688,00</b>	<b>94.403.833.965,75</b>	<b>38.575.166.925,15</b>	<b>0,41</b>					
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	132.987.589.855,00	132.979.000.890,90	99.399.026.225,00	94.377.877.512,75	38.661.923.378,15	0,41					

URSAH	Anggaran 2022		Realisasi 2022		Anggaran 2021		Realisasi 2021		Koreksi/ Penurunan	%
	Rp		Rp		Rp		Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pencairan dana Cadangan	-	-	-	26.756.453,00	(26.756.453,00)	(1,00)				
<b>PENCULIARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	-	<b>10.000.000.000,00</b>					
Penyetoran Model Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00					
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>122.987.559.855,00</b>	<b>122.979.000.899,90</b>	<b>122.979.000.899,90</b>	<b>99.412.782.688,00</b>	<b>28.575.166.925,15</b>	<b>0,30</b>				
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>77.322.187.688,48</b>	<b>-</b>	<b>132.987.559.855,90</b>	<b>(55.665.372.167,44)</b>	<b>(0,42)</b>				

*R/A*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum pendapatan daerah tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp698.402.386.323,22 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp714.157.721.650,00 atau 97,79%. Dibandingkan dengan tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp684.347.061.146,00 direalisasikan sebesar Rp688.635.054.453,61 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp9.767.331.869,61 atau 0,01%. Pencapaian target pendapatan tersebut meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp130.796.925.183,85 dari target yang ditetapkan sebesar Rp136.257.791.456,00 atau 95,99% dari anggarannya dan mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp39.016.304.498,24 atau 0,43% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.
- b. Pendapatan Transfer dengan realisasi mencapai 98,18% atau sebesar Rp567.387.873.682,00 dari anggaran sebesar Rp577.899.930.194,00 dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp593.762.137.738,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp592.236.532.990,00 terdapat penurunan sebesar Rp(26.374.264.056,00) atau (0,04)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target pendapatan sebesar Rp0 direalisasikan sebesar Rp217.587.457,37, dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat penurunan realisasi (0,93)% atau sebesar Rp(2.869.041.072,63).

Pendapatan Daerah tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Daerah yang ada pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp837.145.281.505,00 dengan realisasi sebesar Rp744.059.199.525,66 atau menyerap anggaran sebesar 88,88%.

Tabel 3.1.2  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022		Realisasi 2022		Anggaran 2021		Realisasi 2021		Kenaikan/ Penurunan	
	Rp		Rp	%	Rp		Rp	%	Rp	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>675.422.845.485,00</b>	<b>611.262.131.931,16</b>		<b>642.962.609.606,00</b>	<b>555.168.586.260,11</b>	<b>56.993.545.670,99</b>	<b>0,10</b>		
Belanja Pegawai		325.444.707.869,00	301.384.006.541,66		322.664.638.155,00	296.371.615.565,26	5.012.480.976,41	0,02		
Belanja Barang dan Jasa		301.912.136.291,00	264.544.068.412,26		295.562.732.925,00	296.689.663.677,43	27.954.384.734,85	0,12		
Belanja Subsidi		3.385.626.000,00	2.910.989.266,00		-	-	2.910.989.266,00	-		
Belanja Hibah		42.425.478.528,00	40.192.087.711,16		23.655.237.526,00	21.027.307.017,43	19.185.886.603,73	0,91		
Belanja Bantuan Sosial		2.255.000.000,00	2.236.000.000,00		1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	1.150.000.000,00	1,06		
<b>BELANJA MODAL</b>		<b>147.955.788.352,00</b>	<b>124.005.630.244,56</b>		<b>123.125.748.792,00</b>	<b>93.038.635.113,35</b>	<b>30.966.995.131,21</b>	<b>0,33</b>		
Belanja Modal Tanah		-	-		-	-	-	-		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		60.312.518.236,00	46.131.479.720,00		49.999.944.467,00	42.231.774.799,80	5.899.704.920,20	0,14		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		33.140.307.759,00	25.739.508.574,06		29.277.125.124,00	23.949.425.657,53	1.790.083.516,53	0,07		
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		49.780.228.857,00	45.500.951.394,50		40.886.820.001,00	24.462.072.116,02	21.338.879.268,48	0,88		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		4.742.714.500,00	4.633.690.566,00		2.961.859.200,00	2.695.363.140,00	1.930.327.426,00	0,72		
Belanja Modal Aset Lainnya		-	-		-	-	-	-		
<b>BELANJA TIDAK TERBUKA</b>		<b>5.066.006.000,00</b>	<b>271.437.350,00</b>		<b>17.671.485.436,00</b>	<b>1.844.107.190,00</b>	<b>(1.572.669.840,00)</b>	<b>(85,00)</b>		
Belanja Tidak Terbuka		5.000.000.000,00	271.437.350,00		17.671.485.436,00	1.844.107.190,00	(1.572.669.840,00)	(85,00)		
<b>BELANJA TRANSFER</b>		<b>8.766.666.667,00</b>	<b>8.520.000.000,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.520.000.000,00</b>	<b>-</b>		
<b>BELANJA TRANSFER BANTUAN KEJANGCARIAN</b>		<b>8.766.666.667,00</b>	<b>8.520.000.000,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.520.000.000,00</b>	<b>-</b>		
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		-	-		-	-	-	-		
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>837.145.281.505,00</b>	<b>744.059.199.525,66</b>		<b>783.759.843.834,00</b>	<b>650.051.328.563,46</b>	<b>94.007.879.962,20</b>	<b>14,46</b>		

R17



Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum Belanja Daerah tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp744.059.199.525,66 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp837.145.281.505,00 atau 88,88% dari anggaran. Pencapaian target belanja tersebut meliputi :

- a. Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp611.262.131.191.525,66 dari target yang ditetapkan sebesar Rp675.422.845.486,00 atau 90,50% dari anggarannya dan mengalami kenaikan sebesar Rp56.093.545.670,99 atau 0,10% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.
- b. Belanja Modal dengan realisasi mencapai 83,81% atau sebesar Rp124.005.630.244,56 dari anggaran sebesar Rp147.955.769.352,00 terdapat kenaikan sebesar Rp30.966.995.131,21 atau 0,33 % dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021.
- c. Belanja Tidak Terduga dari Anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp271.437.350,0 atau mencapai 5,43%. Dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat penurunan realisasi (0,85)% atau sebesar Rp(1.572.669.840,00).

Dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diuraikan di atas terjadi *defisit* anggaran sebesar Rp(122.987.559.855,00) yang ditutup dengan Pembiayaan Daerah sebesar Rp122.987.559.855,00. Dari target Pembiayaan Daerah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp122.987.559.855,00. Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp132.987.559.855,00 dengan realisasi sebesar Rp132.979.000.890,90 atau 99,99% dari anggarannya.

Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 100% dari anggarannya. Realisasi penerimaan ini sepenuhnya berasal dari SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp132.979.000.890,90.

Dibandingkan dengan tahun 2021 dari anggaran Pembiayaan sebesar Rp99.412.782.688,00 direalisasikan sebesar Rp94.403.833.965,75 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 0,30% atau Rp28.583.725.890,15. Terdiri dari kenaikan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp38.583.725.890,15 atau sebesar 0,41 %.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah maka defisit anggaran yang diperkirakan sebesar Rp(122.987.559.855,00) namun dalam realisasinya terjadi surplus sebesar Rp(45.663.834.026,44), dengan jumlah realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp 122.979.000.890,90 maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp77.322.187.688,46.

Tabel 3.1.3  
Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

URAIAN	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Kontribusi	%
	Rp	Rp	Rp	Rp	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7=5,9
Surplus (Defisit)	122.987.559.855,00	(45.656.813.202,44)	(90.412.782.688,00)	38.503.725.890,15	(84.240.539.092,59)	(2,16)
PEMBIAYAAN DAERAH						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.987.559.855,00	132.979.000.890,90	96.412.782.688,00	94.403.833.965,75	38.575.166.925,15	0,41
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	132.987.559.855,00	132.979.000.890,90	90.386.028.205,00	94.377.077.512,75	38.601.923.378,15	0,41
Pencairan Dana Cadangan	-	-	26.756.453,00	26.756.453,00	(26.756.453,00)	(1,00)
PENGELOMPOKAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-	10.000.000.000,00	
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-	10.000.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTO	122.987.559.855,00	122.979.000.890,90	96.412.782.688,00	94.403.833.965,75	28.575.166.925,15	0,30
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	77.322.187.688,46	-	132.987.559.855,90	(55.665.372.167,44)	(0,42)

879

### 3.2. HAMBATAN/KENDALA DAN FAKTOR PENDUKUNG DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun kendala dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun 2022 antara lain adalah :

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi penerimaan yang ada di Kota Bukittinggi, khususnya pada Penerimaan Retribusi Daerah.
2. Secara umum target Pendapatan Daerah telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, namun masih ada yang belum mencapai seratus persen, seperti Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya 88,49%.
3. Pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih yang disebabkan oleh Pandemi *Covid-19* yang dialami semenjak tahun 2020 yang lalu.
4. Pelaksanaan belanja, secara khusus untuk Belanja Operasi terealisasi sebesar 90,50% dari target, dan Belanja Modal terealisasi sebesar 83,81% secara umum disebabkan kurang optimalnya belanja modal gedung dan bangunan, belanja barang dan jasa yang disebabkan adanya kegiatan yang gagal dilaksanakan pada tahun 2022.
5. Masih kurang maksimalnya pola perencanaan pada SKPD, sehingga dalam tahun berjalan diperlukan penyesuaian Anggaran Belanja pada kegiatan yang mengakibatkan tertundanya realisasi anggaran.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 ini antara lain adalah :

1. Perbaikan sistem kerja, sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja.
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
3. Semakin meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi vertikal lainnya.
4. Dengan meningkatnya penyebaran informasi terkait pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan kesadaran akan kualitas kesehatan masyarakat yang semakin baik apalagi di masa pandemi.

**BAB IV**  
**DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

**4.1. STRUKTUR LAPORAN KEUANGAN**

LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 merupakan laporan gabungan/ konsolidasian seluruh entitas akuntansi pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau yang biasa disebut juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas/ Badan/ Satuan/ Kantor/ Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD termasuk didalamnya fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melekat pada OPD Badan Keuangan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi menggabungkan Laporan Realisasi Anggaran 28 (dua puluh delapan) SKPD yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Surplus/Defisit
- d. Pembiayaan
- e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL memuat laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, SiLPA atau SiKPA serta Saldo Anggaran Lebih Akhir secara komparatif posisi periode tahun 2022 dengan periode sebelumnya tahun 2021 yaitu pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal.
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
- c. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

- c. Lain-lain.
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

### 3. Neraca Daerah

Neraca, menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas sampai dengan tanggal tertentu, Neraca disajikan komparatif antara tahun 2022 dan tahun sebelumnya 2021. Neraca Daerah Kota Bukittinggi memuat informasi-informasi akun-akun Aset yaitu Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset lainnya, akun Kewajiban yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang serta Ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, dan Ekuitas. Pemerintah Kota Bukittinggi mengklasifikasikan Neraca dalam struktur akun sebagai berikut:

#### a. Aset

- 1) Aset Lancar.
- 2) Investasi Jangka Panjang.
- 3) Aset Tetap.
- 4) Dana Cadangan.
- 5) Aset Lainnya.

#### b. Kewajiban

- 1) Kewajiban Jangka Pendek.
- 2) Kewajiban Jangka Panjang.

#### c. Ekuitas

### 4. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban yang surplus atau defisit operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional adalah menggambarkan laporan operasional riil untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, menyajikan pos-pos sebagai berikut:

#### a. Kegiatan Operasional.

- Pendapatan
- Beban
- Surplus/Defisit Operasi

#### b. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

- Surplus Non Operasional
- Defisit Non Operasional

- Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa ,
- c. Pos Luar Biasa
  - Pendapatan Luar biasa
  - Beban Luar Biasa
- d. Surplus/ Defisit LO

#### 5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/ pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran kas tanpa melalui rekening kas umum daerah namun dianggarkan pada APBD maupun yang bersumber dari transitoris (non anggaran).

Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi yakni tahun 2022 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan, laporan arus kas disajikan arus kas masuk dan arus kas keluar secara komparatif antara tahun berjalan dan tahun yang lalu yang terdiri dari:

- a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
    - Arus Masuk Kas
    - Arus Keluar Kas
  - b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
    - Arus Masuk Kas
    - Arus Keluar Kas
  - c. Arus Kas Aktivitas Pendanaan
    - Arus Masuk Kas
    - Arus Keluar Kas
  - d. Arus Kas Aktivitas Transitoris
    - Arus Masuk Kas
    - Arus Keluar Kas
  - e. Kenaikan/ Penurunan Kas
  - f. Saldo Awal Kas
  - g. Saldo Akhir Kas
- #### 6. Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE )

Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit- LO, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari:

- a. Ekuitas Awal.
- b. Surplus/Defisit LO
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
  - Koreksi Nilai Persediaan
  - Selisih Revaluasi Aset Tetap
  - Lain-lain
- d. Ekuitas Akhir.

#### 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi umum entitas dan pelaporan keuangan, kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi, penjelasan mengenai dasar penyusunan laporan keuangan berupa aturan-aturan serta kebijakan akuntansi, penjelasan mengenai pos-pos akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, LPSAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan LPE dalam rangka memenuhi pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam seluruh unsur LKPD, yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagaimana sistematisa penulisan yang telah dijabarkan pada BAB I tentang sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
2. Kebijakan Fiskal/ Keuangan dan Ekonomi Makro
3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
4. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
5. Penjelasan Pos – pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
6. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
7. Penutup

#### 4.2. KEBIJAKAN KONVERSI

Penyusunan APBD Kota Bukittinggi dan penyusunan Laporan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2022 disusun dan disajikan mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait penganggaran.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 telah mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.

Pengaturan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur APBD dan akun/ rekening laporan berdasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dicabut tanggal 27 Desember 2021 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2022.

Demikian juga saldo akhir LKPD tahun 2021, untuk menjadikannya saldo awal tahun 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi telah memverifikasi akun yang dimapping sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tersebut.

### **4.3. ASUMSI DASAR AKUNTANSI**

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

#### **4.3.1. Asumsi Kemandirian Entitas**

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.



#### 4.3.2. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

#### 4.3.3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

#### 4.4. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi :

1. Masyarakat;
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
4. Pemerintah.

Para pengguna laporan keuangan memanfaatkan informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah untuk membuat penilaian, keputusan keuangan dan keperluan manajemen lainnya.

#### 4.5. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

##### 4.5.1. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, serta aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana

diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### 4.5.2. Prinsip Nilai Historis

Prinsip nilai historis pada aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan, sementara itu untuk kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

#### 4.5.3. Prinsip Realisasi

Bagi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

#### 4.5.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 4.5.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode bulanan, triwulanan, dan semesteran digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4.5.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang

lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 4.5.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 4.5.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

### 4.6. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang harus dibayar kembali. Ekuitas dana diakui dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan seluruhnya menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### 4.7. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN LAPORAN KONSOLIDASIAN

##### 4.7.1. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

###### A. Relevan

Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, yaitu:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
3. Tepat waktu.
4. Lengkap.

###### B. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian jujur.
2. Dapat diverifikasi (*verifiability*).
3. Netralitas.

###### C. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

###### D. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

##### 4.7.2. Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan--alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, yaitu:

1. Materialitas.
2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat.
3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif.

#### 4.7.3. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati dalam penyusunan standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan. Berikut adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sebagai berikut:

1. Basis akuntansi
2. Prinsip nilai historis
3. Prinsip realisasi
4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal
5. Prinsip periodisitas
6. Prinsip konsistensi
7. Prinsip pengungkapan lengkap
8. Prinsip penyajian wajar.

#### 4.7.4. Jenis dan Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK, CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Dengan demikian laporan keuangan pokok pemerintah daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
3. Neraca.
4. Laporan Operasional (LO).
5. Laporan Arus Kas (LAK).
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

#### 4.7.5. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/ peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas antara lain:

1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi
2. Keandalan Pengukuran

#### 4.8. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

##### 4.8.1. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Akuntansi Anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

Secara umum prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu:

##### 4.8.2. Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat

jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pembagian Pendapatan terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

#### **4.8.3. Akuntansi Belanja**

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD bagi pengeluaran yang menggunakan SP2D Langsung Gaji, SP2D Langsung untuk Belanja Tidak Langsung, SP2D Langsung Barang dan Jasa termasuk belanja Modal dan Transfer.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh fungsi Perbendaharaan;
3. Untuk badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Bagi belanja atas penggunaan Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP Pemerintah Kota Bukittinggi mengakui belanja jika telah ada pengesahan pertanggungjawaban belanja tersebut oleh BUD/Kuasa BUD.

#### **4.8.4. Akuntansi Pembiayaan**

##### **4.8.4.1. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dengan maksud akan dibayar Kembali pada masa yang akan datang antara lain berasal dari penerimaan SiLPA/SiKPA penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. .

Pengukuran dan pencatatan penerimaan pembiayaan adalah dengan menggunakan asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan potongan dan sebagainya) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah dikeluarkan.

##### **4.8.4.2. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dengan maksud akan diterima kembali di masa yang akan datang. Pengeluaran

Pembiayaan antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, pembentukan/ penambahan Investasi/ penyertaan modal pemerintah, pembentukan dana cadangan

Pengukuran dan pencatatan pengeluaran pembiayaan adalah dengan menggunakan asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran/biaya) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah dikeluarkan.

#### 4.8.5. Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar adalah kelompok pendapatan yang bersumber dari APBD, yaitu penerimaan pendapatan daerah yang telah dianggarkan pada APBD Tahun berjalan, baik yang angkanya dapat diestimasi maupun yang tidak. Pada APBD anggaran pendapatan dapat bernilai "0" (nol) karena tidak semua akun penerimaan pendapatan bisa diberikan target. Atas kelompok APBD tersebut, terdapat lima kelompok pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO.
2. Pendapatan Transfer-LO.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO.
4. Surplus Non Operasional-LO.
5. Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pengakuan Pendapatan LO terdiri dari :

1. Dengan Penetapan.
2. Tanpa Penetapan.
3. Hasil Eksekusi Pengadilan/ Jaminan

Penetapan yang dimaksud adalah ketika secara jabatan ditetapkan hak pemerintah atas pendapatan. Penetapan yang dimaksud adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Kurang Bayar/Lebih Bayar atas dokumen yang ditetapkan serta dokumen yang disetarakan dengan penetapan. Tanpa penetapan yang dimaksud adalah penerimaan kas atas pendapatan tanpa didahului oleh penetapan.

Pendapatan dari hasil eksekusi pengadilan/ jaminan adalah pendapatan yang merupakan hak Kota Bukittinggi melalui penetapan oleh pengadilan atas sidang kasus tertentu, sementara hasil eksekusi jaminan merupakan pendapatan yang menjadi hak Kota Bukittinggi disebabkan eksekusi terhadap jaminan pelaksanaan maupun pemeliharaan akibat kondisi tertentu dari perjanjian/kontrak yang dilakukan dengan pihak ketiga.



Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah diakui pada saat sebagai berikut:

1. Timbulnya hak (piutang) pemerintah daerah atas dana transfer tersebut sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan penetapan yang bersifat definitif, sedangkan peraturan/ketentuan yang bersifat alokasi belum bisa dijadikan dasar untuk pengakuan hak Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Namun adakalanya penetapan yang berjudul definitif belum dapat diakui sebagai pendapatan jika pemerintah membiasakan penerbitan penetapan kurang/lebih salur. Ketentuan kurang/lebih salur lebih kuat kedudukannya daripada penetapan definitif.

Pada awal penyaluran dari ketentuan tentang alokasi, pendapatan transfer tersebut akan dicatat sebesar realisasinya sebagai kas ke kas daerah atau kas ke bendahara yang telah ditetapkan. Sementara Piutang atau Utang atas Kurang Bayar dan Lebih Bayar akan diakui pada saat terbitnya ketentuan definitif atas Kurang Bayar maupun Lebih Bayar penyalurannya.

Selain pencatatan terhadap kurang/lebih salur, Pemerintah Kota Bukittinggi juga memberlakukan pencatatan dana treasury yang difasilitasi oleh pemerintah pusat ke akun kelompok aset lainnya berdasarkan arahan pihak Pemerintah Pusat. Arahan kebijakan dari pemerintah pusat mungkin berbeda dari lainnya, namun kelengkapan dokumen dan substansi suatu kejadian dan transaksi tetap dipertimbangkan.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan PAD dan Pendapatan Transfer, yaitu antara lain: Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Pendapatan hibah diakui pada saat dokumen pengajuan pencairan dana hibah diterbitkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah.

Hibah yang berupa barang juga dicatat sebagai pendapatan operasional sebesar nilai hibah pada Berita Acara Hibah atau yang setara. Barangnya diakui sebagai persediaan atau aset apabila nilai perolehan hibah tersebut memenuhi kriteria perolehan dan nilai rupiahnya telah melebihi batasan minimum biaya yang dapat dikapitalisasi bagi barang yang berkategori aset tetap..

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar), dan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan telah diterima.

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika telah diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.

#### 4.8.6. Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat:

##### 1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

##### 2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

##### 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu (contohnya: penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud).

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban persediaan dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

##### 1. Metode Pendekatan Beban

Dengan metode pendekatan beban setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/ dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin.

##### 2. Metode Pendekatan Aset

Dengan metode pendekatan aset setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan metode pendekatan beban dalam pencatatan persediaannya demi memudahkan pengukuran, pencatatan maupun penyajian nilai persediaan.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan penghitungan penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah oleh bidang/seksi pengelola pendapatan masing-masing SKPD. Berdasarkan kertas kerja penyisihan piutang tersebut PPK SKPD membuatkan bukti memorial atas penyisihan piutang tersebut untuk melakukan pencatatan transaksi.

#### 4.8.7. ASET

##### 4.8.7.1 Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Daerah.

##### A. Kas dari Transaksi Pendapatan

Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau.
2. Diterima di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

##### B. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Belanja pemerintah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) yang selanjutnya dengan Ganti Uang (GU), pembayaran langsung (LS) baik terhadap belanja pegawai, barang dan jasa maupun belanja modal. Pengeluaran kas untuk belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

##### C. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan daerah yang berasal dari utang yang wajib dikembalikan, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun atau tahun-tahun anggaran berikutnya dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

1. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan
2. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special*

*account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu kejadiannya diantara.

- 1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali, atau
- 2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

#### **D. Pengeluaran Kas Akibat Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran kas untuk pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi:

1. Pemberian pinjaman, menyebabkan timbulnya piutang.
2. Pelunasan pokok utang, menyebabkan berkurangnya utang.
3. Pengeluaran kas untuk investasi, penyertaan modal negara/ pemerintah daerah, menyebabkan penambahan investasi pada sisi aset.
4. Pembentukan dana cadangan menyebabkan penambahan dana cadangan.

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

1. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan.
2. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

#### **4.8.7.2 Piutang**

Piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Mengenai teknis penggolongan dan penyisihan piutang berpedoman kepada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi yang berlaku.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dengan berdasarkan dokumen:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah.
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Beban Dibayar Dimuka diakui untuk jumlah nilai belanja sewa atau semacamnya yang belum menjadi beban pada akhir tahun anggaran.

Untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.
2. Jumlah piutang dapat diukur.
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Beban Dibayar Dimuka dihitung berdasarkan dokumen belanjanya dengan memisahkan beban di tahun berjalan dengan beban di tahun-tahun berikutnya. Jumlah yang dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka adalah jumlah yang menjadi beban di tahun-tahun berikutnya, karena jumlah tersebut masih berupa hak dan belum dapat dieksekusi oleh pihak lain menjadi kewajiban tahun berjalan Pemerintah Kota Bukittinggi.

#### 4.8.7.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

##### 4.8.7.3.1 Pengakuan Persediaan

Pengakuan persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem pencatatan akuntansi secara periodik (*periodical system*) dengan pendekatan beban untuk semua SKPD dan untuk semua jenis persediaannya, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan harus dicatat dengan metode *perpetual* untuk akun persediaan tertentu.

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem periodik dengan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, artinya setiap adanya perolehan terhadap persediaan, baik yang berasal dari belanja maupun sebab lainnya, SKPD akan mencatatnya sebagai beban, bukan persediaan. Nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal pada akhir periode laporan neraca SKPD pada setiap unit kerja yang ada di SKPD. Untuk masa transisi,

perhitungan fisik dilakukan terbatas terhadap persediaan barang yang ada pada unit penyimpanan barang saja.

Hasil inventarisasi fisik pada penyimpanan barang harus menggambarkan nilai akhir persediaan dalam artian saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi jumlah pemakaian persediaan dan dikalikan nilai harga per unit dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

*Stock opname* dilakukan oleh masing-masing SKPD dan direkapitulasi oleh bendahara/ pengurus barang SKPD. Terhadap laporan tersebut PPK SKPD akan mencatat nilai persediaan yang ada dan melakukan penyesuaian terhadap beban persediaan. Pada saat itulah Pemerintah Kota Bukittinggi telah mendapatkan potensi manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal terhadap persediaan dan bebannya.

#### 4.8.7.3.2 Pengakuan Beban Persediaan

Pengakuan beban persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, setiap perolehan persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

Dengan menggunakan sistem periodik dan pendekatan beban tersebut, nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal diunit penyimpanan barang pada akhir periode laporan neraca SKPD dan beban persediaan disesuaikan dengan nilai persediaan sehingga nilai beban persediaan yang muncul di Laporan Operasional yang disampaikan adalah sebesar nilai persediaan yang terpakai/habis.

Hasil inventarisasi fisik hendaknya juga menggambarkan jumlah beban persediaan pada akhir periode pelaporan, yaitu sebesar persediaan yang telah terpakai/habis. Jumlah beban persediaan tersebut berasal dari jumlah saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi saldo akhir persediaan dan dikalikan nilai harga per unit.

#### 4.8.7.3.3 Selisih Persediaan

Selisih persediaan sering kali terjadi antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

#### 4.8.7.4 Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemko Bukittinggi sampai saat ini berupa saham pada kelompok Investasi permanen untuk peruntukan jangka panjang dan dana bergulir yang berada pada kelompok investasi non permanen.

#### 4.8.7.4.1 Pengakuan investasi

Pengakuan Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas ditambah dengan penambahan dan pengurangan nilai baik akibat setoran Pemerintah Kota Bukittinggi maupun perkembangan dan penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dana oleh penerima investasi (*investee*) yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/ andal (*reliable*).

Pengeluaran kas tersebut untuk memperoleh investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir (*bruto*) yang secara periodik, Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan penyesuaian terhadap nilai Dana Bergulir yang berasal dari tambahan kucuran dana bergulir dari Pemerintah Kota Bukittinggi maupun penambahan yang berasal dari perkembangan dana bergulir oleh masyarakat. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) merupakan nilai dana bergulir yang dikurangi penyisihan nilai dana bergulir tersebut.

Teknis penyisihan dana bergulir adalah sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

#### 4.8.7.4.2 Pengakuan Hasil Investasi

Pengakuan hasil investasi diakui sebagai berikut:

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah, sedangkan dividen dalam bentuk saham tidak mengurangi nilai investasi.

#### 4.8.7.5 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan/material dan perlengkapan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

##### 1. Mempunyai Masa Manfaat Lebih dari 12 Bulan

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

##### 2. Biaya Perolehan Aset Dapat Diukur Secara Andal

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak



kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

3. Tidak Dimaksudkan Untuk Dijual Dalam Operasi Normal Entitas

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

4. Diperoleh Atau Dibangun Dengan Maksud Untuk Digunakan

Aset Tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

5. Memenuhi Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap yang Telah Ditetapkan.

Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap. Ketentuan tentang batas jumlah biaya ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi. Batasan tersebut adalah Peralatan dan Mesin besar sama dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Gedung dan Bangunan besar sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Jalan, Irigasi dan Jaringan besar sama dengan Rp1,00 (satu rupiah), Aset Tetap Lainnya besar sama dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk kelompok lainnya adalah besar sama dengan Rp1,00 (satu rupiah). Terhadap nilai perolehan dan/atau pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang tidak memenuhi batas jumlah biaya diakui sebagai *extracomptable*.

**Tabel 4.8.7.1**  
**Kapitalisasi Aset Tetap**

No	Aset Tetap	Batas Kapitalisasi (Rp)	Keterangan
1.	Tanah	1,00	
2.	Peralatan dan Mesin	500.000,00	
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,00	
5.	Aset Tetap Lainnya	50.000,00	

**4.8.7.5.1 Tanah**

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual.
4. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
5. Memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
  - a) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
  - b) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

279

- c) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e) Tanah yang digunakan/ dipakai oleh instansi pemerintah yang masih berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### 4.8.7.5.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin, pengakuannya dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini, misalnya ditandai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan. Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

#### 4.8.7.5.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi. Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

#### 4.8.7.5.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

#### 4.8.7.5.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

#### 4.8.7.5.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

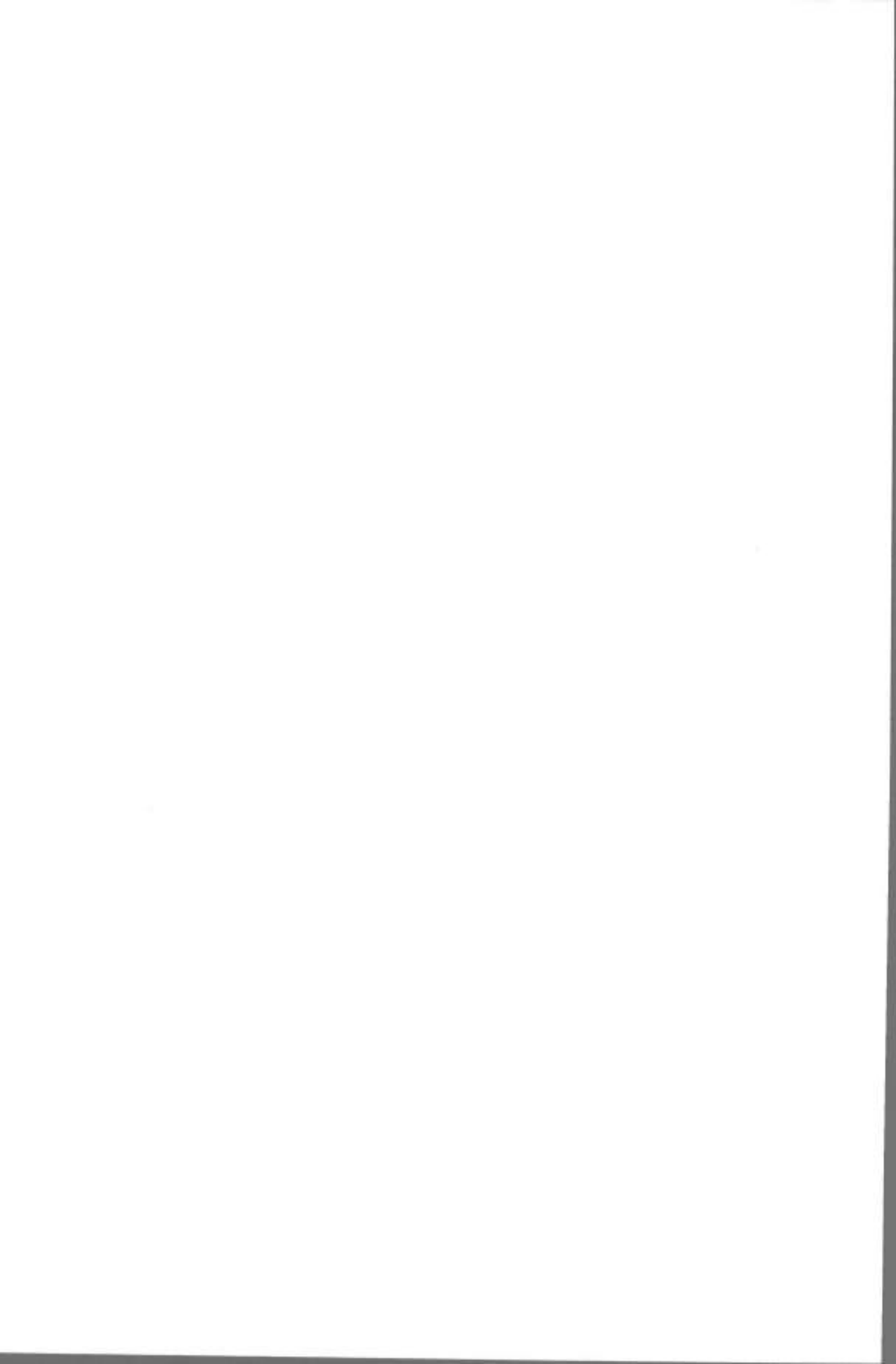
Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal.
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan. Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan ini memberikan pedoman sebagai berikut:

1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah bisa dimanfaatkan oleh SKPD maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
3. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.



4. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
5. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam Pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*forcemajeur*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*forcemajeur* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapus bukukan.
6. Apabila ada pemutusan kontrak pekerjaan, dimana Berita Acara Serah Terima (BAST) dan atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) dan aset tetap tersebut belum bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya, maka akan diakui sebagai KDP. Sebaliknya apabila aset tetap tersebut dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya, meskipun fisiknya belum selesai 100% (seratus persen), maka dapat diakui sebagai aset tetap.

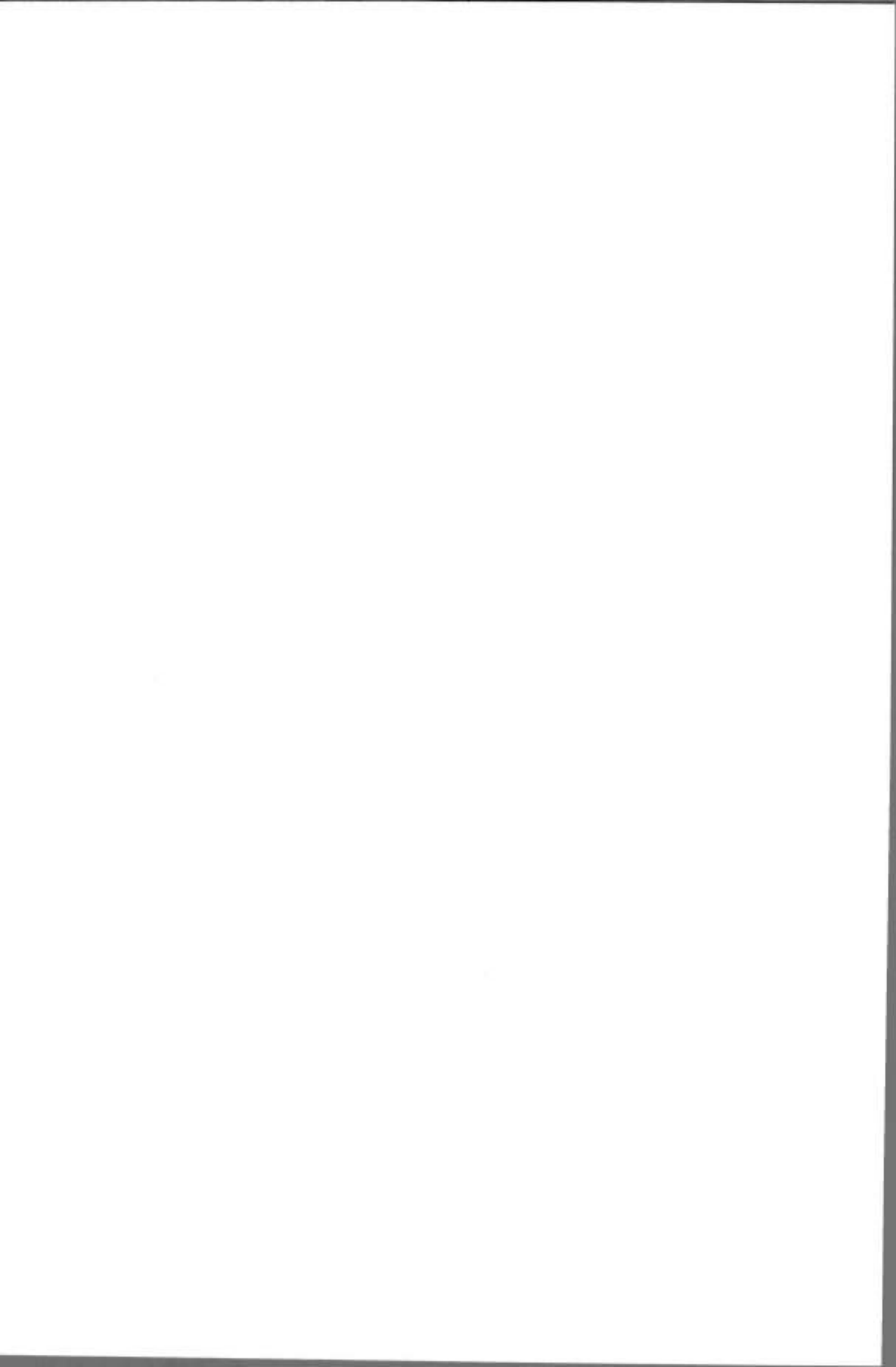
Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 4.8.7.5.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan diakui pada saat penghitungan tambahan nilai penyusutan dari suatu aset tetap menurut teknis penyusutan yang dilakukan sesuai aturan dan kebijakan yang dipedomani.

Nilai penyusutan aset tetap setiap tahunnya dihitung dengan membandingkan antara nilai perolehan aset tetap dengan umur manfaat aset tetap yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, dengan menggunakan formula sebagai berikut;

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan Aset}}{\text{Umur Manfaat Aset}}$$



Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus dengan formula yang sama dengan formula penyusutan aset tetap.

#### 4.8.7.5.8 Aset Tetap Renovasi

Aset tetap renovasi, pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis dari aset tetap, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap Renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap sesuai kelompoknya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 diatas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
3. Apabila jumlah nilai biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir 1 dan 2 diatas adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Perolehan Aset Tetap, selain Aset Tetap Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/ donasi. Pengakuan aset tetap melalui pembelian didahului dengan pengakuan pada belanja modal.

#### 4.8.7.6 Aset Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.



Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme SP2D-LS atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### 4.8.7.7 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya, Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap yang telah diusulkan untuk dihapus karena telah rusak berat dan hilang (non operasional), serta aset yang nilai perolehannya di bawah nilai batas kapitalisasi untuk aset tetap.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut;

##### 4.8.7.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

###### 1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah dan pihak lain sesuai peraturan yang berlaku.

###### 2. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian

tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

#### 4.8.7.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga, untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

##### 1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga–Sewa.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

##### 2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

##### 3. Bangun Guna Serah–BGS (*Build, Operate, Transfer–BOT*).

Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

##### 4. Bangun Serah Guna–BSG (*Build, Transfer, Operate–BTO*).

Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

#### 4.8.7.3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB dapat diakui sebagai suatu entitas harus dapat dibuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang disetarakan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan

pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran *setelah* perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat didistribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya:

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas.
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB. Aset Tak Berwujud (ATB) terdiri atas:

1. Goodwill.
2. Royalti.
3. Lisensi.
4. Hak Paten.
5. Aset Tidak Berwujud Lainnya.

Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. Pengakuan untuk Aset Tidak Berwujud Lainnya adalah sebagai berikut :

#### A. Perlakuan Khusus untuk *Software* Komputer

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri, biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan *software* tersebut, maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB, yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap awal kegiatan

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternative untuk pengembangan *software* tersebut.

- b. Tahap pengembangan aplikasi

Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi *software* dan *software interface*, *koding*, *meng-install ke hardware*, *testing*, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasionalkan *software*.

- c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi

Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software*.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya. Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai.
- b. Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

2. Perolehan *software* secara eksternal

Ada beberapa kondisi untuk *software* yang diperoleh secara eksternal, yaitu:

- a. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah, maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.
- b. Untuk *software* yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk digunakan sendiri, namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
- c. Untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap *software* yang diperoleh secara *eksternal* tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah;

- a. Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja.
- b. Apakah ada batasan waktu/izin penggunaan *software*.
- c. Berapa lama izin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
- b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.

### 3. Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Meningkatkan fungsi *software*.
- b. Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up-grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi.

### B. Perlakuan untuk Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang

Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial di masa yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai aset.

#### 1. Pengakuan yang Diperoleh Secara Internal

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

- a. Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/ riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/ aktivitas internal, pemerintah tidak/ belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

## b. Tahap Pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) *harus diakui jika dan hanya jika*, pemerintah daerah dapat memperlihatkan *seluruh kondisi* di bawah ini, yaitu adanya:

- 1) Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan.
- 2) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- 3) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut.
- 4) Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang.
- 5) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak Berwujud tersebut.
- 6) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang didistribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/ kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial dimasa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (*further advance*) atas tahap penelitian/riset.

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/ pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

- a. Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/ pengembangan tersebut.
- b. Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut.
- c. Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain.
- d. Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Jika pemerintah daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, maka seluruh pengeluaran atas kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/ riset.

## 2. Pengakuan dari Penelitian Dibiayai Instansi Lain

Pada praktik di pemerintahan daerah terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu, namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian

yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintah daerah dan konsep entitas, maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan bahwa perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan yang memperoleh dana penelitian dari pemerintah tidak dapat mengalihkan kepemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kontrol terhadap aset yang dihasilkan, hal ini merupakan salah satu kriteria untuk mengakui ATB.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan.

Pihak perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan penelitian tidak mencatat ATB tersebut, namun sesuai dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan tersebut adalah sebagai pengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukannya. Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang tersebut mengupayakan perlindungan hukum atas kepemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

Dengan demikian apabila hasil penelitian tersebut dipatenkan, dan biaya patennya dikeluarkan oleh instansi lembaga penelitian, maka ATB berupa paten tersebut dicatat oleh lembaga penelitian sebesar jumlah biaya patennya.

### C. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan



(*intangible asset – work in progress*) dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

#### 4.8.7.4. Aset Lain-Lain

Kelompok Aset Lain-lain adalah:

1. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain; dan
2. Aset Tetap yang masih dalam proses serah terima kepada pihak ketiga.

#### 4.8.8. KEWAJIBAN

##### 4.8.8.1. Klasifikasi

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang pajak, utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Kewajiban terdiri dari 2 (dua) yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

##### 4.8.8.2. Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada setelah tanggal pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

##### A. Timbulnya Kewajiban

Secara umum kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*),

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK dan kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*),

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*),

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*),

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Kewajiban jangka pendek biasanya terdiri atas:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
- b. Utang Bunga
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- d. Pendapatan Diterima di Muka.
- e. Utang Jangka Pendek Lainnya.

## B. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat:

1. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah.
2. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah.
3. Pada saat jatuh kewajiban pemerintah daerah untuk membayar kewajiban yang timbul dari belanja dan/ atau kelebihan pendapatan atau dari sebab yang lain.

### 4.8.8.3. Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan *kurs* tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

#### A. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain diakhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Contoh:

1. Utang taspen, iuran jaminan dan sebagainya yang bersifat transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Utang pajak, yaitu kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah pusat sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang pajak diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### B. Utang Bunga

Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

#### C. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

#### D. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka yang dicatat sebagai utang adalah selisih antara pendapatan yang diterima dengan manfaat yang telah ditentukan oleh Pihak Ketiga.

### E. Utang Belanja

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan dan berita acara yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

### F. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar (yang diharapkan dibayar paling lama 12 (dua belas bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban jangka pendek lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Contoh:

1. Utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.
2. Penerimaan pembayaran Dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Dari sifatnya, utang juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan.

Utang yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2. Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan.

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah dan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

#### 4.8.9. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas akan bertambah bila terdapat pendapatan-LO, yang merupakan hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan, yang dapat menurunkan nilai ekuitas adalah beban, yang merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Selisih antara pendapatan-LO dan beban merupakan Surplus Defisit – LO yang akan ditutupan (menambah) nilai ekuitas pada 1 (satu) periode akuntansi. Ekuitas juga dipengaruhi oleh dampak kebijakan dan kejadian luar biasa yang dinilai menjadi:

1. Koreksi Nilai Aset Tetap.
2. Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap.
3. Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain.
4. Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
5. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang.
6. Koreksi Nilai Aset Lain-lain.
7. Koreksi Nilai Persediaan.
8. Selisih Revaluasi Aset Tatap.
9. Koreksi atas Pendapatan.
10. Koreksi Lain-lain.

Mengenai klasifikasi dan keterangan lebih lengkap Kebijakan Akuntansi terhadap akun-akun Laporan Keuangan dapat dilihat pada Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

#### 4.8.10. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Terdapat 8 (delapan) UPTD di Kota Bukittinggi yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yaitu:

Tabel 4.8.10.1. UPTD yang Telah Menerapkan PPK BLUD

No.	Nama UPTD	Sumber Dana BLUD	Keterangan
1.	Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
2	Puskesmas Guguk Panjang	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
3	Puskesmas Nilam Sari	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
4	Puskesmas Mandiangin	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
5	Puskesmas Gulai Baneah	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
6	Puskesmas Tigo Baleh	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
7	Puskesmas Plus Mandiangin	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
8	Rumah Sakit Umum Daerah	Semua penerimaan UPTD	Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 t tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi

Dengan diterbitkan dan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, aturan tentang BLUD menjadi lebih jelas dibanding Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 termasuk penyediaan Laporan Keuangan BLUD sebanyak 7 (tujuh) macam sama halnya dengan jenis laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Aturan perundang-undangan sesudahnya menghendaki pemberlakuan PPK BLUD bagi Rumah Sakit Daerah yang baru berdiri. Maka dari itu tanggal 14 Februari 2021 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai UPTD yang mengimplementasikan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Sebelumnya, tahun 2016, 7 (tujuh) UPTD Puskesmas telah lebih dahulu melaksanakan PPK BLUD dengan status penuh, yakni dengan dana yang bersumber dari dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD), BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan.

Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara yang dipisahkan, BLUD adalah juga entitas pelaporan. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

## BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Pada bagian ini akan diuraikan informasi atau penjelasan mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2022. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Aktual, ditetapkan dalam Pernyataan SAP (PSAP) 01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan PSAP 02 tentang Penyajian Laporan Keuangan terdapat 7 (tujuh) jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang harus disajikan, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk penjelasan masing-masing LKPD Kota Bukittinggi akan diuraikan satu per satu sebagai berikut :

### 5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi pos pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 yang mencakup :

#### 1. Gambaran Anggaran, Realisasi beserta Persentase Pencapaian

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp714.157.721.650,00 dengan realisasi sebesar Rp698.402.386.323,22. Target Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp837.145.281.505,00 dengan realisasi sebesar Rp744.059.199.525,66. Anggaran Belanja Daerah tahun 2022 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga.

Selisih antara Pendapatan dan Belanja adalah Defisit sebesar (Rp45.656.813.202,44). Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja Kota Bukittinggi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5.1.1  
Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun 2022

URAIAN	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%
1	2	3	4 (3/2)
<b>PENDAPATAN DAERAH – LRA</b>	<b>714,157,721,650.00</b>	<b>698,402,386,323.22</b>	<b>97.79</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA</b>	<b>136,257,791,456.00</b>	<b>130,796,925,183.85</b>	<b>95.99</b>
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	50,269,852,262.00	49,570,750,398.00	98.61
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	48,684,034,600.00	46,662,398,969.00	95.85
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,505,000,000.00	6,641,291,925.00	88.49
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	29,798,905,194.00	27,922,483,891.85	93.70
<b>PENDAPATAN TRANSFER – LRA</b>	<b>577,899,930,194.00</b>	<b>567,387,873,682.00</b>	<b>98.18</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>543,423,791,657.00</b>	<b>532,574,902,562.00</b>	<b>98.00</b>
Dana Perimbangan	543,423,791,657.00	532,574,902,562.00	98.00
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	
<b>Pendapatan Transfer antar Daerah</b>	<b>34,476,138,537.00</b>	<b>34,812,971,120.00</b>	<b>100.98</b>
Pendapatan Bagi Hasil	34,076,138,537.00	34,412,971,120.00	100.99
Bantuan Keuangan	400,000,000.00	400,000,000.00	100.00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>-</b>	<b>217,587,457.37</b>	<b>0.00</b>
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan prundang-undangan	-	217,587,457.37	0.00
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>837,145,281,505.00</b>	<b>744,059,199,525.66</b>	<b>88.88</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>675,422,845,486.00</b>	<b>611,262,131,931.10</b>	<b>90.50</b>
Belanja Pegawai	325,444,707,669.00	301,384,096,541.66	92.61
Belanja Barang dan Jasa	361,912,139,291.00	264,544,058,412.28	87.62
Belanja Subsidi	3,385,520,000.00	2,910,989,266.00	85.98
Belanja Hibah	42,425,478,526.00	40,192,987,711.16	94.74
Belanja Bantuan Sosial	2,255,000,000.00	2,230,000,000.00	98.89
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>147,955,769,352.00</b>	<b>124,005,630,244.56</b>	<b>83.81</b>
Belanja Modal Tanah	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60,312,518,236.00	48,131,479,720.00	79.80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33,140,307,759.00	25,739,508,574.06	77.67
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	49,760,228,857.00	45,500,951,384.50	91.44
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,742,714,500.00	4,633,390,566.00	97.70
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5,000,000,000.00</b>	<b>271,437,350.00</b>	<b>5.43</b>
Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	271,437,350.00	5.43
<b>BELANJA TRANSFER</b>			<b>97.19</b>

URAIAN	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%
1	2	3	4 (3/2)
	8,766,666,667.00	8,520,000,000.00	
<b>BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	8,766,666,667.00	8,520,000,000.00	97.19
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kab/Kota ke Provinsi	8,766,666,667.00	8,520,000,000.00	97.19
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(122,987,559,855.00)	(45,656,813,202.44)	37.12
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	132,987,559,855.00	132,979,006,890.90	99.99
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	132,987,559,855.00	132,979,006,890.90	99.99
Pencairan dana Cadangan	-	-	
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	100.00
Penyertaan Modal Daerah	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	100.00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	122,987,559,855.00	122,979,006,890.90	99.99
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	-	77,322,187,688.46	

## 2. Penjelasan atas Perbedaan antara Anggaran dan Realisasi

Secara keseluruhan Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp698.402.386.323,22 atau 97,79% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp714.157.721.650,00. Pencapaian target Pendapatan tersebut terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp130.796.925.183,85 atau 95,99% dari anggaran sebesar Rp136.257.791.456,00
- Pendapatan Transfer dengan realisasi sebesar Rp567.387.873.682,00 atau 98,18 % dari anggaran sebesar Rp577.899.930.194,00 dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp217.587.457,37 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Daerah tahun 2022 yang direalisasikan sebesar Rp744.059.199.525,66 atau sebesar 88,88% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp837.145.281.505,00. Realisasi tersebut terdiri dari:

- Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp611.262.131.931,10 atau 90,50% dari anggaran sebesar Rp675.422.845.486,00.
- Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp124.005.630.244,56 atau 83,81% dari anggaran sebesar Rp147.955.769.352,00.
- Belanja Tidak Terduga dengan realisasi sebesar Rp271.437.350,00 atau 5,43% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00, dan

- d. Belanja Transfer dengan realisasi sebesar Rp8.520.000.000,00 atau 97,19% dari anggaran sebesar Rp8.766.666.667,00.

Dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2022 diperkirakan terjadi Defisit anggaran sebesar (Rp122.987.559.855,90), namun dalam pelaksanaan APBD tahun 2022 terdapat defisit sebesar (Rp45.656.813.202,44) atau sebesar 37,12%. Defisit anggaran tahun 2022 dibiayai dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan, berupa SiLPA tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp132.979.000.890,90 atau 99,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp132.987.559.855,90; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan, berupa Penyertaan Modal Daerah terealisasi sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp77.322.187.688,46.

### 3. Perbandingan dengan Periode yang Lalu

Salah satu kriteria laporan keuangan yang baik adalah laporan tersebut dapat dibandingkan. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka Laporan Realisasi APBD Kota Bukittinggi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.2**  
**Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	Kenaikan- Penurunan Rp	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(7/6)
1	Pendapatan Asli Daerah	136.257.791.456,00	130.796.925.183,85	92.110.528.556,00	91.786.288.185,61	39.010.636.998,24	42,50
2	Pendapatan Transfer	577.899.930.194,00	567.387.873.682,00	592.236.532.590,00	593.762.137.738,00	(26.374.264.056,00)	(4,44)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	217.587.457,37	-	3.086.628.530,00	(2.869.041.072,63)	(92,95)
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>714.157.721.650,00</b>	<b>698.402.386.323,22</b>	<b>684.347.061.146,00</b>	<b>688.635.054.453,61</b>	<b>9.767.331.869,61</b>	<b>1,42</b>
1	Belanja Operasi	675.422.845.486,00	611.262.131.931,10	642.962.609.606,00	555.168.586.260,11	56.093.545.670,99	10,10
2	Belanja Modal	147.955.769.352,00	124.005.630.244,56	123.125.748.792,00	93.038.635.113,35	30.966.995.131,21	33,28
3	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	271.437.350,00	17.671.485.436,00	1.844.107.190,00	(1.572.669.840,00)	(85,28)
4	Belanja Transfer	8.766.666.667,00	8.520.000.000,00	-	-	8.520.000.000,00	0
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>837.145.281.505,00</b>	<b>744.059.199.525,66</b>	<b>783.759.843.834,00</b>	<b>650.051.328.563,46</b>	<b>94.007.870.962,20</b>	<b>14,46</b>

Tahun 2022, secara umum realisasi Pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp9.767.331.869,61 atau 1,42 % dari tahun 2021, kenaikan tersebut berupa :

- a. Kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp39.010.636.998,24 atau 42,50%; dan
- b. Penurunan pada Pendapatan Transfer sebesar (Rp26.374.264.056,00) atau ( 4,44)%.
- c. Penurunan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar (Rp2.869.041.072,63) atau (92,95)%.

Dari sisi Belanja, terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp94.007.870.962,20 atau sebesar 14,46 % yang berasal dari :

- a. Kenaikan pada Belanja Operasi sebesar Rp56.093.545.670,99 atau 10,10%.
- b. Kenaikan pada Belanja Modal sebesar Rp30.966.995.131,21 atau 33,28 %.
- c. Penurunan Belanja Tidak Terduga sebesar (Rp1.572.669.840,00) atau (85,28)%.
- d. Kenaikan pada Belanja Transfer sebesar Rp8.520.000.000,00 atau 0% dibanding tahun 2021 yang tidak dianggarkan.

#### 5.1.1 Pendapatan Daerah

Anggaran Tahun 2022 Rp	Realisasi Tahun 2022 Rp
714.157.721.650,00	698.402.386.323,22

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp714.157.721.650,00 dengan realisasi sebesar Rp698.402.386.323,22 atau 97,79. Realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp9.767.331.869,61 atau 1,42% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp688.635.054.453,61.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Kota Bukittinggi tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.1.1  
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	2	3	4=(3/2)	5
<b>PENDAPATAN DAERAH – LRA</b>	<b>714.157.721.650,00</b>	<b>698.402.386.323,22</b>	<b>97,79</b>	<b>688.635.054.453,61</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA</b>	<b>136.257.791.456,00</b>	<b>130.796.925.183,85</b>	<b>95,99</b>	<b>91.786.288.185,61</b>
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	50.269.852.262,00	49.570.750.398,00	98,61	40.765.025.893,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	48.684.034.000,00	46.662.398.969,00	95,85	27.401.890.331,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.505.000.000,00	6.641.291.925,00	88,49	5.462.031.608,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	29.798.905.194,00	27.922.483.891,85	93,70	18.137.350.353,61
<b>PENDAPATAN TRANSFER – LRA</b>	<b>577.899.930.194,00</b>	<b>567.387.873.682,00</b>	<b>98,18</b>	<b>593.762.137.738,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	543.423.791.657,00	532.574.902.562,00	98,00	561.086.880.504,00
Dana Perimbangan	543.423.791.657,00	532.574.902.562,00	98,00	515.555.324.504,00
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	45.531.556.000,00
Pendapatan Transfer antar Daerah	34.476.138.537,00	34.812.971.120,00	100,98	32.675.257.234,00
Pendapatan Bagi Hasil	34.076.138.537,00	34.412.971.120,00	100,99	32.675.257.234,00

819

Bantuan Keuangan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	-	<b>217.587.457,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086.628.530,00</b>
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan	-	217.587.457,37	0,00	3.086.628.530,00

**5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

<b>Anggaran Tahun 2022 Rp</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 Rp</b>
<b>136.257.791.456,00</b>	<b>130.796.925.183,85</b>

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 sebesar Rp136.257.791.456,00 dengan realisasi sebesar Rp130.796.925.183,85 atau 95,99%. Realisasi PAD tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp39.010.636.998,24 atau 42,50% dari tahun 2021 sebesar Rp91.786.288.185,61. Kenaikan tersebut berupa :

1. Kenaikan pada Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp8.805.724.505,00 atau 21,60%.
2. Kenaikan pada Retribusi Daerah sebesar Rp19.260.518.638,00 atau 70,29%
3. Kenaikan pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp1.159.260.317,00 atau 21,15% dan
4. Kenaikan pada Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp9.785.133.538,24 atau 53,95 %.

Realisasi pendapatan asli daerah tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.1.1.1  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	Pendapatan Pajak Daerah	50.269.852.262,00	49.570.750.398,00	40.765.025.893,00	8.805.724.505,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	48.684.034.000,00	46.662.398.969,00	27.401.880.331,00	19.260.518.638,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.505.000.000,00	6.641.291.925,00	5.482.031.608,00	1.159.260.317,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	29.798.905.194,00	27.922.483.891,85	18.137.350.353,61	9.785.133.538,24
	<b>Total</b>	<b>136.257.791.456,00</b>	<b>130.796.925.183,85</b>	<b>91.786.288.185,61</b>	<b>39.010.636.998,24</b>

**5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah**

<b>Anggaran Tahun 2022 Rp</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 Rp</b>
<b>50.269.852.262,00</b>	<b>49.570.750.398,00</b>

Pendapatan Pajak Daerah pada APBD 2022 dianggarkan sebesar Rp50.269.852.262,00 dengan realisasi sebesar Rp49.570.750.398,00 atau 98,61%. Realisasi Pendapatan Pajak

219

Daerah tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp8.805.724.505,00 atau 21,60% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp40.765.025.893,00. Rincian dari realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.1.1.3**  
**Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Pajak Hotel	16.132.300.000,00	16.203.159.513,00	100,44	12.296.289.161,00
2	Pajak Restoran	8.532.186.156,00	6.907.203.972,00	80,95	6.052.919.004,00
3	Pajak Hiburan	1.088.022.310,00	1.004.246.805,00	92,30	712.031.108,00
4	Pajak Reklame	860.800.000,00	967.282.188,00	112,37	648.480.050,00
5	Pajak Penerangan Jalan	6.074.338.220,00	6.268.267.602,00	103,19	5.902.665.599,00
6	Pajak Parkir	400.000.000,00	322.475.568,00	80,62	298.836.255,00
7	Pajak Air Tanah	70.000.000,00	76.075.811,00	108,68	69.419.188,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.090.100.000,00	3.925.523.043,00	95,98	3.768.254.822,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.022.105.576,00	13.896.515.896,00	106,71	11.016.130.696,00
	<b>Total</b>	<b>50.269.852.262,00</b>	<b>49.570.750.398,00</b>	<b>98,61</b>	<b>40.765.025.893,00</b>

Realisasi penerimaan pajak tahun 2022 untuk 9 (sembilan) jenis pajak ada beberapa yang melebihi dari target yang dianggarkan dan ada pula yang belum mencapai target anggaran, namun dibandingkan dengan realisasi 2021 secara keseluruhan, hasil realisasi 9 jenis pajak mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena tahun 2022 tidak ada lagi pembatasan berskala besar (PSBB) dikarenakan angka kasus /penularan Covid -19 di tahun 2022 semakin menurun.

#### 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran Tahun 2022 Rp	Realisasi Tahun 2022 Rp
48.684.034.000,00	46.662.398.969,00

Pendapatan Retribusi Daerah pada APBD 2022 dianggarkan sebesar Rp48.684.034.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp46.662.398.969,00 atau 95,85%. Realisasi retribusi tahun 2022 mengalami kenaikan sangat signifikan sebesar Rp19.260.518.638,00 atau 70,29% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp27.401.880.331,00. Rincian realisasi Retribusi Daerah tahun 2022 dan 2021 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 5.1.1.4  
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	SKPD	Uraian Rekening	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$	7
1	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	400.000.000,00	535.212.000,00	133,80	363.593.000,00
2	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	1.305.794.000,00	87,05	1.193.391.000,00
		Retribusi Terminal	182.500.000,00	190.204.000,00	104,22	179.782.000,00
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.200.000.000,00	807.420.000,00	67,29	741.782.000,00
		Retribusi Izin Trayek	34.170.000,00	29.220.000,00	85,51	24.070.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pelayanan dan Persampahan	1.200.864.000,00	1.170.449.500,00	97,47	1.070.567.500,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	5.000.000,00	2.275.000,00	45,50	4.675.000,00
5	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000,00	35.984.000,00	71,97	3.000.000,00
		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	28.800.000.000,00	27.746.558.055,00	96,34	16.810.153.684,00
6	Badan Keuangan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	102.000.000,00	55.926.900,00	54,83	56.453.800,00
7	Dinas Penanaman Modal PTSPK	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	70.000.000,00	75.351.900,00	107,65	79.122.500,00
		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	180.000.000,00	174.393.645,00	96,89	437.483.837,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	150.000.000,00	174.060.000,00	116,04	149.745.000,00
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00	10.030.000,00	100,30	0,00
		Retribusi Rumah Potong Hewan	240.000.000,00	241.040.000,00	100,43	236.398.000,00
		Retribusi penjualan produksi Usaha Daerah	80.000.000,00	73.850.585,00	92,31	81.561.810,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Retribusi Pelayan Persampahan dan Kebersihan (Keterangan: khusus di tiga wilayah pasar)	350.000.000,00	361.348.190,00	103,24	181.389.540,00
		Retribusi Pelayanan Pasar	1.272.500.000,00	1.316.078.600,00	103,42	1.194.622.812,00
		Retribusi Penyedotan Kakus	2.000.000.000,00	2.212.882.000,00	110,64	1.720.804.000,00
		Retribusi Tera Ulang	7.000.000,00	8.169.500,00	116,71	10.107.500,00
		Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	9.800.000.000,00	8.941.077.094,00	91,24	2.055.531.348,00
		Retribusi Tempat Parkir	800.000.000,00	735.394.000,00	91,92	753.286.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	459.680.000,00	183,87	74.360.000,00
	<b>Total Retribusi</b>		<b>48.684.034.000,00</b>	<b>46.662.398.969,00</b>	<b>95,85</b>	<b>27.401.880.331,00</b>

<b>5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>Anggaran Tahun 2022 Rp 7.505.000.000,00</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 Rp 6.641.291.925,00</b>
---	--	---

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD 2022 dianggarkan sebesar Rp7.505.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.641.291.925,00 atau 88,49%. Realisasi tahun 2022 naik sebesar Rp1.159.260.317,00 atau 21,15% dari tahun 2021 sebesar Rp5.482.031.608,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tahun 2022 berasal dari piutang deviden tahun 2021 yang dibagikan kepada Pemko Bukittinggi atas penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) Sumatera Barat sebesar Rp6.252.795.492,00 dan piutang deviden tahun 2021 atas penyertaan modal Pemko Bukittinggi pada Perseroda PT. BPRS Jam Gadang sebesar Rp388.496.433,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1.1.5  
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	2	3	4	5	6
1	Bagian Laba (dividen) sebesar Rp6.641.291.925,00 yang terdiri dari: a. Bank Nagari sebesar Rp6.252.795.492,00 ; dan b. BUMD PT. Perseroda BPRS Jam Gadang sebesar Rp388.496.433,00.	7.505.000.000,00	6.641.291.925,00	88,49	5.482.031.608,00
	<b>Total</b>	<b>7.505.000.000,00</b>	<b>6.641.291.925,00</b>	<b>88,49</b>	<b>5.482.031.608,00</b>

<b>5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>Anggaran Tahun 2022 Rp 29.798.905.194,00</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 Rp 27.922.483.891,85</b>
--	---	--

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD 2022 dianggarkan sebesar Rp29.798.905.194,00 dan telah terealisasi sebesar Rp27.922.483.891,85 atau 93,70%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp9.785.133.538,24 atau 53,95% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp18.137.350.353,61.

Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel di bawah ini :



Tabel 5.1.1.6  
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021

No	Urutan	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	214.186.000,00	35.900.000,00	16,76	143.235.768,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.067.000.000,00	632.792.049,00	59,31	453.968.151,00
3	Penerimaan Jasa Giro	4.650.000.000,00	2.639.172.489,00	56,76	3.562.919.442,00
4	Pendapatan Bunga	5.750.000.000,00	4.244.628.513,40	73,82	4.820.054.660,75
5	Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah	-	6.000.000,00	-	-
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	142.636.531,00	-	63.734.680,22
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	191.880.143,75	-	48.335.976,96
8	Pendapatan Denda Pajak	125.000.000,00	334.802.457,00	267,84	346.170.657,00
9	Pendapatan Denda Retribusi	-	180.043.745,00	-	41.939.623,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	671.001.216,00	-	166.712.567,39
11	Pendapatan dari Pengembalian	2.554.417.426,00	2.663.715.363,70	104,28	2.109.268.996,29
12	Pendapatan BLUD	15.438.301.768,00	16.155.511.384,00	104,65	6.217.252.737,00
13	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP	-	-	-	397.100,00
14	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	-	24.400.000,00	-	163.350.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>29.798.905.194,00</b>	<b>27.922.483.891,85</b>	<b>93,70</b>	<b>18.137.350.353,61</b>

Dari tabel di atas, nomor 1 adalah sub rincian akun Lain-lain PAD yang Sah berupa Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan, yang persentase realisasinya rendah. Hal tersebut dikarenakan Tahun Anggaran 2022 diusulkan target yang akan dicapai untuk penjualan BMD untuk seluruh SKPD/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, namun dalam pelaksanaannya tidak seluruh SKPD/Unit kerja yang mengusulkan penjualan, sehingga capaian realisasi hanya 19 SKPD/Unit kerja saja.

Pada nomor 10 juga terdapat Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan dengan rincian sebagai berikut :

1. Jaminan Pelaksanaan atas Wan Prestasinya Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Primer (SMPN 1 s.d Rumah Potong) Tahun 2021 oleh PT. Inanta Bhakti Utama, dengan nilai kontrak Rp12.970.588.752,71. Jaminan pelaksanaan pekerjaan dicairkan pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp648.529.438,00
2. Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan Rehab Drainase Lingkungan Belakang Balok Tahun 2021 oleh CV. Giasta Company dengan nilai kontrak sebesar Rp449.435.553,28 pada

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jaminan pemeliharannya adalah sebesar Rp22.471.778,00 yang dicairkan pada tanggal 27 Juli 2022.

#### 5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran Tahun 2022 Rp	Realisasi Tahun 2022 Rp
577.899.930.194,00	567.387.873.682,00

Pendapatan Transfer yang dianggarkan tahun 2022 sebesar Rp577.899.930.194,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp567.387.873.682,00 atau 98,18%. Realisasi pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp26.374.264.056,00 atau 4,44% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp593.762.137.738,00. Berikut beberapa informasi penjelasan yaitu:

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp17.019.578.058,00 atau 3,30% dari realisasi tahun 2021;
- Pendapatan Transfer antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp2.137.713.886,00 atau 6,54%.

Pada tahun 2022, terdapat penurunan pendapatan dana transfer Pemerintah Pusat yang disebabkan oleh :

- Pada Tahun Anggaran 2022 Kota Bukittinggi tidak mendapatkan Alokasi dan penyaluran Dana Insentif Daerah,
- Sebagian Dana Bagi Hasil Reguler tahun 2022 senilai Rp1.849.462.625,00 disalurkan oleh pemerintah pusat secara non tunai melalui mekanisme *Treasury Deposit Facility (TDF)* tanggal 30 Desember 2022 yang berdasarkan:
  - PMK Nomor 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2022.
  - PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi yang disalurkan secara non tunai melalui *Fasilitas Treasury Deposit Facility* tanggal 3 Maret 2023.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.1.7  
Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan 2021

	URAIAN	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
1	2	3	4	5	6=5-4	7
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	543.423.791.657,00	532.574.902.562,00	561.086.880.504,00	(28.511.977.942,00)	(5,08)

2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.476.138.537,00	34.812.971.120,00	32.675.257.234,00	2.137.713.886,00	6,54
	<b>JUMLAH</b>	<b>577.899.930.194,00</b>	<b>567.387.873.682,00</b>	<b>593.762.137.738,00</b>	<b>(26.374.264.056,00)</b>	<b>(4,44)</b>

#### 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

**Anggaran  
Tahun 2022  
Rp  
543.423.791.657,00**

**Realisasi  
Tahun 2022  
Rp  
532.574.902.562,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan Tahun 2022 sebesar Rp543.423.791.657,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp532.574.902.562,00 atau 98,00%. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp28.511.977.942,00 atau 5,08% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp561.086.880.504,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID). Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.1.8  
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan 2021**

No	URATAN	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
1	2	3	4	5	6=(3-4)	7
1	Dana Perimbangan	543.423.791.657,00	532.574.902.562,00	515.555.324.504,00	17.019.578.058,00	3,30
2	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	45.531.556.000,00	(45.531.556.000,00)	(100,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>543.423.791.657,00</b>	<b>532.574.902.562,00</b>	<b>561.086.880.504,00</b>	<b>(28.511.977.942,00)</b>	<b>(5,08)</b>

#### 5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

**Anggaran  
Tahun 2022  
Rp  
543.423.791.657,00**

**Realisasi  
Tahun 2022  
Rp  
532.574.902.562,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi dari Pemerintah Pusat pada tahun 2022 seluruhnya berasal dari Dana Perimbangan, yang dianggarkan sebesar 543.423.791.657,00 dengan realisasi sebesar Rp532.574.902.562,00 atau 98,00%. Dana Perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp17.019.578.058,00 atau 3,30% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp Rp515.555.324.504,00. Rincian realisasi Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1.1.9  
Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2021**

No	URAIAN	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp	Kenalkan/ Penurunan Rp	%
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	15.894.532.000,00	18.945.474.525,00	19.297.898.290,00	(352.423.765,00)	(1,83)
2	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	415.488.236.540,00	419.027.434.440,00	421.334.282.000,00	(2.306.847.560,00)	(0,55)
3	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	49.076.996.961,00	38.100.592.208,00	17.828.812.263,00	20.271.779.945,00	113,70
4	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	62.964.026.156,00	56.501.401.389,00	57.094.331.951,00	(592.930.562,00)	(1,04)
	<b>JUMLAH</b>	<b>543.423.791.657,00</b>	<b>532.574.902.562,00</b>	<b>515.555.324.504,00</b>	<b>17.019.578.058,00</b>	<b>3,30</b>

DAK Fisik untuk Kota Bukittinggi Tahun 2022 meliputi DAK Fisik Bidang Pendidikan, DAK Fisik Bidang Kesehatan, DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman, DAK Fisik Bidang Pariwisata, DAK Fisik Bidang Jalan, DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Peningkatan Persiapan.

Untuk pendapatan DAK Non Fisik Tahun 2022 terdiri dari : Dana BOS (reguler sekolah negeri dan swasta serta Kinerja), TPG PNSD, Tamsil Guru PNSD, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, BOKKB-BOK, BOKKB-Pengawasan Obat dan makanan, BOKKB Akreditasi Puskesmas, BOKKB-Jaminan Persalinan, BOKKB-BOKB, PK2UKM, Dana Pelayanan Kepariwisataaan, Fasilitas Penanaman Modal, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

**5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah  
(DID)**

**Anggaran  
Tahun 2022  
Rp  
0,00**

**Realisasi  
Tahun 2022  
Rp  
0,00**

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID). DID mengalami penurunan sebesar (Rp45.531.556.000,00) atau (100%) dari anggaran dan realisasi tahun 2021 sebesar Rp45.531.556.000,00, sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 5.1.1.10  
Dana Insentif Daerah Tahun 2022 dan 2021**

No	URAIAN	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp	Kenalkan/ Penurunan Rp	%
1	DID	0,00	0,00	45.531.556.000,00	(45.531.556.000,00)	(100,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.531.556.000,00</b>	<b>(45.531.556.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

*19*

**5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah**

**Anggaran Tahun 2022**  
Rp  
34.476.138.537,00

**Realisasi Tahun 2022**  
Rp  
34.812.971.120,00

Pendapatan Kota Bukittinggi yang bersumber dari Transfer Antar Daerah yang dianggarkan Tahun 2022 sebesar Rp34.476.138.537,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp34.812.971.120,00 atau 100,98%. Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp2.137.713.886,00 atau 6,54% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp32.675.257.234,00. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.1.11**  
**Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 dan 2021**

URAIAN	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
Pendapatan Bagi Hasil pajak	34.076.138.537,00	34.412.971.120,00	32.675.257.234,00	1.737.713.886,00	5,32
Bantuan Keuangan	400.000.000,00	400.000.000,00	0	400.000.000,00	0
<b>JUMLAH</b>	<b>34.476.138.537,00</b>	<b>34.812.971.120,00</b>	<b>32.675.257.234,00</b>	<b>2.137.713.886,00</b>	<b>5,32</b>

**5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

**Anggaran Tahun 2022**  
Rp  
0,00

**Realisasi Tahun 2022**  
Rp  
217,587,457.37

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdapat dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2022 merupakan pendapatan hibah dari pemerintah dan pihak lainnya serta lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp217,587,457.37. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar (Rp2,869,041,072.63) atau (92,95)% dari realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp3.086.628.530,00. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 5.1.1.14**  
**Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021**

URAIAN	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
1	2	3	4	5=3-4	6
Pendapatan atas pengembalian akibat temuan regular Inspektorat di tahun 2022 atas tahun sebelumnya	-	5.667.500,00	-	5.667.500,00	-

Pendapatan atas pengembalian dana belanja hibah tahun sebelumnya ke organisasi/lembaga masyarakat	-	211.919.957,37	3.086.628.530,00	(2.874.708.572,63)	(0,93)
<b>JUMLAH</b>	-	<b>217.587.457,37</b>	<b>3.086.628.530,00</b>	<b>(2.869.041.072,63)</b>	

**5.1.2 BELANJA**

<b>Anggaran Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>
<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>837.145.281.505,00</b>	<b>744.059.199.525,66</b>

Anggaran Belanja Daerah Kota Bukittinggi tahun 2022 sebesar Rp837.145.281.505,00 dengan realisasi sebesar Rp744.059.199.525,66 atau 88,88%. Berdasarkan jenisnya Belanja dapat dibagi atas :

1. Belanja berdasarkan urusan pemerintah dan organisasi, Belanja Daerah dapat dikelompokkan menjadi:
  - a. Urusan wajib pelayanan dasar;
  - b. Urusan wajib bukan pelayanan dasar;
  - c. Urusan pilihan; dan
  - d. Urusan pemerintah fungsi penunjang.

Realisasi Belanja berdasarkan urusan pemerintah dan organisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.1.15**  
**Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Dan Organisasi Tahun 2022 dan 2021**

No.	Urusan	Unit Organisasi	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	2	3	4	5	6	7
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	184.531.786.333,00	176.640.871.175,63	95,72	168.449.155.297,91
		Dinas Kesehatan	110.919.308.871,00	89.915.816.408,34	81,06	88.196.355.853,80
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	67.466.693.480,00	54.886.841.356,17	81,35	32.561.710.417,04
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	17.389.940.613,00	16.405.111.863,00	94,34	13.447.821.257,78
		Dinas Kebakaran	7.792.205.950,00	7.147.474.055,67	91,73	6.505.868.310,00
		Satuan Polisi Pamong Praja	21.379.804.911,00	19.727.921.874,00	92,27	17.907.852.130,00
		Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah	4.512.083.952,00	4.291.534.890,76	95,11	4.577.578.785,00
		Dinas Sosial	7.879.143.508,00	6.687.905.903,00	84,88	6.182.161.289,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	687.444.384,00	548.627.061,00	79,81	620.123.872,00

219

No.	Urusan	Unit Organisasi	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	2	3	4	5	6	7
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	7.949.779.587,00	7.621.818.986,00	95,87	6.745.221.191,00
		Dinas Pertanian dan Pangan	10.960.150.740,00	9.669.366.056,00	88,22	698.823.995,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	559.638.165,00	433.368.274,04	77,44	475.673.199,00
		Dinas Lingkungan Hidup	42.321.589.123,00	38.228.064.116,34	90,33	33.284.163.015,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.266.328.404,00	5.863.934.087,23	93,58	5.252.015.865,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	3.621.188.736,00	3.086.867.483,00	85,24	2.045.437.564,88
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.245.315.716,00	3.868.973.892,46	91,14	4.592.430.412,95
		Dinas Perhubungan	15.154.462.444,00	13.466.614.877,26	88,86	12.129.716.501,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	9.958.690.937,00	9.215.894.634,66	92,54	6.854.828.171,00
		Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	11.340.944.060,00	10.733.473.946,00	94,66	6.784.297.596,90
		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.950.783.289,00	10.099.545.607,00	92,23	16.803.191.100,76
		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.900.462.077,00	7.177.070.881,70	90,84	3.836.090.633,34
		Dinas Komunikasi dan Informatika	53.080.600,00	51.580.850,00	97,17	14.376.750,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	80.193.000,00	65.395.700,00	81,55	39.094.815,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.431.348.086,00	3.093.140.076,00	90,14	2.885.760.339,00
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.866.559.387,00	5.568.555.966,00	94,92	4.865.213.246,00
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	619.798.140,00	472.373.687,00	76,21	641.606.290,00
3	Urusan Pilihan	Dinas Pertanian dan Pangan	1.575.996.652,00	1.494.721.624,80	94,84	914.861.404,44
		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	28.924.472.414,00	25.985.299.047,04	89,86	19.203.269.405,43
		Dinas Pertanian dan Pangan	3.049.672.213,00	2.737.973.236,10	89,78	14.319.629.467,50
		Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	15.082.964.242,00	12.878.647.908,96	85,39	8.174.856.067,62
		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.489.729.920,00	1.297.034.543,00	87,07	613.592.789,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Sekretariat Daerah	74.964.123.762,00	67.871.387.882,43	90,54	47.018.222.249,84
		Inspektorat	8.473.210.882,00	7.328.446.153,00	86,49	6.843.454.353,00
		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	6.634.823.893,00	5.937.496.031,00	89,49	5.954.990.382,00
		Badan Keuangan	32.362.837.910,00	25.085.525.503,00	77,51	16.805.352.751,00
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.980.801.349,00	6.358.429.724,00	91,08	5.450.808.435,00

No.	Urusan	Unit Organisasi	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	2	3	4	5	6	7
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia	960.864.536,00	930.157.781,00	96,80	676.755.517,00
		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	377.871.000,00	309.666.173,00	81,95	497.437.825,00
		Sekretariat DPRD	40.491.537.552,00	32.585.823.296,00	80,48	32.598.071.658,00
		Kecamatan Mandiangi Koto Selayan	17.091.427.558,00	16.038.641.622,07	93,84	16.269.210.000,57
		Kecamatan Guguk Panjang	14.817.737.145,00	13.696.503.045,00	92,43	12.040.362.757,70
		Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	14.194.387.758,00	13.678.126.189,00	96,36	11.292.205.165,00
		Kesatuan Bangsa dan Politik	5.834.098.226,00	4.875.176.058,00	83,56	4.981.680.427,00
			837.145.281.505,00	744.059.199.525,66	88,88	650.051.328.563,46

2. Belanja berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, Belanja Daerah dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Fungsi pelayanan umum;
- b. Fungsi ketertiban dan keamanan;
- c. Fungsi ekonomi;
- d. Fungsi lingkungan hidup;
- e. Fungsi perumahan dan fasilitas umum;
- f. Fungsi kesehatan;
- g. Fungsi pariwisata dan budaya;
- h. Fungsi pendidikan; dan
- i. Fungsi perlindungan sosial.

Realisasi Belanja berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.1.16**  
**Realisasi Belanja Berdasarkan Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Dan Fungsi Tahun 2022 dan 2021**

No.	Urusan	Unit Organisasi	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	2	3	4	5	6/5/4	7
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	184.531.786.333,00	176.640.871.175,63	95,72	168.449.155.297,91
		Dinas Kesehatan	110.919.308.871,00	89.915.816.408,34	81,06	88.196.355.853,80
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	67.466.693.480,00	54.886.841.356,17	81,35	32.361.710.417,04
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	17.389.940.613,00	16.405.111.863,00	94,34	13.447.821.257,78
		Dinas Kebakaran	7.792.205.950,00	7.147.474.055,67	91,73	6.505.868.310,00
		Satuan Polisi Pamong Praja	21.379.804.911,00	19.727.921.874,00	92,27	17.907.852.130,00



No.	Urusan	Unit Organisasi	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp		
1	2	3	4	5	6=5/4	7		
		Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah	4.512.083.952,00	4.291.534.890,76	95,11	4.577.578.785,00		
		Dinas Sosial	7.879.143.508,00	6.687.905.903,00	84,88	6.182.161.289,00		
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	687.444.384,00	548.627.061,00	79,81	620.123.872,00		
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	7.949.779.587,00	7.621.818.985,00	95,87	6.745.221.191,00		
		Dinas Pertanian dan Pangan	10.960.150.740,00	9.669.366.056,00	88,22	698.823.995,00		
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	559.638.165,00	433.368.274,04	77,44	-		
		Dinas Lingkungan Hidup	42.321.589.123,00	38.228.064.116,34	90,33	33.759.836.214,00		
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.266.328.404,00	5.863.934.087,23	93,58	5.252.015.865,00		
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	3.621.188.736,00	3.086.867.483,00	85,24	2.045.437.564,88		
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.245.315.716,00	3.868.973.892,46	91,14	4.592.430.412,95		
		Dinas Perhubungan	15.154.462.444,00	13.466.614.877,26	88,86	12.129.716.501,00		
		Dinas Komunikasi dan Informatika	9.958.690.937,00	9.215.894.634,66	92,54	6.854.828.171,00		
		Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	11.340.944.060,00	10.735.473.946,00	94,66	6.784.297.596,90		
		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.950.783.289,00	10.099.545.607,00	92,23	16.803.191.100,76		
		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.900.462.077,00	7.170.050.057,70	90,75	3.836.090.633,34		
		Dinas Komunikasi dan Informatika	53.080.600,00	51.580.850,00	97,17	14.376.750,00		
		Dinas Komunikasi dan Informatika	80.193.000,00	65.395.700,00	81,55	39.094.815,00		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.431.348.086,00	3.093.140.076,00	90,14	2.885.760.339,00		
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.866.559.387,00	5.568.555.966,00	94,92	4.865.213.246,00		
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	619.798.140,00	472.373.687,00	76,21	641.606.290,00		
		3	Urusan Pilihan	Dinas Pertanian dan Pangan	1.575.996.652,00	1.494.721.624,80	94,84	914.861.404,44
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	28.924.472.414,00	25.992.319.871,04	89,86	19.203.269.405,43
Dinas Pertanian dan Pangan	3.049.672.213,00			2.737.973.236,10	89,78	14.319.629.467,50		
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	15.082.964.242,00			12.878.647.908,96	85,39	8.174.856.067,62		

No.	Urusan	Unit Organisasi	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	2	3	4	5	6=5/4	7
		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.489.729.920,00	1.297.034.543,00	87,07	613.592.789,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Sekretariat Daerah	74.964.123.762,00	67.871.387.882,43	90,54	47.018.222.249,84
		Inspektorat	8.473.210.882,00	7.328.446.153,00	86,49	6.843.454.363,00
		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	6.634.823.893,00	5.937.496.031,00	89,49	5.954.990.382,00
		Badan Keuangan	32.362.837.910,00	25.085.525.503,00	77,51	16.805.352.751,00
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.980.801.349,00	6.358.429.724,00	91,08	5.450.808.435,00
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	960.864.536,00	930.157.781,00	96,80	676.755.517,00
		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	377.871.000,00	309.666.173,00	81,95	497.437.825,00
		Sekretariat DPRD	40.491.537.552,00	32.585.823.296,00	80,48	32.598.071.658,00
		Kecamatan Mandiangi Koto Selayan	17.091.427.558,00	16.038.641.622,07	93,84	16.269.210.000,57
		Kecamatan Guguk Panjang	14.817.737.145,00	13.696.503.045,00	92,43	12.040.362.757,70
		Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	14.194.387.758,00	13.678.126.189,00	96,36	11.292.205.165,00
		Kesatuan Bangsa dan Politik	5.834.098.226,00	4.875.176.058,00	83,56	4.981.680.427,00
				<b>837.145.281.505,00</b>	<b>744.059.199.525,66</b>	<b>88,88</b>

3. Belanja berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Belanja Daerah dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja Operasi:
- b. Belanja Modal:
- c. Belanja Tidak Terduga: dan
- d. Belanja Transfer.

Realisasi Belanja berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.1.17  
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	2	3	4=(3/2)	5
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>837.145.281.505,00</b>	<b>744.059.199.525,66</b>	<b>88,88</b>	<b>650.051.328.563,45</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>675.422.845.486,00</b>	<b>611.262.131.931,10</b>	<b>90,50</b>	<b>555.168.586.260,11</b>
Belanja Pegawai	325.444.707.669,00	301.384.096.541,66	92,61	296.371.615.565,25
Belanja Barang	301.912.139.291,00	264.544.058.412,28	87,62	236.689.663.677,43
Belanja Subsidi	3.385.520.000,00	2.910.989.266,00	85,98	-
Belanja Hibah	42.425.478.526,00	40.192.987.711,16	94,74	21.027.307.017,43
Belanja Bantuan Sosial	2.255.000.000,00	2.230.000.000,00	98,89	1.080.000.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>147.955.769.352,00</b>	<b>124.005.630.244,56</b>	<b>83,81</b>	<b>93.038.635.113,34</b>
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.312.518.236,00	48.131.479.720,00	79,80	42.231.774.799,80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.140.307.759,00	25.739.508.574,06	77,67	23.949.425.057,52
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.760.228.857,00	45.500.951.384,50	91,44	24.162.072.116,02
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.742.714.500,00	4.633.690.566,00	97,70	2.695.363.140,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>271.437.350,00</b>	<b>5,43</b>	<b>1.844.107.190,00</b>
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	271.437.350,00	5,43	1.844.107.190,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>8.766.666.667,00</b>	<b>8.520.000.000,00</b>	<b>97,19</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>8.766.666.667,00</b>	<b>8.520.000.000,00</b>	<b>97,19</b>	<b>-</b>
Belanja Bantuan Keuangan	8.766.666.667,00	8.520.000.000,00	97,19	-

## 5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran Tahun 2022 Rp	Realisasi Tahun 2022 Rp
675.422.845.486,00	611.262.131.931,10

Anggaran Belanja Operasi Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022 sebesar Rp675.422.845.486,00 realisasi sebesar Rp611.262.131.931,10 atau 90,50%. Realisasi Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp56.093.545.670,99 atau 10,11 % dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp555.168.586.260,11. Realisasi Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.1  
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp	Kenalkan / Penurunan Rp
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	Belanja Pegawai	325.444.707.669,00	301.384.096.541,66	296.371.615.565,25	5.012.480.976,41
2	Belanja Barang dan Jasa	301.912.139.291,00	264.544.058.412,28	236.689.663.677,43	27.854.394.734,85
3	Belanja Subsidi	3.385.520.000,00	2.910.989.266,00	-	2.910.989.266,00
4	Belanja Hibah	42.425.478.526,00	40.192.987.711,16	21.027.307.017,43	19.165.680.693,73
5	Belanja Bantuan Sosial	2.255.000.000,00	2.230.000.000,00	1.080.000.000,00	1.150.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>675.422.845.486,00</b>	<b>611.262.131.931,10</b>	<b>555.168.586.260,11</b>	<b>56.093.545.670,99</b>

**5.1.2.1.1 Belanja Pegawai**

**Anggaran  
Tahun 2022  
Rp  
325.444.707.669,00**

**Realisasi  
Tahun 2022  
Rp  
301.384.096.541,66**

Anggaran Belanja Pegawai tahun 2022 adalah sebesar Rp325.444.707.669,00 dengan realisasi sebesar Rp301.384.096.541,66 atau 92,61%. Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp5.012.480.976,41 atau 1,69 % dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp296.371.615.565,25. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1.2.2  
Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	171.487.316.916,00	165.379.234.960,00	96,44	168.930.182.615,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	88.722.711.128,00	82.495.178.895,66	92,98	74.227.960.376,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	45.648.577.534,00	39.573.406.240,00	86,69	37.962.195.720,25
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.496.015.094,00	9.849.462.007,00	93,84	11.424.125.555,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.621.474.179,00	1.216.458.905,00	75,02	1.138.296.713,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	714.030.000,00	527.451.234,00	73,87	601.599.996,00
7	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	600.000,00
8	Belanja Pegawai BLUD	6.754.582.818,00	2.342.904.300,00	34,69	2.086.654.590,00
	<b>Jumlah</b>	<b>325.444.707.669,00</b>	<b>301.384.096.541,66</b>	<b>92,61</b>	<b>296.371.615.565,25</b>

Pada Belanja Pegawai BLUD persentase realisasinya rendah disebabkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.754.582.818,00 mengakomodir rencana pembayaran jasa medis tahun 2021 dan 2022, honorarium PPTK, honorarium Bendahara Pembantu dan Honorarium Pejabat Pengadaan. Namun dari target tersebut hanya terealisasi untuk pembayaran honorarium PPTK, Honorarium Bendahara Pembantu dan Honorarium Pejabat Pengadaan sebesar Rp2.342.904.300,00. Untuk Jasa Medis tahun 2021 dan 2022 sampai periode ini belum dapat dibayarkan karena Peraturan Walikota tentang Remunerasi pada RSUD sampai dengan 31 Desember 2022 masih dalam proses penetapan, sehingga sama halnya dengan utang 2021 yang diakomodir sebagai kewajiban di Neraca RSUD dan Neraca Dinas Kesehatan sampai kepada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi.

**5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa**

<b>Anggaran Tahun 2022 Rp</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 Rp</b>
<b>301.912.139.291,00</b>	<b>264.544.058.412,28</b>

Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 adalah sebesar Rp301.912.139.291,00 dengan realisasi sebesar Rp264.544.058.412,28 atau 87,62%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp27.854.394.734,85 atau 11,76% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp236.689.663.677,43. Realisasi Belanja Barang tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1.2.3  
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	2	3	4	3/4/3	5
1	Belanja Barang	52.636.885.429,00	45.252.903.639,74	85,97	41.459.336.963,41
2	Belanja Jasa	157.512.299.151,00	141.940.212.404,68	90,11	118.678.611.392,38
3	Belanja Pemeliharaan	28.712.176.742,00	22.663.628.650,86	78,93	15.947.872.079,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	44.438.835.988,00	38.444.404.647,00	86,51	31.333.058.245,50
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	3.080.650.000,00	2.751.096.770,00	89,30	1.995.074.339,34
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.423.434.704,00	11.098.294.672,00	97,15	11.688.460.588,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.107.857.277,00	2.393.517.628,00	58,27	15.587.250.069,80
	<b>Jumlah</b>	<b>301.912.139.291,00</b>	<b>264.544.058.412,28</b>	<b>87,62</b>	<b>236.689.663.677,43</b>

**5.1.2.1.3 Belanja Subsidi**

<b>Anggaran Tahun 2022 Rp</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 Rp</b>
<b>3.385.520.000,00</b>	<b>2.910.989.266,00</b>

Anggaran Belanja Subsidi tahun 2022 adalah sebesar Rp3.385.520.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.910.989.266,00 atau 85,98 %. Tahun 2021 tidak dianggarkan Belanja Subsidi untuk Tabungan Utsman yang dialamatkan kepada BUMD PT. BPRS Jam Gadang serta untuk Koperasi Angkutan IKABE, Koperasi Merapi Singgalang, Koperasi Angkutan Jam Gadang yang bertujuan untuk Pengendalian Inflasi akibat kenaikan BBM Tahun 2022.

Realisasi Belanja Subsidi tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.2.3.1  
Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	2	3	4	3/4/3	5
1	Belanja Subsidi Kepada BUMN	470.520.000,00	-	-	-
2	Belanja Subsidi Kepada BUMD	2.575.000.000,00	2.574.989.266,00	100,00	-
3	Belanja Subsidi Kepada Koperasi	340.000.000,00	336.000.000,00	98,82	-
	<b>Jumlah</b>	<b>3.385.520.000,00</b>	<b>2.910.989.266,00</b>	<b>85,98</b>	<b>-</b>

8/19

## 5.1.2.1.4 Belanja Hibah

<b>Anggaran Tahun 2022 Rp</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 Rp</b>
<b>42.425.478.526,00</b>	<b>40.192.987.711,16</b>

Anggaran Belanja Hibah tahun 2022 adalah sebesar Rp42.425.478.526,00 dengan realisasi sebesar Rp40.192.987.711,16 atau 94,74 %. Realisasi belanja hibah mengalami kenaikan sebesar Rp19.165.680.693,73 atau 91,14% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp21.027.307.017,43. Realisasi belanja hibah tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.2.4  
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	239.258.707,66
2	Belanja Hibah Kepada Badan atau Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	34.987.231.000,00	32.862.652.041,16	93,93	20.081.991.319,77
3	Belanja Hibah Dana BOS untuk sekolah SMP, SD dan PAUD swasta	6.702.600.000,00	6.624.278.680,00	98,83	-
4	Belanja Hibah kepada Partai Politik	735.647.526,00	706.056.990,00	95,98	706.056.990,00
<b>Jumlah</b>		<b>42.425.478.526,00</b>	<b>40.192.987.711,16</b>	<b>94,74</b>	<b>21.027.307.017,43</b>

Akun Belanja Hibah Dana BOS, digunakan untuk merealisasikan belanja yang bersumber uangnya dari DAK Non Fisik yang disalurkan pemerintah pusat ke Kota Bukittinggi, yang pada tahun 2022 mengalami perubahan mekanisme dari tahun 2021. Tahun 2022 pendapatan dan belanjanya dianggarkan di APBD Kota Bukittinggi, sementara fisik dananya tetap disalurkan langsung kepada pihak sekolah, sehingga Pemko Bukittinggi mengesahkan Belanja Hibah tersebut per kali salurnya SMP, SD dan PAUD swasta.

Pada pos Belanja Hibah tersebut juga diakomodir bantuan iuran komite bagi pelajar SMA/SMK swasta yang mempunyai Kartu Keluarga Bukittinggi, yang tidak dapat diakomodir pada pos Belanja Transfer-Bantuan Keuangan ke Provinsi.

Rincian penerima Belanja Hibah tersebut diatas dapat dilihat pada lampiran Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

**5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial**

<b>Anggaran Tahun 2022 Rp</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 Rp</b>
<b>2.255.000.000,00</b>	<b>2.230.000.000,00</b>

Anggaran Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 adalah sebesar Rp2.255.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.230.000.000,00 atau 98,89% yang objek penerimanya adalah keluarga. Realisasi Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp214.942.000,00 atau 24,85% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.080.000.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1.2.5  
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021**

No	Urutan	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	2	3	4	3/(4)	5
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga	2.255.000.000,00	2.230.000.000,00	98,89	1.080.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.255.000.000,00</b>	<b>2.230.000.000,00</b>	<b>98,89</b>	<b>1.080.000.000,00</b>

Rincian penerima Belanja Hibah tersebut di atas dapat dilihat pada Lampiran Catatan atas Laporan Keuangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan ini.

**5.1.2.2 Belanja Modal**

<b>Anggaran Tahun 2022 Rp</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 Rp</b>
<b>147.955.769.352,00</b>	<b>124.005.630.244,56</b>

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp147.955.769.352,00 dengan realisasi sebesar Rp124.005.630.244,56. Tahun 2021 realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp93.038.635.113,35, artinya pada tahun 2022 realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp30.966.995.131,21 atau 33,28%.

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bukittinggi menurut jenis belanja adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.2.6  
**Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021 (Memurut Jenis Belanja)**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022 Rp	REALISASI 2022 Rp	%	ANGGARAN 2021 Rp	REALISASI 2021 Rp	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3)	6	7	8=(7-6)	9=(8/7)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	60.312.518.236,00	48.131.479.720,00	79,80	49.999.944.467,00	42.231.774.799,80	5.899.704.920,20	13,97
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.140.307.759,00	25.739.568.574,06	77,67	29.277.125.124,00	23.949.425.057,53	1.790.083.516,53	7,47
4	Belanja Modal Jalan Inggasi dan Jaringan	49.760.228.857,00	45.500.951.384,50	91,44	40.886.820.001,00	24.162.072.116,02	21.338.879.268,48	88,32
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.742.714.500,00	4.633.690.566,00	97,70	2.961.859.200,00	2.695.363.140,00	1.938.327.426,00	71,91
	<b>Jumlah</b>	<b>147.955.769.352,00</b>	<b>124.065.630.244,56</b>	<b>83,81</b>	<b>123.125.748.792,00</b>	<b>93.038.635.113,35</b>	<b>30.966.995.131,21</b>	<b>33,28</b>



Berikut keterangan masing-masing jenis Belanja Modal yaitu:

1. Belanja Modal Tanah tidak dianggarkan pada tahun 2022;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp60.312.518.236,00 dan direalisasikan sebesar Rp48.131.479.720,00 atau sebesar 79,80%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direalisasikan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan antara lain berupa pengadaan alat-alat besar darat, alat bantu, alat-alat angkutan, alat angkutan darat tak bermotor, alat kantor dan rumah tangga, komputer dan sebagainya;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan Rp33.140.307.759,00 dan direalisasikan sebesar Rp25.739.508.574,06 atau sebesar 77,67%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk pengadaan/konstruksi/pembelian bangunan/gedung pemerintah termasuk rehabilitasi bangunan/gedung kantor maupun bangunan lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah;
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp49.760.228.857,00 dan direalisasikan sebesar Rp45.500.951.384,50 atau sebesar 91,44 %. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk pengadaan ataupun rehab jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi serta jaringan yang dibutuhkan untuk masyarakat Kota Bukittinggi; dan
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp4.742.714.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.633.690.566,00 atau sebesar 97,70%. Untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya selama Tahun Anggaran 2022 realisasinya mencakup Belanja Modal Bahan Perpustakaan (tercetak maupun terekam), Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan lainnya, Belanja Modal Hewan, Belanja Modal Tanaman, serta Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

#### 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Anggaran Tahun 2022 Rp	Realisasi Tahun 2022 Rp
5.000.000.000,00	271.437.350,00

Selama Tahun Anggaran 2022 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp271.437.350,00. Tahun 2021 belanja tersebut direalisasikan sebesar Rp1.844.107.190,00 dari anggaran sebesar Rp17.671.485.436,00.

Dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi Belanja Belanja Tidak Terduga tahun 2022 mengalami penurunan yang disebabkan pandemic Covid-19 telah reda. Realisasi anggaran pada tahun 2022 digunakan untuk tanggap darurat untuk 3 (tiga) kali bencana kebakaran, penanganan pasca Covid-19 di awal tahun serta pengembalian dana akibat kelebihan pendapatan tahun sebelumnya ke wajib pajak.

Belanja Tidak Terduga Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 digunakan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 5.1.2.7  
Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 (Menurut Jenis Belanja)

NO	TANGGAL	NOMOR	URAIAN	REALISASI Rp
1	14 April 2022	0357/LS/2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga T.A.2022 untuk pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah berupa Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan a.n.Azmel Muzarfi	12.157.350,00
2	23 Agustus 2022	1625/LS/2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga T.A.2022 untuk pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah berupa Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan a.n.Idris Syafri	59.500.000,00
3	30 Desember 2022	4533/LS/2022	Pembayaran 95% Pekerjaan Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital di Masa Tanggap Darurat Kebakaran Pasar Bawah Kelurahan ATTS Kec Guguk Panjang Tanggal 4 Desember 2022	189.791.000,00
4	30 Desember 2022	4534/LS/2022	Pembayaran 5% Pekerjaan Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital di Masa Tanggap Darurat Kebakaran Pasar Bawah Kelurahan ATTS Kec Guguk Panjang Tanggal 4 Desember 2022	9.989.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>271.437.350,00</b>

Sesuai dengan Laporan Kejadian Bencana Kebakaran oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi bahwa telah terjadi Bencana Kebakaran di Pasar Bawah pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 jam 04.30. Kebakaran menghanguskan 11 petak kios dan 7 petak lapak mengalami rusak ringan, Terhadap musibah ini Pemerintah Kota Bukittinggi segera mengeluarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat Bencana dan segera melakukan pemulihan sarana dan prasarana vital untuk meminimalisir dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Dengan tidak tersedianya anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana diatas pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Pemerintah Kota Bukittinggi memutuskan untuk menggunakan dana Belanja Tidak Terduga agar pemulihan sarana prasarana Pasar Bawah tersebut dapat segera dilakukan.

Untuk pelaksanaan Pemulihan Sarana dan Prasarana dikoordinir oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, dan atas pelaksanaan pekerjaan proyek pemulihan sarana dan prasarana vital dimasa tanggap darurat tersebut telah dibayarkan menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga dengan rincian:

1. SP2D nomor 4533/LS/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp189.791.000,00
2. SP2D nomor 4534/LS/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp9.989.000,00.

Selain untuk pemulihan pasca bencana Kebakaran Pasar Bawah, BTT juga digunakan untuk untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah berupa Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan a.n. Azmel Muzarfi dan a.n. Idris Syafri sebagaimana terangkum dalam tabel diatas.

Selengkapnya rincian penggunaan dana oleh SKPD dapat dilihat pada lampiran Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

#### 5.1.2.4 Belanja Transfer

Anggaran Tahun 2022 Rp	Realisasi Tahun 2022 Rp
8.766.666.667,00	8.520.000.000,00

Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp8.766.666.667,00. Anggaran ini merupakan bantuan ke Pemerintah Provinsi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Bukittinggi yakni Hebat dalam sektor Pendidikan. Pemerintah memandang perlu adanya jaminan terlaksananya Wajib Belajar 12 Tahun berupa subsidi iuran komite bagi pelajar SMA/SMK Negeri yang mempunyai Kartu Keluarga Bukittinggi.

Untuk menjaga keberlangsungan serta untuk penguatan Program Pendidikan pada SMA, SLB dan SMK Negeri/Swasta, maka Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya melalui salah satu kebijakan yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-54-2022 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2022.

Dalam Surat Keputusan sebagaimana dimaksud di atas dana yang ditetapkan adalah sebesar Rp9.266.666.667,00 yang kemudian terjadi beberapa kali perubahan terakhir dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-217-2022 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-54-2022 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2022 dimana anggaran yang ditetapkan menjadi sebesar Rp8.766.666.667,00 yang terrealisasi sebesar 97,19 %. Keterangan lebih jelas atas aktifitas belanja ini dapat dilihat pada Bab VI Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 5.1.3 Surplus / Defisit

Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
(122.987.559.855,00)	(45.656.813.202,44)

Dari Pendapatan dan Belanja yang telah direalisasikan selama Tahun Anggaran 2022 menghasilkan defisit sebesar (Rp45.656.813.202,44) dari anggaran Defisit yang ditetapkan sebesar (Rp122.987.559.855,00) dan defisit sebesar angka tersebut akan ditutup dengan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

5.1.4 Pembiayaan Daerah	Anggaran	Realisasi
	Tahun 2022	Tahun 2022
	Rp	Rp
	122.987.559.855,90	122.987.559.855,90

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi dari setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam pegangan pemerintah terutama dimaksud untuk menutup defisit atau memanfaatkan *surplus* anggaran.

Pada APBD Tahun Anggaran 2022, Pembiayaan Daerah dianggarkan dalam Belanja Badan Keuangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp122.987.559.855,00 yaitu sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk menutup defisit anggaran. Sementara realisasi Pembiayaan tahun 2022 adalah 100% yang melebihi anggarannya Rp0,90 sebesar Rp122.987.559.855,90. Realisasi Pembiayaan Daerah secara terinci dapat disajikan dibawah ini.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan	Anggaran	Realisasi
	Tahun 2022	Tahun 2022
	Rp	Rp
	132.987.559.855,00	132.979.000.890,90

Anggaran penerimaan pembiayaan Tahun 2022 adalah sebesar Rp132.987.559.855,00 direalisasikan sebesar Rp132.987.559.855,90 atau lebih 100%, melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,90. Penerimaan pembiayaan ini berasal dari pelampauan pendapatan/penghematan belanja yang menjadi SiLPA tahun 2021 sebesar Rp132.979.000.890,90.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Anggaran	Realisasi
	Tahun 2022	Tahun 2022
	Rp	Rp
	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi pengeluaran Pemerintah Kota Bukittinggi yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di masa yang akan datang. Pada tahun 2022 Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Bukittinggi terdiri dari :

1. Penyertaan Modal pada PT BPRS JAM GADANG sebesar Rp3.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021.
2. Penyertaan Modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) Kantor Cabang Bukittinggi sebesar Rp7.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Anggaran	Realisasi
	Tahun 2022	Tahun 2022
	Rp	Rp
	0,00	77.322.187.688,46

Berdasarkan uraian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja pada bagian sebelumnya maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaannya mengalami Defisit sebesar Rp45.656.813.202,44 yang ditutupi dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp122.987.559.855,90, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp77.332.187.688,46

Disamping formula penghitungan SiLPA di atas, dapat juga kami informasikan struktur pembentuk SiLPA Tahun 2022 yang berasal dari pelampauan pendapatan dan penghematan belanja serta pembiayaan yang dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel. 5.1.2.8 Rincian SiLPA Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>I</b>	<b>Pelampauan PAD</b>	<b>15.755.335.326,78</b>
	Pendapatan Asli Daerah	5.460.866.272,15
	Pendapatan Transfer	10.512.056.512,00
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	(217.587.457,37)
<b>II</b>	<b>Penghematan Belanja</b>	<b>93.086.081.979,34</b>
	Belanja Operasi	64.160.713.554,90
	Belanja Modal	23.950.139.107,44
	Belanja Tidak Terduga	4.728.562.650,00
	Belanja Transfer	246.066.667,00
<b>III</b>	<b>Pelampauan Pembiayaan</b>	<b>8.558.964,10</b>
	Penerimaan Pembiayaan	-
	Pengeluaran Pembiayaan	8.558.964,10
	<b>SILPA (I - II + III)</b>	<b>(77.322.187.688,46)</b>

8/19

SiLPA sebesar Rp77.332.187.688,46 tersebut adalah dalam bentuk kas dan kewajiban sebagaimana penjelasan kas dibagian Aset Lancar dan kewajiban pada Neraca dengan struktur dan nilai sebagai berikut:

1. Kas pada kasda sebesar Rp63.691.297.145,77
2. Kas pada Bendahara Pengeluaran Rp7.020.824,00
3. Kas pada Bendahara BLUD Rp12.610.034.870,69
4. Kas dana BOS sebesar Rp1.014.071.646,00
5. Kas BOP sebesar Rp202,00
6. Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp237.000 yang merupakan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 oleh RSUD Kota Bukittinggi sebesar Rp243.000,00 dan keterlambatan pembayaran potongan gaji untuk Taspen sebesar Rp6.000,00.

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
	77.322.187.688,46	132.987.559.855,90

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Perubahan SAL menyajikan pos-pos secara komparatif antara periode berjalan dan periode yang lalu. Laporan Perubahan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 dan 2021 yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 5.2.1  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Kota Bukittinggi  
Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021
1	2	3	4
1	Saldo anggaran Lebih Awal	132,987,559,855.90	99,386,026,235.08
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	132,979,000,890.90	94,377,077,512.75
3	Sub Total	8,558,965.00	5,008,948,722.33
4	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	77,322,187,688.46	132,987,559,855.90
5	Sub Total	77,330,746,653.46	137,996,508,578.23
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(8,558,965.00)	(5,008,948,722.33)
7	Lain-lain	-	-
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	77,322,187,688.46	132,987,559,855.90

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp132.987.559.855,90 yang merupakan nilai dari SiLPA Tahun Anggaran 2021. Saldo Anggaran Lebih ini yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2022.
- Penggunaan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi pada APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 99,99% dari total SiLPA tahun 2021 yakni sebesar Rp132.979.000.890,00 sementara penggunaan SAL tahun 2021 adalah Rp94.377.077.512,75
- Selisih antara SiLPA yang awal dengan penggunaan SiLPA tahun berjalan berupa koreksi penggunaan SiLPA tahun lalu sebesar Rp8.558.965,00. Dan di tahun 2021 terdapat selisih serupa sebesar Rp5.008.948.722,33.

4. Selama tahun 2022, estimasi Perubahan SAL menghasilkan nilai Rp77.322.187.688,46 nilai ini sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022 yang menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp77.322.187.688,46, nilai tersebut merupakan selisih dari nilai Pendapatan dikurangi nilai Belanja dan ditambah dengan Pembiayaan Netto selama tahun 2022, dan Tahun 2021 nilai SiLPA adalah sebesar Rp132.987.559.855,90.
5. Pada tahun 2022 terdapat koreksi terhadap pembukuan dari kas BOS ke Tagihan Jangka Panjang-TGR akibat meninggalnya Bendahara BOS SDN 12 Puhun Pintu Kabun tahun 2021 yang selanjutnya terbit di 29 Desember 2021 tahun sebelumnya sebesar Rp8.558.965,00 yang merupakan reklas pencatatan kesalahan dan pada tahun 2021 terdapat koreksi sebesar Rp5.008.948.722,33 yang merupakan nilai pendapatan jasa giro Dana Cadangan yang tercatat ganda (double accounting) pada tahun 2020.
6. Total nilai SAL Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan tahun 2022 berjumlah Rp77.322.187.688,46.



### 5.3 NERACA

Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 dengan nilai Aset sebesar Rp2.045.355.031.596,55, nilai Kewajiban sebesar Rp12.332.999.300,92 dan nilai Ekuitas sebesar Rp2.033.022.032.295,63. Penjelasan masing-masing pos Neraca adalah sebagai berikut.

5.3.1 ASET	Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
	2.045.355.031.596,55	2.052.252.906.872,87

Nilai Aset Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.045.355.031.596,55, nilai Aset tersebut terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp105.597.334.644,95, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp62.195.784.727,47 Aset Tetap sebesar Rp1.855.803.078.417,13 dan Aset Lainnya sebesar Rp21.779.052.447,00 Penjelasan Aset dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.1 ASET LANCAR	Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
	105.597.334.644,95	169.194.733.756,46

Nilai Aset Lancar Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 sebesar Rp105.597.334.644,95. Nilai Aset Lancar Pemerintah Kota Bukittinggi terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, Investasi Jangka Pendek dan Persediaan. Rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut:

1. Kas dan Setara Kas	Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
	Rp77.322.424.688,46	Rp132.987.559.855,90

PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp77.322.424.688,46, sementara SiLPA di LRA sebesar Rp77.322.187.688,46. artinya terdapat selisih antara Kas dan Setara Kas dengan SiLPA di LRA sebesar Rp237.000,00 yang merupakan Utang PFK.

Kas tersebut adalah merupakan Kas di Bank dan Kas Tunai yang terdiri dari:

A. Kas di Kas Daerah	Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
	63.691.297.145,77	126.122.416.542,07

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sisa Kas di Kas Daerah Kota Bukittinggi menurut pencatatan Badan Keuangan sebagai SKPKD yang kepala organisasinya juga selaku BUD adalah sebesar Rp63.691.297.145,77 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1  
Daftar Saldo Kas di Rekening Kas Daerah

No.	Rekening	No. Rekening	Per 31 Desember 2022 (Rp.)	Per 31 Desember 2021 (Rp.)
1	2	3	4	5
1	BPD PENGELUARAN	0200.0101.00278-4	-	-
2	BPD PENERIMAAN	0200.0101.00201-9	-	-
3	BPD KAS UMUM DAERAH	0200.0101.00276-1	63.691.297.145,77	120.761.419.322,85
4	BPD PENGELUARAN GAJI	0200.0101.00202-1	-	-
5	BPD PENERIMAAN PBB	0200.0101.00343.1	-	-
6	BPD DAK	0200.0101.00242-5	-	-
7	BNI		-	-
8	BRI KASDA		-	5.299.831.319,22
9	BRI PARPORA		-	61.165.900,00
10	BRI PARKIR RODA EMPAT		-	-
11	BRI PARKIR RODA DUA		-	-
12	BRI PARKIR BASEMENT PASAR ATAS		-	-
13	BPD PAJAK HOTEL	0200.0201.00373.9	-	-
14	BPD PAJAK RESTORAN	0200.0101.00374.1	-	-
15	BPD PAJAK HIBURAN	0200.0101.00375.2	-	-
16	BPD PAJAK REKLAME	0200.010100376.4	-	-
17	BPD PAJAK PARKIR	0200.0101.00378.8	-	-
18	BPD PAJAK AIR BAWAH TANAH	0200.0101.00379.1	-	-
19	BPD PAJAK BPHTB	0200.0101.00380.6	-	-
			63.691.297.145,77	126.122.416.542,07

Dalam saldo Kas Daerah tahun 2022 tersebut juga masih mengandung sisa dana peruntukan tertentu sebesar Rp6.559.075.462,55 dengan uraian sebagai berikut:

1. Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2021 sebesar Rp24.304.865,00 dan tahun 2022 adalah Rp6.029.040,73.
2. Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik sampai dengan tahun 2022 selain BOP dan BOS adalah Rp3.299.885.905,00.
3. Sisa Dana Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022 sebesar Rp91.884.329,82
4. Sisa Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp13.083.422,00
5. Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) yang perantukannya untuk gaji PPPK tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp3.123.887.900,00

Dalam hal manajemen kas, sejak tahun 2012 yang lalu Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerapkan *single treasury account* dengan menetapkan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi sebagai bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah dan Nomor Rekening 0200.0101.00276-1 sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang berfungsi sebagai rekening penerima transfer baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun dari rekening kas lainnya.

Untuk menunjang tertibnya pengelolaan Kas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-337-2021 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi sebagai Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022, Keputusan Walikota Nomor 188.45-338-2021 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Walikota Bukittinggi nomor 188.45-238-2022 tentang Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kota Bukittinggi. Berikut rekening-rekening pembantu Kas Umum Daerah yang masih berlaku sampai 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

- a. Rekening 0200.0101.00201-9 untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Rekening 0200.0101.00202-1 untuk pembayaran pengeluaran Gaji yang dananya bersumber dari pemindahan dari rekening Kas Umum Daerah;
- c. Rekening 0200.0101.00278-4 untuk pengeluaran rutin Pemerintah Kota Bukittinggi yang dananya bersumber dari pemindahan dari rekening Kas Umum Daerah;
- d. Rekening 0200.0101.00343-1 untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dananya bersumber dari setoran wajib pajak PBB-P2
- e. Rekening 0200.0101.00373.9 untuk penerimaan Pajak Hotel
- f. Rekening 0200.0101.00374.1 untuk penerimaan Pajak Restoran
- g. Rekening 0200.0101.00375.2 untuk penerimaan Pajak Hiburan
- h. Rekening 0200.0101.00376.4 untuk penerimaan Pajak Reklame
- i. Rekening 0200.0101.00377.6 untuk penerimaan Penerangan Jalan
- j. Rekening 0200.0101.00378.8 untuk penerimaan Pajak Parkir
- k. Rekening 0200.0101.00379.1 untuk penerimaan Pajak Air Tanah
- l. Rekening 0200.0101.00380.6 untuk penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- m. Rekening 0200.0101.00436-6 untuk penerimaan Layanan E-Retribusi dan E-Sewa pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi.
- n. Rekening 0200.0101.00440.3 untuk penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Sampai pada akhir tahun 2021 rekening Kas Daerah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bukittinggi belum mampu memenuhi kriteria tersebut diatas, maka terhitung tanggal 8 Februari 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi menutup rekening Kas Daerah Rekening Nomor 0015-01-001847-30-7 pada BRI.

Pada tanggal 21 Desember 2022 juga dilakukan penutupan beberapa rekening Pembantu yang ada pada BRI, sehingga per 31 Desember 2022 tidak terdapat lagi rekening Kasda dan Rekening Pembantu Kasda pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tahun 2022 juga dilakukan penutupan Rekening Pembantu Kas Daerah yang digunakan untuk membantu pencairan Dana DAK, dikarenakan kurang efektifnya penggunaan rekening bank tersebut yang mana realisasi dana DAK dapat digabungkan ke rekening belanja umum, maka Rekening 0200.0101.00242-5 dilakukan penutupan.

<b>B. Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>0,00</b>	<b>17.754.000,00</b>

Pada tahun 2021 terdapat Sisa Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp17.754.000,00 yaitu Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup yang telah disetor ke rekening Kas Daerah Pembantu Penerimaan pada tanggal 3 Januari 2022 dengan STS Nomor 014008, dan pada tahun 2022 tidak lagi terdapat saldo kas pada Bendahara Penerimaan.

<b>C. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>7.020.824,00</b>	<b>1.625.443.351,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai dan saldo bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp7.020.824,00 merupakan saldo Bank pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi, nilai tersebut merupakan utang ke BPJS tahun 2020 yang seharusnya sudah dibayar.

Pembayaran utang BPJS tersebut telah diproses melalui SP2D dengan Nomor 4618/LS/2022 tanggal 31 Desember 2022, namun telah terjadi kesalahan teknis pada permintaan pencairan sehingga pembayaran Utang BPJS tidak jadi terbayarkan namun uang tersebut berada di rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Surat Perintah Membayar dari dinas terkait. Akhirnya, untuk pelunasan Utang kepada BPJS tersebut direalisasikan pada tanggal 16 Februari 2023 dengan setoran Bendahara terkait langsung ke BPJS.

D. Kas di BLUD	Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
	12.610.034.870,69	3.081.986.359,83

Kas di BLUD yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.081.986.359,83 dan per tanggal 31 Desember 2022 naik menjadi Rp12.610.034.870,69

Sampai dengan 31 Desember 2022, 7 (tujuh) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Walikota nomor 188.45.351-2016 tanggal 23 Desember 2016 dan diiringi kemudian dengan terbitnya Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 April 2017 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Bukittinggi.

Setelah melalui proses pada triwulan III dan IV tahun 2020 UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi yang baru berdiri pun menyusul untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sesuai dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-32-2021 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi tanggal 3 Februari 2021.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan BLUD untuk 8 (delapan) UPTD di atas, maka setiap tahun ditetapkan Bendahara dan Nomor Rekening pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Pada tahun 2022, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-253-2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 188.45-353-2021 tentang Penetapan Bendahara Pembantu dan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

Dengan telah ditunjuknya Bendahara dan ditetapkannya Rekening Bendahara pada masing-masing Puskesmas dan RSUD Kota Bukittinggi, Bendahara bertanggungjawab untuk melaksanakan fungsi penatausahaan dan pertanggungjawaban terkait tugas-tugas perbendaharaan pada Badan Layanan Umum Daerah serta menyusun laporan data dan informasi yang dibutuhkan secara periodik yang berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Bendahara membuat surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dari Pengguna Anggaran kepada BUD, kemudian BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) setiap bulannya. Berdasarkan SP2B bulan Januari sampai dengan Desember 2022, maka didapat sisa kas pada masing-masing Puskesmas dan RSUD sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.2  
Mutasi Kas Bendahara BLUD Tahun 2022

No	Uraian	Per 31 Des 2021	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pajak yg belum disetor (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=3+4+6-5
1	Puskesmas Rasimah Ahmad	96.290.897,00	768.328.950,00	862.835.882,00	-	1.783.965,00
2	Puskesmas Guguak Panjang	63.458.791,00	878.059.500,00	937.855.832,00	-	3.662.459,00
3	Puskesmas Nilam Sari	16.071.713,15	346.342.600,00	358.777.610,00	-	3.636.703,15
4	Puskesmas Mandiangin	3.446.149,00	690.237.300,00	674.495.765,00	-	19.187.684,00
5	Puskesmas Gulai Baneah	13.671.590,68	314.300.700,00	304.993.155,00	-	22.979.135,68
6	Puskesmas Tigo Baleh	161.186.903,00	613.009.200,00	698.549.710,00	-	75.646.393,00
7	Puskesmas Plus Mandiangin	21.771.154,00	273.268.200,00	293.023.513,00	-	2.015.841,00
8	Rumah Sakit Umum Daerah	2.706.089.162,00	12.271.964.934,00	2.497.174.406,14	243.000,00	12.481.122.689,86
	Total	3.081.986.359,83	16.155.511.384,00	6.627.705.873,14	243.000,00	12.610.034.870,69

Pada RSUD Kota Bukittinggi terjadi kesalahan penghitungan pajak sehingga terdapat kekurangan setor pajak per 31 Desember 2022 senilai Rp243.000,00 yang dicatat sebagai kas BLUD RSUD. Pajak tersebut telah disetorkan pada tanggal 5 Januari 2023 oleh bendahara BLUD RSUD.

Selain kurang setor pajak pada BLUD RSUD sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat kas tunai di tangan bendahara BLUD RSUD sebesar Rp12.914,00 sehingga pada 31 Desember 2022 kas tunai di tangan Bendahara BLUD RSUD adalah sebesar Rp255.914,00, sedangkan pada 7 (tujuh) Puskesmas lainnya tidak terdapat saldo Kas Tunai.

Rincian saldo Kas Tunai dan Bank sebagaimana mutasi kas di atas, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 5.3.1.3  
Saldo Kas Tunai dan Bank Pada Bendahara BLUD

No	Uraian	Saldo Kas di Bank (Rp)	Saldo Kas Tunai (Rp)	Saldo kas Per 31 Des 2022
1	2	3	4	5=3+4
1	Puskesmas Rasimah Ahmad	1.783.965,00	-	1.783.965,00
2	Puskesmas Guguak Panjang	3.662.459,00	-	3.662.459,00
3	Puskesmas Nilam Sari	3.636.703,15	-	3.636.703,15
4	Puskesmas Mandiangin	19.187.684,00	-	19.187.684,00
5	Puskesmas Gulai Baneah	22.979.135,68	-	22.979.135,68
6	Puskesmas Tigo Baleh	75.646.393,00	-	75.646.393,00
7	Puskesmas Plus Mandiangin	2.015.841,00	-	2.015.841,00

**E. Kas Dana BOS**

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>1.014.071.646,00</b>	<b>2.139.959.603,00</b>

Kas di Bendahara BOS merupakan bagian Kas yang ada pada Bendahara yang memegang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masing-masing Sekolah Dasar Negeri dan SMP Negeri. Saldo kas di Bendahara BOS Sekolah Negeri pada Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.014.071.646,00 sedangkan saldo kas pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.139.959.603,00.

Rincian saldo kas pada masing-masing Bendahara BOS di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 5.3.1.4**  
**Mutasi Kas Pada Bendahara BOS Sekolah Negeri Tahun 2022**

N o.	Uraian	Per 31 Des 2021	Pendapatan (Rp)	Pengembalian Atas Temuan Inspektorat (Rp)	Belanja (Rp)	Reklasifikasi dari Kas ke Aset Lainnya	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=3-4+5-6-7
1	SD N 01 Campago Ipuh	6.264.177,00	147.418.941,00	930.000,00	146.989.510,00		7.623.608,00
2	SD N 02 Campago Gugunk Bulek	7.467.205,00	145.408.699,00	500.000,00	144.963.016,00		8.412.888,00
3	SD N 03 Pulai Anak Air	2.343.907,00	99.000.000,00	-	98.840.588,00		2.503.319,00
4	SD N 04 Garegeh	1.778.543,00	271.335.085,00	-	272.100.739,00		1.012.889,00
5	SD N 05 PPK	6.306.215,00	180.257.713,00	-	180.177.990,00		6.385.938,00
6	SD N 06 Pulai Anak Air	165.690,00	145.428.516,00	-	145.550.000,00		44.206,00
7	SD N 07 Kubu Gulai Bancak	6.689.673,00	194.400.000,00	-	194.275.711,00		6.813.962,00
8	BOS SD N 08 Campago Ipuh	49.589,00	122.400.000,00	-	122.179.779,00		269.810,00
9	SD N 09 Manggis Ganting	11.060.932,00	150.300.000,00	-	148.505.790,00		12.855.142,00
10	SD N 10 Puhun	4.920.770,00	114.300.000,00	-	110.874.832,00		8.345.938,00

	Pintu Kabun						
11	SD N 11 Campag o Guguk Bulek	11.234.310,00	142.200.000,0 0	-	135.364.970,00		18.069.340,00
12	SD N 12 Puhun Pintu Kabun	24.601.162,00	78.032.575,00	-	93.803.996,00	8.558.965,0 0	270.776,00
13	SD N 13 Kubu Gulai Bancah	99.087,00	92.377.505,00	-	92.349.097,00		127.495,00
14	SD N 14 Tanjung Alam	21.395.721,00	84.600.000,00	250.000,00	82.213.921,00		24.031.800,00
15	SD N 15 Pulai Anak Air	83.212,00	129.600.000,0 0	-	126.917.616,00		2.765.596,00
16	SD N 16 Campag o Ipuh	24.396.852,00	119.757.025,0 0	-	130.457.950,00		13.695.927,00
17	SD N 17 Manggis Ganting	7.364.797,00	124.321.016,0 0	-	123.632.423,00		8.053.390,00
18	SD N 18 Campag o Guguk Bulek	8.553.703,00	121.231.562,0 0	-	125.068.398,00		4.716.867,00
19	SD N 01 Benteng Pasar Atas	41.259.810,00	420.975.464,0 0	-	437.275.662,00		24.959.612,00
20	SD N 02 Percont ohan	83.240.829,00	435.453.861,0 0	235.000,00	484.142.662,00		34.787.028,00
21	SD N 03 Pakan Kurai	47.927.261,00	442.612.710,0 0	-	485.445.917,00		5.094.054,00
22	SD N 04 Bukit Apit Puhun	211.314,00	116.100.000,0 0	-	115.086.750,00		1.224.564,00
23	SD N 05 Tarok Dipo	712.994,00	150.300.000,0 0	-	149.965.721,00		1.047.273,00
24	SD N 06 Aur Tanjung Tengah Sawah	602.608,00	148.500.000,0 0	-	144.464.954,00		4.637.654,00
25	SD N 07 Bukit Cangan g	19.392.300,00	260.820.040,0 0	240.000,00	249.544.212,00		30.908.128,00
26	SD N 08 Tarok Dipo	92.437.603,00	240.116.170,0 0	-	306.667.728,00		25.886.045,00
27	SD N 10 Aur Tanjung	204.262,00	136.800.000,0 0	-	135.558.914,00		1.445.348,00

8/9



	ang Tengah Sawah						
28	SD N 11 Bukit Apit Puhun	10.156.138,00	140.400.000,0 0	-	135.000.000,00		15.556.138,00
29	SD N 12 Bukit Cangan g	659.758,00	126.000.000,0 0	-	125.999.937,00		659.821,00
30	SD N 13 Bukit Apit Puhun	231.568,00	149.400.000,0 0	320.000,00	149.400.000,00		551.568,00
31	SD N 14 Aur Tanjung ang Tengah Sawah	35.960.577,00	325.800.000,0 0	-	316.498.325,00		45.262.252,00
32	SD N 16 Tarok Dipo	1.696.942,00	288.900.000,0 0	-	287.985.320,00		2.611.622,00
33	SD N 17 Pakan Kurai	4.940.760,00	261.900.000,0 0	-	258.768.231,00		8.072.529,00
34	SD N 18 Tarok Dipo	556.364,00	129.600.000,0 0	-	129.032.401,00		1.123.963,00
35	SD N 19 Aur Tanjung ang Tengah Sawah	7.591.252,00	122.400.000,0 0	-	121.979.313,00		8.011.939,00
36	SD N 01 Ladang Cakiah	8.098.010,00	140.400.000,0 0	-	138.984.950,00		9.513.060,00
37	SD N 02 Aur Kuning	52.686.811,00	270.371.286,0 0	-	282.961.505,00		40.096.592,00
38	SD N 03 Pakan Labuh	35.016.827,00	247.297.780,0 0	-	274.981.524,00		7.333.083,00
39	SD N 04 Birugo	20.663.011,00	389.390.650,0 0	-	410.011.284,00		42.377,00
40	SD N 05 Birugo	5.130.679,00	107.080.600,0 0	-	105.051.612,00		7.159.667,00
41	SD N 06 Parit Antang	11.809.502,00	116.100.000,0 0	-	115.902.217,00		12.007.285,00
42	SD N 07 Belakan g Balok	12.285.174,00	144.691.805,0 0	-	155.527.890,00		1.449.089,00
43	SD N 08 Kuba Tanjung	13.085.480,00	137.972.394,0 0	-	144.900.000,00		6.157.874,00
44	SD N 09 Belakan g Balok	5.012.354,00	211.121.572,0 0	-	213.163.911,00		2.969.815,00
45	SD N 10 Supiran	549.852,00	248.400.000,0 0	-	247.825.449,00		1.124.403,00

46	SD N 11 Aur Kuning	37.876.253,00	130.794.509,0 0	-	141.817.510,00		26.853.252,00
47	SMP N 1 Bukittinggi	260.029.308,00	534.300.134,0 0	200.000,00	677.664.282,00		116.865.160,0 0
48	SMP N 2 Bukittinggi	332.781.308,00	767.547.131,0 0	50.000,00	1.025.255.112,00		75.123.327,00
49	SMP N 3 Bukittinggi	91.275.167,00	504.006.275,0 0	492.500,00	562.603.366,00		33.170.576,00
50	SMP N 4 Bukittinggi	150.173.907,00	835.187.087,0 0	1.675.000,0 0	951.395.146,00		35.640.848,00
51	SMP N 5 Bukittinggi	27.426.517,00	672.699.261,0 0	-	622.790.842,00		77.334.936,00
52	SMP N 6 Bukittinggi	326.985.512,00	451.566.524,0 0	-	639.188.058,00		129.363.978,0 0
53	SMP N 7 Bukittinggi	172.708.779,00	413.269.932,0 0	-	557.479.789,00		28.498.922,00
54	SMP N 8 Bukittinggi	83.807.467,00	458.417.114,0 0	775.000,00	487.470.608,00		55.528.973,00
	<b>Total</b>	<b>2.139.999.603,00</b>	<b>13.139.060.936,00</b>	<b>5.667.500,00</b>	<b>14.262.057.428,00</b>	<b>8.558.965,00</b>	<b>1.014.071.646,00</b>

Pada SDN 12 Puhun Pintu Kabun, Saldo kas senilai Rp8.558.965,00 merupakan saldo kas ditangan Bendahara BOS 2021 yang meninggal pada tahun 2021. Sehubungan dengan telah diterbitkannya SKTJM atas nama Bendahara tersebut, maka kas senilai Rp8.558.965,00 tersebut di reklas ke akun Aset Lainnya, penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Aset Lainnya.

Per tanggal 31 Desember 2022 terdapat saldo kas di bank sebesar Rp950.930.765,00 dan saldo kas tunai sebesar Rp71.699.846,00 pada Bendahara BOS Sekolah Negeri. Sisa kas tunai tersebut di atas disetorkan ke rekening Kas Bos pada tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 5.3.1.5**  
**Saldo Kas Tunai dan Bank Pada Bendahara BOS Sekolah Negeri**

No.	Uraian	Saldo Kas di Bank (Rp)	Saldo Kas Tunai (Rp)	Saldo Kas Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2	3	4	5=3+4
1	SD N 01 Campago Ipuh	7.623.608,00	-	7.623.608,00
2	SD N 02 Campago Guguak Bulek	8.412.888,00	-	8.412.888,00
3	SD N 03 Pulai Anak Air	2.503.319,00	-	2.503.319,00
4	SD N 04 Garegeh	1.012.889,00	-	1.012.889,00
5	SD N 05 PPK	6.385.938,00	-	6.385.938,00
6	SD N 06 Pulai Anak Air	44.206,00	-	44.206,00
7	SD N 07 Kubu Gulai Bancah	6.813.962,00	-	6.813.962,00
8	BOS SD N 08 Campago Ipuh	269.810,00	-	269.810,00
9	SD N 09 Manggis Ganting	264.142,00	12.591.000,00	12.855.142,00
10	SD N 10 Puhun Pintu Kabun	8.345.938,00	-	8.345.938,00
11	SD N 11 Campago Guguak Bulek	18.069.340,00	-	18.069.340,00
12	SD N 12 Puhun Pintu Kabun	270.772,00	4,00	270.776,00
13	SD N 13 Kubu Gulai Bancah	127.495,00	-	127.495,00
14	SD N 14 Tanjung Alam	7.784.800,00	16.247.000,00	24.031.800,00
15	SD N 15 Pulai Anak Air	2.765.596,00	-	2.765.596,00
16	SD N 16 Campago Ipuh	13.695.927,00	-	13.695.927,00
17	SD N 17 Manggis Ganting	8.053.390,00	-	8.053.390,00
18	SD N 18 Campago Guguak Bulek	4.716.867,00	-	4.716.867,00
19	SD N 01 Benteng Pasar Atas	18.560.175,00	6.399.437,00	24.959.612,00
20	SD N 02 Percontohan	8.649.588,00	26.137.440,00	34.787.028,00
21	SD N 03 Pakan Kurai	5.094.054,00	-	5.094.054,00
22	SD N 04 Bukit Apit Puhun	1.224.564,00	-	1.224.564,00
23	SD N 05 Tarok Dipo	1.047.273,00	-	1.047.273,00
24	SD N 06 Aur Tajung Kang Tengah Sawah	4.637.654,00	-	4.637.654,00
25	SD N 07 Bukit Cangang	30.908.128,00	-	30.908.128,00
26	SD N 08 Tarok Dipo	25.886.045,00	-	25.886.045,00
27	SD N 10 Aur Tajung Kang Tengah Sawah	1.445.348,00	-	1.445.348,00
28	SD N 11 Bukit Apit Puhun	15.556.138,00	-	15.556.138,00
29	SD N 12 Bukit Cangang	659.821,00	-	659.821,00
30	SD N 13 Bukit Apit Puhun	551.568,00	-	551.568,00
31	SD N 14 Aur Tajung Kang Tengah Sawah	45.262.252,00	-	45.262.252,00
32	SD N 16 Tarok Dipo	2.611.622,00	-	2.611.622,00
33	SD N 17 Pakan Kurai	8.072.529,00	-	8.072.529,00
34	SD N 18 Tarok Dipo	1.123.963,00	-	1.123.963,00
35	SD N 19 Aur Tajung Kang Tengah Sawah	8.011.939,00	-	8.011.939,00
36	SD N 01 Ladang Cakiah	9.513.060,00	-	9.513.060,00
37	SD N 02 Aur Kuning	40.096.592,00	-	40.096.592,00
38	SD N 03 Pakan Labuah	7.333.083,00	-	7.333.083,00
39	SD N 04 Birago	42.377,00	-	42.377,00
40	SD N 05 Birago	7.159.667,00	-	7.159.667,00
41	SD N 06 Parit Antang	12.007.285,00	-	12.007.285,00
42	SD N 07 Belakang Balok	1.449.089,00	-	1.449.089,00
43	SD N 08 Kubu Tanjung	6.157.874,00	-	6.157.874,00
44	SD N 09 Belakang Balok	2.969.815,00	-	2.969.815,00
45	SD N 10 Sapiran	1.124.403,00	-	1.124.403,00
46	SD N 11 Aur Kuning	26.853.252,00	-	26.853.252,00
47	SMP N 1 Bukittinggi	116.865.160,00	-	116.865.160,00
48	SMP N 2 Bukittinggi	75.123.327,00	-	75.123.327,00
49	SMP N 3 Bukittinggi	33.170.576,00	-	33.170.576,00
50	SMP N 4 Bukittinggi	33.874.848,00	1.766.000,00	35.640.848,00
51	SMP N 5 Bukittinggi	77.334.936,00	-	77.334.936,00

No.	Uraian	Saldo Kas di Bank (Rp)	Saldo Kas Tunai (Rp)	Saldo Kas Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2	3	4	5=3+4
52	SMP N 6 Bukittinggi	139.363.978,00	-	139.363.978,00
53	SMP N 7 Bukittinggi	28.498.922,00	-	28.498.922,00
54	SMP N 8 Bukittinggi	55.528.973,00	-	55.528.973,00
	Total	950.930.765,00	63.140.881,00	1.014.071.646,00

Pada Tahun 2022 Dana BOS dan BOP disalurkan dalam bagian Pendapatan DAK Non Fisik, dimana jika terdapat sisa dana di akhir tahun akan diperhitungkan pada penyaluran tahun selanjutnya. Dana BOS disalurkan langsung oleh Pemerintah Pusat ke rekening Bendahara BOS dan BOP sekolah yang anggarannya ditetapkan pada rekening Belanja Operasional BOS dan BOP untuk SD dan SMP Negeri, namun untuk SD, SMP dan PAUD swasta dianggarkan di APBD melalui rekening Belanja Hibah. Kedua macam penganggaran Belanja yang berasal dari Dana BOS dan BOP tersebut dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.

Pada LRA, pendapatan dana BOS dan BOP dicatat pada akun Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada pos Pendapatan Dana Perimbangan dan belanjanya dicatat berdasarkan pengesahan yang diterbitkan oleh BUD berupa SP2B setiap bulannya berdasarkan usulan SP3B dari SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada akun yang dianggarkan sesuai DPA masing-masing.

Selain sisa pada sekolah negeri, terdapat sisa Dana DAK Non Fisik-BOS dan BOP pada SD, SMP dan PAUD swasta, penyaluran dilakukan dengan cara pemindahbukukan dari RKUN langsung ke rekening satuan Pendidikan, sisa belanja dari dana hibah yang diterima oleh sekolah tersebut tidak diakui sebagai bagian sisa Kas pada Pemerintah Kota Bukittinggi, karena sisa tersebut berada pada sekolah swasta yang bukan bagian penguasaan BUD Pemerintah Kota Bukittinggi.

Berikut sisa Dana BOS yang bersumber dari DAK Non Fisik pada SD dan SMP swasta, yang tidak dihitung sebagai Aset Lancar pada Pemerintah Kota Bukittinggi, yaitu:

Tabel 5.3.1.6  
Sisa Kas Dana BOS Sekolah Swasta

No	Sekolah	SILPA sampai dengan 2021	Penyaluran 2022	Total Anggaran 2022	Realisasi Anggaran 2022	SILPA BOS s.d 31 Des 2022
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5-6
1	SD ISLAM TERPADU MASYITHAH	14.897.079,00	279.900.000,00	294.797.079,00	279.723.552,00	15.073.527,00
2	SDIT CAHAYA HATI	1.827.090,00	490.500.000,00	492.327.090,00	485.003.232,00	7.323.858,00
3	SDIT INSAN KAMIL	9.134.700,00	586.665.300,00	595.800.000,00	595.444.779,00	355.221,00
4	SD FRANSISKUS	33.716.015,00	317.700.000,00	351.416.015,00	344.490.015,00	6.926.000,00
5	SD JAMIYYATUL HUJJAJ BUKITTINGGI	121.868,00	577.657.430,00	577.779.298,00	575.369.313,00	2.409.985,00
6	SD TRISULA PERWARI	-	48.600.000,00	48.600.000,00	48.559.040,00	40.960,00
7	SD ISLAM AL ISHLAH BUKITTINGGI	16.998.687,00	673.200.000,00	690.198.687,00	677.680.312,00	12.518.375,00

979

No	Sekolah	SILPA sampai dengan 2021	Penyaluran 2022	Total Anggaran 2022	Realisasi Anggaran 2022	SILPA BOS sd 31 Des 2022
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5-6
8	SD ISLAM EXCELLENT PLUS	243.677,00	432.000.000,00	432.243.677,00	431.360.168,00	883.509,00
9	SDIT AL AZHAR DARUL JANNAH	988.511,00	214.718.489,00	215.707.000,00	214.550.000,00	1.157.000,00
10	SD ISLAM AL FALAH	27.327.171,00	384.300.000,00	411.627.171,00	403.730.622,00	7.896.549,00
11	SDIT SYAHIRAL ILMU	36.995,00	449.100.000,00	449.136.995,00	434.336.200,00	14.800.795,00
12	SDS IT ULUL ALBAB BUKITTINGGI	-	34.080.000,00	34.080.000,00	34.040.000,00	40.000,00
13	SDI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK	57.795,00	146.668.275,00	146.726.070,00	146.572.871,00	153.195,00
14	SD ISLAM AL AZHAR 67 BUKITTINGGI	25.355.633,00	399.404.367,00	424.760.000,00	420.802.106,00	3.957.894,00
15	SD SURYA KIDS	-	110.700.000,00	110.700.000,00	110.700.000,00	-
16	SD ISLAM CENDEKIA	4.882.557,00	89.080.343,00	93.962.900,00	92.590.438,00	1.372.462,00
17	SDIT ADZKIA BUKITTINGGI	90.000,00	85.500.000,00	85.590.000,00	85.500.000,00	90.000,00
18	SD SEKOLAH ALAM BUKITTINGGI	81.104,00	59.379.753,00	59.460.857,00	59.460.857,00	-
19	SD LEBAH PEMBELAJAR	-	81.000.000,00	81.000.000,00	79.365.000,00	1.635.000,00
	<b>Total SD Swasta</b>	<b>135.758.882,00</b>	<b>5.460.153.957,00</b>	<b>5.595.912.839,00</b>	<b>5.519.278.505,00</b>	<b>76.634.334,00</b>
20	SMP PSM BUKITTINGGI	4.594.731,00	60.763.658,00	65.358.389,00	62.700.000,00	2.658.389,00
21	SMP ISLAM AL ISHLAH	132.668.278,00	537.901.449,00	670.569.727,00	638.343.075,00	32.226.652,00
22	SMPS XAVERIUS	25.656.016,00	198.000.000,00	223.656.016,00	209.981.301,00	13.674.715,00
23	SMPIT CAHAYA HATI BUKITTINGGI	-	135.300.000,00	135.300.000,00	134.614.850,00	685.150,00
24	SMP IT SJECH M. DJAMIL DJAMBEK	-	71.500.000,00	71.500.000,00	71.500.000,00	-
25	SMP JAMIYYATUL HUJJAJ	707.584,00	53.285.616,00	53.993.200,00	53.245.450,00	747.750,00
26	SMP ISLAM AL AZHAR 39	12.648.200,00	107.374.000,00	120.022.200,00	101.096.422,00	18.925.778,00
	<b>Total SMP Swasta</b>	<b>176.274.809,00</b>	<b>1.164.124.723,00</b>	<b>1.340.399.532,00</b>	<b>1.271.481.098,00</b>	<b>68.918.434,00</b>
	<b>Total</b>	<b>312.033.691,00</b>	<b>6.624.278.680,00</b>	<b>6.936.312.371,00</b>	<b>6.790.759.603,00</b>	<b>145.552.768,00</b>

**F. Kas BOP**

**Tahun 2022**  
**(Rp)**  
**202,00**

**Tahun 2021**  
**(Rp)**  
**0,00**

Kas BOP Tahun 2021 bersaldo Rp0,00, pada tahun 2022 terdapat kas BOP sebesar Rp202,00 yang merupakan sisa kas pada Bendahara BOP Kesetaraan Negeri yaitu SPNF SKB tahun 2022. Uraian mutasi kas BOP dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. BOP Negeri

Tabel 5.3.1.9 Mutasi Kas pada Bendahara Dana BOP Negeri Tahun 2022

No	Nama Sekolah	Penyaluran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Pengembalian Ke Rkun	Sisa Per 31 Des 2022
1	2	3	4	5	6=3-4-5
1	Tk Negeri Pembina	130.200.000,00	130.200.000,00	-	-

No	Nama Sekolah	Penyaluran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Pengembalian Ke Rkun	Sisa Per 31 Des 2022
1	2	3	4	5	6=3-4-5
2	Tk Negeri 1 Bukittinggi	20.400.000,00	20.400.000,00	-	-
	<b>Total Sekolah Negeri</b>	<b>150.600.000,00</b>	<b>150.600.000,00</b>	-	-
	<b>Total BOP PAUD</b>	<b>2.177.535.000,00</b>	<b>2.167.074.000,00</b>	-	-

## 2. BOP Kesetaraan Negeri

Tabel 5.3.1.10 Mutasi Kas pada Bendahara Dana BOP Kesetaraan Negeri Tahun 2022

No.	Uraian	Per 31 Des 2021	Pendapatan (Rp)	Pengembalian Atas Temuan Inspektorat (Rp)	Belanja (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5-6
1	SPNF SKB	-	250.500.000,00	-	250.499.798,00	202,00
	<b>Total</b>	-	<b>250.500.000,00</b>	-	<b>250.499.798,00</b>	<b>202,00</b>

Selain informasi BOP Negeri dan Kesetaraan Negeri, juga kami informasikan sisa BOP untuk swasta yang dianggarkan pada APBD pada rekening Belanja Hibah, yang sisa kas tidak dihitung menjadi bagian Kas Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai berikut:

## 1. Sisa Dana BOP PAUD Swasta

Tabel 5.3.1.7  
Sisa Kas Dana BOP PAUD Swasta

No	Nama Sekolah	Penyaluran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Pengembalian Ke Rkun	Sisa Per 31 Des 2022
1	2	3	4	5	6=3-4-5
	<b>KB</b>				
1	KB Daarul Uluum	6.000.000,00	6.000.000,00		-
2	KB Ibu Sina	2.535.000,00	-	2.535.000,00	-
3	KB Islam Excellent	4.200.000,00	4.200.000,00		-
4	KB Tunas Bangsa	2.400.000,00	2.400.000,00		-
5	KB Adzka	6.000.000,00	6.000.000,00		-
6	KB Aisyiyah I	15.000.000,00	15.000.000,00		-
7	KB Al-Azhar	7.800.000,00	7.800.000,00		-
8	KB Berbasis Masjid Al Abrar	7.200.000,00	7.200.000,00		-
9	KB Deud Hkbp	1.800.000,00	951.000,00		849.000,00
10	KB Duta Wahana	1.800.000,00	1.800.000,00		-
11	Kb Genius Kids III	10.800.000,00	10.800.000,00		-
12	KB Mutiara	5.400.000,00	5.400.000,00		-

No	Nama Sekolah	Penyaluran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Pengembalian Ke Rkun	Sisa Per 31 Des 2022
1	2	3	4	5	6=3-4-5
13	KB Al Falah	11.400.000,00	11.400.000,00		-
14	KB An Naufa	6.000.000,00	6.000.000,00		-
15	KB Assalaam	7.200.000,00	7.200.000,00		-
16	KB Az Zahrah	13.200.000,00	13.200.000,00		-
17	KB Bougenvill	4.800.000,00	4.800.000,00		-
18	Kb Genius Kids	19.200.000,00	19.200.000,00		-
19	KB Inklusi Inspirasi Semut-Semut	6.600.000,00	6.600.000,00		-
20	KB Kasih Ibu Al Wustha	6.000.000,00	6.000.000,00		-
21	KB Khalifah 35	5.400.000,00	5.400.000,00		-
22	KB Seruni	10.800.000,00	10.800.000,00		-
23	KB Surya Kids	20.400.000,00	20.400.000,00		-
24	KB Tunas Harapan	12.000.000,00	12.000.000,00		-
25	Kelompok Bermala Al Ikhwan	17.400.000,00	17.400.000,00		-
	SPS			-	-
1	SPS Buah Hati	13.800.000,00	13.800.000,00		-
2	SPS Dahlia	7.800.000,00	7.800.000,00		-
3	SPS Flamboyan	4.200.000,00	4.200.000,00		-
4	SPS Nurul Ilmi	15.000.000,00	15.000.000,00		-
5	SPS Palapa Saiyo	11.400.000,00	11.400.000,00		-
6	SPS Lenteng	13.800.000,00	13.800.000,00		-
7	SPS Maisharah	8.400.000,00	8.400.000,00		-
8	SPS Mata Hati	6.600.000,00	6.600.000,00		-
9	SPS Nurul Huda	13.800.000,00	13.800.000,00		-
10	SPS Sbb Batu Hampa	12.000.000,00	12.000.000,00		-
11	SPS Anggur Al-Wustha	7.200.000,00	7.200.000,00		-
12	SPS Ar Rahim	13.200.000,00	13.200.000,00		-
	TK			-	-
1	TK Aisyiyah Iii	7.200.000,00	7.200.000,00		-
2	TK Aisyiyah V	17.400.000,00	17.400.000,00		-
3	TK Cerdas Ceria	9.000.000,00	9.000.000,00		-
4	TK Ibnu Sina	9.600.000,00	9.600.000,00		-
5	TK Islam Al-Wirdah	10.200.000,00	10.200.000,00		-
6	TK Islam Excellent	61.800.000,00	61.800.000,00		-
7	TK Islam Masyithah	55.200.000,00	55.200.000,00		-
8	TK Islam Nurul Hidayah	6.000.000,00	6.000.000,00		-
9	TK Kartika 1 - 57	17.400.000,00	17.400.000,00		-
10	TK Kartika 1-58	18.600.000,00	18.600.000,00		-
11	TK Kemala Bhayangkari 11	19.200.000,00	19.200.000,00		-
12	TK Melur Putih	18.600.000,00	18.600.000,00		-
13	TK Surya Kids Duo Platinum	44.400.000,00	44.400.000,00		-
14	TK Surya Kids Tigo	31.800.000,00	31.800.000,00		-

No	Nama Sekolah	Penyaluran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Pengembalian Ke Rkua	Sisa Per 31 Des 2022
1	2	3	4	5	6=3-4-5
15	TK Tunas Bangsa	16.200.000,00	16.200.000,00		-
16	TK Aisyiyah I	103.800.000,00	103.800.000,00		-
17	TK Aisyiyah II	25.800.000,00	25.800.000,00		-
18	TK Aisyiyah IV	13.800.000,00	13.800.000,00		-
19	TK Flores Pertanian	34.200.000,00	34.200.000,00		-
20	TK Gajah Tongga	10.200.000,00	10.200.000,00		-
21	TK Islam Adzka	73.200.000,00	73.200.000,00		-
22	TK Islam Al Mubarak	6.000.000,00	6.000.000,00		-
23	TK Islam Al-Azhar	73.800.000,00	73.800.000,00		-
24	TK Islam Jamiyatul Hujjah	76.200.000,00	76.200.000,00		-
25	TK Islam Riyadul Ilmi	12.000.000,00	12.000.000,00		-
26	TK Mutiara	18.600.000,00	18.600.000,00		-
27	TK Paud Berbasis Masjid Al Abrar	16.800.000,00	16.800.000,00		-
28	TK S Harapan Mama	10.200.000,00	10.200.000,00		-
29	TK S Kuntum Mekar	28.800.000,00	28.800.000,00		-
30	TK S Trisula Perwari	8.400.000,00	8.400.000,00		-
31	TK Teladan Pertiwi Tunas Harapan	90.000.000,00	90.000.000,00		-
32	Taman Karak-Karak Asas	10.800.000,00	10.800.000,00		-
33	TK Assalaam	30.600.000,00	30.600.000,00		-
34	TK Genius Kids II	24.000.000,00	24.000.000,00		-
35	TK Inklusi Inspirasi Semut-Semut	61.800.000,00	61.800.000,00		-
36	Tk Irsyaddunnaas	15.600.000,00	15.600.000,00		-
37	TK Islam Al Azhar 48	54.600.000,00	54.600.000,00		-
38	TK Islam Al-Falah	55.800.000,00	55.800.000,00		-
39	TK Islam Al-Furqan	17.400.000,00	17.400.000,00		-
40	Tk Islam Al-Ishlah	63.600.000,00	63.600.000,00		-
41	TK Islam Semai Benih Bangsa Al Akshah	31.200.000,00	31.200.000,00		-
42	TK Kenari	9.000.000,00	9.000.000,00		-
43	TK Khalifah 35	8.400.000,00	8.400.000,00		-
44	Tk Mutiara Insani	8.400.000,00	4.437.000,00	3.963.000,00	-
45	TK Pertiwi Al-Wustha	18.000.000,00	18.000.000,00		-
46	TK Qurratu Aini	25.800.000,00	25.800.000,00		-
47	TK Surya Kids	103.800.000,00	103.800.000,00		-
48	TK Tali Kasih Bunda	13.200.000,00	13.200.000,00		-
	TPA				-
1	TPA Cerdas Ceria	11.400.000,00	11.400.000,00		-
2	TPA Ibu Sina Yarsi	19.800.000,00	19.800.000,00		-
3	TPA Bunda	12.600.000,00	12.600.000,00		-
4	TPA Islam Excellent	6.600.000,00	6.600.000,00		-
5	TPA Mitra Bunda	13.800.000,00	13.800.000,00		-



No	Nama Sekolah	Penyaluran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Pengembalian Ke Rkun	Sisa Per 31 Des 2022
1	2	3	4	5	6=3-4-5
6	TPA Tunas Bangsa	8.400.000,00	8.400.000,00		-
7	TPA Aisyiyah I	13.800.000,00	13.800.000,00		-
8	TPA Mardi Widaynt	5.400.000,00	5.400.000,00		-
9	TPA Mutiara	6.600.000,00	6.600.000,00		-
10	TPA Mutiara Bunda	6.000.000,00	6.000.000,00		-
11	TPA Nafha	8.400.000,00	8.400.000,00		-
12	TPA Prima Asuh	9.000.000,00	9.000.000,00		-
13	TPA Al Misbah	7.800.000,00	7.800.000,00		-
14	TPA Amanah	12.000.000,00	12.000.000,00		-
15	TPA Avicena Bukittinggi	6.600.000,00	3.486.000,00		3.114.000,00
16	TPA Cemara	12.000.000,00	12.000.000,00		-
17	TPA Qurata Aini	10.800.000,00	10.800.000,00		-
18	TPA Surya Kids	21.000.000,00	21.000.000,00		-
	<b>Total Sekolah Swasta</b>	<b>2.026.935.000,00</b>	<b>2.016.474.000,00</b>	<b>6.498.000,00</b>	<b>3.963.000,00</b>

Beberapa catatan pelaksanaan BOP PAUD tahun 2022 pada BOP PAUD swasta di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kas pada Yayasan KB DAUD HKBP senilai Rp849.000,00 merupakan dana BOP PAUD yang telah masuk ke rekening yayasan KB PAUD HKBP pada tahun 2022, namun karna lembaga telah tutup pada tahap II Tahun 2022, maka dana hibah tersebut hanya dipegang oleh pengurus dan telah dikembalikan ke Kas Daerah tanggal 6 Maret 2023 dan saat ini tanggal 16 Mei 2023 masih berada di RKUD menunggu proses dikembalikan ke RKUN.
- Kas sebesar Rp3.114.000,00 merupakan dana BOP PAUD Tahap II pada TPA Avicena Bukittinggi, dana BOP PAUD Tahap I senilai Rp3.486.000,00 telah masuk ke Rekening TPA Avicena Bukittinggi dan telah dibelanjakan serta SPJ nya telah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi. namun untuk dana BOP PAUD Tahap II senilai Rp3.114.000,00 tidak masuk ke rekening TPA Avicena Bukittinggi, dikarenakan ada permasalahan internal, sehingga yayasan mengganti Rekening tanpa ada pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dan Kemendikbudristek RI, sehingga dana tahap II yang telah ditransfer pemerintah pusat melalui KPPN Bukittinggi tertahan pada Kas Penampung Bank Nagari/ BPD Sumatera Barat. Penyaluran dana tersebut melalui SP2D Nomor 220111304005700000096 tanggal 06 September 2022, selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2023 KPPN mengembalikan dana BOP tersebut ke Kas BUN melalui SP2D-R nomor 23011140700000100001.

## 2. Sisa Dana BOP Kesetaraan Swasta

Sisa Dana BOP Kesetaraan Swasta Tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 5.3.1.8**  
**Sisa Kas Dana BOP Kesetaraan**

NO	Nama Sekolah	Penyaluran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Silpa per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5=3-4
	<b>PKBM</b>			
1	PKBM SERBA GUNA	58.800.000	58.800.000	-
2	PKBM AI MA'ARIF	89.700.000	89.700.000	-
3	PKBM KASIH BUNDO	320.000.000	320.000.000	-
	<b>Total</b>	<b>468.500.000</b>	<b>468.500.000</b>	<b>-</b>

**1. Piutang**

Tahun 2022

Rp

43.377.889.031,00

Tahun 2021

Rp

47.377.310.959,00

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/ bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Sedangkan Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang.

Total Piutang Pemerintah Kota Bukittinggi secara bruto sebagaimana yang tertera pada Neraca tahun 2022 adalah Rp43.377.889.031,00 Penyajian piutang pada Neraca tahun 2022 adalah berdasarkan IPSAP 04 PP. 71 tahun 2010, piutang secara golongan beserta nilai netto nya adalah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.3.4 Penyajian Piutang pada Neraca Tahun 2022 dan 2021**

URAIAN	2022	2021
1	2	3
Piutang Pajak	14.306.957.898,00	13.321.325.831,00
Penyisihan Piutang Pajak	9.088.313.560,00	7.864.584.149,00
<b>Piutang Pajak Netto</b>	<b>5.218.644.338,00</b>	<b>5.456.741.682,00</b>
Piutang Retribusi	12.046.237.364,00	14.565.925.783,00
Penyisihan Piutang Retribusi	10.151.975.230,00	8.593.829.761,00
<b>Piutang Retribusi Netto</b>	<b>1.894.262.134,00</b>	<b>5.972.096.022,00</b>
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.363.843.874,00	6.641.291.925,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	33.765.979,10
<b>Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan netto</b>	<b>8.363.843.874,00</b>	<b>6.607.525.945,90</b>
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	4.632.545.459,00	8.361.251.441,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg sah	1.844.230.624,00	2.711.651.262,00
<b>Piutang lain-lain PAD yg sah netto</b>	<b>2.958.338.601,00</b>	<b>5.649.600.179,00</b>
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	3.849.825,00
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	962.456,25
<b>Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto</b>	<b>-</b>	<b>2.887.368,75</b>
Piutang Transfer Antar Daerah	3.781.987.835,00	4.209.749.129,00
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	1.052.437.282,25
<b>Piutang Transfer Antar Daerah netto</b>	<b>3.781.987.835,00</b>	<b>3.157.311.846,75</b>
Piutang Lainnya	246.316.601,00	273.917.045,00

819

URAIAN	2022	2021
1	2	3
Penyisihan Piutang Lainnya	246.316.601,00	246.316.601,00
<b>Piutang Lainnya Netto</b>	-	<b>27.600.444,00</b>
Beban Dibayar Dimuka		
<b>Total Piutang Bruto</b>	<b>43.377.889.031,00</b>	<b>47.377.310.959,00</b>
<b>Total Penyisihan Piutang</b>	<b>21.330.836.015,00</b>	<b>20.303.567.490,60</b>
<b>Total Piutang Netto</b>	<b>22.047.053.016,00</b>	<b>27.073.743.468,40</b>

## A. Piutang Pajak Daerah

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp	Rp
<b>14.306.957.898,00</b>	<b>13.321.325.831,00</b>

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi dikelola oleh Badan Keuangan.

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 yang lalu sebesar Rp13.321.325.831,00. Selama Tahun 2022 terdapat mutasi bersih sebesar Rp985.632.067,00, sehingga saldo Tahun 2022 menjadi sebesar Rp14.306.957.898,00. Rincian Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.5 Mutasi Piutang Pajak Tahun 2022

Nama Akun	Saldo Akhir 2021 (Rp) (Audited)	Koreksi (Rp)	Saldo Awal 2022 (Rp) Setelah Koreksi	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
				Bertambah	Berkurang	
Piutang Pajak Daerah	13.321.325.831,00		13.321.325.831,00	6.275.479.333,00	5.289.847.266,00	14.306.957.898,00
Piutang Pajak Hotel	690.926.705,00		690.926.705,00	30.874.500,00	77.119.138,00	644.682.067,00
Piutang Pajak Hotel	690.986.705,00		690.986.705,00	30.874.500,00	77.119.138,00	643.742.067,00
Piutang Pajak Rumah Penghapan dan Sejenismya	-		-	-	-	-
Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	940.000,00		940.000,00	-	-	940.000,00
Piutang Pajak Restoran	349.055.200,00		349.055.200,00	134.306.340,00	129.913.386,00	353.448.154,00
Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	329.994.800,00		329.994.800,00	106.613.175,00	86.472.221,00	349.135.554,00
Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenismya	15.565.500,00		15.565.500,00	15.422.700,00	30.170.700,00	817.500,00
Piutang Pajak Jasa Boga / Katering dan sejenisnya	3.495.100,00		3.495.100,00	13.270.465,00	13.270.465,00	3.495.100,00
Piutang Pajak Hiburan	11.248.704,00		11.248.704,00	3.000.000,00	4.188.750,00	10.059.954,00
Piutang Pajak Tontonan Film	4.188.750,00		4.188.750,00	-	4.188.750,00	-
Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan bermotor dan Permalinan ketangkasan	7.059.954,00		7.059.954,00	3.000.000,00	-	10.059.954,00

Nama Akun	Saldo Akhir 2021 (Rp) (Audited)	Koreksi (Rp)	Saldo Awal 2022 (Rp) Setelah Koreksi	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
				Bertambah	Berkurang	
Piutang Pajak Reklame	883.683.614,00		883.683.614,00	998.201.437,00	954.982.188,00	926.902.863,00
Piutang Pajak Reklame/Papan, Billboard/Videotron/Megatron	854.133.114,00		854.133.114,00	889.705.937,00	842.561.688,00	911.277.383,00
Piutang Pajak Reklame Kain	19.550.500,00		19.550.500,00	108.495.500,00	112.420.500,00	15.825.500,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	400.000,00		400.000,00	-	-	400.000,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	400.000,00		400.000,00	-	-	400.000,00
Piutang Pajak Parkir	1.096.520,00		1.096.520,00	-	-	1.096.520,00
Piutang Pajak Parkir	1.096.520,00		1.096.520,00	-	-	1.096.520,00
Piutang Pajak Air Tanah	13.678.103,00		13.678.103,00	77.239.048,00	78.075.811,00	14.839.340,00
Piutang Pajak Air Tanah	13.678.103,00		13.678.103,00	77.239.048,00	78.075.811,00	14.839.340,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.315.583.714,00		11.315.583.714,00	4.853.142.158,00	3.925.523.043,00	12.243.202.829,00
Piutang PBBP2	11.315.583.714,00		11.315.583.714,00	4.853.142.158,00	3.925.523.043,00	12.243.202.829,00
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	55.655.271,00	-	55.655.271,00	178.715.850,00	122.044.950,00	112.326.171,00
Piutang BPHTB Pemindahan Hak	17.370.471,00		17.370.471,00	78.715.850,00	13.044.950,00	83.041.371,00
Piutang BPHTB Pemindahan Hak Baru	38.284.800,00		38.284.800,00	100.000.000,00	109.000.000,00	29.284.800,00

**B. Penyisihan Piutang Pajak Daerah**

**Tahun 2022**  
**Rp**  
**(9.088.313.560,00)**

**Tahun 2021**  
**Rp**  
**(7.664.584.149,00)**

Saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2021 yang lalu sebesar (Rp7.664.584.149,00). Untuk nilai penyisihan piutang pajak tahun 2022 adalah sebesar (9.088.313.560,00). Rincian perhitungan penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel : 5.3.6 Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2022**

Nama Piutang	Nilai	Kurang 1 Tahun (0,5%)	1-3 Tahun (25%)	3-5 Tahun (50%)	Lebih 5 Tahun (100%)	Jumlah Penyisihan
Pajak Hotel	644.882.067,00	10.045,00	26.612.650,00	106.528.210,00	323.185.937,00	466.316.851,00
Pajak Restoran	353.448.154,00	115.472,00	16.439.929,00	45.099.680,00	174.304.773,00	236.049.854,00
Pajak Hiburan	10.059.054,00	15.000,00	-	-	7.059.954,00	7.074.954,00
Pajak Reklame	926.902.863,00	478.759,00	57.285.375,00	81.856.000,00	478.297.614,00	997.917.748,00
Pajak Penerangan Jalan	400.000,00	-	-	-	400.000,00	400.000,00

879

Nama Piutang	Nilai	Kurang 1 Tahun (0,5%)	1-3 Tahun (25%)	3-5 Tahun (50%)	Lebih 5 Tahun (100%)	Jumlah Penyisihan
Pajak Parkir	1.096.520,00	-	59.930,00	-	856.800,00	916.730,00
Pajak Air tanah	14.839.340,00	7.995,00	1.249.720,00	550.990,00	7.139.462,00	8.948.167,00
PBB-P2	12.243.202.829,00	4.638.095,00	805.637.222,00	1.134.613.062,00	5.823.806.703,00	7.766.897.083,00
BPHTB	112.326.171,00	328.355,00	11.563.818,00	-	-	11.992.173,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.306.957.898,00</b>	<b>5.893.722,00</b>	<b>918.948.644,00</b>	<b>1.348.647.951,00</b>	<b>6.815.125.243,00</b>	<b>9.088.313.560,00</b>

**C. Piutang Retribusi Daerah**

**Tahun 2022**                      **Tahun 2021**  
**Rp**    **Rp**  
**12.046.237.364,00**                      **14.565.925.763,00**

Piutang Retribusi Daerah timbul apabila sampai akhir periode laporan terdapat tagihan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi oleh Wajib Retribusi.

Saldo piutang Retribusi Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2021 yang lalu adalah Rp14.565.925.763,00. Selama tahun 2022 terdapat mutasi bersih dengan pengurangan sebesar Rp2.519.688.399,00, sehingga saldo tahun 2022 menjadi sebesar Rp12.046.237.364,00. Rincian Piutang Retribusi Daerah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel : 5.3.7 Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2021**

No	Nama Akun	SALDO AWAL	KOREKSI	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI		SALDO AKHIR
					BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Piutang Retribusi Daerah	14.565.925.763,00	-	14.565.925.763,00	9.278.609.645,00	11.796.298.044,00	12.046.237.364,00
A	Piutang Retribusi Jasa Umum	2.877.761.477,00	-	2.877.761.477,00	1.914.055.077,00	1.926.117.790,00	2.865.698.744,00
1	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	849.193.030,00	-	849.193.030,00	808.809.000,00	743.647.890,00	913.745.340,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						-
B	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	38.560.000,00	-	38.560.000,00	382.582.500,00	382.582.500,00	38.560.000,00
	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN						-
b	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	810.833.030,00	-	810.833.030,00	425.917.600,00	381.365.190,00	875.185.340,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir	60.393.850,00	-	60.393.850,00	-	-	60.393.850,00

No	Nama Akun	SALDO AWAL	KOREKSI	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI		SALDO AKHIR
					BERTAMBAH	BERKURANG	
	di Tepi Jalan Umum						
	DINAS PERHUBUNGAN						-
a	Putang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	60.393.850,00		60.393.850,00	-	-	60.393.850,00
3	Putang Retribusi Pelayanan Pasar	1.763.244.597,00		1.763.244.597,00	835.155.077,00	713.600.100,00	1.884.799.574,00
	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN						-
a	Putang Retribusi Los	1.609.216.802,00		1.609.216.802,00	34.290.281,00	569.185.762	1.074.321.121,00
b	Putang Retribusi Kios	154.027.995,00		154.027.995,00	800.964.795,00	144.414.338	810.478.453,00
4	Putang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.890.000,00		8.890.000,00	-	8.890.000,00	-
	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA						-
a	Putang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.890.000,00		8.890.000,00		8.890.000,00	-
5	Putang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	196.040.000,00		196.040.000,00	270.400.000,00	459.680.000,00	6.760.000,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						-
a	Putang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	196.040.000,00		196.040.000,00	270.400.000,00	459.680.000,00	6.760.000,00
B	Putang Retribusi Jasa Usaha	11.203.083.686,00	-	11.203.083.686,00	7.364.554.568,00	9.872.180.254,00	8.695.458.000,00
1	Putang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	907.806.732,00		907.806.732,00	89.882.200,00	750.206.900,00	247.262.032,00
	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA						-
a	Putang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	694.280.000,00		694.280.000,00		694.280.000,00	-
	BADAN KEUANGAN						-
b	Putang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	213.526.732,00		213.526.732,00	89.882.200,00	55.926.900,00	247.262.032,00
c	Putang Retribusi Pemakaian aset						-

No	Nama Akun	SALDO AWAL	KOREKSI	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI		SALDO AKHIR
					BERTAMBAH	BERKURANG	
2	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan	10.091.613.524,00	-	10.091.613.524,00	7.274.872.368,00	8.941.974.094,00	8.424.511.798,00
	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN						-
a	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakan	7.467.974.730,00		10.091.613.524,00	7.274.872.368,00	8.941.974.094,00	5.600.673.004,00
b	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Pertokoan Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakan	2.623.638.794,00		-			2.623.638.794,00
3	Piutang Retribusi Terminal	23.364.170,00	-	23.364.170,00	-	-	23.364.170,00
	DINAS PERHUBUNGAN						-
a	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas lainnya ditingkungan Terminal	23.364.170,00		23.364.170,00			23.364.170,00
4	Piutang Retribusi Tempat Olahraga	180.299.260,00	-	180.299.260,00	-	179.999.260,00	300.000,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						-
a	Piutang Retribusi Tempat Olah Raga	180.299.260,00		180.299.260,00	-	179.999.260,00	300.000,00
C	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	485.080.600,00	-	485.080.600,00	-	-	485.080.600,00
1	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	485.080.600,00	-	485.080.600,00	-	-	485.080.600,00
	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA						
a	Piutang Retribusi Izin Bangunan	485.080.600,00		485.080.600,00	-	-	485.080.600,00

## D. Penyisihan Piutang Retribusi

Tahun 2022

Tahun 2021





	SALDO AWAL (Rp)	KOREKSI (Rp)	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI (Rp)	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR (Rp)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.641.291.925,00	-	6.641.291.925,00	7.771.262.394,00	6.252.795.492,00	8.636.436.414,00
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Bank Nagari	6.641.291.925,00	-	6.641.291.925,00	7.771.262.394,00	6.252.795.492,00	8.150.778.827,00
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) PT.BPR Jam Gadang	272.592.540,00		272.592.540,00	592.561.480,00	388.496.433,00	476.357.587,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022 digunakan untuk mencatat Piutang Deviden/Piutang Bagi Hasil atas kegiatan Penyertaan Modal terhadap Pemerintah Kota Bukittinggi pada Bank Nagari, BPRS Jam Gadang Perseroda serta Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang.

Sesuai dengan aturan baru yakni Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Intervarisasi Pemutakhiran Kalasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka pencatatan piutang dividen dimapping ke akun Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Selain mapping akun, sama halnya dengan Piutang Dana Transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, piutang dividen tidak dilakukan penyisihan karena potensi penerimaan yang sangat besar di tahun berikutnya.

Pencatatan piutang dividen dari Bank Nagari dan BPRS tersebut di atas berdasarkan surat sebagai berikut :

1. Dikarenakan belum adanya RUPS, maka Badan Keuangan menyurati Bank Nagari dengan surat nomor 900.1.15.1/4/BK-05/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Kebutuhan Data dan Informasi untuk penyusunan LKPD Tahun 2022 dan dibalas dengan Surat dari Pimpinan PT Bank Nagari Cabang Bukittinggi Nomor SR/027/BT/UM/01-2023 tanggal 6 Januari 2023 perihal kebutuhan data dan Informasi terkait Penyusunan LKPD Tahun 2022.

2. Surat dari Direktur Utama PT. BPRS Jam Gadang Perseroda Nomor 08/BPRS.JG/UM/0123 tanggal 10 Januari 2023 perihal Data dan Informasi Keuangan dan didukung dengan Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang Perseroda Nomor 02 tanggal 06 Januari 2023, sebagai balasan surat Kepala Badan Keuangan Nomor 900.1.15.1/3/BK-05/2023 tanggal 04 Januari 2023 perihal Kebutuhan Data dan Informasi untuk Penyusunan LKPD 2022.

F. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
	4.632.545.459,00	8.361.251.441,00

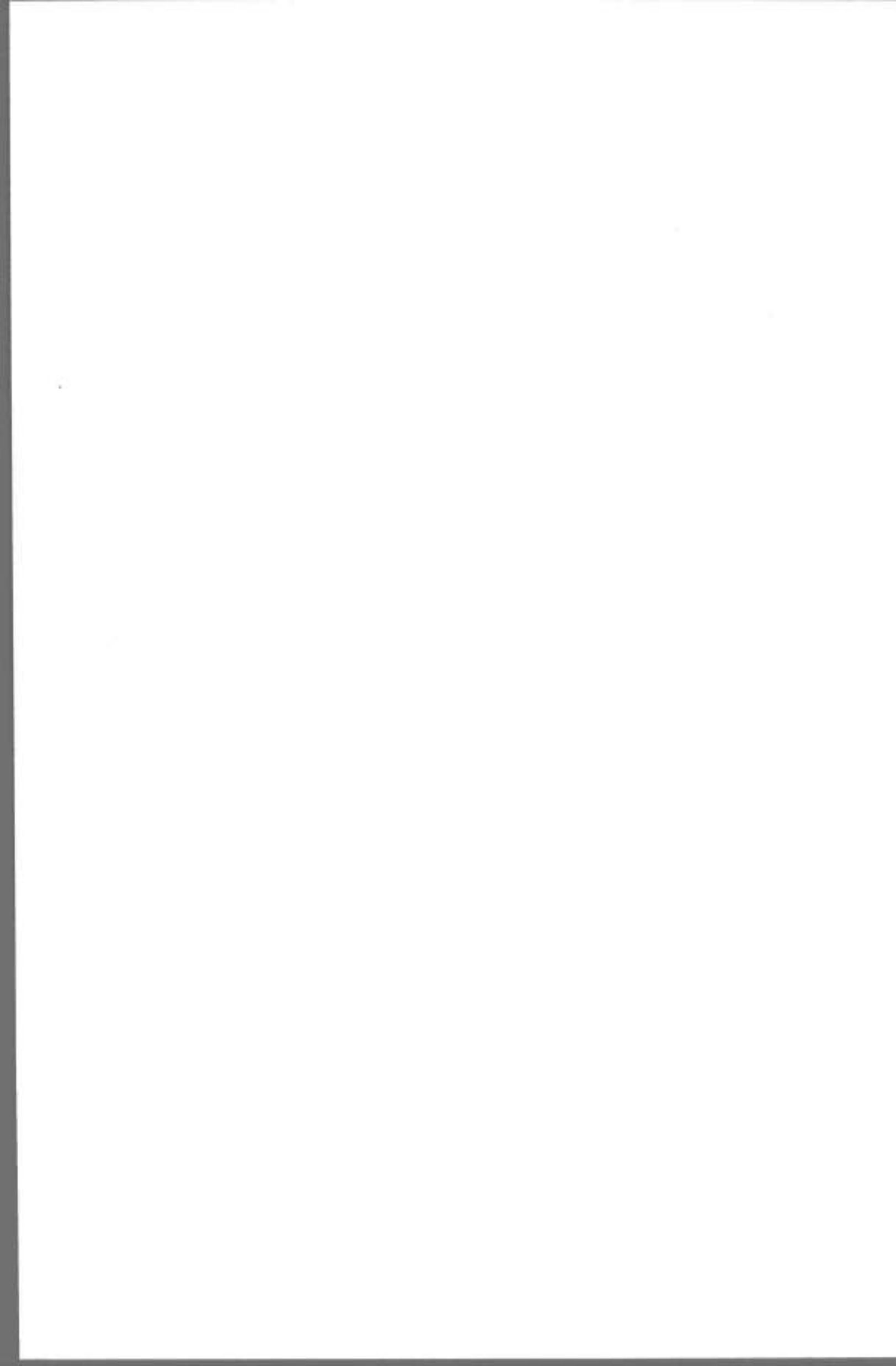
Piutang Lain-lain PAD yang sah mencatat antara lain adalah Denda Piutang Pajak, Piutang Retribusi, beban dibayar dimuka dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Saldo Piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.361.251.441,00 terdapat mutasi bersih dengan berkurang sebesar Rp3.728.705.982,00. Sehingga saldo piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.632.545.459,00. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Pemerintah Kota Bukittinggi seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel : 5.3.11 Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022

No	Nama Akun	SALDO AKHIR 2021 (Audited)	KOREKSI	SALDO AWAL 2022 SETELAH KOREKSI	MUTASI		SALDO AKHIR
					BERTAMBAH	BERKURANG	
I	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.361.251.441,00	-	8.361.251.441,00	4.083.402.369,00	7.811.818.706,00	4.632.545.459,00
A	Piutang Hasil Sewa BMD	-	-	-	1.194.719.751,00	371.493.200,00	823.226.551,00
	DINAS PARIWISATA, PENUDA DAN OLAH RAGA						
	Piutang Hasil Sewa BMD	-	-	-	1.194.719.751,00	371.493.200,00	823.226.551,00
B	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.947.616.982,00	-	1.947.616.982,00	-	90.562.849,00	1.857.054.133,00
	Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah	1.947.616.982,00	-	1.947.616.982,00	-	90.562.849,00	1.857.054.133,00
	BADAN KEUANGAN						
	Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah	1.947.616.982,00	-	1.947.616.982,00	-	90.562.849,00	1.857.054.133,00
C	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	31.443.130,00	-	31.443.130,00	23.565.302,00	23.734.581,00	31.273.851,00
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	31.443.130,00	-	31.443.130,00	23.565.302,00	23.734.581,00	31.273.851,00
	BADAN KEUANGAN						
	Piutang Pendapatan	31.320.930,00	-	31.320.930,00	23.565.302,00	23.734.581,00	31.151.651,00

No	Nama Akun	SALDO AKHIR 2021 (Audited)	KOREKSI	SALDO AWAL 2022 SETELAH KOREKSI	MUTASI		SALDO AKHIR
					BERTAMBAH	BERKURANG	
	Denda Pajak Hotel						
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	122.200,00		122.200,00	-	-	122.200,00
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	10.843.034,00	-	10.843.034,00	14.287.636,00	11.849.168,00	13.281.505,00
	<b>BADAN KEUANGAN</b>						
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.373.076,00		10.373.078,00	11.384.478,00	8.651.047,00	13.106.507,00
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Mekan dan Sejenisnya	18.844,00		18.844,00	1.769.087,00	1.752.737,00	35.184,00
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	311.310,00		311.310,00	-	311.310,00	-
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	139.804,00		139.804,00	458.250,00	458.250,00	139.804,00
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan	637.500,00	-	637.500,00	663.700,00	1.021.950,00	179.250,00
	<b>BADAN KEUANGAN</b>						
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Kelangkaan	637.500,00		637.500,00	663.700,00	1.021.950,00	179.250,00
D	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.782.328,00	-	5.782.328,00	1.382.400,00	1.382.400,00	5.782.328,00
	<b>BADAN KEUANGAN</b>						
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	5.782.328,00		5.782.328,00	1.382.400,00	1.382.400,00	5.782.328,00
E	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	78.633,00	-	78.633,00	29.096,00	29.096,00	78.633,00
	<b>BADAN KEUANGAN</b>						
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	78.633,00		78.633,00	29.096,00	29.096,00	78.633,00
F	Piutang Pendapatan	46.542,00	-	46.542,00	5.981,00	5.981,00	46.542,00

No	Nama Akun	SALDO AKHIR 2021 (Audited)	KOREKSI	SALDO AWAL 2022 SETELAH KOREKSI	MUTASI		SALDO AKHIR
					BERTAMBAH	BERKURANG	
	Denda Pajak Air Tanah						
	<b>BADAN KEUANGAN</b>						
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	46.542,00		46.542,00	5.981,00	5.981,00	46.542,00
	<b>BADAN KEUANGAN</b>						
	Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)- Pajak Bumi dan Bangunan, Pe- nasaan dan Perkotaan	-		-	296.779.281,00	296.779.281,00	-
G	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	232.988.344,00	-	232.988.344,00	-	-	232.988.699,00
	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	232.988.344,00	-	232.988.344,00	-	-	232.988.699,00
	<b>PMPTSP</b>						
	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	226.177.248,00	-	226.177.248,00	-	-	226.177.248,00
	<b>DINAS, KOPERASI, UKM DAN PERDAGANG AN</b>						
	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.811.096,00		6.811.096,00	17.777.627,00	18.067.272,00	6.521.451,00
H	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	3.030.998,00	-	3.030.998,00	158.560.453,00	158.724.973,00	2.866.478,00
	<b>BADAN KEUANGAN</b>						
	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.101.243,00		1.101.243,00	-	-	1.101.243,00
	<b>DINAS, KOPERASI, UKM DAN PERDAGANG AN</b>						
	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Perlokooan	1.929.755,00		1.929.755,00	158.560.453,00	158.724.973,00	1.765.235,00
I	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	816.613.850,00	-	816.613.850,00	-	-	816.613.850,00



No	Nama Akun	SALDO AKHIR 2021 (Audited)	KOREKSI	SALDO AWAL 2022 SETELAH KOREKSI	MUTASI		SALDO AKHIR
					BERTAMBAH	BERKURANG	
	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	816.613.850,00	-	816.613.850,00	-	-	816.613.850,00
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG</b>						
	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	782.629.500,00		782.629.500,00	-	-	782.629.500,00
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>						
	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	33.984.350,00		33.984.350,00	-	-	33.984.350,00
J	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	20.346.188,00	-	20.346.188,00
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>						
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan				1.846.188,00	-	1.846.188,00
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>						
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	-	-	18.500.000,00	-	18.500.000,00
K	Piutang Pendapatan BLUD	5.311.170.100,00	-	5.311.170.100,00	2.869.493.308,00	7.152.014.508,00	828.648.900,00
	Piutang Pendapatan BLUD	5.311.170.100,00	-	5.311.170.100,00	2.869.493.308,00	7.152.014.508,00	828.648.900,00
	<b>DINAS KESEHATAN</b>						
	Piutang Pendapatan BLUD	5.311.170.100,00	-	5.311.170.100,00	2.869.493.308,00	7.152.014.508,00	828.648.900,00
L	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	1.000.000,00	-	1.000.000,00	448.551,00	1.000.000,00	448.551,00
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>						
	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	1.000.000,00		1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
	<b>BADAN KEUANGAN</b>						
	Piutang Lain-lain	-	-	-	448.551,00	-	448.551,00

R 19

No	Nama Akun	SALDO AKHIR 2021 (Audited)	KOREKSI	SALDO AWAL 2022 SETELAH KOREKSI	MUTASI		SALDO AKHIR
					BERTAMBAH	BERKURANG	
	lain PAD Yang Sah Lainnya						

Beberapa hal penting dari daftar di atas dapat dijelaskan terkait Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp816.613.850,00 terdiri dari :

1. Piutang Jaminan dari Dinas PUPR sebesar Rp782.629.500,00 yang terdiri dari dari :
  - Jaminan pekerjaan PT. ARSHALIA sebesar Rp22.455.000,00 atas pembangunan Mushala Sekretariat Daerah pada Tahun 2010;
  - Jaminan kepada PT. Adhiwira ikaputra sebesar Rp760.174.500,00 atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Parkir Representatif Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013;

Pemerintah Kota Bukittinggi mengakui Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut berdasarkan hasil audit yang disepakati bahwa hasil pekerjaan hanya mencapai 93,82% sehingga rekanan tersebut wanprestasi dan Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan klaim terhadap jaminan pelaksanaan pekerjaan rekanan tersebut. Atas kekurangan prestasi rekanan, Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah menyurati Kepala LKPP-RI dengan Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600.484/DPU-BKT/VI-2014 tanggal 5 juni 2014 perihal usulan Masuk Daftar Hitam Penyedia Jasa Konstruksi a.n. PT.ADHIWIRA IKAPUTRA. Pengakuan piutang juga berdasarkan Pasal 5 Akta Perdamaian antara Pemerintah Kota Bukittinggi yang diwakili Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Parkir Representatif Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 dengan Ir. H. Soetrisno Direktur PT. Adhiwira Ikaputra yang menyatakan bahwa kedua pihak menyepakati akan merealisasikan klaim Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp5% dari nilai addendum kontrak. Akta perdamaian tersebut adalah dalam rangka menindaklanjuti Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 9/Pdt.G/ /2014/PN BT tanggal 20 November 2014. Pada tahun 2015 juga terdapat jaminan yang belum dieksekusi oleh Pemko Bukittinggi akibat terdapat perselisihan atas final quantity pekerjaan. Pekerjaan tersebut adalah Rehabilitasi Taman DPRD. Selain adanya jaminan yang belum dieksekusi, pekerjaan tersebut juga menimbulkan hutang kekurangan pembayaran pekerjaan dan piutang denda keterlambatan pekerjaan yang telah dicatat pada pos masing-masing.
2. Piutang Jaminan dari Dinas Perhubungan sebesar Rp33.984.350,00.  
Piutang Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Terminal Aur Kuning tahun 2007 oleh CV.Khandra Utama.
3. Piutang Pendapatan BLUD sebesar R828.648.900,00 yang terdiri dari :
  - Klaim BPJS bulan Juli s.d Desember 2022 sebesar Rp785.029.900,00.
  - Klaim Covid-19 tahun 2022 sebesar Rp43.619.000,00.

4. Piutang Pendapatan dari Pengembalian kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp20.346.188,00 yang terdiri dari :
- Dinas Lingkungan Hidup merupakan kelebihan pembayaran tunjangan dari gaji an Suryadi pada tahun 2021 sebesar Rp1.045.744,00.
  - Dinas Lingkungan Hidup merupakan kelebihan pembayaran tunjangan dari gaji an. Erwin St Bagindo berjumlah Rp800.444,00 sejak tahun 2009 tidak bisa ditagih karen yang bersangkutan sudah meninggal dunia
  - Dinas Perhubungan sebesar Rp18.500.000,00 yang merupakan keterlambatan pembayaran tunjangan istri an.Neli Efendi sejak tahun 2017 yang dicicil melalui Taspen.

<b>G. Penyisihan Piutang Lain-Lain</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>PAD yang Sah</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>(4.632.545.459,00)</b>	<b>(2.711.651.262,00)</b>

Saldo Penyisihan Piutang PAD yang Sah per 31 Desember 2021 yang lalu sebesar (Rp2.711.651.262,00). Untuk nilai Penyisihan Piutang Penyisihan Lain-lain PAD yang sah tahun 2022 adalah sebesar (Rp4.632.545.459,00), terdapat kenaikan sebesar Rp1.920.894.197,00 Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel : 5.3.12 Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022**

Uraian	Nilai	Kurang 1 Bulan	1-3 Bulan	3-12 Bulan	Lebih 12 Bulan	Jumlah
		(0,5%)	(25%)	(50%)	(100%)	Penyisihan
1	2	3	4	5	6	7
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	4.632.545.459,00	817.068.015,00	-	-	3.815.477.444,00	4.632.545.459,00
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.680.280.684,00	-	-	-	2.680.280.684,00	2.680.280.684,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	823.226.551,00	-	-	-	823.226.551,00	823.226.551,00
Badan Keuangan	1.857.054.133,00	-	-	-	1.857.054.133,00	1.857.054.133,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	50.642.109,00	-	-	-	50.642.109,00	50.642.109,00
Badan Keuangan	50.642.109,00	-	-	-	50.642.109,00	50.642.109,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	235.565.177,00	454.165,00	-	-	235.111.012,00	235.565.177,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah & perdagangan	8.286.686,00	454.165,00	-	-	7.832.521,00	8.286.686,00
PMPTSP	226.177.248,00	-	-	-	226.177.248,00	226.177.248,00
Badan Keuangan	1.101.243,00	-	-	-	1.101.243,00	1.101.243,00



Uraian	Nilai	Kurang 1 Bulan	1-3 Bulan	3-12 Bulan	Lebih 12 Bulan	Jumlah
		(0,5%)	(25%)	(50%)	(100%)	Penyisihan
1	2	3	4	5	6	7
Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	816.613.850,00	816.613.850,00	-	-	-	816.613.850,00
Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang	782.629.500,00	782.629.500,00				782.629.500,00
Dinas Perhubungan	33.984.350,00	33.984.350,00				33.984.350,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	20.346.188,00	-	-	-	20.346.188,00	20.346.188,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.846.188,00				1.846.188,00	1.846.188,00
Dinas Perhubungan	18.500.000,00				18.500.000,00	18.500.000,00
Piutang Pendapatan BLUD	828.648.900,00	-	-	-	828.648.900,00	828.648.900,00
Dinas Kesehatan	828.648.900,00	-	-	-	828.648.900,00	828.648.900,00
Piutang Lain-lain PAD Yang Bah Lainnya	448.551,00	-	-	-	448.551,00	448.551,00
Dinas Kesehatan	448.551,00				448.551,00	448.551,00

**H. Piutang Transfer Pemerintah Pusat****Tahun 2022****Tahun 2021****Rp  
0,00****Rp  
3.849.825,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 yang lalu adalah sebesar Rp3.849.825,00, tahun 2022 terdapat koreksi saldo awal senilai Rp3.046.191.842,00 sehingga saldo awal tahun 2022 menjadi Rp3.050.041.667,00. Koreksi saldo awal dikarenakan terbitnya PMK Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022 Tanggal 25 Agustus 2022. Dan pada tahun 2022 jumlah piutang tersebut telah direalisasikan oleh Pemerintah Pusat ke Kas Umum Daerah.

Piutang Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi pada Pemerintah Pusat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

8/19

Tabel : 5.3.13 Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022

No.	Rincian	Saldo Awal (Rp) 31 Des 2021	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo awal setelah koreksi (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo akhir Piutang (Rp) 31 Desember 2022	Keterangan
					Tambah	Kurang		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=5+6-7	11
	Pajak							
	PPH							
	PPH Pasal 21	-	1.191.416.764,00	1.191.416.764,00		1.191.416.764,00	-	
	PPH Pasal 25/29	-	466.533.566,00	466.533.566,00		466.533.566,00	-	
	PBB		-					
	Beig rata	-	803.667.166,00	803.667.166,00		803.667.166,00	-	
	Bagian Daerah Sektor Perkebunan	-	-					
	Bagian Daerah Sektor Perhutanan	-	-					
	Bagian Daerah Sektor Pertambangan Migas	-	-					
	Bagian Daerah Sektor Pertambangan Mineral Non Migas	-	-					
	Bagian Daerah Sektor Pertambangan Panas Bumi	-	-					
	Bagian Daerah Sektor lainnya	-	60.807.157,00	60.807.157,00		60.807.157,00	-	
	Biaya Pemungutan Sektor Perhutanan	-	-					
	Biaya Pemungutan Sektor Perkebunan	-	-					
	Biaya Pemungutan Sektor Pertambangan Migas	-	-					
	Biaya Pemungutan sektor Pertambangan Non Migas	-	-					
	Biaya Pemungutan sektor pertambangan Panas Bumi	-	-					
	Biaya Pemungutan Sektor lainnya	-	1.688.560,00	1.688.560,00		1.688.560,00	-	
	CHT	3.849.825,00	1.031.518,00	4.881.343,00		4.881.343,00	-	

Dasar Hukum : PMK No. 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022 Tanggal 25 Agustus 2022, KMK No.29/KM.7/2022 tg Penyelaran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian DBH Periode pertama, KMK No.37/KM.7/2022 tg Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian DBH Periode Kedua dan KMK No.46/KM.7/2022 tg Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian DBH Periode ketiga.

No.	Rincian	Saldo Awal (Rp) 31 Des 2021	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo awal setelah koreksi (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo akhir Putang (Rp) 31 Desember 2022	Keterangan
					Tambah	Kurang		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=5+6-7	11
	SOA							
	Migas							
	Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-	-	-
	Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-	-	-
	Minyak Bumi dalam rangka Otsus	-	-	-	-	-	-	-
	Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-	-	-
	Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-	-	-
	Gas Bumi dalam rangka Otsus	-	-	-	-	-	-	-
	Minerba							
	Landrent	-	-	-	-	-	-	-
	Royalti	-	295.785.359,00	295.785.359,00		295.785.359,00	-	-
	Panas Bumi							
	Iran Produkasi	-	202.739.192,00	202.739.192,00		202.739.192,00	-	-
	Iran Tetap	-	22.522.660,00	22.522.660,00		22.522.660,00	-	-
	Sektoran Bagian Pemertintah	-	-	-		-	-	-
	Kebudayaan	-	-	-		-	-	-
	DK	-	-	-		-	-	-
	ILUPH	-	-	-		-	-	-
	PSDM	-	-	-		-	-	-
	Perikanan	-	-	-		-	-	-
	Jumlah	3.849.825,00	3.046.191.842,00	3.056.041.667,00	1.849.462.625,00	3.056.041.667,00	-	-

8 1A

<b>I. Piutang Transfer Antar Daerah</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>3.781.987.835,00</b>	<b>4.209.749.129,00</b>

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2021 yang lalu adalah sebesar 4.209.749.129,00. Pada tahun 2022 dengan terbitnya Keputusan Kepala Bapenda Propinsi Sumbar No. 971.1/023/Pjk-Bapenda/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Periode Desember 2021, maka terdapat koreksi tambah nilai piutang transfer antar daerah senilai Rp1.350.036.655,00 sehingga saldo awal Piutang Transfer antar Daerah menjadi Rp5.559.785.784,00. Selama Tahun 2022 terdapat mutasi kurang sebesar 5.559.785.784,00 dan mutasi tambah sebesar Rp3.781.987.835,00 Penambahan Piutang tahun 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/06/Pjk-Bapenda/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Alokasi Defenitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun Anggaran 2022, sehingga saldo piutang per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp3.781.987.835,00 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel : 5.3.15 Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2021

No.	Jenis Piutang	Saldo Awal (Rp) 31 Des 2021	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo awal setelah koreksi (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir Piutang (Rp) 31 Desember 2022	Keterangan
					Tambah	Kurang		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	PKB	1.601.953.553,00	-	1.601.953.553,00	1.625.842.061,00	1.601.953.553,00	1.625.842.061,00	Dasar Hukum Keputusan Kepala Bapenda Prov Sumbar No
2	SDNH	1.100.439.756,00	-	1.100.439.756,00	890.493.394,00	1.100.439.756,00	890.493.394,00	1.No.971.1/007/Pjk-Bapenda/2022
3	PBBRB	1.499.741.317,00	-	1.499.741.317,00	1.456.399.220,00	1.499.741.317,00	1.456.399.220,00	2. No 971.1/023/Pjk-Bapenda/2022
4	PAP	7.614.501,00	-	7.614.501,00	9.298.180,00	7.614.501,00	9.298.180,00	3. No 971.1/06/Pjk-Bapenda/2023
5	PAJAK ROKOK	-	1.350.036.655,00	1.350.036.655,00	-	1.350.036.655,00	-	
	Jumlah	4.209.749.129,00	1.350.036.655,00	5.559.785.784,00	3.781.987.835,00	5.559.785.784,00	3.781.987.835,00	

**J. Piutang Lainnya**

**Tahun 2022**  
**Rp**  
**246.316.601,00**

**Tahun 2021**  
**Rp**  
**273.917.045,00**

Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp273.917.045,00 terdapat mutasi berkurang sebesar Rp27.300.441. Sehingga saldo piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp246.017.045,00. Rincian data Piutang Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebagaimana daftar di bawah ini :

Tabel : 5.3.17 Piutang Lainnya Tahun 2022

Nama Akun	BALDO AWAL	KOREKSI	BALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI		BALDO AKHIR
				BERTAMBAH	BERKURANG	
Piutang Lainnya	246.316.601,00	-	246.316.601,00	7.747.867.761,25	7.747.867.761,25	246.316.601,00
Uang Muka	246.316.601,00	-	246.316.601,00	7.747.867.761,25	7.747.867.761,25	246.316.601,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	246.316.601,00	-	246.316.601,00	7.747.867.761,25	7.747.867.761,25	246.316.601,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	113.622.000,00		113.622.000,00	1.699.172.423,78	1.699.172.423,78	113.622.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG						
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	132.694.601,00	-	132.694.601,00	5.858.695.337,47	5.858.695.337,47	132.694.601,00

Untuk Piutang Lainnya pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp246.316.601,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa yang terdapat pada :

a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Jumlah Piutang uang Muka yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp113.622.000,00 yang terdiri dari :

- Uang Muka Pengadaan Komputer pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2007 sebesar Rp93.060.000,00 merupakan Uang Muka yang belum dikembalikan oleh rekanan.
- Sisa Uang Muka CV.Billi Sarius oleh PT.Asuransi Paralamas atas pekerjaan pengadaan meja kursi siswa SMP tahun 2012 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp20.562.000,00. Piutang ini adalah pajak yang dipungut oleh BUD, sehingga rekanan berpendapat bukan merupakan kewajiban rekanan untuk mengembalikan.

## b) Dinas Pekerjaan Umum

Jumlah Piutang Uang Muka yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan umum sampai dengan posisi 31 Desember 2022 sebesar Rp132.694.601,00 yang terdiri dari :

- Sisa Piutang Uang Muka kepada PT.Arhalia atas pembangunan Mushala Sekretariat Daerah pada tahun 2010 sebesar Rp10.158.539,00.
- Piutang dari pembayaran uang Muka pada Kegiatan Leger Jalan (Sistem Informasi Jaringan Jalan) tahun 2015 yang belum dikembalikan oleh rekanan oleh PT. MATURO NUANSATAMA sesuai dengan temuan pemeriksaan sebesar Rp122.536.062,00.

**K. Penyisihan Piutang Lainnya**

**Tahun 2022**  
**Rp**  
**246.316.601,00**

**Tahun 2021**  
**Rp**  
**246.316.601,00**

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp246.316.601,00 tidak terdapat mutasi sehingga saldo piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp246.316.601,00. Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi seperti terlihat pada table berikut:

Tabel : 5.3.18 Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2022

Nama Piutang	Nilai	Kurang 1 Tahun (0,5%)	1-3 Tahun (25%)	3-5 Tahun (50%)	Lebih 5 Tahun (100%)	Jumlah Penyisihan
Piutang Lainnya	246.316.601,00	-	-	-	246.316.601,00	246.316.601,00
Uang Muka	246.316.601,00	-	-	-	246.316.601,00	246.316.601,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		-	-	-	-	-
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	113.622.000,00	-	-	-	113.622.000,00	113.622.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG		-	-	-	-	-
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	132.694.601,00				132.694.601,00	132.694.601,00

**2. PERSEDIAAN**

**Tahun 2022**  
**(Rp)**  
**7.525.720.925,49**

**Tahun 2021**  
**(Rp)**  
**9.133.430.432,16**

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam pencatatan Persediaan adalah periodik, metode periodik dilaksanakan dengan menggunakan

*stock opname*. Berdasarkan *stock opname* posisi tanggal 31 Desember 2022 terdapat nilai Persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp7.525.720.925,49.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, *stock opname* Tahun 2022 telah dilakukan sendiri oleh SKPD pada akhir Tahun 2022. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian entitas, namun Bidang Pengelolaan BMD tetap melakukan asistensi dan pengawasan. Persediaan diatas dirinci berdasarkan SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.19 Persediaan Per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	SKPD	2021	2022
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	972.421.067,00	740.120.131,00
2	Dinas Kesehatan	5.243.111.115,16	4.325.777.665,49
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	489.543.440,00	243.810.707,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	48.113.631,00	44.924.591,00
5	Dinas Kebakaran	88.685.740,00	48.289.830,00
6	Setuan Polisi Pamong Praja	5.349.000,00	2.390.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	62.040.000,00
8	Dinas Sosial	7.725.450,00	1.200.985,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	220.185.616,00	148.373.207,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	207.589.895,00	235.709.001,00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	723.128.017,00	485.805.095,00
12	Dinas Perhubungan	2.872.500,00	8.108.000,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	43.219.785,00	12.683.115,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	7.700.000,00	-
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Tenaga Kerja	50.447.330,00	31.631.280,00
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	40.334.445,00	30.013.416,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	23.041.500,00	112.520.000,00
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	56.518.900,00	111.458.288,00
19	Sekretariat Daerah	156.247.946,00	201.198.515,00
20	Sekretariat DPRD	51.979.930,00	36.809.578,00
21	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	63.065.601,00	66.274.390,00
22	Badan Keuangan	540.552.594,00	487.083.831,00
23	Badan Kepegawalan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.586.500,00	3.824.600,00
24	Inspektorat	41.054.800,00	45.915.500,00
25	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	9.703.060,00	24.310.200,00
26	Kecamatan Guguk Panjang	1.331.200,00	12.090.600,00
27	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	39.334.450,00	14.521.400,00
28	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.187.020,00	837.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.133.430.432,16</b>	<b>7.525.720.925,49</b>

875

Persediaan per Jenis Barang Tahun 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi adalah seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.20 Persediaan Per Jenis Barang Tahun 2022

No	SKPD	BAHAN/MATERIAL	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	OBAT-OBATAN	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	NATURA DAN PAKAN	TOTAL
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.248.400,00	727.450.841,00	10.821.090,00	800.000,00	-	740.120.131,00
2	Dinas Kesehatan	233.601.045,00	411.965.638,00	3.680.265.982,49		45.000,00	4.325.777.665,49
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		4.552.000,00		239.258.707,00		243.810.707,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman		6.785.500,00		38.159.091,00		44.924.591,00
5	Dinas Kebakaran		46.289.830,00	<			46.289.830,00
6	Setuan Polisi Pamong Praja	-	2.390.000,00	-	-	-	2.390.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		82.040.000,00				82.040.000,00
8	Dinas Sosial		1.200.985,00				1.200.985,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		8.014.300,00	146.358.907,00			148.373.207,00
10	Dinas Lingkungan Hidup		185.934.001,00		49.805.000,00		235.709.001,00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		485.805.095,00				485.805.095,00
12	Dinas Perhubungan		8.108.000,00				8.108.000,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	12.683.118,00	-	-	-	12.683.118,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Tenaga Kerja		31.631.280,00				31.631.280,00
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	30.013.416,00	-	-	-	30.013.416,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga		28.520.000,00		84.000.000,00		112.520.000,00
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	36.857.030,00	11.195.158,00	48.731.100,00		14.875.000,00	111.458.288,00
19	Sekretariat Daerah		201.198.515,00				201.198.515,00
20	Sekretariat DPRD		36.809.578,00				36.809.578,00
21	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan		56.274.380,00				56.274.380,00
22	Badan Keuangan	-	487.083.831,00	-	-	-	487.083.831,00
23	Badan Kepegawalan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	3.824.800,00	-	-	-	3.824.800,00
24	Inspektorat		45.915.500,00				45.915.500,00



No	SKPD	BAHAN/ MATERIAL	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	OBAT-OBATAN	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/ DISERAHKAN	NATUPA DAN PAKAN	TOTAL
25	Kecamatan Mandiangan Koto Selayan	-	24.310.200,00	-	-	-	24.310.200,00
26	Kecamatan Guguk Panjang	-	12.090.800,00	-	-	-	12.090.800,00
27	Kecamatan Aur Birugo Tiga Belah	-	14.521.400,00	-	-	-	14.521.400,00
28	Kantor Keastuan Bangsa Dan Politik	-	837.000,00	-	-	-	837.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>271.606.475,00</b>	<b>2.947.394.573,00</b>	<b>3.880.177.079,49</b>	<b>411.832.798,60</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>7.126.720.926,49</b>

**5.3.1.2 INVESTASI****Tahun 2022****(Rp)****62.195.784.727,47****Tahun 2021****(Rp)****51.833.451.094,17**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, secara pengelompokan akun, Investasi pemerintah daerah terdiri dari dua yaitu:

1. **Investasi Jangka Pendek**

Sampai saat ini Pemko Bukittinggi tidak mempunyai investasi jangka pendek. Adapun deposito yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022 hanya berumur kurang dari 3 (tiga) bulan yang tidak dapat dikategorikan investasi jangka pendek dan hanya bertujuan untuk manajemen kas dengan sistem *on call* yang sewaktu-waktu dapat dicairkan.

2. **Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang Kota Bukittinggi terdiri dari Investasi Jangka Panjang Permanen dan Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

**A. Investasi Jangka Panjang Non  
Permanen****Tahun 2022  
(Rp)****635.298.884,95****Tahun 2021  
(Rp)****661.844.211,48**

Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk digulirkan secara berkelanjutan oleh kelompok usaha ekonomi masyarakat di Kota Bukittinggi. Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Neraca menggambarkan nilai Investasi sampai dengan 31 Desember 2022 serta penyisihannya. Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp635.298.884,95.

Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2021 yang lalu sebesar Rp661.844.211,48 selama tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp26.545.326,53 sehingga Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2022 bersaldo sebesar Rp635.298.884,95

Dana Bergulir diberikan kepada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang penyalurannya direalisasikan dari pos Belanja Bantuan Sosial Kota Bukittinggi pada tahun 2001 s.d. 2005. Penyaluran dana ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang dilanjutkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri c.q. Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa Nomor 412/2440/SJ tanggal 26 Oktober 1998 tentang Pedoman Pembentukan dan Pematapan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), yang kemudian berubah nama menjadi UEM-SP. Dalam suratnya, pada poin 12 Mendagri menyatakan bahwa: *"Modal kerja UED-SP adalah modal usaha untuk kegiatan bagi anggota dalam rangka menumbuh kembangkan usaha-usaha ekonomi produktif di pedesaan yang dananya bersumber dari bantuan pemerintah (APBN, APBD I, APBD II), masyarakat, lembaga perbankan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat"*.

Pada tingkat Provinsi pun telah beberapa kali mengeluarkan pedoman pengelolaan, terakhir adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 412.25/283/2002 tanggal 25 Oktober 2002 perihal Pedoman Administrasi dan Keuangan UEM-SP di Sumatera Barat, yang sampai saat ini diacu oleh pengelola di tingkat Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Dana Bergulir tersebut disajikan sebagai Investasi Non Permanen dalam Neraca Pemko Bukittinggi adalah berpedoman kepada Buletin Teknis 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir sebagai petunjuk teknis lebih lanjut PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tabel-tabel berikut adalah gugusan data Dana Bergulir yang merupakan hasil inventarisasi tim monitoring dan evaluasi UEM-SP per 31 Desember 2022 yakni sebagai berikut

:

Tabel 5.3.4.15

## Daftar Posisi Pinjaman Dana Bergulir per Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	No	Kelurahan	Kelompok	Pinjaman (Rp)
1	2	3	4	5
A  Mandiangan Koto Selayan	1	Koto Selayan	Maju Jaya	67.715.000,00
	2	Campago Ipoh	Campago Sepakat	17.440.000,00
	3	Kubu Gulai Buncah	Sepakat Jaya	82.226.388,00
	4	Puhun Pintu kabun	Mekar	36.565.000,00
	5	Manggis Ganting	Amanah	46.607.000,00
	6	Campago Guguk Bulek	Campago Saiyo	53.895.000,00
	7	Garegeh	Tunas Harapan	64.267.000,00
	8	Pulai Anak Aia	Anggrek	52.705.000,00

Kecamatan	No	Kelurahan	Kelompok	Pinjaman (Rp)
1	2	3	4	5
	9	Puhun Tembok	Puhun Tembok	57.040.000,00
	Sub Total			<b>478.460.388,00</b>
B  Guguk Panjang	1	Tarok Dipo	Mekar jaya	59.170.000,00
	2	Benteng Pasar Atas	Benteng Indah	123.400.000,00
	3	Pakan Kurai	Pakan Kurai	58.300.000,00
	4	Kayu Kubu	Mayang Sari	75.650.000,00
	5	Aur Tajung Kang Tengah Sawah	Mutiara Indah	84.965.000,00
	6	Bukit Apit Puhun	Randang Kopi	43.597.000,00
	7	Bukit Cangang Kayu Ramang	Bunga Karang	-
Sub Total			<b>445.082.000,00</b>	
C  Aur Binago Tigo Baleh	1	Ladang Cakiah	Lensura	57.224.000,00
	2	Aur Kuning	Flamboyan	117.750.000,00
	3	Belakang balok	Dian	69.617.500,00
	4	Birugo	Biru Indah	46.559.000,00
	5	Parit Antang	Serba Usaha	142.420.000,00
	6	Sapiran	Kelapa Gading	49.757.000,00
	7	Pakan Labuah	Palapa	34.450.000,00
	8	Kubu Tanjung	Bunga Tanjung	23.925.000,00
Sub Total			<b>541.702.500,00</b>	
<b>Total</b>			<b>1.465.244.888,00</b>	

Nilai dari posisi pinjaman yang dilaporkan oleh pengelola dana bergulir kemudian dikelompokkan berdasarkan umur piutang. Daftar umur piutang terhadap data pinjaman dana bergulir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3.4.16  
Pinjaman Berdasarkan Umur Pinjaman Tahun 2022

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo Pinjaman (Rp)	Kelompok			
			0-1 Tahun (Rp)	2-3 Tahun (Rp)	4-5 Tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
1	2	3	4	5	6	8
<b>A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>						
1	Koto Selayan	67.715.000,00	-	2.900.000,00	18.200.000,00	46.615.000,00
2	Campago Ipuh	17.440.000,00	5.000.000,00	-	-	12.440.000,00
3	Kubu Gulai Baneh	82.226.388,00	38.500.000,00	-	-	43.726.388,00
4	Puhun Pintu kabun	36.565.000,00	-	-	-	36.565.000,00
5	Manggis Ganting	46.607.000,00	-	-	-	46.607.000,00

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo Pinjaman (Rp)	Kelompok			
			0-1 Tahun (Rp)	2-3 Tahun (Rp)	4-5 Tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
1	2	3	4	5	6	8
6	Campago Guguk Bulek	53.895.000,00				53.895.000,00
7	Garegeh	64.267.000,00	-	-	-	64.267.000,00
8	Pulai Anak Ais	52.705.000,00	-	-	-	52.705.000,00
9	Puhun Tembok	57.040.000,00				57.040.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>478.460.388,00</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>413.860.388,00</b>
<b>B. GUGUK PANJANG</b>						
1	Tarok Dipo	59.170.000,00	59.170.000,00	-	-	-
2	Benteng Pasar Atas	123.400.000,00	58.100.000,00	65.300.000,00	-	-
3	Pakan Kurni	58.300.000,00	-	9.500.000,00	21.700.000,00	27.100.000,00
4	Kayu Kubu	75.650.000,00	-	-	-	75.650.000,00
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	84.965.000,00	18.300.000,00	5.150.000,00	17.510.000,00	44.005.000,00
6	Bukit Apit Puhun	43.597.000,00				43.597.000,00
7	Bukit Cengang Kayu Ramang	-	-	-	-	-
	<b>Sub Total</b>	<b>445.082.000,00</b>	<b>135.570.000,00</b>	<b>79.950.000,00</b>	<b>39.210.000,00</b>	<b>190.352.000,00</b>
<b>C. AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>						
1	Ladang Cakiah	57.224.000,00	-	-	-	57.224.000,00
2	Aur Kuning	117.750.000,00	117.750.000,00	-	-	-
3	Belakang balok	69.617.500,00	-	-	1.400.000,00	68.217.500,00
4	Birugo	46.559.000,00	4.500.000,00	-	-	42.059.000,00
5	Parit Antang	142.420.000,00	59.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	78.620.000,00
6	Sapiran	49.757.000,00	-	-	-	49.757.000,00
7	Pakan Labuah	34.450.000,00	-	-	-	34.450.000,00
8	Kubu Tanjung	23.925.000,00	-	-	-	23.925.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>541.702.500,00</b>	<b>182.050.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>354.252.500,00</b>
	<b>Total</b>	<b>1.465.244.888,00</b>	<b>361.120.000,00</b>	<b>84.850.000,00</b>	<b>60.810.000,00</b>	<b>958.464.888,00</b>

Terhadap penyisihan nilai tak tertagih dari piutang kelompok UEM-SP, diberlakukan aging schedule sebagai berikut:

1. Pinjaman dengan umur 0 s/d 1 tahun disisihkan sebesar 0,50%
2. Pinjaman dengan umur 2 s/d 3 tahun disisihkan sebesar 10%
3. Pinjaman dengan umur 4 s/d 5 tahun disisihkan sebesar 50%
4. Pinjaman dengan umur >5 tahun sebesar 100%

Setelah mendapatkan saldo berdasarkan umur pinjaman, untuk menyajikan Nilai Investasi Non Permanen di dalam Neraca, dilakukan Penyisihan Piutang untuk mendapatkan perhitungan NRV (*Net Realizable Value*) per kelompok sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut:

8/9

Tabel 5.3.4.17  
Penyisihan Pinjaman Tahun 2022

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo Pinjaman (Rp)	Penyisihan Pinjaman (Rp)					Jumlah Penyisihan	NRV
			0-1 Tahun 0-50%	2-3 Tahun 10%	4-5 Tahun 50%	> 5 Tahun 100%	8= (4+5+6+7+8)		
<b>A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>									
1	Koto Selayan	67.715.000,00	-	290.000,00	9.100.000,00	46.615.000,00	56.005.000,00	11.710.000,00	
2	Campago Ipuh	17.440.000,00	25.000,00	-	-	12.440.000,00	12.465.000,00	4.975.000,00	
3	Kubu Galai Baruah	82.226.388,00	192.500,00	-	-	43.726.388,00	43.918.888,00	38.307.500,00	
4	Puhun Pinta kabau	36.565.000,00	-	-	-	36.565.000,00	36.565.000,00	-	
5	Manggis Gamping	46.607.000,00	-	-	-	46.607.000,00	46.607.000,00	-	
6	Campago Guguk Bulek	53.895.000,00	-	-	-	53.895.000,00	53.895.000,00	-	
7	Garegeh	64.267.000,00	-	-	-	64.267.000,00	64.267.000,00	-	
8	Pulai Asak Ain	52.705.000,00	-	-	-	52.705.000,00	52.705.000,00	-	
9	Puhun Tembok	57.040.000,00	-	-	-	57.040.000,00	57.040.000,00	-	
	<b>Sub Total</b>	<b>478.460.388,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>413.860.388,00</b>	<b>423.467.888,00</b>	<b>54.992.500,00</b>	
<b>B. GUGUK PANJANG</b>									
1	Tarak Dipo	59.170.000,00	295.850,00	-	-	-	295.850,00	58.874.150,00	
2	Benteng Pasar Atas	123.400.000,00	290.500,00	6.530.000,00	-	-	6.820.500,00	116.579.500,00	
3	Pakan Kurai	58.300.000,00	-	950.000,00	10.850.000,00	27.100.000,00	38.900.000,00	19.400.000,00	
4	Kayu Kabu	75.650.000,00	-	-	-	75.650.000,00	75.650.000,00	-	
5	Aur Tajangkang Tangah Sawah	84.965.000,00	91.500,00	515.000,00	8.755.000,00	44.905.000,00	53.366.500,00	31.598.500,00	
6	Bukit Apit Puhun	43.597.000,00	-	-	-	43.597.000,00	43.597.000,00	-	
7	Bukit Cancang Kayu Ransang	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Sub Total</b>	<b>445.082.000,00</b>	<b>677.850,00</b>	<b>7.995.000,00</b>	<b>19.605.000,00</b>	<b>190.352.000,00</b>	<b>218.629.850,00</b>	<b>226.452.150,00</b>	
<b>C. AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>									
1	Ladang Cakiah	57.224.000,00	-	-	-	57.224.000,00	57.224.000,00	-	

R 19

Catatan atas Laporan Keuangan (LKPD 2022)

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo Plutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)					Jumlah Penyisihan	NRV
			0-1 Tahun 0,50%	2-3 Tahun 10%	4-5 Tahun 50%	> 5 Tahun 100%	8 = (4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Aur Kuning	117.750.000,00	588.750,00	-	-	-	588.750,00	117.161.250,00	
3	Belakang bakok	69.617.500,00	-	-	700.000,00	-	68.917.500,00	700.000,00	
4	Birugo	46.559.000,00	22.500,00	-	-	-	42.059.000,00	4.477.500,00	
5	Parit Antang	142.420.000,00	299.000,00	200.000,00	1.000.000,00	-	80.119.000,00	62.301.000,00	
6	Sapiran	49.757.000,00	-	-	-	-	49.757.000,00	-	
7	Pakan Labuah	34.450.000,00	-	-	-	-	34.450.000,00	-	
8	Kubu Tanjung	23.925.000,00	-	-	-	-	23.925.000,00	-	
	Sub Total	541.782.500,00	910.250,00	200.000,00	1.700.000,00	354.252.500,00	357.062.750,00	184.639.750,00	
	TOTAL	1.465.244.888,00	1.885.690,00	8.485.000,00	30.405.000,00	958.464.888,00	999.160.488,00	466.084.400,00	

8/15

Selanjutnya, nilai NRV yang didapat dari penghitungan *aging schedule* didapat total nilai NRV dari seluruh kelompok sebesar Rp466.084.400,00 Nilai tersebut masih belum menggambarkan nilai total Investasi yang akan disajikan dalam Neraca, karena masih terdapat saldo kas di tangan pengelola, saldo kas yang terdapat pada bank serta simpanan anggota kelompok Dana Bergulir. Rincian kas dan simpanan yang ada pada pengelola Dana Bergulir tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.3.4.18  
Kas Bendahara dan Bank Tahun 2022

No	Kecamatan/ Kelurahan	Kas (Rp)	Bank (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = (3+4)
<b>A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>				
1	Koto Selayan	42.000.000,00	-	42.000.000,00
2	Campago Ipuh	6.700.000,00	26.174.209,00	32.874.209,00
3	Kubu Gulai Bascah	1.024.499,00	25.162.634,00	26.187.133,00
4	Puhun Pintu kabun	-	22.820.251,00	22.820.251,00
5	Manggis Ganting	500.000,00	10.930.566,00	11.430.566,00
6	Campago Guguk Bulek	-	-	-
7	Garegeh	1.827.000,00	-	1.827.000,00
8	Pulai Anak sia	6.570.500,00	-	6.570.500,00
9	Puhun Tembok	2.320.000,00	-	2.320.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>60.941.999,00</b>	<b>85.087.660,00</b>	<b>146.029.659,00</b>
<b>B. GUGUK PANJANG</b>				
1	Tarok Dipo	48.121.500,00	-	48.121.500,00
2	Benteng Pasar Atas	1.306.300,00	-	1.306.300,00
3	Pakan Kural	-	-	-
4	Kayu Kubu	6.197.000,00	-	6.197.000,00
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	27.852.000,00	-	27.852.000,00
6	Bukit Apit Puhun	-	-	-
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	45.082.584,95	45.082.584,95
<b>Sub Total</b>		<b>83.476.800,00</b>	<b>45.082.584,95</b>	<b>128.559.384,95</b>
<b>C. AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>				
1	Ladang Cakiah	-	10.187.000,00	10.187.000,00
2	Aur Kuning	56.700.400,00	108.512,00	56.808.912,00
3	Belakang Balok	-	9.579.534,00	9.579.534,00
4	Birugo	23.169.957,00	6.250.043,00	29.420.000,00
5	Parit Antang	352.500,00	487.500,00	840.000,00
6	Sapiman	-	17.421.321,00	17.421.321,00
7	Pakan Labuah	9.912.000,00	-	9.912.000,00



No	Kecamatan/ Kelurahan	Kas (Rp)	Bank (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = (3+4)
8	Kubu Tanjung	-	25.324.560,00	25.324.560,00
<b>Sub Total</b>		<b>90.134.857,00</b>	<b>69.358.470,00</b>	<b>159.493.327,00</b>
<b>Total</b>		<b>234.553.656,00</b>	<b>199.528.714,95</b>	<b>434.082.370,95</b>

Besaran nilai Investasi sebesar Rp1.465.244.888,00 ditambahkan dengan jumlah kas yang ada pada pengurus dan kas yang ada pada bank sebesar Rp434.082.370,95 sehingga nilai Investasi menjadi sebesar Rp1.899.327.258,95 Pada angka tersebut masih terdapat simpanan dari anggota yang bukan merupakan pendapatan dari Dana Bergulir sebesar Rp264.867.886,00 yang rinciannya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.3.4.19  
Simpanan Anggota Kelompok Dana Bergulir Tahun 2022

No	Kecamatan/ Kelurahan	Simpanan			Jumlah (Rp)
		Pokok (Rp)	Wajib (Rp)	Sukarela (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)
<b>A.MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>					
1	Koto Selayan	225.000,00	680.000,00	75.000,00	980.000,00
2	Campago Ipuh	290.000,00	1.799.500,00	-	2.089.500,00
3	Kubu Gulai Baneah	430.000,00	10.952.837,00	281.200,00	11.664.037,00
4	Puhun Pintu kabun	285.000,00	6.225.000,00	-	6.510.000,00
5	Manggih Ganting	1.575.000,00	1.420.000,00	-	2.995.000,00
6	Campago Guguk Bulek	265.000,00	2.384.000,00	-	2.649.000,00
7	Garegeh	505.000,00	4.045.000,00	542.500,00	5.092.500,00
8	Pulai Anak aia	860.000,00	6.477.500,00	10.000,00	7.347.500,00
9	Puhun Tembok	290.000,00	8.745.000,00	-	9.035.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>4.725.000,00</b>	<b>42.728.837,00</b>	<b>908.700,00</b>	<b>48.362.537,00</b>
<b>B.GUGUK PANJANG</b>					
1	Tarok Dipo	-	-	-	-
2	Benteng Pasar Atas	585.000,00	42.740.000,00	-	43.325.000,00
3	Pakan Kurai	-	-	-	-
4	Kayu Kubu	380.000,00	13.327.000,00	1.840.000,00	15.547.000,00
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	2.634.000,00	9.223.000,00	15.789.569,00	27.646.569,00
6	Bukit Apit Puhun	-	-	-	-
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>		<b>3.599.000,00</b>	<b>65.290.000,00</b>	<b>17.629.569,00</b>	<b>86.518.569,00</b>
<b>C.AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>					
1	Ledang Cakiah	175.000,00	9.046.000,00	669.000,00	9.890.000,00
2	Aur Kuning	285.000,00	10.797.500,00	552.000,00	11.634.500,00

No	Kecamatan/ Kelurahan	Simpanan			Jumlah (Rp)
		Pokok (Rp)	Wajib (Rp)	Sukarela (Rp)	
3	Belakang Balok	102.000,00	14.295.000,00	-	14.397.000,00
4	Birugo	180.000,00	7.092.250,00	1.310.750,00	8.583.000,00
5	Parit Antang	310.000,00	54.469.700,00	3.024.080,00	57.803.780,00
6	Sapin	1.806.000,00	9.610.500,00	75.000,00	11.491.500,00
7	Pakan Labuah	575.000,00	982.000,00	-	1.557.000,00
8	Kubu Tanjung	425.000,00	14.005.000,00	200.000,00	14.630.000,00
Sub Total		3.858.000,00	120.297.950,00	5.830.830,00	129.986.780,00
Total		12.182.000,00	228.316.787,00	24.369.099,00	264.867.886,00

Untuk mendapatkan nilai Investasi Non Permanen (dana bergulir UEM-SP) yang akan disajikan dalam Neraca, maka nilai sebesar Rp1.899.327.258,95 dikurangi dengan jumlah simpanan anggota kelompok masyarakat yang ada pada pengelola sebesar 264.867.886,00 sehingga dana Investasi Non Permanen Pemerintah Kota Bukittinggi yang disajikan sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp1.634.459.372,95.

Dari data yang telah tersusun tersebut didapatkan nilai bruto Dana Bergulir yang ada di tangan pengurus/ kelurahan maupun yang masih beredar di masyarakat sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.634.459.372,95. Dari data tersebut juga didapatkan nilai Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp999.160.488,00 Sehingga diperoleh netto dana bergulir sebesar Rp635.298.884,95

Hingga tahun 2022 masih banyak ditemui kendala dalam tertib administratif Dana Bergulir, antara lain kepengurusan yang ada di beberapa kelurahan tidak lagi aktif (*vakum*) maupun telah meninggal, sehingga pengelola dana tidak ada lagi. Dari 24 kelompok, terdapat 18 (Delapan belas) unit UEM-SP yang tidak lagi beroperasi, yaitu seperti tabel berikut:

Tabel 5.3.4.20  
Kondisi Kelompok UEM-SP Di Bukittinggi 2022

KECAMATAN	NO	KELURAHAN	KELOMPOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A Mandiangan Koto Selayan	1	Koto Selayan	Maju Jaya	Tidak Aktif
	2	Campago Ipah	Campago Sepakat	Tidak Aktif
	3	Kubu Gulai Baneah	Sepakat Jaya	Tidak Aktif
	4	Puhun Pintu kabun	Mekar	Tidak Aktif
	5	Manggis Ganting	Amanah	Tidak Aktif
	6	Campago Guguk Bulek	Campago Saiyo	Tidak Aktif
	7	Garegeh	Tunas Harapan	Tidak Aktif
	8	Pulai Anak sia	Anggrek	Tidak Aktif
	9	Puhun Tembok	Puhun Tembok	Tidak Aktif
	1	Tarok Dipo	Mekar jaya	Aktif
	2	Benteng Pasar Atas	Benteng Indah	Aktif

KECAMATAN	NO	KELURAHAN	KELOMPOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
B Guguk Panjang	3	Pakan Kurai	Pakan Kurni	Tidak Aktif
	4	Kayu Kubu	Mayang Sari	Tidak Aktif
	5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	Mutiara Indah	Tidak Aktif
	6	Bukit Apit Puhun	Randang Kopi	Tidak Aktif
	7	Bukit Cangang Kayu Ramang	Bunga Karang	Tidak Aktif
C Aur Birugo Tigo Baleh	1	Ladang Cakiah	Lansura	Aktif
	2	Aur Kuning	Flamboyan	Aktif
	3	Belakang balok	Dian	Tidak Aktif
	4	Birugo	Biru Indah	Aktif
	5	Parit Antang	Serba Usaha	Aktif
	6	Sapiran	Kelapa Gading	Tidak Aktif
	7	Pakan Labuah	Palapa	Tidak Aktif
	8	Kubu Tanjung	Bunga Tanjung	Tidak Aktif

Satu hal yang menyebabkan kendala-kendala dalam penatusahaan dan pertanggungjawaban dari Dana Bergulir tersebut adalah sulitnya mengubah persepsi masyarakat akan Dana Bergulir yang terlanjur menganggap bahwa Dana Bergulir tersebut tidak perlu di pertanggungjawabkan maupun dikembalikan, karena Dana Bergulir tersebut pada awal pengguliran berasal dari kelompok belanja Bantuan Sosial.

Kendati demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi selalu berupaya mensosialisasikan penatusahaan Dana Bergulir kepada kelompok pengelola maupun masyarakat, sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang dapat diterapkan penatusahaan dan pertanggungjawaban dana bergulir yang lebih baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

<b>B. Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	61.560.485.842,52	51.171.606.882,69

#### 1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi jangka panjang permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp61.560.485.842,52 yang merupakan akun Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa saham sampai dengan 31 Desember 2021 yang lalu adalah Rp51.171.606.882,69.

Selama tahun 2022 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp13.028.582.263,11 yang terdiri dari :

1. Penambahan Penyertaan Modal pada Bank Nagari sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar Rupiah)

2. Penambahan Penyertaan Modal pada BPRS Jam Gadang Persero da sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah)
3. Pengakuan investasi dengan telah diumumkan nya deviden tahun 2022 oleh BPRS Jam Gadang sebesar Rp592.561.480,00;
4. Penyesuaian nilai Penyertaan Modal Pemda pada PDAM Tirta Jam Gadang, karena pada Laporan Keuangan PDAM mencatat nilai Penyertaan Modal Pemda senilai Rp16.496.904.508, sedangkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi Penyertaan Modal Pemda adalah senilai Rp18.932.925.291,47.

Sementara itu untuk pengurangan sebesar Rp2.639.703.303,28 adalah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengurangan nilai investasi karena deviden tahun 2022 sebesar Rp592.561.480,00 telah diumumkan kembali dan akan disetorkan berupa uang pada tahun 2023.
2. Pengurangan nilai investasi karena terdapat penurunan laba tahun 2022 dan penambahan nilai laba ditahan pada laporan keuangan PDAM tahun 2022 (audited) dibanding tahun 2021.

Dengan mutasi penambahan dan pengurangan di atas selama tahun 2022, sehingga nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bukittinggi saldo per 31 Desember 2022 menjadi Rp61.560.485.842,52 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.3.4.21  
Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi

No	Uraian	Saldo akhir 31 Desember 2021 (Rp)	Koreksi akhir awal 2022	Saldo awal sebelum koreksi	Mutasi		Saldo akhir 31 Desember 2021 (Rp)
					Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=5+6-7
1	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Negeri	37.524.000.000,83	-	37.524.000.000,83	7.000.000.000,00	-	44.524.000.000,83
2	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroada	5.250.000.000,00	-	5.250.000.000,00	3.592.561.480,00	592.561.480,00	8.250.000.000,00
3	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tita Jam Gadang	8.397.606.881,86	-	8.397.606.881,86	2.436.020.783,11	2.047.141.823,28	8.786.485.841,69
	Jumlah Penyerahan Modal	51.171.606.882,69	-	51.171.606.882,69	13.028.582.263,11	2.639.703.303,28	61.560.485.842,52

**a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari**

Investasi Saham pada Bank Nagari Sumatera Barat sampai dengan 31 Desember 2021 yang lalu bersaldo Rp37.524.000.000,83 dan pada tahun 2022 terdapat mutasi tambah senilai Rp7.000.000.000,00 sehingga sampai tanggal 31 Desember 2022 nilai Investasi Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp44.524.000.000,83. Sedangkan porsi kepemilikan saham Pemerintah Kota Bukittinggi di Bank Nagari Tahun 2021 adalah 2,15%, di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,31 % sehingga menjadi 2,46% per 31 Desember 2022.

Pencatatan nilai investasi Pemko Bukittinggi pada Bank Nagari adalah dengan menggunakan Metode Biaya (Cost Method).

Dari nilai tersebut, sampai saat ini telah diterbitkan sertifikat sahamnya sebanyak 37.524 lembar yaitu Saham Seri A senilai Rp1.000.000,00 perlembar dengan total nominal Rp37.524.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000015, Nomor Seri 280.611 s.d. 284.690 sebanyak 4.080 lembar dengan nominal Rp4.080.000.000,00,
- 2) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000035, Nomor Seri 363.149 s.d. 363.549 sebanyak 401 lembar dengan nominal Rp401.000.000,00,
- 3) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000054, Nomor Seri 418.791 s.d. 420.252 sebanyak 1.462 lembar dengan nominal Rp1.462.000.000,00,
- 4) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000077, Nomor Seri 482.324 s.d. 484.436 sebanyak 2.113 lembar dengan nominal Rp2.113.000.000,00 yang berasal dari tambahan investasi saham Tahun 2011,
- 5) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000104, Nomor Seri 607.550 s.d. 609.919 sebanyak 2.370 lembar seri A dengan nominal Rp2.370.000.000,00 yang merupakan setoran investasi saham Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012,
- 6) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000133, Nomor Seri 761.620 s.d. 765.551 sebanyak 3.932 lembar dengan nominal Rp3.932.000.000,00 yang disetor tanggal 14 November 2013,
- 7) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000145, Nomor Seri 895.366 s.d. 899.365 sebanyak 4.000 lembar dengan nominal sebesar Rp4.000.000.000,00 yang berasal dari tambahan setoran modal tanggal 23 April 2014,
- 8) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000158, Nomor Seri 984.016 s.d. 984.598 sebanyak 583 lembar dengan nilai nominal Rp583.000.000,00 yang merupakan setoran investasi saham Tahun 2015 tanggal 22 Januari 2015,
- 9) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000166, Nomor Seri 1.021.190 s.d. 1.025.589 sebanyak 4.400 lembar dengan nominal Rp4.400.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015,

- 10) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000181, Nomor Seri 1.161.281 s.d 1.163.263 sebanyak 1.983 lembar dengan nominal Rp1.983.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2016 tanggal 2 Februari 2016,
- 11) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000202, Nomor Seri 1.365.722 s.d 1.373.921 sebanyak 8.200 lembar dengan nominal Rp8.200.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017,
- 12) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000219, Nomor Seri 1.516.803 s.d 1.520.802 sebanyak 4.000 lembar dengan nominal Rp4.000.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018.

Dari hasil koordinasi ke Bank Nagari didapat keterangan bahwa sertifikat saham seri A masih sedang diproses untuk disampaikan ke Pemko Bukittinggi. Nilai tersebut merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bukittinggi yang disetorkan ke Bank Nagari tahun 2022 sebesar Rp7.000.000.000,00

Sesuai surat dari Wakil Pimpinan Cabang Bank Nagari Bukittinggi Nomor SR/0017/BT/UM/01-2022 tanggal 10 Januari 2022, proyeksi bagian deviden Pemko Bukittinggi Tahun 2021 yang dibagikan tahun 2022 adalah sebesar Rp6.641.291.925,00. yang sudah dicatat di pos akun Piutang pada neraca 2021.

Berdasarkan surat Pimpinan Cabang Bank Nagari Bukittinggi Nomor SR/027/BT/UM/01-2023 tanggal 06 Januari 2023 juga dinyatakan terdapat proyeksi bagian deviden Pemko Bukittinggi Tahun 2022 sebesar Rp7.934.638.854,00 yang akan diterima pada tahun 2023. Nilai sebesar Rp7.934.638.854,00 tersebut masih bersifat proyeksi karena penghitungan menggunakan laba bersih sebelum dilakukan audit oleh Akuntan Publik. Nilai deviden tersebut telah dicatat Pemko Bukittinggi pada Neraca Tahun 2022 pos akun Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Sementara itu RUPS Bank Nagari baru direncanakan akan diadakan bulan Maret 2023.

#### **b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda.**

PT. BPRS Jam Gadang Perseroda sebelumnya bernama BPR Jam Gadang, penggantian nama menjadi PT.BPRS Jam Gadang Perseroda pada tanggal 27 Mei 2021 sesuai dengan Keputusan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-76/D.03/2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat PT Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PT Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang Perseroda yang telah berstatus BUMD.

Nilai Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda kondisi sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.250.000.000,00 dengan persentase kepemilikan saham sebesar 85,15%. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi menambah

penyertaan modal pada PT BPRS Jam Gadang Perseroda sebesar Rp3.000.000.000,00 sehingga nilai riil uang yang disetorkan Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp8.250.000.000,00 dengan porsi kepemilikan 90,01% yang disetor tahun 2007, 2017, 2018 dan tahun 2022. Nilai uang tersebut jika dikonversikan ke nilai saham adalah sebanyak 825.000 lembar saham @Rp10.000,00.

Dari nilai tersebut, sampai saat ini sudah diterbitkan sertifikat sahamnya semua yaitu sebanyak 825.000 lembar. Saham tersebut senilai Rp10.000,00 per lembar saham, total nominal Rp8.250.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sertifikat Saham Nomor Seri JG.00001 sebanyak 25.000 lembar senilai Rp10.000,00 per lembar saham dengan nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah)
2. Sertifikat Saham Nomor Seri JG.00166 sebanyak 200.000 lembar senilai Rp10.000,00 per lembar saham dengan nominal Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah)
3. Sertifikat Saham Nomor Seri JG.00189 sebanyak 300.000 lembar senilai Rp10.000,00 per lembar saham dengan nominal Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah)
4. Sertifikat Saham Nomor Seri JG.00001 sebanyak 300.000 lembar senilai Rp10.000,00 per lembar saham dengan nominal Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah)

Terdapat penambahan pencatatan nilai investasi Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp3.592.561.480,00 dan pengurangan sebesar Rp592.561.480,00. Penambahan dan pengurangan nilai tersebut dikarenakan Pemerintah Kota Bukittinggi mempunyai kepemilikan lebih dari 50% yang menurut SAP dalam pencatatan nilai saham adalah dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) yakni memperhitungkan porsi laba PT.BPR Jam Gadang Tahun 2022 untuk Pemerintah Kota Bukittinggi dikurangi dengan dividen yang dibagikan.

Berikut penghitungan nilai investasi Pemko Bukittinggi pada BPRS Jam Gadang tahun 2022:

Tabel 5.3.4.22

**Perhitungan *Equity Method* untuk Investasi Pemko Bukittinggi  
pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda Tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2021 ( <i>Neraca Audited</i> )	5.250.000.000,00
2	Penambahan Penyertaan Modal tahun 2022	3.000.000.000,00
3	Jumlah Modal Disetor s.d 31 Desember Tahun 2022	8.250.000.000,00
4	Jumlah Total Saham BPR s.d Tahun 2022	9.165.900.000,00
5	Persentase Kepemilikan Saham Pemko Bukittinggi dari Rp8.250.000.000,00	90,01
6	Jumlah Laba BPR Jam Gadang Tahun 2022 setelah pajak	1.204.710.506,00
7	Bagian Laba untuk Pembagian Dividen (55%)	662.590.777,85
8	Jumlah Laba BPR Jam Gadang Tahun 2022 Sesuai porsi kepemilikan	592.561.480,00
9	Dividen 2022 yang akan dibagikan di 2023	592.561.480,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
10	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2022 dengan metode ekuitas	8.250.000.000,00

Untuk penghitungan dividen dari PT BPRS Jam Gadang Perseroda Tahun 2022 yang akan diterima Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2023 dihitung terpisah antara modal sebesar Rp5.250.000.000,00 dengan Penambahan Modal sebesar Rp3.000.000.000,00, karena penambahan penyertaan modal disetorkan pada bulan Maret 2022.

Berdasarkan surat Direktur PT.BPRS Jam Gadang Perseroda Nomor 08/BPRS.JG/UM/0123 tanggal 10 Januari 2023 dinyatakan terdapat proyeksi bagian dividen Pemko Bukittinggi Tahun 2022 sebesar Rp592.561.480,00 yang akan diterima pada tahun 2023, dan didukung dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT BPRS Jam Gadang Perseroda Nomor 02 Tanggal 06 Februari 2023, rincian dividen yang akan diterima Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2023 adalah :

Laba setelah pajak	1.204.710.506,00
Dividen untuk pemegang saham (55%)	662.590.778,00
I. Dividen atas Penyertaan Modal Rp5.250.000.000,00 (12 Bulan):	
a. Modal Pemko	5.250.000.000,00
b. Total Modal BPRS	8.665.900.000,00
c. Dividen pemegang saham	662.590.778,00
<b>Jumlah Dividen dari modal Rp5.250.000.000,00 (a/b*c)</b>	<b>401.412.615,48</b>
II. Dividen atas Penambahan Penyertaan Modal Rp3.000.000.000,00 (10 Bulan):	
a. Modal Pemko (10/12 x 3.000.000.000,00)	2.500.000.000,00
b. Total Modal BPRS	8.665.900.000,00
c. Dividen untuk pemegang saham (55%)	662.590.778,00
<b>Jumlah Dividen dari modal Rp3.000.000.000,00 (a/b*c)</b>	<b>191.148.864,51</b>
<b>Total Dividen tahun 2022 yang akan diterima tahun 2023 (I+II)</b>	<b>592.561.480,00</b>

Nilai dividen tersebut telah dicatat Pemko Bukittinggi pada Neraca tahun 2022 pos akun Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

#### c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang

Investasi Pemerintah Kota Bukittinggi pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi pada Neraca per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp8.397.606.881,86. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp2.436.020.783,11 dan mutasi kurang sebesar Rp2.047.141.823,28 sehingga saldo akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp8.786.485.841,69.

Untuk penentuan nilai investasi pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang, Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan metode ekuitas, karena kepemilikan saham Pemerintah Kota Bukittinggi atas saham Perumda adalah seratus persen (100%) dengan konsekuensi seluruh laba atau rugi juga menjadi milik Pemko dan dicatat sebagai penambah atau pengurang investasi pemko.

Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang mengalami kerugian dari tahun ke tahun yang menyebabkan berkurangnya nilai investasi Pemko Bukittinggi. Penyesuaian tersebut dilakukan karena konsekuensi dari metode kepemilikan modal ekuitas 100% Pemko Bukittinggi atas PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang mengakui laba sebagai penambah nilai investasi dan mengakui rugi sebagai pengurang nilai investasi.

Berikut struktur modal Pemko Bukittinggi atas PDAM Tirta Jam gadang adalah:

1. Kekayaan Pemda yang dipisahkan	Rp 1.177.102.241,00
2. Penyertaan Modal Pemda	Rp 18.932.925.291,47
3. Modal Hibah	Rp 972.316.207,50
4. Laba (rugi) ditahan s.d. tahun lalu	(Rp 12.355.398.290,28)
5. Laba (rugi) tahun ini	<u>Rp 59.540.392,00</u>
<i>Jumlah nilai bersih Penyertaan Modal</i>	<i>Rp 8.786.485.841,69</i>

Diakuinya nilai penyertaan modal pemko sebesar Rp18.932.925.291,47 merupakan nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi. Terdapat perbedaan nilai penyertaan modal pemko antara nilai yang tercantum pada Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang tahun 2022 dengan yang tercantum pada Perda tersebut, perbedaan nilai penyertaan modal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai penyertaan modal Pemko Bukittinggi pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang:

No	Perda Nomor	Tahun	Nilai Penyertaan Modal (Rp)
1.	Perda No 4 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang	2014	6.432.925.291,47
2.	Perda No 15 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.	2014	2.500.000.000,00
3.	Perda No 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.	2017	10.000.000.000,00
	<b>Jumlah Penyertaan Modal Pemko Bukittinggi</b>		<b>18.932.925.291,47</b>

Namun Pada Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang, tercatat penyertaan modal Pemko Bukittinggi sebesar Rp16.496.904.508,00. Rincian nilai penyertaan modal pemda pada Laporan Keuangan PDAM tersebut adalah sebagai berikut :

No	Rincian	Nilai (Rp)
1	Penyertaan Modal dari Laba ditahan	1.319.650.100,00
2	Penambahan penyertaan modal pada tahun buku 2020	421.384.000,00

3	Penyertaan modal dari APBD	12.500.000.000,00
4	Penyertaan Modal dari Bagian Laba	2.255.970.498,00
	<b>Total</b>	<b>16.496.904.508,00</b>

Perbedaan nilai penyertaan modal tersebut disebabkan karena :

1. PDAM tidak mencatat nilai penyertaan modal Pemda awal sebesar Rp6.432.925.291,47 yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2014 sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Pada tahun 2012 dan seterusnya struktur akun Dana cadangan Umum dan Dana Cadangan Tujuan tidak termasuk lagi dalam struktur modal yang pada Laporan Keuangan Perumda sebelumnya merupakan bagian dalam komposisi nilai penyertaan modal Pemda.
3. Belum ditetapkannya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi dari Laba Ditahan dan tambahan Penyertaan Modal dari Bagian Laba dengan Perda.
4. Belum ditetapkannya penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Distribusi Air Minum Kelurahan Bukit Apit senilai Rp421.384.000,00 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2019 dengan Perda.

Penambahan penyertaan modal pemda tahun 2020 pada Laporan Keuangan Perumda Air Minum merupakan Proyek Sarana dan Prasarana Pengembangan Distribusi Air Minum Kelurahan Bukit Apit senilai Rp421.384.000,00 dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 600.143/DPUPR-BKT/II/2019 Tanggal 4 Februari 2019.

5. Dengan demikian, untuk kondisi awal komposisi nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Bukittinggi yang seharusnya adalah:

- Penyertaan Modal awal Pemda	Rp 6.432.925.291,47
- Penambahan penyertaan modal Pemda tahun 2014	Rp 2.500.000.000,00
- Penambahan penyertaan modal Pemda tahun 2017	Rp10.000.000.000,00
- Penambahan penyertaan modal Pemda tahun 2020	Rp 421.384.000,00
- Penambahan nilai penyertaan modal dari Laba ditahan (s.d tahun 2021)	Rp 1.319.550.011,00
- Penambahan Penyertaan modal Pemda dari bagian Laba (s.d tahun 2021)	<u>Rp 2.255.970.498,00</u>
<b>Total</b>	<b>Rp22.929.829.800,47</b>

Pada Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang juga terdapat Aset Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya senilai Rp14.544.620.510,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset ex Departemen PU berupa pekerjaan Jaringan Distribusi Kapasitas Sedang dan Pemasangan sambungan rumah senilai Rp 838.812.810,38
2. Pengadaan dan Pemasangan pipa DN 250mm dengan nilai sebesar Rp1.077.074.700,00
3. IPA Kapasitas 20L/det Pengadaan dan Pemasangan pipa DN200 mm senilai Rp9.727.186.000,00
4. Pembuatan dinding penahan dan tumpuan jembatan pipa distribusi utama dengan nilai sebesar Rp2.901.547.000,00.

Penyerahan aset senilai Rp14.544.620.510,00 ke PDAM tersebut di atas masih berupa Berita Acara Serah Terima Sementara dan aset tersebut masih tercatat sebagai aset pada Kementerian PUPR.

Pada audit atas LKPD Tahun 2021 auditor merekomendasikan agar Pemko Bukittinggi mengupayakan penyerahan sepenuhnya atas aset dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bukittinggi dan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang.

Pemerintah Kota Bukittinggi dan Perumda Air Minum telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengalihan aset tersebut, Direktur PDAM pernah beberapa kali bersurat kepada Dirjen Cipta Karya tahun 2007, tahun 2012, tahun 2015 serta 2021 perihal Aset Eks Departemen PU.

Tahun 2021, untuk mendorong percepatan penyelesaian serah terima aset tersebut, Pemko Bukittinggi juga telah menindaklanjuti upaya-upaya yang telah dilakukan dengan menyurati pihak kementerian sebagai berikut:

1. Surat Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR-RI c.q. Kepala Balai Prasarana Permukiman Nomor 905.647/BK.05/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 perihal Permohonan Serah Terima Aset.
2. Surat Kepala Badan Keuangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi nomor 905.889/BK.05/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal serah terima aset.

Selain melalui surat, telah dilakukan beberapa kali pertemuan baik di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun pihak Kementerian/ balai yang berkunjung ke Badan Keuangan dan Perumda.

Tindak lanjut dari pertemuan tersebut telah dilakukan verifikasi data oleh Perumda sesuai dengan kontrak dan asbuilt drawing dari beberapa pekerjaan dan ditindaklanjuti dengan Surat pernyataan dari Direktur Perumda Nomor : 173/ IX/Perumda.AMTJ-Bkt/11-2022 tanggal 4 November 2022 atas Hasil Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa:

1. Pekerjaan pemasangan dan pengadaan Pipa Dn 250mm Banpro Penyehatan PDAM Kota Bukittinggi (paket 05) tahun 2010 dengan nilai Perolehan Rp.1.077.074.700.-

2. Pekerjaan IPA Kapasitas 20 L/detik Pengadaan dan Pemasangan Pipa Dn 200 mm dan Dn 225 mm Banpro Penyehatan PDAM Kota Bukittinggi (paket 09) Tahun 2011 dengan Nilai Perolehan Rp. 9.727.186.000.
3. Pembuatan Dinding Penahan dan Tumpuan Jembatan Pipa Pengadaan dan Pemasangan Pipa Dn 250mm Banpro PDAM Kota Bukittinggi (PAMS-9) Tahun 2015 dengan nilai Perolehan Rp.2.901.547.000.-

Selanjutnya Surat pernyataan dari Direktur Perumda dikuatkan dengan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Barang Milik Negara (BMN) oleh Walikota Bukittinggi dengan nomor 030/2455/BK.06/2022 tanggal 29 November 2022. Surat Pernyataan ini sebagai persyaratan atas usulan alih status/ Hibah Barang Milik Negara. Saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi menunggu tahapan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia dan nantinya dicatat sebagai Aset Pemerintah Kota Bukittinggi dan selanjutnya akan diperhitungkan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bukittinggi kepada Perumda.

Selain aset pemerintah pusat (APBN) di atas, juga terdapat aset Pemerintah Kota Bukittinggi (APBD) yang belum dicatat sebagai bagian penyertaan modal Pemko Bukittinggi pada PDAM, karena penyerahan aset tersebut masih berupa Berita Acara Serah Terima Sementara (BASTS) dan masih tercatat sebagai aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, dengan jumlah nilai aset sebesar Rp1.416.078.946,93 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Saluran Pembawa air baku tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang) dengan nilai Rp177.476.000,00 dengan BAST Sementara Nomor 030/571.B/BK.06/2019 dan Nomor 671.A/IX-PDAM/08-2019 tanggal 15 Agustus 2019.
2. Saluran pembawa air baku tertutup dengan BAST Sementara Nomor 030/26.a/BK.06/2020 dan Nomor 03.a/IX-PDAM/01-2020 tanggal 6 Januari 2020 dengan total nilai sebesar Rp1.238.602.946,93 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Saluran pembawa air baku tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang di Kelurahan Parit Antang senilai Rp335.615.469,98;
  - b. Saluran pembawa air baku tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang) di Kelurahan Tarok Dipo senilai Rp411.943.479,93;
  - c. Saluran pembawa air baku tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang di Kelurahan Kubu Tanjung) senilai Rp166.475.376,00;
  - d. Saluran pembawa air baku tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang di Kelurahan Pulau Anak Air) senilai Rp172.139.811,34;
  - e. Saluran pembawa air baku tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang di Kelurahan Puhun Pintu Kabun) senilai Rp152.428.809,68.

Verifikasi data telah dilakukan dengan Perumda, dan Saluran Pembawa Air Baku Tertutup (Jaringan SPAM) inipun telah beroperasi. Saat ini Badan Keuangan telah memasukkan nilai Aset ini ke dalam Draft Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Selain upaya-upaya dalam rangka percepatan serah terima asset dan penetapan sebagai penyertaan modal, auditor juga merekomendasikan agar dilakukan penghitungan nilai yang akan dicatat dalam penyertaan modal. Untuk saat ini penghitungan yang dapat dilakukan adalah penghitungan awal /sementara, namun belum dapat dicatat sebagai penyertaan modal disebabkan sebagai berikut:

1. Aset-aset tersebut belum diserahterimakan secara penuh dan masih dicatat di neraca Kementerian PUPR maupun Dinas PUPR Kota Bukittinggi (menghindari double pencatatan);
2. Belum dilakukan verifikasi fisik, penafsiran maupun penilaian ulang terhadap kondisi fisik barang yang diserahterimakan karena terdapat aset-aset dari pemerintah pusat tersebut yang sudah lama sehingga fisiknya tidak ditemukan lagi/diganti seperti pipa jaringan dan sebagainya;
3. Belum ditetapkan pada Peraturan daerah terkait penyertaan modal Pemko Bukittinggi.

Adapun penghitungan sementara yang dapat kami sajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah:

1. Penambahan penyertaan modal Pemda tahun 2014	Rp 2.500.000.000,00
2. Penambahan penyertaan modal Pemda tahun 2017	Rp10.000.000.000,00
3. Penyertaan Modal awal Pemda	Rp 6.432.925.291,47
4. Penambahan penyertaan modal Pemda tahun 2020	Rp 421.384.000,00
5. Penambahan nilai penyertaan modal dari Laba ditahan (s.d tahun 2021)	Rp 1.319.550.011,00
6. Penambahan Penyertaan modal Pemda dari bagian Laba (s.d tahun 2021)	Rp 2.255.970.498,00
7. Aset Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya dan masih dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Sementara (BASTS)	Rp14.544.620.510,00
8. Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi masih dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Sementara (BASTS)	Rp1.416.078.946,93
<i>Jumlah</i>	<i>Rp38.890.529.257,40</i>

Saat ini draft peraturan daerah untuk penyertaan modal ke Perumda Air Minum sedang diajukan. Jika serah terima dari Kementerian PUPR selesai menjelang ditetapkannya peraturan daerah tersebut, angka sebesar Rp38.890.529.257,40 tersebut di atas akan menjadi angka dasar untuk dipertimbangkan ke depan untuk diappraisal kemudian ditetapkan menjadi penyertaan modal sesuai peraturan yang berlaku.

## 5.3.1.2 Aset Tetap

**Tahun 2022**  
(Rp)  
**1.855.803.078.417,13**

**Tahun 2021**  
(Rp)  
**1.808.865.746.671,24**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Harga Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.718.826.511.137,30 dan Rp2.592.895.250.678,61 atau mengalami peningkatan sebesar 4,86%. Sedangkan nilai buku Aset Tetap Tahun 2021 sebesar Rp1.808.865.746.671,24 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.855.803.078.417,30. Berdasarkan kelompoknya, Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi yang disajikan pada Neraca Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.3.21 Kelompok Aset Tetap

No	Rekening	Uraian	Saldo Akhir 2021 (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
	<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>				
1	1.3.01	Tanah	566.209.588.505,20	622.700.000,00	542.500.000,00	566.289.788.505,20
2	1.3.02	Peralatan dan Mesin	346.346.890.953,31	65.789.239.008,47	5.471.108.849,12	406.665.021.112,66
3	1.3.03	Gedung dan Bangunan	960.588.776.351,51	53.318.466.659,75	9.568.482.275,13	1.004.338.760.736,13
4	1.3.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	623.922.585.555,15	55.307.802.355,83	6.485.205.340,64	672.744.182.570,34
5	1.3.05	Aset Tetap Lainnya	30.677.779.197,80	4.716.903.366	4.224.807.472,00	31.169.875.091,80
6	1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	65.149.630.115,64	6.362.829.128,41	33.893.576.122,88	37.618.883.121,17
7	1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(784.029.504.007,37)	(84.468.710.604)	(5.474.781.892,00)	(863.023.432.720)
		<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1.808.865.746.671,24</b>	<b>101.649.229.914,46</b>	<b>54.711.898.167,77</b>	<b>1.855.803.078.417,30</b>

## 5.3.1.2.1 Tanah

**Tahun 2022**  
(Rp)  
**566.289.788.505,20**

**Tahun 2021**  
(Rp)  
**566.209.588.505,20**

Nilai Tanah pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp566.209.588.505,20. Pada Tahun 2022 Tanah tersebut mengalami mutasi penambahan sebesar Rp622.700.000,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp542.500.000,00 sehingga saldo akhir Tahun 2022 adalah Rp566.289.788.505,20 untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Saldo Awal

Rp 566.209.588.505,20

Mutasi Tambah

Belanja Modal Tanah	0,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
Hibah Masuk dari pihak ke-3	80.200.000,00
Penilaian Tanah yang sebelumnya bernilai Nol	0,00
Mutasi Masuk Antar SKPD	542.500.000,00
Koreksi Pencatatan	0,00

<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>Rp 622.700.000,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Mutasi Keluar antar SKPD	542.500.000,00
Koreksi Pencatatan	
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>Rp 542.500.000,00</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp 566.289.788.505,20</b>

Tanah terdiri dari: Tanah Persil senilai Rp400.989.547.476,00, Tanah Non Persil senilai Rp20.017.663.908,20, dan Lapangan senilai Rp145.282.577.121,00.

Penambahan nilai tanah sebesar Rp80.200.000,00 berasal dari hibah Pihak ke-3. Tanah Hibah dari pihak ke-3 tersebut sudah tercatat sebagai inventaris Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Aset Berupa Tanah Dari Hj. Asma Kepada Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 15 September 2022 seluas 100 m<sup>2</sup>.

Tabel 5.3.22 Rekap Data Aset Tetap Tanah Per SKPD

NO	SKPD	Tanah (Rp)
1	Sekretariat DPRD	5.683.900.000,00
2	Sekretariat Daerah	19.256.977.652,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	146.017.527.875,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.885.142.908,20
5	Dinas Perhubungan	7.906.450.000,00
6	Dinas Kesehatan	17.587.408.500,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.491.265.001,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	278.250.000,00
9	Dinas Sosial	1.001.400.000,00
10	Dinas Kebakaran	0,00
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	810.000.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	960.000.000,00
13	Dinas Pertanian dan Pangan	13.718.684.469,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	78.173.490.000,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Tenaga Kerja	2.624.000.000,00
16	Pengelola Barang Milik Daerah	27.365.906.000,00
17	Badan Keuangan	6.139.500.000,00
18	Inspektorat	437.500.000,00
19	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	0,00
20	Dinas Lingkungan Hidup	7.813.703.000,00



21	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	132.858.634.000,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	909.000.000,00
24	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	0,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	282.000.000,00
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
27	Kecamatan Guguk Panjang	12.683.300.000,00
28	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	9.203.607.100,00
29	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	3.202.142.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>566.289.788.505,20</b>

Disamping itu, terdapat Aset Tetap Tanah yang digunakan oleh pihak lain dengan status pinjam pakai sebagai berikut:

1. Status pinjam pakai dengan Komisi Pemilihan Umum berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 453,75 m<sup>2</sup> melalui perjanjian pinjam pakai nomor: 180/09/Hukum.B/151/KB/KPU-Kota/003.435.130 /2015 tanggal 25 Maret 2015.
2. Status pinjam pakai dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 2.250 m<sup>2</sup> yang digunakan untuk pembangunan gedung UPTD SAMSAT Bukittinggi melalui perjanjian pinjam pakai Nomor 180/26/Huk-B/2015 dan 030/121/Perj/BPAD-IX/2015 tanggal 28 September 2015.

#### 5.3.1.2.2 Peralatan Dan Mesin

**Tahun 2022**  
Rp  
406.665.021.112,66

**Tahun 2021**  
Rp  
346.346.890.953,31

Peralatan dan Mesin meliputi Alat-alat Bermesin dan Tidak Bermesin, Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor, Alat Elektronik, Inventaris Kantor, dan Peralatan Lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2021 lalu adalah Rp346.346.890.953,31. Pada Tahun 2022 Peralatan dan Mesin tersebut mengalami mutasi bertambah sebesar Rp65.789.239.008,47 dan mutasi berkurang sebesar Rp5.471.108.849,12 sehingga saldo akhir Tahun 2022 adalah Rp406.665.021.112,66 dimana rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3.24 Rincian Aset Tetap  
Peralatan dan Mesin

No.	Akuis/ Rekening	Uraian	Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
	<b>1.3.02</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	346.346.890.953,31	406.665.021.112,66
<b>A</b>	<b>1.3.02.01</b>	<b>Alat Besar</b>	19.146.627.447,90	20.743.096.138,90
1	1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	8.295.192.773,00	9.547.597.384,00
2	1.3.02.01.02	Alat Besar Apung	325.710.000,00	374.709.840,00
3	1.3.02.01.03	Alat Bantu	10.525.724.674,90	10.820.788.914,90
<b>B</b>	<b>1.3.02.02</b>	<b>Alat Angkutan</b>	80.181.653.155,00	87.761.004.547,00
1	1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	79.475.089.722,00	86.486.874.114,00
2	1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	585.013.433,00	844.789.433,00
3	1.3.02.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	121.550.000,00	429.341.000,00
<b>C</b>	<b>1.3.02.03</b>	<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	1.858.540.868,00	2.213.040.560,00
1	1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	597.994.650,00	509.453.730,00
2	1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	257.631.755,00	279.162.525,00
3	1.3.02.03.03	Alat Ukur	1.002.914.463,00	1.424.424.305,00
<b>D</b>	<b>1.3.02.04</b>	<b>Alat Pertanian</b>	858.684.444,00	864.384.444,00
1	1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	858.684.444,00	864.384.444,00
<b>E</b>	<b>1.3.02.05</b>	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	95.795.479.751,27	106.536.501.882,41
1	1.3.02.05.01	Alat Kantor	31.882.427.266,52	36.913.868.742,48
2	1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	57.501.962.879,75	62.993.641.025,93
3	1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.411.089.605,00	6.628.992.114,00
<b>F</b>	<b>1.3.02.06</b>	<b>Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar</b>	7.964.453.524,87	11.864.751.759,54
1	1.3.02.06.01	Alat Studio	3.557.894.621,00	7.499.083.263,00
2	1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	3.943.330.515,04	3.978.499.654,71
3	1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	447.641.388,83	387.168.941,83
4	1.3.02.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15.587.000,00	0,00
<b>G</b>	<b>1.3.02.07</b>	<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	46.064.291.088,03	55.087.241.147,71
1	1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	45.612.998.385,71	54.626.087.445,71
2	1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	451.292.702,34	461.153.702,00
<b>H</b>	<b>1.3.02.08</b>	<b>Alat Laboratorium</b>	24.227.620.895,60	28.152.206.514,48
1	1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	11.756.589.126,00	15.258.673.151,00
2	1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	30.518.500,00	30.518.500,00
3	1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	11.340.997.865,60	11.755.838.651,48
4	1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	71.570.024,00	71.570.024,00
5	1.3.02.08.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	184.678.000,00	184.678.000,00
6	1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	806.257.380,00	806.257.380,00
7	1.3.02.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	2.500.000,00	2.500.000,00
8	1.3.02.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	34.510.000,00	42.170.808,00
<b>I</b>	<b>1.3.2.09</b>	<b>Alat Persenjataan</b>		202.273.400,00
	1.3.2.09.02	Persenjataan Non senjata api		175.670.000,00
	1.3.2.09.04	Alat khusus Kepolisian		26.603.400,00
<b>J</b>	<b>1.3.02.10</b>	<b>Komputer</b>	61.743.723.329,47	75.964.971.234,47
1	1.3.02.10.01	Komputer Unit	48.187.779.442,30	59.895.354.034,30
2	1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	13.555.943.887,17	16.069.617.200,17
<b>K</b>	<b>1.3.02.11</b>	<b>Alat Eksplorasi</b>	1.580.000,00	
1	1.3.02.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	1.580.000,00	
<b>L</b>	<b>1.3.02.12</b>	<b>Alat Pengeboran</b>	599.734.590,00	
1	1.3.02.12.01	Alat Pengeboran Mesin	599.734.590,00	
<b>M</b>	<b>1.3.02.13</b>	<b>Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian</b>	280.721.684,62	280.721.684,62
1	1.3.02.13.01	Sumur	280.721.684,62	280.721.684,62
<b>N</b>	<b>1.3.02.14</b>	<b>Alat Bantu Eksplorasi</b>	-	

1	1.3.02.14.02	Alat Bantu Produksi	-	
<b>O</b>	<b>1.3.02.15</b>	<b>Alat Keselamatan Kerja</b>	2.235.898.041,30	1.668.450.388,30
1	1.3.02.15.01	Alat Deteksi	737.877.240,00	
2	1.3.02.15.02	Alat Pelindung	356.683.601,30	319.762.601,30
3	1.3.02.15.03	Alat SAR	1.121.477.400,00	1.330.904.387,00
4	1.3.02.15.04	Alat Kerja Penerbangan	19.859.800,00	17.783.400,00
<b>P</b>	<b>1.3.02.16</b>	<b>Alat Peraga</b>	-	
1	1.3.02.16.01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	-	
<b>Q</b>	<b>1.3.02.17</b>	<b>Peralatan Proses/ Produksi</b>		45.340.750,00
	1.3.02.17.01	Unit Peralatan/ Proses Produksi		45.340.750,00
<b>R</b>	<b>1.3.02.18</b>	<b>Rambu-rambu</b>	4.698.065.383,23	14.163.134.761,23
1	1.3.02.18.01	Rambu-rambu Laku Lintas Darat	4.698.065.383,23	14.163.134.761,23
<b>S</b>	<b>1.3.02.19</b>	<b>Peralatan Olahraga</b>	689.816.750,00	1.117.901.900,00
1	1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	689.816.750,00	1.117.901.900,00

Sedangkan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 adalah sebagaimana uraian di bawah ini:

**Saldo Awal 1 Januari 2022**

**Rp 346.346.890.953,31**

**Penambahan**

Belanja Modal (LRA)	Rp 48.131.479.720,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp 144.765.510,00
Mutasi dari SKPD Lain (BAST)	Rp 1.976.799.775,34
Hibah dari Pihak ke 3	Rp 10.957.420.258,00
Koreksi Pencatatan	Rp 717.824.139,13
Reklas Antar Kelompok Barang (Masuk)	Rp 3.818.411.546,00
Hasil Penilaian Kurang Catat	Rp 42.538.060,00

**Jumlah Penambahan**

**Rp 65.789.239.008,47**

**Pengurangan**

Penghapusan berdasarkan SK Wako	Rp 391.395.278,00
Mutasi ke SKPD Lain (BAST)	Rp 1.976.799.775,34
Koreksi Pencatatan	Rp 26.858.900,00
Reklas Antar Kelompok Barang (Keluar)	Rp 2.299.045.931,14
Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi (Ekstrakomptabel)	Rp 387.235.545,50
Belanja Modal Reklas ke Gol. Lain (Persediaan)	Rp 223.500.724,00
Belanja Modal Reklas ke Gol. Lain (Pemeliharaan)	Rp 165.522.695,14

**Jumlah Pengurangan**

**Rp 5.471.108.849,12**

**Saldo akhir per 31 Desember 2022**

**Rp 406.665.021.112,66**

Rincian penambahan dari Peralatan dan Mesin dapat di jelaskan sebagai berikut :

**I. Penambahan berasal dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa.**

8/19

Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa merupakan Belanja pada SKPD yang berasal dari belanja Barang dan Jasa akan tetapi menambah nilai Aset SKPD yang bersangkutan. Ada beberapa SKPD yang terdapat Belanja Barang dan Jasa yang sifatnya menambah Nilai Aset, diantaranya sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat Belanja Barang dan Jasa yang menambah Nilai Aset dengan total sebesar Rp96.261.770,00. Nilai tersebut terdapat pada:

- Dinas Pendidikan sebesar Rp3.000.000,00 berupa Belanja Handy Talky.
- SDN 01 Benteng Pasar Atas sebesar Rp30.195.000,00 berupa Belanja Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga Lainnya.
- SDN 04 Bukit Apit Puhun sebesar Rp1.700.000,00 berupa Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya.
- SDN 07 Bukit Cangang sebesar Rp8.250.000,00 berupa Belanja Alat Peraga Praktek Sekolah.
- SDN 11 Bukit Apit Puhun sebesar Rp4.700.000,00 berupa Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya.
- SDN 12 Puhun Pintu Kabun sebesar Rp3.000.000,00 berupa Belanja Alat Peraga Praktek Sekolah.
- SDN 16 Tarok Dipo sebesar Rp13.328.270,00 berupa Belanja Alat Peraga Praktek Sekolah.
- SMPN 1 sebesar Rp2.070.000,00 berupa Belanja Alat Bantu dan Alat Pembersih Lantai.
- SMPN 3 sebesar Rp24.018.500,00 berupa Belanja Alat Kantor Lainnya, Alat Studio Audio dan Alat Peraga Praktek Sekolah.
- SMPN 4 sebesar Rp4.000.000,00 berupa Alat Peraga Praktek Sekolah.
- SMPN 8 sebesar Rp2.000.000,00 berupa Alat Peraga Praktek Sekolah.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan terdapat Belanja Barang dan Jasa yang menambah Aset berupa Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya sebesar Rp800.000,00 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp1.400.000,00 dan Belanja Modal Unit Peralatan Proses/ Produksi (Transport and Storage Equipment For Liquid) sebesar Rp12.765.000,00.

3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan terdapat Belanja Barang dan Jasa yang menambah Aset berupa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp2.377.200,00 serta Upah Pemasangan Pompa Air yang menambah ke Nilai Pompa yang bersangkutan sebesar Rp3.219.000,00.

4. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terdapat Belanja Barang dan Jasa yang menambah Aset berupa Belanja Pompa sebesar Rp1.656.040,00 serta Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya sebesar Rp23.000.000,00.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat Belanja Barang dan Jasa yang menambah Aset berupa Belanja Peralatan Jaringan sebesar Rp3.286.500,00.

## II. Penambahan berasal dari Hibah Pihak Ke Tiga

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Hibah Pihak ke 3 dengan total sebesar Rp10.957.420.258,00 merupakan pemberian seseorang, kelompok masyarakat atau organisasi kepada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang diberikan secara sukarela. Rincian Hibah dari Pihak ke 3 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika menerima Hibah dari Bank Nagari berupa Hibah Videotron/Display sebesar Rp849.365.600,00.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BPBD menerima Hibah Trailer Dapur dan Peralatan Kebencanaan dari BNPB sebesar Rp721.158.500,00.

3. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan menerima Hibah dari Kementerian Perhubungan berupa Peralatan ATCS (*Area Traffic Control System*) sebesar Rp9.386.896.158,00.

## III. Penambahan dari Koreksi Pencatatan.

Penambahan dari Koreksi Pencatatan pada SKPD dengan total sebesar Rp717.824.139,13 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan

Koreksi pencatatan pada Dinas Perhubungan berupa Perencanaan Pengadaan ATCS dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp65.009.700,00 yang awalnya terletak di KDP kemudian dikoreksi menjadi Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022.

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koreksi pencatatan ke Peralatan dan Mesin dari Belanja Pengadaan Gedung dan Bangunan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

-SMPN 3 realisasi belanja berupa Kanopi sebesar Rp224.761.035,42.

-SMPN 5 realisasi belanja berupa Pemasangan Auning sebesar Rp117.034.279,65.

- TK Negeri 1 realisasi belanja berupa pembangunan APE luar sebesar Rp88.225.135,88 serta pengadaan Tangki Air dan Sanitasinya sebesar Rp111.781.088,18.

Sedangkan koreksi pencatatan ke Peralatan dan Mesin dari rekening belanja Aset Tetap Lainnya dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

- SMPN 6 realisasi belanja Alat Kantor sebesar Rp15.184.800,00, belanja Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp18.000.000,00, belanja Personal Komputer Rp11.499.600,00 serta belanja Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar Rp4.884.000,00.
- SDN 18 Campago Guguk Bulek realisasi belanja berupa Gorden sebesar Rp6.000.000,00.
- SDN 02 Aur Kuning realisasi belanja berupa Teralis Kelas sebesar Rp15.000.000,00.
- SDN 04 bukit Apit Puhun realisasi belanja berupa Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Kesenian sebesar Rp2.834.500,00.
- SDN 05 Puhun Pintu Kabun realisasi belanja berupa Tangki Air sebesar Rp1.600.000,00 belanja Teralis sebesar Rp7.000.000,00.
- SDN 10 ATTS realisasi belanja Alat Kantor sebesar Rp6.400.000,00.
- SDN 11 Aur Kuning realisasi belanja Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Kesenian sebesar Rp2.560.000,00.
- SDN 17 Manggis Ganting realisasi belanja Alat Kantor sebesar Rp2.400.000,00 dan belanja Alat Rumah Tangga sebesar Rp750.000,00.
- SMPN 2 realisasi belanja berupa Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Kesenian sebesar Rp4.400.000,00.
- SMPN 5 relaisasi belanja berupa Alat Rumah Tangga sebesar Rp8.350.000,00.

### 3. Dinas Kebakaran

Dinas Kebakaran terdapat koreksi belanja Jalan Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.150.000,00 berupa Belanja Tangki air dan Portable Water Pump.

## IV. Penambahan berasal dari Reklas Antar kelompok Barang (Masuk)

Reklas Antar kelompok Barang (Masuk) sebesar Rp3.818.411.546,00 dapat dirinci dan dijelaskan pada SKPD sebagai berikut:

### 1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah terdapat reklas antar kelompok barang dari Aset Tetap Lainnya (realisasi belanja pada DPA SKPD) ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.014.849.546,00 berupa:

- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Belanja Modal Audio Visual/ Vidio Wall sebesar Rp999.950.604,00.

- Pengadaan Belanja Modal Audio Visual berupa voice recorder sebesar Rp2.997.000,00.
- Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah/Belanja Modal Audio Visual/ Videotron sebesar Rp1.996.916.942,00.
- Pengadaan Alat Rumah Tangga berupa Televisi sebesar Rp14.985.000,00.

2. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman terdapat reklas antar kelompok barang (masuk) dari Belanja Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.994.000,00 berupa Teralis.

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat reklas antar kelompok barang dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp173.745.000,00 berupa Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Kesenian.

4. Dinas Pertanian dan Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan terdapat reklas antar kelompok barang dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.500.000,00 berupa Alat Kantor Lainnya.

5. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdapat reklas antar kelompok barang dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.745.000,00 berupa Belanja Modal Audio Visual.
- Reklas dari Belanja Mesin Pompa Air sebesar Rp7.215.000,00 dan belanja Alat Kantor Lainnya sebesar Rp800.000,00.

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BKPSDM terdapat reklas antar kelompok barang (masuk) dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.000.000,00 berupa Peralatan Studio Audio.

7. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan terdapat reklas antar kelompok barang (masuk) dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp33.128.000,00 berupa Belanja Alat Kantor Rp18.143.000,00 serta Belanja Alat Rumah Tangga sebesar Rp14.985.000,00.

8. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat reklas antar kelompok barang (masuk) dari Aset Lainnya (Rusak Berat) ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp101.935.000,00 berupa Kendaraan bermotor Penumpang/Mini Bus pembelian Tahun 1999. Kendaraan tersebut diperbaiki kembali karena tidak adanya anggaran untuk pengadaan kendaraan roda 4 disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran untuk kebutuhan dana Covid 19 pada Tahun 2020.

**9. Dinas Lingkungan Hidup**

Dinas Lingkungan Hidup terdapat reklas antar kelompok barang (masuk) dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada DPA SKPD ke Pengelompokan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp452.500.000,00 berupa:

- Alat-alat Besar sebesar Rp370.000.000,00.
- Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp3.500.000.
- Alat Laboratorium sebesar Rp54.000.000,00.
- Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp25.000.000,00.

**V. Penambahan dari Hasil Penilaian Kurang Catat**

Hasil penilaian kurang catat merupakan penambahan nilai aset yang berasal dari kealpaan pencatatan tahun sebelumnya, sehingga perlu dicatat lagi ditahun berjalan dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat kurang catat terhadap usetnya dengan total sebesar Rp29.677.660,00 berupa Gordyn, Michrophone Table Stand, Audio Mixing Console, Peralatan Studio Audio Lainnya, Lighting Stand Tripod, Hard disk Eksternal, serta Peralatan Jaringan. Kurang catat tersebut merupakan hasil temuan Inspektorat tahun 2022.
2. Dinas Kesehatan terdapat kurang catat sebesar Rp12.860.400,00 berupa Alat Bengkel bermesin sebesar Rp2.530.000,00, Alat Ukur Universal sebesar Rp7.305.400,00 serta Alat Rumah Tangga Lainnya sebesar Rp3.025.000,00.

Rincian pengurangan dari Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

**I. Pengurangan Berdasarkan SK Penghapusan**

Pengurangan Berdasarkan SK Penghapusan merupakan pengurangan Aset SKPD yang berasal dari penjualan, pemusnahan atau pun sebab kondisi lainnya. Rincian Penghapusan pada SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan jumlah penghapusan sebesar Rp 11.734.400,00.
2. Dinas Kesehatan dengan jumlah penghapusan sebesar Rp 12.330.000,00.
3. Bapelitbang dengan jumlah penghapusan sebesar Rp 117.701.357,00.
4. Kantor Satpol PP dengan jumlah penghapusan sebesar Rp 18.847.500,00.
5. Diskominfo dengan jumlah penghapusan sebesar Rp 20.148.700,00.
6. Kecamatan Guguk Panjang dengan jumlah penghapusan sebesar Rp 210.633.321,00.

Rincian dari Penghapusan pada SKPD tersebut dapat dilihat pada lampiran SK penghapusan SKPD yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari CaLK Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.



## II. Pengurangan dari Koreksi Pencatatan

Koreksi pencatatan berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp26.858.000,00 dengan rincian serta penjelasannya sebagai berikut:

- Koreksi pencatatan aset dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan pada SDN 03 Pakan Kurai sebesar Rp8.436.000,00.
- Koreksi pencatatan aset dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya pada SMPN 7 sebesar Rp17.672.900,00.
- Koreksi pencatatan aset dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya pada SDN 06 Pulau Anak air sebesar Rp750.000,00.

## III. Pengurangan berasal dari Reklas Antar kelompok Barang (keluar)

Pengurangan yang berasal dari reklas antar kelompok barang (keluar) berasal dari SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman  
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (ubah kondisi barang baik jadi Rusak Berat) sebesar Rp46.752.770,00.
2. Dinas Kesehatan  
-Dinas Kesehatan terdapat Reklas Belanja dari Rekening Peralatan dan Mesin berupa partisi ruangan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp130.724.129,14.  
-Dinas Kesehatan terdapat reklas belanja dari Rekening Peralatan dan Mesin berupa IPAL ke JIJ sebesar Rp733.606.000,00.
3. Dinas Kebakaran  
Dinas Kebakaran terdapat Reklas Belanja dari rekening Peralatan dan Mesin ke JIJ sebesar Rp.15.000.000,00 berupa Pengadaan Instalasi air bersih.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.  
DP3APKB terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Ubah Kondisi Barang Baik Jadi RB) sebesar Rp49.873.500,00.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.  
DKUKMDP terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Ubah Kondisi Barang Baik Jadi RB) sebesar Rp92.994.100,00.
6. Inspektorat  
Inspektorat terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Ubah Kondisi Barang Baik Jadi RB) sebesar Rp40.432.000,00.
7. Dinas Lingkungan Hidup

219

Dinas Lingkungan Hidup terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Ubah Kondisi Barang Baik Jadi RB) sebesar Rp 754.268.833,00.

8. Kantor Satpol PP

Satpol PP terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Ubah Kondisi Barang Baik Jadi RB) sebesar Rp188.564.841,00

10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BKPSDM terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Ubah Kondisi Barang Baik Jadi RB) sebesar Rp73.557.000,00.

9. Diskominfo

Diskominfo terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Ubah Kondisi Barang Baik Jadi RB) sebesar Rp36.790.000,00.

10. Kecamatan ABTB

Kecamatan ABTB terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Ubah Kondisi Barang Baik Jadi RB) sebesar Rp92.882.563,00.

11. Kecamatan MKS

Kecamatan MKS terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Ubah Kondisi Barang Baik Jadi RB) sebesar Rp43.600.195,00.

**IV. Pengurangan berasal dari Belanja Modal menjadi Aset Non Kapitalisasi**

Pengurangan yang berasal dari Belanja Modal di tahun berjalan, menjadi Aset Non Kapitalisasi (Ekstrakomtabel) karena tidak memenuhi jumlah nilai kapitalisasi Asetnya. Penjelasan dan rincian Belanja Modal menjadi Aset Non Kapitalisasi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah sebesar Rp25.041.600,00.
2. DPUPR sebesar Rp12.897.500,00.
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp4.376.040,00.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp217.264.820,50.
5. Dinas Kesehatan sebesar Rp36.421.395,00.
6. BPBD sebesar Rp9.852.250,00.
7. DKUKMDP sebesar Rp2.070.000,00.
8. Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp6.925.000,00.
9. Badan Keuangan sebesar Rp750.000,00.
10. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp300.000,00.
11. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp499.500,00.
12. Kantor Satpol PP sebesar Rp39.682.000,00.
13. BKPSDM sebesar Rp425.000,00.
14. Kec. Guguk Panjang sebesar Rp21.378.440,00.
15. Kec. ABTB sebesar Rp2.997.000,00.

16. Kec. MKS sebesar Rp7.105.000,00.

#### V. Pengurangan berasal dari Belanja Modal menjadi Persediaan.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin menjadi Persediaan merupakan pengurangan Belanja Modal di LRA menjadi barang Persediaan. Penjelasan dan rincian Pengurangan aset dari Belanja Modal menjadi persediaan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD sebesar Rp19.425.000,00.
2. Sekretariat Daerah sebesar Rp72.632.420,00.
3. DPUPR sebesar Rp2.260.959,00.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp55.508.475,00.
5. Dinas Kesehatan sebesar Rp23.143.500,00.
6. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp15.318.000,00.
7. BKPSDM sebesar Rp2.935.000,00.
8. Diskominfo sebesar Rp1.900.000,00.
9. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp30.377.370,00.

#### VI. Pengurangan berasal dari Belanja Modal yang reklas ke Pemeliharaan.

Pengurangan berasal dari Belanja Modal yang reklas ke Pemeliharaan merupakan Belanja Modal pada SKPD yang tidak memenuhi untuk dijadikan Aset Tetap tapi perlu di reklas ke Pemeliharaan. Penjelasan dan rinciannya adalah sebagai berikut:

##### 1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah terdapat Belanja Modal yang menjadi Pemeliharaan sebesar Rp125.522.695,14 berupa rehab ringan Rumah Dinas Walikota sebesar Rp109.730.492,04 serta Rumah Dinas Wakil Walikota sebesar Rp15.792.203,10.

##### 2. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup terdapat Belanja Modal yang menjadi Pemeliharaan sebesar Rp40.000.000,00 berupa kerangkeng kendaraan roda 4 pickup L300.

Adapun Aset Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas yang dimanfaatkan pihak lain dan tidak dalam penguasaan Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan tahun akhir tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.25  
Daftar Kendaraan Dinas yang dimanfaatkan pihak lain Tahun 2022

N O	URAIAN	INSTANSI PEMILIHAN PAKAI	TANGGAL	NOMOR PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	BERAKHIR
1	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1537 L (Eks.12 L). Toyota Kijang Inova G Tahun 2005	Sub Dempon 14-3 Bukittinggi	15 September 2015	188.45/DPKAD/06/02/201 5 B/92/EX.2015	5 Tahun	15 September 2015 s/d 14 September 2020

2	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1560 L. Toyota Kijang Innova G (TGN 40R-GKMDKD) Tahun 2013	Pengadilan Negeri Klas I.B Bukittinggi	01 April 2016	024/02/DPKAD.06/2016 W3.012/392/UM/III/2016	5 Tahun	16 Januari 2016 s/d 15 Januari 2021
3	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 2743 LG. Toyota Kijang LX 1.8 Tahun 2004	Kodim 0304 / Agam	01 April 2016	024/01/DPKAD.06/2016 B/283/III/2016	5 Tahun	20 Februari 2016 s/d 19 Februari 2021
4	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1513 L. Toyota Kijang Innova G Tahun 2010	Kejaksaan Negeri Bukittinggi	01 April 2016	024/03/DPKAD.06/2016 B.507/N.3.1.1/ CV.1/03/2016	5 Tahun	04 Februari 2015 s/d 3 Februari 2020
5	1. Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1545 L. Toyota Rush 1.5 S Tahun 2013 2. Kendaraan Dinas Roda 2 BA 7536 LG. Honda GLP/III A (Kend. roda 2)	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	11 April 2016	024/05/DPKAD.06/2016 03065/IV/Perj/BPAD.2016	5 Tahun	30 Januari 2016 s/d 29 Januari 2021
6	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1481 LG. Toyota Kijang Innova G Tahun 2005	Kepolisian Resor Bukittinggi	20 April 2016	024/08/DPKAD.06/2016 B/1011/IV/2016	5 Tahun	30 Januari 2016 s/d 29 Januari 2021
7	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1320 L. Toyota Kijang Innova 2.4 Q M/T Tahun 2016	Kepolisian Resor Bukittinggi	9 Januari 2017	024/01/BK/I-2017	5 Tahun	9 Januari 2017 s/d 8 Januari 2022
8	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1755 L (Eks.BA.58L). Toyota Avanza 1500 S Tahun 2008	Kejaksaan Negeri Bukittinggi	18 Februari 2019	030/02/PERJ.PP/BK.06/2019 B.323/N.3.11/CP.1/02/2019	5 Tahun	18 Februari 2019 s/d 18 Februari 2024
9	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1048 L. Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T Tahun 2019	Lembaga Permayarakatan Klas IIA Bukittinggi	27 March 2019	030/03/PERJ.PP/BK.06/2019 W3.PAS.02.UM.01.01-57	5 Tahun	27 Maret 2019 s/d 26 Maret 2024
10	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1567 L. Toyota Fortuner Tahun 2013	Kejaksaan Negeri Bukittinggi	10 September 2020	020/240/Umper/II-2020 B-1254/L.3.11/Cpl/9/2020	5 Tahun	10 Sept 2020 s/d 09 September 2025
11	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1121 L. Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T Tahun 2019	Pengadilan Agama Bukittinggi Klas I.B	10 September 2020	020/238/Umper/II-2020 W3.A42335/PL.01/II-2019	5 Tahun	10 Sept 2020 s/d 09 September 2025
12	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1123 L. 2. Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T VIN 2019	Kodim 0304 / Agam	10 September 2020	020/239/Umper/II-2020 B/983/XI/2020	3 Tahun 8 Bulan	10 Sept 2020 s/d 09 September 2025

## 5.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Tahun 2022

Tahun 2021

Rp

Rp

1.004.338.760.735,96

960.588.776.351,51

Nilai Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp960.588.776.351,51. Selama Tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp53.318.466.659,58 dan pengurangan sebesar Rp9.568.482.275,13 sehingga saldo akhir Tahun 2022 adalah Rp1.004.338.760.735,96 yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

Tabel 5.3.26 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Akron/Rekening	Uraian	Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
-----	----------------	--------	-----------------------------	-----------------------------

879

	13.03	Gedung dan Bangunan	960.588.776.351,51	1.004.338.760.735,96
1	13.03.01	Bangunan Gedung	923.139.876.774,58	964.346.610.510,87
2	13.03.02	Monumen	27.307.393.155,19	27.307.393.155,19
3	13.03.03	Bangunan Menara	115.989.000,00	115.989.000,00
4	13.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.025.517.421,74	12.568.768.069,90

Sementara mutasi dari saldo awal 2022 sampai saldo akhir 2022 dapat dilihat pada uraian berikut ini:

<b>Saldo Awal 1 Januari 2022</b>	<b>960.588.776.351,51</b>
<b>Penambahan karena :</b>	
Belanja Modal (LRA)	25.739.508.574,06
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	237.391.119,00
Mutasi dari SKPD Lain (BAST)	984.016.400,00
Hibah dari pihak ke 3	-
Koreksi Pencatatan	122.472.000,00
Reklas Antar Kelompok Barang (Masuk)	26.235.078.566,52
Hasil Penilaian Kurang Catat	0,00
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>53.318.466.659,58</b>
<b>Pengurangan karena:</b>	
Penghapusan berdasarkan SK Wako	1.344.627.262,89
Mutasi ke SKPD Lain (BAST)	784.236.400,00
Koreksi Pencatatan	607.528.539,13
Reklas Antar Kelompok Barang (Keluar)	6.375.678.982,41
Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi (Ekstrakomptabel)	8.436.000,00
Belanja Modal Reklas ke Gol. Lain (Pemeliharaan)	447.975.090,70
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>9.568.482.275,13</b>
<b>Saldo akhir per 31 Desember 2022</b>	<b>1.004.338.760.735,96</b>

#### I. Penambahan pada Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan dari Belanja Modal (LRA) Gedung dan Bangunan sebesar Rp 25.739.508.574,06 dengan rincian sebagai berikut :
  - Sekretariat DPRD sebesar Rp1.004.818.618,00.
  - Sekretariat Daerah sebesar Rp442.019.036,24.
  - Dinas PUPR sebesar Rp462.653.076,96.
  - Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp389.359.795,20.
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp11.386.623.678,99.

- Dinas Kesehatan sebesar Rp4.181.408.497,00.
  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp169.587.935,76.
  - Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp55.997.420,23.
  - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp2.711.216.547,96.
  - Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Rp35.655.675,74.
  - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2.711.559.773,65.
  - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.949.430.498,69.
  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp88.511.155,00.
  - Kecamatan ABTB sebesar Rp79.070.288,00.
  - Kecamatan MKS sebesar Rp71.596.576,64.
2. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp237.391.119,00 berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, dimana pada Rekening APBD berupa belanja Barang dan Jasa (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Jasa Konsultasi (Perencanaan) tetapi dalam realisasi belanjanya berupa Gedung Pertokoan Koperasi/ Pasar Permanen.
3. Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Mutasi SKPD lain sebesar Rp984.016.400,00 yang terdiri dari:
- Dinas Kesehatan sebesar Rp670.200.400,00 yang berasal dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja berupa Gedung Kantor.
  - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp199.780.000,00 berupa Kios Inpres Pasar Bawah.
  - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp114,036,000.00 berupa mutasi dari Pengelola berupa Bangunan Rumah Makan Family Benteng.
4. Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari mutasi antar rekening dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Dinas PUPR sebesar Rp1.415.180.236,00 yang berasal dari belanja Jalan Irigasi dan Jaringan
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp20.608.696.424,14 yang berasal dari Kontruksi Dalam Pengerjaan tahun 2021 yang telah selesai pengerjaannya.
  - Dinas Kesehatan sebesar Rp130.724.129,14 berasal dari Belanja Peralatan dan Mesin yang pindah ke Gedung dan Bangunan berupa Partisi Ruangan Gedung.
  - Dinas Lingkungan Hidup Rp76.101.520,00 berasal dari rekening Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021 yang telah selesai pengerjaannya di Tahun 2022.
  - Kecamatan MKS sebesar Rp4.004.376.257,41 berasal dari rekening Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2021 yang telah selesai pengerjaannya di Tahun 2022.

**II. Pengurangan pada Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:**

1. Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan berasal dari Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan pada SKPD yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp284.079.310,00 yang berasal dari penghapusan Gedung dan Bangunan pada SMPN 4 Kota Bukittinggi.
  - Dinas Kesehatan sebesar Rp608.023.942,00 yang berasal dari Penghapusan Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.
  - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp118,288,431.00 berupa penghapusan berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen karena sebab kebakaran.
  - Kecamatan Guguk Panjang sebesar Rp334.235.579,89 berupa penghapusan Gedung Kerja Kantor karena bencana kebakaran yang terjadi pada April Tahun 2022.
2. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan karena Mutasi ke SKPD lain dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp670.200.400,00 berupa Gedung Kerja Kantor yang dimutasikan ke Dinas Kesehatan.
  - Pengelola sebesar Rp114.036.000,00 berupa aset Rumah Makan Family Benteng yang dimutasikan ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
3. Pengurangan karena reklas antar kelompok barang (keluar) sebesar Rp6.375.678.982,41 merupakan mutasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Rekening lainnya berupa:
  - Dinas PUPR sebesar Rp391.792.300,75 berupa Pengadaan Gedung dan Bangunan yang menjadi KDP di tahun berjalan.
  - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp.5.994.000,00 berupa teralis.
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp198,804,103.99 berupa Pengadaan Gedung dan Bangunan yang belum selesai pengerjaannya.
  - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp2,724,184,551.96 berupa Pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Stasiun) ke KDP karena belum selesai pengerjaannya.
  - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp35,655,675.74 berupa Belanja Perencanaan Pembangunan Gedung Prasarana Pertanian yang reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.
  - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 2,487,678,061.97 berupa Pengadaan
    - a. DED Sport Hall Rp76.372.656,00.
    - b. Revitalisasi benteng Fort de Kock Rp2.202.318.277,80.
    - c. Pembuatan Gerbang Geopark Sianok Maninjau Rp208.978.128,15.

819

- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp452.500.000,00 berupa Pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang reklas ke Peralatan dan Mesin berupa:
    - a. Alat-alat Besar sebesar Rp370.000.000,00.
    - b. Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp3.500.000,00.
    - c. Alat Laboratorium sebesar Rp54.000.000,00.
    - d. Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp25.000.000,00.
  - Kecamatan ABTB sebesar Rp79.070.288,00 berupa Pengadaan Gedung dan Bangunan yang reklas ke KDP (DED Kantor Lurah Ladang Cakiah).
4. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal menjadi Aset Ekstrakomtabel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp8.436.000,00 berupa belanja pagar beton.
5. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Modal menjadi Pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Sekretariat Daerah sebesar Rp216.758.025,00 berupa Belanja Modal menjadi pemeliharaan karena realisasi Belanja berupa pemeliharaan/rehab Gedung Kantor yang sifatnya tidak menambah nilai Gedung Kantor tersebut.
  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp169.587.935,76 berupa Belanja Modal menjadi pemeliharaan/rehab Gedung Kantor yang sifatnya tidak menambah nilai Gedung Kantor.
  - Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebesar Rp61.629.129,94 berupa Belanja Modal pada APBD menjadi Pemeliharaan/rehab Gedung Kantor yang sifatnya tidak menambah nilai Gedung Kantor.

<b>5.3.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	672.744.182.570,34	623.922.585.555,15

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp623.922.585.555,15. Selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp55.307.802.355,83 dan pengurangan sebesar Rp6.486.205.340,64 sehingga saldo akhir Tahun 2022 adalah Rp672.744.182.570,34 yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

<b>Saldo Awal 1 Januari 2022</b>	<b>Rp</b>
623.922.585.555,15	
<b>Mutasi bertambah:</b>	
- Belanja Modal (LRA)	<b>Rp</b>
45.500.951.384,50	



- Mutasi dari SKPD lain	Rp.	-
- Hibah dari pihak ke 3	Rp.	-
- Reklas Antar Kelompok Barang	Rp.	
9.806.850.971,33		
- Hasil Penilaian Kurang Catat	Rp-	
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>Rp.</b>	
<b>55.307.802.355,83</b>		
<b>Mutasi berkurang:</b>		
- Mutasi ke SKPD lain	Rp.	-
- Korcksi Pencatatan	Rp.	
4.617.365.958,64		
- Reklas Antar Kelompok Barang	Rp.	
1.868.839.382,00		
- Belanja Modal Reklas ke Gol. Lain (Persediaan/Pemeliharaan)		
<b>Jumlah Mutasi berkurang</b>	<b><u>Rp.</u></b>	
<b>6.486.205.340,64</b>		
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp.</b>	<b>672.744.182.570,34</b>

Rincian Penambahan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Pemko Bukittinggi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Reklas Antar Kelompok rekening Barang.

Penambahan Aset JIJ dari reklas antar kelompok barang merupakan pengelompokan kembali yang berasal dari Belanja Modal selain Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD, rincian penambahannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas PUPR sebesar Rp9.019.263.931,33 yang berasal dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2021 yang telah selesai pengerjaannya pada Tahun 2022.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp38.981.040,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2021 yang telah selesai pengerjaannya pada Tahun 2022.
- Dinas Kesehatan sebesar Rp733.606.000,00 berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada DPA SKPD berupa Belanja IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang reklas ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- Dinas Kebakaran Rp15.000.000,00 berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa pengadaan Sumur Bor.

2. Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan berasal dari Reklas Antar Kelompok Barang

Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.868.839.382,00 berasal dari Reklas Antar Kelompok Barang yang merupakan pengurangan Aset JIJ disebabkan oleh pengelompokan kembali sesuai dengan klasifikasi jenis rekening Asetnya.

-Dinas PUPR sebesar Rp1.600.569.661,00 berupa belanja Jalan Irigasi dan Jaringan pada APBD yang reklas ke Aset Gedung dan Bangunan.

-Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp242.832.161,00 berupa Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang pindah ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.

-Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp25.437.560,00 berupa Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang pindah ke KDP sebesar Rp17.422.560,00 serta Rp8.015.000,00 yang pindah ke aset Peralatan dan Mesin berupa belanja Papan Pengumuan dan Mesin Pompa Air.

3. Pengurangan aset Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Koreksi Pencatatan

Pengurangan aset Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Koreksi Pencatatan dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

-Dinas PUPR sebesar Rp 4.613.215.958,64 merupakan koreksi pencatatan dari belanja Jalan irigasi dan jaringan ke pembayaran hutang drainase Tahun 2021.

-Dinas Kebakaran sebesar Rp4.150.000,00 berupa koreksi pencatatan dari belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin berupa Tandon Air dan Mesin Pompa Air.

Sedangkan rincian Aset Tetap kelompok Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada daftar di bawah ini:

Tabel 5.3.27 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Rekening	Uraian	Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
	<b>1.3.04</b>	<b>Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>623.922.585.555,15</b>	<b>672.744.182.570,34</b>
<b>A</b>	<b>1.3.04.01</b>	<b>Jalan dan Jembatan</b>	<b>433.592.541.953,21</b>	<b>454.595.038.174,60</b>
1	1.3.04.01.01	Jalan	418.340.541.659,76	438.715.818.322,56
2	1.3.04.01.02	Jembatan	15.252.000.293,45	15.879.219.852,04
<b>B</b>	<b>1.3.04.02</b>	<b>Bangunan Air</b>	<b>163.755.568.900,84</b>	<b>189.690.811.439,18</b>
1	1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	45.390.973.534,04	48.249.393.441,50
2	1.3.04.02.02	Bangunan Pengaliran Pasang Surut	9.663.585.164,19	9.663.585.164,19
3	1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	69.457.878.494,62	90.702.148.062,95
4	1.3.04.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.839.049.000,00	1.839.049.000,00
5	1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	14.723.178.612,67	14.723.178.612,67
6	1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor	22.680.904.095,32	24.513.457.157,87
<b>C</b>	<b>1.3.04.03</b>	<b>Instalasi</b>	<b>5.078.071.716,71</b>	<b>6.660.709.516,71</b>
1	1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.183.591.606,03	2.274.001.606,03
2	1.3.04.03.02	Instalasi Air Kotor	2.841.135.110,68	3.574.741.110,68
3	1.3.04.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	-	758.621.800,00
4	1.3.04.03.09	Instalasi Pengaman	53.345.000,00	53.345.000,00
<b>D</b>	<b>1.3.04.04</b>	<b>Jaringan</b>	<b>21.496.402.984,39</b>	<b>21.797.623.439,85</b>
1	1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	6.293.363.054,00	6.293.363.054,00

8/9

2	1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	15.203.039.930,39	15.504.260.385,85
---	--------------	------------------	-------------------	-------------------

<b>5.3.1.2.5 Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>31.169.875.091,80</b>	<b>30.677.779.197,80</b>

Nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp30.677.779.197,80. Selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp4.716.903.366,00 dan pengurangan sebesar Rp4.224.807.472,00 sehingga saldo akhir Tahun 2022 adalah Rp31.169.875.091,80 dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

<b>Saldo Awal 1 Januari 2022</b>	<b>Rp 30.677.779.197,80</b>
<b>Mutasi bertambah:</b>	
- Belanja Modal (LRA)	Rp 4.633.690.566,00
- Kapitalisasi dari barang dan jasa	Rp 64.789.900,00
- Koreksi pencatatan	Rp 18.422.900,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>Rp 4.716.903.366,00</b>
<b>Mutasi berkurang:</b>	
- Penghapusan berdasarkan SK Wako	Rp 123.926.876,00
- Koreksi Pencatatan	Rp 106.862.900,00
- Reklas Keluar antar kelompok barang	Rp 3.347.752.546,00
- Belanja Modal tidak kapitalisasi	Rp 295.104.970,00
- Belanja Modal reklas ke Persediaan	Rp 306.695.800,00
- Belanja Modal Aset tidak berwujud	Rp. 44.464.380,00
<b>Jumlah Mutasi berkurang</b>	<b><u>Rp 4.224.807.472,00</u></b>
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 31.169.875.091,80</b>

Untuk Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya Pemko Bukittinggi dapat dijelaskan sebagai berikut;

- I. Penambahan aset dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp64.789.900,00 terdapat pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Alat Praktek Sekolah Bidang Kesenian dan Bahan Perpustakaan Tercetak (Buku-buku).
- II. Penambahan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp18.422.900,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak (Buku-buku).

Untuk rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- I. Penghapusan berdasarkan SK Walikota sebesar Rp123.926.876,00 terdapat pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD SMPN 5 Bukittinggi berupa Bahan Perpustakaan Tercetak (Buku-buku).
- II. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp106.862.900,00 terdapat pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga serta Alat Peraga Praktek Sekolah.
- III. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklas Antar Kelompok Barang sebesar Rp3.347.752.546,00 merupakan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya pada DPA SKPD yang reklas menjadi Aset Peralatan dan Mesin pada Rekening BMD, yang terdiri dari:
  1. Sekretariat Daerah sebesar Rp3.014.849.546,00 berupa Belanja Aset Tetap Lainnya pada DPA SKPD yang Reklas ke Peralatan Mesin pada rekening BMD.
    - Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor/ Belanja Modal Audio Visual/Video Wall sebesar Rp999.950.604,00
    - Pengadaan Belanja Modal Audio Visual berupa Voice Recorder sebesar Rp2.997.000,00
    - Pengadaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah/Belanja Modal Audio Visual/ Videotron sebesar Rp1.996.916.942,00
    - Pengadaan Alat Rumah Tangga berupa Televisi sebesar Rp14.985.000,00
  2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp173.745.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga dan serta Alat Peraga Praktek Sekolah.
  3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp12,500,000.00 berupa pengadaan Alat Kantor Lainnya/LCD Proyektor.
  4. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp97,785,000.00 merupakan Belanja Aset Tetap Lainnya pada DPA SKPD yang reklas ke Aset Tidak Berwujud pada rekening BMD berupa pengadaan Software Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2022.
  5. Dinas Pariwisata dan Olahraga sebesar Rp12,745,000.00 berupa Pengadaan Layar dan Infocus yang reklas ke Peralatan dan Mesin.
  6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp3.000.000,00 berupa pengadaan Voice Recorder.
  7. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebesar Rp33,128,000.00 berupa Pengadaan Infocus dan Televisi yang reklas ke Peralatan dan Mesin.
- IV. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal yang reklas ke Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp295.104.970,00 merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang nilainya dibawah Rp50.000,00/pcs serta dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

8 19

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp282.798.800,00 berupa Bahan Perpustakaan tercetak.
  - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp950.000,00 berupa Hewan Peliharaan
  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp 11.356.170,00 berupa Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya (buku)
- V. Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Modal reklas ke Persediaan sebesar Rp306.695.800,00 terdapat pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak/ Buku Fokus. Buku tersebut reklas ke Persediaan karena usia penggunaan/pemakaian untuk siswa tidak lebih dari 1 Tahun.
- VI. Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp44.464.380,00 berupa Belanja Aset Tetap Lainnya yang reklas ke Aset Tidak Berwujud terdapat pada SKPD:
- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp24.420.000,00 berupa Pengadaan Software Aplikasi SIMOTA.
  - Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp8.944.380,00 berasal dari Belanja Aset Tetap lainnya yang reklas ke Aset Tidak Berwujud berupa Belanja Lisensi dan *Franchise*.
  - Dinas Kesehatan sebesar Rp11.100.000,00 berasal dari Belanja Aset Tetap Lainnya yang reklas ke Aset Tidak Berwujud berupa Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan – SDK.

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3.28 Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

No.	Akun/ Rekening	Uraian	Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
	1.3.05	Aset Tetap Lainnya	30.677.779.197,80	31.169.875.091,80
A	1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	18.231.523.815,80	18.850.089.709,80
1	1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan tercetak	17.621.750.380,80	18.206.528.984,80
2	1.3.05.01.02	Bahan Perpustakaan Terakan dan Bentuk Mikro	214.856.000,00	248.643.290,00
3	1.3.05.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	389.460.435,00	389.460.435,00
4	1.3.05.01.05	Karya Grafika (Graphic Material)	5.457.000,00	5.457.000,00
B	1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	2.172.089.735,00	2.003.344.735,00
1	1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	1.414.659.985,00	1.240.914.985,00
2	1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	756.347.750,00	761.347.750,00
3	1.3.05.02.03	Tanda Penghargaan	1.082.000,00	1.082.000,00
C	1.3.05.03	Hewan	1.321.638.000,00	1.363.913.000,00
1	1.3.05.03.01	Hewan Piaraan	1.321.638.000,00	1.363.913.000,00
D	1.3.05.04	Biota Perairan	14.778.667,00	14.778.667,00
1	1.3.05.04.01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	14.778.667,00	14.778.667,00
E	1.3.05.05	Tanaman	23.484.500,00	23.484.500,00
1	1.3.05.05.01	Tanaman	23.484.500,00	23.484.500,00
F	1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	8.914.264.480,00	8.914.264.480,00
1	1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	8.914.264.480,00	8.914.264.480,00

G	1.3.05.88	Aset Tetap Lainnya BOS	-	-
1	1.3.05.88.01	Aset Tetap Lainnya BOS	-	-

<b>5.3.1.2.6</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
		<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
		<b>37.618.883.121,17</b>	<b>65.149.630.115,64</b>

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp65.149.630.115,64. Selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp6.362.829.128,41 dan pengurangan sebesar Rp33.893.576.122,88 sehingga saldo akhir Tahun 2022 adalah Rp37.618.883.121,17 yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

<b>Saldo Awal 1 Januari 2022</b>	<b>Rp 65.149.630.115,64</b>
<b>Mutasi bertambah:</b>	
- Reklas Antar Kelompok Barang (masuk)	Rp. 6.362.829.128,41
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b><u>Rp. 6.362.829.128,41</u></b>
<b>Mutasi berkurang:</b>	
- Koreksi pencatatan	Rp 103.990.740,00
- Reklas antar kelompok barang	Rp 33.703.721.332,88
- Belanja Modal tidak kapitalisasi	Rp 85.964.050,00
<b>Jumlah Mutasi berkurang</b>	<b><u>Rp 33.893.576.122,88</u></b>
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 37.618.883.121,17</b>

Rincian terhadap Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat jelaskan sebagai berikut:

- I. Penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklas Antar Kelompok Barang sebesar Rp6.362.829.128,41 merupakan penambahan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang pengerjaannya belum selesai di tahun berjalan. Adapun rincian SKPD nya sebagai berikut:
  - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp2,724,184,551.96 merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang pengerjaannya belum selesai.
  - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp35,655,675.74 berupa Perencanaan Pembangunan Gedung Prasarana Pertanian.
  - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2,505,100,621.97 berupa Pengadaan Gedung dan Bangunan serta Jalan Pedestrian (Perencanaan) yang belum selesai pengerjaannya.
  - Kecamatan ABTB sebesar Rp 79,070,288.00 berupa Pengadaan Gedung dan Bangunan (DED Kantor Lurah Ladang Cakiah).

- Dinas PUPR sebesar Rp 577,181,725.75 berupa Pengadaan Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan Jaringan yg belum selesai pengerjaannya.
  - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp 242,832,161.00 berasal dari Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang belum selesai pengerjaannya di Tahun 2022 berupa peningkatan Jalan Komplek dan Pembuatan Saluran Pembuangan air.
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 198,804,103.99 berupa Pengadaan Gedung dan Bangunan yang belum selesai pengerjaannya.
- II. Pengurangan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp33.893.576.122,88 merupakan penyelesaian pekerjaan fisik Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan terhadap KDP tahun sebelumnya, berikut rincian dan Penjelasannya:
1. Pengurangan Koreksi Pencatatan sebesar Rp103.990.740,00 terdiri dari SKPD:
    - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp 38,981,040.00 berupa penyelesaian pekerjaan Jalan Irigasi dan Jaringan (pengawasan) yang menjadi KDP tahun lalu.
    - Dinas Perhubungan sebesar Rp65.009,700.00 berupa pengadaan rambu-rambu lalu lintas Tahun 2022 yang menjadi KDP tahun lalu.
  2. Pengurangan dari reklas antar kelompok barang sebesar Rp33.703.721.332,88 terdiri dari SKPD:
    - Dinas PUPR sebesar Rp9,019,263,931.33 berupa Penyelesaian Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan terhadap KDP tahun 2020 dan 2021.
    - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp20,603,979,624.14 berupa Penyelesaian pekerjaan Gedung dan Bangunan SMPN 1, SDN 04 Garegeh serta SDN 02 Percontohan dan SDN 16 Campago Ipuh.
    - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp76,101,520.00 berupa Perencanaan Pembangunan Gedung PDU tahun 2021.
    - Kecamatan MKS sebesar Rp4,004,376,257.41 berupa penyelesaian pekerjaan Gedung dan Bangunan kelurahan Manggis Ganting.
  3. Pengurangan dari Belanja Modal Non Kapitalisasi sebesar Rp85.864.050,00 pada Dinas PUPR yang merupakan reklas ke belanja jasa Konsultasi Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2022.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.29 Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Akun/ Rekening	Uraian	Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
----	-------------------	--------	--------------------------------	--------------------------------

	1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	65.149.630.115,64	37.618.883.121,17
A	1.3.06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	65.149.630.115,64	37.618.883.121,17
1	1.3.06.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	1.732.477.226,84	-
2	1.3.06.01.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	-	18.574.200,00
3	1.3.06.01.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	51.859.020.691,28	35.244.198.442,13
4	1.3.06.01.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.054.575.354,37	2.356.110.479,04
5	1.3.06.01.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya	483.556.843,15	-

5.3.1.2.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Tahun 2022 Rp (863.023.432.720)	Tahun 2021 Rp (784.029.504.007,37)
-----------	---------------------------------	---------------------------------------	--

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2021 adalah (Rp784.029.504.007,37) Selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar (Rp84.468.710.604) dan pengurangan sebesar (Rp5.474.781.892,00) sehingga saldo akhir Tahun 2022 adalah (Rp863.023.432.720) yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

**Saldo Awal**

**Mutasi bertambah:**

- Beban	Rp	(82.397.181.834)
- Mutasi Masuk	Rp	(2.032.193.929)
- Reklas masuk		
- Koreksi susut	Rp	(193.334)
- Koreksi	Rp	(7)
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>Rp</b>	<b>(84.468.710.604)</b>

**Mutasi berkurang:**

- Penghapusan	Rp	2.215.529.234
- Ubah Kondisi	Rp	1.187.723.809
- Mutasi	Rp	2.032.193.939
- Reklas	Rp	39.141.500
- Koreksi	Rp	193.333
- koreksi susut	Rp	77
<b>Jumlah Mutasi berkurang</b>	<b>Rp</b>	<b>5.474.781.892</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>(863.023.432.720)</b>



Rincian akumulasi penyusutan per jenis dan objek akun dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.3.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Akun/ Rekening	Uraian	Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
	<b>1.3.07</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(784.029.504.007,37)</b>	<b>(863.023.432.720)</b>
<b>A</b>	<b>1.3.07.01</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(228.962.018.808,00)</b>	<b>(265.475.485.595)</b>
1	1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(10.273.317.020,00)	(12.129.529.334)
2	1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(66.342.543.566,00)	(70.852.288.832)
3	1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(1.137.028.203,00)	(1.151.158.898)
4	1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(805.731.854,00)	(824.616.554)
5	1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(70.672.199.235,50)	(78.140.358.339)
6	1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(3.792.437.209,00)	(5.090.909.116)
7	1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(15.216.432.346,00)	(22.579.429.260)
8	1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(12.297.342.079,00)	(14.551.085.510)
	1.3.07.01.09	Akumulasi penyusutan Alat perenjatan		(175.670.000)
9	1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(42.643.699.108,50)	(49.810.325.876)
10	1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(1.147.518.034,00)	(1.348.607.295)
11	1.3.07.01.17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi		(260.417)
12	1.3.07.01.18	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(4.078.403.716,00)	(8.198.315.727)
13	1.3.07.01.19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(555.366.437,00)	(622.931.497)
<b>B</b>	<b>1.3.07.02</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(133.560.697.132,01)</b>	<b>(151.492.871.584)</b>
1	1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(125.843.643.388,01)	(143.015.579.276)
2	1.3.07.02.02	Akumulasi Penyusutan Monumen	(6.982.062.993,00)	(7.535.859.884)
3	1.3.07.02.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	(34.796.700,00)	(37.696.425)
4	1.3.07.02.04	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(700.192.051,00)	(903.736.049)
<b>C</b>	<b>1.3.07.03</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan.</b>	<b>(421.506.788.967,36)</b>	<b>(446.055.074.541)</b>
1	1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(346.976.840.749,65)	(364.564.493.735)
2	1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(68.893.096.132,71)	(75.092.717.243)
3	1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(1.162.810.039,00)	(1.333.340.104)
4	1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(4.474.041.146,00)	(5.064.523.459)

<b>5.3.1.5. ASET LAINNYA</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>21.758.833.807,00</b>	<b>22.358.975.351,00</b>

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp21.758.833.807,00 dan Rp22.358.975.351,00. Rincian aset lainnya dapat dilihat diuraikan sebagai berikut:

<b>5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang-</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>56.959.498,00</b>	<b>48.400.533,00</b>

Pada Pemerintah Kota Bukittinggi, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah Tagihan Jangka Panjang atas tuntutan ganti kerugian daerah oleh Bendahara SKPD, Bendahara BOS dan non bendahara, yang sampai saat ini belum selesai.

Nilai Tagihan Jangka Panjang dari kejadian tersebut per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp56.959.458,00 dan Rp48.400.533,00, artinya terdapat penambahan di tahun 2022 sebesar 8.558.965,00. Tagihan tersebut merupakan utang TGR atas 2 (dua) orang Bendahara SKPD dan 1 (satu) orang Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ketiganya meninggal dalam masa tugas jadi bendahara. Juga terdapat kelebihan pembayaran SPPD tahun 2017 pada Sekretariat Daerah yang belum diselesaikan sampai dengan tahun 2022. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3.47 Mutasi Tagihan Jangka Panjang Tahun 2022

NO.	SKPD	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	Dinas Kebakaran	2.431.169,00	-	-	2.431.169,00
2	Sekretariat Daerah	25.000,00	-	-	225.000,00
3	BAPPEDA	45.744.364,00			45.744.364,00
4	Dinas Pendidikan	0,00	8.558.965,00	-	8.558.965,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>48.400.533,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56.959.498,00</b>

Pada tahun 2022 Bendahara BOS SD N 12 Puhun Pintu Kabun meninggal dunia sehingga terdapat sisa kas tunai yang belum diselesaikan sebesar Rp8.558.965,00. Jumlah ini merupakan sisa dari nilai uang yang tertera pada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak suami almarhumah sebagai ahli waris dengan SKTJM tertanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp20.962.140,00. Bersamaan dengan SKTJM tersebut ahli waris menyertakan jaminan berupa BPKB 1 (satu) uni sepeda motor dan BPKB 1 (satu) unit Mobil.

## 5.3.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tahun 2022  
(Rp)

16.246.002.000,00

Tahun 2021  
(Rp)

16.360.038.000,00

Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan kerjasama dengan pihak ketiga berupa kerjasama operasi. Nilai kerja sama operasi Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.246.002.000,00 yang terdiri dari:

## 5.3.2.4.2.1 Bangun Guna Serah

Tahun 2022  
(Rp)

16.246.002.000,00

Tahun 2021  
(Rp)

16.246.002.000,00

Pemerintah Kota Bukittinggi mempunyai beberapa Aset Tanah yang telah dilakukan kerjasama Pemanfaatan Aset dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) sebagaimana yang tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022 dan tahun 2021 adalah senilai Rp16.246.002.000,00. Aset tanah tersebut tercatat pada Pengelola Barang Pemerintah Kota Bukittinggi dengan status tanah Hak Pengelolaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.48 Aset Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah dilaksanakan Kerjasama Pemanfaatan Aset Dalam Bentuk Bangun Guna Serah (BGS)

No	Nama Pemegang Hak	Pengembang	Aset Tanah Yang Dikerjasama	Asal Usul	Letak/ Alamat	Luas (m2)	Nilai (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi	PT. RANAH GARUDA MINANG	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.1/TD	Tanah Negara	Pertokoan Pasar Simpang Aur Kel.Tarok Dipo Kec. GGP	1153	345.900.000	
2	Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi	PT. RANAH GARUDA MINANG	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.2/TD	Tanah Negara	Pertokoan Pasar Simpang Aur Kel.Tarok Dipo Kec. GGP	1248	11.004.749.000	
3	Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi	PT. RANAH GARUDA MINANG	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.3/TD	Tanah Negara	Pertokoan Pasar Simpang Aur Kel.Tarok Dipo Kec. GGP	1183	354.900.000	
4	Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi	PT INKORBA	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.4/TD: No 5/TD	Tanah Negara	Pertokoan Pasar Simpang Aur Kel.Tarok Dipo Kec. GGP	774	232.200.000	
5	Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi	PT.SUMAJAYA	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No 5/TD : No 6/TD	Tanah Negara	Pertokoan Pasar Simpang Aur Kel.Tarok Dipo Kec. GGP	558	111.600.000	
6	Pemerintah Kota Bukittinggi	Pertokoan Pasar Bunto	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No2/ATTS	Tanah Negara	Kel.ATTS Kec. GP	7484	4.196.653.000	
Jumlah...								16.246.002.000

Berdasarkan tabel diatas, ada 5 (lima) buah Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah dikerjasama dengan Pihak Ketiga yang berlokasi pada Pertokoan Pasar

Simpang Aur Kelurahan Tarok Dipo yang dituangkan dalam 5 (lima) buah perjanjian kerjasama dengan PT. Ranah Garuda Minang (PT. RGM), PT. Inkorba dan PT. Suma Jaya. Kelima perjanjian kerjasama tersebut merupakan kerjasama pemanfaatan Aset tanah Pemerintah Kota Bukittinggi dengan nilai aset sebesar Rp12.049.349.000,00.

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Pihak Ketiga tersebut untuk membangun 5 (lima) Blok Bangunan Ruko pada Pertokoan Pasar Simpang Aur yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun. Untuk 5 (lima) Blok Bangunan Ruko telah diterbitkan 5 (lima) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Induk atas nama PT. RGM 3 (tiga) Buah Sertifikat HGB, PT. Inkorba 1 (satu) Buah Sertifikat HGB dan PT. Suma Jaya 1 (satu) Buah Sertifikat HGB dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.49 Daftar Kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Pihak Ketiga di Pertokoan Pasar Simpang Aur**

No	Nama Pemegang Hak	Pengembang	Perjanjian	Aset Tanah Yang Dikerja samakan	Luas (m2)	Nilai (Rp.)	HGB Indak	Jumlah HGB Pecahan
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi	PT. RANAH GARUDA MINANG	1946/0-VI/1983 tgl. 15 Maret 1983	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.1/TD	1153	345.900.000	HGB No.9 GS no.465/1983	15
2	Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi	PT. RANAH GARUDA MINANG	1946/0-VI/1983 Tgl. 15 Maret 1983	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.2/TD	1246	11.004.749.000	HGB No.8 GS No.466/1983	14
3	Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi	PT. RANAH GARUDA MINANG	1946/0-VI/1983 Tgl.15 Maret 1983	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.3/TD	1183	354.900.000	HGB No.7 GS NO.483/1983	23
4	Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi	PT INKORBA	Tgl. 12 Maret 1987	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.4/TD: No 5/TD	774	232.200.000	HGB No.65 GS No.65/1987	16
5	Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi	PT.SUMAJAYA	01/PRJ/1985 Tgl.30 Desember 1985	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.5/TD : No 6/TD	558	111.600.000	HGB No.82 GS No.187/1987	8
Jumlah						12.049.349.000		76

Terhadap Bangunan Ruko yang dibangun tersebut, Pihak Ketiga menjualnya kepada Pedagang dan terhadap masing-masing ruko dikeluarkan Sertifikat HGB sebagai pecahan dari HGB Induk. Sertifikat HGB yang dikeluarkan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) buah Sertifikat HGB atas nama pedagang. Ketujuh puluh enam Sertifikat HGB diatas HPL pada Pertokoan Pasar Simpang Aur tersebut sebagai berikut:

**Tabel 5.3.50 Daftar Pemegang Sertifikat HGB diatas HPL di Pertokoan Pasar Simpang Aur**

No.	Nama Pemegang Hak	Alamat Objek HGB	No. Sertifikat HGB	No. Sertifikat HPL
1	2	3	4	5
1	PT.Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	156	1
2	H Yoni Agusti,SH;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln.Diponegoro 1 Bukittinggi	142	1
3	Andri Sukma Jaya;	Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi	166	1

No.	Nama Pemegang Hak	Ahmad Objek HGB	No. Sertifikat HGB	No. Sertifikat HPL
1	2	3	4	5
4	Asweti;	Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi	139	1
5	Desnawati	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	146	1
6	Asweti	Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi	140	1
7	H Syofyan;	Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi	171	1
8	PT.Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Diponegoro 04 Bukittinggi	158	1
9	Hendry;	Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi	138	1
10	A.DT.Bahah;	Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi	181	1
11	Hj.Suwarni,Ir.Herrizon Anton, Zainal,Syasil Zainal,H.Afris.E,Susi Sandra,Witra	Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi	145	1
12	Enita Tjastja;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	194	1
13	H.Baiyar;	Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi	143	1
14	H.Yemriani;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln.Diponegoro 2 Bukittinggi	167	1
15	Zahara	Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi	141	1
16	H.Zakaria;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	169	2
17	Yasman;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	148	2
18	H.Telvi Robbel,SH;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Diponegoro Bukittinggi	190	2
19	Delwinda Nofa;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	209	2
20	1.Yunaidi Amir,St Marajo; 2.Ainil Mardiah.	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Diponegoro Bukittinggi	180	2
21	PT.Ranah Garuda Minang;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	159	2
22	Romi Ardiansyah;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	208	2
23	1.Yusneli; 2.Efendi	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	205	2
24	Fadlan Arynda Haviz;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	151	2
25	Haviz Dt.Manindih;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	195	2
26	Haviz Dt.Manindih;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	150	2
27	Haviz Dt.Manindih;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	149	2
28	PT.Ranah Garuda Minang.	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Diponegoro Bukittinggi	157	2
29	PT.Ranah Garuda Minang.	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Diponegoro Bukittinggi	155	2
30	H.Yoni Agusti,SH.	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	172	3
31	H.Muhammad Ikhwan	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	197	3
32	Marshall Mansyur	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	211	3
33	Marshall Mansyur	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	212	3
34	H.Muslim;	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	179	3
35	Amiza;	Pertokoan Simpang Aur Blok O Bukittinggi	207	3
36	Yarlis;	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	206	3
37	H.Ratinis St Mudo	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 5, Bukittinggi	165	3
38	H.Asrizal Ahmad;	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 4, Bukittinggi	178	3
39	Guswir;	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 3, Bukittinggi	210	3
40	H.Em Mirfal Effendi;	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 2, Bukittinggi	168	3
41	H.Em Mirfal Effendi;	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 1, Bukittinggi	170	3
42	Haji Daeril;	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	147	3
43	PT.Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	160	3

No.	Nama Pemegang Hak	Alamat Objek HGB	No. Sertifikat HGB	No. Sertifikat HPL
1	2	3	4	5
44	PT.Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	161	3
45	PT.Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	162	3
46	PT.Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	163	3
47	PT.Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Simpang Aur Dalam Bukittinggi	164	3
48	Chaiyar	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln.Auri 10 Bukittinggi	130	3
49	Rosmanidar	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 9 Bukittinggi	131	3
50	H. Yoni Syafril SH	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 7 Bukittinggi	132	3
51	H. ASWIR	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 8 Bukittinggi	133	3
52	Haji Ruslami Rasyid Datuak Sati;	Pertokoan Simpang Aur Blok O Bukittinggi	144;	3
53	Muhammad Habi; Ahmad Fadli;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl.Diponegoro 16 Tarok Dipo Bukittinggi	176	5
54	Alibar Nain	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl.Diponegoro 14 Tarok Dipo Bukittinggi	189	5
55	Emnizal	Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi	173	5
56	I.Mawardi, 2.Dnariwati	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	177	5
57	H.M.Ramsi Suman,SM	Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi	182	5
58	Dra.Afnita	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	192	5
59	Nailul Anar St.Kayo	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	191	5
60	H.Evi Arons	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	183	5
61	H.Evi Arons	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	184	5
62	H.Evi Arons	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	186	5
63	I.Hj.Baenar, 2.Syafwan St.Btk Ameh	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	202	5
64	Asrul Nain	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl.Diponegoro 15 Tarok Dipo Bukittinggi	196	5
65	H.Syahrial;Erfin Sikumbang;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl.Diponegoro 13 Tarok Dipo Bukittinggi	187	5
66	Helmawati	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Diponegoro 11 Bukittinggi	201	5
67	Asrul Nain	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Diponegoro 12 Bukittinggi	203	5
68	1.Yunizal, 2.Hamon;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Diponegoro 10 Bukittinggi	204	5
69	Adril Syaribuluddin	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	174	6
70	Marshall Mansyur	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	175	6
71	Marshall Mansyur	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	185	6
72	Rizal	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	188	6
73	H.Amrizal	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri Bukittinggi	193	6
74	Haji Ruslami Rasyid Dt.Sati	Pertokoan Simpang Aur Blok O Bukittinggi	198	6
75	H.Sofardi	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri Bukittinggi	199	6
76	Sumarti	Pertokoan Simpang Aur Blok O Bukittinggi	200	6

Saat ini Sertifikat HGB yang dipegang oleh pedagang tersebut dalam masa perpanjangan/pembaharuan hak untuk jangka waktu 20 Tahun. Namun pada waktu perpanjangan/pembaharuan Sertifikat HGB tersebut tidak ada perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bukittinggi selaku Pemegang HPL dengan pedagang sebagai pemegang HGB. Pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 18 (delapan) buah Sertifikat HGB yang telah diperpanjang/diperbaharui tersebut telah habis masa berlakunya, sisanya akan habis pada Tahun 2025 dan Tahun 2027.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai Pemegang Hak Pengelolaan telah menerima pendapatan berupa uang kontribusi dari Pihak Ketiga yaitu dari PT. RGM, PT. Inkorba dan PT. Suma Jaya. Semenjak Tahun 2018 hingga Tahun 2021 Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penerimaan Daerah atas Uang Wajib Tahunan dan Uang Pemasukan atas Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan pada Pertokoan Pasar Simpang Aur berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penerimaan Daerah Atas Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi.

Namun pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi tidak lagi mengeluarkan Surat Ketetapan Penerimaan Daerah atas Uang Wajib Tahunan atas Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan tersebut dikarenakan aturan yang mendasari Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah dan aturan lainnya telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, dimana pada Pasal 9 Ayat (4) terkait uang wajib tahunan dinyatakan "*Rumusan Tarif dan/atau Uang wajib tahunan yang dikenakan oleh Pemegang Hak Pengelolaan ditetapkan oleh Menteri*". Dalam hal ini yang dimaksud Menteri adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Sampai saat ini, ketetapan terkait rumusan tarif dan/atau uang wajib tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tersebut, belum keluar dan Pemerintah Kota Bukittinggi terkait hal ini juga telah menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pemerintah Kota Bukittinggi juga masih dalam masa perjanjian bagi tempat usaha dengan PT. Citicon Mitra Bukittinggi dengan HPL Nomor 02/Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang. Terkait perjanjian ini sampai saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi belum mendapatkan manfaat dari PT. CMB. Berbagai upaya perundingan telah diupayakan tetapi belum mencapai titik temu.

Aset Tanah terletak pada Pengelola Barang Milik Daerah dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor Surat Ukur Nomor 41/ATTS/2004 tanggal 25 Agustus 2004 dengan luas 7484 m<sup>2</sup>.

Aset Pemerintah Kota Bukittinggi yang dikerjasamakan lainnya memiliki luas tanah sebesar 7.484 m<sup>2</sup> adalah Tanah asar Banto dalam bentuk Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 002 Aur Tajungjang Tengah Sawah yang saat ini sedang dikerjasamakan dengan pihak PT. Citicon Mitra Bukittinggi, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Citicon Mitra Bukittinggi yang berakhir tanggal 31 Juli 2020. Tanah Hak Pengelolaan tersebut dicatat di Aset Lain-Lain dengan nilai aset sebesar Rp4.196.653.000,00.

Berdasarkan LHP BPK Nomor : 05.C/LHP/XVIII.PDG/05/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bukittinggi direkomendasikan agar Pemerintah Kota Bukittinggi menginventarisir kembali dan menelaah hak-hak Pemerintah Kota Bukittinggi dan kewajiban-kewajiban PT. CMB sesuai perjanjian kerjasama.

Pemerintah Kota Bukittinggi telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak PT. CMB dengan beberapa kesepakatan. Namun tindak lanjut dari kesepakatan tersebut belum memberikan hasil maksimal, terutama terhadap kewajiban-kewajiban pihak PT. CMB.

1. Pertemuan tanggal 5 Juli 2014 di Jakarta menyepakati Seluruh kewajiban PT. CMB yang terjadi karena adanya kerjasama akan dibayarkan, termasuk seluruh dokumen-dokumen perusahaan sebagai mitra kerjasama akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi paling lambat tanggal 20 Agustus 2014.
2. Pertemuan tanggal 29 Januari 2015 di Bukittinggi, Pihak PT CMB (EJ dan A) tidak dapat memberikan laporan keuangan sebelum peralihan, karena Laporan keuangan Tahun 2006 s/d 2011 merupakan tanggung jawab J.P (Kuasa Direktur lama). Pihak PT. CMB (baru) tidak dapat menerima Nilai Aset BTC sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa penilai Publik Kampianus Roman.
3. Pertemuan tanggal 9 Mei 2016 di Bukittinggi, J.P menyatakan bahwa peralihan pemegang Saham telah dilakukan sejak tanggal 21 Mei 2012 kepada EJ dan A. Pemegang saham yang baru menyatakan bersedia membayar kewajiban paling lambat 15 hari setelah pertemuan.
4. Pertemuan tanggal 3 September 2016 di Jakarta, Pemko Bukittinggi meminta kepada PT. CMB untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 9 Mei 2016. Kedua pihak bersedia melakukan renegotiasi atau revisi perjanjian sesuai aturan yang berlaku, tetapi hal ini belum dapat dilakukan karena Laporan Keuangan yang diserahkan oleh PT. CMB kepada Pemko Bukittinggi, belum berupa laporan keuangan yang sudah di audit oleh Akuntan Publik, sehingga sulit menentukan kualitas Laporan Keuangan, hal ini mengakibatkan kesulitan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk



mengetahui posisi keuangan yang sebenarnya. Pemko Bukittinggi telah meminta kepada PT. CMB untuk menyerahkan laporan keuangan yang meliputi:

1. Neraca Perusahaan.
2. Laporan Laba/Rugi Perusahaan.
3. Laporan Arus Kas.
4. Utang Piutang termasuk Kredit Bank.
5. Daftar Penyertaan Modal.

<b>5.3.2.4.2.2 Kerjasama Sewa</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	0	114.036.000,00

Aset yang disewakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun 2021 berupa bangunan yang terletak pada Taman Benteng Fort de Kock dengan nilai bangunan sebesar Rp114.036.000,00 yang Pengelolaannya dilakukan oleh Pengelola Barang, yang disewakan kepada saudara H. Yul Bray Pili dengan perjanjian yang diperbaharui setiap tahunnya.

Pada Tahun 2022, bangunan yang terletak pada taman Benteng Fort de Kock tersebut diserahkan Pengelolaannya yang semula di Pengelola Barang kemudian dipindahkan ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Barang, sehingga bangunan tersebut dipindahkan pencatatannya dari Aset Tetap Bangunan kerjasama sewa di Pengelola Barang ke Aset Tetap Bangunan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga senilai Rp114.036.000,00 (sesuai appraisal oleh KPKNL) dengan perjanjian sewa nomor: 556/01/DISPARPORA/XI-2022.

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan besaran sewa sebesar Rp145.046.000,00. Atas pelaksanaan perjanjian tersebut, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mencatat pendapatan LRA di kelompok Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-Hasil Sewa BMD untuk 2 tahun pembayaran, kemudian untuk Pendapatan diterima di Muka dicatat di kelompok Kewajiban serta Pendapatan LO dicatat hanya yang terkait dengan pendapatan tahun berjalan tahun 2022 saja

<b>5.3.1.4.3. Aset Tidak Berwujud</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	8.352.406.781,00	8.170.557.401,00

Nilai Aset Tidak Berwujud pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.170.557.401,00. Selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp181,849,380.00 sehingga saldo akhir Tahun 2022 adalah Rp8,352,406,781.00 dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

<b>Saldo Awal</b>	Rp 8.170.557.401,00
-------------------	---------------------

Mutasi bertambah:		
- Belanja modal (LRA)		Rp 24,420,000.00
- Reklas antar kelompok barang (masuk)	Rp.	117,829,380.00
- Hasil penilaian kurang catat		Rp 39,600,000.00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 181,849,380.00</b>
Mutasi berkurang:		
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
- Hasil Penilaian Kurang Catat		Rp 0,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 0,00</b>
<b>Saldo akhir</b>		<b>Rp 8,352,406,781.00</b>

<b>5.3.1.4.4. Aset Lain-lain</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>2.672.835.677,00</b>	<b>4.746.799.227,00</b>

Aset yang tercatat pada aset lain-lain merupakan aset tetap yang kondisinya sudah tidak dapat digunakan, baik itu rusak berat maupun aset yang sudah tidak ditemukan lagi dan diusulkan untuk dihapuskan serta aset sedang dalam penelusuran.

Nilai Aset Lain-Lain pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp43.176.272.532,16. Selama tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp2.025.562.614,50 sehingga saldo akhir Tahun 2022 adalah Rp41.150.709.917,66 dengan nilai akumulasi penyusutan Barang Rusak Berat sebesar (Rp38,477,874,240,66) yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

<b>Uraian</b>	<b>Aset Lainnya (Rp)</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>43.176.272.532,16</b>
<b>Penambahan</b>	
-Reklas Mutasi masuk dari aset tetap/ubah kondisi	1.419.715.802,00
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>1.419.715.802,00</b>
<b>Pengurangan</b>	
Penghapusan berdasarkan SK Wako	3,239,691,266.50
Reklas Antar Kelompok Barang (Keluar)	101,935,000.00
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>3,341,626,266.50</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>41.150.709.917,66</b>

<b>5.3.1.4.5. Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>(7.418.832.774,00)</b>	<b>(6,966.819.810,00)</b>

Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan masa manfaat untuk Aset Tidak Berwujud selama 5 (lima) tahun dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp7.418.832.774,00 dan Rp6.966.819.810,00. Untuk perhitungan nilai buku Aset Tidak Berwujud dapat disajikan sebagai berikut:

<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp (6.966.819.810,00)</b>
-------------------	------------------------------

Beban Amortisasi Tahun 2022	Rp	(370.705.597,00)
Bertambah reklas dari aset tetap	Rp	(81.307.367,00)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>RP</b>	<b>(7,418.832.774,00)</b>

<b>5.3.1.4.6. Dana Treasury Deposit Facility (TDF)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>1.489.832.774,00</b>	<b>0</b>

Dana Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2020 yang lalu adalah sebesar Rp0,00, tahun 2022 terdapat TDF senilai Rp1.489.832.774,00 yang menjadi saldo tahun 2022.

TDF sebesar Rp1.849.462.625,00 dikarenakan terbitnya PMK Nomor 218/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 yang merupakan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat yang disalurkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF). TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Daerah untuk menampung uang di BUN sebagai bentuk penyaluran non tunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening TDF Pemerintah Daerah di Bank Indonesia (BI). Sesuai dengan surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S-5/PK/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Penyampaian Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pada Tahun 2022, karna ketentuan lebih lanjut mengenai TDF belum terbit, maka Pemerintah Kota Bukittinggi mencatat nilai tersebut sebagai Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada Pendapatan LO.

Pencatatan TDF ke kelompok Aset Lainnya Neraca adalah berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 yang dialamatkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF yaitu poin 4 huruf a angka 1) yang berbunyi:

“Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF, Pemda mencatat sebagai **Aset Lainnya** (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO). Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca)”

Sedangkan nilai remunerasi dari TDF tersebut sebesar Rp448.551,00 telah diakui dan dicatat pada kelompok Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2022.

**5.3.2. KEWAJIBAN**

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp	Rp
12.332.999.300,92	11.436.747.898,31

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi pemerintah. Pada Neraca Kota Bukittinggi Kewajiban Tahun 2022 diklasifikasikan sebagai berikut :

**Tabel. 5.3.2.1**  
Kewajiban Tahun 2022

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal 2022 setelah Koreksi	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	11.436.747.898,31	0,00	11.436.747.898,31	575.712.956.854,76	574.816.706.452,15	12.332.999.300,92
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.436.747.898,31	0,00	11.436.747.898,31	575.712.956.854,76	574.816.706.452,15	12.332.999.300,92

Sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Kota Bukittinggi hanya mempunyai kewajiban jangka pendek sebesar Rp12.332.999.300,92.

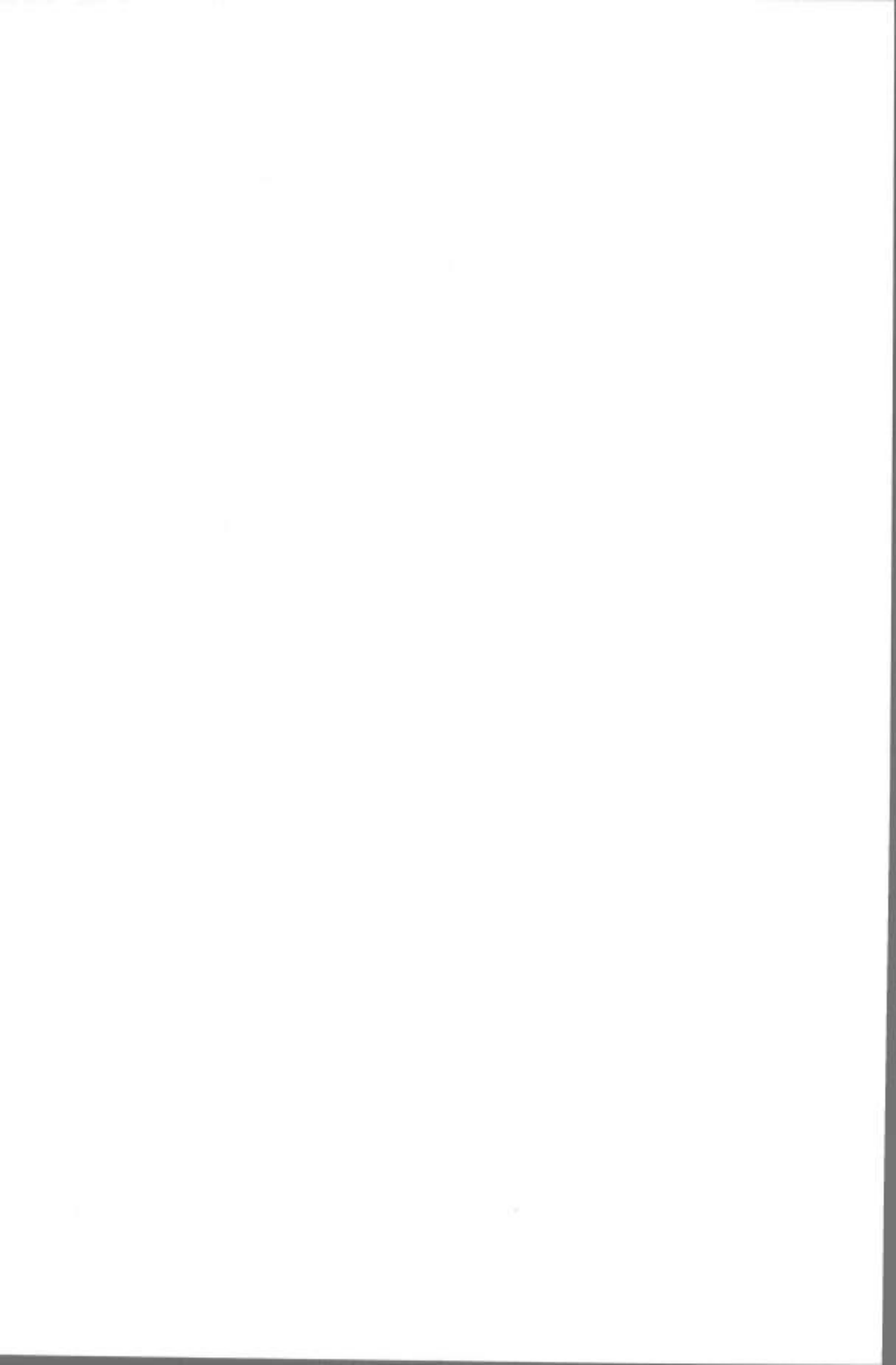
**5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek**

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp	Rp
12.332.999.300,92	11.436.747.898,31

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Bukittinggi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp12.332.999.300,92 dan Rp11.436.747.898,31, artinya terdapat penurunan angka kewajiban sebesar Rp896.251.402,61 sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel. 5.3.2.2**  
Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2022

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal 2022 setelah Koreksi	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	54.173.972.301,00	54.173.736.301,00	237.000,00
2	Bagian Lancar Utang Jangka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Pendapatan Diterima Dimuka	379.525.936,67	0,00	379.525.936,67	430.564.800,67	379.525.936,67	430.564.800,67



No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal 2022 setelah Koreksi	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Utang Belanja	4.008.590.212,00	4.913.822.838,64	9.522.213.050,64	456.464.437.575,60	454.748.930.076,99	11.237.720.549,25
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	535.508.911,00	-	535.508.911,00	119.890.119.070,49	119.751.161.030,49	664.476.951,00
	Jumlah	5.523.625.059,67	4.913.822.838,64	10.437.247.898,31	630.949.093.747,76	629.053.342.345,15	12.132.999.390,02

**A. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Tahun 2022  
Rp  
237.000,00

Tahun 2021  
Rp  
0,00

Nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00, pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp237.000,00, yang terdiri dari keterlanjuran bayar utang PFK Belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2022 oleh Bendahara Umum Daerah ke PT.Taspen sebesar (Rp6.000,00) dan utang PPH pasal 21 RSUD sebesar Rp243.000 Kota Bukittinggi.

**B. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Tahun 2022  
Rp  
0,00

Tahun 2021  
Rp  
999.500.000,00

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada neraca Per 31 Desember 2021 sebesar Rp999.500.000,00 sampai dengan tahun 2022 belum ada jawaban kemnterian keuangan terkait status Utang Kewajiban Inpres Pasar yang sampai tahun 2021 terus dicatat oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di Neraca.

Maka pada tahun 2022 ini Pemerintah Kota Bukittinggi mengambil langkah bertahap untuk tidak menyajikan nilai kewajiban pada Neraca namun mengoreksinya menjadi Kewajiban kontingensi yang sewaktu waktu ada perkembangan baru akan ditindaklanjuti penjelasan lebih lanjut berada pada BAB VI Catatan atas Laporan Keuangan.

**C. Pendapatan Diterima di Muka**

Tahun 2022  
Rp  
430.564.800,67

Tahun 2021  
Rp  
379.525.936,67

Saldo Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2021 pada neraca per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp379.525.936,67, selama tahun 2022 terdapat mutasi tambah sebesar Rp315.336.134,00 dan mutasi kurang sebesar Rp264.297.270,00 sehingga saldo akhir tahun 2022 menjadi Rp430.564.800,67.

**Tabel. 5.3.2.4**  
**Daftar Mutasi Pendapatan Diterima di Muka**

No.	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal	Mutasi		Saldo akhir 31 Desember 2022
				Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron - LO	170.262.270,00	0,00	211.555.134,00	170.262.270,00	211.555.134,00
2	Pajak Reklame Berjalan	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3	Hasil dari pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	208.813.666,67	0,00	22.708.000,00	93.585.000,00	137.936.666,67
4	Reklame Kain	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
5	Retribusi Pertokoan	0,00	0,00	72.523.000,00	0,00	72.523.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>379.525.936,67</b>	<b>0,00</b>	<b>315.336.134,00</b>	<b>264.297.270,00</b>	<b>430.564.860,67</b>

Pendapatan Diterima di Muka tahun 2022 berada pada SKPD Badan Keuangan dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

#### D. Utang Belanja

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>11.237.720.549,25</b>	<b>9.522.213.050,64</b>

Utang Belanja pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp11.237.720.549,25 dan Rp9.522.213.050,64. Adapun rincian Utang Belanja tersebut adalah sebagai berikut :

##### 1. Utang Belanja Pegawai

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>6.240.714.248,00</b>	<b>4.608.590.212,00</b>

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.608.590.212,00. Selama tahun 2022 terdapat penambahan Utang Belanja Pegawai sebesar Rp2.980.320.355,00 dan pengurangan utang sebesar Rp1.314.190.979,00. Sehingga saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.240.714.248,00. Rincian mutasi utang belanja pegawai tersebut dapat dijelaskan dengan tabel berikut :

Tabel. 5.3.2.5  
Daftar Mutasi Utang Belanja Pegawai Tahun 2022

No.	SKPD	Tahun Pengakuan	Saldo awal 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi		Saldo akhir 31 Desember 2022
						Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Satuan Pendidikan Pamong Preja	2021	577.319.398,00	-	577.319.398,00	-	577.319.398,00	-
2	Diras Sosial	2021	170.142.878,00	-	170.142.878,00	-	170.142.878,00	-
3	Sekretariat DPRD	2021	201.194.787,00	-	201.194.787,00	-	201.194.787,00	-
4	Kecamatan Gugak Perjing Diras Pendidikan dan Kebudayaan	2021	124.610.528,00	-	124.610.528,00	-	124.610.528,00	-
5	Diras Pertanian	2020	13.420.505,00	-	13.420.505,00	-	13.420.505,00	-
6	Diras Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2019	7.020.824,00	-	7.020.824,00	3.065.431.497,00	3.065.431.497,00	7.020.824,00
7	Diras Kesehatan	2021	3.717.660,00	-	3.717.660,00	0,00	0,00	3.717.660,00
8	Diras Kesehatan	2021	3.279.240.244,00	-	3.279.240.244,00	2.544.596.663,00	0,00	5.914.836.907,00
9	PUPR	2022	0,00	-	0,00	123.953.065,00	0,00	123.953.065,00
10	PERKOM	2022	0,00	-	0,00	19.448.947,00	0,00	19.448.947,00
11	DPMPTSP/PTK Diras Perhubungan dan Kerajinan	2022	0,00	-	0,00	77.557.718,00	0,00	77.557.718,00
12	Sekretariat Daerah	2022	0,00	-	0,00	66.792.915,00	0,00	66.792.915,00
13	Sekretariat Daerah	2022	0,00	-	0,00	13.867.707,00	0,00	13.867.707,00
14	Jumlah		4.608.596.212,00	-	4.608.596.212,00	8.011.746.512,00	4.379.622.476,00	6.246.714.249,00

E.1.1.1



Berikut uraian Utang Belanja Pegawai Tahun 2022 adalah :

a. Dinas Pertanian

Saldo Utang Belanja Pegawai Dinas Pertanian per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.420.505,00 yang merupakan kekurangan pembayaran tambahan penghasilan dan pembayaran honorarium PPK kegiatan penanganan Covid-19 dan selama tahun 2022 belum ada pembayaran atas utang tersebut, sehingga saldo akhir utang belanja pegawai pada Dinas Pertanian per 31 Desember 2022 masih tetap sebesar Rp13.420.505,00.

b. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Saldo Utang Belanja Pegawai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.020.824,00 yang merupakan kekurangan pembayaran asuransi kesehatan TPP tahun 2020 ke BPJS. Pada tanggal 31 Desember 2022 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran utang ke BPJS, namun karena ada kesalahan dalam penulisan nomor rekening tujuan pada Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga SP2D yang telah terbit di Bank Nagari mengentri sesuai rekening tujuan pada dokumen tsb yaitu rekening Bendahara Pengeluaran dan bendahara baru menyadari pada bulan Januari 2023, saldo akhir utang belanja pegawai pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2022 masih tetap sebesar Rp7.020.824,00.

c. Dinas Kebakaran

Saldo utang Belanja Pegawai Dinas Kebakaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.717.660,00 selama tahun 2022 tidak terdapat penambahan dan pengurangan utang sebesar Rp3.717.660,00 merupakan kekurangan pembayaran Iuran BPJS TPP Bulan Desember 2021. Sehingga saldo akhir utang belanja pegawai pada Dinas Kebakaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.717.660,00.

d. Dinas Kesehatan

Saldo Utang Belanja Pegawai Dinas Kesehatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp Rp3.270.240.244,00 ada koreksi saldo awal sebesar Rp2.310.946.497 dan koreksi saldo awal sebesar Rp28.823.500,00 sehingga saldo awal setelah koreksi Rp896.392.155,00 dan selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp4.759.058.523,00 yang merupakan kekurangan pembayaran Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS Dinas Kesehatan sebesar Rp230.562.729,00 dan ditambah utang Jasa Pelayanan Medis kesehatan RSUD sebesar Rp4.759.058.523,00. sehingga saldo akhir utang belanja pegawai pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.914.836.907,00

e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Saldo Utang Belanja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp123.953.065,00 yang merupakan kekuarangan pembayaran utang Tambahan Penghasilan Pegawai Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga saldo akhir utang pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2022 sebesar Rp123.953.065,00.

f. Dinas Perumahan dan Pemukiman.

Saldo Utang Belanja Pegawai Dinas Perumahan dan Pemukiman per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp19.374.195,00 yang merupakan kekuarangan pembayaran utang iuran BPJS gaji susulan dan gaji 13 serta TPP ketiga belas Dinas Perumahan dan Pemukiman. Sehingga saldo akhir utang pegawai Dinas Perumahan dan Pemukiman per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.374.195,00.

g. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Saldo Utang Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp77.657.718,00 yang merupakan kekuarangan pembayaran iuran BPJS utang gaji susulan dan gaji ketiga belas serta TPP ketiga belas Dinas Perumahan dan Pemukiman. Sehingga saldo akhir utang pegawai Dinas Penanaman Modal, Peiayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2022 sebesar Rp77.657.718,00.

h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Saldo utang belanja pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp66.792.915,00 yang merupakan kekuarangan pembayaran utang gaji susulan dan gaji 13 serta TPP 13 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sehingga saldo akhir utang pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan per 31 Desember 2022 sebesar Rp66.792.915,00.

i. Sekretariat Daerah

Saldo utang belanja pegawai Sekretariat Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp13.867.707,00 yang merupakan kekurangan pembayaran utang gaji susulan dan gaji ketiga belas serta TPP ketiga belas Sekretariat Daerah. Sehingga saldo akhir utang pegawai Sekretariat Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.867.707,00.

**2. Utang Belanja Barang dan Jasa**

**Tahun 2022**  
**Rp**  
**65.334.191,00**

**Tahun 2021**  
**Rp**  
**170.081.100,00**

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp65.334.191,00 dan Rp170.081.100,00. Terdapat mutasi bersih utang tersebut selama tahun 2022 berupa pengurangan sebesar (Rp104.746.909,00) yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.3.2.6  
Daftar Matausi Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

No	SKPD	Tahun Pengakuan	Saldo Akhir 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2022
						Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Kesehatan		86.801.100,00	-	86.801.100,00	2.148.500,00	86.801.500,00	2.148.500,00
a	Bantuan Iuran Peserta PBU dan BP Kolas 3 tgl. 11 Nov 2021 dan Desember	2021	87.566.600,00	-	87.566.600,00	-	87.566.600,00	-
b	Utang Pembelian Pindah Belah untuk FoodCourt di RSUD	2021	11.484.500,00	-	11.484.500,00	-	11.484.500,00	-
c	Utang Jasa Anestesi	2021	7.750.000,00	-	7.750.000,00	-	7.750.000,00	-
d	Utang Bebeja Jasa Kantor	2022	-	-	-	2.148.500,00	-	2.148.500,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	2021	83.280.000,00	-	83.280.000,00	-	49.320.000,00	33.960.000,00
3	DPMTSPPTK	2022	-	-	-	6.284.000,00	-	6.284.000,00
4	BAPELITBANG	2022	-	-	-	3.542.221,00	-	3.542.221,00
5	Dinas Koperasi, UKM dan Pertambangan	2022	-	-	-	19.396.470,00	-	19.396.470,00
	Jumlah		170.081.100,00	-	170.081.100,00	31.374.191,00	136.121.100,00	65.334.191,00

Berdasarkan tabel di atas dapat kami jelaskan SKPD yang mencatat utang tersebut sebagai berikut :

a. Dinas Kesehatan

Saldo utang pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp86.801.100,00.

Pada tahun 2022 terdapat pengurangan utang sebesar Rp84.652.600,00 yang terdiri dari :

1. Utang Bantuan Iuran Peserta PBU dan BP Kelas 3 tagihan November dan Desember 2021 sebesar Rp67.566.600,00
2. Utang atas pembelian pecah belah untuk foodcourt di RSUD sebesar Rp11.484.500,00 dan
3. Utang jasa Anestesi sebesar Rp7.750.000,00.
4. Penambahan Utang Belanja Jasa Kantor penyelenggara acara sebesar Rp2.148.500,00

Sehingga nilai saldo utang pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp2.148.500,00.

b. Dinas Lingkungan Hidup

Saldo Utang Barang dan Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2021 sebesar Rp83.280.000,00. Selama Tahun 2022 terdapat pengurangan sebesar Rp49.320.000,00 utang tersebut merupakan utang kompensasi jasa pelayanan persampahan Kota Bukittinggi yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2022. Pembayaran utang belanja ini akan dianggarkan pada Anggaran Perubahan APBD Tahun 2023, dengan demikian saldo utang tersebut Tahun 2022 adalah sebesar Rp33.960.000,00.

c. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Saldo Utang 2022 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja terdapat pada Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Air sebesar Rp6.284.000,00

d. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Saldo Utang 2022 pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan terdapat pada Utang belanja Kantor Tagihan Listrik periode November s.d Desember 2022 sebesar Rp3.542.221,00

e. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Penambahan utang pada tahun 2022 sebesar 20% adalah terhadap perencanaan penampungan pedagang pasar bawah/ ex pedagang kuliner stasiun/parkir tahun 2022 sebesar Rp19.399.470.

<b>3. Utang Belanja Hibah</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>0,00</b>	<b>6.972.680,00</b>

Pada tahun 2021 terdapat Utang Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp6.972.680,00 yang merupakan utang pembayaran termyn I sebesar 100% Pengawasan Pembangunan Atap Jenjang Mesjid Jami' Gunjo Koto Selayan. Pada tahun 2022 utang tersebut telah dibayarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga saldo Utang Belanja Hibah tahun 2022 adalah Rp0,00.

<b>4. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>4.871.672.110,25</b>	<b>123.353.100,00</b>

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp123.353.100,00. Selama tahun 2022 terdapat mutasi tambah sebesar Rp4.871.672.110,25 dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp21.885.500,00 merupakan Utang 20% Perencanaan Penampung Pedagang Pasar Bawah / ex Pedagang Kuliner Stasiun/Parkir tahun 2022 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
2. Utang Pembangunan RSUD pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.418.980.100,93, merupakan utang kepada PT.Bangun Kharisma Prima sesuai hasil putusan pengadilan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.Bkt tanggal 15 Februari 2022.
3. Utang sebesar Rp430.806.509,32 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga yang merupakan Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Rp272.104.812,20 dan Utang Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp57.234.097,12

Sehingga saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp4.871.672.110,25 sebagaimana dapat dijelaskan tabel berikut :

**Tabel. 5.3.2.7**  
**Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022**

No.	SKPD	Tahun Pengakuan	Saldo Akhir 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal	Mutasi		Saldo akhir 31 Desember 2022
					Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	2016	21.885.500,00	-	-	-	21.885.500,00
2	Dinas Kesehatan	2022	-	-	4.418.980.100,93	-	4.418.980.100,93
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2020	101.467.600,00	-	329.338.909,32	-	430.806.509,32
	<b>Jumlah</b>		<b>123.353.100,00</b>	<b>-</b>	<b>4.748.319.010,25</b>	<b>-</b>	<b>4.871.672.110,25</b>

<b>5. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>Rp</b> <b>0,00</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>Rp</b> <b>4.613.215.958,64</b>
---	---	---

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2021 adalah Rp4.613.215.958,64. Selama Tahun 2022 semua Utang yang timbul pada tahun 2021 telah dibayar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2022 adalah Rp0,00. Mutasi Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel. 5.3.2.8  
Daftar Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas PUPR Tahun 2022

No.	SKPD	Tahun Pengakuisi	Saldo Akhir 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi		Saldo akhir 31 Desember 2022 9-6+7-3
						Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Pembayaran Termyn I sebesar 90% Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Bormawil	2021	430.270.646,38	0	430.270.646,38		430.270.646,38	0,00
	Pembayaran Termyn II sebesar 10% Insas (Insas) Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Drainase Paket II	2021	24.581.634,00	0	24.581.634,00		24.581.634,00	0,00
	Pembayaran Final Quantity sebesar 60,71% Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Primer (SMPN1 s.d. Rumah Potong)	2021	4.072.175.137,36	0	4.072.175.137,36		4.072.175.137,36	0,00
	Pembayaran Termyn II sebesar 5% Pekerjaan Pembuatan Crossing Saluran dan Pintu Air Jalan Mebel	2021	9.654.304,95	0	9.654.304,95		9.654.304,95	0,00
	Pembayaran Termyn I sebesar 12% Pekerjaan Pembangunan Transfer Dappo	2021	76.534.155,95	0	76.534.155,95		76.534.155,95	0,00
	Jumlah		4.613.215.958,64	0,00	4.613.215.958,64	0,00	4.613.215.958,64	0,00

<b>6. Utang Belanja Tak Terduga</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tidak terdapat saldo utang Belanja Tidak Terduga pada tahun 2021, dan juga tidak adanya mutasi tambah maupun kurang pada tahun 2022, sehingga tidak terdapat saldo per tanggal 31 Desember 2022.

<b>7. Utang Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo utang Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2022 adalah Rp60.000.000,00. Utang tersebut timbul karena pada APBD awal telah dianggarkan Belanja Bantuan Sosial tersebut dan telah dilaksanakan, namun pada Perubahan APBD tahun 2022 tersebut anggaran yang semula ada menjadi tidak tersedia, sehingga pembayaran dijadwalkan dibayarkan pada APBD Perubahan 2023 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 5.3.2.9

Daftar Utang Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022

No.	SKPD	Tahun Pengakuan	Saldo Akhir 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal	Mutasi		Saldo akhir 31 Desember 2022
					Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						
	Utang Belanja Bantuan Sosial	2022	-	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00
	Jumlah				60.000.000,00	-	60.000.000,00

<b>A. Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>664.476.951,00</b>	<b>535.508.911,00</b>

Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022 adalah Rp662.476.951,00, merupakan utang kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat tahun sebelumnya, dengan rincian :

**1. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer**

Saldo Utang Kelebihan Transfer Tahun 2021 adalah sebesar Rp535.508.911,00. Dengan terbitnya PMK 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2021 terdapat koreksi tambah utang sebesar Rp275.149.536,00 sehingga utang menjadi Rp810.658.447,00. Selama tahun 2022 terdapat mutasi kurang sebesar Rp148.350.496,00 yang diperhitungkan dalam penyaluran tahun 2022, sehingga saldo akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp662.307.951,00 rincian mutasi utang kelebihan transfer tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut :



Tabel 5.3.3.0  
Daftar Mutasi Utang Kelebihan Transfer Tahun 2022

No.	Rincian	Tahun	Saldo Akhir (Rp) 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo awal setelah koreksi (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo akhir (Rp) 31 Desember 2022	Keterangan
						Tambah	Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>DBH Pajak Pusat</b>								
1	DBH Pajak		115.188.057,00	131.307.768,00	246.495.825,00	-	115.188.057,00	131.307.768,00	
	Lebih Sisa Dana Bagi Hasil Pajak PPh s.d 2019		103.331.466,00	-	103.331.466,00		103.331.466,00	-	
	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil PBB Bagikan Daerah Migas 2020		11.524.532,00	127.750.862,00	139.275.394,00		11.524.532,00	127.750.862,00	
	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil PBB Bayu Pemungutan Migas 2020		332.029,00	3.548.896,00	3.880.925,00		332.029,00	3.548.896,00	
2	Sumber Daya Alam		420.320.854,00	1.3.841.768,00	584.162.622,00		33.182.439,00	531.080.183,00	Dasar Hukum PMK No. 127/PMK.07/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022 Terhadap 25 Aquisitus 2022, KMK No. 28/PMK.7/2022, KMK No. 37/KM.7/2022 dan SKM No. 46/PMK.7/2022
	Lebih Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 2013		-	-	-		-	-	
	Lebih Bayar DBH SDA Migas Minyak Bumi 15% 2020		13.562.800,00	-	13.562.800,00		13.562.800,00	-	
	Lebih Bayar DBH SDA Migas Minyak Bumi 0,5% s.d 2019		427.200,00	-	427.200,00		427.200,00	-	
	Lebih Bayar DBH SDA Mineral dan Batubara 2019		202.451.588,00	-	202.451.588,00		19.152.439,00	183.299.149,00	
	Lebih Sisa DBH SDA Mineral Bukan logam dan Lainnya 2015		-	-	-		-	-	
	Lebih Bayar DBH SDA Dana Bagi Hasil Kehutanan 2020		48.165.246,00	128.062.864,00	176.228.110,00		-	174.228.110,00	
	Lebih Bayar DBH SDA Perikanan 2020		157.604.020,00	15.778.904,00	173.472.924,00		-	173.472.924,00	
	Lebih Sisa DBH SDA Perikanan		-	-	-		-	-	
	<b>Jumlah</b>		<b>535.508.911,00</b>	<b>275.149.536,00</b>	<b>810.658.447,00</b>		<b>148.350.495,00</b>	<b>662.307.951,00</b>	

8.79

**2. Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek tersebut merupakan lebih setor retribusi oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan ke Kas Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp2.169.000,00 sehingga saldo Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut per 31 Desember 2022 menjadi Rp2.169.000,00.

5.3.3 EKUITAS	Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
	2.033.022.032.295,63	2.040.816.158.974,56

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2021 terdapat Ekuitas sebesar Rp2.040.816.158.974,56 dan pada Tahun 2022 sebesar Rp2.033.022.032.295,63 dengan penurunan sebesar Rp7.794.126.678,93. *Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas ini dapat dilihat pada bagian Laporan Perubahan Ekuitas.*

5.4 LAPORAN OPERASIONAL	Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
	(15.075.012.311,53)	342.032.863.452,96

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO dan Beban dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya yang meliputi Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan Defisit sebesar (Rp15.075.012.311,53) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Operasional

Selama tahun 2022 Kegiatan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan Defisit sebesar Rp(13.950.489.410,82) dengan Pendapatan Kegiatan Operasional sebesar Rp703.466.188.835,22 dan Beban Operasional sebesar Rp717.416.678.246,04.

2. Kegiatan Non Operasional

Selama tahun 2022 Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan defisit sebesar (Rp1.124.522.900,71)

3. Pos Luar Biasa

Selama Tahun 2022 tidak terdapat realisasi terhadap Pos Luar Biasa pada Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi.

Adapun realisasi Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.1  
Realisasi Laporan Operasional Tahun 2022

NO URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
7	<b>PENDAPATAN - LO</b>	703.466.188.835,22	1.001.362.252.732,94	(297.896.063.897,72)	(29,75)
7.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	127.187.243.766,85	108.116.129.324,94	19.071.114.441,91	17,64
7.1.1.0	Pajak Daerah-LO	50.808.889.601,00	41.921.194.046,00	8.885.795.555,00	20,48
7.1.2.0	Retribusi Daerah-LO	44.985.091.121,00	35.295.201.072,00	9.689.890.049,00	27,45
7.1.3.0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	8.383.843.874,00	8.983.284.173,00	1.380.559.701,00	19,77
7.1.4.0	Lain-lain PAD yang Sah-LO	23.331.319.170,85	23.916.450.033,94	(585.130.863,09)	(2,45)
7.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>	565.023.737.353,00	590.328.142.941,00	(25.304.405.588,00)	(4,29)
7.2.1.0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	534.420.515.382,00	558.483.516.783,00	(24.063.001.421,00)	(4,31)
7.2.2.0	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	30.603.221.991,00	31.844.626.158,00	(1.241.404.167,00)	(3,90)
7.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO</b>	11.288.207.718,37	302.917.980.467,00	(291.629.772.751,63)	(96,28)
7.3.1.0	Pendapatan Hibah-LO	11.037.620.258,00	299.831.351.937,00	(288.793.731.679,00)	(96,32)
7.3.3.0	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	217.587.457,37	3.085.628.530,00	(2.868.041.072,63)	(92,95)
8	<b>BEBAN</b>	717.416.678.246,04	658.490.138.784,82	58.926.539.461,22	8,95
8.1.1.1	Beban Pegawai	303.024.268.021,96	300.840.522.762,25	2.183.745.259,71	0,73
8.1.2.2	Beban Perbaikan	49.001.217.834,41	59.314.130.550,38	(10.312.912.715,97)	(17,39)
8.1.2.3	Beban Jasa	155.783.489.539,68	132.915.782.054,72	22.867.707.484,96	17,20
8.1.2.4	Beban Pemeliharaan	23.213.658.847,56	19.297.583.710,13	3.916.075.137,43	20,29
8.1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	38.754.670.359,00	32.034.823.347,50	6.719.847.021,50	20,98
8.1.4.0	Beban Subsidi	2.910.989.268,00	0,00	2.910.989.268,00	0,00
8.1.6.6	Beban Hibah	40.192.887.711,16	21.027.307.017,43	19.165.580.693,73	91,15
8.1.6.7	Beban Bantuan Sosial	2.290.000.000,00	1.080.000.000,00	1.210.000.000,00	112,04
8.1.7.9	Beban Penyisihan Piutang	3.489.490.061,00	5.663.113.272,30	(2.173.623.211,30)	(38,74)
8.1.8.10	Beban Lain - lain	8.514.589.496,57	8.025.321.297,10	489.267.199,47	5,10
8.2.1.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	81.741.340.299,00	78.288.554.773,01	3.452.785.525,99	4,41
8.3.2.11	Beban Bantuan Keuangan	8.620.000.000,00	0,00	8.620.000.000,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	(13.950.489.410,82)	342.872.113.948,12	(356.822.603.358,94)	(104,07)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
7.4.1.0	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
8.5.1.0	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	(208.740.226,00)	335.345.363,16	(544.085.589,16)	(162,25)
8.5.2.0	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	(916.082.674,71)	503.905.132,00	(1.419.987.806,71)	(281,80)
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	(1.124.522.900,71)	839.250.495,16	(1.963.773.395,87)	(233,99)
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	(15.075.012.311,53)	342.032.863.452,96	(357.107.875.764,49)	(104,41)
<b>POS LUAR BIASA</b>					
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(15.075.012.311,53)	342.032.863.452,96	(357.107.875.764,49)	(104,41)

Kegiatan Operasional menyajikan informasi pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Bukittinggi serta besarnya beban yang harus ditanggung untuk melakukan pelayanan dan

pelaksanaan rencana strategis Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2022. Rincian Kegiatan Operasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.1.1  
Kegiatan Operasional Tahun 2022

Uraian	2022	2021 (Audited)	Kenakan/ Penurunan Rp 4=(2-J)
	Rp 2	Rp 3	
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(13.950.489.410,82)</b>	<b>342.872.113.948,12</b>	<b>(356.822.603.358,94)</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>703.466.188.835,22</b>	<b>1.001.362.252.732,94</b>	<b>(297.896.063.897,72)</b>
PENDAPATAN ASLI DAERAH	127.187.243.766,85	108.116.129.324,94	19.071.114.441,91
PENDAPATAN TRANSFER	565.023.737.353,00	590.328.142.941,00	(25.304.405.588,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	11.255.207.715,37	302.917.980.467,00	(291.662.772.751,63)
<b>BEBAN</b>	<b>717.416.678.246,04</b>	<b>658.490.138.784,82</b>	<b>58.926.539.461,22</b>

#### 5.4.1.1 Pendapatan

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp	Rp
703.466.188.835,22	1.001.362.252.732,94

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Operasional terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi Pendapatan-LO selama Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp703.629.096.744,22 merupakan jumlah pendapatan yang diakui dikarenakan timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan pendapatan yang telah direalisasikan (*realized*).

#### 5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp	Rp
127.187.243.766,85	108.116.129.324,94

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah ini diperoleh dengan mengikuti ketentuan bahwa setiap penetapan oleh pemerintah daerah (secara jabatan) menjadi Pendapatan Asli Daerah. Penetapan yang dimaksud ini adalah Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan ketentuan sesuai dengan SAP. Selain pendapatan dengan penetapan Pendapatan-LO juga memuat pendapatan yang diterima langsung

dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi (WP/WR) dan wajib bayar lainnya, baik melalui Kas Bendahara Penerimaan maupun langsung ke kas daerah tanpa didahului dengan penetapan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2022 adalah sebesar Rp127.187.243.766,85 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.4.1.2**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah LO dan LRA Daerah Tahun 2022**

Uraian Rekening	Realisasi LO	Realisasi LRA	Selfish
	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4=(2-3)
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>127,187,243,766.85</b>	<b>130,796,925,183.85</b>	<b>(3,609,681,417.00)</b>
Pendapatan Pajak Daerah	50,506,989,601.00	49,570,750,398.00	936,239,203.00
Pendapatan Retribusi Daerah	44,985,091,121.00	46,662,398,989.00	(1,677,307,868.00)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,363,843,874.00	6,641,291,925.00	1,722,551,949.00
Lain-lain PAD Yang Sah	23,331,319,170.85	27,922,483,891.85	(4,591,164,721.00)

**5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO**

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp	Rp
<b>50.506.989.601,00</b>	<b>41.921.194.046,00</b>

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah dikelola sepenuhnya oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagai SKPKD. Pada Tahun 2022 Pajak Daerah pada Pendapatan-LO direalisasikan sebesar Rp50.506.989.601,00 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.4.1.3**  
**Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022**

Kode	Uraian Rekening	Realisasi
		Rp
1	2	3
<b>7.1.1</b>	<b>PENDAPATAN PAJAK DAERAH – LO</b>	<b>50.506.989.601,00</b>
7.1.1.06.	Pajak Hotel – LO	16.156.914.875,00
7.1.1.07.	Pajak Restoran – LO	6.911.596.926,00
7.1.1.08.	Pajak Hiburan – LO	1.003.058.055,00
7.1.1.09.	Pajak Reklame – LO	961.108.573,00
7.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan – LO	6.268.267.602,00

Kode	Uraian Rekening	Realisasi Rp
1	2	3
7.1.1.11.	Pajak Parkir – LO	322.475.568,00
7.1.1.12.	Pajak Air Tanah – LO	77.239.048,00
7.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	4.853.142.158,00
7.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	13.953.186.796,00

Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Pajak-LRA dengan Pendapatan Pajak-LO sebesar Rp936.239.203,00. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

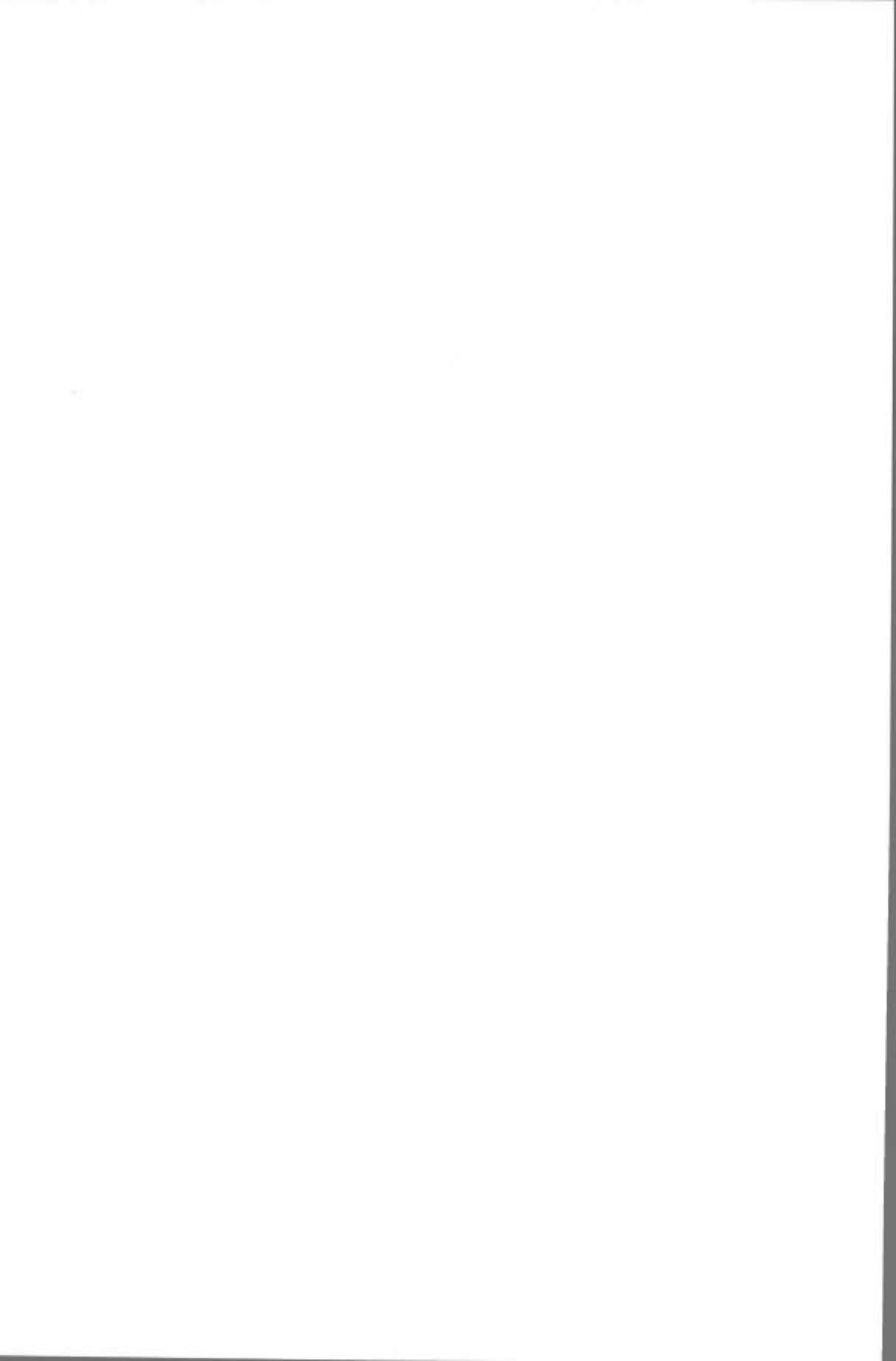
**Tabel 5.4.1.4**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak-LO dengan LRA Tahun 2022**

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Pajak- LO	Realisasi Pendapatan Pajak- LRA	Selisih
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Pajak Hotel	16.156.914.875,00	16.203.159.513,00	(46.244.638,00)
2	Pajak Restoran	6.911.596.926,00	6.907.203.972,00	4.392.954,00
3	Pajak Hiburan	1.003.058.055,00	1.004.246.805,00	(1.188.750,00)
4	Pajak Reklame	961.108.573,00	967.282.188,00	(6.173.615,00)
5	Pajak Penerangan Jalan	6.268.267.602,00	6.268.267.602,00	-
6	Pajak Parkir	322.475.568,00	322.475.568,00	-
7	Pajak Air Tanah	77.239.048,00	76.075.811,00	1.163.237,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.853.142.158,00	3.925.523.043,00	927.619.115,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.953.186.796,00	13.896.515.896,00	56.670.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>50.506.989.601,00</b>	<b>49.570.750.398,00</b>	<b>936.239.203,00</b>

Selisih antara Pendapatan LO dan pendapatan LRA sebesar Rp936.239.203,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp1.118.744.178,00.
2. Penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp220.105.134,00.
3. Pengurangan karena realisasi piutang tahun lalu sebesar Rp133.112.111,00.
4. Pengurangan pendapatan diterima dimuka tahun lalu sebesar Rp170.712.270,00.

Selisih Pendapatan LO dan pendapatan LRA tersebut juga dapat dirinci sebagaimana tabel dibawah ini :





Tabel 5.4.1.5

## Rincian Selisih Pendapatan Pajak-LRA dengan LO Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi Piutang 2022 Rp	Penambahan Piutang Rp	Pendapatan diterima dimuka Rp		Selisih Rp
				Berkurang	Bertambah	
1	2	3	4	5	6	7=(3+4-5+6)
1	Pajak Hotel - LO	48.253.730,00	2.009.092,00	-	-	46.244.638,00
2	Pajak Restoran - LO	18.701.350,00	23.094.304,00	-	-	(4.392.954,00)
3	Pajak Hiburan - LO	4.188.750,00	3.000.000,00	-	-	1.188.750,00
4	Pajak Reklame - LO	52.532.500,00	95.751.749,00	170.712.270,00	220.105.134,00	6.173.615,00
5	Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	-
6	Pajak Parkir - LO	-	-	-	-	-
7	Pajak Air Tanah - LO	435.781,00	1.599.018,00	-	-	(1.163.237,00)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	927.619.115,00	-	-	(927.619.115,00)
9	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.000.000,00	65.670.900,00	-	-	(56.670.900,00)
<b>Jumlah</b>		<b>133.112.111,00</b>	<b>1.118.744.178,00</b>	-	-	<b>(936.239.203,00)</b>

## 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Tahun 2022

Tahun 2021

Rp

Rp

44.985.091.121,00

35.295.201.072,00

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan, retribusi berhubungan dengan jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang diberikan secara langsung atas permohonan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh Pemerintah. Retribusi Daerah dikelola oleh SKPD sesuai dengan tupoksi masing-masing SKPD. Realisasi Pendapatan Retribusi-LO selama Tahun 2022 adalah sebesar Rp44.985.091.121,00 seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.1.6

## Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah- LO Tahun 2022

Rekening	Uraian Rekening	Realisasi Rp
1	2	3
7.1.2.	<b>PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH - LO</b>	<b>44.985.091.121,00</b>
7.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	709.272.000,00
7.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	1.596.367.000,00

Rekening	Uraian Rekening	Realisasi Rp
7.1.2.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – LO	2.275.000,00
7.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	1.305.794.000,00
7.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	1.437.633.577,00
7.1.2.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	2.212.882.000,00
7.1.2.01.11	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya—LO	8.169.500,00
7.1.2.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	270.400.000,00
7.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	178.832.100,00
7.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LO	7.274.872.368,00
7.1.2.02.04	Retribusi Terminal – LO	190.204.000,00
7.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	1.542.814.000,00
7.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	241.040.000,00
7.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	27.737.071.346,00
7.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	73.850.585,00
7.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	174.393.645,00
7.1.2.03.03	Retribusi Izin Trayek – LO	29.220.000,00

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi retribusi per rekening, rincian masing-masing rekening tersebut berasal dari SKPD penghasil yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.4.1.7**  
**Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO per SKPD Tahun 2022**

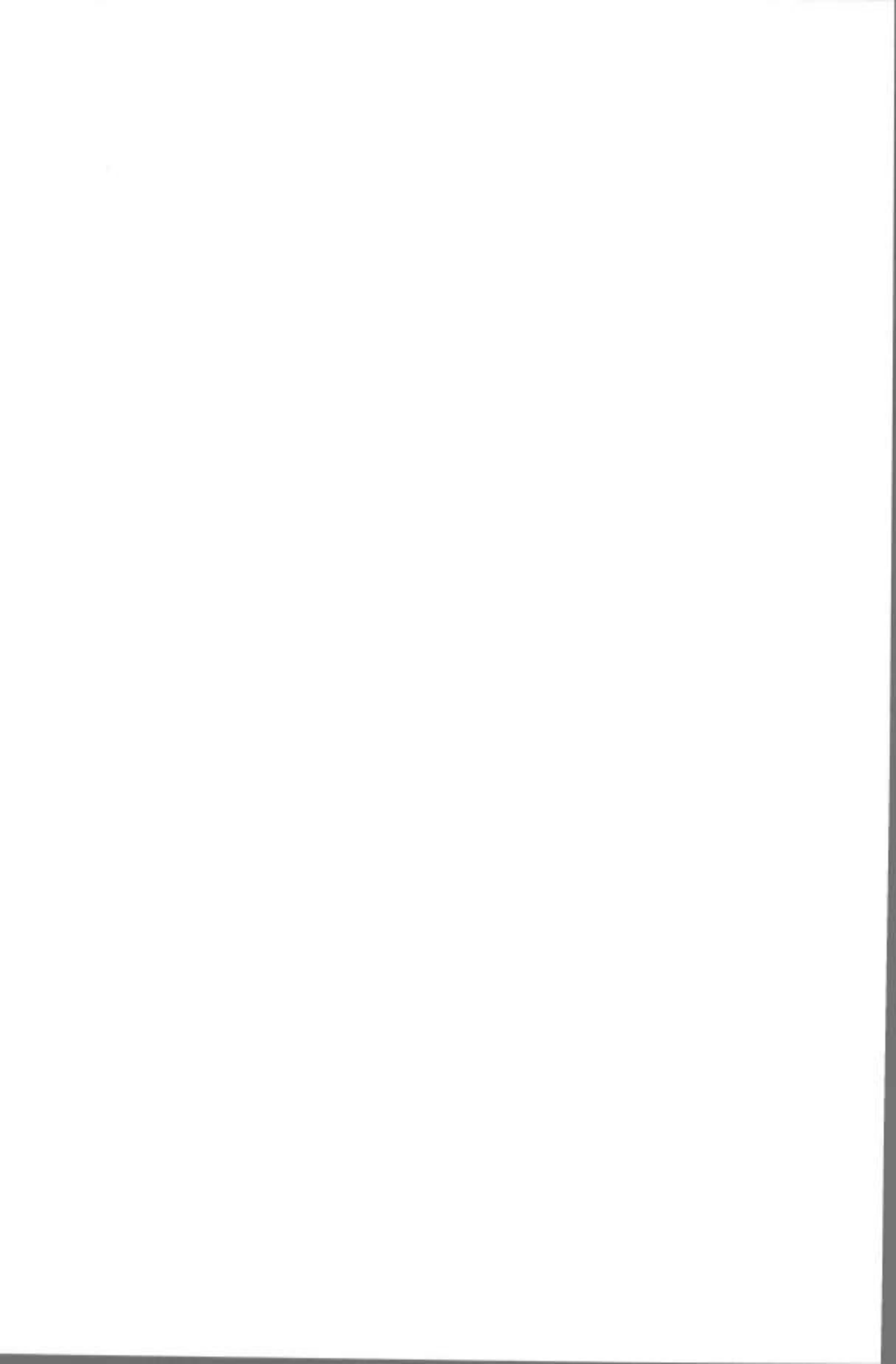
No.	Nama SKPD	Realisasi per SKPD Rp	Uraian Rekening APBD	Realisasi Rp
1	DINAS KESEHATAN	535.212.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan	535.212.000,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.170.449.500,00	Retribusi Pelayanan dan Persampahan/Kebersihan	1.170.449.500,00
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	2.275.000,00	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – LO	2.275.000,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	2.332.638.000,00	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.305.794.000,00
			Retribusi Terminal	190.204.000,00
			Retribusi Tempat Khusus Parkir	807.420.000,00
			Retribusi Izin Trayek	29.220.000,00
5	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	12.094.868.945,00	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	425.917.500,00
			Retribusi Pelayanan Pasar	1.437.633.577,00

No.	Nama SKPD	Realisasi per SKPD	Uraian Rekening APBD	Realisasi
		Rp		Rp
			Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.212.882.000,00
			Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	7.274.872.368,00
			Retribusi Tempat Khusus Parkir	735.394.000,00
			Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.169.500,00
6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	249.745.545,00	Retribusi Mendirikan Bangunan	174.393.645,00
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.351.900,00
7	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	27.740.839.346,00	Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.768.000,00
			Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	27.737.071.346,00
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	498.980.585,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan	174.060.000,00
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	10.030.000,00
			Retribusi rumah potong hewan	241.040.000,00
			Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	73.850.585,00
9	BADAN KEUANGAN	89.682.200,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	89.682.200,00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	270.400.000,00	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	270.400.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>44.985.091.121,00</b>		<b>44.985.091.121,00</b>

Terdapat perbedaan realisasi Pendapatan Retribusi-LRA dengan Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp1.677.307.848,00 sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.1.8  
Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LRA dan LO Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Retribusi - LO	Realisasi Pendapatan Retribusi - LRA	Selisih
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	709.272.000,00	709.272.000,00	-
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.596.367.000,00	1.531.797.690,00	64.569.310,00



3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	2.275.000,00	2.275.000,00	-
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.305.794.000,00	1.305.794.000,00	-
5	Retribusi Pelayanan Pasar	1.437.633.577,00	1.316.078.600,00	121.554.977,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.212.882.000,00	2.212.882.000,00	-
7	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	8.169.500,00	8.169.500,00	-
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	270.400.000,00	459.680.000,00	(189.280.000,00)
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	178.832.100,00	177.292.800,00	1.539.300,00
10	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	7.274.872.368,00	8.941.077.094,00	(1.666.204.726,00)
11	Retribusi Terminal	190.204.000,00	190.204.000,00	-
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.542.814.000,00	1.542.814.000,00	-
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	241.040.000,00	241.040.000,00	-
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	27.737.071.346,00	27.746.558.055,00	(9.486.709,00)
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	73.850.585,00	73.850.585,00	-
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	174.393.645,00	174.393.645,00	-
17	Retribusi Izin Trayek	29.220.000,00	29.220.000,00	-
	<b>Total</b>	<b>44.985.091.121,00</b>	<b>46.662.398.969,00</b>	<b>(1.677.307.848,00)</b>

Selisih antara Pendapatan Retribusi LRA dan Pendapatan Retribusi LO sebesar Rp1.677.307.848,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Terdapat selisih pada Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp64.569.310,00, yang disebabkan oleh :
  - Realisasi piutang pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Sebesar Rp64.552.310,00
  - Koreksi Piutang Tahun Lalu pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sebesar Rp17.000,00.
- Terdapat selisih pada Pendapatan Retribusi Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp121.554.977,00 yang disebabkan adanya realisasi piutang tahun lalu sebesar Rp121.554.977,00.
- Terdapat selisih pada Pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp189.280.000,00 yang disebabkan oleh adanya realisasi piutang tahun lalu sebesar Rp189.280.000,00.
- Terdapat selisih pada Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.539.300,00 yang disebabkan oleh :
  - Adanya realisasi Piutang tahun lalu pada Badan Keuangan sebesar Rp6.819.900,00 dan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp35.984.000,00
  - Adanya penambahan piutang pada Badan Keuangan sebesar Rp40.575.200,00 dan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.768.000,00.

5. Terdapat selisih pada Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan sebesar Rp1.666.204.726,00 yang disebabkan oleh adanya penambahan piutang tahun 2022 sebesar Rp1.667.101.726,00 dan koreksi atas piutang tahun lalu sebesar Rp897.000,00.
6. Terdapat selisih pada Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp9.486.709,00 yang disebabkan oleh adanya realisasi piutang sebesar Rp9.486.709,00 atas nama Roni Chaniago.

5.4.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
	8.363.843.874,00	6.983.284.173,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 merupakan bagian laba/deviden yang dibagikan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi atas aktifitas Penyertaan Modal yang dilakukan pada Perusahaan Bank Nagari BPD Sumatera Barat dan pada PT. BPRS Jam Gadang Kota Bukittinggi. Selama Tahun 2022 realisasi Pendapatan-LO dari Deviden adalah sebesar Rp8.527.200.334,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.9  
Perbandingan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dan LRA Tahun 2022

No	Uraian Rekening	Realisasi LO	Realisasi LRA	Selisih
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5=(3-4)
	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>8.363.843.874,00</b>	<b>6.641.291.925,00</b>	<b>1.722.551.949,00</b>
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga)	8.363.843.874,00	6.641.291.925,00	1.722.551.949,00
	- Bank Nagari	7.934.638.854,00	6.252.795.492,00	1.681.843.362,00
	- BPRS Jam Gadang	429.205.020,00	388.496.433,00	40.708.587,00

Perbedaan antara realisasi LRA dan realisasi LO sebesar Rp1.722.551.949,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penerimaan piutang Bagian Laba/deviden yang dibagikan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022 atas perhitungan tahun 2021 sebesar Rp6.641.291.925,00 yang terdiri dari Bank Nagari sebesar Rp6.252.795.492,00 dan PT. BPRS Perseroda Jam Gadang sebesar Rp388.496.433,00.
- Pengakuan dan pencatatan atas piutang Deviden 2022 yang akan disetor pada tahun 2023 sebesar Rp8.527.200.334,00, yang terdiri dari Bank Nagari sebesar Rp7.934.638.854,00

dan PT. BPRS Jam Gadang sebesar Rp429.205.020,00 yang menambah pendapatan di Laporan Operasional Tahun 2022.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
	23.331.319.170,85	23.916.450.033,94

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan PAD yang tidak bisa ditampung dalam rekening Pajak dan Retribusi Daerah maupun dalam Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Selama Tahun 2022 Lain-lain PAD yang Sah-LO adalah sebesar Rp23.331.319.170,85, berikut perbandingan realisasi LRA serta rinciannya sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 5.4.1.10**  
Realisasi Lain-lain PAD yang Sah LO dan LRA Tahun 2022

No	Uraian Rekening	Realisasi LO	Realisasi LRA	Selisih
		Rp	Rp	
1	2	3	4	5(3-4)
	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH - LO</b>	<b>23.331.319.170,85</b>	<b>27.922.483.891,85</b>	<b>(4.611.164.761,00)</b>
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	35.900.000,00	35.900.000,00	-
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	522.343.200,00	632.792.049,00	(110.448.849,00)
3	Penerimaan Jasa Giro	2.639.172.489,00	2.639.172.489,00	-
4	Pendapatan Bunga	4.244.628.513,40	4.244.628.513,40	-
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	-
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	142.636.531,00	142.636.531,00	-
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	191.880.143,75	191.880.143,75	-
8	Pendapatan Denda Pajak	336.613.399,00	334.802.457,00	1.810.942,00
9	Pendapatan Denda Retribusi	179.589.580,00	180.043.745,00	(454.165,00)
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	671.001.216,00	671.001.216,00	-
11	Pendapatan dari Pengembalian	2.663.715.363,70	2.663.715.363,70	-
12	Pendapatan dari BLUD	11.672.990.184,00	16.155.511.384,00	(4.482.521.200,00)
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	24.400.000,00	24.400.000,00	-
14	Lain - lain PAD yang Sah Lainnya	448.511,00	-	448.511,00

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan PAD yang tidak bisa ditampung dalam rekening Pajak dan Retribusi Daerah maupun dalam Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah-LO selama Tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp23.331.319.170,85

Dari tabel di atas realisasi pendapatan LO dan LRA terdapat selisih sebesar Rp4.611.164.761,00, yang dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini :

1. Terdapat selisih pada Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp110.448.849,00 yang disebabkan :
  - Adanya realisasi piutang Hasil dari Bangun Guna pada Badan Keuangan sebesar Rp90.562.849,00.
  - Realisasi Piutang Sewa BMD pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp18.240.000,00.
  - Penambahan Pendapatan Dierima Dimuka untuk Sewa BMD pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp72.523.000,00.
  - Pengurangan Pendapatan diterima dimuka untuk Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD pada Badan Keuangan sebesar Rp (70.877.000,00).
2. Terdapat selisih pada Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp1.810.942,00 yang disebabkan:
  - Adanya realisasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel sebesar Rp347.527,00.
  - Adanya penambahan Piutang Denda Pajak Hotel Tahun 2022 sebesar Rp178.248,00.
  - Adanya realisasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran sebesar Rp326.027,00.
  - Adanya penambahan piutang Denda Pajak Restoran Tahun 2022 sebesar Rp2.764.498,00.
  - Adanya realisasi piutang Denda Pajak Hiburan sebesar Rp458.250,00
3. Terdapat selisih pada Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp454.165,00 yang disebabkan:
  - Realisasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sebesar Rp55.000,00
  - Realisasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasarpada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sebesar Rp234.295,00.
  - Realisasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sebesar Rp164.520,00.
4. Terdapat selisih pada Pendapatan dari BLUD sebesar Rp4.482.521.200,00 yang disebabkan adanya realisasi Piutang Pendapatan BLUD Rp4.482.521.200,00 dari klain dana BPJS.
5. Terdapat Selisih PAD yang sah Lainnya sebesar Rp448.551,00



5.4.1.1.1	Pendapatan Transfer	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
		565.023.737.353,00	590.328.142.941,00

Adapun realisasi penerimaan Pendapatan Transfer selama tahun 2022 adalah sebesar Rp Rp565.023.737.353,00. adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.4.1.11**  
**Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022**

No	Urutan Rekening	Realisasi LO	Realisasi LRA	Selisih
		Rp	Rp	Rp
		3	4	5=(3-4)
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>		565.023.737.353,00	567.387.873.682,00	(2.364.136.329,00)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	534.420.515.362,00	532.574.902.562,00	1.845.612.800,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.603.221.991,00	34.812.971.120,00	(4.209.749.129,00)

5.4.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
		534.420.515.362,00	558.483.516.783,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO terdiri dari Dana Perimbangan-LO dengan rincian yang terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO; Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO; Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO; dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO;. Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA dan LO dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 5.4.1.12**  
**Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2022**

No	Urutan Rekening	Realisasi LO	Realisasi LRA	Selisih
		Rp	Rp	Rp
		3	4	5=(3-4)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	534.420.515.362,00	532.574.902.562,00	1.845.612.800,00
	Dana Perimbangan-LO	534.420.515.362,00	532.574.902.562,00	1.845.612.800,00
	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	20.791.087.325,00	18.945.474.525,00	1.845.612.800,00
	- Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	419.027.434.440,00	419.027.434.440,00	-

- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	38.100.592.208,00	38.100.592.208,00	-
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	56.501.401.389,00	56.501.401.389,00	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lo dibandingkan dengan realisasi anggaran terdapat selisih pada Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-LO sebesar Rp1.845.612.800,00. Selisih tersebut merupakan penambahan piutang selama tahun 2022 sebesar Rp1.845.612.800,00.

<b>5.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>30.603.221.991,00</b>	<b>31.844.626.158,00</b>

Pendapatan Transfer Antar Daerah LO terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil-LO dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Selama Tahun 2022 realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebesar Rp30.603.221.991,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp30.203.221.991,00 dan realisasi Bantuan Keuangan adalah sebesar Rp400.000.000,00

Perbandingan antara realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dan LRA serta rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.13 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah LO Tahun 2022

No	Uraian Rekening	Realisasi LO	Realisasi LRA	Selisih
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5=(3-4)
A	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO</b>	<b>30,603,221,991.00</b>	<b>34,812,971,120.00</b>	<b>(4,209,749,129.00)</b>
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	30,203,221,991.00	34,412,971,120.00	(4,209,749,129.00)
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	30,203,221,991.00	34,412,971,120.00	(4,209,749,129.00)
2	Bantuan Keuangan	400,000,000.00	400,000,000.00	-
	- Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	400,000,000.00	400,000,000.00	-

Selisih antara realisasi LRA dan LO sebesar Rp4.209.749.129,00 merupakan realisasi piutang transfer provinsi berdasarkan realisasi yang diterima dengan alokasi yang terdapat pada Surat Keputusan Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/007/Pjk-Bapenda/2022 sebesar Rp4.209.749.129,00. Dan pada tahun 2022 adanya penambahan piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp3.781.987.835,00 berdasarkan surat Bapenda No.971.1/06/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Alokasi Depenitif Dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022. Sehingga saldo piutang Piutang Transfer Antar Daerah pada neraca sebesar Rp3.781.987.835,00.

5.4.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
	11.255.207.715,37	302.917.980.467,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui melalui penetapan atau tanpa penetapan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2022 sebesar Rp11.255.207.715,37 adalah akumulasi berupa pendapatan hibah yang dari pemerintah pusat, badan/ lembaga organisasi swasta dalam negeri berupa asset serta pengembalian belanja dan dana BOS serta pengembalian dana hibah tahun sebelumnya. Adapun rincian dari Pendapatan Hibah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

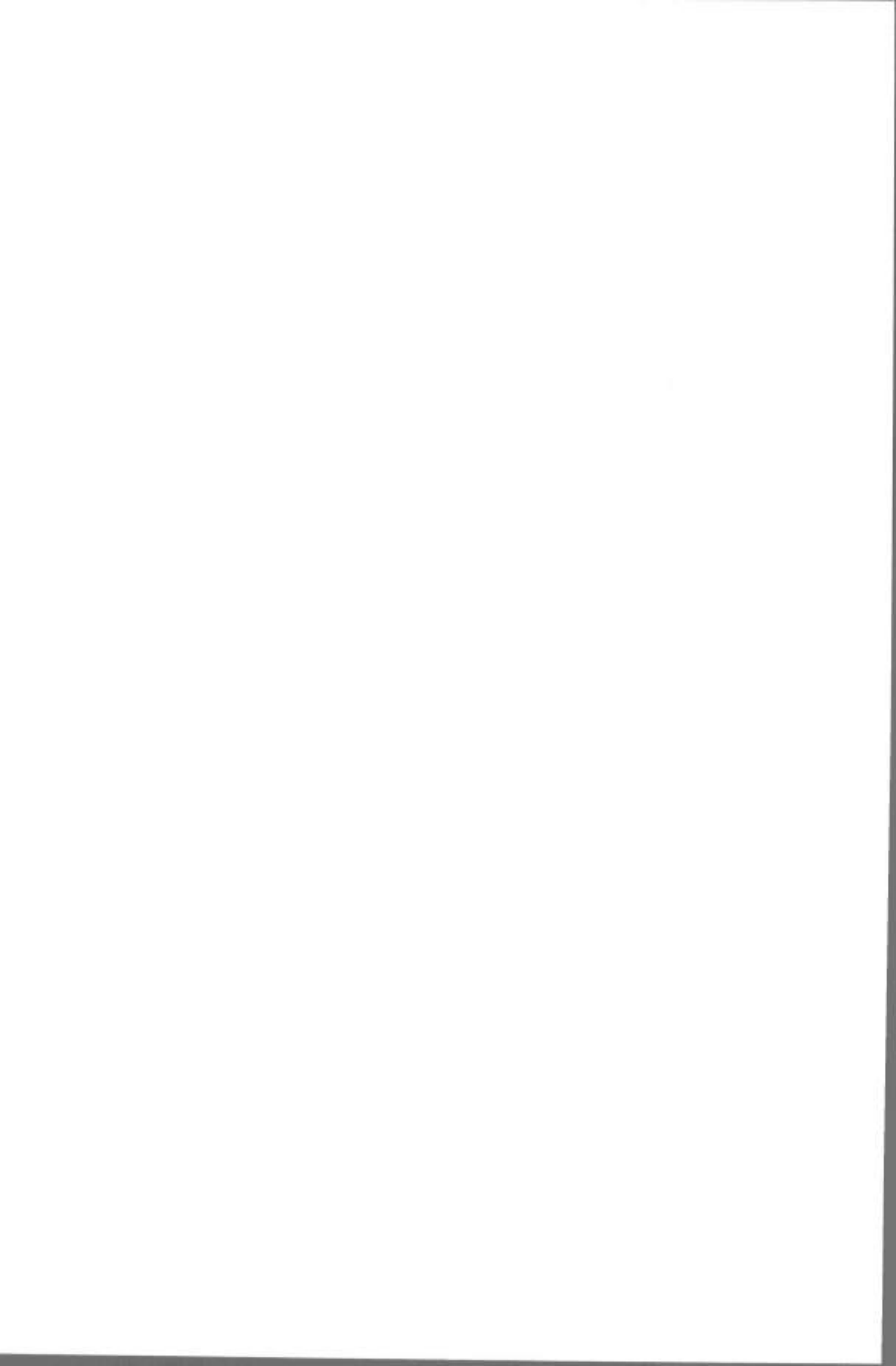
**Tabel 5.4.1.14**  
**Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 2022**

No	Uraian Rekening	Realisasi LO	Realisasi LRA	Selisih
		Rp	Rp	
1	2	3	4	5(3-4)
	<b>PENDAPATAN HIBAH - LO</b>	11.255.207.715,37	217.587.457,37	11.037.620.258,00
1	Pendapatan Hibah	11.037.620.258,00	-	11.037.620.258,00
2	Dana Darurat-LO	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	217.587.457,37	217.587.457,37	-

Selisih antara realisasi Pendapatan Hibah LRA dan LO sebesar Rp11.037.620.258,00 adalah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah untuk BPBD sebesar Rp721.158.500,00
2. Pendapatan Hibah untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Rp849.365.600,00
3. Pendapatan Hibah untuk Dinas Perhubungan Rp9.386.896.158,00
4. Pendapatan Hibah untuk Dinas Kesehatan Kota Rp80.200.000,00

Pengakuan dan pencatatan pendapatan hibah dikarenakan diterimanya Aset Tetap dari Pemerintah Pusat yang diperuntukan untuk BPBD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan. Selanjutnya keterangan hibah berupa barang tersebut juga dapat dilihat pada BAB VI tentang Informasi Lainnya bagian Informasi Dana dan Aset yang Bersumber dari Non APBD Kota Bukittinggi pada Catatan atas Laporan Keuangan ini.



5.4.1.2 Beban	Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
	717.416.678.246,04	658.490.138.784,82

Beban adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, dimana jumlah tersebut merupakan Beban pada Tahun 2022. Realisasi Beban Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2022 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4.1.15  
Beban Tahun 2022

Uraian	2022 Rp	2021 Rp	Kenakan/Penurunan Rp
	2	3	4 = (2-3)
<b>BEBAN</b>	<b>717,416,678,246.04</b>	<b>658,490,138,784.82</b>	<b>58,926,539,461.22</b>
Beban Pegawai	303,024,268,021.66	300,840,522,762.25	2,183,745,259.41
Beban Persediaan	49,001,217,634.41	59,314,130,550.38	(10,312,912,915.97)
Beban Jasa	155,783,489,539.68	132,918,782,054.72	22,864,707,484.96
Beban Pemeliharaan	23,213,656,847.56	19,297,583,710.13	3,916,073,137.43
Beban Perjalanan Dinas	38,754,670,369.00	32,034,823,347.50	6,719,847,021.50
Beban Subsidi	2,910,989,266.00	0.00	2,910,989,266.00
Beban Hibah	40,192,987,711.16	21,027,307,017.43	19,165,680,693.73
Beban Bantuan Sosial	2,290,000,000.00	1,080,000,000.00	1,210,000,000.00
Beban Penyisihan Piutang	3,469,490,061.00	5,663,113,272.30	(2,193,623,211.30)
Beban Lain-lain	8,514,568,496.57	8,025,321,297.10	489,247,199.47
Beban Penyusutan dan Amortisasi	81,741,340,299.00	78,288,554,773.01	3,452,785,525.99
Beban Bantuan Keuangan	8,520,000,000.00	0.00	8,520,000,000.00

5.4.1.2.1 Beban Pegawai	Tahun 2022 Rp.	Tahun 2021 Rp
	303.024.268.021,66	300.840.522.762,25

Beban Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk Gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beban Pegawai terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan ASN, Beban Tambahan Penghasilan ASN, Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Beban Gaji dan Tunjangan DPRD, Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Penggunaan objek tersebut didasarkan pada penggunaan model konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis No.04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.

Realisasi Beban Pegawai dalam Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp303.024.268.021,66 dengan realisasi Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp301.384.096.541,66. Selanjutnya, Realisasi Belanja dan Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.4.1.16**  
**Perbandingan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2022.**

No	Uraian	Beban 2022 Rp	Belanja 2022 Rp	Selisih Rp
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	165,383,630,273.00	165,379,234,960.00	4,395,313.00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	81,660,039,466.66	82,495,178,895.66	(835,139,429.00)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	44,387,226,136.00	39,573,406,240.00	4,813,819,896.00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	9,849,462,007.00	9,849,462,007.00	-
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1,216,458,905.00	1,216,458,905.00	-
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	527,451,234.00	527,451,234.00	-
7	Beban Pegawai BOS	0.00	0.00	-
8	Beban Pegawai BLUD	0.00	2,342,904,300.00	(2,342,904,300.00)
	<b>Jumlah</b>	<b>303,024,268,021.66</b>	<b>301,384,096,541.66</b>	<b>1,640,171,480.00</b>

Selisih antara Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai sebesar Rp1.640.171.480,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selisih antara Beban Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp4.395.313,00. Selisih tersebut disebabkan oleh:
  - Pengurangan Beban Gaji dan Tunjangan ASN atas pembayaran Utang Belanja Pegawai sebesar Rp274.457.324,00 yang terdiri dari:
    - 1) Pembayaran Utang TPP pada Dinas Sosial sebesar Rp5.746.692,00.
    - 2) Pembayaran Utang Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada Sekreariat DPRD sebesar Rp6.909.933,00.
    - 3) Pembayaran Utang Iuran BPJS Kesehatan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp240.923.388,00.
    - 4) Pembayaran Utang TPP BPJS Kesehatan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp20.877.311,00.
  - Penambahan Beban Gaji dan Tunjangan ASN yang disebabkan penambahan Utang Belanja Pegawai sebesar Rp278.852.637,00, yang terdiri dari:





- 1) Penambahan Utang BPJS TPP pada Dinas PUPR sebesar Rp4.482.130,00.
  - 2) Penambahan Utang BPJS TPP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp10.565.876,00.
  - 3) Penambahan Utang BPJS TPP pada Dinas Sekretariat Daerah sebesar Rp13.867.707,00.
  - 4) Penambahan Utang BPJS PNS 4% TPP dan Gaji Septembar sampai dengan Desember 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp19.374.195,00
  - 5) Penambahan Utang Iuran Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota sebesar Rp230.562.729,00.
2. Selisih Beban Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp835.139.429,00 yang disebabkan oleh:
- Pengurangan Beban Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp1.044.215.785,00 yang terdiri dari:
    - 1) Pembayaran Utang TPP Tahun 2021 pada Dinas Sosial sebesar Rp164.396.186,00
    - 2) Pembayaran Utang TPP Tahun 2021 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp194.284.854,00
    - 3) Pembayaran Utang TPP Tahun 2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp556.442.087,00
    - 4) Pembayaran utang BPJS TPP Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp4.482.130,00
    - 5) Pembayaran utang BPJS TPP Tahun 2021 pada Kecamatan Guguk Panjang sebesar Rp124.610.528,00
  - Penambahan Beban Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp213.558.486,00 yang terdiri dari:
    - 1) Penambahan Utang TPP Tahun 2022 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ruang sebesar Rp56.227.039,00.
    - 2) Penambahan Utang TPP Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp123.953.065,00.
    - 3) Penambahan Utang TPP Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp28.823.500,00.
    - 4) Penambahan Utang TPP Tahun 2022 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp7.752,00.



3. Selisih Beban dari Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebesar Rp4.813.819.896,00 yang disebabkan oleh:
- Pengurangan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan objektif Lainnya ASN atas koreksi lebih catat Utang Jasa Layanan RSUD sebesar Rp2.310.946.497,00.
  - Pengurangan Beban Koreksi atas nilai Utang Remunerasi RSUD Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar Rp54.854.148,00
  - Penambahan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN atas reklas dari Beban Pegawai BLUD ke sebesar Rp7.101.962.823,00.
  - Penambahan Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp77.657.718,00.
4. Selisih antara Beban Pegawai BLUD dengan Belanja Pegawai BLUD karena Belanja sebesar Rp2.342.904.300,00 dalam Laporan Operasional Tahun 2022 telah direklasifikasi ke Beban Pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi sehingga telah tergabung dengan Beban Pegawai seluruh SKPD

5.4.1.2.2 Beban Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
	49.001.217.634,41	59.314.130.550,38

Dalam mencatat Beban Persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan beban, dimana seluruh persediaan awal dan pembelian selama tahun berjalan dianggap sebagai beban dan kemudian pada akhir tahun baru dilakukan penyesuaian terhadap beban berdasarkan hasil *stock opname* persediaan oleh masing-masing SKPD. Pada tahun 2022 terdapat Beban Persediaan sebesar Rp49.001.217.634,41.

**Tabel 5.4.1.17**  
**Beban Persediaan Tahun 2022**

No	Uraian	Beban 2022 Rp	Belanja 2022 Rp	Selisih Rp
1	2	3	4	5
1	Beban Barang Pakai Habis	48.989.967.195,41	45.241.953.200,74	3.748.013.994,67
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	11.250.439,00	10.950.439,00	300.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>49.001.217.634,41</b>	<b>45.252.903.639,74</b>	<b>3.748.313.994,67</b>

9/7/22

5.4.1.2.3 Beban Jasa	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
	155.783.489.539,68	132.918.782.054,72

Beban jasa yang Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp155.783.489.539,68 Beban Jasa pada Laporan Operasional tersaji pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.4.1.18**  
**Beban Jasa Tahun 2022**

No	Urutan	Beban 2022 Rp	Belanja 2022 Rp	Selisih Rp
		3	4	5 = 3 - 4
1	Beban Jasa Kantor	122,295,701,520.99	122,177,702,989.99	117,998,531.00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	7,606,995,810.00	7,680,266,210.00	(73,270,400.00)
3	Beban Sewa Tanah	2,270,461,483.00	2,270,461,483.00	-
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2,930,859,944.00	2,930,859,944.00	-
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1,950,919,870.00	1,950,919,870.00	-
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	35,350,000.00	35,350,000.00	-
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	714,683,017.40	773,978,551.40	(59,295,534.00)
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2,063,712,666.25	1,977,848,616.25	85,864,050.00
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	141,000,000.00	141,000,000.00	-
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1,665,443,477.04	1,529,618,140.04	135,825,337.00
12	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	197,023,268.00	197,023,268.00	-
13	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	275,183,332.00	275,183,332.00	-
14	Beban Utang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3,040,207,770.00	2,751,096,770.00	289,111,000.00
15	Beban Barang dan Jasa BOS	10,595,947,381.00	13,491,812,300.00	(2,895,864,919.00)
	<b>Jumlah</b>	<b>155,783,489,539.68</b>	<b>158,183,121,474.68</b>	<b>(2,399,631,935.00)</b>

Perbedaan belanja jasa dengan beban jasa dapat dijelaskan antara lain:

- Selisih antara Beban Jasa Kantor dengan Belanja Jasa Kantor sebesar Rp117.998.531,00 yang disebabkan oleh:
  - Pengurangan Beban Jasa Kantor sebesar Rp91.030.000,00 yang terdiri dari:
    - Pembayaran Utang Jasa Kantor pada Dinas Kesehatan Kota Sebesar Rp7.750.000,00.

- 2) Koreksi Utang Jasa Kantor pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp83.280.000,00.
  - Penambahan Beban Jasa Kantor sebesar Rp209.028.531,00 yang terdiri dari:
    - 1) Penambahan Utang Belanja Kontribusi Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp33.960.000,00.
    - 2) Pengakuan Utang pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp6.284.000,00.
    - 3) Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD ke Beban Jasa Kantor sebesar Rp165.242.310,00.
    - 4) Pengakuan Utang Belanja Tagihan Listrik pada Badan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp3.542.221.
2. Selisih antara Beban Iuran Jaminan/Asuransi dengan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp73.270.400,00 yang disebabkan oleh adanya pengurangan Beban Iuran Jaminan/Asuransi atas pembayaran utang BPJS pada Dinas Kesehatan Kota.
3. Selisih antara Beban Jasa Konsultansi Konstruksi dengan Belanja Beban Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp59.295.534,00 yang disebabkan oleh:
  - Adanya pengurangan Beban Jasa Konsultansi Konstruksi atas kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sebesar Rp78.695.004,00.
  - Pengakuan Utang 20% Perencanaan Penampung Pedagang Pasar Bawah Eks Pedagang Kuliner Stasiun/Parkir Tahun 2022 sebesar Rp19.399.470,00 pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.
4. Selisih antara Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp85.864.050,00 yang disebabkan adanya belanja modal Bangunan Pembawa Irigasi menjadi Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang disebabkan oleh konsultansi survey kondisi irigasi menggunakan E-Paksi.
5. Selisih antara Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp135.825.337,00 yang disebabkan adanya reklas dari Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Dinas Kesehatan Kota.
6. Selisih antara Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp289.111.000,00 yang disebabkan adanya reklas dari Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Dinas Kesehatan Kota.
7. Selisih antara Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp2.895.864.919,00 yang disebabkan adanya reklas ke Beban Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5.4.1.2.4	Beban Pemeliharaan	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
		23.213.656.847,56	19.297.583.710,13

Beban Pemeliharaan sebesar Rp23.213.656.847,56 merupakan Beban Pemeliharaan Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.4.1.19**  
**Beban Pemeliharaan Tahun 2022**

No	Uraian	Beban 2022	Belanja 2022	Selisih
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.745.386.558,26	14.479.596.644,26	265.789.914,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.878.801.245,30	2.616.255.512,60	262.545.732,70
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.239.405.954,00	3.217.713.404,00	21.692.550,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.350.063.090,00	2.350.063.090,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>23.213.656.847,56</b>	<b>22.663.628.650,86</b>	<b>550.028.196,70</b>

Selisih antara belanja pemeliharaan dengan beban pemeliharaan sebesar Rp550.028.196,70 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan beban dari belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp265.789.914,00
2. Penambahan beban dari belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp262.545.732,70
3. Penambahan beban dari belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp21.692.550,00.

5.4.1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
		38.754.670.369,00	32.034.823.347,50

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp38.754.670.369,00. Rincian Realisasi Beban Perjalanan Dinas disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.4.1.20**  
**Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022**

No	Urutan	Beban	Belanja	Selisih
		Rp	Rp	
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.754.670.369,00	38.444.404.647,00	310.265.722,00
	<b>Jumlah</b>	<b>38.754.670.369,00</b>	<b>38.444.404.647,00</b>	<b>310.265.722,00</b>

Selisih antara belanja dan beban perjalanan dinas sebesar Rp310.265.722,00 merupakan reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD. Sebagaimana tertuang pada DPA Kegiatan bahwa belanja barang dan jasa dicatat pada rekening Barang dan Jasa BLUD, begitu juga untuk beban BLUD yang secara langsung di catat pada Beban Barang dan Jasa BLUD, sehingga pada akhir tahun anggaran perlu di reklas sesuai dengan pembebanan pada pos masing-masing rekening sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

**5.4.1.2.6 Beban Subsidi**

	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
	<b>2.910.989.266,00</b>	<b>0</b>

Beban Subsidi Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp2.910.989.266,00. Rincian Realisasi Beban Subsidi disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.4.1.21**  
**Beban Subsidi Tahun 2022**

No	Urutan	Beban	Belanja	Selisih
		Rp	Rp	
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Beban Subsidi kepada BUMD	2.574.989.266,00	2.574.989.266,00	-
2	Beban Subsidi kepada Koperasi	336.000.000,00	336.000.000,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.910.989.266,00</b>	<b>2.910.989.266,00</b>	<b>-</b>

119

5.4.1.2.7 Beban Hibah	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
	40.192.987.711,16	21.027.307.017,43

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk pemberian uang/barang atau jasa kepada lembaga/organisasi masyarakat, pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2022 yaitu sebesar Rp40.192.987.711,16. Tidak ada selisih antara Beban hibah dengan Belanja Pemerintah Kota Bukittinggi, berikut persandingannya:

Tabel 5.4.22  
Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2022

No	Uraian	Hibah	Belanja	Selisih
		Rp	Rp	5 = (3-4)
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.507.400.481,73	11.507.400.481,73	-
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.403.961.659,43	20.403.961.659,43	-
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	951.289.900,00	951.289.900,00	-
4	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta	6.624.278.680,00	6.624.278.680,00	-
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	706.056.990,00	706.056.990,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>40.192.987.711,16</b>	<b>40.192.987.711,16</b>	-

5.4.1.2.8 Beban Bantuan Sosial	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
	2.290.000.000,00	1.080.000.000,00

Beban Bantuan Sosial adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban Bantuan Sosial yang direalisasi pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah Beban Bantuan Sosial direncanakan kepada Keluarga dengan total beban selama tahun 2022 sebesar Rp2.290.000.000,00.



**Tabel 5.4.1.23**  
**Beban Bantuan Sosial Tahun 2022**

No	Uraian	Beban Rp	Belanja Rp	Selisih 5=(3-4)
1	2	3	4	5
1	Beban Bantuan Sosial uang kepada individu	60.000.000,00	0	60.000.000,00
2	Beban Bantuan Sosial kepada keluarga	2.230.000.000,00	2.230.000.000,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.290.000.000,00</b>	<b>2.230.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>

Selisih antara Belanja dan Beban Bantuan Sosial sebesar Rp60.000.000,00 yang merupakan Kewajiban yang belum dibayar atas telah terlaksananya pekerjaan bantuan sosial pada Belanja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2022 yang disebabkan tidak tersedianya pada APBD Perubahan Tahun 2022.

<b>5.4.1.2.9</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
		<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
		<b>3,469,490,061.00</b>	<b>5.663.113.272,30</b>

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2022 adalah sebesar Rp3,469,490,061.00 dengan rincian seperti tercantum dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 5.4.1.24**  
**Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022**

No	Uraian	Realisasi Rp
1	2	3
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1,423,729,411.00
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	1,564,905,469.00
3	Beban penyisihan piutang hasil pengelolaan	-
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	480,855,181.00
	<b>Jumlah</b>	<b>3,469,490,061.00</b>

<b>5.4.1.2.1</b>	<b>Beban Lain-lain</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
		<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
		<b>8.514.568.496,57</b>	<b>8.025.321.297,10</b>

Pada tahun 2022 terdapat realisasi Beban Lain-lain sebesar Rp8.514.568.496,57 yang timbul akibat Aset Rusak Berat/Usang, Belanja Modal *Extracomptable* Pemerintah Kota Bukittinggi.

5.4.1.2.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
		81,741,340,299.00	78.288.554.773,01

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap, Aset Lain-Lain serta Aset Tidak Berwujud yang dapat disusutkan/diamortisasikan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2022 adalah sebesar Rp81,741,340,299.00 dengan rincian seperti tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.4.1.25  
Beban Penyusutan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	38,068,103,188.00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18,672,937,674.00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	24,548,286,473.00
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	-
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	452,012,964.00
	<b>Jumlah</b>	<b>81,741,340,299.00</b>

5.4.1.2.3	Beban Bantuan Keuangan	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
		8.520.000.000,00	0

Beban Bantuan Keuangan merupakan beban yang dikeluarkan oleh suatu entitas untuk memberikan bantuan keuangan kepada pihak-pihak tertentu. Sesuai dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-54-2022 Tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2022. Realisasi Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2022 adalah sebesar Rp8.520.000.000,00.

**5.4.1 Kegiatan Non Operasional**

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp	Rp
(1.124.522.900,71)	(839.250.495,16)

Kegiatan Non Operasional Pemko Bukittinggi merupakan pendapatan dan beban yang bukan merupakan aktifitas rutin, seperti Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Tahun 2022 terdapat defisit dari kegiatan ini dengan rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut:

**Tabel 5.4.1.26**  
**Beban Non Operasional Tahun 2022**

Uraian	Realisasi Rp
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(1.124.522.900,71)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(1.124.522.900,71)</b>
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	300.000,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	(208.740.226,00)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	(916.082.674,71)

**5.5 LAPORAN ARUS KAS**

**Tahun 2022**  
**(Rp)**  
**77.322.424.688,46**

**Tahun 2021**  
**(Rp)**  
**132.987.559.855,90**

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan serta perubahan kas dan setara kas yang terjadi pada Kas Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2022. Penerimaan dan pengeluaran tersebut diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dan Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran.

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 tersaji pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.5.1**  
**Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2022 dan 2021**

URAIAN	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	-	
Arus Kas Masuk	-	
Pajak Daerah	49,570,750,398.00	40,765,025,893.00
Retribusi Daerah	46,662,198,969.00	27,401,880,331.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,641,291,925.00	5,482,031,608.00
Lain-lain PAD yang Sah	27,886,583,891.85	17,994,114,585.01
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	532,574,902,562.00	561,086,880,504.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	34,812,971,120.00	32,675,257,234.00
Pendapatan Hibah	-	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	217,587,457.37	3,086,628,530.00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>698,366,486,323.22</b>	<b>688,491,818,685.61</b>
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	301,384,096,541.66	191,036,056,141.25
Belanja Barang dan Jasa	264,544,058,412.28	202,176,372,062.43
Belanja Subsidi	2,910,989,266.00	-
Belanja Hibah	40,192,987,711.16	15,324,545,864.43
Belanja Bantuan Sosial	2,230,000,000.00	1,080,000,000.00
Belanja Tidak Terduga	271,437,350.00	1,844,107,190.00
Belanja Bantuan Keuangan	8,520,000,000.00	-
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>620,053,569,281.10</b>	<b>411,161,081,258.11</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>78,312,917,042.12</b>	<b>277,330,737,427.50</b>
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Tanah		0,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	35,900,000.00	143,235,768.00

Pencairan Dana Cadangan	-	26,756,453.00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>35,900,000.00</b>	<b>169,992,221.00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Belanja Modal Tanah	0.00	0.01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48,131,479,720.00	30,066,387,600.80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25,739,508,374.06	12,970,244,501.62
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45,500,951,384.50	24,149,072,116.02
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,633,690,566.00	369,627,390.00
Penyertaan Modal Daerah	10,000,000,000.00	-
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>134,005,630,244.56</b>	<b>67,555,331,668.44</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(133,969,730,244.56)</b>	<b>(67,385,339,447.44)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	47,860,737,563.00	-
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>47,860,737,563.00</b>	<b>-</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	47,860,737,563.00	-
Koreksi SILPA	8,558,965.00	5,008,948,722.33
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>47,869,296,528.00</b>	<b>5,008,948,722.33</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>(8,558,965.00)</b>	<b>(5,008,948,722.33)</b>
<b>Kenalkas / (Pemurunan) Kas</b>	<b>(8,558,965.00)</b>	<b>204,936,449,257.73</b>
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas Di Bendahara Penerimaan	132,987,559,855.90	(77,170,835,364.66)
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas Di Bendahara Penerimaan	77,322,424,888.46	127,765,613,893.07
Kas di BLUD	12,610,034,870.69	3,081,986,359.83
Kas Dana BOS	1,014,071,646.00	2,139,959,603.00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya	202.00	-
Setoran Kas		0.00
<b>Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran &amp; Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>63,698,317,969.77</b>	<b>132,987,559,855.90</b>

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	78.312.917.042,12	277.330.737.427,50

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Komponen penyusun laporan arus kas dari aktivitas operasi bersumber dari pendapatan daerah (selain penjualan aset tetap) dikurangi dengan belanja daerah (selain belanja modal) selama tahun 2022.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp78.312.917.042,12 yang merupakan selisih dari arus kas masuk sebesar Rp698.366.486.323,22 yang merupakan seluruh Realisasi APBD tahun 2022 dari Pos Pendapatan Daerah selain pendapatan dari penjualan aset tetap dengan Arus Kas Keluar Rp620.053.569.281,10 yang merupakan Realisasi APBD tahun 2022 dari Pos Belanja Daerah selain Belanja Modal, lebih rinci seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.5.2**  
**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

URAIAN	2022	2021
1	2	2
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	-	
<b>Arus Kas Masuk</b>	-	
Pajak Daerah	49,570,750,398.00	40,765,025,893.00
Retribusi Daerah	46,662,398,969.00	27,401,880,331.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,641,291,925.00	5,482,031,608.00
Lain-lain PAD yang Sah	27,886,583,891.85	17,994,114,585.61
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	532,574,902,562.00	561,086,880,504.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	34,812,971,120.00	32,675,257,234.00
Pendapatan Hibah	-	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	217,587,457.37	3,086,628,530.00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>698,366,486,323.22</b>	<b>688,491,818,685.61</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Belanja Pegawai	301,384,096,541.66	191,036,056,141.25
Belanja Barang dan Jasa	264,544,058,412.28	202,176,372,062.43
Belanja Subsidi	2,910,989,266.00	-
Belanja Hibah	40,192,987,711.16	15,024,545,864.43
Belanja Bantuan Sosial	2,230,000,000.00	1,080,000,000.00

URAIAN	2022	2021
1	2	2
Belanja Tidak Terduga	271,437,350.00	1,844,107,190.00
Belanja Bantuan Keuangan	8,520,000,000.00	-
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>620,053,569,281.10</b>	<b>411,161,081,258.11</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>78,312,917,042.12</b>	<b>277,330,737,427.50</b>

<b>5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>(133.969.730.244,56)</b>	<b>(67.385.339.447,44)</b>

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang bertujuan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap, aset lainnya serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Komponen penyusun laporan arus kas dari aktivitas investasi bersumber dari pendapatan atas penjualan investasi Pemerintah Kota Bukittinggi baik berupa aset tetap maupun investasi selain aset tetap dikurangi dengan pengeluaran investasi baik berupa investasi terhadap aset tetap maupun investasi dalam bentuk lainnya.

Arus kas bersih dari aktivitas ini adalah selisih antara arus kas masuk dari aktivitas investasi dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar (Rp133.969.730.244,56) dengan rincian arus kas masuk sebagai berikut:

Arus kas masuk :

1. Penerimaan dari pencairan Dana Cadangan sebesar Rp0,00
2. Penjualan aset sebesar Rp35.900.000,00

Arus kas keluar:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp48.131.479.720,00
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp25.739.508.574,06
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp45.500.951.384,50
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.633.690.566,00
5. Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00

**Tabel 5.5.3**  
**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

URAIAN	2022	2021
1	2	3
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Tanah		
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya		
Hasil Penjualan Aset Lainnya	35,900,000.00	143,235,768.00
Pencairan Dana Cadangan	0.00	26,756,453.00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>35,900,000.00</b>	<b>169,992,221.00</b>
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Tanah		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48,131,479,720.00	30,066,387,660.80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25,739,508,574.06	12,970,244,501.62
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45,500,951,384.50	24,149,072,116.02
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,633,690,566.00	369,627,390.00
Penyertaan Modal Daemh	10,000,000,000.00	0.00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>134,005,630,244,56</b>	<b>67,555,331,668,44</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(133,969,730,244,56)</b>	<b>(67,385,339,447,44)</b>

**5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran**

**Tahun 2022  
(Rp)  
(8.321.965,00)**

**Tahun 2021  
(Rp)  
(5.008.948.722,33)**

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah sebesar (Rp8.321.965,00) yang merupakan selisih dari penerimaan sebesar Rp47.860.974.563,00 dan pengeluaran Rp47.869.296.528,00. Rincian penerimaan dan pengeluaran pada aktivitas transitoris dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 5.5.4**  
**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

URAIAN	2022	2021
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	47.860.974.563,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>47.860.974.563,00</b>	<b>0,00</b>
Arus Kas Keluar	47.860.737.563,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	8.558.965,00	5.008.948.722,33
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>47.869.296.528,00</b>	<b>5.008.948.722,33</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>(8.321.965,00)</b>	<b>(5.008.948.722,33)</b>

<b>5.5.4 Kenalkan/ Penurunan Kas</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b> <b>(55.665.135.167,44)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b> <b>204.936.449.257,73</b>
--------------------------------------	--	---

Angka 5.5.1 sampai dengan angka 5.5.4 di atas adalah menjelaskan kronologis atau pembagian dari mutasi kas daerah selama tahun 2022 yaitu terjadi penurunan kas daerah sebesar RpRp55.665.135.167,44 dari sebelumnya sebesar Rp132.987.559.855,90 sehingga posisi kas daerah menjadi Rp77.322.424.688,46 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.020.824,00;
2. Kas pada Kas BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.610.034.870,69;
3. Kas pada Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.014.071.646,00;
4. Kas pada Kas Dana BOK per 31 Desember 2022 sebesar Rp202,00;
5. Saldo pada Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.691.297.145,77.

Rincian posisi kas selama Tahun 2022 sebesar Rp77.322.424.688,46 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.5.5**  
**Saldo Kas dari Arus Kas**

URAIAN	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	2	3
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas Di Bendahara Penerimaan	132.987.559.855,90	(77.170.835.364,66)
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas Di Bendahara Penerimaan	77.322.424.688,46	127.765.613.893,07
Kas di BLUD	12.610.034.870,69	3.081.986.359,83
Kas Dana BOS	1.014.071.646,00	2.139.959.603,00
Kas Dana Kapitasi pada FK TP		

URAIAN	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Kas Lainnya	202,00	-
Setara Kas		0,00
<b>Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran &amp; Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>63.698.317.969,77</b>	<b>132.987.559.855,90</b>

Selisih nilai Saldo Akhir Kas dengan nilai SiLPA adalah sebesar Rp237.000,00 yang merupakan Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp237.000 yang merupakan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 oleh RSUD Kota Bukittinggi sebesar Rp243.000,00 dan keterlambatan pembayaran potongan gaji untuk Taspen sebesar Rp6.000,00

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	2.033.022.032.295,63	2.040.816.158.974,56

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif kesalahan perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir. Saldo awal ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.033.022.032.295,63. Berikut rincian penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022:

**Tabel 5.6.1**  
**Laporan Perubahan Ekuitas**

URAIAN	2021	2021
EKUITAS AWAL	2.040.816.158.974,56	1.687.944.342.619,61
SURPLUS/DEFISIT-LO	(15.075.012.311,53)	342.032.863.452,96
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	7.280.885.632,60	10.838.952.901,99
EKUITAS AKHIR	2.033.022.032.295,63	2.040.816.158.974,56

Pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai yang terdapat pada Ekuitas awal merupakan nilai Ekuitas pada Neraca LKPD Tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.040.816.158.974,56;
2. Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, dan Kejadian Luar Biasa. Surplus/defisit Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022 sebesar (15.075.012.311,53);
3. Ekuitas Akhir sebesar Rp2.033.022.032.295,63;
4. Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengoreksi Ekuitas adalah sebesar Rp7.280.885.632,60 sebagai penambah/pengurang Ekuitas pada Tahun 2022.

## BAB VI INFORMASI LAINNYA

### 6.1. Aset (Tanah) dalam Penelusuran

Pada Tahun 2013, di Buku Inventaris Sekretariat Daerah terdapat beberapa Aset Tanah yang diragukan keberadaannya sehingga Aset tersebut memerlukan penelusuran. Untuk proses lebih lanjut, karena Tanah tersebut tidak digunakan untuk penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, maka aset tersebut di pindahkan pencatatannya ke Pengelola pada Aset Lain-lain berupa 9 (sembilan) bidang tanah yang belum diketahui lokasi fisiknya. Tanah tersebut telah tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Bukittinggi dalam jangka waktu yang cukup lama dan hingga saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan upaya untuk menelusuri keberadaan fisik tanah tersebut namun belum menemui titik terangnya. Rincian aset tanah yang masih dalam penelusuran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.1.1**  
**Daftar Aset Tanah yang masih dalam Penelusuran**

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Asal usul	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Untuk Jalan					187.900.000,00	Lokasi tidak diketahui
2	Tanah kosong	715	1952	Pinang Sabatang Kel Bukit Apit	Eks Jepang	14.300.000,00	Longsor masuk ngarai
3	Tanah kosong	4.740,00	1952	Pinang Sabatang Kel Bukit Apit	Pembelian	127.980.000,00	Longsor masuk ngarai
4	Tanah kosong	430	1956	Campago Guguk Bulek	Pembelian	20.640.000,00	Tidak ditemukan
5	Tanah kosong	28.062,00	1945	Ngarai Bawah	Eks Jepang	31.963.000,00	Dikuasai masyarakat, proses tambahan ganti rugi tidak selesai
6	Tanah kosong	18.866,00	0	Ateh Birugo Kelurahan Birugo	Pembelian	394.639.000,00	Dikuasai masyarakat
7	Tanah kosong	5.642,00	1956	Bukit Campago Kel Campago Guguk Bulek		1.547.014.000,00	Tidak ditemukan
8	Tanah kosong	600	1956	Campago Guguk Bulek	Pembelian	361.088.000,00	Dirjen Penasyarakatatan II
9	Tanah kosong	4.027,00	1956	Bukit Campago Kel Campago GB	Eks Jepang	198.095.000,00	Tidak ditemukan
<b>TOTAL</b>		<b>63.082,00</b>				<b>2.883.619.000,00</b>	

## 6.2. Kewajiban Kontingensi

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan koreksi pencatatan Kewajiban Jangka Pendek-Bagian Lancar Utang Jangka Pendek berupa Kredit Inpres Pasar (KIP) ke Kewajiban Kontingensi.

Koreksi tersebut dilakukam karena dalam konsultasi, koordinasi dan penelusuran kewajiban tersebut ke pemerintah pusat, pihak pemerintah pusat mengaku tidak memiliki piutang tersebut ke pemerintah Kota Bukittinggi, Maka pada tahun 2022 ini Pemerintah Kota Bukittinggi tidak lagi mencatatnya dalam komponen Neraca Tahun 2022 namun mengungkapkan dengan memadai pada pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada neraca Per 31 Desember 2021 sebesar Rp999.500.000,00. Selama tahun 2022 tidak ada mutasi penambahan maupun pengurangan sehingga nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 tetap sebesar Rp999.500.000,00.

Utang Kredit Inpres Pasar (KIP) pada Kota Bukittinggi sampai saat ini belum jelas status kepemilikannya walaupun telah beberapa kali dikonfirmasi baik lisan maupun tulisan ke pihak Departemen Keuangan Republik Indonesia maupun Kementerian Keuangan RI dan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jakarta.

Melalui konfirmasi tulisan langsung di Departemen Keuangan RI maupun via telepon dengan pihak Subdit Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Pemko Bukittinggi mendapatkan informasi bahwa angsuran KIP ini hanya menjadi Penerimaan Lain-lain Negara.

- 1) Pada Tahun 2013, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan upaya :
  - a. Menghadiri undangan Sekretaris Dirjen Keuangan Daerah atas nama Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI. Undangan tersebut ditujukan selain kepada Pemko Bukittinggi, juga kepada pihak-pihak terkait Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda Pembahasan permasalahan Hutang Pemerintah Kota Bukittinggi yang berasal dari Kredit Inpres Pasar (KIP). Undangan rapat tersebut merupakan respon positif dari Kementerian Dalam Negeri RI atas Surat Walikota Nomor 970.1372/DPKAD.05/XII-2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Informasi mengenai Kredit Inpres Pasar (KIP) Pemerintah Kota Bukittinggi. Pada notulen rapat tersebut terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh pihak Pemerintah Kota Bukittinggi diantaranya mengumpulkan dokumen perjanjian, bukti setor, surat tagihan dan menyampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan

Direktur Sistem Manajemen Investasi. Selanjutnya pihak-pihak tersebut akan menindaklanjutinya;

- b. Dalam rangka menindaklanjuti rapat tersebut, pada tanggal 13 Desember 2013 Pemko Bukittinggi telah mengirimkan kembali surat konfirmasi data dan status utang Kredit Inpres Pasar Sistem (KIP) Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor 970.1970/DPKAD.05/XII-2013 kepada Dirjen Keuangan Daerah RI Kementerian Dalam Negeri. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI untuk meminta jadwal rapat/diskusi langsung pada tanggal 19 Desember 2013. Beberapa Staf Pemko Bukittinggi telah melakukan rapat/diskusi sesuai permohonan agenda tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1. Rapat di Kementerian Keuangan RI

- a) Dirjen Perbendaharaan dan Pemerintah Kota Bukittinggi sangat mengapresiasi upaya yang telah dan tengah dilakukan demi jelasnya status hutang KIP. Pihak SMI pun sangat berharap mereka mampu membantu Pemko Bukittinggi dalam menelusuri data dan informasi Kredit Inpres Pasar (KIP) ini dengan petunjuk dokumen yang telah disampaikan kepada mereka;
- b) Pemko Bukittinggi diharapkan bisa mendapatkan dan mencari dokumen yang menunjukkan tanggal mutasi kas daerah dari Bank Nagari ke pihak BRI sebagai bank penerusan pembayaran angsuran sebesar Rp500.000.000,00 yang merupakan pembayaran terakhir tanggal 28 Desember 2006, baik berupa rekening koran maupun keterangan konfirmasi dari pihak Bank Nagari dan BRI Cabang Bukittinggi.

2. Rapat di Kementerian Dalam Negeri RI

- a) Dirjen Keuangan Daerah (DKD) sangat mengapresiasi upaya yang telah dan tengah dilakukan demi jelasnya status hutang. Pihak DKD pun berharap pihak Ditjen Perbendaharaan akan mampu mengungkap data dan status dengan menelusuri data dan informasi Kredit Inpres Pasar (KIP) ini dengan petunjuk dokumen yang disampaikan Pemko Bukittinggi;
- b) Pihak DKD juga menyarankan agar Pemko Bukittinggi tetap memegang perjanjian awal dengan pihak BRI dan jika keuangan daerah memungkinkan saldo hutang KIP yang ada tersebut diangsur saja sembari menunggu kejelasan data dan status dari Kementerian Keuangan RI. Pemko Bukittinggi menanggapi bahwa demi efisiensi dan efektif serta tepat sarannya pengeluaran kas daerah. Pemko

Bukittinggi bertekad menunda pembayaran sampai mendapatkan data dan status yang jelas mengenai hutang Kredit Inpres Pasar (KIP) dari pemerintah pusat;

- c) Pihak DKD pun dalam rapat telah memohon maaf atas kekurangan informasi dan data yang dimiliki oleh DKD sekaitan dengan Kredit Inpres Pasar Pemko Bukittinggi, antara lain disebabkan karena perpindahan kantor yang sering, struktur organisasi kementerian yang telah berganti serta mutasi SDM yang cukup tinggi.

- 2) Pada tahun 2019 atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI, Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan rekonsiliasi dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 yang menyatakan bahwa utang KIP Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun 2019 berjumlah sebesar Rp999.500.00,00 sebagaimana yang tersaji dalam tabel dibawah ini :

**Tabel Tabel. 6.1.2**  
**Daftar Rincian Utang Kredit Inpres Pasar (KIP)**

No	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Uraian Kredit Pasar	Realisasi Kredit (Rp)	Pelunasan S.d. Desember 2007 (Rp)	Tunggakan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Bunto TA 1982/1983	325.000.000,00	59.500.000,00	265.500.000,00
2	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Aur Tajungkarang TA 1982/1983	275.000.000,00	27.500.000,00	247.500.000,00
3	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Atas TA 1982	460.000.000,00	-	460.000.000,00
4	16/4/Kep/GBI	29 Maret 1986	Pasar Aur Kuning TA 1983/1984	300.000.000,00	300.000.000,00	-
5	16/4/Kep/GBI	29 Maret 1986	Pasar Bawah TA 1983/1984	285.000.000,00	258.500.000,00	26.500.000,00
<b>Total</b>				<b>1.645.000.000,00</b>	<b>645.500.000,00</b>	<b>999.500.000,00</b>

- 3) Dalam masa audit Laporan Keuangan Tahun 2021 Pemko Bukittinggi telah kembali menyurati Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI untuk meminta konfirmasi mengenai status utang ini, dan telah dilakukan komunikasi telepon dengan petugas yang terkait. Dalam hasil komunikasi tersebut pihak Direktorat Sistem Manajemen Investasi akan berupaya menelusuri dan menentukan status utang ini dan akan mengikuti prosedur untuk

proses pemutihan jika memungkinkan nantinya. Sampai sekarang status masih menunggu kabar selanjutnya dari Kementerian Keuangan.

- 4) Untuk tahun 2022 belum ada peluang atau perkembangan yang berarti untuk utang ini, dan besar harapan Pemko Bukittinggi agar ada rekomendasi untuk penghapusan utang tersebut.

### **6.3. Kebijakan Pengelolaan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022 Untuk Pemulihan Ekonomi, Perlindungan Sosial dan Pengendalian Inflasi Pasca Pandemi Covid-19**

#### **6.3.1. Pergeseran dan Perubahan APBD 2022**

Selama tahun 2022 tidak ada amanat pemerintah pusat ataupun kebutuhan daerah untuk mengadakan penyesuaian (refocussing) anggaran terkait kebutuhan anggaran untuk Pandemi Covid-19 beserta akibatnya. Aktivitas koreksi dan penyesuaian anggaran hanya pergeseran APBD dan perubahan APBD, pergeseran tersebut adalah 3 (tiga) kali sebelum perubahan dan 1 (satu) kali pergeseran pasca perubahan APBD.

#### **6.3.2. Program Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi**

##### **6.3.2.1. Program Pemerintah Pusat**

Penanggulangan pandemi Covid-19 tak terlepas dari upaya pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, selama pandemi corona tersebut berlangsung, DPR RI bersama pemerintah menganggarkan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), yang salah satunya menysasar perlindungan sosial bagi masyarakat.

Pandemi Covid-19 tak hanya menyisakan dampak kesehatan bagi rakyat Indonesia dan warga dunia. Namun juga memberikan dampak terhadap permasalahan sosial dan kelesuan ekonomi nasional. Tapi berkat Program PC-PEN yang fokus kepada dampak tersebut, permasalahan dapat diatasi.

Berkaca pada PC-PEN tahun 2021, dinilai program tersebut terbukti efektif dan responsif. Tak hanya itu program PC-PEN tahun lalu memang terbukti mampu mengantisipasi dampak sosial dan kesehatan, sehingga dapat tetap mengakselerasi pemulihan ekonomi.

Momentum berlanjutnya pemulihan di tahun 2021 menjadi modal yang kuat bagi Walikota Bukittinggi untuk mengimplementasikan visi dan misi kerakyatan dan melanjutkan kebijakan pemerintah pusat di tahun 2022.



PC-PEN pada program perlindungan sosial bersama pemulihan ekonomi dianggap mampu menekan tingkat kemiskinan salah satunya melalui beberapa program. Itulah kenapa Pemerintah Kota Bukittinggi mendorong agar perlindungan sosial pada PC-PEN juga harus fokus untuk mengakselerasi pemulihan melalui berbagai program penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan.

Sektor perlindungan sosial tetap menjadi perhatian utama masyarakat luas. Tak hanya itu, pemulihan ekonomi masyarakat juga harus memperhatikan faktor sosial masyarakat yang ada.

Pemerintah diketahui tetap melanjutkan program perlindungan sosial. Program yang diutamakan merupakan lanjutan dari PEN tahun-tahun sebelumnya, seperti Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Alokasi anggaran itu untuk program bantuan sosial (bansos) sebagai penyangga apabila terjadi kembali pembatasan kegiatan masyarakat.

Program pemerintah pusat tersebut diejawantahkan dalam APBD daerah, yang bersumber dananya dari Dana Transfer Umum untuk pemulihan ekonomi dianggarkan sebesar Rp110.412.845.442,00 sebesar Rp94.823.912.006,00 yang terdiri dari:

- a. Program Perlindungan Sosial dianggarkan sebesar Rp45.893.253.147,00 terealisasi sebesar Rp42.121.812.057,00 dengan rincian sebagaimana daftar berikut ini:

**Tabel 6.1.2.1. 1. Daftar Anggaran dan Realisasi Kegiatan yang Diperuntukkan untuk Program Perlindungan Sosial**

No.	Perlindungan Sosial	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>DINAS SOSIAL</b>					
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	33.305.500	31.935.500	22.337.500	Perlinsos
2	Penyediaan Makanan	76.850.000	100.000.000	40.171.200	Perlinsos
3	Penyediaan Permakanan	114.590.000	106.730.000	84.057.500	Perlinsos
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	120.727.750	117.067.750	96.795.400	Perlinsos
5	Pemberian Layanan Kedaruratan	58.000.000	54.000.000	14.225.750	Perlinsos
6	Pemberian Layanan Rujukan	142.981.910	136.729.992	111.886.897	Perlinsos
7	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	167.972.610	262.580.492	245.279.583	Perlinsos

8	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	237.697.700	237.657.500	230.067.500	Perlinsos
9	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	261.146.500	210.046.500	191.996.899	Perlinsos
10	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	305.087.620	311.323.784	226.060.330	Perlinsos
11	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	768.084.500	822.649.500	796.692.198	Perlinsos
12	Pemberian Layanan Kedaruratan	129.664.000	122.284.000	87.268.847	Perlinsos
13	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	544.070.000	637.426.250	574.370.545	Perlinsos
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					
1	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	15.488.949.000	15.903.269.000	14.336.935.846	Perlinsos Lainnya
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>					
1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	111.857.800	118.777.800	117.695.990	Perlinsos Lainnya
2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	845.504.840	1.008.973.646	1.008.784.137	Perlinsos Lainnya
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>					
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	143.853.400	138.028.400	110.629.450	Perlinsos Lainnya
2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	386.572.000	385.079.500	341.301.400	Perlinsos Lainnya
3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	162.611.250	154.858.750	146.673.790	Perlinsos Lainnya
4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	915.656.000	754.561.000	741.506.750	Perlinsos Lainnya
5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.129.463.500	1.927.640.000	1.516.712.704	Perlinsos Lainnya
6	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	9.502.410.396	9.034.220.106	8.561.570.814	Perlinsos Lainnya
<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					

1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4.586.646.450	3.334.166.374	3.253.131.375	Perlinsos Lainnya
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.935.607.020	6.992.680.871	6.512.970.203	Perlinsos Lainnya
<b>DINAS KEBAKARAN</b>					
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.862.956.200	2.007.360.278	1.789.769.101	Perlinsos Lainnya
<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>					
1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	243.301.600	285.356.600	283.933.094	Perlinsos Lainnya
2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	752.039.650	697.849.554	679.587.254	Perlinsos Lainnya
<b>DINAS SOSIAL</b>					
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	33.305.500	31.935.500	22.337.500	Perlinsos
2	Penyediaan Makanan	76.850.000	100.000.000	40.171.200	Perlinsos
3	Penyediaan Permakanan	114.590.000	106.730.000	84.057.500	Perlinsos
<b>JUMLAH (1)</b>		<b>46.027.607.196</b>	<b>45.893.253.147</b>	<b>42.121.812.057</b>	

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dianggarkan sebesar Rp64.519.592.295,00 yang terealisasi sebesar Rp52.702.099.949,00 yang rinciannya sebagaimana daftar di bawah ini:

**Tabel 6.1.2.1.2 Daftar Anggaran dan Realisasi Kegiatan yang Diperuntukkan untuk Program Pemberdayaan Ekonomi**

No.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN</b>					
1	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7.127.889.935	5.582.779.762	4.277.386.187	Sarana PED
2	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.925.148.500	5.962.824.366	5.271.063.106	
3	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	189.976.000	128.656.000	121.142.185	

Pemerintah Kota Bukittinggi

4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	72.750.000	71.150.000	69.895.315	
5	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	5.692.313.510	4.084.168.046,00	3.978.522.266,00	
6	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.084.718.950	1.402.733.232,00	1.361.528.147,00	
7	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.234.761.394	1.237.052.636	1.195.907.185	
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	10.793.000	6.953.000	4.758.300	
9	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	12.764.000	19.311.268	15.796.268	
10	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	21.788.000	30.788.000	23.512.500	
11	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	500.491.000	487.541.000	415.011.982	
<b>DPMPTSPPTK</b>					
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	433.060.900	652.160.100	522.466.461	Pemberdayaan UMKM lainnya/PED Sarpras Layanan Publik
2	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	272.600.000	238.176.000	217.016.605	
3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	118.609.000	116.229.000	112.796.490	
4	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	67.265.000	67.265.000	66.095.800	
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	53.005.170	48.607.451	32.322.000	
6	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	52.035.000	17.864.000	16.993.300	
7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	140.783.804	102.451.804	91.188.421	
8	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	340.670.516	549.218.916	533.775.830	

9	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	444.517.000	782.142.000	626.190.192	
10	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	59.160.800	54.111.800	44.357.100	
11	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	803.924.890	908.958.668	836.002.227	
<b>DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>					
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	142.864.550	140.929.550	118.940.850	
2	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	438.485.000	396.430.000	275.789.200	
3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	3.469.451.850	1.111.232.827	979.267.642	
4	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	298.442.500	0	0	
5	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	675.000.000	1.066.450.000	945.112.339	
6	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.281.291.642	3.241.042.706	3.073.780.941	
7	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.630.000.200	3.191.538.180	2.566.544.442	
8	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.744.567.000	3.314.615.525	3.133.672.257	
9	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	229.729.000	198.422.950	155.211.400	Pemberdayaan UMKM lainnya/PED Sarpras Layanan Publik
10	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.970.098.345	3.314.615.525	3.133.672.257	
11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	347.029.200	387.322.750	311.630.800	
12	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	229.729.000	198.422.950	155.211.400	
13	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	584.091.000	440.641.000	278.630.280	

14	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	793.530.000	950.850.000	941.549.500	
15	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	914.900.430	2.079.840.430	1.822.440.038	
16	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	346.998.500	337.298.500	219.632.150	
<b>DINAS PERTANIAN</b>					
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	505.911.500	603.552.500	556.864.958	
2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	111.560.000	107.760.000	5.102.250	
3	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	43.825.000	42.650.000	40.995.000	
4	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	217.899.000	296.649.000	289.308.779	
6	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	587.001.000	891.150.412	841.094.337	
8	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	218.672.340	327.952.340	305.709.209	
9	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	98.848.000	95.038.000	86.599.200	
10	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	774.103.400	1.015.423.400	991.521.825	
11	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	370.609.870	370.308.504	308.813.658	
12	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	118.829.300	115.109.000	84.305.800	
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	25.329.000	22.769.000	20.012.702	
14	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	67.586.170	70.429.804	68.745.604	Subsidi Pertanian
15	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	250.252.944	259.934.690	244.492.579	
16	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	239.926.890	209.229.657	202.361.757	
17	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	23.648.000	22.473.000	21.910.400	
18	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	107.740.370	109.134.004	103.009.904	
19	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	231.727.370	237.676.654	177.541.604	

<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	22.218.942.000	6.060.278.680	1.304.189.053	Pemberdayaan UMKM lainnya/PED Sarpras Layanan Publik
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	405.855.880	440.448.366	355.773.222	
3	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	140.323.570	244.954.604	199.532.137	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	29.475.000	40.723.000	31.006.520	
5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	4.880.620.000	4.080.523.000	3.798.099.204	
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>					
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.913.178.160	3.052.412.330	2.649.522.627	Pemberdayaan UMKM lainnya/PED Sarpras Layanan Publik
2	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	146.008.130	137.267.830	127.047.838	
3	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	109.357.000	152.447.000	135.928.593	
<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>					
1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	572.240.100	678.049.420	662.087.961	Pemberdayaan UMKM lainnya/PED Sarpras Layanan Publik
2	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.168.332.010	1.168.106.546	1.145.709.367	
<b>JUMLAH (2)</b>		<b>86.295.766.534</b>	<b>64.519.592.295</b>	<b>52.702.099.949</b>	

Dalam proses Perubahan APBD Tahun 2022, terbitlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Terbitnya PMK tersebut adalah untuk mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyalurkan 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial. Maka, diproseslah di perubahan APBD anggaran belanja tersebut sebesar

Rp2.236.268.913,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.672.268.913,00. Daftar anggaran dan realisasi belanja tersebut sebagai berikut:

**Tabel 6.1.2.1.3. LAPORAN REALISASI BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL  
(PMK 134/PMK/07/2022)  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Uraian	Jenis Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Jumlah	Sumber Pendanaan		Jumlah	%
				DAU	DBH		
(a)	(b)	(c)	(f)=(d)+(e)	(h)	(i)	(j)=(h)+(i)	(k)=(j)/(f)
<b>I</b>	<b>BANTUAN SOSIAL</b>						
	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (Dinas Sosial)	Belanja Subsidi	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	100
	<b>Subtotal BANTUAN SOSIAL</b>		<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>II</b>	<b>PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA</b>						
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dinas PMPTSP)	Belanja Barang dan Jasa	336.268.913	206.671.340	129.597.573	336.268.913	100
	<b>Subtotal PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA</b>		<b>336.268.913</b>	<b>206.671.340</b>	<b>129.597.573</b>	<b>336.268.913</b>	<b>100</b>
<b>III</b>	<b>SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI</b>						
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Belanja Subsidi	400.000.000	336.000.000	-	336.000.000	84,00
	<b>Subtotal SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI</b>		<b>400.000.000</b>	<b>336.000.000</b>	<b>-</b>	<b>336.000.000</b>	<b>84,00</b>
<b>IV</b>	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA</b>						
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan (Dinas Pertanian)	Belanja Subsidi	500.000.000	-	-	-	0,00
	<b>Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA</b>		<b>500.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TA. 2022</b>		<b>2.236.268.913</b>	<b>1.206.671.340</b>	<b>129.597.573</b>	<b>1.672.268.913</b>	<b>74,78</b>

### 6.3.3. Program APBD - Tabungan Utsman

Tabungan Utsman Adalah program Pemerintah Kota Bukittinggi untuk membantu masyarakat pasca pandemi covid-19 dalam mendapatkan modal dari perbankan dengan margin/



bunga yang ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Tujuan Tabungan Utsman adalah untuk meningkatkan ekonomi para pelaku usaha mikro.

Target masyarakat yang dibantu adalah pelaku usaha yang yang tidak memiliki agunan untuk mendapatkan modal dari perbankan serta untuk mengatasi agar pelaku usaha mikro khususnya di Kota Bukittinggi tidak terjerat oleh rentenir. Syarat yang harus dipenuhi nasabah BPRS unuk mendapatkan subsidi margin ini adalah :

- a. Mempunyai usaha tetap dan berada di Kota Bukittinggi
- b. Identitas diri (KTP) Kota Bukittinggi
- c. Tidak termasuk dalam kualitas kredit dalam perhatian dan/atau macet (BI Checking)

Sesuai dengan salah satu *Visi Misi* Pemerintah Bukittinggi untuk menjadikan Kota Bukittinggi **"HEBAT"** dalam sektor ekonomi kerakyatan, bertolak dari kondisi selama ini para pelaku ekonomi skala UMKM selama ini yang kurang diperhatikan, kurang diberi peluang dan tempat yang sepatutnya, sehingga pemerintah kota seyogyanya dapat memberikan perubahan baik bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha apalagi pasca Pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan sendi ekonomi masyarakat.

Ini merupakan inisiasi dari Walikota Bukittinggi H. Erman Safar, SH, dengan sistem kerjasama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan BPRS Jam Gadang (Perseroda), namun dalam penyiapannya juga melakukan studi banding dan koordinasi ke daerah lain.

Program ini dapat dilaksanakan dengan menyediakan Belanja Subsidi untuk pembayaran margin/ bunga pinjaman oleh pelaku usaha dimana margin/ bunga yang dibantu Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebesar 19%/ tahun, dimana Belanja Subsidi untuk pembayaran margin/ bunga dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada APBD Kota Bukittinggi pada pos Belanja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi.

Pada Tahun 2022 Dana awal yang disediakan untuk pembayaran subsidi margin ini adalah sebesar Rp. 1.575.000.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada APBD Kota Bukittinggi di Tahun 2022 pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi. Masyarakat menyambut program ini dengan antusiasme yang besar dimana pada bulan Maret tahun 2022 tersebut terealisasi pinjaman kepada masyarakat sebesar Rp. 2.535.500.000 (dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah).

Oleh karena antusias, minat masyarakat serta daya manfaat program yang tinggi tersebut, maka masyarakat maka Tabungan Utsman pada Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022

dana anggarannya ditambah Rp1.000.000.000,00 sehingga total jumlah anggaran tahun 2022 menjadi Rp2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)

Dana bantuan yang sudah tersalurkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 adalah sebesar Rp12.239.500.000 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dengan subsidi margin yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp2.574.989.266 (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam Rupiah) atau terealisasi sebesar 99,99%.

Penerima manfaat program bantuan subsidi margin Tabungan Utsman ini di tahun 2022 adalah sebanyak 1.956 nasabah pada semua kecamatan di Kota Bukittinggi dengan rincian Kecamatan Guguk Panjang 820 orang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan 764 orang dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 363 orang.

Sistem pengembalian adalah dengan sistem menabung dan dijemput oleh petugas BPRS Jam Gadang setiap hari atau setiap minggu sesuai dengan akad perjanjian antara BPRS Jam Gadang dengan nasabah, Untuk pengembalian nasabah tidak dikenakan biaya apapun sebagaimana saat melakukan proses peminjaman semua biaya administrasi juga tidak dikenakan kepada nasabah.

Pada tahun 2023 anggaran yang disediakan pada APBD Kota Bukittinggi untuk Program Tabungan Utsman ini adalah sebesar Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) pada SOTK baru yaitu Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.

#### **6.3.4. Bantuan Keuangan bersifat Khusus (BKK)**

##### **6.3.4.1. Pendapatan BKK dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke Pemerintah Kota Bukittinggi**

Penerimaan pendapatan tersebut dicatat oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp400.000.000 tanggal 9 Agustus 2023. Pendapatan tersebut diperuntukkan untuk giat pariwisata Kota Bukittinggi yakni objek wisata di Kota Bukittinggi.

##### **6.3.4.2. Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus (BKK)**

Untuk menjalankan Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terutama Pasal 12 ayat (1) POINT "A" yang menyatakan bahwa salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Pendidikan, serta dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kota Bukittinggi, yakni Hebat dalam Sektor Pendidikan, Pemerintah Kota Bukittinggi merasa perlu adanya jaminan pelaksanaan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi pada APBD Tahun Anggaran 2022 telah mengalokasikan anggaran dalam bentuk belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus (BKK) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemko Bukittinggi memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus berada di tangan pemerintah provinsi.

Wujud konkret BKK ini berupa pembebasan iuran komite sekolah (dahulu sering disebut SPP) kepada murid SMA, SMK dan SLB Negeri/Swasta yang memiliki KTP Kota Bukittinggi atau terdaftar dalam Kartu Keluarga warga Kota Bukittinggi dan bersekolah pada SMA, SMK dan SLB Negeri/Swasta yang berada/domisili di Kota Bukittinggi. Besaran nominal anggaran pemberian BKK dari Pemko Bukittinggi kepada Pemprov Sumatera Barat secara terperinci untuk masing-masing sekolah telah dituangkan dalam Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-54-2022 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Penerima BKK TA 2022.

Pelaksanaan BKK ini selanjutnya telah dikemas dalam sebuah kerjasama daerah antara Pemprov Sumatera Barat dan Pemko Bukittinggi, yakni dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur dan Walikota serta Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi.

Kebijakan untuk pembebasan biaya iuran komite (uang SPP) bagi seluruh pelajar SMA, SMK dan SLB baik negeri maupun swasta yang ber KTP dan Kartu Keluarga Kota Bukittinggi telah disosialisasikan kepada seluruh siswa, termasuk kepada pengelola sekolah SMA, SMK dan SLB swasta yang ada di Kota Bukittinggi.

BKK kepada Pemerintah Provinsi yang diperuntukkan untuk disalurkan kepada sekolah negeri direalisasikan 2 (dua) kali yaitu:

1. Pada tanggal 30 Juni 2022 dengan SP2D Nomor: 0966/LS/2022 yang dibebankan kepada Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp6.419.250.000,00.
2. Pada tanggal 2 Desember 2022 dengan SP2D Nomor: 2926/LS/2022 yang dibebankan kepada Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp2.100.750.000,00.

Sehingga, jumlah realisasi keseluruhan adalah Rp8.520.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp8.766.666.667,00 atau sebesar 97,19%.

Sampai dengan terealisasinya Belanja Bantuan Keuangan untuk sekolah negeri tahap pertama, sama sekali belum ada realisasi bantuan bagi SMA, SMK dan SLB swasta di Kota Bukittinggi, sementara pihak sekolah telah menghentikan pungutan iuran komite (SPP) dari para murid. Kondisi ini dirasakan sangat berat oleh SMA, SMK dan SLB Swasta, mengingat belanja rutin untuk operasional sekolah tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan kondisi tersebut pihak sekolah swasta meminta Pemko Bukittinggi segera menanggulangi permasalahan yang ada, atau mereka kembali akan memungut iuran komite (SPP) dari para murid.

Untuk mengatasi permasalahan ini, dengan ditolaknya penyaluran BKK bagi SMA, SMK dan SLB swasta oleh Pemprov Sumatera Barat, sementara disisi lain anggaran BKK ini terkait langsung dengan penyelenggaraan urusan pemerintah wajib yaitu pendidikan, diambilah kebijakan dengan alternatif penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui mekanisme keperluan mendesak untuk bulan Januari s.d. Juni 2022 (satu semester). Sedangkan untuk semester berikutnya direncanakan dianggarkan melalui Belanja Hibah pada APBD Perubahan Tahun 2022.

B  
J  
G

NO	PENERIMA BANTUAN	ALAMAT	JUMLAH PADA APRIL TA 2022 (Rp)	REALISASI/SP2D			SPJ	SISA DANA YANG DIBETULKAN KE KAS DAERAH (Rp)	SETORAN SISA DANA HISAH				KETERANGAN
				TANGGAL	NOMOR	JUMLAH (Rp)			NO. REKENING PENYETORAN	TANGGAL PENYETORAN	NOMOR BUKTI SETORAN	NILAI SETORAN (Rp)	
1	SLB Al Azhar	Jl. TDR Parak Kongsi Kel Bukit Apit Puhun Kec Guguk Panjang, Bukittinggi	118.600.000	07/11/2022	2562/LS/2022	118.600.000	118.600.000						laporan telah diserahkan
2	SLB Al Ikhlas	Jl. Paninjauan	125.400.000	14/11/2022	2661/LS/2022	125.400.000	125.400.000						laporan telah diserahkan
3	SLB Aubame YPPA	Jl. Pintu Kebun Jirek Cg. Mawar	88.800.000	23/11/2022	2806/LS/2022	88.800.000	88.800.000						laporan telah diserahkan
4	SLB Karakter Mandiri	Jl. Abdul Manan Campogo Ipuh	99.000.000	07/11/2022	2560/LS/2022	99.000.000	99.000.000						laporan telah diserahkan
5	SLB Permata Bunda	Jl. H. Burhan Blugo	56.400.000	15/11/2022	2689/LS/2022	56.400.000	56.400.000						laporan telah diserahkan
6	SLB Restu Ibu	Jl. Kubu Tanjung No.90 Kubu Tanjung	81.200.000	15/11/2022	2688/LS/2022	81.200.000	81.200.000						laporan telah diserahkan
7	SMAS Islam Al Hishah	Jl. Mir Assaat No.52 B Banto Darano	210.000.000	18/11/2022	2743/LS/2022	210.000.000	210.000.000						laporan telah diserahkan
8	SMAS Karya Bakti	Jl. Diponegoro No.8	165.800.000	10/11/2022	2611/LS/2022	165.800.000	165.800.000						laporan telah diserahkan
9	SMAS Pembangunan	Jl. Jend. Sudirman Aerama Kodim 0304 Agam	295.680.000	14/11/2022	2660/LS/2022	295.680.000	295.160.000	2.520.000	0200.01.01.0276.1	06/01/2023	003761	2.520.000	laporan telah diserahkan
10	SMAS Psm Bukittinggi	Jl. Dr. A. Rival No.17 Kelurahan Kayu Kubu Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi	151.200.000	22/11/2022	2764/LS/2022	151.200.000	151.200.000						laporan telah diserahkan
11	SMAS Taruna Bangsa	Jl. Syech Jamil Djambek No.33 Kel. Pekan Kurai Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi	84.200.000	18/11/2022	2736/LS/2022	84.200.000	84.200.000						laporan telah diserahkan
12	SMAS Xaverius	Jl. Bagindo A'ris Chan Kel Bukit Canggih Krayu Ramang	303.400.000	11/11/2022	2614/LS/2022	303.400.000	303.400.000	69.048	0200.01.01.0276.1	31-Jan-23	003789	69.048	bunga bank

P. H

13	SMK Elektronika Indonesia Bukittinggi	Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi	60.800.000	11/11/2022	2613/15/2022	60.800.000	58.400.000	2.400.000	0200.01.01.0 0201.9	04-Jan-23	003760	2.400.000	laporan telah diserahkan
14	SMK Farmasi Insani Bonojo Bukittinggi	Jl.Kesehatan No.20 Kel.Bukit Apit Puhun Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi	268.000.000	07/11/2022	2563/15/2022	268.000.000	268.000.000						laporan telah diserahkan
15	SMK Gajah Tengg	Jl.Umar Gafar No.4 Kelurahan Pakan Kural Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi	119.600.000	15/11/2022	2687/15/2022	119.600.000	119.600.000						laporan telah diserahkan
16	SMK Gema Nusantara Bukittinggi	Jl Birugo Bungo No.137 A Bukittinggi	409.000.000	10/11/2022	2610/15/2022	409.000.000	409.000.000						laporan telah diserahkan
17	SMK Kesehatan Prima Nusantara Bukittinggi	Jl Kusuma Bhakti No.99 Bukittinggi	147.400.000	11/11/2022	2634/15/2022	147.400.000	146.200.000	1.200.000	0200.01.01.0 0201.9	05-Jan-23	003767	1.200.000	laporan telah diserahkan
18	SMK Paramitha Bukittinggi	Jl Veteran No.79 Jirek Bukittinggi	63.800.000	23/11/2022	2805/15/2022	63.800.000	51.800.000						laporan telah diserahkan
19	SMK Pembangunan Bukittinggi	Jl.Ishandar Tejda Kusuma Kel.Tarok Dipo Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi	164.200.000	11/11/2022	2642/15/2022	164.200.000	164.200.000						laporan telah diserahkan
20	SMK Pembina Bangca	Jl.Syeck Jamil Jambek No.33 Kel.Pakan Kural Kec.Guguk Panjang Bukittinggi	357.000.000	22/11/2022	2759/15/2022	357.000.000	357.000.000						laporan telah diserahkan
21	SMK Teknologi Muhammadiyah	Jl.Prof Dr. Hamka Kel.Tarok Dipo Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi	284.800.000	07/11/2022	2561/15/2022	284.800.000	284.800.000						laporan telah diserahkan
<b>JUMLAH</b>			<b>3.654.280.000</b>			<b>3.642.280.000</b>	<b>3.636.160.000</b>	<b>6.189.048</b>				<b>6.189.048</b>	

PFA

Beberapa dokumen dalam pelaksanaan BKK Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

- a. MoU abatara Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Walikota se Sumatera Barat perihal Kerjasama Antar Daerah tanggal 06 September 2021;
- b. Perjanjian Kerjasama antara Pemko Bukittinggi dengan Pemprov Sumatera Barat tentang bantuan keuangan khusus bagi SMA, SMK dan SLB Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 No. 421/436/Disdikbud/III/2022 dan No. 120-014/PKS/GSB-2022 tanggal 17 Maret 2022.
- c. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
- d. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-54-2022 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Penerima BKK TA 2022;
- e. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-70-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-54-2022 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Penerima BKK TA 2022;
- f. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-97-2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-54-2022 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Penerima BKK TA 2022;
- g. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-148-2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-54-2022 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Penerima BKK TA 2022;
- h. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 903/393/SKPD/BPKAD-2022 tanggal 15 April 2022 perihal BKK dari Kota Bukittinggi.

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **6.4. INFORMASI DANA DAN ASET YANG BERSUMBER DARI NON APBD KOTA BUKITTINGGI**

Pada tahun 2022 tidak terdapat dana yang bersumber dari selain APBD, namun terdapat penambahan aset tahun 2022 yang bersumber dari selain APBD yaitu sebesar Rp11.037.620.258,00.

##### **6.4.1. Aset Hibah**

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat hibah aset dari beberapa donator hibah kepada Pemerintah Kota Bukittinggi dengan uraian sebagai berikut:

---

Pemerintah Kota Bukittinggi

Tabel 6.2.1 Daftar Aset Non APBD

NO	SKPD/PPKD YANG MENCATAT	INSTANSI PEMBERI	URAIAN	JUMLAH (RP)	STATUS NERACA
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Area Traffic Control System (ATCS) (Berita Acara Serah Terima Hibah Pembangunan dan Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) Kota Bukittinggi tanggal 20 Oktober 2022)	9.386.896.158,00	Tercatat
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bank Nagari	1 Unit Videotron	843.365.600,00	Tercatat
			1 unit PC (Perjanjian)	6.000.000,00	Tercatat
			(Berita Acara Serah Terima Bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Bentuk Videotron Nomor BN.028/BA/UM/09-2022, Nomor 02/BAST/BK.06/IX/2022 tanggal 16 September 2022)		
3	Dinas Kesehatan	Hj. Asma	Tanah Bangunan Poskeskel (1 kavling tanah luas 100m2 (Berita Acara Serah Terima Aset Berupa Tanah dari Hj. Asma kepada Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 15 September 2022)).	80.200.000,00	Tercatat
4	BPBD		Alat SAR	220.594.000,00	Tercatat
			Alat Komunikasi	42.773.500,00	Tercatat
			Alat Angkutan Darat Bermotor	307.791.000,00	Tercatat
			Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	150.000.000,00	Tercatat
<b>Jumlah Tercatat</b>				<b>11.037.620.258,00</b>	
3	PPKD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Area Traffic Control System (ATCS). Peralatan Mesin (Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor: PL.02.04-Bb3-PJNW1-SB/1350 Nomor 03/BAST/BK.06/XII/2022	2.012.570.000,00	Belum Tercatat
6	Dinas Kesehatan (RSUD)	BTN KC Padang	Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) berupa Bantuan Peaghijauan Taman dan Area Terbuka Bermain Anak di RSUD Kota Bukittinggi oleh BTN KC Padang ke Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 13 Desember 2022.	35.000.000,00	Belum Tercatat
<b>Jumlah Belum Tercatat</b>				<b>2.047.570.000,00</b>	
<b>Jumlah Semua Hibah Aset Tahun 2022</b>				<b>13.085.190.258,00</b>	



#### 6.5. Kebijakan Pembatasan/Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama Tahun 2022

Tahun 2022, tidak terdapat kebijakan PPKM oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, karena Pandemi Covid-19 sudah dapat dikendalikan dengan tidak adanya kasus baru.

#### 6.6. Informasi Sengketa Tanah untuk Pembangunan Gedung DPRD Kota Bukittinggi

Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki tanah yang berasal dari pengadaan tahun anggaran 2007 yang diperuntukan untuk Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Bukittinggi sesuai dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-147-2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi. Tanah ini tercatat pada Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi selaku Pengguna Barang pada Daftar Kartu Inventaris Barang (KIB A) Kode Register 01.01.02.02.002.000002 seluas 5.528 m<sup>2</sup> beralamat di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan SHM Nomor 655/Kel. Manggis Ganting, tanggal 18-06-2007, SU Nomor 12/MG/2007 tanggal 25-05-2007 atas nama Syafri. Pengurusan balik nama sertifikat setelah pembelian saat itu tidak dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dikarenakan terjadi peristiwa pidana yang melanda pejabat Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2009 dan dilakukannya upaya pemblokiran oleh pihak Yayasan Fort De Kock yang diajukan kepada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi.

Pada tanggal 27 Juli 2019 Pihak Yayasan Fort De Kock melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada :

- a) Syafri St Pangeran (Tergugat I)
- b) H. Arjulis Dt.Basa (Tergugat II)
- c) Muhammad Nur (Tergugat III)
- d) Walikota Bukittinggi (Tergugat IV)
- e) Hj.Tessi Levino, SH (Tergugat V)

Proses hukum di pengadilan terus berjalan sejak tahun 2019 sampai dengan 2022. Pada tahun 2020, Walikota Bukittinggi mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI. Tahun 2022 Mahkamah Agung RI menetapkan Putusan Nomor 2108 K/PDT/2022, tanggal 28 Juli 2022 yang memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi. Pada tanggal 4 Oktober 2022 Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi memanggil para pihak dalam rangka melakukan *aanmaning*. Pada tanggal 14 Oktober 2022 Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi menerbitkan Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PN Bkt *jo* Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bkt, menjelaskan bahwa :

- a. Amar ke-5 hanya ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Para Tergugat dan tidak termasuk Pemerintah Kota Bukittinggi selaku Tergugat IV.
- b. Amar ke-5 berupa "*Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan serta melanjutkan kembali seluruh Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 23 November 2005, di legalisasi oleh Hj. Tessi Levino, SH, Notaris di Bukittinggi dengan Nomor: 150/D/XI/2005 secara penuh dan tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku*", telah diganti dengan penetapan secara limitatif berupa hanya eksekusi pembayaran sejumlah uang sebesar Rp 1.243.800.000,- yang dihitung dari nilai jual harga tanah sesuai PPJB di atas sebesar Rp 225.000,- x 5528 M2, dan tidak ada kewajiban lain termasuk penyerahan SHM Nomor 655/Kel. Manggis Gantiang, Luas 5.528 m<sup>2</sup>.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi sampai saat ini tidak menyerahkan aset berupa tanah beserta sertifikat kepada pihak Yayasan Fort De Kock. Dalam kelanjutannya, pihak Yayasan Fort De Kock telah melakukan okupasi atau penyerobotan lahan SHM Nomor 655/Kel. Manggis Gantiang, Luas 5.528 m<sup>2</sup> yang menjadi aset Pemerintah Kota Bukittinggi.

Langkah yang telah dilakukan dalam rangka upaya pengamanan barang milik daerah Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai berikut :

**Tabel 6.4.0.1 Langkah dan Upaya Pengamanan barang Milik Daerah yang Dilakukan**

Nama Instansi	Waktu	Kegiatan
a) BPKP Perwakilan Sumatera Barat	29 November 2022	BPKP tidak memberikan opini karena permasalahan terkait hukum (surat BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat No. PE.08.00/S-475/PW03/3/2023 tanggal 27 Februari 2023)
b) Komisi Pemberantasan Korupsi RI	16 Februari 2023	Pertemuan secara daring di BCC Kota Bukittinggi tentang ekspose kronologis dan proses hukum di pengadilan oleh Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
	27 Februari s/d 1 Maret 2023	Pertemuan di KPK RI Jakarta dalam rangka konsultasi dengan hasil : 1. Proses penerbitan tanah agar segera terus dilanjutkan. 2. KPK akan memfasilitasi mediasi dengan para pihak.
c) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan	14 Maret 2023	Pertemuan di BPK Perwakilan Sumatera Barat dengan hasil :

Sumatera Barat		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Agar Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan informasi /press release kepada public terhadap putusan-putusan pengadilan dan langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi</li><li>2. Agar permasalahan ini diinformasikan dalam CaLK pada point informasi/penjelasan lain-lain.</li></ol>
----------------	--	--

Ke depan, Pemerintah Kota Bukittinggi akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan yang disarankan oleh KPK dan BPK Perwakilan Sumatera Barat.

## BAB VII PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi merupakan amanat dari paket peraturan terkait pengelolaan keuangan negara/daerah yang dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sampai kepada peraturan pemerintah dan peraturan menteri menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelola keuangan Negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur / Bupati / Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota harus mempertanggungjawabkan kepada publik (*stake holders*) mengenai pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tugas dan wewenangnya.

Kota Bukittinggi sebagai salah satu Pemerintah Daerah Otonom, dalam hal pengelolaan keuangan daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi setiap tahunnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi tahun 2021 adalah laporan keuangan berbasis akrual sebagai amanah dari paket Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini dalam hal pengelolaan keuangan.

LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disajikan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Perundang-Undangan tersebut.

Sebagai bagian dari LKPD, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan untuk memberikan informasi ataupun penjelasan, baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dalam pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022, dalam rangka penungkapan penuh (*full disclosure*). Dengan demikian diharapkan para pembaca dan pengguna dapat memahami secara komprehensif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi ini secara bebas dari kesalahan penafsiran.

Laporan Keuangan ini juga dilampiri dengan daftar-daftar pendukung serta laporan keuangan BUMD PDAM Tirta Jam Gadang dan BPR Jam Gadang, yang mana keduanya

19

adalah Badan Usaha Milik Daerah dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat dan juga fokus investasi Pemerintah Kota Bukittinggi.

Sebagaimana maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan tersebut di atas, mudah-mudahan manfaatnya melebihi muatannya sehingga berdampak strategis untuk evaluasi dan penyusunan kebijakan dimasa yang akan datang serta juga dapat dikembangkan menjadi sumber data penelitian ilmiah dan analisis keuangan.

WALIKOTA BUKITTINGGI

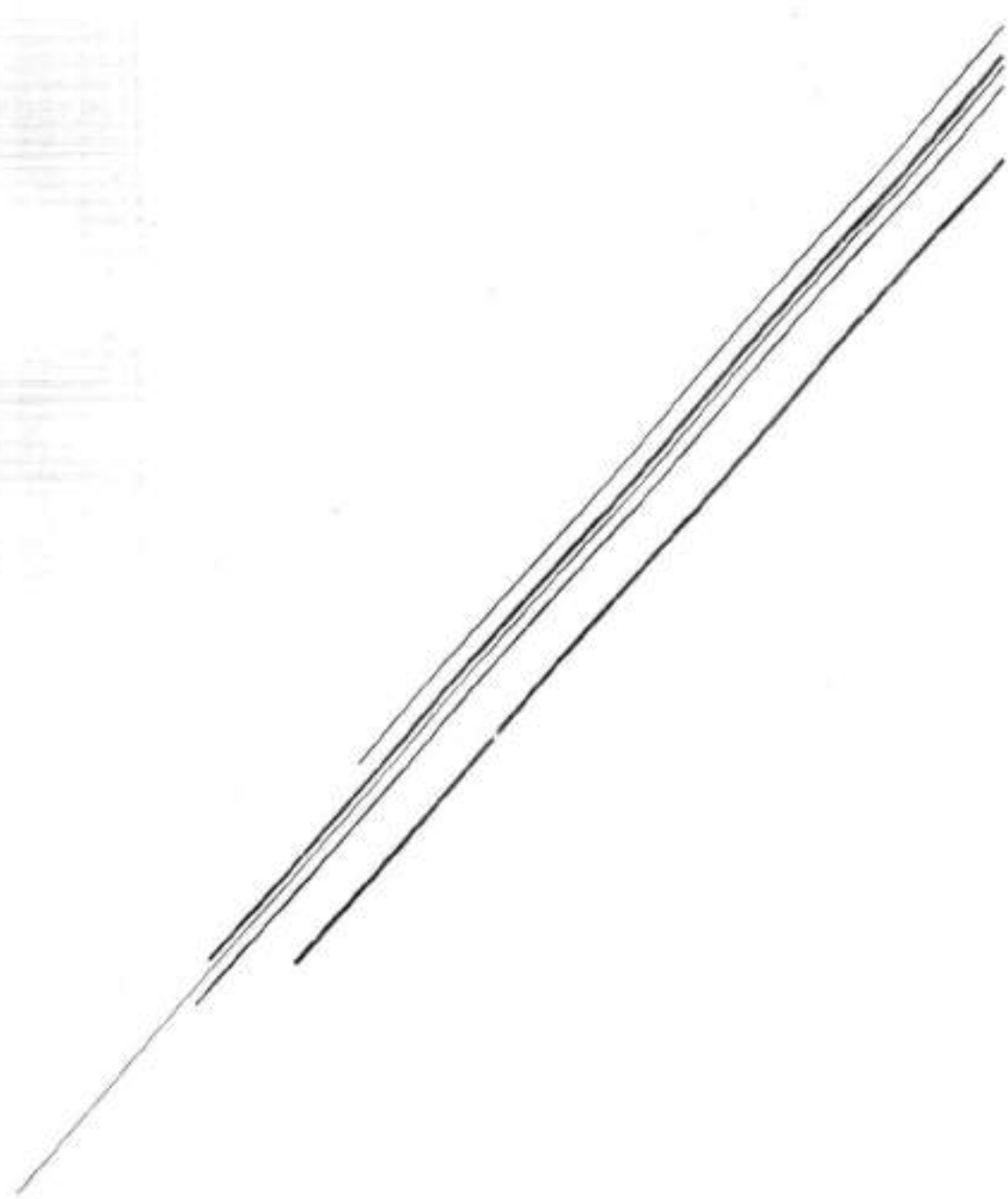


ERMANSAFAR

*[Handwritten signature]*

# LAMPIRAN CALK

Calk LKPD TA 2022



Tahun Anggaran  
2022



# PERUMDA AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI

R. Peraturan No. 3 Tahun 07/2023 21125-05329 POL. 07/2023 20229 Bukittinggi 20 016

Email : [perumda@jamgadangkab.go.id](mailto:perumda@jamgadangkab.go.id)

## SURAT PERNYATAAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BUDI SUHENDRA, S.T.  
Alamat kantor : Jl. Panorama No.3, Bukittinggi  
Alamat rumah : Jl. Jambak Dalam  
Kelurahan Bukik Apik Puhun - Kecamatan Guguak Panjang  
Kota Bukittinggi  
Nomor Telp : (0752) 21125  
Jabatan : Direktur

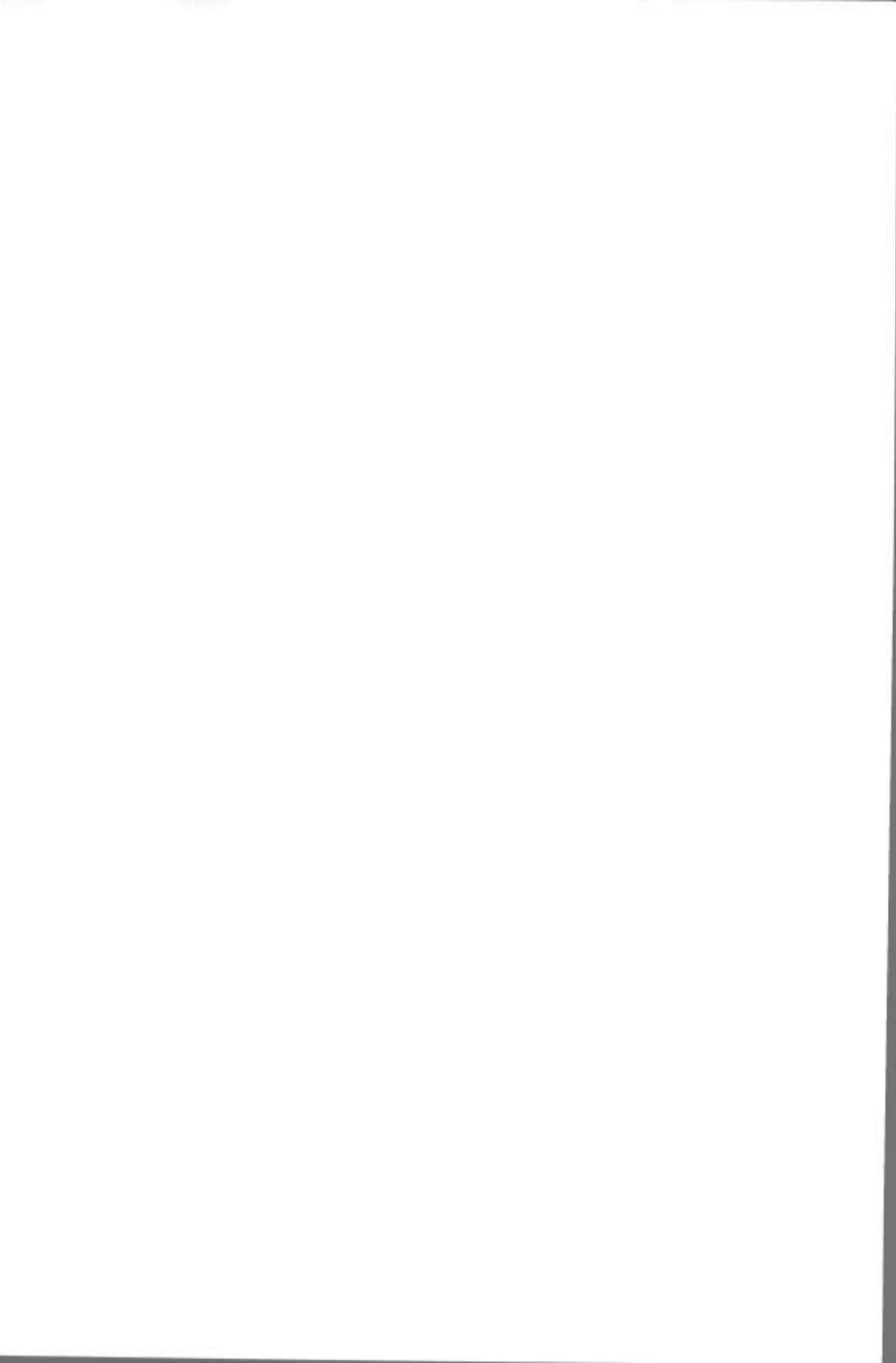
Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
2. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian Intern yang diterapkan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bukittinggi, 03 Januari 2023  
DIREKTUR

BUDI SUHENDRA, S.T.





**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA JAM GADANG  
NERACA**

Per 31 Desember 2022 dan 2021

ASET	Cat	2022	2021
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	8.4.C.1	3.443.845.591	3.976.783.595
Piutang Air dan Non Air	8.5.C.2	1.559.757.365	1.488.380.165
Akumulasi Penyisihan Piutang	8.5.C.2	(246.642.459)	(256.963.536)
Persediaan	8.6.C.3	817.286.320	833.176.700
Piutang Pajak			
Biaya dibayar dimuka	8.7.C.4	150.000	18.333.300
<b>Sub Total Aset Lancar</b>		<b>5.574.396.817</b>	<b>6.059.718.223</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
<b>Aset Tetap :</b>			
Harga Perolehan	8.8.C.5	43.198.721.115	42.841.678.341
Akumulasi Penyusutan		(19.766.151.133)	(18.601.428.555)
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>		<b>23.432.569.981</b>	<b>24.240.249.786</b>
Aset Tidak Lancar Lainnya	C.6	1.309.261.000	1.309.261.000
<b>TOTAL ASET</b>		<b>30.316.227.799</b>	<b>31.609.229.009</b>
<b>KEWAJIBAN dan EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban jangka Pendek</b>			
Utang Usaha	C.7		79.000.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	C.8	1.943.328.658	1.005.949.744
Utang Pajak	C.9	285.169.468	55.236.592
Pendapatan Diterima Dimuka	C.10	57.010.200	51.047.400
Utang jangka Pendek Lainnya	C.11	37.830.000	40.048.000
<b>Sub Total Kewajiban jangka Pendek</b>		<b>2.323.338.326</b>	<b>1.231.279.736</b>
<b>Kewajiban jangka Panjang</b>			
Cadangan Dana	C.12	7.097.803.903	7.435.727.880
<b>Sub Total Kewajiban jangka Panjang</b>		<b>7.097.803.903</b>	<b>7.435.727.880</b>
<b>EKUITAS</b>			
Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	A.2, C.13	1.177.102.241	1.177.102.241
Penyertaan Modal Pemda	A.2, C.14	16.496.904.508	16.496.904.508
Penyertaan Modal Pemda Yang Belum Ditetapkan	A.2, C.15	14.544.628.510	14.544.628.510
Hibah	A.2, C.16	972.316.208	972.316.208
Laba (Rugi) Ditahan		(12.355.398.290)	(10.346.825.769)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		59.540.392	98.109.695
<b>Sub Total Ekuitas</b>		<b>28.895.085.569</b>	<b>22.942.227.393</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN dan EKUITAS</b>		<b>30.316.227.799</b>	<b>31.609.229.009</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA JAM GADANG  
LAPORAN LABA (RUGI)**

Untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	Cat	2022 Rp	2021 Rp
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Air	B.13, C17	11.243.997.300	11.307.359.200
Pendapatan Non Air	B.13, C18	653.164.950	789.234.250
<b>Jumlah Pendapatan Usaha</b>		<u>11.897.162.250</u>	<u>12.096.593.450</u>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Operasional	B.13, C19	10.715.719.353	10.882.039.162
Beban Penyusutan		1.164.722.578	1.191.677.111
<b>Jumlah Beban Operasional</b>		<u>11.880.441.931</u>	<u>12.073.716.273</u>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Non Operasional	B.13, C20	170.148.506	152.098.448
Beban Non Operasional		(31.189.447)	(29.479.969)
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional</b>		<u>138.959.059</u>	<u>122.618.478</u>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL BERSIH SEBELUM PAJAK</b>		<b>155.679.378</b>	<b>145.495.655</b>
<b>TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>		<b>96.138.985</b>	<b>47.385.960</b>
<b>LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK</b>		<u><b>59.540.392</b></u>	<u><b>98.109.695</b></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Perseroda)

**BANK JAM GADANG**  
*Syariah*



Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta No. 52 A Telp. (0752) 628703 HP. 0852 7478 8880

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2022  
PT. BPR SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)**

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang  
Perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang  
Bank Terbatas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Feri Irawan, SE, ME
Alamat Kantor	: Jl. Soekarno - Hatta No. 52 A Bukittinggi
Nomor Telepon	: 0752 33877
Jabatan	: Direktur Utama
Nama	: Dewi Fitria, SE
Alamat Kantor	: Jl. Soekarno - Hatta No. 52 A Bukittinggi
Nomor Telepon	: 0752 33877
Jabatan	: Direktur
Nama	: Rismai Hadi, S.STP, M.Si
Alamat Kantor	: Jl. Soekarno - Hatta No. 52 A Bukittinggi
Nomor Telepon	: 0752 33877
Jabatan	: Komisaris Utama
Nama	: Uskavinov SE, MM
Alamat Kantor	: Jl. Soekarno - Hatta No. 52 A Bukittinggi
Nomor Telepon	: 0752 33877
Jabatan	: Komisaris

Untuk dan atas nama Direksi dan Komisaris PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang  
(Perseroda) sebagai pihak yang bertanggungjawab atas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Jam Gadang (Perseroda) menyatakan bahwa :

1. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) adalah entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
2. Dengan persetujuan pemegang saham dan Dewan Komisaris, Direksi telah memutuskan untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan pedoman akuntansi perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) serta pedoman akuntansi yang diterapkan otoritas perbankan.
3. Direksi telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan terlampir.
4. Laporan keuangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

BANK  JAM GADANG   
*Syariah*

Santor Pusat : Jl. Soekarno Hatta No. 52 A Telp. (0752) 628703 HP. 0852 7478 8880


Informasi dalam laporan keuangan PT. Bank Pেমblayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi fakta material.

Bank Pেমblayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) telah membuat catatan, bukti-buku, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak kewajiban serta kegiatan usaha perusahaan, termasuk catatan yang terdiri dari neraca, laporan keuangan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jumlah transaksi harian atau setiap tulisan yang disertai keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan dan dokumen-dokumen tersebut disimpan oleh perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pেমblayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. Bank Pেমblayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda), serta sistem pengendalian internal dalam PT. Bank Pেমblayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda).


Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


  
Dad Irawan, SE, ME  
Direktur Utama

  
Rismal Hadi, S.STP, M.Si  
Komisaris Utama

Bukittinggi, 11 Januari 2023



  
Dewi Fitria, SE  
Direktur

  
Uskavinov SE, MM  
Komisaris

**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)**  
**NERACA**

**31 Desember 2022**

**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2021**  
**(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)**

Uraian	Catatan	2022	2021
<b>ASET</b>			
Kas	3	708.712.589	353.843.953
Penempatan Pada Bank Lain	4	21.201.900.669	13.511.483.901
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		(20.646.158)	(16.628.047)
Jumlah Setelah Dikurangi Penyisihan		21.181.254.531	13.494.835.854
Pembiayaan yang diberikan	5	48.308.703.113	35.975.076.887
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		(410.271.927)	(190.062.924)
Jumlah Setelah Dikurangi Penyisihan		47.898.431.186	35.785.013.963
Aset Tetap dan Inventaris	6	1.305.656.450	1.158.728.450
Akumulasi Penyusutan		(778.317.603)	(616.524.906)
Nilai Buku		527.338.847	542.203.544
Aset Lain-Lain	7	671.297.911	480.758.416
<b>Jumlah Aset</b>		<b>70.985.035.064</b>	<b>50.656.653.730</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban Segera	8	67.716.142	38.387.086
Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan	9	34.706.809	25.821.798
Hutang Pajak	10	89.410.381	40.526.396
Tabungan Wadiah	11	39.843.387.835	36.443.484.297
Deposito	12	8.307.287.000	5.651.887.000
Simpanan dari bank lain	13	9.100.000.000	500.000.000
Kewajiban Lain-Lain	14	1.538.958.396	28.742.660
Administrasi Pembiayaan	15	552.722.484	-
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>69.514.189.027</b>	<b>42.726.848.237</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Disetor	1b	9.165.900.000	6.165.900.000
Cadangan	15		
Cadangan umum		915.708.974	749.791.734
Cadangan tujuan		184.526.557	454.405.793
Belum Ditentukan Tujuannya		1.204.710.506	559.706.966
Jumlah		2.304.946.037	1.763.904.493
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>11.470.846.037</b>	<b>7.929.804.493</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>70.985.035.064</b>	<b>50.656.653.730</b>

11 Januari 2023

**Ferdinand, SE, ME**  
Direktur Utama

**David Fitria, SE**  
Direktur

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan


## PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)


## LAPORAN LABA-RUGI

Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022  
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2021  
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana dari penempatan pada bank syariah lain	16	444.945.695	125.247.042
Pendapatan Operasional dari pembiayaan yang diberikan		6.405.684.099	2.330.778.432
Jumlah Pendapatan Operasional		6.850.629.794	2.456.025.474
Beban Operasional Bagi Hasil kepada Pemilik Dana	17	349.160.041	15.675.062
Beban Operasional kepada Bank Lain		597.925.245	146.572.721
Beban Operasional kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		947.085.286	162.247.783
Jumlah Beban Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana		5.903.544.508	2.293.777.691
Pendapatan Operasional Lainnya	18	582.705.614	368.930.663
Beban Operasional	19	506.633.858	251.495.310
Beban Operasional Lainnya	20	4.541.656.161	1.750.674.919
Jumlah Beban Operasional		5.048.290.019	2.010.170.229
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>1.437.960.103</b>	<b>652.638.125</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Non Operasional	21	14.315.000	-
Beban Non Operasional		(36.306.878)	(16.892.329)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		(21.991.878)	(16.892.329)
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>1.415.968.225</b>	<b>635.645.796</b>
Pajak Penghasilan		(211.257.719)	(75.938.830)
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		<b>1.204.710.506</b>	<b>559.706.966</b>

11 Januari 2023

  
**Feri Irawan, SE, ME**  
 Direktur Utama

  
**Dewi Filtria, SE**  
 Direktur

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

DAFTAR TANAH PEMERINTAH DAERAH

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	6	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1,265	RD Sekretaris Daerah	1,012,000,000	Sekretariat Daerah
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2,532	Rumah Dinas Walikota	4,873,600,000	Sekretariat Daerah
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	427	RD Wakil Walikota	83,400,000	Sekretariat Daerah
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	402	RD Wakil Walikota	80,400,000	Sekretariat Daerah
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	54	Rumah Dokter	24,300,000	Dinas Kesehatan
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	200	Rumah Dinas Dokter	40,000,000	Dinas Kesehatan
7	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	391	Rumah Dinas Dokter	234,600,000	Dinas Kesehatan
8	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	108	Rumah Medis	48,600,000	Dinas Kesehatan
9	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	80	Rumah Dokter Gigi	36,000,000	Dinas Kesehatan
10	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	120	Rumah Dinas	60,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1,096	Kantor BPDG	876,800,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kecamatan Mandiangin Kota Selayan
12	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	900	Kantor Kel. Campago Guguk Bulek	225,000,000	
13	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	450	Rumah Dinas	112,500,000	Pengelola Barang Milik Daerah
14	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	450	Rumah Dinas	112,500,000	Pengelola Barang Milik Daerah
15	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	167	Rumah Dinas	10,688,000	Pengelola Barang Milik Daerah
16	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1,466	Rumah Dinas	200,010,000	Pengelola Barang Milik Daerah
17	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	2,500	Rumah Dinas	320,000,000	Pengelola Barang Milik Daerah
18	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	200	Rumah Dinas	243,000	Pengelola Barang Milik Daerah
19	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	329	Rumah Dinas	636,871,000	Pengelola Barang Milik Daerah
20	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	330	Rumah Dinas	66,000,000	Pengelola Barang Milik Daerah
21	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	302	Rumah Dinas	60,400,000	Pengelola Barang Milik Daerah
22	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	299	Rumah Dinas	59,800,000	Pengelola Barang Milik Daerah
23	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	294	Rumah Dinas	58,800,000	Pengelola Barang Milik Daerah
24	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	307	Rumah Dinas	59,400,000	Pengelola Barang Milik Daerah
25	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	796	Rumah Jabatan Ketua DPRD	186,287,000	Pengelola Barang Milik Daerah
26	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	10,000	Rumah Dinas	36,000,000	Pengelola Barang Milik Daerah
27	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	200	Rumah Dinas	243,000	Pengelola Barang Milik Daerah
28	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	450	Pengadilan Rumah PUSDO	112,500,000	Pengelola Barang Milik Daerah
29	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	225	Rumah Dinas	90,000,000	Pengelola Barang Milik Daerah
30	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	275	Rumah Dinas	82,500,000	Pengelola Barang Milik Daerah
31	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	494	Rumah Dinas	612,813,000	Pengelola Barang Milik Daerah
32	Tanah Bangunan Pasar	18,740	Bangunan Pasar Abah	20,475,800,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
33	Tanah Bangunan Pasar	10,385	Bangunan Pasar Bawah	12,194,307,400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
34	Tanah Bangunan Pasar	5,816	Bangunan Pasar Aur Tanjungkang	6,895,892,600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
35	Tanah Bangunan Pasar	21,539	Bangunan Pasar Simpang Aur	32,909,190,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
36	Tanah Bangunan Gudang	2,620	Gudang PU	657,509,579	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
37	Tanah Bangunan Gudang	2,610	Gudang PU	652,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
38	Tanah Bangunan Gudang	400	Gudang Buku	600,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
39	Tanah Bangunan Terminal Darat	2,362	Terminal Angdes dan Parkir	190,800,000	Dinas Perhubungan
40	Tanah Bangunan Terminal Darat	2,427	Gedung Parkir	4,342,450,000	Dinas Perhubungan
41	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,093	DPKAD, Bappeda & Kesbangpol Linmas	6,139,500,000	Badan Keuangan
42	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,720	Kantor Dinas Dukcapil	750,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
43	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	988	Gudang Farmasi	296,400,000	Dinas Kesehatan
44	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	33,972	Rencana RSUD	8,000,000,000	Dinas Kesehatan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	6	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
45	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,800	Komplek Perkantoran (Kantor DPP, KPU, KAN)	4,410,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
46	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,262	KANTOR LFTD METROLOGI	412,560,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
47	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8,540	Gedung Kantor	1,708,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
48	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	200	Bangunan kantor	471,200,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
49	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7,664	Taman Panorama dan Lobang Jepang	3,832,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
50	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	30,281	Bangunan TMSK di	52,991,750,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
51	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,160	Medan Nan Belinduang	6,240,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
52	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	33,829	Taman Benteng	59,200,750,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
53	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,990	Dinas PU	1,592,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
54	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,425	Kantor Pemerintah	2,545,229,125	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
55	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,000	Kantor Pemerintah	1,794,450,325	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
56	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,371	Kantor Pemerintah	2,668,439,125	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
57	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	600	Kantor DISKOPERINDAG	480,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
58	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	600	Kantor DISKOPERINDAG	480,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
59	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,000.00	Gedung Kantor Dinas Sosnaker	800,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
60	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	748.00	Kantor Pelayanan Terpadu	598,400,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
61	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,325.00	Kantor Poi PP	542,500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
62	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,256.00	Kantor Dishubkominfo	1,012,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
63	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	267.00	Kantor OPMPSTP	213,600,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
64	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,010.00	DISKOPORA	2,020,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
65	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	894.00	SKB	447,250,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
66	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,626.00	SDV 10 ATTS	569,100,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
67	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	564.00	Kantor Ansp dan Perpustakaan Daerah	282,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan
68	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5,000.00	Gedung Kantor Dinas Pertanian	6,426,600,000	Dinas Pertanian dan Pangan
69	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5,465.00	Kolam Talao dan BPP Model	3,786,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
70	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,000.00	Pasar Ternak	500,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
71	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	131.00	Rencana RPI Bukittinggi	271,834,469	Dinas Pertanian dan Pangan
72	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	239.00	Kantor PP dan KB	239,000,000	Dinas Sosial
73	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	625.00	Inspektorat	437,500,000	Inspektorat
74	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	450.00	Kantor Lurah Birugo	202,500,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Saleh
75	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	940.00	Kantor Lurah Belakang Balai	577,160,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Saleh
76	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,187.00	Kantor Camat ABTB	474,860,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Saleh
77	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,628.00	Kantor Lurah Aur Kuning, Balai Perbukitan KB	894,100,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Saleh
78	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	748.00	Kantor Lurah Ladang Cakiah	2,305,683,500	Kecamatan Aur Birugo Tigo Saleh
79	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,143.00	Kantor Lurah Pohan Lubuah & Pukasinan Tigo Saleh	3,341,445,200	Kecamatan Aur Birugo Tigo Saleh
80	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	160.00	Tanah Kantor Camat ABTB	64,000,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Saleh
81	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	456.00	Halaman Kantor Camat ABTB	162,400,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Saleh
82	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,850.00	Kantor Camat Guguk Panjang	2,137,500,000	Kecamatan Guguk Panjang
83	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	202.00	Kantor Kel.ATTS	141,400,000	Kecamatan Guguk Panjang
84	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	202.00	Kantor Kel.8.Cangang	270,900,000	Kecamatan Guguk Panjang
85	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	721.00		360,500,000	Kecamatan Guguk Panjang
86	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	150.00	Kantor Kel. Paken Kural	59,500,000	Kecamatan Guguk Panjang



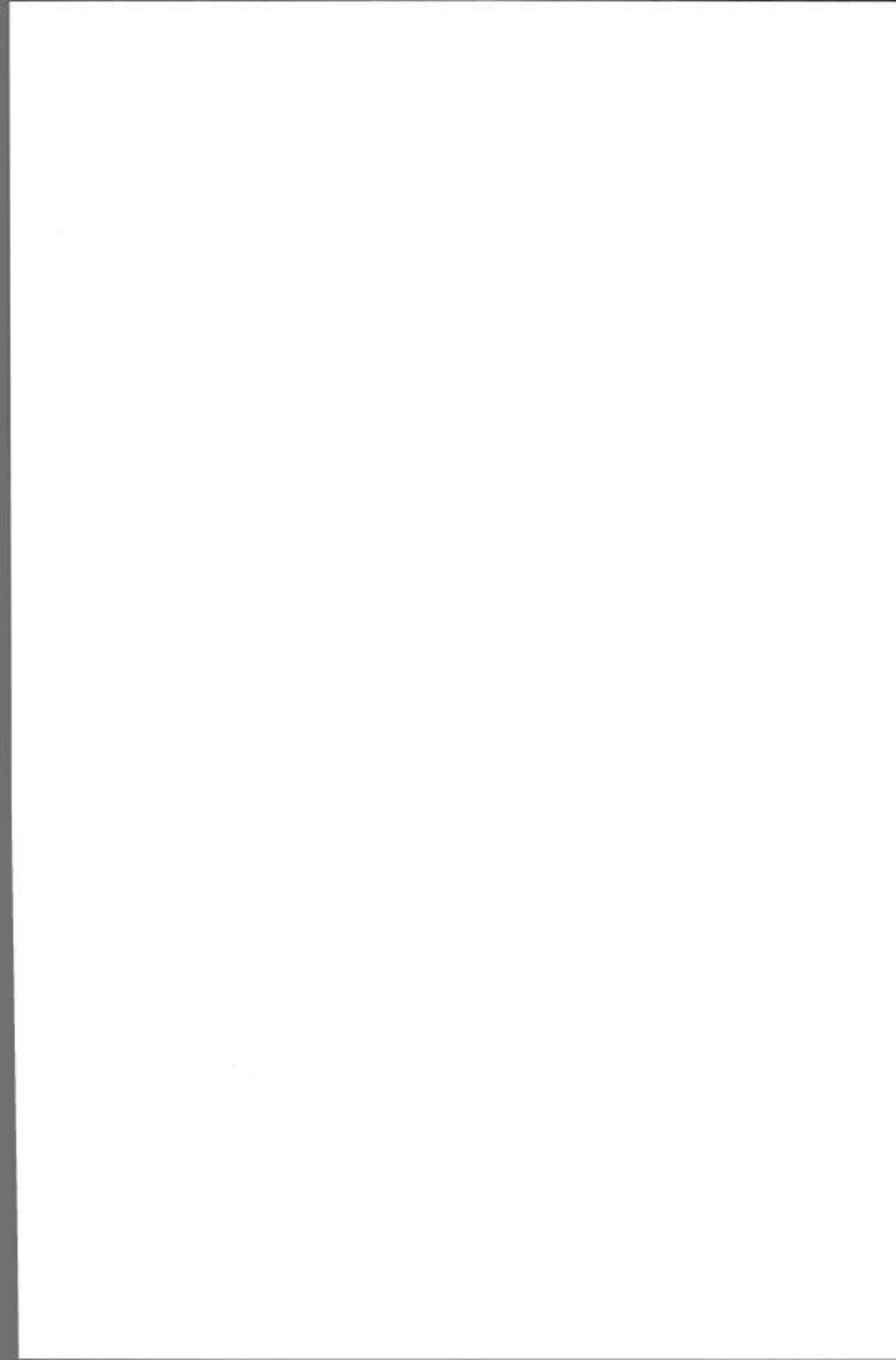
No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	6	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
87	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	528.00	Kantor Lurah Bakir Apit	158,400,000	Kecamatan Guguk Panjang
88	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	398.00	Kantor Kelurahan	597,000,000	Kecamatan Guguk Panjang
89	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	338.00	Kantor Lurah Tarok Dipo	236,600,000	Kecamatan Guguk Panjang
90	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	709.00	Kantor Pemerintahan	4,171,900,000	Kecamatan Guguk Panjang
91	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,198.00	TANAH LINTAS KANTOR LURAH AJA TAJUNGGANG TANGAH SAWAH JL. SYECH SULAIMAN ARRASULI	4,550,000,000	Kecamatan Guguk Panjang
92	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,963.00	Kantor Kec. MRS	2,095,100,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
93	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	63.00	Poyendu dan Balai Pemuda	18,900,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
94	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	222.00	Kantor Kel. Kubu Gulai Banchah	99,900,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
95	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	471.00	Kantor Kel. Campago Ipuh	188,400,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
96	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	590.00	Kantor Kel. P. Anak Nir	236,000,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
97	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	150.00	Kantor Kel. M. Ganting	60,000,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
98	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	166.00	Kantor Kel. Campago Guguk Bulek	76,700,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
99	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	615.00	Kantor Lurah Koto Selayan	140,342,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
100	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	319.00	Kantor Lurah Puhu Pintu Kabun	63,800,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
101	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12,378.00	Deknasaada	594,144,000	Pengelola Barang Milk Daerah
102	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,000.00	Bka Kantor Imigrasi Bukitinggi	870,000,000	Pengelola Barang Milk Daerah
103	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	688.00	DPD Golkar	45,968,000	Pengelola Barang Milk Daerah
104	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,614.00	Kantor DKP	5,871,250,000	Pengelola Barang Milk Daerah
105	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	712.00	Eks. SD	200,643,000	Pengelola Barang Milk Daerah
106	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	40,000.00	Kr Balakota	12,000,000,000	Sekretariat Daerah
107	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12,788.00	Balakota	922,192,400	Sekretariat Daerah
108	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,028.00	Balakota	83,385,252	Sekretariat Daerah
109	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,472.00	Kantor Sekretariat DPRD	3,680,000,000	Sekretariat DPRD
110	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	4,583.00	SDN 04 Garegeh	963,500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
111	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	4,839.00	SDN 08 Puhun Pintu Kabun	1,359,900,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
112	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	4,963.00	Komp. SDN 10 Sepiran	714,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
113	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	3,603.00	SMPN 5	1,570,800,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
114	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	1,627.00	SDN 02 Aur Kuning	976,200,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
115	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	1,351.00	SDN 04 Birugo	1,251,800,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
116	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	1,909.00	SDN 10 Puhun Pintu Kabun	763,600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
117	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	1,635.00	SDN 11 Campago Guguk Bulek	490,500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
118	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	818.00	SDN 12 Bukit Cangang	654,400,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
119	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	2,266.00	SDN 05 Tarok Dipo	882,400,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
120	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	1,476.00	SDN 06 ATTS	816,600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
121	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	2,175.00	SDN 06 Pual Anak Ala	434,200,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
122	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	2,329.00	SDN 07 Kubu Gulai Banchah	1,048,050,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
123	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	2,000.00	SDN 08 Tarok Dipo	700,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
124	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	2,627.00	SDN 09 Belakang Balok	2,206,660,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
125	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	1,531.00	SDN 19 ATTS	612,400,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
126	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	1,572.00	SDN 17 Manggla Ganting	471,600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
127	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	1,331.00	SDN 18 Tarok Dipo	532,400,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
128	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	1,368.00	SDN 18 CGB	410,400,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
129	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	1,873.00	SDN 19 Manggla Ganting	936,500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
130	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	1,204.00	SDN 08 Kubu Tanjung	602,200,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
131	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathihan	2,094.00	SDN 08 Campago Ipuh	637,600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

819

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	6	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
132	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,900.00	SDN 07 Belakang Belok	1,520,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
133	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	714.00	SDN 11 Aur Kuning	285,600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
134	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,800.00	SDN 12 P. Pintu Kabun	540,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
135	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,575.00	SDN 13 Kubu Gulai Bancah	708,750,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
136	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,904.00	SDN 15 Pulai Anak Ala	666,400,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
137	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,664.00	SDN 16 Campago Ipah	499,200,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
138	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,447.00	SDN 03 Pulai Anak Ala	434,100,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
139	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,141.00	SDN 02 Percontohan	570,500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
140	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,205.00	SDN 01 Ladang Caklah	602,500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
141	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	2,000.00	SDN 14 Tanjung Alam	239,700,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
142	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	10,529.00	SMPN 4	10,529,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
143	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,547.00	SDN 06 Parit Ariang	618,800,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
144	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,255.00	SDN 16 Tarok Dipo	789,250,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
145	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,989.00	SDN 17 Pukan Kural	795,600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
146	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,090.00	SMPN 1	1,135,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
147	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,167.00	SMPN 08	1,300,200,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
148	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	996.00	SDN 04 Bukit Apit Puhun	199,200,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
149	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	4,200.00	SMPN 2	1,020,600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
150	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	3,850.00	SMPN 6	1,710,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
151	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,893.00	TK Negeri Pemolina	1,135,800,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
152	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	5,764.00	SMPN 7	1,570,800,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
153	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,744.00	Tanah Bangunan SMPN 3 Bukittinggi	130,800,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
154	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	2,618.00	SDN 01 BPA	1,309,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
155	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,965.00	SDN 01 Campago Ipah	482,500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
156	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,253.80	SDN 03 Pakan Labuah	626,900,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
157	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	2,916.00	SDN 03 Pakan Kural	1,020,600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
158	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	825.00	SDN 02 CGB	412,500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
159	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	2,428.00	SDN 14 ATTS	2,428,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
160	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	2,071.00	SDN 13 Bukit Apit Puhun	724,850,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
161	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,600.00	SDN 11 Bukit Apit Puhun	560,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
162	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,600.00	SDN 05 Brugo	678,400,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
163	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,864.00	SDN 07 Bukit Cangang	652,400,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
164	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	4,770.00	Tanah Bangunan SMPN 3 Bukittinggi	214,560,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
165	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	200.00	Komp. SDN 10 Sepren	40,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
166	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	785.00	Lapangan Olahraga SMP 2	223,725,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
167	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,120.00	SMP Negeri 2 Bukittinggi	1,570,800,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
168	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,442.00	Gedung LBK	736,800,000	Dinas Sosial
169	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,071.00	SD Al Azhar	202,521,000	Pengelola Barang Milik Daerah
170	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	1,833.00	eka SDN 1 Luak Anyik	540,900,000	Pengelola Barang Milik Daerah
171	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	40.00	Tanah Kosong	32,000,000	Pengelola Barang Milik Daerah
172	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathhan	10,341.00	Tanah Kosong	827,280,000	Pengelola Barang Milik Daerah
173	Tanah Bangunan Balai Sidang/Peresmuan	20,558.00	Belairung Seri	6,167,400,000	Pengelola Barang Milik Daerah
174	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	1,505.00	Puskesmas Handangin	677,250,000	Dinas Kesehatan
175	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	1,139.00	Puskesmas Perkotaan	667,200,000	Dinas Kesehatan
176	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	200.00	Pustu Ujung Bukit	90,000,000	Dinas Kesehatan
177	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	200.00	Puskesmas	100,000,000	Dinas Kesehatan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	6	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
178	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	2,300.00	Bangunan Puskesmas mandingin Plus	724,500,000	Dinas Kesehatan
179	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	204.00	Bangunan Poskeskel	102,000,000	Dinas Kesehatan
180	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	-	Rencana Puskesmas Brugo	2,604,458,500	Dinas Kesehatan
181	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	200.00	Powandu	60,000,000	Dinas Kesehatan
182	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	200.00		60,000,000	Dinas Kesehatan
183	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	2,507.00	DKK, Puskesmas GGP dan UPT Labor	2,065,610,000	Dinas Kesehatan
184	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	200.00	Bangunan Pustu Pirtu Kabun	60,000,000	Dinas Kesehatan
185	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	700.00	Poskeskel Belakang Balok	429,800,000	Dinas Kesehatan
186	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	200.00	Pustu Putal Anak Air	60,000,000	Dinas Kesehatan
187	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	38.00	Pembangunan Pustu Panganek	11,400,000	Dinas Kesehatan
188	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	800.00	Puskesmas Tigo Belah	160,000,000	Dinas Kesehatan
189	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	300.00	Pembangunan Pustu Kuriman	50,000,000	Dinas Kesehatan
190	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	220.00	Poskeskel Putal Anak Air	35,200,000	Dinas Kesehatan
191	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	200.00	Pustu Kb. Tanjung	40,000,000	Dinas Kesehatan
192	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	200.00	Pembangunan Gedung Pustu Pabidhan	60,000,000	Dinas Kesehatan
193	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	326.00	Pustu Manggis Garing	65,200,000	Dinas Kesehatan
194	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	200.00	Pustu Garegeh	60,000,000	Dinas Kesehatan
195	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	261.00	Pustu Tabek Gedang	52,200,000	Dinas Kesehatan
196	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	40.00	Powandu	20,000,000	Dinas Kesehatan
197	Tanah Bangunan Puskesmas/Powandu	200.00	Pustu Guguk Bulek	60,000,000	Dinas Kesehatan
198	Tanah Bangunan Pos Jaja/Menara Jaja	34.00	Pos Ronda	4,800,000	Pengelola Barang Milk Daerah
199	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dit)	1,928.00	Gedung Parkir Representatif	3,374,000,000	Dinas Perhubungan
200	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dit)	2,824.00	Rumah Potong Hewan	2,118,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
201	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dit)	400.00	LPK Bukitinggi	25,600,000	Dinas Sosial
202	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	4,200.00	Lapangan Badminton/ Sport Hall	2,100,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
203	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	2,683.00	Lapangan tenis / Atas Ngani	1,341,350,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
204	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	1,624.00	Lapangan Basket / Atas Ngani	812,100,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
205	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	2,480.00	Kolam Renang	620,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
206	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	20,719.00	Lapangan Bola	5,179,500,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
207	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	621.00	Lapangan Olah Raga	434,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
208	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1,113.00	Tanah Kosong untuk Gedung Kantor	278,250,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
209	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	9,336.00	Halaman SKB	4,668,250,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
210	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1,455.00	Demplot Penyuluh Pertanian	253,628,690	Dinas Pertanian dan Pangan
211	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1,010.00	Puskesmas	262,621,310	Dinas Pertanian dan Pangan
212	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	18,089.00	Rusunawa Bukitinggi	2,058,169,908.20	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
213	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	12,480.00	Tanah Kosong	1,984,000,000	Pengelola Barang Milk Daerah
214	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2,582.00	Tanah Kosong / Rumah TNI	123,536,000	Pengelola Barang Milk Daerah
215	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	15,760.00	Ditampat Kodim	1,285,200,000	Pengelola Barang Milk Daerah
216	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	170.00	Tanah Kosong	110,500,000	Pengelola Barang Milk Daerah
217	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5,390.00	Tanah Kosong Rencana Musabeta	2,120,000,000	Pengelola Barang Milk Daerah
218	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3,170.00	Tanah Kosong	792,500,000	Pengelola Barang Milk Daerah
219	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1,050.00	Pengganti Rumah PUSIDO	262,500,000	Pengelola Barang Milk Daerah
220	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4,293.00	Tanah Yayasan Kasih Bunda	206,601,000	Pengelola Barang Milk Daerah
221	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1,000.00	Tanah Kosong	1,753,818,000	Pengelola Barang Milk Daerah
222	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	681.00	Tanah Kosong	844,789,000	Pengelola Barang Milk Daerah
223	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2,424.00	Tanah Kosong	909,000,000	Seban Pital Pamong Praja

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	6	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
224	Tanah Kosong Yang Sudah Diberunbukkan	2,764.00	Tanah Kosong (Renc. Ktr DPRD)	621,900,000	Sekretariat DPRD
225	Tanah Kosong Yang Sudah Diberunbukkan	5,528.00	Tanah Kosong (Renc. Ktr DPRD)	1,382,000,000	Sekretariat DPRD
226	Tanah Lapangan Apel/Upacara	500.00	Pool Kendaraan Sekretariat Daerah	200,000,000	Sekretariat Daerah
227	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	11,986.00	Jalan	5,853,962,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
228	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,666.00	Jalan	159,936,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
229	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,194.00	Jalan Kota Kolektor	380,289,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
230	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	12,462.00	Jalan	4,910,028,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
231	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	834.00	Jalan Kota Kolektor	344,799,429	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
232	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,122.00	Jalan	375,870,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
233	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,112.00	Jalan Kota Kolektor	1,864,176,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
234	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	847.00	Jalan	22,869,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
235	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	7,380.00	Jalan Kota Kolektor	1,941,333,333	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
236	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	6,659.00	Jalan	496,838,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
237	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,348.00	Jalan Kota Kolektor	156,328,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
238	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	681.00	Jalan	136,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
239	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,338.00	Jalan Kota Kolektor	448,230,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
240	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,589.00	Jalan	76,272,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
241	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,520.00	Jalan Kota Kolektor	309,320,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
242	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,850.00	Jalan	3,141,450,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
243	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,240.00	Jalan Kota Kolektor	1,362,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
244	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	8,355.00	Jalan	2,147,235,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
245	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,920.00	Jalan Kota Kolektor	1,648,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
246	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	8,372.00	Jalan	5,910,632,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
247	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,048.00	Jalan Kota Kolektor	950,272,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
248	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	17,207.00	Jalan	6,838,061,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
249	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,344.00	Jalan Kota Kolektor	832,608,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
250	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	10,908.00	Jalan	1,698,016,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
251	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,175.00	Jalan Kota Kolektor	753,004,167	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
252	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,087.00	Jalan	1,432,368,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
253	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,254.00	Jalan Kota Kolektor	349,239,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
254	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	9,579.00	Jalan	5,562,525,300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
255	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,044.00	Jalan Kota Kolektor	345,740,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
256	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	6,061.00	Jalan	2,521,376,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
257	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,836.00	Jalan Kota Kolektor	918,918,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
258	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,081.00	Jalan	475,924,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
259	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,484.00	Jalan Kota Kolektor	1,140,572,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
260	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,515.00	Jalan	703,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
261	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,384.00	Jalan Kota Kolektor	566,632,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
262	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	6,623.00	Jalan	3,237,992,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
263	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,060.00	Jalan Kota Kolektor	190,550,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
264	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,612.00	Jalan	2,340,204,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
265	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,684.00	Jalan Kota Kolektor	284,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
266	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,037.00	Jalan	1,553,474,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
267	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	8,323.00	Jalan Kota Kolektor	796,927,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
268	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,447.00	Jalan	707,183,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
269	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,370.00	Jalan Kota Kolektor	118,920,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	6	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
270	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	626.00	Jalan	80,128,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
271	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,938.00	Jalan Kota Kolektor	32,154,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
272	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	892.00	Jalan	24,084,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
273	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	17,586.00	Jalan Kota Kolektor	791,170,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
274	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,351.00	Jalan	247,908,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
275	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,836.00	Jalan Kota Kolektor	287,946,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
276	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,035.00	Jalan	251,505,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
277	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,236.00	Jalan Kota Kolektor	500,889,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
278	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,134.00	Jalan	686,276,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
279	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,550.00	Jalan Kota Kolektor	319,637,900	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
280	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	767.00	Jalan	49,388,300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
281	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,236.00	Jalan Kota Kolektor	405,794,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
282	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,611.00	Jalan	268,933,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
283	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,980.00	Jalan Kota Kolektor	238,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
284	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	237.00	Jalan	15,168,300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
285	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,844.00	Jalan Kota Kolektor	602,359,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
286	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	570.00	Jalan	193,515,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
287	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,613.00	Jalan Kota Kolektor	70,551,300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
288	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,108.00	Jalan	269,824,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
289	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,021.00	Jalan Kota Kolektor	916,873,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
290	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,929.00	Jalan	308,640,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
291	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,810.00	Jalan Kota Kolektor	244,020,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
292	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	566.00	Jalan	161,210,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
293	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,800.00	Jalan Kota Kolektor	264,100,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
294	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	237.00	Jalan	67,545,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
295	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	7,644.00	Jalan Kota Kolektor	1,892,654,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
296	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	513.00	Jalan	33,348,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
297	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,124.00	Jalan Kota Kolektor	271,872,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
298	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	320.00	Jalan	16,900,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
299	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,680.00	Jalan Kota Kolektor	127,344,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
300	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	327.00	Jalan	93,195,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
301	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,184.00	Jalan Kota Bukittinggi	359,824,300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
302	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,588.00	Jalan	42,676,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
303	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	12,696.00	Jalan Kota Kolektor	2,374,152,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
304	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,633.00	Jalan	150,306,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
305	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,817.00	Jalan Kota Kolektor	1,309,905,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
306	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	997.00	Jalan	63,808,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
307	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	8,560.00	Jalan Kota Kolektor	2,448,140,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
308	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	252.00	Jalan	50,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
309	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	8,340.00	Jalan Kota Kolektor	333,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
310	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	866.00	Jalan	41,568,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
311	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	628.00	Jalan Kota Lokal	235,980,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
312	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,892.00	Jalan	1,385,292,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
313	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,120.00	Jalan Kota Lokal	295,680,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
314	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,221.00	Jalan	182,122,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
315	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	836.00	Jalan Kota Lokal	70,792,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	6	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
316	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,008.00	Jalan	40,160,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
317	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,392.00	Jalan Kota Lokal	1,206,864,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
318	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,420.00	Jalan	404,700,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
319	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,330.00	Jalan Kota Lokal	563,760,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
320	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	461.00	Jalan	92,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
321	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,025.00	Jalan Kota Lokal	1,087,425,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
322	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	511.00	Jalan	102,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
323	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	648.00	Jalan Kota Lokal	255,312,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
324	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	541.00	Jalan	108,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
325	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,508.00	Jalan Kota Lokal	495,603,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
326	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	920.00	Jalan	24,840,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
327	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,690.00	Jalan Kota Lokal	478,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
328	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	522.00	Jalan	148,770,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
329	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	298.00	Jalan Kota Lokal	86,430,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
330	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	305.00	Jalan	25,010,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
331	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,974.00	Jalan Kota Lokal	441,794,375	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
332	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	422.00	Jalan	67,520,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
333	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,120.00	Jalan Kota Lokal	49,280,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
334	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	654.00	Jalan	186,390,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
335	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,560.00	Jalan Kota Lokal	493,653,333	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
336	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	880.00	Jalan	250,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
337	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,330.00	Jalan Kota Lokal	215,525,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
338	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	249.00	Jalan	70,965,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
339	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	885.00	Jalan Kota Lokal	31,860,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
340	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	327.00	Jalan	109,545,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
341	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,200.00	Jalan Kota Lokal	43,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
342	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	582.00	Jalan	93,120,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
343	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,264.00	Jalan Kota Lokal	549,020,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
344	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,031.00	Jalan	10,310,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
345	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,775.00	Jalan Kota Lokal	699,350,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
346	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	982.00	Jalan	328,970,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
347	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	178.00	Jalan Kota Lokal	67,000,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
348	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	451.00	Jalan	128,535,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
349	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	756.00	Jalan Kota Lokal	42,336,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
350	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	850.00	Jalan	170,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
351	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	990.00	Jalan Kota Lokal	75,240,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
352	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,246.00	Jalan	52,332,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
353	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	518.00	Jalan Kota Lokal	103,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
354	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,659.00	Jalan	743,337,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
355	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	303.00	Jalan Kota Lokal	40,905,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
356	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,311.00	Jalan	324,472,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
357	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	308.00	Jalan Kota Lokal	121,352,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
358	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	7,097.00	Jalan	393,173,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
359	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,056.00	Jalan Kota Lokal	460,416,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
360	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	692.00	Jalan	168,196,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
361	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,908.00	Jalan Kota Lokal	626,301,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	6	Marga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
362	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	196.00	Jalan	16,072,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
363	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	297.00	Jalan Kota Lokal	117,018,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
364	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	347.00	Jalan	98,895,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
365	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	477.00	Jalan Kota Lokal	130,380,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
366	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	710.00	Jalan	113,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
367	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	408.00	Jalan Kota Lokal	116,380,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
368	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	488.00	Jalan	78,080,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
369	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	600.00	Jalan Kota Lokal	73,050,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
370	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	411.00	Jalan	65,760,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
371	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	626.00	Jalan	100,160,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
372	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	665.00	Jalan Kota Lokal	99,760,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
373	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	631.00	Jalan	100,960,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
374	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,890.00	Jalan Kota Lokal	92,295,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
375	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	355.00	Jalan	56,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
376	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	236.00	Jalan Kota Lokal	94,478,667	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
377	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,042.00	Jalan	85,444,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
378	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,212.00	Jalan Kota Lokal	223,008,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
379	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,249.00	Jalan	52,458,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
380	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	300.00	Jalan Kota Lokal	9,825,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
381	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,162.00	Jalan	74,368,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
382	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	385.00	Jalan Kota Lokal	18,490,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
383	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	924.00	Jalan	263,340,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
384	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	464.00	Jalan	132,240,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
385	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,584.00	Jalan Kota Lokal	384,912,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
386	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	510.00	Jalan	65,280,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
387	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,230.00	Jalan Kota Lokal	84,120,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
388	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	820.00	Jalan	159,080,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
389	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	762.00	Jalan Kota Lokal	134,112,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
390	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	737.00	Jalan	14,740,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
391	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,115.00	Jalan Kota Lokal	181,890,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
392	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	635.00	Jalan	212,725,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
393	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	448.00	Jalan Kota Lokal	38,528,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
394	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,298.00	Jalan	184,688,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
395	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	500.00	Jalan Kota Lokal	205,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
396	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,238.00	Jalan	58,992,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
397	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,002.00	Jalan Kota Lokal	103,208,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
398	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,727.00	Jalan	2,268,378,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
399	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	680.00	Jalan Kota Lokal	65,280,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
400	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,957.00	Jalan	912,688,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
401	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	300.00	Jalan Kota Lokal	60,450,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
402	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	376.00	Jalan	107,160,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
403	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	752.50	Jalan Kota Lokal	290,475,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
404	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,960.00	Jalan	1,197,960,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
405	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	-	Jalan	230,384,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
406	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	204.00	Jalan Kota Lokal	25,194,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
407	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,940.00	Jalan	45,590,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M <sup>2</sup> )	6	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
408	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,062.00	Jalan Kota Lokal	172,752,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
409	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	477.00	Jalan	12,879,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
410	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	438.00	Jalan Kota Lokal	124,830,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
411	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,422.00	Jalan	28,440,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
412	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	519.00	Jalan Kota Lokal	147,915,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
413	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	666.00	Jalan	161,838,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
414	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	846.00	Jalan Kota Lokal	172,020,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
415	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,020.00	Jalan Kota Kolektor	626,280,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
416	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,752.00	Jalan Kota Kolektor	918,048,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
417	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	396.00	Jalan Kota Lokal	112,860,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
418	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	380.00	Jalan Kota Lokal	108,300,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
419	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	320.00	Jalan Kota Lokal	91,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
420	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	429.00	Jalan Kota Lokal	122,265,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
421	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	456.00	Jalan Kota Lokal	110,580,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
422	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	579.00	Jalan Kota Lokal	165,015,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
423	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	944	Jalan Kota Lokal	99,120,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
424	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	273	Jalan Kota Lokal	17,403,750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
425	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	462	Jalan Kota Lokal	112,035,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
426	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	429	Jalan Kota Lokal	38,875,125	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
427	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	795	Jalan Kota Lokal	164,167,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
428	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	621	Jalan Kota Lokal	99,360,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
429	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	270	Jalan Kota Lokal	56,295,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
430	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,515	Jalan Kota Lokal	567,367,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
431	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	453	Jalan Kota Lokal	129,105,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
432	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,860	Jalan Kota Lokal	225,060,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
433	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,976	Jalan Kota Lokal	326,032,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
434	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,128	Jalan Kota Lokal	197,218,750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
435	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,640	Jalan Kota Lokal	884,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
436	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,175	Jalan Kota Lokal	286,612,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
437	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	456	Jalan Kota Lokal	64,296,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
438	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	632	Jalan Kota Lokal	126,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
439	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,368	Jalan Kota Lokal	224,352,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
440	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,312.5	Jalan Kota Lokal	374,362,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
441	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	681	Jalan Kota Lokal	51,245,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
442	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,536	Jalan Kota Lokal	80,306,667	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
443	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	651	Jalan Kota Lokal	256,494,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
444	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,232	Jalan Kota Lokal	168,516,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
445	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,436	Jalan Kota Lokal	119,772,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
446	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,538	Jalan Kota Lokal	111,037,900	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
447	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,242	Jalan Kota Lokal	59,516,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
448	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,697	Jalan Kota Lokal	1,040,143,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
449	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,804	Jalan Kota Lokal	486,912,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
450	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,776		75,520,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
451	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,141		763,263,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
452	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,232		107,136,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
453	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	6,072		163,944,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

819

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	6	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
454	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,232		229,806,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
455	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	260		87,100,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
456	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,994		253,952,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
457	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	273		54,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
458	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	219		43,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
459	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	207		41,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
460	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	252		50,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
461	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,002		200,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
462	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,651		1,301,508,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
463	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	775		480,112,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
464	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,275		238,425,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
465	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	480		137,280,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
466	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,960		1,319,360,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
467	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	681		272,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
468	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,580		119,290,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
469	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	916		183,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
470	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,812		650,568,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
471	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,725		438,650,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
472	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,675		498,750,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
473	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,128		457,122,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
474	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,500		354,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
475	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	660		218,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
476	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,836		734,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
477	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	337,50		96,525,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
478	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,675		536,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
479	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	660		264,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
480	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,497		279,939,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
481	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	937,50		341,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
482	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,692		172,288,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
483	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,695		127,680,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
484	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,204		205,056,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
485	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	990		67,950,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
486	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,500		144,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
487	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	960		92,160,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
488	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	500		100,750,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
489	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	270		72,900,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
490	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	270		54,405,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
491	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	516		103,974,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
492	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	916		94,348,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
493	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	432		44,496,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
494	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	282		58,797,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
495	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	455		132,525,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
496	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,200		224,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
497	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,200		224,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
498	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,295		259,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
499	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,312		262,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	6	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
500	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	720		144,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
501	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,480		94,720,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
502	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,600		743,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
503	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,616		347,136,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
504	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	476		1,140,680,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
505	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	493		1,283,700,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
506	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	169		307,910,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
507	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	482		1,629,610,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
508	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	118	Jalan Kantor DPRD	381,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
509	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	75	Jalan Kantor DPRD	309,300,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
510	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	49		131,900,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
511	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	32	Jalan Kantor DPRD	65,900,125	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
512	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	357	Jalan	1,043,653,800	Kecamatan Aur Brugo Tigo Baleh
513	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	54		157,862,600	Kecamatan Aur Brugo Tigo Baleh
514	Tanah Untuk Bangunan Rumah Adat	2,592	Taman Jem Gadang	69,894,300	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
515	Tanah Untuk Bangunan Rumah Adat	772	Museum IKBH	772,300,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
516	Tanah Untuk Makam Umum	50,400	Rencana Taman Pemakaman Umum	754,717,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
517	Tanah Untuk Makam Umum	1,197	TANAH PEMAKAMAN	62,256,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
518	Tanah Lapangan Taman lainnya	6,720	Taman Igaral Maaram Kota Bukittinggi	3,359,875,000	Dinas Lingkungan Hidup
519	Tanah Lapangan Taman lainnya	2,643	Kawasan Jalur Hijau	2,390,626,000	Dinas Lingkungan Hidup
520	Tanah Lapangan Taman lainnya	2,220	Taman Hutan	355,200,000	Dinas Lingkungan Hidup
521	Tanah Bangunan Puskesmas/Prorandu	100	puskesmas	80,200,000	Dinas Kesehatan
				<b>546,289,788,505.20</b>	

8 9 1

DAFTAR ASET TAK BERWUJUD

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun	Nilai	SKPD
1	2	3	4	5
1	SOFTWARE MICROSOFT SQL SERVER	2009	30,470,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	SOFTWARE NORTON ANTI VIRUS	2010	2,700,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	SOFTWARE ANTI VIRUS	2012	3,470,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	SOFTWARE WEB	2012	38,812,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	software PBB	2012	836,000,000	Badan Keuangan
6	software pendapatan	2015	46,125,000	Badan Keuangan
7	software windows/server 2012 r2	2015	17,490,000	Badan Keuangan
8	software windows 7 / 64 bit	2015	2,970,000	Badan Keuangan
9	software windows 7 /64 bit	2015	2,970,000	Badan Keuangan
10	software windows 7 /64 bit	2015	2,970,000	Badan Keuangan
11	software windows 7 /64 bit	2015	2,970,000	Badan Keuangan
12	software windows 7/ 64 bit	2015	2,970,000	Badan Keuangan
13	software windows 7 / 64 bit	2015	2,970,000	Badan Keuangan
14	software windows 7 /64 bit	2015	2,970,000	Badan Keuangan
15	software aktivasi hamci	2016	3,485,000	Badan Keuangan
16	webfoto pajak	2017	48,400,000	Badan Keuangan
17	software windows server 2016	2017	14,300,000	Badan Keuangan
18	software c	2017	20,185,000	Badan Keuangan
19	APLIKASI WEBGIS PBMD	2019	95,933,420	Badan Keuangan
20	Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	2014	218,809,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
21	Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kota	2019	26,888,250	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
149	RISET POTENSI PAJAK RETRIBUSI DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 S.D 2025	2021	199,925,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
150	RENCANA INDIK KELITBANGAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026	2021	56,677,500	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
22	APLIKASI CAPIL	2010	30,985,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23	APLIKASI DOKUMENTASI CAPIL	2013	9,900,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24	Software Lisensi Mikrotik dan Instalasinya	2017	1,730,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25	Aplikasi Otomatisasi Integrasi Data Alat Baca KTP-el untuk Adm Pemerintahan	2018	5,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26	Aplikasi Otomatisasi Integrasi Data Alat Baca KTP-el untuk Adm Pemerintahan	2018	5,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
27	Aplikasi Otomatisasi Integrasi Data Alat Baca KTP-el untuk Adm Pemerintahan	2018	5,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
28	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan Integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan Integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan Integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
31	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan Integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
32	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan Integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
33	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan Integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

8/19

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun	Nilai	SKPD
1	2	3	4	5
34	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
35	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
36	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
37	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
38	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
39	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
40	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
41	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
42	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
43	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
44	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
45	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
46	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
47	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
48	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
49	PT. PERMATA GEMILANG SEJAHTERA	2020	40,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
50	PT. PERMATA GEMILANG SEJAHTERA	2020	25,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
51	Perangkat Lunak Sistem Informasi	2018	53,900,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
52	Software Infokus	2009	164,450,000	Dinas Kesehatan
53	Software Infokus	2011	23,400,000	Dinas Kesehatan
54	Software Infokus	2011	29,150,000	Dinas Kesehatan
55	Software	2015	7,689,000	Dinas Kesehatan
56	Software	2015	7,689,000	Dinas Kesehatan
57	Software	2015	7,689,000	Dinas Kesehatan
58	Software	2015	7,689,000	Dinas Kesehatan
59	Software	2015	7,689,000	Dinas Kesehatan
60	Software	2015	7,689,000	Dinas Kesehatan
61	Software	2015	7,689,000	Dinas Kesehatan
62	Kajian DED	2017	139,564,000	Dinas Lingkungan Hidup
63	website	2007	44,500,900	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
64	software utk komputer rumah adat	2016	154,699,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
65	master plan kawasan TIC	2017	49,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun	Nilai	SKPD
1	2	3	4	5
66	Kajian penyusunan RTBL Kawasan Pusat Pelayanan Kota	2011	362,470,990	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
67	Kajian penyusunan RDTR Kota Bukittinggi	2011	423,921,300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
68	Kajian pembuatan blok blad kawasan Ladang Cakiah - Koto Selayan	2011	90,408,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
69	Kajian pembuatan blok blad Puhun Fintu Kabun dan Kubu Gulai Bancah	2013	148,088,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
70	Kajian Dua Jalur Jalan Soekarno Hatta	2013	213,665,100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
71	Kajian Pembuatan Blok Blad Kelurahan	2014	285,203,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
72	Kajian Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	2014	683,985,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
73	Kajian Blok Blad Kawasan Kelurahan	2015	177,716,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
74	Kajian Penyusunan RDTR dan PZ Kecamatan ABTB	2015	204,029,350	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
75	Kajian Aktualisasi Data Jalan	2015	48,560,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
76	Kajian/ Penyusunan RTBL Kawasan Koridor By Pass	2017	363,787,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
77	Kajian/ Dokumen Pendataan Bangunan	2017	317,655,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
78	Aplikasi GIS Tanah dan Bangunan	2018	47,632,255	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
79	Data Base Daerah Irigasi Kota Bukittinggi	2019	97,689,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
80	APLIKASI PERIZINAN UNTUK 11 JENIS IZIN YANG DITERBITKAN OLEH KPPT	2008	67,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
81	APLIKASI PERIZINAN ONLINE (36 BUAH TEMPLATE PERIZINAN)	2014	25,938,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
82	BUKU RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL RUPM TAHUN 2019 -2025	2019	251,670,540	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
83	RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA (NASKAH AKADEMIK DAN RTIK)	2019	191,501,200	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
84	Website Official dan API	2020	45,629,630	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
85	Android Application - Counter Screen	2020	34,222,222	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
86	Web Application - Counter service and Government Managemen	2020	91,259,259	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
87	Web Application - Registration Screen	2020	96,962,963	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
88	Virtual Private Server	2020	9,125,926	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
89	Softwars Pembelajaran	2011	21,422,500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
90	Aplikasi Pembelajaran	2012	5,789,600	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
91	Aplikasi Pembelajaran	2012	5,789,600	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
92	Software Perpustakaan elektronik, software pembelajaran IPS, TIK, PKN dan Keterampilan Edukatif	2012	5,789,600	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
93	Pembelajaran Interaktif bahasa Inggris, IPA dan Matematika	2012	5,784,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
94	Software Pusat Sumber Belajar Virtual	2013	95,700,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
95	Software Pusat Sumber Belajar Virtual	2013	102,300,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
96	Website	2013	48,400,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
97	Aplikasi Pembelajaran	2014	4,600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
98	Bel masuk digital	2016	1,750,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
99	microsoft windows server 2012	2016	3,386,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun	Nilai	SKPD
1	2	3	4	5
100	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
101	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
102	PAKET SOFTWARE ENGINE	2016	35,475,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
103	PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SMP	2016	28,256,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
104	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
105	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
106	PAKET SOFTWARE ENGINE	2016	35,475,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
107	PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SMP	2016	30,630,600	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
108	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
109	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
110	PAKET SOFTWARE ENGINE	2016	35,475,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
111	PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SMP	2016	30,311,600	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
112	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
113	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
114	PAKET SOFTWARE ENGINE	2016	35,200,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
115	PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SD	2016	30,026,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
116	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
117	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
118	PAKET SOFTWARE ENGINE	2016	35,200,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
119	PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SD	2016	30,026,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
120	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
121	PAKET SOFTWARE ENGINE	2016	30,200,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
122	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
123	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
124	PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SD	2016	30,026,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
125	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
126	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
127	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
128	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
129	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
130	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
131	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
132	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
133	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
134	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
135	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
136	Software	2017	600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
137	Bel Otomatis	2018	600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
138	Software	2016	2,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

8 79

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun	Nilai	SKPD
1	2	3	4	5
139	Sistem Monitoring Jaringan	2008	12,799,000	Dinas Perhubungan
140	Sistem Informasi PKB	2018	39,576,900	Dinas Perhubungan
141	Aplikasi Aksara Perpustakaan	2012	66,790,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
142	OS SERVER	2019	2,852,600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
143	DED	2019	98,658,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
144	SIG UNTUK DATABASE PERUMAHAN	2021	98,850,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
145	SIG DATABASE PSU	2021	92,654,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
146	Windows OS Server 2012 R2	2016	23,100,000	Inspektorat
147	Aplikasi E-Pembangunan	2018	27,954,146	Sekretariat Daerah
148	Aplikasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Pemerintah Kota Bukittinggi	2019	63,800,000	Sekretariat Daerah
149	Software	2022	24,420,000	DPNPTSP
150	Aplikasi E-Lapkes	2022	39,600,000	DKK
151	Software Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan	2022	97,785,000	DISDUKCAPIL
152	Lisensi dan Franchise Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	2022	8,944,380	DISKOMINFO
153	Software/Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan - SCK	2022	11,100,000	DKK
	<b>Total</b>		<b>8,352,406,781</b>	

291



DAFTAR KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN

No.	SKPD	Keterangan	Nilai Kontrak (ribuan Rp)
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (DED TESONG KANTOR WALIKOTA)	47,694,943.15
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Kantor Arsip Dokumentasi dan Museum Sejarah Alam (MUSABATA)	673,522,080.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Kantor DPRD Kota Bukittinggi	371,762,400.00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Manajemen Konstruksi Pembangunan Kantor DPRD kota Bukittinggi Tahun 1 ( Pertama )	173,603,650.00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gedung YPAC	47,616,000.00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Bukittinggi	86,901,925.00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sport Hall	434,097,000.00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan Rancangan Pra Konsep Pembangunan Kembali Pasar Atas	49,821,000.00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan DED Pasar Lereng	270,118,468.80
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Awning Mirangkabau Night Market	85,182,611.55
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengawasan Pembangunan Awning Hwang Kabau Night Market	35,991,000.00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Gerbang Belakota Bukittinggi dan Pedestrian	38,544,000.00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pasar Lereng	675,538,600.00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota	49,960,000.00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan Jalan Dalam Kota	49,960,000.00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota	19,968,000.00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan Jalan Dalam Kota	19,430,000.00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	gg lubang Tendo dan Jl. Kiri Menuju Perbatasan dengan Kelurahan Perit Antang	17,411,000.00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Rehab Trotoar serta Jembatan di Depan Kedai Nasi Selero Kampung serta Perbatasan Kelurahan Pekan Labuah	12,328,000.00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan DED Jalan Kantor DPRD	97,818,000.00
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Peningkatan Jalan Konsolidasi By.Pais	39,796,000.00
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2023 ( DAK Fisik Bidang Jalan 2022 )	99,325,175.00
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perencanaan Peningkatan Trotoar (Paket 1) (Jl. Panorama Baru)	22,346,600.00
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perencanaan Peningkatan Trotoar (Paket2)	90,780,000.00
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Sultan Syehri	46,783,000.00
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Batang Tambuc	24,600,000.00
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan Jalan Sahler Johan	32,224,900.00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	12,950,300.00
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pendukung Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAK Tahap 1	49,462,300.00
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan DAK Irigasi (2020)	72,000,000.00
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi Tahun 2019	19,884,000.00
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan Saluran Pembagi Air Jembatan Besi	34,900,000.00
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Peningkatan Drainase Paket 4 (pasar atas - a.yeni)	69,085,300.00
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Paket 2 (Jl. A. Yani - Simp. Tambak)	69,008,500.00
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Peningkatan Drainase Paket 1 ( Batang Maseng)	37,465,138.04
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Pengadaman Tebing Ikuu Labuah (putus kontrak)	186,536,220.00
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Perbaikan Intake WTP SPAM Panorama Baru	4,979,020.00
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya (Solar Cell) di Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi	22,484,000.00
39	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan	63,010,000.00
40	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkung dan Riol Kel.Campago Ipuh	47,880,000.00
41	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Rehab Jaling Kel.Campago Ipuh	11,638,476.00
42	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningk. Jalan Labuah Baru Kel. PPK	5,237,314.00
43	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningk. Jln.Manggai Jl. Angku Baso Kel. PT	1,745,771.00
44	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Lanjutan Peningk Jaling Komp Pongas Madinatul M. Kel.CGB	6,465,820.00
45	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningkatan Jaling RW 1 Kubu Tabak Ledang Cahah	11,982,667.00
46	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningkatan Jaling Depan MDA Al Manzarl Panorama RW 2 Kayu Kubu	1,497,833.00

8 19

No.	SKPD	Keterangan	Nilai Kontrak (ribuan Rp)
1	2	3	4
47	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningkatan Jalang panorama dalam RW 2 Kel Kayu Kubu	10,484,833.00
48	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengecoran bahu jalan Komp.Perum Ganting Permai RW 4 Kel.PAA	2,580,230.00
49	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkung gp. 5.Biru Kel.Campago Ipuh	8,719,303.00
50	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengecoran jalan guguk panjang RW 2 dan RW 3 Kel BCKR	11,985,710.00
51	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembukaan Jalan Semping Kantor Yakult	3,704,312.00
52	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkung RW I Kelurahan Aur Kuning	3,367,556.00
53	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalang RW I Kubu Tabak Kel. Ladang Caklah	7,851,773.00
54	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan dan drainase Kel. Koto Selayan	6,456,492.00
55	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkung Kel. Pakan Labuah	3,873,896.00
56	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan jalan lingkungan dan drainase belakang SDN 17 Kelurahan Pekan Kural	12,162,081.00
57	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan dan drainase Gang Tenggara menenggang Kel.Pakan Kural	10,051,734.00
58	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan dan drainase RT.01/RW.03 Kel. Pakan Kural	21,462,185.00
59	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan jalan lingkung dan drainase lingkungan jalan Serjal Dalam Kel.Mangga Ganting	12,061,383.00
60	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan dan drainase belakang Hoky Kelurahan Mangga Ganting	15,596,617.00
61	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan pada tanah konsolidasi Rv Pass Kelurahan Aur Kuning	58,886,000.00
62	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkung Perumahan Ar-Rahmah Kel.Camp Guguk Bulek	62,162,000.00
63	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Pembangunan riol 3 Kekekakan dalam Kel.Belakang Belok	28,804,000.00
64	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembuatan riol bik komp ganting permai Kel.PAA	3,576,182.00
65	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan pembuatan riol komp perum ganting permai RW2 Kel.PAA	2,981,818.00
66	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Drainase Jln.Banda redak RT.05/RW.06 Kel.Pakan Kural	8,380,525.00
67	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Drainase Jalan Lingkar dalam Kel. Camp Ipuah	5,375,096.00
68	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Riol Kel.Campago Guguk Bulek	5,375,096.00
69	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan drainase Lingkungan Kel.Kubu Gulai Bencah	6,935,507.00
70	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan drainase Lingkungan Kel. ATTS	6,242,046.00
71	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembuatan sumur resapan di Gang Peotya, Tengah Jua	10,056,630.00
72	Dinas Perhubungan	DED Traffic Light ATCS 2 Trik Penempatan (Realisasi 7 Titik dari Total 9 Titik)	18,574,200.00
73	Dinas Perhubungan	DED Pembangunan Gedung Kantor DISHUB	78,418,600.00
74	Dinas Perhubungan	DED Rehab Gedung Parkir Roda 2 dan 4	78,418,400.00
75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	MUSHALLA (KDP 2018 : 19.611.222.49 + 2019 : 327.395.263.09)	347,006.484.97
76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	perencanaan sekolah	35,809,600.00
77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SDN 05 Tarok Dipo	71,406,400.00
78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SDN 11 Aur Kuning	66,859,200.00
79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		74,055,200.00
80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PEMBANGUNAN SDN 05 TAROK DIPO	1,963,340,555.24
81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Lanjutan Pembangunan, Perencanaan dan pengawasan SDN 05 Tarok Dipo	831,027,467.84
82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DED Pembangunan SDN 16 Tarok Dipo	79,619,220.00
83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh 2.523.768.534.06 Perencanaan 71.738.150 Pengawasan 66.780.150	2,665,286,834.08
84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Lanjutan Pembangunan SDN 08 Kubu Tanjung 743.584.065.53 Perencanaan 44.735.000 Pengawasan 44.725.467	833,048,530.05
85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembayaran Termin I 80% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan SNP N 9 Bukittinggi	79,840,000.00
86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	POKR 2022	198,804,103.99
87	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rehab gedung kantor	94,995,200.00
88	Dinas Sosial	DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial	79,620,000.00
89	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran Termin I sebesar 11,95 % Pekerjaan Pembangunan RPH	90,770,953.51
90	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran 85 % Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RPH Kota Bukittinggi	79,225,950.00
91	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran uang muka 20 % Pekerjaan Pembangunan RPH Bukittinggi	202,557,218.42
92	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran 15 % Perencanaan Pekerjaan Pembangunan RPH	13,981,050.00

No.	SKPD	Keterangan	Nilai Kontrak (ribuan Rp)
1	2	3	4
93	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran Termyn II sebesar 81,50 % Pekerjaan Pembangunan RPH	528.294.545.30
94	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran Termyn III sebesar 95 % Pekerjaan Pembangunan RPH	140.524.070.28
95	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran Termyn IV sebesar 5 % Pekerjaan Pembangunan RPH	50.639.304.61
96	Dinas Pertanian dan Pangan	Pengawasan Pembangunan RPH	69.868.030.00
97	Dinas Pertanian dan Pangan	Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pembangunan RPH	79.840.000.00
98	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran termyn I sebesar 80% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan SPAL SRH	63.440.000.00
99	Dinas Pertanian dan Pangan	BH Pembangunan RPH Rumah Potong Hewan (Fask dan Pengawasan)	1.800.750.871.17
100	Dinas Pertanian dan Pangan	Review Perencanaan RPH 80%	35.155.675.74
101	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	DED PEMBANGUNAN KANOPIL JL. MINANGKABAU	77.704.000.00
102	Dinas Lingkungan Hidup	80% Pekerjaan Perencanaan RTH Ngarai Hserem	79.824.800.00
103	Dinas Lingkungan Hidup		12.760.000.00
104	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Perencanaan Kantor Informasi Destinasi	326.221.600.00
105	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	perencanaan diorama lobang jepang	29.796.000.00
106	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	PERENCANAAN KOLAM RENANG	39.647.200.00
107	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	PERENCANAAN SPORTRHALL	49.650.000.00
108	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	PENYUSUNAN DED KANDANG TAHAP II TMSBK	79.548.800.10
109	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Plak kandang tahap II TMSBK (zone reptil dan harimau)2020	14.395.000.000.10
110	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pengawasan kandang tahap II (zone reptil dan harimau)2020	178.680.720.10
111	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Hutang DED Pemeliharaan Kandang Sebwa Tahap II	19.912.200.00
112	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pembangunan Kandang Sebwa Plak (lanjutan kandang tahap 2) tahun 2021	226.017.524.00
113	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Hutang Pemeliharaan DED Kantor Pusat Informasi	81.555.400.00
114	Kecamatan Aur Brugo Tigo Baleh	Pembayaran DED Pembangunan Kantor Camat AITB Termyn I	158.840.000.00
115	Kecamatan Aur Brugo Tigo Baleh	Pembayaran Termyn I DED Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Brugo	35.380.000.00
116	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	DED Kantor Camat Mandiangin Koto Selayan	111.576.860.00
117	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Status Tahap I (Perencanaan I : 77.597.890, Termyn I 40% (uang muka) : 93.866.429,04, Termyn II 70% :	2.724.184.551.96
118	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	DED Sport Hall 2022	76.372.658.00
119	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pembuatan Gerbang Gasparik Blantik Marinjau 2022	208.887.128.15
120	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	revitalisasi benteng fort de lock 2022	2.202.318.177.80
121	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Jalur pejalan kaki (pedestrian)	17.422.560.00
122	Kec.AITB	DED Pembangunan Kantor LC Termyn I	79.070.288.00
		<b>Total</b>	<b>37.618.883.121.17</b>

8/19

## REKAP AKUMULASI PENYUSUTAN PER SKPD PER KELOMPOK BARANG

No.	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			TOTAL AKUMULASI ASET TETAP
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	Sekretariat DPRD	13,143,516,878.00	1,859,476,019.00	-	14,992,992,897.00
2	Sekretariat Daerah	29,753,103,089.00	7,938,970,376.00	-	37,692,073,465.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13,633,512,500.00	2,117,270,502.00	404,218,737,793.00	419,969,520,795.00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1,746,508,773.00	336,705,585.00	32,293,246,102.00	34,376,460,460.00
5	Dinas Perhubungan	11,393,122,712.00	8,346,132,929.00	-	19,739,254,741.00
6	Dinas Kesehatan	47,301,607,225.00	10,683,021,623.00	468,191,752.00	58,452,820,600.00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	47,266,896,968.00	56,959,725,921.00	-	104,226,622,889.00
8	Badan Perangulungan Bercara Daerah	3,023,311,008.00	14,055,440.00	-	3,037,366,448.00
9	Dinas Sosial	1,414,619,971.00	561,780,770.00	-	1,976,400,741.00
10	Dinas Kebekaran	11,760,782,455.00	608,530,228.00	251,316,872.00	12,620,629,555.00
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Sipil	3,353,999,944.00	1,144,777,321.00	-	4,498,777,265.00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB	4,186,669,072.00	698,122,997.00	-	4,884,792,069.00
13	Dinas Pertanian dan Pangan	7,745,704,813.00	4,748,910,637.00	1,762,576,651.00	14,257,192,101.00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4,286,383,544.00	25,947,810,121.00	961,345,136.00	31,195,538,801.00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	4,596,612,270.00	786,816,925.00	-	5,383,429,195.00
16	Pengelola	1,096,244,970.00	3,826,464,613.00	1,300,634,515.00	6,223,344,098.00
17	Badan Keuangan	8,564,305,025.00	1,896,421,980.00	-	10,460,727,005.00
18	Inspektorat	1,792,699,577.00	451,952,574.00	-	2,244,652,151.00
19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	2,593,280,420.00	837,231,838.00	-	3,430,512,258.00
20	Dinas Lingkungan Hidup	13,801,318,258.00	4,117,678,158.00	55,163,533.00	17,974,160,949.00
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	6,894,134,927.00	7,638,944,228.00	4,743,862,187.00	19,276,941,342.00
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	637,607,947.00	-	-	637,607,947.00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	4,089,864,243.00	1,078,773,206.00	-	5,168,637,449.00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2,088,883,471.00	-	-	2,088,883,471.00
25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2,534,217,993.00	321,352,726.00	-	2,855,570,719.00
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	7,753,322,842.00	-	-	7,753,322,842.00
27	Kecamatan Guguk Panjang	3,006,645,828.00	2,534,236,220.00	-	5,540,882,048.00
28	Kecamatan Air Bangis Tiga Baleh	2,586,609,421.00	2,564,648,927.00	-	5,151,258,348.00
29	Kecamatan Mandiangin Koto Seayan	3,296,229,459.00	3,478,060,620.00	-	6,774,290,079.00
	<b>Total</b>	<b>265,475,486,595.00</b>	<b>151,492,871,584.00</b>	<b>446,035,074,541.00</b>	<b>863,023,432,720.00</b>

8 79

**REKAPITULASI ASET TAK BERWUJUD DAN AKUMULASI PENYUSUTAN**

No.	Nama SKPD	Aset Tidak Berwujud	Akumulasi Penyusutan
1	2	3	4
1	Sekretariat DPRD	-	-
2	Sekretariat Daerah	91,754,146	68,360,813
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,494,831,695	3,459,012,395
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	278,162,000	160,556,967
5	Dinas Perhubungan	52,375,900	52,375,900
6	Dinas Kesehatan	321,523,000	310,793,000
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	710,859,250	710,859,250
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
9	Dinas Sosial	-	-
10	Dinas Kebakaran	-	-
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Sipil	362,050,000	198,791,750
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB	-	-
13	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	837,729,740	507,574,943
16	Pengelola	0,00	-
17	Badan Keuangan	1,104,708,420	1,074,320,504
18	Inspektorat	23,100,000	23,100,000
19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	503,099,750	290,637,293
20	Dinas Lingkungan Hidup	139,564,000	139,564,000
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	258,599,900	258,599,900
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
23	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
24	Badan Kepegawalan dan Pengembangan SDM	75,452,000	75,452,000
25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	89,652,600	88,555,270
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	8,944,380	269,786
27	Kecamatan Guguk Panjang	-	-
28	Kecamatan Aur Brugo Tigo Belah	-	-
29	Kecamatan Mandangin Koto Selayan	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>8,352,406,781.00</b>	<b>7,418,832,774.00</b>

8 19

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG SERTA REALISASI

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Pagu APBD P 2022 (Rp)	Keputusan/ Nomor/ Tanggal	Realisasi Dana APBD (Rp)	Realisasi DAK (Rp)	Persentase Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>							
1	Eri Fitri	Jl. Mandangin Gang Melur No. 36 F RT.005 RW.001	50,000,000.00	SK WAKO No.188.45-194-1022 / Tanggal 13 Juli 2022	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
2	Nouri Yandi	Jl. Prof. Bahder Johan RT.005 RW.002	50,000,000.00		30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
3	Ade Putra	Jl. Prof. Bahder Johan RT.005 RW.002	50,000,000.00		30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
4	Hidayat	Jl. BAHDER JOHAN RT 005 RW 002	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
5	Rozal	JL. BAHDER JOHAN RT 005 RW 002	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
6	Ervin	JANGKAK C. PULH RT 001 RW 004	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
7	Hendrizon	JANGKAK RT 001 RW 004	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
8	Erval	Jl. Ipah Mandangin RT 003 RW 002	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
9	Nelta Harlanze	Ipah Mandangin RT 006 RW 002	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
10	Enderita	Jl. Mandangin Kudu Belirik RT 002 RW 002	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
11	Mardauli S	Mandangin RT.001 RW.001	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
12	Syawal	Jl. Veteran NO. 174 C RT.001 RW.005	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
13	Syafriadi	Jl. Veteran RT.001 RW.001	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
14	Sofia Elzana	Kabun Pulasan RT 003 RW 003	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
15	Ramijon	Kabun Pulasan RT 003 RW 006	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
16	Arni Yakup	Jl. Kabun Pulasan RT 004 RW 003	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
17	Nurma	Jl. Angku Basa NO. 30 RT 001 RW 002	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
18	Ratna	Jln bahder Johan RT 001 RW 005	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
19	Rozaminet	Kabun Pulasan Dalam RT 004 RW 003	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
20	Yaelzal	Jl. Pejjuang 45 No.17C RT.001 RW.001	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
21	Yula Elfarid	Jl. Pejjuang 45 No. 17C RT.001 RW.001	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
22	Sefli Wati	Jl. Pendidikan Ateh Lurah RT.004 RW.003	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
23	Linda Yulianty	Jln. Padang Camauk RT.002 RW.005	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
24	Novla Anzori D	Jl. Hamza Ujung Bukit RT.003 RW.006	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
25	Yula Rini	Jl. Ladang Andung RT.003 RW.003	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
26	Syehuddin	Ladang Andung RT.003 RW.003	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
27	Mitsa Wati	Jl. St. Syahril No. 24 A RT 003 RW 003	50,000,000.00	ada	30,000,000.00	20,000,000.00	100 %
28	Epi Rafes	Jln. Dr. Hamza Gg. Ubi No. 1 RT 002 RW 006	50,000,000.00	ada	-	20,000,000.00	40 %
29	Hendra	Jln. ST. Syahril Gg. Pelajar No.67 RT.001 RW.004	50,000,000.00	ada	-	20,000,000.00	40 %
30	Lixye Yeri	Jl. Betunindan RT.004 RW.002	22,500,000.00	SK WAKO No.188.45-129-2022 / Tanggal 30 Mei 2022	22,500,000.00	-	100 %
31	Rukmani	Jl. Ibrahim Husa No 51 A RT.001 RW.002	20,000,000.00		20,000,000.00	-	100 %
32	Nurdi	Jl. Unggek Di Bagindo I No 51 RT.004 RW.002	15,000,000.00		15,000,000.00	-	100 %
33	Yuanita	Jl. Unggek Di Bagindo II No 61 RT.004 RW.002	10,000,000.00	ada	10,000,000.00	-	100 %
34	Cut Effra	Jl. Tabek Tuhua RT.001 RW.003	35,000,000.00	ada	35,000,000.00	-	100 %
35	Yulnar	Jl. Bukit Sangkut RT.003 RW.004	35,000,000.00	ada	35,000,000.00	-	100 %
36	Fitra Rahayu	Jl. Lepas Batu RT.002 RW.003	35,000,000.00	ada	35,000,000.00	-	100 %
37	Ahwaso	Jl. Mejo RT.003 RW.002	17,500,000.00	ada	17,500,000.00	-	100 %
38	Pitri Handayani	Kabun Pulasan RT.003 RW.003	15,000,000.00	ada	15,000,000.00	-	100 %
39	Aifra Jonira	Jln. Pengesak RT.003 RW.002	15,000,000.00	ada	15,000,000.00	-	100 %
40	Devil Hanina	Jl. Jambak Muko No.11 RT.001 RW.002	15,000,000.00	ada	15,000,000.00	-	100 %
41	Fefi Yenta Rayu	Jl. Abdul Manan RT.003 RW.001	40,000,000.00	ada	40,000,000.00	-	100 %
42	Briani	Tako RT.001 RW.005	30,000,000.00	ada	30,000,000.00	-	100 %
43	Indra Wils	Jalan Panorama No.53 RT.003 RW.002	20,000,000.00	ada	20,000,000.00	-	100 %
44	Ama	Jl. Mangkuto Ameh RT.001 RW.002	30,000,000.00	ada	30,000,000.00	-	100 %
45	Jeri Sri Angreni	Jl. Saaddudin Djembak No. 95 RT.001 RW.004	20,000,000.00	ada	20,000,000.00	-	100 %
46	Donni Irwan	Perumahan Gardang Permai RT 003 RW 004	20,000,000.00	ada	20,000,000.00	-	100 %
47	Rahli Netti	Jl. Kubu Tanjung RT.002 RW.001	25,000,000.00	ada	25,000,000.00	-	100 %
48	Rina April	Jl. Fedat Karya 1A Kuriman Panorama Baru RT.002 RW.001	15,000,000.00	ada	15,000,000.00	-	100 %
49	Samar	Jl. Kubu Tanjung RT.001 RW.001	30,000,000.00	ada	30,000,000.00	-	100 %
50	Kamba Murti	Jl. Kubu Tanjung NO. 84 RT.002 RW.003	25,000,000.00	ada	25,000,000.00	-	100 %
51	Rolan Syahril Afendi	Kubu Tanjung RT.002 RW.003	60,000,000.00	ada	60,000,000.00	-	100 %

879

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Pagu APBD P 2022 (Rp)	Keputusan/ Nomor/ Tanggal	Realisasi Dana APBD(Rp)	Realisasi DAK (Rp)	Persentase Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
52	SYAMSUR	Jl. Ladang Celiuh No. 96 RT.001 RW.002	50,000,000.00	ada	50,000,000.00	-	100 %
53	Efina	Jl. Sumur RT.002 RW.001	50,000,000.00	ada	50,000,000.00	-	100 %
54	Erma Jusrie	Simpang Lima RT.003 RW.002	40,000,000.00	ada	40,000,000.00	-	100 %
55	Sumarti	Jln. Prof. Hamka SS D RT.002 RW.004	40,000,000.00	ada	40,000,000.00	-	100 %
56	Amran	Pakan Kural RT.001 RW.005	35,000,000.00	ada	35,000,000.00	-	100 %
57	Ernawati	Jl. ST. Syahrir Simpang Aur Dalam Gand. Pelajar No RT.001 RW.004	35,000,000.00	ada	35,000,000.00	-	100 %
58	Erniwati	JL. PANORAMA BARU NO. 63 A	20,000,000.00	ada	20,000,000.00	-	100 %
59	Guena Wati	Jalan Masjid Darussalam RT.001 RW.005	50,000,000.00	ada	50,000,000.00	-	100 %
60	Deswati	X. Shupe Raya RT.003 RW.006	20,000,000.00	ada	20,000,000.00	-	100 %
61	Herman/Wahis	X. Di Di Hajo Basa Nan Kuning RT.001 RW.003	30,000,000.00	ada	30,000,000.00	-	100 %
62	Achral	X. Lubuk Sebaris RT.004 RW.006	20,000,000.00	ada	20,000,000.00	-	100 %
63	ALUMAT	Curun Panjang RT.004 RW.006	20,000,000.00	ada	20,000,000.00	-	100 %
64	Annesa Suwendy	Jl. Perak Congkak RT.002 RW.004	30,000,000.00	ada	30,000,000.00	-	100 %
65	Andi Difa	Panorama Baru RT.001 RW.001	22,500,000.00	ada	22,500,000.00	-	100 %
66	MAWARDE	Jl. Bermawi Kepala Koto RL 902 RW.001	40,000,000.00	ada	-	-	0 %
67	Meldawati	Bukt Lampasa RT.005 RW.002	30,000,000.00	ada	30,000,000.00	-	100 %
68	Yuneliza R	Pant Antang RT.001 RW.001	40,000,000.00	ada	40,000,000.00	-	100 %
69	Nisa Fitriani	Pulau Anak Air RT.002 RW.004	20,000,000.00	ada	20,000,000.00	-	100 %
70	YUNIMAR	Pant Antang RT.002 RW.001	30,000,000.00	ada	30,000,000.00	-	100 %
71	Amawita	Jl. Pant Antang Balai Banyak RT.001 RW.002	25,000,000.00	ada	25,000,000.00	-	100 %
72	Nover Riko	Jln Panorama Baru RT.002 RW.001	15,000,000.00	ada	15,000,000.00	-	100 %
73	Yumiantari	Jl. Pant Mabung RT.002 RW.002	22,500,000.00	ada	22,500,000.00	-	100 %
74	Syahrial	X. Kural Rkor Lakuah No. 1 RT.001 RW.002	40,000,000.00	ada	40,000,000.00	-	100 %
75	Winda	X. Kural Balai Banyak NO.35 RT.002 RW.003	50,000,000.00	ada	50,000,000.00	-	100 %
76	Guaniwati	X. Kural Balai Banyak RT.001 RW.003	50,000,000.00	ada	50,000,000.00	-	100 %
77	Yasim M	Jln. Panorama Baru RT.002 RW.001	15,000,000.00	ada	15,000,000.00	-	100 %
78	Desniawati	X. Kural Balai Banyak No.42 RT.002 RW.003	30,000,000.00	ada	30,000,000.00	-	100 %
79	Desniawati	Pulau Anak Air RT.001 RW.004	20,000,000.00	ada	20,000,000.00	-	100 %
80	Nuriah	Jl. Bahder Johan RT.001 RW.005	-	-	-	-	-
81	Malyula	Panganak RT.003 / RW.002	-	-	-	-	-
82	Jana	X. Angku Basa No 73 RT.001 RW.002	-	-	-	-	-
83	Doni Efrenki	X. Sukarno Hatta 90 Swadya RT.007 RW.001	-	-	-	-	-
84	Yunida	Kabun Pulasan Dalam RT.004 RW.002	-	-	-	-	-
85	Atrita	Jl. Hamka No. 10 C RT.001 RW.006	-	-	-	-	-
86	Desniawati	Jl. Angku Basa No 106 G RT.001 RW.002	-	-	-	-	-
87	Zulfazli	Jl. Angku Basa No 140 RT.001 RW.006	-	-	-	-	-
88	Yunani	Jalan Picoran Gunung MD B RT.004 RW.002	-	-	-	-	-
89	Syofri	X. Gunung Tigo RT.003 RW.005	-	-	-	-	-
90	Yasni	X. Hamka No. 15 E RT.002 RW.006	-	-	-	-	-
91	Salmi	X. Bermawi No.13 K.Koto RT.001 RW.002	-	-	-	-	-
92	Ridwan	X. Puding Hias No 23 RT.001 RW.004	-	-	-	-	-
93	Yong Bastian	X. H. Misikin No. 8 Sumbu Gadang Mandiangin RT.002 RW.003	-	-	-	-	-
94	Insuaris	Rarjeu RT.003 RW.003	-	-	-	-	-
95	Ernawati	Jl. Curun Panjang RT.004 RW.006	-	-	-	-	-
96	Mayulis	Jl. Prof Dr Bahder Johan RT.007 RW.002	-	-	-	-	-
97	Efrial M	Kabun Pulasan RT.002 RW.006	-	-	-	-	-
98	Deswita	Jl. Diponegoro No. 50 A RT.004 RW.004	-	-	-	-	-
99	Devy Hartati	X. Sumur No. 31 RT.002 RW.001	-	-	-	-	-
100	Rumita Leli	X. ST Syahrir Gg Pelajar No.83 RT.001 RW.004	-	-	-	-	-
101	Yulidar Dethy, HI	X. Veteran No. 125 C RT.001 RW.001	-	-	-	-	-
102	Eni Yuarita	Jl. Isuh Mandiangin RT.006 RW.004	-	-	-	-	-
103	Yuni Berti	Jl. Veteran No. 51 RT.002 RW.002	-	-	-	-	-
104	Ernawati	Jl. Angku Basa No.108 RT.002 RW.001	-	-	-	-	-

8 19

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Pagu APBD P 2022 (Rp)	Keputusan/ Nomor/ Tanggal	Realisasi Dana APBD(Rp)	Realisasi DAK (Rp)	Persentase Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
105	Nofendra	Jl. Bahder Sohon RT.001 RW.005	-		-	-	
<b>Jumlah Total</b>			<b>2,915,000,000.00</b>		<b>2,230,000,000.00</b>	<b>380,000,000.00</b>	

8 19



DAFTAR NAMA PENERIMA HEBAT TAHUN 2022 BERTA REALISASI

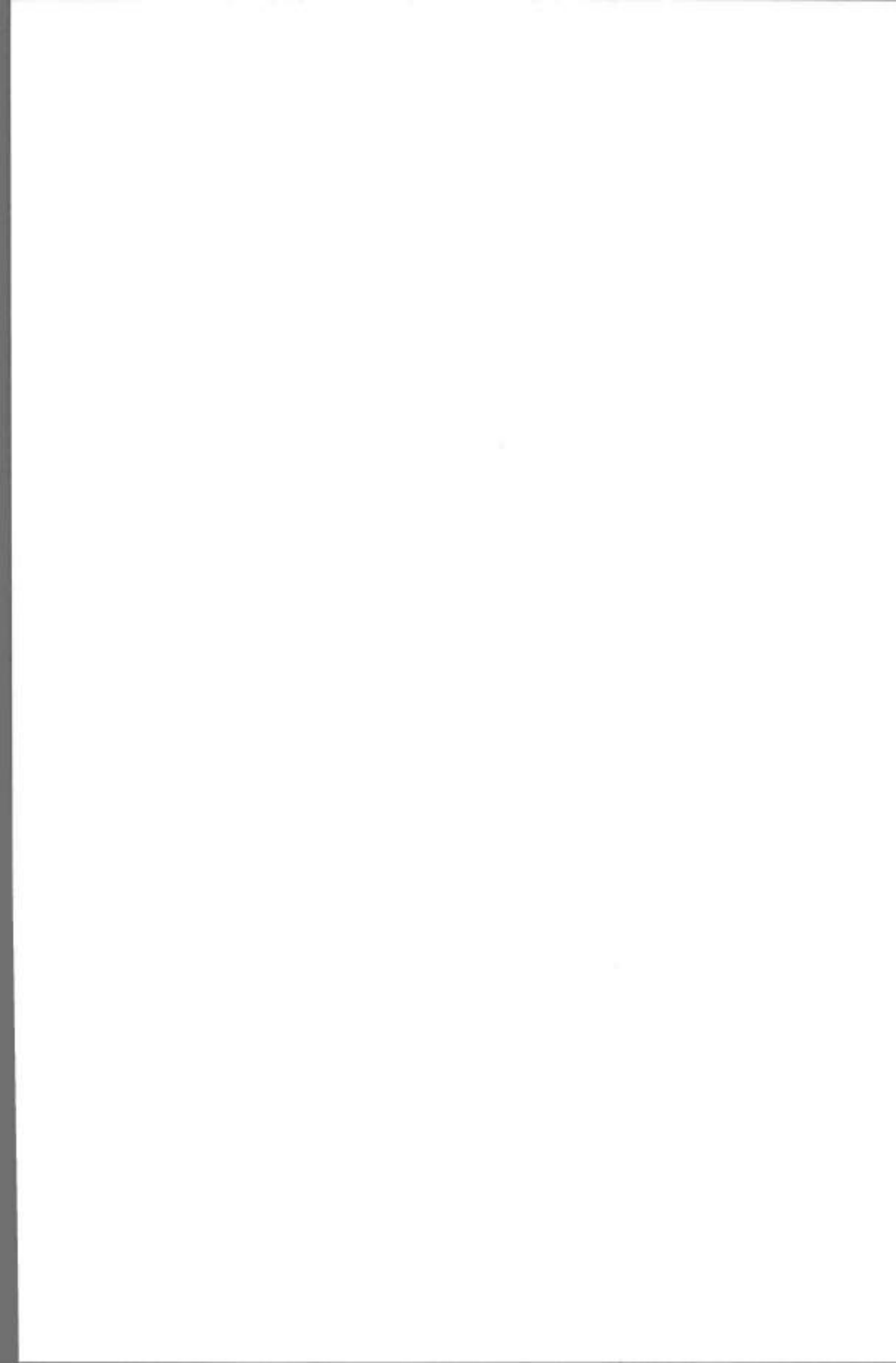
1) HIBAH BERUPA UANG

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Pagu APBD P 2022	Realisasi (Rp)	Pengembalian	Persentase Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
<b>DENAS PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN</b>						
1	HIS AL ISHWAN	Jl. Pinta Kaban No.99	-	-		
2	SD ISLAM AL AZHAR 67 BUKITTINGGI	Jl. Mr. Asaad No. 70	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
3	SD ISLAM AL ISHLAH BUKITTINGGI	Jl. Mr. Asaad No. 52 B Banto Darano	15,000,000.00			- %
4	SD ISLAM CERDEKA	Jl. Veteran No. 202	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
5	SD ISLAM EXCELLENT PLUS	Jl. Adnegoro tengah Jua 1 no. 2	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
6	SD ISLAM SIBOH M. DJAMEL DJAMBEK	Jl. Syekh Djamil Djambek	55,000,000.00	55,000,000.00		100 %
7	SD ISLAM TERPADU HASYITHAH	Jl. Abdul Hafis Djail	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
8	SDIT ADDA BUKITTINGGI	Jl. Prof. Hamka No.33	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
9	SDIT AL AZHAR DARUL JANNAH	Jl. TDR, Perak Koral Bukit Apit Puhun	65,000,000.00	65,000,000.00		100 %
10	SDIT CAHAYA HATI	Jl. Pabelakan, Kel. Papan Labuah	115,000,000.00	115,000,000.00		100 %
11	SDIT INSAN KAMIL	Jl. Sultan Syarif	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
12	SDIT SYAHRAL ILMU	Jl. Perak Congkak	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
13	SD JAMDIYATUL HUSNA BUKITTINGGI	Jl. Jam'iyatul Husna, Tarok Dipo	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
14	SD LIBAH PEMBELAJAR	Jl. By Pass, Manggis Genting	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
15	SD SEKELAH ALAM BUKITTINGGI	Jl. M. Yamin No. 51 Air Kuning	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
16	SDS PRASEKUS	Jl. Bagindo Atsahan No. 11	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
17	SDS IT ULUL ALBAB BUKITTINGGI	Jl. Raya By Pass Kel. Pual Anak Air	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
18	SDS TRISULA PERWARJ	Jl. Syekh Ibrahim Musa No. 44 A	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
19	SD SURYA KIDS	Jl. Veteran No. 78 B Jirik	65,000,000.00	65,000,000.00		100 %
20	SD SWASTA ISLAM AL PALAH	Jl. Masjid Nurul Huda Pangarakan	40,000,000.00	40,000,000.00		100 %
21	SD SWASTA ISLAM AL PALAH	Jl. Masjid Nurul Huda Pangarakan	394,300,000.00	394,300,000.00		100 %
22	SDS PRASEKUS	Jl. Bagindo Atsahan No. 11	317,700,000.00	317,700,000.00		100 %
23	SDIT INSAN KAMIL	Jl. Sultan Syarif	898,800,000.00	898,888,380.00		99 %
24	SDS SIBOH M. DJAMEL DJAMBEK		148,700,000.00	148,688,278.00		100 %
25	SD ISLAM AL AZHAR 67 BUKITTINGGI	Jl. Mr. Asaad No. 70	424,760,000.00	399,404,267.00		94 %
26	SD ISLAM AL ISHLAH BUKITTINGGI	Jl. Mr. Asaad No. 52 B Banto Darano	673,200,000.00	673,100,000.00		100 %
27	SD ISLAM CERDEKA	Jl. Veteran No. 202	93,962,000.00	89,380,343.90		95 %
28	SD ISLAM EXCELLENT PLUS	Jl. Adnegoro tengah Jua 1 no. 2	432,000,000.00	432,000,000.00		100 %
29	SD ISLAM TERPADU HASYITHAH	Jl. Abdul Hafis Djail	279,900,000.00	279,900,000.00		100 %
30	SDIT ADDA BUKITTINGGI	Jl. Prof. Hamka No.33	85,500,000.00	85,500,000.00		100 %
31	SDIT AL AZHAR DARUL JANNAH	Jl. TDR, Perak Koral Bukit Apit Puhun	218,707,000.00	214,718,489.00		100 %
32	SDIT CAHAYA HATI	Jl. Pabelakan, Kel. Papan Labuah	490,000,000.00	490,000,000.00		100 %
33	SDIT SYAHRAL ILMU	Jl. Perak Congkak	448,100,000.00	448,100,000.00		100 %
34	SD JAMDIYATUL HUSNA BUKITTINGGI	Jl. Jam'iyatul Husna, Tarok Dipo	577,778,288.00	577,687,488.00		100 %
35	SD LIBAH PEMBELAJAR	Jl. By Pass, Manggis Genting	81,000,000.00	81,000,000.00		100 %
36	SD SEKELAH ALAM BUKITTINGGI	Jl. M. Yamin No. 51 Air Kuning	59,400,000.00	59,379,753.00		100 %
37	SDS IT ULUL ALBAB BUKITTINGGI	Jl. Raya By Pass Kel. Pual Anak Air	24,170,000.00	24,080,000.00		100 %
38	SD SURYA KIDS	Jl. Mr. Asaad No. 70	110,700,000.00	110,700,000.00		100 %
39	SDS TRISULA PERWARJ	Jl. Syekh Ibrahim Musa No. 44 A	48,600,000.00	48,600,000.00		100 %
40	DENAS PENDIDIKAN KOTA BUKITTINGGI	Jl. Dr. A Rizal No.9 Atas Nigral	68,000,000.00	68,660,000.00	4,395,200.00	91 %
41	MTs AL HAKIRIP	Jl. Koto Selayan	-	-		
42	BMP ISLAM AL AZHAR 39 BUKITTINGGI	Jl. Mr. Asaad No. 70	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %

8/19

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Pagu APBD P 2023	Realisasi (Rp)	Pengembalian	Persentase Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
43	SMP ISLAM AL ISHLAH BUKITTINGGI	Jl. Mr. Assaf No. 52 B	18,750,000.00	18,750,000.00		100 %
44	SMPIT CAHAYA HATI BUKITTINGGI	Jl. Veteran RT 03/RW 01	390,000,000.00	390,000,000.00		100 %
45	SMPIT SURUH M. DAMEL DABBEK BUKITTINGGI	Jl. Syech Djamil Dambek	13,125,000.00	13,125,000.00		100 %
46	SMP JAM'YATUL HUDAJ BUKITTINGGI	Jl. Sumurpak Jamiyatul Huda	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
47	SMPS PSH BUKITTINGGI	Jl. Dr. A. Rizki No. 17	55,750,000.00	55,750,000.00		100 %
48	SMPS XAVERIUS BUKITTINGGI	Jl. Bagindo Adzhan No. 11	18,750,000.00	18,750,000.00		100 %
49	SMP ISLAM AL AZHAR 28 BUKITTINGGI	Jl. Mr. Assaf No. 70	108,900,000.00	107,374,000.00		98 %
50	SMP ISLAM AL ISHLAH BUKITTINGGI	Jl. Mr. Assaf No. 52 B	564,300,000.00	537,801,449.00	175,622,798.00	94 %
51	SMPIT CAHAYA HATI BUKITTINGGI	Jl. Veteran RT 03/RW 01	135,300,000.00	135,300,000.00		100 %
52	SMPIT SURUH M. DAMEL DABBEK BUKITTINGGI	Jl. Syech Djamil Dambek	71,500,000.00	71,500,000.00		100 %
53	SMP JAM'YATUL HUDAJ	Jl. Syech Djamil Dambek	53,900,000.00	53,285,618.00		99 %
54	SMPS PSH BUKITTINGGI	Jl. Dr. A. Rizki No. 17	62,700,000.00	60,763,658.00		97 %
55	SMPS XAVERIUS BUKITTINGGI	Jl. Bagindo Adzhan No. 11	198,000,000.00	198,000,000.00		100 %
56	RA AL IKHWAN					
57	RA AL IKHWAN		40,000,000.00	40,000,000.00		100 %
58	KB An Nau'ah	Jl. Luak Anyik Gulik Banceh	50,000,000.00	50,000,000.00		100 %
59	KB Az Zahrah	Jl. Veteran Depan H. Al Palak	80,000,000.00	80,000,000.00		100 %
60	KB Bougenyil	Jl. H. Meilin Palarok	50,000,000.00	50,000,000.00		100 %
61	KELOMPOK BERMADH AL IKHWAN	Komplek Masjid Huilimin Pitu Kabun	53,000,000.00	53,000,000.00		100 %
62	SPS BUAH HATI	Jl. Ladang Cahiah	45,000,000.00	45,000,000.00		100 %
63	SPS MATA HATI	Jl. Prof. DR. Hamka Pekanbaru	25,000,000.00	25,000,000.00		100 %
64	SPS NURUL HUDA	Bukit Cenggang Kayu Ramang	60,000,000.00	60,000,000.00		100 %
65	SPS NURUL ILMI	Jl. Adnagoro Komplek Mushalla Al Manar	50,000,000.00	50,000,000.00		100 %
66	SPS PALAPA SADIYO	Jl. Bermanah Kapalo Kota	75,000,000.00	75,000,000.00		100 %
67	SPS TERBUKTAJAL AL IKHWAN ROSE	Jl. Anggur Komplek M. Huilimin Pitu Kabun	53,000,000.00	-		- %
68	TK Aleyyah I	Jl. Perintis kemerdekaan	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
69	TK Aleyyah II	Jl. Padang Ngamuk	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
70	TK Aleyyah III	Jl. Ladang Cahiah	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
71	TK Aleyyah IV	Jl. Hamka	70,000,000.00	70,000,000.00		100 %
72	TK Aleyyah V	Jl. Adnagoro	65,000,000.00	65,000,000.00		100 %
73	TK Asas	Jl. H. Meilin	40,000,000.00	40,000,000.00		100 %
74	TK As Salam	Gareget	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
75	TK Cerdas Ceria	Jln M Yamin	45,000,000.00	45,000,000.00		100 %
76	TK Flora Perbenan	Jln S. Di Jambak	65,000,000.00	65,000,000.00		100 %
77	TK Gajah Tongga	Jln Umar Gafar	-	-		
78	TK GENIUS KIDS II	Jl. Kusuma Bhakti Gulik Banceh	115,000,000.00	115,000,000.00		100 %
79	TK Harapan Haris	Jl. M. Syaiful	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
80	TK Ibnu Sina	Jln Birugo Puhun	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
81	TK INKLUSI (INSPIRASI) SEMUT-SEMUT	Bh. Pasi Panggis Gantang	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
82	TK IRSYADURRAAS	Kabun Pulean Dalam Bukittinggi	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
83	TK ISLAM ADDIA	Jl. Hamka Tarok Dipu, Kel. Tanah Duri	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
84	TK ISLAM AL-AZHAR	Jl. A. Karim No. 4, Kel. Benteng Pasar Asa	15,000,000.00	-		-
85	TK ISLAM AL-AZHAR 48	Jl. Mr. Assaf, Kel. Campago Guguk Buleh	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
86	TK ISLAM AL-FALAH	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Pula Arak Air	55,000,000.00	55,000,000.00		100 %

Handwritten signature or initials.

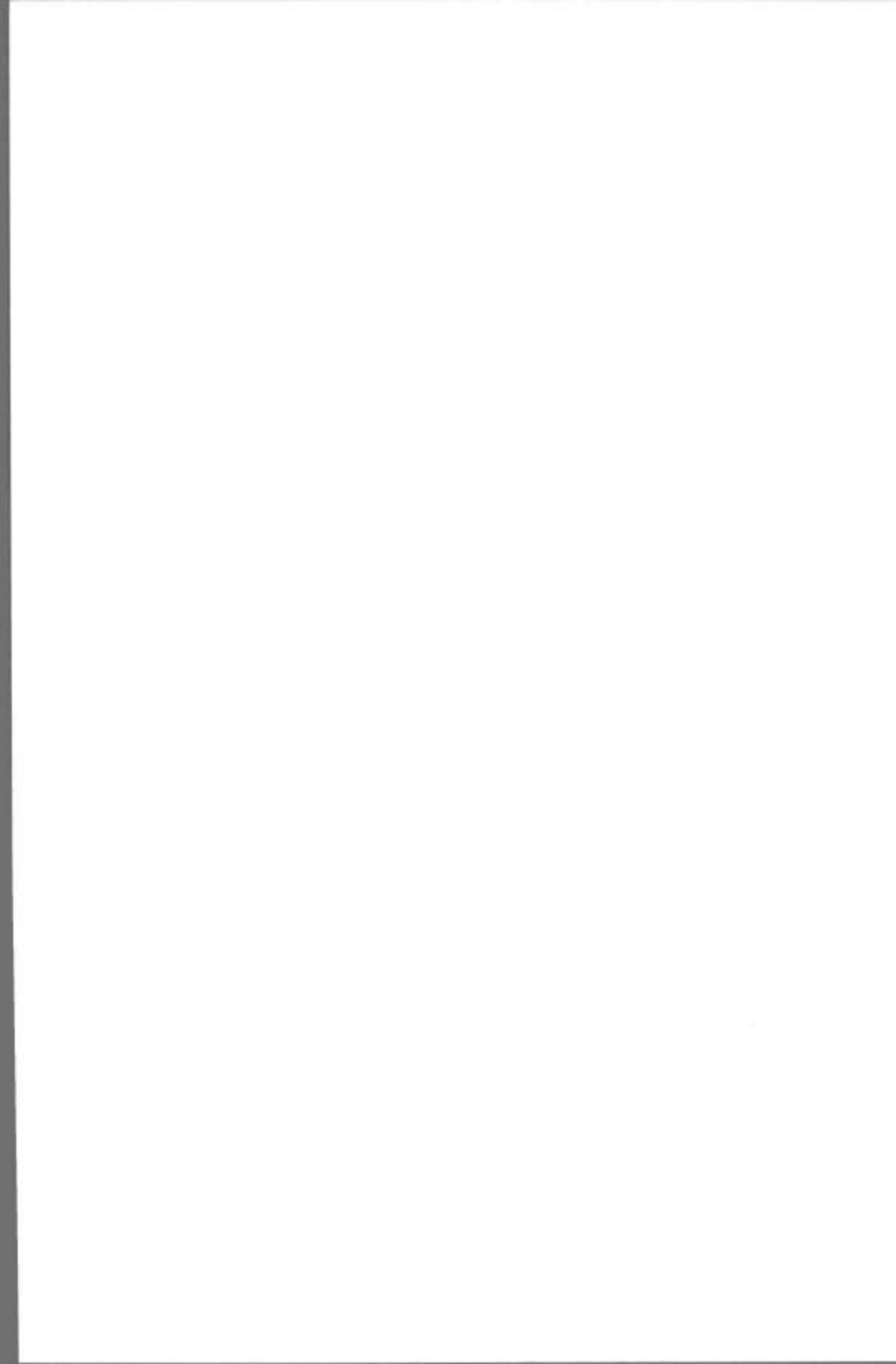


No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Pagu APBD P 2022	Realisasi (Rp)	Pengembalian	Persentase Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
87	TK ISLAM AL-FURQAN	Jl. Abd. Haran Sanjo, Kel. Campago Guguk Buleh	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
88	TK ISLAM AL-ISHLAH	Jl. Mr. Aswat Banto Darano, Kel. Campago Guguk Buleh	66,000,000.00	66,000,000.00		100 %
89	TK ISLAM AL-MUBARRAK	Jl. Bukit Agri Puhun	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
90	TK ISLAM AL-MURDAH	Jl. Jend. Sudirman Bukitngg	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
91	TK Dalam Excellent	Jl. Adi segoro Tanah Jus No. 1	65,000,000.00	65,000,000.00		100 %
92	TK ISLAM JAMBIKATIL HILJAD	Jl. Tuanku Nan Retsah Kel Kayu Kubu	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
93	TK ISLAM MADYITIMAH	Jl. Jend. Sudirman Bukitngg	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
94	TK Dalam Riyadul Ibt	Jl Ipuh Handangan Suro Gendang	115,000,000.00	115,000,000.00		100 %
95	TK ISLAM SEMAJ BENDI BANGSA AL AKKABAH	windah	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
96	TK Kartika 1-57	Jl. Cimbin Belakang Balok	85,000,000.00	85,000,000.00		100 %
97	TK Kartika 1 - 58	Jl. Limp Suroharjo	95,000,000.00	95,000,000.00		100 %
98	TK KEHALA BHAYANGKARI	Jl. Sulman Blugo	-	-		
99	TK Kemala Bhayangkari 11	Jl. Jend Sudirman No. 23	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
100	TK Kenan	Jl. Kisanari Hiku Kabun	130,000,000.00	130,000,000.00		100 %
101	TK Khalifah 35	Jl. Yoi Sudano No.10 B. Berteng	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
102	TK Junjun Meuar	Jl Sulman	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
103	TK Helur Putih	Jl. Kuali	85,000,000.00	85,000,000.00		100 %
104	TK Hutera	Jl. Parotia Kemerdekaan	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
105	TK MUTIARA INSANI	Jl. Syaedin Jambak	-	-		
106	TK PAUD Berbasis Masjid Al Akbar	Jl Dr Arwal komplek RSAM	85,000,000.00	85,000,000.00		100 %
107	TK PERTWI AL-MUSTHA	Jl. Soekarno Hatta Gendang, Kel. Menggih Gendang	11,000,000.00	11,000,000.00		100 %
108	TK Qurata Aini	Jl Ipuh Suro Gendang	67,250,000.00	67,250,000.00		100 %
109	TK S TUNAS BANGSA	Jl. Batang Masang Belakang Balok	165,000,000.00	165,000,000.00		100 %
110	TK Surya Kida	Jln Soekarno Hatta	45,000,000.00	45,000,000.00		100 %
111	TK Surya Kida Dua Platinium	Jl Jendral Sulman Blugo	85,000,000.00	85,000,000.00		100 %
112	TK SURYA KIDS TIGO	Jl. Kubu Tanjung	95,000,000.00	95,000,000.00		100 %
113	TK TALI KASIH BUNDA	Jl. H. Bial Di. Majo Indo Menggih Gendang	118,000,000.00	118,000,000.00		100 %
114	TK TELADAN PERTWI TUMAS HARAPAN	Jl. Pancasila No 30 Kel. Kayu Kubu	15,000,000.00	-		-
115	TK Thala Perwar	Jl. Syeh Ibrahim Huan	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
116	TPA KATCEMA	Jalan Kabun Pulasan Tembok	50,000,000.00	50,000,000.00		100 %
117	TPA METRA BUNDA	Jl. Havit Ojati RT 003/001	90,000,000.00	90,000,000.00		100 %
118	KB Az Zahrah	Jl. Veteran Depan M. Al Fala	13,200,000.00	13,200,000.00		100 %
119	KB Bouperville	Jl. H. Piskin Pelok	4,800,000.00	4,800,000.00		100 %
120	KB DAARUL ULUM	Jl. Blugo Blugo	8,000,000.00	8,000,000.00		100 %
121	KB DAUD HIMP	Jl. H. Syafiq No. 26 Tanah Dipo	1,800,000.00	1,800,000.00		100 %
122	KB DUTA WAHANA	Jl. Tauku Umar No. 10 A	1,800,000.00	1,800,000.00		100 %
123	KB INKLUSI INSPIRASI SEMUT-SEMUT	Jl. Rv Pas No 23	8,600,000.00	8,600,000.00		100 %
124	KB ISLAM EXCELLENT	Jl. Adiregoro Tanah Jus 1, Kel. Aur Kuning	4,200,000.00	4,200,000.00		100 %
125	KB KASIH IBU AL MUSTHA	Jl. Soekarno Hatta Sanjal	6,000,000.00	6,000,000.00		100 %
126	KB KHALIFAH 35	Jl. Saaduddin Jambak Kelurahan Puli Anak Ar	5,400,000.00	5,400,000.00		100 %
127	KB SERURE	Jl. AK Gari no. 14 C Guguk Buleh	10,800,000.00	10,800,000.00		100 %
128	KB SURYA KIDS	Jl. Soekarno Hatta No. 81	20,400,000.00	20,400,000.00		100 %
129	KB TUNAS BANGSA	Jl. Batang Masang No. 7 Kel Biling Balok	2,400,000.00	2,400,000.00		100 %
130	KB TUMAS HARAPAN	Jl. Abdul Manan No. 28 Sanjo	12,000,000.00	12,000,000.00		100 %

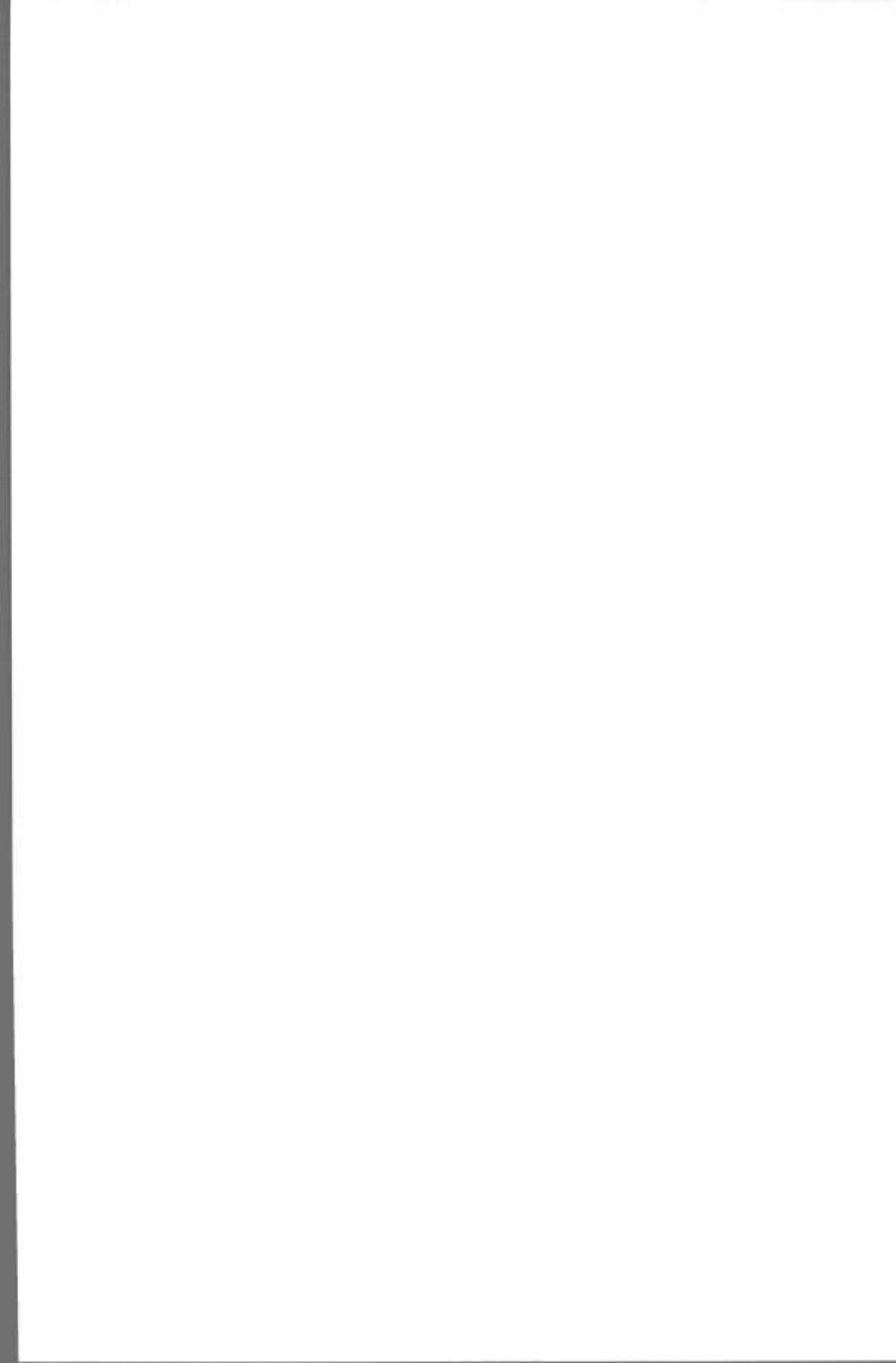
8 19

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Pagu APBD P 2023	Realisasi (Rp)	Persentase	Persentase Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
131	KELOMPOK BERMAIN AL-SOBAHAN	Komplek Masjid Muallimin Pintu Kubur	17.400.000,00	17.400.000,00		100 %
132	SPS ANGGUR AL-WUSTA	Jl. Soekarno Hatta	7.200.000,00	7.200.000,00		100 %
133	SPS FLAMBOYAN	Jl. Ketafman 1 Belakang Balok	4.200.000,00	4.200.000,00		100 %
134	SPS MADHARAH	Jl. Tarik Bungo	8.400.000,00	8.400.000,00		100 %
135	SPS MATA HATI	Jl. Prof. DR. Hamka Pekanbaru	6.600.000,00	6.600.000,00		100 %
136	SPS PALAPA SAKYD	Jl. Bermani Kasan Kiri	11.400.000,00	11.400.000,00		100 %
137	TAMAN KANAK-KANAK ASAS	Jl. Haji Makh No 2 Surau Gedang	10.800.000,00	10.800.000,00		100 %
138	TK Gajah Tongga	Jn Umar Gafar	10.200.000,00	10.200.000,00		100 %
139	TK INKLUSI DESPORASI SEMUT-SEMUT	By Pass Manggic Gandang	61.800.000,00	61.800.000,00		100 %
140	TK ISLAM AL-PALAH	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Pulau Anak Air	55.800.000,00	55.800.000,00		100 %
141	TK ISLAM MASYITAH	Jl. Jend. Sudirman Bukittinggi	55.200.000,00	55.200.000,00		100 %
142	TK ISLAM SIDIQ BENDH BANGSA AL-ANBARAH	Jl. Byak Peto Lukung, Kel. Pulau Anak Air	31.200.000,00	31.200.000,00		100 %
143	TK Kartika 1 - SB	Jl. Urip Sumoharjo	18.600.000,00	18.600.000,00		100 %
144	TK Kamela Shayekhah	Jl. Jend. Sudirman No 23 Brugo	19.200.000,00	19.200.000,00		100 %
145	TK Qumru Ahi	Jn Iqoh Suntu Gedang	25.800.000,00	25.800.000,00		100 %
146	TK Surya Kida Duo Natrum	Jn Jendral Sudirman Brugo	44.400.000,00	44.400.000,00		100 %
147	TPA ADZYIYAH I	Jl. P. Kemerdekaan, 28 Kel ATTS	13.800.000,00	13.800.000,00		100 %
148	TPA AL NISBAH	Jl. M. Burul Mather No. 13	7.800.000,00	7.800.000,00		100 %
149	TPA AVIENA	Jalan Kebun Pulaan Tambak	6.600.000,00	3.486.000,00		53 %
150	TPA CEMARA	Jl. Veteran No. 32 F	12.000.000,00	12.000.000,00		100 %
151	TPA IBNU SINA YASRI	Jl. Sudirman Brugo pukur	19.800.000,00	19.800.000,00		100 %
152	TPA IBUNDA	Jl. Perwira 2 No. 18 Belakang Balok	12.800.000,00	12.800.000,00		100 %
153	TPA ISLAM EXCELLENT	Jl. Adinegoro Tanah Jua 1	8.600.000,00	8.600.000,00		100 %
154	TPA HADI WIDAYAT	Jl. Bgt. Adis Chan No. 34	5.400.000,00	5.400.000,00		100 %
155	TPA METRA BUNDA	Jl. Haidi Djail RT 003/001	13.800.000,00	13.800.000,00		100 %
156	TPA MUTIARA	Jl Perintis Kemerdekaan No 28 Bukittinggi	8.800.000,00	8.800.000,00		100 %
157	TPA MUTIARA BUNDA	Jl. Sumurpek Bukittinggi	8.000.000,00	8.000.000,00		100 %
158	TPA NARHA	Jl. Bukit Api	8.400.000,00	8.400.000,00		100 %
159	TPA TURUS BANGSA	Jl. Betang Masang No. 7 Kel Betang Balok	8.400.000,00	8.400.000,00		100 %
160	KB Abayyah I	Jl. P. Kemerdekaan Kel ATTS	15.000.000,00	15.000.000,00		100 %
161	KB Al-Akhar	Jl. A. Karim No. 4 Kel Betang Posar Atas	7.800.000,00	7.800.000,00		100 %
162	KB Al-Falah	Jl. Soekarno Hatta No. 8F	11.400.000,00	11.400.000,00		100 %
163	KB ASSALAAM	Jalan 2 Mengkuto Arwah Gajah Bukittinggi	7.200.000,00	7.200.000,00		100 %
164	KB Berhala Masjid Al Abraf	Jl. DR. A. Rival Kayu Kubu	7.200.000,00	7.200.000,00		100 %
165	KB CREATIVE KIDS	Jl Prof. Hamka No 23 Pekanbaru				
166	KB GENIUS KIDS	Jl. Anggur No. 1 Pintu Sabun	19.200.000,00	19.200.000,00		100 %
167	KB GENIUS KIDS III	Jl. M. Yamin No. 18 Aur Atas	10.800.000,00	10.800.000,00		100 %
168	KB MUTIARA	Jl Perintis Kemerdekaan No 28 Bukittinggi	5.400.000,00	5.400.000,00		100 %
169	SPS AR RAHIM	Jl. Dr. Hengsono Anah	13.200.000,00	13.200.000,00		100 %
170	SPS BUAH HATI	Jl. Ladang Caklah	13.800.000,00	13.800.000,00		100 %
171	SPS DAHLIA	Jl. Haidi Jail Brugo	7.800.000,00	7.800.000,00		100 %
172	SPS LENTERA	Jl. Pincuran Gunung Tarik	13.800.000,00	13.800.000,00		100 %
173	SPS NURUL HUDA	Bukit Gergang Kayu Ramang	13.800.000,00	13.800.000,00		100 %
174	SPS NURUL ILMI	Jl. Adinegoro Komplek Mushalla Al Manar	15.000.000,00	15.000.000,00		100 %

8 19



No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Pagu APBD P 2022	Realisasi (Rp)	Pengembalian	Persentase Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
175	SPS Sema Berih Bangsa Batu Rampa	Jl Ikonokel Ujung Buluh	12,000,000.00	12,000,000.00		100 %
176	TK Aisyiah I	Jn Perintis kemerdekaan	103,800,000.00	103,800,000.00		100 %
177	TK Aisyiah II	Jn Padang Ngamul	25,800,000.00	25,800,000.00		100 %
178	TK Aisyiah III	Jn Ledeng caliah	7,200,000.00	7,200,000.00		100 %
179	TK Aisyiah IV	Jn Hamka	13,800,000.00	13,800,000.00		100 %
180	TK Aisyiah V	Jn Adinegoro	17,400,000.00	17,400,000.00		100 %
181	TK ASSALAAM	Jl. Dj Di Mangkuto Ameh Garagah	30,800,000.00	30,800,000.00		100 %
182	TK Cerdas Ceria	Jln M Yamin	9,000,000.00	9,000,000.00		100 %
183	TK Flora Pentarian	Jln S. Dj. Jambek	34,200,000.00	34,200,000.00		100 %
184	TK GENUS KIDS II	J. Kusuma Bhakti Sula Bencah	24,000,000.00	24,000,000.00		100 %
185	TK Ilmu Sina	Jn Birugo Puhun	9,000,000.00	9,000,000.00		100 %
186	TK IBYADULLAHAS	Kotban Pulasan Dalam Bukittinggi	15,600,000.00	15,600,000.00		100 %
187	TK ISLAM ADZHA	Jl. Hamka Tarok Dipo, Kel. Tarok Dipo	73,200,000.00	73,200,000.00		100 %
188	TK ISLAM AL-AZHAR	J. A. Karim No. 4, Kel. Benteng Pasar Atas	73,800,000.00	73,800,000.00		100 %
189	TK ISLAM AL-AZHAR 40	Jl. Mr. Asaat, Kel. Campago Guguk Buluh	54,600,000.00	54,600,000.00		100 %
190	TK ISLAM AL-PURQAN	Jl. Abd. Manan Sarjo, Kel. Campago Guguk Buluh	17,400,000.00	17,400,000.00		100 %
191	TK ISLAM AL-SHAHAH	Jl. Mr. Asaat Remi Dereni, Kel. Campago Guguk Buluh	63,800,000.00	63,800,000.00		100 %
192	TK ISLAM AL-MUBARAK	J. Bukit Apit Puhun	6,000,000.00	6,000,000.00		100 %
193	TK ISLAM AL-WORDAH	J. Jend. Sudirman Bukittinggi	10,200,000.00	10,200,000.00		100 %
194	TK Islam Baccellert	Jl. Adinegoro Tanah Jua No. 1	61,800,000.00	61,800,000.00		100 %
195	TK ISLAM JAMHIYATUL HUDAJ	Jl. Tuanku Nan Renoh Kel Kayu Kubu	78,200,000.00	78,200,000.00		100 %
196	TK Islam Nurul Hidayah	Jln Kubu Tanjung Igo Bekah	6,000,000.00	6,000,000.00		100 %
197	TK Islam Rivaqul Ibtih	Jl Ipuh Mandangan Suro Gandang	12,800,000.00	12,800,000.00		100 %
198	TK Kartika 1-57	Jl. Dmslin Belakang Bekah	17,400,000.00	17,400,000.00		100 %
199	TK Kaseh	Jl. Khertan Rindu Sabun	9,000,000.00	9,000,000.00		100 %
200	TK Khatirin 28	Jl. Yoe Sudarso No.10 B. Benteng	8,400,000.00	8,400,000.00		100 %
201	TK Makur Puh	Jn Kural	18,800,000.00	18,800,000.00		100 %
202	TK Mutara	Jl. Perintis Kemerdekaan	18,800,000.00	18,800,000.00		100 %
203	TK Mutara Insani	Jn Perintis Kemerdekaan	4,400,000.00	4,417,000.00	2,461,000.00	6 %
204	TK NUJID Berkele Hadji M Abzar	Jn Dr Arhal komplek RSAN	16,800,000.00	16,800,000.00		100 %
205	TK PERTWI AL-MASTHA	Jl. Soekarno Hatta Ganding, Kel. Manggih Ganding	18,000,000.00	18,100,000.00		100 %
206	TK S HARAPAN HAMA	Jl. Hesti Tarok Bukittinggi	10,200,000.00	10,200,000.00		100 %
207	TK S KUNTLUM MEDIKA	Jl. Sudirman Bukittinggi	28,800,000.00	28,800,000.00		100 %
208	TKS TRISULA PERHARI	Tengah Sewah	8,400,000.00	8,400,000.00		100 %
209	TK S TUNAS BANGSA	Jl. Ratang Masang Belalang Bekah	16,200,000.00	16,200,000.00		100 %
210	TK Surya Kidz	Jln Soekarno Hatta	103,800,000.00	103,800,000.00		100 %
211	TK SURYA KIDS TIGO	Jl. Kubu Tanjung	31,800,000.00	31,800,000.00		100 %
212	TK TALI KASHI BUNDA	Jl. H. Bhai Di. Mejo Indo Manggih Gandang	13,200,000.00	13,200,000.00		100 %
213	TK TELADAN PERITWI TUNAS HARAPAN	Jl. Panorama No 30 Kel. Kayu Kubu	90,900,000.00	90,000,000.00		100 %
214	TPA ALMAH	Jl. Dr. Mangkuto Ameh	12,800,000.00	12,000,000.00		100 %
215	TPA CERDAS CERIA	J. H. Yamin No. 16 Aur Atas	11,400,000.00	11,400,000.00		100 %
216	TPA KASHI BUNDA	Jl. Dr. Arhal Komplek RSAN Bukittinggi				
217	TPA PRIMA ASUH	Jalan Umar Ghafer No. 2 Bukittinggi	9,000,000.00	9,000,000.00		100 %
218	TPA QUR'ANU AZIM	Jl. Ipuh Suro Gandang	10,800,000.00	10,800,000.00		100 %

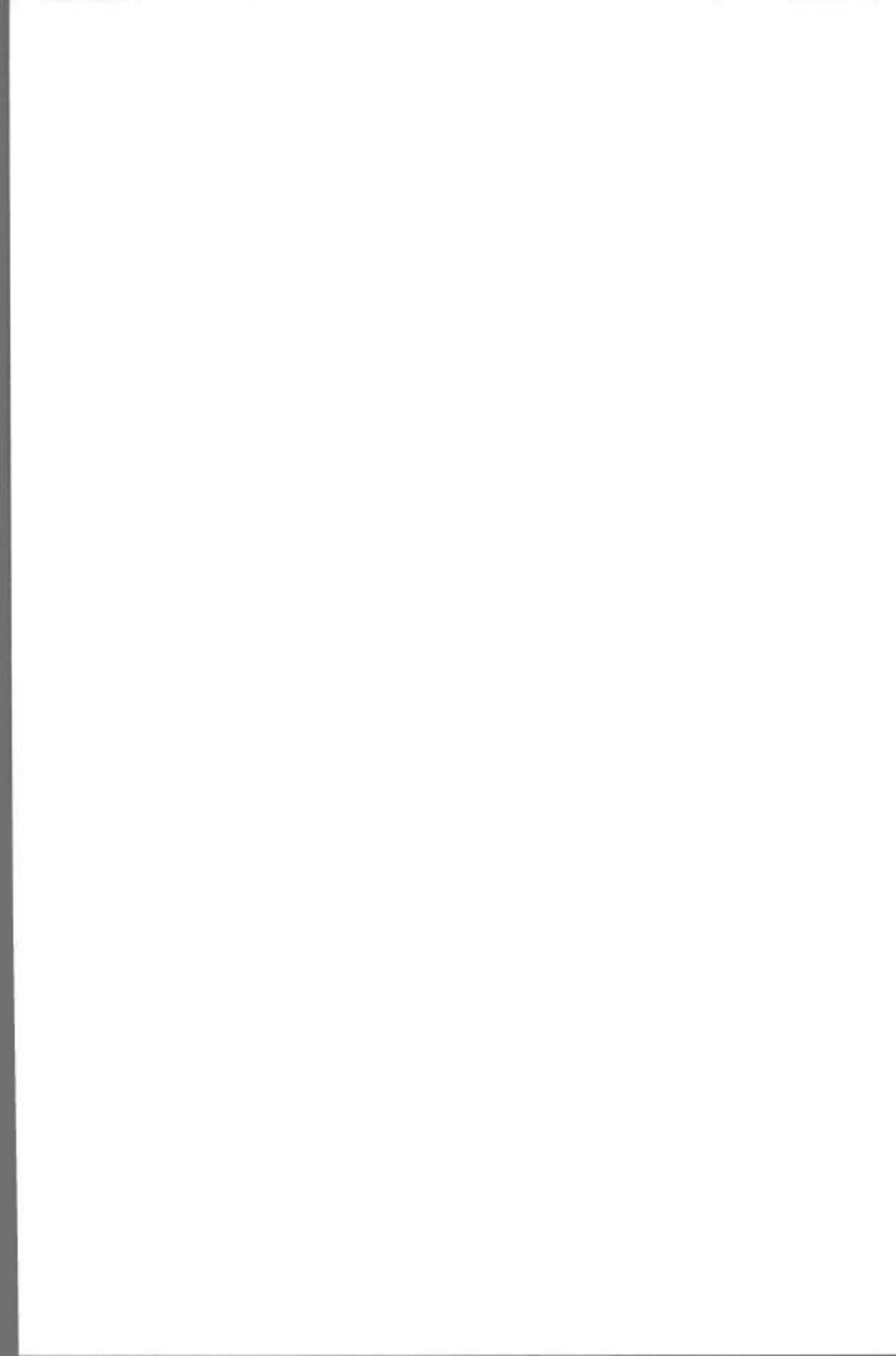




No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Pagu APBD P 2022	Realisasi (Rp)	Pengembalian	Persentase Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
219	TKA SURYA KIDS	Jl. Soekarno Hatta No. 81	21.000.000.00			- %
220	KB Azka	Jl. Dr. Prof. Henka Taruk Dipo	6.000.000.00	6.000.000.00		100 %
221	KB An Nuda	Jl. Luk Anya Gulai Beroah	6.000.000.00	6.000.000.00		100 %
222	Paket A PKM Al Ha'arif	Jl. Gurje Koto Selayan	80.700.000.00	80.700.000.00		100 %
223	Paket B PKM Kasih Bunda	Jl. BAHAR KAMS, Herygga Gatang	156.000.000.00	156.000.000.00		100 %
224	Paket B PKM SERBA GUNA	Jl. ABDUL MANAN NO.26 CAMPAGU IRUH	21.000.000.00	21.000.000.00		100 %
225	Paket C PKM Kasih Bunda	Jl. BAHAR KAMS, Herygga Gatang	99.000.000.00	99.000.000.00		100 %
226	Paket C PKM Serba Guna	Jl. ABDUL MANAN NO.26 CAMPAGU IRUH	21.000.000.00	21.000.000.00		100 %
227	Paket A PKM Kasih Bunda	Jl. BAHAR KAMS, Herygga Gatang	65.000.000.00	65.000.000.00		100 %
228	SPWT S&B Kota Bukittinggi	Jl. Gunung Panjang	250.000.000.00	250.000.000.00	202.000.000.00	100 %
229	Persebaran Luas keperawatan Indonesia (PGRI) Kota Bukittinggi	Bukittinggi	91.000.000.00	91.000.000.00		100 %
230	Kepatihan Adat Kural	Jalan Kural Balai Banyak Tigo Baleh Bukittinggi	-	-		
231	Kepatihan Adat Negeri/KAN Aul Brugo	Kelurahan Aul Brugo (Jl. Sudirman No. 64 Brugo, Kecamatan Aul Brugo Tigo Baleh Bukittinggi, Sumatera Barat 26181)	-	-		
232	Kepatihan Adat Negeri/KAN Guguk Panjang	Kel. Guguk Panjang (Jl. Cindua Peto, Beriteng Ps. Atas Kel. Guguk Panjang Bukittinggi Sumatera Barat 26136)	-	-		
233	Kepatihan Adat Negeri/KAN Koto Selayan	Kel. Koto Selayan (Jl. Sumur Koto Selayan Kel. Mandangin Koto Selayan Bukittinggi Sumatera Barat 26122)	40.000.000.00	40.000.000.00	1.117.000.00	97 %
234	Kepatihan Adat Negeri/KAN Mandangin	Kel. Mandangin (Jl. H. Melen No. 1 Campago Ikuh Kel. Mandangin Koto Selayan Bukittinggi Sumatera Barat 26122)	40.000.000.00	40.000.000.00	477.948.00	99 %
235	Kepatihan Adat Negeri/KAN Tigo Baleh	Kel. Pekan Labuah (Jl. Tigobelah No. 7 Pekan Labuah Kel. Aul Brugo Tigo Baleh Bukittinggi Sumatera Barat 26131)	40.000.000.00	40.000.000.00	3.884.865.00	90 %
236	Lembaga Kepatihan Adat Alim Hingababau/LOAH	Jl. Sudirman No. 27-29 Bukittinggi	120.000.000.00	120.000.000.00	6.161.300.00	95 %
237	Peraturan Warita Kural	Jalan Kural Balai Banyak Tigo Baleh Bukittinggi Sumatera barat	40.000.000.00	40.000.000.00		100 %
238	Aliran Silek Tradisional Harimau Singgalang Kota Bukittinggi	Jalan Guru Tua Gg. Muallik Puhun Pulu Kabun Kel. MDC	75.625.000.00	75.625.000.00		100 %
239	Pengurusan Silet Bud Sabra	Pengerak Kecamatan Mandangin	100.000.000.00	100.000.000.00		100 %
240	Sanggar Mahoni	Kelurahan Brugo	-	-		
241	Sanggar Seni Cahaya Amari	Jl. Pincuran Gaung (Belakang 60 05 Tera Dipo RT 02/RW 02	75.000.000.00	75.000.000.00		100 %
242	Sanggar Seni Ratuang Kuning	Jl. Angku Basa Komp. Gaya Baru No. 8 A	85.750.000.00	85.750.000.00		100 %
<b>Total Dinas Pendidikan</b>			<b>13.469.976.198.00</b>	<b>13.773.801.480.00</b>	<b>183.643.395.00</b>	<b>97 %</b>
<b>DINAS KESEHATAN</b>						
1	UTD PHE KOTA BUKITTINGGI	Jl. Dr. Abdul Rival No. 17A	550.000.000.00	550.000.000.00	-	100 %
<b>Total Dinas Kesehatan</b>			<b>550.000.000.00</b>	<b>550.000.000.00</b>	<b>-</b>	<b>100 %</b>
<b>DINAS SOSIAL</b>						
1	Gerlakin	Jalan Stupo Raya No.29 y. RT.IV. RW.3	20.000.000.00	20.000.000.00		100 %
<b>Total Dinas Sosial</b>			<b>20.000.000.00</b>	<b>20.000.000.00</b>	<b>-</b>	<b>100 %</b>
<b>DINAS PARTISIPASI PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>						
<b>Komite Nasional Pemuda</b>						
1	Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi	Jl. A Rival atas Negeri	200.000.000.00	200.000.000.00	890.400.00	100 %
2	Bukittinggi Intelektual BISC Kota Bukittinggi	Jl. By Pass				
3	IPSI Kota Bukittinggi	Jl. Teuku Umar No. 9 C Benteng Pasar Atas				
4	Kelompok Olahraga Hweythal Gati	Jl. Arival Atas Negeri				
5	Kelompok olahraga Taekwondo Dojang kota Bukittinggi	Jl. Sudirman				
6	Kelompok PBI Kota Bukittinggi	Jl. A. Rival septhal Bukittinggi				
7	Kodim	(Sudirman komplek sarana kodim)				
8	Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) Guguk	Jl. Prof. Henka No.27	175.000.000.00	175.000.000.00	2.919.732.00	99 %
9	Perwakilan Lembaga Pengembangan Masyarakat Indonesia (POPMI) Kota Bukittinggi	Jl. Ahmad Yani	93.050.000.00	93.050.000.00		100 %
10	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bukittinggi	Jl. Dr. A. Rival No. 17-A, Bukittinggi, Bukit Api Puhun, Guguk Panjang, Bukittinggi, Sumatera Barat	2.560.000.000.00	2.060.000.000.00	283.480.758.00	80 %
11	Perwakilan Lembaga Pengembangan Masyarakat Indonesia (POPMI) Kota Bukittinggi	Jl. Ahmad Yani	93.050.000.00			- %
12	Yessan Jantung Sehat Indonesia (YJS) Kota Bukittinggi	Jl. Perwa No.23	25.000.000.00			- %
13	Gerakan Pramuka Kota Bukittinggi	Jl. Katedral, Belalang Balok, Kel. Aul Brugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat	800.000.000.00	800.000.000.00		100 %
<b>Total Dinas Partisipasi Pemuda dan Olah Raga</b>			<b>3.647.693.000.00</b>	<b>3.828.143.000.00</b>	<b>287.296.800.00</b>	

8 19

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Pagu APBD P 2022	Realisasi (Rp)	Pengembalian	Persentase Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						
1	Bernas Kota Bukittinggi	J. Mubara Tengah Sewah Bukittinggi	225.000.000,00	225.000.000,00	2.284.000,00	99 %
2	Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bukittinggi	J. Sudirman, Kel. Sapiran kec. Aur Birugo Tigo Baleh kota Bukittinggi	330.000.000,00	330.000.000,00		100 %
3	Forum Komunikasi Pondok Al Qur'an Kota Bukittinggi	Kampus Alqabah 3.01 Dohri Kelurahan Tarok Dipo-Bukittinggi	35.000.000,00	35.000.000,00	44.500,00	100 %
4	LPTQ ( Lembaga Pengembangan Tilawat Qur'an) Kota Bukittinggi	J. Botang Dambin II No.32, Kel. Bekiang Batak, Kec. ABTS, Kota Bukittinggi	150.000.000,00	150.000.000,00		100 %
5	Maktab Qur'an Ashabul Qur'an	Jl. SUGO RAYA 2012 3 UG PABUK Kel. Pakan Kural kec. Gg Panjang Kota Bukittinggi	500.000.000,00	500.000.000,00		100 %
6	Masjid Jamil Tarok	Bukittinggi	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		100 %
7	Masjid Mukhlis	Jl. Soekarno Hatta Km.3 kel. Manggis Gantung kec. MKS kota Bukittinggi	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
8	Masjid Taqiyiyah	Bukittinggi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		100 %
9	MDTA Al Muttaqin	Jl. Kabun Pulesan Kelurahan Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi	155.000.000,00	155.000.000,00		100 %
10	MDTA ARRABBIYAH	J. N.Cj Di. Mangkuto Ameh Kelurahan Kota Selayan	40.000.000,00			- %
11	MDTA Daqamah	Jl. Sumur Kelurahan Ladang Caklah Kec. ABTS Kota Bukittinggi	100.000.000,00	100.000.000,00		100 %
12	MDTA Nurul Yakin	Jl. Pinoran Gaung Kel. Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang kota Bukittinggi	80.000.000,00	80.000.000,00		100 %
13	MDTA SYUKRA	Jl. Ipuh Mandiangin Kel. Cempojo Ipuh Kec. MKS Kota Bukittinggi	130.000.000,00	130.000.000,00	36.980.000,00	72 %
14	MDTA TABLIGHIYAH	Jl. Soekarno Hatta KM 3 Gantung Bukittinggi	750.000.000,00	750.000.000,00		100 %
15	Masjid Jami Tarok	Jl. Hamka Simp. Bengko Kelurahan Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi				
16	Masjid AL FURQAN SERJO Bukittinggi	Jl. Abdul Manan Kelurahan Cempojo Gg. Bulek Kec. MKS kota Bukittinggi	350.000.000,00	350.000.000,00		100 %
17	Masjid Al Ikhwan Panarema	Jl. Panarema, Kel. Kayu Kubu, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi	100.000.000,00	97.084.840,00		97 %
18	Masjid Al Ihsan	JALAN KPR NO.20 KALurahan Selayan Puhun Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi	100.000.000,00	100.000.000,00		100 %
19	Masjid BAITUL AMIN	Jl. Jend. Sudirman Arama Pohan Bukittinggi				
20	Masjid Baiturrahman	Jl. BANTU LAMPUNG RT.10 / RW.04 Kelurahan Cempojo Gg. Bulek Kec. MKS Kota Bukittinggi	150.000.000,00	150.000.000,00		100 %
21	Masjid Jami Air Kuning	Jl. Prof. M. Yamin Di. Kelurahan Air Kuning Kec. ABTS Kota Bukittinggi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		100 %
22	Masjid Jami Gensale Bukittinggi	Jl. Anak Air kel. Pakan anai air kec. MKS Kota Bukittinggi	15.000.000,00	15.000.000,00		%
23	Masjid Jami Gurjo Bukittinggi	Jl. N.S. Di. Mangkuto Ameh RW.26, Kel. Kota Selayan, Kec. MKS, Kota Bukittinggi	200.000.000,00	200.000.000,00		100 %
24	Masjid Mukhlis	Jl. Soekarno Hatta KM 3 Kelurahan Manggis Gantung Kec. MKS kota Bukittinggi				
25	Masjid NURUL HUDA Pengaruh	Jl. Tabet Tuhas, Kel. Puhun Pintu Kabun, Kec. MKS, Kota Bukittinggi	100.000.000,00	100.000.000,00		100 %
26	MUI Kota Bukittinggi	Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Banteh Semping Pengadilan Agama Bukittinggi	225.000.000,00	225.000.000,00		100 %
27	Mushalla Al Firdaus	Jl. Ipuh Jeleh Kelurahan Cempojo Ipuh Kec. MKS Kota Bukittinggi	700.000.000,00	700.000.000,00		100 %
28	Mushalla Al Ihsan Arama Kodin	Jl. Arama Kodin Kelurahan Sempin Kec. ABTS Bukittinggi				
29	Mushalla Al Ihsan Pengaruh	Jl. Pangrak Atas Bukittinggi	20.000.000,00	20.000.000,00		100 %
30	Mushalla AL DOKLAS Pintu Kabun	Jl. Pintu Kabun, Kel. Puhun Pintu Kabun, Kec. MKS, Kota Bukittinggi	125.000.000,00	125.000.000,00		100 %
31	Mushalla Al Wadi	Arah Hajar, Kel. Kayu Kubu, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi	100.000.000,00			-
32	Mushalla An Nur Gantung	Jl. Gantung Kelurahan Manggis Gantung Kec. MKS Kota Bukittinggi	50.000.000,00	50.000.000,00		100 %
33	Mushalla Ba'atunrahman	Jl. Ba'atunrahman No. 4 Kel. ATTS Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi	50.000.000,00	50.000.000,00		100 %
34	Mushalla HAQQUL KHAFI	Jl. Panarema Baru kel. Puhun Pintu Kabun Kec. MKS Kota Bukittinggi	150.000.000,00	150.000.000,00		100 %
35	Mushalla NUR RABMANI Bukittinggi	Jl. Batu Hampa, Kel. Tarok Dipo, kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi	50.000.000,00	50.000.000,00		100 %
36	Mushalla Nurul Ihsan	Kelurahan Puhun Pintu kabun	30.000.000,00	30.000.000,00		100 %
37	Mushalla NURUL FALAH	Jl. Pintu Kabun Kel. Puhun Pintu Kabun Kec. MKS Kota Bukittinggi				
38	Mushalla Nurul Iman Jangkak	Jl. Jangkak Kelurahan Cempojo Ipuh Kec. MKS Kota Bukittinggi				
39	Mushalla (Surtu Bundo Birugo Puhun	Jl. Birugo Puhun, Kel. Birugo, Kec. ABTS, Kota Bukittinggi	100.000.000,00	100.000.000,00		100 %
40	Pondok Pesantren Madrasah Nurankah Bukittinggi	Jl. Abdul manan Kel. Cempojo Gg. Bulek Kec. MKS	100.000.000,00	100.000.000,00	9.908.815,00	90 %
41	Rumah Tahfith (Miftahul Qur'an	Tabel gadang Kelaur. Kuning		50.000.000,00		
42	SURUK BANTU LADANG CAKLAH	Jl. Ladang Caklah Kel. Ladang Caklah, Kec. ABTS, Kota Bukittinggi	50.000.000,00	50.000.000,00		100 %
43	TRQ Al Huda Bukit banteh	Jl. By Pass KM 3 Kelurahan Bukit Gulai Banteh Bukittinggi	800.000.000,00	800.000.000,00		100 %
44	TRQ Ash Shalikh	Jl. Sugo Raya Kelurahan Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi	25.000.000,00	25.000.000,00		100 %



No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Pagu APBD P 2022	Realisasi (Rp)	Pengembalian	Persentase Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
45	TPQ BABUSSALAM	Jl.Jung Bukit Kelurahan Tarok Dipo Kec.Gg Panjang Kota BK				
46	TPQ Syedil Jannah	Jl. Mr. Asat'at Simpang Guguk Bukit Bukittinggi	30,000,000.00	30,000,000.00		100 %
47	Lembaga Didikan Sukoh ( LDS ) Kota Bukittinggi	Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bencah Bukittinggi	200,000,000.00	200,000,000.00		100 %
48	Majdi Al Mubtahirin Baruah	Jl. Sa'aduddin Jambek RT 01 RW 04 Kal.Pulau Anak Ala Kec.PKS kota Bukittinggi	981,450,000.00	-		-
49	MOTA "Ameliah	Jl. N.O.P.Hangko Anah	40,000,000.00	40,000,000.00		100 %
50	Mushalla Al Anwar Bukit Lampasa	Jl. Bukit Lampasa Kelurahan Puhun Pindu Kabun	50,000,000.00	50,000,000.00		100 %
51	Mushalla Al Manna	Jl. Aur Kuning Kel.Aur Kuning Kec.ABTB Kota Bukittinggi	225,000,000.00	225,000,000.00		100 %
52	Mushalla Al Mustajir Bukit Apit Puhun	Jl. Jambak Huko	100,000,000.00	100,000,000.00		100 %
53	Mushalla An Nur Pebedihan	Jl. Pebedihan Kelurahan Puhun Pindu Kabun	50,000,000.00	50,000,000.00		100 %
54	Mushalla Babussalam	Jl.Jung Bukit Tarok Dipo Bukittinggi	50,000,000.00	50,000,000.00		100 %
55	MUSHALLA BATTURAHMAN	JL.SUTAN SYAHRIJ JEMBATAN BESI KELURAHAN TAROK DIPO KOTA BUKITTINGGI	219,200,000.00	219,200,000.00	7,000,000.00	97 %
56	Pondok Tahfidz Ukhwalid Qur'an	Tapak Gadang Aur Kuning	50,000,000.00			- %
57	SURAU HANGGDI	Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB	200,000,000.00	198,950,000.00		99 %
58	SLB Al Ahar	Jl. TDR Pank Kongsi Kel Bukit Apit Puhun Kec.Guguk Panjang, Bukittinggi	118,400,000.00	118,400,000.00		100 %
59	SLB AL DOHAS	Jl. Paninjauan	125,400,000.00	125,400,000.00		100 %
60	SLB ALITSHE YPPA	Jl. Pindu Kabun Jirek Gg. Manna	88,800,000.00	88,800,000.00		100 %
61	SLB KARAKTER HANGGDI	Jl. Abdul Manan Campago Ipuh	99,000,000.00	99,000,000.00		100 %
62	SLB MERNATA BUNDA	Jl. H.Burhan Siruga	86,400,000.00	86,400,000.00		100 %
63	SLB BESTU IBU	Jl. Kubu Tanjung No.90 Kubu Tanjung	81,200,000.00	81,200,000.00		100 %
64	SMAS ISLAM AL ISHLAH	Jl. Mr Asaat No.52 B Berito Genang	210,000,000.00	210,000,000.00		100 %
65	SMAS Kana Bakti	Jl.Diponegoro no.8	165,800,000.00	165,800,000.00		100 %
66	SMAS PEMBANGUNAN	Jl. Jend. Sudirman Arema Kadin 0304 Agam	295,680,000.00	295,680,000.00		100 %
67	SMAS PDH Bukittinggi	Jl.Dr. A. Rival No.17 Kelurahan Kayu Kubu Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi	151,200,000.00	151,200,000.00		100 %
68	SMAS Taruna Bangsa	Jl.Syech Jamil Djambek no.33 Kel. Papan Kurali Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi	84,200,000.00	84,200,000.00		100 %
69	SMAS Tawerka	Jl.Begindo Ace chen Kel Bukit Cangang Kayu Remang Kec.Guguk Panjang kota Bukittinggi	303,400,000.00	303,400,000.00		100 %
70	SMK Balbonika Indonesia Bukittinggi	Jl.Prof Hamka No.55 Papan Kandi Bukittinggi	60,800,000.00	60,800,000.00		100 %
71	SMK Hamazi Imam Borjel Bukittinggi	Jl.Kesatuan No.28 Kel Bukit Apit Puhun Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi	268,000,000.00	268,000,000.00		100 %
72	SMK Gajah Tongga	Jl.Limar galar No.4 Kelurahan Papan Kurali Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi	119,600,000.00	119,600,000.00		100 %
73	SMK Gema Nwantara Bukittinggi	Jl.Siruga Bungo No.137 A Bukittinggi	400,000,000.00	400,000,000.00		100 %
74	SMK Kesehatan Prima Noderika Bukittinggi	Jl.Kusuma Bhakti No.99 Bukittinggi	147,400,000.00	147,400,000.00		100 %
75	SMK Parantha Bukittinggi	Jl.Veteran No.79 Jirek Bukittinggi	63,800,000.00	51,000,000.00		81 %
76	SMK Pembangunan Bukittinggi	Jl.Ikandar Teja Kusuma Kel.Tarok Dipo Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi	164,200,000.00	164,200,000.00		100 %
77	SMK Pembina Bangsa	Jl.Syech Jamil Jambek no.33 kel Papan Kurali kec.Guguk Panjang Bukittinggi	387,000,000.00	387,000,000.00		100 %
78	SMK Teknologi Muhammadiyah	Jl.Prof Dr.Hamka kel.Tarok Dipo Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi	284,800,000.00	284,800,000.00		100 %
<b>Total Sekretariat Daerah</b>			<b>3,634,390,000.00</b>	<b>18,417,816,000.00</b>	<b>595,236,418.00</b>	<b>493 %</b>
<b>BAGAN KEPESAWATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA</b>						
1	KORPRI	Bukittinggi	150,000,000.00	150,000,000.00	15,995,144.00	85 %
<b>Total BKPSDH</b>			<b>150,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>15,995,144.00</b>	
<b>KECAMATAN HANGGANGIN KOTO SELAYAN</b>						
1	Karang Taruna Bhakti Muda Kel. Pulau Anak Air	Jl. Sa'aduddin Jambek No. 90	64,607,000.00	64,607,000.00		100 %
2	Karang Taruna Kel. Campago Ipuh	Jl. H. Manna, Kel. Campago Ipuh	35,000,000.00	35,000,000.00		100 %
3	Karang Taruna Kel Hanggah Gantung	Jl. Bahar Kamil RT.01/RW.02 Gantung	200,000,000.00	199,994,086.43		100 %
4	Karang Taruna Teratai Putih	Jl. Campago No. 23 Inkombe Kelurahan Campago Guguk Bulek	15,000,000.00	15,000,000.00		100 %
5	Rumah Tahfiz BQC Syukur Henna Kel. Puhun Pindu Kabun	Kelurahan Puhun Pindu Kabun	120,000,000.00	120,000,000.00		100 %
6	Rumah Tahfiz Bukittinggi Qur'an Center (BQC) Kel. Campago Ipuh	Kelurahan Campago Ipuh	200,000,000.00	200,000,000.00	100,000.00	100 %

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Pagu APBD P 2022	Realisasi (Rp)	Pengembalian	Persentase Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
7	Rumah Tahfidh TPQ/RTQ Syedril Jannah	J. Mr. Asat Simpang Guguk Bukit Bukitnggi	280,000,000.00	279,480,000.00		100 %
8	BOKT Kecamatan Mandangin Koto Selayan	Jn. Abdul Manan No.2 Kelurahan Campago Ipoh	50,000,000.00	49,950,000.00		100 %
9	BOKT Masjid Al Wuzha	Jn. Serjal Dalam RT 01/RW 01	50,000,000.00	50,000,000.00		100 %
10	BOKT Permata Masjid Al Muhammadiyah Banjar	Pulau Anak Air	80,000,000.00	49,973,000.00		100 %
11	PKK Kelurahan Menggis Garing	Jn. Serjal Dalam	100,000,000.00	99,999,000.00		100 %
12	Rumah Tahfidh	Kecamatan Mandangin Koto Selayan				
13	Karang Taruna Bhaidd Mula Kel. Puli Anak Air	J. Sa'adudin Jember No. 90	26,000,000.00	26,000,000.00		100 %
14	Karang Taruna Kel Kubu Gula Banjar	J. Kusuma Bhaidd Gula Banjar	50,000,000.00	50,000,000.00		100 %
15	PKK Kelurahan Campago Ipoh	J. H. Hekin, Kelurahan Campago Ipoh	30,000,000.00	29,914,000.00		100 %
16	PKK KELURAHAN PUHUN TEMBOX		45,000,000.00	45,000,000.00		100 %
17	Potolewa	J. Serjal Dalam RT.01/RW.01	50,000,000.00	-		-
18	PKK Kecamatan Mandangin Koto Selayan	J. Abdul Manan, No. 2, Kelurahan Campago Ipoh	30,000,000.00	29,985,950.00		100 %
19	PKK Kelurahan Campago Ipoh	J. H. Hekin, Kelurahan Campago Ipoh	50,000,000.00	49,950,000.00		100 %
20	PKK Kelurahan Menggis Garing	Jn. Serjal Dalam	50,000,000.00	49,999,950.00		100 %
<b>Total Kecamatan PMS</b>			<b>1,500,607,600.00</b>	<b>1,448,420,584.43</b>	<b>129,080.00</b>	<b>97 %</b>
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Guguk Panjang</b>						
1	Kube Gempir Maju	RT 04/04 Tarok Dipo	26,000,000.00	-		-
2	Kube Park Tinggi	Park Tinggi, Tarok Dipo	25,000,000.00	-		-
3	Rumah Tahfidh Qurin	Bukitnggi				
4	Rumah Tahfidh Al Ibtisam	Kelurahan Bukit Apit Puhun	200,000,000.00	200,000,000.00	456,800.00	100 %
5	Rumah Tahfidh Sunaya Tarok Dipo	Tarok Dipo	200,000,000.00	200,000,000.00	76,500.00	100 %
6	HIMPAS QUR'AN ASHABUL QUR'AN	Pekan Kural	200,000,000.00	200,000,000.00	159,400.00	100 %
7	LPH Kelurahan Tarok Dipo	Tarok Dipo, Bukitnggi	30,000,000.00	30,000,000.00		100 %
8	LPH Kelurahan Tarok Dipo	Tarok Dipo, Bukitnggi	100,000,000.00	100,000,000.00		100 %
9	Karang Taruna Kelurahan Kayu Kubu	Kelurahan Kayu Kubu	50,000,000.00	50,000,000.00		100 %
10	KIT Ibu-Ibu Nejuang Kalsang	RW 2 Kelurahan ATTS	20,000,000.00	-		-
11	Poksekab Belahampe	Tarok Dipo	25,000,000.00	25,000,000.00		100 %
12	Poksekab Padang Gersuk	Tarok Dipo	25,000,000.00	25,000,000.00		100 %
13	Poksekab Sejahtera	Tarok Dipo	25,000,000.00	25,000,000.00		100 %
14	TP PKK Kelurahan ATTS	J. Sijolang Di P Basi 1	50,000,000.00	50,000,000.00		100 %
15	TP PKK Kelurahan ATTS	J. Sijolang Di P Basi 1				
16	TP PKK Kelurahan ATTS	J. Sijolang Di P Basi 1				
17	TP PKK Kel. Tarok Dipo	Jn. Batu Hampir Konsolidasi Ujung Bukit, Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang	30,000,000.00	30,000,000.00		100 %
<b>Total Kecamatan Guguk Panjang</b>			<b>1,024,000,000.00</b>	<b>965,000,000.00</b>	<b>794,910.00</b>	<b>94 %</b>
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Binsang Tiga Batah</b>						
1	BOKT Permata muhalla darul muttaqin	J. Perawat Kelurahan Belakang Belok	80,000,000.00	80,000,000.00		100 %
2	BOKT PERMATA MUSHALLA ISTIQOMAH SUMUA	J. SUMUA	20,000,000.00	20,000,000.00		100 %
3	KARANG TARUNA TUNAS GDHA	J. H. YAHDI BH	90,000,000.00	90,000,000.00		100 %
4	PTQ UROHATUL QURAN	J. Puding Hias Tabek Padang Kel. Aur Kuning	190,000,000.00	190,000,000.00	2,587,000.00	99 %
5	RTQ Suku Balai Banyak	J. kandi	190,000,000.00	190,000,000.00		100 %
6	Rumah Tahfidh Daarul Muttaqin	J. Perawat No 141	220,000,000.00	220,000,000.00		100 %
7	Idrak masjid istiqomah	ladang cakaran				
8	BOKT Permata Darul Muttaqin	J. perawat RT 03 RW 01 Kelurahan Belakang Belok				
9	Karang taruna kelurahan binsang	Binsang	200,000,000.00	200,000,000.00		100 %
10	LPH Kecamatan	Bukitnggi				
11	LPH Kelurahan Belakang Belok	J. Selang Masang no 1 Kelurahan Belakang Belok	25,000,000.00	25,000,000.00		100 %

8  
bq

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Pagu APBD P 2022	Realisasi (Rp)	Pengembalian	Persentase Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
12	IPM PARTI ANTANG	Jl. Kural no 49 Kelurahan Part Antang	125,000,000.00	125,000,000.00		100 %
	<b>Total Kecamatan ASTB</b>		<b>1,075,090,000.00</b>	<b>1,075,000,000.00</b>	<b>2,587,000.00</b>	<b>100 %</b>
<b>B.01.1.05.0.02.04.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</b>						
1	PARTAI AMANAT NASIONAL	BUKITTINGGI	109,829,568.00	109,829,568.00		100 %
2	PARTAI DEMOKRAT	BUKITTINGGI	139,843,998.00	139,843,998.00		100 %
3	PARTAI GERAKAN INDONESIA BAYA	BUKITTINGGI	141,731,010.00	141,731,010.00		100 %
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	BUKITTINGGI	74,824,128.00	74,824,128.00		100 %
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	BUKITTINGGI	122,970,282.00	122,970,282.00		100 %
6	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	BUKITTINGGI	29,590,536.00	-		-
7	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	BUKITTINGGI	53,684,124.00	53,684,124.00		100 %
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGSUNAN	BUKITTINGGI	63,173,880.00	63,173,880.00		100 %
9	PERSATUAN WARGA LIMA PULUH KOTA	Pulau Anak Air	-	-		
10	PAGUYUBAN PERANTAU JAWA (PAPERJA) BUKITTINGGI-AGAH	BUKITTINGGI	-	-		
11	FORUM KERUKUNAN LIMK BERAGAMA	BUKITTINGGI	100,000,000.00	100,000,000.00	1,204,890.00	99 %
12	KELOMPOK SADAR KEAMINAN DAN KETERTISAN MASYARAKAT	BUKITTINGGI	75,000,000.00	75,000,000.00		100 %
	<b>Total Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</b>		<b>810,647,526.00</b>	<b>881,056,990.00</b>	<b>1,104,980.00</b>	

**3) HIBAH BERUPA BARANG**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Pagu APBD P 2022	Realisasi (Rp)	Pengembalian	Persentas
1	2	3	4	5	6	7
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
1	Kantor Polisi Sektor Kota Bukittinggi	Jl. Soekarno Hatta Bukittinggi	200,000,000.00	199,763,427.28	-	100 %
2	Kantor Polisi Sektor Kota Bukittinggi	Jl. Soekarno Hatta Bukittinggi	18,000,000.00	16,703,675.16	-	93 %
3	Kantor Polisi Sektor Kota Bukittinggi	Jl. Soekarno Hatta Bukittinggi	16,000,000.00	17,773,708.50	-	99 %
4	Rajkasaan Negeri Bukittinggi	Jl. Adhyaksa No. 198, Belakang Balai	15,000,000.00	12,225,940.30	-	82 %
5	Rajkasaan Negeri Bukittinggi	Jl. Adhyaksa No. 198, Belakang Balai	200,000,000.00	191,909,846.79	-	96 %
	<b>Total Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>481,000,000.00</b>	<b>438,436,197.73</b>	-	
	<b>TOTAL HIBAH</b>			<b>41,281,674,484.16</b>	<b>1,089,881,743.00</b>	

2/11



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7
1	Badan Keuangan	Putang Pajak Daerah	11.321.625.831.00	6.175.478.333.00	5.289.847.286.00	14.300.957.998.00
3	Diras Pendidikan dan Kebudayaan	Putang Retribusi Daerah	300.000.00	-	-	300.000.00
3	Diras Lingkungan Hidup	Putang Retribusi Daerah	38.160.000.00	381.562.500.00	381.562.500.00	38.500.000.00
4	Diras Perhubungan	Putang Retribusi Daerah	83.758.000.00	-	-	83.758.000.00
5	Diras Komunikasi dan Informatika	Putang Retribusi Daerah	195.043.000.00	270.400.000.00	493.680.000.00	5.763.000.00
6	Diras Koperasi dan Perdagangan	Putang Retribusi Daerah	12.805.491.131.00	8.535.944.945.00	13.013.529.584.00	11.194.496.712.00
7	Diras Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Putang Retribusi Daerah	495.083.600.00	-	-	495.083.600.00
8	Badan Keuangan	Putang Retribusi Daerah	213.626.513.00	80.682.300.00	81.836.600.00	247.282.513.00
8	Diras Periklanan, Pemuda dan Olahraga	Putang Retribusi Daerah	383.183.261.00	-	383.183.261.00	-
10	Badan Keuangan	Putang hasil Pengetiaan Keuangan Daerah yang diupayakan	5.641.291.925.00	8.527.205.314.00	6.804.448.385.00	8.363.949.874.00
11	Diras Kesehatan	Putang Lain-lain PAD yang Sah	5.511.170.120.00	2.088.403.308.00	7.152.814.506.00	828.446.922.00
13	Diras Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Putang Lain-lain PAD yang Sah	781.626.500.00	-	-	781.626.500.00
13	Diras Lingkungan Hidup	Putang Lain-lain PAD yang Sah	1.300.000.00	1.846.188.00	1.000.800.00	1.846.188.00
14	Diras Perhubungan	Putang Lain-lain PAD yang Sah	33.884.350.00	18.500.000.00	-	52.484.350.00
15	Diras Koperasi, UKM dan perdagangan	Putang Lain-lain PAD yang Sah	8.740.851.00	176.338.080.00	176.792.345.00	8.286.686.00
16	Diras Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Putang Lain-lain PAD yang Sah	226.177.248.00	-	-	226.177.248.00
17	Diras Periklanan, Pemuda dan Olahraga	Putang Lain-lain PAD yang Sah	-	1.194.714.731.00	371.493.300.00	823.226.431.00
18	Badan Keuangan	Putang Lain-lain PAD yang Sah	1.097.449.562.00	159.398.125.00	424.609.462.00	1.609.246.225.00
19	Badan Keuangan	Putang Transfer Antar Daerah	4.309.749.129.00	3.781.987.875.00	4.309.749.129.00	3.781.987.875.00
20	Diras Pendidikan dan Kebudayaan	Putang Lainnya	113.622.000.00	-	-	113.622.000.00
21	Diras Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang	Putang Lainnya	181.095.045.00	-	27.805.444.00	153.694.601.00
<b>Jumlah</b>			<b>47.373.461.134.00</b>	<b>32.280.563.609.00</b>	<b>39.295.132.703.00</b>	<b>43.377.899.031.00</b>

Bukittinggi, 16 Agustus 2023  
**WALIKOTA BUKITTINGGI**  




PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
1	Piutang Pajak Daerah	14,306,957,898.00	0,000,211,560.00	14,306,746,338.00
2	Piutang Retribusi Daerah	12,046,237,384.00	6,278,565,976.00	5,767,671,408.00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,363,843,874.00	-	8,363,843,874.00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4,632,545,459.00	4,615,503,869.00	17,041,590.00
5	Piutang Transfer Antar Daerah	3,781,367,835.00	-	3,781,367,835.00
6	Piutang Lainnya	246,316,601.00	246,316,601.00	-
<b>Jumlah</b>		<b>43,777,889,631.00</b>	<b>22,628,708,000.00</b>	<b>21,149,181,631.00</b>

Bukittinggi, 15 Agustus 2023  
WALIKOTA BUKITTINGGI  
  
ERMAN SAFAR



Lampiran X : PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
Nomor : 3 Tahun 2023  
Tanggal : 16 Agustus 2023



**KOTA BUKITTINGGI**  
**DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DAN BERGULIR**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	SKPD	Jumlah Dana Bergulir	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	Jumlah Piutang Bersih
1	2	3	4	5
1	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	1,634,459,372.95	999.160,488.00	635,298,884.95

Bukittinggi, 16 Agustus 2023  
**WALIKOTA BUKITTINGGI**  
  
**ERMAN SAFAR**



KOTA BUKITTINGGI  
 DAFTAR PERHITUNGAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAHAN DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Tahun Perencanaan modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Ruang Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah (target di persis)	Jumlah modal yang telah atau akan dibayarkan sampai dengan awal tahun	Pemertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah dibayarkan sampai dengan akhir tahun ini	Ges modal yang belum dibayarkan	Hasil perubahan modal (Investasi) dalam tahun ini	Jumlah modal (Investasi) yang ditransfer kebatal	Jumlah sisa modal (Investasi) yang diartikan sebagai dengan tahun ini
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2021	Bank Negeri				5.943.118.110,83		5.943.118.110,83				
2021	Bank Negeri				4.076.000.000,00		4.076.000.000,00				
2022	Bank Negeri	Perda No.12 Tahun 2012			10.576.000.000,00		10.576.000.000,00				
2023	Bank Negeri	Perda No.12 Tahun 2012			14.308.000.000,00		14.308.000.000,00				
2024	Bank Negeri	Perda No.25 Tahun 2013			18.708.000.000,00		18.708.000.000,00				
2025	Bank Negeri	Perda No.14 Tahun 2014			18.941.000.000,00		18.941.000.000,00				
2026	Bank Negeri				25.234.000.000,00		25.234.000.000,00				
2027	Bank Negeri				33.124.000.000,00		33.124.000.000,00				
2028	Bank Negeri	Perda No.12 Tahun 2018			33.254.000.000,00		33.254.000.000,00				
2029	Bank Negeri				37.254.000.000,00		37.254.000.000,00				
2030	Bank Negeri				37.254.000.000,00		37.254.000.000,00				
2031	Bank Negeri				37.254.000.000,00		37.254.000.000,00				
2032	Bank Negeri				37.254.000.000,00		37.254.000.000,00				
2033	Bank Negeri				37.254.000.000,00		37.254.000.000,00				
2034	Bank Negeri	Perda No.12 Tahun 2021		20.000.000.000,00	37.254.000.000,00	1.000.000.000,00	44.504.000.000,00	21.600.000.000,00	6.200.000.000,00		
2035	Bank Negeri				370.000.000,00		370.000.000,00				
2036	Bank Negeri				407.000.000,00		407.000.000,00				
2037	Bank Negeri				437.000.000,00		437.000.000,00				
2038	Bank Negeri				437.000.000,00		437.000.000,00				
2039	Bank Negeri				510.000.000,00		510.000.000,00				
2040	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2041	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2042	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2043	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2044	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2045	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2046	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2047	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2048	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2049	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2050	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2051	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2052	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2053	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2054	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2055	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2056	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2057	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2058	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2059	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2060	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2061	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2062	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2063	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2064	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2065	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2066	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2067	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2068	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2069	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2070	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2071	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2072	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2073	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2074	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2075	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2076	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2077	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2078	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2079	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2080	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2081	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2082	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2083	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2084	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2085	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2086	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2087	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2088	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2089	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2090	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2091	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2092	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2093	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2094	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2095	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2096	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2097	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2098	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2099	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2100	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2101	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2102	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2103	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2104	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2105	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2106	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2107	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2108	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2109	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2110	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2111	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2112	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2113	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2114	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2115	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2116	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2117	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2118	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2119	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2120	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2121	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2122	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2123	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				
2124	Bank Negeri				5.820.000.000,00		5.820.000.000,00				



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
 DAFTAR REKAPITULASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN  
 ASET TETAP DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Dinas Pendidikan	251.200.520.258.11	62.490.562.421.84	48.862.282.084.13	264.828.800.595.82
2	Dinas Kesehatan	204.416.827.792.76	37.406.216.079.40	31.890.048.653.33	210.718.145.219.03
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	320.474.040.925.18	116.675.626.999.18	101.217.356.557.67	335.932.311.366.70
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	52.358.644.003.21	15.140.803.357.81	16.310.074.786.81	51.189.372.574.21
5	Dinas Kebencanaan	3.187.732.551.30	512.214.493.67	821.826.168.87	2.878.120.876.00
6	Setuan Polisi Pamong Praja	11.850.164.347.30	1.237.632.141.08	1.298.656.433.00	11.789.140.055.00
7	Badan Penanggulangan Bencana	1.096.714.476.30	1.212.710.207.71	1.041.707.980.75	1.267.716.703.00
8	Dinas Sosial	3.325.502.767.00	59.940.000.08	101.812.935.00	2.276.629.832.00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	2.890.376.974.89	284.153.017.00	404.836.915.00	2.769.693.076.89
10	Dinas Lingkungan Hidup	27.676.865.032.84	11.134.021.324.51	8.777.631.324.69	40.034.254.032.66
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.723.713.516.30	3.182.520.174.82	3.028.853.612.62	1.877.379.078.50
12	Dinas Perhubungan	41.681.848.401.00	9.742.266.383.00	5.073.437.658.00	46.350.677.126.00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.889.359.719.20	2.919.685.557.00	1.640.886.448.00	3.268.158.828.00
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pengembangan	407.371.475.290.24	8.894.562.592.88	12.403.803.757.60	403.862.264.125.52
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja	35.094.622.011.74	917.540.785.00	1.404.680.648.00	32.597.481.148.74
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	4.466.567.337.30	829.413.540.00	655.398.180.00	4.640.681.697.00
17	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	210.400.353.099.11	5.922.625.319.98	3.687.760.032.28	212.635.618.386.81
18	Dinas Pertanian dan Pangan	33.316.128.562.85	467.677.601.48	909.586.486.24	32.874.215.678.09
19	Sekretariat Daerah	60.251.689.729.30	12.483.594.289.59	7.071.020.547.84	65.664.263.471.05
20	Sekretariat DPRD	11.874.429.048.30	3.414.919.389.34	2.367.793.794.34	12.921.554.643.30
21	Badan Perencanaan Rencanan dan Pengembangan	1.371.589.727.30	323.894.217.00	307.695.296.50	1.387.788.647.80
22	Badan Keuangan	44.376.694.347.22	863.194.951.00	1.253.547.925.00	44.086.341.373.22
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	485.530.287.30	216.491.675.00	276.211.123.00	425.810.839.30
24	Inspektorat	1.930.772.702.30	233.778.073.00	263.062.493.00	1.899.488.282.30
25	Kecamatan Mandiangin Kota Selatan	18.694.796.762.98	5.263.685.724.57	4.752.628.777.99	19.205.853.709.56
26	Kecamatan Guguk Panjang	26.415.621.837.33	490.666.317.02	1.138.186.459.89	25.768.111.694.46
27	Kecamatan Aur Krug Tigo Belah	19.994.008.263.94	527.899.251.00	705.787.122.00	19.816.080.392.94
28	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	45.996.792.00	275.310.000.00	72.460.046.00	248.846.746.00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.868.865.746.671.24</b>	<b>307.646.072.084.06</b>	<b>360.102.740.338.17</b>	<b>1.855.863.078.417.13</b>

Bukittinggi, 16 Agustus 2023  
**WALIKOTA BUKITTINGGI**  
  
**ERMAN SAFAR**

Lampiran III : PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
Nomor : 3 Tahun 2023  
Tanggal : 16 Agustus 2023



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021	Mutasi		Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Tanah	566,206,588,505.20	622,700,000.00	542,520,000.00	566,186,788,505.20
2	Peralatan dan Mesin	346,346,890,953.31	65,789,239,008.47	5,471,108,849.12	406,665,021,112.66
3	Gedung dan Bangunan	960,588,776,351.51	53,318,466,659.45	9,568,482,275.13	1,004,338,760,735.83
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	623,922,585,555.15	55,307,802,355.83	6,486,205,340.64	672,744,182,570.34
5	Aset Tetap Lainnya	30,677,779,107.80	4,716,953,366.00	4,224,807,472.00	31,169,875,091.80
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	65,149,630,115.64	6,362,829,128.41	33,893,576,122.88	37,618,883,121.17
7	Akumulasi Penyusutan	(784,029,504,007.37)	(84,468,710,604.34)	(5,474,781,891.84)	(863,023,432,719.87)
	<b>Jumlah</b>	<b>1,808,865,746,471.24</b>	<b>101,649,229,913.82</b>	<b>54,711,898,167.93</b>	<b>1,855,803,078,417.13</b>

Bukittinggi, 16 Agustus 2023  
**WALIKOTA BUKITTINGGI**



**ERMAN SAPAR**



KOTA BUKITTINGGI  
 DAFTAR REALISASI KONSTRUKSI DALAM PENCERDASAN  
 FAKTOR ANGGARAN

NO	SDP	SALDO AWAL	REVISI				MUTASI				REKONSILIASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023
			ASST TERAP LAINNYA	GESENG DAN BANGUNAN	JALAN BERKAS DAN BERKAS	PERALATAN DAN MESIN	ASST TERAP LAINNYA	GESENG DAN BANGUNAN	JALAN BERKAS DAN BERKAS	PERALATAN DAN MESIN	ASST NON KONSTRUKSI	REVISI	SALDO PER 31 DESEMBER 2023		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.652.079,118.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dinas Perikanan (Luaran dan Perikanan Laut)	12.695.628,794.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.695.628,794.17
4	Dinas Perikanan dan Kelautan (Perikanan)	205.824.600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.824.600.00
5	Dinas Kelautan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sekolah Pendidikan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Badan Penyelenggara dan Layanan Dasar	14.995.200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.995.200.00
8	Dinas Sosial	20.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000.00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Lingkungan Hidup	390.000.200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.000.200.00
11	Dinas Pengendalian dan Pertahanan SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Pekerjaan	241.601.200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241.601.200.00
13	Dinas Pekerjaan dan Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pekerjaan (UPT dan Persewaan) (Dinas Pekerjaan Mula, Pekerjaan Terseleksi Pula, PTK)	17.284.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.284.000.00
15	Dinas Pekerjaan dan Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Perumahan dan Permukiman	15.626.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.626.000.000.00
17	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Pekerjaan dan Industri	2.520.200.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.520.200.000.00
19	Sektor/Unit/Instansi	47.886.943.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.886.943.15
20	Sektor/Unit/Instansi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Badan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Badan Penyelenggara dan Sertifikasi Dasar/Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Instansi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Keuntungan/Keuntungan/Keuntungan	4.115.000.217.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.115.000.217.61
26	Keuntungan/Keuntungan/Keuntungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Keuntungan/Keuntungan/Keuntungan	194.200.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.200.000.00
28	Keuntungan/Keuntungan/Keuntungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	4.115.000.217.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.115.000.217.61

Bukittinggi, 15 Agustus 2023  
 WILKOKO BUKITTINGGI  
  
 SONAN SAFAR



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DAFTAR REKAPITULASI ASET LAIN - LAIN (RUSAK BERAT)**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	948,211,654.00	-	933,241,771.00	14,969,883.00
2	Dinas Kesehatan	356,191,608.00	-	152,481,739.00	203,709,869.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,252,079,138.00	-	108,832,708.00	1,144,046,431.00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
5	Dinas Kelautan	-	-	-	-
6	Satuan Polisi Ramong Peta	6,126,000.00	-	6,126,000.00	-
7	Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah	-	-	-	-
8	Dinas Sosial	-	-	-	-
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	-	3,510,100.00	-	3,510,100.00
10	Dinas Lingkungan Hidup	675,710,748.00	-	17,017,832.00	658,692,916.00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
12	Dinas Perhubungan	4,989,400.00	-	4,989,400.00	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,354,000.00	-	3,354,000.00	-
14	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	-	10,547,286.00	-	10,547,286.00
15	Dinas Pelayanan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTK	-	-	-	-
16	Dinas Perjudian dan Keansipen	-	-	-	-
17	Dinas Pariwisata dan Olah Raga	632,567,678.00	-	489,384,680.00	143,182,998.00
18	Dinas Pertanian dan Pangan	553,832,300.00	-	162,667,200.00	391,165,100.00
19	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
20	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
21	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
22	Badan Keuangan	6,250,000.00	-	6,250,000.00	-
23	Badan Kepegawalan dan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
24	Inspektorat	-	-	-	-
25	Kecamatan Mendiangin Kota Selatan	-	-	-	-
26	Kecamatan Guguk Rangang	7,960,000.00	-	7,394,286.00	565,714.00
27	Kecamatan Aur Bangko Tiga Belah	514,800.00	1,930,780.00	-	2,445,580.00
28	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>4,746,799,127.00</b>	<b>15,988,166.00</b>	<b>2,088,951,716.00</b>	<b>2,672,835,677.00</b>

Bukittinggi, 16 Agustus 2023  
**WALIKOTA BUKITTINGGI**  
  
**ERWIN SAFAR**

Lampiran XVI : PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
Nomor : 2 Tahun 2023  
Tanggal : 16 Agustus 2023



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH**  
**PER 31 DESEMBER 2022**

No	Tujuan Pembantuan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan
1	7	3	4	5	6	7	8	9
1	NIHIL							

Bukittinggi, 1 Agustus 2023  
**WALIKOTA BUKITTINGGI**  
  
FRANS SAFAR



Lampiran XVII : PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
Nomor : 3 Tahun 2023  
Tanggal : 16 Agustus 2023



**KOTA BUKITTINGGI**  
**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**  
**PER 31 DESEMBER 2022**

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	-	237.000,00	-	237.000,00
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	999.500.000,00	-	999.500.000,00	-
3	Pendapatan Diterima Dimuka	379.525.936,67	315.336.134,00	264.297.370,00	430.564.800,67
4	Utang Belanja	9.522.213.050,54	10.851.439.713,25	9.135.932.214,64	11.237.720.549,25
5	Utang Jangka Pendek	535.508.911,00	128.968.040,00	-	664.476.951,00
Jumlah		<b>11.436.747.898,21</b>	<b>11.295.980.887,25</b>	<b>10.399.729.484,64</b>	<b>12.332.999.300,92</b>

Bukittinggi, 16 Agustus 2023  
**WALIKOTA BUKITTINGGI**  
  
**HERMAN SAFAR**







Lampiran XX.2 : PEMANTAUAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
 Periode : 3 Tahun 2021  
 Tanggal : 16 Agustus 2023



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAHPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

NO	BUMD/ Perusahaan Daerah Tahun 2021	Sumber	Status	Pendapatan	Beban	Labas (Rugi) Kotor	Pendapatan diluar usaha	Beban Diluar usaha	Labas (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7 = 5-6	8	9	10
1	Bidang Perbankan								
	1. PT. BPRS Jam Gadang	Laporan Audit	sehat	7,433,335,408.00	5,995,375,305.00	1,437,960,103.00	14,315,000.00	(36,306,878.00)	1,415,968,225.00
	<b>Sub Total</b>			<b>7,433,335,408.00</b>	<b>5,995,375,305.00</b>	<b>1,437,960,103.00</b>	<b>14,315,000.00</b>	<b>(36,306,878.00)</b>	<b>1,415,968,225.00</b>
2	Bidang Air Minum								
	1. Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang	Laporan Audit	sehat	11,897,162,250.00	11,880,441,931.00	16,720,319.00	170,148,506.00	(31,189,447.00)	155,679,378.00
	<b>Sub Total</b>			<b>11,897,162,250.00</b>	<b>11,880,441,931.00</b>	<b>16,720,319.00</b>	<b>170,148,506.00</b>	<b>(31,189,447.00)</b>	<b>155,679,378.00</b>
	<b>Total Seluruh Bidang Industri</b>			<b>19,330,497,658.00</b>	<b>17,875,817,236.00</b>	<b>1,454,680,422.00</b>	<b>184,463,506.00</b>	<b>(67,496,325.00)</b>	<b>1,571,647,603.00</b>

Bukittinggi, 16 Agustus 2023  
**WALIKOTA BUKITTINGGI**



Lampiran XX : PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
Nomor : 3 Tahun 2023  
Tanggal : 15 Agustus 2023



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022  
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NILAI								

Bukittinggi, 16 Agustus 2023  
WALIKOTA BUKITTINGGI  
  
BRIAN SAFAR



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA									
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERBUKA		TRANSFER		REALISASI	10
		3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Pelayanan Umum	195,474,032,139.00	175,667,911,859.14	18,300,889,076.00	14,693,725,175.82	5,000,000,000.00	271,437,358.00	8,766,666,667.00	8,520,000,000.00	0.00	0.00
01 02	Komunikasi dan Informatika	8,600,303,662.00	7,875,920,264.66	1,483,570,875.00	1,436,942,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04	Sekretariat Daerah	65,291,932,888.00	59,225,308,015.05	9,672,200,881.00	8,546,079,867.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04	Sekretariat DPRD	36,236,588,552.00	30,428,482,868.00	4,254,948,000.00	2,157,340,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	Pencananaan	6,879,281,898.00	6,158,652,204.00	133,413,000.00	88,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	Keuangan	18,108,000,623.00	15,838,050,200.00	488,162,620.00	466,037,863.00	5,000,000,000.00	271,437,358.00	8,766,666,667.00	8,520,000,000.00	0.00	0.00
01 05	Kepagawaban	7,790,600,885.00	7,152,660,630.00	151,575,000.00	135,526,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 06	Inspektorat	8,271,310,882.00	7,188,556,121.00	201,990,000.00	139,890,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 07	Administrasi Pemerintahan (Perencanaan)	44,288,433,761.00	41,790,273,466.43	1,815,118,700.00	1,622,997,389.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Keterlibatan dan Keamanan	37,825,117,479.00	34,515,016,731.00	1,693,875,560.00	1,527,990,147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01	Kerentanan dan Keterlibatan Umum serta Perencanaan Masyarakat	32,236,869,253.00	29,860,932,673.00	1,497,225,560.00	1,305,298,147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06	Kesatuan Bangsa dan Politik	5,588,248,226.00	4,654,084,058.00	246,650,000.00	221,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Ekonomi	65,614,987,828.00	59,233,621,921.42	4,677,240,116.00	3,694,382,938.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02	Pertubuhan	14,268,521,494.00	13,175,254,352.26	885,941,030.00	290,360,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23,216,564,186.00	20,727,426,867.00	3,207,244,116.00	2,876,694,087.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02	Pesananan Modal	12,885,868,593.00	11,688,591,711.00	262,089,000.00	256,615,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03	Pertanian	15,263,953,605.00	13,621,348,991.16	321,866,000.00	270,711,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Perencanaan Lingkungan Hidup	36,911,145,583.00	32,887,283,868.65	5,418,443,530.00	5,340,780,347.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 02	Lingkungan Hidup	36,911,145,583.00	32,887,283,868.65	5,418,443,530.00	5,340,780,347.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6/1/22



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK TA 2022**

**A. PERHITUNGAN BELANJA BAGI HASIL DAN/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH/ DESA**

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
<b>1.</b>	<b>Penerimaan</b>			
	Dana Transfer Umum			
	a. DAU	415.488.236.540,00	415.488.236.540,00	100,00
	b. DBH	15.893.149.200,00	15.893.149.200,00	100,00
	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>431.381.385.740,00</b>	<b>431.381.385.740,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>Pengurang</b>			
	a. DBH CHT	38.233.200,00	36.686.290,00	95,95
	b. DBH DR	-	-	
	c. ADD	-	-	
	<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>38.233.200,00</b>	<b>36.686.290,00</b>	<b>95,95</b>
<b>3.</b>	<b>Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan</b>	<b>431.343.152.540,00</b>	<b>431.344.699.450,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH</b>				
No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
<b>1.</b>	<b>a) Belanja Modal</b>			
	1) Tanah	-	-	
	2) Peralatan dan Mesin	22.417.171.549,00	22.417.171.549,00	100,00
	3) Bangunan dan Gedung	17.484.960.216,00	17.484.960.216,00	100,00
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.169.247.696,00	28.169.247.696,00	100,00
	5) Aset Tetap Lainnya	138.000.000,00	138.000.000,00	100,00
	6) Aset Lainnya	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00
<b>2.</b>	Belanja Pemeliharaan	10.113.377.694,00	10.113.377.694,00	100,00
<b>3.</b>	Belanja Hibah	42.527.627.526,00	40.192.987.711,16	94,51
<b>4.</b>	Belanja Bantuan Sosial	2.255.000.000,00	2.230.000.000,00	98,89
<b>5.</b>	Belanja Bantuan Keuangan	8.520.000.000,00	8.520.000.000,00	100,00
	<b>Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah</b>	<b>131.750.384.681,00</b>	<b>129.390.744.866,16</b>	
	<b>Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya bersifat Umum</b>	<b>30,54</b>	<b>30,00</b>	<b>-</b>



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING BIDANG KESEHATAN TA 2022**

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
<b>1.</b>	<b>a. Belanja pada Dinas Kesehatan</b>	<b>110.922.929.837,00</b>	<b>89.915.816.408,14</b>	<b>81,06</b>
	1) Belanja Operasi:	80.837.155.651,00	69.169.066.868,00	85,57
	a. Belanja Pegawai	44.903.578.794,00	38.782.842.116,00	86,37
	b. Belanja Barang dan Jasa	35.383.576.857,00	29.836.274.752,00	84,32
	c. Belanja Hibah	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	2) Belanja Modal	30.085.774.186,00	20.746.749.540,14	68,96
	<b>b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:</b>	<b>1.850.609.446,00</b>	<b>1.721.220.895,00</b>	<b>93,01</b>
	1) Belanja Transfer :	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
	2) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan IKBP/K pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	121.500.000,00	121.290.300,00	99,83
	Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program			
	KKBP/K untuk Petugas Keluarga Berencana/Periyuluh pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/Lapangan Keluarga Berencana (PKS/PLKB)	55.474.000,00	54.911.400,00	98,99
	4) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.168.106.546,00	1.145.709.367,00	98,08
	6) Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55.514.800,00	45.005.875,00	81,07
	7) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program IKBP/K di Kampung KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	267.408.600,00	180.090.525,00	67,35
	8) Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	103.590.000,00	96.839.800,00	93,57
<b>2.</b>	<b>Anggaran Kesehatan (a+b)</b>	<b>79.105.500,00</b>	<b>77.373.628,00</b>	<b>97,81</b>
<b>3.</b>	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>112.773.539.283,00</b>	<b>91.637.037.303,14</b>	<b>81,26</b>
<b>4.</b>	<b>Gaji ASN</b>	<b>847.424.062.076,00</b>	<b>744.059.199.525,66</b>	<b>87,80</b>
<b>5.</b>	<b>Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)</b>	<b>171.961.833.253,00</b>	<b>165.379.234.960,00</b>	<b>96,17</b>
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	16,70	15,84	85,67

Bukittinggi, 16 Agustus 2023  
**WALIKOTA BUKITTINGGI**



ERMIN SAFAR



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING BIDANG PENDIDIKAN TA 2022**

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
<b>1.</b>	<b>a. Belanja pada Dinas Pendidikan</b>	<b>185.473.871.670,00</b>	<b>178.848.678.343,00</b>	
	1) Belanja Operasi:	160.786.452.407,00	154.301.303.784,00	95,97
	a. Belanja Pegawai	110.230.066.134,00	103.744.917.511,00	94,12
	b. Belanja Barang dan Jasa	37.380.961.273,00	37.380.961.273,00	100,00
	c. Belanja Hibah	13.175.425.000,00	13.175.425.000,00	100,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	2) Belanja Modal	24.687.419.263,00	24.547.374.559,00	99,43
	<b>b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang</b>	<b>12.302.596.667,00</b>	<b>11.785.930.000,00</b>	
	1) Belanja Transfer : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Sumbar Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian	8.766.666.667,00	8.250.000.000,00	94,11
	2) Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah	3.535.930.000,00	3.535.930.000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)</b>	<b>197.776.468.337,00</b>	<b>190.634.608.343,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>847.424.062.076,00</b>	<b>744.059.199.525,66</b>	
	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	23,34	25,62	



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Realisasi
A	A.SPM Bidang Pendidikan			
1	Pendidikan Dasar			
		Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/VTU Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Alat Rumah Tenaga Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengadaan Perlengkapan Siswa Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Penyelenggaraan Dana BOS Sekolah Dasar	5.044.713.672,00 650.163.500,00 133.935.000,00 122.412.000,00 1.327.495.000,00 559.450.000,00 155.280.000,00 241.504.250,00 946.560.000,00 - 100.000.000,00 5.391.000.000,00 1.143.115.000,00 105.668.800,00 309.994.750,00 9.590.447.600,00 265.949.800,00 771.445.900,00 14.467.500.000,00	5.030.945.124,61 646.666.911,21 133.628.737,07 122.109.917,78 1.315.855.571,02 554.600.250,00 151.794.666,20 237.300.000,00 945.693.600,00 - 100.000.000,00 5.305.774.741,00 962.703.091,00 93.361.410,00 287.489.121,00 9.037.968.694,00 265.788.920,00 735.127.950,00 14.198.364.182,00
		<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>41.326.635.272,00</b>	<b>40.145.112.886,89</b>
		<b>Jumlah Pendidikan Dasar</b>	<b>41.326.635.272,00</b>	<b>40.145.112.886,89</b>
	Pendidikan Kesetaraan			
		Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	129.100.000,00 34.190.000,00 99.010.000,00 - 331.934.920,00 28.775.000,00 21.479.500,00 719.000.000,00	107.777.461,23 34.190.000,00 91.625.282,00 - 321.754.790,00 26.060.000,00 18.311.850,00 718.999.798,00
		<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>1.363.489.420,00</b>	<b>1.318.719.181,23</b>
		<b>Jumlah Pendidikan Kesetaraan</b>	<b>1.363.489.420,00</b>	<b>1.318.719.181,23</b>

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Realisasi
	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pengadaan Mebel PAUD Pengadaan Perlengkapan PAUD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Penyapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pembinaan Kolembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD	322.810.000,00 - 54.300.000,00 - 193.399.992,00 47.430.000,00 3.483.400.936,00 19.317.000,00 3.058.717.200,00 2.174.751.000,00 9.354.134.128,00 9.354.134.128,00	310.470.118,56 - 53.647.150,00 - 179.803.476,00 - 3.449.927.870,00 18.938.900,00 3.026.645.779,00 2.177.535.000,00 9.216.968.293,56 9.216.968.293,56
		<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>9.354.134.128,00</b>	<b>9.216.968.293,56</b>
		<b>Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>9.354.134.128,00</b>	<b>9.216.968.293,56</b>
		<b>Jumlah SPM Bidang Pendidikan</b>	<b>52.044.258.820,00</b>	<b>50.680.800.361,68</b>
<b>2</b>	<b>B SPM Bidang Kesehatan</b>			
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	187.130.000,00	171.751.840,00
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> <b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>	<b>187.130.000,00</b> <b>187.130.000,00</b>	<b>171.751.840,00</b> <b>171.751.840,00</b>
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	173.101.164,00	102.799.711,00
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> <b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>	<b>173.101.164,00</b> <b>173.101.164,00</b>	<b>102.799.711,00</b> <b>102.799.711,00</b>
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	119.288.000,00	110.736.320,00
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> <b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>	<b>119.288.000,00</b> <b>119.288.000,00</b>	<b>110.736.320,00</b> <b>110.736.320,00</b>

849

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sesuai Perubahan)	Realisasi
	Pelayanan Kesehatan Balita	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	89.800.000,00	70.881.769,00
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>89.800.000,00</b>	<b>70.881.769,00</b>
		<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita</b>	<b>89.800.000,00</b>	<b>70.881.769,00</b>
	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.956.000,00	18.015.350,00
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>19.956.000,00</b>	<b>18.015.350,00</b>
		<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>	<b>19.956.000,00</b>	<b>18.015.350,00</b>
	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3.320.000,00	3.246.800,00
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.246.800,00</b>
		<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.246.800,00</b>
	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	140.045.000,00	131.214.713,00
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>140.045.000,00</b>	<b>131.214.713,00</b>
		<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>	<b>140.045.000,00</b>	<b>131.214.713,00</b>
	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6.533.500,00	5.888.840,00
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.533.500,00</b>	<b>5.888.840,00</b>
		<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>	<b>6.533.500,00</b>	<b>5.888.840,00</b>
	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus</b>	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	37.352.000,00	36.847.100,00
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>37.352.000,00</b>	<b>36.847.100,00</b>
		<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus</b>	<b>37.352.000,00</b>	<b>36.847.100,00</b>
	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</b>	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.668.900,00	7.998.600,00
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.668.900,00</b>	<b>7.998.600,00</b>
		<b>Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</b>	<b>9.668.900,00</b>	<b>7.998.600,00</b>

AA

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Realisasi	
3	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.551.000,00	12.094.750,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.551.000,00	12.094.750,00	
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	16.551.000,00	12.094.750,00	
		Jumlah Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	319.444.318,00	260.689.867,00	
	C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	319.444.318,00	260.689.867,00	
		Jumlah Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	319.444.318,00	260.689.867,00	
	4	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1.122.181.882,00	932.165.660,00
			Jumlah SPM Bidang Kesehatan		
		C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	16.553.500,00	14.896.430,00	
Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		Fasilitas Penyediaan Kerja Sama SPAM	71.800.000,00	51.067.226,00	
		Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	88.353.500,00	65.963.656,00	
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	88.353.500,00	65.963.656,00	
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	329.900.000,00	287.805.680,40		
Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pembangunan/penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT				
	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	329.900.000,00	287.805.680,40		
E SPM Bidang Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	329.900.000,00	287.805.680,40		
	Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	418.253.500,00	353.769.336,40		
Pelayanan ketertarikan dan ketertarikan Umum	Perencanaan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Petrol, Pengamanan, dan Pengawasan	1.927.640.000,00	1.516.712.704,00		
Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Penilaian atau Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum Berdasarkan Verda dan Perbeda melalui Penertiban dan Pengawasan Unjuk Rasa dan Kerasuhan Massa	9.034.220.106,00	8.561.570.814,00		
	Jumlah Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.961.860.106,00	10.078.283.518,00		
Jumlah Pelayanan ketertarikan dan ketertarikan Umum			10.961.860.106,00	10.078.283.518,00	

8  
19

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Realisasi
	Pelayanan informasi rawan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sosialiasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	47.414.700,00	47.397.200,00
		<b>Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>47.414.700,00</b>	<b>47.397.200,00</b>
		<b>Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana</b>	<b>47.414.700,00</b>	<b>47.397.200,00</b>
	<b>Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Pengebalaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Penguatan Kapasitas Kawasas untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penyediaan Pascatbencana Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tim Resaki Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	282.342.950,00 1.008.973.646,00	265.426.000,00 1.008.784.137,00
		<b>Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>1.892.105.616,00</b>	<b>1.851.064.470,00</b>
		<b>Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>1.892.105.616,00</b>	<b>1.851.064.470,00</b>
	<b>Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	8.875.000,00	8.852.250,00
		<b>Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>8.875.000,00</b>	<b>8.852.250,00</b>
		<b>Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>8.875.000,00</b>	<b>8.852.250,00</b>
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Peninggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Pemeliharaan Aparatur Pemadam Kebakaran Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	295.572.900,00 2.007.360.278,00 52.755.000,00 274.451.560,00 85.617.790,00	253.900.921,67 1.789.769.101,00 59.310.301,00 223.005.000,00 84.777.700,00

8  
AA

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Realisasi
		Penyenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbasis, antar Lembaga, dan Kerjasama dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Korban dan Penyelamatan Non Korban	163.552.000,00	139.047.350,00
	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Keluaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.839.309.038,00	2.549.810.372,67
	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		2.839.309.038,00	2.549.810.372,67
	Jumlah SPM Bidang Ketertarikan dan Keterlibatan Umum		15.749.564.460,00	14.535.407.810,67
5	F SPM Bidang Sosial			
	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar negeri			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Negeri Sosial		117.067.750,00	96.795.400,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		174.644.000,00	155.123.380,00
	Pemberian Layanan Duta dan Pengalihan			
	Pemberian Layanan Keadaratan		122.284.000,00	87.268.847,00
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
	Pemberian Layanan rujukan		136.729.992,00	111.886.897,00
	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di		550.725.742,00	451.074.524,00
	Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar		550.725.742,00	451.074.524,00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial			
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		100.000.000,00	40.171.300,00
	Penyediaan Makanan			
	Penyediaan Sandang			
	Pelayanan Dukung Psikososial		110.344.500,00	67.090.640,00
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		210.344.500,00	107.261.840,00
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		210.344.500,00	107.261.840,00
	Jumlah SPM Bidang Sosial		761.070.242,00	558.336.364,00

Bukittinggi, 16 Agustus 2023  
WALIKOTA BUKITTINGGI



ERMAH SAFAR



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT  
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/ BERKURANG	(%)
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	714.157.721.650,00	698.402.386.323,22	15.755.335.326,78	97,79
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	136.257.791.456,00	130.796.925.183,85	5.460.866.272,15	95,99
4.1.1	<b>Pajak Daerah</b>	50.389.862.282,00	49.570.790.398,00	819.071.894,00	98,61
4.1.1.06	<b>Pajak Hotel</b>	16.132.306.060,00	16.203.199.513,00	(70.893.453,00)	100,44
4.1.1.06.01	<b>Pajak Hotel</b>	15.979.000.000,00	16.148.312.295,00	(169.312.295,00)	101,06
4.1.1.06.01.0001	<b>Pajak Hotel</b>	15.979.000.000,00	16.148.312.295,00	(169.312.295,00)	101,06
4.1.1.06.07	<b>Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya</b>	150.000.000,00	51.294.718,00	98.705.282,00	34,20
4.1.1.06.07.0001	<b>Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya</b>	150.000.000,00	51.294.718,00	98.705.282,00	34,20
4.1.1.06.08	<b>Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)</b>	3.300.000,00	3.552.500,00	(252.500,00)	107,65
4.1.1.06.08.0001	<b>Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)</b>	3.300.000,00	3.552.500,00	(252.500,00)	107,65
4.1.1.07	<b>Pajak Restoran</b>	8.532.186.156,00	6.907.203.972,00	1.624.982.184,00	80,95
4.1.1.07.01	<b>Pajak Restoran dan Sejenisnya</b>	7.532.186.156,00	6.408.174.324,00	1.104.011.832,00	85,34
4.1.1.07.01.0001	<b>Pajak Restoran dan Sejenisnya</b>	7.532.186.156,00	6.408.174.324,00	1.104.011.832,00	85,34
4.1.1.07.02	<b>Pajak rumah Makan dan Sejenisnya</b>	400.000.000,00	223.719.530,00	176.280.470,00	55,93
4.1.1.07.02.0001	<b>Pajak rumah Makan dan Sejenisnya</b>	400.000.000,00	223.719.530,00	176.280.470,00	55,93
4.1.1.07.07	<b>Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya</b>	600.000.000,00	255.310.118,00	344.689.882,00	42,55
4.1.1.07.07.0001	<b>Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya</b>	600.000.000,00	255.310.118,00	344.689.882,00	42,55
4.1.1.08	<b>Pajak Hiburan</b>	1.088.022.310,00	1.064.246.805,00	23.775.505,00	92,30
4.1.1.08.01	<b>Pajak Hiburan Film</b>	14.500.000,00	4.188.750,00	10.311.250,00	28,89
4.1.1.08.01.0001	<b>Pajak Hiburan Film</b>	14.500.000,00	4.188.750,00	10.311.250,00	28,89
4.1.1.08.05	<b>Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya</b>	10.000.000,00	563.500,00	9.436.500,00	5,64
4.1.1.08.05.0001	<b>Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya</b>	10.000.000,00	563.500,00	9.436.500,00	5,64
4.1.1.08.07	<b>Pajak Permainan Bilur dan Bowling</b>	20.000.000,00	2.470.500,00	17.529.500,00	12,35
4.1.1.08.07.0001	<b>Pajak Permainan Bilur dan Bowling</b>	20.000.000,00	2.470.500,00	17.529.500,00	12,35
4.1.1.08.08	<b>Pajak Pacuan Kuda, Kendaran Bermotor, dan Permainan Kelayuhan</b>	1.088.022.310,00	990.419.677,00	98.002.633,00	96,30

6/4



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
4.1.1.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kordaman Bemerlar, dan Permainan Kembang-kembangan	1.028.512.310,00	900.419.677,00	38.092.633,00	96,30
4.1.1.08.09	Pajak Partai Pijat, Reflexologi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	15.010.000,00	6.604.378,00	8.405.622,00	44,00
4.1.1.08.09.0001	Pajak Partai Pijat, Reflexologi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	15.010.000,00	6.604.378,00	8.405.622,00	44,00
4.1.1.09	Pajak Reklame	860.800.000,00	967.282.188,00	(106.482.188,00)	112,37
4.1.1.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Alatstray/Megatron	800.000.000,00	842.561.688,00	(42.561.688,00)	105,32
4.1.1.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Alatstray/Megatron	800.000.000,00	842.561.688,00	(42.561.688,00)	105,32
4.1.1.09.02	Pajak Reklame Kain	30.500.000,00	112.420.500,00	(81.920.500,00)	368,59
4.1.1.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	30.500.000,00	112.420.500,00	(81.920.500,00)	368,59
4.1.1.09.05	Pajak Reklame Berjalan	30.300.000,00	12.300.000,00	18.000.000,00	40,59
4.1.1.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	30.300.000,00	12.300.000,00	18.000.000,00	40,59
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	6.074.398.220,00	6.268.267.602,00	(193.929.382,00)	103,19
4.1.1.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	6.074.398.220,00	6.268.267.602,00	(193.929.382,00)	103,19
4.1.1.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	6.074.398.220,00	6.268.267.602,00	(193.929.382,00)	103,19
4.1.1.11	Pajak Parkir	400.000.000,00	322.475.568,00	77.524.432,00	80,62
4.1.1.11.01	Pajak Parkir	400.000.000,00	322.475.568,00	77.524.432,00	80,62
4.1.1.11.01.0001	Pajak Parkir	400.000.000,00	322.475.568,00	77.524.432,00	80,62
4.1.1.12	Pajak Air Tanah	70.000.000,00	76.075.811,00	(6.075.811,00)	108,68
4.1.1.12.01	Pajak Air Tanah	70.000.000,00	76.075.811,00	(6.075.811,00)	108,68
4.1.1.12.01.0001	Pajak Air Tanah	70.000.000,00	76.075.811,00	(6.075.811,00)	108,68
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan dan Perikanan (PBBP2)	4.090.100.000,00	3.925.523.043,00	164.576.957,00	95,98
4.1.1.15.01	PBBP2	4.090.100.000,00	3.925.523.043,00	164.576.957,00	95,98
4.1.1.15.01.0001	PBBP2	4.090.100.000,00	3.925.523.043,00	164.576.957,00	95,98
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Zonas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.022.105.576,00	13.896.515.896,00	(874.410.320,00)	116,71
4.1.1.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	13.022.105.576,00	13.480.085.896,00	(457.980.320,00)	103,52
4.1.1.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	13.022.105.576,00	13.480.085.896,00	(457.980.320,00)	103,52
4.1.1.16.02	BPHTB-Pembelian Hak Baru	0,00	416.430.000,00	(416.430.000,00)	0,00
4.1.1.16.02.0001	BPHTB-Pembelian Hak Baru	0,00	416.430.000,00	(416.430.000,00)	0,00
4.1.2	Retribusi Daerah	48.684.034.000,00	46.662.398.969,00	2.021.635.031,00	95,85
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	7.135.364.000,00	7.545.948.790,00	(410.584.790,00)	105,75

819

KODE REKENING	UMILAN	AMGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/ BERKURANG	(%)
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	550.000.000,00	705.272.000,00	(159.272.000,00)	128,96
4.1.2.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	170.451.000,00	144.494.000,00	25.957.000,00	84,77
4.1.2.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	379.549.000,00	564.778.000,00	(185.229.000,00)	148,80
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.550.864.000,00	1.531.797.690,00	19.066.310,00	98,77
4.1.2.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.550.864.000,00	1.531.797.690,00	19.066.310,00	98,77
4.1.2.01.03	Retribusi Pelayanan Pemukiman dan Pengabsahan Mayat	5.000.000,00	2.275.000,00	2.725.000,00	45,50
4.1.2.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurutan serta Pemakaman/Pengabsahan Mayat	5.000.000,00	2.275.000,00	2.725.000,00	45,50
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	1.305.794.000,00	194.206.000,00	87,05
4.1.2.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	1.305.794.000,00	194.206.000,00	87,05
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.272.500.000,00	1.316.076.600,00	(43.576.600,00)	103,42
4.1.2.01.05.0001	Retribusi Pelataran	572.500.000,00	602.476.500,00	(29.976.500,00)	105,24
4.1.2.01.05.0002	Retribusi Los	550.000.000,00	566.519.350,00	(16.519.350,00)	103,00
4.1.2.01.05.0003	Retribusi Kos	150.000.000,00	147.080.750,00	2.919.250,00	98,05
4.1.2.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kalus	2.000.000.000,00	2.212.882.000,00	(212.882.000,00)	110,64
4.1.2.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kalus	2.000.000.000,00	2.212.882.000,00	(212.882.000,00)	110,64
4.1.2.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	7.000.000,00	8.165.500,00	(1.165.500,00)	116,71
4.1.2.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat Ukur, Timbang, dan Perengkapannya	7.000.000,00	8.165.500,00	(1.165.500,00)	116,71
4.1.2.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Memara Telekomunikasi	250.000.000,00	459.680.000,00	(209.680.000,00)	183,87
4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Memara Telekomunikasi	250.000.000,00	459.680.000,00	(209.680.000,00)	183,87
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	41.374.500.000,00	38.912.836.534,00	2.421.663.466,00	94,14
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	232.000.000,00	177.292.800,00	54.707.200,00	76,42
4.1.2.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	152.000.000,00	91.910.900,00	60.089.100,00	60,47
4.1.2.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	10.000.000,00	10.030.000,00	(30.000,00)	100,30
4.1.2.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	70.000.000,00	75.351.900,00	(5.351.900,00)	107,65
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Perbaikan	6.800.000.000,00	8.941.077.094,00	858.922.506,00	91,24
4.1.2.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Sebagai Jenis Barang yang Didistribusikan	6.300.000.000,00	7.424.287.540,00	875.732.460,00	89,45
4.1.2.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Perbaikan yang Didistribusikan	1.500.000.000,00	1.516.889.554,00	(16.889.554,00)	101,12
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	182.500.000,00	190.204.000,00	(7.704.000,00)	104,22

9/19

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
4.1.2.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	182.500.000,00	190.204.000,00	(7.704.000,00)	104,22
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.000.000.000,00	1.542.814.000,00	457.186.000,00	77,14
4.1.2.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	2.000.000.000,00	1.542.814.000,00	457.186.000,00	77,14
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	240.000.000,00	241.040.000,00	(1.040.000,00)	100,43
4.1.2.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	240.000.000,00	241.040.000,00	(1.040.000,00)	100,43
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	28.000.000.000,00	27.746.558.055,00	1.053.441.945,00	96,34
4.1.2.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	28.000.000.000,00	27.746.558.055,00	1.053.441.945,00	96,34
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	80.000.000,00	73.850.585,00	6.149.415,00	92,31
4.1.2.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah berupa Biskuit Tembak	45.000.000,00	38.500.000,00	6.500.000,00	85,56
4.1.2.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah berupa Biskuit atau Biskuit Ikan	35.000.000,00	35.350.585,00	(350.585,00)	101,00
4.1.2.03	Retribusi Perairan Tertentu	214.170.000,00	203.613.645,00	10.556.355,00	95,07
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	180.000.000,00	174.393.645,00	5.606.355,00	96,89
4.1.2.03.01.0001	Retribusi Pembiaran Izin Mendirikan Bangunan	180.000.000,00	174.393.645,00	5.606.355,00	96,89
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Trayek atau Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	34.170.000,00	29.220.000,00	4.950.000,00	85,51
4.1.2.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	34.170.000,00	29.220.000,00	4.950.000,00	85,51
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.505.000.000,00	6.641.291.925,00	863.708.075,00	88,49
4.1.3.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemertah Daerah (Dividen) atas Pemertahan Modal pada BMD	7.505.000.000,00	6.641.291.925,00	863.708.075,00	88,49
4.1.3.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemertah Daerah (Dividen) atas Pemertahan Modal pada BMD (Lembaga Keuangan)	7.505.000.000,00	6.641.291.925,00	863.708.075,00	88,49
4.1.3.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemertah Daerah (Dividen) atas Pemertahan Modal pada BMD (Lembaga Keuangan)	7.505.000.000,00	6.641.291.925,00	863.708.075,00	88,49
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	29.708.905.194,00	27.922.483.891,85	1.875.421.302,15	93,70
4.1.4.01	Hasil Penyjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	214.186.000,00	35.000.000,00	179.286.000,00	16,76
4.1.4.01.06	Hasil Penyjualan Asat Lainnya	214.186.000,00	35.000.000,00	179.286.000,00	16,76
4.1.4.01.06.0002	Hasil Penyjualan Asat Lainnya-Aset Lain-Lain	214.186.000,00	35.000.000,00	179.286.000,00	16,76
4.1.4.03	Hasil Pemertahan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.067.000.000,00	632.752.049,00	434.247.951,00	59,31
4.1.4.03.01	Hasil Sewa BMD	345.000.000,00	542.229.200,00	(197.229.200,00)	157,17
4.1.4.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	345.000.000,00	542.229.200,00	(197.229.200,00)	157,17
4.1.4.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	722.000.000,00	90.562.949,00	631.437.051,00	12,54
4.1.4.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	722.000.000,00	90.562.949,00	631.437.051,00	12,54

119

KODE REKENING	URAIAN	AMGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
4.1.4.05	Jasa Giro	4.650.000.000,00	2.679.172.499,00	2.010.827.511,00	56,76
4.1.4.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.650.000.000,00	2.452.034.940,00	2.197.965.100,00	51,73
4.1.4.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.650.000.000,00	2.452.034.940,00	2.197.965.100,00	52,73
4.1.4.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	133.819.493,00	(133.819.493,00)	0,00
4.1.4.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	133.819.493,00	(133.819.493,00)	0,00
4.1.4.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BCS	0,00	45.444.737,00	(45.444.737,00)	0,00
4.1.4.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BCS	0,00	45.444.737,00	(45.444.737,00)	0,00
4.1.4.05.05	Jasa Giro Dana Keptasi pada PKTP	0,00	7.873.419,00	(7.873.419,00)	0,00
4.1.4.05.05.0001	Jasa Giro Dana Keptasi pada PKTP	0,00	7.873.419,00	(7.873.419,00)	0,00
4.1.4.07	Pendapatan Bunga	5.750.000.000,00	4.244.628.513,40	1.505.371.486,60	73,82
4.1.4.07.01	Pendapatan Bunga atas Persempitan Uang Pemerintah Daerah	5.750.000.000,00	4.244.628.513,40	1.505.371.486,60	73,82
4.1.4.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Persempitan Uang Pemerintah Daerah	5.750.000.000,00	4.244.628.513,40	1.505.371.486,60	73,82
4.1.4.08	Penerimaan atas Turun-turun Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	0,00
4.1.4.08.02	Turtun-turun Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	0,00
4.1.4.08.02.0001	Turtun-turun Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	0,00
4.1.4.09	Penerimaan Koneksi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	142.636.531,00	(142.636.531,00)	0,00
4.1.4.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	142.636.531,00	(142.636.531,00)	0,00
4.1.4.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	142.636.531,00	(142.636.531,00)	0,00
4.1.4.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	191.880.143,75	(191.880.143,75)	0,00
4.1.4.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	191.880.143,75	(191.880.143,75)	0,00
4.1.4.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	191.880.143,75	(191.880.143,75)	0,00
4.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	125.000.000,00	334.802.457,00	(209.802.457,00)	267,84
4.1.4.12.05	Pendapatan Denda Pajak Hotel	25.000.000,00	23.794.581,00	1.265.419,00	94,94
4.1.4.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	25.000.000,00	23.625.631,00	1.374.369,00	94,50
4.1.4.12.06.0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	108.950,00	(108.950,00)	0,00
4.1.4.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	40.000.000,00	11.849.168,00	28.150.832,00	29,62
4.1.4.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.000.000,00	8.051.047,00	6.948.953,00	57,07
4.1.4.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	15.000.000,00	1.752.737,00	13.247.263,00	11,60
4.1.4.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	311.310,00	(311.310,00)	0,00
4.1.4.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Watering dan Sejenisnya	10.000.000,00	1.134.074,00	8.865.926,00	11,34

879

KODE REKENING	URAIAN	AMCIBARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/ BERKURANG	(%)
4.1.4.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	1.021.950,00	(1.021.950,00)	0,00
4.1.4.12.08.0001	Pendapatan Denda Pajak Trenaman Film	0,00	458.250,00	(458.250,00)	0,00
4.1.4.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Olahraga, Karaoke, Klub Malam, dan Selentingan	0,00	79.380,00	(79.380,00)	0,00
4.1.4.12.08.0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Billar dan Bowling	0,00	214.020,00	(214.020,00)	0,00
4.1.4.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kenderaan Bermotor, dan Permainan Kandang-kandang	0,00	150.000,00	(150.000,00)	0,00
4.1.4.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Parkir, Restoran, Mudi, Lany/Sipa, dan Pusat Kebudayaan (Fitness Center)	0,00	118.500,00	(118.500,00)	0,00
4.1.4.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	1.382.400,00	(1.382.400,00)	0,00
4.1.4.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	0,00	1.382.400,00	(1.382.400,00)	0,00
4.1.4.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	29.096,00	(29.096,00)	0,00
4.1.4.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	29.096,00	(29.096,00)	0,00
4.1.4.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	5.981,00	(5.981,00)	0,00
4.1.4.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	5.981,00	(5.981,00)	0,00
4.1.4.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	60.000.000,00	296.779.281,00	(236.779.281,00)	494,63
4.1.4.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	60.000.000,00	296.779.281,00	(236.779.281,00)	494,63
4.1.4.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	180.043.745,00	(180.043.745,00)	0,00
4.1.4.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	18.067.272,00	(18.067.272,00)	0,00
4.1.4.13.01.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemusnahan/Kuburan	0,00	6.090.105,00	(6.090.105,00)	0,00
4.1.4.13.01.0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	11.977.167,00	(11.977.167,00)	0,00
4.1.4.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	158.724.973,00	(158.724.973,00)	0,00
4.1.4.13.02.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Persewaan	0,00	158.724.973,00	(158.724.973,00)	0,00
4.1.4.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tertentu	0,00	3.251.500,00	(3.251.500,00)	0,00
4.1.4.13.03.0003	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	3.251.500,00	(3.251.500,00)	0,00
4.1.4.14	Pendapatan Hasil Eksekuasi atas Jaminan	0,00	671.001.216,00	(671.001.216,00)	0,00
4.1.4.14.01	Hasil Eksekuasi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	671.001.216,00	(671.001.216,00)	0,00
4.1.4.14.01.0001	Hasil Eksekuasi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	671.001.216,00	(671.001.216,00)	0,00
4.1.4.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.554.417.406,00	2.663.715.363,70	(109.297.957,70)	104,28
4.1.4.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kreditan Pembayaran Cukai dan Tunjangan	2.554.417.406,00	72.108.440,00	2.482.228.978,00	2,83
4.1.4.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kreditan Pembayaran Cukai dan Tunjangan	2.554.417.406,00	72.108.440,00	2.482.228.978,00	2,83
4.1.4.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kreditan Pembayaran Persewaan Dinas	0,00	1.203.449.503,00	(1.203.449.503,00)	0,00

8 14

KODE REKENING	URAIAN	AMGABAH 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
4.1.4.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Denda Hengat-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	1.203.449.603,00	(1.203.449.603,00)	0,00
4.1.4.15.05	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	0,00	1.388.077.312,70	(1.388.077.312,70)	0,00
4.1.4.15.05.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	0,00	1.388.077.312,70	(1.388.077.312,70)	0,00
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	15.438.301.768,00	16.155.511.384,00	(717.209.616,00)	104,65
4.1.4.16.01	Pendapatan BLUD	15.438.301.768,00	16.155.511.384,00	(717.209.616,00)	104,65
4.1.4.16.01.0001	Pendapatan BLUD	15.438.301.768,00	16.155.511.384,00	(717.209.616,00)	104,65
4.1.4.18	Pendapatan Dana Kapital Jaminan Kesehatan Nasional (JKM) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.18.01	Pendapatan Dana Kapital JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapital JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	24.400.000,00	(24.400.000,00)	0,00
4.1.4.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	24.400.000,00	(24.400.000,00)	0,00
4.1.4.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	24.400.000,00	(24.400.000,00)	0,00
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	577.898.538.394,00	567.387.877.682,00	10.512.656.512,00	98,18
4.2.1	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	543.423.791.657,00	532.574.902.562,00	10.848.889.095,00	98,00
4.2.1.01	Dana Perimbangan	543.423.791.657,00	532.574.902.562,00	10.848.889.095,00	98,00
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.894.532.800,00	18.945.474.525,00	(3.050.942.525,00)	119,19
4.2.1.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.236.399.800,00	5.448.983.285,00	(1.210.584.285,00)	128,56
4.2.1.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7.129.180.000,00	8.172.246.258,00	(1.043.066.258,00)	114,63
4.2.1.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29(WFOPDH)	207.808.000,00	824.359.566,00	(446.533.566,00)	230,38
4.2.1.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (DHT)	39.616.000,00	41.567.633,00	(1.951.633,00)	104,93
4.2.1.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	625.805.000,00	691.066.752,00	(225.261.752,00)	116,00
4.2.1.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu bara-Landport	484.500.000,00	0,00	484.500.000,00	0,00
4.2.1.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu bara-Royalti	932.123.000,00	1.520.228.021,00	(588.105.021,00)	163,09
4.2.1.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Ponds Sumber Daya Hutan (PSDH)	128.712.000,00	128.712.000,00	0,00	100,00
4.2.1.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Jaran dan Usaha Pemeliharaan Hutan (JUPH)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	0,00	100,00
4.2.1.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	415.888.236.540,00	419.027.434.440,00	(3.539.197.900,00)	100,35
4.2.1.01.02.0001	DAU	415.888.236.540,00	419.027.434.440,00	(3.539.197.900,00)	100,85
4.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	49.076.996.961,00	38.100.592.208,00	10.976.404.753,00	77,63
4.2.1.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.927.876.000,00	2.765.333.475,00	162.542.525,00	94,45

819

KODE REKENING	URAIAN	AMCASAAM 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
4.2.1.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-OPF	1.290.738.000,00	1.079.508.470,00	2.11.229.530,00	82,09
4.2.1.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-OSB	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	596.710.000,00	590.176.390,00	6.533.610,00	98,91
4.2.1.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Pencapaian dan Penguatan Penyelenggara dan Sarifitil Total Berbasis Masyarakat	84.032.000,00	75.488.500,00	8.543.500,00	89,83
4.2.1.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	355.000.000,00	163.250.000,00	1.750.000,00	98,94
4.2.1.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar (K0)	431.064.000,00	361.564.000,00	69.500.000,00	83,88
4.2.1.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Pencapaian dan Penguatan Penyelenggara dan Sarifitil Total Berbasis Masyarakat	1.636.018.000,00	616.018.000,00	420.000.000,00	39,46
4.2.1.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	1.050.000.000,00	0,00	1.050.000.000,00	0,00
4.2.1.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	13.341.758.161,00	11.203.166.902,00	2.138.591.259,00	83,97
4.2.1.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Pengasasan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Pengasasan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kesehatan-Pengasasan-Lingkungan Hidup	3.837.000.000,00	3.215.162.700,00	621.837.292,00	84,23
4.2.1.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesehatan Sistem Kesehatan	24.336.000.000,00	18.050.023.763,00	6.285.976.237,00	74,17
4.2.1.01.04	Dana Transfer Khusus Dana Abkasi Khusus (DAK) Non Fisik	62.964.026.156,00	56.501.401.389,00	6.462.624.767,00	89,74
4.2.1.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	21.332.600.000,00	19.763.339.616,00	1.569.260.384,00	92,64
4.2.1.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PMSD	29.481.162.000,00	27.500.480.680,00	1.980.681.320,00	93,28
4.2.1.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamzil Guru PKSD	372.000.000,00	331.250.000,00	40.750.000,00	89,05
4.2.1.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.026.066.000,00	2.171.037.000,00	(144.951.000,00)	107,13
4.2.1.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesehatan	468.500.000,00	719.000.000,00	(250.500.000,00)	153,47
4.2.1.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.400.000.000,00	1.127.727.056,00	272.272.944,00	80,55
4.2.1.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOSK-BOK	840.250.056,00	1.641.381.161,00	(798.031.105,00)	194,79
4.2.1.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOSK-Pengembangan Obat dan Makanan	445.836.000,00	0,00	445.836.000,00	0,00
4.2.1.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOSK-Meritulasi Pustaka	2.580.019.500,00	0,00	2.580.019.500,00	0,00
4.2.1.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOSK-Jaminan Kesehatan	44.240.000,00	0,00	44.240.000,00	0,00
4.2.1.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOSK-BOKB	1.397.943.600,00	1.175.618.640,00	222.324.960,00	84,10
4.2.1.01.04.0016	DAK Non Fisik-PKZIRN	494.200.000,00	397.130.550,00	7.069.450,00	98,25
4.2.1.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	837.673.000,00	618.356.475,00	219.316.525,00	73,82
4.2.1.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	360.216.000,00	281.868.711,00	78.347.289,00	78,25
4.2.1.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perencanaan Perumahan dan Anak	451.000.000,00	312.582.000,00	139.218.000,00	69,19
4.2.1.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Kutuhan Pangan Dan Pertanian	510.000.000,00	461.429.500,00	48.570.500,00	90,48
4.2.1.02	Dana Transfer Daerah (DTD)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.01	DTD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.01.0001	DTD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.476.138.537,00	34.812.971.120,00	(336.832.583,00)	100,98

819

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	34.876.138.537,00	34.412.971.120,00	(336.832.583,00)	100,99
4.2.2.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	34.876.138.537,00	34.412.971.120,00	(336.832.583,00)	100,99
4.2.2.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.523.461.378,00	8.568.646.378,00	2.954.815.000,00	74,36
4.2.2.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.883.464.365,00	4.525.078.628,00	(1.641.614.263,00)	156,93
4.2.2.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.897.564.638,00	9.890.621.609,00	6.943.029,00	99,93
4.2.2.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	86.787.692,00	78.273.141,00	8.514.551,00	90,19
4.2.2.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.694.866.464,00	11.350.351.364,00	(1.665.490.900,00)	117,20
4.2.2.02	Bantuan Keuangan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00
4.2.2.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00
4.2.2.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SARI	0,00	217.587.457,37	(217.587.457,37)	6,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	217.587.457,37	(217.587.457,37)	6,00
4.3.3.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	217.587.457,37	(217.587.457,37)	6,00
4.3.3.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	5.667.500,00	(5.667.500,00)	6,00
4.3.3.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	5.667.500,00	(5.667.500,00)	6,00
4.3.3.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	211.919.957,37	(211.919.957,37)	6,00
4.3.3.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Bertanda Tulum Indonesia	0,00	211.919.957,37	(211.919.957,37)	6,00
5	BELANJA DAERAH	837.145.281.595,00	744.059.199.525,66	93.086.081.979,34	88,88
5.1	BELANJA OPERASI	675.622.845.486,00	611.262.131.931,10	64.160.713.554,90	90,50
5.1.1	Belanja Pegawai	325.444.707.669,00	301.384.096.541,66	24.060.611.127,34	92,61
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	171.487.216.916,00	165.379.234.960,00	6.108.081.956,00	96,44
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	127.611.797.186,00	123.488.603.270,00	4.123.193.916,00	96,77
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	126.791.898.866,00	122.698.636.570,00	4.093.262.296,00	96,77
5.1.1.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	819.898.320,00	789.966.700,00	29.931.620,00	96,35
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	12.360.034.035,00	11.889.147.101,00	470.886.934,00	96,19
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12.290.216.447,00	11.821.286.809,00	468.929.638,00	96,18
5.1.1.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	69.817.588,00	67.860.292,00	1.957.296,00	97,20
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.699.106.026,00	5.473.047.050,00	226.148.976,00	96,02
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.699.106.026,00	5.473.047.050,00	226.148.976,00	96,03
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.849.110.283,00	5.528.378.350,00	320.731.933,00	94,52

87A



KODE REKENCING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.758.594.263,00	5.438.510.350,00	300.083.933,00	94,44
5.1.1.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	90.516.000,00	89.868.000,00	648.000,00	99,28
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.614.322.564,00	2.474.240.000,00	140.082.564,00	94,64
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.614.322.564,00	2.474.240.000,00	140.082.564,00	94,64
5.1.1.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	7.604.653.392,00	7.327.093.090,00	327.560.302,00	95,77
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.596.547.528,00	7.273.067.770,00	323.480.158,00	95,74
5.1.1.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	58.105.864,00	54.025.320,00	4.080.144,00	92,96
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	252.863.834,00	233.682.004,00	19.181.830,00	92,41
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	248.401.799,00	221.563.315,00	18.838.484,00	92,16
5.1.1.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	12.462.035,00	12.118.689,00	343.346,00	97,24
5.1.1.01.08	Belanja Pembelian Gaji ASN	1.928.882,00	1.697.030,00	233.772,00	88,35
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembelian Gaji PNS	1.906.832,00	1.689.616,00	217.216,00	88,61
5.1.1.01.08.0002	Belanja Pembelian Gaji PPPK	13.970,00	7.414,00	6.556,00	53,07
5.1.1.01.09	Belanja Juran Jaminan Kesehatan ASN	8.362.753.866,00	7.949.089.416,00	413.662.450,00	95,05
5.1.1.01.09.0001	Belanja Juran Jaminan Kesehatan PNS	8.325.184.791,00	7.913.710.765,00	411.473.926,00	95,06
5.1.1.01.09.0002	Belanja Juran Jaminan Kesehatan PPPK	37.567.165,00	35.378.651,00	2.188.514,00	94,17
5.1.1.01.10	Belanja Juran Jaminan Kesehatan Kerja ASN	271.528.927,00	253.495.794,00	18.033.131,00	93,36
5.1.1.01.10.0001	Belanja Juran Jaminan Kesehatan Kerja PNS	268.570.467,00	251.821.820,00	16.748.647,00	93,76
5.1.1.01.10.0002	Belanja Juran Jaminan Kesehatan Kerja PPPK	2.958.460,00	1.673.974,00	1.284.484,00	56,58
5.1.1.01.11	Belanja Juran Jaminan Kesehatan ASN	809.137.991,00	760.761.853,00	48.376.138,00	94,02
5.1.1.01.11.0001	Belanja Juran Jaminan Kesehatan PNS	802.662.804,00	755.740.117,00	46.922.687,00	94,15
5.1.1.01.11.0002	Belanja Juran Jaminan Kesehatan PPPK	6.475.187,00	5.021.736,00	1.453.451,00	77,55
5.1.1.02	Belanja Pembiayaan Penghasilan ASN	88.722.711.128,00	82.495.178.895,66	6.227.532.232,34	92,96
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	46.628.341.890,00	37.752.146.200,66	2.876.195.689,34	92,97
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	31.985.239.260,00	37.732.417.666,66	2.232.821.601,34	94,41
5.1.1.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	663.102.622,00	15.728.614,00	643.374.008,00	2,98
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kriteria Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kriteria Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	0,00	0,00	0,00	0,00

819

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Preskabel Kerja ASN	48.094.359.238,00	44.743.032.615,00	3.351.326.623,00	93,03
5.1.1.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Preskabel Kerja PNS	48.059.281.233,00	44.710.412.795,00	3.348.768.438,00	93,03
5.1.1.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Preskabel Kerja PPPK	35.168.085,00	32.619.820,00	2.548.265,00	92,75
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektiv Lainnya ASN	65.648.577.534,00	39.577.406.240,00	6.075.171.294,00	60,69
5.1.1.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.962.024.603,00	1.345.893.879,00	496.130.724,00	73,06
5.1.1.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	989.596.030,00	475.205.201,00	114.300.059,00	80,66
5.1.1.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	308.811.920,00	185.352.681,00	122.659.239,00	60,18
5.1.1.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	35.450.104,00	18.227.105,00	17.222.999,00	51,42
5.1.1.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rekreasi	36.126.080,00	26.712.119,00	9.413.961,00	73,94
5.1.1.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	219.283.609,00	177.275.243,00	42.008.366,00	80,84
5.1.1.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	14.440.000,00	8.688.099,00	5.751.901,00	60,17
5.1.1.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	11.550.000,00	2.146.403,00	9.403.597,00	38,58
5.1.1.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	157.468.850,00	90.788.524,00	66.680.326,00	57,65
5.1.1.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bba Perumahan Hak atas Tanah dan Bangunan	478.098.810,00	361.448.504,00	108.649.506,00	76,89
5.1.1.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.061.279.308,00	767.432.934,00	293.846.404,00	72,31
5.1.1.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	16.125.000,00	16.125.000,00	0,00	100,00
5.1.1.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	32.756.640,00	22.701.711,00	10.054.929,00	69,30
5.1.1.03.02.0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemukiman dan Penggabungan Mayak bagi ASN	250,00%	0,00	250.000,00	0,00
5.1.1.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Perawatan dan Penggabungan Mayak Umum	61.536.303,00	35.486.250,00	26.050.183,00	57,67
5.1.1.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	29.954.650,00	29.927.400,00	27.250,00	99,91
5.1.1.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyediaan Kulkas yang Didukung oleh Pemertinan Daerah	47.080.000,00	47.038.000,00	42.000,00	99,91
5.1.1.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	227.500,00	227.125,00	375,00	99,84
5.1.1.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Memara Telekomunikasi	8.288.000,00	6.993.750,00	1.294.250,00	79,50
5.1.1.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kebijakan Daerah	4.345.400,00	2.852.000,00	1.493.400,00	65,63
5.1.1.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	210.692.000,00	184.749.600,00	45.942.400,00	88,08
5.1.1.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	8.275.995,00	5.847.252,00	2.428.743,00	70,65
5.1.1.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	66.677.270,00	15.081.600,00	53.596.170,00	21,96
5.1.1.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Pening Hewan	12.675.000,00	8.664.000,00	4.011.000,00	68,36
5.1.1.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	510.930.000,00	386.251.095,00	124.638.905,00	75,61
5.1.1.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pengujian Produk Uji Coba Daerah	2.600.000,00	2.118.000,00	482.000,00	81,46

819

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
5.1.1.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Izan Mendirikan Bangunan	25.000.000,00	2.425.500,00	22.574.500,00	9,70
5.1.1.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Izan Triayak untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.365.000,00	904.051,00	460.949,00	66,27
5.1.1.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PKSD	32.678.318.120,00	30.319.047.800,00	2.351.262.320,00	92,80
5.1.1.03.03.0001	Belanja TPG PKSD	32.678.318.120,00	30.319.047.800,00	2.351.262.320,00	92,80
5.1.1.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tambahan) Guru PKSD	408.750.000,00	334.000.000,00	66.750.000,00	83,34
5.1.1.03.05.0001	Belanja Tambahan Penghasilan (Tambahan) Guru PKSD	408.750.000,00	334.000.000,00	66.750.000,00	83,34
5.1.1.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	172.999.644,00	64.300.601,00	108.699.043,00	37,17
5.1.1.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	172.999.644,00	64.300.601,00	108.699.043,00	37,17
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	8.511.113.829,00	5.771.581.026,00	2.739.532.803,00	67,81
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Kawasan	6.966.263.829,00	5.132.856.526,00	1.833.407.303,00	73,68
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengabdian Sarang/Jasa	1.469.350.000,00	581.274.500,00	878.075.500,00	39,83
5.1.1.03.07.0003	Belanja Honorarium Peringkat Unit Kerja Pengabdian Barang dan Jasa (UKPRU)	85.900.000,00	57.450.000,00	28.450.000,00	66,88
5.1.1.03.08	Belanja Jasa Pengadaan BMD	980.700.000,00	971.206.000,00	18.500.000,00	98,13
5.1.1.03.08.0002	Belanja Jasa Pengadaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	980.700.000,00	971.206.000,00	18.500.000,00	98,13
5.1.1.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.496.815.894,00	9.845.462.007,00	646.353.887,00	93,84
5.1.1.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	580.000.000,00	547.395.000,00	32.635.000,00	94,37
5.1.1.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	580.000.000,00	547.395.000,00	32.635.000,00	94,37
5.1.1.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	50.000.000,00	45.870.300,00	4.129.700,00	91,74
5.1.1.04.02.0003	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	50.000.000,00	45.870.300,00	4.129.700,00	91,74
5.1.1.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	60.000.000,00	56.487.600,00	3.512.400,00	94,15
5.1.1.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	60.000.000,00	56.487.600,00	3.512.400,00	94,15
5.1.1.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	60.000.000,00	48.132.000,00	11.868.000,00	80,22
5.1.1.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	60.000.000,00	48.132.000,00	11.868.000,00	80,22
5.1.1.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	840.000.000,00	793.679.250,00	46.320.750,00	94,49
5.1.1.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	840.000.000,00	793.679.250,00	46.320.750,00	94,49
5.1.1.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	100.000.000,00	80.570.700,00	19.429.300,00	80,57
5.1.1.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	100.000.000,00	80.570.700,00	19.429.300,00	80,57
5.1.1.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.375.000,00	0,00	15.375.000,00	0,00

8/19

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
5.1.1.04.07.0001	Belanja Tunjangan Auk Kelengkapan Lainnya DPRD	15.375.000,00	0,00	15.375.000,00	0,00
5.1.1.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Internal Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00	100,00
5.1.1.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Internal Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00	100,00
5.1.1.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	672.340.000,00	466.200.000,00	206.140.000,00	69,34
5.1.1.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	672.340.000,00	466.200.000,00	206.140.000,00	69,34
5.1.1.04.10	Belanja Perimbangan PPH kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	700.094,00	417.421,00	282.673,00	59,62
5.1.1.04.10.0001	Belanja Perimbangan PPH kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	700.094,00	417.421,00	282.673,00	59,62
5.1.1.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.877.600.000,00	2.698.461.378,00	179.138.622,00	93,77
5.1.1.04.12.0001	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.877.600.000,00	2.698.461.378,00	179.138.622,00	93,77
5.1.1.04.12.0002	Belanja Tunjangan Kesehatan bagi DPRD	60.000.000,00	48.784.176,00	11.215.824,00	81,31
5.1.1.04.12.0003	Belanja Tunjangan Kesehatan Kerja DPRD	1.800.000,00	1.155.168,00	644.832,00	64,18
5.1.1.04.12.0004	Belanja Tunjangan Kesehatan DPRD	4.800.000,00	3.465.504,00	1.334.496,00	72,20
5.1.1.04.12.0004	Belanja Tunjangan Penunahan DPRD	2.811.000.000,00	2.645.056.530,00	165.943.470,00	94,10
5.1.1.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.300.000.000,00	3.222.278.358,00	77.721.642,00	97,64
5.1.1.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.300.000.000,00	3.222.278.358,00	77.721.642,00	97,64
5.1.1.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
5.1.1.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.621.474.179,00	1.216.458.905,00	405.015.274,00	75,02
5.1.1.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	1.365.000,00	97,56
5.1.1.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	1.365.000,00	97,56
5.1.1.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.000.000,00	6.048.000,00	1.952.000,00	75,60
5.1.1.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.000.000,00	6.048.000,00	1.952.000,00	75,60
5.1.1.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	380.737.000,00	382.285.000,00	-1.548.000,00	97,56
5.1.1.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	380.737.000,00	382.285.000,00	-1.548.000,00	97,56
5.1.1.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.200.000,00	4.345.200,00	3.854.800,00	52,99
5.1.1.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.200.000,00	4.345.200,00	3.854.800,00	52,99
5.1.1.05.05	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	600.000,00	459.474,00	140.526,00	76,58
5.1.1.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	600.000,00	459.474,00	140.526,00	76,58
5.1.1.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.624,00	960,00	1.664,00	36,59
5.1.1.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.624,00	960,00	1.664,00	36,59

819

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
5.1.1.05.07	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.588.080,00	5.448.960,00	1.139.120,00	82,71
5.1.1.05.07.0001	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.588.080,00	5.448.960,00	1.139.120,00	82,71
5.1.1.05.08	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	194.316,00	112.320,00	21.996,00	83,62
5.1.1.05.08.0001	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	194.316,00	112.320,00	21.996,00	83,62
5.1.1.05.09	Belanja Juran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00	336.960,00	65.988,00	83,62
5.1.1.05.09.0001	Belanja Juran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00	336.960,00	65.988,00	83,62
5.1.1.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	669.618.520,00	613.285.998,00	56.332.530,00	91,59
5.1.1.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	218.802.800,00	216.059.627,00	2.743.173,00	98,72
5.1.1.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	114.333.294,00	88.158.810,00	26.174.484,00	77,11
5.1.1.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	12.281.998,00	8.820.181,00	3.461.817,00	69,00
5.1.1.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	11.913.920,00	10.939.856,00	974.064,00	91,82
5.1.1.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	81.396.132,00	80.560.906,00	835.226,00	98,97
5.1.1.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Perkar	5.368.000,00	4.133.000,00	1.227.000,00	77,11
5.1.1.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.450.000,00	3.04.759,00	2.625.241,00	23,91
5.1.1.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perikanan	47.836.150,00	33.589.946,00	13.446.204,00	71,41
5.1.1.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	174.496.214,00	170.198.913,00	4.297.301,00	97,54
5.1.1.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	771.225.683,00	433.541.033,00	337.684.650,00	56,21
5.1.1.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	13.875.000,00	7.945.000,00	6.230.000,00	55,10
5.1.1.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Perampokan/Kedokteran	36.346.000,00	18.104.325,00	18.042.275,00	50,09
5.1.1.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Perkar di Tepi Jalan Umum	33.149.498,00	16.537.500,00	16.611.998,00	49,89
5.1.1.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar Bersepeda	22.268.750,00	17.587.400,00	4.581.350,00	79,43
5.1.1.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Bersepeda	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyediaan Kulkas	35.000.000,00	27.900.000,00	7.200.000,00	79,43
5.1.1.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tenda Tenda	122.500,00	96.000,00	25.500,00	79,10
5.1.1.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan dan Pengendalian Masalah Telekomunikasi	4.732.000,00	2.381.250,00	2.350.750,00	50,32
5.1.1.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemukiman Karyawan Daerah	175.200,00	139.000,00	36.000,00	79,43
5.1.1.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pasar Grosir dan/atau Perbaikan	171.900.000,00	108.945.000,00	63.455.000,00	63,00
5.1.1.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Terminal	4.456.305,00	2.536.748,00	1.919.557,00	56,92

819

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	PERTAMBAH/BERKURANG	(%)
5.1.1.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Pasar	40.840.000,00	8.820.000,00	32.020.000,00	21,60
5.1.1.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Pening Hewan	6.825.000,00	3.336.000,00	3.489.000,00	48,88
5.1.1.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	400.000.000,00	219.153.186,00	180.846.814,00	54,79
5.1.1.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produk Usaha Daerah	1.400.000,00	882.000,00	518.000,00	63,00
5.1.1.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu dan Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	735.000,00	376.724,00	358.276,00	51,25
5.1.1.06	Belanja Pemeliharaan Lainnya Peralihan DPRD serta KDH/WKDH	714.000.000,00	527.451.234,00	186.578.766,00	73,87
5.1.1.06.01	Belanja Dana Operasional Perumahan DPRD	116.030.000,00	100.800.000,00	15.230.000,00	86,87
5.1.1.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Perumahan DPRD	116.030.000,00	100.800.000,00	15.230.000,00	86,87
5.1.1.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	598.000.000,00	426.651.234,00	171.348.766,00	71,35
5.1.1.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	598.000.000,00	426.651.234,00	171.348.766,00	71,35
5.1.1.08	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.08.08	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.08.08.0808	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.09	Belanja Pegawai BLUD	6.794.982.818,00	2.342.904.300,00	4.451.678.518,00	34,69
5.1.1.09.99	Belanja Pegawai BLUD	6.794.982.818,00	2.342.904.300,00	4.451.678.518,00	34,69
5.1.1.09.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	6.794.982.818,00	2.342.904.300,00	4.451.678.518,00	34,69
5.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	301.912.139.291,00	264.544.058.412,28	37.368.080.878,72	87,62
5.1.2.01	Belanja Barang	52.636.885.429,00	45.252.903.639,74	7.383.981.789,26	85,97
5.1.2.01.01	Belanja Barang Peralatan	52.615.877.429,00	45.241.953.200,74	7.373.924.228,26	85,99
5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	140.825.500,00	76.802.220,00	64.023.280,00	47,70
5.1.2.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.377.947.300,00	1.320.762.814,00	57.184.486,00	95,85
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.115.722.067,00	841.456.782,00	274.265.285,00	75,42
5.1.2.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Batu	97.546.700,00	60.057.604,00	37.489.096,00	61,57
5.1.2.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Sifat Tanaman	692.350.000,00	609.403.054,00	83.146.946,00	87,99
5.1.2.01.01.0009	Belanja Bahan-Bahan Tabung Pemadam Kebakaran	92.100.000,00	50.661.500,00	41.438.500,00	55,01
5.1.2.01.01.0010	Belanja Bahan-Bahan Tabung Gas	82.375.000,00	69.235.380,00	13.139.620,00	84,05
5.1.2.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Sifat Tembak/Biskuit/Ikan	49.555.000,00	32.857.300,00	17.097.700,00	65,77
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.735.418.538,00	1.634.945.102,00	100.473.436,00	94,21
5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20.799.000,00	16.482.481,00	4.316.519,00	79,25
5.1.2.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	346.160.000,00	203.531.077,00	144.628.923,00	58,22
5.1.2.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kelembaran	12.000.000,00	11.988.000,00	12.000,00	99,90
5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	5.710.000,00	4.286.650,00	1.423.350,00	75,07

81A

KODE REKENING	URUTAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
5.1.2.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	38.302.000,00	35.844.060,00	3.458.040,00	91,28
5.1.2.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	21.129.000,00	13.884.500,00	7.244.500,00	65,71
5.1.2.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.000.000,00	2.968.250,00	30.750,00	98,98
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.000.578.222,00	1.815.242.456,00	185.335.767,00	90,74
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	628.936.500,00	655.000.040,00	65.935.551,00	92,84
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.777.690.640,00	4.809.028.991,00	968.661.649,00	83,24
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Posa	166.177.000,00	149.530.000,00	16.647.000,00	89,98
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.341.208.300,00	1.147.793.545,00	93.414.755,00	85,47
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.154.207.310,00	1.042.520.150,00	111.687.160,00	90,32
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.048.495.375,00	970.771.983,00	68.723.392,00	93,36
5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Penyelenggaraan Dinas	1.327.929.940,00	1.221.625.398,00	106.304.542,00	91,99
5.1.2.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kapasitap dan Penyelenggaraan Sewa	28.500.000,00	20.450.000,00	50.000,00	99,76
5.1.2.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Penyelenggaraan Olahraga	38.895.000,00	30.895.000,00	0,00	100,00
5.1.2.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Sewa/Condominium	1.189.650.000,00	1.164.315.555,00	20.334.445,00	98,28
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Sewa/Condominium	756.686.940,00	655.531.648,00	101.155.292,00	86,63
5.1.2.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.007.513.132,00	996.562.335,00	10.950.797,00	99,91
5.1.2.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat Lainnya	128.800.000,00	128.310.505,00	489.415,00	99,62
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Disewa kepada Masyarakat	8.935.863.680,00	8.348.685.280,74	587.178.399,26	93,43
5.1.2.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Disewa kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	868.000.000,00	834.969.700,00	33.030.300,00	96,19
5.1.2.01.01.0043	Belanja Nutrisi dan Pakan-Nutrisi	265.340.000,00	209.946.000,00	55.394.000,00	79,12
5.1.2.01.01.0044	Belanja Nutrisi dan Pakan-Pakan	127.268.000,00	122.446.750,00	4.847.250,00	96,19
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.092.421.700,00	8.528.232.005,00	3.144.189.695,00	70,51
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.627.661.000,00	3.973.593.210,00	654.067.790,00	85,87
5.1.2.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	395.386.200,00	365.646.246,00	29.739.954,00	92,48
5.1.2.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Utama Persewaan	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00
5.1.2.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Utama Kesehatan	404.808.784,00	382.496.273,00	22.318.511,00	94,49
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Utama Kesehatan	355.785.000,00	275.286.430,00	80.509.570,00	77,37
5.1.2.01.01.0060	Belanja Paksaon Dinas dan Akibat Pembebanan dan Anggaran DPRD	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0061	Belanja Paksaon Spil Harta (PSH)	35.000.000,00	34.965.000,00	35.000,00	99,90
5.1.2.01.01.0062	Belanja Paksaon Spil Uang (PSU)	120.000.000,00	49.393.000,00	70.605.000,00	41,16
5.1.2.01.01.0063	Belanja Paksaon Dinas Harta (PDH)	150.000.000,00	147.876.000,00	2.130.000,00	98,58
5.1.2.01.01.0064	Belanja Paksaon Dinas Lapangan (PDL)	701.400.000,00	694.438.527,00	16.961.473,00	97,58
5.1.2.01.01.0065	Belanja Paksaon Spil Revisi (PSR)	35.000.000,00	32.196.000,00	2.804.000,00	91,97
5.1.2.01.01.0066	Belanja Paksaon Dinas Upacara (PDO)	97.000.000,00	87.917.150,00	9.082.850,00	90,64
5.1.2.01.01.0067	Belanja Paksaon Penyelamatan	45.150.000,00	44.882.440,00	267.560,00	99,41
5.1.2.01.01.0068	Belanja Paksaon Sewa	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	100,00
5.1.2.01.01.0071	Belanja Paksaon Kerja Laboratorium	900.000,00	828.000,00	72.000,00	92,00
5.1.2.01.01.0072	Belanja Paksaon Kerja Bengkel	4.000.000,00	2.503.050,00	1.496.950,00	62,58

KODE REKENING	ISALIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
5.1.2.01.01.0074	Belanja Pakan Acid Dieriah	65.760.000,00	59.394.940,00	6.375.060,00	90,31
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakan Basik Tradisional	394.000.000,00	295.494.790,00	8.515.220,00	97,20
5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakan Calfmaga	190.275.000,00	177.969.000,00	2.306.000,00	98,72
5.1.2.01.01.0077	Belanja Pakan Probiotika	179.000.000,00	179.215.050,00	584.950,00	99,67
5.1.2.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	21.000.000,00	10.950.430,00	10.057.561,00	52,13
5.1.2.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	20.170.000,00	10.120.439,00	10.057.561,00	50,16
5.1.2.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	830.000,00	830.000,00	9,00	100,00
5.1.2.02	Belanja Jasa	157.512.299.151,00	141.940.212.404,68	15.572.086.746,32	90,11
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	134.339.998.999,00	122.177.792.989,59	12.162.206.009,01	90,95
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.969.630.000,00	11.315.570.000,00	1.654.052.000,00	87,25
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tin Pelekaan Kegiatan dan Seleksi dan Seleksi Tin Pelekaan Kegiatan	2.894.990.000,00	2.305.630.000,00	589.360.000,00	79,64
5.1.2.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan AHL, Sekt AHL, dan Baracra	295.000.000,00	24.250.000,00	130.750.000,00	36,22
5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	6.407.600.000,00	6.305.620.000,00	80.920.000,00	96,74
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Riset	10.500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	52,38
5.1.2.02.01.0008	Honorarium Tin Penyusunan Jurnal, Bulletin, Majalah, Pengitip, Pengitip Teknologi Informasi dan Pengitip Website	110.000.000,00	64.500.000,00	45.500.000,00	58,60
5.1.2.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	7.010.000,00	7.010.000,00	0,00	100,00
5.1.2.02.01.0010	Honorarium Perbaikan Baur Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
5.1.2.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.524.175.000,00	1.114.575.000,00	409.600.000,00	73,13
5.1.2.02.01.0012	Honorarium Tin Anggaran Pemerintah Daerah	741.790.000,00	674.200.000,00	67.590.000,00	90,90
5.1.2.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	16.378.633.694,00	15.982.260.192,00	386.393.412,00	97,64
5.1.2.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.473.505.274,00	5.369.938.282,00	1.103.626.952,00	82,95
5.1.2.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	332.430.337,00	275.819.937,00	56.610.400,00	82,97
5.1.2.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Pasaran dan Sarana Umum	3.790.685.833,00	3.795.554.912,00	85.130.921,00	97,75
5.1.2.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan Umum, dan Perhubungan Masyarakat	8.130.741.388,00	8.028.646.577,00	102.094.811,00	98,74
5.1.2.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Kebersihan dan Penyelamatan	1.180.871.741,00	1.167.802.599,00	13.069.145,00	98,89
5.1.2.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.280.850.368,00	1.261.316.285,00	19.533.983,00	98,47
5.1.2.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	173.196.994,00	87.725.252,00	85.471.732,00	50,65
5.1.2.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	3.044.270.427,20	2.954.562.830,00	89.708.397,00	97,05
5.1.2.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Peranian dan Paupan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesman dan Kelautan	563.677.526,00	334.143.485,00	229.534.041,00	59,28
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.538.015.830,00	5.334.999.998,00	203.015.832,00	96,33
5.1.2.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	854.329.430,00	825.533.525,00	28.795.905,00	96,63
5.1.2.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.386.797.751,00	4.241.981.856,00	144.815.895,00	96,70
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga AHL	886.500.000,00	748.125.500,00	138.374.500,00	84,39
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.023.022.598,00	17.615.860.333,14	407.161.975,86	97,74
5.1.2.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Kermanan	5.203.880.349,00	4.881.394.570,80	322.485.778,20	93,80

*Handwritten signature/initials*



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
5.1.2.02.01.0036	Belanja Jasa Audio/Surveillance ISU	67.500.000,00	59.906.700,00	7.593.300,00	88,75
5.1.2.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perbaikan/Perawatan	107.750.000,00	79.217.500,00	28.532.500,00	73,52
5.1.2.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informatika dan Teknologi	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	83,33
5.1.2.02.01.0041	Belanja Jasa Perencanaan Instalasi Telepon, Ak, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.01.0043	Belanja Jasa Perbaikan dan Perencanaan	100.000.000,00	97.524.500,00	2.475.500,00	97,52
5.1.2.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informatika	320.000.000,00	318.715.140,00	1.284.860,00	99,60
5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.348.700.000,00	4.075.877.223,00	272.822.777,00	93,73
5.1.2.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	258.194.000,00	206.943.193,05	51.650.806,95	80,00
5.1.2.02.01.0049	Belanja Jasa Perencanaan Pakaian, Alat Kesehatan dan Kebersihan, serta Alat Rumah Tangga	149.550.000,00	114.224.860,00	35.325.140,00	76,39
5.1.2.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	130.000.000,00	66.024.150,00	63.975.850,00	50,79
5.1.2.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.068.099.184,00	953.076.340,00	114.962.844,00	89,24
5.1.2.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	45.000.000,00	5.540.600,00	39.459.400,00	12,31
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Milyu/Pelaksanaan, Film, dan Perawatan	1.558.252.304,00	1.021.935.000,00	536.317.304,00	65,58
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	489.420.000,00	288.382.327,00	201.037.673,00	58,92
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	865.025.000,00	589.442.482,00	275.582.518,00	68,09
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.766.480.000,00	5.991.763.406,00	774.716.594,00	88,55
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	352.960.000,00	339.635.351,00	13.324.649,00	96,22
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan	3.955.400.000,00	3.592.561.822,00	362.838.178,00	90,83
5.1.2.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	40.190.000,00	2.560.350,00	37.629.650,00	6,37
5.1.2.02.01.0065	Belanja Persembahan Doya	5.000.000,00	3.421.000,00	1.579.000,00	68,42
5.1.2.02.01.0067	Belanja Perawatan Tajuk, Bas, dan Perbaikan	106.440.000,00	51.394.257,00	55.045.743,00	48,28
5.1.2.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	74.000.000,00	11.035.312,00	62.964.688,00	14,91
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	12.251.309.300,00	9.339.062.135,00	2.912.247.165,00	76,02
5.1.2.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	61.679.600,00	29.400.000,00	32.279.600,00	35,91
5.1.2.02.01.0075	Belanja Inisiatif Tenaga Kesehatan Perencanaan CDMB-19	80.275.000,00	1.300.000,00	78.975.000,00	1,62
5.1.2.02.02	Belanja Jaran Jaminan/Auransi	8.706.595.428,00	7.280.266.210,00	1.026.329.218,00	88,21
5.1.2.02.02.0003	Belanja Jaran Jaminan Kecelakaan bagi Peserta PRTU dan IP Kelas 3	4.771.200.000,00	4.466.100.600,00	305.099.400,00	93,61
5.1.2.02.02.0004	Belanja Bantuan Jaran Jaminan Kecelakaan bagi Peserta PRTU dan IP Kelas 3	957.391.400,00	884.416.500,00	72.974.900,00	92,38
5.1.2.02.02.0005	Belanja Jaran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	2.711.950.170,00	2.086.563.664,00	625.386.606,00	76,94
5.1.2.02.02.0006	Belanja Jaran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	121.022.666,00	109.420.310,00	11.592.356,00	90,42
5.1.2.02.02.0007	Belanja Jaran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	145.031.772,00	133.740.220,00	11.291.552,00	92,22
5.1.2.02.03	Belanja Sewa Tanah	2.331.824.200,00	2.270.461.483,00	61.362.717,00	97,37
5.1.2.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	2.331.824.200,00	2.270.461.483,00	61.362.717,00	97,37
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Perabotan dan Meubel	3.149.732.844,00	2.930.859.944,00	218.872.900,00	76,13
5.1.2.02.04.0003	Belanja Sewa Escrevator	9.622.844,00	0,00	9.622.844,00	0,00

819

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/ BERKURANG	(%)
5.1.2.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	183.000.000,00	80.675.000,00	102.325.000,00	43,76
5.1.2.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	324.000.000,00	265.545.000,00	58.455.000,00	81,96
5.1.2.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	46.000.000,00	44.200.000,00	1.800.000,00	96,09
5.1.2.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	168.250.000,00	111.200.000,00	57.050.000,00	66,09
5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.107.510.000,00	785.207.100,00	322.302.900,00	70,90
5.1.2.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.080.450.000,00	1.033.790.900,00	46.659.100,00	95,68
5.1.2.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tinggal Lainnya (Home Use)	102.500.000,00	19.820.000,00	82.680.000,00	19,34
5.1.2.02.04.0132	Belanja Sewa Perawatan Studio Audio	106.000.000,00	24.100.000,00	81.900.000,00	22,74
5.1.2.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	16.500.000,00	15.500.000,00	1.000.000,00	93,94
5.1.2.02.04.0255	Belanja Sewa Perawatan Umum	500.000.000,00	497.824.600,00	2.175.400,00	99,56
5.1.2.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
5.1.2.02.04.0410	Belanja Sewa Perawatan Jaringan	55.000.000,00	53.197.344,00	1.802.656,00	96,72
5.1.2.02.04.0509	Belanja Sewa Perawatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.198.175.000,00	1.950.919.870,00	247.255.130,00	88,75
5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	66.150.000,00	45.920.000,00	21.150.000,00	68,03
5.1.2.02.05.0059	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.162.400.000,00	1.072.613.480,00	89.786.520,00	92,28
5.1.2.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.500.000,00	16.500.000,00	4.000.000,00	80,49
5.1.2.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	28.000.000,00	17.760.000,00	10.240.000,00	63,43
5.1.2.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	906.125.000,00	799.946.390,00	107.078.610,00	88,18
5.1.2.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
5.1.2.02.07	Belanja Sewa Alat Tetap Lainnya	35.500.000,00	35.350.000,00	150.000,00	99,58
5.1.2.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	35.500.000,00	35.350.000,00	150.000,00	99,58
5.1.2.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.495.600.000,00	773.978.551,40	721.621.448,60	51,75
5.1.2.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Desain Arsitektural	512.000.000,00	133.992.774,00	378.007.226,00	26,39
5.1.2.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Desain Interior	43.600.000,00	33.805.000,00	9.795.000,00	77,53
5.1.2.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Arsitektur Lainnya	10.000.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00
5.1.2.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rukunnya Jasa Hauling dan Konsultansi Resayasa Teknik	90.000.000,00	89.579.000,00	421.000,00	99,53
5.1.2.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	140.000.000,00	136.731.549,00	3.268.451,00	97,67
5.1.2.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Ruang-Proyeksi/Perencanaan Formafascan Ruang	100.000.000,00	99.385.840,00	614.160,00	99,39
5.1.2.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	400.000.000,00	271.384.388,40	128.615.611,60	67,85
5.1.2.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Eduvasi Nelayan dan Bangunan	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
5.1.2.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.259.223.846,00	1.977.848.616,25	281.375.229,75	87,55
5.1.2.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	131.500.000,00	48.943.119,00	82.556.881,00	37,22
5.1.2.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telekomunikasi	286.740.846,00	260.728.349,84	17.012.506,16	94,06

819

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
S.1.2.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Keuangan	50.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	80,00
S.1.2.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Pendidikan	96.270.000,00	96.270.000,00	0,00	100,00
S.1.2.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kepemudaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
S.1.2.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Sarana	389.704.000,00	338.791.900,00	50.912.100,00	86,94
S.1.2.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Riset Teknik	325.000.000,00	243.661.628,41	81.338.371,59	74,97
S.1.2.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	415.000.000,00	394.207.575,00	20.792.425,00	94,99
S.1.2.02.09.0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	250.000.000,00	231.246.744,00	18.753.256,00	92,50
S.1.2.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
S.1.2.02.09.0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Studi Kebijakan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
S.1.2.02.11	Belanja Bantuan Pendidikan PNS	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	100,00
S.1.2.02.11.0001	Belanja Bantuan Tugas Belajar S1	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00
S.1.2.02.11.0002	Belanja Bantuan Tugas Belajar S2	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
S.1.2.02.12	Belanja Kurang/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.299.760.000,00	1.529.618.140,94	230.141.809,96	95,62
S.1.2.02.12.0001	Belanja Kurus Singkat/Pelatihan	1.288.440.000,00	1.218.298.140,04	70.141.859,96	94,56
S.1.2.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	311.320.000,00	311.320.000,00	0,00	100,00
S.1.2.02.13	Belanja Jasa Incentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	224.550.000,00	197.623.268,00	27.526.732,00	87,74
S.1.2.02.13.0006	Belanja Incentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	68.800.000,00	67.861.843,00	18.157,00	99,97
S.1.2.02.13.0007	Belanja Incentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	35.600.000,00	32.298.748,00	3.301.252,00	90,73
S.1.2.02.13.0008	Belanja Incentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	15.650.000,00	3.138.134,00	11.911.866,00	20,05
S.1.2.02.13.0009	Belanja Incentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rekreasi	6.800.000,00	5.048.763,00	951.237,00	84,15
S.1.2.02.13.0010	Belanja Incentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penanganan Jalan	25.300.000,00	25.292.271,00	7.269,00	99,97
S.1.2.02.13.0011	Belanja Incentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.500.000,00	1.513.814,00	986.186,00	60,55
S.1.2.02.13.0012	Belanja Incentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	900.000,00	437.308,00	462.692,00	48,59
S.1.2.02.13.0015	Belanja Incentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	17.000.000,00	7.298.840,00	9.701.160,00	42,93
S.1.2.02.13.0016	Belanja Incentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bes Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	54.200.000,00	54.013.087,00	186.913,00	99,66
S.1.2.02.14	Belanja Jasa Incentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	330.338.834,00	275.183.332,00	55.155.502,00	83,30
S.1.2.02.14.0002	Belanja Incentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Perantara/Kelurahan	21.136.230,00	20.425.563,00	710.667,00	96,64
S.1.2.02.14.0004	Belanja Incentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	13.365.050,00	4.226.250,00	9.138.750,00	31,62
S.1.2.02.14.0005	Belanja Incentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	11.401.600,00	11.286.300,00	115.300,00	98,97
S.1.2.02.14.0009	Belanja Incentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan Layanan Penyediaan Kibus	17.920.000,00	17.732.000,00	188.000,00	98,95
S.1.2.02.14.0015	Belanja Incentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Perikanan	87.808.000,00	74.705.400,00	13.102.600,00	85,08

219

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
5.1.2.02.14.0017	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	991.516,00	741.000,00	250.516,00	74,73
5.1.2.02.14.0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Pabrik	37.716.488,00	6.598.400,00	31.118.088,00	16,17
5.1.2.02.14.0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Refleksi dan Olahraga	140.000.000,00	1.399.974.719,00	25.201,00	99,98
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	28.712.176.742,90	22.663.628.650,86	6.048.548.091,14	78,93
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Perabotan dan Mesin	17.991.696.204,00	14.479.596.644,26	3.512.099.559,74	80,48
5.1.2.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar-Darat-Tractor	121.647.879,00	90.873.000,00	30.774.879,00	74,70
5.1.2.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar-Darat-Loader	342.672.500,00	139.900.300,00	102.772.200,00	57,65
5.1.2.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar-Darat-Alat Pengangkat	236.672.500,00	29.771.200,00	206.901.300,00	12,58
5.1.2.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar-Darat-Mesin Proses	3.000.000,00	2.719.500,00	280.500,00	90,65
5.1.2.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar-Darat-Alat Besar Darat Lainnya	40.000.000,00	3.600.000,00	34.400.000,00	14,00
5.1.2.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar-Apung-Alat Besar Apung Lainnya	3.850.000,00	3.750.000,00	100.000,00	97,40
5.1.2.03.02.0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Compressor	11.350.000,00	9.059.500,00	2.290.500,00	79,82
5.1.2.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	89.150.000,00	35.889.142,00	53.260.858,00	40,26
5.1.2.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	11.000.000,00	8.344.000,00	2.656.000,00	75,85
5.1.2.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	237.695.500,00	148.275.360,00	89.420.140,00	62,38
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.460.900.300,00	1.937.200.080,00	523.699.920,00	78,72
5.1.2.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Persempangan	2.713.848.200,00	2.525.325.404,00	188.522.796,00	93,05
5.1.2.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.827.818.300,00	4.195.004.575,00	1.632.813.725,00	83,45
5.1.2.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.756.400.300,00	1.489.750.574,00	266.649.726,00	84,82
5.1.2.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.820.113.625,00	1.187.951.515,00	632.162.110,00	65,27
5.1.2.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	971.558.000,00	879.886.913,00	91.671.087,00	90,42
5.1.2.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	289.250.000,00	205.075.249,00	84.174.751,00	70,93
5.1.2.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	20.300.000,00	2.985.000,00	17.315.000,00	14,93
5.1.2.03.02.0056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.1.2.03.02.0079	Belanja Pemeliharaan Alat Bergelend dan Alat Ular-Alat Bergelend Tak Bermotor-Perabotan Ubur, Gao, dan Feeding	3.200.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
5.1.2.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Perizin-Alat Pengisian-Alat Pemeliharaan Tasaman/ Jany/Ternak	13.300.000,00	12.019.000,00	1.281.000,00	90,45
5.1.2.02.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Tulis	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	0,00
5.1.2.02.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Penyediaan Kantor	14.800.000,00	3.206.680,00	11.593.320,00	22,90
5.1.2.02.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	251.150.000,00	193.019.950,00	58.130.050,00	76,85

819

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
5.1.2.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mobid	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	100,00
5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	23.790.000,00	12.162.000,00	11.628.000,00	51,12
5.1.2.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	245.770.000,00	89.194.240,00	156.575.760,00	36,29
5.1.2.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Penerimaan-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5.1.2.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	15.000.000,00	9.706.060,00	5.293.940,00	64,71
5.1.2.03.02.0203	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	3.000.000,00	1.517.750,00	1.482.240,00	50,59
5.1.2.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	65.400.000,00	55.891.500,00	9.508.500,00	85,46
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	182.135.000,00	147.834.060,00	34.300.940,00	81,17
5.1.2.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	142.690.000,00	129.665.082,00	13.024.918,00	90,87
5.1.2.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Hardware Komputer-Peralatan Personal Computer	38.180.000,00	30.886.850,00	7.293.150,00	80,90
5.1.2.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Hardware Komputer-Peralatan Jaringan	45.000.000,00	37.660.000,00	7.340.000,00	83,69
5.1.2.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Perbaikan Komputer-Perbaikan Komputer Lainnya	69.870.000,00	52.223.250,00	17.646.750,00	74,74
5.1.2.03.02.0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Boja Pongoran	6.675.000,00	5.975.000,00	700.000,00	89,51
5.1.2.03.02.0450	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	1.800.000,00	1.790.000,00	10.000,00	99,44
5.1.2.03.02.0451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	15.900.000,00	15.895.000,00	5.000,00	99,97
5.1.2.03.02.0452	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-SAB-Alat Perolong	610.000,00	510.000,00	100.000,00	83,61
5.1.2.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Dasar Rambu Bermana	100.000.000,00	99.943.810,00	56.190,00	99,94
5.1.2.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Dasar Rambu Tidak Bermana	647.500.000,00	645.664.170,26	1.835.829,74	99,72
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.330.066.199,00	2.616.255.512,60	913.810.686,40	78,11
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.136.935.559,00	1.552.382.815,18	584.552.743,82	72,65
5.1.2.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	12.638.980,00	12.416.500,00	212.480,00	98,32
5.1.2.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	12.904.000,00	12.904.000,00	0,00	100,00
5.1.2.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	200.000.000,00	229.297.750,00	702.250,00	99,69
5.1.2.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Posa	350.000.000,00	335.257.084,00	14.742.916,00	95,79
5.1.2.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	67.600.000,00	63.603.000,00	3.997.000,00	94,09
5.1.2.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terluksa	185.699.600,00	140.355.506,00	45.354.154,00	75,56
5.1.2.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Peternakan	157.590.000,00	150.035.257,42	7.464.742,58	95,26
5.1.2.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	125.000.000,00	120.103.600,00	4.896.400,00	96,08
5.1.2.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Hamah Negara Gedung I	251.888.000,00	0,00	251.888.000,00	0,00
5.1.2.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalin, Jaringan, dan Inggat	4.794.414.339,00	3.217.713.404,00	1.576.700.935,00	67,11

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
5.1.2.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota	1.325.900.075,00	1.055.240.176,00	270.659.899,00	79,59
5.1.2.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	30.000.000,00	26.064.400,00	3.935.600,00	86,88
5.1.2.03.04.0020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Penyeberangan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
5.1.2.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Jangse-Bangunan Pembawa Injapad	650.000.000,00	312.821.604,00	337.178.396,00	48,00
5.1.2.03.04.0063	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	15.000.000,00	14.976.831,00	23.969,00	99,84
5.1.2.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	1.926.814.120,00	1.183.750.448,00	743.063.672,00	61,44
5.1.2.03.04.0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
5.1.2.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
5.1.2.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	200.000.000,00	136.249.000,00	63.751.000,00	68,12
5.1.2.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	69.000.000,00	34.384.640,00	44.615.960,00	35,34
5.1.2.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	530.000.144,00	462.327.705,00	67.672.439,00	87,23
5.1.2.03.04.0127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
5.1.2.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.396.000.000,00	2.350.663.090,00	45.936.910,00	98,08
5.1.2.03.05.0040	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan- Hewan- Hewan Kibun-Bekang	2.395.000.000,00	2.349.663.090,00	45.936.910,00	98,08
5.1.2.03.05.0045	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	44.438.835.988,00	38.444.404.647,00	5.994.431.341,00	86,51
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.378.835.988,00	38.384.404.647,00	5.994.431.341,00	86,49
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.130.946.988,00	35.543.100.203,00	4.587.846.785,00	88,57
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.239.356.000,00	1.363.986.684,00	875.369.316,00	60,91
5.1.2.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.698.273.000,00	1.349.259.900,00	349.013.100,00	79,45
5.1.2.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	310.260.000,00	128.057.860,00	182.202.140,00	41,27
5.1.2.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
5.1.2.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa/Luar Negeri	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.060.650.000,00	2.751.696.776,00	309.553.224,00	89,30
5.1.2.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.500.150.000,00	2.670.317.720,00	229.832.280,00	92,08
5.1.2.05.01.0001	Belanja hadiah yang bersifat Persembahan	1.501.350.000,00	1.356.473.720,00	145.876.280,00	90,28
5.1.2.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Sumpah Prestasi	263.000.000,00	189.844.000,00	73.156.000,00	72,16
5.1.2.05.01.0003	Belanja Bantuan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
5.1.2.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00
5.1.2.05.01.0005	Belanja Transfer Kasuspan Daerah dan Desa (TKDD)	925.000.000,00	925.000.000,00	0,00	100,00
5.1.2.05.02	Belanja jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	180.500.000,00	80.779.650,00	99.720.950,00	44,75
5.1.2.05.02.0001	Belanja jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	170.500.000,00	79.944.250,00	90.555.750,00	46,89
5.1.2.05.02.0002	Belanja jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	10.000.000,00	834.800,00	9.165.200,00	8,35

Handwritten signature and initials.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/ BERKURANG	(%)
5.1.2.00	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.403.434.704,00	11.098.294.672,00	305.140.032,00	97,15
5.1.2.00.00	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.403.434.704,00	11.098.294.672,00	305.140.032,00	97,15
5.1.2.00.00.0000	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.403.434.704,00	11.098.294.672,00	305.140.032,00	97,15
5.1.2.00	Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.807.657.277,00	2.393.517.628,00	1.714.339.649,00	58,27
5.1.2.00.00	Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.807.657.277,00	2.393.517.628,00	1.714.339.649,00	58,27
5.1.2.00.00.0000	Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.807.657.277,00	2.393.517.628,00	1.714.339.649,00	58,27
5.1.4	Belanja Subsidi	3.865.520.000,00	2.910.989.266,00	474.530.734,00	85,98
5.1.4.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	470.520.000,00	0,00	470.520.000,00	0,00
5.1.4.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	470.520.000,00	0,00	470.520.000,00	0,00
5.1.4.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	470.520.000,00	0,00	470.520.000,00	0,00
5.1.4.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.575.000.000,00	2.574.989.266,00	10.734,00	100,00
5.1.4.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.575.000.000,00	2.574.989.266,00	10.734,00	100,00
5.1.4.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.575.000.000,00	2.574.989.266,00	10.734,00	100,00
5.1.4.04	Belanja Subsidi kepada Koperasi	940.000.000,00	336.000.000,00	4.000.000,00	98,82
5.1.4.04.01	Belanja Subsidi kepada Koperasi	940.000.000,00	336.000.000,00	4.000.000,00	98,82
5.1.4.04.01.0001	Belanja Subsidi kepada Koperasi	940.000.000,00	336.000.000,00	4.000.000,00	98,82
5.1.5	Belanja Hibah	42.425.478.526,00	40.192.987.711,16	2.232.490.814,84	94,74
5.1.5.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Komersial yang Berbadan Hukum Indonesia	34.987.231.000,00	32.862.652.041,16	2.124.578.958,84	93,93
5.1.5.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.672.581.800,00	11.567.400.481,73	125.180.518,27	99,92
5.1.5.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Berbadan Hukum, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Pemerintah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.181.581.800,00	11.068.964.284,00	112.616.716,00	98,99
5.1.5.05.01.0002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Berbadan Hukum, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	491.000.000,00	470.476.197,73	12.563.802,27	97,21
5.1.5.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Keterangan Tambahan	22.323.043.000,00	20.403.961.659,43	1.919.081.340,57	91,40
5.1.5.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Tambahan	22.323.043.000,00	20.403.961.659,43	1.919.081.340,57	91,40
5.1.5.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Berbadan Sosial Komersial	1.031.607.000,00	951.269.000,00	80.317.100,00	92,21

819

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
5.1.5.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Hibah, Sukarela Berifat Sosial Komunitarian	1.031.607.000,00	951.289.900,00	80.317.100,00	92,21
5.1.5.06	Belanja Hibah Dana BOS	6.702.600.000,00	6.624.278.680,00	78.321.320,00	98,83
5.1.5.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan oleh Satuan/Swasta	6.702.600.000,00	6.624.278.680,00	78.321.320,00	98,83
5.1.5.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan oleh Satuan/Swasta	6.702.600.000,00	6.624.278.680,00	78.321.320,00	98,83
5.1.5.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	795.647.536,00	706.056.990,00	29.590.536,00	95,98
5.1.5.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	795.647.536,00	706.056.990,00	29.590.536,00	95,98
5.1.5.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	795.647.536,00	706.056.990,00	29.590.536,00	95,98
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.255.000.000,00	2.230.000.000,00	25.000.000,00	98,89
5.1.6.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.255.000.000,00	2.230.000.000,00	25.000.000,00	98,89
5.1.6.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Diberikan kepada Keluarga	2.255.000.000,00	2.230.000.000,00	25.000.000,00	98,89
5.1.6.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Diberikan kepada Keluarga	2.255.000.000,00	2.230.000.000,00	25.000.000,00	98,89
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	147.955.765.352,00	124.005.630.244,56	23.950.139.107,44	83,81
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Belanja Modal Tanah Persegi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Perabotan dan Mesin	60.312.518.236,00	48.131.479.720,00	12.181.038.516,00	79,80
5.2.2.01	Belanja Modal Alat Beker	1.954.975.611,00	1.858.680.101,00	96.295.510,00	95,07
5.2.2.01.01	Belanja Modal Alat Besi Dasar	983.404.611,00	983.404.611,00	0,00	100,00
5.2.2.01.01.0009	Belanja Modal Loader	983.404.611,00	983.404.611,00	0,00	100,00
5.2.2.01.03	Belanja Modal Alat Berat	571.571.000,00	675.275.490,00	96.295.510,00	90,09
5.2.2.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	100.771.000,00	111.751.090,00	70.016.010,00	98,58
5.2.2.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	750.000.000,00	731.606.000,00	16.394.000,00	97,81
5.2.2.01.03.0016	Belanja Modal Alat Berat Lainnya	30.000.000,00	25.914.500,00	885.000,00	97,13
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Angkutan	9.064.091.800,00	7.149.290.925,00	2.815.700.875,00	71,74
5.2.2.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	9.052.691.800,00	7.045.449.925,00	2.807.241.875,00	71,51
5.2.2.02.01.0001	Belanja Modal Kondoran Citrus Bermotor Perorangan	5.006.814.000,00	3.065.316.000,00	1.941.504.000,00	61,22
5.2.2.02.01.0002	Belanja Modal Kondoran Bermotor Perorangan	678.862.000,00	558.500.000,00	110.362.000,00	85,55
5.2.2.02.01.0003	Belanja Modal Kondoran Bermotor Angkutan Berlingkaran	1.588.677.800,00	1.588.677.800,00	0,00	100,00
5.2.2.02.01.0004	Belanja Modal Kondoran Bermotor Beroda Dua	1.025.238.000,00	1.187.819.125,00	737.418.875,00	61,70
5.2.2.02.01.0005	Belanja Modal Kondoran Bermotor Beroda Tiga	50.000.000,00	44.193.000,00	5.807.000,00	88,39

8/15



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/ BERKURANG	(%)
5.2.2.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	619.100.000,00	606.950.000,00	12.150.000,00	98,04
5.2.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkut Darat Tak Bermotor	112.300.000,00	103.841.000,00	8.459.000,00	92,47
5.2.2.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Darat	112.300.000,00	103.841.000,00	8.459.000,00	92,47
5.2.2.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	97.715.000,00	76.930.299,00	20.784.701,00	78,73
5.2.2.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	51.100.000,00	39.312.580,00	11.787.420,00	76,93
5.2.2.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	20.000.000,00	10.129.080,00	9.870.920,00	50,65
5.2.2.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	31.100.000,00	29.183.500,00	1.916.500,00	93,84
5.2.2.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	9.209.000,00	6.671.579,00	2.527.421,00	71,75
5.2.2.03.02.0004	Belanja Modal Perkakas Pansang/uk	3.000.000,00	2.710.620,00	289.380,00	90,35
5.2.2.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	6.209.000,00	3.960.959,00	2.238.041,00	62,88
5.2.2.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	32.215.000,00	30.946.140,00	6.369.860,00	82,93
5.2.2.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	21.956.000,00	20.036.540,00	1.919.460,00	91,26
5.2.2.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
5.2.2.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Bara	2.500.000,00	1.800.000,00	700.000,00	72,00
5.2.2.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	12.800.000,00	9.049.600,00	3.750.400,00	70,70
5.2.2.04	Belanja Modal Alat Pertanian	128.935.000,00	126.695.904,00	2.239.096,00	98,26
5.2.2.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	128.935.000,00	126.695.904,00	2.239.096,00	98,26
5.2.2.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Bany/Ternak	915.000,00	720.000,00	215.000,00	77,81
5.2.2.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	128.000.000,00	125.975.904,00	2.024.096,00	98,42
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.093.891.526,00	9.013.943.677,86	1.079.947.848,14	89,30
5.2.2.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.643.629.000,00	2.515.897.136,20	127.731.863,80	95,17
5.2.2.05.01.0002	Belanja Modal Meja Hitung/Meja Jamah	5.600.000,00	5.385.000,00	215.000,00	95,89
5.2.2.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perangkat Lunak Kantor	150.500.000,00	110.182.000,00	40.318.000,00	73,21
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.487.529.000,00	2.400.350.136,20	87.178.863,80	96,50
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.890.262.526,00	6.020.537.671,66	869.725.254,34	87,38
5.2.2.05.02.0003	Belanja Modal Mebel	2.556.229.000,00	2.263.731.375,00	292.488.625,00	88,56
5.2.2.05.02.0003	Belanja Modal Alat Perbendah	94.818.800,00	51.233.500,00	43.604.500,00	54,00
5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	205.750.000,00	132.229.005,00	73.520.995,00	64,27
5.2.2.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	66.750.000,00	27.734.000,00	39.016.000,00	41,55
5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.892.853.346,00	3.471.967.291,56	420.886.044,34	89,19
5.2.2.05.02.0007	Belanja Modal Alat Permadam Kibukaran	73.851.560,00	73.642.500,00	209.060,00	99,72
5.2.2.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	559.999.600,00	477.508.870,00	82.490.730,00	85,27

8149

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
5.2.2.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	181.000.000,00	160.226.850,00	20.773.150,00	88,52
5.2.2.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	15.000.000,00	14.985.000,00	15.000,00	99,96
5.2.2.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	159.999.600,00	102.659.620,00	57.339.980,00	64,16
5.2.2.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
5.2.2.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangang Pejabat	160.000.000,00	157.630.000,00	2.370.000,00	98,52
5.2.2.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Aduh Pejabat	39.000.000,00	37.007.400,00	1.992.600,00	94,89
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasar	948.299.875,00	605.716.790,00	42.583.085,00	63,93
5.2.2.06.01	Belanja Modal Alat Studio	514.449.875,00	493.154.040,00	21.295.835,00	95,86
5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.608.790,00	4.600.000,00	28.790,00	99,38
5.2.2.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	376.346.125,00	362.784.240,00	13.561.885,00	96,40
5.2.2.06.01.0006	Belanja Modal Aduh Studio Lainnya	133.475.000,00	125.769.800,00	7.705.200,00	94,23
5.2.2.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	133.850.000,00	112.562.750,00	21.287.250,00	84,10
5.2.2.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	88.100.000,00	99.312.750,00	20.787.250,00	74,05
5.2.2.06.02.0006	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	58.000.000,00	49.500.000,00	580.000,00	99,00
5.2.2.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00
5.2.2.07	Belanja Modal Alat Keokteran dan Kesehatan	15.000.364.800,00	9.665.490.666,00	5.334.874.134,00	64,44
5.2.2.07.01	Belanja Modal Alat Keokteran	14.237.500.000,00	9.108.889.434,00	5.128.610.566,00	63,98
5.2.2.07.01.0001	Belanja Modal Alat Keokteran Umum	2.476.470.700,00	2.376.265.637,00	100.205.066,00	95,95
5.2.2.07.01.0004	Belanja Modal Alat Keokteran Bedah	3.531.900.300,00	290.479.000,00	3.241.441.382,00	8,22
5.2.2.07.01.0005	Belanja Modal Alat Keokteran Keokteran dan Penyakit Kandungan	35.000.000,00	4.552.966,00	30.447.034,00	13,01
5.2.2.07.01.0008	Belanja Modal Alat Keokteran Bagian Penyakit Dalam	3.602.144.300,00	3.296.168.331,00	265.975.969,00	92,53
5.2.2.07.01.0010	Belanja Modal Alat Keokteran Anak	948.399.834,00	740.000.000,00	208.399.834,00	78,03
5.2.2.07.01.0013	Belanja Modal Alat Keokteran Rehabilitasi Medis	2.000.000,00	2.275.500,00	274.500,00	11,02
5.2.2.07.01.0013	Belanja Modal Alat Keokteran Neurologi (Saraf)	931.954.295,00	617.355.000,00	314.599.295,00	66,24
5.2.2.07.01.0014	Belanja Modal Alat Keokteran Jantung	545.246.380,00	543.600.000,00	1.646.380,00	99,70
5.2.2.07.01.0021	Belanja Modal Alat Keokteran Gawat Darurat	291.866.100,00	0,00	291.866.100,00	0,00
5.2.2.07.01.0024	Belanja Modal Alat Keokteran ICU	83.193.000,00	83.193.000,00	0,00	100,00
5.2.2.07.01.0029	Belanja Modal Alat Keokteran Lainnya	1.829.611.722,00	1.155.000.000,00	674.611.722,00	63,13
5.2.2.07.02	Belanja Modal Alat Keokteran Umum	762.864.800,00	556.601.232,00	206.263.568,00	72,96
5.2.2.07.02.0005	Belanja Modal Alat Keokteran Umum Lainnya	762.864.800,00	556.601.232,00	206.263.568,00	72,96
5.2.2.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.403.762.725,00	3.401.932.770,00	201.830.455,00	94,40
5.2.2.08.01	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.487.626.250,00	3.301.810.820,00	185.815.430,00	94,68
5.2.2.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	16.000.000,00	13.655.000,00	2.345.000,00	85,34
5.2.2.08.01.0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Medis	36.426.250,00	36.396.500,00	29.350,00	99,93

819

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
5.2.2.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
5.2.2.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	3.400.000.000,00	3.251.758.920,00	148.241.080,00	95,64
5.2.2.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	64.236.475,00	61.804.475,00	2.432.000,00	96,21
5.2.2.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keperawatan	30.000.000,00	29.918.000,00	82.000,00	99,73
5.2.2.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	31.886.475,00	31.886.475,00	0,00	100,00
5.2.2.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00
5.2.2.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Madya/Elektronika	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00
5.2.2.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00
5.2.2.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	44.000.000,00	30.216.975,00	13.783.025,00	68,67
5.2.2.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	44.000.000,00	30.216.975,00	13.783.025,00	68,67
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	10.682.361.439,00	10.163.280.266,00	519.081.174,00	95,14
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	9.430.316.750,00	9.011.764.690,00	418.552.060,00	95,56
5.2.2.10.01.0021	Belanja Modal Komputer Jaringan	364.950.000,00	360.349.000,00	4.601.000,00	98,74
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	7.785.710.850,00	7.463.047.624,00	322.663.226,00	95,86
5.2.2.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.275.655.860,00	1.188.368.666,00	87.287.194,00	92,87
5.2.2.10.02	Belanja Modal Perolehan Komputer	1.252.944.680,00	1.151.515.576,00	100.529.104,00	91,97
5.2.2.10.02.0001	Belanja Modal Peralihan Mainframe	2.450.000,00	2.035.000,00	415.000,00	83,06
5.2.2.10.02.0002	Belanja Modal Peralihan Mini Computer	14.500.000,00	13.560.000,00	940.000,00	93,52
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralihan Personal Computer	480.469.680,00	453.038.881,00	27.430.799,00	94,29
5.2.2.10.02.0004	Belanja Modal Peralihan Jaringan	404.413.000,00	349.649.800,00	54.763.200,00	86,46
5.2.2.10.02.0005	Belanja Modal Peralihan Komputer Lainnya	350.212.000,00	333.231.895,00	16.980.105,00	95,15
5.2.2.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemaman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5.2.2.13.01	Belanja Modal Gumar	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5.2.2.13.01.0002	Belanja Modal Surtir Pemboran	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5.2.2.15	Belanja Modal Alat Kelembagaan Kerja	71.600.000,00	71.530.000,00	70.000,00	99,90
5.2.2.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02.0002	Belanja Modal Masker	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.15.03	Belanja Modal Alat SAR	71.600.000,00	71.530.000,00	70.000,00	99,90
5.2.2.15.03.0001	Belanja :Hoodi Alat Pelindung	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
5.2.2.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	70.000.000,00	69.930.000,00	70.000,00	99,90
5.2.2.16	Belanja Modal Alat Peraga	2.145.000.000,00	2.136.605.600,00	8.394.400,00	99,61

819

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/ BERKURANG	(%)
5.2.2.16.01	Belanja Modal Alat Peninggalan dan Perawatan	2.145.000.000,00	2.136.600.600,00	8.399.400,00	99,61
5.2.2.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peninggalan	440.000.000,00	439.559.600,00	440.400,00	99,90
5.2.2.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peninggalan dan Perawatan Lainnya	1.705.000.000,00	1.697.050.000,00	7.950.000,00	99,53
5.2.2.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	28.256.000,00	28.148.500,00	107.500,00	99,62
5.2.2.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Dasar	28.256.000,00	28.148.500,00	107.500,00	99,62
5.2.2.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuara	28.256.000,00	28.148.500,00	107.500,00	99,62
5.2.2.19	Belanja Modal Perawatan Olahraga	78.300.000,00	32.562.500,00	45.737.500,00	41,59
5.2.2.19.01	Belanja Modal Perawatan Olahraga	78.300.000,00	32.562.500,00	45.737.500,00	41,59
5.2.2.19.01.0002	Belanja Modal Perawatan Perawatan	26.300.000,00	1.300.000,00	25.000.000,00	4,94
5.2.2.19.01.0003	Belanja Modal Perawatan Sewam	52.000.000,00	31.262.500,00	20.737.500,00	60,12
5.2.2.28	Belanja Modal Perawatan dan Mesin Bos	1.923.202.796,00	1.894.394.256,00	28.818.540,00	98,50
5.2.2.28.88	Belanja Modal Perawatan dan Mesin Bos	1.923.202.796,00	1.894.394.256,00	28.818.540,00	98,50
5.2.2.28.88.8888	Belanja Modal Perawatan dan Mesin Bos	1.923.202.796,00	1.894.394.256,00	28.818.540,00	98,50
5.2.2.09	Belanja Modal Perawatan dan Mesin BULD	3.875.861.673,00	1.891.283.945,14	1.984.577.727,86	48,80
5.2.2.09.99	Belanja Modal Perawatan dan Mesin BULD	3.875.861.673,00	1.891.283.945,14	1.984.577.727,86	48,80
5.2.2.09.99.9999	Belanja Modal Perawatan dan Mesin BULD	3.875.861.673,00	1.891.283.945,14	1.984.577.727,86	48,80
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.140.307.759,00	25.739.508.574,06	7.400.799.184,94	77,67
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	31.676.307.759,00	25.147.195.650,71	6.529.112.108,29	79,39
5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	31.866.307.759,00	24.540.910.473,71	7.325.397.285,29	79,00
5.2.3.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	864.584.000,00	881.521.400,63	183.062.604,37	78,83
5.2.3.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kebutuhan	5.361.000.000,00	4.581.458.497,00	1.079.591.503,00	79,48
5.2.3.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Perbaikan	11.438.260.138,00	11.386.623.678,99	51.636.859,01	99,55
5.2.3.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	129.815.751,00	300.254.367,20	29.561.383,30	91,04
5.2.3.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertahanan/Kepolisian/Posar	7.698.953.866,00	3.103.008.948,71	4.595.545.017,29	40,31
5.2.3.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	71.535.000,00	70.660.776,21	674.223,79	99,06
5.2.3.01.01.0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemerting Pesisir	70.000.000,00	35.655.475,74	34.344.524,26	50,94
5.2.3.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00
5.2.3.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.838.313.691,00	2.311.863.868,65	526.649.822,35	81,45
5.2.3.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.473.644.908,00	2.469.713.360,88	3.331.547,92	99,87
5.2.3.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	610.000.000,00	606.245.177,80	3.754.823,00	99,38
5.2.3.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	610.000.000,00	606.245.177,80	3.754.823,00	99,38

81A

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	PERTAMBAH/BERURANG	(%)
5.2.3.04	Belanja Modal Tugu Tikik Kontrol/Pasir	764.000.000,00	592.352.923,35	171.647.076,65	77,53
5.2.3.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	764.000.000,00	592.352.923,35	171.647.076,65	77,53
5.2.3.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	300.000.000,00	308.987.128,15	91.012.871,85	69,66
5.2.3.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	629.000.000,00	349.385.795,20	79.714.204,80	81,42
5.2.3.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	35.000.000,00	34.080.000,00	920.000,00	97,37
5.2.3.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00
5.2.3.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00
5.2.3.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.760.128.857,00	45.500.951.394,50	4.259.277.472,50	91,44
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	25.754.307.835,00	22.385.563.560,54	3.468.743.474,46	86,53
5.2.4.01.01	Belanja Modal Jalan	24.789.858.835,00	21.658.344.001,95	3.131.514.833,05	87,37
5.2.4.01.01.0904	Belanja Modal Jalan Kota	17.523.243.161,00	14.664.578.902,69	2.858.664.258,31	83,69
5.2.4.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	322.000.000,00	314.180.102,03	7.819.897,97	97,57
5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	6.944.614.674,00	6.679.584.997,23	265.029.676,77	96,18
5.2.4.01.02	Belanja Modal Jembatan	964.449.000,00	627.219.558,59	337.229.441,41	65,03
5.2.4.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	964.449.000,00	627.219.558,59	337.229.441,41	65,03
5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	20.829.173.080,00	20.389.937.761,95	439.235.918,05	97,89
5.2.4.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.910.759.000,00	2.845.067.497,26	65.681.502,74	97,74
5.2.4.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.910.759.000,00	2.845.067.497,26	65.681.502,74	97,74
5.2.4.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	398.648.000,00	293.789.244,27	104.858.755,73	73,70
5.2.4.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	398.648.000,00	293.789.244,27	104.858.755,73	73,70
5.2.4.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kolter	17.519.766.600,00	17.251.081.020,42	268.685.619,58	98,47
5.2.4.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kolter	17.519.766.600,00	17.251.081.020,42	268.685.619,58	98,47
5.2.4.03	Belanja Modal Instalasi	2.681.748.142,00	2.524.229.606,55	157.518.535,45	94,13
5.2.4.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	88.000.000,00	86.775.000,00	1.225.000,00	98,61
5.2.4.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	88.000.000,00	86.775.000,00	1.225.000,00	98,61
5.2.4.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kolter	1.914.955.057,00	1.758.661.566,55	156.293.490,45	91,84
5.2.4.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	1.914.955.057,00	1.758.661.566,55	156.293.490,45	91,84
5.2.4.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	678.793.085,00	678.793.040,00	45,00	100,00
5.2.4.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	678.793.085,00	678.793.040,00	45,00	100,00

849

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
5.2.4.04	Belanja Modal Jaringan	495.000.000,00	301.220.455,46	193.779.544,54	60,85
5.2.4.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	495.000.000,00	301.220.455,46	193.779.544,54	60,85
5.2.4.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	495.000.000,00	301.220.455,46	193.779.544,54	60,85
5.2.5	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>4.742.714.500,00</b>	<b>4.633.690.566,00</b>	<b>109.023.934,00</b>	<b>97,70</b>
5.2.5.01	Belanja Modal Bahan Perputakaan	3.184.850.000,00	3.173.837.666,00	11.012.314,00	99,65
5.2.5.01.01	Belanja Modal Bahan Perputakaan Terotak	58.700.000,00	57.666.240,00	1.033.760,00	98,24
5.2.5.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5.2.5.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perputakaan Terotak Lainnya	58.200.000,00	57.666.240,00	533.760,00	99,08
5.2.5.01.02	Belanja Modal Bahan Perputakaan Teresam dan Bantak Mikro	3.126.150.000,00	3.116.171.446,00	9.978.554,00	99,68
5.2.5.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	3.126.150.000,00	3.116.171.446,00	9.978.554,00	99,68
5.2.5.02	Belanja Modal Barang Berotak Kecerutan/Kebudayaan/Kelompok	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
5.2.5.02.02	Belanja Modal Alat Berotak Kebudayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
5.2.5.02.02.0004	Belanja Modal Alat Berotak Kebudayaan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
5.2.5.03	Belanja Modal Hewan	50.000.000,00	43.225.000,00	6.775.000,00	86,45
5.2.5.03.01	Belanja Modal Hewan Pertern	50.000.000,00	43.225.000,00	6.775.000,00	86,45
5.2.5.03.01.0003	Belanja Modal Hewan Kebun Binatang	50.000.000,00	43.225.000,00	6.775.000,00	86,45
5.2.5.05	Belanja Modal Tanaman	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
5.2.5.05.01	Belanja Modal Tanaman	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
5.2.5.05.01.0001	Belanja Modal Asit Tidak Berwujud	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	149.502.000,00	142.249.380,00	7.252.620,00	95,15
5.2.5.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	149.502.000,00	142.249.380,00	7.252.620,00	95,15
5.2.5.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	9.502.000,00	8.944.380,00	557.620,00	94,13
5.2.5.08.01.0005	Belanja Modal Software	140.000.000,00	133.305.000,00	6.695.000,00	95,22
5.2.5.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.283.362.500,00	1.269.378.500,00	13.984.000,00	98,91
5.2.5.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.283.362.500,00	1.269.378.500,00	13.984.000,00	98,91
5.2.5.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.283.362.500,00	1.269.378.500,00	13.984.000,00	98,91
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERBUKA</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>271.437.350,00</b>	<b>4.728.562.650,00</b>	<b>5,43</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terbuka	5.000.000.000,00	271.437.350,00	4.728.562.650,00	5,43

449

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
5.3.1.01	Belanja Tidak Tertaga	5.000.000.000,00	271.437.350,00	4.728.562.650,00	5,43
5.3.1.01.01	Belanja Tidak Tertaga	5.000.000.000,00	271.437.350,00	4.728.562.650,00	5,43
5.3.1.01.01.0001	Belanja Tidak Tertaga	5.000.000.000,00	271.437.350,00	4.728.562.650,00	5,43
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	8.766.666.667,00	8.520.000.000,00	246.666.667,00	97,19
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	8.766.666.667,00	8.520.000.000,00	246.666.667,00	97,19
5.4.2.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	8.766.666.667,00	8.520.000.000,00	246.666.667,00	97,19
5.4.2.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	8.766.666.667,00	8.520.000.000,00	246.666.667,00	97,19
5.4.2.04.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	8.766.666.667,00	8.520.000.000,00	246.666.667,00	97,19
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(122.987.559.855,00)	(15.656.813.202,44)	(77.330.746.652,56)	37,12
6.1	<b>PEREMBAHAN PEMBIAYAAN</b>	132.987.559.855,00	132.979.000.090,90	8.558.964,10	99,99
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	132.987.559.855,00	132.979.000.090,90	8.558.964,10	99,99
6.1.1.05	Penghematan Belanja	132.987.559.855,00	132.987.559.855,90	(0,90)	100,00
6.1.1.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasional	66.244.246.080,00	66.244.246.080,00	0,00	100,00
6.1.1.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	100,00
6.1.1.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang	13.943.545.484,00	13.943.545.484,00	0,00	100,00
6.1.1.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	28.793.045.652,00	28.793.045.652,00	0,00	100,00
6.1.1.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Komunitas/lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
6.1.1.05.01.0029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.507.654.953,00	1.507.654.953,00	0,00	100,00
6.1.1.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	66.743.313.766,00	66.743.313.766,90	(0,90)	100,00
6.1.1.05.02.0010	Penghematan Belanja Modal Perawatan dan Mesin-Alat Komputer	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
6.1.1.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	25.789.552.492,00	25.789.552.492,00	0,00	100,00
6.1.1.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen	10.854.880.363,00	10.854.880.363,00	0,00	100,00
6.1.1.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Jaban, Jeringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	19.098.880.911,00	19.098.880.911,90	(0,90)	100,00
6.1.1.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jaban, Jeringan, dan Irigasi-Bangunan Air	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
6.1.1.09	Kontribusi SDA	0,00	(8.558.965,00)	8.558.965,00	0,00
6.1.1.09.01	Kontribusi Kostalihan Pembukaan Tahun Sebelumnya	0,00	(8.558.965,00)	8.558.965,00	0,00
6.1.1.09.01.0001	Kontribusi Kostalihan Pembukaan Tahun Sebelumnya	0,00	(8.558.965,00)	8.558.965,00	0,00
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.2.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00

814

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	(%)
1.2.02.01.0001	Penyediaan Modal Daerah pada BKPD	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
	<b>PENGJAJARAN NETTO</b>	172.987.520.855,00	172.976.000.890,90	8.558.964,10	99,99
	<b>SISA LEBIH/KURANG PENJAJARAN TAHUN BERKEMAAH</b>	0,00	77.322.187.688,46	(77.322.187.688,46)	0,00

Bukittinggi, 16 Agustus 2023

**WALIKOTA BUKITTINGGI**



**ERMAN SAFAR**



**PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI**  
**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Komitmen Belanja PDN (Rp)	Realisasi Belanja PDN (Rp)	Persentase Realisasi PDN (%)	Permasalahan dan Strategi Penyelesaian
I	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>344.337.617.817,00</b>	<b>75.307.079.065,00</b>	<b>39.794.117.296,00</b>	<b>52,84</b>	
I.1	Belanja Barang dan Jasa (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat)	301.912.139.291,00	72.257.034.065,00	38.415.530.745,00	53,17	
I.2	Belanja Hibah Barang / Jasa	42.425.478.526,00	3.050.045.000,00	1.378.586.551,00	45,20	
I.3	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa					
II	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>147.955.769.352,00</b>	<b>68.206.777.821,00</b>	<b>28.647.279.580,00</b>	<b>42,00</b>	
II.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.312.518.236,00	20.427.941.320,00	6.705.485.574,00	32,83	
II.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.140.307.759,00	30.169.964.724,00	16.021.339.058,00	53,10	
II.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.760.228.857,00	17.404.121.931,00	5.728.048.686,00	32,91	
II.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.742.714.500,00	204.749.846,00	192.406.262,00	93,97	

Bukittinggi, 16 Agustus 2023

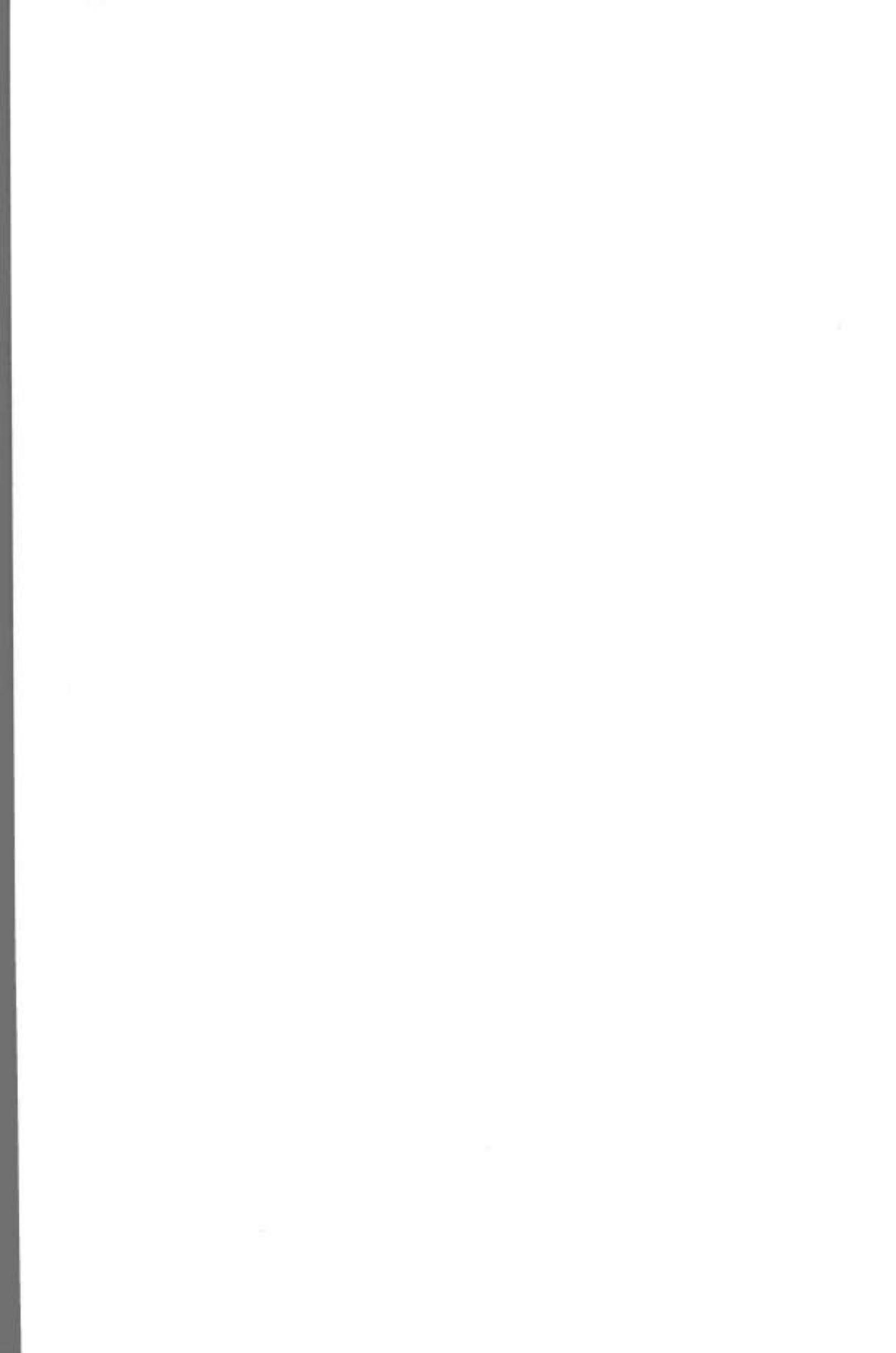
**WALIKOTA BUKITTINGGI**





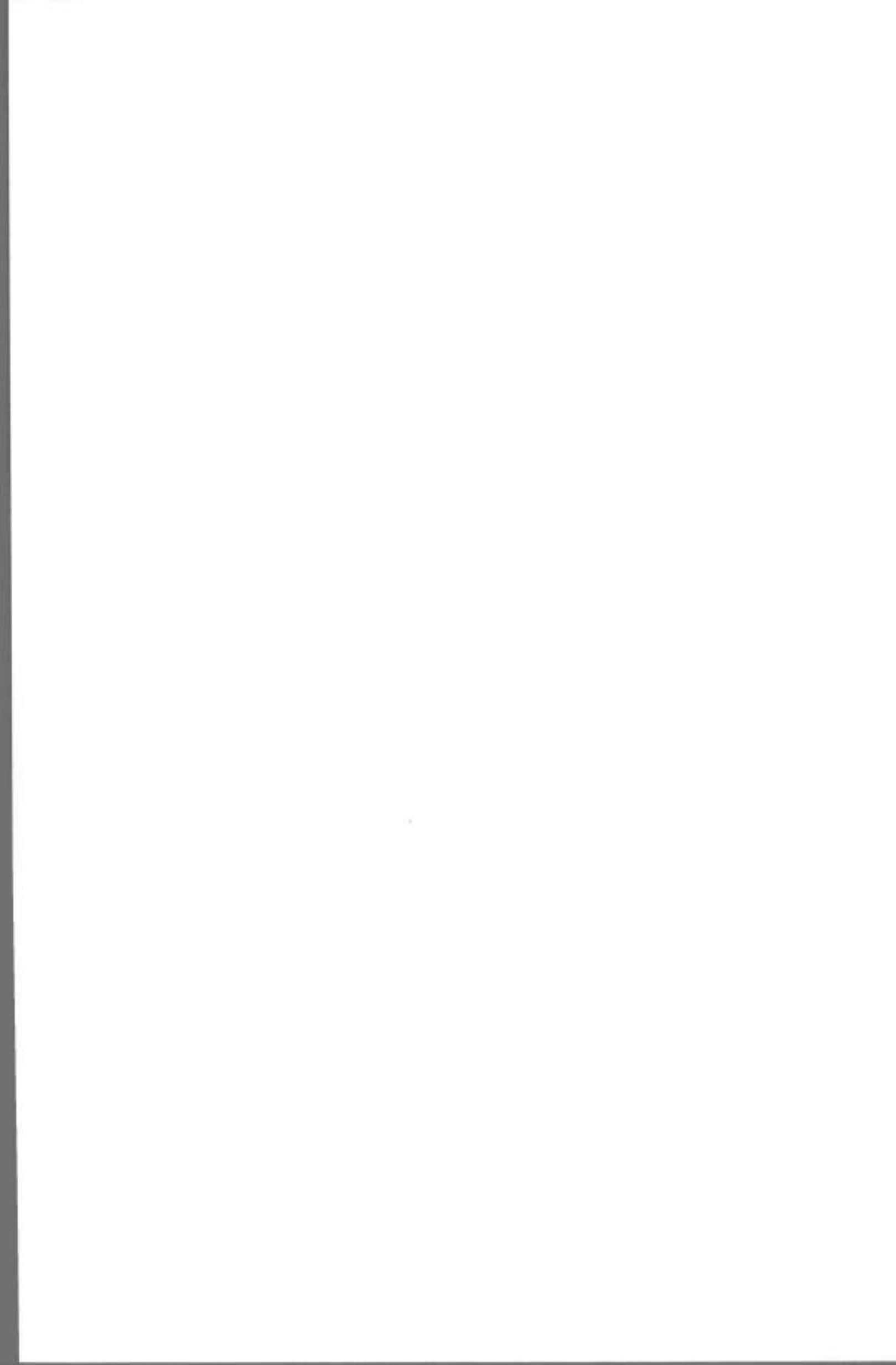
**KOTA BUKITTINGGI**  
**REALISASI BELAJAR DAERAH SINGKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Belanja Operasional			Belanja Modal			BTT			Jumlah			
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Angg (Rp)	Real (Rp)	Bal Transf (Rp)	Real (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)		
1	Peningkatan kualitas layanan air untuk mendukung pertumbuhan	Pengadaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pertanian dan Perikanan Ruang	45.170.000,00									45.170.000,00	-	0,00	
		Pengembangan Pembudidayaan Perikanan Diversifikasi dan Kelola Perikanan Masyarakat	Dinas Pertanian dan pangan	262.952.340,00	305.709.209,00									305.709.209,00	116,26	
		Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Perikanan Masyarakat	Dinas Pertanian dan pangan	603.552.500,00	556.864.958,00									556.864.958,00	92,26	
		Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Perikanan Masyarakat	Dinas Pertanian dan pangan	18.585.000,00	6.537.500,00									6.537.500,00	35,71	
		Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Perikanan Masyarakat	Dinas Pertanian dan pangan	371.831.000,00	169.939.150,00									169.939.150,00	45,90	
		Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Perikanan Masyarakat	Dinas Pertanian dan pangan	1.966.385.404,00	1.834.011.441,10									1.834.011.441,10	93,31	
		Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Perikanan Masyarakat	Dinas Pertanian dan pangan	325.936.654,00	166.288.854,00									166.288.854,00	51,33	
		Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Perikanan Masyarakat	Dinas Pertanian dan pangan	540.267.151	516.544.099									516.544.099	95,63	
		Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Perikanan Masyarakat	Dinas Pertanian dan pangan	107.750.000	5.802.250									5.802.250	5,39	
		Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Perikanan Masyarakat	Dinas Pertanian dan pangan	428.198.000	421.524.656,00									421.524.656,00	98,44	
2	Peningkatan pengelolaan pemerintahan, pelayanan dan pengujian kearsifan dan naskah	Pengadaan dan Pemeliharaan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM dan Menengah	20.986.800,00	21.801.400,00	19.800.000,00	19.758.000,00						19.758.000,00	40.759.400,00	99,93	
		Pendidikan dan Latihan	Dinas Koperasi, UKM dan Menengah	195.146.000,00	186.794.110,00									186.794.110,00	95,72	
		Peningkatan dan Pemeliharaan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM dan Menengah	128.656.000,00	121.142.185,00									121.142.185,00	94,16	
		Peningkatan Usaha Menengah (UM) dan Usaha Mikro (UMK)	Dinas Koperasi, UKM dan Menengah	71.150.000	69.895.315,00									69.895.315,00	98,24	
		Peningkatan Usaha Menengah (UM) dan Usaha Mikro (UMK)	Dinas Koperasi, UKM dan Menengah	4.099.158.046,00	3.963.774.806,00	15.000.000,00	14.747.460,00							14.747.460,00	97,41	
		Peningkatan Usaha Menengah (UM) dan Usaha Mikro (UMK)	Dinas Koperasi, UKM dan Menengah	196.174.000,00	186.825.510,00									186.825.510,00	95,24	
		Peningkatan Usaha Menengah (UM) dan Usaha Mikro (UMK)	Dinas Koperasi, UKM dan Menengah	1.429.312.720,00	1.246.654.443,00	4.500.000,00	4.500.000,00							4.500.000,00	87,26	
		Peningkatan Usaha Menengah (UM) dan Usaha Mikro (UMK)	Dinas Koperasi, UKM dan Menengah	54.111.800,00	44.357.100,00									44.357.100,00	81,97	
		Peningkatan Usaha Menengah (UM) dan Usaha Mikro (UMK)	Dinas Koperasi, UKM dan Menengah	1.556.523.000,00	1.506.573.029,00									1.506.573.029,00	96,79	
		3	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor ritl. dan	Pengembangan Sistem Informasi	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga	10.252.929.986,00	9.262.273.936,85	760.522.950,00	416.232.670,18						760.522.950,00	9.678.506.609,03
Pengembangan Sistem Informasi	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga			972.414.009,00	718.922.405,00	59.750.000,00	58.220.000,00							58.220.000,00	75,29	
Pengembangan Sistem Informasi	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga			750.000,00	590.000,00	950.000.000,00	941.049.500,00							941.049.500,00	99,02	
Pengembangan Sistem Informasi	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga			39.503.539.971,00	35.475.442.646,74									35.475.442.646,74	89,80	
Pengembangan Sistem Informasi	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga															
Pengembangan Sistem Informasi	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga															
Pengembangan Sistem Informasi	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga															
Pengembangan Sistem Informasi	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga															
Pengembangan Sistem Informasi	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga															
Pengembangan Sistem Informasi	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga															



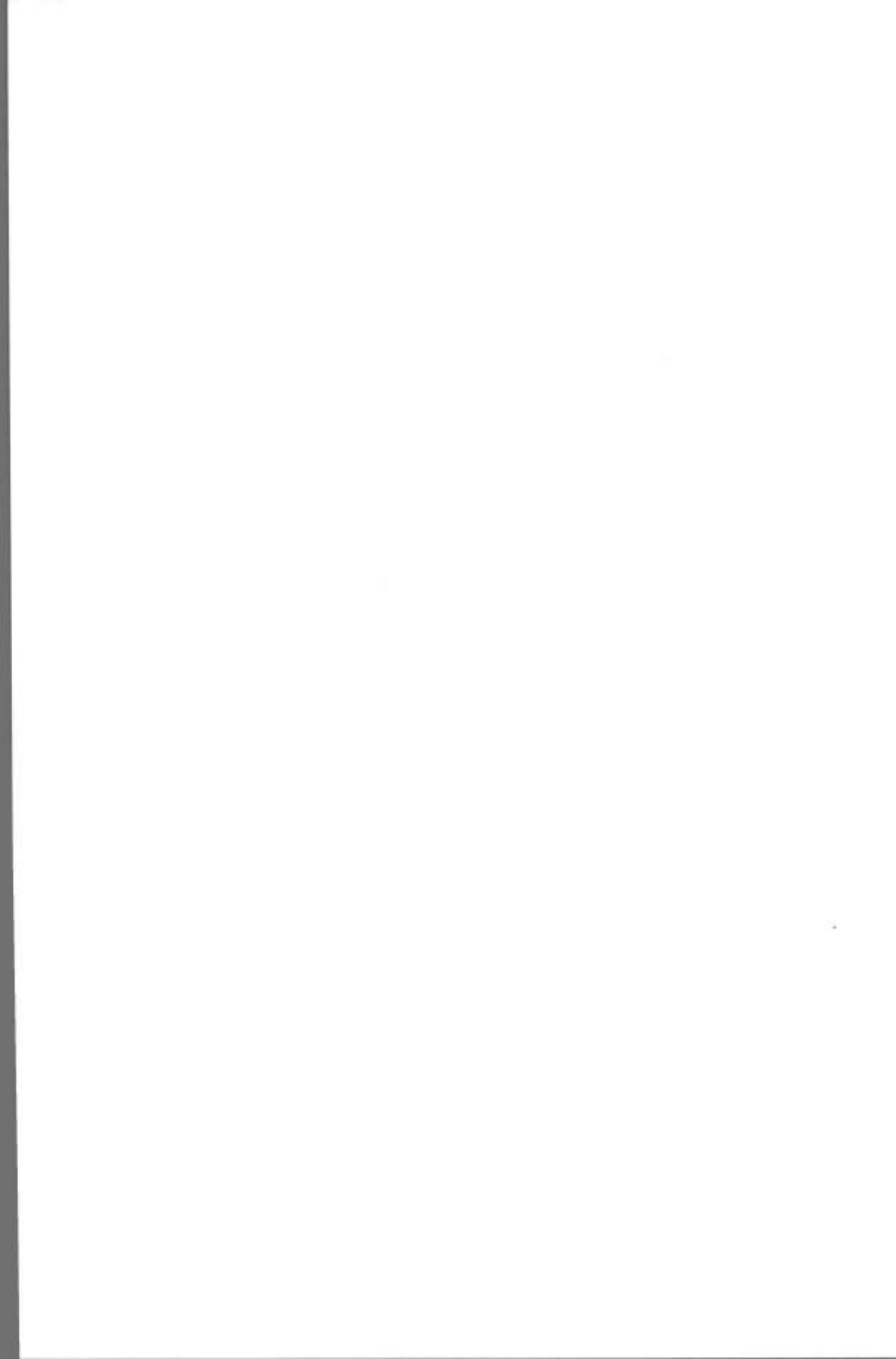
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Belanja Operasi				Belanja Modal		BTT		Bel Transfer		Jumlah		
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Angg (Rp)	Real (Rp)	Angg (Rp)	Real (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)		
5	Peningkatan ekspor domestik, tambah tinggi dan pengurangan Tingkat Ketergantungan Dalam Negeri	Pengembangan Ilmu Pengetahuan Modal	Dinas Perencanaan	352.757.200,00	357.613.895,00	38.913.000,00	36.295.000,00						421.670.000,00	395.998.895,00	93,89	
		Penyusunan Penanaman Modal	Dinas Perencanaan	966.668.168,00	885.840.330,00	20.000.000,00	16.761.000,00							986.668.168,00	922.601.330,00	91,48
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Perencanaan	403.823.443,00	153.403.000,00									403.823.443,00	153.403.000,00	37,99
		Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perencanaan	652.160.100,00	522.466.461,00									652.160.100,00	522.466.461,00	80,11
		Pemempatan tenaga Kerja	Dinas Perencanaan	8.379.500,00	4.063.200,00									8.379.500,00	8.063.200,00	96,23
		Hubungan Industri	Dinas Perencanaan	26.904.784,00	18.097.400,00									26.904.784,00	18.097.400,00	67,26
		Pengelolaan data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Perencanaan	17.864.000,00	16.903.800,00									17.864.000,00	16.993.800,00	95,13
		Perencanaan dan Pendaftaran Perizinan	Dinas Koperasi, UKM dan Menengah	26.235.600,00	24.211.650,00	20.000.000,00	19.369.500,00							46.235.600,00	43.581.150,00	94,26
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM dan Menengah	11.031.417.130,00	12.035.603.144,96	3.299.972.866,00	2.781.490.027,00							14.331.389.996,00	14.817.101.171,96	103,39
		Stabilitas Harga Barang kebutuhan Pokok Dan barang Standardisasi Dan Perindugan Keresmasan	Dinas Koperasi, UKM dan Menengah	57.052.268,00	44.367.068,00	-	-							57.052.268,00	44.367.068,00	77,24
Penggunaan Dan Pemecaran Produk dalam Negeri	Dinas Koperasi, UKM dan Menengah	72.415.000,00	53.520.063,00	-	-							72.415.000,00	53.520.063,00	73,91		
Promosi dan Pemasaran Perkonsumen Dan pembantuan	Dinas Koperasi, UKM dan Menengah	487.541.000,00	4.150.111.982,00	-	-							487.541.000,00	4.150.111.982,00	85,123		
6	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya	Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretariat Daerah	342.364.100,00	264.748.294,00	-	-							342.364.100,00	264.748.294,00	77,33
		Koordinasi Dan Singkronisasi Pemecaran Pembangunan Daerah	Badan Keuangan	405.276.262,00	408.371.286,00	25.500.000,00	23.782.500,00							430.776.286,00	433.153.786,00	88,26
		Pengelolaan Persewaan	Badan Perencanaan	164.408.000,00	113.484.361,00	-	-							164.408.000,00	113.484.361,00	69,03
		Pengelolaan Informasi	Badan Perencanaan	1.763.779.000,00	3.517.880.663,00	56.594.000,00	56.406.250,00							1.820.373.000,00	1.573.886.913,00	86,46
		Administrasi pemerintahan	Badan Perencanaan	284.576.222,00	179.693.175,00	230.293.000,00	194.585.950,00							474.869.222,00	374.279.125,00	78,82
		Pencatatan sipil	Badan Perencanaan	52.407.000,00	52.407.000,00	-	-							52.407.000,00	52.407.000,00	100,00
		Pengelolaan Profil Kependudukan	Badan Perencanaan	41.409.000,00	36.015.100,00	-	-							41.409.000,00	39.013.300,00	94,22
		Pendataan Penduduk	Badan Perencanaan	616.106.753,00	584.821.111,00	16.000.000,00	15.984.000,00							632.106.753,00	600.805.111,00	95,05
		Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	1.741.399.534,00	1.567.153.073,00	30.000.000,00	29.979.000,00							1.771.399.534,00	1.597.132.073,00	90,16
		Pengelolaan Bencana	Dinas Sosial	210.344.500,00	307.761.840,00	-	-							210.344.500,00	107.261.840,00	50,99
7	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Pengembangan Bencana	Dinas Sosial	162.180.452,00	245.279.583,00	-	-							262.580.452,00	245.279.583,00	93,41
		Pengelolaan Tindakan Masyarakatan	Dinas Sosial	221.384.662,00	217.232.497,00	-	-							221.384.662,00	217.232.497,00	98,12
		Pemeliharaan sosial	Dinas Sosial	479.639.500,00	444.401.899,00	-	-							479.639.500,00	444.401.899,00	92,65
		Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	752.585.350,00	671.616.530,00	30.000.000,00	29.970.000,00							782.585.350,00	701.586.530,00	89,65

81A



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Belanja Operasi			Belanja Modal			BTT		Jumlah		
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Angg (Rp)	Real (Rp)	Angg (Rp)	Real (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
8	Peringkat akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Sektoral (KS) Perindungan Dan Jaminan Sosial Tertentu	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Peningkatan	1.670.004.290,00	1.298.195.648,00	-	-	-	-	-	-	1.670.004.290,00	1.298.195.648,00	77,74
		Pengendalian Perilaku	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Peningkatan	120.298.750,00	63.157.670,00	-	-	-	-	-	-	120.298.750,00	63.157.670,00	48,85
		Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Peningkatan	100.575.000,00	67.450.940,00	-	-	-	-	-	-	100.575.000,00	67.450.940,00	67,07
		Pengendalian Perilaku	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Peningkatan	121.500.000,00	121.290.300,00	-	-	-	-	-	-	121.500.000,00	121.290.300,00	99,83
		Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Peningkatan	1.223.580.546,00	1.200.620.767,00	-	-	-	-	-	-	1.223.580.546,00	1.200.620.767,00	98,12
		Peningkatan Unsur Pemertahan Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Peningkatan	505.528.900,00	399.399.828,00	-	-	-	-	-	-	505.528.900,00	399.399.828,00	78,99
		Peningkatan Unsur Pemertahan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan	3.658.440.025,00	1.545.699.778,00	779.861.673,00	399.050.000,00	-	-	-	-	4.438.301.768,00	1.944.749.778,00	43,82
		Peningkatan Unsur Pemertahan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan	33.902.916.637,00	23.199.479.953,20	23.449.845.800,00	12.720.658.457,90	-	-	-	-	56.551.962.437,40	35.910.138.410,20	63,50
		Peningkatan Unsur Pemertahan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan	119.102.000,00	64.896.150,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	-	-	120.702.000,00	66.406.150,00	55,02
		Peningkatan Unsur Pemertahan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan	408.299.500,00	356.852.286,00	-	-	-	-	-	-	408.299.500,00	356.852.286,00	87,40
9	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	48.381.982.665,00	25.854.110.023,41	25.698.686.509,00	22.027.640.919,04	-	-	-	-	74.030.669.244,00	47.881.750.942,45	64,68
10	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Peningkatan	3.446.659.230,00	3.519.303.882,00	185.950.000,00	183.097.750,00	-	-	-	-	3.852.609.230,00	3.702.401.632,00	96,10
11	Peningkatan produktivitas dan daya saing	Peningkatan produktivitas dan daya saing	Dinas Perikanan, Peternakan dan Garam	4.837.354.976,00	4.204.932.144,00	464.915.751,00	369.789.167,70	-	-	-	-	5.242.270.727,00	4.634.721.311,70	88,41
12	Peningkatan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk generasi bangsa yang unggul	Peningkatan Unsur Pemertahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah	12.506.890.226,00	10.409.823.841,00	3.952.373.861,00	3.390.793.277,14	-	-	-	-	16.459.264.107,00	13.790.617.118,14	83,79
		Administrasi Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah	36.287.722.609,00	27.566.015.815,05	252.257.090,00	227.188.275,90	-	-	-	-	30.540.479.600,00	27.793.204.090,05	91,00
		Kepogawean Daerah	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.870.604.012,00	2.496.114.907,00	34.200.000,00	33.490.300,00	-	-	-	-	2.904.814.012,00	2.529.604.907,00	87,08
		Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia	897.464.536,00	47.176.594,00	63.400.000,00	55.229.875,00	-	-	-	-	960.864.536,00	102.406.469,00	10,66
		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	269.366.000,00	114.649.968,00	-	-	-	-	-	-	269.366.000,00	114.649.968,00	42,58
		Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	796.136.000,00	593.814.015,00	-	-	-	-	-	-	796.136.000,00	593.814.015,00	74,59
		Pengembangan Kemasyarakatan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	386.375.000,00	386.315.000,00	-	-	-	-	-	-	386.375.000,00	386.315.000,00	99,98
		Tradisional Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	67.546.000,00	59.878.575,00	12.947.000,00	12.947.000,00	-	-	-	-	80.493.000,00	72.825.575,00	90,47
		Pengembangan Pemerintahan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.168.344.086,00	2.014.085.480,00	26.660.000,00	26.100.000,00	-	-	-	-	2.194.944.086,00	2.040.185.486,00	92,95

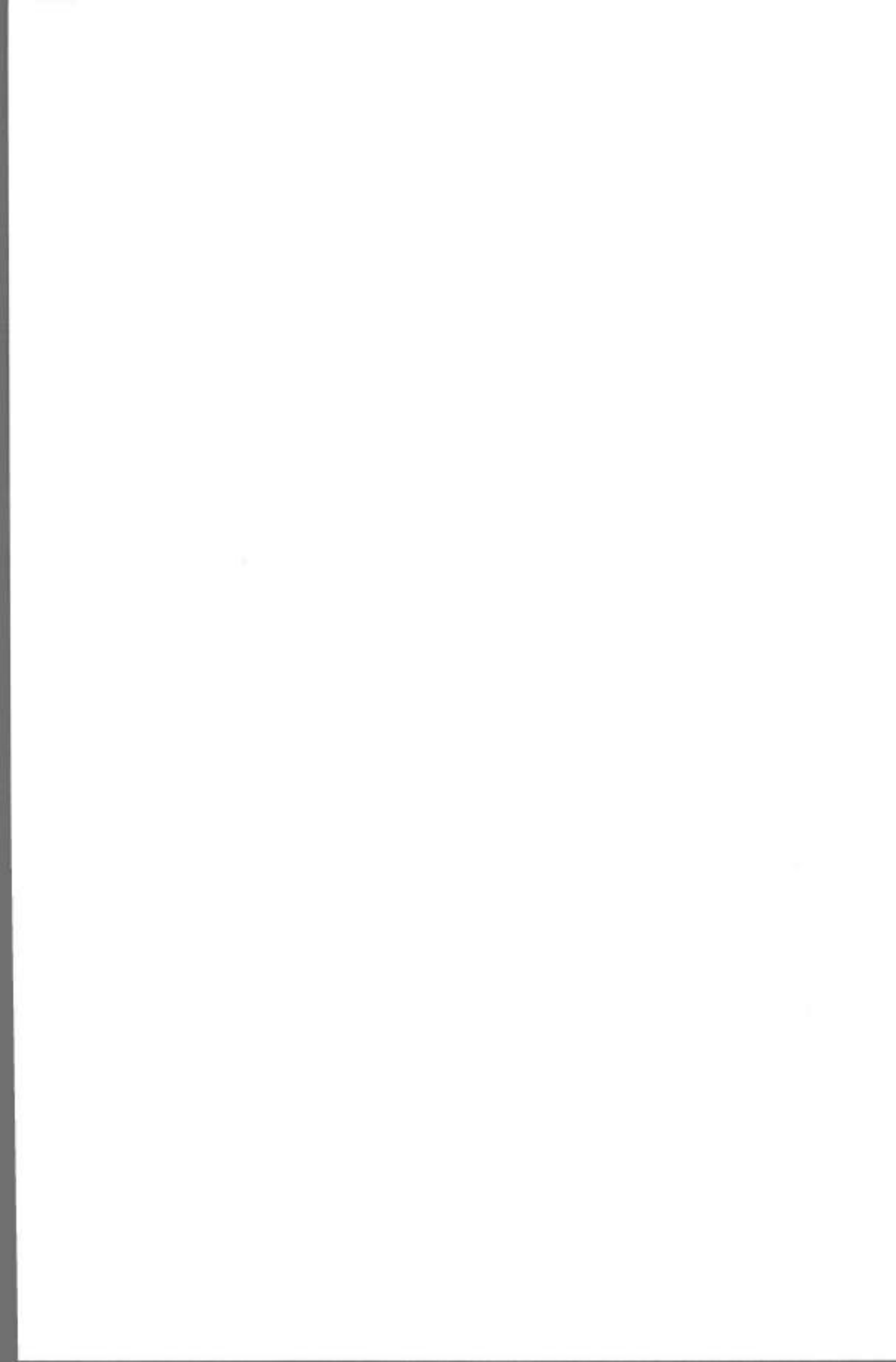
7A



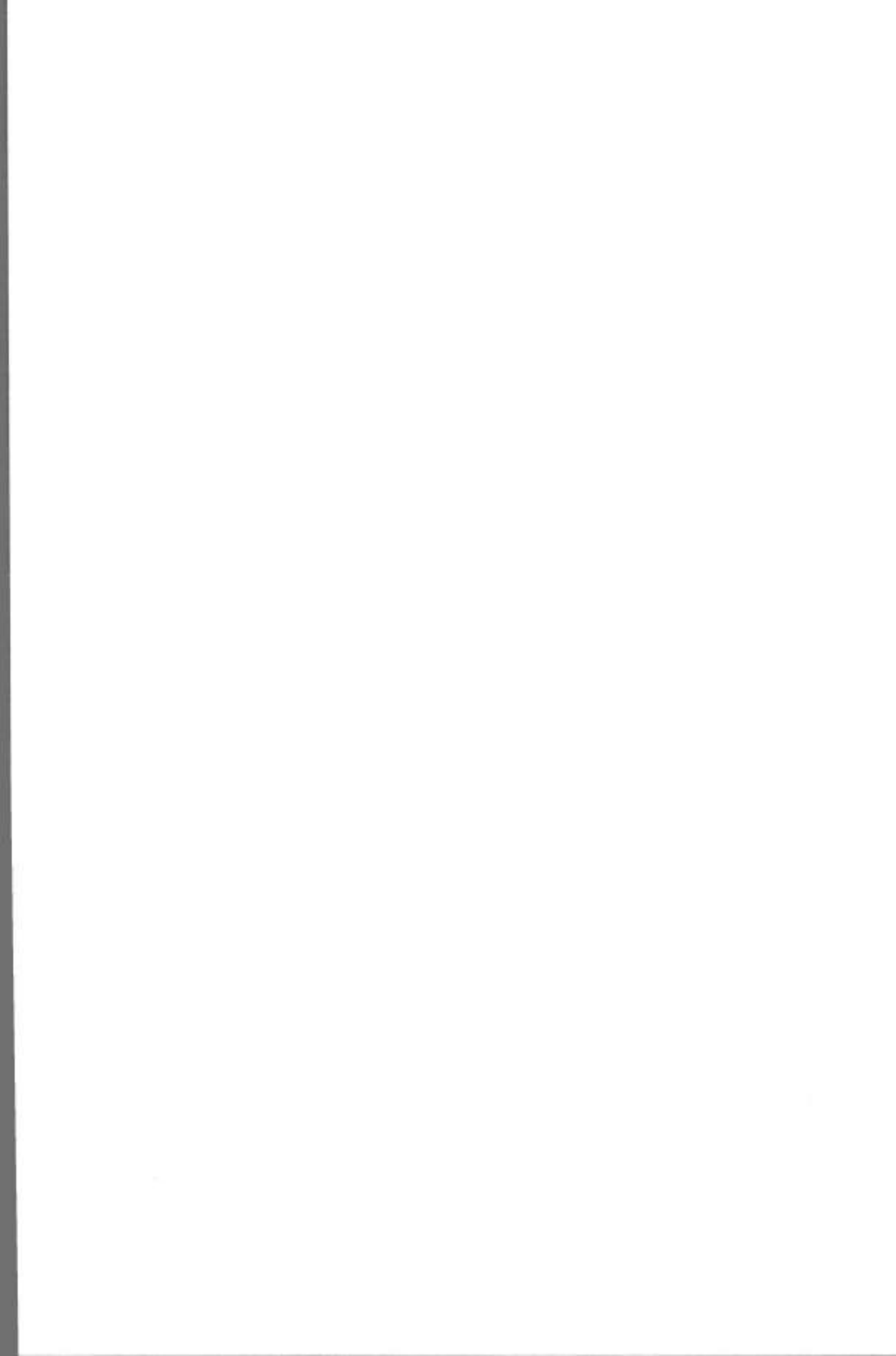
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Belanja Operasi				Belanja Modal				BTT			Jumlah		
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Angg (Rp)	Real (Rp)	Angg (Rp)	Real (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
		Pengembangan Kegiatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perputakaan Dan Kerdasan	93.581.500,00	87.652.053,00	40.000.000,00	39.948.900,00								133.581.500,00	127.600.958,00	95,52
		Pemeliharaan Perputakaan Kabupaten/Kota	Dinas Perputakaan Dan Kerdasan	811.232.150,00	694.945.756,00	276.580.000,00	263.980.100,00								1.007.812.150,00	998.825.856,00	88,14
		Pelaksanaan Keketat Nasional Dan Di Wilayah Lain	Dinas Perputakaan Dan Kerdasan	37.890.000,00	36.388.300,00	21.200.000,00	20.769.280,00								59.090.000,00	37.157.580,00	62,88
13	Keperluan Infrastruktur Untuk Membantu Pembangunan Ekonomi Dan Pekerjaan Dasar	Pengembangan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	721.443.380,00	1.080.037.488,00	1.014.128.828,00	510.531.295,28								1.735.572.208,00	1.590.568.781,28	91,65
		Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	280.357.000,00	254.993.370,00	186.600.000,00	185.335.000,00								468.957.000,00	440.329.370,00	93,90
		Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	177.817.750,00	164.266.232,00	3.228.993.624,00	3.150.140.543,00								3.404.411.374,00	3.314.406.775,00	97,36
		Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.944.691.731,00	6.589.774.093,80	718.525.940,00	704.470.299,00								7.663.227.671,00	7.294.244.302,80	95,19
		Pengembangan Sistem Air Bersih	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	328.900.000,00	287.805.680,40										329.900.000,00	287.805.680,40	87,24
		Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.170.000,00	36.346.300,00	3.982.353.000,00	3.761.752.902,66								4.080.523.000,00	3.798.099.202,66	93,08
		Pengembangan Sistem Drainase	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.635.468.615,00	1.634.792.549,00	13.550.712.680,00	13.500.469.075,82								16.186.171.295,00	15.125.261.624,82	93,45
		Pengembangan Dan Penyelenggaraan Dan Penyelenggaraan Sistem Air Bersih	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.553.500,00	14.696.435,00										16.553.500,00	14.696.435,00	89,99
		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPM) Daerah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.019.571.168,00	534.616.005,76	2.936.759.000,00	2.861.043.617,28								3.956.330.168,00	3.395.661.623,02	85,85
		Pengembangan sumber daya Air (SDA)	Dinas Perhubungan	3.735.519.831,00	3.501.756.343,26	19.297.000,00	18.749.000,00								3.754.816.831,00	3.520.505.343,26	93,76
		Pengembangan Laku Lintas Dan angkutan jalan (LLJ)	BPSD	1.890.520.315,00	1.849.461.780,00	57.875.000,00	57.852.090,00								1.948.395.315,00	1.907.313.870,00	97,89
		Pengembangan Bencana	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.988.583.532,00	1.538.699.193,00	21.399.421.161,00	17.967.389.638,26								23.388.004.693,00	19.484.088.831,26	83,31
		Pengembangan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113.867.000,00	14.490.260,00	28.000.000,00	19.435.100,00								133.867.000,00	33.926.360,00	25,34
		Pengembangan Jasa Konstruksi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.274.020.680,00	716.216.631,73	5.244.764.000,00	775.878.421,23								6.519.684.680,00	1.492.055.052,96	22,89
		Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.400.532.380,00	1.850.834.615,00	350.318.796,00	377.999.840,00								2.750.851.130,00	2.228.834.455,00	81,02
		Pengelolaan aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.877.229.541,00	2.795.623.953,00	981.542.125,00	943.269.380,00								3.858.871.666,00	3.738.893.335,00	96,89
14	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Perencanaan lingkungan dan (RPPH) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	3.339.913.388,00	3.223.963.298,00	121.000.000,00	102.938.625,00								3.460.913.388,00	3.326.901.923,00	96,13
		Peningkatan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	238.832.858,00	220.843.676,00	44.000.000,00	30.215.975,00								282.832.058,00	251.040.653,00	88,77
		Peningkatan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	2.956.972.330,00	2.894.250.680,00	77.000.000,00	72.721.650,00								3.033.972.330,00	2.966.972.330,00	97,46
		Peningkatan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12.360.000,00	8.238.750,00										12.360.000,00	8.238.750,00	66,64

19









No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Belanja Operasi				BTT		Jumlah		
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Angg (Rp)	Real (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
24	Perencanaan, Pelaksanaan dan Keterlibatan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat	Perencanaan dan Keterlibatan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat	Sekeloa Polid Pamong Praja	10982798250	10005170064	6374740000	5045120000			11.620.272.250,00	11.109.682.064,00	95,61
25	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sekeloa Polid Pamong Praja	677.970.650,00	698.536.840,00	103.200.000,00	100.867.800,00			677.970.650,00	598.604.640,00	88,26
26	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dinas Perpusustakaan dan Kearsifan	45.678.900,00	40.194.550,00	0	0			45.678.900,00	40.194.550,00	87,99
27	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dinas Perpusustakaan dan Kearsifan	82.952.000,00	42.389.970,00	40.000.000,00	37.707.200,00			82.952.000,00	79.596.970,00	96,44
28	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dinas Perpusustakaan dan Kearsifan	394.554.390,00	272.151.916,00	25.000.000,00	19.893.950,00			419.554.390,00	292.044.966,00	69,61
29	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dinas Perpusustakaan dan Kearsifan	23.550.600,00	17.224.100,00	-	-			23.550.600,00	17.224.100,00	73,14
30	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dinas Perpusustakaan dan Kearsifan	26.062.250,00	21.983.101,00	22.000.000,00	20.920.800,00			48.062.250,00	42.913.101,00	89,29
31	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	28.080.600,00	26.771.950,00	25.000.000,00	24.898.800,00			53.080.600,00	51.580.850,00	97,17
32	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	29.800.000,00	21.695.250,00	20.750.000,00	20.750.000,00			50.040.000,00	41.895.250,00	82,55
33	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah	207.536.200,00	201.278.276,00	4.500.000,00	4.495.500,00			242.035.200,00	205.773.776,00	85,02
34	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah	624.694.558,00	630.043.719,00	156.100.000,00	154.956.050,00			780.894.558,00	584.949.769,00	74,91
35	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah	204.887.750,00	15.500.400,00	-	-			204.887.750,00	15.500.400,00	7,57
36	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sekretariat DPRD	716.410.000,00	487.583.007,00	-	-			716.410.000,00	487.583.007,00	68,05
37	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sekretariat DPRD	282.766.000,00	88.914.229,00	-	-			202.766.000,00	88.914.229,00	43,85
38	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sekretariat DPRD	4.007.707.000,00	3.809.034.480,00	0,00	0,00			4.007.707.000,00	3.809.034.480,00	95,04
39	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbang	522.714.650,00	282.788.056,00	28.500.000,00	22.977.000,00			551.214.650,00	305.765.056,00	55,47
40	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbang	92.977.600,00	71.369.168,00	-	-			92.977.600,00	71.369.168,00	76,76
41	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbang	63.299.600,00	45.501.952,00	-	-			63.299.600,00	45.501.952,00	71,88
42	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan	234.397.000,00	139.674.606,00	5.913.000,00	5.883.000,00			240.220.000,00	145.557.606,00	60,59
43	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan	184.417.000,00	146.156.348,00	-	-			184.417.000,00	146.156.348,00	79,27
44	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Badan Keuangan	1.290.246.110,00	1.021.363.563,00	88.665.620,00	88.253.900,00			1.378.911.730,00	1.109.557.463,00	80,47

MA

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SAPO Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah					
				Belanja Operasi		Belanja Modal		BTT		Bul Transfer		Realisasi (Rp)	(%)
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Angg (Rp)	Koef (Rp)	Angg (Rp)	Koef (Rp)		
45	Koordinasi dan Pelaksanaan Nurtani dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Nurtani/Badan Keuangan		739.678.150,00	672.033.577,00	23.300.000,00	22.251.310,00			753.978.150,00	694.284.915,00	92,08	
46	Penyjangg Utusan Kecamatan Persebaran Pengabdian Desa dan Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Penyjangg Utusan Kecamatan Persebaran Pengabdian Desa dan Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah		13.835.856.667,00	57.766.736,00	-	-			13.835.856.667,00	57.766.736,00	0,42	
47	Induksi Keuangan Daerah	Pengalihan Data dan Implementasi Badan Keuangan		125.160.000,00	-	-	-			125.160.000,00	-	0,00	
48	Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Perencanaan Bidang M&K Daerah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Badan Keuangan	1.730.081.750,00	1.555.564.903,00	71.100.000,00	64.324.500,00			1.801.181.750,00	1.619.889.403,00	89,93	
49	Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Perencanaan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Keperawatan	44.120.000,00	24.063.398,00	-	-			44.120.000,00	24.063.398,00	54,54	
50	Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Perencanaan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Keperawatan	341.370.000,00	133.238.350,00	-	-			341.370.000,00	133.238.350,00	93,53	
51	Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Perencanaan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Keperawatan	193.301.000,00	153.374.423,00	-	-			193.301.000,00	153.374.423,00	79,72	
52	Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Perencanaan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Keperawatan	501.201.600,00	377.815.043,00	-	-			501.201.600,00	377.815.043,00	75,38	
53	Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Perencanaan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Keperawatan	43.758.000,00	38.358.600,00	-	-			43.758.000,00	38.358.600,00	76,23	
54	Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Perencanaan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Keperawatan	200.877.850,00	139.865.920,00	-	-			200.877.850,00	139.865.920,00	68,13	
55	Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Perencanaan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Keperawatan	103.840.650,00	-	-	-			103.840.650,00	-	0,00	
56	Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Perencanaan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Keperawatan	192.498.100,00	-	-	-			192.498.100,00	-	0,00	
57	Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Perencanaan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Keperawatan	14.194.250,00	13.204.250,00	-	-			14.194.250,00	13.204.250,00	93,03	
58	Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Perencanaan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Keperawatan	320.104.303.850,00	-	-	-			320.104.303.850,00	-	0,00	
59	Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Perencanaan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperawatan	Keperawatan	26.427.961.992,00	-	-	-			26.427.961.992,00	-	0,00	
				49.173.931.785,00	30.048.781.100,00	868.615.000,00	581.998.710,00			50.042.546.769,00	31.528.377.810,00	23,64	





PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING TA 2023

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (Rp)
1	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	950.985.600	837.678.812	88,09
	1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	861.185.600	766.795.043	89,04
	Belanja Operasi	430.130.800	405.231.043	94,21
	Belanja Barang dan Jasa	421.730.800	398.931.043	94,60
	Belanja Hibah	8.400.000	6.300.000	75,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	Belanja Modal	431.054.800	361.564.000	83,88
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	431.054.800	361.564.000	83,88
	2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ragata	89.800.000	70.881.769	78,93
	Belanja Operasi	74.800.000	55.897.324	74,73
	Belanja Barang dan Jasa	74.800.000	55.897.324	74,73
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	Belanja Modal	15.000.000	14.984.445	99,90
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	15.000.000	14.984.445	99,90
2	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	165.250.000	163.500.000	98,94
	1. Sub kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekososi Keluarga (PEPKS))	165.250.000	163.500.000	98,94
	Belanja Operasi	165.250.000	163.500.000	98,94
	Belanja Barang dan Jasa	250.000	250.000	100,00
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	165.000.000	163.250.000	98,94
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
2. Total Belanja Stunting		1.116.135.600	1.001.176.812	89,69





PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENURUNAN KEMISKINAN EKSTREM  
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
<b>NIHIL</b>				

Bukittinggi, 16 Agustus 2023  
WALIKOTABUKITTINGGI



ERMAN SAFAR